BNI

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Melangkah Lebih Cepat
Menangkan Persaingan

Laporan Tahunan 2016

BNI @BNI46 1500046 Call

Kesinambungan Tema

2013

BIGGER, BETTER, TOGETHER

Dengan fokus pada pertumbuhan kualitas, BNI dengan basis nasabah yang luas terus mempertahankan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada segmen Perbankan Bisnis, BNI mendukung nasabah segmen bisnis di 8 sektor Industri terdepan, termasuk para pengusaha di sektor Usaha Unit Kecil Menengah. Pada sektor Konsumer dan Ritel, BNI berupaya untuk menjadi mitra yang setia dan terpercaya bagi seluruh nasabah melalui produk, layanan, *service coverage* serta . Dengan menjadi lebih besar dan lebih baik, BNI tumbuh beriringan dengan perbaikan serta peningkatan kesejahteraan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

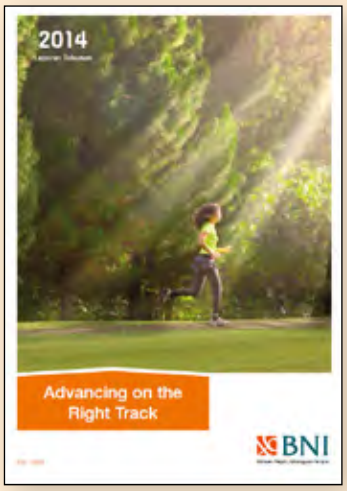

2014

ADVANCING ON THE RIGHT TRACK

BNI telah mencapai banyak kemajuan maupun prestasi penting di berbagai bidang. Banyak dari pencapaian dan kemajuan tersebut dapat langsung diukur, disajikan dalam grafik, ataupun dilaporkan dalam laporan keuangan BNI, seperti pertumbuhan jumlah kantor cabang dan ATM, tingkat Rasio Kecukupan Modal yang tinggi, serta perolehan Laba Bersih sebesar Ro10,8 triliun pada tahun 2014. Banyak juga pencapaian dan kemajuan lain yang meskipun sama pentingnya namun lebih sulit dinyatakan secara kuantitatif, misalnya kemajuan pada kapabilitas Teknologi Informasi, ragam jumlah dan jenis produk ataupun sumber daya yang telah diinvestasikan dalam pengembangan budaya kerja dan kompetensi karyawan BNI.

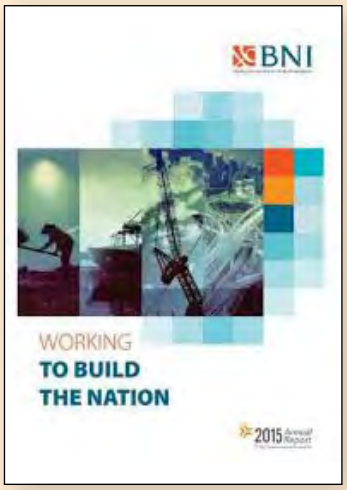

2015

BEKERJA MEMBANGUN BANGSA

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk menjadi bangsa yang mandiri dan unggul dalam persaingan global. Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, BNI aktif berperan sebagai *Agent of Development* dengan melaksanakan fungsi intermediasi dalam menunjang kebutuhan perbankan nasional, dan terus menunjukkan semangat berprestasi membangun bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab.

Melangkah Lebih Cepat Menangkan Persaingan

2016

Fokus kebijakan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019 yakni memperkuat beberapa sektor yang teridentifikasi merupakan sektor prioritas BNI merupakan suatu peluang kunci bagi BNI sebagai salah satu bank BUMN di Indonesia. Dalam rangka menyikapi hal-hal tersebut, BNI memprioritaskan penyaluran kredit produktif pada 20 sektor prioritas BNI maupun Wilayah disertai langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih baik lagi.

Pendekatan *value chain* yang menjadi fokus BNI dalam strateginya diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang yaitu dengan melayani seluruh aspek dan elemen pendukung pembangunan mulai dari institusi/ korporasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta menjangkau individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 akan semakin meningkatkan persaingan terutama pada sektor riil. Penguasaan pasar domestik menjadi jawaban bagi implementasi MEA terkait dengan peningkatan daya saing perbankan nasional. Di sisi lain, dengan berlakunya MEA, aktivitas perdagangan luar negeri akan semakin meningkat. Oleh karena itu BNI akan memfasilitasi peningkatan tersebut dengan memberikan fasilitas kredit maupun *trade finance* kepada industri-industri yang berorientasi ekspor, terlebih saat ini pemerintah terus berupaya memperluas pangsa ekspor di luar negara-negara yang saat ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia. Peluang usaha perbankan di luar negeri berdasarkan asas resiprokal juga dapat disikapi dengan pembukaan kantor layanan di negara lain baik yang berada di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN. Hal ini yang akan dapat membantu pertumbuhan bisnis BNI serta memperluas layanan BNI ke depan.

Highlight Kinerja

2,7%

PROFITABILITAS JAUH DI ATAS RATA-RATA INDUSTRI, BNI MEMILIKI TINGKAT ROA SEBESAR 2,7% JAUH LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN RATA-RATA INDUSTRI YAITU SEBESAR 2,2%.

146,0%

COVERAGE RATIO MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN, DARI 140,4% DI 2015 MENJADI 146,0% DI 2016.

23,1%

PENINGKATAN **FEE BASED INCOME** CUKUP SIGNIFIKAN YAITU SEBESAR 23,1%

20,6%

KREDIT BNI TUMBUH 20,6% (YOY) DARI RP326,1 TRILIUN PADA 2015 MENJADI RP393,3 TRILIUN PADA 2016.

17,6%

RP65,1 TRILIUN

SIMPANAN NASABAH BNI NAIK SEBESAR RP65,1 TRILIUN ATAU 17,6% DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2015.

RP94,4 TRILIUN

PERTUMBUHAN ASETNYA MENINGKAT SEBESAR RP94,4 TRILIUN DIBANDINGKAN DENGAN PENINGKATAN TAHUN 2015.

LABA BNI
TUMBUH MENCAPAI 25,1%

25,1%

9,7%

PANGSA PASAR
DARI SISI ASET MENINGKAT DARI 9,2% DI 2015 MENJADI 9,7% DI 2016

PANGSA PASAR DARI SISI DANA PIHAK KETIGA MENINGKAT DARI 7,3% DI 2015 MENJADI 9,6% DI 2016

9,6%

BEST MOBILE BANKING GROWTH 2015
KATEGORI BANK BUKU 4, M-BANKING TELKOMSEL

7,9%

PANGSA PASAR DARI SISI JUMLAH PINJAMAN YANG DIBERIKAN MENURUN DARI 10,4% DI 2015 MENJADI 7,9% DI 2016.

BEST STATE OWNED ENTERPRISE DAN TOP 50 PUBLIC LISTED COMPANIES
DALAM ACARA GOOD CORPORATE GOVERNANCE AWARD YANG DISELENGGARAKAN I (IICD).

MOST TRUSTED COMPANY BASED ON CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Jejak Langkah

1946
BNI didirikan dengan nama "Bank Negara Indonesia" sebagai bank pertama yang dimiliki Pemerintah Indonesia dan mendapatkan amanah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran mata uang Rupiah

1955
BNI diubah statusnya menjadi bank umum.

1968
Sebagai bank umum dengan nama "Bank Negara Indonesia 1946", BNI mendapatkan tugas memperbaiki ekonomi rakyat indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan meberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia

1986
BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta *Performance Improvement* ***Program*** (PIP).

1989
Peluncuran logo baru BNI berupa "Bahtera Berlayar di Tengah Samudera" sebagai cerminan dan ungkapan harapan Perseroan

1992
Bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan

1996
BNI menawarkan saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka.

1997
Krisis moneter melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut, hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial.

1999
BNI memperoleh tambahan modal dari Pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi Unit Pemrosesan Bersama (UPB)

2004
BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya membangun citra Perseroan yang kokoh dalam menghadapi persaingan.

2007

BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%.

2008

Di bawah tim Manajemen yang baru, BNI melangkah meningkatkan nilai di tengah tantangan krisis ekonomi global, dengan memperkuat landasan finansial melalui 5 (lima) strategi utama yaitu kecukupan pencadangan kerugian, peningkatan kualitas aktiva, fokus pada profitabilitas, menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, serta mempertahankan struktur biaya yang efisien.

2009

Pemegang saham BNI menyetujui untuk memisahkan divisi Syariah BNI menjadi entitas bisnis yang independen.

2010

BNI menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) sehingga kepemilikan publik meningkat menjadi 40%.

2012

BNI menerbitkan *Global Bond* melalui kantor cabang London senilai USD500 juta. *Global Bond* ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

2013

BNI melakukan kemitraan strategis dengan Sumitomo *Life Insurance Company* yang membeli saham baru yang diterbitkan PT BNI *Life Insurance* senilai Rp4,2 triliun.

2014

Laba Bersih BNI untuk pertama kalinya menembus angka dua digit (Rp10,8 triliun), sebagai salah satu hasil program transformasi BNI yang dilakukan sejak 2008.

2015

Hasil RUPST 2014 menetapkan pergantian Manajemen BNI dan menunjuk Bapak Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama BNI. Dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, manajemen mengambil langkah konservatif proaktif untuk memperkuat fundamental keuangan BNI.

2016

Untuk kedua kalinya BNI mencatat laba dobel digit sebesar Rp11,4 Triliun dengan fundamental yang lebih baik, ditunjukkan dengan *coverage ratio* mencapai 146% dan CAR 19,4%.

Daftar Isi

Kesinambungan Tema	2
Highlight Kinerja	4
Jejak Langkah	6
Daftar Isi	8
Ikhtisar Data Keuangan Penting	10
Ikhtisar Kinerja Operasional	15
Informasi Harga Saham	17
Informasi Obligasi	18
Rating	19
Peristiwa Penting Di Tahun 2016	20
Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016	24
Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016	24

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Laporan Dewan Komisaris	33
Dewan Komisaris	42
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	44
Laporan Direksi	53
Jajaran Direksi	64

PROFIL PERUSAHAAN

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan	66
Identitas Perusahaan	70
Riwayat Singkat Perusahaan	71
Brand Perusahaan	73
Bidang Usaha	74
Produk Dan Jasa	76
Peta Wilayah Operasional	80
Inovasi *Outlet* Dan ATM	82
Struktur Organisasi	84
Visi, Misi, Dan Budaya Perusahaan	86
Profil Dewan Komisaris	88
Profil Direksi	92
Profil Pejabat Eksekutif	97
Profil Karyawan	99
Komposisi Pemegang Saham	104
Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi	108
Struktur Grup	115
Kronologis Pencatatan Saham	116
Kronologis Pencatatan Obligasi	117
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya	117
Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal	118
Nama Dan Alamat Entitas Anak Dan/Atau Kantor Wilayah Dan Cabang	119
Akses Informasi	121

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Industri	125
Tinjauan Operasional	131
Tinjauan Keuangan	177
Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya	206
Tax Amnesty	237
Permasalahan Hukum Pajak	238
Informasi Material Lainnya	239
Kinerja Anak Perusahaan	247
Tinjauan Pendukung Bisnis	263
Tinjauan Operasional Dan Teknologi Informasi	275

SUMBER DAYA MANUSIA

System Thinking	289
Employee Value Proposition	290
Human Capital Architecture	291
Realisasi Strategi Manajemen Modal Manusia 2016	293
Human Capital Transformation	301
Penghargaan	302
Inisiatif Strategis Tahun 2017	303
Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia	304
Profil Pegawai	306

TATA KELOLA PERUSAHAAN

BNI *Corporate Governance Framework*	315
Arti Penting GCG	317
Dasar Penerapan GCG	319
Roadmap GCG	320
Roadmap GCG	323
Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	334
Struktur dan Mekanisme GCG	348
Satuan Pengawasan Internal	523
Fungsi Audit Ekstern	534
Fungsi Manajemen Risiko	538
Sistem Pengendalian Intern	564
Fungsi Kepatuhan	571
Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	576
Code Of Conduct	579
Gratifikasi	582
Whistleblowing System (WBS)	583
Permasalahan Hukum	589
Pengungkapan Hal Penting	592
Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik	599
Information Tecnology Governance	608
Akses Informasi dan Data Perusahaan	609
Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali	627
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	629

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pendekatan Holistik Terintegrasi Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*	649
CSR Terkait Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup	650
CSR Terkait Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	656
CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan	660
CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah	673

PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO (KONSOLIDASI)

Struktur Permodalan BNI	698
Penerapan Manajemen Risiko	703

PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO (KONSOLIDASI)

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA	792

PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO (KONSOLIDASI)

Ikhtisar Data Keuangan Penting

IKHTISAR KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2016	2015	2014	2013	2012
NERACA - KONSOLIDASIAN					
Total Aset	603.032	508.595	416.574	386.655	333.304
Kas	11.168	12.890	11.436	10.090	7.969
Giro pada Bank Indonesia	30.147	30.932	24.598	23.130	22.422
Giro pada Bank lain - neto	6.298	8.999	4.496	4.102	5.841
Penempatan pada bank lain dan BI - neto	33.662	33.417	14.527	23.473	32.617
Efek-efek - neto	23.765	9.927	12.738	8.513	9.801
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	1.665	376	6.237	1.897	-
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - neto	8.568	8.831	2.301	3.417	2.839
Tagihan akseptasi - neto	14.724	10.821	12.467	11.479	10.077
Tagihan derivatif - neto	250	441	165	178	11
Pinjaman yang diberikan	393.275	326.105	277.622	250.638	200.742
Cadangan kerugian penurunan nilai atas Pinjaman yang diberikan	(16.681)	(12.039)	(6.970)	(6.880)	(6.908)
Obligasi Pemerintah	63.006	47.222	43.830	44.884	38.561
Pajak dibayar dimuka	620	2.299	1.437	817	29
Beban dibayar dimuka	2.411	1.633	1.392	1.221	1.054
Penyertaan saham - neto	57	36	37	40	24
Aset lain-lain	6.793	4.483	3.370	3.157	3.312
Aset tetap - neto	21.972	20.757	6.222	5.514	4.592
Aset pajak tangguhan - neto	1.332	1.465	668	986	320
Total Liabilitas	513.778	430.157	355.552	338.971	289.778
Libilitas segera	3.276	1.805	1.813	1.760	2.726
Simpanan Nasabah *	435.545	370.420	313.893	291.890	257.661
Simpanan Dari Bank Lain *	10.224	4.698	3.177	3.185	3.245
Pinjaman yang Diterima	32.965	22.524	11.212	18.951	8.750
Liabilitas derivatif	411	1.162	662	1.182	455
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.765	3.163	2.492	-	-
Liabilitas akseptasi	4.359	6.188	6.469	6.199	4.625
Beban yang masih harus dibayar	1.047	917	660	483	527
Utang pajak	151	749	318	324	242
Imbalan kerja	3.503	3.481	3.393	3.150	2.566
Penyisihan	156	99	87	104	55
Liabilitas lain-lain	11.149	7.584	5.219	5.708	4.158
Efek-efek yang diterbitkan*	7.227	7.367	6.158	6.037	4.769

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2016	2015	2014	2013	2012
Total Dana Syirkah Temporer	21.077	17.429	14.404	9.518	7.272
Simpanan Nasabah	20.092	16.484	13.629	9.150	7.091
Simpanan Dari Bank Lain	489	449	775	368	181
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan	496	496	-	-	-
Total Ekuitas	89.254	78.438	61.021	47.684	43.525
Kepentingan Non Pengendali	2.097	2.023	1.950	83	52
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	87.157	76.415	59.072	47.600	43.473
* termasuk di dalamnya dana syirkah temporer					
LABA RUGI - KONSOLIDASIAN					
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	43.768	36.895	33.750	26.705	22.705
Beban Bunga dan Beban Syariah	(13.773)	(11.335)	(10.989)	(7.392)	(7.246)
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Neto	29.995	25.560	22.761	19.312	15.459
Pendapatan Premi - Neto	1.342	1.133	607	554	331
Pendapatan Operasional Lainnya (Incl Recovery)	9.963	8.565	8.379	7.545	7.180
- Pendapatan Operasional Lainnya	8.585	6.975	6.523	5.407	5.142
- Recovery	1.378	1.590	1.856	2.138	2.038
Total Pendapatan Operasional	41.299	35.258	31.747	27.411	22.971
Beban Operasional Lainnya	(19.217)	(16.510)	(14.760)	(13.485)	(11.805)
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.853)	(7.336)	(3.642)	(2.708)	(2.525)
Laba Operasional	14.229	11.412	13.345	11.219	8.641
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto	74	54	178	59	259
Laba Sebelum Beban Pajak	14.303	11.466	13.524	11.278	8.899
Beban Pajak	(2.893)	(2.326)	(2.695)	(2.220)	(1.851)
Laba Tahun Berjalan	11.410	9.141	10.829	9.058	7.048
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
- Kepentingan Non-Pengendali	71	74	47	4	2
- Pemilik Entitas Induk	11.339	9.067	10.783	9.054	7.046
LABA RUGI - KOMPREHENSIF					
Pendapatan/(Kerugian) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	922	11.722	1.085	(2.814)	154
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	12.333	20.863	11.915	6.244	7.203
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
- Kepentingan Non-Pengendali	73	74	47	4	(0)
- Pemilik Entitas Induk	12.260	20.789	11.868	6.240	7.203

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2016	2015	2014	2013	2012
ARUS KAS					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	15.422	24.357	(610)	(7.288)	5.764
Arus Kas bersih dari Dana Syirkah Temporer	-	10.259	(11.060)	2.293	1.184
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(29.400)	(3.516)	(2.406)	(12.580)	(4.479)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.637	9.250	(4.454)	9.985	3.067
Arus Kas Bersih	(5.341)	30.090	(7.471)	(7.590)	5.536
RASIO KEUANGAN [%] - BANK					
Permodalan					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	19,4	19,5	16,2	15,1	16,7
- Tier 1	18,3	17,0	15,3	14,2	15,2
Profitabilitas					
Return On Assets (ROA)	2,7	2,6	3,5	3,4	2,9
Return On Equity (ROE)	15,5	17,2	23,6	22,5	20,0
Net Interest Margin (NIM)	6,2	6,4	6,2	6,1	5,9
Other Operating Income to Operating Income	25,7	26,0	27,7	28,3	31,5
BOPO (Biaya Operasi/Pendapatan Operasional)	73,6	75,5	69,8	67,1	71,0
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	1,9	1,8	2,7	2,4	2,1
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Ekuitas	12,9	11,7	18,7	18,9	15,6
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	85,2	84,7	85,7	87,3	86,6
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	576,1	551,8	598,7	688,2	645,8
Rasio *Fee Based Income* terhadap Total Pendapatan Operasional Lainnya	85,7	81,0	77,4	70,6	70,1
Laba Bersih per Saham (EPS) (Dalam Rupiah penuh)	610	487	578	486	378
Kualitas Aset					
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,1	1,9	1,5	1,5	2,0
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	2,0	1,9	1,4	1,5	2,1
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,7	2,5	1,7	1,9	2,6
Pemenuhan CKPN Aset Produktif	2,7	2,4	1,7	1,9	2,3
Pemenuhan CKPN Aset Non Produktif	42,3	33,5	98,3	86,9	92,8
NPL Bruto	3,0	2,7	2,0	2,2	2,8
NPL Netto	0,4	0,9	0,4	0,5	0,8
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	61,7	63,2	67,0	67,5	65,9
Rasio debitur inti terhadap total kredit	29,6	26,2	23,4	25,9	24,3

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam miliar Rupiah, kecuali disebutkan lain)	2016	2015	2014	2013	2012
Rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Likuiditas					
Pinjaman Terhadap Jumlah Simpanan	90,4	87,8	87,8	85,3	77,5
LFR	90,4	87,8	87,8	85,3	77,5
Rasio Aset Likuid terhadap total aset	19,0	21,0	18,6	19,3	24,3
Rasio total aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek	-	-	-	-	-
Rasio total kredit kepada UMKM terhadap total kredit	17,7	16,0	16,2	16,9	15,9
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Utama Rupiah	6,8	9,2	8,1	8,1	8,5
- GWM Valuta Asing	8,0	8,0	8,3	8,1	8,0
Posisi Devisa Neto (PDN)	3,4	1,7	1,6	3,4	2,2
RASIO LAINNYA [%] - BANK					
LLR/NPL Gross (Coverage Ratio)	146,0	140,4	130,1	128,5	123,0
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan)	44,0	44,2	43,8	46,7	49,5
Operating Income/Employee (Dalam Juta Rp)	1.320	1.196	1.115	984	870
Jumlah Outlet (nilai penuh, tidak diaudit)	1.876	1.826	1.766	1.693	1.590
Jumlah ATM (nilai penuh, tidak diaudit)	17.056	16.071	14.071	11.163	8.227
Jumlah Pegawai (nilai penuh, tidak diaudit)	28.390	26.875	26.536	26.100	24.861

dalam Rp Triliun)

Aset

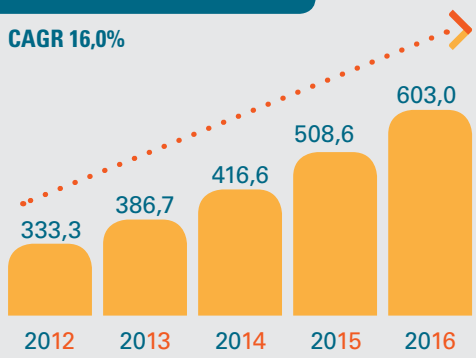

Pinjaman yang diberikan

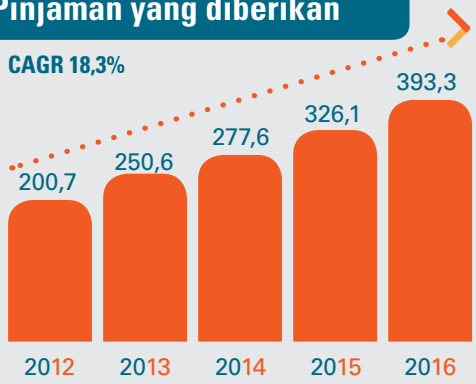

Liabilitas

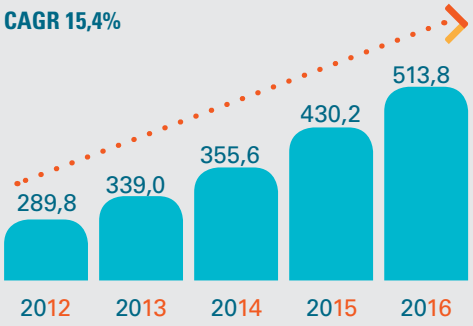

Simpanan Nasabah

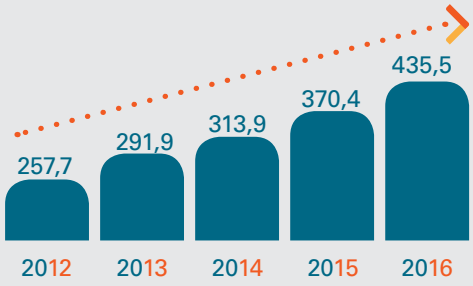

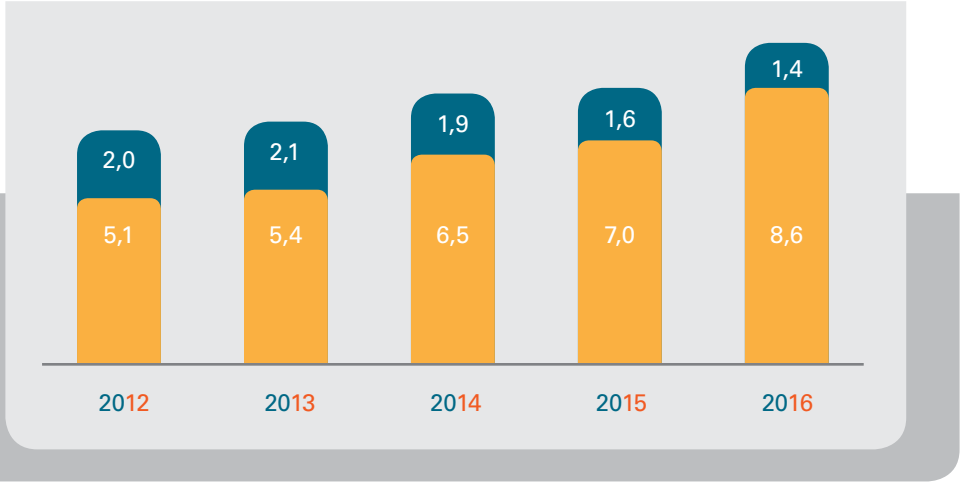

Ikhtisar Kinerja Operasional

KINERJA OPERASIONAL SEGMEN OPERASI

Kinerja Produk Pinjaman *Business Banking* (dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2016	Komposisi	2015	Komposisi	Pertumbuhan
Korporasi	174,073	56,6%	137,909	55,0%	26,2%
Menengah	61,330	20,0%	51,147	20,4%	19,9%
Kecil	50,684	16,5%	42,076	16,8%	20,5%
Luar Negeri	21,237	6,9%	19,538	7,8%	8,7%
TOTAL	307,324	100,0%	250,670	100,0%	22,6%

Kinerja Produk Pinjaman *Consumer* (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2016	Komposisi	2015	Komposisi	Pertumbuhan
Mortgage	36,436	56,0%	34,719	60,3%	4,9%
Credit Card	10,527	16,2%	9,789	17,0%	7,5%
Payroll	8,949	13,8%	3,923	6,8%	128,1%
Auto Loan	5,161	7,9%	5,379	9,3%	(4,4%)
Others	4,017	6,2%	3,729	6,5%	7,7%
TOTAL CONSUMER	65,069	100,0%	57,539	100,0%	13,1%

Penyaluran Pinjaman Segmen Menengah Berdasarkan Sektor (dalam Miliar Rupiah)

Segmen Middle	2015	2016	*Growth* YoY	Komposisi 2015	2016
Perindustrian	14.086	18.655	32,4%	27,5%	30,4%
Perdagangan, restoran dan hotel	15.043	19.316	28,4%	29,4%	31,5%
Pertanian	2.197	2.238	1,9%	4,3%	3,6%
Jasa dunia usaha	5.111	4.803	-6,0%	10,0%	7,8%
Konstruksi	5.567	6.095	9,5%	10,9%	9,9%
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	4.566	5.538	21,3%	3,9%	9,0%
Jasa pelayanan sosial	2.137	2.352	10,1%	4,2%	3,8%
Pertambangan	1.668	1.680	0,7%	3,3%	2,7%
Listrik, gas dan air	771	653	-15,3%	1,5%	1,1%
TOTAL	51.147	61.330	19,99%	100,0%	100,0%

Kinerja Produk Pinjaman Segmen Kecil (dalam Juta Rupiah)

Uraian	2016		2015		Pertumbuhan
	Outstand	NPL	*Outstand*	NPL	
BCM	34.404	3,7%	31.958	3,9%	7,7%
BWU	2.859	8,3%	2.628	11,3%	8,8%
KKLK	2.457	1,6%	3.164	1,8%	(22,3%)
KUR	10.964	2,4%	4.326	1,8%	153,4%
TOTAL	50.684	3,6%	42.076	4,0%	20,5%

Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2016	Komposisi	2015	Komposisi	Pertumbuhan
Giro	122,652	28,2%	91,194	24,6%	34,5%
Tabungan	158,662	36,4%	135,065	36,5%	17,5%
Deposito	154,230	35,4%	144,161	38.9%	7,0%
TOTAL	435,545	100,0%	370,421	100,0%	17,6%

Informasi Harga Saham

Informasi Harga Saham Tahun 2016

2016	Pembukaan	Terendah	Tertinggi	Penutupan	Volume Perdagangan	Kapitalisasi Pasar
Triwulan I	4.990	4.835	5.675	5.200	27.788.000	96.192.494
Triwulan II	5.100	4.270	5.300	5.200	44.907.800	96.192.494
Triwulan III	5.225	5.100	5.975	5.200	23.008.500	103.500.043
Triwulan IV	5,625	5,450	5,650	5,525	28,42,800	103,033,826

Informasi Harga Saham Tahun 2015

2015	Pembukaan	Terendah	Tertinggi	Penutupan	Volume Perdagangan	Kapitalisasi Pasar
Triwulan I	6.100	5.900	7.225	7.225	24.139.779	134.736.543
Triwulan II	7.250	5.250	7.275	5.300	26.979.821	98.837.879
Triwulan III	5.300	3.940	5.625	4.135	39.472.303	77.112.194
Triwulan IV	4.195	4.145	5.300	4.990	24.956.054	93.056.796

Grafik Pergerakan Harga Saham BNI Tahun 2016

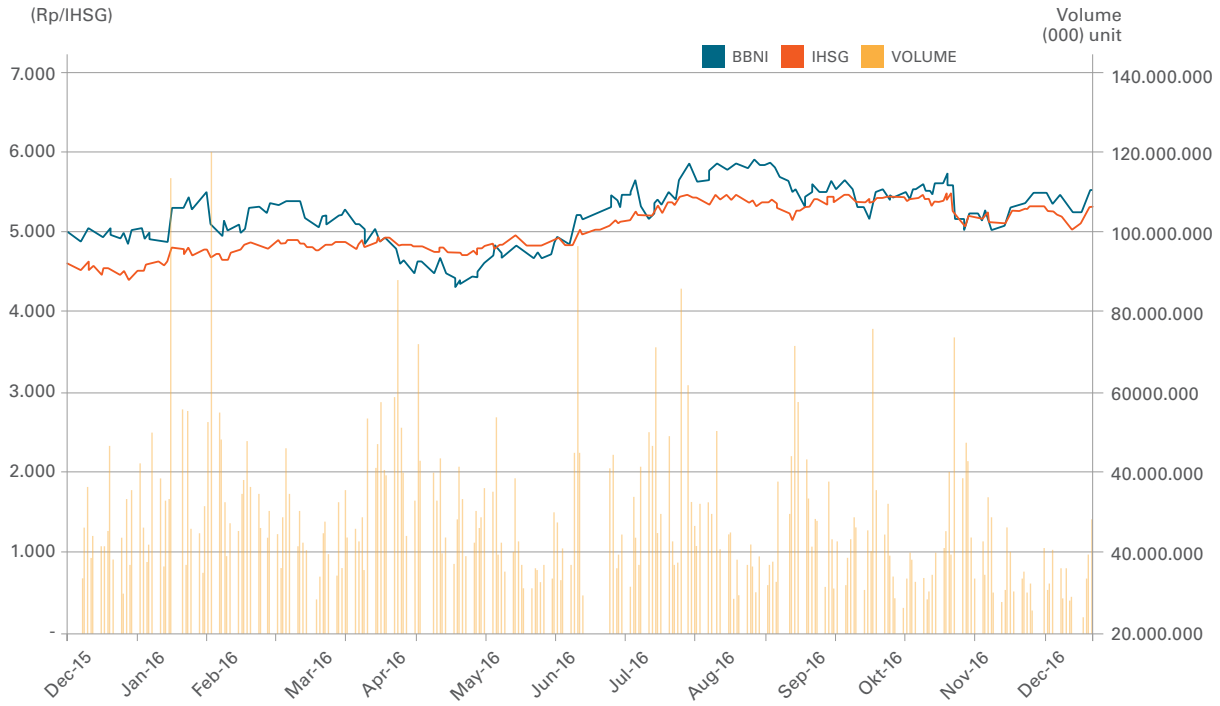

▶ Grafik Pergerakan Harga Saham BNI Tahun 2015

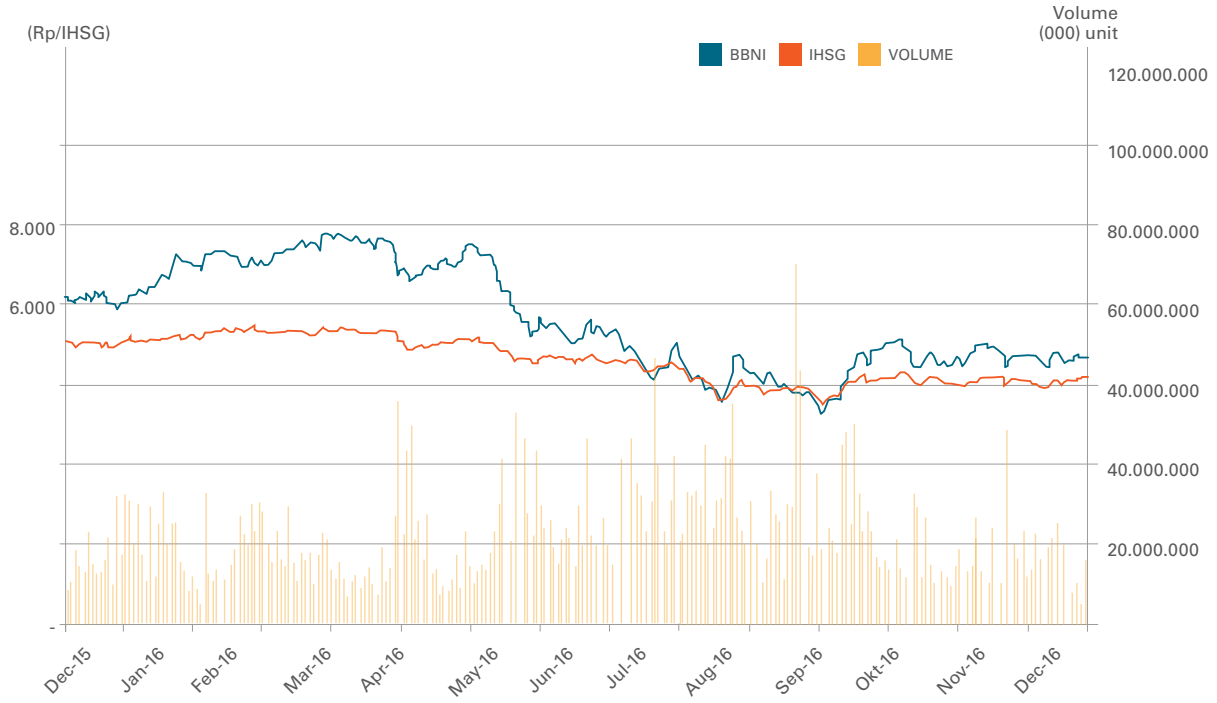

Informasi Obligasi

Strategi pendanaan BNI tetap mengutamakan sumber dana dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun untuk mendukung pertumbuhan aset yang optimal, komposisi pendanaan yang ideal, dan *cost of fund* yang efisien maka dimungkinkan untuk melakukan pendanaan yang bersumber dari DPK Non Konvensional Rupiah dan Valas.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BNI, baik di Indonesia maupun di 6 (enam) Kantor Cabang Luar Negeri serta sebagai mitigasi risiko likuiditas dan pasar, maka pada bulan April tahun 2012 BNI menerbitkan instrumen *Global Bond* sebesar USD500 juta dengan tenor 5 tahun dan kupon 4.125%. *Global Bond* didaftarkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SDX-ST) dengan BNI Cabang London sebagai *booking office*. Saat ini obligasi valas BNI tersebut aktif diperdagangkan dengan harga premium karena tingginya kepercayaan investor global kepada BNI.

Uraian	Tanggal Emisi	Jangka Waktu (tahun)	Nilai Emisi (USD 000)	Jatuh Tempo	Kupon	*Rating*	Pencatatan	*Outstanding* (USD 000)
Global Bond	27 April 2012	5	500,000	27 April 2017	4.,25% p.a	- Baa3(Moody's) - BBB- (Fitch)	Bursa Efek Singapura	500.000

Rating

Rating Perusahaan Periode 2016

Pemeringkat	Uraian	Peringkat
Pefindo	*Corporate Rating*	id AAA
	Outlook	*Stable*
Moody's	*Outlook Stable*	*Stable*
	Bank Deposits	Baa3/P-3
	Baseline Credit Assessment	ba1
	Adjusted Baseline Credit Assessment	ba1
	Senior Unsecured	Baa3
Fitch	*Long term foreign currency*	BBB-
	Long term local foreign currency	BBB-
	Short term foreign currency	F3
	Support Rating Floor	BBB-
	Viability Rating	bb+
	National long term rating	AA+
	National short term rating	F1+
	National Outlook	Stabil
Standard and Poor's	*Issuer Credit Rating*	BB/*Positive*
	ASEAN *Regional Scale*	axBBB
	Senior Unsecured	BB

Peristiwa Penting Di Tahun 2016

11 Januari 2016
BNI Jadi Bank Tunggal Layanan Izin Investasi 3 Jam di BKPM

26 Januari 2016
BNI Gandeng Agung Podomoro, Salurkan Pembiayaan Kios Jakarta

27 Januari 2016
BNI Tampung Setoran Pungutan Ekspor Sawit

28 Januari 2016
BNI lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Bogor untuk memberikan layanan perbankan secara lengkap.

31 Januari 2016
BNI ditetapkan sebagai *Syndicated Loan House* di Indonesia oleh Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).

01 Februari 2016
Kementerian ATR/ BPN Gandeng BNI Layani Transaksi di 450 BPN

02 Februari 2016
Alpha Southeast Asia kembali menganugerahkan predikat sebagai *The Best Remittance Provider in Southeast Asia* pada tahun 2015 kepada BNI.

04 Februari 2016
BNI dan Angkasa Pura 2 Kerja sama Layanan *Integrated Cash Management* untuk meningkatkan pelayanan di 13 Bandar Udara di Indonesia.

10 Februari 2016
BNI dan Apotek K24 melakukan sinergi untuk mempermudah pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di lebih dari 350 outlet Apotek K24 di seluruh Indonesia.

11 Februari 2016
BNI dan PT Pos Indonesia (Persero) bekerjasama untuk saling melengkapi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

16 Februari 2016
- Dalam rangka merayakan HUT ke-70- BNI Gelar CSR untuk Tenaga Migran di Singapura.
- BNI Seoul, Tawarkan Produk Unggulan Kiriman Uang MANTAP

17 Februari 2016
BNI Perluas Layanan Remitansi ke City Plaza Singapore

06 Maret 2016
Terbitkan *Debit Card Co Brand* BNI dan Garuda, satukan fungsi Debit dan *TapCash* dalam Satu Kartu

10 Maret 2016
Keputusan RUPS Tahunan BNI 2015 BNI Bagikan Dividen 25% dari Laba Bersih

13 Maret 2016
BNI Gandeng Sisfo Salurkan KUR Mikro untuk Bisnis Keamanan Nelayan

18 Maret 2016
Sinergi BUMN realisasikan Tol Surabaya Mojokerto,pengguna tol langsung dapat bertransaksi dengan BNI *TapCash*

21 Maret 2016
Sinergi 4 Bank BUMN melalui *launching e-Payment Toll* PT Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ) yang mengelola Ruas Tol *Jakarta Outer Ring Road* (JORR)

19 April 2016
Kemendesa dan BNI Sinergi Kembangkan Akses Ekonomi Pedesaan Melalui fasilitas *Integrated Cash Management* untuk menyimpan dan mengelola dana seperti BNI *Direct, Virtual Account,* dan BNI *e-tax, Payroll,* tunjangan kinerja pegawai, serta Pembayaran Pensiun Pegawai.

20 April 2016
Semarak 70 Tahun BNI di INACRAFT 2016 Jelajahi Warisan Nusantara Karya Anak Bangsa. BNI kembali menjadi *partner* utama Inacraft selama 12 tahun sejak tahun 2005

22 April 2016
BNI kucurkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp 1 Triliun bagi Semen Indonesia

28 April 2016
BNI ditetapkan sebagai agen penjual obligasi Negara ritel berkinerja terbaik 2015 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

01 Mei 2016
HUT ke-70 BNI, Kementerian Luar Negeri, dan BNP2TKI Latih 150 TKI Kemandirian Ekonomi

12 Mei 2016
BNI Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Pesisir Utara Jateng BNI Cetak 7.630 Agen Laku Pandai

22 Mei 2016
BNI dan Bank Sumsel Babel Wujudkan Pabrik Baturaja II

28 Mei 2016
Tarik Investasi ke Bojonegoro,BNI dan Pemda Gelar *Investment Day* 2016

01 Juni 2016
Sambut 70 Tahun BNI Bangun Sumur Bor di Daerah Minim Sarana Air Bersih di Halmahera Timur

02 Juni 2016
BNI Hadiahi RS Bhayangkara Batam Mobil Jenazah

27 Juni 2016
Terbitkan Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera BNI dorong Warung Kube Menjadi Agen Laku Pandai

29 Juni 2016
BNI Sosialisasikan Manfaat *Tax Amnesty* di Singapura

01 Juli 2016
BNI Pulangkan 5.000 Pemudik Lebih dari 700 Gardu Tol di Jalur Mudik Siap Bertransaksi BNI *TapCash*

22 Juli 2016
Pada Kuartal II 2016BNI Raih Laba Bersih Rp4,37 Triliun

28 Juli 2016
Kerja Sama GOJEK dan BNI, Kini Top UpGo Pay Bisa Dilakukan di BNI

22 Agustus 2016
Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) Sosialisasikan Manfaat *Tax Amnesty* di Hong Kong

28 Agustus 2016
Sasar Konsumen Properti, BNI dan Agung Sedayu Group Beri Konsultasi *Tax Amnesty*

29 Agustus 2016
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek Palapa Ring Paket Tengah senilai Rp 975 miliar.

30 Agustus 2016
- Dorong Gerakan Non Tunai, BNI Terbitkan Kartu Tani dimulai dari Jombang
- Dikunjungi *Queen* Maxima, BNI Tunjukkan Program SimPel dan e-Warong KUBE

01 September 2016
- BNI peroleh predikat terbaik pada layanan *Trade Finance* dan *Cash Management* diberikan oleh Majalah Alpha South East Asia dalam kategori *Best Trade Finance Bank* in Indonesia dan *Best Cash Management Bank* in Indonesia untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penyediaan Layanan Produk dan Jasa Perbankan antara BP Batam dengan BNI di Batam, Kepulauan Riau.

07 September 2016
- BNI bekerjasama dengan Blue Bird meluncurkan sistem pembayaran Non-Tunai (*Cashless*) di aplikasi My Blue Bird.
- Buka Agen46 di Telang, BNI Perkuat Layanan Perbankan di Kawasan Transmigrasi

14 September 2016
HIS Indonesia Gandeng BNI Hadirkan Japan *Travel Fair*

15 September 2016
- BNI Perkuat Pariwisata Pulau Lombok dengan menggelar Pelatihan dan Pengembangan Produk Pariwisata pada Rumah Kreatif BNI *Geopark* Rinjani.
- BNI Pecahkan Rekor MURI Buka Tabungan SimPel Terbanyak dengan merangkul 100.000 Siswa.

21 September 2016
BNI peroleh penghargaan sebagai bank yang dapat memberikan layanan *Cash Management* terbaik di Indonesia, melalui survei yang dilakukan AsiaMoney.

22 September 2016
BNI Gandeng Lazada Hadirkan Pinjaman Digital bagi UKM

23 September 2016
BNI gandeng Tokopedia melalui Perjanjian Kerja Sama untuk Salurkan KUR kepada para Mitra *Toppers* dari kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

27 September 2016
Sinergi BNI dan IPB luncurkan situs *online* untuk memasarkan produk-produk inovatif yang diproduksi oleh IPB(serambibotani.com dan ipbsciencepark.com)

29 September 2016
BNI dan Bank Victoria menandatangani Nota Kesepahaman Perpanjangan Kerja Sama *Capacity Building* Pendampingan sebagai Bank Devisa.

30 September 2016
- BNI (sebagai salah satu dari enam anggota sindikasi) salurkan pembiayaan sindikasi kepada Waskita Karya untuk bangun Kereta Api Ringan (LRT) Palembang.
- BNI berserta 2 bank BUMN lain sediakan layanan keuangan bagi Pelindo III untuk Tingkatkan Layanan Kepelabuhan.

03 Oktober 2016
BNI himpun dana repatriasi Rp7,6 Triliun dalam program *Tax Amnesty*

08 Oktober 2016
BNI untuk ke-6 kalinya, kembali menjadi *Official Bank* dalam perhelatan pameran properti terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Real Estat Indonesia (REI), yaitu Real Estat Expo 2016. Pada pameran yang berlangsung pada 8 – 16 Oktober 2016.

13 Oktober 2016
- BNI, BNN serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Yayasan Alumni SMAN 1 Jambi laksanakan kegiatan sosialisasi program Stop Narkoba dengan *Edutainment*.
- Pada Kuartal III 2016, BNI mencatat laba sebesar Rp 7,72 triliun atau tumbuh 28,7%.

17 Oktober 2016
BNI berkomitmen kendalikan Gratifikasi yang ditegaskan melalui kerja sama BNI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

18 Oktober 2016
BNI bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perusahaan swasta untuk mengembangkan perekonomian para petambak udang di Provinsi Lampung

19 Oktober 2016
- BNI dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan sebagai langkah awal menuju *smart city.*
- BNI resmi menjadi bank yang menyalurkan dana bantuan bagi siswa sekolah dalam Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Perluasan layanan BNI diarahkan ke Wilayah Timur Indonesia dalam hal ini dengan membuka outlet baru di ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yaitu Waisai

20 Oktober 2016
BNI gelar BUMN Mengajar di Malang untuk tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.

21 Oktober 2016
Peresmian pemasangan terminal parkir elektronik (TPE) di Jalan Ir. H Juanda, Jakarta Pusat. Sebanyak 41 TPE siap digunakan untuk pembayaran parkir tepi jalan (on-street parking) di sepanjang jalan Juanda, jalan Pecenongan, dan jalan Pinangsia

24 Oktober 2016
BNI bagikan motor di BSD dalam rangka program Rejeki BNI Taplus.

28 Oktober 2016
BNI dan OJK melakukan Deklarasi Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dalam bentuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tabungan Simpel secara serentak dengan lebih dari 300 sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA yang tersebar di berbagai daerah layanan Kantor Cabang BNI

Peristiwa Penting Di Tahun 2016

03 November 2016
BNI menyalurkan kredit untuk pembiayaan kebutuhan dana talangan Proyek Jalan Tol Pandaan Malang senilai Rp450 miliar

09 November 2016
BNI ajak 250 Guru dan Pelajar Natuna gemar menabung dalam Program Pembinaan Daerah Perbatasan.

14 November 2016
Permudah Pengajuan KUR dan BNI Wirausaha, BNI rancang layanan pengajuan kredit secara *online* melalui https://eform.bni.co.id

02 Desember 2016
BNI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura luncurkan Kartu Pekerja Indonesia - Singapura (KPIS), yaitu Kartu Multimanfaat untuk Pekerja Indonesia berbasis Kartu Debit BNI.

05 Desember 2016
BNI menerbitkan produk baru yang dapat digunakan untuk memudahkan transaksi kaum urban, yaitu produk BNI UnikQu.

06 Desember 2016
BNI Layani Setoran Penerimaan Negara Rp250 Triliun

10 Desember 2016
BNI bangun Rumah Kreatif BUMN dan ajak Mitra Binaan masuki Ekosistem Ekonomi Digital.

16 Desember 2016
Penandatanganan Perjanjian Kredit antara sindikasi Bank Mandiri, BNI, dan SMIdengan PT Trans Bumi Serbaraja untuk proyek pembangunan jalan tol Serpong Balaraja.

19 Desember 2016
BNI bersama PT KAI menerbitkan kartu *TapCash RailPay*

Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016

1

2

3

4

5

6

7

1. **Best Sustainability Report 2015** Category Financial Services, Sustainability Report Award 2016
2. **Juara 2 BUMN Keuangan Listed,** Annual Report Award 2015, Komite Nasional Kebijakan Governace, Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, Kementerian BUMN RI, Ikatan Akuntan Indonesia
3. **Gold Medal Winner and Ranked #1** for Best Use of Social Media in the Contract Center in APAC 2016, Contract Center World Awards
4. **Gold Medal Winner and Ranked #1** for Best Technology Innovation by a Medium Inhouse Center in APAC 2016 , Contact Center World Awards
5. **Best Financial, Institution Awards in Southeast Asia,** Best Financial, Institution Awards in Southeast Asia, Best International Banking Division in Asean (2007-2016) Alpha Southeast Asia
6. **Most Trusted Company based on Corporate Governance,** Good Corporate Governance Award 2016
7. **Most Trusted Company based on Investors and Analysis, Assesment Survey**, Good Corporate Governance Award 2016

Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016

8

9

10

11

12

13

14

8. **Best Financial Institutions in Southeast Asia,** Alpha Southeast Asia 2016
9. **1st Debt Bersama Acquirer 2016, ATM Bersama Award**
10. **Best Performance 2016, ATM Bersama Award**
11. **Juara 1 Kompetisi Inklusi Keuangan 2016,** Kategori Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
12. **3rd Contributor 2016 Category of Bank BUMN, Banking Award 2016,** Telkomsel
13. **Best Mobile Banking Growth 2015 Kategori Bank Buku** M-Banking Telkomsel
14. **The Best State Owned Enterprise 2016,** Indonesian Institute for Corporate Directorship

15

16

17

18

19

20

21

22

15. **The Best II BUMN Tbk,** Human Capital Award 2016, Economic Review
16. **Juara II Unit Kearsipan Terbaik Nasional tahun 2016** tingkat Badan Usaha Milik Negara, Anri Award
17. **Juara Umum III The Big 5 Human Capital Award 2016,** Economic Review
18. **Best Bank in Diversity Indonesia Banking Award 2016**
19. **Bronze Medal Winner and Ranked #3 for Best Help Desk** in APAC 2016, Contact Center World Awards
20. **Silver Medal Winner and Ranked #2 for Best Support Professional-**HR in APAC 2016, Contact Center World Awards
21. **Gold Medal Winner and Ranked #1 for Best Project Manager** in the Contact Center in APAC 2016, Contact Center World Awards
22. **2nd Best Call Center Commercial Bank,** 2016 Banking Service Excellence, MRI &Infobank
23. **1st Best Phone Commercial Bank,** 2016 Banking Service Excellence, MRI &Infobank

Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016

23

24

25

26

27

28

29

30

24. **Silver Medal Winner and Ranked #2 for Best Incentive Scheme** in APAC 2016, Contact Center World Awards
25. **Bronze Medal Winner and Ranked #3 for Best Support Professional IT** in APAC 2016, Contact Center World Awards
26. **Bronze Medal Winner and Ranked #3 for Best Customer Loyalty Program** in APAC 2016, Contact Center World Awards
27. **Bronze Medal Winner and Ranked #3 for Best Contact Center** Trainer in APAC 2016, Contact Center World Awards
28. **Bronze Medal Winner and Ranked #3 for Best Support Professional Workforce Planning** in APAC 2016, Contact Center World Awards
29. **Top Corporate on Digital Transformation Readiness 2016,** Top IT 2016, ITECH
30. **Bank Pelapor Terbaik Laporan Harian Bank Umum (LHBU)** Periode 2016, Bank Indonesia

SERTIFIKASI

1

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2008
Quality Management System on Trade Processing Center

Validasi:
30 September 2009 – 29 September 2018

Dikeluarkan Oleh:
SAI Global Certification Services

2

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2008
Quality Management System on Card Business Division

Validasi:
27 Juni 2003 -26 Juni 2018

Dikeluarkan Oleh:
Lloyd'S

3

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2008
Quality Management System on IT Operation Services

Validasi:

26 September 2016 - 26 September 2019

Dikeluarkan Oleh:
SGS

4

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:200
Quality Management System on IT Security Management

Validasi:

26 September 2016 - 26 September 2019

Dikeluarkan Oleh:
SGS

Penghargaan Dan Sertifikasi Di Tahun 2016

5

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2015
Preparation and Verification Process on Published Financial Statements

Validasi:
10 Oktober 2016 – 10 Oktober 2019

Dikeluarkan Oleh:
SGS United Kingdom Ltd

6

Jenis Sertifikasi:
ISO 9001:2015
BNI Corporate University Quality Management System on Inhouse Learning and e-Learning / Digital Learning

Validasi:
21 September 2016 – 20 September 2019

Dikeluarkan Oleh:
Société Générale de Surveillance (SGS S.A.)
Geneva

Laporan Tahunan 2016

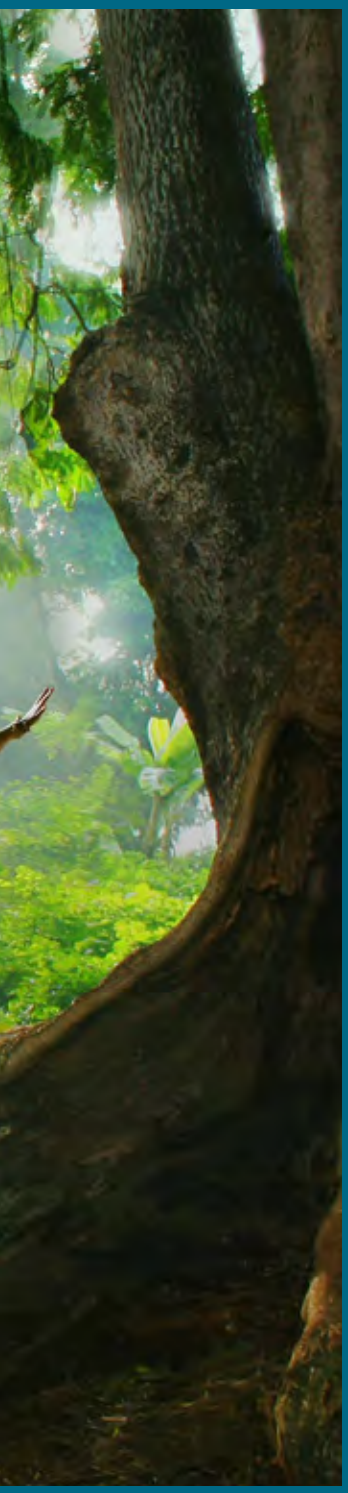

Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi

- Laporan Dewan Komisaris 33
- Dewan Komisaris 42
- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris 44
- Laporan Direksi 53
- Jajaran Direksi 70
- Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 72

Hartadi A. Sarwono
Komisaris Utama

Laporan Dewan Komisaris

Arahan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Direksi. Dibandingkan dengan industri perbankan, BNI tumbuh lebih tinggi baik dari segi kredit maupun pendanaan. Pertumbuhan kredit maupun pendanaan tersebut telah berhasil meningkatkan pangsa pasar baik dari sisi aset, kredit maupun pendanaan. Dari sisi profitabilitas, BNI memiliki tingkat ROA sebesar 2,7% jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yaitu sebesar 2,2%. Salah satunya didukung oleh pencapaian *fee based income* yang tumbuh sebesar 23,1% dibandingkan tahun 2015. Mengingat kedepannya *fee based income* menjadi salah satu mesin pendorong kinerja bank selain dari pendapatan bunga bersih.

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris senantiasa menjaga obyektivitas dan independensi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris memiliki komite-komite yang telah menjalankan tugas dengan efektif, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata kelola Terintegrasi. Tugas dan wewenang komite-komite penunjang Dewan Komisaris telah didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris.

Dalam laporan ini, Dewan Komisaris melaporkan penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penilaian atas komite-komite penunjang Dewan Komisaris, dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Atas kinerja Perseroan yang sangat memuaskan, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2016. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 5,0% di tahun 2016 meningkat dibanding yang sebesar 4,8% (yoy) di tahun 2015, tingkat pertumbuhan industri perbankan masih mengalami perlambatan. Per Desember 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,9% *year on year* (yoy) jauh lebih rendah daripada penyaluran kredit per Desember 2015 yang mencapai 10,4% (yoy). Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga perbankan per Desember 2016 tumbuh sebesar 9,6% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,3% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan per Desember 2016 adalah sebesar 9,7% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada posisi sama tahun sebelumnya sebesar 9,2% (yoy).

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Atas kinerja Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2016, Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi sangat baik. Dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Kinerja Operasional Dan Keuangan

Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang masih belum sesuai yang diharapkan di tahun 2016, Direksi mampu mengambil berbagai inisiatif strategis dalam rangka meningkatkan kinerja operasional Perseroan. Pada tahun 2016, Direksi telah melaksanakan nasehat Dewan Komisaris yaitu fokus pada 1) memberikan perhatian khusus pada kualitas kredit, 2) menjaga likuiditas dalam level yang sehat, 3) pertumbuhan kredit dan 4) peningkatan *fee based income*. Nilai NPL nett mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 0,9% di 2015 menjadi 0,4% di 2016. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tahun 2016 berada di posisi 90,4%, mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu sebesar 87,8%. Pertumbuhan kredit cukup signifikan yaitu sebesar 20,6%. Sedangkan *fee based income* tumbuh sebesar 23,1%.

Pada tahun 2016, Perseroan berhasil mempertahankan posisinya yang cukup kompetitif di industri perbankan. Dibandingkan dengan industri, BNI tumbuh lebih tinggi baik dari segi kredit, pendanaan maupun aset. Kredit BNI tumbuh 20,6% (yoy) dari Rp326,1 triliun pada 2015 menjadi Rp393,3 triliun pada 2016 dan simpanan nasabah BNI naik sebesar Rp65,1 triliun atau 17,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan pertumbuhan kredit dan simpanan nasabah tersebut, aset BNI meningkat sebesar Rp94,4 triliun atau 18,6% dibandingkan tahun 2015.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada peningkatan yang cukup signifikan pada perolehan Laba BNI. Di tahun 2016, laba BNI tumbuh sebesar 25,1%. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank mencerminkan hasil penilaian kondisi Perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk - based bank rating*) yang mencakup 4 faktor sebagai berikut.

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance*
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Pada tahun 2015, Perseroan telah mendapat tingkat kesehatan Bank Peringkat Komposit 2 (PK-2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Selain pengawasan pada pencapaian kinerja bisnis, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat pada proses bisnis. Proses bisnis yang baik akan mendorong kinerja bisnis yang baik pula. Dewan Komisaris fokus terhadap implementasi manajemen risiko, *good corporate governance,* dan *corporate social responsibility*.

Manajemen Risiko

Untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis perbankan yang dinamis, maka Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai konsep strategis. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui;

1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif,

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Risiko & Kapital (KRK) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), *Sub Komite Assets and Liabilities* (ALCO), Sub Komite *Anti Fraud* (KAF), serta forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Terdapat 8 (delapan) risiko yang dikelola Bank yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Menurut pendapat Dewan Komisaris, kedelapan risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren BNI posisi 31 Desember 2016 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko BNI adalah 2 *(low to moderate)*.

Sedangkan untuk penilaian profil risiko terintegrasi, meliputi 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi. Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan Semesteran. Berdasarkan hasil laporan terakhir secara penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren posisi 30 Juni 2016 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 *(low to moderate).*

Good Corporate Governance

Dewan Komisaris sangat menyadari bahwa implementasi *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi *good corporate governance* menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2016. GCG merupakan mekanisme yang mengatur hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perseroan telah merasakan manfaat yang signifikan dari implementasi GCG yang telah dilakukan.

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *Self Assessment* sesuai ketentuan BI/ OJK dan *Third Party Assessment*. Dasar pelaksanaan *self assessment* adalah POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil pelaksanaan *self assessment* di tahun 2016 menunjukkan nilai komposit 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK.

Third party assessment melalui kegiatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan *Asean CG Scorecard* (ACGS) yang dilaksanakan oleh IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*). Hasil penilaian CGPI menunjukkan bahwa BNI mendapatkan predikat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*). Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik GCG BNI berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dilaksanakan pada tahun 2016, BNI mendapatkan predikat "*GOOD*"

Corporate Social Responsibility

Hal penting lainnya yang mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dewan Komisaris berpendapat bahwa CSR akan berdampak bagi kinerja perusahaan, melalui legitimasi dari para *stakeholders*. CSR akan meningkatkan reputasi Perseroan dan selanjutnya akan terjalin hubungan yang harmonis antara Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dengan efektif meliputi program pelestarian alam dan lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial kemasyarakatan dan taggung jawab terhadap nasabah. BNI menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan fokus pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BNI dilakukan secara terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan sehingga BNI turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

PANDANGAN ATAS PROSPEK YANG TELAH DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi. Prospek usaha telah disusun berdasarkan asumsi yang tepat dan realistis. Hasil analisis dari beberapa pihak menyatakan bahwa pemulihan perekonomian global diperkirakan lebih cepat di tahun 2017 daripada pemulihan ekonomi di tahun 2016. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik, perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan, kebijakan dari otoritas (moneter, perbankan, dan fiskal), dan rencana perbaikan proses bisnis internal maka prospek BNI untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis melebihi industri di tahun 2017 adalah sangat tepat.

Melihat prospek usaha tersebut serta efektifnya strategi usaha yang telah ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan penerapan strategi dalam rangka meningkatkan sinergi bisnis dengan Perusahaan Anak. Sinergi bisnis tersebut akan mendorong peningkatan nilai BNI secara keseluruhan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai

bahwa selama 2016, komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance.* Komite Audit telah menjalankan peran secara profesional dan independen selama tahun 2016. Komite Audit telah menyelenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat, baik rapat internal Komite, rapat bersama Direktur Sektor dan Divisi terkait, serta melalui Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Anggota Komite Audit dengan tujuan agar hal-hal yang bersifat substantif dapat segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/ jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2016.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
6. Melakukan *assessment* terhadap Sistem Internal Kontrol BNI.
7. Memberikan rekomendasikan pengembangan *Credit Discipline Program* untuk meningkatkan kualitas kredit Bank.
8. Memberikan rekomendasikan untuk menambahkan kurikulum mengenai temuan-temuan audit sebagai *lessons to be learned* pada BNI *Corporate University*.
9. Melakukan penelaahan terhadap laporan bulanan kinerja perusahaan dan usulan RBB 2017-2019 yang disampaikan Manajemen.
10. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
11. Melakukan koordinasi antar Komite.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Dewan Komisaris juga menilai bahwa kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan perannya dengan efektif selama 2016. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan total 15 (lima belas) kali rapat.

Sepanjang tahun 2016, selain merealisasikan rencana kerja, Komite Nominasi Remunerasi juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Bidang Nominasi

1. Melakukan *review* terhadap sistem nominasi Direksi;
2. Membuat rekomendasi mengenai Program Pengembangan Kemampuan anggota Direksi/ Dewan Komisaris;
3. Rekomendasi kandidat Direksi dan atau Komisaris;
4. Melakukan *review* terhadap sistem nominasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Melakukan pemantauan terhadap perubahan ketentuan dan atau peraturan perundangan-undangan terkait serta melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru terhadap hal-hal terkait fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bidang Remunerasi:
1. Melakukan *review* Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Membuat rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran remunerasi;
3. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris;
4. Melakukan *review* Remunerasi dan sistem Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan, serta hal-hal lain terkait remunerasi pegawai;
5. Melakukan penilaian kinerja Direksi kolegial dan individual untuk tahun buku 2015;
6. Melakukan review terhadap format dan *Key Performance Indikator* (KPI) Penilaian Kinerja Direksi kolegial dan individual untuk tahun buku 2017.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko. Dewan Komisaris juga menilai bahwa kinerja Komite Pemantau Risiko telah menjalankan perannya dengan efektif selama 2016.

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 19 (sembilan belas) kali Rapat termasuk rapat gabungan bersama Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta pertemuan yang bersifat diskusi, baik rapat/diskusi internal maupun rapat/diskusi bersama Divisi-divisi/unit-unit terkait.

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain dengan melakukan pemantauan, penelaahan/*review* serta pemberian saran terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas Komite Pemantau Risiko antara lain melalui:
Pelaksanaan rapat internal KPR.
1. Rapat dan diskusi bersama divisi-divisi/unit-unit terkait.
2. Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut.
   a. Tingkat Kesehatan Bank per semester dan Profil Risiko per Triwulan.
   b. Kebijakan Umum dan Strategi manajemen Risiko BNI, termasuk Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta Pedoman perusahaan Sistem Pengendalian Intern.
   c. Kebijakan Perkreditan BNI.
   d. Pemantauan/*monitoring* penerapan Manajemen Risiko.
   e. Bidang perkreditan seperti melakukan *review*/evaluasi terhadap portofolio pinjaman, evaluasi kinerja per segmen kredit, 16 (enam belas) permohonan konsultasi kredit dan permohonan persetujuan pemberian atau tambahan pemberian fasilitas kredit yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, monitoring pelaksanaan hasil konsultasi kredit kepada Dewan komisaris, perbaikan kualitas kredit.
   f. Rencana kerja atau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
   g. Kinerja Perusahaan Anak serta realisasi investasi/penyertaan modal kepada Perusahaan Anak.
   h. Permasalahan teknologi Informasi.
   i. Penetapan Kebijakan *Risk Tolerance* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM).
   j. Rencana Bisnis Bank.
   k. Hasil *exit meeting* Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan perannya dengan efektif selama 2016. Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat bersama Direktur Sektor, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, unit-unit terkait, dan internal Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 6 (enam) kali.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2016, Komite Tata Kelola terintegrasi telah

melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan membahas kinerja perusahaan anak berikut strategi pertumbuhan perusahaan anak sejalan dengan perubahan visi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja sehingga *corporate plan* perusahaan anak terintegrasi dengan *corporate plan* perusahaan induk.
2. Memberikan masukan dan saran dalam rangka peningkatan sinergi perusahaan anak sebagai bagian dari BNI Group, ekplorasi produk-produk baru yang prospektif dan optimalisasi peluang bisnis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk.
3. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi meliputi kecukupan pengendalian intern terintegrasi; pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi; implementasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, dan pencapaian kinerja perusahaan anak.
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap *dashboard risk profile* terintegrasi, penentuan *leading risk indicator* untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan masing-masing perusahaan anak serta melakukan evaluasi hasil asesmen/ penilaian terhadap tata kelola terintegrasi.
6. Memastikan hasil temuan audit terintegrasi telah ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan anak serta memastikan telah dibuatkan kategorisasi temuan untuk mengantisipasi temuan berulang.
7. Mendorong peningkatan pelaksanaan sinergi perusahaan anak, di antaranya sinergi dalam hal *branding* bersama dan penetapan segmentasi agar tidak terjadi *overlapping*.
8. Mendorong percepatan BNI *Incorporated* berjalan dengan baik sehingga berdampak pada *profitability* masing-masing perusahaan anak diiringi pengendalian risiko, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tata kelola yang baik.
9. Membahas dan merekomendasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi di perusahaan anak.
10. Melakukan *review* dan memastikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan tata kelola terintegrasi serta memastikan atas kelemahan yang ada telah dibuat *action plan*/langkah-langkah perbaikan.
11. Meningkatkan komitmen bersama bagi semua Komisaris perusahaan anak dan seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi bahwa dalam melakukan pengawasan harus berdasarkan pada konteks risiko terhadap entitas utama.
12. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 dengan fokus: memastikan struktur Tata Kelola Terintegrasi berfungsi secara optimal; memastikan proses Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik; mengevaluasi hasil Tata Kelola Terintegrasi.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali perubahan komposisi Dewan Komisaris. RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada 12 Januari 2016 memutuskan bahwa:

Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama
- Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:

1. Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama
2. Bpk. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
3. Bpk. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen
4. Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris
5. Bpk. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen
6. Ibu Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen
7. Bpk. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen
8. Bpk. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris
9. Bpk. Revrisond Baswir sebagai Komisaris
10. Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris

RUPS tahunan dilaksanakan pada 10 Maret 2016 kemudian menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
   a. Sdr. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen
   b. Sdr. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen
   c. Sdr. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen

   Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui pengalihan penugasan Sdr. Hartadi A. Sarwono dari Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen serta Sdr. Revrisond Baswir dan Sdr. Pataniari Siahaan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen.

3. Menyetujui dan mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
   a. Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris
   b. Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

1. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:
   a. Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
   b. Sdr.Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
   c. Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris
   d. Sdri.Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen
   e. Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen
   f. Sdr. Revrisond Baswir sebagai Komisaris Independen
   g. Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris
   h. Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris
   i. Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris

Perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut perlu dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dalam rangka memenuhi tuntutan bisnis Perseroan dan mempertimbangkan pemilihan Putra Terbaik Bangsa untuk ditempatkan sebagai Pengawas dalam melaksanakan putaran roda Perseroan. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2016. Dewan Komisaris akan selalu berupaya untuk profesional dan independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat agar kinerja Perseroan bisa selalu meningkat di masa yang akan datang,

Sekali lagi, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, berkat dedikasi dan kerja keras, Perseroan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang mengalami tantangan.

Jakarta, Februari 2017

Atas nama Dewan Komisaris
PT Bank Negara (Persero) Tbk.

Hartadi A. Sarwono
Komisaris Utama

Dewan Komisaris

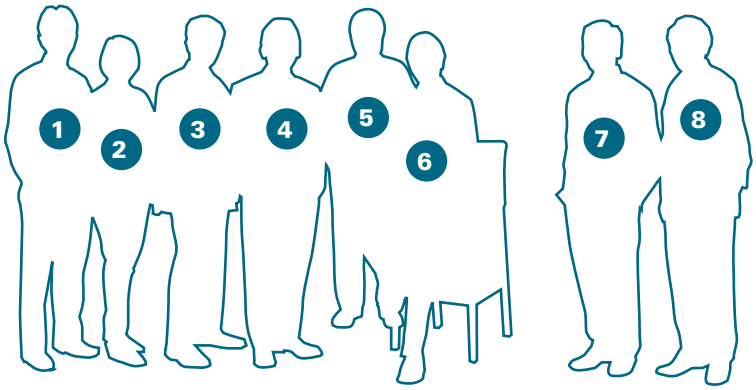

1. **Joni Swastanto**
   Komisaris
2. **Anny Ratnawati**
   Komisaris Independen
3. **Revrisrond Baswir**
   Komisaris Independen
4. **Pradjoto**
   Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
5. **Pataniari Siahaan**
   Komisaris Independen
6. **Hartadi A Sarwono**
   Komisaris Utama/Komisaris Independen
7. **Wahyu Kuncoro**
   Komisaris
8. **Bistok Simbolon**
   Komisaris

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan terlaksananya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dewan Komisaris merupakan suatu majelis yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif, serta selalu fokus pada kegiatan strategis yang dihadapi perusahaan dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan keinginan Pemegang Saham.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan *trend* yang positif. Secara sektoral, sektor industri, pertanian, dan perdagangan masih tumbuh positif. Demikian pula stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan juga semakin baik. Hal itu tercermin pada inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang menurun, dan nilai tukar yang menguat. Namun demikian terdapat beberapa tekanan terhadap perekonomian dan industri perbankan nasional, terutama pengaruh global antara lain keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan ketidakpastian kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika.

Di tengah berbagai tantangan eksternal dan domestik, Manajemen mengambil inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan di atas industri, diantaranya dengan menggali potensi pasar pembiayaan BUMN yang fokus pada proyek infrastruktur dan sektor-sektor industri yang memiliki risiko rendah, menggali potensi *supply chain* debitur korporasi, meningkatkan kualitas *monitoring* pembiayaan kredit segmen menengah melalui pemberian kewenangan kepada Pimpinan Wilayah, mengoptimalkan jaringan dengan menetapkan *outlet* sebagai *full branch* agar mampu menggarap potensi pasar yang ada, fokus pada pembiayaan KUR, dan mengembangkan sistem pembiayaan segmen kecil berbasis digital (*digital loan*). Upaya-upaya dan pelaksanaan inisiatif strategis tersebut, menghasilkan kinerja Perseroan yang secara umum mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan pada tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajaran Manajemen serta Pegawai atas pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2016, dengan beberapa pandangan sebagai berikut:

PENILAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN BANK

BNI pada tahun 2016 telah mewujudkan kinerja yang kuat dalam situasi yang penuh tantangan. Kinerja keuangan Perseroan tahun 2016 menunjukkan pencapaian target dan hasil yang baik, terdapat perbaikan kuantitas maupun kualitas pada rasio dan indikator keuangan, namun tetap perlu menjaga momentum untuk melaksanakan perbaikan terhadap aspek bisnis yang masih di bawah target.

Dari sisi profitabilitas, strategi bisnis yang diterapkan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp11,3 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 25,1% dibanding perolehan laba bersih periode sebelumnya. Pada akhir tahun 2016 *Return on Asset* (ROA) meningkat menjadi sebesar 2,7%, sementara *Return on Equity* (ROE) tercapai sebesar 15,5%. Di tengah ketatnya likuiditas perbankan pada tahun 2016, Manajemen masih mampu menjaga *Net Interest Margin* (NIM) pada posisi 6,2% di tahun 2016.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan mampu meningkatkan efisiensi operasional yang dicerminkan dengan penurunan *Cost to Income Ratio* (CIR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dibandingkan periode sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 44,2% dan 75,5% pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 44,0% dan 73,6% pada akhir tahun 2016.

Strategi yang diterapkan di bidang perkreditan mampu mendorong pertumbuhan kredit, sehingga pada akhir tahun 2016 penyaluran kredit mencapai Rp393,3 triliun atau tumbuh sebesar 20,6% dibandingkan penyaluran kredit periode sebelumnya. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan industri dan *peer* BNI tersebut dengan tetap meminta komitmen Manajemen untuk memperkuat struktur perkreditan dan memperbaiki kualitas aktiva produktif sehingga *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* tahun 2016 sebesar 3,0% dapat lebih ditekan lagi di periode yang akan datang. Sedangkan untuk memperkuat kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi potensi kerugian, Manajemen meningkatkan *Coverage Ratio* dari sebesar 140,4% pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 146,0% pada akhir tahun 2016.

Dari sisi penghimpunan dana, strategi yang diterapkan manajemen mampu meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 17,6% dibandingkan posisi DPK pada periode sebelumnya, sehingga total DPK pada akhir tahun 2016 mencapai Rp435,5 triliun. Pertumbuhan DPK tersebut, dikontribusikan oleh pertumbuhan seluruh komponen DPK, yaitu tabungan tumbuh sebesar 17,5%, giro tumbuh sebesar 34,5%, dan deposito tumbuh sebesar 7,0%. Pertumbuhan DPK yang didominasi oleh peningkatan tabungan dan giro menghasilkan peningkatan Rasio *Current Account & Saving Account* (CASA) dari sebesar 61,1% pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 64,6% pada akhir tahun 2016.

Pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penghimpunan DPK, membawa konsekuensi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada tahun 2016 meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 87,8% pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 90,4% pada akhir tahun 2016. Tingkat likuiditas yang dicerminkan oleh LDR tersebut, berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh Regulator, dan menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dapat dikelola dengan baik dan dijaga pada level yang sehat.

Secara umum Bank dinilai mampu melakukan pengelolaan permodalan dengan baik sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha sehingga mampu menjaga tingkat permodalan di atas batas minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dicerminkan dengan pencapaian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 19,4%.

Pengelolaan risiko telah dilakukan dengan baik dan memadai. Kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko yang melekat pada bisnis Bank tergolong rendah, dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai memadai meskipun terdapat kelemahan minor yang perlu mendapat perhatian Manajemen.

AKTIVITAS PENGAWASAN

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan 26 (dua puluh enam) kali rapat, termasuk diantaranya 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan seluruh Direksi. Hal-hal berikut merupakan fokus pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2016:

- Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian Rencana Bisnis Bank, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti profitabilitas, penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi.
- Melakukan pengawasan terhadap pencapaian rencana kerja setiap Direktur Sektor dan melakukan *review* atas kebijakan, strategi dan program kerja Direktur Sektor.
- Melakukan pengawasan dan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank serta mendorong Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- Memantau perkembangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkenaan

dengan fungsi stratejik SDM dalam mendukung pencapaian rencana jangka panjang Bank.
- Memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh jenjang organisasi dengan memantau hasil *self assessment* terhadap GCG dan mendorong penyempurnaan praktik GCG dengan mengacu kepada *international best practices*.
- Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang efektif dengan memantau tindak lanjut temuan dan rekomendasi Satuan Pengawasan Internal (SPI), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Memastikan efektivitas sistem dan proses manajemen risiko dengan memantau pengelolaan risiko utama Bank.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit, dengan melakukan evaluasi secara independen, memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi untuk memberikan fasilitas kredit dalam jumlah tertentu, serta memberikan persetujuan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada Pihak Terkait.
- Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi yang terkait dengan penciptaan sinergi dan penguatan bisnis Perusahaan Anak.

1. Penetapan Akuntan Publik
   Salah satu hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 tanggal 10 Maret 2016 adalah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, selain itu juga menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2015.

   Dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of* Ernst & Young) untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keuangan Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan, Laporan Keuangan dan Laporan Portfolio Investasi DPLK, Operasi Kustodian, Evaluasi Kinerja, dan kepatuhan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) 62 untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Penetapan KAP tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Pemberian Kredit
   Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyampaikan saran dan pendapat berkenaan dengan keputusan Direksi untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur dalam jumlah tertentu kepada 23 (dua puluh tiga) debitur, yang terdiri dari 15 (lima belas) perusahaan BUMN, 1 (satu) Kementerian Negara Republik Indonesia, dan 7 (tujuh) perusahaan swasta. Sesuai ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris tidak melakukan kegiatan operasional, sehingga kegiatan konsultasi kredit tidak merupakan bagian dari pengambilan keputusan pemberian kredit.

   Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dengan pertimbangan bahwa Direksi telah melakukan kajian dan memberikan usulan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada 6 (enam) Pihak Terkait, yang terdiri dari 4 (empat) debitur institusi dan 2 (dua) debitur perorangan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
   Organisasi senantiasa terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, dengan tujuan menciptakan organisasi yang efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan dan tujuan utama Bank. Penyempurnaan organisasi yang telah dilakukan pada tahun 2016 adalah:
   a. Pembentukan BNI *Corporate University* untuk lebih mengoptimalkan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung kebutuhan organisasi.
   b. Pengangkatan *Senior Executive Vice President* (SEVP) *Human Capital* yang membawahi *Human Capital Division* dan BNI *Corporate University*, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan SDM BNI.
   c. Pengangkatan SEVP *Information Technology* yang membawahi IT *Operation Division*, IT *Solution & Security Division*, dan *Data Management Division*, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan IT BNI.

   Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM perlu terus diupayakan untuk mendukung kebutuhan organisasi dan strategi Bank, melalui program-program yang terstruktur dan terencana dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas global. Inisiasi penambahan pegawai difokuskan pada pencapaian target bisnis yang ditunjang oleh peningkatan produktivitas pegawai.

4. Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
   Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), seluruh jajaran Manajemen dan Pegawai Konglomerasi Keuangan BNI memiliki komitmen penuh untuk tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari seluruh *stakeholder* Konglomerasi Keuangan BNI seperti nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya agar terwujud praktik bisnis yang bermartabat dan beretika.

5. Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) BNI
   Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan penawaran NCD maksimal sebesar Rp3 triliun dengan realisasi penerbitan sebesar Rp3,023 triliun yang terdiri dari beberapa seri. Pihak *Arrangers* dari penerbitan NCD BNI tersebut adalah Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BCA Sekuritas. Konsultan Hukum yang digunakan adalah Hanafiah Ponggawa & *Partners*. Notaris yang digunakan adalah Fathiah Helmi, SE. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai *Paying Agent*. Penerbitan NCD tersebut merupakan strategi Perseroan untuk menambah likuiditas rupiah.

6. Tambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Anak
   Dalam rangka memperkuat permodalan untuk pengembangan bisnis, meningkatkan kinerja dan kapabilitas dalam pemberian pembiayaan kepada Nasabah terkait Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) PT BNI Multifinance dan atas persetujuan yang diberikan OJK, Perseroan telah melakukan penyertaan modal tambahan yang disetorkan penuh sebesar Rp203 miliar kepada PT BNI Multifinance. Komposisi pemegang saham PT BNI Multifinance setelah dilakukan penambahan modal dimaksud adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 99,994% dan Koperasi Karyawan PT BNI Multifinance sebesar 0,006%.

   Tambahan Penyertaan Modal kepada PT BNI Multifinance tidak berdampak secara langsung kepada Perseroan karena penambahan modal dilakukan kepada Perusahaan Anak yang telah dimiliki secara mayoritas oleh Perseroan. Penambahan modal tersebut tidak mengubah Pemegang Saham Pengendali PT BNI Multifinance. Segala anggaran terkait penambahan modal ini telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2016.

7. *Facility Agreement* dengan Konsorsium Bank
   Perseroan telah menandatangani *Facility Agreement* dengan konsorsium yang terdiri dari 9 Bank global atas fasilitas pinjaman sebesar USD750 juta *clean basis* untuk tenor 3 dan 5 tahun. Fasilitas pinjaman tersebut ditujukan untuk penyediaan tambahan likuiditas Perseroan yang antara lain akan digunakan untuk ekspansi bisnis.

8. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Pengawasan Realisasi RBB
   Dewan Komisaris bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi senantiasa memantau Manajemen dan melakukan penilaian secara seksama atas kinerja Perseroan berdasarkan RBB dan *Corporate Plan* yang telah ditetapkan.

   Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap RBB, Dewan Komisaris telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Revisi RBB Tahun 2016-2018 yang diajukan Direksi pada bulan Juni 2016, dan RBB Tahun 2017-2019 yang diajukan Direksi pada bulan November 2016. Selain hal tersebut, Dewan Komisaris juga telah menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB untuk periode Semester II Tahun 2015 di bulan Februari 2016, dan Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB untuk periode Semester I Tahun 2016 di bulan Agustus 2016 kepada OJK.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA BANK

Dalam rangka mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja, BNI telah menetapkan Visi untuk "Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja" dan menetapkan target pertumbuhan kinerja keuangan dengan tetap menjaga kualitas aset.

Dewan Komisaris menilai bahwa capaian kinerja tahun 2016 merefleksikan kemampuan dan kekuatan BNI untuk mengembangkan bisnis di pasar keuangan Indonesia. Pelaksanaan aktivitas bisnis dengan mengedepankan *prudential banking* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator, serta kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan kondisi pasar, dipandang merupakan kunci keberhasilan bagi Perseroan untuk *survive* di tengah indikasi perkembangan ekonomi global yang masih rentan terhadap ketidakpastian, dan kunci dalam menghadapi persaingan yang dipandang akan semakin ketat.

Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat serta ketidakpastian pasar keuangan dunia yang perlu lebih dicermati. Untuk menghadapi tantangan dan persaingan ke depan, BNI akan melaksanakan rencana di tahun 2017 sesuai tahapan dalam rencana jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan* 2014-2018. Pada tahun 2017, BNI berencana melakukan pertumbuhan agresif melalui ekspansi bisnis pada pasar yang selektif untuk pertumbuhan berkualitas, memperkuat sinergi antar seluruh lini bisnis, mengoptimalkan *outlet* sebagai *point of sales*, meningkatkan CASA dan FBI dengan mendorong transaksi nasabah melalui pengembangan *electronic transaction*, memperkuat Perusahaan Anak serta pertumbuhan non-organik, dan memperkuat permodalan.

Di tengah berbagai tantangan eksternal dan meningkatnya kompleksitas bisnis perbankan, Dewan Komisaris percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan pondasi bagi terbentuknya infrastruktur perbankan dan budaya perusahaan yang kokoh, dan hal tersebut akan berkontribusi terhadap kelangsungan kinerja usaha sekaligus membantu dalam meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Susunan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami perubahan pada tahun 2016. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Januari 2016 telah memutuskan untuk mengangkat Bapak Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama, dan Bapak Bistok Simbolon sebagai Komisaris.

   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 tanggal 10 Maret 2016

telah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatannya yaitu Bapak Zulkifli Zaini, Bapak Joseph F.P. Luhukay, dan Bapak Daniel T. Sparringa. Masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Bapak Wahyu Kuncoro dan Bapak Joni Swastanto. RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 juga telah memutuskan untuk mengalihkan penugasan Bapak Hartadi A. Sarwono dari Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen, serta Bapak Revrisond Baswir dan Bapak Pataniari Siahaan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen. Sesuai Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Bapak Revrisond Baswir dan Bapak Pataniari Siahaan menjalankan masa *cooling off* berkenaan pengalihan tugasnya dari Komisaris menjadi Komisaris Independen.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin diangkat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Susunan Dewan Komisaris Periode sebelum 12 Januari 2016

Nama	Jabatan
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen merangkap Pelaksana Tugas Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Daniel T. Sparringa	Komisaris Independen
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen
Anny Ratnawati	Komisaris Independen
Joseph F.P. Luhukay	Komisaris Independen
Pataniari Siahaan	Komisaris
Revrisond Baswir	Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Periode setelah 12 Januari 2016

Nama	Jabatan
Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Daniel T. Sparringa	Komisaris Independen
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen
Anny Ratnawati	Komisaris Independen
Joseph F.P. Luhukay	Komisaris Independen
Pataniari Siahaan	Komisaris
Revrisond Baswir	Komisaris
Bistok Simbolon	Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Periode 10 Maret 2016 - 26 Oktober 2016

Nama	Jabatan
Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris
Anny Ratnawati	Komisaris Independen
Pataniari Siahaan*	Komisaris Independen
Revrisond Baswir*	Komisaris Independen
Bistok Simbolon	Komisaris
Wahyu Kuncoro	Komisaris
Joni Swastanto	Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Periode setelah 26 Oktober 2016

Nama	Jabatan
Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Anny Ratnawati	Komisaris Independen
Pataniari Siahaan*	Komisaris Independen
Revrisond Baswir*	Komisaris Independen
Bistok Simbolon	Komisaris
Wahyu Kuncoro	Komisaris
Joni Swastanto	Komisaris

**) menjalani cooling off*

Sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Komisaris yang telah purna bakti atas segala dedikasi, kontribusi dan kerjasamanya dalam menjalankan tugas sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Komisaris juga menyampaikan selamat bergabung kepada Komisaris yang baru dengan harapan semakin dapat meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam memberikan kontribusinya bagi Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan, dan dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pengangkatan dan pengaturan tugas Organ Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris berharap upaya-upaya perbaikan dan peningkatan untuk mengejar berbagai ketertinggalan dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendekatan dan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi. Dewan Komisaris percaya bahwa Direksi dan jajaran pimpinan BNI telah memiliki strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga kerja keras yang telah dicapai di tahun 2016 dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Demikian laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan program pengawasan selama tahun 2016.

Hartadi A. Sarwono
Komisaris Utama

Achmad Baiquni
Direktur Utama

Laporan Direksi

Pada saat kondisi perekonomian yang cukup menantang, Perseroan berhasil menunjukkan kinerja yang membanggakan. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor usaha, BNI tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya sehingga meningkat sebesar Rp94,4 triliun. Pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 65,2% dari total aset di tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 20,6%. Simpanan nasabah BNI di tahun 2016 naik sebesar Rp65,1 triliun atau 17,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 yang tercatat hanya Rp56,5 triliun. Di tahun 2016 BNI mampu mencapai pertumbuhan laba yang agresif. Berdasarkan data per Desember 2016 BNI mampu mencapai pertumbuhan laba sampai 25,1%, jauh di atas pertumbuhan laba industri yang hanya mencapai 1,8%.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan Laporan Pengelolaan Perseroan untuk Tahun buku 2016. Secara umum, pencapaian kinerja Perseroan sangat baik. Tidak hanya pada aspek keuangan namun juga aspek non keuangan kendatipun kondisi perekonomian global dan nasional masih belum mengalami pemulihan secara signifikan.

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terjadi pada tahun 2016, dan diperkirakan akan lebih baik pada tahun 2017 mendatang. Untuk dua tahun mendatang, perekonomian dunia diperkirakan akan relatif lebih baik. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh 2,8% pada 2017 dan 3,0% pada 2018. Hal ini didukung oleh upaya-upaya beberapa negara dalam pemulihan perekonomian mereka masing-masing.

Dari sisi kebijakan suku bunga, saat ini dunia sedang mengalami *monetary policy less divergence*, yaitu kondisi adanya beberapa bank sentral dunia seperti The Fed berpotensi menaikkan suku bunga acuan secara gradual namun masih pada level yang rendah, searah dengan pemulihan perekonomiannya. Di sisi lain, beberapa bank sentral (Asia, Eropa) menerapkan kebijakan suku bunga rendah atau bahkan negatif, untuk mendorong konsumsi dalam negeri/kawasannya.

Dalam jangka menengah ke depan, sejumlah risiko global masih terus menjadi perhatian. Perlambatan yang diikuti ketidakpastian perkembangan ekonomi global tersebut akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kinerja perdagangan masih tertekan akibat faktor global, kegiatan ekspor dan impor melambat meskipun neraca perdagangan masih mencatat surplus.

Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih tinggi akibat tekanan yang lebih besar akibat ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Pemilihan Presiden AS. Pasar keuangan Indonesia juga diperkirakan akan mengalami tekanan dan meningkatnya volatilitas pasca Pemilihan Presiden AS. Hal ini berpotensi menciptakan *capital outflow* dari pasar keuangan Indonesia.

Ke depan kondisi fiskal Indonesia diperkirakan akan tertekan yang tercermin dari melebarnya defisit anggaran, karena pendapatan negara akan berkurang cukup signifikan. Di sisi lain, progam kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan defisit anggaran, serta melonggarkan likuiditas perbankan.

Dengan kondisi yang demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan berada pada level 4,9-5,3% (perkiraan Bank Indonesia). Sedangkan untuk tahun depan perekonomian Indonesia diperkirakan relatif lebih baik, atau mampu tumbuh sekitar 5,1-5,3%, dengan masih ditopang oleh faktor konsumsi dan investasi, serta kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup baik.

Fokus kebijakan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019 yakni memperkuat beberapa sektor stratejik. Sektor-sektor tersebut termasuk dalam sektor kemaritiman, pangan, energi, dan infrastruktur yang sudah teridentifikasi dalam sektor prioritas masing-masing wilayah dan 20 sektor prioritas BNI secara *bankwide*. Sebagai salah satu bank BUMN, ekspansi bisnis BNI diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam rangka menyikapi hal-hal tersebut, BNI memprioritaskan penyaluran kredit produktif pada 20 sektor prioritas BNI maupun Wilayah disertai langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih baik lagi. Pendekatan *value chain* yang menjadi fokus BNI dalam strateginya diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang yaitu dengan melayani seluruh aspek dan elemen pendukung pembangunan mulai dari institusi/ korporasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta menjangkau individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 akan semakin meningkatkan persaingan terutama pada sektor riil. Penguasaan pasar domestik menjadi jawaban bagi implementasi MEA terkait dengan peningkatan daya saing perbankan nasional. Di sisi lain, dengan berlakunya MEA, aktivitas perdagangan luar negeri akan semakin meningkat. Oleh karena itu BNI akan memfasilitasi peningkatan tersebut dengan memberikan fasilitas kredit maupun *trade finance* kepada industri-industri yang berorientasi ekspor, terlebih saat ini pemerintah terus berupaya memperluas pangsa ekspor di luar negara-negara yang saat ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia. Peluang usaha perbankan di luar negeri berdasarkan asas resiprokal juga dapat disikapi dengan pembukaan kantor layanan di negara lain baik yang berada di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN. Hal ini yang akan dapat membantu pertumbuhan bisnis BNI serta memperluas layanan BNI ke depan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, BNI berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan institusi lain yang berasal dari negara, pemerintah, individu, masyarakat, sesama perusahaan keuangan, maupun badan partikelir lainnya.

Selain kontribusi terhadap bangsa dan negara tersebut, BNI berusaha menegaskan eksistensinya dengan berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan khususnya perbankan melalui layanan keuangan yang menyeluruh kepada semua nasabah perbankan dan nilai tambah bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Rencana jangka pendek BNI disusun berdasarkan pada rencana jangka panjangnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal terkini. Selama tahun 2016, BNI telah berhasil menjalankan rencana-rencananya dengan garis besar sebagaimana berikut.

1. Memperkuat ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen menengah pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas.
   a. Meningkatkan ekspansi bisnis di *selected corporate market* di sektor prioritas nasional yang mendukung program pemerintah.
   b. Meningkatkan ekspansi segmen menengah pada sektor prioritas daerah dengan tetap menjaga kualitas portofolio.
   c. Optimalisasi proses kredit yang fokus pada kecepatan proses namun tetap *prudent.*
   d. Meningkatkan kualitas kredit dengan fokus pada restrukturisasi dan *recovery* nasabah.

2. Meningkatkan *fee based income* (FBI) dan *current account saving account* (CASA) melalui penguatan *transactional banking* nasabah dan *value chain*-nya.
   a. Mengembangkan transaksi *targeted* nasabah Kementerian, institusi, dan korporasi melalui *integrated cash management, trade finance,* dan bank garansi.
   b. Meningkatkan utilisasi dan *wallet size cash management* di segmen menengah.
   c. Mengoptimalkan *supply chain financing* berdasarkan transaksi nasabah dan *value chain*-nya.

3. Memperkuat *positioning* produk *consumer banking*: BNI Griya, BNI Fleksi, dan kartu kredit serta Taplus.
   a. Meningkatkan penetrasi produk unggulan di *selected customer segment.*
   b. Mengembangkan kerjasama dengan *partner* bisnis untuk meningkatkan transaksi nasabah.
   c. Meningkatkan *cross selling* produk unggulan terhadap nasabah potensial.
   d. Melakukan pengembangan produk melalui optimalisasi pemanfaatan *e-channel.*
   e. Optimalisasi penetrasi BNI Fleksi pada nasabah *payroll* dan pensiunan
   f. Penetrasi produk dan layanan *retail* di cabang luar negeri kepada masyarakat Indonesia.

4. Mengimplementasikan layanan *digital* untuk peningkatan *sales* dan *customer interaction.*
   a. Meningkatkan transaksi nasabah melalui pengembangan *e-channel, e-commerce,* dan solusi pembayaran elektronik menuju layanan digital.
   b. Melakukan pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan *customer interaction* dan penjualan.
   c. Melakukan ekspansi infrastruktur *e-channel* untuk meningkatkan penetrasi di pasar potensial.
   d. Meningkatkan utilisasi *e-channel* untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas *channel.*

5. Meningkatkan *cross selling* produk terhadap *targeted segment.*
   a. Optimalisasi *bundling* produk bank dan perusahaan anak kepada *potential customer.*
   b. Optimalisasi *e-channel* dalam *cross selling* produk dan layanan produk bank dan perusahaan anak
   c. Mengembangkan *targeted segment* dengan melihat perkembangan bisnis.

6. Mengoptimalkan *outlet* menjadi *revenue center* termasuk solusi finansial terintegrasi.
   a. Optimalisasi transaksi nasabah dengan memberikan *total financial solution.*
   b. Mengembangkan *value chain* pada seluruh lini dan perusahaan anak.
   c. Meningkatkan *referral* nasabah untuk produk perusahaan anak di seluruh *outlet.*

7. Melakukan akuisisi/divestasi perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang memiliki sinergi kuat.
   a. Melakukan akuisisi lembaga keuangan prospektif dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah.
   b. Memperkuat perusahaan anak dalam meningkatkan ekspansi bisnis melalui sinergi antar unit.

8. Meningkatkan *engagement* dan produktivitas pegawai.
   a. Meningkatkan kapabilitas pegawai dalam mendukung implementasi strategi bisnis
   b. Optimalisasi kapasitas pegawai dalam memenuhi kebutuhan bisnis

Rencana jangka pendek tahun 2016 tersebut secara umum telah berhasil dilaksanakan. Ekspansi kredit di sektor prioritas seperti pada sektor pertanian, manufaktur, infrastruktur, dan industri penunjang infrastruktur telah dilaksanakan secara optimal. Begitu juga ekspansi kredit di sektor potensial di masing-masing wilayah dan nasabah yang merupakan *supply/value chain* dari debitur korporasi. Untuk pemberian kredit di sektor kecil, BNI telah berhasil melampaui regulasi minimum pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan portepel kredit di atas rata-rata industri tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga *Non-Performing Loan* (NPL) tidak terjadi kenaikan secara proporsional dan menghasilkan imbal hasil yang relatif tinggi.

Peningkatan pendapatan non-bunga dan pengumpulan dana murah telah dilakukan sesuai rencana di tengah ketatnya persaingan bisnis di sektor keuangan dan penempatan dana masyarakat dari institusi non-bank atau pun dengan adanya *fintech*. Persaingan bisnis di bidang digitalisasi layanan keuangan telah diantisipasi dengan meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada sehingga sistem tersebut siap untuk dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah sesuai yang telah dituangkan dalam dalam *Information Technology Strategic Plan* (ITSP). Hasil dari pelaksanaan rencana strategis di bidangan teknologi informasi tersebut yaitu berupa peningkatan jumlah transaksi dan peningkatan kualitas layanan.

Dukungan berupa layanan terhadap program-program pemerintahan dan regulator juga telah dilakukan dengan sempurna, antara lain dengan dukungan terhadap program literasi dan inklusi keuangan yaitu Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD) serta program mobil SiMolek selain edukasi keuangan langsung ke Tenaga Kerja Indonesia baik di Hong Kong maupun di daerah asal, sosialisasi *Tax Amnesty* di berbagai lokasi, program bantuan sosial (bansos), e-warung KUBE, kerja sama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*), penerbitan Kartu Lentera dan Kartu Masyarakat Sejahtera serta penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Layanan terhadap *state owned enterprise* (SOE) dan institusi pemerintah lainnya juga dilaksanakan secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir berupa pengelolaan investasi, pembiayaan transaksi, kerja sama penerbitan kartu debit/kredit *co-brand*, penyaluran kredit konsumer, *cash management*, dan penerbitan kartu pegawai/anggota.

Rencana penambahan dan penataan *outlet* juga telah dilakukan sesuai rencana. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan peningkatan *span of control* serta perluasan wilayah layanan bank, maka BNI di 2016 telah melaksanakan penambahan *outlet*, peningkatan status *outlet*, relokasi *outlet*, dan penambahan kantor fungsional (kantor wilayah) selain ekspansi anjungan tunai mandiri (ATM) dan *eletronic data capture* (EDC). Dengan penataan *outlet* tersebut pula, upaya penyediaan solusi keuangan terintegrasi berupa *cross selling* produk termasuk produk perusahaan anak dan peningkatan produktifitas pegawai dapat lebih mudah dicapai.

Dukungan terhadap amanat pemerintah lainnya dalam rangka percepatan pembangunan juga telah dilaksanakan oleh BNI. Rencana pembentukan *Holding* Lembaga Keuangan juga telah melalui tahap-tahap pembentukan sesuai rencana. Pembentukan perusahaan pengelolaan ATM dan EDC bersama dengan Bank-bank anggota Himbara telah diimplementasikan dan telah berhasil dilakukan dengan adanya pembukaan *outlet* berupa ATM dan EDC Merah Putih. Amanat dari pemerintah untuk Program *Tax Amnesty* pun telah berhasil BNI laksanakan. BNI selain berfungsi sebagai *gateway* penerimaan tebusan dan penempatan dana repatriasi juga berfungsi sebagai inisiator sosialisasi dan komunikasi *Tax Amnesty* ke berbagai kelompok masyarakat.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

Perlambatan ekonomi dan berbagai tantangan pada tahun 2016 sebagaimana uraian di atas dapat diantisipasi dengan baik oleh Perseroan. Melalui eksekusi strategi bisnis yang tepat, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, pada saat kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih. Secara umum, Perseroan berhasil meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2016, laba BNI tumbuh mencapai 25,1% menjadi Rp11,4 triliun. Hal ini terutama dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor usaha, BNI tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya sehingga meningkat sebesar Rp94,4 triliun dibandingkan dengan peningkatan tahun 2015 yang hanya meningkat sebesar Rp92,0 triliun. Pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 65,2% dari total aset di tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 20,6%. Di tahun 2016, simpanan nasabah BNI naik sebesar Rp65,1 triliun atau 17,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 yang tercatat hanya Rp56,5 triliun. Di samping itu, kinerja BNI juga telah diapresiasi oleh pihak eksternal, pada tahun 2016 BNI kembali meraih penghargaan sebagai *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan i (IICD).

Hal lain yang juga sangat membanggakan bagi Perseroan di tahun 2016 adalah perbaikan kualitas kredit yang signifikan. Perbaikan ini tentunya datang dari berbagai inisiatif di bidang perkreditan, salah satunya dengan menetapkan kebijakan *mempekuat* ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen menengah pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas. Selain menetapkan sektor strategis, optimalisasi *supply chain* dan *cross selling* juga merupakan unsur penting dalam mencapai pertumbuhan kredit yang berkualitas melalui proses assesmen yang mendalam pada *parent account*. Pada sektor konsumer, pertumbuhan kredit juga difokuskan kepada *selected partner, portfolio action* serta segmen dengan *risk profile* yang rendah.

BNI telah melakukan penyempurnaan dalam proses kredit *Business Banking* baik pada segmen korporasi, menengah maupun pada segmen usaha kecil. Penyempurnaan yang dilakukan pada segmen korporasi, menengah dan kecil unorganik yaitu dengan penajaman fungsi unit bisnis dengan melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukanan analisa kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur serta penajaman fungsi unit risiko yaitu memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dengan melakukan analisis risiko kredit dan mitigasi/*risk control* yang berfokus pada risiko yang kemungkinan dan dampaknya tinggi.

Sedangkan penyempurnaan yang dilakukan pada Segmen Usaha Kecil adalah dengan melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukan analisa kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur oleh unit bisnis dan pelaksanaan supervisi dan asesmen risiko kredit secara mendalam oleh atasan langsung.

Dengan melaksanakan berbagai inisiatif strategis di atas, di tahun 2016, segmen korporasi mampu membukukan pertumbuhan kredit sebesar 26,2% dari Rp137,9 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp174,1 triliun pada Desember 2016. Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut berdampak pada peningkatan kontribusi segmen korporasi BNI menjadi sebesar 44,3% terhadap total portofolio kredit BNI (konsolidasi) dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 42,3%. Segmen korporasi terus mengoptimalkan perluasan bisnis dengan melakukan ekspansi fokus pada sektor – sektor prioritas BNI seperti infrastruktur (telekomunikasi, jalan tol dan konstruksi, kelistrikan, minyak dan gas serta transportasi), manufaktur, perdagangan dan perkebunan.

Pada akhir tahun 2016, kredit segmen menengah telah mencapai sebesar Rp61,3 triliun, atau tumbuh 19,9% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, serta mencakup 15,6% dari total kredit BNI (konsolidasi). Sedangkan untuk pinjaman bagi segmen kecil, di akhir tahun 2016, mencapai sebesar Rp50,7 triliun, tumbuh sebesar 20,5% dari pencapaian tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp42,1 triliun. Pencapaian ini menyumbang sebesar 12,9% dari total kredit BNI (konsolidasi).

Dalam kondisi pertumbuhan kredit yang agresif, Perseroan mampu mempertahankan nilai NPL yang rendah. Rasio NPL bruto tercatat sebesar 3,0% di Desember 2016 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,7%. Dalam rangka mitigasi risiko terkait dengan kondisi NPL tersebut, BNI membentuk *coverage ratio* yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 140,4% menjadi 146,0% di tahun 2016. Peningkatan NPL bruto tidak diikuti dengan NPL neto nya yang tercatat menurun dibandingkan dengan tahun 2015 dari 0.9% menjadi 0,4% di tahun 2016. Hal ini mencerminkan bahwa kecukupan cadangan kerugian yang dibentuk oleh BNI sudah dapat meng*cover* peningkatan NPL yang terjadi di tahun 2016.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana-dana berbiaya murah, BNI menawarkan berbagai produk giro, deposito dan tabungan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan operasional nasabah institusi. Di tahun 2016, pertumbuhan dana operasional nasabah perbankan bisnis tetap difokuskan pada dana murah, yang tumbuh semakin cepat dan efektif dengan saldo rata-rata dana murah sebesar Rp90 triliun, meningkat 3,6% dibandingkan saldo rata-rata sebesar Rp86,9 triliun di tahun 2015. Peningkatan kontribusi dana murah ini telah menghasilkan penurunan biaya dan *(cost of fund)* sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing BNI.

Total simpanan nasabah *business banking* mencapai Rp207 triliun pada akhir tahun 2016, yang mencakup sebesar 50,4%dari total dana pihak ketiga BNI. Pencapaian ini meningkat sebesar 20% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp172,5 triliun atau 49,4% dari total dana pihak ketiga tahun 2015.

Beberapa rasio profitabilitas pada tahun 2016 juga menunjukan perbaikan dibandingkan posisi tahun 2015. *Return on Assets* (ROA) BNI meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat 2.6% menjadi 2,7% di tahun 2016. Peningkatan ini merupakan dampak dari peningkatan kinerja BNI dibandingkan tahun 2015 yang lalu. Hal penting lainnya adalah Perseroan juga mampu mempertahankan tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang kuat sehingga mampu menopang pertumbuhan portofolio kredit yang berkualitas. Rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2016 relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang terjaga di kisaran 19,4%. CAR BNI di tahun 2016 jauh lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum yang ditetapkan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yakni minimum 9% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.

Terkait dengan perbankan internasional, produk pinjaman seluruh Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) mayoritas mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 KCLN secara total KCLN berhasil mencapai angka Rp21,2 Triliun, tumbuh sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya dengan pencapaian pada produk pinjaman hanya sebesar Rp19,6 Triliun. Peningkatan ini terjadi karena ekspansi masing-masing KCLN yang sudah semakin meluas. Pertumbuhan pada *Local Loan* yang signifikan yaitu sebesar 52,2% dengan pencapaian Rp8,7 Triliun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar Rp5,8 Triliun. Hal ini menjadi bukti bahwa KCLN sudah mulai menunjukkan eksistensinya di mata warga lokal di masing-masing Negara.

Dana Pihak Ketiga seluruh KCLN secara mayoritas meningkat pada tahun 2016 dengan pencapaian sebesar Rp3,9 Triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,4% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp3,7 Triliun. Hal ini antara lain dikarenakan pada tahun ini BNI telah membuka KCLN baru di negara Korea Selatan di mana KCLN ini mempunyai izin penuh (*full license*) untuk melakukan transaksi termasuk bisnis retail/*consumer*.

Dapat kami sampaikan bahwa berbagai kesuksesan yang dicapai Perseroan di atas menunjukkan bahwa strategi bisnis yang dilaksanakan manajemen telah berada pada rel yang benar.

PENCAPAIAN TARGET 2016

Secara umum, di tahun 2016, BNI telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa pencapaian kinerja kunci. Meskipun laba tahun berjalan masih sedikit di bawah yang ditargetkan, namun profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA dan ROE mencapai target dengan realisasi sebesar 2,7% dan 15,5%. Pendapatan bunga bersih juga telah melebihi target yaitu sebesar 100,4%. Pencapaian lainnya adalah dimilikinya pertumbuhan pinjaman BNI yang mencapai 20,6% diikuti dengan *coverage ratio* yang juga meningkat menjadi *Coverage Ratio* 146,0%. LDR berada di kisaran 90,4%. BNI juga mampu meningkatkan *recurring fee* sebesar 23,0% (YoY) dan Dana Pihak Ketiga sebesar 17,6% dengan *service level* pada posisi top 2.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, tekanan ekonomi makro turut mempengaruhi kinerja Perseroan pada tahun 2016. Sementara pada sisi lainnya, persaingan antar bank menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan kajian dalam rangka mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi. Dengan menggunakan *tools* analisis SWOT, Perseroan menyadari bahwa salah satu kendala yang dihadapi Perseroan adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan kredit dengan tingkat volatilitas yang masih tinggi. Hal tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya rasio LDR dan CASA BNI.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Perseroan telah menetapkan strategi-strategi untuk meningkatkan DPK terutama CASA melalui *closed-loop transaction* dan transaksi *e-channel* 6. Pengembangan *digital banking* untuk meningkatkan *customer experience*, transaksi, dan penjualan. Perseroan juga menetapkan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi persaingan bisnis melalui peningkatan *engagement* dan produktivitas pegawai. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik sebagaimana yang dapat dilihat pada uraian analisis kinerja di atas.

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan lebih baik dan berada pada kisaran 5,1-5,3%. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada tahun 2017 diharapkan meningkat dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan kredit diperkirakan sebesar 13,0-15,0% dan pertumbuhan dana pihak ketiga diperkirakan sebesar 11,0-13,0%.

Melihat prospek usaha industri perbankan nasional tersebut, khususnya adanya kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional, pertumbuhan industri manufaktur yang diproyeksikan mengalami peningkatan, serta berkembangnya perdagangan luar negeri di kawasan Asia, Perseroan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih setiap peluang dan potensi yang tercipta. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan, Direksi optimis bahwa prospek usaha di masa yang akan datang akan cerah. Hal ini ditopang dengan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan diantaranya sebagai berikut.

1. Memiliki *market share* yang kuat di segmen Korporasi dan BUMN
2. Pertumbuhan kredit segmen menengah di atas industri
3. Memiliki *market share* yang kuat di kartu kredit dan komposisi kredit perumahan yang masih dominan terhadap total kredit konsumer
4. Tingginya pertumbuhan kredit multiguna (BNI Fleksi)
5. Pertumbuhan dan kinerja anak perusahaan cukup tinggi, sehingga kontribusi laba perusahaan anak meningkat
6. Penyaluran Kredit Kecil cukup tinggi
7. Memiliki permodalan yang mencukupi (CAR)

Kami memiliki keyakinan yang kuat dapat segera mewujudkan Visi, Misi dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Untuk itu Perseroan telah menyiapkan strategi pengembangan usaha yang tepat, sehingga Perseroan mampu menangkap peluang yang ada secara efektif.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Perseroan berupaya keras untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik GCG, tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices*/standard internasional. Bagi Perseroan, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan, guna mencapai kinerja terbaik secara berkelanjutan.

Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan senantiasa menerapkan standard praktik GCG yang tinggi yang mengacu pada ketentuan OJK dan standar internasional sesuai *framework* ASEAN CG *Scorecard* yang selaras dengan parameter yang telah ditetapkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Berbagai upaya intensif telah dilakukan sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian *Good Corporate Governance* pada Laporan Tahunan ini. Beberapa hal terkait dengan upaya intensif tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Untuk memastikan penerapan praktik GCG tersebut di atas, maka Perseroan secara konsisten telah melaksanakan *assessment*, baik *self assessment* maupun *Third Party Assessment*. Dasar pelaksanaan *self assessment* adalah POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil pelaksanaan *self assessment* di tahun 2016 menunjukkan nilai komposit 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK.

Third party assessment melalui kegiatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan *Asean CG Scorecard* (ACGS) yang dilaksanakan oleh IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*). Hasil penilaian CGPI menunjukkan bahwa BNI mendapatkan predikat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*). Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik GCG BNI berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dilaksanakan pada tahun 2016, BNI mendapatkan predikat "*GOOD*".

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, diantaranya:

1. Komite Kredit
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
3. Komite Manajemen Risiko dan Kapital
4. Komite Produk
5. Komite Manajemen Kinerja
6. Komite Manajemen Teknologi
7. Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
8. Komite Sumber Daya Manusia

Direksi menilai bahwa selama 2016, komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dengan baik.

Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Komite Kredit dengan keputusan Dir. Sektor ke atas dilaksanakan 117 kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 dan bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI yang bertindak sebagai Direktur yang ditunjuk untuk menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda pembahasan penetapan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, terakhir diubah berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016. Tugas utama dari KRK adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Manajemen Risiko dan menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank, mencakup pengukuran, struktur (*tier 1/tier 2*), alokasi dan rencana kontijensi permodalan. Sepanjang tahun 2016, Komite Risiko dan Kapital telah menjalankan tugas dengan baik dengan melaksanakan 10 kali rapat.

Komite Anti *Fraud* dibentuk untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi berdasarkan SK Nomor KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016 perihal Pembentukan Komite *Anti Fraud* (KAF). Selama tahun 2016, KAF telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian *fraud* yang berasal dari kegiatan/aktivitas di segenap unit kerja BNI.
2. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
3. Menetapkan kebijakan dan strategi *anti fraud*.
4. Memantau penerapan kebijakan dan strategi *anti fraud* di BNI serta melakukan *review* dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan secara periodik.

Komite Produk merupakan wadah pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk/aktivitas di BNI untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Komite Produk dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 perihal *Product Committee* (PRC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sepanjang tahun 2016, Komite Produk telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda pembahasan realisasi produk dan aktivitas baru triwulan I 2016 dan rencana pengembangan produk/aktivitas baru dalam revisi RBB 2016-2018 dan pembahasan pemenuhan data mitigasi risiko atas rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru 2017 serta realisasi penerbitan produk dan/atau aktivitas baru dalam RBB 2016.

Komite Manajemen Kinerja (PMC) merupakan komite permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (*performance management*) di BNI untuk memastikan keselarasan *strategic planning*, memfasilitasi proses *target setting* dan penilaian kinerja. Komite Manajemen Kinerja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/466/DIR/R tanggal 5 Oktober 2012 perihal *Performance Management Committee* (PMC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Kinerja telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda pembahasan finalisasi Skor Unit dan Sub Unit 2015 dan Perubahan KPI Unit dan Sub Unit dan KPI Direksi 2016.

Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan Komite permanen di BNI yang di dalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP). Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (KKP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/168/DIR/R tanggal 26 April 2013 dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/169/DIR/R tanggal 26 April 2013 dan dilakukan perubahan susunan penataan Komite menjadi Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang didalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/106/DIR/R tanggal 03 April 2014. Pada tahun 2015 dilakukan penyesuaian susunan penataan Komite berdasarkan Penataan Organisasi Direksi BNI No. KP/117/DIR/R tanggal 20 Maret 2015 yang selanjutnya diperbaharui/diupdate melalui memo REN No. REN/2/1437 tanggal 19 Oktober 2016 yang disesuaikan dengan penataan Organisasi Direksi cfm. SK Direksi No. KP/253/DIR/R tanggal 1 Juni 2016. Sepanjang tahun 2016, Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengadakan 39 kali rapat.

Komite Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komite permanen di BNI yang beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa pemimpin Divisi. Komite Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Perubahan Komite Sumber Daya

Manusia. Selama tahun 2016, Komite Sumber Data Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu,

1. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakna/ ketentuan dalam bidang sumber daya manusia tersebut meliputi
2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat termasuk untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi
4. Memastikan bahwa pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai denan kebutuhan dan peruntukannya

Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan sebagai Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Commitee*) dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI). Komite Manajemen Teknologi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi, yang diperbaharui melalui Memo Divisi Perencanaan No. REN/2/234/R tanggal 04 Mei 2016 perihal Perubahan Keanggotaan Komite. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Teknologi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan mengadakan 7 kali rapat.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2016 komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan. RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada 12 Januari 2016 memutuskan bahwa:

Menyetujui dan mengangkat Bpk. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah RUPS Luar Biasa dan mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:

- Bpk. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
- Bpk. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama
- Bpk. Herry Sidharta sebagai Direktur
- Bpk. Sutanto sebagai Direktur
- Bpk. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
- Bpk. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
- Ibu Adi Sulistyowati sebagai Direktur
- Bpk. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
- Bpk. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
- Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur

Selanjutnya, RUPS tahunan dilaksanakan pada 10 Maret 2016 kemudian menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui dan mengangkat Sdr. Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah RUPS tahunan dan mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:

- Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
- Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama
- Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
- Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur
- Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
- Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur
- Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
- Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
- Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur.
- Sdr. Putrama Wahju Setiawan sebagai Direktur

Perubahan ini dipandang sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk memenuhi tuntutan bisnis, mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis sebagaimana yang dituangkan dalam program transformasi, termasuk mensukseskan program sejuta rumah, berdasarkan evaluasi dari pemegang saham pengendali dan rekomendasi Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

PENUTUP

Demikian, laporan tugas Direksi atas pelaksanaan usaha Perseroan selama tahun 2016. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras di tengah tantangan yang terjadi di industri perbankan. Atas kerja keras dari tim manajemen dan seluruh karyawan, Perseroan mampu meningkatkan kinerjanya di 2016.

Atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Arahan Dewan Komisaris sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan di 2016.

Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan. Atas dukungan yang diberikan selama ini, Perseroan mampu bertahan dan bahkan senantiasa menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Kedepannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa Perseroan akan menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Jakarta, Februari 2017
Atas Nama Direksi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Achmad Baiquni
Direktur Utama

Jajaran Direksi

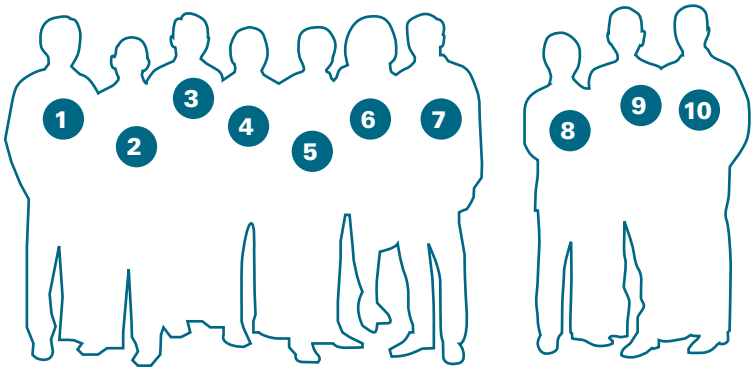

1. **Panji Irawan**
   Direktur Tresuri dan Internasional
2. **Imam Budi Sarjito**
   Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
3. **Rico Rizal Budidarmo**
   Direktur Keuangan dan Risiko Kredit
4. **Bob Tyasika Ananta**
   Direktur Perencanaan dan Operasional
5. **Achmad Baiquni**
   Direktur Utama
6. **Adi Sulistyowati**
   Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan
7. **Suprajarto**
   Wakil Direktur Utama
8. **Putrama Wahju Setyawan**
   Direktur Bisnis Menegah
9. **Herry Sidharta**
   Direktur Bisnis Korporasi
10. **Anggoro Eko Cahyo**
    Direktur Konsumer Banking

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Februari 2017

DEWAN KOMISARIS

HARTADI A. SARWONO
Komisaris Utama/Komisaris Independen

PRADJOTO
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen

ANNY RATNAWATI
Komisaris Independen

BISTOK SIMBOLON
Komisaris

JONI SWASTANTO
Komisaris

PATANIARI SIAHAAN
Komisaris Independen

REVRISOND BASWIR
Komisaris Independen

WAHYU KUNCORO
Komisaris

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam laporan tahunan 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Februari 2017

DIREKSI

ACHMAD BAIQUNI
Direktur Utama

SUPRAJARTO
Wakil Direktur Utama

RICO RIZAL BUDIDARMO
Direktur Keuangan dan Risiko Kredit

HERRY SIDHARTA
Direktur Bisnis Korporasi

ADI SULISTYOWATI
Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan

BOB TYASIKA ANANTA
Direktur Perencanaan dan Operasional

ANGGORO EKO CAHYO
Direktur Konsumer Banking

IMAM BUDI SARJITO
Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan

PANJI IRAWAN
Direktur Tresuri dan Internasional

PUTRAMA WAHJU SETYAWAN
Direktur Bisnis Menengah

Laporan Tahunan 2016

Profil Perusahaan

- Identitas Perusahaan 70
- Riwayat Singkat Perusahaan 71
- Brand Perusahaan 73
- Bidang Usaha 74
- Produk Dan Jasa 76
- Peta Wilayah Operasional 80
- Inovasi Outlet Dan ATM 82
- Struktur Organisasi 84
- Visi, Misi, Dan Budaya Perusahaan 86
- Profil Dewan Komisaris 92
- Profil Direksi 92
- Profil Pejabat Eksekutif 97
- Profil Karyawan 99
- Komposisi Pemegang Saham 104
- Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi 108
- Struktur Grup 115
- Kronologis Pencatatan Saham 116
- Kronologis Pencatatan Obligasi 117
- Kronologis Pencatatan Efek Lainnya 117
- Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal 118
- Nama Dan Alamat Entitas Anak Dan/Atau Kantor Wilayah Dan Cabang 119
- Akses Informasi 121

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kegiatan Usaha	Bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar No. 35, tanggal 17 Maret 2015.
Segmen Usaha	• Perbankan Bisnis Korporasi, Menengah, dan Kecil • Perbankan Konsumer • Perbankan Internasional dan Tresuri
Tanggal Pendirian	5 Juli 1946
Dasar Hukum Pendirian	• Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 1946 • Lembaran Negara RI No. 70 Tahun 1968 • UU No. 17 Tahun 1968 • PP No.19 Tahun 1992 (Penyesuaian Bentuk Hukum BNI)
Kepemilikan	Negara Republik Indonesia: 60% Masyarakat: 40%
Modal Dasar	15.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.054.806.974.125
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	28 Oktober 1996
Kode Saham	BBNI
Alamat Kantor Pusat	Gedung BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telepon: (62-21) 251 1946 I-Telex: 765185 BNI DLN IA Faks.: (62-21) 251 1214 E-mail: bni@bni.co.id Website: www.bni.co.id PO Box 1946 Jakarta Mampang 12700
Hubungan Investor	Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Gedung BNI, Lt. 24 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telepon: (62-21) 2511 946, 572 8387 Faks.: (62-21) 572 8295, 572 8053 E-mail: investor.relations@bni.co.id Website: www.bni.co.id

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya

saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

Di akhir tahun 2016, jumlah aset yang dimiliki BNI tercatat sebesar Rp603 triliun dan jumlah karyawan sebanyak 24.272 orang. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.763 *outlet* domestik dan di luar negeri melalui 6 (enam) Kantor Cabang Luar Negeri (Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul). Jaringan ATM BNI saat ini tercatat sebanyak 16.188 unit ATM dan didukung juga oleh jaringan ATM bersama. Layanan BNI juga tersedia melalui 111.743 EDC, *Internet Banking*, dan SMS *Banking*.

Brand Perusahaan

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

- Logo BNI menggunakan warna Orange dan Turquoise sebagai warna *signature* korporat yang dikembangkan untuk memberikan kesan modern dan *fresh*. Angka 46 merupakan bagian dari sejarah pendirian BNI sebagai bank pertama Indonesia dan telah terbukti memberikan kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa.
- Slogan "Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa" merupakan penguat filosofi dan visi perusahaan.
- *Value Proposition* 2017 adalah BNI merupakan *Digital Financial Institution* yang komprehensif dan terpercaya yang akan terus memberikan pengalaman inovasi digital ke semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik korporasi besar maupun sangat kecil, individual segala usia, bahkan untuk mereka yang masih belum tersentuh bank (*unbank*).

Bidang Usaha

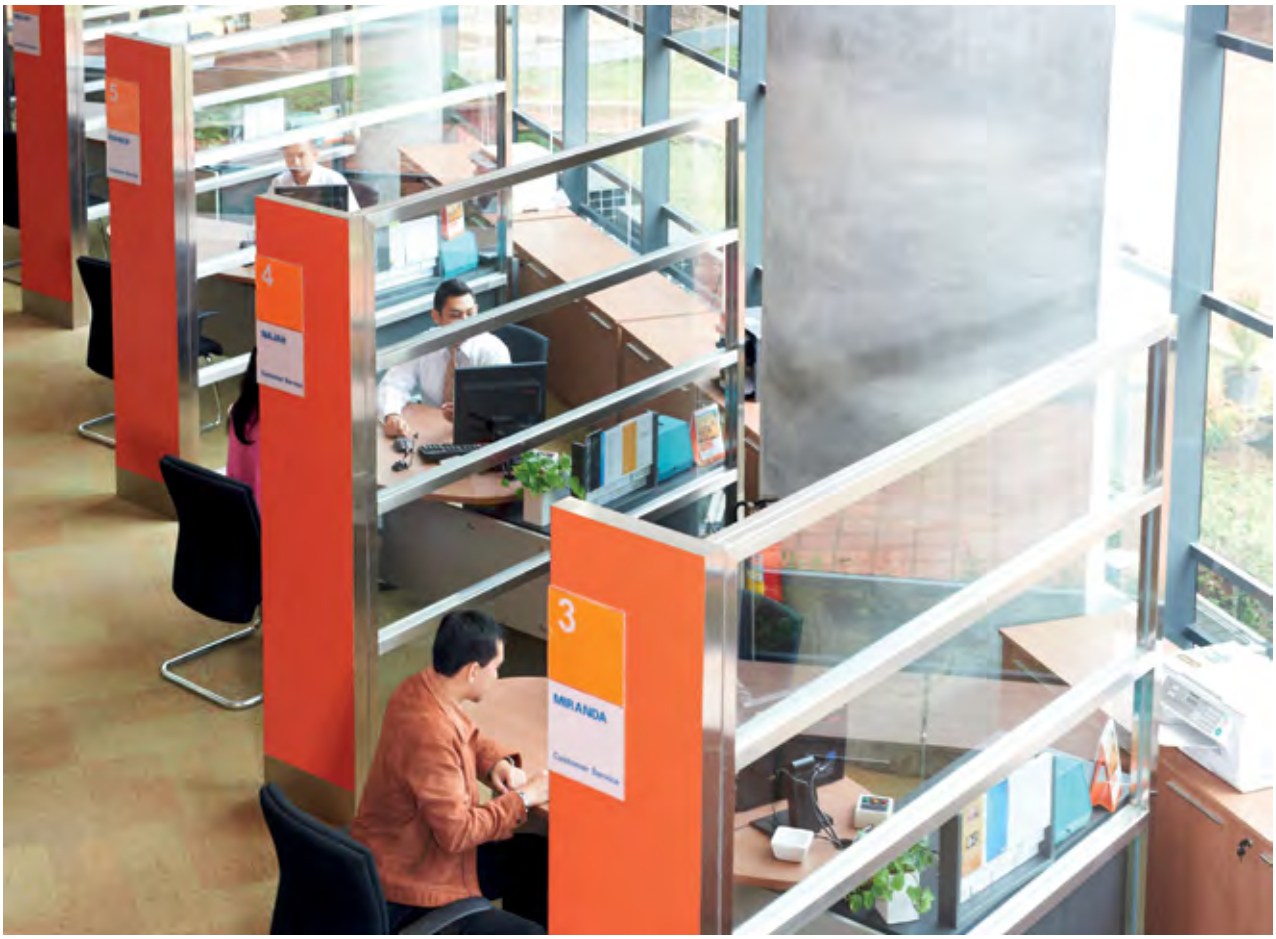

BNI menjalankan usaha dan kegiatannya di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35, tanggal 17 Maret 2015. Kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah (seperti wesel, surat pengakuan utang/kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan Negara, surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu, dan instrumen surat berharga lainnya).
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegiatan kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
16. Bertindak sebagai Pendiri Dana Pensiun.
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking, investment banking* lainnya.
18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Produk Dan Jasa

KONSUMER

SIMPANAN
- BNI Taplus
- BNI Taplus Muda
- BNI Tappa (Taplus Pegawai/Taplus Anggota)
- BNI Tapma (Taplus Mahasiswa)
- BNI Haji
- BNI Tapenas
- BNI Taplus Anak
- BNI Simpanan Pelajar
- Tabunganku
- BNI Giro
- BNI Dollar
- BNI Deposito
- BNI Duo

PINJAMAN
- BNI Griya
- BNI Griya Multiguna
- BNI Fleksi
- BNI Oto
- BNI Instan
- BNI Wirausaha
- BNI Kartu Tunai

KARTU KREDIT
- Kartu Kredit Reguler
  - BNI *Silver*
  - BNI *Gold*
- Kartu Kredit Premium
  - BNI *Style Titanium*
  - BNI Visa *Platinum Card*
  - BNI JCB *Platinum*
  - BNI Visa *Infinite*
- Kartu Kredit Corporate
  - BNI *Corporate Card Gold*
  - BNI *Corporate Card Platinum*
  - BNI *American Express Business Card*
- Kartu Kredit Affinity
  - BNI *Affinity* - Universitas
  - BNI *Affinity* - Ikatan Alumni
  - BNI *Affinity* - Organisasi
- Kartu Kredit *Co-Branding*
  - BNI-Chelsea *Card*
  - BNI-Garuda
  - BNI-LOTTE Mart *Card*
  - BNI-Bank Sumsel Babel *Card*
  - BNI-bank bjb *Card*
  - Kartu Kredit Ferrari *by* BNI
- Kartu Kredit Private Label
  - BNI *Travelling Card*
  - BNI *Gasoline Card*
  - BNI *Health Card*
  - BNI Kartu Tunai

KARTU DEBIT
- Kartu Debit Reguler
  - Kartu Debit *Silver*
  - Kartu Debit *Gold*
- Kartu Debit *Premium*
  - Kartu Debit *Platinum*
  - Kartu Debit – Chelsea
- Kartu Debit Co-Branding
  - Kartu Debit Garuda
  - Kartu Debit Ferrari by BNI
  - Kartu Debit LOTTE Mart Wholesale
  - Kartu Debit Co-Branding Multimart
  - Kartu Debit Co-Branding Indogrosir

E-BANKING
- BNI ATM Reguler
- BNI ATM Non Tunai
- BNI ATM Setoran Tunai
- BNI ATM *Drive Thru*
- BNI SMS *Banking*
- BNI *Internet Banking*
- BNI *Phone Banking*
- BNI *Mobile Banking*
- BNI Layanan Gerak
- BNI Debit *Online*
- *Tap Cash*
- Agen 46
- Unikqu
- EDC
- EDC Mini ATM

JASA-JASA
- Kiriman Uang Dalam Negeri (BNI TRANSFER)
- Kiriman Uang Internasional
- *Safe Deposit Box*
- BNI *Voucher* Multiguna
- Inkaso
- BNI Surat Keterangan Bank
- *Traveller's Cheque*
- Uang Kertas Asing
- *Electronic Data Capture* (EDC)

SIMPANAN PENSIUN
- BNI Simponi

BANCASSURANCE
- *In Branch and Telemarketing*
- Solusi Abadi Plus
- B-*Life Plan Multipro*
- B-*Life Cash Pro*
- Prima Proteksi
- Pro Maxima
- Pro Medika
- Blife Medplus
- Rencana Pintar
- Rencana Sehat

PRIORITY BANKING

LAYANAN EMERALD
- BNI Emerald Card
- BNI Infinite Card
- BNI Emerald Saving
- Layanan BNI Emerald

PRODUK INVESTASI
- BNI Supermarket Investment
- Supermarket Reksa Dana
  - Reksa Dana Pasar Uang
  - Reksa Dana Pendapatan Tetap
  - Reksa Dana Saham
  - Reksa Dana Campuran
  - Reksa Dana Terproteksi

PRODUK ASURANSI
- *In Branch & Telemarketing*
- Solusi Abadi Plus
- BNI *Life* Multi Pro
- BNI *Life Cash* Pro
- Prima Proteksi
- Pro Maxima
- Pro Medika
- Blife MedPlus
- Rencana Pintar
- Rencana Sehat

E-BANKING
- BNI ATM
- ATM *Drive Thru*
- SMS *Banking*
- *Internet Banking*
- *Phone Banking*
- Layanan Gerak
- *Mobile Banking*
- *Tapcash*
- Unikqu
- EDC
- EDC Mini ATM

BUSINESS BANKING

BNI *BUSINESS BANKING*
- *Local Corporate and Multinational Company 1*
- Local Corporate and Multinational Company 2
- *Transactional Banking Services*
  - BNI *Direct* (*Payment Management, Collection Management, Liquity Management, Information Management*)
  - *Supply Chain Financing*
  - *Custody and Securities Services*
- *Commercial and Small*
  - Kredit Modal Kerja (KMK)
  - Kredit Investasi (KI)
  - Garansi Bank (GB)
  - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
  - *Letter of Credit* (LC)
  - Kredit Usaha rakyat (KUR)
  - Kredit Program
- *Marketing Intelligence and Business Portfolio*

SEKTOR INDUSTRI
- Agribisnis
- Telekomunikasi
- Makanan dan Minuman
- Minyak Gas dan Pertambangan
- Industri Kimia
- Konstruksi
- Kelistrikan
- Perdagangan Besar dan Eceran

FUNDING
- BNI Giro Non-Perorangan
- Deposito Berjangka Perusahaan
- *Single Currency*
- *Dual Currency* (BNI duo)

LENDING
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Kredit *Supply Chain*
- Kredit kepada Lembaga Keuangan (KKLK)
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- *Two Step Loan*
- *Two Step Loan* – IEPC 2
- Kredit Beragun Deposito Berjangka
- BNI Wirausaha
- *Cash Collateral Credit*
- Kredit Ekspor
- Kredit Impor
- Kredit Koperasi Primer
- Kredit Sindikasi
- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
- Kredit Program Revitalisasi Perkebunan-Pola Kemitraan

SERVICES

Cash Management
- *Tranfer Management*
  - *Collection Management (Auto Collection, Pickup Services,* BNI *Virtual Account)*
  - *Payment Management (Bulk Payment, Payroll Management, BNI e-Tax)*
  - *Liquidity management*
- Sindikasi
  - *Arrangement*
  - keagenan
- Agen Fasilitas (*Facility Agent*)
- Agen Jaminan (*Security Agent*)
- Agen Penampungan (*Escrow Agent*)
- *Fund Services*
  - *Fund Accounting, Fund Administration,* Pengawasan Pelaporan dan Publikasi
  - *Core Banking* BNI
  - Agen Transfer (*Transfer Agency*)
- *Custody Service*
- Wali Amanat
- Garansi Bank
  - *Big Bond*/Jaminan Tender
  - *Advance Payment Bond*/Jaminan Uang Muka
  - *Performance Bond* (Garansi Bank Pelaksana/ *Performance Bond,* Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan/*Maintenance Bond*/*Retention Bond,* Garansi Bank Pembayaran)
  - *Custom Bond*
- Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

INTERNASIONAL

PRODUK TRADE FINANCE
- *Import LC Issuance*
- *Sight LC*
- *Usance LC*
- *Back to Back LC* (BBLC)
- *Transferable Letter of Credit*
- *Export LC Negotiation*
- *Inward Documentary Collection*
- *Outward Documentary Collection*
- *Shipping Guarantee*
- *Trust Receipt*
- *Advances Under Collection Bills*
- *Open Account Financing*
- *Bills Discounting*
- "UPAS" *LC Refinancing*
- *Standby Letters of Credit*

PRODUK PINJAMAN
- *Corporate Loan* (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi)
- Kredit *Term Loan*
- *Overdraft Facility*
- Pembiayaan *Trade*
- Kredit Sindikasi
- Pembiayaan Proyek
- *Discount Bills*
- *Loan on Bills*
- *Housing Loan*
- *Two Steps and Channeling Loan* kepada Perusahaan Lokal dari Indonesia

PRODUK JASA RITEL
- BNI *Current Account*
- BNI *Fixed Deposit*
- BNI SingPlus *Saving Account*
- BNI Simpanan Hong Kong Dollar
- BNI Giro Hong Kong Dollar & US Dollar
- *Demand Deposits*
- *Negotiable Deposits*
- *Remittance*
- *Hospital Guarantee*
- Bank BNI Singapore | MAS Electronic
- *Payment System* (MEPS)
- *Escrow Agent*
- *Safe Deposit Box*

PRODUK FINANCIAL INSTITUTION
- *Bank Guarantee based on Counter Guarantee*
- *Confirm* LC/SKBDN
- *Nostro Account*
- *Foreign Exchange*
- *Today, Tom, and Spot*
- *Forward Transaction*
- *Swap Transaction*
- Penempatan Dana
- *Money Market Account*
- *Deposit on Call*
- *Billateral Trade Financing*
- *Risk Participation and Forfaiting*
- *Custodian Services*
- *Bankers Acceptance*
- Derivatif
- *Interest Rate Swap*
- *Option*
- *Cross Currency Swap*
- *Bank Notes*
- *Plain Vanilla Option*
- Repo Obligasi/*Reverse Repo*

TRESURI
- *Foreign Exchange*
  - *Today, Tom, & Spot*
- *Forward Transaction*
- Penempatan Dana
  - *Money Market Account*
  - *Deposit on Call*
- Derivatif
  - *Interest Rate Swap*
  - *Option*
  - *Cross Currency Swap*
- Bank Notes
- *Plain Vanilla Option*
- Repo Obligasi/ *Reverse Repo*

Peta Wilayah Operasional

WILAYAH MEDAN
19 Kantor Cabang
52 Kantor Cabang Pembantu
45 Kantor Kas
1.010 ATM

WILAYAH BANJARMASIN
18 Kantor Cabang
62 Kantor Cabang Pembantu
58 Kantor Kas
1.312 ATM

WILAYAH PALEMBANG
15 Kantor Cabang
59 Kantor Cabang Pembantu
35 Kantor Kas
920 ATM

WILAYAH PADANG
13 Kantor Cabang
53 Kantor Cabang Pembantu
37 Kantor Kas
901 ATM

WILAYAH SEMARANG
11 Kantor Cabang
34 Kantor Cabang Pembantu
36 Kantor Kas
704 ATM

WILAYAH JAKARTA KEMAYORAN
8 Kantor Cabang
76 Kantor Cabang Pembantu
47 Kantor Kas
1.476 ATM

WILAYAH JAKARTA SENAYAN
7 Kantor Cabang
85 Kantor Cabang Pembantu
40 Kantor Kas
946 ATM

WILAYAH BANDUNG
15 Kantor Cabang
65 Kantor Cabang Pembantu
40 Kantor Kas
1.398 ATM

WILAYAH JAKARTA KOTA
6 Kantor Cabang
77 Kantor Cabang Pembantu
39 Kantor Kas
848 ATM

WILAYAH SURABAYA
11 Kantor Cabang
67 Kantor Cabang Pembantu
46 Kantor Kas
1.217 ATM

WILAYAH JAKARTA BSD
9 Kantor Cabang
67 Kantor Cabang Pembantu
43 Kantor Kas
1.768 ATM

WILAYAH YOGYAKARTA
15 Kantor Cabang
53 Kantor Cabang Pembantu
33 Kantor Kas
1.006 ATM

WILAYAH MALANG
14 Kantor Cabang
33 Kantor Cabang Pembantu
24 Kantor Kas
924 ATM

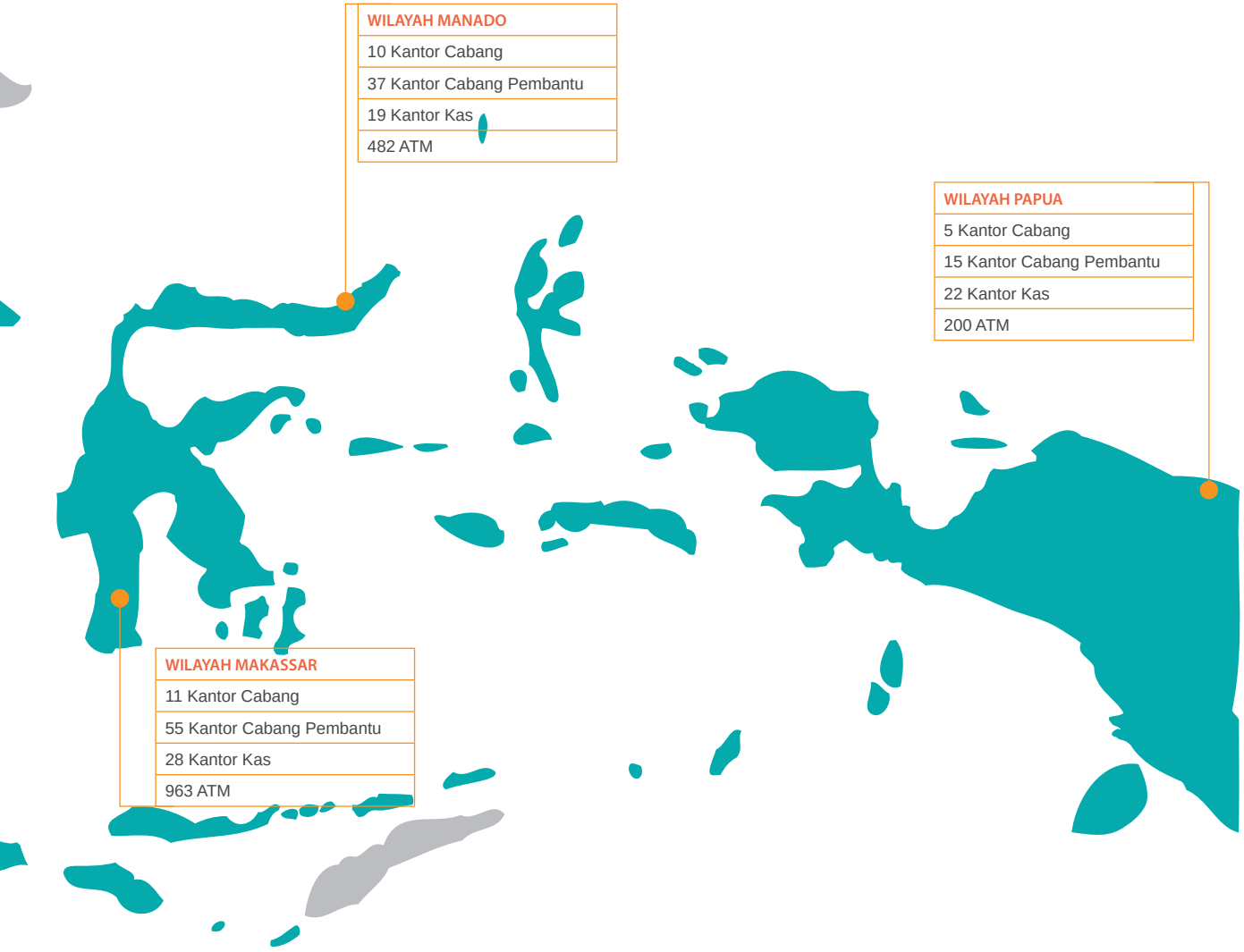

Jumlah Kantor BNI Berdasarkan 2014- 2016

Jenis Kantor	2016	2015	2014
Kantor Wilayah	17	15	15
Kantor Cabang	196	169	168
Kantor Cabang Pembantu	948	911	912
Kantor Kas	623	545	495
ATM	17.056	16.071	14.071
Layanan Gerak	96	81	78

Inovasi *Outlet* Dan ATM

BNI Emerald

BNI Emerald menawarkan produk dan layanan yang didesain khusus untuk setiap individu nasabah Emerald sehingga dapat memberikan kemudahan layanan di dalam negeri dan khususnya 6 cabang luar negeri seperti *hospital guarantee, education guarantee*, dan *travel services.*

BNI *Weekend Banking*

BNI memiliki 82 outlet *weekend banking* dan 26 outlet dengan fasilitas layanan Emerald yang tersebar di seluruh jaringan wilayah di Indonesia.

BNI Container Outlet

BNI *Container Outlet* atau *outlet* peti kemas ini dapat dengan mudah dipindahkan apabila diperlukan untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan akses bagi nasabah dalam bertransaksi, terutama di lokasi-lokasi dengan keterbatasan ketersediaan gedung atau lahan, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.

BNI Digital Branch

BNI mengusung konsep pelayanan secara digital dengan membangun BNI *e-branch* untuk memberikan kemandirian pelayanan kepada nasabah serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

ATM *Drive Thru*

ATM yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang banyak beraktivitas dengan menggunakan kendaraan roda empat yang membutuhkan BNI ATM di sela-sela aktivitas tanpa harus meninggalkan kendaraan.

ATM Sepeda Motor

ATM yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang banyak beraktivitas dengan menggunakan kendaraan roda dua yang membutuhkan BNI ATM di sela-sela aktivitas tanpa harus meninggalkan kendaraan.

ATM Disabilitas

ATM yang memberikan kemudahan bagi nasabah difabel (berkebutuhan khusus) yang menggunakan kursi roda dengan akses yang mudah dilalui, pintu otomatis, dan mesin ATM yang didesain

BNI Layanan Gerak

Untuk memudahkan nasabah yang berdomisili jauh dari Kantor Cabang BNI, BNI memiliki armada BNI Layanan Gerak yang berfungsi sebagai *One Stop Mini Banking*.

Struktur Organisasi

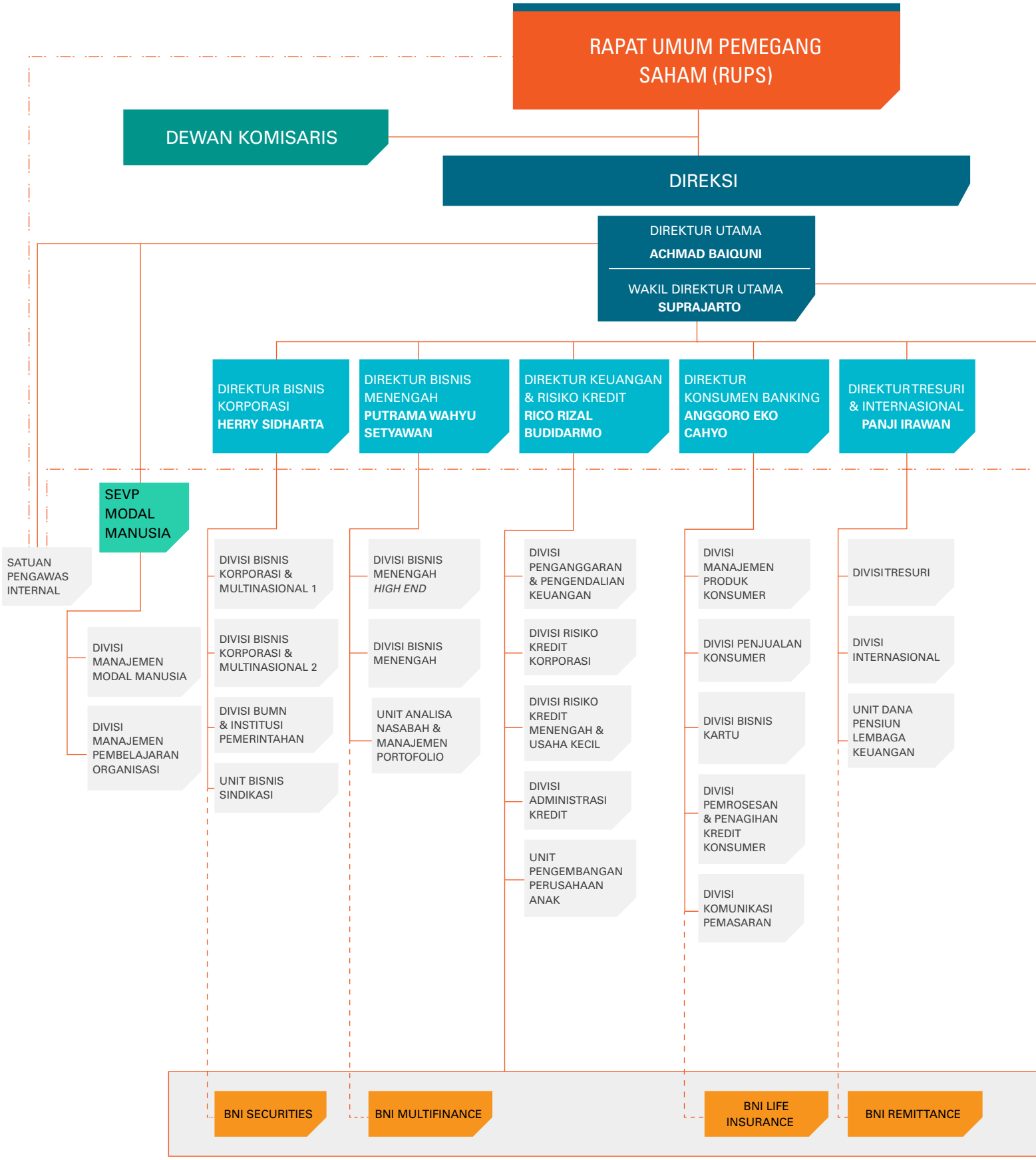

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor: KP/253/DIR/R
Tanggal : 01 Jun 2016
Lampiran: 1/6

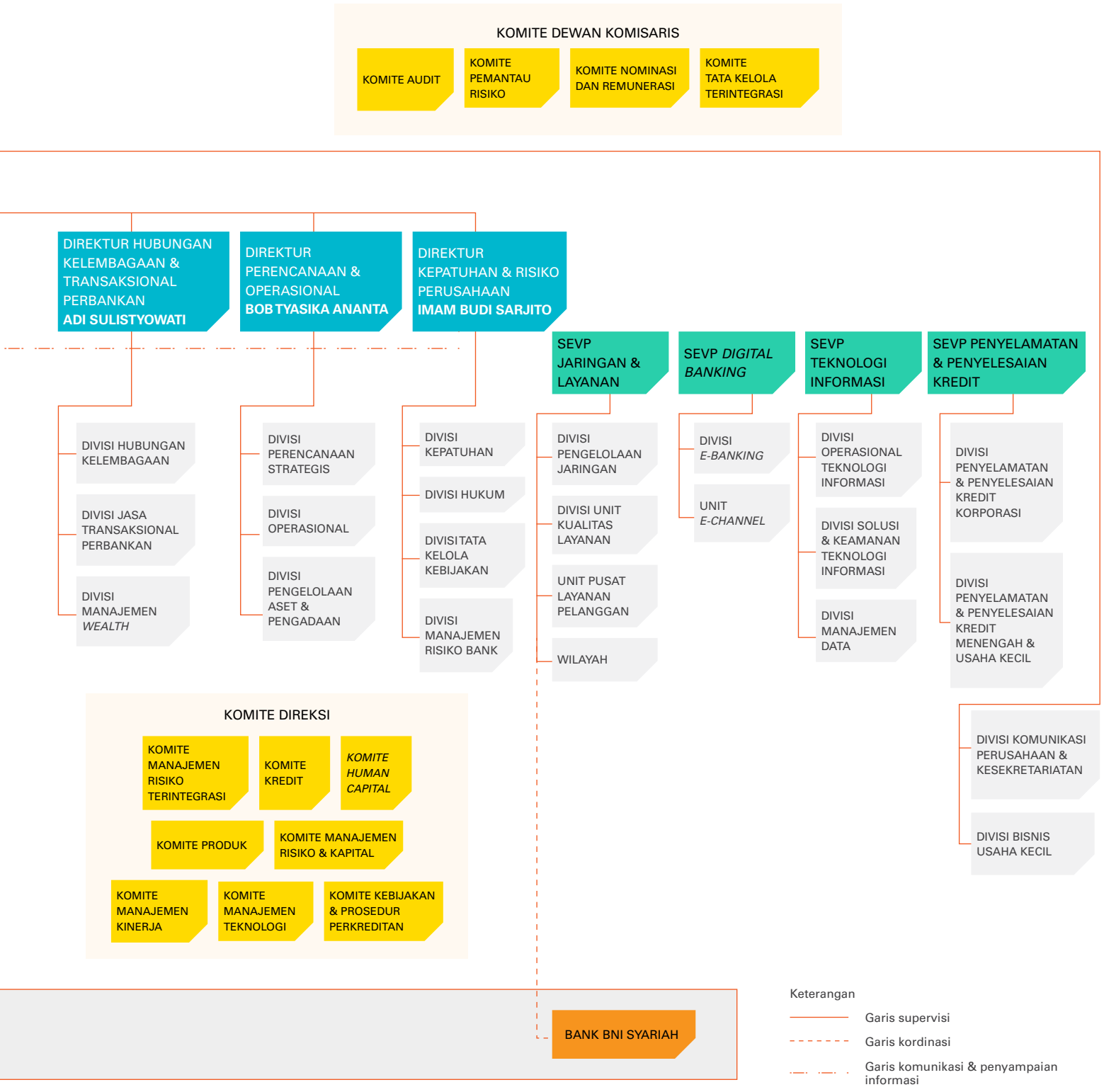

Visi, Misi, Dan Budaya Perusahaan

Visi dan Misi Bank telah ditetapkan dalam dokumen BNI *Corporate Plan* 2014-2018 Revisi I

VISI

"Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja"

PENJABARAN VISI

Unggul dalam Layanan

BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam melayani seluruh kebutuhan keuangan nasabah sebagai *lifetime financial partner*, dengan menyediakan total *financial solution*.

Unggul dalam Kinerja

BNI sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam kinerja keuangan, sehingga mampu memberikan *values* kepada nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri.

MISI

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
- Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

PENJABARAN MISI

Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.

- Menyediakan produk/jasa-jasa perbankan yang lengkap, terpadu, berkualitas, terpercaya, dan dapat diandalkan;
- Menyediakan informasi pelayanan perbankan yang lengkap;
- Memberikan kualitas pelayanan unggul meliputi keramahan, kecepatan, ketepatan, kenyamanan dan keamanan;
- Keluwesan dan kecepatan yang maksimal dalam mengambil keputusan pada saat negosiasi;
- Bersifat tanggap dan akomodatif terhadap kritik dan saran nasabah;
- Secara proaktif melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan nasabah akan kualitas produk/jasa yang ditawarkan BNI.

Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor

- Pencapaian laba (profitabilitas) usaha maksimal;
- Pertumbuhan yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (*sustainable growth*);
- Bank yang sehat;
- Pengendalian biaya (*cost effectiveness*).

Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi

- Pemberian kesempatan yang sama dan luas bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepastian jenjang karir;
- Pemberian imbalan dan fasilitas kesejahteraan yang bersaing dengan standar pasar;
- Menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman, nyaman, harmonis sehingga menunjang sasaran peningkatan produktivitas.

Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas

- Aktif melayani kebutuhan perbankan segenap lapisan masyarakat;
- Aktif mencari dan memasuki bisnis baru sesuai dengan undang-undang;
- Aktif memberikan kesempatan program mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Aktif bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan operasi BNI;
- Aktif meningkatkan kualitas lingkungan yang sejalan dengan pengembangan bisnis

Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri

- Pelaksanaan *risk management* yang terpadu dengan mengacu kepada Basel III;
- Mengakomodasi *whistle blower* bagi kepentingan perusahaan;
- *Senior Leadership* aktif berkomunikasi dengan *workforce* dan menjadi *role model*;
- Aktif meng-*update* ketentuan, peraturan, serta melaksanakannya secara disiplin dan tersistem.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Kerja BNI "PRINSIP 46" merupakan tuntunan perilaku Insan BNI.

Adapun penjelasan dari budaya kerja "PRINSIP 46" adalah sebagai berikut.

4 NILAI BUDAYA KERJA BNI	6 PERILAKU UTAMA INSAN BNI
Profesionalisme	• Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
Integritas	• Jujur, Tulus dan Ikhlas • Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
Orientasi Pelanggan	• Memberikan Layanan Terbaik Melaui Kemitraan yang Strategis
Perbaikan Tiada Henti	• Senantiasa Melakukan Penyempurnaan • Kreatif dan Inovatif

Adapun arti dari Nilai Budaya Perusahaan adalah sebagai berikut.

- **PROFESIONALISME**
  Memiliki kompetensi handal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik.

- **INTEGRITAS**
  Berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki.

- **ORIENTASI PELANGGAN**
  Senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan yang sinergis.

- **PERBAIKAN TIADA HENTI**
  Senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkatkan layanan dan kinerja yang melampaui harapan Pelanggan.

Profil Dewan Komisaris

HARTADI A. SARWONO
(Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 10 Agustus 1952, saat ini berusia 64 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1979), gelar *Master of Arts* di bidang *Macroeconomics*, University of Oregon, USA (1985), dan gelar *Doctor of Philosophy* di bidang *Monetary Theory & Policy*, University of Oregon, USA (1989). Aktif mengikuti Pelatihan diantaranya *Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry* yang diadakan oleh Banker Association for Risk Management.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia selama dua periode (2003-2013), Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo (2003), dan Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (2000-2003). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak 2013.

Diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan sejak 12 Januari 2016, berdasarkan akta keputusan RUPS LB nomor 01 tanggal 12 Januari 2016 dan mendapatkan persetujuan OJK tanggal 4 Mei 2016. Mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada 4 Mei 2016 dan pada tanggal 12 Mei 2016 merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

PRADJOTO
(Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 7 Maret 1953, saat ini berusia 63 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Hukum, Universitas Indonesia (1981), dan gelar *Master of Art* dari Jurusan *Economy*, University of Kyoto (1988). Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry* yang diadakan oleh Banker Association for Risk Management.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain sebagai *Banking Expert* Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2013), *Supervisor Board* of Perbanas (2009-2016), Senior Advisor Bank Internasional Indonesia (2009-2011), Ketua Dewan Etik Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) (2006-2009), dan Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (2005-2015). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chairman of Supervisory Board* of Perbanas (2016-sekarang) dan *Board of Advisor* Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2006-sekarang), Penasehat Hukum Dewan Gubernur Bank Indonesia (2006-sekarang).

Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan sejak 17 Maret 2015 berdasarkan akta RUPS nomor 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2015. Pada tanggal 22 Mei 2015 mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan pada tanggal 25 Juni 2015 sebagai Ketua Tata Kelola Terintegrasi.

ANNY RATNAWATI
(Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir pada 24 Februari 1962, saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar Magister Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1989), dan Doktor Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1996). Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry* yang diadakan oleh Banker Association for Risk Management serta Seminar dan *Executive Roundtable*, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) (2012–2014), Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan (2012-2014), Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2010-2014), dan Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI (2008–2011). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dosen Sekolah Bisnis pada Institut Pertanian Bogor.

Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan akta RUPS nomor 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 8 Juni 2015. Pada tanggal 8 Juni 2015 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tanggal 24 Maret 2016 mendapat penugasan khusus sebagai Ketua Komite Audit.

BISTOK SIMBOLON
(Komisaris)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 13 Desember 1956, saat ini berusia 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Hukum, Universitas Sumatera Utara (1984) dan gelar Magister Hukum dari Jurusan Ekonomi, Universitas Indonesia (2004).

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain Wakil Sekretaris Kabinet (2015-2017), Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2011-2015), Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet (2006-2011) dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Kabinet (2000-2006).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan akta keputusan RUPS LB nomor 01 tanggal 12 Januari 2016 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 Mei 2016. Pada tanggal 10 Mei 2016 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

JONI SWASTANTO
(Komisaris)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 13 Juni 1956, saat ini berusia 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1981), gelar Sarjana (S2) Jurusan Ekonomi dari Colorado State University, USA (1985) dan gelar Sarjana (S3) Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007). Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar Pengendalian Gratifikasi dan Seminar *Revisit Enterprise Risk Management and Learning Best Practices of Credit Risk Management.*

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB, Otoritas Jasa Keuangan (Juni 2015-2016), Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (2013-2015), Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (2013), Kepala Perwakilan Semarang, Bank Indonesia (2011-2013), Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (2008-2011) dan Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, Bank Indonesia (2008).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 10 Maret 2016 berdasarkan akta RUPS nomor 8 tanggal 10 Maret 2016 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 20 April 2016 mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PATANIARI SIAHAAN
(Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berdimisili di Jakarta. Lahir pada 30 Juli 1946, saat ini berusia 70 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti (1978) dan Sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Transportasi Universitas Krisnadwipayana (2006), Magister Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti (2007), dan Doktor Ilmu Hukum dari Hukum, Universitas Trisakti (2011). Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia serta *Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry*.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting diantaranya sebagai Ketua Tim Sosialisasi Putusan MPR RI Bidang Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (2005-2009), Pimpinan Badan Legislasi DPR RI (2004-2009), dan berbagai jabatan Ketua dan Anggota pada DPR/MPR RI (1999-2009). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI (2015-2019) dan Dewan Redaksi Jurnal Hukum Prioris (2013-sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 17 Maret berdasarkan akta RUPS nomor 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Juni 2015. Pada tanggal yang sama, mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016 dialihtugaskan menjadi Komisaris Independen.

Profil Dewan Komisaris

REVRISOND BASWIR
(Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Yogyakarta. Lahir pada 28 Februari 1958, saat ini berusia 58 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1983), *Master of Business Administration* dari Western Michigan University, Amerika Serikat (1991), dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya (2011). Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry* yang diadakan oleh Banker Association for Risk Management.

Beliau pernah menduduki jabatan penting diantaranya sebagai Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XI, Surabaya (2014-2015), Komisaris PTPN VIII, Bandung (2013-2014), Anggota Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN (2006-2011 dan 2015-2016), Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (2006-2008 dan 2013-2015), Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XIII, Pontianak (2008-2013), Staf Ahli DPD RI (2005-2006) dan Staf Ahli Kementrian HAM RI (2000). Saat ini juga menjabat sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (1983-sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan akta RUPS nomor 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 24 Juni 2015. Pada tanggal yang sama mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam RUPS tanggal 10 Maret 2016 dialihtugaskan menjadi Komisaris Independen.

WAHYU KUNCORO
(Komisaris)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 31 Oktober 1969, saat ini berusia 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Pertanian, Universitas Sebelas Maret (1993), gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Ekonomi, Universitas YAI (2003), dan gelar Sarjana (S2) dari Jurusan Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2005).

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting diantaranya sebagai Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Angkasa Pura II (Persero) (2013-2016), Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN (2015-2016), Asisten Deputi Perbankan dan Asuransi, Kementerian BUMN (2014-2015), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2013-2014), Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2012-2013), Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IA, Kementerian BUMN (2012-2013), Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIA, Kementerian BUMN (2010-2012), Komisaris, PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012) dan Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIB, Kementerian BUMN (2006-2010). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi di Kementerian BUMN (2016-sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan akta keputusan RUPS nomor 8 tanggal 10 Maret 2016.

Profil Direksi

ACHMAD BAIQUNI
(Direktur Utama)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir pada 1 Januari 1957, saat ini berusia 60 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1982 dan memperoleh gelar S2 di bidang *Business Management* dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina pada tahun 1992. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Indonesia *Leadership Forum*, Seminar APPU, *Workshop on Enchanting Technical Cooperation among Members Countris through Reverse Linkage*, *FGD Challenges to Global Economy* dan lain-lain.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di BNI, antara lain sebagai Direktur Konsumer (2003-2006), Direktur Korporasi (2006-2008), Direktur Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Syariah (2008-2010). Selain itu sebagai Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2015).
Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 17 Maret 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No 67 tanggal 21 April 2015.

SUPRAJARTO
(Wakil Direktur Utama)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir di Yogyakarta pada 28 Agustus 1956, saat ini berusia 61 tahun.

Meraih gelar Sarjana (S1) di bidang Ekonomi dari UPN Yogyakarta pada tahun 1982, gelar Magister (S2) di bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2001, dan gelar Doktor (S3) di bidang Manajemen Bisnis dari Universitas yang sama pada tahun 2014. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Retail Banking Innovation* Seminar dan Anti Pencucian Uang (APU)/PPATK, 2016

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk antara lain sebagai *Corporate Secretary* (2005), Pemimpin Wilayah (2006), dan terakhir sebagai Direktur Bidang Jaringan & Layanan (2007-2015).

Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan diangkat sejak 17 Maret 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 67 tahun 2015.

RICO RIZAL BUDIDARMO
(Direktur Keuangan dan Risiko Kredit)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 19 Juni 1963, saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1987 dan memperoleh gelar MBA dan MIS di bidang *Business* dan *Finance* dari Stern Business School, New York University pada tahun 1996, kemudian memperoleh gelar Doktor di bidang Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Future of Asia's Finance: Financing for development* 2015 (September 2015), "Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Di Indonesia" (Januari 2015), Sertifikasi *Refreshment* – Manajemen Resiko Perbankan Level 5 (Mei 2014), *Intensive Wealth Management and Risk Management Refreshment Program For Executive, Europe Class* 2014 (Mei 2014)

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting antara lain sebagai GM/EVP *Treasury* di BRI pada tahun 2013-2014, Kemudian menjadi Direktur *Risk and Compliance* tahun 2014-2015 di BTN. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Risiko Kredit di BNI tahun 2015 – sekarang.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak Selasa, 21 April 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 67 tahun 2015.

HERRY SIDHARTA
(Direktur Bisnis Korporasi)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 23 April 1957, saat ini berusia 60 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1982 dan memperoleh gelar di bidang *Master of Business Administration* dari Rensselaer Polytechnic Institute, New York, Amerika Serikat pada tahun 1995. Aktif mengikuti seminar diantaranya Seminar Anti Pencucian Uang dengan penyelenggara BNI dan PPATK dan Kompas CEO Forum.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di BNI sebagai Pemimpin Divisi Korporasi (2008-2009), Pemimpin Divisi Usaha Menengah (2009-2010), Pemimpin Divisi Usaha Kecil (2010). Beliua juga pernah menduduki berbagai jabatan penting di Perum Jamkrindo antara lain sebagai Direktur SDM dan Umum sejak Maret 2014 – Maret 2015, Direktur Operasi, Perum Jamkrindo sejak Januari 2013 – Maret 2014. Juga sebagai Direktur Keuangan, Perum Jamkrindo sejak Maret 2011 – Januari 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 21 April 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 67 tahun 2015.

ADI SULISTYOWATI

(Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 11 Juni 1967 saat ini berusia 50 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1993. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar Anti Pencucian Uang dan Kompas CEO Forum.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di BNI, antara lain sebagai Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan pada tahun 2010-2012, dan Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan pada tahun 2012 – 2015.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 27 Mei 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS N0 53 tahun 2015.

BOB TYASIKA ANANTA

(Direktur Perencanaan dan Operasional)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 26 Mei 1963, saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1986 dan memperoleh gelar di bidang *Finance* dari University of Oregon pada tahun 1986. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya *Loan Restructure Training*, Seminar Anti Pencucian Uang (APU), *Global and Indonesia Macroeconomics Trend and Forecast*, Penyegaran Komisaris dan Direksi BUMN, dan lain-lain

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di BNI antara lain sebagai *General Manager* Kantor Cabang Hong Kong (2008-2010), Pemimpin Divisi Internasional (Agustus 2010-2011), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (Agustus 2011-Maret 2015).

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak hari Selasa, 21 April 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 67 tahun 2015.

ANGGORO EKO CAHYO
(Direktur Konsumer *Banking*)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Tangerang Lahir pada 7 Januari 1969, saat ini berusia 48 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik & Manajemen Industri dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar *Sinergy* BUMN, Seminar Anti Pencucian Uang (APU), Seminar Persiapan Menyambut Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan penggunaan PIN 6 Digit untuk kartu ATM dan/atau kartu Debet, Indonesia *Business and Development* EXPO 2016 Conference dan Seminar, dan lain-lain.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kota (2010-2011), Pemimpin Wilayah Jakarta BSD (2009-2010), Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan (2011-2012), Pemimpin Divisi *Human Capital* (2012-2015) serta sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia periode (2012 –2015). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) periode tahun 2016 – tahun 2019.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak hari Selasa 21 April 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No 67 tahun 2016.

IMAM BUDI SARJITO
(Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusaahan)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta lahir pada 16 Maret 1959, saat ini berusia 58 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Ph.D. *Economics* di bidang ekonomi dari The Claremont Graduate School California, USA pada tahun 1995. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar APU dan PPT.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di BNI antara lain sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategi (2008-2011), Pemimpin Divisi *Enterprise Risk Management* (2011-2015) dan Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015).

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 2015 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 67 tahun 2015

PANJI IRAWAN
(Direktur Tresuri dan Internasional)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 16 Oktober 1965, saat ini berusia 52 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang *Agricultural & Resource Economic* dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1989. Aktif mengikuti pelatihan antara lain Seminar Anti Pencucian Uang (APU), *Workshop on Enhancing Technical Corporation among Member Countries through Reverse Linkage: "Together We Overcome Our Challenges", Indonesia Business & Development* (IBD) Expo 2016, Seminar BI "Pengembangan Instumen Pasar Uang Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*)", dan lain-lain.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting, antara lain sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas tahun 2011–2016. Menjabat sebagai *Executive Vice President Treasury Group* Bank Mandiri (Persero) Tbk, tahun 2010–2016. Menjabat sebagai Ketua *Association Cambiste Internationale (ACI)* Indonesia tahun 2010 - 2014. Menjabat sebagai *Chairman Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)* tahun 2014 - 2016.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 12 Januari 2016 berdasarkan akta keputusan RUPS No. 01 tahun 2016.

PUTRAMA WAHJU SETYAWAN
(Direktur Bisnis Menegah)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bekasi. Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 28 November 1969, saat ini berusia 48 tahun.

Meraih gelar Sarjana di bidang Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994 dan memperoleh gelar di bidang *Magister Management Accounting* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996 S2. Aktif mengikuti pelatihan diantaranya Seminar Anti Pencucian Uang (APU), Sosialisasi *Tax Amnesty*, Memperkuat Fundamental Perekonomian Indonesia dan KOMPAS CEO Forum.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, antara lain sebagai Pemimpin Divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit korporasi di Tahun 2011, Kemudian sebagai Pemimpin Divisi BUMN dan institusi pemerintah di Tahun 2014 kemudian sebagai Pemimpin Divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit komersial dan usaha kecil di Tahun 2015 dan kemudian menjabat sebagai Senior Eksekutif *Vice President* Bisnis Menengah di Tahun 2016.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak 10 Maret 2016 dan telah dikukuhkan dalam akta keputusan RUPS No. 17 Tanggal 25 Juli 2016.

Profil Pejabat Eksekutif

ALEX DENNI
SEVP Modal Manusia

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 27 Desember 1968, saat ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Agro Industri dari Universitas Pertanian Bogor pada tahun 1990, memperoleh gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1997, dan memperoleh gelar di bidang Manajemen Agro Industri dan Fokus Penelitian di *Human Capital* dari Universitas Pertanian Bogor pada tahun 2011 (s3). Menjabat sebagai SEVP Modal Manusia sejak 01 Juni 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No DIR/059 tanggal 25 Mei 2016.

DADANG SETIABUDI
SEVP Teknologi Informasi

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 23 Juni 1962 saat ini berusia 54 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tahun 1987 dan memperoleh gelar S2 di bidang Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1999. Menjabat sebagai SEVP Teknologi Informasi sejak 24 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No KP/241/DIR/R tahun 2016.

Pada Tahun 2017 terjadi pergantian Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan SK Direksi No. KP/482/DIR/R tahun 2016

ANANG BASUKI
Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Anang Basuki, CIA telah berpengalaman dalam bidang pengawasan (internal audit) mengingat awal karir dimulai sebagai auditor di SPI dan semakin ditunjang dengan perolehan gelar sertifikasi di bidang internal audit (CIA), di samping itu pengalaman operasional perbankan juga telah dimiliki sebagai Pemimpin Cabang dan CEO Region. Posisi yang pernah dijabat oleh Anang Basuki, CIA adalah CEO Region Wilayah Padang, Pemimpin Cabang Malang dan Pemimpin Cabang Mojokerto.

MUHAMMAD GUNAWAN PUTRA
Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 6 Oktober 1970, saat ini berusia 46 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1995, Register Akuntan pada tahun 1996, memperoleh gelar Master di bidang *Business Administration* dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2009, dan memperoleh *Chartered Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2015. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal sejak 4 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No KP/482/DIR/R tahun 2016.

Pada Tahun 2016 terjadi pergantian Sekretaris Perusahaan BNI berdasarkan SK Direksi No. KP/161/DIR/R tahun 2016

SUHARDI PETRUS
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Akuntansi, Universitas Sebelas Maret (1992) dan S2 Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Wijaya Putra (2000).

Memimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan BNI mulai 27 November 2015 sampai 24 April 2016.

KIRYANTO
Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Lahir pada 12/10/1964, saat ini berusia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989 dan memperoleh gelar di bidang Finance dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 (S2). Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/161/DIR/R tanggal 18 April 2016.

Profil Karyawan

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING LEVEL JABATAN

Berdasarkan Level Jabatan

Grade	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
≥ VP	167	42	209	139	40	179	111	34	145	108	32	140	91	30	121
AVP	680	254	934	677	233	910	693	216	909	639	186	825	629	177	806
MGR	1.684	1.095	2.779	1.594	1.032	2.626	1.500	936	2.436	1.486	839	2.325	1.442	758	2.200
AMGR	3.989	3.784	7.773	4.031	3.754	7.785	4.143	3.848	7.991	4.243	3.919	8.162	3.769	3.320	7.089
ASST	5.834	9.620	15.454	5.340	8.957	14.297	5.277	8.668	13.945	5.120	8.360	13.480	4.982	8.274	13.256
PGD	1.035	0	1.035	1.078	0	1.078	1.110	0	1.110	1.168	0	1.168	1.388	1	1.389
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
≥ VP	209	0,7%	179	0,7%	16,8%
AVP	934	3,3%	910	3,4%	2,6%
MGR	2.779	9,9%	2.626	9,8%	5,8%
AMGR	7.773	27,6%	7.785	29%	-0,1%
ASST	15.454	54,8%	14.297	53,2%	8,1%
PGD	1.035	3,7%	1.078	4,0%	-4%
TOTAL	28.184	100,0%	26.875	100,0%	4,9%

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Strata 3	3	3	6	3	3	6	4	1	5	4	1	5	5	1	6
Strata 2	1.497	920	2.417	1.509	867	2.376	1.514	858	2.372	1.514	858	2.372	1.546	823	2.369
Strata 1	9.793	11.559	21.352	9.437	11.314	20.751	9.241	10.945	20.186	9.241	10.945	20.186	8.696	9.701	18.397
Akademi	1.190	2.286	3.476	1.140	1.796	2.936	1.233	1.844	3.077	1.233	1.844	3.077	1.102	1.946	3.048
SD-SMA	905	27	933	770	36	806	842	54	896	842	54	896	952	89	1041
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
Strata 3	6	0.02%	6	0,02%	0,00%
Strata 2	2.417	8.58%	2.376	8,84%	1,73%
Strata 1	21.352	75.76%	20.751	77,21%	2,90%
Akademi	3.476	12.33%	2.936	10,92%	18,39%
SD-SMA	933	3.31%	806	3,00%	15,76%
TOTAL	28.184	100.00%	26.875	100,00%	4,87%

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KARYAWAN

Berdasarkan Status Karyawan

Status Karyawan	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tetap	1.1775	12.495	24.270	11.647	12.173	23.820	11.500	11.689	23.189	11.352	11.097	22.449	10.273	8.908	19.181
Kontrak	1.614	2.300	3.914	1.212	1.843	3.055	1.334	2.013	3.347	1.412	2.239	3.651	2.028	3.652	5.680
TOTAL		28.184			26.875			26.536			26.100			24.861	

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
Tetap	13.389	47,51%	12.859	47,85%	4,12%
Kontrak	14.795	52,49%	14.016	52,15%	5,56%
TOTAL	28.184	100,00%	26.875	100,00%	4,87%

JUMLAH KARYAWAN BEDASARKAN USIA

Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
>50 Tahun	578	201	779	598	205	803	783	266	1049	841	277	1.118	703	205	908
>45-50 Tahun	1.931	1.108	3.039	1.643	841	2.484	1.628	829	2.457	1.224	536	1.760	770	297	1.067
>40-45 Tahun	1.512	1.287	2.799	1.634	1.420	3.054	1.694	1.459	3.153	1.944	1.538	3.482	2.294	1.483	3.777
>35-40 Tahun	2.640	2.462	5.102	2.760	2.320	5.080	2.805	2.379	5.184	2.599	2.069	4.668	1.675	1.418	3.093

Usia	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
>30-35 Tahun	1.449	1.509	2.958	1.281	1.346	2.627	1.325	1.436	2.761	1.581	1.810	3.391	2.626	2.711	5.337
>25-30 Tahun	3.897	5.716	9.613	3.785	5.570	9.355	3.805	5.727	9.532	3.455	4.943	8.398	2.140	2.733	4.873
≤ 25 Tahun	1.382	2.512	3.894	1.158	2.314	3.472	794	1.606	2.400	1.120	2.163	3.283	2.093	3.713	5.806
TOTAL	28.184			26.875			26.536			26.100			24.861		

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
>50 Tahun	779	2,76%	979	3,64%	-20,43%
>45-50 Tahun	3.039	10,78%	3.079	11,46%	-1,30%
>40-45 Tahun	2.799	9,93%	2.860	10,64%	-2,13%
>35-40 Tahun	5.102	18,10%	5.262	19,58%	-3,04%
>30-35 Tahun	2.958	10,50%	3.000	11,16%	-1,40%
>25-30 Tahun	9.613	34,11%	9.625	35,81%	-0,12%
≤ 25 Tahun	3.894	13,82%	2.070	7,70%	88,12%
TOTAL	28.184	100,00%	26.875	100,00%	4,87%

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	2015	2014	2013	2012
Pria	13.389	12.859	12.834	12764	12301
Wanita	14.795	14.016	13.702	13336	12560
TOTAL	28.184	26.875	26.536	26100	24861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
Pria	13.389	47,51%	12.859	47,85%	4,12%
Wanita	14.795	52,49%	14.016	52,15%	5,56%

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENERASI

Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Generasi	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Baby Boomer	567	198	765	722	257	979	913	323	1.236	1.108	371	1.479	1.146	359	1.505
Gen X	6.291	5.068	11.359	6.460	5.215	11.675	6.606	5.378	11.984	6.691	5.506	12.197	6.690	5.479	12.169
Gen Y	6.531	9.529	16.060	5.677	8.544	14.221	5.315	8.001	13.316	4.965	7.459	12.424	4.465	6.722	11.187
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Generasi	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
Baby Boomer	765	2,71%	979	3,64%	(21,86%)
Gen X	11.359	40,30%	11.675	43,44%	(2,71%)
Gen Y	16.060	56,98%	14.221	52,92%	12,93%
TOTAL	28.184	100,00%	26.875	100,00%	4,87%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka menjawab tantangan persaingan industri perbankan yang semakin ketat, BNI memahami bahwa kunci sukses yang paling utama adalah aspek *human capital*. Sehingga memiliki *human capital* dengan kompetensi terbaik dan handal, serta bagaimana pengembangannya secara berkesinambungan menjadi awal transformasi BNI *Organizational Learning* menjadi BNI *Corporate University*.

Keseriusan BNI dalam meningkatkan kapabilitas pegawai di bidang perkreditan ditunjukkan dengan konsistensi pemberian program sertifikasi, *Training for Trainer* (TFT), disertai penyediaan *e-Learning Mandatory Core Credit Skill* sepanjang tahun 2016. Program sertifikasi profesi juga diberikan BNI sesuai kebutuhan bisnis dan pegawai, dengan tambahan tutorial program yang diselenggarakan baik *in-class* maupun *e-learning*. Program sertifikasi yang diikuti antara lain *Associate Wealth Management Certification*, *Certificate for Specialists in Demand Guarantees*, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Sertifikasi Manajemen Risiko, *Certificate in International Trade and Finance*, *Certificate Documentary Credit Specialists*, Sertifikasi AAJI, serta Sertifikasi Kepatuhan Perbankan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selama tahun 2016, BNI telah melatih sebanyak 99,76% pegawainya atau 28.311 pegawai (27.544 pegawai aktif dan 767 pegawai yang telah non aktif), dengan jumlah partisipasi pelatihan sebesar 179.914 atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 6,34 kali.

Jumlah Karyawan (dalam orang)	Jumlah Jam Training (dalam jam)	*Training Hours per Employee*	Jumlah Partisipan Training	Jumlah Karyawan yang Terlatih (dalam satuan orang)
28.378	1.740.788	61,34	179.914	28.311

Realisasi Pembelajaran 2016 Berdasarkan Model Pembelajaran dan Pengembangan 70:20:10

Metode Pengembangan		∑ Kelas	∑ Partisipasi
Experiential Learning "70"	*On the Job Training* (OJT)	72	2.460
	In Service Training (IST)	72	2.460
	Short Overseas Assignment	1	4
Social Learning "20"	*Coaching*	58	1.639
	Mentoring	165	5.018
	Role Play	193	6.000
Formal Learning "10"	*In-Class Learning*	1.130	41.747
	e-Learning	43	136.021
	Workshop/Seminar	119	935
	Sertifikasi	64	1.200
	Konferensi/Kongres	5	11

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2016 adalah sebesar Rp214.996,57 juta (86,34% dari anggaran setahun), dan mengalami kenaikan 3,75% dibanding 2015. Indikator kenaikan didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebesar 179.914 atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 6,34 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2016 mencapai Rp7,59 juta per pegawai.

Uraian	2016 (dalam Juta Rp)	2015 (dalam Juta Rp)	Peningkatan (dalam Juta Rp)	Peningkatan (dalam %)
Pendidikan dan Pelatihan	214.996.57	207.229.04	7.767.53	3,75%

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham BNI Per Desember 2016

No.	Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1	Pemerintah	11.189.193.875	60,0%
2	Publik:		
	• Perorangan Indonesia	323.254.850	1,7%
	• Koperasi	742.429	0,0%
	• Yayasan	162.629.127	0,9%
	• Dana Pensiun	101.189.813	0,5%
	• Asuransi	361.205.395	1,9%
	• Bank	43	0,0%
	• Perseroan Terbatas	560.729.757	3,0%
	• Badan Usaha Lain	5.298	0,0%
	• Reksadana	450.422.330	2,4%
	• Perorangan Asing	4.098.418	0,0%
	• Badan Usaha Asing	5.492.283.541	29,4%
	Jumlah	18.648.656.458	100,0 %

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BNI Per Desember 2016

No.	Nama Investor	Alamat	Status	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN BUMN, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13, JAKARTA 10110	Negara Republik Indonesia	11.189.193.875	60,00%
2.	PERSEROAN TERBATAS BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT	GEDUNG JAMSOSTEK. JL JEND. GATOT SUBROTO NO 79, JAKARTA SELATAN	Perseroan Terbatas	454.055.368	2,43%
3.	BNYMSANV RE BNYMILLUX RE RE MILLUX RE BLK GLBFDS-2049334050	2-4 RUE EUGENE RUPPERT,L-2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG	Badan Usaha Asing	305.565.421	1,64%
4.	JPMCB NA RE-SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY	PO BOX 2992, RIYADH 11169, SAUDI ARABIA	Badan Usaha Asing	249.230.013	1,34%
5.	BNYM LUX S/A EASTSPRING INVESTMENTS-2040084086	46 RUE MONTOYER B-1000 BRUSSELS, BELGIUM	Badan Usaha Asing	207.569.536	1,11%
6.	HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE CO LTD	LAURENCE POUNTNEY HILL, LONDON, EC4R 0HH	Badan Usaha Asing	170.834.100	0,92%
7.	YKP BNI FOR PROGRAM LTI BNI	JL LAUSER NO 73, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	Yayasan	150.537.500	0,81%

No.	Nama Investor	Alamat	Status	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
8.	SSB AEM1 S/A TMTB OF JP,LTD.ATO EATS INV AS OHDEMF-2144613498	11-3, HAMAMATSUCHO 2-CHOME MINATO-KU,TOKYO 105-8579 JAPAN	Badan Usaha Asing	144.349.400	0,77%
9.	BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDEN TFD BOARD-2039844119	EPF BUILDING, JALAN RAJA LAUT, 50350 KUALA LUMPUR, MALAYSIA	Badan Usaha Asing	130.408.000	0,70%
10.	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355-2331	Badan Usaha Asing	122.073.365	0,65%
11.	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	168 ROBINSON ROAD 37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE 068912 SINGAPORE 068913 SINGAPORE	Badan Usaha Asing	112.095.969	0,60%
12.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	6301 BEE CAVE RD, BUILDING ONE, AUSTIN TX 78746	Badan Usaha Asing	102.370.741	0,55%
13.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	PRUDENTIAL TOWER. JL. JEND. SUDIRMAN KAV.79 SETIABUDI JAKARTA SELATAN	Asuransi	96.625.316	0,52%
14.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PA 19355, USA	Badan Usaha Asing	86.525.402	0,46%
15.	JPMCB NA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EME MRKT EQ POOL	OUDE LINDESTRAAT 70, 6401 DJ HEERLEN, THE NETHERLANDS	Badan Usaha Asing	64.471.700	0,35%
16.	PT AIA FINL - UL EQUITY	AIA CENTRAL, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 48A, JAKARTA SELATAN 12930, TANGERANG, INDONESIA	Asuransi	56.756.100	0,30%
17.	SSB FBC1 S/A BARON EMERGING MARKETS FUND-2144611655	767 FIFTH AVENUE 49 FL, NEW YORK NY 10153	Badan Usaha Asing	55.000.000	0,29%
18.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	BANKPLASSEN 2, 0151 OSLO, NORWAY	Badan Usaha Asing	51.917.000	0,28%
19.	SSB 1BA9 ACF MSCI EQUITY INDEX FUND B-INDONESIA - 2144609619	400 HOWARD STREET SAN FRANSISCO, CA 94105	Badan Usaha Asing	51.024.088	0,27%
20.	SSB OBIH S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144609616	400 HOWARD STREET SAN FRANCISCO CA 94105	Badan Usaha Asing	49.503.676	0,27%

Komposisi Pemegang Saham di atas 5% BNI Per Desember 2016

No.	Nama Investor	Alamat	Status	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KEMENTERIAN BUMN, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 13, JAKARTA 10110	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.189.193.875	60,0%

Kepemiikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BNI Per Desember 2016

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
DEWAN KOMISARIS			
Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama/Independen	0	0,0%
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Independen	0	0,0%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	0	0,0%
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	0	0,0%
Pataniari Siahaan*	Komisaris Independen	0	0,0%
Revrisond Baswir*	Komisaris Independen	0	0,0%
Bistok Simbolon	Komisaris	0	0,0%
Wahyu Kuncoro	Komisaris	0	0,0%
Joni Swastanto	Komisaris	0	0,0%
DIREKSI			
Achmad Baiquni	Direktur Utama	0	0,0%
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	0	0,0%
Rico Rizal Budidarmo	Direktur	0	0,0%
Herry Sidharta	Direktur	0	0,0%
Anggoro Eko Cahyo	Direktur	152.526	0,0%
Adi Sulistyowati	Direktur	68.124	0,0%
Bob Tyasika Ananta	Direktur	82.891	0,0%
Imam Budi Sarjito	Direktur	117.074	0,0%
Panji Irawan	Direktur	0	0,0%
Putrama Wahju Setiawan	Direktur	116.425	0,0%

**Per tanggal 27 Juni menjalani cooling off selama 6 (enam) bulan.*

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Per Desember 2016

No. Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PEMEGANG SAHAM LOKAL		
1. Perorangan Indonesia	323.254.850	1,73339%
2. Koperasi	742.429	0,00398%
3. Yayasan	162.629.127	0,90961%
4. Dana Pensiun	101.189.813	0,54261%
5. Asuransi	361.205.395	1,93690%
6. Bank	43	0,00000%
7. Perseroan Terbatas	560.729.757	3,00681%
8. Badan Usaha Lain	5.298	0,00003%
9. Reksadana	450.422.330	2,41531%
Sub Total	1.967.179.042	10,54863%
PEMEGANG SAHAM ASING		
10. Perorangan Asing	4.098.418	0,02198%
11. Badan Usaha Asing	5.488.185.123	29,42939%
Sub Total	5.492.283.541	29,45137%
TOTAL	7.459.462.583	40,00000%

Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi

ENTITAS ANAK

Awal tahun 2016, mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam bentuk kerjasama perdagangan bebas di kawasan asia tenggara. MEA merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN yang dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Agar dapat bersaing secara kompetitif dalam MEA, maka merupakan suatu tantangan bagi BNI untuk terus mengembangkan cakupan bisnisnya. Sebagai salah satu bank utama di Indonesia, peran BNI di industri keuangan telah menempati posisi yang sangat strategis. Untuk itu, BNI mencanangkan BNI Financial Services Group guna meningkatkan sinergi antara BNI dengan entitas anak sehingga dapat memberikan layanan jasa keuangan secara menyeluruh dalam satu payung kepada nasabah. Entitas anak BNI didirikan agar dapat menyediakan layanan jasa keuangan "satu atap", dalam BNI Financial Center yang meliputi produk dan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal dan *remittance*. Aliansi strategis dan sinergi antar perusahaan anak maupun dengan BNI sebagai perusahaan induk dibangun dalam rangka meningkatkan layanan, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi seluruh *stakeholder* BNI.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri perbankan, BNI mengelola entitas anak dengan melakukan penyertaan modal pada entitas anak yang bergerak di bidang keuangan. Kepemilikan mayoritas di beberapa perusahaan anak ditujukan agar dapat membangun aliansi strategis untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah BNI. Sedangkan kepemilikan minoritas (1%-8%) dilaksanakan dengan tujuan mematuhi kebijakan/peraturan yang berlaku seperti ketentuan dari OJK dan BI, serta dalam rangka membangun kerjasama bisnis dengan mitra BNI.

Entitas anak dengan peran BNI sebagai pemegang saham mayoritas adalah: PT Bank BNI Syariah (99,90%), PT BNI Life Insurance (60,00%), PT BNI Securities (75,00%), PT BNI Multifinance (99,99%) dan BNI Remittance Ltd (100%). Sedangkan kepemilikan saham minoritas antara lain pada PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (8,00%), PT Pemeringkat Efek Indonesia (1,43%), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1,00%), PT Bank Mizuho Indonesia (1%), dan PT Sumitomo Mitsui Indonesia (0,52%).

BNI dan entitas anak BNI akan terus berkembang dengan strategi bisnis yang selaras dan meningkatkan sinergi bisnis untuk memberikan jasa keuangan yang menyeluruh yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian taget bisnis BNI Group. Untuk pengembangan bisnis entitas anak, salah satu strategi BNI adalah memperkuat permodalan perusahaan, sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing untuk menegambangkan bisnisnya. Untuk tahun 2016, BNI telah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT BNI Multifinance sebesar Rp 203 miliar, untuk meningkatkan ruang pengembangan bisnis pembiayaan yang potensial. Pada tahun 2016, semua entitas anak BNI telah membukukan laba, dengan pertumbuhan sebesar 12,75% dibanding dengan tahun 2015, yaitu dari Rp 415,14 miliar menjadi Rp468 miliar dan memberikan kontribusi sebesar 4,34% terhadap total laba BNI.

Sinergi dalam BNI Financial Services Group akan tercipta jika setiap entitas anak dikelola dengan baik dan terdapat kerja sama antara BNI dengan entitas anak maupun antar entitas anak itu sendiri. Keberhasilan kinerja masing-masing entitas anak tercermin dari peningkatan kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, kepuasan nasabah, dan posisinya jika dibandingkan perusahaan peers group dalam industri yang sama. Dengan demikian, kontribusi dari setiap entitas anak akan terus meningkat secara signifikan dan memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh baik kebutuhan transaksi, perlindungan, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan dalam setiap siklus hidupnya. Sinergi yang solid pada BNI Financial Group sangat dibutuhkan agar setiap komponen di dalamnya dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Untuk itu, telah disusun *Roadmap* BNI *Financial Services Group* yang dimasukkan dalam *Corporate Plan* 2014-2018, yaitu:

2018 — Melanjutkan visi sector pemain *Total Finance Solution*

2017 — Menjadi pemain utama dalam penyediaan *total financial solution*

2016 — Memperkuat sinergi bisnis dengan menawarkan *total financial solution*, baik bank maupun *non-bank financing*

2015 — Memperkuat bisnis perusahaan anak dengan *leverage customer base*

2014 — Memperkuat landasan perusahaan anak dalam rangka pengembangan bisnis BNI *Financial Services Group*

Nama	Bidang Usaha	Domisili	Kepemilikan Saham	Tahun Pendirian	Status Operasi
PT Bank BNI Syariah	Perbankan Syariah	Jakarta	99,90%	2010	Telah Beroperasi
PTBNI Multifinance	Pembiayaan Konsumen	Jakarta	99,99%	1983	Telah Beroperasi
PTBNI Securities	*Brokerage* dan *Underwriter* , meliputi perdagangan efek, termasuk didalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi	Jakarta	75,00%	1995	Telah Beroperasi
PTBNI Life Insurance	Jasa Asuransi Jiwa	Jakarta	60,00%	1996	Telah Beroperasi
BNI Remittance	Jasa Pengiriman Uang	Hongkong	100%	1996	Telah Beroperasi

Adapun uraian singkat mengenai entitas anak BNI adalah sebagai berikut:

PT BANK BNI SYARIAH

PT Bank BNI Syariah didirikan pada 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.
BNI Syariah merupakan bank umum syariah yang merupakan hasil pemekaran usaha (*spin-off*) Unit Usaha Syariah BNI ("UUS BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI tanggal 5 Oktober 2009 sesuai akta No. 37 Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemekaran usaha dilakukan dengan mengacu kepada PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan cara mendirikan bank umum syariah baru.

BNI Syariah menjalankan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010. Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh Bank BNI pada BNI Syariah sebesar 99,90%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank BNI Syariah berdasarkan akta risalah RUPS No.28 tanggal 16 November 2016 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama:
Fero Poerbonegoro

Komisaris Independen:
Rizqullah

Komisaris:
Max Niode*)

Komisaris:
Muhammad Syakir Sula*)

**) masih menjalani fit and proper test*

DIREKSI

Direktur Utama:
Imam Teguh Saptono

Direktur:
Junaidi Hisom

Direktur:
Kukuh Rahardjo

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua:
K.H. Ma'ruf Amin

Anggota:
Hasanudin

PT BNI MULTIFINANCE

PT BNI Multifinance didirikan pada tanggal 8 April 1983 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 21. Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT BNI Multifinance yang keputusannya diaktakan dalam akta No. 103 tanggal 27 Juni 1994. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Multifinance, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayan multi guna dan sewa operasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BNI Multifinance mengoperasikan 7 kantor cabang di kota Bogor, Medan, Lampung, Semarang, Surakarta,Yogyakarta, dan Surabaya. BNI Multifinance telah beroperasi sejak 1983 Persentase kepemilikan saham oleh Bank BNI sebesar 99,99%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Multifinance berdasarkan akta risalah RUPS No.111 tanggal 26 September 2016 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris:
RL. Dwi Mutiari

Komisaris:
M. Gunawan Putra

DIREKS

Presiden Direktur:
Suwaluyo

Direktur:
Rana Ranadi

PT BNI SECURITIES

PT BNI Securities didirikan pada 1995 berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 dari Koesbiono Sarmanhadi, S.H., di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan akta No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C26278.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1995, Tambahan No. 5804.

BNI Securities merupakan entitas anak BNI yang Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Securities, ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan efek, termasuk didalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Di tahun 2011, BNI Securities melakukan *spin-off* unit bisnis *Assets Management* menjadi perusahaan anak PT BNI *Assets Management* yang beroperasi sejak September 2011. BNI Securities juga menjalin aliansi strategis dengan SBI Securities Co. Ltd., perusahaan sekuritas dari Jepang. Persentase kepemilikan saham oleh Bank BNI pada BNI Securities sebesar 75,00%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Securities berdasarkan akta risalah RUPS No. 1 tanggal 01 Oktober 2016 dan No.21 tanggal 06 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/ Komisaris Independen:
Fabianus Sudjatmoko

Komisaris:
Ryosuke Hayashi

Komisaris:
Suhendry Hafni

DIREKSI

Direktur Utama:
Adiyasa Suhadibroto

Direktur:
Reza Benito Zahar

Direktur:
Aswardin

Direktur:
Kenichiro Matshuhisa

PT BNI LIFE INSURANCE

PT BNI Life Insurance didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI Life Insurance dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-31600 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Desember 2004. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BNI Life, ruang lingkup kegiatan BNI Life adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI Life memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-305/KMK.01 7/1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada tanggal 3 April 2014, akuisisi BNI Life oleh Sumitomo Life telah diselesaikan dan diaktakan dengan Akta Notaris No.7 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.01557.40.21.2014 tanggal 29 April 2014. Akuisisi ini mengakibatkan kepemilikan saham BNI di BNI Life terdilusi, saat ini persentase kepemilikan saham oleh Bank BNI sebesar 60,00%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BNI Life Insurance berdasarkan akta risalah RUPS No.19 tanggal 13 Oktober 2015 dan No.38 Tanggal 30 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen:
Krisna Wijaya

Komisaris Independen:
Mauli Adiwarman Idris

Komisaris Independen:
Wiriadi Saputra

Komisaris:
Shinzo Kono

Komisaris:
Darwin Suzandi

DIREKSI

Direktur Utama:
Budi Tampubolon

Wakil Direktur Utama:
Geger N. Maulana

Direktur:
Kazuhiko Arai

Direktur:
Hirokazu Todaka

Direktur:
Intan Abdams Katoppo

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua:
Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin

Anggota:
Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI

Anggota:
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA

BNI REMITTANCE Ltd.

BNI Remittance Limited (BNIR) adalah entitas anak BNI yang didirikan oleh BNI Hong Kong pada tahun 1996 dengan nama *"High Motivation Company"*, kemudian pada tahun 1997 perusahaan ini berubah nama menjadi BNI Nakertrans Ltd.

Untuk lebih mengoptimalkan aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan koridor aturan otoritas setempat, melalui sebuah kajian bisnis yang komprehensif diputuskan untuk memisahkan manajemen BNI Nakertrans Ltd dari BNI Hong Kong sekaligus merubah nama perusahaan menjadi BNI Remittance Ltd pada tahun 2009. Saat ini BNIR terdaftar sebagai *Money Service Operator* dengan nomor register 12-08-00768 dan tunduk kepada Hong Kong *Custom and Excise Department*. Persentase kepemilikan saham oleh Bank BNI sebesar 100%.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Remittance berdasarkan akta risalah RUPS No.0574748 tanggal 31 July 2016 adalah sebagai berikut

DIREKSI

Direktur:
Eko Kristianto

ENTITAS ASOSIASI/PENYERTAAN SAHAM

Nama	Bidang Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Kepemilikan Saham	Status Operasi
PT Swadharma Surya Finance	Pembiayaan	Jakarta	1992	25,0%	Telah Beroperasi
PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	Investasi	Jakarta	1981	8,0%	Telah Beroperasi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyelesaian Efek	Jakarta	1988	2,5%	Telah Beroperasi
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	Jakarta	1994	1,9%	Telah Beroperasi
PT Bursa Efek Indonesia	Bursa Efek	Jakarta	1977	1,2%	Telah Beroperasi
PT Bank Mizuho Indonesia	Jasa Keuangan	Jakarta	2003	1,0%	Telah Beroperasi
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Jasa Keuangan	Jakarta	2004	0,5%	Telah Beroperasi

Struktur Grup

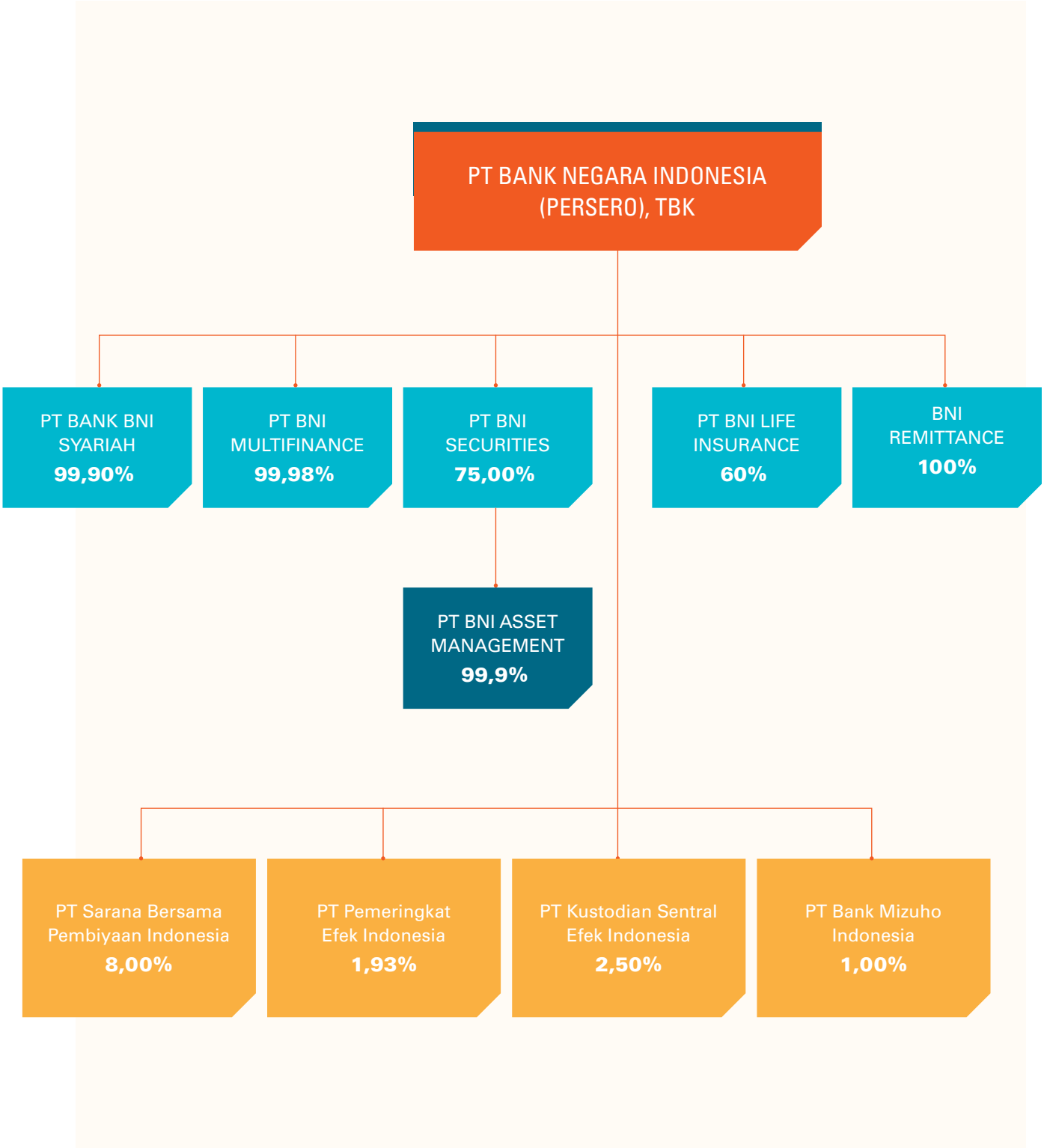

Kronologis Pencatatan Saham

Kronologis Pencatatan Saham

Tanggal	Dekripsi	Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	
			Nilai Nominal	Jumlah Saham yang Diterbitkan
Sebelum IPO			@Rp1,000,000	1,000,000
November 1996	*Initial Public Offering* (IPO)	Seri-A	@Rp500	1
		Seri-B	@Rp500	4,340,127,999
	Total			4,340,128,000
Juni 1999	*Rights Issue* (1:35)	Seri-A	@Rp500	1
		Seri-B	@Rp500	4,340,127,999
		Seri-C	@Rp25	151,904,480,000
	Total			156,244,608,000
Juni 2000	*Issuance of new shares without pre-emptiverights*	Seri-A	@Rp500	1
		Seri-B	@Rp500	4,340,127,999
		Seri-C	@Rp25	196,850,884,500
	Total			201,191,012,500
Juni 2001	*Repayment of excess amount in Government Bonds*	Seri-A	@Rp500	1
		Seri-B	@Rp500	4,340,127,999
		Seri-C	@Rp25	194,885,183,000
	Total			199,225,311,000
Desember 2003	*Reverse Stock Split* (15:1)	Seri-A	@Rp7.500	1
		Seri-B	@Rp7.500	289,341,866
		Seri-C	@Rp375	12,992,345,533
	Total			13,281,687,400
13 Agustus 2007	*Rights Issue* (20:3)	Seri-A	@Rp7.500	1
		Seri-B	@Rp7.500	289,341,866
		Seri-C	@Rp375	14,984,598,643
	Total			15,273,940,510
Agustus 2010	Divestasi Saham Negara RI pada BNI eks *green shoe*	Seri-A	@Rp7.500	1
		Seri-B	@Rp7.500	289,341,866
		Seri-C	@Rp375	14,984,598,643
	Total			15,273,940,510
10 Desember 2010	*Rights Issue* (110.473:500.000)	Seri-A	@Rp7.500	1
		Seri-B	@Rp7.500	289,341,866
		Seri-C	@Rp375	18,359,314,591
	Total			18,648,656,458

Kronologis Pencatatan Obligasi

Kronologis Pencatatan Obligasi

No.	Obligasi	Jumlah (USD 000)	Jangka Waktu (Tahun)	Tingkat Bunga Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	Status Pembayaran
1.	Global Bond	500.000	5 tahun	4,125% p.a	27 April 2012	27 April 2017	Baa3 (Moody's) BBB- (Fitch)	Belum Lunas

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

PENERBITAN *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD) BNI

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan penawaran NCD maksimal sebesar Rp3 triliun dengan realisasi penerbitan sebesar Rp3.023 triliun yang terdiri dari beberapa seri. Pihak *Arrangers* dari penerbitan NCD BNI tersebut adalah Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BCA Sekuritas. Konsultan Hukum yang digunakan adalah Hanafiah Ponggawa & *Partners*. Notaris yang digunakan adalah Fathiah Helmi, SE. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai *Paying Agent*. Penerbitan NCD tersebut merupakan strategi Perseroan untuk menambah likuiditas rupiah.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

NCD	Seri	Jumlah (Juta Rp)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Kupon	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo
Tahap I	A	390.000	6 bulan	7,0%	16 Juni 2016	16 Des 2016
	B	20.000	9 bulan	7,2%		16 Mar 2017
	C	42.000	370 hari	7,6%		23 Jun 2017
	D	415.000	18 bulan	7,8%		15 Des 2017
	E	1.231.000	24 bulan	8,3%		15 Jun 2018
	F	925.000	36 bulan	8,4%		14 Jun 2019
Tahap II	A	225.000	370 hari	7,2%	27 September 2016	02 Okt 2017
	B	390.000	18 bulan	7,6%		26 Mar 2018
	C	770.000	24 bulan	7,9%		26 Sep 2018
	D	815.000	36 bulan	8,1%		26 Sep 2019

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga	Alamat
KANTOR AKUNTAN PUBLIK	**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** – firma anggota jaringan global PwC Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940, PO Box 2473 JKP 10001 Telepon: (62-21) 521 2901 Faks: (62-21) 5290 5555, 5290 5050 website: www.pwc.com/id
PENCATATAN SAHAM	**Bursa Efek Indonesia** Building Tower I Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (62-21) 515 0515 Faks.: (62-21) 515 0330
BIRO ADMINISTRASI EFEK	**PT Datindo Entrycom** Puri Datindo Wisma Diners Club Annex Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 Telepon: (62-21) 570 9009 Faks.: (62-21) 570 9026
PERUSAHAAN PEMERINGKAT	**Standard & Poor's** 30 Cecil Street Prudential Tower 17th floor Singapore 049712 Telepon: (65) 6438 2881 Website: www.standardandpoors.com **Moody's Singapore Pte Ltd** 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower 048623 Telepon: (65) 6398 8300 Faks.: (65) 6398 8301 Website: www.moodys.com **PT Fitch Ratings Indonesia** Prudential Tower Lt. 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta Selatan 12910 Telepon: (62-21) 5795 7755 Faks.: (62-21) 5795 7750 Website: www.fitchratings.com **Fitch Ratings Ltd** 30 North Colonnade London E14 5GN United Kingdom Telepon: +44(0) 20 3530 1000 Faks.: +44(0)20 3530 1500 Website: www.fitchratings.com **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)** Panin Tower Senayan City Lt. 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Telepon: (62-21) 7278 2380 Faks.: (62-21) 7278 2370 Website: www.pefindo.com
NOTARIS	**Fathiah Helmi, S.H.** Graha Irama Lantai 6-C Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950 Telepon: (021) 529 07304, (021) 529 07305, (021) 529 07306 Fax: (021) 526 1136

Nama Dan Alamat Entitas Anak Dan/ Atau Kantor Wilayah Dan Cabang

ENTITAS ANAK

Nama	Alamat
PT Bank BNI Syariah	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11 Kuningan, Jakarta 12950 Tel.: (021) 29701946 Fax.: (021) 29667935 Email: info@bnisyaria
PT BNI Multifinance	Gedung BNI Life Insurance Lantai 5 Jl. Aipda K.S. Tubun No. 67 Petamburan, Jakarta Pusat 10260 Hotline: (021) 290 22555 Fax. (021) 290 22146 www.bnimultifinance.co.id
PT BNI Securities	Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78, Jakarta 12910 Tel./Call Center: (021) 2554 3946 Fax.: (021) 5793 5831 Email: bnisec@bnisecurities.co.id www.bnisecurities.co.id
PT BNI Life Insurance	BNI Life Tower Lantai 21 The Landmark Center Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910 Tel.: (021) 2953 9999 Fax.: (021) 2953 9998 www.bni-life.co.id Email: customer-care@bni-life.co.id Customer Care: (021) 5021 7626 SMS Center: 0811117626
BNI Remittance	BNI Remittance Limited Flat/RM5 on GF, Nos 1-7 Keswick Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel.: +852 28908082 Fax.: +852 28908182

KANTOR WILAYAH, KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

KANTOR WILAYAH		
Kantor Wilayah Medan Jl. Pemuda No. 12, Lantai 4 Medan 20151 Tel.: (061) 4567110, 4567002 Fax.: (061) 4567105, 4515754	**Kantor Wilayah Padang** Jl. Dobi No. 1 Lantai 3 Padang 25138 Tel.: (0751) 890005-08 Fax.: (0751) 890010-11	**Kantor Wilayah Palembang** Jl. Jend. Sudirman No. 132 Palembang 30126 Tel.: (0711) 361961-65, 321046 Fax.: (0711) 361966, 374160
Kantor Wilayah Bandung Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Bandung 40117 Tel. (022) 4240431-39, 4240534 Fax.:(022)4240432-4214926- 4213107	**Kantor Wilayah Semarang** Jl. Letjen. MT. Haryono No. 16 Semarang 50122 Tel.: (024) 3556747, 3556746 Fax.: (024) 3547686, 3520636	**Kantor Wilayah Surabaya** Jl. Jend. A. Yani No. 286 Gedung Graha Pangeran Lt. 3-4 Surabaya 60292 Tel.: (031) 8292820 - 26 Fax.: (031) 8292805, 8292841
Kantor Wilayah Makassar Jl. Jend. Sudirman No. 1 Lt.3 Makassar 90115 Tel.:(0411)3620355-56,3621926 Fax.: (0411) 3619562, 3625395	**Kantor Wilayah Denpasar** Jl. Raya Puputan Renon No. 27 - Lantai 2, Renon Denpasar 82265 Tel.: (0361) 263304 - 08 Fax.: (0361) 227874, 263319	**Kantor Wilayah Banjarmasin** Jl. Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin 70111 Tel.: (0511) 3353689, 3357063 Fax.: (0511) 3354409, 3357066
Kantor Wilayah Manado Jl. Dotulolong Lasut No. 1 Manado 95122 Tel.: (0431) 868019, 862777 Fax.: (0431) 851852/865458	**Kantor Wilayah Papua** Jl. Kelapa II Entrop Kota Jayapura Papua 99224 Tel.: (0967) 5355311, 522354 Fax.: (0967) 533316	**Kantor Wilayah Jakarta Senayan** Jl. Jend. Gatot Subroto No. 55 Jakarta Pusat 10210 Tel.: (021) 2500025, 5706057 (Hunting) Fax.: (021) 2500033

KANTOR WILAYAH

Kantor Wilayah Jakarta Kota
Jl. Lada No. 1 - Jakarta 11110
Tel.: (021) 6901131- 2601090, 2601148
Fax.: (021) 6901131, 6901182, 2601165, 2601179

Kantor Wilayah Jakarta BSD
Jl. Lada No. 1 - Jakarta 11110
Tel.: (021) 6901131- 2601090, 2601148, 2601165
Fax.: (021) 6901131, 6901182, 2601165, 2601179

Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran
Jl. Lada No. 1 - Jakarta 11110
Tel.: (021) 6901131- 2601090, 2601148, 2601165
Fax.: (021) 6901131, 6901182, 2601165, 2601179

Kantor Wilayah Yogyakarta
Jl. Trikora No.1
Yogyakarta
Telp. : (0274) 376287
Fax. : (0274) 2872414

Kantor Wilayah Malang
Gedung BNI Lt. 2
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 75-77
Malang
Telp. : (0341) 3012111-15
Fax. : (0341) 3012125-26

KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Kantor Cabang Singapore
39 Robinson Road #01-02,
02-02 and 06-01/04
Robinson Point
Singapore 068911
Tel.: +65 6225 7755
Fax.: +65 6225 4757

Kantor Cabang Hong Kong
G/F Far East Finance Center,
16 Hartcourt Road
Hong Kong
Tel.: +852 25299871, 28618600 Fax.: +852 28656500

Kantor Cabang Tokyo
Kokusai Bld 1st Floor 3-1-1 Marunounchi
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0005, Japan
Tel.: +81 3 3214 6565, 3214 5621
Fax.: +81 3 3212 6428, 3201 2633

Kantor Sub Branch Osaka
Nakanoshima Festival Tower
17th Floor 2-3-18 Nakanoshima Kita-ku Osaka
530-0005, Japan
Tel.: +81 6470 83823
Fax.: +81 6470 83823

Kantor Cabang London
30 King Street,
London EC2V 8AG
Tel.: +44 (0) 20 7776 4646
Fax.: +44 (0) 20 7776 4699

Kantor Cabang New York
One Exchange Plaza 5th Floor
Broadway
New York NY. 10006 USA
Tel.: +1 212 943 4750
+1 212 943 4760
Fax.: +1 212 344 5723

Kantor Cabang Seoul
8th Floor Wise Tower,6-4, 5-ga Namdaemun-ro,
Jung-gu Seoul
Tel.: +82 2-6386-8046

Kantor Perwakilan Yangon
BNI Yangon Office 3rd Floor Room
#0303A Sakura Tower 339
Bogyoke Aung San Road Kyauktada
Township - Myanmar

Akses Informasi

BNI telah menyediakan akses informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui:

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan
Gedung BNI, Lt. 24
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 2511 946, 572 8387
Faks. : (62-21) 572 8295, 572 8053
E-mail : investor.relations@bni.co.id
Website : www.bni.co.id

Call Center :
Layanan 24 Jam BNI Call 1500046
Fax : (021) 2554 1203
Email : bnicall@bni.co.id
Twitter : @BNI
Facebook : BNI
Instagram : @BNI46

Selain itu, informasi mengenai perkembangan saham dan permodalan BNI juga dapat diakses melalui *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Dengan diberlakukannya peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang situs *web* emiten atau perusahaan publik, maka BNI telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan 5 tahun terakhir serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, Informasi-informasi yang disajikan dalam *website* senantiasa diperbaharui secara berkala.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

- Tinjauan Industri 125
- Tinjauan Operasional 131
- Tinjauan Keuangan 177
- Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya 206
- *Tax Amnesty* 237
- Permasalahan Hukum Pajak 238
- Informasi Material Lainnya 239
- Kinerja Anak Perusahaan 247
- Tinjauan Pendukung Bisnis 263
- Tinjauan Operasional Dan Teknologi Informasi 275

Kinerja BNI di 2016 menujukkan ketangguhan BNI di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan di industri perbankan. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pada tahun 2016 BNI memiliki pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri maupun dibandingkan *peers group*. Kredit BNI tumbuh 22,4%, lebih tinggi dibandingkan industri dan juga *peers group*, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) BNI tumbuh 20,6% per Periode November 2016. Dengan pertumbuhan Kredit dan DPK tersebut, maka pada periode yang sama, aset BNI dapat tumbuh sebesar 21,9%, lebih tinggi dibandingkan *industry* dan *peers group*. Pertumbuhan dari sisi aset, kredit dan dana pihak ketiga telah meningkatkan pangsa pasar BNI selama tiga tahun berturut-turut.

Peningkatan kinerja dari sisi operasional tersebut mampu meningkatkan pendapatan bunga dan pendapatan syariah dari Rp36,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp43,8 triliun di tahun 2016 atau sebesar 18,6%. Hal tersebut berdampak pada naiknya laba per saham BNI dari Rp487 per lembar di tahun 2015 menjadi Rp610 per lembar saham pada tahun 2016.

Tinjauan Industri

PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terjadi pada tahun 2016, dan diperkirakan akan lebih baik pada tahun 2017 mendatang. Beberapa lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 berada pada kisaran kurang dari hingga sampai dengan 3%. Pada Juni 2016 lalu, Bank Dunia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga level 2,4%. Sementara pada Juli 2016, IMF melakukan revisi terbaru yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga level 3,1% setelah sebelumnya memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 3,2%. Kondisi ini menegaskan bahwa perekonomian dunia saat ini masih menghadapi permasalahan yang pelik.

Salah satu risiko global yaitu terjadinya British Exit (Brexit) yang akan berdampak pada terganggunya kepercayaan investor dan iklim investasi, termasuk kondisi keuangan dan sentimen pasar. Namun, risiko Brexit tersebut akan lebih banyak terkonsentrasi pada negara-negara maju di kawasan Eropa, dengan dampak yang relatif lebih rendah di kawasan lain, termasuk di Amerika Serikat dan Cina.

Untuk dua tahun mendatang, perekonomian dunia diperkirakan akan relatif lebih baik, dimana Bank Dunia memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh 2,8% pada 2017 dan 3,0% pada 2018. Hal ini didukung oleh upaya-upaya beberapa negara dalam pemulihan perekonomian mereka masing-masing. Harga komoditas global diproyeksikan akan membaik secara perlahan walaupun akan berada pada level rendah, terutama untuk komoditas non energi. Sedangkan prospek komoditas energi saat ini dan ke depan diperkirakan akan mengalami *oversupply* produksi serta terus melemahnya permintaan dunia.

Dari sisi kebijakan suku bunga, saat ini dunia sedang mengalami *monetary policy less divergence*, dimana beberapa bank sentral dunia seperti The Fed berpotensi menaikkan suku bunga acuan secara *gradual* namun masih pada level yang rendah, searah dengan pemulihan perekonomiannya.

Di sisi lain, beberapa bank sentral (Asia dan Eropa) menerapkan kebijakan suku bunga rendah atau bahkan negatif, untuk mendorong konsumsi dalam negeri/kawasannya. Amerika Serikat diperkirakan akan terus berupaya mempertahankan momentum pemulihan dalam negeri. Tingkat pertumbuhan ekonomi AS ke depan diperkirakan akan berada pada level kisaran 2,2- 2,5%. Bank Dunia memprediksi ekonomi AS akan tumbuh 2,2% pada 2017 dan 2,1% pada 2018, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sekitar 1,9%. Dengan makin membaiknya perekonomian dalam negeri AS, laju inflasi diperkirakan akan meningkat mendekati target 2%. Dengan demikian, suku bunga acuan The Fed (*Fed Fund Rate*/FFR) juga diproyeksi akan mengalami kenaikan secara gradual paling cepat mulai akhir tahun ini hingga tahun 2017 mendatang. Kenaikan suku bunga acuan tersebut akan berpengaruh bagi kondisi ekonomi global, terutama negara-negara *emerging market*. Sedangkan tingkat pengangguran yang saat ini berada pada kisaran 5%, diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun depan. Hasil Pemilihan Presiden AS pada awal November 2016 lalu juga berpotensi meningkatkan ketidakpastian pada perekonomian global. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang baru akan bersifat proteksionis terhadap perekonomian dalam negerinya. Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Kawasan Eropa masih diliputi ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi. Risiko Brexit berdampak pada negara-negara maju Eropa, termasuk kegiatan perdagangan, transaksi keuangan maupun investasi. Bank sentral Eropa ECB berencana memperpanjang lagi periode *quantitative easing* sebesar 80 miliar euro per bulan, yang akan berakhir pada Maret 2017. Pada bulan Desember mendatang, diperkirakan ECB akan membuat keputusan mengenai *quantitative easing* tersebut. Sementara itu, untuk mendorong tingkat inflasi zona Euro, bank sentral masih mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang rendah, yakni nol persen, serta suku bunga simpanan sebesar -0,4%. Tingkat inflasi masih belum mendekati target bank sentral yakni sebesar 2%. Per September 2016, tingkat inflasi berada pada level

0,4%. Sementara itu, untuk tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih stagnan pada level masing-masing 1,6% dan 1,5%. Oleh karena itu, reformasi struktural dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa sekaligus mencapai target inflasi 2%.

Dari kawasan Asia, Cina masih terus melanjutkan tren perlambatan ekonomi. Pada tahun 2016, perekonomian Cina diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,7%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,9%. Dalam dua tahun mendatang, ekonomi Cina diprediksi akan tumbuh pada level moderat yakni 6,5-7,0%. Angka perkiraan yang moderat ini masih menggambarkan adanya pelemahan pada ekspor dan investasi. Pada 2016 ini, pemerintah Cina akan melakukan kebijakan pelonggaran lain, yang lebih fokus pada langkah-langkah fiskal.

Sedangkan Jepang, saat ini pemerintahnya telah melonggarkan kebijakan dengan meluncurkan paket stimulus fiskal sejak Agustus 2016 lalu sebesar 13,5 triliun yen atau sebesar 132 miliar dolar AS. Paket ini terdiri dari 7,5 triliun yen untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, serta 6 triliun yen untuk investasi dan program kredit. Stimulus ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Jepang untuk mengkoordinasikan kebijakan dengan Bank of Japan (BoJ).

Dalam jangka menengah ke depan, sejumlah risiko global masih terus menjadi perhatian. Perlambatan yang diikuti ketidakpastian perkembangan ekonomi global tersebut akan mempengaruhi ekonomi Indonesia.

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2016)

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia di tahun 2016 masih ditandai dengan kinerja perdagangan yang masih tertekan akibat faktor global. Kegiatan ekspor dan impor melambat meskipun neraca perdagangan masih mencatat surplus. Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan meningkat akibat tekanan yang lebih besar akibat ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Pemilihan Presiden AS. Pasar keuangan Indonesia juga diperkirakan akan mengalami tekanan dan meningkatnya volatilitas pasca Pemilihan Presiden AS. Hal ini berpotensi menciptakan *capital outflow* dari pasar keuangan Indonesia.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu faktor pendorong utama perekonomian Indonesia diperkirakan akan meningkat, namun dalam level terbatas. Selain itu, belanja pemerintah juga masih akan menjadi faktor lain dalam mendorong ekonomi Indonesia, terutama terkait fokus pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah. Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, diperkirakan masih akan terus berlanjut. Paket-paket kebijakan ekonomi yang dirilis juga telah berjalan baik dan menunjukkan dampak positif.

Namun, kedepannya kondisi fiskal Indonesia diperkirakan akan tertekan yang tercermin dari melebarnya defisit anggaran, karena pendapatan negara akan berkurang cukup signifikan. Di sisi lain, progam kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan defisit anggaran, serta melonggarkan likuiditas perbankan. Dengan kondisi yang demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan berada pada level 4,9-5,3% (perkiraan Bank Indonesia). Sedangkan untuk tahun depan perekonomian Indonesia diperkirakan relatif lebih baik, atau mampu tumbuh sekitar 5,1-5,3%, dengan masih ditopang oleh faktor konsumsi dan investasi, serta kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup baik.

Fokus kebijakan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019 yakni memperkuat sektor kemaritiman (termasuk subsektor perikanan dan kelautan), pangan, energi, serta infrastruktur Selain itu, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 akan semakin meningkatkan persaingan terutama pada sektor riil. Penguasaan pasar domestik menjadi jawaban bagi dengan cakupan yang cukup luas meliputi sektor konstruksi, sumber daya hayati, mineral, pembuatan kapal, pariwisata dan rekreasi, serta transportasi laut.

implementasi MEA terkait dengan peningkatan daya saing perbankan nasional. Di sisi lain, dengan berlakunya MEA, aktivitas perdagangan luar negeri akan semakin meningkat. Oleh karena itu BNI akan memfasilitasi peningkatan tersebut dengan memberikan fasilitas kredit maupun *trade finance* kepada industri-industri yang berorientasi ekspor, terlebih saat ini pemerintah terus berupaya memperluas pangsa ekspor di luar negara-negara yang saat ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia. Peluang usaha perbankan di luar negeri berdasarkan asas resiprokal juga dapat disikapi dengan pembukaan kantor layanan di negara lain baik yang berada di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN.

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2016)

KONDISI INDUSTRI PERBANKAN

Industri perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan per Desember 2016 dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Sampai dengan Desember 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,9% jauh lebih rendah daripada Desember 2015 yang mencapai 9,6%. Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga perbankan per Desember 2016 hanya tumbuh sebesar 9,6% jauh lebih tinggi dari pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,3%. Akibat dari perlambatan penyaluran kredit dan pendanaan tersebut maka pertumbuhan aset perbankan per Desember 2016 adalah sebesar 9,7%, secara signifikan lebih tinggi dari pertumbuhan pada posisi sama tahun sebelumnya sebesar 9,2%.

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2016)

POSISI BANK BNI DI INDUSTRI PERBANKAN

Apabila dibandingkan dengan industri perbankan dan *peers group*, BNI tumbuh lebih tinggi baik dari segi aset, kredit, maupun pendanaan. Pinjaman yang diberikan BNI tumbuh 20,6%, lebih tinggi dibandingkan industri dan juga *peers group,* sedangkan dana pihak ketiga (DPK) BNI tumbuh 17,6% per Periode Desember 2016. Dengan pertumbuhan pinjaman yang diberikan dan DPK tersebut, maka pada periode yang sama, aset BNI dapat tumbuh sebesar 18,6%, lebih tinggi dibandingkan *industry* dan *peers group.*

Dibandingkan dengan *peers*, maka pertumbuhan BNI dilihat dari segi aset, kredit, dan dana pihak ketiga per November 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel Posisi BNI Berdasarkan Pertumbuhan Aset, Kredit dan DPK (Bank Saja)

Bank	Aset	Kredit	Dana Pihak Ketiga
Industri	7,7%	7,4%	6,5%
BBRI	17,0%	18,7%	16,6%
BMRI	14,3%	13,3%	11,0%
BBCA	13,3%	4,9%	12,0%
BBNI	21,9%	22,4%	20,6%

**Untuk data peers menggunakan data November 2016.*

Grafik Posisi BNI dibandingkan Peers berdasarkan Pertumbuhan Aset

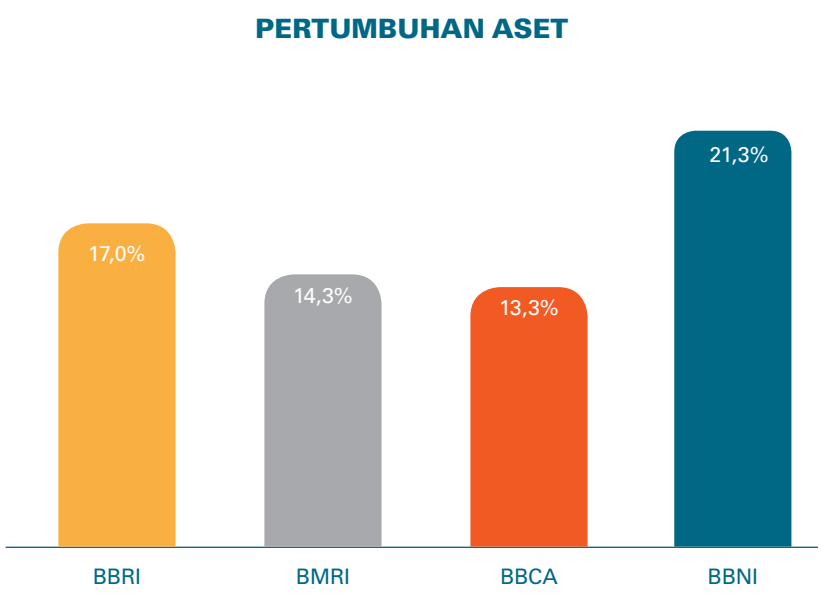

PERTUMBUHAN ASET	25.00%	20.00%	15.00%	10.00%	5.00%	0.00%	17.00%
14.30%	13.30%	21.90%	BBRI	BMRI	BBCA	BBNI	

Grafik Posisi BNI dibandingkan Peers berdasarkan Pertumbuhan Kredit

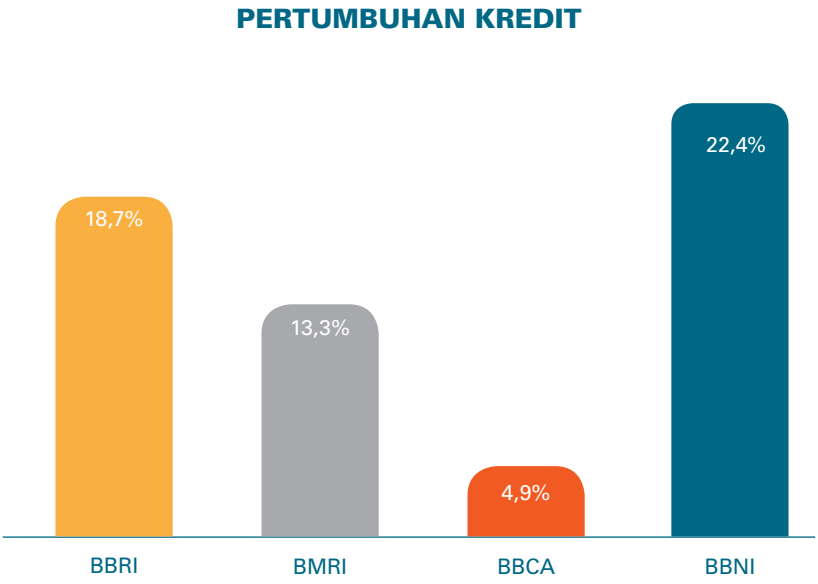

PERTUMBUHAN KREDIT	25.00%	20.00%	15.00%	10.00%	5.00%	0.00%	18.70%
13.30%	4.90%	22.40%	BBRI	BMRI	BBCA	BBNI	

Grafik Posisi BNI dibandingkan Peers berdasarkan Dana Pihak Ketiga

PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA

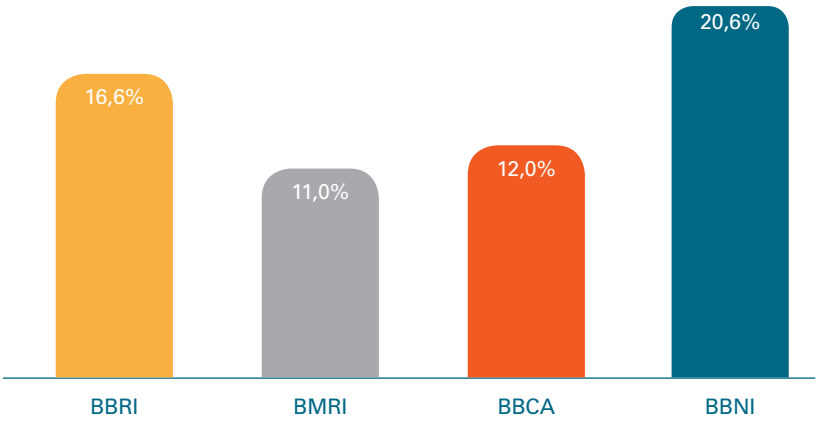

PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA	25.00%	20.00%	15.00%	10.00%	5.00%	0.00%	16.60%
11.00%	12.00%	20.60%	BBRI	BMRI	BBCA	BBNI	

Tinjauan Operasional

BNI menjalankan usaha dan kegiatannya di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35, tanggal 17 Maret 2015. Kegiatan utamanya yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan kredit; Menerbitkan surat pengakuan utang; Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah (seperti wesel, surat pengakuan utang/kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan Negara, surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu, dan instrumen surat berharga lainnya); Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; Melakukan kegiatan dalam valuta asing; Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegiatan kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; Bertindak sebagai Pendiri Dana Pensiun; Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking, investment banking* lainnya; dan Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama di atas, BNI dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Bank BNI berdasarkan segmen usaha diklasifikasikan menjadi Perbankan Bisnis, Perbankan Konsumer, Perbankan Internasional, dan Treasuri. Penjelasan terkait rincian setiap kegiatan usaha Bank BNI diuraikan sebagai berikut.

PERBANKAN BISNIS

Kegiatan perbankan bisnis atau *Business Banking* BNI fokus untuk melayani para nasabah di segmen korporasi, menengah dan kecil.

PRODUK KREDIT

Adapun rincian kegiatan usaha terkait penyaluran kredit untuk segmen korporasi, menengah, dan kecil diuraikan sebagai berikut.

Segmen Korporasi
Segmen Korporasi BNI menangani pemberian pinjaman di atas Rp400 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup pada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, perusahaaan-perusahaan nasional dan multi nasional terbesar di Indonesia.

Segmen Menengah
Segmen Menengah BNI mengelola pemberian pinjaman di atas Rp15 miliar sampai dengan Rp400 miliar untuk untuk nasabah individu dan nasabah grup.

Segmen Kecil
Segmen Kecil BNI menangani pemberian pinjaman sampai dengan Rp15 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup.

PRODUK DANA PIHAK KETIGA
Dana pihak ketiga (DPK) *Business Banking* adalah sejumlah dana, baik untuk simpanan maupun untuk kegiatan operasional, yang dimiliki dan atau dikelola oleh nasabah institusi. Nasabah institusi dimaksud bisa berbentuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, BUMN, BUMD, Rumah Sakit, Kementrian dan berbagai Lembaga Pemerintah lainnya. Produk Dana Pihak Ketiga *Business Banking* mencakup produk-produk Giro, Tabungan dan Deposito.

PERBANKAN KONSUMER

KREDIT KONSUMER
Produk – produk perbankan konsumer terdiri dari *mortgage, credit card, payroll, auto loan,* dan lainnya. Rincian terkait keterangan untuk tiap produk perbankan consumer diuraikan sebagai berikut.

1. ***Mortgage***
   BNI Griya merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada individu/perorangan untuk tujuan konsumtif, antara lain: pembelian rumah tinggal, apartemen, ruko/ rukan, rumah peristirahatan (villa) baik baru maupun seken dan pembelian kavling/tanah serta pembangunan, *renovasi, refinancing, take over, top up* dan multiguna.

2. ***Credit Card***
   Credit card merupakan salah satu produk pinjaman Konsumer. Produk-produk *Credit Card* BNI terdiri dari :
   a. Kartu Kredit Reguler, yang terdiri dari: BNI *Silver* dan BNI *Gold*
   b. Kartu Kredit Premium, yang terdiri dari: BNI *Style Titanium*, BNI Visa *Platinum Card*, BNI JCB *Platinum*, dan BNI Visa *Infinite*
   c. Kartu Kredit *Corporate*, yang terdiri dari: BNI *Corporate Card Gold*, BNI *Corporate Card Platinum*, dan BNI *American Express Business Card*
   d. Kartu Kredit *Affinity*, yang terdiri dari: BNI *Affinity* - Universitas, BNI Affinity - Ikatan Alumni, dan BNI *Affinity* - Organisasi
   e. Kartu Kredit *Co-Branding*, yang terdiri dari: BNI - Chelsea *Card*, Kartu Kredit Garuda – BNI, BNI-LOTTE Mart *Card*, BNI-Bank Sumsel Babel Card, BNI-bank bjb Card, dan Kartu Kredit Ferrari by BNI
   f. Kartu Kredit *Private Label* yang terdiri dari: BNI *Travelling Card*, BNI *Gasoline Card*, BNI Health Card, dan BNI Kartu Tunai

3. ***Payroll***
   BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI.

4. ***Auto Loan***
   KKM (*Channeling*) adalah pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan untuk membiayai piutang perusahaan sesuai kriteria yang ditetapkan.

5. ***Others***
   BNI Oto, adalah produk kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

   BNI Instan, adalah produk kredit untuk para nasabah BNI pemegang Deposito, Tabungan dan Giro dari BNI.

DANA PIHAK KETIGA KONSUMER

Produk dana pihak ketiga perbankan konsumer mencakup produk giro, tabungan, dan Deposito. Adapun rincian keterangan terkait produk dana pihak ketiga perbankan Konsumer diuraikan sebagai berikut.

1. **Tabungan**
   Produk Tabungan BNI terdiri dari:
   a. Tabungan Plus ***(Taplus),*** merupakan tabungan yang memberikan layanan PLUS dengan berbagai macam fitur dan manfaat.
   b. Taplus Bisnis, adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan, yang dilengkapi dengan fitur dan fasilitas yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mendukung usaha bisnis.
   c. Taplus Muda, merupakan produk simpanan dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi kaum muda dengan usia mulai dari 15 tahun sampai dengan 25 tahun.
   d. TAPPA (Taplus Pegawai/ Anggota), merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi Pegawai/ Anggota suatu Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/ Organisasi Profesi yang menjalin kerjasama dengan BNI yang berfungsi sebagai sarana tabungan, kartu identitas Pegawai/Anggota.
   e. TAPMA (Taplus Mahasiswa), adalah tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan BNI yang berfungsi untuk menampung keperluan membayar SPP dan atau lainnya.
   f. Tapenas, merupakan simpanan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan untuk mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman.
   g. Taplus Anak, merupakan produk tabungan untuk membantu mengajarkan anak-anak menabung sejak usia dini, diperuntukan bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun.
   h. Simpanan Pelajar, adalah tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
   i. Tabunganku, adalah produk Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   j. BNI Pandai, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh BNI yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA) dan dapat dibuka melalui Kantor Cabang BNI maupun melalui Agen.
   k. BNI Dollar, merupakan jenis simpanan dalam bentuk mata uang asing (USD/SGD) yang memiliki nilai tukar lebih stabil dan aman serta memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

2. **Deposito**
   Produk Deposito yang ditawarkan BNI mencakup:
   a. BNI Deposito merupakan simpanan berjangka dalam berbagai pilihan mata uang dengan tingkat suku bunga yang menarik.
   b. BNI Duo merupakan simpanan berjangka dengan sistem perhitungan bunga berbunga yang memberikan fleksibilitas untuk mengganti mata uang simpanan sebelum jatuh tempo.

PERBANKAN INTERNASIONAL

PRODUK PINJAMAN

Produk pinjaman yang ditawarkan oleh Kantor Cabang Luar Negeri umunya berbeda-beda tergantung pada *license* dari masing-masing cabang. Namun secara *geographical* dan fungsinya produk pinjaman Kantor Cabang Luar Negeri terbagi menjadi:

1. ***Local Loan***
   Local loan adalah fasilitas yang ditawarkan oleh Kantor Cabang Luar Negeri kepada para debitur lokal Negara dimana Kantor Cabang Luar Negeri tersebut berdiri. Jenis pinjaman yang ditawarkan dapat berupa Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, *Trust Receipt*, Konsumer, dan Sindikasi.

2. ***Offshore Loan***
   Offshore loan adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) kepada nasabah Divisi Korporasi dan Sentra Kredit baik untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan periode maksimum 1 tahun (jangka pendek) maupun untuk membiayai pengadaan barang-barang modal untuk tujuan rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi yang akan diselesaikan pembayarannya dalam jangka menengah atau panjang.

3. ***Trade Loan***
   Trade Loan adalah fasilitas Kantor Cabang Luar Negeri yang pembiayaannya diberikan atas dasar transaksi *trade*.

PRODUK DANA PIHAK KETIGA

Produk Dana Pihak Ketiga Perbankan Internasional terdiri dari produk Tabungan, Deposito, dan Giro. Rincian terkait produk dana pihak ketiga *overseas* diuraikan sebagai berikut.

1. **Tabungan**

2. **Giro**
   Layanan deposit untuk nasabah individual dan *corporate* dengan fasilitas cek sebagai alat tarik . Sebagai *licensed* yang dimiliki oleh KCLN dapat membayarkan atau menagihkan cek yang ditarik atau dibayar oleh nasabah.

3. **Deposito**
   Layanan *funding* dengan jangka waktu mulai dari 1 bulan - 12 bulan yang dimiliki KCLN dengan memberikan *special rate* di masing-masing KCLN sesuai *license* yang dimiliki kepada selektif *customer*.

JASA DAN LAYANAN

Adapun jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Segmen Perbankan Internasional diuraikan sebagai berikut.

1. ***Overseas Branches***
   a. *Export Letter of Credit*
      Merupakan kegiatan bank dalam rangka menerima asli LC termasuk *pre-advice* dan perubahannya dari :
      i. *Issuing Bank* untuk diteruskan kepada *Beneficiary Second Advising Bank*
      ii. *First Advising Bank* untuk diteruskan kepada *Beneficiary*
   b. **Penerbitan *Import Letter of Credit***
      Merupakan kegiatan bank dalam rangka menerbitkan LC (*master* LC) termasuk *Pre-advice* dan perubahannya *(amendment LC*) sebagai jaminan pembayaran bersyarat atas dasar instruksi atau permintaan dari *Applicant* atau atas namanya sendiri.
   c. **Konfirmasi *Letter of Credit***
      Merupakan kegiatan bank dalam rangka ikut menjamin pembayaran suatu LC dan perubahannya yang diadviskan atas dasar permintaan atau penunjukkan dari Bank Pembuka yang disyaratkan dalam LC.
   d. ***Standby Letter of Credit (SBLC)***
      Merupakan kegiatan bank dalam rangka melaksanakan transaksi *Standby Letter of Credit* (SBLC) yang tunduk pada UCPDC atau ISP yang belaku, meliputi :
      i. Penerbitan SBLC
      ii. Penerusan SBLC
      iii. Konfirmasi SBLC
      iv. *Transfer* SBLC
      v. *Cancellation* SBLC
      vi. Realisasi SBLC
      vii. *Un-used* SBLC
   e. ***Inward Bill Collection***
      Merupakan kegiatan bank sebagai:
      i. *Collecting Bank* dalam rangka meneruskan instruksi *collection* dari *Remitting Bank* kepada *Presenting Bank*, atau
      ii. *Presenting Bank* dalam rangka melaksanakan instruksi *collection* dari *Remitting Bank.*
   f. ***Outward Bill Collection***
      Merupakan kegiatan bank sebagai *Remitting Bank* dalam rangka mengirimkan dokumen komersial atau dengan disertai dokumen finansial (wesel/*promissory note*) dan instruksi *collection* kepada *Presenting Bank* atau melalui *Collecting Bank* di luar negeri untuk diserahkan kepada Tertarik (*Drawee)* atas dasar pembayaran atau akseptasi.
   g. **Bank Garansi**

Bank garansi yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah misalnya pendirian perusahaan, kontrak kerja, dll yang bersifat *full cover* atau dengan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan

h. **Bank Garansi *Under Counter***
Bank Garansi yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah yang dicover dengan *counter guarantee* dari koresponden atau sebaliknya.

2. ***Financial Institution***
   a. ***Bank Guarantee Under Counter*** (BGUC): Merupakan penerbitan *Guarantee* (Bank Garansi atau *Direct Demand Guarantee*) atas permintaan dan dengan penjaminan pasti dari bank koresponden (*the Instructing Party*)
   b. ***Bank to Bank Financing – Refinancing,*** Merupakan produk turunan dari transaksi *trade finance* dimana BNI memberikan pembiayaan atas tagihan yang dimiliki oleh Bank koresponden terhadap transaksi *trade finance.*
   c. Bank to Bank Financing, ***Trade Avance Financing,*** Merupakan pembiayaan (*refinancing*) yang dilakukan oleh BNI kepada *Issuing Bank*, berupa pembayaran atas realisasi LC/SKBDN, kepada *Nominated Bank.*
   d. ***Bank to Bank Financing-Forfaiting***, Merupakan pembelian hak tagih *atas Banker's Acceptance* (B/A) yang dimiliki Bank Koresponden selaku *Nominated Bank (forfaitee)* sehubungan transaksi L/C atau SKBDN dengan *discount* tanpa hak regres.

3. ***BNI Smart Trade***
BNI *Smart Trade* diklasifikasikan menjadi *trade product*, *trade service*, dan *trade fianance*. Adapun rincian terkait produk *smart trade* diuraikan sebagai berikut.

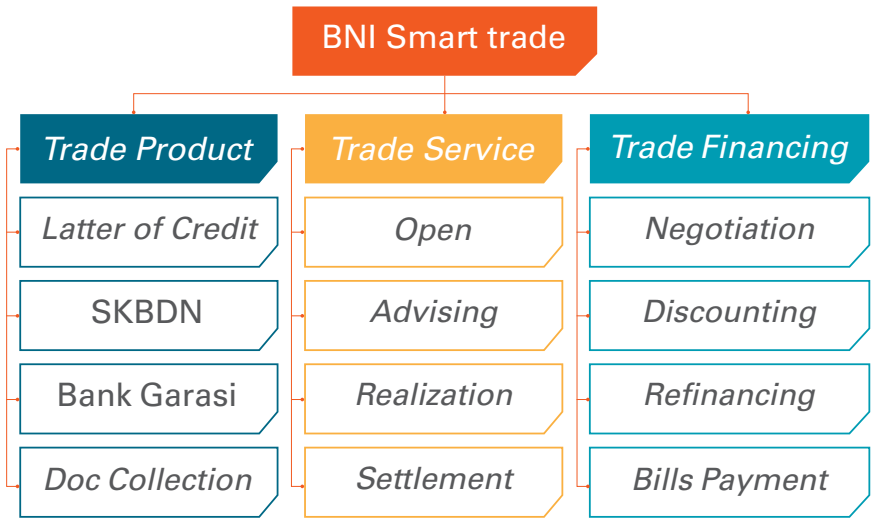

Trade Product

a. ***Letter of Credit***
L/C adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) kepada penerima (*Beneficiary*) yang tunduk pada *Uniform Customs* and *Practice for Documentary Credits* (UCP).

b. **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri**
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) kepada penerima (*Beneficiary*) yang tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan digunakan untuk transaksi perdagangan dalam negeri.

c. **Bank Garansi**
Bank Garansi adalah instrumen jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank kepada penerima garansi (*Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi). Bank Garansi tunduk kepada PBI atau *Uniform Rules for Demand Guarantee* (URDG) atau *International Standby Practices* (ISP).

d. ***Documentary Collection***
Documentary Collection adalah salah satu sistem pembayaran dalam dunia perdagangan yang dilakukan melalui jasa perbankan dalam bentuk tagihan berdokumen yang tunduk pada *Uniform Rules for Collections* (URC).

Trade Services
Trade Services merupakan bisnis *trade* yang memberikan pelayanan kepada nasabah untuk mendapatkan jasa/*services* dalam rangka transaksi *trade* atau perdagangan dengan ruang lingkup ekspor/impor dan dalam negeri. Berikut adalah layanan *trade services*.

a. ***Open***
Open (Penerbitan) merupakan jasa untuk melakukan penerbitan dari suatu instrumen (L/C, SKBDN, Bank Garansi) yang menjamin kepastian pembayaran atau penjaminan pelaksanaan kontrak tertentu kepada pihak penerima dengan kondisi yang telah disepakati oleh pihak yang bersepakat.

b. ***Advising***
Advising (Penerusan) merupakan jasa untuk menyampaikan berupa verifikasi keabsahan/kebenaran dari L/C, SKBDN, Bank Garansi yang dikirimkan oleh Bank Koresponden dari luar negeri dan dalam negeri untuk disampaikan kepada penerima/*beneficiary*.

c. ***Realization***
Realization (Realisasi) merupakan jasa untuk melakukan penyampaian/penyerahan dokumen dalam rangka perdagangan kepada penerima dokumen sebagai importir/pembeli dengan kondisi yang telah disepakati.

d. ***Settlement***
Settlement(Pembayaran) merupakan jasa untuk melakukan penyelesaian transaksi perdagangan berupa pembayaran terhadap transaksi yang telah dilaksanakan atau disepakati. Jasa ini merupakan satu siklus transaksi perdagangan dengan melakukan pembayaran kepada eksportir/penjual melalui *transfer* bank.

Trade Financing
Trade Financing merupakan bisnis yang dikelola oleh Divisi Internasional untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka transaksi *trade*/perdagangan dengan instrumennya berupa L/C, SKBDN, *Documentary Collection*, *Bills Payment*, dan *Invoice* atau berbasis tagihan. Berikut adalah layanan *trade financing*.

a. ***Negotiation***
Negotiation adalah pengambilalihan pembayaran nilai wesel yang ditarik oleh *beneficiary* kepada suatu bank atas dasar dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan sesuai dengan syarat dan kondisi LC/SKBDN/SBLC dengan tenor *sight*.

b. ***Discounting***
Discounting adalah pengambilalihan pembayaran nilai wesel yang ditarik oleh beneficiary kepada suatu bank atas dasar dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan sesuai dengan syarat dan kondisi LC/SKBDN/SBLC dengan tenor *usance*.

c. ***Refinancing***
Refinancing merupakan pembiayaan dalam bentuk pengambilalihan pembayaran dengan latar belakang transaksi penerbitan L/C atau SKBDN. Pembiayaan dalam bentuk *refinancing* dapat dilaksanakan pada saat awal penerbitan atau pada saat mendekati jatuh tempo pembayaran.

d. ***Bills Payment***
Bills Payment adalah pembiayaan kepada

eksportir/penjual dan importir/pembeli atas dasar transaksi *documentary collection/ open account.*

4. ***Remittance***
Remittance merupakan perintah tertulis atas permintaan individu atau badan hukum (*ordering customer atau institution*) kepada lembaga pengirim uang (*remitting bank/institution*), untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain yang ditunjuk (*beneficiary customer atau institution*).

   Adapun jenis – jenis *Remittance* diuraikan sebagai berikut.
   a. ***Incoming Fund Transfer*** atau ***Incoming transfer*** (ITR) atau Kiriman Uang Masuk
   Adalah kiriman uang dari seseorang atau badan hukum melalui bank pengirim di luar negeri dalam valas/rupiah atau melalui bank di dalam negeri khusus dalam valas yang ditujukan kepada BNI sebagai bank penerima, untuk keuntungan penerima yang namanya ditunjuk dalam kirimana uang, baik sebagai nasabah atau bukan nasabah BNI di dalam negeri. Kode transaksi ITR di BNI adalah S06.

   BNI Wesel PIN adalah layanan kiriman uang/ *Incoming Transfer* (ITR) dari luar negeri yang dapat diambil tunai (tanpa rekening) di outlet BNI dan *paying agent* BNI seperti Pos Indonesia, Alfamart, dan Pegadaian. Syarat pencairan adalah dengan menunjukkan nomor PIN (*Personal Identification Number*) yang benar dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
   b. ***Outgoing Fund Transfer*** (OTR) atau Kiriman Uang Keluar
   Perintah tertulis tidak bersyarat dari BNI atas permintaan nasabah dan/atau untuk kepentingan BNI sendiri yang ditujukan kepada bank koresponden untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang / badan (*beneficiary*) yang ditentukan. Meliputi kiriman uang valas keluar ke bank koresponden di dalam dan luar negeri. Kode transaksi OTR di BNI adalah S10.

   Layanan kiriman uang BNI dapat diterima pada hari yang sama (*same day service*) sesuai batas waktu (*cut off time*) yang telah ditentukan per masing-masing valuta. Selain itu BNI juga memiliki layanan *multi currencies* yaitu layanan kiriman uang yang dapat diterima dalam 125 jenis mata uang lokal di 160 negara.

5. ***Japan Desk***
   a. **Pinjaman/ *Loan***
   Unit Japan Desk memberikan layanan Pinjaman kepada Nasabah Korporasi Jepang yang ada di Indonesia dengan berbasis Stand By LC (SBLC) maupun *Open Account Financing* (OAF) dengan suku bunga yang kompetitif. Dalam hal pemberian Pinjaman ini JPD berkoordinasi dengan unit Kredit (LMC, SKM, SKC).
   b. **Dana Pihak Ke Tiga**
   Bekerja sama dengan cabang memberikan layanan pembukaan Tabungan, Giro dan Deposito kepada Nasabah, baik perorangan maupun korporasi Jepang di Indonesia.
   c. **Transaksi *Financial Institution***
   Memberikan layanan perbankan seperti Bank Garansi dan *Forfaiting* kepada Bank Jepang yang sudah menjadi *counterpart* yang membutuhkan garansi dari bank Pemerintah.
   d. ***Cash Management***
   Bekerjasama dengan Divisi *Transaction Banking Services* (TBS), memasarkan produk BNI *direct* kepada nasabah Jepang di Indonesia
   e. ***Kartu Kredit***
   Bekerjasama dengan Divisi Bisnis Kartu (BSK) menawarkan kartu kredit personal maupun korporasi yang berlogo Japan Card Bureau (JCB) kepada nasabah Jepang.

6. ***Custody***
Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal no. 8/1995, Kustodian merupakan Jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Adapun jasa yang ditawarkan BNI *Custodial Services* ialah sebagai berikut.

a. ***Custody Services***
   i. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga baik *scrip* maupun *scripless* pada Bursa Efek Indonesia.
   ii. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga yang diterbitkan pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
   iii. Penyimpanan, pengelolaan dan pengadministrasian surat berharga di pasar internasional yang terdaftar pada *Euroclear* sebagai salah satu lembaga depositori internasional.

b. ***Fund Services***
   Jasa layanan terhadap proses transaksi sampai dengan penghitungan nilai aktiva bersih (neraca, laba/rugi, laporan portfolio) untuk Reksa Dana, Kontrak Pengeloaan Dana (KPD) dan *Unit Link*. Layanan yang diberikan meliputi *Fund Accounting*/*Fund Administration*, pengawasan, pelaporan dan publikasi

c. **Wali Amanat dan *Agency***
   i. Wali Amanat
      Bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan efek bersifat utang, meliputi:
      - Penyusunan kontrak perwaliamanatan dengan emiten
      - Monitoring emiten atas pemenuhan kewajibannya
      - Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi
      - Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
   ii. Agen Jaminan (*Security Agent*)
      Pengadministrasian aset yang dijaminkan oleh suatu pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati.
   iii. Agen Pembayaran (*Paying Agent*)
      Memproses pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk aktivitas terkait transaksi pasar modal seperti pembayaran kupon/bunga, dividen, pokok obligasi atau surat hutang lainnya serta jasa pembayaran pembagian hasil jual/beli dan lain-lain.
   iv. Agen Penampungan (*Escrow Agent*)
      Pengelolaan, pemantauan dan pengendalian *escrow account* (rekening khusus) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati *(customized).*

d. ***Trustee***
   Trust merupakan kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta milik *Settlor* (pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola *Trustee*/ Bank) berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai *Trustee* dengan *Settlor* untuk kepentingan *Beneficiary* (penerima manfaat).

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.27/POJK.03/2015, *Trustee* dapat berperan sebagai:
   i. Agen Pembayar (*Paying Agent*)
   ii. Agen Investasi Dana (*Investment Agent)*
   iii. Agen Peminjam (*Borrowing Agent*)

   Trustee tidak hanya melayani nasabah korporasi, saat ini nasabah perorangan dapat menjadi nasabah *Trustee*. Hal ini berdasarkan POJK No 25/POJK.03/2016. Hal ini merupakan relaksasi aturan untuk mendukung program *Tax Amnesty.*

TRESURI

Produk *Treasury* Bank BNI diklasifikasikan ke dalam produk transaksional, produk investasi, dan produk lindung nilai *(hedging).*

1. **Transaksional**
   Produk transaksional ini terdiri dari Forex-TOD, Forex-TOM, Forex-SPOT, dan Forex- Bank *Notes*.

Rincian Terkait produk-produk transaksional diuraikan sebagai berikut.

a. Forex – TOD
Jual beli valuta asing dimana kesepakatan transaksi dan penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama.

b. Forex – TOM
Jual beli valuta asing dimana penyelesaian transaksi dilakukan 1 hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

c. Forex – SPOT
Jual beli valuta asing dimana penyelesaian transaksi dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

d. Forex – *Bank Notes*
Transaksi yang melibatkan pertukaran kepemilikan fisik dari mata uang (*banknotes*) yang terlibat dalam transaksi. Dapat dibedakan atas;
   i. Transaksi *Banking*
   Setoran/penarikan *banknotes* dari rekening nasabah dengan mata uang yang sama. Pendapatan bagi cabang adalah pendapatan *fee in lieu of exchange.*
   ii. Transaksi *Trading*
   Jual/beli *banknotes.* Pendapatan bagi cabang adalah dari selisih kurs.

2. **Investasi**
Produk investasi treasuri terdiri dari *Deposit on Call* (DOC), *Money Market Account* (MMA), dan obligasi retail. Rincian Terkait produk-produk investasi diuraikan sebagai berikut.

a. ***Deposit on Call*** (DOC)
   i. Penempatan dana jangka waktu minimal 3 hari s/d 30 hari
   ii. Tingkat suku bunga mengacu tingkat suku bunga interbank
   iii. Dapat di-*'call'* setiap saat
   iv. Minimal penempatan IDR 100 Juta atau USD 75 Ribu

b. ***Money Market Account (MMA)***
   i. Penempatan dana jangka waktu minimal 1 hari s/d 1 tahun
   ii. Tingkat suku bunga mengacu tingkat suku bunga interbank
   iii. Dapat di-*'call'* setiap saat
   iv. Minimal penempatan IDR 1 miliar atau USD 100 Ribu

c. Obligasi Retail
Obligasi adalah bukti hutang dari penerbit (*issuer*) yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai dengan kondisi dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi obligasi yang dapat dilakukan antara Divisi Tresuri dengan Nasabah Individu adalah transaksi sebagai berikut:
   i. Pada pasar primer meliputi obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah non ritel
   ii. Pada pasar sekunder meliputi obligasi perusahaan, obligasi pemerintah ritel, obligasi pemerintah non ritel, dan obligasi pemerintah Negara lain

3. **Lindung Nilai *(Hedging)***

Currency Forward
Jual beli valuta asing dimana penyelesaian transaksi dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kurs yang digunakan pada transaksi *forward* ini memperhitungkan *forward points*.

Currency Swap
Transaksi 'jual dan beli' atau 'beli dan jual' suatu mata uang terhadap mata uang yang lain yang dilaksanakan (secara simultan) dalam waktu bersamaan dengan *counterparty* (nasabah) yang sama.

Currency Option
Perjanjian untuk memberikan hak dan bukan kewajiban dari penjual (*option writer*) kepada pembeli (*option holder*) untuk membeli atau menjual sejumlah nominal mata uang tertentu untuk masa yang akan datang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya (*strike price*) pada atau sebelum waktu tertentu (*expiry date*).

Interest Rate Swap (IRS)
Kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran rangkaian pembayaran bunga secara

tetap (*fixed rate)* dalam satu mata uang dengan seri/rangkaian pembayaran bunga secara fluktuatif (*variable rate*) dalam mata uang yang sama (atau sebaliknya). Umumnya pertukaran pokok pinjaman tidak dilakukan dalam transaksi ini, tetapi pokok pinjaman digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bunga yang dipertukarkan.

Cross Currency Swap (CCS)
Kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan pokok pinjaman dan pembayaran bunga dalam mata uang yang berbeda. Pertukaran pokok pinjaman menggunakan nilai tukar pada saat dimulainya transaksi.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 2016

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan, BNI berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan institusi lain yang berasal dari negara, pemerintah, individu, masyarakat, sesama perusahaan keuangan, maupun badan partikelir lainnya.

Selain kontribusi terhadap bangsa dan negara tersebut, BNI berusaha menegaskan eksistensinya dengan berusaha untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor keuangan khususnya perbankan melalui layanan keuangan yang menyeluruh kepada semua nasabah perbankan dan nilai tambah bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Rencana jangka pendek BNI disusun berdasarkan pada rencana jangka panjangnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal terkini. Selama tahun 2016, BNI telah berhasil menjalankan rencana-rencananya dengan garis besar sebagaimana berikut.

1. Memperkuat ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen menengah pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas.
   a. Meningkatkan ekspansi bisnis di *selected corporate market* di sektor prioritas nasional yang mendukung program pemerintah
   b. Meningkatkan ekspansi segmen menengah pada sektor prioritas daerah dengan tetap menjaga kualitas portofolio
   c. Optimalisasi proses kredit yang fokus pada kecepatan proses namun tetap *prudent.*
   d. Meningkatkan kualitas kredit dengan fokus pada restrukturisasi dan *recovery* nasabah.

2. Meningkatkan *fee based income* (FBI) dan *current account saving account* (CASA) melalui penguatan *transactional banking* nasabah dan *value chain*-nya.
   a. Mengembangkan transaksi *targeted* nasabah Kementerian, institusi, dan korporasi melalui *integrated cash management*, *trade finance*, dan bank garansi.
   b. Meningkatkan utilisasi dan *wallet size cash management* di segmen menengah.
   c. Mengoptimalkan *supply chain financing* berdasarkan transaksi nasabah dan *value chain*-nya.

3. Memperkuat *positioning* produk *consumer banking*: BNI Griya, BNI Fleksi, dan kartu kredit serta Taplus.
   a. Meningkatkan penetrasi produk unggulan di *selected customer segment.*
   b. Mengembangkan kerjasama dengan *partner* bisnis untuk meningkatkan transaksi nasabah.
   c. Meningkatkan *cross selling* produk unggulan terhadap nasabah potensial.
   d. Melakukan pengembangan produk melalui optimalisasi pemanfaatan *e-channel*.
   e. Optimalisasi penetrasi BNI Fleksi pada nasabah *payroll* dan pensiunan
   f. Penetrasi produk dan layanan *retail* di cabang luar negeri kepada masyarakat Indonesia.

4. Mengimplementasikan layanan *digital* untuk peningkatan *sales* dan *customer interaction*.
   a. Meningkatkan transaksi nasabah melalui pengembangan *e-channel*, *e-commerce*,

dan solusi pembayaran elektronik menuju layanan digital.
b. Melakukan pengembangan produk dan layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan *customer interaction* dan penjualan.
c. Melakukan ekspansi infrastruktur *e-channel* untuk meningkatkan penetrasi di pasar potensial.
d. Meningkatkan utilisasi *e-channel* untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas *channel*.

5. Meningkatkan *cross selling* produk terhadap *targeted segment*.
   a. Optimalisasi *bundling* produk bank dan perusahaan anak kepada *potential customer*.
   b. Optimalisasi *e-channel* dalam *cross selling* produk dan layanan produk bank dan perusahaan anak
   c. Mengembangkan *targeted segment* dengan melihat perkembangan bisnis.

6. Mengoptimalkan *outlet* menjadi *revenue center* termasuk solusi finansial terintegrasi.
   a. Optimalisasi transaksi nasabah dengan memberikan *total financial solution*.
   b. Mengembangkan *value chain* pada seluruh lini dan perusahaan anak.
   c. Meningkatkan *referral* nasabah untuk produk perusahaan anak di seluruh *outlet*.

7. Melakukan akuisisi/divestasi perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang memiliki sinergi kuat.
   a. Melakukan akuisisi lembaga keuangan prospektif dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah.
   b. Memperkuat perusahaan anak dalam meningkatkan ekspansi bisnis melalui sinergi antar unit.

8. Meningkatkan *engagement* dan produktivitas pegawai.
   a. Meningkatkan kapabilitas pegawai dalam mendukung implementasi strategi bisnis
   b. Optimalisasi kapasitas pegawai dalam memenuhi kebutuhan bisnis

Rencana jangka pendek tahun 2016 tersebut secara umum telah berhasil dilaksanakan. Ekspansi kredit di sektor prioritas seperti pada sektor pertanian, manufaktur, infrastruktur, dan industri penunjang infrastruktur telah dilaksanakan secara optimal. Begitu juga ekspansi kredit di sektor potensial di masing-masing wilayah dan nasabah yang merupakan *supply/value chain* dari debitur korporasi. Untuk pemberian kredit di sektor kecil, BNI telah berhasil melampaui regulasi minimum pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertumbuhan portepel kredit di atas rata-rata industri tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga *Non-Performing Loan* (NPL) tidak terjadi kenaikan secara proporsional dan menghasilkan imbal hasil yang relatif tinggi.

Peningkatan pendapatan non-bunga dan pengumpulan dana murah telah dilakukan sesuai rencana di tengah ketatnya persaingan bisnis di sektor keuangan dan penempatan dana masyarakat dari institusi non-bank atau pun dengan adanya *fintech*. Persaingan bisnis di bidang digitalisasi layanan keuangan telah diantisipasi dengan meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada sehingga sistem tersebut siap untuk dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah sesuai yang telah dituangkan dalam dalam *Information Technology Strategic Plan* (ITSP). Hasil dari pelaksanaan rencana strategis di bidangan teknologi informasi tersebut yaitu berupa peningkatan jumlah transaksi dan peningkatan kualitas layanan.

Dukungan berupa layanan terhadap program-program pemerintahan dan regulator juga telah dilakukan dengan sempurna, antara lain dengan dukungan terhadap program literasi dan inklusi keuangan yaitu Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD) serta program mobil SiMolek selain edukasi keuangan langsung ke Tenaga Kerja Indonesia baik di Hong Kong maupun di daerah asal, sosialisasi *Tax Amnesty* di berbagai lokasi, program bantuan sosial (bansos), e-warung KUBE, kerja sama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), program Jaring (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*), penerbitan Kartu Lentera dan Kartu Masyarakat Sejahtera serta penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Layanan terhadap *state owned enterprise* (SOE)

dan institusi pemerintah lainnya juga dilaksanakan secara komprehensif mulai dari hulu ke hilir berupa pengelolaan investasi, pembiayaan transaksi, kerja sama penerbitan kartu debit/kredit *co-brand*, penyaluran kredit konsumer, *cash management*, dan penerbitan kartu pegawai/anggota.

Rencana penambahan dan penataan *outlet* juga telah dilakukan sesuai rencana. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan peningkatan *span of control* serta perluasan wilayah layanan bank, maka BNI di 2016 telah melaksanakan penambahan *outlet*, peningkatan status *outlet*, relokasi *outlet*, dan penambahan kantor fungsional (kantor wilayah) selain ekspansi anjungan tunai mandiri (ATM) dan *eletronic data capture* (EDC). Dengan penataan *outlet* tersebut pula, upaya penyediaan solusi keuangan terintegrasi berupa *cross selling* produk termasuk produk perusahaan anak dan peningkatan produktifitas pegawai dapat lebih mudah dicapai.

Dukungan terhadap amanat pemerintah lainnya dalam rangka percepatan pembangunan juga telah dilaksanakan oleh BNI. Rencana pembentukan *Holding* Lembaga Keuangan juga telah melalui tahap-tahap pembentukan sesuai rencana. Pembentukan perusahaan pengelolaan ATM dan EDC bersama dengan Bank-bank anggota Himbara telah diimplementasikan dan telah berhasil dilakukan dengan adanya pembukaan *outlet* berupa ATM dan EDC Merah Putih. Amanat dari pemerintah untuk Program *Tax Amnesty* pun telah berhasil BNI laksanakan. BNI selain berfungsi sebagai *gateway* penerimaan tebusan dan penempatan dana repatriasi juga berfungsi sebagai inisiator sosialisasi dan komunikasi *Tax Amnesty* ke berbagai kelompok masyarakat.

PENCAPAIAN KINERJA OPERASIONAL

KINERJA OPERASIONAL PER PRODUK DAN LAYANAN

PERBANKAN BISNIS

Kegiatan Perbankan Bisnis atau *Business Banking* BNI fokus untuk melayani para nasabah di segmen korporasi, menengah dan kecil.

Berbekal dengan optimisme dalam menghadapi kondisi ekonomi domestik dan global di tahun 2016 yang rentan terhadap krisis, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di 2016 antara lain perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih melemahnya harga minyak dunia. Di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok yang secara tidak langsung berdampak pada perlambatan ekonomi nasional, *Business Banking* BNI berhasil membukukan kinerja yang unggul diatas rata-rata Industri melalui strategi yang konservatif dan proaktif dalam menjaga kualitas aset. Ekspansi kredit *Business Banking* diarahkan pada intensifikasi maupun ekstensifikasi kepada korporat lokal dan perusahaan multinasional strategis yang bergerak pada sektor-sektor yang menjadi prioritas BNI maupun kredit sindikasi. BNI juga berusaha menjadi bank terdepan dalam inovasi *digital banking* guna meningkatkan *customer experience*, transaksi, dan penjualan.

BNI sebagai salah satu bank milik negara yang sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi sejalan dengan Trisakti dan Nawacita maka strategi ekspansi *Business Banking* BNI diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ekspansi di segmen menengah dan kecil dengan tetap menjaga kualitas kredit dan fokus terhadap industri prospektif pada sektor prioritas.

Adapun rincian terkait kinerja Produk Pinjaman *Business Banking* diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Kinerja Produk Pinjaman *Business Banking*

Keterangan	2016 Rp miliar	Komposisi	2015 Rp miliar	Komposisi	Pertumbuhan
Korporasi	174.073	60,8%	137.909	59,7%	26,2%
Menengah	61.330	21,4%	51.147	22,1%	19,9%
Kecil	50.684	17,7%	42.076	18,2%	20,5%
Luar Negeri	21.237	6,9%	19.538	7,8%	8,7%
Total	307.323	100,0%	250.670	100,0%	22,6%

Di tahun 2016, segmen *Business Banking* BNI berhasil membukukan pertumbuhan yang positif. Total pinjaman yang disalurkan mencapai sebesar Rp307,3 triliun, meningkat sebesar 22,6% dibandingkan dengan penyaluran pinjaman di tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp250,7 triliun. Dari sisi kualitas aset, segmen *Business Banking* juga terus menjaga kualitas aset dengan baik.

Segmen Korporasi

Segmen Korporasi BNI menangani pemberian pinjaman di atas Rp400 miliar untuk nasabah individu dan nasabah grup pada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, perusahaaan-perusahaan nasional dan multi nasional terbesar di Indonesia.

Di tahun 2016, segmen korporasi (termasuk pinjaman luar negeri) mampu membukukan pertumbuhan pinjaman sebesar 24,0% dari Rp157,4 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp195,3 triliun pada Desember 2016. Peningkatan pertumbuhan pinjaman tersebut berdampak pada peningkatan kontribusi segmen korporasi BNI menjadi sebesar 49,7% terhadap total portofolio pinjaman yang diberikan (BNI konsolidasi) dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 48,3%. Segmen korporasi terus mengoptimalkan perluasan bisnis dengan melakukan ekspansi fokus pada sektor – sektor prioritas BNI seperti infrastruktur (telekomunikasi, jalan tol dan konstruksi, kelistrikan, minyak dan gas serta transportasi), manufaktur, perdagangan dan perkebunan.

Dari sisi kualitas aset, meskipun pelemahan kinerja ekonomi global maupun nasional mempengaruhi kinerja beberapa debitur korporasi BNI, namun dengan strategi yang konservatif dan proaktif dalam mengelola kualitas aset, segmen korporasi masih mampu menjaga tingkat kualitas aset dengan baik.

Sepanjang tahun 2016, portofolio pinjaman BNI terus terdiversifikasi dengan baik pada sektor-sektor yang menjadi prioritas BNI. Sektor perindustrian memberikan kontribusi sebesar 27,7% terhadap total kredit bisnis korporasi, diikuti dengan sektor pertanian sebesar 18,3% serta listrik, gas dan air sebesar 14,0%.

Berikut adalah daftar sektor usaha 10 debitur besar individual dan grup pada akhir tahun 2016.

Individu

Debitur Individual	Jumlah (Rp)
Rokok	Rp6,0 triliun
Perantara Keuangan Lainnya(Non Bank) Selain *Leasing*	Rp5,4 triliun
Jasa Sosial Masyarakat	Rp4,5 triliun
Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	Rp2,6 triliun
Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	Rp1,9 triliun
Jasa Telekomunikasi	Rp1,8 triliun

Debitur Individual	Jumlah (Rp)
Bangunan Sipil Lainnya	Rp1,7 triliun
Administrasi Pemerintahan, dan Kebijaksanaan Ekonomi dan Sosial	Rp1,6 triliun
Industri Pengolahan	Rp1,5 triliun
Bangunan Sipil Lainnya	Rp1,5 triliun
Jumlah	Rp28,6 triliun

Grup

Debitur Individual	Jumlah (Rp)
Ketenagalistrikan	Rp20,4 triliun
Industri Pupuk	Rp7,8 triliun
Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton / *Paper Board*	Rp6,9 triliun
Perkebunan Kelapa Sawit; Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya; Industri Gula dan Pengolahan Gula	Rp6,5 triliun
Industri Semen, Kapur dan *Gips*, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	Rp5,9 triliun
Bangunan Sipil Lainnya	Rp5,7 triliun
Industri Semen, Kapur dan *Gips*, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	Rp5,4 triliun
Jasa Telekomunikasi	Rp5,4 triliun
Perkebunan Kelapa Sawit; Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	Rp5,1 triliun
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Rp4,4 triliun
Jumlah	Rp73,7 triliun

Berdasarkan jenis pinjaman yang diberikan, pada tahun 2016 mayoritas pinjaman korporasi disalurkan dalam bentuk Kredit Modal Kerja, yang mencakup 57,9% dari total pinjaman korporasi, atau sebesar Rp113,2 triliun sedangkan sisanya sebesar 42,1% atau Rp82,1 triliun merupakan Kredit Investasi.

Strategi Segmen Korporasi Tahun 2017

Dengan proyeksi perekonomian di tahun 2017 diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2016, dan sejalan dengan strategi untuk mewujudkan target bisnis 2017, segmen korporasi BNI telah menetapkan inisiatif-inisiatif strategi untuk memasuki tahun 2017, yaitu:

1. Ekspansi pinjaman fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah untuk korporasi dan BUMN yang mencakup hulu hingga hilir.
2. Perbaikan kualitas aset melalui fokus pengendalian NPL dan meningkatkan pendapatan *recovery.*
3. Identifikasi risiko kredit berdasarkan skala *low to high* dan *yiled high to low.*
4. Meningkatkan DPK terutama CASA melalui *closed loop transaction* dan transaksi *e-channel* serta mapping institusi potensial *(high to low).*
5. Optimalisasi *Value Chain* terhadap 24 *Group* Debitur Korporasi.
6. Sinergi korporasi dengan perusahaan anak.

Segmen Menengah

Segmen Menengah BNI mengelola pemberian pinjaman di atas Rp15 miliar sampai dengan Rp400 miliar untuk untuk nasabah individu dan nasabah grup.

Di tahun 2016, Bisnis segmen Menengah mampu menjawab tantangan yang muncul dari kondisi perekonomian Indonesia yang tumbuh melambat, dengan tetap memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi dengan kualitas aset yang masih terjaga baik. BNI memberikan jasa perbankan kepada perusahaan-perusahaan skala menengah melalui 32 Sentra Kredit Menengah (SKM) yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Grafik Pertumbuhan Segmen Menengah

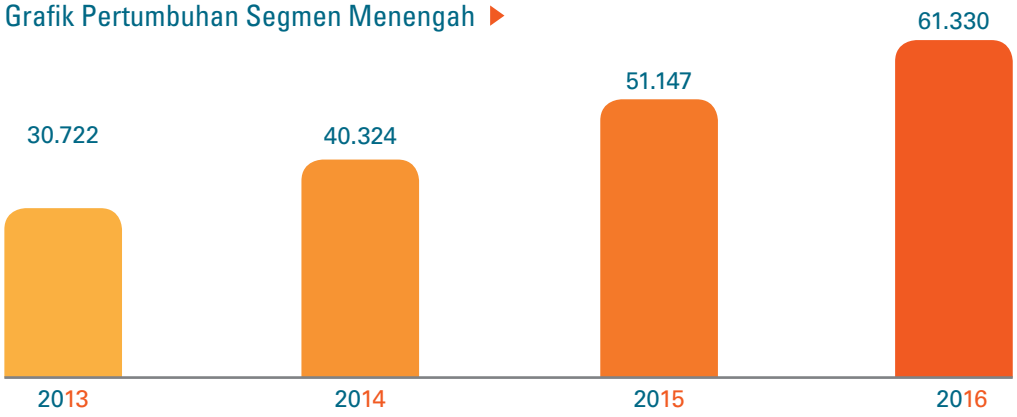

Pertumbuhan Pinjaman yang Diberikan Segmen Menengah

Pada akhir tahun 2016, pinjaman segmen menengah mencapai sebesar Rp61,3 triliun, atau tumbuh 19,9% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, serta mencakup 15,6% dari total kredit BNI (konsolidasi). Penyaluran pinjaman segmen menengah terdiri dari Kredit Modal Kerja yang menyumbang 66,6% atau sebesar Rp40,9 triliun, sedang 33,4% sisanya atau sebesar Rp20,4 triliun merupakan Kredit Investasi.
Pinjaman segmen menengah mayoritas disalurkan ke sektor perdagangan restoran dan hotel sebesar 31,5% diikuti dengan pinjaman di sektor perindustrian sebesar 30,4% dari total pinjaman segmen menengah.

Berikut rincian penyaluran pinjaman segmen menengah berdasarkan sektor yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Penyaluran Kredit Segmen Menengah Berdasarkan Sektor

		2016	2015
Perindustrian		30,4%	27,5%
Perdagangan, Restoran dan Hotel		31,5%	29,4%
Pertanian		3,6%	4,3%
Jasa Dunia Usaha		7,8%	10,0%
Konstruksi		9,9%	10,9%
Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi		9,0%	8,9%
Jasa Pelayanan Sosial		3,8%	4,2%
Pertambangan		2,7%	3,3%
Listrik, Gas dan Air		1,1%	1,5%

Inisiatif Strategis / Hal-Hal yang Telah Dilakukan di Tahun 2016

Dari sisi pengelolaan portofolio pinjaman agar tetap memberikan hasil optimal dengan risiko yang dapat diminimalisir berbagai upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jaringan distribusi dengan menambah 8 Sentra Kredit Menengah (SKM) untuk menggarap potensi pasar di daerah-daerah yang potensial dan meningkatkan *ticket size* debitur
2. Penyempurnaan bisnis proses dalam rangka peningkatan *Service Level Agreement* (SLA) debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*)
3. Melakukan ekspansi melalui akuisisi debitur baru (*take over*) bank lain yang telah teruji *past performance* dan ekspansi pada sektor ekonomi yang memiliki kualitas kredit yang ter-*manage*
4. Meningkatkan pemberian pinjaman dengan *asset based*.
5. Akselerasi Penanganan Pra NPL dan NPL dengan proaktif dan bersinergi dengan unit yang menangani pinjaman bermasalah.

Strategi Segmen Menengah Tahun 2017
BNI telah menetapkan serangkaian strategi sebagai pedoman bagi pengembangan segmen menengah untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. **Pertumbuhan Agresif**
   a. Fokus ekspansi pada sektor prioritas dan wilayah potensial
   b. Optimalisasi *outlet* dan menaikkan *ticket size* debitur
   c. Memaksimalkan potensi *value chain* debitur Korporat
   d. Menerapkan *pipeline management* dan *close monitoring*

2. **Peningkatkan Kualitas Aset**
   a. Pelaksanaan *Credit Risk Review*
   b. Peningkatan *Risk Awareness* personil kredit dengan implementasi *Credit Dicipline Program*
   c. Memperkuat *Early Warning System* melalui *Immediate Post Review* untuk segmen menengah
   d. Percepatan dan meningkatkan *Remedial dan Recovery* melalui implementasi organisasi *Remedial dan Recovery*.

3. **Profitabilitas**
   a. Optimalisasi *Yield* (Pendapatan) dengan *downsizing* debitur dengan *rate* rendah dan mengoptimalkan *Costumer Profitability Report* dan *Tactical Account Planning*.
   b. Menekan *Credit Cost* dan *Operational Cost* dengan perluasan penutupan Asuransi Kredit debitur segmen menengah.

4. **Meningkatkan Sinergi dan *Cross Selling***
   dengan mendorong *Closed Loop Transaction*, meningkatkan CASA melalui *cross selling* debitur Taplus/Giro dan mendorong peningkatan *Product Holding Ratio*.

Segmen Kecil

Segmen kecil BNI menangani pemberian pinjaman produktif untuk maksimum sampai dengan Rp15 miliar. Debitur dapat berupa nasabah individu maupun nasabah grup.

Pertumbuhan kredit
Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi bisnis usaha kecil, namun demikian segmen kecil BNI berhasil melalui tantangan tersebut dan berhasil membukukan kinerja yang baik.

Di tahun 2016, pinjaman segmen kecil mencapai sebesar Rp.50,7 triliun, atau tumbuh sebesar 20,5% dari pencapaian tahun 2015 yang sebesar Rp.42,1 triliun. Pencapaian ini menyumbang sebesar 12,9% dari total kredit BNI (Konsolidasi). Dari sisi Kualitas kredit, NPL segmen kecil juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan adanya penurunan % NPL dari 4,0% pada tahun 2015 menjadi 3,6% di tahun 2016.

Sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI sepanjang tahun 2016 telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp10,3 triliun kepada 44.877 debitur. BNI terus berkomitmen untuk berperan dalam mengembangkan usaha kecil, utamanya dengan penyaluran KUR melalui 24 Sentra Kredit Kecil dan 149 Kantor Cabang Pemutus Kredit.

Product	2016		2015		Growth Outstanding Kredit
	Outstanding Rp miliar	NPL	Outstanding Rp miliar	NPL	
Non KUR	39.720	3,8%	37.750	4,3%	5,2%
KUR	10.964	2,4%	4.326	1,8%	153,4%
Total	50.684	3,6%	42.076	4,0%	20.5%

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit program yang diluncurkan oleh Pemerintah untuk membantu mengembangkan pengusaha UMKM. Kredit Non KUR merupakan kredit komersil BNI.

Pencapaian kinerja di tahun 2016 tersebut dapat terwujud berkat beberapa pengembangan yang telah dilakukan oleh BNI, yakni :

1. Melakukan optimalisasi *outlet* sebagai *point of sales*
2. Melakukan Pengembangan akses *digital loan* untuk permohonan kredit debitur
3. Menggiatkan penyaluran KUR sebagai upaya mensukeskan program Pemerintah dalam mendorong kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan sektor ekonominya, mayoritas kredit segmen kecil disalurkan ke sektor perdagangan restoran dan hotel yakni sebesar 62,5%, diikuti oleh penyaluran ke sektor jasa dunia usaha dan sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 10,4% dan 9,0% dari total portofolio kredit segmen kecil.

Penyaluran Pinjaman Segmen Kecil Berdasarkan Sektor

Sektor Ekonomi	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	*Growth* Yoy	*Composition*	NPL 2016	NPL 2015
Perindustrian	4.565	3.949	3.579	15,6%	9,0%	3,6%	4,3%
Perdagangan, Restoran & Hotel	31.698	24.413	22.744	29,8%	62,5%	3,8%	4,3%
Pertanian	2.880	2.491	2.483	15,6%	5,7%	3,2%	3,6%
Jasa Dunia Usaha	5.288	5.073	5.216	4,2%	10,4%	1,8%	2,3%
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.453	1.339	1.317	8,9%	2,9%	6,2%	7,3%
Kontruksi	2.281	2.177	2.175	4,8%	4,5%	4,3%	4,2%
Listrik, Gas dan Air	58	53	70	9,1%	0,1%	3,6%	7,4%
Pertambangan	201	249	279	-19,2%	0,4%	4,8%	1,0%
Jasa Pelayanan Sosial	2.255	2.323	2.484	2,9%	4,4%	1,9%	2,4%
Lain-lain	0	9	0	100,0 %	0,0%	0,0%	0,0%
Total	50.684	42.076	40.375	20,5%	100%	3,6%	4,0%

Strategi Kerja 2017

Guna menjawab tantangan bisnis, menjaga kualitas aset, serta untuk dapat menggarap potensi pasar yang masih terbuka lebar, BNI telah menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan berbasis optimalisasi outlet dan *channel*
2. Memanfaatkan akses digital loan dan platform
3. Melakukan akselerasi penyaluran KUR utamanya pada sektor produktif
4. Membangun sinergi institusi dan pola kerjasama
5. Menggarap *value chain* atas perusahaan *anchor* segmen korporasi.
6. Memperkuat *early warning system* serta meningkatkan *risk awareness* personil kredit.
7. Penyempurnaan *collection management system*

DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN BISNIS

Dana pihak ketiga (DPK) *Business Banking* adalah sejumlah dana, baik untuk simpanan maupun untuk kegiatan operasional, yang dimiliki dan atau dikelola oleh nasabah institusi. Nasabah institusi dimaksud bisa berbentuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, BUMN, BUMD, Rumah Sakit, Kementrian dan berbagai Lembaga Pemerintah lainnya.

DPK *Business Banking* bisa berupa Tabungan, Deposito maupun Giro, sesuai dengan manfaat yang ingin diambil oleh nasabah institusi. Ketiga produk tersebut secara bersama-sama ditawarkan ke nasabah institusi terpilih dengan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi.

Untuk nasabah institusi, BNI mempunyai produk tabungan khusus, dengan bunga dan fitur yang kompetitif, yaitu Tabungan Bisnis. Segmen utama Tabungan Bisnis adalah berbagai perusahaan skala kecil, seperti perusahaan keluarga, yang biasanya digunakan dalam proses operasional perusahaan.

Sedangkan produk deposito BNI yang paling banyak diminati adalah Deposito Non Perorangan, *Deposit on Call* (DOC) dan *Money Market Account* (MMA). Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan produk deposito biasa, DOC dan MMA sangat menarik bagi para nasabah institusi tersebut, terutama untuk dana simpanan .

Produk giro BNI, yang dari awal diciptakan untuk nasabah institusi, cukup banyak digunakan oleh perusahaan nasional dan perusahaan multinasional.

JASA TRANSAKSIONAL PERBANKAN

Jasa Transaksional Perbankan merupakan jasa pengelolaan kas dari nasabah korporasi.

Sepanjang tahun 2016, BNI tetap berhasil dan terus meningkatkan keberadaannya sebagai bank transaksi pilihan nasabah melalui berbagai pilihan layanan *cash management* yang efisien, efektif, aman dan handal. Sebagai hasilnya, total frekuensi transaksi layanan manajemen kas terpadu melalui BNI *Direct (corporate internet banking)* tumbuh 45,3% mencapai 17,99 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp1.262 triliun dari sebesar Rp936 triliun di tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan bisnis layanan *transactional banking*, pendapatan berbasis *fee* juga tumbuh menjadi sebesar Rp477 miliar di akhir tahun 2016.

Peningkatan kinerja di atas didukung oleh beberapa inisiatif strategis di tahun 2016. Antara lain, sepanjang tahun 2016 BNI berhasil meningkatkan penetrasi layanan transaksional perbankannya di segmen nasabah korporasi (termasuk BUMN dan Pemerintahan), serta memperluas kehadirannya di segmen nasabah komersial dengan mengoptimalkan potensi debitur BNI di masing-masing wilayah.

BNI juga berhasil memperoleh kepercayaan dalam membangun layanan-layanan publik yang mendukung efisiensi dan transparansi birokrasi di berbagai kementrian dan lembaga pemerintahan, di antaranya untuk pembayaran pajak secara elektronik *real-time online* (BNI *e-Tax*) dan pembayaran bea cukai serta impor barang (BNI e-PIB), pembayaran pembuatan paspor, serta ikut berperan dalam pemrosesan *Tax Amnesty*. Beragam solusi *cash management* BNI telah berhasil membantu nasabah dalam menciptakan proses bisnis yang semakin efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas nasabah. Solusi-solusi elektronik yang dibangun juga mampu menciptakan efisiensi proses kerja di internal BNI sehingga meningkatkan layanan bagi nasabah.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, layanan transaksional perbankan BNI berhasil meraih berbagai penghargaan di tahun 2016, yaitu:

1. *Best Local Cash Management Bank in* Indonesia *as voted by Large and Medium Corporates* dari *AsiaMoney*
2. 2nd *Best Local Cash Management Bank in* Indonesia *as voted by Small Companies* dari *AsiaMoney*
3. *Best Cash Management Bank* in Indonesia 2016 dari *Alpha South East Asia*

Transaksi BNI Direct

Keterangan	2016	2015	Pertumbuhan
Jumlah Transaksi (juta Rupiah)	18,0	12,4	45,3%
Nominal Transaksi (triliun Rupiah)	1261,6	936,0	34,8%
Fee Based Income (miliar Rupiah)	477,0	436,6	9,3%

PENINGKATAN SUMBER DANA MURAH

Guna memenuhi kebutuhan para nasabah korporasi, BNI menawarkan berbagai produk giro, deposito dan tabungan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan operasional nasabah institusi. Di tahun 2016, pertumbuhan dana operasional nasabah perbankan bisnis tetap difokuskan pada dana murah, yang tumbuh semakin cepat dan efektif dengan saldo rata-rata dana murah sebesar Rp90 triliun, meningkat 3,6% dibandingkan saldo rata-rata sebesar Rp86,9 triliun di tahun 2015. Peningkatan kontribusi dana murah ini telah menghasilkan penurunan biaya dan *(cost of fund)* sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing BNI.

Total simpanan nasabah *business banking* mencapai Rp207 triliun pada akhir tahun 2016, yang mencakup sebesar 50,4% dari total dana pihak ketiga BNI. Pencapaian ini meningkat sebesar 20% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp172,5 triliun atau 49,4% dari total dana pihak ketiga tahun 2015.

Menjembatani strategi BNI untuk meraih pertumbuhan aset yang berkualitas dan tingkat profitabilitas yang baik melalui struktur pendanaan yang optimal, pada tahun 2017 BNI berinisiatif untuk meningkatkan *customer experience* melalui peningkatan *business solutions* dengan inisiatif-inisiatif sebagai berikut.

1. Fokus bisnis pada 15 Kementrian dan Lembaga, 20 BUMN Utama, berbagai institusi pendidikan, solusi untuk Pemda dan Rumah sakit, serta berbagai insitusi jasa keuangan, migas dan korporasi lainnya.
2. Meningkatkan peran BNI dalam layanan publik
3. Optimalisasi solusi-solusi berbasis elektronik dalam pengelolaan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak.
4. Meningkatkan solusi transaksi korporasi melalui *e-channel* untuk jasa pembayaran, penerimaan dan pengelolaan informasi keuangan nasabah.
5. Meningkatkan *fee based income* dengan solusi layanan operasional yang inovatif di berbagai sektor industi
6. Optimalisasi *Value chain.*
7. *Cross sell* jasa transaksional dan garansi bank kepada nasabah.

Data Balance

Keterangan	2016 Rp triliun	2015 Rp triliun	Pertumbuhan
Average Balance	90	87	3,6%
Ending Balance Giro	120	90	33,0%
Ending Balance BB (DPK *Business Banking*)	207	173	20,0%
Ending Balance DPK (*Business Banking* dan Konsumer)	410.9	349	17,7%

PERBANKAN KONSUMER

KREDIT KONSUMER

BNI Griya

Selama tahun 2016, penyaluran kredit BNI Griya difokuskan kepada segmen *primary property market* melalui kerjasama dengan *Developer*, sedangkan untuk segmen *secondary property market* penjualan BNI Griya dilakukan melalui *channel Property Agent* dan optimalisasi *outlet*.

Di segmen *primary property market*, BNI Griya memperluas kerja sama dengan *Developer* di seluruh Indonesia dan memberikan kemudahan serta kecepatan proses pengajuan kredit bagi calon debitur yang membeli properti baru di *Developer* kerja sama BNI tersebut.

Di segmen *secondary property market*, BNI Griya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah *Property Agent*, serta melakukan kegiatan *gathering* bersama untuk meningkatkan akuisisi aplikasi BNI Griya terutama pembelian properti seken. Pemasaran BNI Griya juga dilakukan dengan mengoptimalkan cabang sebagai *channel* penjualan kepada *walk in customer* dan program *cross selling* kepada nasabah *existing*.

Penyaluran kredit BNI Griya dilakukan pula dengan sinergi bersama Bisnis *Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel) dan Perusahaan Anak, untuk menggarap BNI Griya dengan target segmen direktur, *business owner* dan pegawai dari mitra institusi BNI.

Selama tahun 2016, telah dilakukan kerjasama dengan mitra institusi BNI, dimana produk BNI Griya dipasarkan secara *customized* dalam bentuk fasilitas *Home Ownership Program* (HOP) dengan *pricing* dan fitur khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan di segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), BNI juga turut berpartisipasi dalam program pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayan Perumahan (FLPP) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program Unggulan BNI Griya tahun 2016 antara lain adalah program suku bunga khusus BNI Griya dengan suku bunga menarik dan kepastian cicilan yang tetap hingga 5 tahun pertama. Selain itu, diberlakukan pula program instan *approval*, yaitu program percepatan proses kredit serta simplifikasi dokumen atas pengajuan BNI Griya khusus di beberapa mitra *Developer* BNI.

BNI Fleksi

BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI.

BNI Fleksi menjadi salah satu produk unggulan sektor kredit konsumer, dan *yield* yang relatif tinggi, dengan potensi pasar yang cukup besar, serta mempunyai kualitas kredit yang cukup baik.

BNI Fleksi difokuskan pada program fleksi *payroll* dengan strategi akuisisi melalui *cross selling* fleksi *payroll* kepada nasabah/debitur terpilih (*selected company*) melalui *payroll base customer*. Meningkatnya jumlah rekening *payroll* selama tahun 2016 memberikan potensi yang cukup besar bagi ekspansi BNI Fleksi, terutama karyawan PNS/ BUMN/Swasta. Fitur BNI Fleksi sendiri dapat bersifat *customized*, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan/institusi. Beberapa kerjasama dalam hal penyaluran BNI selama tahun 2016 antara PT. KAI, OJK, Pertamina Group, PT.Telkom, Medco Group, PT. PLN, dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Peningkatan *portfolio* BNI Fleksi dilakukan pula dengan pengembangan fasilitas kredit kepada pensiun melalui BNI Kredit Pensiun (BKP). Produk ini merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada calon pensiun yang akan memasuki masa pensiun maksimal 2 tahun ke depan, dengan plafon kredit yang cukup menarik yaitu dengan maksimum kredit sampai dengan 350 juta, serta jangka waktu yang lebih panjang, sampai dengan 10 tahun, serta bunga yang cukup bersaing. Penyaluran BNI Fleksi - Kredit Pensiun kepada calon pensiunan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pensiun beberapa institusi, antara lain dengan Taspen dan Asabri.

Peningkatan akuisisi BNI Fleksi juga didukung oleh fleksibilitas channel pemasaran melalui channel ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, disamping percepatan proses, simplifikasi dokumen dan kemudahan proses (*pre-aproval*)

Berikut ini rincian terkait kinerja pertumbuhan produk pinjaman Perbankan Konsumer yang disajikan dalam bentuk tabel.

Kinerja Produk Pinjaman Konsumer

Keterangan	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan
Mortgage	36,436	56,0%	34,719	60,3%	4,9%
Credit Card	10,527	16,2%	9,789	17,0%	7,5%
Payroll	8,949	13,8%	3,923	6,8%	128,1%
Auto Loan	5,161	7,9%	5,379	9,3%	(4,4%)
Others	4,017	6,2%	3,729	6,5%	7,7%
TOTAL CONSUMER	65,069	100,0%	57,539	100,0%	13,1%

Pada tahun 2016, kredit konsumer tercatat bertumbuh 13,1% dengan total portofolio menjadi Rp65,1 triliun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada produk pinjaman *payroll* (BNI Fleksi), yang mengalami pertumbuhan sebesar 128,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Simpanan Nasabah

Produk Dana Pihak Ketiga yang ditawarkan oleh segmen bisnis konsumer terdiri dari produk tabungan dan deposito.

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga

Keterangan	2016 Unit Rekening	Komposisi	2015 Unit Rekening	Komposisi	Pertumbuhan Unit Rekening
Tabungan	21.680.278	98,6%	16.823.018	98,3%	4.857.260
Deposito	309.831	1,4%	289.657	1,7%	20.174
Total	21.990.109	100%	17.112.675	100%	4.877.434

Kenaikan jumlah rekening tabungan pada tahun 2016, diantaranya diperoleh dari program akuisisi melalui kerjasama *payroll* dengan Perusahaan/Institusi terutama yang telah menjadi Nasabah/Debitur BNI di sektor Bisnis *Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel) serta berbagai macam kerjasama yang dibuat dengan Pemerintahan/Kementerian. Pertumbuhan jumlah rekening ini didukung pula dari pelaksanaan Program Pemerintah tahun 2016 dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah seperti Program Bantuan Sosial non tunai, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Simpanan pelajar (Simpel).

Jumlah Dana Pihak Ketiga

Keterangan	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan	149.148.336	73,1%	127.588.927	71,4%	21.559.410
Deposito	54.786.234	26,9%	51.047.962	28,6%	3.738.272
Total	203.934.570	100%	178.636.888	100%	25.297.682

Sejalan dengan peningkatan jumlah rekening, total dana pihak ketiga dari nasabah perorangan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp203,9 triliun atau tumbuh sebesar 14,2% dibandingkan pencapaian tahun 2015. Pencapaian tersebut dikontribusikan dari tabungan sebesar 73,1% dan deposito sebesar 26,9%. Total dana dari tabungan tumbuh 16,9% mencapai sebesar Rp149,1 triliun dan dari deposito tumbuh 7,3% mencapai sebesar Rp54,8 triliun. Kenaikan dana pihak ketiga tahun 2016 didorong pula oleh dukungan program yang fokus dan menyasar nasabah pada segmen tertentu.

Tabungan

Beragam pilihan produk tabungan yang ditawarkan oleh BNI disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pada setiap tahapan kehidupan.

Dimulai dari nasabah anak-anak, BNI Taplus Anak merupakan produk tabungan untuk membantu mengajarkan anak-anak menabung sejak usia dini. Pada tahun 2016, BNI Taplus Anak hadir turut mengembangkan bakat anak Indonesia dengan program lomba mewarnai dan menggambar nasional berhadiah liburan ke Korea. Selain menikmati indahnya wisata di Negara Ginseng tersebut, dengan semangat memperkenalkan layanan BNI di mancanegara, para nasabah cilik pemenang program "BNI Taplus Anak *Goes to Korea*" ini juga berkunjung ke Kantor Cabang BNI Seoul.

Kesungguhan terhadap komitmen terus mengasah bakat hebat anak Indonesia diwujudkan dalam berbagai kolaborasi dengan mitra kerjasama, diantaranya dengan PT Kuark Internasional dalam program "Olimpiade Sains Kuark" sejak tahun 2013, PT Mizan Publishing House dalam program "KKPK Mizan *Goes to Korea*", dan Sekolah Musik Yamaha dalam program "*Early Registration Campaign – Junior Music Course*".

Dalam rangka menggarap *segment Gen Y,* BNI menyediakan produk tabungan BNI Taplus Muda dimana fitur dan program-programnya dibuat relevan dengan kebutuhan/aktifitas segmen muda. Beberapa program BNI Taplus Muda yang diselenggarakan BNI tahun 2016 adalah Kado Belanja *Online* Taplus Muda, Java Jazz 2016, School to School dan 3 Level Taplus Muda yaitu program untuk para mahasiswa di selektif Universitas yang telah melakukan kerjasama BNI guna mengaktifkan Kartu Tanda Mahasiswa menjadi tabungan, menambah saldo tabungannya dan aktif melakukan transaksi.

BNI Tapenas sebagai tabungan perencanaan masa depan, merupakan simpanan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan untuk mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman. BNI Tapenas memberikan *benefit* dalam rangka mewujudkan rencana Nasabah di depan dengan perlindungan asuransi jiwa gratis. Selama tahun 2016 telah dilakukan beberapa program promosi BNI Tapenas, antara lain program hadiah langsung bagi Nasabah yang membuka BNI Tapenas melalui iBank BNI atau *mobile banking*, gratis *e-voucher* Lazada bagi Nasabah yang membuka BNI Tapenas melalui kantor layanan BNI, program gratis *pre-order gadget* Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge dan program Kado Merdeka BNI Tapenas gratis Logam Mulia, iPhone 6, Apple Macbook Air ed 2016, dan *Travel Voucher*.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada para nasabah yang setia dan aktif bertransaksi, BNI mempersembahkan Rejeki BNI Taplus (RBT) 2016. Program RBT tahun 2016 ini dilaksanakan lebih unik dengan tema program "Program Rejeki BNI Taplus - Pasti Ada Pemenang di Setiap Cabang". Program ini merupakan penghargaan BNI kepada nasabah yang melakukan penambahan saldo dan bertransaksi dengan *e-Banking* BNI serta berbelanja menggunakan Kartu Debit BNI dengan hadiah berupa Mobil Lexus LX570 dan Toyota Fortuner untuk kategori Nasional serta Toyota Sienta dan Honda Scoopy untuk kategori Regional.

Dalam upaya menjadi *transactional banking*, BNI terus melakukan inovasi pada berbagi fitur dan benefit pada produk tabungan untuk segmen wirausaha dalam memantau keuangan atau alur transaksi usahanya. Segmen wirausaha merupakan target market yang digarap secara serius dengan menawarkan BNI Taplus Bisnis yang memudahkan wirausaha untuk bertransaksi dengan bank. Program-program khusus yang menyasar segmen wirausaha diantaranya program bundling BNI Taplus Bisnis-EDC, Bundling BNI Taplus Bisnis-KUR Ritel, Kerjasama dengan strategic partner (Lotte Grosir dan Indogrosir), akuisisi Taplus Bisnis di Pusat Bisnis (Thamrin City, ITC Mega Grosir Surabaya dan Plaza Medan *Fair*) dan akuisisi BNI Taplus Bisnis Sahabat Agen 46.

Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana murah (CASA), khususnya tabungan, BNI melakukan pemasaran produk BNI Taplus untuk para pegawai Perusahaan/Institusi terutama yang telah menjadi Nasabah/Debitur BNI di sektor *Bisnis Banking* (Korporasi, Komersial, dan Ritel). Untuk para pegawai perusahaan yang ber*payroll* dengan BNI akan memperoleh berbagai benefit yang unik dibanding Bank lain seperti fasilitas pinjaman KTA BNI Fleksi dengan bunga kompetitif, KPR BNI Griya proses cepat, promo belanja berupa diskon atau cashback, produk bundling, program loyalti *payroll* dan info promo di Smartphone Android melalui install aplikasi BNI *Experience apps* di *Play Store*.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Keuangan yaitu *Tax Amnesty*, BNI merupakan salah satu Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menangani Program *Tax Amnesty* tersebut. Segenap *outlet* disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (Repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratan *Tax Amnesty* dari para wajib pajak.

Program lain yang telah diselenggarakan BNI tahun 2016 diantaranya adalah :

1. Dalam rangka sinergi BUMN, BNI melakukan *strategic partnership* dengan PT. Garuda Indonesia untuk menerbitkan Kartu Debit *Co Brand* BNI Garuda dimana kartu ini memiliki *Unique Value Proposition* berupa *Bonus Miles* Pembukaan Rekening, *Reward* Transaksi via POS dan *e-Commerce*, *Reward* Transaksi via e-Channel BNI: ATM BNI, SMS Banking dan Internet Banking, Cashback 20 Top Spender setiap Bulan, Welcome *Bonus Miles*, Diskon 5% Penukaran *Award Ticket*, Hemat 5% untuk Pembelian Tiket Garuda Indonesia, *Fast Track* Garuda Miles Platinum. Kartu Debit ini untuk menyasar nasabah yang memiliki hobi *travelling*.
2. Pemecahan Rekor Muri dengan melakukan pembukaan 100.000 rekening BNI Simpel secara serentak di Kota Makassar.
3. Dalam rangka memaknai hari Sumpah Pemuda, BNI melakukan deklarasi BNI Simpel bersama OJK berupa penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNI Simpel dengan 321 sekolah.

Jumlah Rekening Produk Tabungan

Produk	2016 dalam Unit Rekening	Komposisi	2015 dalam Unit Rekening	Komposisi	Pertumbuhan dalam Unit Rekening
Tabungan plus (taplus)	8.297.223	39,3%	7.660.207	46,7%	637.016
Taplus bisnis *)	500.112	2,3%	448.983	2,7%	51.129
TAPMA *)	2.544.192	12,0%	2.206.629	13,4%	337.563
TAPPA	1.463.570	6,9%	1.090.683	6,6%	378.887
Tapenas	236.506	1,1%	208.222	1,3%	28.284
Taplus anak	1.200.847	5,6%	1.052.092	6,4%	148.755
Simpanan pelajar (simpel)	244.231	1,1%	37.948	0,2%	206.283
Tabunganku	1.005.692	4,7%	867.340	5,3%	138.352
BNI Pandai	1.205.105	5,7%	487	0,0%	1.204.618
BNI dollar	58.347	0,3%	53.796	0,3%	4.551
Emerald saving	10.279	0,0%	9.378	0,1%	901
Other program pemerintah	3.350.690	15,7%	1.626.487	9,9%	1.724.203
Other	1.169.127	5,5%	1.156.662	7,0%	6.465
Sub Total	**21.285.921**	**100,0%**	**16.418.914**	**100,0%**	**4.867.007**
Tabungan haji Indonesia	394.357		404.104	2,5%	(9.747)
Total	**21.680.278**		**16.823.018**		**4.857.260**

Peningkatan jumlah rekening tabungan didominasi dari tabungan program pemerintah yaitu Tabunganku Indonesia Pintar dan Simpel Program Indonesia Pintar. Kenaikan dana produk tabungan tahun 2016, diantaranya didukung oleh adanya program Top Nasabah, *boosting payroll* dan Program PESTA, sehingga *rebound* angka pencapaian tabungan tahun 2016 terjadi lebih awal dibanding tahun 2015.

Jumlah Dana Produk Tabungan

Produk	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan Rp Juta
Tabungan plus (taplus)	78.955.305	53,3	72.403.301	57,2	6.552.004
Taplus bisnis *)	35.875.355	24,2	31.366.114	24,8	4.509.241
TAPMA *)	1.550.855	1,0	1.389.127	1,1	161.728
TAPPA	5.038.043	3,4	4.225.063	3,3	812.981
Tapenas	2.573.816	1,7	2.521.449	2,0	52.367
Taplus anak	2.424.224	1,6	2.054.004	1,6	370.220
Simpanan pelajar (simple)	23.261	0,0	4.499	0,0	18.762
Tabunganku	2.254.026	1,5	1.878.749	1,5	375.278
BNI Pandai	118.355	0,1	212	0,0	118.143
BNI dollar	12.089.105	8,2	6.472.661	5,1	5.616.444
Emerald saving	6.034.042	4,1	2.853.760	2,3	3.180.282
Other program pemerintah	800.189	0,5	708.605	0,6	91.895
Other	492.908	0,3	700.605	0,6	(207.698)
Sub Total	**148.229.484**	**100**	**126.511.838**	**100**	**21.651.646**
Tabungan haji Indonesia	918.853		1.012.046		(93.193)
Total	**149.148.336**		**127.589.889**		**21.558.453**

Keterangan:
Taplus Bisnis : TABI Perorangan dan Non Perorangan
TAPMA: TAPMA Perorangan dan Non Perorangan
BNI Dollar: BNI Dollar Perorangan dan Perusahaan
Others Program Pemerintah: Tabunganku – Indonesia Pintar, Indonesia Pintar (Simpel PIP)
Others: TKI Plus (Piloting) Kartu Plus, Kartu Cobranding, Takesra, Tabungan Mikro, dan Simpanan Mikro

Deposito

Deposito dapat menjadi salah satu instrumen investasi bagi nasabah. Dana nasabah dapat ditempatkan dengan berbagai pilihan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif. Untuk menghadapi persaingan suku bunga di pasar serta menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, BNI menerapkan strategi pemberian *Special Rate* yang selektif dengan tetap menjaga *Cost of Fund*, sedangkan untuk menarik nasabah yang tidak sensitif terhadap bunga BNI menawarkan program *Multigift* Deposito yaitu pemberian hadiah langsung dengan perhitungan nilai hadiah berdasarkan kriteria penempatan dana dan jangka waktu.

Jumlah Rekening Produk Deposito

Produk	2016 Unit Rekening	Komposisi	2015 Unit Rekening	Komposisi	Pertumbuhan Unit Rekening
Deposito	309.831	100,0%	289.657	100,0%	20.174
Total	**309.831**	**100,0%**	**289.657**	**100,0%**	**4.857.260**

Jumlah Dana Produk Deposito

Produk	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan Rp Juta
Deposito	54.786.234	100,0%	51.047.962	100,0%	3.738.272
Total	**54.786.234**	**100,0%**	**51.047.962**	**100,0%**	**21.558.453**

Kenaikan jumlah rekening deposito dan jumlah dana produk deposito didukung oleh adanya program pemberian *special rate* yang selektif serta program *Multigift* berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah.

BISNIS KARTU

BNI terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di bisnis kartu kredit di samping secara kontinyu mengembangkan bisnis kartu debitnya.

Kartu Debit

Kartu debit BNI memiliki berbagai pilihan dengan desain batik khas Indonesia meliputi Kartu Debit BNI *Silver*, Kartu Debit BNI *Gold*, Kartu Debit BNI *Platinum* serta Kartu BNI *Emerald World MasterCard* (khusus untuk nasabah prioritas). Selain itu, BNI juga terus melebarkan kerja sama dengan komunitas nirlaba dalam bentuk Kartu Debit *Affinity* maupun komunitas bisnis dalam bentuk Kartu Debit *Co-brand* meliputi Kartu Debit Ferrari by BNI, Kartu Debit LotteMart *Wholesale*, Kartu Debit Garuda, Kartu Debit Multimart dan Kartu Debit Indogrosir.

Kinerja 2016

Pada tahun 2016, pertumbuhan nilai transaksi kartu debit BNI mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan industri. Nilai transaksi kartu debit BNI pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp15,8 triliun, tumbuh sebesar 35,3% dibanding pencapaian tahun sebelumnya.

Selama tahun 2016, BNI aktif menyelenggarakan berbagai program menarik bagi para pemegang Kartu Debit BNI. Dalam rangka upaya peningkatan *sales volume* dan kartu debit yang aktif bertransaksi, fokus program promosi kartu debit selama 2016 yaitu pada *outlet-outlet* Supermarket, *Department Store* dan Restoran. Kerja sama dengan berbagai *merchant* favorit telah dilakukan dalam rangka membentuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kartu debit sebagai pengganti uang tunai. Sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi pemegang kartu debit, BNI terus berupaya memperluas kerja sama dengan mitra-mitra potensial. Program unggulan kartu debit BNI tahun 2016 diantaranya untuk Restoran yaitu KFC, Pizza Hut, Bakmi Gajah Mada, Cold Stone, Supermarket seperti LotteMart, Hypermart, Ranch dan Farmers Market serta Alfa Midi dan juga untuk *Entertainment* seperti Snowbay dan The Jungle.

Kerja sama kemitraan dengan beberapa komunitas bisnis, juga semakin ditingkatkan khususnya dalam program-program *loyalty* dan aktivasi. Beberapa program ditujukan untuk memberikan apresiasi tidak saja kepada para nasabah BNI namun juga mitra bisnis BNI. Untuk pemilik kartu debit *Co-brand* Garuda BNI, nasabah bisa mendapatkan *Triple Miles* setiap bertransaksi dengan menggunakan kartu debit *Co-brand* Garuda BNI. Program kartu debit Co-brand LotteMart *Wholesale* memberikan *cashback* setiap bulannya bagi setiap nasabah yang bertransaksi di LotteMart *Wholesale* dengan syarat saldo tertentu. Pada bulan November 2016 telah di launching Kartu debit *BNI-Indogrosir* salah satu program kartu debit ini adalah memberikan program *cashback* kepada para nasabah yang bertransaksi dengan kartu debit BNI-Indogrosir selama periode program.

Di samping itu, dalam mendukung pelaksanaan Program Pemerintah di tahun 2016, BNI telah bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yaitu:

1. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial melalui penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera.
2. Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan dan Budaya tingkat SMA di seluruh Indonesia.
3. Penyaluran subsidi bagi petani tebu dan bawang dari Kementerian Pertanian melalui penerbitan Kartu Tani.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerbitkan Kartu Jaring yang ditujukan untuk para nelayan.
5. Bank Indonesia dengan menerbitkan Kartu Lantera yang diperutukkan untuk para Nelayan di Batam.
6. Pendataan pekerja migran Indonesia di Singapura bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui penerbitan Kartu Identitas Indonesia Singapura (KPIS)

Strategi 2017

Credit Card

Tahun 2017, BNI akan fokus pada pertumbuhan *sales volume* maupun jumlah kartu debit yang bertransaksi dengan melakukan program pada 10 MCC utama yang disesuaikan dengan perilaku para pemegang kartu debit diantaranya adalah *Supermarket/Grocery Store, Clothing, Health Service, Home Furnishing, Department Stores, Entertainment, Restaurants, Food and Beverages, Watches and Jewelry, Telecommunication*. Fokus program promosi kartu debit ditahun 2017 meliputi program peningkatan *behaviour* nasabah maupun loyalti program untuk membangun *experience* dalam bertransaksi menggunakan kartu debit BNI baik skala nasional maupun skala regional. Strategi lain dalam upaya peningkatan jumlah kartu debit bertransaksi pada tahun 2017 dilakukan melalui program promosi yang bersifat atraktif dan berkarakter transaksional.

Selanjutnya untuk memperluas kemitraan dengan komunitas bisnis, BNI akan melakukan kerja sama dengan mitra potensial yaitu Pertamina dalam hal penerbitan dan pengelolaan Kartu Debit *Co-branding* BNI Pertamina serta dengan *fast food* KFC dengan menerbitkan kartu loyalti KFC.

Credit Card

Outstanding kartu kredit BNI pada akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar Rp768.443 Juta atau *growth* sebesar 7,54%, dibanding *outstanding* akhir tahun 2015. Adapun *outstanding* kartu kredit di akhir tahun 2016 sebesar Rp10.526.975 Juta dan di akhir tahun 2015 sebesar Rp9.788.532 Juta Rupiah. Meningkatnya *outstanding* kartu kredit BNI didukung oleh pertumbuhan jumlah kartu dan peningkatan *sales volume* kartu kredit melalui penetrasi program "*every day transaction*", penambahan fitur cicilan pada *merchant-merchant* terkemuka dan penetrasi BNI *reward Point redemption online*. Kenaikan *outstanding* kartu kredit diiringi dengan kenaikan *Fee Based Income* dan Nilai transaksi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel Kinerja Kartu Kredit

Keterangan	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	Pertumbuhan
Nilai Transaksi	32.617	32.498	0,4%
Fee Based Income	1.291	1.200	7,5%

Strategi 2016

Strategi 2016 Bisnis Kartu BNI mengusung tema "***Your Card for Your Everyday Transaction***" masih tetap fokus dalam peningkatan portofolio jumlah pengguna kartu kredit BNI. Peningkatan portofolio tersebut melalui:

1. Akuisisi yang agresif dengan peningkatan sinergi antar bisnis di BNI melalui optimalisasi *captive* data, kerja sama perusahaan anak dan melakukan *leverage* kerja sama dengan partner BNI saat ini baik *co-branding* maupun *affinity*, melalui *payroll based* dengan optimalisasi *channel* cabang dengan pendekatan *close relationship*.
2. Inisiasi *Credit Limit Increase* Program untuk nasabah terpilih.
3. Mengoptimalkan akuisisi *electronic channel* baik *channel* milik BNI antara lain ATM maupun *partner* antara lain *website partner*.
4. Program *pre-embossed* dan *pre-approve* kartu kredit.
5. Akuisisi Kartu Kredit BNI untuk individu pada perusahaan *partner Corporate Card* BNI dengan simplifikasi proses.

Peningkatan *Sales Volume* Kartu Kredit BNI juga dilakukan dengan:

1. Memaksimalkan program *everyday transaction*, *Travel Related* dan *Online Transaction* (*e-commerce*).
2. Optimalisasi kerjasama kemitraan yang sudah terjalin dengan partner *co-branding* maupun *affinity* melalui program-program promosi yang meningkatkan *leverage* aktivitas yang terkait dengan kemitraan tersebut.
3. Pengembangan *corporate card* selain untuk melayani transaksi travel dan *entertainment* juga akan dikembangkan sebagai *procurement* card dan diharapkan mampu meningkatkan penetrasi penggunaan *corporate card* di setiap perusahaan.
4. Program *Loan on Phone* pada selected customer.
5. Memaksimalkan program 0% *installment* di merchant, serta *installment* bunga ringan melalui konversi via SMS.

Kinerja 2016

Selama tahun 2016,BNI aktif menyelenggarakan berbagai program menarik bagi para pemegang Kartu Kredit BNI dan pengembangan produk baru untuk memperluas pasar pengguna Kartu Kredit BNI antara lain:

1. Ikut serta dalam berbagai event besar seperti Indonesia *Fashion Week*, Inacraft, Garuda Indonesia Travel Fair (GATF), Java Jazz Festival dan kegiatan besar lainnya.
2. Kerjasama dengan merchant-merchant besar *e-commerce* seperti Tokopedia, Elevenia, Traveloka, Tiket.com, Agoda, Jd.id, Zalora, Lazada, Blibli.com, Dinomarket dan *merchant e-commerce* lainnya. Beberapa inisiatif dilakukan untuk menambahkan fitur cicilan 0% secara *online* di website merchant seperti yang telah berjalan di *website* Lazada, Tokopedia, Traveloka, Panorama, Blibli, Dinomarket, Bhinneka, Jd.id, Garuda Indonesia, Citilink, Bukalapak, dan Air Asia.
3. *Continuity* program masih tetap berlangsung dan menambahkan fitur cicilan 0% dengan *merchant-merchant* terkemuka seperti PT Kawan Lama, Electronic City, Electronic Solution, Best Denki, Erafone, iBox, EMAX,Mitra10, ATRIA, Modena, Telesindo, *Home Solution* dan berbagai *merchant* lainnya.
4. Kerja sama dengan *principal* baru yaitu AMEX
5. Kerja sama produk Kartu *Affinity* dengan PLN dan Budha Tzu Chi

Strategi 2017

Di 2017, Bisnis Kartu BNI yang memiliki tagline "*Your Card for Your Everyday Digital Transaction*" fokus pada Peningkatan *Fee Based Income* dan Peningkatan Portofolio Kartu Kredit BNI. Peningkatan *portofolio* melalui peningkatan penetrasi akuisisi kartu kredit dari *captive data based, new co-Branding partner* melalui penerbitan Kartu BNI co-Branding dengan Bank DKI dan Pertamina. Penetrasi *new segment digital banking based customer* serta *motivational program* untuk *Atrition-Team.*

Dalam rangka peningkatan Sales Volume tahun 2017, BNI akan melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Kerjasama *usage* program dengan *e-commerce* merchant yang strategis baik program *discount*/ potongan harga, installment, atau redemption BNI Reward Point, seperti :
   a. Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Air Asia, Traveloka, Tiket.com, Agoda.
   b. Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Zalora.
   c. MatahariMall.com, Lazada, Blibli.com, Dinomarket, JD.ID, Bhinneka.com.
2. Meningkatkan penetrasi *Sales Volume* di wilayah dengan memperbanyak program promo kartu kredit dengan *merchant-merchant local* melalui program *discount, cashback, redeem* BNI *Point reward*, dan cicilan
3. Meluncurkan beberapa jenis produk baru diantaranya:
   a. Kartu Kredit BNI *Mastercard World* yang akan memberikan *benefit* dan fitur sebagaimana kartu bersegmentasi premium untuk menikmati promo menarik di *merchant* pilihan dan mengusung konsep *contactless* dalam bertransaksi.
   b. Kartu Kredit *Digital Card* yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi karena mengusung konsep *contactless* dalam melakukan transaksi di merchant.
   c. *Distribution Card*, diperuntukkan bagi segmen komersial khususnya untuk agen, distributor dan pemasar dari institusi yang bekerjasama dengan BNI.
4. *New digital channel* sebagai media penawaran program fitur *installment*, akusisi kartu kredit dan *channel* transaksi kartu kredit (QR Code)
5. Meningkatkan *relationship* dengan PIC *Corporate Card, Corporate Client* melalui RM Divisi Pengelola *Corporate Client* serta membuat *loyalty program*.
6. Peningkatan Kerjasama *Co-Branding* pada 2 partner yang strategis untuk peningkatan jumlah kartu dan *Sales Volume* :
   a. PT Pertamina (Persero)
   b. PT Bank DKI

PERBANKAN INTERNASIONAL

Produk Pinjaman

Produk pinjaman seluruh KCLN mayoritas mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 KCLN secara total KCLN berhasil mencapai angka Rp21,2 triliun, tumbuh sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya dengan pencapaian pada produk pinjaman hanya sebesar Rp19,6 triliun. Peningkatan ini terjadi karena ekspansi masing-masing KCLN yang sudah semakin meluas. Pertumbuhan pada *Local Loan* yang signifikan yaitu sebesar 52,2% dengan pencapaian Rp8,7 triliun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar Rp5,8 triliun. Hal ini menjadi bukti bahwa KCLN sudah mulai menunjukkan eksistensinya di mata warga lokal di masing-masing Negara.

Rincian kinerja produk pinjaman Perbankan Internasional diuraikan sebagai berikut.

Kinerja Produk Pinjaman Perbankan Internasional

Keterangan	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan
Local Loan	8.755.338	41,2%	5.751.504	29,3%	52,2%
Offshore Loan	11.936.907	56,2%	13.440.565	68,4%	(11,2%)
Trade Loan	533.551	2,5%	449.286	2,3%	18,8%
Total	**21.225.796**	**100,0%**	**19.641.354**	**100,0%**	**8,1%**

PRODUK DANA PIHAK KETIGA

Sama halnya dengan produk pinjaman, produk Dana Pihak Ketiga (DPK) ditawarkan oleh Kantor Cabang Luar Negeri sesuai *license* yang dimiliki masing-masing KCLN. Untuk KCLN London dan New York, kedua KCLN ini tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi retail.

Jumlah Dana Pihak Ketiga

Keterangan	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan
Tabungan	86.383	2,2%	61.642	1,7%	40,1%
Giro	2.277.978	57,9%	1.124.591	30,7%	102,6%
Deposito	1.571.673	39,9%	2.478.947	67,6%	(36,6%)
Total	**3.936.033**	**100,0%**	**3.665.180**	**100,0%**	**7,4%**

BNI Tokyo

BNI Seoul

BNI New York

BNI London

BNI Osaka

BNI Singapura

BNI Hong Kong

BNI Yangon

Peningkatan sisi Dana Pihak Ketiga seluruh KCLN secara mayoritas meningkat pada tahun 2016 dengan pencapaian sebesar Rp3,9 triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,4% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp3,7 triliun.

Sebabnya dikarenakan pada tahun ini BNI telah membuka KCLN baru di negara Korea Selatan dimana KCLN ini mempunya izin penuh (*full license*) untuk melakukan transaksi termasuk bisnis retail/*consumer*.

JASA DAN LAYANAN

Overseas Branches

Pertumbuhan kinerja *trade* KCLN tak kalah dengan *service* lainnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan 9,7% dengan pencapaian sebesar Rp5,6 triliun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5,1 triliun. Hal ini didukung oleh aktivitas ekspansi KCLN baik layanan pada penduduk lokal masing-masing Negara maupun transaksi *trade refinancing*.

Kinerja ***Overseas Branches***

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan
Trade	5.587.614	5.093.549	9,7%

Financial Institutions

Kenaikan di sisi *Bank Guarantee Under Counter* (BGUC) dari 2015 ke 2016 adalah karena SLA yang diberikan oleh BNI dapat membuat koresponden puas karena kecepatan dan kecepatannya, lalu *courtesy visit* yang kerapkali dilakukan para RM kepada bank koresponden yang juga memberikan *insight* kepada mereka mengenai layanan BGUC yang diberikan oleh BNI.

Kenaikan di sisi *Bank to Bank financing* dari 2015 ke 2016 adalah karena *pricing* yang diberikan sangat kompetitif sehingga jumlah Bank Koresponden yang melakukan transaksi *refinancing* kepada BNI bertambah banyak, lalu BNI juga mulai melakukan transaksi *Trade Advance* yang dapat berkontribusi dalam kenaikan yang cukup signifikan di sisi *interest*. Selain itu, SLA yang diberikan oleh BNI dapat membuat para koresponden puas dan nyaman karena kecepatan dan ketepatannya.

Pada tahun 2015 pencapaian *Bank Guarantee Under Counter* (BGUC) adalah sebanyak 2.275 slip sedangkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.681 slip dan mengalami kenaikan sekitar 17,8%. Sementara itu untuk *Bank to Bank Financing* pada tahun 2015 terdapat 59 transaksi, lalu naik menjadi 140 transaksi di tahun 2016 dengan pertumbuhan sekitar 137,3%.

Adapun rincian terkait kinerja *financial institution* diuraikan sebagai berikut.

Kinerja ***Financial Institution***

Keterangan	2016 Rp JuTa	2015 Rp Juta	Pertumbuhan
Bank Guarantee Under Counter (BGUC)	2.681 slip	2.275 slip	17,8%
Bank to Bank Financing	140 Transaksi	59 Transaksi	137,3%

BNI *Smart Trade*

Berikut uraian terkait kinerja pendapatan BNI *Smart Trade* yang disajikan ke dalam bentuk tabel.

Pendapatan BNI *Smart Trade*

Keterangan	2016 Rp miliar	Komposisi	2015 Rp miliar	Komposisi	Pertumbuhan
Ekspor	950,6	72%	583,67	69%	63%
Impor	373,3	28%	262,35	31%	42%
Total	**1.323,9**	**100%**	**846,02**	**100%**	**56%**

Kinerja BNI Smart Trade berdasarkan ***volume*** transaksi

Keterangan	2016 miliar USD	Komposisi	2015 miliar USD	Komposisi	Pertumbuhan
Ekspor	17,95	55%	17,11	59%	5%
Impor	14,49	45%	12,12	41%	20%
Total	**32,44**	**100%**	**29,23**	**100%**	**11%**

Pertumbuhan kinerja *trade* baik dari sisi volume maupun *revenue* tumbuh dengan baik. Selama tahun 2016 BNI sukses membukukan *revenue* sebesar Rp1.323,85 miliar, tumbuh sebesar 56% jika dibandingkan dengan pencapaian *revenue* tahun 2015 sebesar Rp846,02 miliar. Pertumbuhan agresif ini ditopang oleh transaksi ekspor tahun 2016 sebesar Rp950,59 miliar yang tumbuh signifikan sebesar 63% bila dibandingkan dengan pencapaian transaksi ekspor tahun 2015 sebesar Rp583,67 miliar.

Selain itu volume transaksi *trade* di tahun 2016 tumbuh sebesar 11% dengan pencapaian USD 2,44 miliar dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar USD29,23 miliar. Peningkatan volume ini didukung oleh meningkatnya transaksi impor di sepanjang tahun 2016 dengan volume USD14,49 miliar, tumbuh sebesar 20% apabila dibandingkan dengan volume tahun 2015 sebesar USD12,12 miliar.

Peningkatan revenue dan volume tersebut didukung oleh aktivitas ekspansi dari debitur korporasi dan adanya debitur baru yang menyalurkan transaksi trade. Peningkatan *revenue trade* tersebut didominasi oleh BUMN pada sektor infrastruktur dimana pada tahun 2016 pengembangan infrastruktur menjadi fokus program pemerintah.

Remittance

Peningkatan slip *Incoming Transfer* (ITR) sebesar 17,16 % dari 2,205,447 slip menjadi 2,583,811 slip dikarenakan penambahan jaringan kerjasama serta peningkatan IT dengan koneksi *Host to Host* (H2H) koresponden *remittance* di luar negeri.

Penurunan slip *Outgoing Transfer* (OTR) sebesar 8,64% dari 321,046 slip menjadi 293,311 slip dikarenakan adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/pbi/2015 yang berisi kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.

Kinerja produk *remittance*

Keterangan	2016 Rp Juta	Komposisi	2015 Rp Juta	Komposisi	Pertumbuhan
Slip Incoming Transfer (ITR)	2.583.811	89,8%	2.205.447	87,3%	17,2%
Slip Outgoing Transfer (OTR)	293.311	10,2%	321.046	12,7%	(8,6%)
Total	**2.877.122**	**100,0%**	**2.526.493**	**100,0%**	**16,3%**

Japan Desk

Transaksi Kredit mengalami penurunan yang drastis. Bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp199 miliar, di tahun 2016 menjadi Rp43,64 miliar atau turun 78,1%. Penurunan kredit disebabkan oleh adanya pelunasan bertahap dari debitur yang cukup besar. Debitur tersebut telah mendapatkan suntikan dana dari *Parent company* nya di Jepang sebagai dana untuk menambah modal kerja dan investasi. Selain itu, adanya pengaruh dari penurunan penjualan otomotif secara nasional dimana sebagian besar nasabah BNI adalah *supplier spare part* industri otomotif.

Namun sebaliknya, Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 yang sebesar Rp937.48 miliar menjadi Rp1.087,94 miliar di tahun 2016 atau meningkat sebesar 16,0%. begitu pula pada transaksi FI, dimana pada tahun 2015 mencapai Rp768,15 miliar menjadi Rp3.024,68 miliar di tahun 2016 atau meningkat sebesar 293,8%. Peningkatan dari DPK dan transaksi FI (*Forfaiting* dan BG *under Counter*) didorong oleh program *marketing* yang intensif dan terukur. Beberapa program tersebut diantaranya adalah gathering dengan nasabah, program undian berhadiah untuk nasabah, *workshop* produk BNI, dan *joint marketing* dengan Divisi/Sentra Kredit/Cabang terkait.

Adapun uraian terkait kinerja Japan Desk disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Kinerja *Japan Desk*

Keterangan	2016 Rp miliar	Komposisi	2015 Rp miliar	Komposisi	Pertumbuhan
Pinjaman kepada Japan Corporate	Rp43.64	100%	Rp199	100%	(78,1%)
Dana Pihak Ke tiga dari Japan Corporate	Rp1.087.94	100%	Rp937.48	100%	16,0%
Transaksi FI	Rp3.024.68	100%	Rp768.15	100%	293,8%
Total		**Rp4.156,26**		**Rp1.904,63**	**118,2%**

Custody

Pertumbuhan kinerja *Aset Under Custody* mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Selama tahun 2016 BNI *Custody* sukses membukukan *Asset Under Custody* sebesar Rp179,358 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 32,53% apabila dibandingkan dengan pencapaian *Aset Under Custody* tahun 2015 sebesar Rp135,336 triliun. Kinerja bisnis kustodi mengalami peningkatan secara signifikan didukung dengan adanya peningkatan kepercayaan nasabah *existing* terhadap BNI yang ditunjukan dengan meningkatnya penggunaan fasilitas layanan kustodi, pertambahan nasabah baru *(new customer)* dan adanya pertumbuhan ekonomi yang membaik memberikan sentimen positif terhadap pasar modal yang berpengaruh positif pada peningkatan *Asset Under Custody (AUC).*

Berikut kami uraikan kinerja *Aset Under Custody (AUC)* BNI ke dalam bentuk tabel.

Tabel Kinerja produk ***Custody*** (dalam juta Rupiah)

Keterangan	2016	2015	Pertumbuhan
Custodial Services	179.358.440	135.336.069	32,53%

Trustee

Terdapat peningkatan volume transaksi *Trustee* dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 14,9% dari Rp15,2 triliun menjadi Rp17,5 triliun.

Hal ini disebabkan karena:

1. Penambahan *volume* transaksi dan penambahan nasabah baru.
2. Relaksasi regulasi pemerintah terkait *tax amnesty* sehingga perorangan dapat menjadi nasabah *Trustee*

Tabel Kinerja Produk ***Trustee*** (dalam juta Rupiah)

Keterangan	2016	2015	Pertumbuhan
TRUSTEE	17.477.191	15.210.032	14,9%

TRESURI

Penjelasan terkait kinerja produk tresuri diklasifikasikan menjadi kinerja untuk transaksi *foreign* exchange *dan capital gain*. Adapun uraian terkait kedua transaksi tersebut diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Forex Gain

Pada tahun 2016, volume transaksi untuk produk *Tod, Tom*, dan *Spot* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar USD23,164 juta menjadi USD25,942 juta atau meningkat sebesar 12%. Begitu pula dengan profit pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari Rp315,164 juta menjadi Rp374,524 juta atau meningkat sebesar 19%. Peningkatan transaksi *Forex, Tod, Tom,* dan *Spot* karena adanya penambahan nasabah baru BUMN, Non BUMN dan Institusi, harga yang kompetitif, didukung oleh *Dealer* yang handal serta infrastruktur yang memadai.

Pada tahun 2016, *volume* transaksi untuk produk *FX Forward* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar USD605 juta menjadi USD849 juta atau meningkat sebesar 40%. Begitu pula dengan profit pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari Rp2,875 juta menjadi Rp4,042 juta atau meningkat sebesar 41%.

Untuk transaksi *FX Swap*, terjadi kenaikan *volume* sebesar 170% atau meningkat dari tahun 2015 sebesar USD58,25 juta menjadi USD157 juta pada tahun 2016. Sedangkan untuk profit meningkat sebesar 99%, yaitu naik dari tahun 2015 sebesar Rp277 juta menjadi Rp550 juta pada tahun 2016.

Untuk transaksi CCS dan IRS, terjadi kenaikan *volume* sebesar 713% atau meningkat dari tahun 2015 sebesar USD19,83 juta menjadi USD161,25 juta pada tahun 2016. Sedangkan untuk profit meningkat sebesar 303%, yaitu naik dari tahun 2015 sebesar Rp3,418 juta menjadi Rp13,772 juta pada tahun 2016.

Peningkatan transaksi *Hedging* (lindung nilai), yaitu *FX Forward, FX Swap, CCS,* dan *IRS* karena Dealer aktif melakukan pendekatan kepada nasabah untuk memberikan solusi *hedging*, dan juga infrastruktur yang memadai serta SDM yang *capable*.

Berikut ini rincian terkait kinerja *forex gain* berdasarkan *volume* transaksi dan *profit* yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Pertumbuhan *Forex Gain* berdasarkan Volume dan Profit

Produk	2016		2015	
	Vol (in USD)	Profit (id USD)	Vol	Profit
Tod, tom, spot	USD 25,924	IDR 374,524	USD 23,164	IDR 315,544
FX forward	USD 849	IDR 4,042	USD 605.34	IDR 2,875
FX swap	USD 157	IDR 550	USD 58.25	IDR 277
CCS, IRS	USD 161.25	IDR 13,772	USD 19.83	IDR 3,418
Total	**USD 27,092**	**IDR 392,888**	**USD 23,847.61**	**IDR 322,113.30**

Capital Gain

Pada tahun 2016, *volume* Obligasi Ritel mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp2,953,067 juta menjadi Rp4,131,561 juta atau meningkat sebesar 40%. Untuk profit transaksi mengalami kenaikan dari Rp22,507 juta menjadi Rp38,898 juta atau meningkat sebesar 73%.

Peningkatan transaksi Obligasi Ritel karena kondisi pasar yang sangat kondusif dan infrastruktur yang sudah mendukung untuk dilakukan transaksi lebih cepat dan *up to date*.

Berikut ini rincian terkait pertumbuhan *capital gain* berdasarkan volume transaksi dan profit yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Pertumbuhan ***Capital Gain*** berdasarkan Volume dan Profit

Produk	2016		2015	
	Vol (in USD)	Profit(id USD)	Vol	Profit
Obligasi ritel	IDR 4,131,561	IDR 38,898	2,953,067	IDR 22,507

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Aktivitas komunikasi pemasaran sektor *Consumer Banking* dan *Corporate Branding* dikelola oleh Divisi *Marketing Communication* (MCM) dengan koordinasi unit bisnis dan unit pendukung lain dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan dan kepuasan nasabah sejalan dengan visi dan misi BNI.

Sinergi antara sektor *Consumer Banking* dan sektor *Business Banking* senantiasa diupayakan melalui pendekatan *value chain model* sehingga dalam suatu mata rantai bisnis yang memberikan nilai tambah pada masing-masing tahapan diidentifikasi produk dan layanan BNI yang dibutuhkan yang dapat mempermudah proses dalam pengembangan bisnis.

Beragam program pemasaran dan promosi produk Konsumer *Banking* untuk nasabah secara umum dibuat sesuai segmentasi dan preferensi nasabah dengan konsep "*BNI Experience*" yang diklasifikasikan menjadi 5 (lima) *Iconic Cluster* yaitu BNI *Music Experience,* BNI *Fashion Experience,* BNI *Food Experience,* BNI *Travel Experience* dan BNI *Entrepreneurship Experience.*

Untuk mengkomunikasikan seluruh aktivitas pemasaran, BNI menggunakan media komunikasi yang terintegrasi mulai dari *Above The Line*, *Below The Line* yang diperkuat dengan *Online dan Social Media* BNI dengan jumlah *followers* per Desember 2016 dari seluruh akun Twitter BNI (@BNI, @BNIPromo, @BNICustomerCare dan @BNIYouthzone46) adalah 848.217 *Followers*, *Facebook* 264.097 *Likes* dan *Instagram* 47.500 *Followers*.

BNI *Music Experience*

Untuk ke-12 kalinya, BNI memanjakan nasabah para pecinta musik dengan menyajikan *event* musik *Java Jazz Festival* 2016 - sebuah *event* musik terbesar di Asia Tenggara. Nasabah BNI dapat menikmati berbagai *benefit* dan *privilege* bagi pemegang Kartu BNI (BNI Kartu Kredit, BNI Kartu Debit, BNI Emerald dan *Tapcash*) dimana BNI memberikan berbagai kemudahan dan keistimewaan bagi nasabah seperti *Buy 1 Get 2*, diskon 25% untuk pembelian tiket ataupun dengan cicilan, jalur masuk VIP bebas antrian, BNI *Lounge* serta berbagai *games* dan hadiah di *booth* BNI Taplus Muda.

BNI menjadi sponsor beragam *event* lainnya seperti *Java Jazz on the Move*, Ijen Summer Jazz, *Emerald Loyalty Program Annie The Musical*, *Prambanan Jazz, Loyalty Program* Konser Iwan Fals Malang, Konser Daniel Powter, Pertunjukan Hi 5, Borobudur *Nite* dan Konser *New Year* Glenn Fredly.

BNI *Fashion Experience*

Berbagai acara peragaan busana digelar selama tahun 2016 diantaranya Indonesia *Women Expo* 2016, Pameran Karya Anak Negeri *by* Anne Avantie, Batikology, Program *Loyalty "Tea season with Patrick Owen"*.

Selain itu BNI juga memberikan kemudahan bagi pecinta fashion untuk memiliki produk ternama seperti Giordano, Giordano Ladies, Guess, Frank and Co, GAP, Timberland, The North Face dan lainnya dengan program diskon, cicilan dan harga hemat dengan BNI *Reward Point*.

BNI *Food Experience*

Untuk para pecinta kuliner, BNI menawarkan beragam program promosi bagi pemegang Kartu Kredit dan Kartu Debit BNI untuk menikmati sajian istimewa di berbagai restoran ternama di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, dengan menawarkan diskon harga ataupun program promosi yang menarik lainnya antara lain di restoran The Duck King, Pancious, Pizza HUT, Coldstone, KFC, JCo, PHD, Krispy Kreme, ReJuve dan lain-lain. Untuk menyambut momentum tertentu, BNI juga menawarkan

serangkaian acara promosi kuliner tematik seperti *Imlek Dining Experience*, *Ramadhan Experience* serta *Year End Dining Experience*.

BNI *Travel Experience*

Tren untuk pergi liburan bersama keluarga dengan tujuan domestik maupun mancanegara semakin menjadi kebutuhan untuk sebagian masyarakat. BNI memanfaatkan momentum tersebut dengan program promosi yang menawarkan tiket pesawat dan paket liburan bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan *travel agent* seperti pada event Garuda Indonesia *Travel Fair* (GATF) 2016 dan beberapa program *travel* lainnya seperti BNI *Travel Experience* di PIM 2, Promo Kartu Kredit JCB, Promo Diskon 25% dengan Garuda Indonesia, Jetstar, Japan Travel Fair dan HIS *Travel Fair*. Untuk layanan pemesanan hotel dan paket wisata di seluruh dunia secara online BNI bekerjasama dengan Accor Hotel Group, Agoda, dan tiket.com.

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dan ditunjang dengan program *loyalty* untuk nasabah BNI Taplus, BNI menyelenggarakan program mudik bersama bernama Rejeki BNI Mudik 2016 yang bertujuan memberikan kesempatan pulang kampung atau mudik pada musim libur panjang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H secara gratis, dengan memulangkan sekitar 5.000 perantau yang ada di Jabodetabek serta 70 TKI yang bekerja di luar negeri.

BNI *Entrepreneurship Experience*

Sebagai bentuk kepedulian pembangunan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan dunia usaha, BNI membantu nasabah komersial ritel dan UKM untuk mempromosikan produk dan layanan melalui berbagai acara pameran produk dan industri.

Untuk ke-12 kalinya BNI menjadi partner utama dalam event Inacraft 2016 sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan Industri Kreatif karya anak bangsa. Dilanjutkan dengan menjadi sponsor pada *event* Mutumanikam yang merupakan pameran hasil perajin perhiasan nasional dari seluruh Nusantara; *event* WARISAN sebuah pameran Batik Tulis bukan cap dan *printing* dan pameran UMKM bernama BNI *Fashion* dan *Craft Festival* Surabaya.

Partisipasi Program Pemerintah

Sebagai Lembaga Jasa Keuangan , Bank Negara Indonesia turut mendukung Pemerintah dalam program Inklusi Keuangan yang diluncurkan oleh OJK yaitu Kartu Jaring yang diciptakan untuk memberikan kemudahan sesederhana Tabungan dan Kartu BNI Pandai yang sudah diluncurkan sebelumnya. Jaring sendiri merupakan singkatan dari program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penerbitan Tabungan dan Kartu BNI Jaring diharapkan dapat mempermudah realisasi sasaran utama Program Jaring yaitu meningkatkan pertumbuhan pembiayaan/kredit di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Bank Negara Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desan (disingkat BUMDES) sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa melalui penempatan Agen46 pada BUMDES – BUMDES tersebut. Selain itu BNI turut aktif pada kegiatan Expo Potensi Desa 2016 yang diinisasi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Achievement

Sepanjang tahun 2016 BNI mendapatkan beragam penghargaan antara lain sebagai berikut.

1. Customer X-Factor Award 2016 dari Hootsuite Singapore
2. Indonesia Leading Bank in Tourism Branding 2016 dari ITTA Foundation
3. Indonesia Best eMark Award 2016 untuk #AskBNI dari Telkom University dan Majalah SWA
4. Rekor Bisnis Indonesia 2016 untuk #AskBNI sebagai Auto response Twitter dari Tera Foundation dan Koran Sindo

DISIPLIN OPERASIONALISASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Proses yang berkelanjutan terus dilakukan BNI terhadap *sales people*-nya dalam membangun kebiasaan dan karakter Budaya Penjualan *(Sales Culture)* yang kuat, melalui aktivitas terstruktur dan terdokumentasi dalam proses penjualan yang dilakukan *(Account Planning, Staging Pipeline)*, di samping program-program yang diinisiasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapabilitas *sales* melalui program pelatihan dan sertifikasi. Keseluruhan proses adalah dalam rangka membentuk *sales* BNI yang *highly skilled*, *knowledgeable*, dan memiliki *positive attitude*.

Selama kurun waktu 2016, selain proses-proses dimaksud, ditanamkan juga pola kerja yang secara disiplin dilakukan dan dikawal secara harian yaitu disiplin operasionalisasi, suatu pola eksekusi pencapaian hasil dengan pengukuran keberhasilan yang merupakan turunan dari perhitungan berdasarkan *setup* target bisnis yang sudah ditetapkan. Pola *monitoring*-nya bahkan dilakukan sampai level kantor pusat. Hal tersebut sesuai dengan rencana kerja tahun 2016 yaitu menciptakan ritme operasional *(operating rhytm)* yang secara konsisten memberi dampak positif kepada eksekusi strategi bisnis BNI.

Dari pola strategi yang telah dilakukan, terdapat peningkatan rata-rata *sales performance* di tahun 2016, dimana tumbuh 36% dibanding tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel Rata-rata ***Performance Sales***

Subyek	2016	2015	Pertumbuhan
Avg. Performance Sales	121%	89%	36%

Grafik Rata-Rata *Performance Sales*

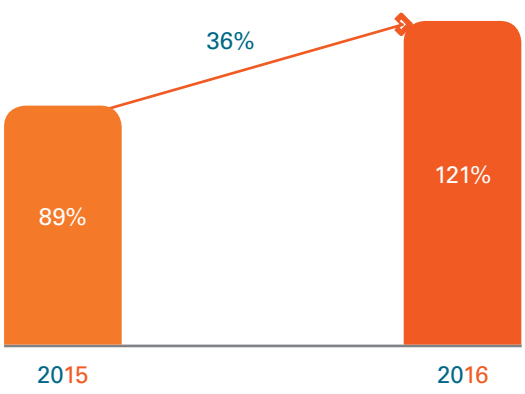

Selain pertumbuhan rata-rata *performance* sales, terdapat peningkatan jumlah *sales* yang mendapatkan insentif, dimana jumlah *sales* yang mendapatkan insentif tumbuh 17% di tahun 2016 dibanding tahun 2015, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Jumlah ***Sales*** Mendapatkan Insentif

Subyek	2016	2015	Pertumbuhan
Sales Mendapatkan Insentif	48%	41%	17%

Grafik Jumlah *Sales* Mendapatkan Insentif

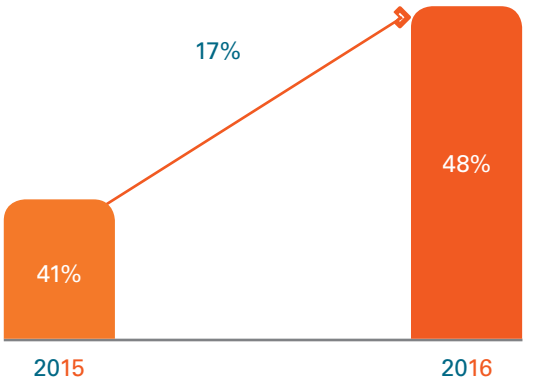

Rencana Kerja 2017

Inisiasi yang sudah dilakukan di tahun 2016 akan terus dioptimalkan di tahun 2017 demi mewujudkan ritme operasional yang lebih produktif, ditingkatkan dengan program-program pengembangan dan disesuaikan dengan arah strategi bisnis BNI tahun 2017. Optimalisasi pencapaian *sales* semakin terukur dengan diimplementasikannya *Key Performance Indicator* (KPI) *sales* yang baru, yang diatur sedemikian rupa sehingga *sales* menjadi lebih fokus terhadap aktivitasnya.

PANGSA PASAR

Analisis pangsa pasar diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank.

Kinerja Bank dibanding rata-rata Industri

Uraian		2016	2015	2014
Jumlah Aset	Industri (Rpmiliar)	6581,88	6129,35	5615,15
	Bank BNI (Rpmiliar)	603,03	508,60	416,57
	Pangsa Pasar	9,16%	8,30%	7,42%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri (Rpmiliar)	4733,98	4413,06	4114,42
	Bank BNI (Rpmiliar)	415,45	353,94	313,89
	Pangsa Pasar	8,78%	8,02%	7,63%
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	Industri(Rpmiliar)	4314,91	4057,90	3674,31
	Bank BNI (Rpmiliar)	393,28	326,11	277,62
	Pangsa Pasar	9,11%	8,04%	7,56%

Uraian		2016	2015	2014
PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN DENGAN RATA-RATA INDUSTRI BANK UMUM				
CAR	Industri	22,35%	21,16%	19,57%
	Bank BNI	19,4%	19,5%	16,2%
BOPO	Industri	81,7%	82,17%	76,29%
	Bank BNI	73,6%	75,5%	68,0%
ROA	Industri	2,32%	2,26%	2,85%
	Bank BNI	2,7%	2,6%	3,5%
LDR	Industri	91,48%	99,46%	89,42%
	Bank BNI	90,4%	87,8%	87,8%

(Sumber: Laporan Industri Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Per September 2016

Grafik Pangsa Pasar Bank BNI Dibandingkan Industri

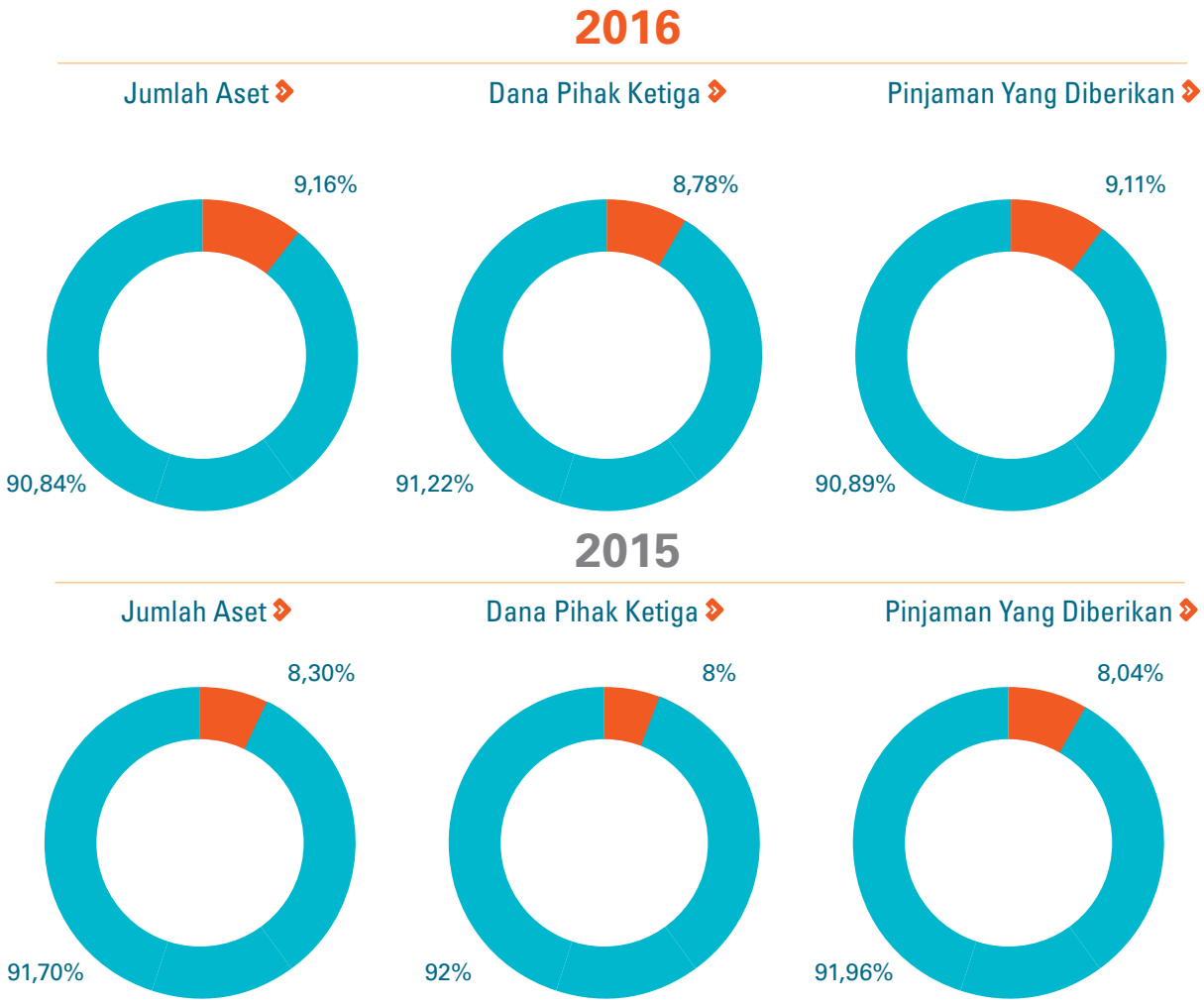

Pangsa Pasar Berdasarkan Aset

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Perseroan di 2016 mencapai 9,16%. Hal ini disebabkan oleh proporsi peningkatan jumlah aset Perseroan yang sejalan dengan proporsi peningkatan jumlah aset bank umum di Indonesia.

Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di 2016 mencapai 8,78%. Hal ini disebabkan kemampuan Bank dalam mengelola produk simpanan Bank sehingga mampu meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Bank sejalan dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum di Indonesia.

Pangsa Pasar Berdasarkan Pinjaman Yang Diberikan

Berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di 2016 mencapai 9,11%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank dalam mengelola produk pinjaman sehingga mampu meningkatkan penyaluran kreditnya.

Perbandingan Rasio Keuangan Dengan Rata-Rata Industri Bank Umum

Berdasarkan rasio keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal (CAR) di 2016 mencapai 19,4%, menurun dibandingkan tahun 2015 dan masih lebih rendah dari industri. Sedangkan beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 73,6% dibandingkan tahun 2015 namun masih lebih rendah dibandingkan industri. Imbal hasil atas aset (ROA) mengalami peningkatan sebesar 2,7% di tahun 2016 dan lebih tinggi dari industri. Selain itu, tingkat likuiditas (LDR) meningkat sebesar 90,4% di tahun 2016 dan masih lebih rendah dari industri.

PROSPEK USAHA 2017

Banyak pihak memperkirakan bahwa pemulihan perekonomian global diperkirakan lebih cepat di tahun 2017 daripada pemulihan ekonomi di tahun 2016. Untuk dua tahun mendatang, perekonomian dunia diperkirakan akan relatif lebih baik, Bank Dunia telah memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh 2,8% pada 2017 dan 3,0% pada 2018. Hal tersebut didasarkan pada fakta adanya upaya-upaya beberapa negara dalam pemulihan perekonomian mereka masing-masing.

Harga komoditas global diproyeksikan akan membaik secara perlahan walaupun akan berada pada level rendah, terutama untuk komoditas non-energi. Prospek komoditas energi saat ini dan ke depan diperkirakan akan tetap mengalami kondisi *oversupply* produksi di tengah terjadinya pelemahan permintaan dunia akibat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Otoritas moneter masing-masing negara di dunia, saat ini, berusaha untuk mengembalikan produktifitas ekonomi negara-negara tersebut melalui berbagai instrumen. Dengan adanya kecenderungan untuk *inward looking* maka kebijakan moneternya pun sangat bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara tersebut (*less divergent monetary policy*). Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mempunyai kecenderungan untuk menaikkan suku bunga acuan apabila memungkinkan. The Fed cenderung menaikkan suku bunga acuannya secara gradual, searah dengan indikator-indikator pemulihan perekonomiannya. Di pihak lain, Bank Sentral negara-negara Asia dan Eropa cenderung menerapkan kebijakan suku bunga rendah atau bahkan negatif, untuk mendorong konsumsi dalam negeri/kawasannya.

Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada momentum pemulihan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun depan diperkirakan akan berada pada level ideal yaitu berada di kisaran 2,2-2,5%. Bank Dunia memprediksi ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,2% pada 2017 dan 2,1% pada 2018, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan berada pada level 1,9%. Dengan makin membaiknya perekonomian dalam negeri Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan akan meningkat mendekati target yang dikehendaki The Fed yaitu di sekitar 2%. Dengan demikian, suku bunga acuan

The Fed (Fed Fund Rate/FFR) juga diproyeksi akan mengalami kenaikan secara gradual paling cepat mulai akhir tahun ini hingga tahun 2017 mendatang. Indikator lain yang berupa tingkat pengangguran, saat ini, berada pada kisaran 5% dan diperkirakan akan menurun pada tahun depan. Peristiwa politik berupa hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada awal November 2016 berpotensi meningkatkan ketidakpastian pada perekonomian global. Pasar memperkirakan bahwa kebijakan pemerintah baru bersifat proteksionis namun kebijakan proteksionis tersebut belum dapat diperkirakan detailnya sehingga berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, yang berdampak terutama pada negara-negara *emerging market*.

Pemulihan ekonomi kawasan Eropa masih diliputi ketidakpastian. Peristiwa politik berupa Brexit akan berdampak pada perekonomian negara-negara di kawasan tersebut baik dari aspek perdagangan, transaksi keuangan, maupun dari aspek investasi. Untuk membantu pemulihan ekonomi kawasan Eropa tersebut, Bank Sentral Eropa (ECB) kemungkinan akan memperpanjang kembali periode *quantitative easing* (QE) sebesar 80 miliar Euro per bulan yang seharusnya berakhir pada Maret 2017. Kepastian terhadap perpanjangan QE tersebut diperkirakan akan di ambil oleh ECB pada bulan Desember 2016. Dengan berbagai upaya dari ECB tersebut, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa diperkirakan masih akan stagnan pada level masing-masing 1,6% dan 1,5% untuk tahun 2017 dan 2018. Oleh karena itu, reformasi struktural dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa sekaligus sebagai upaya mencapai target inflasi 2% yang per September 2014 berada di lebel 0,4%. Untuk mendorong tingkat inflasi zona Euro, ECB diperkirakan masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang rendah yakni nol persen sehingga suku bunga simpanan berada pada level -0,4%.

Sejalan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dunia. Cina diperkirakan masih terus melanjutkan tren perlambatan ekonominya. Untuk tahun 2016, perekonomian Cina diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,7%, lebih rendah daripada periode sebelumnya sebesar 6,9%. Untuk tahun 2017 dan 2018, ekonomi Cina diprediksi akan tumbuh pada level yang relatif moderat yakni pada level 6,5-7,0%. Angka perkiraan yang moderat ini masih menggambarkan adanya pelemahan pada ekspor dan investasi. Upaya untuk mengatasi mperlambatan tersebut, pemerintah Cina akan melakukan kebijakan pelonggaran yang lebih fokus pada langkah-langkah fiskal pada tahun 2016.

Selain itu, faktor-faktor internal (domestik) yang mempengaruhi perubahan proyeksi makroekonomi 2017 - 2019 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan akan sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mengalami moderasi pertumbuhan. Pada tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 4,79%, sedangkan untuk tahun ini diperkirakan ekonomi dapat tumbuh sekitar 4,9-5,3%. Peningkatan konsumsi rumah tangga walaupun masih terbatas serta belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, serta adanya program *tax amnesty* diperkirakan mampu mendorong perekonomian relatif lebih baik pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

2. Daya serap anggaran belanja pemerintah yang sudah membaik, namun masih terbatas. Kementerian Keuangan optimis penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2016 dapat mencapai 97,1%. Hal ini dikarenakan banyak kementerian/ lembaga yang cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal tahun karena perencanaan yang makin baik. Selain itu, juga karena Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan percepatan terutama untuk berbagai belanja yang menyangkut infrastruktur.

3. Dari sisi likuiditas valas diperkirakan akan makin ketat, sehingga *supply* valas di dalam negeri berkurang. Hal tersebut terkait dengan rencana kenaikan Fed Fund Rate secara gradual paling cepat pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, potensi *capital flight* valas masih tetap akan ada.

4. Permintaan kredit akan meningkat menyusul adanya penurunan suku bunga kredit perbankan,

terutama kredit segmen kecil dan kredit usaha rakyat (KUR) hingga level *single digit*. Kebijakan ini ditempuh untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan kredit, dimana pada 2015 kredit hanya mencatat pertumbuhan 10,4% saja, dibandingkan 11,6% pada 2014 dan 21,6% pada 2013.

5. Adanya kebijakan pelonggaran aturan *Loan To Value* (LTV) untuk sektor properti dan rencana pelonggaran LTV untuk sektor otomotif. Bank Indonesia pada tahun ini kembali melonggarkan aturan LTV untuk sektor properti seperti tercantum dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 26 Agustus 2016. Berdasarkan aturan baru tersebut, LTV KPR pertama menjadi 85%, sehingga uang muka yang harus dibayar nasabah menjadi 15% dari total harga rumah, turun dibandingkan aturan sebelumnya yang sebesar 20%. Relaksasi aturan yang menyasar sektor properti ini akan memiliki efek pengganda manfaat ekonomi (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor lain seperti sektor konstruksi, industri, dan juga jasa keuangan termasuk asuransi. Selain itu, beberapa waktu lalu juga OJK berencana melonggarkan aturan uang muka Kredit Kepemilkan Kendaraan Bermotor (KKB) hingga 0%. Pelonggaran-pelonggaran ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit yang saat ini mencatat pertumbuhan *single digit*. Dengan adanya pelonggaran ini, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor properti dan penjualan otomotif.

6. Lahirnya paket-paket kebijakan pelonggaran ekonomi yang diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Dengan adanya berbagai insentif, pelonggaran dan kemudahan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menstimulasi kegiatan perekonomian sektor riil. Namun demikian, implementasi dan dampak positif dari paket kebijakan tersebut masih perlu dibuktikan dan dirasakan dalam jangka menengah .

Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan terkini dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri dan luar negeri atau perekonomian global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian penetapan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017-2019 yaitu sebagai berikut.

Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2017 – 2019

No,	Asumsi	2017	Tahun Proyeksi 2018	2019
Asumsi Makro				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,3	5,2-5,5	5,3-5,8
2	Inflasi (%)	4,0 – 4,5	3,5-4,5	4,0-5,0
3	Nilai Tukar Rupiah / Dollar Amerika Serikat (Rp,)	13.000 – 13.500	12.500-13.00	13.000-13.500
4	Bi 7 *days Repo Rate*	4,0 – 4,5	4,0-4,5	4,25-4,75
Asumsi Mikro				
1	Pertumbuhan Kredit (%)	13,0-15,0	15,0-17,0	15,0-17,0
2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)	11,0-13,0	13,0-15,0	13,0-15,0

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik, perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan, kebijakan dari otoritas (moneter, perbankan, dan fiskal), dan rencana perbaikan proses bisnis internal maka rencana BNI untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis melebihi industri di tahun 2017 adalah sangat tepat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan mewujudkan visi BNI untuk menjadi Lembaga Keuangan yang unggul dalam Layanan dan Kinerja, maka arah kebijakan BNI untuk periode 2017-2019 adalah fokus menjadi lembaga Keuangan dengan Kinerja Unggul dengan pertumbuhan agresif yang didukung dengan tingkat layanan yang semakin baik, serta optimalisasi *outlet*. Indikator dari kebijakan tersebut adalah ukuran aset, tingkat pengembalian investasi, produktivitas pegawai, sinergi antar unit dan perusahaan anak, dan layanan yang unggul serta nilai perusahaan bagi investor.

Arah Kebijakan BNI Tahun 2017 dan 2019

Ukuran	Lembaga Keuangan dengan Kinerja Unggul		
	Target		
	2017	2018	2019
Market Capitalization	Top 3	Top 3	Top 3
Total Asset	Top 3	Top 3	Top 3
ROA	Top 3	Top 2	Top 2
ROE	Top 3	Top 2	Top 2
CSI *Independent Surveyor*	Top 1	Top 1	Top 1
EPE	Top 3	Top 2	Top 2

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA 2017

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik, perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan, kebijakan dari otoritas (moneter, perbankan, dan fiskal), dan rencana perbaikan proses bisnis internal maka rencana BNI untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis melebihi industri di tahun 2017 adalah sangat tepat.

Pertumbuhan bisnis tersebut tentu saja dengan memperhatikan tata kelola yang baik (*good corporate government*), prinsip kehati-hatian perbankan, batasan regulasi, dan aspirasi pemegang saham. Dari sisi batasan regulasi, BNI bermaksud untuk tetap berada di area yang menjadi arah regulasi, antara lain rasio NPL jauh di bawah 5%, *Loan to Funding Ratio* (LFR) di bawah 92%, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di atas ketentuan sesuai dengan profil risiko di mana BNI berada.

Sesuai dengan aspirasi pemegang saham, BNI mentargetkan sasaran-sasaran keuangan yang lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan atau lebih tinggi dari rata-rata industri. Sasaran-sasaran keuangan tersebut adalah profitabilitas, *market share* baik pinjaman maupun dana pihak ketiga, dan tercapainya program-program yang diamanatkan pemerintah kepada BNI.

Untuk mencapai target-target tersebut, BNI berencana untuk melaksanakan rencana untuk tumbuh agresif di Tahun 2017 sesuai tahapan dalam rencana jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan* 2014-2018 dan Kebijakan umum Direksi tahun 2017. Rencana tersebut secara garis besar tertuang dalam Kebijakan Manajemen BNI tahun 2017 sebagai berikut:

1. Ekspansi kredit fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah untuk Korporasi dan BUMN yang mencakup hulu hingga hilir.
   a. Ekspansi debitur baru dan mengoptimalkan

penggunaan kredit debitur eksisting yang fokus pada proyek infrastruktur.
   b. Ekspansi debitur baru dan mengoptimalkan penggunaan kredit debitur eksisting pada sektor prioritas lainnya.
2. Ekspansi kredit Segmen Menengah secara selektif dengan fokus pada industri prospektif.
   a. Optimalisasi *Supply Chain* dari nasabah korporasi yang potensial
   b. Secara selektif melakukan *take over* debitur baru dari Bank lain yang potensial sejalan dengan sektor prioritas.
   c. Optimalisasi fasilitas debitur eksisting dengan tetap memperhatikan tingkat kewajarannya.
3. Ekspansi kredit Segmen Kecil di sektor ekonomi produksi dan prioritas.
   a. Optimalisasi *supply chain financing* debitur Korporasi dan sinergi dengan BUMN yang potensial.
   b. Memperbanyak *point of sales* melalui optimalisasi *outlet*.
   c. Mengoptimalkan *channel* kerjasama (Agen 46) dan penggunaan akses *digital loan*.
4. Ekspansi bisnis Konsumer dengan fokus pada optimalisasi eksisting nasabah BNI, *selected developer*, *selected partner,* dan *high transaction merchant.*
   a. Optimalisasi pemasaran BNI Griya, BNI Fleksi dan kartu kredit kepada pegawai institusi mitra dari *Business Banking*/Korporasi.
   b. Meningkatkan ekspansi BNI Griya dan BNI Fleksi melalui optimalisasi *outlet*.
   c. Fokus pemasaran melalui mitra pengembang yang memiliki kerjasama penyaluran KPR dengan BNI.
5. Meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) terutama *current account/saving account* (CASA) melalui *closed-loop transaction* dan transaksi *e-channel.*
   a. Fokus pada akuisisi nasabah dana melalui penetrasi *payroll* kepada karyawan debitur sektor *Business Banking*.
   b. Optimalisasi dana area, baik pemerintah daerah maupun institusi lainnya.
   c. Meningkatkan *share* transaksi *on us* dengan fokus penempatan *electronic data capture* (EDC) pada lokasi potensial.
   d. Pengembangan *digital channel* sebagai *point of acquisition* dan *point of transaction* untuk GEN-Y.
   e. Mewajibkan debitur kredit Kecil untuk menyalurkan dana operasionalnya melalui Tabungan dan Giro BNI.
6. Pengembangan *digital banking* untuk meningkatkan *customer experience*, transaksi, dan penjualan.
7. Meningkatkan *engagement* dan produktivitas pegawai

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2016 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	2016 (Rp miliar)	2015 (Rp miliar)	Pertumbuhan	
			(Rp miliar)	%
Kas	11.168	12.890	(1.723)	-13,4%
Giro pada Bank Indonesia	30.147	30.932	(785)	-2,5%
Giro pada Bank lain - neto	6.298	8.999	(2.701)	-30,0%
Penempatan pada bank lain dan BI - neto	33.662	33.417	245	0,7%
Efek-efek - neto	23.765	9.927	13.837	139,4%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	1.665	376	1.289	342,8%
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - neto	8.568	8.831	(264)	-3,0%
Tagihan akseptasi - neto	14.724	10.821	3.904	36,1%
Tagihan derivatif - neto	250	441	(191)	-43,3%
Pinjaman yang diberikan	393.275	326.105	67.170	20,6%
Cadangan kerugian penurunan nilai atas Pinjaman yang diberikan	(16.681)	(12.039)	(4.642)	38,6%
Obligasi Pemerintah	63.006	47.222	15.784	33,4%
Pajak dibayar dimuka	620	2.299	(1.679)	-73,0%
Beban dibayar dimuka	2.411	1.633	778	47,6%
Penyertaan saham - neto	57	36	21	58,3%
Aset lain-lain	6.793	4.483	2.311	51,6%
Aset tetap - neto	21.972	20.757	1.216	5,9%
Aset pajak tangguhan - neto	1.332	1.465	(134)	-9,1%
Total Aset	**603.032**	**508.595**	**94.437**	**18,6%**
Libilitas segera	3.276	1.805	1.470	81,5%
Simpanan Nasabah *	435.545	370.420	65.125	17,6%
Simpanan Dari Bank Lain *	10.224	4.698	5.527	117,6%
Pinjaman yang Diterima dan Efek-Efek yang Diterbitkan *	40.193	29.890	10.302	34,5%
Liabilitas derivatif	411	1.162	(751)	-64,6%
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.765	3.163	602	19,0%
Liabilitas akseptasi	4.359	6.188	(1.830)	-29,6%
Beban yang masih harus dibayar	1.047	917	130	14,2%
Utang pajak	151	749	(599)	-79,8%
Imbalan kerja	3.503	3.481	23	0,6%

	2016 (Rp miliar)	2015 (Rp miliar)	Pertumbuhan	
			(Rp miliar)	%
Penyisihan	156	99	57	57,6%
Liabilitas lain-lain	11.149	7.584	3.565	47,0%
Efek-efek yang diterbitkan*	7.227	7.367	(140)	-1,9%
Total Liabilitas	**513.778**	**430.157**	**83.621**	**19,4%**
Simpanan Nasabah	20.092	16.484	3.608	21,9%
Simpanan Dari Bank Lain	489	449	39	8,9%
Sukuk Mudharabah yang diterbitkan	496	496	-	0,0%
Total Dana Syirkah Temporer	**21.077**	**17.429**	**3.647**	**20,9%**
Kepentingan Non Pengendali	2.097	2.023	73	3,7%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	87.157	76.415	10.743	14,1%
Total Ekuitas	**89.254**	**78.438**	**10.816**	**13,8%**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**603.032**	**508.595**	**94.437**	**18,6%**

**Termasuk di dalamnya dana syirkah temporer*

Grafik Pertumbuhan Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan Nasabah

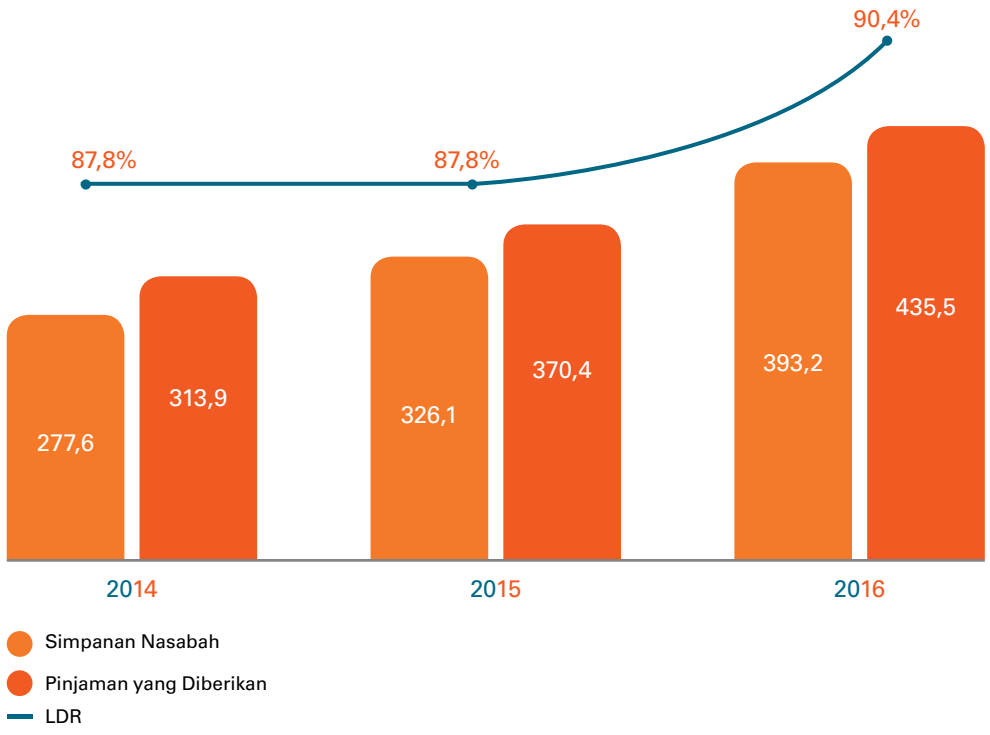

ASET

Tahun 2016 adalah tahun yang penuh tantangan bagi BNI ditengah persaingan dunia usaha perbankan yang semakin kompetitif. Tantangan yang paling berat dihadapi adalah untuk terus tumbuh secara sehat baik dari sisi aset maupun sisi laba perusahaan dengan terus dibayang-bayangi oleh perlambatan ekonomi baik global maupun nasional. Penyaluran kredit yang terus melambat merupakan salah satu dampak yang dirasakan dunia perbankan di tahun 2016. Namun angin segar kembali dihembuskan oleh pemerintah dengan menerbitkan pelonggaran kebijakan moneter di bulan November sebagai respon pemerintah karena adanya keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk mempertahankan suku bunganya.

Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor usaha, BNI tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan asetnya secara selektif pada sector yang prospektif, sehingga meningkat sebesar Rp94,4 triliun. Pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank berkontribusi 65,2% dari total aset di tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 20,6%. Fokus selanjutnya bagi BNI adalah memperbaiki kualitas aset dan menjaga ketersediaan cadangan kerugian sebagai salah satu bentuk mitigasi, ditandai dengan meningkatnya *Coverage ratio* dari 140,4% menjadi 146,0%.

Adapun rincian terkait Aset diuraikan dalam tabel berikut.

Aset

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 (%)	Pertumbuhan 2014-2015 (%)
Kas	11.168	12.890	11.436	(13,4)	12,7
Giro pada bank Indonesia	30.147	30.932	24.598	(2,5)	25,8
Giro pada bank lain	6.300	9.000	4.497	(30,0)	100,1
Penempatan pada bank lain dan BI	33.662	33.417	14.530	0,7	130,0
Efek-efek	23.856	9.964	12.743	139,4	(21,8)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.665	376	6.237	342,8	(94,0)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8.599	8.858	2.302	(2,9)	284,7
Tagihan ekspfektasi	14.809	10.900	12.531	35,9	(13,0)
Tagihan derivatif	250	441	165	(43,3)	166,9
Pinjaman yang diberikan	393.275	326.105	277.622	20,6	17,5
CKPN-Pinjaman yang diberikan	(16.681)	(12.039)	(6.970)	38,6	72,7
Obligasi pemerintah	63.006	47.222	43.830	33,4	7,7
Penyertaan saham	57	61	62	(6,6)	(2,6)
Asset tetap – neto	21.972	20.757	6.222	5,9	233,6
Pajak dibayar dimuka	620	2.299	1.437	(73,0)	60,0
Beban dibayar dimuka	2.411	1.633	1.392	47,6	17,3
Asset pajak tangguhan – neto	1.332	1.465	668	(9,1)	119,3
Asset lain-lain – neto	6.793	4.481	3.370	51,6	33,0
CKPN	(209)	(167)	(99)	25,1	69,0
Total Aset	**603.032**	**508.595**	**416.574**	**18,6**	**22,1**

Kas Dan Giro Pada Bank Indonesia

Posisi kas dan giro Bank Indonesia turun 5,7% dari Rp43,8 triliun di tahun 2015 menjadi Rp41,3 triliun per Desember 2016.

Giro Pada Bank Lain Serta Penempatan Pada Bank Lain Dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain serta penempatan pada bank lain dan BI turun 5,7% dari Rp42,4 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp40,0 triliun di Desember 2016. Hal ini sejalan dengan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengoptimalkan likuiditas perusahaan dengan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang lebih menguntungkan.

Efek-Efek

Efek-efek memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan giro atau penempatan pada bank.Untuk optimalisasi pendapatan, porsi efek-efek BNI di tahun 2016 meningkat sebesar Rp13,9 triliun atau 139,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Efek-Efek

	2016		2015		2014		Pertumbuhan 2015-2016		Pertumbuhan 2014-2015	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Korporasi	8.952	37,5	5.725	57,5	5.582	46,0	3.226	56,4	(127)	(2,2)
Bank	3.279	13,7	2.293	23,0	1.126	8,8	986	43,0	1.167	103,6
Bank Indonesia	11.625	48,7	1.946	19,5	5.765	45,2	9.680	497,5	(3.819)	(66,3)
Total	**23.856**	**100,0**	**9.964**	**100,0**	**12.743**	**100,0**	**13.892**	**139,4**	**(2.779)**	**(21,8)**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91)		(36)		(5.0)		(55)	150,9	(31)	625,8
Neto	23.765		9.928		12.738		13.837	139,4	(2.811)	(22,1)

Efek-Efek Yang Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Repo)

Tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI melakukan penyempurnaan dalam tata laksana transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* yang sebelumnya dianggap belum terlalu jelas rambu-rambu pelaksanaannya. Melalui POJK No. 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, SE OJK No. 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia dan berbagai Workshop GMRA memperlihatkan keseriusan regulator untuk membenahi dan menarik minat lembaga keuangan untuk melakukan transaksi Repo. Kondisi ini mendukung kenaikan transaksi Repo di tahun 2016 sebesar 342,8% menjadi Rp1,7 triliun dari Rp376 miliar di tahun 2015.

Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan sebagai bisnis utama bank memiliki komposisi 65.2% dari total aset, sedikit meningkat bila dibandingkan porsi tahun lalu yang mencapai 64.1%. Peningkatan tersebut didorong ekspansi yang cukup agresif atas pinjaman yang diberikan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 20.6% menjadi Rp393,3 triliun di tahun 2016.

Komposisi Pinjaman berdasarkan Jenis Debitur

	2016		2015		2014		Pertumbuhan 2015-2016		Pertumbuhan 2014-2015	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Korporasi	174.073	44,3	137.909	42,3	119.715	43,1	36.194	26,2	18.194	15,2
Menengah	61.330	15,6	51.147	15,7	40.324	14,5	10.824	19,9	10.824	26,8
Kecil	50.684	12,9	42.076	12,9	40.374	13,3	8.608	20,5	1.702	4,2
Consumer	65.069	16,5	57.540	17,6	52.024	29,9	7.530	13,1	5.516	10,6
Internasional	21.237	5,4	19.538	6,0	10.082	3,6	1.699	8,7	9.456	93,8
Perusahaan anak	20.882	5,3	17.896	5,5	15.104	5,4	2.985	16,7	2.792	18,5
Total Pinjaman	**393.275**	**100,0**	**326.105**	**100,0**	**277.622**	**100,0**	**67.170**	**20,6**	**26.984**	**9,7**

Komposisi Pinjaman Yang Diberikan

Komposisi tertinggi dari pinjaman yang diberikan terdapat pada segmen korporasi sebesar 44,3%, diikuti segmen konsumer dan menengah masing–masing 16,5% dan 15,6%, segmen kecil sebesar 12,9% dan cabang luar negeri sebesar 5,4% dari total pinjaman yang diberikan.
Secara konsolidasi, perusahaan anak berkontribusi menyalurkan pinjaman sebesar 5,3% dari total pinjaman yang diberikan.

Semua segmen pinjaman yang diberikan mengalami pertumbuhan yang cukup agresif, dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada segmen korporasi yaitu 26,2% atau meningkat dari Rp137,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp174,0 triliun di tahun 2016. Ekspansi segmen Korporasi paling pesat terjadi pada debitur BUMN terutama dari sector pertanian dan infrastruktur. Selanjutnya diikuti oleh segmen kecil yang tumbuh 20,5% dari Rp42,1 triliun di tahun 2015 menjadi Rp50,7 triliun di tahun 2016. Ekspansi segmen kecil di tahun 2016, didorong oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program Pemerintah denga skema subsidi dan penjaminan. Kemudian segmen menengah tumbuh sebesar 19,9% dari Rp51,1 triliun di tahun 2015 menjadi Rp61,3 triliun di 2016. Tumbuhnya segmen menengah digerakkan oleh omset *supply chain* dengan memanfaatkan Perusahaan Mitra dari debitur Korporasi.

Sedangkan segmen Konsumer tumbuh sebesar 13,2% atau sebesar Rp7,6 triliun dari Rp57,5 triliun di tahun 2015 menjadi Rp65,1 triliun pada tahun 2016. Pinjaman luar negeri tumbuh sebesar 8,7% dibandingkan dengan tahun 2015 dari Rp19,5 triliun menjadi Rp21,2 triliun di tahun 2016. Selain itu, perusahaan anak BNI juga mencatat pertumbuhan 16,7% dari Rp17,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp20,9 triliun di tahun 2016.

Komposisi Pinjaman berdasarkan Segmen dan Mata Uang

	2016		2015		2014		Pertumbuhan 2015-2016		Pertumuhan 2014-2015	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Korporasi	**174.073**	**44,3**	**137.909**	**42,3**	**119.715**	**43,1**	**36.164**	**26,2**	**18.194**	**15,2**
Rupiah	141.044	81,0	114.607	83,1	91.426	76,4	26.437	23,1	23.182	25,4
Valas	33.029	19,0	23.302	16,9	28.289	23,6	9.727	41,7	(4.988)	(17,6)
Menengah	**61.330**	**15,6**	**51,247**	**15,7**	**40.324**	**24,5**	**10.182**	**19,9**	**10.824**	**26,8**
Rupiah	59.933	96,1	48.785	95,4	38.056	94,4	10.148	20,8	10.728	28,2
Valas	2.397	3,9	2.363	4,6	2.267	5,6	35	1,5	96	4,2
Kecil	**50.684**	**12,9**	**42.076**	**12,9**	**40.374**	**14,5**	**8.608**	**20,5**	**1.702**	**4,2**
Rupiah	50.568	99,8	41.956	99,7	40.250	14,5	8.612	20,5	1.706	4,2
Valas	116	0,2	120	0,3	124	0,0	(4)	(3,1)	(4)	(3,0)
Consumer	**65.069**	**16,5**	**57.540**	**17,6**	**52.024**	**18,7**	**7.530**	**13,1**	**5.515**	**10,6**
Rupiah	65.038	100,0	57.514	100,0	52.008	18,7	7.524	13,1	5.507	10,6
Valas	31	0,0	25	0,0	17	0,0	6	22,8	9	53,1
Internasional	**21.237**	**5,4**	**19.538**	**6,0**	**10.082**	**3,6**	**1.699**	**8,7**	**9.456**	**93,8**
Rupiah	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Valas	21,237	100,0	19.538	100,0	10.082	10,0	1.699	8,7	9.456	93,8
Perusahaan Anak	**20.882**	**5,3**	**17.896**	**5,5**	**15.104**	**5,4**	**2.986**	**16,7**	**2.792**	**18,5**
Rupiah	20.582	98,6	17.536	98,0	14.878	98.5	3.046	17,4	2.658	17,9
Valas	301	1,4	360	2,0	226	1,5	(59)	(16,5)	134	59,2
Total Pinjaman	**393.275**	**100,0**	**326.105**	**100,0**	**277.622**	**100,0**	**67.170**	**20,6**	**48.483**	**17,5**
Total Rupiah	**336.164**	**85,5**	**280.398**	**86,0**	**236.618**	**85,2**	**55.766**	**19,9**	**43.780**	**18,5**
Total Valas	**57.111**	**14,5**	**45.707**	**14,0**	**41.004**	**14,8**	**11.404**	**25,0**	**4.703**	**11,5**

Kualitas Pinjaman Yang Diberikan

Rasio NPL bruto tercatat sebesar 3,0% di Desember 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,7%. Dalam rangka mitigasi risiko terkait dengan kondisi NPL tersebut, BNI membentuk *coverage ratio* yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari 140.4% menjadi 146.0% di tahun 2016.

Meski NPL bruto naik, namun NPL neto tercatat membaik dibandingkan dengan tahun 2015 dari 0.9% menjadi 0.5% di tahun 2016. Hal ini mencerminkan cadangan kerugian yang dibentuk cukup memadai untuk meng-*cover* peningkatan NPL yang terjadi di tahun 2016.

Kolektibilitas portofolio pinjaman yang diberikan BNI disajikan pada tabel berikut.
Tingkat Kolektibilitas Pinjaman yang diberikan

Pinjaman berdasarkan Kolektibilitas

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016		Pertumbuhan 2014-2015	
				Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Lancar	396.623	307.863	264.622	61,760	20,1	43.241	16,3
Dalam perhatian khusus	12.008	9.533	7.564	2.475	26,0	1.969	26,0
Kurang lancar	1.594	2.722	392	(1.129)	(41,5)	2.331	595,0
Diragukan	839	848	851	(10)	(1,1)	(3)	(0,3)
Macet	9.212	5.139	4.193	4.073	79,3	945	22.5
Total	**393.275**	**326.105**	**277.622**	**67.170**	**10,6**	**48.483**	**17.5**

Kenaikan NPL terjadi pada kategori macet sebesar Rp4,1 triliun didominasi oleh 2 (dua) debitur segmen korporasi. Sedangkan kredit kategori kurang lancar dan diragukan cenderung membaik.

Grafik Pinjaman Berdasarkan Segmen

(Rp miliar)

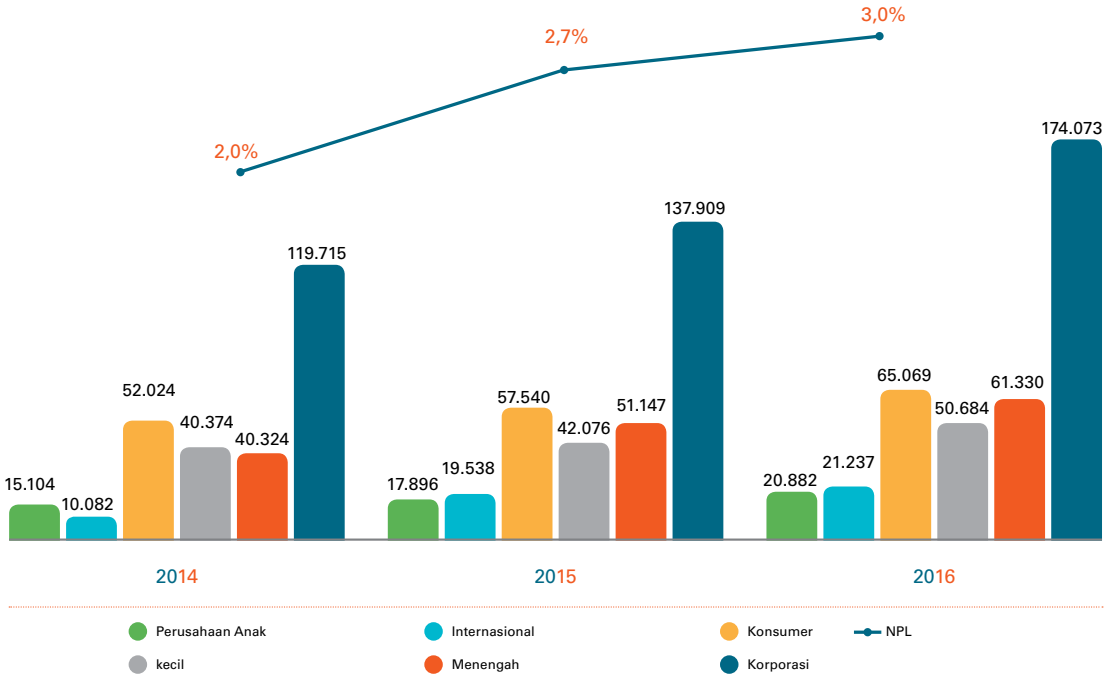

Pinjaman berdasarkan Sektor Ekonomi

	2016		2015		2014		Pertumbuhan Growth 2015-2016		Pertumbuhan Growth 2014-2015	
	Rp Milliar / Rp billion	(%)	Rp Milliar / Rp billion	(%)	Rp Milliar / Rp billion	(%)	Rp Milliar / Rp billion	(%)	Rp Milliar / Rp billion	(%)
Manufaktur	73.090	18,6	66.389	20,4	51.031	18,4	6.701	10,1	15.358	30,1
Perdagangan Restoran dan Hotel	61.581	15,7	49.956	15,3	43.356	15,6	11.625	23,3	6.600	15,2
Jasa Dunia Usaha	38.600	9,8	29.108	8,9	25.444	9,2	8.080	32,6	5.076	14,4
Transportasi & Komunikasi	22.205	5,6	23.809	7,3	20.330	7,3	(1.604)	(6,7)	3.479	17,1
Pertanian	43.128	11,0	28.887	8,9	24.355	8,8	14.241	49,3	4.532	18,6
Pertambangan	14.184	3,6	14.793	4,5	18.384	6,6	(609)	(4,1)	(3.591)	(19,5)
Listrik Gas dan Air	27.006	6,9	17.492	5,4	14.329	5,2	9.547	54,4	3.130	22,1
Konstruksi	20.079	5,1	13.304	4,0	12.091	4,4	3.847	54,1	4.141	7,8
Jasa Pelayanan Sosial	11.246	2,9	8.670	2,7	1.956	0,7	8.453	29,7	837	343,3
Lain-Lain	82.156	20,9	73.967	22,7	66.346	23,9	6.889	11,1	8.921	11,5
Total Pinjaman	**393.275**	**100,0**	**326.105**	**100,0**	**277.622**	**100,0**	**67.170**	**20,6**	**48.483**	**17,5**

Ekspansi Kredit di tahun 2016 fokus pada sektor yang prospektif yaitu sektor konstruksi (29,7%), kelistrikan (54,4%), pertanian (49,3%), dan perdagangan (23,3%). Hal ini sejalan dengan tren perbaikan NPL di sektor-sektor tersebut.

NPL Per Segmen

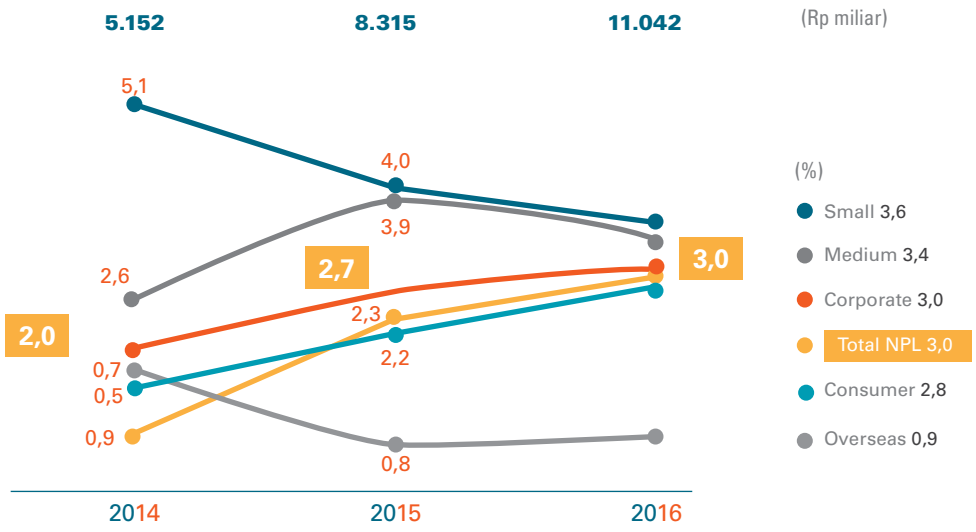

Adanya 2(dua) debitur Korporasi yang memburuk di tahun 2016 menyebabkan NPL Korporasi naik dari 2,3% menjadi 3,0%. Sementara segmen menengah dan kecil menunjukan perbaikan kualitas pinjaman. Sedangkan, segmen consumer terimbas kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.

Penghapusan Aset Pinjaman Yang Diberikan Dan Perolehan Kembali – Bank Saja

Penghapusan aset pinjaman yang diberikan merupakan salah satu alternatif dalam menyikapi perlambatan ekonomi di beberapa sektor usaha yang terus berlanjut sampai dengan 2016. Dalam pelaksanaannya, manajemen BNI memprioritaskan debitur-debitur yang pailit dan bermasalah hukum, dimana telah dilakukan upaya – upaya yang maksimal.

Selama tahun 2016, BNI melakukan penghapusan aset pinjaman yang diberikan sebesar Rp3,0 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp2,5 triliun. Jika dibandingkan dengan total pinjaman yang diberikan – bank saja, rasio penghapusan aset pinjaman yang diberikan relatif rendah pada kisaran 0,8%. Sedangkan penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbuku (*recovery*) sebesar Rp1,5 triliun, sehingga *recovery rate* di tahun 2016 sebesar 49,7%, mengingat kondisi makro ekonomi selama tahun 2016 yang masih cukup menantang bagi industri Perbankan

Hapus Buku & Recovery (Bank Saja)

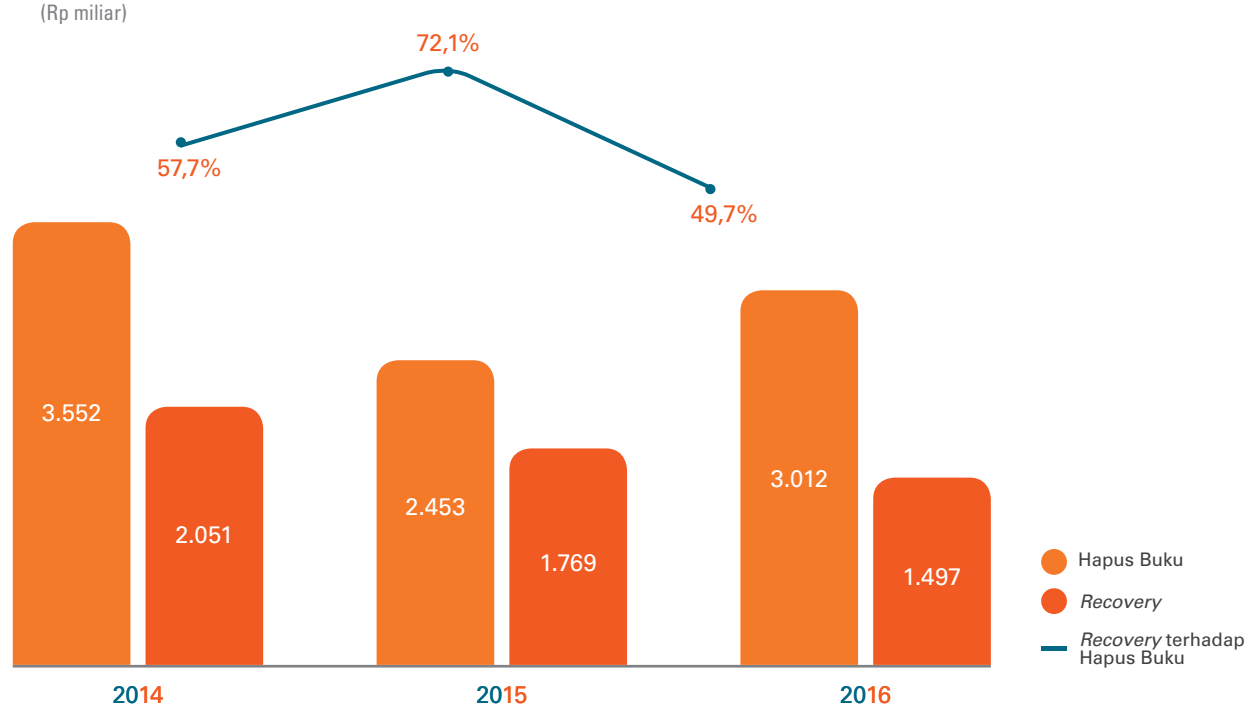

Obligasi Pemerintah

Obligasi pemerintah yang dimiliki BNI naik sebesar Rp15,8 triliun atau 33,4% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp47,2 triliun menjadi Rp63,0 triliun di tahun 2016. Komposisi obligasi pemerintah didominasi oleh obligasi dengan suku bunga tetap sebesar 84,6% dari total obligasi pemerintah, dengan tujuan menghindari risiko atas ketidakpastian di masa yang akan datang.

Pembelian obligasi Pemerintah di tahun 2016 terutama dubukukan sebagai portofolio dimiliki hingga jatuh tempo, untuk meminimalkan dampak pergerakan harga di pasar.

Portofolio tersedia untuk dijual turun di akhir tahun mengingat fluktuasi harga obligasi di paruh pertama tahun 2016 yang cenderung menguntungkan, sehingga dilakukan penjualan obligasi untuk merealisasikan tambahan pendapatan non bunga.

Obligasi Pemerintah

	2016		2015		2014	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Nilai wajar melauli laporan laba rugi	706	1,1	457	1,0	66	0,1
Tersedia untuk dijual	43.660	69,3	34.338	72,7	32.551	74,3
Dimiliki hingga jatuh tempo	18.640	29,6	12.427	26,3	11.213	25,6
Total	**63.006**	**100,0**	**47.222**	**100,0**	**43.830**	**100,0**
Suku bunga tetap	53.284	84,6	34.615	73,3	28.504	65,0
Suku bunga mengambung	9.722	15,4	12.607	26,7	15.326	35,0
Total	**63.006**	**100,0**	**47.222**	**100,0**	**43.830**	**100,0**

Grafik Obligasi Pemerintah Berdasarkan Suku Bunga

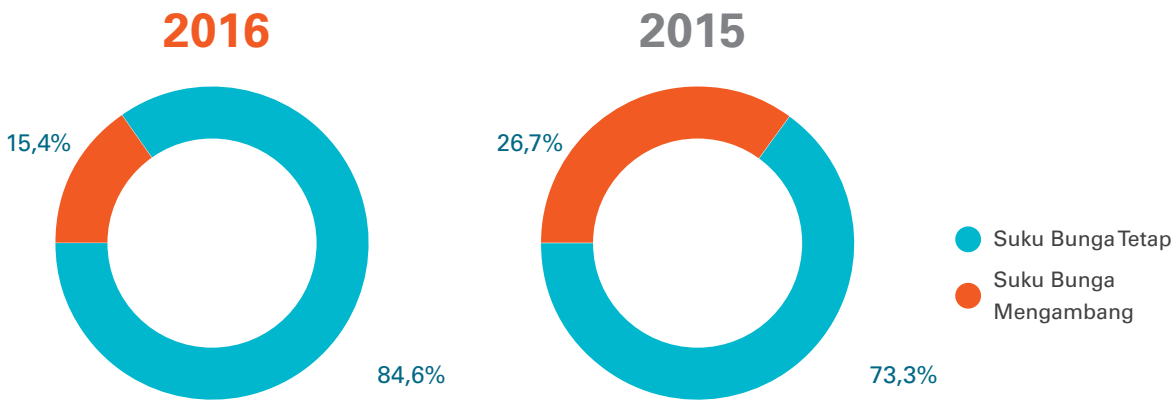

Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang. Total penyertaan saham BNI Pada posisi akhir 2016 sebesar Rp57,2 miliar (bruto) dengan rincian penyertaan sebagai berikut.

1. PT Swadharma Surya Finance 7,4%
2. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia 8,0%
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1,9%
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) 1,9%
5. PT Bursa Efek Indonesia 2,1%
6. PT Bank Mizuho Indonesia 1,0%
7. PT Sumitomo Mitsui Indonesia 0,5%

Aset Tetap

Aset tetap neto tahun 2016 naik 5,8% dibandingkan tahun 2015 dari Rp20,8 triliun menjadi Rp22.0 triliun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan kenaikan di tahun sebelumnya yang mencapai 233,6% disebabkan adanya surplus atas revaluasi aset tetap yang dilakukan di tahun 2015.

Aset Tetap

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016		Pertumuhan 2014-2015	
				Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Tanah	13.829	13.729	1.766	99	0,7	11.963	677,2
Bangunan	3.850	3.693	2.772	157	4,3	921	33,2
Parlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	8.146	7.625	6.248	521	6,8	1.377	22,0
Total biaya perolehan	**25.824**	**25.047**	**10.786**	**777**	**3,1**	**14.261**	**132,3**
Asset dalam penyelesaian	2.601	1.301	1.724	1.300	99,9	(422)	(24,5)
Total biaya perolehan	**28.426**	**26.349**	**12.510**	**2.077**	**7,9**	**13.829**	**110,6**
Akumulasi penyusutan							
Bangunan	546	351	1.518	195	55,6	(1.167)	(76,9)
Parlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	5.908	5.241	4.770	666	12,7	471	9,9
Total akumulasi penyusutan	6.454	5.592	6.288	861	15,4	(696)	(11,1)
Nilai buku neto	**21.972**	**20.757**	**6.222**	**1.216**	**5,9**	**14.535**	**233,6**

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain naik 54,0% menjadi Rp6,8 triliun pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp4,5 triliun. Pos ini terdiri dari piutang bunga dari obligasi pemerintah, piutang nasabah, agunan yang diambil alih, tagihan nasabah, piutang lain-lain dan aset lainnya.

LIABILITAS

Liabilitas

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumuhan 2014-2015	
				2015-2016 (%)	2014-2015 (%)
Liabilitas segera	3.276	1.805	1.813	81,4	(0,4)
Simpanan nasabah*	435.545	370.421	313.893	17,6	18,0
Simpanan dari bank lain*	10.224	4.698	3.177	177,6	47,9
Efek-efek yang di jual dengan janji akan di beli kembali	3.765	3.163	2.492	19,0	26,9
Liabilitas derivatif	411	1.162	662	(64,6)	75,6
Liabilitas akseptasi	4.359	6.188	6.469	(29,6)	(4,3)
Efek-efek yang di terbitkan*	7.227	7.367	6.158	(1,9)	19,6
Pinjaman yang diterima	32.965	22.524	11.212	46,4	100,9

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumuhan 2014-2015	
				2015-2016 (%)	2014-2015 (%)
Utang pajak	151	749	318	(79,9)	136,0
Penyisihan	156	99	87	57,3	13,8
Beban yang masih harus di bayar	1.047	917	660	14,2	39,0
Imbalan kerja	3.503	3.481	3,393	0,7	2,6
Libilitas lain-lain	11.149	7.584	5.219	47,0	45,3
Total liabilitas	**513.778**	**430.157**	**355.552**	**19,4**	**21,0**

*termasuk di dalamnya dana syirkah temporer

Simpanan Nasabah

Persaingan perbankan dalam mengumpulkan dana masyarakat di tahun 2016 yang semakin meningkat menuntut bank untuk terus meningkatkan fitur produk dan tingkat suku bunga yang kompetitif. Di tahun 2016, simpanan nasabah BNI naik sebesar Rp65,1 triliun atau 17,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2015 yang tercatat hanya Rp56,5 triliun, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata industry pada kurun waktu yang sama.

Peningkatan tertinggi terdapat pada produk giro sebesar Rp31,5 triliun atau 34,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya meningkat sebesar 10,1%. Produk tabungan juga naik sebesar 17,5% di tahun 2016 menjadi Rp158,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp135,1 triliun. Sedangkan untuk produk deposito hanya naik 7% bila dibandingkan kenaikan tahun lalu yang mencapai 29,4%.

Peningkatan produk giro dan tabungan adalah strategi BNI dalam menghimpun dana murah untuk menekan biaya dana *(cost of fund)*. Rasio CASA BNI membaik ke level 64,6%, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 61,1%.

Simpanan Nasabah Termasuk Dana Syirkah Temporer

	2016		2015		2014		Pertumbuhan 2015-2016		Pertumuhan 2014-2015	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Giro	**122.652**	**28,2**	**91.135**	**24,6**	**82.743**	**26,4**	**31.517**	**34,6**	**8.392**	**10,1**
Rupiah	92.024	21,1	60.400	16,3	54.651	17,4	31.624	52,4	5.749	10,5
Mata uang asing	30.628	7,0	30.736	8,3	28.092	8,9	(107)	(0,3)	2.643	9,4
Tabungan	**158.662**	**36,4**	**135.065**	**36,5**	**199.779**	**38,2**	**23.597**	**17,5**	**15.286**	**12,8**
Rupiah	146.446	33,6	128.515	34,7	115.607	36,8	17.932	14,0	12.908	11,2
Mata uang asing	12.216	2,8	6.551	1,8	4.172	1,3	5.665	86,5	2.379	57,0
Total giro dan tabungan	**281.315**	**64,6**	**226.200**	**61,1**	**202.522**	**64,5**	**55.114**	**24,4**	**23.678**	**11,7**
Deposito	**154.230**	**35,4**	**144.161**	**38,9**	**111.371**	**35,5**	**10.069**	**7,0**	**32.790**	**29,4**
Rupiah	131.198	30,2	120.785	32,6	99.921	31,8	10.412	8,6	20.865	20,9
Mata uang asing	23.033	5,3	23.376	6,3	11.451	3,6	(343)	(1,5)	11.925	104,1
Total simpanan	**453.545**	**100,0**	**370.421**	**100,0**	**313.893**	**100,0**	**65.124**	**17,6**	**56.527**	**18,0**
Rupiah	369.668	84,9	309.699	83,6	270.178	86,1	59.969	19,4	39.521	14,6

	2016		2015		2014		Pertumbuhan 2015-2016		Pertumuhan 2014-2015	
	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)	Rp miliar	(%)
Mata uang asing	65.877	15,1	60.662	16,4	43.715	13,9	5.215	8,6	16.947	38,8
Casa Ratio		**64,6**		**61,1**		**64,5**				

Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BNI Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena BNI Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (*current asset* dan *other non investment accounts*). Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

Negotiable Certificate Deposit (NCD)

Untuk mendukung likuiditas serta memperkuat struktur dan komposisi pendanaan Rupiah, BNI telah menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Rupiah *scriptless* (tanpa warkat) pada tahun 2016 dalam dua tahap sebagai berikut:

1. Pada semester I, BNI berhasil menerbitkan NCD Rupiah scriptless untuk pertama kalinya dengan emisi sebesar Rp3,0 triliun, dari target awal sebesar Rptriliun, dalam 6 seri tenor (6 bulan sampai dengan 3 tahun).
2. Pada semester II, BNI kembali menerbitkan NCD Rupiah *scriptless* dengan total realisasi emisi sebesar Rp2,2 triliun, dari target semula Rp 1 triliun (*oversubscribe*). *Oversubscription* ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan minat investor kepada BNI.

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan pos yang digunakan untuk transaksi antar bank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas. Posisi simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya di Desember 2016 naik sebesar Rp5,5 trilun atau sebesar 118,9% bila dibandingkan dengan Desember 2015.

Efek-Efek Yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan didominasi oleh surat utang yang diterbitkan oleh BNI melalui Cabang London pada tanggal 27 April 2012 dengan tingkat suku bunga sebesar 4,13% per tahun yang akan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 27 April dan 27 Oktober setiap tahunnya.

Selama tahun 2015 dan 2016, saldo efek-efek yang diterbitkan hanya turun sebesar Rp0,1 triliun, dari Rp7,0 triliun di tahun 2015 menjadi Rp6,9 triliun di tahun 2016. Penurunan ini lebih disebabkan menguatnya nilai rupiah selama tahun 2016 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2015.

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima meningkat 46,4% dari Rp22,5 triliun di tahun 2015 menjadi Rp33,0 triliun di tahun 2016. Kenaikan ini didominasi oleh naiknya pinjaman bilateral sebesar Rp6,6 triliun atau 31,8% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat Rp20,6 triliun. Pinjaman bilateral merupakan salah satu strategi pendanaan untuk menjaga komposisi dana jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman bilateral terbesar berasal dari China Development Bank (CDB), sebesar USD700 juta dan CNY1.90 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Pinjaman tersebut digunakan oleh BNI terutama untuk membiayai program infrastruktur yang digagas oleh pemerintah yang rata-rata memiliki jangka waktu cukup panjang

Pinjaman Yang Diterima

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	*Growth* 2015-2016 (%)	*Growth* 2014-2015 (%)
Pinjaman penerusan	132	269	114	(50,9)	135,3
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	1	1	1	-	-
Pinjaman bilateral	27.863	20.633	6.838	35,0	201,7
Banker acceptance	4.240	1.179	2.477	259,5	(52,4)
Lain-lain	729	442	1.782	65,3	(75,2)
Total	**32.965**	**22.524**	**11.212**	**46,4**	**100,9**

Liabilitas Segera

Liabilitas segera terdiri dari kiriman uang, dana setoran cek, deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BNI sebagai bank persepsi dan simpanan sementara yang belum diselesaikan. Liabilitas segera di Desember 2016 meningkat 81,4% bila dibandingkan dengan Desember 2015.

Efek-Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Utang atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali merupakan instrumen surat berharga repo dengan realisasi sebesar Rp3,8 triliun sampai dengan Desember 2016. Transaksi surat berharga repo baru dilaksanakan di awal tahun 2014 sejak ditandatanganinya Mini MRA (*Master Repo Agreement*) antara beberapa bank termasuk BNI pada Desember 2013.

Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya naik bila dibandingkan dengan Desember 2015 dari Rp7,6 triliun menjadi Rp11,1 triliun di Desember 2016 atau naik sebesar 47,0%. Liabilitas lainnya terdiri atas kewajiban bank kepada pemegang polis, setoran jaminan, utang bunga, pendapatan yang belum diakui, utang reasuransi, komisi dan utang nasabah entitas perusahaan anak.

EKUITAS

Pada Desember 2016 total ekuitas tercatat sebesar Rp89,3 triliun atau meningkat 13,8% dibandingkan dengan Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan tambahan laba bersih tahun 2016 yang mencerminkan kinerja BNI yang semakin baik.

Ekuitas

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 (%)	Pertumbuhan 2014-2015 (%)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	9.055	9. 055	9.055	-	-
Tambahan modal disetor	14.568	14.568	14.568	-	-
Transaksi dengan pihak non pengendali	2.257	2.257	-	-	100
Cadangan Revaluasi aset	12.285	12.190	2.257	0,8	(3.690,4)
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat dan obligasi pemerintah berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	(1.888)	(2.519)	(1.945)	25,0	(33,7)

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 (%)	Pertumbuhan 2014-2015 (%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	82	76	58	7,9	1.073,9
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	-	-	-
Total saldo laba	50.798	41.538	-	22,3	-
Saham treasuri	-	(750)	35.078	44,8	29,9
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	87.157	76.415	1.950	14,1	2.241,2
Kepentingan non pengendali	2.097	2.023	-		-
Total Ekuitas	**89.254**	**78.438**	**61.021**	**46,3**	**28,0**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Selama tahun 2015 menjadi cambuk bagi BNI untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerjanya, sehingga di tahun 2016 BNI mampu mencapai pertumbuhan laba yang agresif. Berdasarkan data per Oktober 2016 BNI mampu mencapai pertumbuhan laba sampai 24,4%, jauh di atas pertumbuhan laba industri yang hanya mencapai 10,0%. Kemudian sampai dengan akhir tahun 2016, laba BNI tumbuh mencapai 25,1% yang dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya.

Laporan laba rugi

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 (%)	Pertumbuhan 2014-2015 (%)
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah-neto	29.995	25.560	22.761	17,4	12,3
Pendapatan premi-neto	1.342	1.133	607	18,4	86,7
Pendapatan operasional lainnya	9.963	8.565	8.379	16,3	2,2
Total pendapatan operasional	**41.300**	**35.258**	**31.747**	**17,1**	**11,1**
Beban operasional lainnya	(19.217)	(16.510)	(14.760)	16,4	11,9
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7.853)	(7.336)	(3.642)	7,0	101,4
Laba operasional	**14.229**	**11.412**	**13.345**	**24,7**	**(14,5)**
Pendapatan (beban) bukan operasional-neto	74	54	178	36,1	(69,6)
Laba sebelum beban pajak	**14.303**	**11.466**	**13.523**	**24,7**	**(15,2)**
Beban pajak	(2.893)	(2.326)	(2.695)	24,4	(13,7)
Laba tahun berjalan	11.410	9.141	10.828	24,8	(15,6)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
- Kepentingan non-pengendali	71	74	47	(3,4)	58,215
- Pemilik entitas induk	11.339	9.067	10.783	25,1	(15,9)

Pertumbuhan Pendapatan Bunga

(Rp triliun)

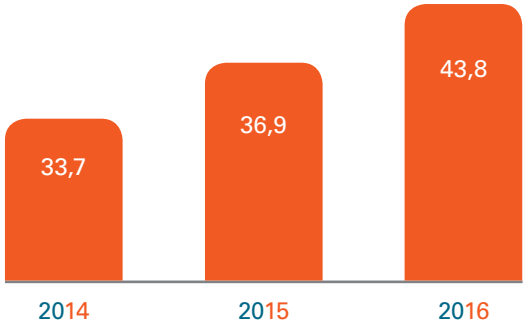

Pendapatan Bunga Dan Pendapatan Syariah

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah merupakan motor utama perusahaan dalam menghasilkan laba selain pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah meningkat dari Rp36,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp43,8 triliun di tahun 2016 atau sebesar 18,6%, dengan peningkatan terbesar pada pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar 19,6%.

Pendapatan Bunga Berdasarkan Aktiva Produktif

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Perumbuhan	
				2015-2016(%)	2014-2015 (%)
Pinjaman yang diberikan	36.304	30.360	27.051	19,6	12,2
Obligasi permintaan dan efek-efek	3.608	3.026	3.111	19,2	(2,7)
Margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah	2.790	2.414	1.916	15,6	26,0
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	447	511	751	(12,6)	(32,0)
Wasel ekspor dan tagihan lainnya	260	220	151	18,6	45,2
Lain-lain	359	364	769	(1,3)	(52,7)
Total	**43.768**	**36.896**	**33.750**	**18,6**	**9,3**

Komposisi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah

Pendapatan Bunga Atas Pinjaman Yang Diberikan

Peningkatan pendapatan bunga yang tertinggi berasal dari pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 19,6% di tahun 2016 atau meningkat menjadi Rp36,3 triliun dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp30,4 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan tumbuhnya pinjaman yang diberikan sebesar 20,9% ditengah kondisi suku bunga pinjaman di tahun 2016 yang cenderung menurun.

Pendapatan Bunga Atas Obligasi Pemerintah Dan Efek-Efek

Pasar efek-efek dan obligasi pemerintah di tahun 2016 lebih menarik dibandingkan tahun sebelumnya, ditandai dengan meningkatnya portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah yang naik 33,4% di akhir tahun 2016. Hal ini juga didorong kondisi perekonomian global yang belum stabil di awal tahun 2016 sehingga BNI memutuskan berinvestasi pada obligasi pemerintah dengan tingkat suku bunga tetap.

Keputusan tersebut berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan bunga atas obligasi pemerintah dan efek-efek yang mencapai 19,2% yaitu dari Rp3,0 triliun di tahun 2015 menjadi Rp3,6 triliun di tahun 2016.

Pendapatan Bunga Atas Margin, Pendapatan Bagi Hasil Dan Bonus Syariah

Di tengah ketatnya persaingan usaha khususnya bagi perbankan syariah di tahun 2016, BNI Syariah berhasil meningkatkan pendapatan bunga atas margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah sebesar 15,6%. Peningkatan ini tidak seagresif tahun sebelumnya yang mencapai 26,0% yang merupakan dampak atas persaingan perbankan syariah di Indonesia.

Pendapatan Bunga Atas Penempatan Pada Bank Lain Dan Bank Indonesia

Sepanjang tahun 2016, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dengan rata-rata penurunan 100–125 basis point atau sekitar 1,00–1,25% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan tersebut berdampak pada turunnya pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tahun 2016 turun sebesar Rp65 miliar menjadi Rp447 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp511 miliar.

Pendapatan Bunga Atas Wesel Ekspor Dan Tagihan Lainnya

Transaksi wesel ekspor meningkat di tahun 2016 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2016 pendapatan bunga atas wesel ekspor dan tagihan lainnya naik Rp40 miliar menjadi Rp260 miliar dari Rp220 miliar di tahun 2015.

BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH

Persaingan dalam penghimpunan dana atas bank-bank lokal Indonesia serta bank-bank asing mewarnai kondisi perbankan Indonesia. Perang harga, produk dan kreativitas menjadi strategi utama bagi bank untuk dapat bertahan di tengah derasnya persaingan merebut dana masyarakat.

Beban bunga dan beban syariah di tahun 2016 naik menjadi Rp13,8 triliun atau sebesar 21,5% dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp11,3 triliun. Kenaikan tersebut sebagai dampak dari naiknya Simpanan Nasabah di tahun 2016 menjadi sebesar Rp435,5 triliun atau sebesar 17,6%. Namun demikian, BNI tetap dapat menjaga biaya dana pada tingkat yang relatif sama dengan biaya dana di tahun sebelumnya di kisaran 3,1%.

Beban Bunga dan Beban Syariah

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Perumbuhan	
				2015-2016(%)	2014-2015 (%)
Simpanan Nasabah dan Bank Lain	11.392	9.556	9.528	19,2	0,3
Pinjaman yang diterima	1.231	661	413	86,2	59,9
Bagi Hasil Mudharabah	855	822	657	4,0	25,1
Efek-efek yang diterbitkan	295	296	390	(0,3)	(24,0)
Total	**13.773**	**11.335**	**10.988**	**21,5**	**3,2**

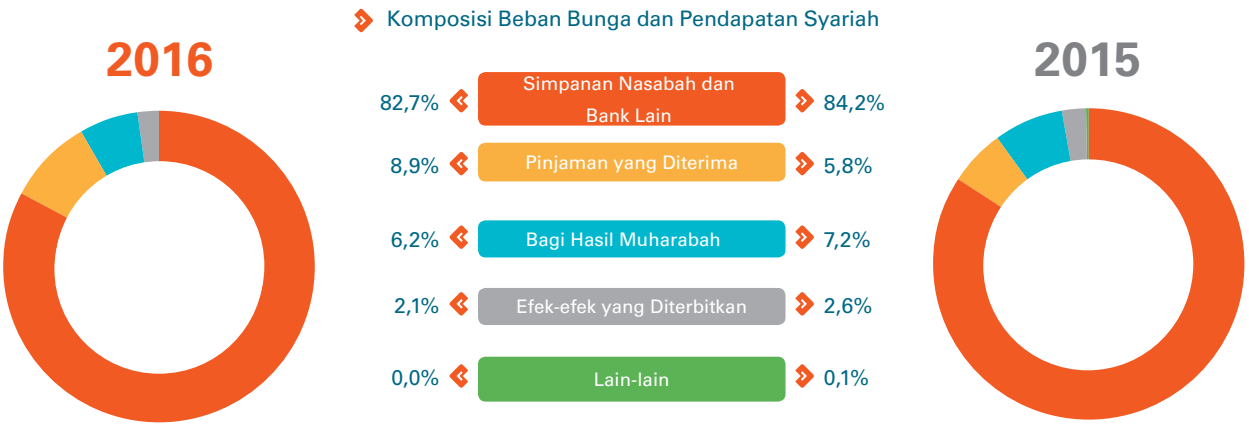

Beban Bunga Atas Simpanan Nasabah Dan Bank Lain

Pergerakan beban bunga atas simpanan nasabah dan bank lain di tahun 2016 sejalan dengan pertumbuhan simpanan nasabahnya. Sampai dengan akhir tahun 2016, simpanan nasabah meningkat sebesar 17,6% dengan pertumbuhan beban bunga sebesar 19,2% dari Rp9,5 triliun di tahun 2015 menjadi Rp11,4 triliun di tahun 2016.

Untuk menekan pertumbuhan biaya bunga, BNI berupaya memperbaiki komposisi simpanan nasabah dengan meningkatkan dana murah yaitu giro dan tabungan yang tercermin dari rasio CASA. Di akhir tahun 2016, BNI berhasil memperbaiki rasio CASA dari 61,1% di tahun 2015 menjadi 64,6% di tahun 2016. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh keberadaan unit dana lembagan dan institusi yang dibentuk sejak akhir 2015.

Beban Bunga Atas Pinjaman Yang Diterima

Beban bunga atas pinjaman yang diterima meningkat dari Rp661 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2016 atau sebesar 86,4%.

Peningkatan dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman yang diterima oleh BNI di tahun 2016 sebesar 46,4% bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Beban Bunga Atas Efek-Efek Yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan merupakan surat utang yang diterbitkan BNI melalui Cabang London dengan nilai USD500 juta sejak 27 April 2012. Beban bunga atas efek-efek yang diterbitkan mengalami penurunan dari Rp296 miliar di tahun 2015 menjadi Rp295 miliar atau turun sebesar 0,4%, didorong oleh menguatnya nilai rupiah selama tahun 2016 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2015.

Beban Bunga Bagi Hasil *Mudharabah*

Beban bunga bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 4,0% atau sejumlah Rp33 miliar di tahun 2016 seiring dengan kenaikan dana *syirkah* temporer sebesar 16,2% menjadi sebesar Rp20,3 triliun.

PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH – NETO

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah tumbuh sebesar 18,6% di tahun 2016 yang diiringi dengan naiknya beban bunga dan beban syariah sebesar 21,5%, sehingga pendapatan Bunga dan pendapatan syariah neto naik sebesar 17,4%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 12,3%.

PENDAPATAN PREMI NETO

Asuransi sebagai salah satu sektor dalam industri keuangan yang semakin menggeliat di tahun 2016 adalah peluang yang tidak bisa dilewatkan oleh BNI Life dalam hal diversifikasi produk yang ditawarkan kepada nasabah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan mengeluarkan produk asuransi yang berbasis investasi, yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan premi neto sebesar 18,4% di tahun 2016 dari Rp1,1 triliun menjadi Rp1,3 triliun.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Di tengah desakan suku bunga dan persaingan pasar, BNI dituntut untuk dapat berkreasi dengan layanan dan produk yang unggul. Keragaman pelayanan yang diberikan oleh BNI kepada nasabahnya dapat tercermin dari pertumbuhan pendapatan operasional lainnya. Di tahun 2016, pendapatan operasional lainnya naik menjadi Rp10,0 triliun atau sebesar 16,3%. Peningkatan terbesar adalah pada komponen pendapatan provisi dan komisi yang meningkat Rp933 miliar atau 16,8%.

Pendapatan Operasional Lainnya

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan	
				2015-2016(%)	2014-2015 (%)
Provisi dan komisi	6.473	5.540	4.642	16,8	19,3
Penerimaan kembali aset yang telah di hapus bukukan	1.378	1.590	1.856	(13,3)	(14,3)
Keuntungan (kerugian) dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan	(43)	22	71	(295,5)	(69,0)
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan yang di klasifikasikan tersedia untuk dijual	646	279	352	131,5	20,7
Laba selisih kurs - neto	685	515	693	33,0	(25,7)
Lainnya	824	619	765	33,1	(19,1)
Total	**9.963**	**8.565**	**8.379**	**16,3**	**2,2**

Provisi Dan Komisi

Pendapatan dari provisi dan komisi BNI berkontribusi sebesar 65,0% dari total pendapatan operasional lainnya di tahun 2016 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang kontribusinya mencapai 55,4%. Pertumbuhan pendapatan atas provisi dan komisi di tahun 2016 mencapai Rp933 miliar atau naik 16,8%. Pendapatan provisi dan komisi didominasi oleh pendapatan dari transaksi bisnis kartu, pengelolaan rekening, pendapatan *fee* ATM kerjasama, produk *bancassurance*, kredit sindikasi dan pengelolaan rekening lainnya.

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan

Penerimaan kembali aset yang dihapusbukukan turun sebesar 13,4% di tahun 2016 bila dibandingkan tahun 2015. Penerimaan ini merupakan pendapatan pokok atas aset yang dihapusbukukan sebelum tahun 2016.

Hal ini disebabkan kondisi makro ekonomi yang kurang mendukung kelangsungan usaha di beberapa sektor industri, sehingga sejak tahun 2016 penerimaan aset yang telah dihapusbukukan cenderung sulit diandalkan untuk mendukung pencapaian laba.

Keuntungan (kerugian) dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan

DI tahun 2016, aset keuangan yang dimiliki untuk dioperdagangkan mengalami sedikit kerugian sebesar Rp43 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami keuntungan sebesar Rp22 miliar. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil dan fluktuasi nilai tukar untuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Keuntungan Dari Penjualan Aset Keuangan Yang Diklasifikasikan Tersedia Untuk Dijual

Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi sebesar Rp646 miliar atau naik 131,3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp279 miliar.

Laba Selisih Kurs Neto

Laba selisih kurs neto mengalami kenaikan sebesar 33,0% menjadi Rp685 miliar di tahun 2016, hal ini disebabkan meningkatnya transaksi mata uang asing selama tahun 2016.

Pendapatan Operasional Lainnya

Komponen lainnya pada pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar 33,2% dari Rp619 miliar di 2015 menjadi Rp824 miliar pada tahun 2016. Pendapatan lainnya terdiri dari pendapatan jasa lainnya, kerja sama dengan pihak lain, pendapatan *service level agreement*, penyelenggaraan kliring dan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank.

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Di tahun 2016, kenaikan ini cukup terkendali jika dibandingkan pesatnya pertumbuhan pinjaman dan penambahan jaringan kantor di sepanjang tahun. Biaya operasional lainnya yang meningkat sebesar 16,4% menjadi sebesar Rp19,2 triliun. Keberhasilan ini ditandai dengan turunnya rasio CIR di tahun 2016 menjadi 44,0% dari 44,2% di tahun 2015. Hal yang serupa juga tampak pada rasio BOPO yang turun menjadi 73,6% di tahun 2016 dari 75,5% di tahun 2015. Turunnya kedua rasio tersebut menjadi tolak ukur bagi kondisi perusahaan bahwa kegiatan operasional bank di tahun 2016 sudah berjalan lebih efisien bila dibandingkan tahun 2015.

Beban Operasional Lainnya

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan	
				2015-2016(%)	2014-2015 (%)
Beban gaji dan tunjangan	8.834	7.366	6.781	19,9	8,6
Umum dan administrasi	6.212	5.758	5.091	7,9	13,1
Beban promosi	946	885	844	6,9	4,7
Premi penjaminan	729	597	587	22,1	1,8
Lain-lain	2.496	1.904	1.457	31,1	30,6
Total	**19.217**	**16.510**	**14.760**	**16,4**	**11,9**

Beban Gaji Dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan di tahun 2016 meningkat sebesar Rp1,5 triliun atau 19,9% dibandingkan tahun 2015. Kenaikan ini terlihat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya naik 8,6%. Di tahun 2016 manajemen BNI memberikan apresiasi atas kinerja positif yang diberikan setiap triwulan kepada seluruh pegawai demi peningkatan kesejahteraan pegawai.

Beban Umum Dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat Rp454 miliar atau 7,9% dibandingkan tahun 2015. Kenaikan terbesar terjadi pada beban tenaga kerja alih daya, beban depresiasi akibat surplus revaluasi aset tetap di tahun 2015, dan beban perjalanan dinas serta beban listrik seiring dengan pertumbuhan bisnis.

Beban Promosi
Beban promosi di tahun 2016 meningkat 6,9% menjadi Rp946 miliar dibandingkan tahun 2015 Rp885 miliar. Kenaikan ini dirasakan perlu oleh BNI dalam rangka meningkatkan loyalitas dan hubungan baik dengan nasabah, yang dilakukan dalam bentuk *sponsorship, event management* , media promosi dan publikasi lainnya.

Beban Premi Penjaminan
Beban premi penjaminan adalah beban premi yang dibayarkan BNI kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tercatat meningkat sebesar Rp132 miliar atau 22,1% di tahun 2016 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan premi ini sejalan dengan meningkatnya simpanan pihak ketiga di tahun 2016 sebesar 17,6%.

Beban Lain-Lain
Beban lain-lain meningkat sebesar Rp592 miliar atau 31,1% dibandingkan dengan tahun 2015. Beban ini didominasi oleh beban iuran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beban transaksi bisnis kartu, beban *fee* kerjasama dengan pihak ketiga dan beban dana PKBL sesuai dengan keputusan RUPS.

BEBAN PENYISIHAN CADANGAN KERUGIAN
Pembentukan beban cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,0% dibandingkan tahun 2015 yaitu dari Rp7,3 triliun menjadi Rp7,9 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian pinjaman yang diberikan di tahun 2016, dimana rasio NPL meningkat menjadi 3,0% yang sebelumnya 2,7% di tahun 2015. Selain itu kenaikan beban penyisihan cadangan kerugian tersebut disebabkan juga oleh pembentukan *coverage ratio* yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
Laba sebelum pajak penghasilan BNI naik dari Rp11,5 triliun di tahun 2015 menjadi Rp14,3 triliun di tahun 2016 atau naik 24,3%.

BEBAN PAJAK
Seiring dengan peningkatan pendapatan di tahun 2016, pajak penghasilan BNI meningkat sebesar 24,4% menjadi Rp2,9 triliun. Sesuai dengan ketentuan berlaku, BNI telah memenuhi persyaratan pembayaran tarif tunggal sebesar 20%.

LABA TAHUN BERJALAN
Sampai dengan akhir tahun 2016, laba BNI tumbuh mencapai 24,8% menjadi Rp11,4 triliun. Hal ini terutama dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban operasionalnya.

PENDAPATAN KOMPREHENSIF
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak terdiri dari:

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:
1. Keuntungan revaluasi aset tetap sebesar Rp120,1 miliar
2. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp231,7 miliar
3. Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain sebesar Rp47,1 miliar

Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:
1. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing sebesar Rp6,2 miliar
2. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp733,9 miliar
3. Pajak penghasilan terkait pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp122,3 miliar

TOTAL LABA KOMPREHENSIF

Total laba komprehensif BNI untuk periode tahun 2016 setelah mempertimbangkan pendapatan komprehensif adalah sebesar Rp12,3 triliun turun sebesar 40,9% dari posisi Rp20,9 triliun di tahun 2015. Penurunan tersebut dikarenakan adanya surplus atas revaluasi asset tetap yang dilakukan BNI di tahun 2015.

Laba Rugi Komprehensif

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan	
				2015-2016(%)	2014-2015 (%)
Laba tahun berjalan	11.410	9.141	10.829	24,8	(15,6)
(kerugian/pendapatan komprehensif lain – setelah pajak	923	11.722	1.085	(92,1)	980,0
Laba komprehensif tahun berjalan	12.333	20.863	11.915	(40,9)	75,1
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
- Kepentingan non-pengendali	73	74	47	(1,0)	58.2
- Pemilik entitas induk	12.259	20.789	11.868	(41,0)	75,2

LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan. Meningkatnya laba bersih setelah pajak penghasilan sebesar 24,8% menyebabkan naiknya laba per saham BNI dari Rp487 per lembar di tahun 2015 menjadi Rp610 per lembar saham pada tahun 2016.

Laba Per Saham Dasar

	2016	2015	2014	Pertumbuhan 2015-2016		Pertumbuhan 2014-2015	
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	(%)	Rp Juta	(%)
Laba tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.339	9.067	10.783	2.272	25,1	(1.716)	(15,9)
Rata-rata Tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (lembar saham)	18.588.205.225	18.623.639.791	18.648.656.458	(35.434.566)	(0,2)	(25.016.667)	(0,1)
Laba per Saham Dasar	**610**	**487**	**578**	**123**	**25,3**	**(91)**	**(15,8)**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2016, saldo kas dan setara kas turun dibandingkan tahun 2015 dari Rp30,1 triliun menjadi Rp5,3 triliun, yang terdiri dari arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp15,4 triliun, arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp29,4 triliun, dan arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp8,6 triliun.

Arus Kas

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan	
				2015-2016	2014-2015
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	15.422	24.357	(610)	(8.934)	24.967
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(29.400)	(3.516)	(2.406)	(25.884)	(1.110)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	8.637	9.250	(4.454)	(612)	13.704
Arus Kas Bersih	**(5.341)**	**30.090**	**(7.471)**	**(35.430)**	**37.560**

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas operasi untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp15,4 triliun. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Total arus kas masuk sebesar Rp134,6 triliun dimana arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah,dan kenaikan simpanan dari bank lain. Total arus kas keluar sebesar Rp119,2 triliun dimana arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pemberian kredit, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya.

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI

Arus kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas investasi untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp29,4 triliun. Total arus kas masuk sebesar Rp17,7 miliar yang berasal dari penjualan aset tetap. Total arus kas keluar sebesar Rp29,4 triliun dimana arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembelian obligasi pemerintah, pembelian efek-efek, serta pembelian aset tetap.

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp8,6 triliun. Total arus kas masuk sebesar Rp11,0 triliun dimana arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima dan kenaikan surat berharga repo. Total arus kas keluar sebesar Rp2,4 triliun dimana arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan dan penurunan nilai surat berharga yang diterbitkan

KINERJA SEGMEN

Berdasarkan laba rugi per segmen usaha tahun 2016, diketahui bahwa tiga segmen yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu segmen korporasi, konsumer dan ritel, serta menengah dan kecil. Kontribusi segmen korporasi mencapai Rp7,7 triliun, sementara itu kontribusi segmen konsumer dan ritel mencapai Rp6,6 triliun, sedangkan kontribusi segmen menengah dan kecil sebesar Rp2,9 triliun.

Tinjauan Laba Rugi Segmen Usaha tahun 2016

2016	Korporasi	Menengah & Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminas & Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Pendapatan bunga bersih	11.358	6.039	9.246	1.913	-	1.966	(527)	29.995
Pendapatan bunga	25.128	11.778	17.933	7.006	-	2.892	(1.001)	63.736
Beban bunga	13.770	5.739	8.688	5.093	-	925	(474)	33.741
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	1.342	-	1.342
Pendapatan operasional lainnya	2.233	987	5.285	2.569	(289)	407	(1.229)	9.963
Pembentukan cadangan kerugian penuruan nilai aset keuangan & lainnya	(3.091)	(2.286)	(1.519)	(14)	(620)	(323)	-	(7.853)
Beban operasional lainya	(2.745)	(1.846)	(6.393)	(1.164)	(4.332)	(2.803)	67	(19.218)
Laba operasional	7.754	2.894	6.619	3.304	(5.241)	588	(1.690)	14.229
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	1	0	26	(4)	20	32	-	74
Laba sebelum beban pajak	7.754	2.894	6.645	3.300	(5.221)	620	(1.690)	14.303

Tinjauan Laba Rugi Segmen Usaha tahun 2015

2015	Korporasi	Menengah & Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminas & Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Pendapatan bunga bersih	8.444	5.686	8.549	1.589	-	1.619	(326)	25.560
Pendapatan bunga	19.884	10.371	16.215	5.450	-	2.485	(720)	53.685
Beban bunga	11.440	4.685	7.666	3.861	-	866	(394)	28.124
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	826	-	826
Pendapatan operasional lainnya	1.591	1.423	4.669	1.621	(258)	597	(771)	8.872
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan & Lainnya	(1.616)	(3.555)	(1.643)	(225)	(99)	(199)	-	(7.336)
Beban operasional lainnya	(2.614)	(1.318)	(6.018)	(1.062)	(3.129)	(2.370)	-	(16.510)
Laba operasional	5.805	2.236	5.557	1.924	(3.486)	473	(1.097)	11.412
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	0	(0)	3	8	(32)	75	-	54
Laba sebelum pajak	**5.805**	**2.236**	**5.560**	**1.933**	**(3.518)**	**548**	**(1.097)**	**11.466**

Pertumbuhan Laba Rugi tahun 2015-2016 (%)

Pertumbuhan 2015-2016 (%)								
	Korporasi	Menengah dan Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminasi dan Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Pendapatan Bunga Bersih	34,5	6,2	8,2	20,4	-	21,5	61,7	17,4
Pendapatan Bunga	26,4	13,6	10,6	28,6	-	16,4	39,0	18,7
Beban Bunga	20,4	22,5	13,3	31,9	-	6,8	20,2	20,0
Pendapatan Premi - Neto	-	-	-	-	-	62,4	-	62,4
Pendapatan Operasional Lainnya	40,4	(30,6)	13,2	58,4	12,0	(31,9)	59,4	12,3
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan & Lainnya	91,3	(35,7)	(7,6)	(93,8)	526,3	62,4	-	7,0
Beban Operasional Lainnya	5,0	40,0	6,2	9,6	38,4	18,3	-	16,4
Laba Operasional	33,6	29,4	19,1	71,7	50,3	24,4	54,0	24,7
Pendapatan (Beban) bukan Operasional - neto	144,0	-	766,0	(153,1)	(162,2)	(57,3)	-	37,0
Laba Sebelum Beban Pajak	33,6	29,4	19,5	70,8	48,4	13,2	54,0	24,7

Tinjauan Posisi Keuangan per Segmen Usaha Tahun 2016

2016	Korporasi	Menengah & Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminas & Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Total asset	**189.077**	**104.981**	**64.458**	**246.882**	**12.202**	**42.888**	**(57.456)**	**603.032**
Kredit yang diberikan – bruto	195.188	112.014	65.119	21.537	-	20.882	(21.465)	393.275
Total labilities	**226.359**	**87**	**208.459**	**51.405**	**7.065**	**13.637**	**14.311**	**492.707**
Simpanan nasabah	203.450	-	207.618	2.680	188	4.151	(2.249)	415.839

Tinjauan Posisi Keuangan per Segmen Usaha Tahun 2015

2015	Korporasi	Menengah & Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminas & Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Total asset	**153.687**	**87.518**	**56.441**	**164.581**	**39.598**	**33.839**	**(27.069)**	**508.595**
Kredit yang diberikan – bruto	129.828	77.422	55.327	10.082	-	15.117	(10.154)	277.622
Total labilities	**174.880**	**78**	**176.869**	**46.148**	**7.966**	**8.889**	**(2.102)**	**412.728**
Simpanan nasabah	76.701	60.694	161.480	1.350	146	2.610	(2.717)	300.265

Pertumbuhan Posisi Keuangan tahun 2015-2016 (%)

	Pertumbuhan 2015-2016 (%)							
	Korporasi	Menengah dan Kecil	Konsumer	TRS & FI	Kantor Pusat	Anak Perusahaan	Eliminasi dan Penyesuaian	BNI Konsolidasi
Total Aset	**23,0**	**20,0**	**14,2**	**50,0**	**(69,2)**	**26,7**	**112,0**	**18,6**
Kredit yang diberikan - Bruto	50,3	44,7	17,7	113,6	-	38,1	111,4	41,7
Total Liabilities	**29,4**	**11,5**	**17,9**	**11,4**	**(11,3)**	**53,4**	**(581,0)**	**19,4**
Total Simpanan Nasabah	165,3	(100,0)	28,6	98,5	28,9	59,0	(17,2)	38,5

RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan

	2016	2015	2014
	Bank (%)	Bank (%)	Bank (%)
MODAL			
CAR-Tier I	18,3	17,0	15,3
CAR-Tier II	1,1	2,5	0,9
CAR (RIsiko Kredit, Pasar dan Operasional)	19,4	19,5	16,2
Kualitas Aset			
NPL Neto	0,4	0,9	0,4
NPL Bruto	3,0	2,7	2,0
Rasio kecukupan pencadangan kerugian terhadap pinjaman yang bermasalah	146,0	140,4	130,1
Profitabilitas			
ROA	2,7	2,6	3,5
ROE	15,5	17,2	23,6
Margin Bunga Bersih	6,2	6,4	6,3
Efisiensi			
BOPO	73,6	75,5	68,0
CIR	44,0	44,2	43,8
Likuiditas			
LDR	90,4	87,8	87,8
Kepatuhan			
GWM (Rupiah)	6,8	9,2	8,1
Posisi Devisa Neto	3,4	1,7	1,6

RASIO PERMODALAN

Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2016 relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang terjaga di kisaran 19,4%. CAR BNI di tahun 2016 jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yaitu minimum sebesar 9% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.

RASIO KUALITAS ASET

Rasio NPL

Perlambatan ekonomi pada beberapa sektor usaha di Indonesia menjadikan dunia perbankan di Indonesia terimbas dampak buruknya khususnya dari sisi kualitas aset. Pinjaman bermasalah sebagai permasalahan setiap bank yang memerlukan perhatian khusus tetap menjadi fokus utama BNI dalam melakukan pertumbuhan yang sehat. Rasio NPL mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang tercatat 2,7% menjadi 3,0% di tahun 2016. Pinjaman bermasalah terjadi di sektor-sektor pinjaman yang bukan prioritas BNI di tahun 2016, salah satunya adalah pada sektor pertambangan.

Coverage Ratio

Dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi yang terus bergulir sampai dengan tahun 2016, BNI kembali meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan, yaitu dari Rp11,7 triliun di tahun 2015 menjadi Rp16,1 triliun di tahun 2016.

*S*ebagai langkah antisipatif BNI dalam menyikapi perlambatan ekonomi di tahun 2016, BNI telah melakukan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi pinjaman yang bermasalah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan *coverage ratio* yang semula 140,4% pada tahun 2015 menjadi 146,0% di tahun 2016, sejalan dengan kebijakan manajemen dalam hal mitigasi risiko.

	2016	2015	2014
	Bank (Rp miliar)	Bank (Rp miliar)	Bank (Rp miliar)
CKPN Pinjaman yang Diberikan - Bank saja	16.122	11.678	6.702
NPL - Bank saja	11.042	8.315	5.151
Coverage Ratio	146,0%	140,4%	130,1%

RASIO PROFITABILITAS

ROA

Return on Assets (ROA) BNI meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat 2,6% menjadi 2,7% di tahun 2016. Peningkatan ini merupakan dampak dari peningkatan kinerja BNI dibandingkan tahun 2015 yang lalu.

ROE

Return on Equity (ROE) mengukur tingkat pengembalian atas modal inti. ROE turun dari 17,2% menjadi 15,5% pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya rata-rata modal inti sepanjang tahun 2016 yang merupakan imbas dari revaluasi atas aset yang dilakukan di akhir tahun 2015.

NIM

Margin bunga bersih *(Net Interest Margin)* pada tahun 2016 menurun menjadi 6,2% dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,4%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah yang menurunkan tingkat suku bunga menjadi *single digit* guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

RASIO EFISIENSI

BOPO

Membaiknya rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari 75,5% di tahun 2015 menjadi 73,6% di tahun 2016 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya di tahun 2016 yang masing-masing sebesar 18,6% dan 12,3% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemampuan BNI menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih efisien.

CIR

Cost to Income Ratio (CIR) BNI di tahun 2016 membaik dibandingkan dengan tahun 2015 dari sebelumnya 44,2% menjadi 44,0%. Membaiknya rasio ini merupakan cerminan upaya efisiensi beban operasional selama tahun 2016 telah membuahkan hasil yang diharapkan.

RASIO LIKUIDITAS

Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) di tahun 2016 sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 90,4% dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar 87,8%. Kondisi ini merupakan dampak dari lebih pesatnya peningkatan pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan peningkatan simpanan nasabah. Rasio tersebut masih berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional yang menetapkan LDR di kisaran 78,0%-92,0%.

RASIO KEPATUHAN

Giro Wajib Minimum

Dalam pengelolaan likuiditas harian, BNI selalu berusaha menjaga tingkat kecukupan likuiditas yang optimal untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia melalui Giro Wajib Minimum (GWM). Pada 31 Desember 2016, GWM Rupiah BNI tercatat sebesar 5,2% dan GWM Valuta Asing sebesar 1,5%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) Desember 2016 tercatat pada level 3,4%, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015. Angka tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI pada Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, yaitu sebesar 20% dari modal.

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

TINGKAT KESEHATAN BANK

Tingkat Kesehatan Bank merupakan adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bagi Bank untuk menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang, menyusun dan melaksanakan *corrective action* atas kelemahan/ permasalahan bank, sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan bagi otoritas pengawas merupakan sarana dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor sebagai berikut.

1. **Profil Risiko (*Risk Profile*)**
   Profil Risiko merupakan gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional Bank. Penilaian Profil risiko dilakukan dengan menilai Risiko Inheren (risiko yang melekat pada aktivitas Bank) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
2. ***Good Corporate Governance* (GCG)**
   Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
3. **Rentabilitas (*Earnings*)**
   Penilaian atas faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas.
4. **Permodalan (*Capital*)**
   Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Selain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai kriteria yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (*Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap 6 bulan (semesteran) pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian TKB BNI periode 31 Desember 2016 berada pada peringkat "Sehat" yang berarti bahwa:

a. Kondisi Bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
b. Peringkat faktor-faktor penilaian (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan) secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Bank BNI mempunyai komitmen dan kontijensi. Ikhtisar komitmen dan kontijensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak sebagai berikut.

Komitmen dan Kontinjensi

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar
Tagihan Komitmen		
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	56.936	26.819
Lain-lain	459	332
Total	57.395	27.151
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54.548	38.265
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	10.515	9.148
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	57.065	27.528
Total	122.128	74.941
Tagihan kontinjensi		
Garansi bank yang diterima	18.697	16.406
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.476	3.852
Lainnya	142	128
Total	23.315	20.386
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:		
Performance bonds	24.933	19.649
Advance payment bonds	11.060	9.540
Standby letters of credit	6.721	5.708
Garansi bank lainnya	7.305	6.668
Bid bonds	4.273	4.099
Shipping guarantee	3	3
Risk sharing	-	57
Total	54.295	45.724

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar
Garansi bank yang diterbitkan		
- Pihak yang berelasi	18.367	13.430
- Pihak ketiga	35.928	32.294
Irrevocable letters of credit		
- Pihak yang berelasi	6.239	4.676
- Pihak ketiga	4.276	4.472
Total	**64.810**	54.872

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut.

	2016 Rp milliar	2015 Rp miliar
Lancar	64.516	53.864
Dalam perhatian khusus	288	951
Kurang lancar	1	51
Diragukan	-	-
Macet	5	6
Total	**64.810**	**54.872**

Di samping itu, Bank BNI juga telah menyusun rincian terkait pertumbuhan Komitmen dan Kontinjensi yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 miliar	Pertumbuhan 2015-2016 %	Pertumbuhan 2014-2015 miliar	Pertumbuhan 2014-2015 %
Liabilitas Komitmen							
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang belum Ditarik	54.548	38.265	38.667	16.283	42,6	(402)	(1,0)
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan	10.515	9.148	8.784	1.3667	14,9	364	4,1
Posisi Penjualan *Spot* dan Derivatif yang masih Berjalan	57.065	27.528	20.277	29.537	107,3	7.251	35,8
Total Liabilitas Komitmen	**122.128**	**74.941**	**67.728**	**47.187**	**63,0**	**7.213**	**10,6**
Tagihan Kontijensi							
Garansi yang Diterima	18.697	16.406	12.245	2.291	14,0	4.161	34,0
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	4.476	3.852	2.946	624	16,2	906	30,8
Lain-lain	142	128	104	14	10,9	24	23,1
Total Tagihan Kontijensi	**23.315**	**20.386**	**15.295**	**2.929**	**14,4**	**5.091**	**33,3**
Liabilitas Kontijensi							
Garansi Bank yang Diberikan	54.295	45.724	35.631	8.571	18,7	10.093	28,3
Total Liabilitas Kontijensi	**54.295**	**45.724**	**35.631**	**8.571**	**18,7**	**10.093**	**28,3**

Jumlah liabilitas komitmen pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 63% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebagian besar dipengaruhi oleh naiknya posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan sebesar 107,3%. Tagihan kontinjensi pada tahun 2016 naik sebesar 14,4% dibandingkan tahun 2015 yang didominasi oleh kenaikan garansi bank yang diterima sebesar 14%. Sedangkan liabilitas kontinjensi juga mengalami kenaikan sebesar 18,7% dibandingkan tahun 2015 yang dipengaruhi oleh kenaikan garansi bank yang diberikan. Kenaikan komitmen dan kontinjen ini sejalan dengan pertumbuhan kredit, mengingat debitur semakin mengoptimalkan penggunaan produk dan layanan BNI yang beragam dengan fitur yang bersaing.

ASET BANK YANG DIJAMINKAN

Pada Tahun 2016, tidak ada Aset Bank yang di jaminkan.

DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

BNI melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan Bank ataupun kepentingan Nasabah. Per posisi 31 Desember 2016, BNI melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) USD-IDR dengan total nilai aset sebesar USD 187,9 juta yang terdiri dari USD 94.0 juta transaksi antar bank dan USD 94,0 juta transaksi dengan nasabah Korporasi.

Selain transaksi CCS, BNI juga melakukan transaksi *Interest Rate Swap* (IRS) dengan total nilai aset per posisi 31 Desember 2016 sebesar USD 240,0 juta terdiri dari 120,0 juta transaksi antar bank dan USD 120,0 juta transaksi dengan nasabah Korporasi.Transaksi CCS dan IRS dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan portofolio yang dimiliki. Sebagai antisipasi atas pergerakan mata uang serta suku bunga yang berpotensi merugikan bank.

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga swap dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

Selain itu, dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

Tagihan dan Liabilitas Derivatif Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

Tahun 2016			
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan Derivatif Rp miliar	Liabilitas Derivatif Rp miliar
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - beli			
USD	134.933.000	31.595	(4.167)
Kontrak berjangka - jual			
JPY	169.411.600	717	(544)
USD	72.923.045	2.804	(1.753)
Swap mata uang asing - beli			
EUR	25.089.206	-	(13.284)
USD	1.169.798.000	35.807	(15.102)
Swap mata uang asing - jual			
AUD	1.500.000	-	(1)
CNY	86.929.579	1.538	
EUR	25.000.000	4.149	
GBP	500.000	142	
USD	1.548.264.901	33.393	(297.957)
SGD	826.565	-	(13)
HKD	69.758.088	-	(55)
Spot mata uang asing - beli			
EUR	2.000.000	211	
USD	92.815.000	1.316	(218)
Spot mata uang asing - jual			
EUR	2.000.000	59	
USD	81.650.000	177	(559)
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga			
Swap mata uang asing dan suku bunga			
USD	187.930.905	89.165	(77.217)
Swap atas suku bunga			
USD	740.000.000	48.791	-
Total		**249.864**	**(410.870)**

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Tahun 2015			
Instrumen	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)	Nilai wajar	
		Tagihan Derivatif Rp miliar	Liabilitas Derivatif Rp miliar
Terkait Nilai Tukar			
Kontrak berjangka - jual			
JPY	120.318.000	-	(200)
USD	15.239.874	189	(4.987)
Kontrak berjangka - beli			
USD	121.994.892	15.319	(1.636)
Swap mata uang asing - beli			
CNY	109.363.588	2.085	-
HKD	11.624.748	21	(35)
JPY	4.213.017.080	-	(280)
USD	576.175.874	17.103	(144.717)
Swap mata uang asing - Jual			
AUD	2.500.000	-	(374)
USD	839.818.772	196.720	(20.681)
Spot mata uang asing - beli			
EUR	2.100.000	-	(41)
USD	56.793.472	149	(580)
Spot mata uang asing - jual			
EUR	2.100.000	43	-
USD	46.796.896	361	(93)
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga			
Swap mata uang asing dan suku bunga			
USD	338.815.726	208.711	(987.933)
Total		**440.701**	**(1.161.557)**

Tabel Tagihan dan Liabilitas Derivatif Berdasarkan Hubungan

Keterangan	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi		
- Mata uang asing	48.105	118.902
Total pihak berelasi	48.105	118.902
Pihak ketiga		
- Mata uang asing	201.759	321.799
Total pihak ketiga	201.759	321.799
Total tagihan derivatif	**249.864**	**440.701**
Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi		
- Mata uang asing	10.979	2.745
Total pihak berelasi	10.979	2.745
Pihak ketiga		
- Mata uang asing	399.891	1.158.812
Total pihak ketiga	399.891	1.158.812
Total	**410.870**	**1.161.557**

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan ke dalam golongan lancar.

DAMPAK PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Sepanjang tahun 2016, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dengan rata-rata penurunan 100–125 basis point atau sekitar 1,00–1,25% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Kebijakan Bank Indonesia tersebut mengakibatkan pertumbuhan pendapatan bunga tidak dapat sejalan dengan pertumbuhan beban bunganya, dimana beban bunga di tahun 2016 tumbuh sebesar 21,5% bila dibandingkan dengan pendapatan bunganya yang hanya tumbuh sebesar 18,6%.

Lebih tingginya pertumbuhan beban bunga menyebabkan *Net Interest Margin* (NIM) terkoreksi di tahun 2016 menjadi 6,2% dari sebelumnya tercatat sebesar 6,4% di tahun 2015. Walaupun NIM BNI di tahun 2016 menurun, BNI tetap mampu menjaga kinerja keuangan keseluruhan tetap membaik yang tercermin pada rasio-rasio keuangan lainnya yang tumbuh secara positif.

AKSELERASI PERTUMBUHAN *FEE BASED INCOME*

Fee based income di tahun 2016 yang berhasil dihimpun BNI mencapai Rp8,59 miliar, meningkat sebesar 23,1% dari tahun 2015 yang mencapai Rp6,98 miliar. Peningkatan tersebut didominasi oleh 4 (empat) aktivitas perbankan diantaranya *Trade Finance*, *Account Manager*, *Bancassurance*, dan *Debit Card Maintenance*. Peningkatan *fee based income* dari jasa *Trade Finance* mencapai pertumbuhan sebesar 84,7% dari Rp428 miliar di 2015 menjadi Rp791 miliar di 2016. *Account Maintenance* mengalami pertumbuhan sebesar 21,7% dari Rp1,18 miliar di 2015 menjadi Rp1,43 miliar di 2016. Layanan *Bancassurance* juga mengalami peningkatan sebesar

28,6% dari Rp317 miliar di 2015 menjadi Rp408 miliar di 2016. Sejalan dengan peningkatan ketiga layanan tersebut, layanan *Debit Card Maintenance* juga mengalami pertumbuhan sebesar 18,2% dari Rp183 miliar di 2015 menjadi Rp216 miliar di 2016.

Rincian pertumbuhan *fee based income* diuraikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut.

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015–2016 (%)	Pertumbuhan 2014–2015 (%)
Recuring Fee	7.986	6.491	5.884	23,0	10,3
Non Recurring Fee	599	483	639	24,0	(24,4)
Total	8.585	6.975	6.523	23,1	6,9

Trade Finance
(Rp miliar)

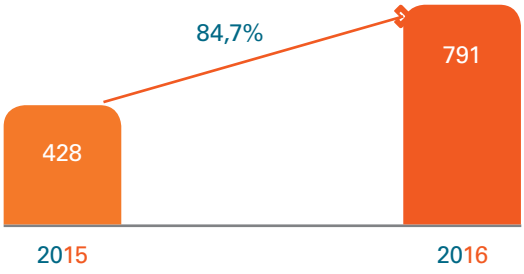

Pengelolaan Rekening
(Rp miliar)

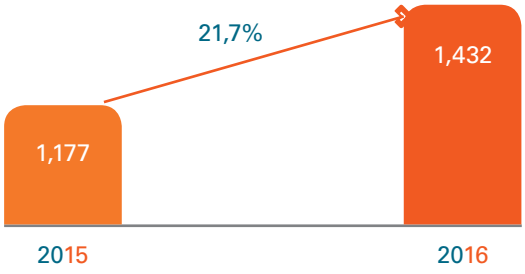

Bancassurance
(Rp miliar)

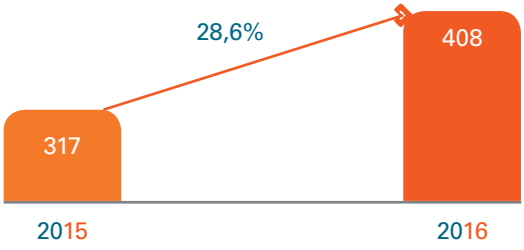

Fee Pengelolaan Kartu Debit
(Rp miliar)

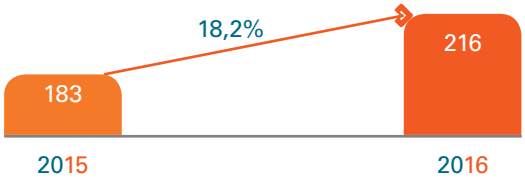

STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Selama tahun 2016 tidak terdapat *corporate action* terkait penambahan modal ataupun perubahan regulasi atau perlakuan akuntansi atas permodalan, sehingga penambahan modal BNI hanya bersifat organik yang bersumber dari laba kegiatan operasional. BNI senantiasa berupaya menjaga komposisi atau struktur modal minimal dan tidak melanggar ketentuan batas minimum yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator perbankan.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Dalam memenuhi kebutuhan permodalan agar sesuai dengan Basel III, BNI mencatat ATMR setelah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sebesar Rp435,4 triliun di tahun 2016 atau naik sebesar 15,0% dibandingkan Desember 2015. Naiknya ATMR tersebut seiring dengan tumbuhnya aset BNI yang cukup agresif di tahun 2016 atau sebesar 18,6%. Mengingat pentingnya struktur modal dalam mendukung ekspansi usaha, BNI bertekad untuk mengelola struktur modal yang sehat untuk mendukung pertumbuhan usaha secara maksimal.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) - Bank Saja

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Komponen Modal			
Modal Inti	79.645	64.251	47.618
Modal Pelengkap	4.634	9.548	2.734
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	84.278	73.799	50.352
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit	378.716	329.343	268.430
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional	54.098	47.746	41.228
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar	2.540	1.476	828
Rasio Modal Inti	18,3%	17,0%	15,3%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	19,5%	19,6%	16,3%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	19,4%	19,5%	16,2%

- Komponen Modal – Bank Saja
  - Modal Inti

    Modal inti adalah modal bank yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

    Modal inti BNI tumbuh 24,0% atau meningkat dari Rp64,3 triliun menjadi Rp79,6 triliun pada tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya laba tahun berjalan selama periode tahun 2016 yang menjadi Rp11,3 triliun dan adanya

reklasifikasi cadangan tujuan sebesar Rp5,6 triliun serta cadangan wajib cabang luar negeri sebesar Rp92.0 miliar. Reklasifikasi tersebut dilakukan setelah diterbitkannya POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

- Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)
  Modal pelengkap (mengacu pada modal bank) terdiri dari cadangan umum aset produktif. Modal pelengkap BNI turun dari Rp9,5 triliun pada Desember 2015 menjadi Rp4,6 triliun pada Desember 2016 atau turun sebesar 51,5% sebagaiman dijelaskan pada alinea sebelumnya disebabkan reklasifikasi yang dilakukan pada modal inti.

- Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
  Sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013, ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal terdiri atas ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Pasar dan ATMR untuk Risiko Operasional. Penjelasan lebih lanjut mengenai profil risiko ATMR akan disampaikan pada pembahasan manajemen risiko.

Grafik Struktur Modal

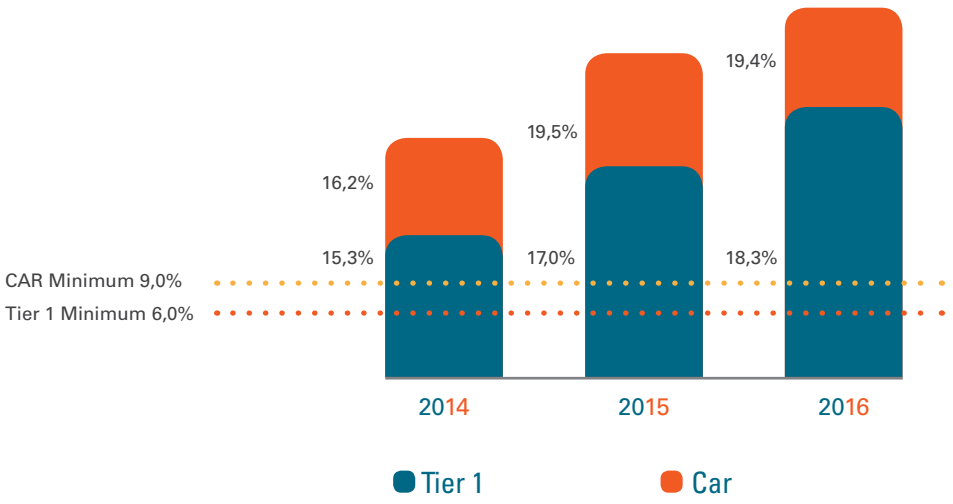

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Sampai dengan tahun 2016, BNI memiliki tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Hal ini direpresentasikan oleh kemampuan BNI dalam memenuhi segala kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang ataupun beban bunganya. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas BNI.

Likuiditas

Pada akhir tahun 2016, tingkat likuiditas BNI yang diukur melalui rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio*) mengalami

kenaikan 2,6% menjadi 90,4% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 87,8%. Kenaikan ini disebabkan lebih pesatnya ekspansi kredit dibandingkan pertumbuhan dana. Tingkat likuiditas tersebut masih berada dalam toleransi dari OJK yaitu 85% sampai dengan 92%. Perhitungan LDR tidak memperhitungkan *funding* non konvensional seperti penerbitan NCD (*Negotiable Certificate Deposit*) dan *Bilateral Loan* bertenor panjang yang sesungguhnya juga digunakan BNI untuk mendanai ekspansi pinjaman yang diberikan.

Solvabilitas

Dari sisi *solvency*, tingkat kecukupan modal BNI (*Capital Adequacy Ratio*) relatif stabil dan tidak mengalami perubahan di tahun 2016 yaitu sebesar 19,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan yang dimiliki BNI memiliki kapabilitas untuk dapat mengimbangi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan oleh BI.

KOLEKTIBILITAS PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*) di tahun 2016 sebesar 3,0%, meningkat 0,3% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,7%. Hal ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian yang berdampak pada kondisi keuangan debitur. Namun demikian, rasio ini tetap lebih baik di bawah rata-rata industri yang tercatat sebesar 3,2%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan secara fundamental pada perkembangan kualitas pinjaman yang diberikan secara keseluruhan.

Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan debitur. Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi pada akhir tahun 2016 mencapai Rp 31,4 triliun atau meningkat 51,8% dibanding tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

1. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya sebesar Rp5,2 triliun atau naik 66,2 % dari tahun sebelumnya.
2. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya dan diturunkan suku bunganya sebesar Rp11,4 triliun atau meningkat 79,7% dari tahun sebelumnya.
3. Pinjaman yang diperpanjang jatuh temponya, diturunkan suku bunganya dan direstrukturisasi dengan cara lainnya sebesar Rp14,7 triliun atau meningkat 31,9% dari tahun sebelumnya.

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas per tanggal 31 Desember 2016 adalah golongan lancar sebesar 69,1%, dalam perhatian khusus sebesar 21,5%, dan *non performing loan* (NPL) mencapai 9,4%.

Dilihat dari sisi jenis mata uang sebesar 82,2% dari pinjaman yang direstrukturisasi adalah dalam mata uang Rupiah sedangkan sisanya adalah dalam mata uang USD.

Pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan peruntukannya per tanggal 31 Desember 2016 adalah Kredit Modal Kerja sebesar 48,1%, Kredit Investasi sebesar 46,6%, dan Kredit Konsumtif mencapai 5,4%.

Dilihat dari per segmen, pinjaman yang direstrukturisasi per 31 Desember 2016 adalah untuk Korporasi sebesar 55,1%, Middle sebesar 27,5%, Small sebesar 12,0%, dan Konsumer sebesar 5,4%.

Pinjaman yang direstrukturisasi di tahun 2016 didominasi oleh sektor usaha manufaktur sebesar 20,9%, disusul oleh trading hotel dan restoran mencapai sebesar 17,3%, sektor usaha pertanian mencapai 15,1%, pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi sebesar 12,5%, dan sisanya tersebar di berbagai sektor usaha secara merata.

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kategori Restruk

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Perpanjangan Jangka Waktu Kredit	5.285	3.180	933
Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Suku Bunga Kredit	11.400	6.344	497
Perpanjangan Jangka Waktu, Penurunan Suku Bunga Kredit, dan Skema Restrukturisasi lain-lain	14.748	11.183	4.933
Total	**31.433**	**20.707**	**6.363**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.084)	(3.530)	(1.696)
Neto	27.349	17.177	4.667

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Kolektibilitas

Kualitas	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Lancar	21.719	14.442	4.566
Dalam Perhatian Khusus	6.773	2.484	624
KurangLancar	858	2.093	54
Diragukan	117	49	110
Macet	1.965	1.639	1.009
Total	**31.433**	**20.707**	**6.363**

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Jenis Sektor Usaha – Bank Saja

Sektor Usaha	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Jasa Dunia Usaha	2.849	1.085	343
Jasa Pelayanan Sosial	325	58	28
Konstruksi	2.097	1.153	347
Lain-lain	1.592	1.306	140
Listrik, Gas, dan Air	468	506	529
Pengangkutan, Pergudangan, dan Perdagangan	3.667	2.395	893
Restoran dan Hotel	5.100	3.357	759
Perindustrian	6.175	4.708	2.512
Pertambangan	2.719	3.894	70
Pertanian	4.437	777	476
Total	**29.429**	**19.239**	**6.098**

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Jenis Peruntukan – Bank Saja

Peruntukan	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Kredit Modal Kerja	14.143	10.836	3.257
Kredit Investasi	13.698	7.215	2.705
Kredit Konsumtif	1.588	1.188	136
Total	**29.429**	**19.239**	**6.098**

Pinjaman yang Direstrukturisasi per Segmen – Bank Saja

Segmen	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Konsumer	1.588	1.188	136
Korporasi	16.216	9.439	3.552
Small	3.528	2.639	733
Middle	8.097	5.973	1.677
Total	**29.429**	**19.239**	**6.098**

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

BNI melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Dalam kegiatan usahanya, semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP- 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

1. Perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

JENIS HUBUNGAN

Adapun Transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan jenis hubungannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Jenis Hubungan

Pengendalian Melalui Pemerintah Republik Indonesia
• Adhi Karya dan Entitas Anak
• Amarta Karya
• Aneka Tambang dan Entitas Anak
• Angkasa Pura I dan Entitas Anak
• Angkasa Pura II dan Entitas Anak
• ASABRI
• ASDP Ferry Indonesia
• Asuransi Jasa Indonesia
• Asuransi Jasa Raharja dan Entitas Anak
• Asuransi Jiwasraya
• Asuransi Kredit Indonesia dan Entitas Anak
• Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Entitas Anak
• Balai Pustaka
• Bank Mandiri dan Entitas Anak
• Bank Rakyat Indonesia
• Bank Tabungan Negara
• Barata Indonesia
• Berdikari dan Entitas Anak
• Bhanda Ghara Reksa dan Entitas Anak
• Bina Karya
• Biofarma
• Biro Klasifikasi Indonesia
• Boma Bisma Indra
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• Brantas Abipraya
• Bulog dan Entitas Anak
• Dahana
• Damri
• Danareksa dan Entitas Anak
• Dirgantara Indonesia dan Entitas Anak
• Djakarta Lloyd dan Entitas Anak
• Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
• Dok dan Perkapalan Surabaya
• Garam
• Garuda Indonesia dan Entitas Anak

Pengendalian Melalui Pemerintah Republik Indonesia
• Hotel Indonesia Natour
• Hutama Karya dan Entitas Anak
• IGLAS
• Indah Karya
• Indofarma dan Entitas Anak
• Indonesia Asahan Aluminium
• Indra Karya
• Industri Kapal Indonesia
• Industri Kereta Api dan Entitas Anak
• Industri Sandang Nusantara
• Industri Telekomunikasi Indonesia
• Istaka Karya
• Jaminan Kredit Indonesia
• Jasa Marga dan Entitas Anak
• Jasa Tirta I
• Jasa Tirta II
• Kawasan Berikat Nusantara
• Kawasan Industri Makassar
• Kawasan Industri Medan
• Kawasan Industri Wijayakusuma
• Kementerian Keuangan
• Kereta Api Indonesia dan Entitas Anak
• Kertas Kraft Aceh
• Kertas Leces
• Kimia Farma dan Entitas Anak
• Kliring Berjangka Indonesia
• Krakatau Steel dan Entitas Anak
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
• LEN Industri dan Entitas Anak
• LKBN Antara
• Merpati Nusantara Airlines
• PAL Indonesia dan Entitas Anak
• PANN dan Entitas Anak
• Pegadaian dan Entitas Anak
• Pelabuhan Indonesia I dan Entitas Anak
• Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anak

Pengendalian Melalui Pemerintah Republik Indonesia
• Pelabuhan Indonesia III dan Entitas Anak
• Pelabuhan Indonesia IV dan Entitas Anak
• Pelayaran Nasional Indonesia dan Entitas Anak
• Pembangunan Perumahan dan Entitas Anak
• Percetakan Negara Republik Indonesia
• Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak
• Perhutani dan Entitas Anak
• Perikanan Indonesia
• Perikanan Nusantara
• Perkebunan Nusantara III dan Entitas Anak
• Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak
• Pertamina dan Entitas Anak
• Pertani
• Perumnas
• Perusahaan Gas Negara dan Entitas Anak
• Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak
• Perusahaan Pengelola Aset dan Entitas Anak
• Perusahaan Perdagangan Indonesia
• Pindad dan Entitas Anak
• Pos Indonesia dan Entitas Anak
• Primissima
• Pupuk Indonesia Holding Company dan EntitasvAnak

Pengendalian Melalui Pemerintah Republik Indonesia
• Rajawali Nusantara Indonesia dan Entitas Anak
• Reasuransi Indonesia Utama dan Entitas Anak
• Sang Hyang Seri
• Sarana Karya
• Sarana Multigriya Finansial
• Sarinah dan Entitas Anak
• Semen Baturaja
• Semen Indonesia dan Entitas Anak
• Sucofindo dan Entitas Anak
• Surveyor Indonesia
• Tambang Batubara Bukit Asam dan Entitas Anak
• Taspen dan Entitas Anak
• Telekomunikasi Indonesia dan Entitas Anak
• Timah dan Entitas Anak
• Varuna Tirta Prakasya
• Virama Karya
• Waskita Karya dan Entitas Anak
• Wijaya Karya dan Entitas Anak
• Yodya Karya
PENGENDALIAN KEGIATAN PERUSAHAAN
• Manajemen Kunci

TRANSAKSI

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
GIRO PADA BANK LAIN		
Bank Mandiri	1.655.195	1.469.438
Bank Rakyat Indonesia	303	79
Total	1.655.498	1.469.517
PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA		
Bank Tabungan Negara	423.215	266.866
Bank Mandiri	213.079	337.957
Bank Rakyat Indonesia	76.732	448.255
Total	713.026	1.053.078
EFEK - EFEK		
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	1.360.531	37.501
Danareksa	928.208	340.875
Bank Rakyat Indonesia	407.467	5.016
Bank Mandiri	331.402	17.754
Permodalan Nasional Madani	283.420	217
Pelabuhan Indonesia II	267.103	273.066
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	261.187	-
Bank Tabungan Negara	213.454	175.743
Garuda Indonesia	141.872	141.796
Pertamina	96.614	136.030
Waskita Karya	91.509	2.997
Sarana Multigriya Finansial	77.548	11.731
Perusahaan Listrik Negara	47.090	126.949
Telekomunikasi Indonesia	41.955	18.410
Lain-lain	137.225	68.219
Total	4.686.585	1.356.304
WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA		
Adhi Karya	1.787.265	-
Waskita Karya	1.090.193	1.708.531
Brantas Abipraya	653.799	425.656
Wijaya Karya	631.480	366.854
Hutama Karya	498.574	208.593
Bank Mandiri	328.843	53.591
Nindya Karya	133.223	61.946
Lain-lain	82.221	71.048
Total	5.205.598	2.896.219

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
TAGIHAN AKSEPTASI		
Garuda Indonesia	1.691.031	76.111
Pembangunan Perumahan	254.450	58.509
Hutama Karya	227.160	109.267
Pindad	214.599	58.441
Krakatau Steel	182.284	25.126
Wijaya Karya	149.690	134.871
Dirgantara Indonesia	95.415	198.160
Dahana	90.318	81.703
Nindya Karya	80.625	127.278
Lain-lain	130.136	367.408
Total	3.115.708	1.236.874
TAGIHAN DERIVATIF		
Garuda Indonesia	33.696	104.686
Bank Mandiri	6.699	1.419
Bank Rakyat Indonesia	4.984	7
Lain-lain	2.726	12.790
Total	48.105	118.902
PINJAMAN YANG DIBERIKAN		
Perusahaan Listrik Negara	19.261.255	10.644.337
Pegadaian	5.378.658	4.940.006
Telekomunikasi Indonesia	4.621.145	3.808.352
Bulog	4.487.128	793
Krakatau Steel	3.607.965	2.117.992
Petrokimia Gresik	3.378.668	4.092.364
Waskita Karya	3.578.039	745.461
Jasa Marga	2.794.921	1.404.660
PANN	2.604.902	2.497.066
Perkebunan Nusantara III	2.389.116	1.078.105
Tambang Batubara Bukit Asam	2.304.160	2.513.414
Perkebunan Nusantara VII	2.126.730	2.149.862
Pertamina	2.031.054	1.486
Kereta Api Indonesia	1.897.367	2.297.209
Kementerian Keuangan	1.635.296	647.573
Garuda Indonesia	1.596.823	631.823
Pupuk Sriwijaya	1.187.151	1.084.836
Rajawali Nusindo	1.042.903	758.916
Pupuk Iskandar Muda	1.014.000	924.795

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
PAL Indonesia	905.478	938.258
Perkebunan Nusantara IV	798.613	-
Pelabuhan Indonesia III	625.000	11.951
Angkasa Pura I	621.300	688.994
Semen Baturaja	599.427	-
Dirgantara Indonesia	568.357	-
Wijaya Karya	504.220	381.095
Perkebunan Nusantara V	500.000	-
Pembangunan Perumahan	494.383	204.274
Pindad	441.927	290.001
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	432.087	-
Hutama Karya	430.478	239.714
Pupuk Indonesia	426.277	-
Perkebunan Nusantara XI	414.272	96.694
Rekayasa Industri	350.052	203.201
Mega Eltra	313.948	232.124
Pos Indonesia	294.858	374.301
Perusahaan Gas Negara	252.609	-
Adhi Karya	250.000	-
Industri Gula Glenmore	223.021	-
Pupuk Kujang	211.266	618.994
Dahana	169.744	171.641
IGLAS	156.567	157.582
Pelabuhan Indonesia I	155.722	48.516
Permodalan Nasional Madani	153.620	167.500
Brantas Abipraya	99.869	99.551
Perusahaan Perdagangan Indonesia	99.791	-
Sang Hyang Seri	97.500	98.403
Perumnas	94.419	99.659
LEN Industri	92.839	17.445
Angkasa Pura II	82.838	-
Perkebunan Nusantara VIII	72.547	-
Percetakan Uang Republik Indonesia	70.468	99.002
Perikanan Indonesia	52.578	-
Virama Karya	51.390	-
Lain-lain	148.836	839.412
Total	78.193.582	48.417.362

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
SIMPANAN NASABAH		
Pertamina	14.509.204	9.181.220
Perusahaan Listrik Negara	10.559.324	4.426.697
Pelabuhan Indonesia II	4.927.336	81.712
Perusahaan Gas Negara	4.166.171	2.614.511
Telekomunikasi Indonesia	3.315.077	5.739.334
Waskita Karya	3.262.602	1.899.046
BPJS Kesehatan	1.906.443	799.546
Indonesia Asahan Aluminium	1.869.301	-
Hutama Karya	1.724.177	1.157.185
Krakatau Steel	1.658.137	158.715
BPJS Ketenagakerjaan	1.461.736	3.165.008
Wijaya Karya	1.419.215	122.652
Garuda Indonesia	1.245.157	388.938
Pembangunan Perumahan	1.203.778	144.280
Petrokimia Gresik	1.200.805	959.183
Kementerian Keuangan	1.153.026	2.587.003
Asuransi Jiwasraya	1.087.055	971.708
Angkasa Pura II	1.039.429	212.848
Kereta Api Indonesia	1.014.855	772.840
Tambang Batubara Bukit Asam	955.269	1.028.122
Jasa Marga	797.606	760.686
Bulog	587.259	1.756
Pelabuhan Indonesia I	585.418	512.417
Pupuk Indonesia	582.342	300.666
Asuransi Jasa Indonesia	517.541	833.230
Barata Indonesia	500.176	366
Pelabuhan Indonesia IV	484.009	57.325
Semen Gresik	443.463	429.204
Pelabuhan Indonesia III	404.992	390.495
Adhi Karya	387.904	136.072
Pindad	352.063	192.657
Asuransi Kredit Indonesia	344.274	47.893
Aneka Tambang	341.288	874.536
Perumnas	335.095	1.027.591
PAL Indonesia	334.068	972.775
Perikanan Indonesia	311.966	-
Perkebunan Nusantara III	267.673	262.863
Perkebunan Nusantara XI	265.582	40.390

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
Dirgantara Indonesia	243.878	281.799
Brantas Abipraya	233.072	224.563
Kliring Berjangka Indonesia	226.973	82.230
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	214.557	-
Pos Indonesia	207.852	191.056
Angkasa Pura I	194.747	297.286
Perkebunan Nusantara IV	176.781	40.809
Jaminan Kredit Indonesia	176.705	239.009
Nindya Karya	161.398	195.442
Perkebunan Nusantara VII	157.015	215.408
Perusahaan Perdagangan Indonesia	144.360	4.563
Inhutani V	137.446	202.278
Perkebunan Nusantara XII	135.236	169
Dahana	132.052	123.906
Rekayasa Industri	131.781	235.137
Asuransi Jasa Raharja	117.968	253.927
Percetakan Uang Republik Indonesia	107.518	76.654
Permodalan Nasional Madani	101.974	1.032.033
Lain-Lain	1.459.767	3.939.131
Total	71.981.896	50.886.870
SIMPANAN DARI BANK LAIN		
Bank Tabungan Negara	318.426	164.958
Bank Mandiri	278.257	1.371
Bank Rakyat Indonesia	98.370	13.558
LPEI	669	-
Total	695.722	179.887
LIABILITAS DERIVATIF		
Bank Rakyat Indonesia	7.219	-
Bank Mandiri	1.749	1.394
Perusahaan Listrik Negara	1.236	-
Garuda Indonesia	203	-
Krakatau Steel	36	370
Lain-lain	536	981
Total	10.979	2.745
LIABILITAS AKSEPTASI		
Pindad	199.922	-
Garuda Indonesia	197.644	-
Pembangunan Perumahan	191.559	-
Hutama karya	131.357	-

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
Dahana	93.098	-
Wijaya Karya	66.172	-
Krakatau Steel	58.824	-
Adhi Karya	33.124	-
Dirgantara Indonesia	32.873	-
Nindya karya	30.507	-
LEN Industri	17.160	-
Lain-lain	41.468	491.533
Total	1.093.708	491.533
DANA SYIRKAH TEMPORER – GIRO ***MUDHARABAH***		
Pemerintah Republik Indonesia	126.634	-
Pertamina	5.913	-
Pegadaian	752	-
Asuransi Jasa Indonesia	90	-
Lain-lain	7.726	10
Total	141.115	10
DANA SYIRKAH TEMPORER – DEPOSITO ***MUDHARABAH***		
Pemerintah Republik Indonesia	7.054.485	-
Pertamina	400.000	-
Manajemen kunci	10.104	4.559
Pertamina Gas	-	179.205
Pelabuhan Indonesia II	-	137.850
Asuransi Jasa Indonesia	-	2.525
Lain-lain	66.002	10.000
Total	7.530.591	334.139
DANA SYIRKAH TEMPORER – TABUNGAN ***MUDHARABAH***		
Manajemen kunci	13.830	8.778
Jamsostek	12	-
Bumi Putera	7	-
Total	13.849	8.778
SUKUK ***MUDHARABAH***		
Bank Syariah Mandiri	100.000	100.000
Danareksa	25.000	-
Penjaminan Infrastruktur Indonesia	20.000	-
Asuransi Jasa Indonesia	10.000	-
Lainnya	10.000	51.000
Total	165.000	151.000
GARANSI BANK YANG DITERBITKAN		
Hutama Karya	2.983.713	2.632.751

Tinjauan Informasi Keuangan Lainnya

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
Waskita Karya	2.531.086	3.073.846
Nindya Karya	1.593.224	992.257
Brantas Abipraya	1.375.188	818.350
Pembangunan Perumahan	1.295.762	191.673
Pertamina	1.244.240	1.360.016
Wijaya Karya	1.164.496	329.134
Bank Mandiri	940.471	136.147
Perusahaan Listrik Negara	771.797	637.158
Rekayasa Industri	650.958	248.831
Adhi Karya	429.787	-
Dirgantara Indonesia	421.837	625.920
Kereta Api Indonesia	420.323	281.508
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	392.140	199.104
Telekomunikasi Indonesia	351.214	178.934
Perusahaan Gas Negara	313.319	299.745
Tambang Batubara Bukit Asam	284.177	253.057
Krakatau Steel	186.872	322.265
Krakatau Steel	168.157	10.120
LEN Industri	118.050	107.729
Pupuk Iskandar Muda	113.584	119.708
Semen Gresik	110.037	6.214
Garuda Indonesia	83.821	84.746
Rajawali Nusindo	72.440	40.578
Mega Eltra	46.930	63.628
Dahana	46.142	77.893
Kertas Kraft Aceh	43.686	1.254
Asuransi Jasa Indonesia	40.210	9.578
Lain-lain	173.308	327.754
Total	18.366.969	13.429.898
LETTER OF CREDIT		
Telekomunikasi Indonesia	1.734.578	1.102.890
Bulog	1.055.573	292.132
Krakatau Steel	701.044	529.470
Pertamina	529.459	212.769
Pembangunan Perumahan	471.550	148.833
Semen Baturaja	359.083	469.384
Kereta Api Indonesia	341.618	429.276
Pindad	164.703	221.994
Dirgantara Indonesia	134.541	279.423

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
Nindya Karya	126.792	198.531
Perkebunan Nusantara V	87.717	-
Hutama Karya	86.437	57.233
Petrokimia Gresik	67.206	104.640
Pupuk Kujang	42.981	57.065
Garuda Indonesia	41.669	43.460
Semen Gresik	40.188	107.566
Lain-lain	253.418	421.265
Total	6.238.557	4.675.931
GAJI DAN TUNJANGAN		
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja jangka panjang Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Executive Vice President* dan *Senior Vice President*	122.791	104.685
Tantiem, bonus Dewan Komisaris, Direksi, *Executive Vice President* dan *Senior Vice President*	138.013	167.060

Selain itu, rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
ASET		
Giro pada bank lain	1.655.498	1.469.517
Penempatan pada bank lain	713.026	1.053.078
Efek-efek	4.686.585	1.356.304
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	5.205.598	2.896.219
Tagihan akseptasi	3.115.708	1.236.874
Tagihan derivative	48.105	118.902
Pinjaman yang diberikan	78.193.582	48.417.362
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi	93.618.102	56.548.256
Jumlah aset konsolidasian	603.031.880	508.595.288
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	15,5%	11,1%
LIABILITAS		
Simpanan nasabah	71.981.896	50.886.870
Simpanan dari bank lain	695.722	179.887
Liabilitas derivatif	10.979	2.745
Liabilitas akseptasi	1.093.708	491.533
Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	73.782.305	51.561.035
Jumlah liabilitas konsolidasian	492.701.125	412.727.677
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	15,0%	12,5%

	2016 Rp juta	2015 Rp juta
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan *Mudharabah*	7.685.555	342.927
Sukuk *Mudharabah*	165.000	151.000
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer Pihak-pihak berelasi	7.850.555	493.927
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	21.076.755	17.429.389
Persentase jumlah Dana *Syirkah* Temporer kepada pihak-pihak Berelasi terhadap jumlah Dana *Syirkah* Temporer konsolidasian	3,8%	2,8%

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, BNI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan

LARANGAN, BATASAN, DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SATU KELOMPOK USAHA

Total penyediaan dana kepada pihak terkait di tahun 2016 sebesar Rp4,9 triliun. Pemberian dana kepada pihak terkait tersebut masih sesuai dengan ambang batas maksmimum pemberian kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bagi Bank Umum yaitu sebesar maksimal 10% dari Modal Bank.

Di tahun 2016, tiga porsi penyediaan dana kepada pihak terkait yang tertinggi adalah kepada BNI *Asset Management* sebesar Rp2,3 triliun dalam bentuk reksadana, kemudian kepada BNI Syariah sebesar Rp1,5 triliun dalam bentuk penyertaan dan garansi bank, dan BNI *Multifinance* sebesar Rp522 miliar dalam bentuk penyertaan, pinjaman, serta *corporate card*.

Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Sampai Dengan Desember 2016

	Rp miliar
Total Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	4.881
Modal	84.278
BMPK (10% dari Modal)	8.428
Over (Under) terhadap BMPK	(3.547)

Detail Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Sampai Dengan Desember 2016

No	Pihak Terkait	Jenis Penyediaan Dana	Penyediaan Dana Rp miliar
1	BNI *Asset Management*	Surat Berharga	2.311
2	BNI Syariah	Penyertaan, Garansi Bank	1.513
3	BNI Multifinance	Penyertaan, Pinjaman, *Corporate Card*	522
4	BNI Life Insurance	Penyertaan, *Corporate Card*, Garansi Bank	403

No	Pihak Terkait	Jenis Penyediaan Dana	Penyediaan Dana Rp miliar
5	BNI *Securities*	Penyertaan, Pinjaman, *Corporate Card*, Garansi Bank, *Intraday*	105
6	BNI *Remmitance*	Penyertaan	10
7	Perseorangan	Pinjaman Konsumtif dan Kartu Kredit	17
TOTAL PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT			**4.881**
MODAL			84.278
SPACE / OVER (UNDER)			(3.547)

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Bentuk kontribusi BNI kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, kontribusi terbesar Perusahaan adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Sedangkan sebagai pemotong pajak, BNI berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak. BNI selalu tepat waktu dalam pembayaran kewajiban pajak atas PPh Badan, PPh Karyawan, PPN, dan PBB. BNI juga menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen kewajiban pada lembaga regulator dengan tepat waktu. Jumlah setoran PPh badan tahun 2016 sebesar Rp 2,7 triliun menurun sebesar 27,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 3,7 triliun.

Kontribusi kepada Negara selain Dividen

	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar	Pertumbuhan 2015-2016 (%)	Pertumbuhan 2014-2015 (%)
- PPN	366	490	535	25,3	(8,4)
- PPh	2.316	2.205	2.210	5,0	897,7
- PPh Badan	2.791	3.736	2.559	(25,3)	46,0
- Pajak Lainnya	2	77	2	(97,4)	3.750,0
Total	**5.475**	**6.508**	**5306**	**(15,9)**	**22,7**

PROPERTI UNTUK INVESTASI

Sampai dengan akhir tahun 2016, BNI tidak memiliki aset properti yang digunakan untuk keperluan investasi

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

TUJUAN IKATAN

Ikatan material yang dimiliki oleh BNI bertujuan sebagai komitmen pembelian barang modal yang telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

SUMBER DANA

Sumber dana yang digunakan dalam pembelian barang modal berasal dari modal BNI yang telah dianggarkan selama tahun berjalan.

MATA UANG
Seluruh transaksi yang dilakukan dalam rangka pengikatan material untuk belanja modal adalah dalam mata uang rupiah.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG
Karena seluruh transaksi pengikatan dan belanja modal dilakukan dalam mata uang rupiah, maka BNI tidak perlu melakukan perlindungan atas risiko perlindungan atas mata uang.

NILAI IKATAN
BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM sebesar Rp1,2 triliun.Terkait dengan belanja modal, BNI telah melakukan beberapa pengikatan material, yang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, sehingga terdapat risiko fluktuasi mata uang.
Beberapa ikatan material yang dilakukan di antaranya:

1. Proyek Pembangunan gedung
   a. Proyek lanjutan pembangunan Gedung Pejompongan tahun 2016 sebesar 284 miliar
   b. Proyek lanjutan pembangunan Gedung BSD tahun 2016 sebesar 259 miliar
   c. Pembelian tanah dan bangunan KCU Melawai (Wilayah Jakarta Senayan) Rp93 miliar
   d. Pembelian tanah dan bangunan untuk KLN Sunter (Wilayah Jakarta Kota) sebesar 15 miliar

2. Pengembangan infrastruktur TI dan e-Banking
   a. ATM 2017 sebesar 348 miliar
   b. EMV Base 24 Rp10 miliar
   c. Lisensi *Software* mesin *mainframe* Rp64 miliar
   d. Infrastruktur E-lo *(Electronic Loan Origination) Mobile* sebesar Rp 8.1 miliar
   e. *Electronic Data Capture* (EDC) Rp136.5 miliar
   f. Lisensi *Microsoft Enterprise Agreement* Rp53 miliar
   g. CCTV ATM Rp7 miliar
   h. Pembelian dan peremajaan BNI Layanan Gerak (BLG) Rp8 miliar

Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan atas belanja modal tersebut berasal dari sisa anggaran investasi tahun lalu, total beban penyusutan tahun lalu dan pembagian/ persentase laba bersih tahun buku sebelumnya.

INVESTASI BARANG MODAL

JENIS INVESTASI
Investasi barang modal yang direalisasi pada tahun 2016 sebesar Rp1,8 Trilun, sebagian besar terdiri dari pembelian perabotan otomasi sebesar 848 miliar, serta pembelian Bangunan dan Gedung sebesar 713 miliar.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL
Pembelian barang modal tersebut bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan perusahaan secara menyeluruh.

NILAI INVESTASI
Belanja barang modal BNI pada tahun 2016 menurun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp783 miliar. Hal ini mengingat tahun lalu terdapat pembelian gedung Kantor Pusat BNI senilai Rp1,5 triliun. Peningkatan nilai investasi di tahun 2016 didominasi oleh jenis barang modal berupa perabotan otomasi sebesar Rp203 miliar yang disebabkan oleh perluasan jaringan & teknologi, dan *replacement* mesin ATM.

Adapun rincian terkait nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Nilai Investasi Barang Modal

Jenis Barang Modal	2016 Rp miliar	2015 Rp miliar	2014 Rp miliar
Bangunan/Gedung	713	524	274
Tanah	122	1,382	-
Perabotan Otomasi	848	645	803
Perabotan Non Otomasi	195	114	120
Kendaraan	8	4	6
Total	**1,886**	**2,669**	**1,203**

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

PENCAPAIAN TARGET 2016

Di tengah gejolak politik dalam negeri dan perlambatan ekonomi secara global berdampak secara tidak langsung terhadap pertumbuhan BNI secara keseluruhan, keadaan tersebut sudah bisa diprediksi oleh BNI sejak tahun lalu dan melakukan tindakan preventif untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus persaingan. Pada posisi Desember 2016 laba BNI tumbuh 25,1% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar Rp9,.1 triliun di tahun 2015 menjadi Rp11,3 triliun di tahun 2016.

Aset BNI tumbuh sebesar 18,6%, dari tahun 2015 sebesar Rp508,6 triliun menjadi Rp603,0 triliun di tahun 2016, pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh tumbuhnya Pinjaman yang diberikan sebesar 20,6% menjadi Rp393,3 triliun di tahun ini, yang diikuti oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 17,6% menjadi Rp435,5 triliun dengan LDR sebesar 90,4%. Sebagai bentuk mitigasi resiko, BNI meningkatkan *coverage ratio* dari 140,4% di tahun 2015 menjadi 146,0% di tahun 2016.

Kebijakan strategis	Target 2016	Pencapaian 2016	Keterangan
1. Memperkuat ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen menengah pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas			
2. Meningkatkan FBI dan Casa melalui penguatan *Transactional Banking* nasabah dan *value chain*-nya			
3. Memperkuat *positioning* produk konsumer banking: BNI Griya, BNI Flexi, dan Kartu Kredit serta Taplus	ROA: 2,6-2,8% ROE: 14,0-18,0% Pertumbuhan pinjaman: 14,0-16,0%	ROA: 2,7% ROE: 15,5% Pertumbuhan pinjaman: 20,6%	Tercapai Tercapai Tercapai
4. Mengimplementasikan layanan digital untuk peningkatan *sales* dan *costumer interaction*	*Coverage ratio*: 140,0-147,0%	*Coverage ratio*: 146,0%	Tercapai
5. Meningkatkan *cross selling product* terhadap segmen yang dituju	NPL bruto: 2,7-3,0% LDR: 88,0-91,0%	NPL bruto: 3,0% LDR: 90,4%	Tercapai Tercapai
6. Mengomptimalkan *outlet* menjadi *revenue center* termasuk solusi keuangan terintegrasi	Pertumbuhan DPK : 12,0-14,0% CIR : 43,0-45,0%	Pertumbuhan DPK : 17,6% CIR : 44,0%	Tercapai Tercapai
7. Melakukan akuisisi/ divestasi perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang memiliki sinergi yang kuat			
8. Meningkatkan *engagement* dan produktivitas pegawai			

Secara umum, sampai dengan Desember 2016, BNI telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA dan ROE mencapai target dengan realisasi sebesar 2,7% dan 15,5%.
2. Pertumbuhan pinjaman BNI mencapai 20,6% diikuti dengan *coverage ratio* yang juga meningkat menjadi 146,0%.
3. LDR sebesar 90,4%.
4. Peningkatan *recurring fee* sebesar 23,0% dan Dana Pihak Ketiga sebesar 17,6% dengan *service level* pada posisi *top 2*.
5. Membaiknya efisiensi operasional dengan CIR sebesar 44,0%.

PROYEKSI

Dalam hal perencanaan bisnis untuk tahun 2017, Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2017 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2017, baik dari segi makro maupun mikro. Rencana Bisnis Bank tersebut diuraikan sebagai berikut.

Kebijakan Strategis	Target 2017
1. Ekspansi kredit fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah untuk korporasi dan BUMN yang mencakup hulu hingga hilir	ROA: 2,5-2,8%
2. Ekspansi kredit segmen menengah secara selektif dengan fokus pada industri prospektif	ROE: 17,0-19,0% Pertumbuhan Pinjaman: 20,0-23,0%
3. Ekspansi kredit kecil di sektor ekonomi produksi dan prioritas	*Coverage Ratio*: 146,0-148,0%
4. Ekspansi bisnis konsumer dengan fokus pada optimalisasi existing nasabah BNI, *selected developer, selected partner* dan *high transaction merchant*	NPL bruto: 2,8-3,0% LDR: 90,0-92,0%
5. Meningkatkan DPK terutama CASA melalui *closed-loop transaction* dan transaksi *e-channel*	Pertumbuhan DPK: 19,0-23,0%
6. Pengembangan *digital banking* untuk meningkatkan *customer experience,* transaksi, dan penjualan	CIR: 43,0-45,0%
7. Meningkatkan *engagement* dan produktivitas pegawai	*Service Level* : *Top 2*

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp8.950.869.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III	
Nilai Bersih Realisasi Hasil Penawaran Umum (setelah dikurangi biaya-biaya)	Rp10.216.387.083.313,-
REALISASI PENGGUNAAN DANA	
Sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran kredit Korporasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil, serta Konsumer	Per 31 Desember 2014 Rp 173.110.530.423,-
Sekitar 15% akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pada teknologi informasi, outlet dan ATM dan lain-lain	Per 31 Desember 2014 Rp1.532.458.224.454,-
Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan anak perusahaan yaitu BNI Life, BNI Syariah, BNI Securities dan BNI Multifinance	Per 31 Desember 2014 Rp510.819.408.152,-
Sisa hasil Penggunaan Dana	Rp Nihil

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen setiap tahun ditetapkan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Pada tahun 2016, BNI telah melakukan pembayaran dividen kas sebesar Rp2.266.645.318.109,00 atau sebesar 25,0% dari laba bersih tahun buku 2015.

Tahun Buku	Total Dividen yang dibagikan	Jumlah Dividen per saham	*Pay out Ratio*	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pembayaran Dividen
2013	Rp2.716,30	Rp145,71	30% of 2013 *net income*	3 April 2014	19 Mei 2014
2014	Rp2.695,66	Rp144,549658	25% of 2014 *net income*	19 Maret 2016	17 April 2016
2015	Rp2.266,64	Rp122,533827	25% of 2016 *net income*	14 Maret 2016	13 April 2016

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan Surat Edaran No. 22/SEOJK.04/2016 tanggal 21 Agustus 2016 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka BNI melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia *(Buy Back)*. BNI telah menunjuk PT BNI Securities sebagai lembaga sekuritas yang melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan dengan periode pembelian saham di pasar kurang dari 3 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali adalah sebesar 0,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sejumlah 150.537.500 lembar saham. Nilai pembelian kembali s aham Perseroan sebesar Rp749.979.275.500,00 (maksimal 750 miliar Rupiah) dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp4.982,00 per saham.

Atas pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 30 Oktober 2016. Memperhatikan butir 4 huruf a angka 3 Peraturan No. XI.B.2 jo. Pasal 9 Peraturan OJK Nomor: 2/ POJK.04/2013, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan/digunakan untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Empoyee Stock Purchase Plan*, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 12 Mei 2016 yang intinya menyampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan pengalihan saham Seri C hasil pembelian kembali saham melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk Bonus Saham (selanjutnya disebut "Program Bonus Saham").

Program Bonus Saham disusun sebagai bagian dari remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam bentuk penghargaan jangka panjang dimana saham yang dibeli kembali dialokasikan kepada:

- Pegawai sebagai bonus atas pencapaian kinerja perusahaan, dan
- Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari tantiem untuk tahun buku yang bersangkutan.

Pengawasan Program Bonus Saham akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

Alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN.

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 8 tanggal 10 Maret 2016, alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri BUMN.

PROGRAM BONUS SAHAM PEGAWAI

Program bonus saham pegawai merupakan program pemberian bonus dalam bentuk saham Bank yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.

Tujuan dari program bonus saham pegawai ini adalah sebagai:

1. Bentuk retensi pegawai dalam jangka panjang.
2. Upaya untuk memotivasi pegawai agar memberikan kinerja yang terbaik.
3. Upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap Bank.

Alokasi tahap I dilakukan pada tahun 2016 dan pegawai yang berhak menjadi peserta dalam Program Bonus Saham adalah pegawai tetap per 30 Oktober 2016 (dhi. tanggal Keterbukaan Informasi).

Pegawai yang dinyatakan *eligible* untuk *vesting* akan memperoleh pemberitahuan melalui email atau media komunikasi lainnya yang di antaranya

memuat konfirmasi atas bonus saham yang menjadi haknya pada tanggal *vesting* tersebut. Adapun syarat vesting ditetapkan sebagai berikut.

1. Tidak sedang dalam proses kasus dan/atau dampak sanksi mengacu pada Peraturan Kepegawaian Bank yang berlaku;
2. Tidak berakhir hubungan kerja atas kemauan sendiri; atau
3. Tidak berakhir hubungan kerja karena kinerja (*low performance*).

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI DI BANK DAN KELOMPOK USAHA BANK DALAM TAHUN YANG BERSANGKUTAN

Tidak terdapat perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank sampai dengan periode Desember 2016 yang berpengaruh terhadap posisi keuangan BNI.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

INVESTASI
Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan kegiatan investasi.

EKSPANSI
Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan kegiatan ekspansi.

DIVESTASI
Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI
Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL
Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

Tax Amnesty

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016. Sejak awal tahun 2016, pemerintah sudah menggaungkan program *Tax Amnesty* dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara untuk pembiayaan pembangunan.

BNI sebagai bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang *Tax Amnesty* ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dari wajib pajak yang mengikuti Program *Tax Amnesty* setelah melakukan pengungkapan harta (baik di dalam dan di luar negeri) yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016.

BNI juga ditunjuk pemerintah sebagai *gateway* dan pengelola repatriasi nasabah/wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* dengan cara menerima dana repatriasi melalui rekening khusus dan melakukan pengalihan dana repatriasi tersebut ke instrumen investasi yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Untuk mendukung kelancaran program *Tax Amnesty* tersebut, BNI menyiapkan lebih dari 1.800 kantor Cabang di seluruh Indonesia dan 6 Kantor Cabang di luar negeri.

Sampai dengan 31 Desember 2016 BNI berhasil menghimpun pembayaran uang tebusan atau dana yang dibayarkan wajib pajak dalam rangka mendapatkanp pengampunan pajak sebanyak 106.945 lembar setoran dengan total nominal sebesar Rp8,8 miliar. Untuk penerimaan Dana Repatriasi atau harta yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri yang telah disetorkan ke rekening khusus oleh wajib pajak melalui BNI dalam beragam satuan mata uang sebanyak 257 rekening khusus dengan total nominal sebesar Rp9.671 miliar.

Adapun rincian terkait realisasi *Tax Amnesty* diuraikan sebagai berikut.

Realisasi Uang Tebusan dan Dana Repatriasi Program *Tax Amnesty* melalui BNI s.d 31 Desember 2016

Segmen	Uang Tebusan		Dana Repatriasi	
	Jumlah Transaksi (lembar)	Nominal Rp miliar	Jumlah Transaksi (rekening)	Nominal Rp miliar
Non UMKM	106.945	8.748	257	9.671
UMKM	-	-	-	-
Total	106.945	8.748	257	9.671

Permasalahan Hukum Pajak

Adapun rincian terkait permasalahan hukum pajak Bank BNI diuraikan sebagai berikut.

1. Pada pelaporan PPh Badan tahun 2010 terkait pemenuhan persyaratan atas pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, BNI telah mengacu pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010 (PMK 57) tentang pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan tahun 2010 di atas, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No.00002/206/10/093/12 pada tanggal 28 November 2012, DJP menganggap bahwa BNI tidak memenuhi ketentuan dalam hal pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sehingga BNI diwajibkan membayar sebesar Rp1,6 triliun karena dianggap baru melakukan hapus buku dan masih melakukan upaya-upaya penagihan atas pinjaman yang dihapusbukukan. Dari sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan, BNI telah melakukan pembayaran di muka sebesar Rp816 miliar pada tanggal 26 Februari 2013.

   Terhadap SKPKB tersebut, BNI melakukan upaya hukum berupa permohonan keberatan yang kemudian ditolak oleh DJP melalui Keputusan No. KEP-289/WPJ.19/2014. Selanjutnya atas penolakan permohonan keberatan tersebut, BNI melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2014 yang kemudian telah dilakukan sidang pemeriksaan terakhir pada tanggal 17 Februari 2015.

   Kemudian pada tanggal 16 Maret 2016, Pengadilan Pajak membacakan putusan pengadilan terkait permohonan banding BNI kepada Pengadilan Pajak atas SKPKB PPh Badan tahun 2010 melalui putusan Nomor Put.69238/PP/M.IIA/15/2016 yang mengabulkan seluruh permohonan banding BNI.

2. Pada pelaporan PPh Badan tahun 2013 terkait pemenuhan persyaratan atas Penyampaian daftar emiten yang harus memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 (PP 77/2013) untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% untuk tahun pajak 2013, dimana salah satu syarat dalam PP 77/2013 adalah Wajib Pajak harus mempunyai saham tanpa warkat *(scriptless)* sejumlah 40%. Namun sampai dengan 31 Desember 2013, BNI hanya mempunyai sejumlah 7.459.462.584 lembar saham yang berbentuk *scriptless* (39,9%), sehingga menurut Ditjen Pajak berdasarkan PP 77/2013, BNI tidak berhak mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 5%.

   Sehingga dengan demikian, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor 00002/206/13/093/14 tanggal 16 Desember 2014, Direktorat Jenderal Pajak menganggap BNI kurang bayar sebesar Rp619.751.055.740,00, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ada pada PP 77/2013. Dari sejumlah kewajiban tersebut, BNI telah melakukan pembayaran dimuka sebesar Rp619.751.055.740,00 pada tanggal 30 Desember 2014.

Terhadap SKPKB tersebut, BNI melakukan upaya hukum berupa permohonan keberatan yang kemudian ditolak oleh DJP melalui keputusan No.KEP-00057/KEB/WPJ.19/2016. Selanjutnya atas penolakan permohonan keberatan tersebut, BNI melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Juni 2016 yang kemudian telah dilakukan sidang pemeriksaan pada tanggal 6 Desember 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, atas proses banding yang dilakukan BNI masih berjalan dan belum dilakukan pembacaan putusan dari Pengadilan Pajak.

Informasi Material Lainnya

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang signifikan setelah tanggal laporan akuntan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan BNI per tanggal 31 Desember 2016.

TRANSAKSI-TRANSAKSI PENTING LAINNYA DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan yang dilakukan oleh BNI.

ISO 9001:2015

Perbaikan tiada henti, sebagai salah satu nilai budaya kerja BNI, mendorong setiap insan BNI untuk senantiasa melakukan penyempurnaan. Salah satu wujud pengimplementasian nilai budaya kerja tersebut adalah dengan diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Publikasi (LKP). Tujuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah memastikan proses penyusunan LKP BNI mampu memenuhi harapan pengguna laporan akan LKP yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan regulator sehingga tercapailah kepuasan user LKP yaitu regulator, pihak-pihak eksternal, dan manajemen BNI. BNI telahmengembangkan prosedur dan dokumentasi, dan pengembangan karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan LKP, serta penyempurnaan sistem dan lingkungan kerja, guna memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Pada bulan September 2016, secara resmi proses penyusunan LKP BNI diakui oleh sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP BANK

Adapun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2016 dan dampaknya bagi Bank BNI diuraikan di dalam tabel sebagai berikut. *f*

Peraturan	Keterangan Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
PBI No. 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	1. Ruang Lingkup Pelaporan Bank wajib menyampaikan laporan LLD yang secara umum meliputi: a. Transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) bank dan/atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) bank. b. Posisi dan mutasi AFLN bank dan/atau KFLN bank. c. Rincian transaksi ekspor dan dokumen pendukung terkait transaksi ekspor dalam hal terdapat transaksi terkait ekspor nasabah. 2. Batas Waktu Penyampaian Laporan Bank wajib menyampaikan laporan LLD setiap bulan secara *online* paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (Masa Penyampaian Laporan / MPL) dengan masa koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan laporan yang bersangkutan (Masa Penyampaian Koreksi Laporan / MPKL). 3. Sanksi Administratif a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. b. Bank yang tidak menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). c. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD dengan benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (*field*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Dengan adanya PBI ini dan ketentuan yang mengatur LLD ini bersifat khusus, maka PT. Bank Negara Indonesia harus menyesuaikan dan mengupdate Pedoman Perusahaan (PP) sesuia dengan PBI yang berlaku saat ini dikarenakan ruang lingkup pelaporan yang mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Informasi Material Lainnya

Peraturan	Keterangan Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
PBI No. 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat Atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional	1. Latar Belakang Pengaturan Dalam rangka mengoptimalkan pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan dan penurunan Giro Wajib Minimum Primer, Bank Indonesia menetapkan kebijakan di bidang makroprudensial melalui penyesuaian kebijakan Giro Wajib Minimum yang terkait batas bawah *Loan to Funding Ratio* (LFR) untuk meningkatkan pertumbuhan kredit. 2. Substansi Penyempurnaan a. Penetapan batas bawah LFR Target dari yang sebelumnya 78% menjadi 80%. b. Penyesuaian terhadap contoh-contoh perhitungan GWM yang terkait dengan penyebutan batas bawah LFR Target dan pengkinian tanggal data laporan. c. PBI ini berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2016. d. Dalam menghitung LFR pada tanggal 24 Agustus 2016, bank menggunakan sumber data dan nilai dalam Laporan Berkala Bank Umum periode data tanggal 8–15 Agustus 2016, dan data dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan periode Juni 2016.	BNI sebelumnya telah melakukan perhitungan *Loan to Funding Ratio* (LFR), selanjutnya BNI akan melakukan penyesuaian komponen perhitungan LFR sesuai dengan PBI dimaksud.
PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	1. Latar Belakang Pengaturan Dalam rangka meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. 2. Substansi Penyempurnaan a. Penyesuaian rasio dan *tiering* LTV untuk Kredit Properti (KP) serta rasio dan *tiering* FTV untuk Pembiayaan Properti (PP) untuk untuk fasilitas ke-1, fasilitas ke-2, fasilitas ke-3 dan seterusnya sehingga rasio LTV untuk KP dan rasio FTV untuk PP paling besar menjadi sebagaimana tabel berikut: b. Penyesuaian persyaratan untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sehingga menjadi sebagai berikut: i. rasio Kredit bermasalah dari total Kredit atau rasio Pembiayaan bermasalah dari total Pembiayaan secara bersih (***net***) kurang dari 5% (lima persen); dan ii. rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).	BNI telah melakukan perhitungan Loan To Value Ratio sesuai dengan PBI sebelumnya. Dengan terbitnya PBI baru, BNI perlu melakukan penyesuaian perhitungan dan tearing LTV untuk masing-masing kredit properti dan pembiayan properti.

Peraturan	Keterangan Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
PBI No. 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur	Substansi Penyempurnaan: 1. Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *online* melalui kantor Pelapor yang bersangkutan atau kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor dimaksud dengan tetap menggunakan sandi kantor Pelapor yang bersangkutan. 2. Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur terdiri atas Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau pihak lain. 3. Pelapor wajib menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur. 4. Dalam hal Pelapor menerima pengaduan Debitur terkait Informasi Debitur dalam Sistem Informasi Debitur, Pelapor wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Pelapor wajib melaporkan pengaduan Debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Debitur kepada Bank Indonesia secara triwulanan. 5. Sanksi kewajiban membayar terhadap Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur, adalah: a. Bagi Bank Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor; dan b. Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.	Dengan terbitnya peraturan dimaksud, BNI harus menambahkan informasi tambahan yang dibutuhkan ke dalam sistem. Selain itu juga BNI secara pararel juga mempersiapkan sistem terkait migrasi Sistem Informasi Debitur (SID) ke Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
POJK No. 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. 2. Selain mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara *self assessment*, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan penilaian sendiri terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan. 3. Tingkat Kesehatan Bank dinilai berdasarkan 4 (empat) aspek/faktor yaitu: a. Profil Risiko: merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 jenis risiko b. *Good Corporate Governance:* merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG c. Rentabilitas: meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank d. Permodalan: meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan	Sesuai dengan POJK dimaksud, BNI harus melakukan self assessment terhadap tingkat kesehatan BNI sesuai dengan aspek/kriteria yang ditentukan. Self asseesment untuk posisi semester kedua (Desember 2016) harus disampaikan ke OJK paling lambat akhir Januari 2017.

Informasi Material Lainnya

Peraturan	Keterangan Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
POJK No. 29/POJK.04/2016 Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat: a. ikhtisar data keuangan penting; b. informasi saham (jika ada); c. laporan Direksi; d. laporan Dewan Komisaris; e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; f. analisis dan pembahasan manajemen; g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. 3. Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. (2) Laporan Tahunan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris. (3) Laporan Tahunan yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa Indonesia. 4. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.	Dengan adanya POJK tersebut, BNI melakukan beberapa penyesuian baik dari segi komposisi laporan dan timeline penyusunan Laporan Tahunan *(Annual Report).*
POJK No. 32/POJK.03/2016 Perubahan atas POJK No 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	1. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank; 2. Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Laporan Publikasi Bulanan; b. Laporan Publikasi Triwulanan; c. Laporan Publikasi Tahunan; dan d. Laporan Publikasi Lain. 3. Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit meliputi: a. informasi umum; b. laporan keuangan; c. informasi kinerja keuangan; d. pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan manajemen risiko; e. pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; dan f. informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Dengan adanya POJK di atas, BNI melakukan penambahan pengungkapan permodalan pada laporan publikasi tahunan sesuai dengan kerangka Basel III yang ditampilkan berdampingan pada website online BNI. Pengungkapan permodalan tersebut terdiri atas tiga format yaitu standar, rekonsiliasi, dan pengungkapan rincian fitur instrumen permodalan. Setiap komponen dalam pengungkapan permodalan. Hal ini untuk memberikan informasi lebih detail dan informatif atas akun-akun pada setiap komponen permodalan dalam rangka transparansi pelaporan keuangan perbankan.

Peraturan	Keterangan Peraturan	Pengaruh Terhadap BNI dan Entitas Anak
POJK No. 34/POJK.03/2016 Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM)	1. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional serta sejalan dengan perkembangan standar internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; 2. Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. *Capital Conservation Buffer;* b. *Countercyclical Buffer;* dan/atau c. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik. 3. Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur: a. *Capital Conservation Buffer* ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; b. *Countercyclical Buffer* ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; c. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR. 4. Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a. 5. Cadangan Tujuan tidak diperhitungkan kembali sebagai komponen modal pelengkap.	Sehubungan POJK dimaksud, BNI telah melakukan penyesuaian tambahan modal yang diatur. Selain itu BNI perlu mengeluarkan komponen Cadangan Tujuan dari perhitungan KPMM dan mereview perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dikarenakan perubahan tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PSAK Syariah 110 – Akuntansi Sukuk
Pada tanggal 1 Januari 2016, Grup (BNI dan anak-anak perusahaan) menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Grup dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan perubahan pada PSAK Syariah 110 – Akuntansi Sukuk mengenai penambahan kategori "Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain" dalam klasifikasi akuntansi investasi Sukuk yang disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal Sukuk diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk
- Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi Sukuk diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan

Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- ISAK 30: Pungutan

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta International Best Practices. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

ASSESSMENT MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Salah satu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP terdiri dari tiga (3) modul utama, yaitu:
- Modul *Self Assessment*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan sendiri (self assessment) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) secara independen dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. *Modul self assessment* wajib diisi oleh segenap unit setiap tiga bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap frekuensi dan dampak setiap *risk issue* di unitnya serta mencari penyebab risiko tersebut timbul.
- *Loss Event Database*, merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial yang meliputi *actual loss* dan near miss secara langsung. Setiap kali unit pemilik risiko (*risk owner*) mengalami kerugian risiko operasional, maka unit tersebut harus melakukan input dalam modul *Loss Event Database* tersebut. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau liabilitas hukum yang terjadi serta pengembalian kerugian (*recovery*). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil risiko operasional secara teratur. Data yang diperoleh dari *Loss Event Database* (LED) merupakan input data utama bila Bank akan mengaplikasikan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA) dalam pengukuran kecukupan modal minimum risiko operasional.

Key Risk Indicator, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/ dominan, yang berpotensi mengganggu pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja, sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi. Perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/threshold* yang ditetapkan sebelumnya (*early warning signal*) yang menuntut adanya tindak lanjut manajemen Unit untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain PERISKOP, BNI saat ini telah memiliki rekening Beban Risiko Operasional (BRO) serta *Recovery* BRO, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan oleh risiko operasional. Pembukuan pada rekening BRO juga akan berdampak kepada penilaian kinerja serta tergambar dalam Performance Measurement System (PMS) Unit yang bersangkutan. Setiap bulan dilakukan *monitoring* terhadap rekening BRO dan *Recovery* BRO ini guna mitigasi risiko operasional.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi disaster (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk

memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Dual Data Cente*r (DDC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center.* Secara rutin BNI melakukan pengujian sistem dan aplikasi pada divisi/unit kritikal setiap 3 (tiga) bulan sekali, melakukan site visit dan simulasi pada cabang dan wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

Kinerja Anak Perusahaan

Awal tahun 2016, mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam bentuk kerjasama perdagangan bebas di kawasan asia tenggara. MEA merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN yang dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Agar dapat bersaing secara kompetitif dalam MEA, maka merupakan suatu tantangan bagi BNI untuk terus mengembangkan cakupan bisnisnya. Sebagai salah satu bank utama di Indonesia, peran BNI di industri keuangan telah menempati posisi yang sangat strategis. Untuk itu, BNI telah mencanangkan BNI *Financial Services Group* guna meningkatkan sinergi antara BNI dengan perusahaan anak sehingga dapat memberikan layanan jasa keuangan secara menyeluruh dalam satu payung kepada nasabah. Perusahaan anak BNI didirikan agar dapat menyediakan layanan jasa keuangan "satu atap", dalam BNI *Financial Center* yang meliputi produk dan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal dan *remittance*. Aliansi strategis dan sinergi antar perusahaan anak maupun dengan BNI sebagai perusahaan induk dibangun dalam rangka meningkatkan layanan, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi seluruh *stakeholder* BNI.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri perbankan, BNI mengelola perusahaan anak dengan melakukan penyertaan modal pada perusahaan anak yang bergerak di bidang keuangan. Pada akhir tahun 2016, BNI tercatat memiliki penyertaan saham di 10 perusahaan anak. Kepemilikan mayoritas di beberapa perusahaan anak ditujukan agar dapat membangun aliansi strategis untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah BNI. Sedangkan kepemilikan minoritas dilaksanakan dengan tujuan mematuhi kebijakan/peraturan yang berlaku seperti ketentuan dari OJK dan BI, serta dalam rangka membangun kerja sama bisnis dengan mitra BNI.

Perusahaan anak di mana BNI berperan sebagai pemegang saham mayoritas adalah: PT Bank BNI Syariah (99,90%), PT BNI Life Insurance (60,00%), PT BNI Securities (75,00%), PT BNI Multifinance (99,99%) dan BNI Remittance Ltd (100%). Sedangkan kepemilikan saham minoritas antara lain pada PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia (8,00%), PT Pemeringkat Efek Indonesia (1,43%), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1,00%), PT Bank Mizuho Indonesia (1%), dan PT Sumitomo Mitsui Indonesia (0,52%).

BNI dan perusahaan anak BNI akan terus berkembang dengan strategi bisnis yang selaras dan meningkatkan sinergi bisnis untuk memberikan jasa keuangan yang menyeluruh yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian taget bisnis BNI *Group*. Untuk pengembangan bisnis perusahaan anak, salah satu strategi BNI adalah memperkuat permodalan perusahaan, sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing untuk menegambangkan bisnisnya. Untuk tahun 2016, BNI telah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT BNI Multifinance sebesar Rp203 miliar, untuk mendukung pengembangan bisnis pembiayaan yang masih potensial. Pada tahun 2016, semua perusahaan anak BNI telah membukukan laba, dengan pertumbuhan sebesar 12,75% dibanding dengan tahun 2015, yaitu dari Rp415,18 miliar menjadi Rp468,10 miliar dan memberikan kontribusi sebesar 4,34% terhadap total laba BNI.

Pertumbuhan Total Laba Perusahaan Anak

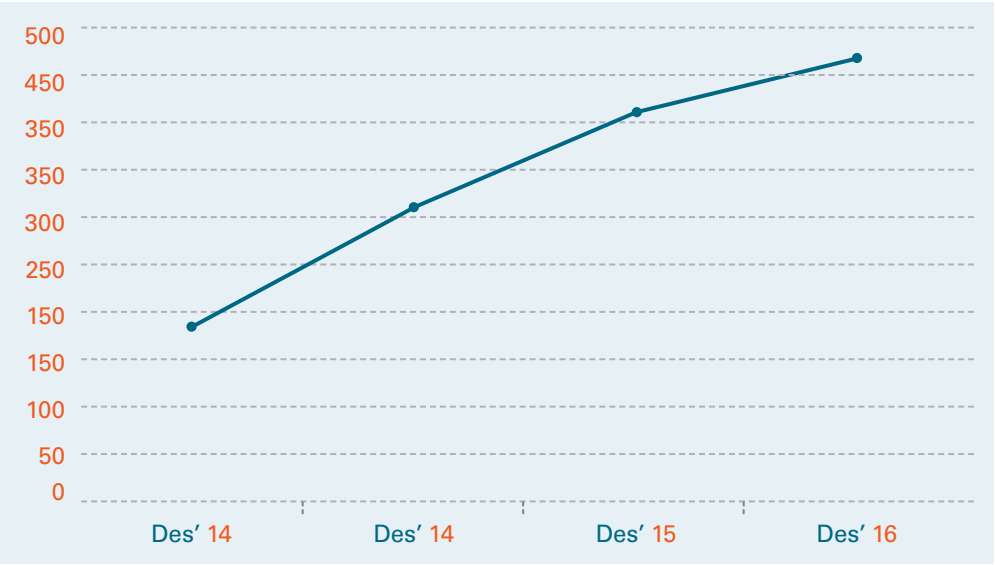

Sinergi dalam BNI *Financial Services Group* akan tercipta jika setiap perusahaan anak dikelola dengan baik dan terdapat kerja sama antara BNI dengan perusahaan anak maupun antar perusahaan anak itu sendiri. Keberhasilan kinerja masing-masing perusahaan anak tercermin dari peningkatan kinerja keuangan, pertumbuhan bisnis, kepuasan nasabah, dan posisinya jika dibandingkan perusahaan *peers group* dalam industri yang sama. Dengan demikian, kontribusi dari setiap perusahaan anak akan terus meningkat secara signifikan dan memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh baik kebutuhan transaksi, perlindungan, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan dalam setiap siklus hidupnya. Sinergi yang solid pada BNI *Financial Group* sangat dibutuhkan agar setiap komponen di dalamnya dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Untuk itu, telah disusun *Roadmap* BNI *Financial Services Group* yang dimasukkan dalam *Corporate Plan* 2014-2018, yaitu:

2018 — Melanjutkan visi sektor pemain *Total Finance Solution*

2017 — Menjadi pemain utama dalam penyediaan *total financial solution*

2016 — Memperkuat sinergi bisnis dengan menawarkan *total financial solution*, baik bank maupun *non-bank financing*

2015 — Memperkuat bisnis perusahaan anak dengan *leverage customer base*

2014 — Memperkuat landasan perusahaan anak dalam rangka pengembangan bisnis BNI *Financial Services Group*

PT BANK BNI SYARIAH (BNI SYARIAH)

SEJARAH SINGKAT

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 9 September 2015. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off)* yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

BNI Syariah merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha. Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010. Maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Syariah berdasarkan akta risalah RUPS No.28 tanggal 16 November 2016 adalah sebagai ebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Fero Poerbonegoro
Komisaris Independen	: Rizqullah
Komisaris	: Max Niode*)
Komisaris Independen	: Muhammad Syakir Sula*)

*) masih menjalani fit and proper test

Direksi

Direktur Utama	: Imam Teguh Saptono
Direktur Operasional	: Junaidi Hisom
Direktur Bisnis Konsumer	: Kukuh Rahardjo

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: K.H Ma'ruf Amin
Anggota	: Hasanudin

KINERJA BNI SYARIAH TAHUN 2016

Di tahun 2016, BNI Syariah terus berhasil membukukan kinerja yang positif seperti ditunjukkan pada pencapaian laba bersih setelah pajak tercatat tumbuh sebesar 21,38% dari Rp229 miliar pada Desember 2015 menjadi sebesar Rp277 miliar pada Desember 2016, mencapai 95,61% dari target akhir tahun 2016 sebesar Rp290 miliar. Selain itu, jumlah aset BNI Syariah mencapai Rp 28.314 miliar, melebihi target akhir tahun 2016 sebesar Rp26.252 miliar.

Pencapaian aset ini didorong oleh pencapaian pembiayaan dan DPK, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,37% dan 22,56%. Posisi pembiayaan pada Desember 2016 sebesar Rp20.494 miliar mencapai 99,17% dari target akhir tahun 2016, dengan pertumbuhan terbesar pada pembiayaan komersial sebesar 26,46%. Posisi DPK pada Desember 2016 sebesar Rp24.233 miliar atau 109,59% dari target akhir tahun 2016.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Syariah selama tahun 2016 diuraikan dalam tabel berikut.

Kinerja Keuangan BNI Syariah

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
POS-POS NERACA				
AKTIVA	28.314.175	23.017.668	5.296.507	23,01%
Investasi	6.085.063	4.972.580	1.112.483	22,37%
Penempatan pada BI	2.459.796	2.583.736	(123.940)	(4,80%)
Penempatan pada bank lain	225.820	89.743	136.077	151,63%

Kinerja Anak Perusahaan

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
Surat Berharga	3.399.447	2.299.101	1.100.346	47,86%
Pembiayaan	20.493.610	17.763.242	2.730.368	15,37%
Piutang *Murabahah/ Salam/Istishna/ Qardh*	16.160.375	14.066.813	2.093.562	14,88%
Pembiayaan	4.211.156	3.448.754	762.402	22,11%
Ijarah	122.079	247.675	(125.596)	(50,71%)
Dana Pihak Ketiga	24.233.009	19.772.239	4.460.770	22,56%
Dana Simpanan Wadiah	4.079.084	2.780.736	1.298.348	46,69%
Dana Investasi Tidak Terikat (*Mudharabah Muthlaqah*)	20.153.925	17.491.504	2.662.421	15,22%
Ekuitas	2.486.565	2.215.658	270.907	12,23%
POS-POS LABA (RUGI)				
Pendapatan Operasional	2.935.118	2.548.057	387.061	15,19%
Pendapatan dari penyaluran dana	2.801.355	2.429.243	372.112	15,32%
Pendapatan Operasional Lainnya	133.763	118.814	14.949	12,58%
Bagi hasil investor Dana Investasi tidak Terikat	905.032	846.069	58.963	6,97%
Pendapatan oper. setelah distribusi bagi hasil	2.030.086	1.701.988	328.098	19,28%
Beban (Pend.) penyisihan penghapusan aktiva	349.985	221.253	128.732	58,18%
Beb. (Pend.) estimasi krg. Komit. dan kontinjen	917	4.184	(3.267)	-78.08%
Beban Operasional Lainnya	1.314.174	1.193.136	121.038	10,53%
Laba (Rugi) Operasional	365.011	266.841	365.011	26.90%
Laba (Rugi) non operasional	8.186	20.169	(11.983)	(59,41%)
Laba Rugi Sebelum Pajak	373.197	307.768	65.429	21,26%
Pajak	95.822	79.243	16.579	20,92%
Laba (Rugi) Seteleh Pajak	277.375	228.525	48.850	21,38%

ROE dan ROA BNI Syariah tahun 2016 sebesar 11,72% dan 1,44 % masing-masing meningkat 0,1% dan 1,41% dari tahun 2015 sejalan dengan peningkatan laba. BOPO sebesar 87,67 % menurun sebesar 1,96% dari tahun 2015 karena adanya efisiensi sehingga pertumbuhan biaya bisa ditekan menjadi lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan. Terjadi peningkatan NPF sebesar 0,41% dari 2,53% pada tahun 2015 menjadi 2,94% pada tahun 2016 disebabkan oleh penurunan kualitas pembiayaan terutama pada segmen komersial.

Rasio Keuangan BNI Syariah

RASIO	2016	2015
NPF	2,94%	2,53%
ROE	11,72%	10,31%
ROA	1,44%	1,34%
BOPO	87,67%	89,63%
CAR	14,92%	15,48%

Di tahun 2016, BNI Syariah juga tetap berkomitmen untuk memperluas jaringan layanannya agar dapat semakin mudah menjangkau nasabahnya. Hingga bulan Desember 2016, jaringan layanan BNI Syariah meliputi sebanyak 323 outlet, yang terdiri dari 49 Kantor Cabang Reguler, 19 Kantor Cabang Mikro, 101 Kantor Cabang Pembantu Reguler, 70 Kantor Cabang Pembantu Mikro, 17 Kantor Fungsional, 17 Kantor Kas, 23 Layanan Gerak dan 27 Lokasi Payment Point.

Selama tahun 2016, BNI Syariah telah meraih lebih dari 40 penghargaan dari berbagai institusi diantaranya:

- *The Best Syariah Bank* 5 tahun berturut-turut kinerja terbaik kategori asset 10-25 triliun dari majalah Infobank
- *The Most Improved Bank* kinerja tahun 2016 dalam Global Islamic Finance Award (GIFA)
- *The Best Syariah Bank* kategori kinerja tahun 2016 dari majalah Investor
- *The Best Syariah* kategori modal inti dan kinerja keuangan tahun 2015 dari majalah Infobank
- *The Best Syariah Bank* kategori kinerja terbaik tahun 2015 dari majalah Investor
- *The Best Most Efficient Sharia Bank* 2016 dari Bisnis Indonesia
- *The Biggest Contributor Financing Islamic Full Fledge Bank* dari Karim Consulting
- Sustainability Reporting Awards 2016 kategori *commendation for first year report* dari National Centre for Sustainability Reporting
- *The Best Social Media* dari majalah Marketing
- *The Best Website Syariah Bank* dari majalah Marketing
- *The Best Digital Brand* Institusi Keuangan Kategori KPR Syariah dari majalah Infobank
- *The Most Expansive Financing Islamic Full Fledge Bank* dari Karim Consulting
- *The Best Bank in Retail Banking Services* dari majalah Tempo

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, BNI Syariah telah menetapkan strategi usaha 2017 sebagai berikut:

- Strategi pemasaran secara komprehensif yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis.
- Strategi penunjang yang terdiri dari strategi teknologi informasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Strategi "Branding Hasanah Lifestyle Bank" sebagai *vehicle* untuk menajamkan *positioning* BNI Syariah sebagai bank *Ritel-Komersil* yang memenuhi kebutuhan *financial* segmen pasar muslim di seluruh kelompok usaha *(life stage)* dengan keunggulan *value dan benefit* yang menyasar pada bisnis dan produk halal seperti *food, fashion, education dan tourism.*

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan infrastruktur yang dimiliki BNI Syariah sebelumnya serta realisasi kinerja periode sebelumnya, maka untuk tahun 2017 perusahaan menetapkan target sebagai berikut.

- Penyaluran pembiayaan kepada debitur selektif dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan pertumbuhan pada kisaran 18,0%.
- Menjaga kualitas pembiayaan agar tetap stabil diangka maksimal 3,38%.
- Menjaga agar rasio-rasio penting tetap terkendali.
- Meningkatkan pendapatan berbasis *fee* dan menjaga efisiensi operasional.
- Pertumbuhan laba bersih perusahaan pada 2017 pada kisaran 22,6%.

PT BNI LIFE INSURANCE (BNI LIFE)

SEJARAH SINGKAT

BNI Life pada awalnya didirikan dengan nama "PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya" berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 28 November 1996 di Jakarta. Pada tanggal 26 November 2004, Perseroan telah mengubah namanya menjadi PT BNI Life Insurance, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-31600 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Desember 2004. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997. Perseroan juga

telah memperoleh izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-186/KM.6/2004 tanggal 19 Mei 2004. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1997. Perseroan berdomisili di Jakarta dan kantor pusatnya berlokasi di BNI Life Tower, Lantai 21, The Landmark Center, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910.

BNI Life adalah perusahaan anak BNI di bidang asuransi, yang menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun dan syariah.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Life berdasarkan akta risalah RUPS No. 19 tanggal 13 Oktober 2015 dan No.38 Tanggal 30 Maret 2016 adalah sebagai ebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Krisna Wijaya
Komisaris Independen : Mauli Adiwarman Idris
Komisaris : Shinzo Kono
KomisarisIndependen : Wiriadi Saputra
Komisaris : Darwin Suzandi

Direksi

Direktur Utama : Budi. Tampubolon
Wakil Direktur Utama : Geger N. Maulana
Direktur : Kazuhiko Arai
Direktur : Hirokazu Todaka
Direktur : Intan Sari Abdams Katoppo

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin
Anggota : Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI
Anggota Utang : Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, MA

KINERJA BNI LIFE TAHUN 2016

Di tahun 2016, BNI Life Insurance berhasil membukukan kinerja yang positif, seperti ditunjukkan pada pencapaian laba bersih setelah pajak tercatat tumbuh sebesar 6,38% dari Rp160 miliar pada Desember 2015 menjadi sebesar Rp170 miliar pada Desember 2016, mencapai 48,06% dari target akhir tahun 2016 sebesar Rp354 miliar. Selain itu, jumlah aset BNI Life mencapai Rp13.062 miliar, melebihi target akhir tahun 2016 yang telah ditetapkan sebesar Rp12.747 miliar. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan Pendapatan premi bruto tahun 2016 yang tumbuh 46% menjadi sebesar Rp4.746 miliar dari Rp3.244 miliar tahun 2015.

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Life selama tahun 2016 diuraikan dalam tabel berikut.

Kinerja Keuangan PT BNI Life Insurance

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
POS-POS NERACA				
Aktiva	13.062.865	9.915.762	3.147.103	31,74%
Aktiva Produktif / Investasi	11.437.074	8.445.857	2.991.217	35,42%
Kewajiban	8.164.519	5.092.671	3.071.848	60,32%
Ekuitas	4.898.346	4.823.091	75.255	1,56%
POS-POS LABA (RUGI)				
Total Pendapatan	5.701.772	3.644.315	2.057.457	56,46%

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
Pendapatan Premi Netto	4.635.232	3.250.784	1.384.448	42,59%
Pendapatan Hasil Investasi	961.591	315.245	646.346	205,03%
Pendapatan Lain-Lain	104.949	78.286	26.663	34,06%
Total Biaya	5.485.480	3.489.840	1.995.640	57,18%
Biaya Asuransi / Klaim	4.255.262	2.501.538	1.753.724	70,11%
Biaya Akuisisi	654.810	455.891	198.919	43,63%
Biaya Usaha	573.214	506.273	66.941	13,22%
Non Operasioanl expenses (income)	2.194	26.138	(23.944)	(91,61%)
LABA SEBELUM PAJAK	216.292	154.475	61.817	40,02%
PAJAK	(46.169)	5.565	(51.734)	(929,63%)
LABA BERSIH	170.123	160.040	10.083	6,30%

ROE dan ROA BNI Life tahun 2016 sebesar 3,49% dan 1.87 % masing-masing meningkat 0,09% dan 0,17% sejalan dengan peningkatan laba. BOPO sebesar 96,21% meningkat sebesar 0,45% dari 95,76 di tahun 2015 karena karateristik produk yang dominan pada *single premium* yang sedang dalam fase pertumbuhan sehingga pada saat penjualan premi, dibarengi pembentukan pencadangan sekaligus sehingga meningkatkan biaya premi. RBC BNI Life sebesar 1.117,40% menurun sebesar 600,9% dari tahun 2015 sebesar 1.718,3% sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahan.

Rasio Keuangan BNI Life

RASIO	2016	2015
ROE	3,49%	3,40%
ROA	1,87%	1,70%
BOPO	96,21%	95,76%
RBC	1117,40%	1718,30%

Ditahun 2016, fokus BNI Life tetap diarahkan kepada perolehan pendapatan premi dari jalur distribusi *Bancassurance* terutama pada unit *In Branch* dan jalur distribusi *Employee Benefits*, peningkatan pelayanan kepada nasabah, serta peluncuran produk-produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menyikapi perkembangan yang dinamis di industri asuransi dan mengantisipasi pertumbuhan bisnis BNI Life di tahun 2016 dan tahun-tahun yang akan datang, maka pada tahun 2016 dilakukan perubahan struktur organisasi dengan mengangkat direktur baru yang khusus menangani jalur distribusi *Employee Benefits, Agency* dan Syariah, *Chief Bancassurance Officer* dan *Chief Affinity Officer*.

Agar dapat menawarkan lebih banyak pilihan bagi para pelanggan, sepanjang tahun 2016 BNI Life Insurance telah meluncurkan berbagai jenis produk baru, diantaranya: Maksima Promo 13, Maksima Promo 14, Blife Optima Saving Relaunched, BNI Life Wellness, BNI Life Active, BNI Life Active +, BNI Life Safe Medical Plan +, BNI Life Strength +, AsuransiJ iwa Kredit BNI Life Proteksi KreditProduktif, BNI Life Spectra Pro dan BNI Life Spectra Double Power.

Untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan memenangkan peluang bisnis kedepan, BNI Life telah melakukan kerjasama strategis dengan Sumitomo Life Insurance pada tahun 2014. Sumitomo Life Insurance melakukan penyertaan modal sebesar Rp 4,2 triliun dengan kepemilikan saham sebesar 40% pada BNI Life dan telah direalisasikan pada September 2014 sehingga kepemilikan BNI selaku pemegang saham mayoritas terdilusi menjadi 60%.

Sebagai bukti keseriusan Sumitomo Life Insurance dalam pengembangan bisnis BNI Life, Sumitomo Life Insurance telah menempatkan perwakilan di manajemen BNI Life baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun tenaga ahli professional. Selain itu, upaya meningkatkan sinergi dengan BNI sebagai perusahaan induk juga telah dilaksanakan melalui pembentukan kelompok kerja untuk meningkat kan kerjasama di bidang strategi produk dan penjualan.

Selain itu, pada tahun 2016 BNI Life kembali meraih berbagai penghargaan, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

- *Contact Center Indonesia 2016, The Best Employee Engagement from Indonesia Contact Center Association*
- *Best Financial Performance Life Insurance Company 2016, Category company Asset More Than Rp 6-10 Trillion, 3rd Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2016*, Warta Ekonomi
- Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, Edukasi Asuransi Mikro Kepada Peserta Terbanyak
- AsuransiJiwaTerbaik 2016, *The Best Life Insurance With Over Than Rp 5-15 Trillion of Asset,* Investor Magazine
- *Best Life Insurance Award 2016, The Best Life Insurance With Over Than Rp 2,5 Trillion of Equity,* Media Asuransi
- *The Best Risk Management, Islamic Life Insurance Sharia Unit Islamic Finance Award 2016*
- *The Most Expansive Insurance, Islamic Life Insurance Sharia Unit Islamic Finance Award 2016*
- BNI Life mendapatkan 2 penghargaan *Contact Center Service Excellence Award 2016 dari Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty* (Carre-CCSL) untuk kategori:
  - *Exceptional for email customer service*: Care@bni-life.co.id
  - *Excellent for contact center*: 1-500-045
- *Excellent Performance*, For Mixed Unit Link Blife Syariah Berimbang Infobank Unit Link Awards 2016
- *Excellent Performance*, For Balanced Unit Link Blife Stabil Syariah Infobank Unit Link Awards 2016
- Pada 26 Agustus 2016, BNI Life mendapatkan 5 medali dari Indonesia Contact Center Association (ICCA) 2016: 1 medali platinum, 1 medali emas, 1 medali perak dan 2 medali perunggu.

Di samping itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah, maka di tahun 2016 BNI Life memberikan fitur baru sebagai berikut.

- *Same day claim services*
- *VIP Medical Visit*
- *Mobile Application*
- *E-Movement*
- *One Day Service for Withdrawal Transaction with Max Amount of IDR 100 Mio*
- *Claim Submission by Email*
- *Doctors Booking*

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Untuk rencana bisnis 2017 BNI Life akan tetap fokus pada perolehan premi dari jalur distribusi Bancassurance dan pengembangan lini usaha asuransi kumpulan melalui jalur distribusi Employee Benefits. Tahun 2017, BNI Life menargetkan perolehan premi bruto sebesar Rp7,35 triliun dan laba setelah pajak sebesar Rp427,7 miliar.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa keuangan yang sangat dinamis, maka BNI Life berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Disamping itu, BNI Life terus melakukan peninjauan atas bisnis proses yang ada, agar tetap berada dalam level yang kompetitif dengan lingkungan yang terus berubah.

Di sisi lain, pengembangan teknologi informasi perusahaan terus dilakukan guna mendukung perkembangan dan ekspansi bisnis di tahun 2017.

PT BNI SECURITIES (BNI SECURITIES)

SEJARAH SINGKAT

BNI Securities (Grup) didirikan berdasarkan akta notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan akta No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Sesuai Anggaran Dasar Grup, ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi perdagangan efek, termasuk didalamnya bertindak sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku. Grup memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi saham dan manajer investasi dari Ketua BAPEPAM-LK masing-masing melalui surat keputusan No. KEP-19/PM/1995, No. KEP-020/PM/1995 tanggal 8 Agustus 1995 dan No. KEP-07/PM-MI/1995 tanggal 23 Oktober 1995, dan dialihkan kepada PT BNI Asset Management berdasarkan surat keputusan No. Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009. Dalam rangka penerapan fungsi independensi manajer investasi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.11 yang merupakan lampiran dalam surat keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi, Grup telah selesai melaksanakan proses pemisahan/pemekaran usaha (*spin-off*) dari operasi bisnis divisi manajer investasi dengan membentuk sebuah Grup baru bernama PT BNI Asset Management. Proses pendiriannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNIS tanggal 1 Maret 2011. Akta terakhir yang berhubungan dengan pengesahan susunan Komisaris dan Direksi Grup adalah: - Akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 1, tanggal 1 Oktober 2015 yang telah diterima dan dinyatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-0966773 tanggal 22 September 2015; - Akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 17, tanggal 9 Desember 2013. Grup berdomisili di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. BNI Securities juga menjalin aliansi strategis dengan SBI Securities Co. Ltd., perusahaan sekuritas dari Jepang.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Securities berdasarkan akta risalah RUPS No. 1 tanggal 01 Oktober 2016 dan No.21 tanggal 06 Desember 2016 adalah sebagai sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	: Fabianus Sudjatmoko
Komisaris	: Ryosuke Hayashi
Komisaris	: Suhendry Hafni

Direksi

Presiden Direktur	: Adiyasa Suhadibroto
Direktur	: Reza Benito Zahar
Direktur	: Aswardin
Direktur	: Kenichiro Matsuhisa

KINERJA BNI SECURITIES TAHUN 2016

Di akhir tahun 2016, BNI Securities berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp12 miliar (*unaudited*) menurun sebesar 68% dari Rp39 miliar di tahun 2015, mencapai 25% dari target sebesar Rp49 miliar, namun pendapatan operasional tetap tumbuh sebesar 7% menjadi Rp211 miliar dari tahun 2015 sebesar Rp196 miliar. Aktivitas *brokerage* tetap menjadi penyumbang pendapatan utama, dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp107 miliar atau 52% dari total pendapatan operasional BNI Securities, sedangkan sisanya sebesar Rp83 miliar berasal dari *investment management fee* dan Rp34 miliar dari Jasa Penjamin Emisi.

Kinerja Anak Perusahaan

Total nilai transaksi *equity brokerage* BNI Securities tahun 2016 sebesar Rp55 triliun, meningkat sebesar 31% dari tahun 2015. Kontribusi nilai transaksi *Online* mencapai sebesar Rp24 triliun sedangkan total nilai transaksi Reguler sebesar Rp31 triliun.

Jumlah nasabah aktif BNI Securities tercatat sebanyak 54.061 nasabah meningkat 93% dari tahun 2015 sebesar 27.972 nasabah.

Pada tahun 2016, BNI Securities meraih penghargaan "*Best Midcap Equity Deal of the Year 2016* dari Alpha Southeast Asia".

Adapun rincian terkait kinerja keuangan BNI Securities diuraikan dalam tabel berikut.

Kinerja Keuangan BNI Securities

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
POS-POS NERACA				
Aktiva	987.266	765.439	221.827	28,98%
Kewajiban	545.728	333.679	212.049	63,55%
Equity	441.538	431.760	9.778	2,26%
POS - POS LABA / RUGI				
Pendapatan	211.350	197.841	13.509	6,83%
Brokerage commissions	83.052	59.243	23.809	40,19%
Investment management fees	82.719	36.795	45.924	124,81%
Fees from Inves. Bank. Act. & B C From Fix In Ac	44.324	31.050	13.274	42,75%
Increase/(decrease) on net asset value of mutual funds	3.394	3.397	-3	-0,09%
Interest Revenue from Fund Separation & Bonddan Dividen	6.286	4.036	2.250	55,75%
Gain (Loss) on trading of marketable securities -net	(34.598)	44.272	-78.870	-178,15%
Margin and Overdue Revenue and other	26.174	19.049	7.125	37,40%
Biaya Usaha	181.618	158.736	22.882	14,42%
Pendapatan Lain - Lain	9.141	13.734	-4.593	-33,44%
Biaya Bunga dan Keuangan Lainnya	(20.347)	(11.719)	-8.628	73,62%
Total Pendapatan	220.492	211.576	8.916	4,21%
Total Biaya	201.965	170.456	31.509	18,49%
Laba Rugi Sebelum Pajak	18.527	41.120	-22.593	-54,94%
Pajak	(6.066)	(2.236)	-3.830	171,29%
Laba Rugi Setelah Pajak	12.461	38.884	-26.423	-67,95%

ROE dan ROA BNI Securities tahun 2016 sebesar 3,49% dan 1,87 % masing-masing menurun sejalan dengan penurunan laba. BOPO sebesar 85,93% meningkat sebesar 5,7% dari di tahun 2015.

Rasio Keuangan BNI Securities

RASIO	2016	2015
ROA	1,63%	5,37%
ROE	2,74%	9,01%
BOPO	85,93%	80,23%

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Untuk tahun 2017, BNI Securities akan melanjutkan strateginya guna meraih kinerja yang lebih baik dengan strategi sebagai berikut.

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan BNI *Group*.
- Mempercepat pertumbuhan bisnis *Investment Banking* melalui pemanfaatan jaringan bisnis BNI *Group* dalam dan luar negeri.
- Fokus pada nasabah institusi untuk pengembangan bisnis *equity.*
- Memperkuat tim riset *equity* dan obligasi untuk mendukung kegiatan pemasaran ke nasabah institusi.
- Marketing bersama ke nasabah bisnis *banking* BNI.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian khususnya perkembangan aktivitas Bursa Efek Indonesia (BEI) maka untuk tahun 2017 BNI Securities menargetkan laba 2017 di atas Rp62 miliar.

PT BNI MULTIFINANCE (BNI MULTIFINANCE)

SEJARAH SINGKAT

BNI Multifinance didirikan tanggal 8 April 1983 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 21. Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT BNI Multifinance yang keputusannya diaktakan dalam akta No. 103 tanggal 27 Juni 1994. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan dalam bidang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat terletak di Gedung BNI Life Insurance Lantai 5, Jalan Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta.

BNI Multifinance bergerak di bidang pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kepemilikan kendaraan, serta di bidang sewa gunau saha (*leasing*) untuk penyediaan barang-barang modal. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, BNI Multifinance mengoperasikan 7 kantor cabang di kota Bogor, Medan, Lampung, Semarang, Surakarta,Yogyakarta, dan Surabaya

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Multifinance berdasarkan akta risalah RUPS No.111 tanggal 26 September 2016 adalah sebagai ebagai berikut.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: RL Dwi Mutiari
Komisaris	: M. Gunawan Putra

Direksi

Presiden Direktur	: Suwaluyo
Direktur	: Rana Ranadi

KINERJA BNI MULTIFINANCE TAHUN 2016

BNI Multifinance menutup tahun 2016 dengan membukukan kinerja yang positif seperti ditunjukkan pada pencapaian laba bersih setelah pajak tercatat tumbuh sebesar 166,4% dari rugi Rp11 miliar pada Desember 2015 menjadi laba sebesar Rpmiliar pada Desember 2016, mencapai 59,3% dari target akhir tahun 2016 sebesar Rp14 miliar. Selain itu, jumlah aset BNI Multifinance mencapai Rp516,79 miliar, melebihi target akhir tahun 2016 yang telah ditetapkan sebesar Rp501 miliar atau tumbuh 189,56%. Pencapaian asset ini didorong oleh pencapaian pembiayaan yang tumbuh sebesar 203,5%. Posisi pembiayaan pada Desember 2016 sebesar Rp389 miliar mencapai 91,87% dari target akhir tahun 2016, dengan pertumbuhan terbesar pada pembiayaan anjak piutang sebesar 1.579,11%. Pertumbuhan pembiayaan ini didukung oleh penambahan modal disetor oleh BNI sebesar Rp203 miliar yang direalisasikan pada Juni 2016, sebagai pembuktian BNI untuk tumbuh bersama perusahaan anak BNI.

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, sepanjang tahun 2016 BNI Multifinance fokus pada pembiayaan komersial (kendaraan niaga, alat berat, dll) pada nasabah *referral* BNI, nasabah r*epeat order* BNI Multifinance dan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda empat melalui *Car Ownership*

Program (COP) bagi segmen pejabat pemerintah, karyawan korporasi serta karyawan Grup Usaha BNI, serta sewa operasi kendaraan roda empat kepada BNI dan Group. Perusahaan juga mulai melakukan pembiayaan anjak piutang dengan fokus pada selektif *low risk customer* untuk menjaga portofolio yang sehat.

Adapun rincian kinerja keuangan BNI Multifinance diuraikan sebagai berikut.

Kinerja Keuangan BNI Multifinance

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
POS-POS NERACA				
Aktiva	516.791	178.476	338.315	189,56%
Deposito	46.000	-	46.000	N/A
Pembiayaan	388.544	128.126	260.418	203,25%
Sewa Guna Usaha	191.803	60.076	131.727	219,27%
Pemby. Konsumen	93.701	59.811	33.890	56,66%
Anjak Piutang	103.040	6.137	96.903	1579,00%
Kewajiban	240.209	112.720	127.489	113,10%
Ekuitas	276.582	65.756	210.826	320,62%
Modal Disetor	299.656	96.656	203.000	210,02%
POS-POS LABA (RUGI)				
Pendapatan Operasional	54.216	25.041	29.175	116,51%
Pend. Sewa Guna Usaha	33.752	18.464	15.288	82,80%
Pend. Pemb.Konsumen	12.566	6.417	6.149	95,82%
Pendapatan Anjak Piutang	7.898	160	7.738	4836,25%
Pend. Operasional lainnya	1.754	2.794	(1.040)	(37,22%)
Total Pendapatan	55.970	27.836	28.134	101,07%
Total Biaya	44.800	41.540	3.260	7,85%
Pendapatan (beban) lain	595	-	595	N/A
Laba sebelum pajak	11.765	(13.704)	25.469	(185,85%)
Pajak	-3.619	1.437	(5.056)	(351,84%)
Laba Bersih Setelah Pajak	8.146	(12.267)	20.413	(166,41%)

ROE dan ROA BNI Multifinance tahun 2016 sebesar 4,35% dan 3,68% dari sebelumnya yang masing-masing masih minus 18,66% dan minus 7,68% dari tahun 2015 sejalan dengan berhasilnya perusahaan membukukan laba dari rugi pada tahun-tahun sebelumnya. BOPO sebesar 82,63 % menurun sebesar 83,25% dari 165,88% di tahun 2015 sejalan dengan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar dari pertumbuhan biaya karena dukungan pertumbuhan bisnis pembiayaan. Terjadi penurunan NPF sebesar 1,86% dari 2,14% pada tahun 2015 menjadi 0,28% pada tahun 2016 disebabkan adanya perbaikan kualitas dan pertumbuhan pembiayaan.

Rasio Keuangan BNI Multifinance

RASIO	2016	2015
NPL	0,28%	2,14%
ROE	4,35%	(18,66%)
ROA	3,68%	(7,68%)
BOPO (Biaya Ops / Pend Ops)	82,63%	165,88%
DER (Debt Equity Ratio) (kali)	0,9	1,7

RENCANA KERJA 2017

Guna meminimalisasi risiko di tahun 2017, fokus bisnis BNI Multifinance masih tetap seperti tahun sebelumnya yaitu:

- Fokus customer pada selektif *low risk customer*.
- Fokus pada bisnis pembiayaan komersial (kendaraan niaga, alat berat, dll) pada nasabah *referral* BNI dan nasabah *repeat order* BNI Multifinance.
- Fokus pada sektor unggulan seperti industry manufaktur dan penunjang infrastruktur.
- Pembiayaan konsumen tetap berjalan dengan target market COP BNI dan COP Non BNI (BUMN dan perusahaan anak) serta produk multiguna untuk pegawai BNI Group.
- Meningkatkan pendapatan berbasis *fee*.

Proyeksi BNI Multifinance untuk pencapaian total aset di tahun 2017 adalah sebesar Rp1,37 triliun, meningkat sebesar 165% dibandingkan total aset di tahun 2016 sebesar Rp517 miliar, dengan *volume* bisnis (pembiayaan baru/*new booking*) sebesar Rp1,33 triliun atau meningkat sebesar 196% dibanding volume bisnis tahun 2016 sebesar Rp452 miliar dan membukukan keuntungan sebesar Rp26,5 miliar di tahun 2017.

BNI REMITTANCE LIMITED (BNI REMITTANCE)

SEJARAH SINGKAT

BNI Remittance Limited (BNI REMITTANCE) adalah anak perusahaan BNI yang didirikan oleh BNI Hong Kong pada tahun 1996 dengan nama "*High Motivation Company*", kemudian pada tahun 1997 perusahaan ini berubah nama menjadi BNI Nakertrans Ltd.

Untuk lebih mengoptimalkan aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan koridor aturan otoritas setempat, melalui sebuah kajian bisnis yang komprehensif diputuskan untuk memisahkan manajemen BNI Nakertrans Ltd dari BNI Hong Kong sekaligus merubah nama perusahaan menjadi BNI Remittance Ltd pada tahun 2009.

Saat ini BNI REMITTANCE terdaftar sebagai *Money Service Operator* dengan nomor register 12-08-00768 dan tunduk kepada Hong Kong *Custom and Excise Department*.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI Multifinance berdasarkan akta risalah RUPS No. adalah sebagai berikut.

Direksi

Direktur : Eko Kristianto

KINERJA BNI REMITTANCE TAHUN 2016

Di tahun 2016, BNI Remittance berhasil membukukan kinerja yang positif dengan pencapaian laba sebesar dari Rp 206 juta pada Desember 2016 turun sebesar 8,84% dari laba 2015 sebesar Rp206 juta. Jumlah aset BNI Remittance pada tahun 2016 mencapai Rp7,13 miliar meningkat sebesar 31,27% dari tahun 2015 sebesar Rp5,43 miliar.

Tahun 2016 BNI Remittance mengelola outlet yang tersebar di tiga area Hong Kong, yaitu Kantor Utama Keswick di Hong Kong Island, Kantor Cabang Tsuen Wan dan Kantor Cabang Yuen Long di New Territories dan Kantor Cabang Hung Hom di Kowloon. Keberadaan *outlet* BNI Remittance tersebut difokuskan untuk melayani masyarakat Indonesia,

khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Hong Kong. Dari total 155 ribu PMI, melalui kerjasama dengan perusahaan induk maupun sesama anak perusahaan, BNI Remittance telah membantu 20% diantaranya atau sekitar 30 ribu PMI untuk membuka rekening BNI Taplus maupun BNI iB Hasanah.

Dengan beroperasinya 4 unit mesin ATM BNI di Hong Kong maka nasabah BNI tersebut dapat lebih leluasa melakukan transaksi keuangan melalui fitur layanan yang sama persis dengan mesin ATM di Indonesia antara lain penarikan tunai, cek saldo, transfer antar rekening BNI dan antar bank lain, pembelian pulsa/ tiket dan penbayaran tagihan.

BNI Remittance mengelola transaksi kiriman uang sebagai aktivitas utama. Selama tahun 2016 transaksi tercatat sebanyak 142,5 ribu slip atau meningkat sebesar 92% dibanding tahun sebelumnya. Transaksi secara konvensional dilakukan melalui *Teller* yang ada di counter sebanyak 69,2 ribu slip (33,6% YoY), sementara transaksi secara elektronik dilakukan melalui ATM BNI sebanyak 73,2 ribu slip (227% YoY).

Untuk meningkatkan pelayanan transaksi kiriman uang melalui Teller, BNI Remittance telah menginisiasi *paperless application remittance form*. Nasabah tinggal menunjukkan Hong Kong ID card dan data historical transaksi dapat ditarik secara online antar cabang,sehingga kedepannya waktu antrian rata-rata setiap nasabah menjadi lebih singkat. *Improvement* ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan berdampak positif terhadap pertumbuhan transaksi.

Selain transaksi *remittance* tersebut diatas, melalui kerjasama yang dijalin antara KJRI Hong Kong dan BNI KCLN Hong Kong, BNI Remittance ditunjuk sebagai outlet pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari visa dan paspor. Selama tahun 2016 tercatat transaksi pembayaran sebanyak 68,5 ribu slip atau meningkat 44,6% dari tahun sebelumnya.

Adapun Rrincian kinerja keuangan BNI Remittance diuraikan sebagai berikut.

Kinerja Keuangan BNI Remittance

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
POS-POS NERACA				
Total Aktiva	7.130	5.431	1.699	31,28%
Fixed Asset	1.242	818	424	51,83%
Current Asset	1.973	1.171	802	68,49%
Other Asset	3.914	3.443	471	13,68%
Total Kewajiban	1.813	184	1.629	885,33%
Current Liabilities	1.813	184	1.629	885,33%
Other Liabilities	-	-	-	-
Total Ekuitas	5.316	5.248	68	1,30%
POS – POS LABA RUGI				
Pendapatan	9.070	8.096	974	12,03%
Revenue	5.460	4.963	497	10,01%
Commision Earned	3.500	3.059	441	14,42%
Exchange gain/Loss	1.960	1.904	56	2,94%
Other Commision	3.610	3.134	476	15,19%
Biaya	8.864	7.870	994	12,63%

Keterangan	2016 Rp Juta	2015 Rp Juta	Pertumbuhan	
			Rp Juta	%
Operational Expenses	8.863,93	7.870	994	12,63%
Laba Sebelum Pajak	206	227	(21)	(9,25%)
Pajak	-	-	-	-
Laba Setelah Pajak	206	227	(21)	(9,25%)

ROE dan ROA BNI Remittance tahun 2016 sebesar 3,88% dan 2,90%, masing-masing menurun sebesar 0,44% dan 1,27% dari tahun 2015 sebesar 4,32% dan 4,17%.

Rasio Keuangan BNI Remittance

RASIO	2016	2015
ROA	2,9%	4,2%
ROE	3,9%	4,3%
BOPO	97,8%	97,2%

RENCANA KERJA 2017

Secara umum strategi perusahaan tahun 2017 akan tetap sejalan dengan tahun sebelumnya, dengan fokus pada program-program yang melibatkan nasabah secara langsung antara lain:

1. ***Customer awareness***
   Meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk maupun sesama anak perusahaan untuk menyelenggarakan program *marketing above the line* maupun *below the line* yang melibatkan nasabah secara aktif melalui komunitas-komunitas yang ada di Hong Kong.

2. ***Customer experience***
   Bekerjasama dengan perusahaan induk untuk meningkatkan *experience* nasabah BNI di Hong Kong melalui program yang mengarah kepada *digital banking*, antara lain:
   a. Optimalisasi penggunaan ATM terutama untuk fitur layanan non tunai.
   b. Inisiasi penggunaan layanan e*banking* lainnya (*mobile banking*) dan *internet banking*.

3. ***Customer loyalty***
   Menginisiasi program yang dapat meningkatkan loyalitas *customer*, terutama fokus pada program berbasis pelatihan kewirausahaan yang berkesinambungan.

Tinjauan Pendukung Bisnis

PENGELOLAAN RISIKO BISNIS

Pertumbuhan kredit BNI yang cukup ekspansif di tahun 2016 diikuti oleh upaya perbaikan dalam pengelolaan risiko kredit sehingga menciptakan pertumbuhan yang berkualitas. Ditengah kondisi perekonomian di Indonesia yang belum pulih, pengelolaan risiko kredit menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung strategi pertumbuhan bisnis untuk dapat memastikan kualitas kredit BNI tetap terjaga sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Penerapan sinergi antar unit untuk percepatan bisnis yang dicanangkan terbukti dapat menjaga kualitas kredit BNI dengan rasio pinjaman bermasalah (NPL) berada pada level 3.0%.

KINERJA 2016

Pertumbuhan Aktiva Produktif Yang Selektif

Berkaca dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang belum pulih di tahun 2016 ini masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global khususnya Tiongkok dimana masih menjadi mitra dagang terbesar di Indonesia serta harga minyak dunia yang belum stabil. Hal ini menjadikan BNI menetapkan kebijakan yaitu memperkuat ekspansi bisnis di *selected corporate market* dan segmen menengah pada sektor terpilih untuk menjaga kualitas.

Selain menetapkan sektor strategis, optimalisasi *supply chain* dan *cross selling* juga merupakan unsur penting dalam mencapai pertumbuhan kredit yang berkualitas melalui proses *assessment* yang mendalam pada *parent account*.

Pada sektor konsumer, pertumbuhan kredit juga difokuskan kepada *selected partner, portfolio action* serta segmen dengan profil risiko yang rendah.

Alur Proses Pemberian Kredit

BNI telah melakukan penyempurnaan dalam proses kredit Business Banking baik pada Segmen Korporasi, Menengah maupun pada segmen Usaha Kecil.

Penyempurnaan yang dilakukan pada Segmen Korporasi, Menengah dan Kecil Unorganik yaitu:

1. Penajaman Fungsi Unit Bisnis
   Unit bisnis melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukan alias kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur.
2. Penajaman Fungsi Unit Risiko
   Unit Risiko memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dengan melakukan analisa risiko kredit dan mitigasi/ *risk control* yang berfokus pada risiko yang kemungkinan dan dampaknya tinggi.

Sedangkan penyempurnaan yang dilakukan pada Segmen Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. RM (Unit Bisnis) melakukan perencanaan daftar prospek, pemasaran, melakukan analisa kelayakan kredit secara menyeluruh (termasuk analisa *first way out* dan *second way out*) dan pemantauan debitur.
2. Atasan langsung RM selain memiliki fungsi supervisi yang sudah melekat, juga memiliki fungsi assessment risiko kredit secara lebih mendalam.

Alat penunjang dalam proses pemberian kredit terus dikembangkan dan disempurnakan. Khusus untuk segmen Usaha Kecil terutama dalam hal penyaluran KUR telah didukung dengan sistem *electronic Loan Origination* (eLO) untuk mempercepat proses analisa kredit. Sedangkan pada seluruh segmen bisnis banking telah dilakukan penyempurnaan Sistem Alat Bantu Analisa Kredit (SABAK) yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta mengurangi human error dalam proses analisia kredit.

Selain itu, dilakukan penguatan *four eyes principle* pada seluruh lini unit pemroses kredit sampai dengan pengambilan keputusan kredit melalui komite kredit yang beranggotakan pejabat pemutus kredit yang sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk terus menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Untuk mendukung percepatan bisnis sektor konsumer, penyempurnaan alur proses diakukan secara komprehensif dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) , yaitu :

1. Kebijakan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada calon debitur melalui proses verifikasi dokumen untuk meminimalisasi fraud aplikasi.
2. Penggabungan unit yang melakukan fungsi verifikasi dan fungsi analisa kredit di LNC dalam rangka mempercepat SLI
3. Pemberian kewenangan memutus kredit BNI Griya kepada Pemimpin Wilayah untuk percepatan bisnis di Wilayah.
4. Pengalihan kewenangan memutus kredit BNI Fleksi dari LNC kepada kantor cabang dengan *tiering* sesuai dengan kelasnya untuk untuk mendukung pertumbuhan produk BNI Fleksi.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap perangkat penunjang proses kredit konsumer dengan cara menyatukan tiga *loan origination system* yang digunakan guna mengakomodir perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal serta mekanisme pasar yang terjadi dengan cepat pada segmen konsumer.

Pemantauan Kredit

Dalam menciptakan pertumbuhan aset yang berkualitas, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemantauan dan penagihan kredit secara intesif. Bentuk pemantauan tersebut dapat diwujudkan melalui kunjungan ke debitur untuk melihat kondisi usahanya, *review* kelayakan pinjaman debitur, dan pemantauan pembayaran kewajiban debitur.

Proses pemantauan pada segmen *business banking* juga ditunjang dengan optimalisasi alat *monitoring* yaitu *watchlist system* yang digunakan untuk

memantau kinerja kredit debitur dan menetapkan tindak lanjut debitur agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit.

Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit

Di tahun 2016, di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perekonomian global yang belum pulih mendorong BNI untuk terus meningkatkan pemantauan dan penyelamatan kredit (restrukturisasi) secara lebih komprehensif serta meningkatkan penyelesaian NPL dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).*

Strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit yang konservatif-proaktif tetap dilakukan guna memperkuat fundamental keuangan BNI dan menjaga kualitas kredit antara lain dengan meningkatkan *coverage ratio* dan melakukan penanganan kredit bermasalah secara optimal. Penanganan kredit bermasalah secara umum ditempuh melalui dua strategi, yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit. Strategi Penyelamatan dilakukan antara lain:

1. Restrukturisasi (*Restructuring, Reconditioning, Rescheduling*) terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban namun masih memiliki prospek dan dinilai kooperatif.
2. Setoran/Pelunasan melalui investor strategis
3. Penjualan jaminan secara sukarela atau eksekusi Hak Tanggungan
4. *Debt to Aset Swap* (DAS)

Sedangkan Strategi Penyelesaian diterapkan kepada debitur yang dinilai sudah tidak memiliki prospek.

Kredit yang sudah dihapusbuku terus diupayakan penyelesaiannya secara maksimal untuk memperkecil kerugian Bank melalui :

1. Penyelesaian hutang dengan tambahan modal oleh investor baru terhadap debitur-debitur yang masih memiliki prospek usaha
2. Penjualan aset jaminan/agunan dan lelang
3. Khusus untuk sektor kredit konsumer, BNI telah menyediakan sarana pemasaran terhadap agunan yang akan dilelang dalam bentuk website yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
4. Subrogasi
5. Tindakan hukum melalui penagihan terhadap penjamin atas *personal guarantee* (PG) dan *company guarantee* (CG), eksekusi hak tanggungan/fidusia, litigasi, kepailitan dan gugatan perdata.

RENCANA DAN STRATEGI 2017

Menjawab tantangan gejolak ekonomi di tahun 2017, BNI menetapkan kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan tetap menjaga kualitas. Melalui kajian internal dan eksternal yang telah dilakukan, ekspansi kredit difokuskan pada industri yang prospektif dan prioritas. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi perbaikan kualitas kredit juga menjadi salah satu fokus utama di tahun 2017 yaitu perbaikan proses kredit yang meliputi restrukturisasi pada debitur bermasalah, meningkatkan risk control dalam proses perkreditan dengan menerapkan four eyes principle dan supervise atasan secara efektif. Pemantauan kredit juga terus dioptimalkan agar dapat mengidentifikasi permasalahan debitur lebih dini dan dapat menerapkan *corrective action* yang tepat.

Unit Risiko Kredit merencanakan penerapan *Credit Risk Management* sebagai strategi utama dalam mengawal kebijakan pertumbuhan yang agresif pada tahun 2017. *Credit Risk Management* meliputi :

1. Credit Risk Analysis :
   a. Meningkatkan peran Credit Risk Analysts pada saat komite kredit dalam hal
      i. Penyeimbang peran RM dalam komite
      ii. Memaksimalkan peran unit risiko sebagai penerapan four eyes principles
2. *Credit Risk Review* :
   a. Melakukan review secara periodik yang prakarsai oleh pemimpin unit risiko di level cabang, Wilayah dan Kantor Pusat
   b. Berkolaborasi dengan pihak independen untuk hal hal yang bersifat spesifik.
3. *Credit Administration* :
   a. Pembentukan divisi administrasi kredit untuk
      i. Memastikan agunan yang bersifat fixed aset telah dilakukan pengikatan secara sempurna untuk menjaga kepentingan BNI.

ii. Memastikan dokumentasi kredit telah berjalan sesuai ketentuan
iii. Melakukan evaluasi terhadap kinerja rekanan

Sejalan dengan penataan organisasi Kantor Wilayah untuk meningkatkan koordinasi dan aktivitas bisnis, operasional dan layanan, maka di tahun 2017 penanganan kredit bermasalah untuk segmen menengah dan kecil akan dilakukan migrasi fungsi Remedial dan Recovery yang semula disupervisi oleh Divisi RRM menjadi bagian unit organisasi Kantor Wilayah. Hal tersebut tentunya akan diiringi dengan peningkatan kapabilitas SDM terkait pelaksanaan fungsi dan aktivitas Remedial dan Recovery di Wilayah melalui review profil kompetensi, penyusunan brevet dan pelatihan.

Selain melakukan perbaikan proses kredit, peningkatan kualitas dan risk awareness kepada SDM perkreditan juga menjadi prioritas.

JARINGAN DAN LAYANAN

Dengan komitmen mendukung kinerja Perbankan Bisnis dan Perbankan Konsumer dalam mencapai target bisnis yang berkelanjutan, BNI menambah jumlah dan melakukan inovasi jaringan kantor (*outlet*) dan jaringan elektronik (ATM) di seluruh Indonesia yang terintegrasi, dan didukung *Unit Contact Center* serta Unit Kualitas Layanan.

JARINGAN KANTOR/OUTLET

Kinerja 2016

Dalam rangka memperluas jaringan serta meningkatkan pelayanan serta kemudahan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi, pada tahun 2016 BNI menambah 64 Kantor Cabang Pembantu, 78 Kantor Kas, 23 *Payment Point*, 15 BNI Layanan Gerak dan 3 *Money Changer*. Selain itu utnuk meningkatkan kinerja bisnis, efektifitas serta optimalisasi pengelolaan *outlet* dan pengendalian resiko operasional, BNI juga menambah 2 Kantor Wilayah dan meningkatkan status 27 Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang.

Dengan penambahan *outlet* dimaksud total, outlet BNI sampai akhir tahun 2016 menjadi sebanyak 1.990 outlet yang terdiri 17 Kantor Wilayah, 196 Kantor Cabang, 948 Kantor Cabang Pembantu, 623 Kantor Kas, 110 *Payment Point* dan 86 BNI Layanan Gerak yang tersebar di 34 Propinsi dan 452 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya terdapat 82 *outlet Weekend Banking* yang melayani nasabah pada hari Sabtu dan minggu serta 26 *outlet* yang menyediakan layanan BNI Emerald.

Sampai dengan akhir tahun 2016, sebanyak 58% dari total *outlet* berada di Pulau Jawa dan slebihnya tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan *outlet* BNI tersebut 65% berada di area komersial khususnya pusat pertokoan dan perbelanjaan sedangkan sisanya sebanyak 35% berada di area perkantoran dan perumahan.

Selama 3 tahun terakhir, jaringan outlet BNI telah bertumbuh sebanyak 230 outlet atau rata-rata sebesar 6,5%/ tahun.

Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Jaringan Outlet BNI

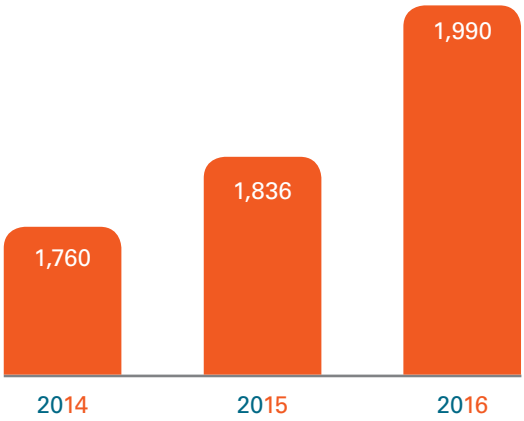

JARINGAN ATM

Kinerja 2016

Pada tahun 2016, BNI telah menambah 985 unit ATM yang terdiri dari 856 ATM Tarikan Tunai dan 129 ATM Setor-Tarik sehingga total ATM BNI sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 17.056 unit yang tersebar di 34 Propinsi dan 452 Kota/Kabupaten termasuk diantaranya 6 unit ATM di luar negeri yaitu 4 unit ATM di Hongkong dan 2 unit ATM di Singapura untuk melayani transaksi nasabah BNI di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan penambahan ATM dimaksud, sampai dengan bulan Desember 2016 total transaksi ATM bertumbuh sebesar 13% dibanding periode sebelumnya. Terkait efektifitas dan efisiensi sekaligus sinergi BUMN, ATM BNI telah tergabung dalam ATM Merah Putih sebanyak 3.000 unit pada tahun 2016.

Dengan semakin bertambah dan tersebarnya ATM BNI, diharapkan akan semakin memudahkan pelayanan transaksi perbankan baik bagi nasabah BNI maupun nasabah lain yang tergabung dalam jaringan ATM bersama, ATM Link, ATM *Global Master Card International* serta jaringan ATM Prima.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jaringan ATM telah bertumbuh dengan penambahan sebanyak 2.985 unit ATM atau sebesar 10% dimana sebanyak 60% tersebar di Pulau Jawa dan selebihnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2016, keberadaan ATM BNI tersebut 65% berada di area komerisal khususnya di pusat pertokoan dan perbelanjaan sedanglan sisanya berada di perkantoran dan perumahan.

Grafik Jumlah dan Pertumbuhan ATM BNI

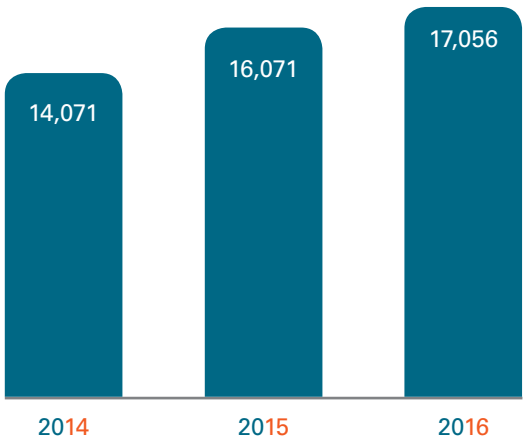

Rencana Kerja 2017

Guna meningkatkan pelayanan perbankan pada tahun 2017, BNI berencana akan menambah *outlet* terutama di area Kabupaten/Dati II *blank spot* yang belum terdapat *outlet* BNI. Total BNI akan menambah 146 *outlet* yang terdiri dari 28 Kantor Cabang Pembantu, 79 Kantor Kas, 13 *Payment Point* dan 26 unit BNI Layanan Gerak dan penambahan 827 unit ATM serta melanjutkan implementasi penggabungan ATM Merah Putih (Himbara).

Selain itu untuk meningkatkan kinerja bisnis dan efektivitas serta optimalisasi pengelolaan outlet, BNI akan meningkatkan status 26 Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang dan 137 Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu.

Selain dengan menambah jumlah *outlet* konvensional, untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan mengikuti pergeseran tren dunia perbankan ke arah digital banking, BNI akan melakukan pengembangan dan optimalisasi outlet e0branch eksisting serta akan membuka 25 outlet e-branch di beberapa kota besar di seluruh In

BNI CONTACT CENTER

BNI Contact Center terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi para nasabah BNI. Melalui layanan BNI Call 1500046, nasabah diberi kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi dan memperoleh solusi atas setiap permasalahan baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit.

Prestasi yang telah diraih BNI *Contact Center* di tahun 2016, diantaranya menjadi yang terbaik untuk kategori *phone banking* dan ranking kedua untuk kategori *call center* berdasarkan hasil survei *Bank Service Excellent Monitor* (BSEM) dari *Marketing Research* Indonesia (MRI) serta mendapat berbagai penghargaan pada kompetisi internasional *Contact Center World* se Asia Pacific dengan meraih 3 (tiga) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 5 (lima) medali perunggu.

Komitmen BNI *Contact Center* untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah diwujudkan melalui standarisasi kualitas layanan dengan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 pada akhir tahun 2016.

Dalam upaya untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah, BNI *Contact Center* senantiasa melakukan evaluasi proses dan efektivitas penyelesaian pengaduan nasabah melalui kerjasama

BNI Contact Center meraih penghargaan sebagai phone banking terbaik berdasarkan hasil survei Bank Service Excellent Monitor (BSEM) dari Marketing Research Indonesia (MRI) 2016.

BNI Contact Center mendapatkan berbagai penghargaan pada kompetisi internasional Contact Center World se Asia Pacific 2016 di Kinabalu, Malaysia.

sinergis antar divisi, memberikan *feedback* kepada *business*/*product owner* terkait pengaduan nasabah, melakukan pemantauan Service Level Agreement (SLA) penyelesaian pengaduan, penyempurnaan aplikasi penanganan pengaduan nasabah *Online Request Management* serta penyesuaian ketentuan internal jika terdapat perubahan perundang-undangan, sehingga dalam 4 (empat) tahun terakhir tren tingkat penyelesaian keluhan nasabah terus meningkat.

BNI Contact Center memprioritaskan *cost efficiency* dengan penurunan *repeated call* melalui peningkatan kualitas *agent*, proses yang cepat dan akurat, peningkatan akurasi *forecasting agent* serta penurunan *adherence* dan *agent attrition*.

Dalam rangka peningkatan kepuasan nasabah, BNI Contact Center melakukan survey kepuasan nasabah secara periodik dengan melibatkan *surveyor independent* sehingga diketahui keinginan dan ekspektasi nasabah terhadap layanan BNI Call. Hal ini terlihat dari hasil index kepuasan nasabah terus meningkat dari skor 3,86 di tahun 2013 menjadi 3,98 di tahun 2015.

Selain itu BNI Contact Center turut berperan sebagai *strategic aset unit*, dengan memberikan berbagai *insight* kepada divisi-divisi lain dalam peningkatan produk, fitur dan layanan yang unggul kepada nasabah.

Seiring dengan perkembangan *Financial and Technology*, BNI Contact Center akan terus meningkatkan kemudahan akses nasabah serta efisiensi biaya telekomunikasi melalui pengembangan layanan *Live Chat* dan *Tap To* Call sehingga kepuasan nasabah terhadap layanan BNI Call 1500046 terus meningkat.

BNI Contact Center akan terus mengembangkan *Online Request Management* untuk mengintegrasikan seluruh permintaan nasabah BNI baik melalui BNI Call 1500046 maupun BNI Cabang sehingga nasabah akan mendapatkan *experience* yang sama

Kontribusi BNI Contact Center untuk turut serta memperkuat sinergi bisnis dan peluang peningkatan pendapatan pada Segmen *Consumer* dan Ritel, Bisnis Banking serta Perusahaan Anak melalui program *referral* dan *cross selling* akan terus dilakukan sehingga BNI Call 1500046 menjadi salah satu *point of contact* dengan memberikan solusi layanan dan penjualan yang terintegrasi.

Prosedur Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bni

BNI Contact Center sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam layanan bagi para nasabah BNI, senantiasa terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit.

Alur layanan dan solusi penyelesaian pengaduan nasabah BNI telah tercantum pada website BNI www.bni.co.id pada ikon BNI Call 1500046.

Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

Gambar 1. Media-Media Penyampaian Pengaduan

Solusi penyelesaian pengaduan yang disampaikan secara lisan maksimal dalam 2 (dua) hari kerja. Apabila solusi penyelesaian pengaduan secara lisan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas BNI akan menyarankan nasabah untuk pengajuan pengaduan secara tertulis.

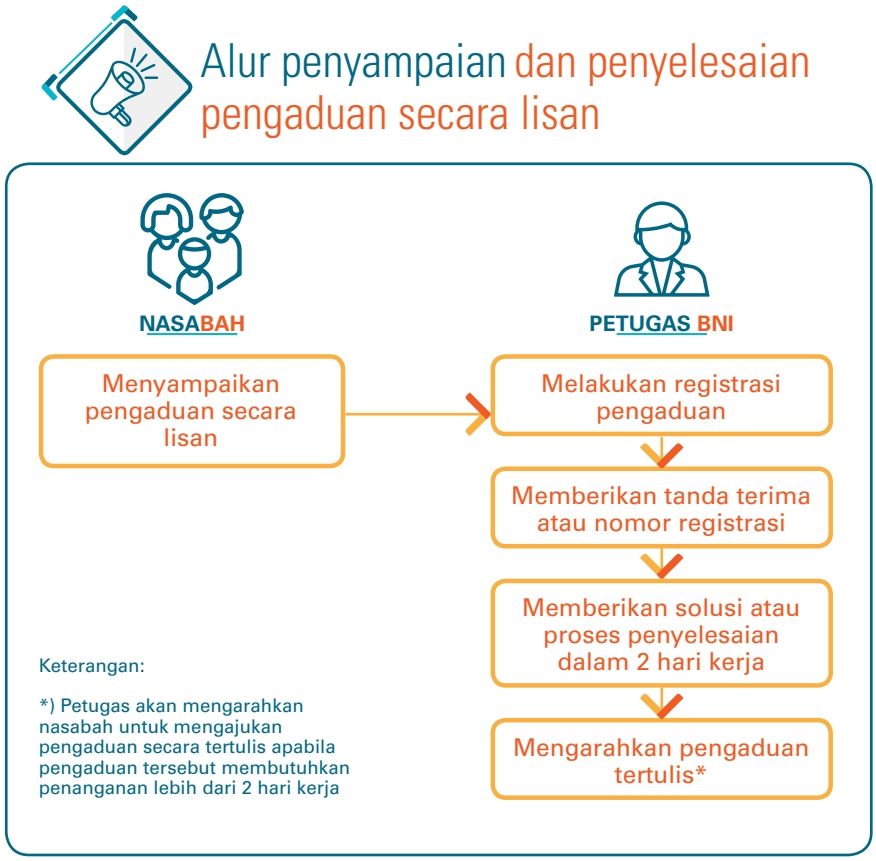

Gambar 2. Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan secara Lisan

Dalam hal pengajuan pengaduan secara tertulis diperlukan dokumen dari nasabah yaitu:

1. Surat Pernyataan yang menjelaskan permasalahan yang dialami nasabah (bersifat wajib)
2. Salinan identitas diri nasabah/perwakilan nasabah (bersifat wajib)
3. Dokumen pendukung seperti:
   a. Bukti setoran/penarikan/transfer atau aktivitas perbankan lain yang terkait dengan pengaduan yang dimaksud
   b. Fotokopi buku tabungan/rekening koran milik nasabah dan/atau perwakilannya
   c. Surat kuasa nasabah yang diwakilkan (bila bukan nasabah sendiri yang mengajukan pengaduan)
   d. Dokumen dari pihak berwenang (bila perwakilan nasabah adalah lembaga/badan hukum)
   e. Dokumen lain yang diperlukan

Pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa BNI akan memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan perpanjangan waktu penyelesaian.

Gambar 3. Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan secara Tertulis

Sesuai Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014, BNI akan memberikan informasi penyelesaian atas pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat ataupun pesan singkat (*short message service*/*sms*).

Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI masih kurang sesuai, nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui layanan mediasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BNI Contact Center didukung oleh aplikasi penanganan pengaduan *Online Request Management* yang terintegrasi sehingga aktivitas penerimaan dan proses penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan pada aplikasi tersebut serta mempermudah pemantauan status penyelesaian pengaduan nasabah.

UNIT KUALITAS LAYANAN

KINERJA 2016

BNI senantiasa melakukan berbagai upaya dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan konsistensi penerapan standar layanan, sejalan dengan perubahan ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan pada umumnya. BNI juga sudah menyajikan layanan *financial advisory* yang mampu memberikan solusi keuangan, melakukan edukasi terkait transaksi digitalisasi melalui *frontliner* yang sudah tersertifikasi, serta tentunya tetap memberikan pelayanan yang ramah, cepat, teliti dan akurat kepada nasabah. Dengan kata lain, kualitas layanan sebagaimana visinya, layanan BNI harus unggul dan terdepan, ditingkatkan untuk mendorong terciptanya peluang bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan profit. Untuk itu, BNI terus berusaha melakukan monitoring dan pengukuran kinerja layanan para petugasnya.

Segala upaya peningkatan kualitas layanan ini berdampak pada *image* yang positif dari masyarakat yang tercermin melalui survey kepuasan nasabah, seperti *voice of customer* yang dilakukan secara periodik serta beberapa penghargaan yang diraih pada tahun 2016, di antaranya, bahwa secara *overall* BNI berhasil mencapai ranking 2 Bank Service Excellence Monitor hasil survey Marketing Research Indonesia (MRI), rangking 2 kategori Customer Service, rangking 1 kategori Satpam, dan rangking 1 untuk kategori telepon cabang.

RENCANA KERJA 2017

1. Di tahun 2017, BNI akan terus melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi terbaru dalam kualitas layanan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ekspektasi terhadap kompetensi petugas dalam memberikan solusi pengelolaan keuangan. Seiring dengan value layanan berupa"Integrity, Continuous Improvement, dan Energy" yang menjadikan layanan sebagai " Culture"bagi seluruh pegawai BNI.
2. Selain itu, untuk memantau sekaligus memastikan konsistensi penerapan standar layanan di segenap outlet, dilakukan evaluasi kualitas layanan outlet secara berkala dengan berbagai metode pengukuran antara lain melalui masukan-masukan dan hasil dari independent survey yang terpercaya, *mystery shopping*, pengujian skill dan kompetensi *frontliner* melalui telepon (*calling test*), tes kompetensi secara *online* dan pelaksanaan survey kepuasan nasabah untuk mendapatkan *feedback* terkait kualitas layanan petugas cabang yang dapat memenuhi ekspektasi nasabah serta berdampak kepada peningkatan layanan dan kinerja BNI.

Tinjauan Operasional Dan Teknologi Informasi

BNI senantiasa melakukan peningkatan kemampuan dan keandalan Teknologi Informasi (TI) BNI untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selama tahun 2016, hal-hal yang telah dilakukan adalah melakukan peningkatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan terkait dengan sistem teknologi informasi.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI BNI DAN PENCAPAIAN UTAMA TI PADA TAHUN 2016

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI 2016

Strategi Teknologi Informasi BNI adalah untuk menjamin layanan bisnis BNI bagi nasabah melalui penggunaan Teknologi Informasi, yaitu melalui layanan Teknologi Informasi dengan *high availability* dan *reliability*, layanan pengembangan Teknologi Informasi dengan *turnaround* yang tinggi, layanan *decision support* dan *management information system*, implementasi rencana strategis Teknologi Informasi dengan pengembangan platform menuju *digital banking*, serta dengan memastikan kepatuhan terhadap tata kelola Teknologi Informasi Perbankan.

Strategi Teknologi Informasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai rekanan strategis bagi bisnis untuk mendukung proses bisnisnya, baik sebagai peningkatan proses internal maupun sebagai produk dan layanan bagi nasabahnya.

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN 2016

Realisasi Teknologi Informasi dalam pemenuhan strategi tersebut antara lain mencakup:

1. *High availability* dan reliability Teknologi Informasi
   a. Proses migrasi server dalam implementasi dual data center BNI
   b. Implementasi *High Availability Firewall* untuk menjamin ketersediaan akses sekaligus meningkatkan penjagaan terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang
   c. Peningkatan IT *Service Management*, untuk makin mempercepat penyelesaian masalah Teknologi Informasi yang dihadapi oleh outlet dan cabang
2. Pengembangan Teknologi Informasi dengan *turnaround* yang tinggi
   Pemanfaatan kapabilitas simulator dan *testing tool* yang digunakan dalam proses pengembangan, sehingga akan mempersingkat waktu proses tersebut untuk dapat dilaksanakan implementasinya sekaligus meningkatkan kualitas hasil pengembangan aplikasi.
3. *Decision support* dan *management information system*
   Peningkatan berkelanjutan terhadap *Enterprise Data Warehouse*, antara lain melalui penambahan sumber data serta pelaksanaan pengkinian dan pembersihan data.
4. Implementasi rencana strategis Teknologi Informasi dengan pengembangan *platform* menuju *digital banking*
   Peningkatan cakupan dan kapasitas virtualisasi *server*, sehingga mempercepat dukungan infrastruktur Teknologi Informasi terhadap kebutuhan BNI
5. Kepatuhan terhadap tata kelola Teknologi Informasi Perbankan
   Peremajaan lisensi dan perangkat pendukung operasional untuk menjamin keberlangsungan layanan sekaligus meningkatkan kinerja sistem yang ada

DUKUNGAN IT UNTUK PENGEMBANGAN *E-BANKING*

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah, BNI melaksanakan peningkatan teknologi informasi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Peningkatan teknologi informasi bank menuntut berubahnya pola pikir dengan pola pikir yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan tuntutan nasabah. Perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan nasabah yang dinamis tersebut menjadi masukan bagi pengembangan struktur teknologi informasi yang dimiliki BNI. Struktur teknologi informasi harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah sehingga produk dan layanan bank selalu relevan bagi nasabah. Nasabah tersebut dalam arti luas yaitu semua pihak yang menerima *output* dari BNI baik pihak investor, regulator, masyarakat luas, maupun karyawan BNI sendiri.

Struktur teknologi informasi termasuk dengan infrastrukturnya yang harus dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan tersebut akan ditujukan untuk menggantikan proses bisnis manual menjadi digital,

menciptakan pengelolaan nasabah yang mampu mengenali dan memenuhi kebutuhan nasabah, serta mengelola inovasi-inovasi dan perubahan yang diperlukan. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi diharapkan kepuasan nasabah akan meningkat sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan dan laba. Pada saat bersamaan, secara internal, peningkatan kualitas dan kecepatan teknologi informasi meningkatkan efisiensi BNI.

Berikut ini strategi dalam mengembangkan *digital banking* yang dituangkan dalam skema sebagai berikut.

Strategi dalam mengembangkan *Digital Bank*

Pengembangan digital banking akan memberikan *new banking experiences* kepada target nasabah, sehingga BNI telah menetapkan strategi dalam megembangkan kapabilitas Digital Bank

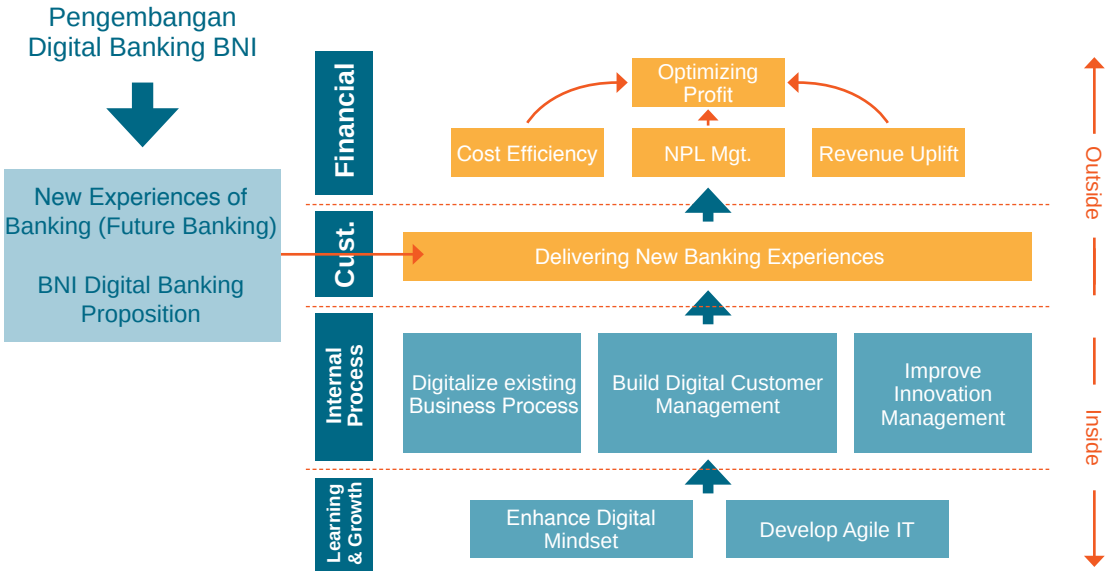

Stricly Confidential – Copyright Tim Digital Banking 46

Selain itu, Realisasi dukungan Teknologi Informasi untuk pengembangan bisnis BNI direalisasikan melalui pengembangan *Electronic Banking*. E-Banking menawarkan beragam produk untuk menunjang aktivitas serta meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BNI menawarkan beragam fasilitas E-Banking yang mencakup ATM, SMS Banking, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Agen 46, Tap Cash, Uniqku, dan EDC.

PRODUK DAN LAYANAN E-BANKING

Adapun rincian produk dan layanan Electronic Banking yang ditawarkan BNI ialah sebagai berikut.

ATM

Channel layanan perbankan, yang memudahkan Nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai, setor tunai, cek saldo, transfer, pembayaran dan pembelian. Jumlah mesin ATM BNI per Desember 2016 adalah 17.050 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka meningkatkan

layanan perbankan bagi Nasabah BNI yang berada di luar negeri, terutama para pekerja Indonesia di luar negeri, BNI juga menempatkan ATM di Singapura (2 unit) dan di Hong Kong (4 unit).

SMS BANKING
BNI *SMS Banking* merupakan channel transaksional bank yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi transfer , pembayaran dan pembelian melalui media sms (syntax) ataupun sms menu.

MOBILE BANKING
BNI *Mobile Banking* merupakan channel transaksional bank yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi *transfer* , pembayaran dan pembelian melalui aplikasi *mobile banking* untuk Android dan IOS.

INTERNET BANKING
BNI ***Internet Banking*** adalah salah satu *channel* fasilitas e-Banking dari BNI untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui jaringan Internet dengan menggunakan perangkat lunak *Internet browser* yang terdapat pada komputer maupun *handphone*.

PHONE BANKING
Phone Banking merupakan layanan khusus perbankan yang disediakan bagi nasabah untuk kemudahan pemanfaatan jasa perbankan tertentu, baik transfer maupun transaksi-transaksi lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran melalui jaringan telepon dengan mengakses nomor telepon tertentu.

AGEN46
Agen46 merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Selain mitra BNI dalam penyediaan berbagai macam layanan perbankan, Agen46 juga memiliki berbagai macam program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial maupun subsidi, dapat berupa tunai maupun non tunai. Melalui Agen46, transaksi perbankan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan mudah dijangkau oleh Masyarakat sekitar. (Sesuai *tagline* Agen46: Lebih Mudah, Lebih Cepat, Lebih Dekat).

TAPCASH
TapCash adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang berbasiskan kartu serta dapat diisi ulang dengan maksimal saldo sebesar Rp1.000.000,-.

UNIKQU
UnikQu adalah pengembangan dari uang elektronik berbasis *server* BNI. UnikQu dapat diakses dan digunakan oleh nasabah dan non nasabah BNI dengan melalui *smartphone* maupun USSD (*946#).

Dengan fleksibilitas tersebut, metode pembayaran menggunakan UnikQu dapat dikerjasamakan dengan merchant yang telah memiliki infrastruktur IT juga pada *merchant* yang tidak memiliki infrastruktur IT seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, dll.

Pengisian ulang saldo UnikQu dapat dilakukan melalui BNI SMS *Banking*, BNI Mobile Banking, BNI *Internet Banking*, dan Agen46. Kedepannya akan diimplementasikan pengisian ulang melalui *channel* ATM Kerjasama dan *merchant*.

Selain fitur pembayaran pada merchant offline, UnikQu juga dapat ditransaksikan pada merchant online seperti Lazada serta dapat digunakan untuk pembelian pulsa handphone dan pembayaran tagihan kartu Halo.

Dengan menggunakan UnikQu, semua masyarakat dapat menikmati layanan BNI.

EDC/ Jaringan *Merchant*
Jaringan *merchant* adalah jaringan (*network*) pelayanan penerimaan transaksi APMK (menggunakan kartu kredit, debit dan prepaid). Jaringan *merchant* merupakan kerjasama antara Bank (*acquirer*) dengan principal baik global principal seperti VISA, MasterCard, Japan Credit Bureau (JCB), UPI, maupun *local principal* seperti Artajasa, Prima, dan ALTO. Sebagai *member* dari principal tersebut, dalam aktivitasnya jaringan *merchant* menjalin kerjasama dengan toko, hotel, restoran, dan berbagai badan usaha lain yang menerima pembayaran barang atau jasanya menggunakan APMK (kartu kredit, debit, dan *prepaid*).

KALEIDOSKOP E-BANKING TAHUN 2016

KALEIDOSKOP **E-BANKING 2016**

BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Jan
- Financial Planner
- Internet Banking

Feb
- BEST Performance ATM Bersama
- 1st Debit Acquirer
- E-Toll Himbara di ruas tol Nasional
- Ruas Tol Surabaya

Mar
- Reborn Agen46
- BPJS Via k24
- Agregator PDAM

Apr
- E-Samsat Jabar
- Banyuwangi Mall
- PBB Banjarbaru
- Akseptasi Kartu Debit Maestro

Mei
- SIP Makassar
- Ruas Toll Makassar
- Cilacap Mall
- Sleman Mall

Jun
- Toll Arus Mudik
- Asuransi Bumiputera
- Pajak Daerah DKI
- TOP UP GOPAY

Jul
- Palm Secure

Ags
- SMS Banking New Look
- PDAM Medan
- JUARA 1 KOINKU
- Theme Park Go Fun (Tapcash)

Sep
- APN
- Union Pay PDAM Makassar

Okt
- Agen46 Penyalur Bansos
- E-Warong
- Kerjasama BULOG (RPK)
- ATM Merah Putih
- SIP Banjarmasin
- PDAM Jayapura
- Launch TPE

Nov
- Toll dalam Kota
- SIP Papua
- Pesona W.Boom
- Pre Approval CC
- Pembelian Tabungan Emas
- Pajak Daerah Semarang
- Samsat Kaltim
- Award TELKOMSEL BEST Growth Mbanking

Des
- Launch UnikQu
- Co Branding Railpay (Tapcash)
- New Mobile Banking
- 30.000 agen melayani masyarakat

KINERJA *E-BANKING* TAHUN 2016

Pembahasan terkait kinerja E-Banking diuraikan dalam penjabaran pertumbuhan berdasarkan pengguna (*user*), pertumbuhan berdasarkan *user performance,* pertumbuhan ATM dan EDC, dan pertumbuhan berdasarkan transaksi. Adapun rincian terkait kinerja produk dan layanan E-banking diuraikan sebagai berikut.

KOMPOSISI USER E-BANKING

Sepanjang tahun 2016, layanan *Internet Banking* mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan peningkatan *user* atau pengguna *internet banking* sebanyak 492.470 pengguna atau 47% dari 1.045.550 pengguna di tahun 2015, meningkat secara berkala untuk triwulan terakhir di tahun 2016 yaitu sebanyak 1.459.166 pengguna di bulan Oktober 2016, meningkat menjadi 1.501.703 pengguna di bulan November 2016, dan sebanyak 1.538.020 pengguna di bulan Desember 2016.

Layanan *Phone Banking* mengalami peningkatan sebanyak 206.327 pengguna atau 12% dari 1.713.352 pengguna di tahun 2015, meningkat secara berkala untuk triwulan terakhir di tahun 2016 yaitu sebanyak 1.880.535 pengguna di bulan Oktober 2016, meningkat menjadi 1.900.783 pengguna di bulan November 2016, dan sebanyak 1.919.679 pengguna di bulan Desember 2016.

Layanan *Phone Banking* mengalami peningkatan sebanyak 206.327 pengguna atau 12% dari 1.713.352 pengguna di tahun 2015, meningkat secara berkala untuk triwulan terakhir di tahun 2016 yaitu sebanyak 1.880.535 pengguna di bulan Oktober 2016, meningkat menjadi 1.900.783 pengguna di bulan November 2016, dan sebanyak 1.919.679 pengguna di bulan Desember 2016.

Selain itu, kinerja Layanan *mobile banking* di tahun 2016 selama triwulan terakhir mengalami peningkatan untuk setiap bulannya. Di Bulan Oktober 2016 jumlah pengguna layanan ini mencapai 416.742 pengguna, kemudian meningkat menjadi 461.499 pengguna, dan tercatat sebanyak 506.564 pengguna untuk bulan Desember 2016.

Rincian terkait pertumbuhan *E-banking* diuraikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Pertumbuhan Produk *E-Banking* berdasarkan jumlah *user*

Channels	2015 *User*	Okt-16 *User*	Nop-16 *User*	Des-16 *User*	Pertumbuhan	
					User	%
Internet Banking	1.045.550	1.459.166	1.501.703	1.538.020	492.470	47%
Phone Banking	1.713.352	1.880.535	1.900.783	1.919.679	206.327	12%
SMS Banking	5.465.190	6.644.436	6.763.628	6.873.626	1.408.436	26%
Mobile Banking	-	416.742	461.499	506.564	506.564	-

Grafik Komposisi User Produk E-Banking

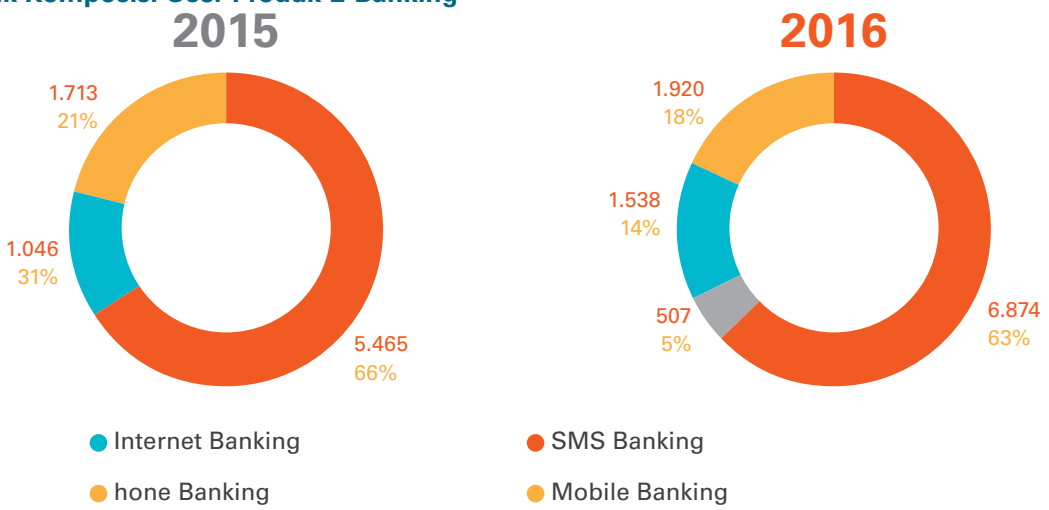

(dalam Rp Ribuan)

Pertumbuhan Produk ***E-Banking*** berdasarkan *User Performance*

Channels	2015		*Ratio*	Des-16		*Ratio*	Target	
	User	Aktif		User	Aktif		Total User Aktif	% Pencapaian Terhadap Target
Internet Banking	1.046	708	68%	1.538	958	62%	1.124	85%
SMS Banking	5.465	3.555	65%	6.874	4.807	70%	5.332	90%
Mobile Banking	-	-	-	507	507	100%	253	200%
Phone Banking	1.713	1.713	100%	1.920	1.920	100%	n/a	n/a

PERTUMBUHAN *E-BANKING* BERDASARKAN *USER PERFORMANCE*

Berdasarkan *user performance*, total pengguna aktif *internet banking* di tahun 2015 tercatat sebesar 708 pengguna atau sebesar 68% dari jumlah pengguna layanan *internet banking*, meningkat 85% di tahun 2016 menjadi 1.538 pengguna atau sebesar 62% dari jumlah penggunan layanan *internet banking.*

Total pengguna aktif *SMS banking* di tahun 2015 tercatat sebesar 3.555 pengguna atau sebesar 65% dari jumlah pengguna layanan *SMS banking*, meningkat 90% di tahun 2016 menjadi 4.807 pengguna atau sebesar 70% dari jumlah penggunan layanan *SMS banking*.

Di samping itu, total pengguna aktif *Mobile banking* di tahun 2016 tercatat sebesar 507 pengguna aktif. Sejalan dengan peningkatan pengguna layanan Internet Banking dan SMS Banking, pertumbuhan jumlah pengguna Phone Banking juga mengalami peningkatan. Di tahun 2016, total pengguna aktif *Phone banking* tercatat sebesar 1.920 pengguna atau sebesar 100% dari jumlah pengguna layanan *Phone banking* dibandingkan dengan jumlah pengguna layanan *Phone Banking* di tahun 2015 yang tercatat sebesar 1.713 pengguna.

Rincian terkait pertumbuhan *E-banking* berdasarkan *user performance* diuraikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Grafik Pertumbuhan Produk ***E-Banking*** berdasarkan *User Performance* 2016

(Pengguna/User)

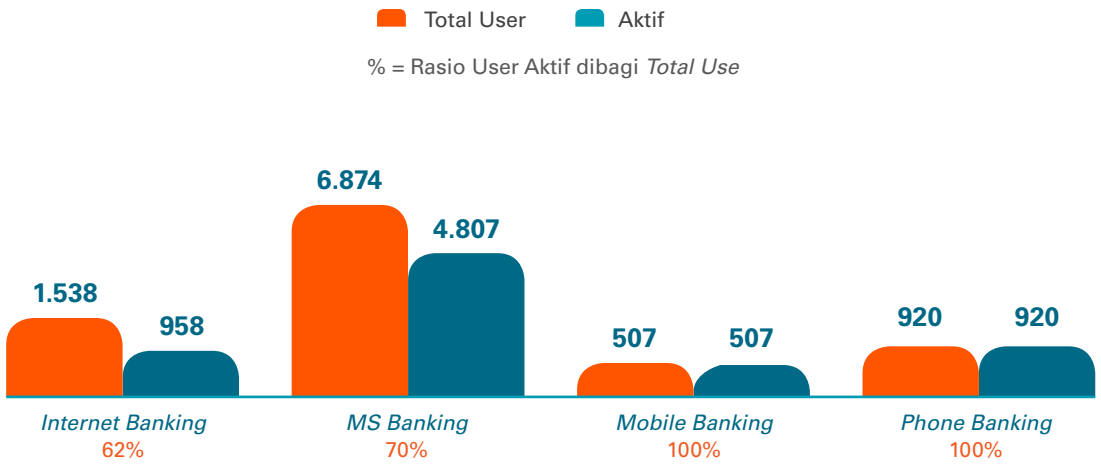

PERTUMBUHAN ATM DAN ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)

Pertumbuhan jumlah ATM BNI di than 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,94% dari total sebanyak 16.100 ATM ditahun 2015 menjadi 17.057 ATM di tahun 2016. Selain itu, Jumlah EDC di tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari total EDC sebanyak 95.721 EDC menjadi 139.694 EDC atau mengalami pertumbuhan sebesar 45,9%. Berikut ini rincian pertumbuhan ATM dan EDC yang diilustrasikan dalam bentuk grafik.

Grafik Pertumbuhan ATM

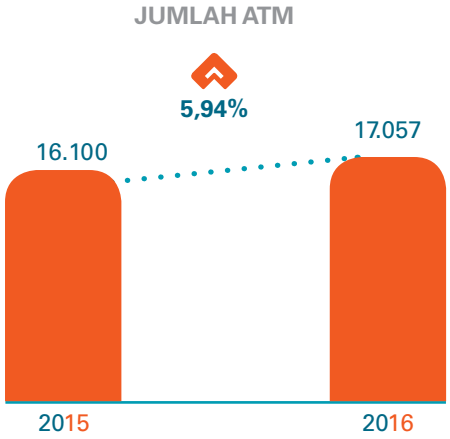

Grafik Pertumbuhan EDC

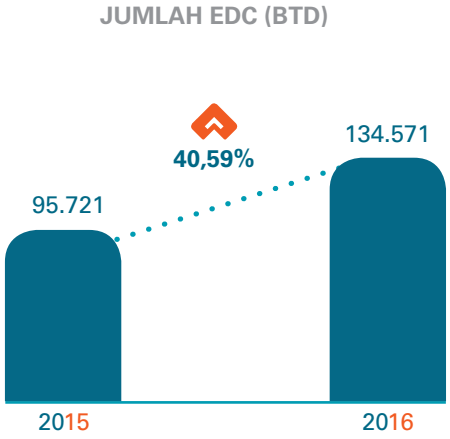

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah ATM dan EDC, jumlah transaksi E-Channel juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari grafik di bawah ini. Grafik tersebut menunjukan pergerakan jumlah transaksi e-channel selama tahun 2016. Pertumbuhan jumlah transaksi pada Januari 2016 tercatat sebesar 88,65%, meningkat menjadi 92,76% di bulan Desember tahun 2016.

Grafik Transaksi *E-Channel dibandingkan dengan transaksi all BNI lainnya (Teller, CS, dan lain-lain)*

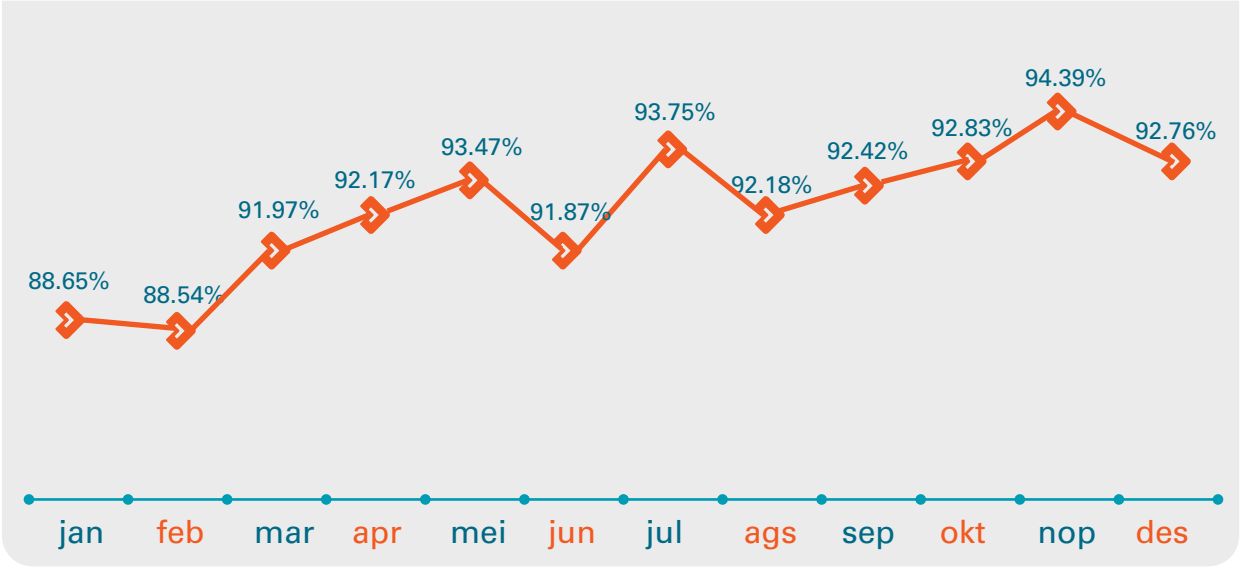

PERTUMBUHAN TRANSAKSI

ATM

Selama tahun 2016, jumlah ATM BNI tercatat sebanyak 17,1 juta ATM, meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 16,1 ATM. Berdasarkan jumlah transaksinya, ATM BNI berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebesar 953 juta di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 851 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah ATM dan jumlah transaksi, Nilai transaksi ATM BNI di tahun 2016 tercatat sebesar Rp606 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp534 triliun.
Adapun rincian terkait pertumbuhan ATM BNI digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik pertumbuhan ATM berdasarkan jumlah ATM, Jumlah Transaksi, dan Nilai Transaksi

PERTUMBUHAN TRANSAKSI
ATM

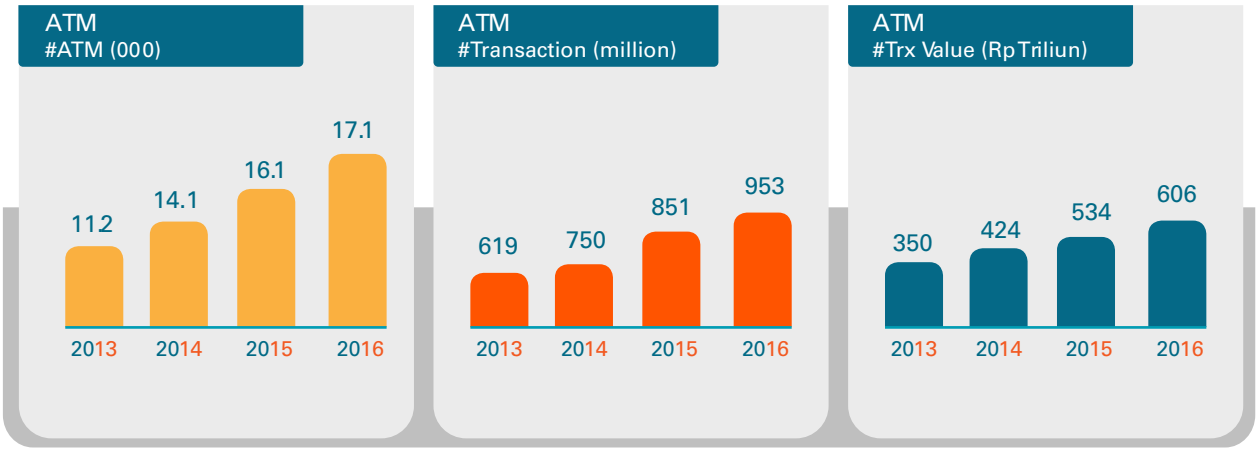

SMS Banking

Selama tahun 2016, jumlah pengguna *SMS Banking* tercatat sebanyak 6,9 pengguna, meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 5,5 pengguna. Berdasarkan jumlah transaksinya, *SMS Banking* berhasil mencacatkan jumlah transaksi sebanyak 308 juta transaksi di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 257 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna dan jumlah transaksi, Nilai transaksi *SMS Banking* di tahun 2016 tercatat sebesar Rp36 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp26 triliun.

Adapun rincian terkait pertumbuhan *SMS Banking* digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik pertumbuhan *SMS Banking* berdasarkan jumlah pengguna, Jumlah Transaksi, dan Nilai Transaksi

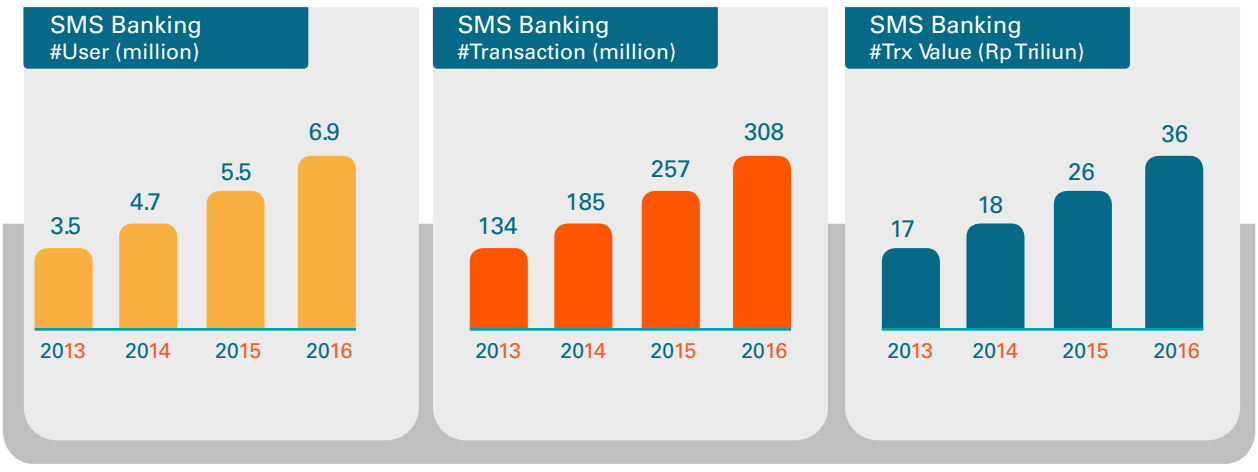

Internet Banking

Selama tahun 2016, jumlah pengguna *Internet Banking* tercatat sebanyak 1.538 pengguna, meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 1.046 pengguna. Berdasarkan jumlah transaksinya, *Internet Banking* berhasil mencatatkan jumlah transaksi sebanyak 26 juta transaksi di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20 juta transaksi. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna dan jumlah transaksi, Nilai transaksi *Internet Banking* di tahun 2016 tercatat sebesar Rp95 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68 triliun.

Adapun rincian terkait pertumbuhan *Internet Banking* digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik pertumbuhan ***Internet Banking*** berdasrkan jumlah pengguna, Jumlah Transaksi, dan Nilai Transaksi

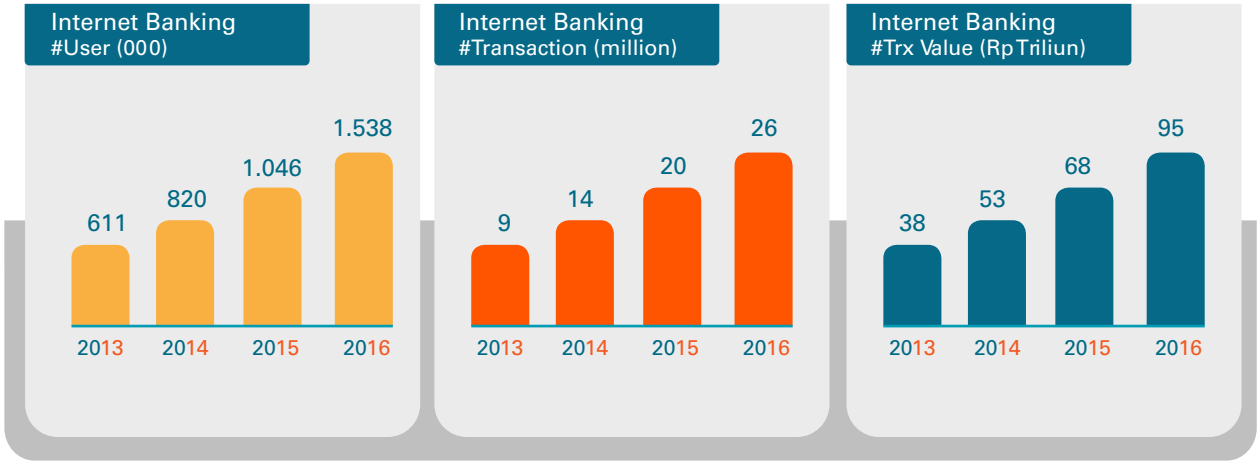

Laporan Tahunan 2016

Sumber Daya Manusia

- System Thinking 289
- Employee Value Proposition 290
- Human Capital Architecture 291
- Realisasi Strategi Manajemen Modal Manusia 2016 293
- Human Capital Transformation 301
- Penghargaan 302
- Inisiatif Strategis Tahun 2017 304
- Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia 310
- Profil Pegawai 306

Memandu, mengiring, dan mengawal langkah cepat bisnis dalam rangka memenangkan persaingan

Tahun 2016 merupakan tahun pertumbuhan bagi BNI, terbukti dari indikator-indikator kinerja yang menunjukkan angka yang cukup signifikan perubahannya dibandingkan tahun sebelumnya serta mampu bersaing dengan kompetitor. BNI meyakini pertumbuhan tersebut dapat terealisasi karena dukungan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak utama sehingga segenap potensi dan tantangan bisnis yang ada mampu ditangkap oleh BNI menjadi pendapatan yang berkelanjutan/sustain dengan risiko yang tetap terjaga. Bebagai inisiatif strategis telah dilakukan di bidang sumber daya manusia sepanjang tahun 2016 ini agar pengelolaan faktor penggerak utama tersebut mampu memandu, mengiring, dan mengawal langkah cepat bisnis dalam rangka memenangkan persaingan.

System Thinking

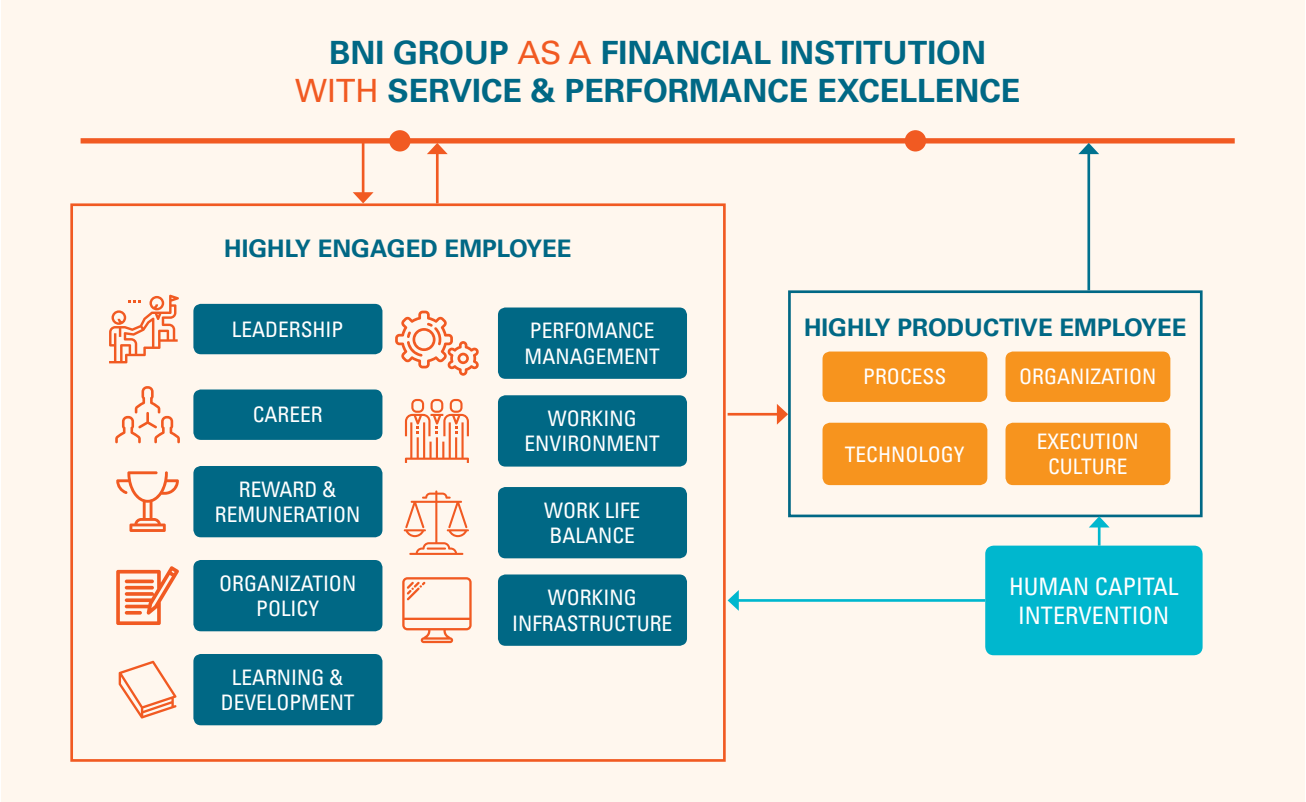

Perseroan percaya bahwa untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja perlu didukung oleh sumber daya manusia yang loyal (*engage*) dan produktif. Sesuai hasil *Employee Engagement Survey* tahun 2015, loyalitas (*engagement*) pegawai dipengaruhi oleh sejumlah aspek, antara lain adalah kepemimpinan, jalur karir, *reward & remunerasi*, kebijakan perusahaan, kesempatan pembelajaran, manajemen pengelolaan kinerja, lingkunan kerja, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work life balance*), dan sarana pekerjaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai antara lain adalah aspek proses kerja, teknologi, organisasi serta budaya eksekusi. Untuk itu, Perseroan memandang bahwa pengelolaan SDM BNI harus mampu melakukan intervensi terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan produktivitas karyawan tersebut.

Employee Value Proposition

Employee Value Proposition BNI

Bersama-sama menciptakan tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar dan bertumbuh, guna menjadi kebanggaan negeri

Employee Value Proposition (EVP) merupakan nilai-nilai ideal Perseroan yang dijanjikan dan diyakini bersama oleh Perseroan dan Karyawan sehingga mampu menimbulkan komitmen untuk mewujudkannya. Keberadaan EVP menjadi perekat utama keberadaan organisasi dan karyawannya agar dapat menghasilkan sinergi yang maksimal. Perseroan berjanji untuk menghargai karyawan sejalan dengan kontribusi dan kinerja yang ditunjukkan. Sebaliknya, karyawan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaiknya kepada Perseroan. Sejalan dengan Misi ketiga BNI yaitu "menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, maka janji bersama Bank dan karyawan tersebut adalah untuk "bersama-sama menciptakan tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar dan bertumbuh, guna menjadi kebanggaan negeri". Makna kata "bersama-sama" tersebut menjelaskan bahwa Perseroan dan Karyawan merupakan dua sisi mata uang yang saling ketergantungan guna mencapai tujuan bersama organisasi.

Human Capital Architecture

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif, maka strategi Perseroan perlu didukung oleh strategi pengelolaan sumber daya manusia yang mumpuni dan sejalan dengan arah bisnis Perseroan. Pada tahun 2016 Perseroan telah menerapkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang disebut dengan BNI *Human Capital Architecture.* Arsitektur pengelolaan SDM tersebut menjadi dasar pengembangan berbagai strategi pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan mampu beradaptasi dan mendukung strategi bisnis Perseroan yang dinamis.

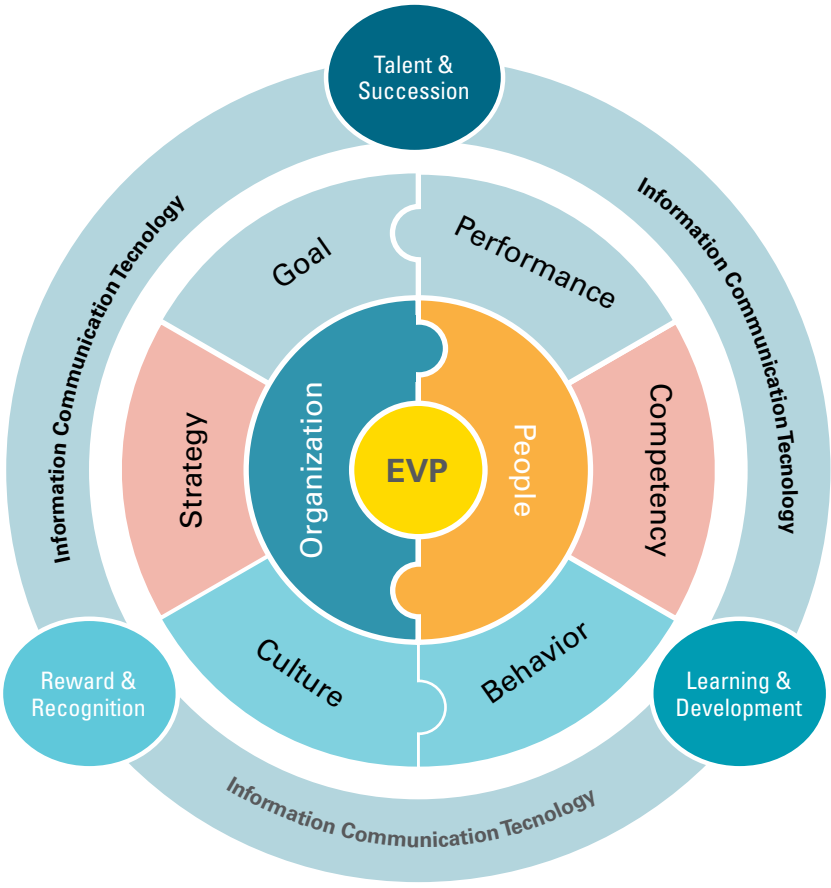

Aligning Corporate's Goal, Strategy and Culture with Employee's Performance, Competency and Behavior

Perseroan memiliki tujuan yang ingin dicapai, strategi untuk mencapai tujuan tersebut serta budaya organisasi yang menjadi dasar perilaku organisasi. Agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai, pegawai BNI dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja/performance yang selaras dengan tujuan perusahaan. Dengan berubahnya strategi perusahaan dalam mencapai tujuan, maka pegawai diharapkan senantiasa

meningkatkan berbagai kompetensi yang mendukung strategi perusahaan. Perseroan juga mengharapkan agar pegawai senantiasa menampilkan perilaku yang sejalan dengan budaya organisasi.

Talent and Sucession, Learning and Development, Reward and Recognition

Apabila pegawai mampu memberikan kinerja yang selaras dengan tujuan perusahaan, kompetensi yang sejalan dengan strategi perusahaan dan perilaku yang mencerminkan budaya perusahaan maka Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan 3 (tiga) hal kepada pegawai yaitu peluang pengembangan karir (*talent & succession*), kesempatan mengembangkan kompetensi dan kapabilitas (*learning & development*), serta pengakuan dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan bagi perseroan (*reward & recognition*).

Information Communication Technology

Seluruh strategi pengelolaan *Human Capital* diinformasikan kepada pegawai secara terbuka dan transparan melalui berbagai jalur komunikasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pegawai. Teknologi berperan sebagai infrastuktur utama yang mendukung penerapan aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia agar menjadi lebih efektif dan efisien. Seluruh komponen pengelolaan pegawai yang terdapat dalam HC *Architecture* kini dapat diakses secara mandiri oleh pegawai melalui sistem pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi secara *online*.

Realisasi Strategi Manajemen Modal Manusia 2016

Perencanaan dan Alokasi Pegawai yang Tepat

Pada tahun 2016, BNI menetapkan strategi untuk meningkatkan ekspansi kredit dengan tetap menjaga kualitas kredit yang disalurkan dan meningkatkan implementasi layanan digital untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi nasabah.

Untuk mendukung rencana tersebut, maka diperlukan perencanaan atas jumlah dan komposisi pegawai yang efektif dan efisien pada setiap unit bisnis. Indikator yang digunakan dalam penyusunan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan pada rasio produktivitas pegawai dengan menggunakan *Earning per Employee* (EPE) dan *Human Capital Return of Investment* (HC ROI).

Pada tahun 2016, realisasi atas jumlah pegawai BNI adalah sebesar 28.184 (tidak termasuk 195 *trainee*) atau 101,2% dari target yang telah ditentukan. Realisasi jumlah pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan target dikarenakan terdapat beberapa strategi yang bertujuan mendukung kebijakan pemerintah, pembukaan outlet-outlet baru, dan mulai dioptimalkannya outlet-outlet BNI sebagai *point of sales*.

Penambahan pegawai sedikit di atas rencana tersebut terbukti efektif dalam mendukung pencapaian bisnis yang diindikasikan melalui pencapaian target produktivitas pegawai berdasarkan indikator *Earning per Employee* (EPE) yang mencapai 100,53% dari target yang telah ditetapkan (Rp.380 juta/pegawai dari target Rp. 378 juta/pegawai). Dengan pencapaian target tersebut, tingkat produktivitas pegawai BNI dibandingkan bank pesaing dapat dipertahankan pada peringkat ketiga.

Pengelolaan Kinerja yang Mendukung Pencapaian Tujuan Perusahaan

Pengelolaan kinerja pegawai merupakan aspek yang menjadi fokus dalam pencapaian target Perseroan. *Performance Management System* yang dilaksanakan oleh Perseroan terdiri dari tiga aspek yang terdiri dari *goal setting, performance driving* dan *performance evaluation*. Ketiga aspek tersebut dipantau secara berkala melalui dua siklus yaitu *short cycle* yang dipantau setiap 3 bulan/kuartal dan *full cycle* yang dipantau setiap tahun.

Tiga Tahapan Performance Management

- Tahap penyusunan target (*goal setting*) dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa target bagi setiap pegawai telah selaras dengan target unit dan target Bank secara keseluruhan;
- Tahap *Performance Driving* bertujuan untuk mendorong dan memotivasi pegawai dalam pencapaian kinerja yang dilakukan secara terus menerus oleh pegawai dan atasannya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- Tahap *Performance Evaluation* merupakan proses penilaian atas pencapaian kinerja sesuai dengan *short cycle* (3 bulan) dan *full cycle* (1 tahun).

Ketiga tahapan ini merupakan bagian dari dua siklus yakni siklus jangka pendek yang dilaksanakan setiap tiga bulan dan siklus jangka panjang yang dilaksanakan setiap tahun. Selama tahun 2016, Bank melakukan penyempurnaan pada desain *Key Performance Indicator* (KPI) yang bertujuan untuk menyelaraskan KPI mulai dari tingkat perusahaan, unit hingga individu sebagai entitas terkecil dalam organisasi.

Seluruh proses pengelolaan kinerja yang diterapkan oleh BNI ini telah menggunakan sistem *online* yang dapat diakses oleh setiap pegawai. Pada tahun ini, Ban juga telah melakukan sejumlah penyempurnaan pada sistem dan infrastruktur *IT* dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses secara keseluruhan.

Hasil penilaian kinerja pegawai akan berdampak pada rencana pengembangan kompetensi, karir dan pemberian *reward & recognition*. Pada tahun 2016, Perseroan mulai memperkenalkan pemberian Tunjangan Tidak Tetap kepada pegawai yang mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Manajemen Kompetensi yang Menunjang Strategi Perusahaan

Di tahun 2016, Perseroan telah menyempurnakan model kompetensi untuk setiap jabatan yang tersedia. Penyempurnaan ini merupakan bagian dari manajemen kompetensi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dalam menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (*right man in the right place*).

Secara berkala, BNI juga melaksanakan asesmen untuk mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh segenap pegawai. Dengan dilakukannya proses asesmen ini, maka pegawai dapat memahami kelebihan dan area pengembangan sehingga pegawai dapat menunjukkan kinerjanya secara optimal. Tujuan dari pelaksanaan asesmen untuk mengetahui kompetensi pegawai pada posisinya saat ini yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan *talent manegement*. Kegiatan asesmen diselenggarakan oleh BNI melalui kerja sama dengan pihak ketiga, internal BNI dan penilaian atasan.

Membangun Perilaku Pegawai sebagai Bagian dari Internalisasi Budaya Perusahaan

BNI telah menyelenggarakan survey kepada seluruh pegawai mengenai budaya kerja dan engagement pegawai. Culture Value Assessment (CVA) yang merupakan survey analisa yang mengukur aspek budaya organisasi. Secara umum, hasil CVA yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh aspek budaya organisasi. Aspek etika bisnis yang menjadi perhatian pada tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam menanamkan budaya risiko dan etika bisnis yang berbasis pada Prinsip 46 melalui sosialiasi dan pembinaan oleh pimpinan unit kepada setiap pegawai dalam berbagai kesempatan seperti pada pelaksanaan hari mutu. Hasil CVA juga menunjukkan bahwa aspek yang memiliki peningkatan tertinggi terdapat pada aspek Profesionalisme yang ditandai dengan turunnya nilai pada aspek Silo Mentality. Pegawai merasa bahwa diri mereka merupakan bagian dari Perseroan, bukan hanya bagian dari unit kerjanya. Dengan demikian, keterbukaan dan kualitas kerja sama pegawai, baik dengan sesama rekan unit maupun dengan lintas unit bisnis menjadi semakin meningkat.

Selain CVA, Bank juga melaksanakan *engagement survey* pegawai secara rutin. *Engagement survey* ini dilaksanakan karena BNI percaya bahwa pegawai yang *highly engage* adalah pegawai yang secara rasional dan emosional terkoneksi dan termotivasi untuk loyal dan menunjukkan kontribusi ebih bagi Perseroan. Hasil *engagement survey* menjadi salah satu masukan bagi Perseroan dalam penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan *engagement* pegawai. Hasil *engagement survey* yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan engagement yang signifikan dari tahun sebelumnya. Angka menunjukkan skor EES BNI meningkat dari 46,88% di tahun 2014 menjadi 55,22% di tahun 2016. Perseroan meyakini bahwa peningkatan ini merupakan dampak dari penerapan berbagai inisiatif baru di bidang pengelolaan sumber daya manusia BNI. Untuk selanjutnya, Perseroan akan tetap berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan engagement pegawai terutama pegawai Generasi Y sebagai mayoritas pegawai di BNI yang mencapai 56,98% dari total pegawai.

Dalam rangka meningkatkan engagement dan daya inovasi segenap insan BNI, secara periodik Perseroan menyelenggarakan BNI Business Innovation Award (BINNOVA) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk berkontribusi. Melalui program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Program unggulan yang dihasilkan melalui kegiatan ini selanjutnya berkesempatan untuk diterapkan secara nyata dalam kegiatan bisnis Perseroan. Adapun program yang telah terimplementasi hingga saat ini sejumlah 10 inovasi yang memenangkan BINNOVA. Pada tahun 2016, perusahaan kembali menyelenggarakan kegiatan BINNOVA yang disambut dengan antusiasme oleh segenap pegawai.

Melalui program BNI Bussiness Innovation Award 2016 (BINNOVA), perusahaan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Antusiasme pegawai atas program ini dinilai cukup tinggi yang diindikasikan dapat terlihat dengan dari peningkatan jumlah proposal yang diterima dari 172 proposal di tahun laluu2015 menjadi 235 proposal pada tahun 2016. Di tahun ini 2016 terdapat dua tema besar yang ditetapkan oleh panitia, yaitu Cost Innovation dan Product Innovation.

Menyelaraskan Talent Management dengan Kebutuhan Mencetak Pemimpin Masa Depan

Talent Management BNI merupakan proses dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai agar dapat berprestasi dan berkinerja unggul baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan Visi, Misi serta Budaya Kerja BNI. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan *talent* adalah suatu proses yang dilaksanakan secara konsisten dan berlangsung dalam jangka panjang. Ruang lingkup *Talent Management* BNI dimulai dari saat masuknya pegawai yang terdiri dari tahap *Talent Acquisition, Talent Classification, Talent Development, Talent Mobility* dan *Talent Retention*.

Komponen dalam penyusunan talent management terdiri atas kompetensi dan kinerja pegawai. Aspek kompetensi dinilai melalui mekanisme asesmen untuk mengukur tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan asesmen untuk seluruh jenjang jabatan dengan realisasi sebanyak 11.090 pegawai atau 39.4%. Angka ini disebabkan pegawai pada jenjang asisten yang memiliki proporsi 54.8% dari keseluruhan pegawai baru akan direncanakan untuk melakukan asesmen pada tahun 2017. Hasil asesmen ini selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan talent management. Seluruh tahap pengelolaan *talent* melibatkan peranan *Talent Committee* untuk memastikan agar proses *Talent Management* dapat berjalan dengan objektif dan terstandarisasi, kewenangan yang dimiliki oleh T*alent Committee* adalah menetapkan *talent classification*, menyusun dan mendorong pelaksanaan *talent mobility plan*, menyusun *talent development plan* dan mendorong realisasinya, dan melaksanakan mutasi/ perubahan posisi pegawai posisi pegawai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penyusunan talent management untuk segenap pegawai mulai dari jenjang AMGR hingga Senior Vice President (SVP) sebanyak 10.040 atau 87.8% dari total pegawai di jenjang jabatan tersebut. Pada tahun 2017, perseroan bermaksud untuk melanjutkan penyusunan talent management pada jenjang jabatan AMGR – SVP dan memulai penyusunan talent management pada jenjang asisten.

Talent Acquisition

Untuk mendapatkan SDM yang unggul, tentunya diperlukan program rekrutmen dan pemillihan *sourcing channel* yang efektif. Selama tahun 2016, BNI telah melakukan rekrutmen sebanyak 2.354 pegawai. Sejalan dengan fokus bisnis Perseroan untuk meningkatkan ekspansi dan mempersiapkan BNI dalam memasuki era digital, maka di tahun 2016 rekrutmen pegawai diutamakan untuk memenuhi posisi-posisi yang terkait dengan inisiatif strategis tersebut. Mekanisme pemenuhan pegawai di 2016 dilakukan melalui proses rekrutmen eksternal, pengembangan karir pegawai internal, *outsourcing* dan magang. Pelaksanaan rekrutmen ini tidak hanya bertujuan untuk penambahan pegawai baru, namun juga untuk menggantikan pegawai yang keluar sehingga kegiatan bisnis tetap dapat berjalan dengan optimal.

Proporsi jumlah rekrutmen pegawai terbesar adalah pada posisi asisten sebanyak 2.308 atau 98% dari keseluruhan pegawai. Rekrutmen pegawai pada posisi asisten sebagian besar ditunjukkan untuk mengisi posisi-posisi setingkat asisten pada Kantor Cabang dan sentra sesuai dengan strategi optimalisasi bisnis outlet yang mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Selain itu, distribusi pegawai setingkat asisten tersebut juga diarahkan untuk mengisi posisi asisten *collection* kartu kredit dan kredit konsumer sebagai upaya BNI dalam perbaikan kualitas *Non Performing Loan* (NPL). Untuk melanjutkan inisiasi agen laku pandai (*branchless banking*) dalam rangka implementasi Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka proporsi rekrutmen pegawai setingkat asisten juga diarahkan untuk mengisi posisi *Assistant Branchless Banking* di seluruh Indonesia.

Selain itu, pengisian kebutuhan pegawai juga dilakukan melalui mekanisme optimalisasi karir pegawai internal. Mekanisme yang telah dijalankan pada tahun 2016 antara lain melalui kebijakan pengembangan karir pegawai dasar menjadi asisten serta pengembangan karir asisten menjadi Assistant Manager (AMGR) . Rekrutmen pegawai setingkat *assistant manager/officer* melalui program *Officer Development Program* (ODP) yang merupakan program reguler untuk menyiapkan kandidat pemimpin BNI di masa datang, tetap dilaksanakan pada tahun ini dengan merekrut sebanyak 178 calon pegawai. Penempatan pegawai yang direkrut melalui program ini difokuskan pada posisi yang merupakan *core* bisnis BNI di bidang perkreditan dan di bidang Teknologi Informasi.

Untuk posisi-posisi yang pemenuhannya masih belum dapat dipenuhi dari pegawai internal yang tersedia, BNI melakukan rekrutmen *experienced hire* melalui mekanisme yang selektif.

Pada tahun 2016, tingkat *turnover* pegawai tercatat sebanyak 764 pegawai atau sebesar 2,7% dari keseluruhan pegawai BNI. Persentase penurunan terbesar dari *turnover* ini berasal dari jenjang jabatan Asisten. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015, BNI mengimplementasikan kebijakan perpanjangan usia pensiun bagi pegawai setingkat Asisten yang dampaknya mulai dirasakan pada tahun 2016. Kebijakan ini merupakan upaya BNI untuk mengakomodasi aspirasi pegawai. Selain itu, untuk posisi AMGR, jumlah *turnover* juga mengalami penurunan. Perseroan memprediksi bahwa hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya *engagement* pegawai sebagai hasil dari upaya BNI dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai yang mengedepankan kualitas hubungan yang sinergis antara pegawai dan Perseroan.

Sistem Reward and Recognition yang Mampu Meningkatkan Engagement Pegawai

Strategi pengelolaan remunerasi yang diterapkan pada tahun 2016 berpedoman pada konsep *FoR MoRe Benefit WE GO* dengan penjelasan sebagai berikut:

FoR: Foundational Reward
Foundational reward merupakan penghasilan tetap yang diterima oleh setiap pegawai berdasarkan jabatan dan atribut personalnya.

MoRe: Motivational Reward
Merupakan komponen *reward* yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai agar menampilkan kinerja terbaik

Benefit: Benefit
Komponen *Benefit* merupakan komponen *reward* yang diberikan sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan bagi pegawai.

WE: Working Environment
Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, hal ini dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa lingkungan fisik, sosial dan psikologis memberikan dampak bagi kinerja pegawai.

GO: Growth Opportunity
Perseroan memberikan kesempatan untuk setiap pegawai agar dapat mengembangkan potensi dan karirnya dengan optimal.

Realisasi penyusunan dan penerapan kebijakan remunerasi yang berbasis pada konsep FoR MoRe Benefit WE GO dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 yang dimulai dengan penyelenggaraan program Flexible Benefit dan Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP) sebagai bagian dari konsep "benefit". Pada tahun 2017, perseroan berkomitmen untuk tetap melaksanakan inisiatif ini sesuai dengan konsep FoR MoRe Benefit WE GO.

Flexible Benefit
Pada tahun 2016, BNI meluncurkan program *flexible benefit* sebagai salah satu program pemberian benefit yang sejalan dengan konsep *For More Benefit We Go*. BNI menyadari bahwa setiap pegawai memiliki kebutuhan yang beragam, sesuai dengan fase kehidupannya saat ini. Sebagai gambaran, populasi pegawai di BNI saat ini sebagian besar terdiri dari Generasi Y yang diikuti oleh Generasi X dan Generasi *Baby Boomer*. Perbedaan generasi ini tentunya juga berpengaruh terhadap aspirasi kebutuhan benefit yang ingin diperoleh.

Sebagai contoh, pegawai yang masih berusia muda menginginkan adanya *benefit* berupa rekreasi atau liburan. Sementara itu, pegawai yang sudah memiliki anak menginginkan adanya *benefit* dalam hal pendidikan anak. Perbedaan aspirasi ini, tidak dapat diakomodasi oleh skema *benefit* sebelumnya yang menganut paham *"One Size Fit for All"*, dimana setiap pegawai diberikan benefit yang sama sesuai dengan jabatannya. Sehingga sebagai penyempurnaan atas skema benefit "*One Size Fit for All*" yang selama ini berlaku, maka *Flexible Benefit* menawarkan fleksibilitas bagi setiap pegawai untuk memiliki sendiri *benefit* yang sesuai dengan kebutuhanya.

Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP)
Dana Kesehatan Masa Pensiun merupakan program yang bertujuan untuk membantu pegawai mempersiapkan kesehatan masa pensiun. Perseroan menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan utama manusia sepanjang hidupnya, termasuk setelah pegawai memasuki masa pensiun. Semasa aktif, setiap pegawai mendapatkan fasilitas kesehatan dari Perseroan. Program DKMP ini merupakan bentuk kewajiban moral Perseroan untuk memastikan bahwa pegawai tetap mendapatkan fasilitas kesehatan setelah pensiun dengan cara mempersiapkannya sejak saat ini atau saat masih aktif sebagai pegawai.

Meningkatkan Kualitas SDM melalui Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan

Dalam rangka menjawab tantangan persaingan industri perbankan yang semakin ketat, BNI memahami bahwa kunci sukses yang paling utama adalah aspek *human capital*. Sehingga memiliki *human capital* dengan kompetensi terbaik dan handal, serta bagaimana pengembangannya secara berkesinambungan menjadi awal transformasi BNI *Organizational Learning* menjadi BNI *Corporate University*. BNI *Corporate University* lahir dengan moto *Learn, Grow, Lead* atau Belajar, Bekerja, Berkarir. Memiliki visi untuk "Menjadi pusat pengembangan profesional jasa keuangan kelas dunia" (*to become a world class financial services professional development center*).

Misi BNI Corporate University antara lain:
1. Menciptakan sistem pengembangan profesional di bidang jasa keuangan kelas dunia, pada bidang perbankan internasional, bidang kredit, bidang manajemen risiko dan bidang operasional;
2. Mengakselerasi persiapan kaderisasi pemimpin bisnis BNI untuk menjawab kebutuhan bisnis di masa depan;
3. Membangun aliansi dengan mitra strategis dan potensial (universitas, pusat pengembangan kepemimpinan, dan pusat kajian bisnis, asosiasi, pelaku industri lainnya);
4. Membangun solusi pembelajaran jasa keuangan kelas dunia yang aplikatif dan berdampak bisnis;
5. Membangun pusat asesmen yang handal dalam mendukung proses pengembangan.

BNI *Corporate University* memberikan setiap pegawainya kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif, serta kesempatan untuk tumbuh melalui kinerja yang baik dan memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kinerja bisnis Perseroan dan memiliki fokus pembelajaran untuk mencetak insan BNI yang berkarakter "Prinsip 46", yaitu Profesionalisme, Integritas, Orientasi Pelanggan, dan Perbaikan Tiada Henti.

Realisasi Program Pembelajaran tahun 2016

Selama tahun 2016, BNI telah melatih sebanyak 99,76% pegawainya atau 28.311 pegawai (termasuk 767 pegawai yang telah non aktif), dengan jumlah partisipasi pelatihan sebesar 179.914 atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 6,34 kali.

Jumlah Karyawan	Jumlah Jam Training	Training Hours per Employee	Jumlah Partisipan Training	Jumlah Karyawan yang Terlatih
28.378	1.740.788	61,3	179.914	28.311

Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2016 adalah sebesar Rp214.996,57 juta atau sebesar 86,34% dari anggaran setahun, meningkat 3,75% dibanding 2015. Indikator kenaikan didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebesar 179.914 peserta atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 6,34 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2016 mencapai Rp7,59 juta per pegawai.

Uraian	2016 (dalam Juta Rp)	2015 (dalam Juta Rp)	Peningkatan (dalam Juta Rp)	Peningkatan (dalam %)
Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan	214.996.57	207.229.04	7.767.53	3,75

Realisasi Strategi Manajemen Modal Manusia 2016

Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan terbesar adalah Beban Pelatihan Calon Pegawai Baru yang mencapai sebesar Rp47.845,56 juta (kontribusi terhadap total biaya pendidikan dan pelatihan sebesar 22,25%), jumlah tersebut merupakan realisasi atas program pelatihan *Officer Development Program (ODP)* dan *Assistant Development Program (ADP)*. Angka realisasi tersebut naik sebesar 17,91% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi terbesar kedua adalah Beban Pelatihan Perkreditan sebesar Rp47.253,64 juta (kontribusi terhadap total biaya pendidikan dan pelatihan sebesar 21,98%).

Keseriusan BNI dalam meningkatkan kapabilitas pegawai di bidang perkreditan ditunjukkan dengan konsistensi pemberian program sertifikasi, *Training for Trainer* (TFT), disertai penyediaan *e-Learning Mandatory Core Credit Skill* sepanjang tahun 2016. Program sertifikasi profesi juga diberikan BNI sesuai kebutuhan bisnis dan pegawai, dengan tambahan tutorial program yang diselenggarakan baik *in-class* maupun *e-learning*. Program sertifikasi yang diikuti antara lain *Associate Wealth Management Certification, Certificate for Specialists in Demand Guarantees*, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Sertifikasi Manajemen Risiko, *Certificate in International Trade and Finance*, *Certificate Documentary Credit Specialists*, Sertifikasi AAJI, serta Sertifikasi Kepatuhan Perbankan.

Sinergi BNI Group juga ditunjukkan dalam koordinasi penyelenggaraan pembelajaran dengan Entitas Anak, antara lain penyelenggaraan program *Four Disciplines of Execution* (4DX), Manajemen Risiko Terintegrasi, serta *Credit Skill Enhancement*, Garansi Bank dan *Trade Finance*.

Manajemen BNI juga memberikan apresiasi berupa *employee recognition program* yang menginjak tahun kedua, yaitu BNI *Development Program*, yang tidak hanya memberikan kesempatan pegawai untuk dapat melanjutkan pasca sarjana di luar negeri, namun juga memberikan kesempatan pegawai untuk magang di Kantor Cabang BNI di luar negeri.

Di tahun 2017, BNV akan lebih berperan dalam meningkatkan e*ngagement* dan produktivitas pegawai dalam berkontribusi pada pencapaian target bisnis BNI, melalui desain pembelajaran yang menggapai segenap pegawai, dengan prioritas program pembelajaran di bidang kredit, dana dan *digital banking* melalui implementasi *best practice Corporate University.*

Realisasi Pembelajaran 2016 berdasarkan model pembelajaran dan pengembangan 70:20:10

Metode Pengembangan		∑ Kelas	∑ Partisipasi
Experiential Learning "70"	*On the Job Training (OJT)*	72	2.460
	In Service Training (IST)	72	2.460
	Short Overseas Assignment	2	26
Social Learning "20"	*Coaching*	58	1.639
	Mentoring	165	5.018
	Role Play	193	6.000
Formal Learning "10"	*In-Class Learning*	1.130	41.747
	e-Learning	43	136.021
	Workshop/Seminar	119	935
	Sertifikasi	64	1.200
	Konferensi/Kongres	5	11

Information and Communication Technology – Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Teknologi

Teknologi informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan industri saat ini. Penerapan kebijakan serta sistem pengelolaan sumber daya manusia telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Fitur dalam *platform Human Capital Management System* (HCMS) sebagai sistem pengelolaan sumber daya manusia juga disempurnakan secara berkala berdasarkan evaluasi dan masukan atas sistem yang telah berjalan. Pada tahun 2016 ini telah dilakukan pengembangan sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan menambahkan sejumlah modul untuk memudahkan proses pengisian dan pemantauan kinerja. Selain itu, fokus penyempurnaan sistem juga ditekankan pada peningkatan kapabilitas infrastruktur IT di seluruh BNI. Implementasi atas sejumlah program seperti *Performance Management, Flexible Benefit*, DKMP, dan *Individual Development Plan* telah dilaksanakan dengan menggunakan *platform* HCMS.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Informasi, Komunikasi dan Teknologi

Perseroan senantiasa berupaya untuk mendorong terciptanya Hubungan Industrial yang berkualitas dan harmonis dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari pegawai. Melalui forum kemitraan dengan Serikat Pekerja, pegawai dapat menyampaikan aspirasi kepada perusahaan sehingga komunikasi dua arah antara perusahaan dan pegawai tetap terjaga. Selama tahun 2016 telah dilakukan 21 kali pertemuan dengan Serikat Pekerja yang membahas sejumlah agenda antara lain mengenai ketentuan administratif kepegawaian, hak, *benefit* dan fasilitas pegawai termasuk sosialisasi atas kebijakan yang telah disepakati bersama. Mekanisme hubungan industrial yang diterapkan merupakan upaya yang berkelanjutan dari komitmen Perseroan dalam menjaga keselarasan hubungan antara Perseroan dan pegawai.

Selain forum kemitraan, Perseroan juga menyediakan sarana bagi pegawai yang memiliki keluhan kepegawaian agar dapat menyampaikan permasalahannya dan memperoleh jawaban atas situasi yang dihadapi. Perseroan menyediakan layanan Info HCT yang membantu menangani berbagai permasalahan terkait sumber daya manusia melalui media komunikasi email, telepon, *whatsapp group*, BBM *Blast* dan SMS *Blast*.

Human Capital Transformation

Di tahun 2016, Perseroan tetap meneruskan untuk menjalankan inisiatif *Roadmap* Transformasi Penglolaan Sumber Daya Manusia menuju *World Class Human Capital Practices* 2018. *Roadmap* ini merupakan program jangka panjang yang mulai dilaksankan pada tahun 2016 dan bertujuan untuk menjadikan Divisi Manajemen Modal Manusia mampu mengintegrasikan strategi bisnis dengan pengelolaan sumber daya manusia terhadap seluruh aspek dalam organisasi yang berfokus pada pengelolaan modal insani sebagai faktor utama. Pengelolaan bisnis yang memperhatikan aspek sumber daya manusia di dalamnya untuk memiliki rasa keterlibatan (*engagement*) atas perusahaan. Dengan demikian, maka akan tercipta hubungan antara organisasi dan pegawai sebagai hubungan yang saling menguatkan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Secara garis besar, strategi Tranformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia BNI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan fungsi penyusunan strategi dan kebijakan sumber daya manusia;
2. Fokus pada aktivitas "*Business Partnering*" yang lebih menyeluruh bagi segenap unit bisnis;
3. Implementasi *shared services* atas pengelolaan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterlibatan *line manager* dalam mengelola sumber daya manusia pada unitnya.

Penghargaan

Sepanjang 2016, BNI telah menerima sejumlah penghargaan terkait pengembangan sumber daya manusia. Penghargaaan-penghargaan yang telah diraih antara lain sebagai berikut.

Penghargaan INDONESIA HUMAN CAPITAL AWARD- II- 2016 oleh Majalah Economic Review

No	Penghargaan	Kategori
1	*The Best Visionary HC Director – Bp.Suprajarto*	*HC Inner Potential*
2	*1st.The Best Recruitment Strategy and HR Planning*	*Recruitment Strategy*
3	*2nd. The Best Human Capital BUMN – Public Company*	*BUMN* – Tbk
4	*2nd.The Best Industrial Relations*	*Industrial Relations*
5	*3rd. The Best HC Business Impact*	*HC Business Impact*
6	*3rd. The Best Human Capital Strategy*	*HC Strategy*
7	*The Big 5 - Learning Development*	*Learning Development*
8	*The Big 5 - Performance Management*	*Performance Develop*
9	*The Big 5 - HR Technology*	*HR Technology*
10	*The Big 5 - Employee Engagement*	*Employee Engagement*
11	*The Big 5 - Organization Strategy*	*Organization Strategy*
12	*3rd. The Best Human Capital - Of The Year 2016*	Juara Umum

Inisiatif Strategis Tahun 2017

Sejalan dengan strategi bisnis BNI untuk melakukan pertumbuhan agresif, maka fokus pengelolaan sumber daya manusia di BNI masih sejalan dengan inisiatif yang telah dimulai pada tahun 2016 yaitu pada peningkatan produktivitas dan keterikatan (*engagement*) pegawai sesuai dengan *Human Capital Architecture* BNI.

Seiring dengan strategi Perseroan yang semakin mengarah ke digitalisasi aktivitas bisnis dan layanan perbankan, maka penentuan komposisi pegawai juga menyesuaikan dengan strategi bisnis Perseroan. Posisi yang terdapat pada unit bisnis dan IT akan menjadi fokus utama dalam penentuan komposisi serta ketersediaan pegawai pada posisi-posisi tersebut.

Sejumlah program kerja yang disusun untuk tahun 2017 antara lain:
1. Penerapan kebijakan *performance management* yang selaras antara kinerja BNI, unit dan individu pegawai
2. Pengembangan *Innovation Center* sebagai bagian dari manajemen pengetahuan berbasis digital
3. Pelaksanaan *talent mobility* dan *talent development plan* sebagaimana yang telah disusun dalam *talent management* tahun 2016
4. Penyusunan kebijakan *Reward & Remuneration* sesuai dengan konsep *FoR MoRe Benefit* WE GO
5. Pelaksanaan strategi *talent acquisition* melalui program *Management Trainee* (MT) dan optimalisasi kerja sama dengan pihak ketiga melalui Pola Kontrak, Tenaga Alih Daya dan Program Kemitraan dan lainnya;
6. Pemberian kesempatan pelatihan dan bimbingan kerja bagi angkatan kerja yang belum berpengalaman (lulusan SMA & Perguruan Tinggi) melalui Program BINA BNI

Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di BNI dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Modal Manusia yang bertanggung jawab atas strategi dan pengelolaan SDM dan BNI *Corporate University* yang bertanggung jawab atas fungsi pembelajaran di organisasi. Kedua divisi ini dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada SEVP *Human Capital*.

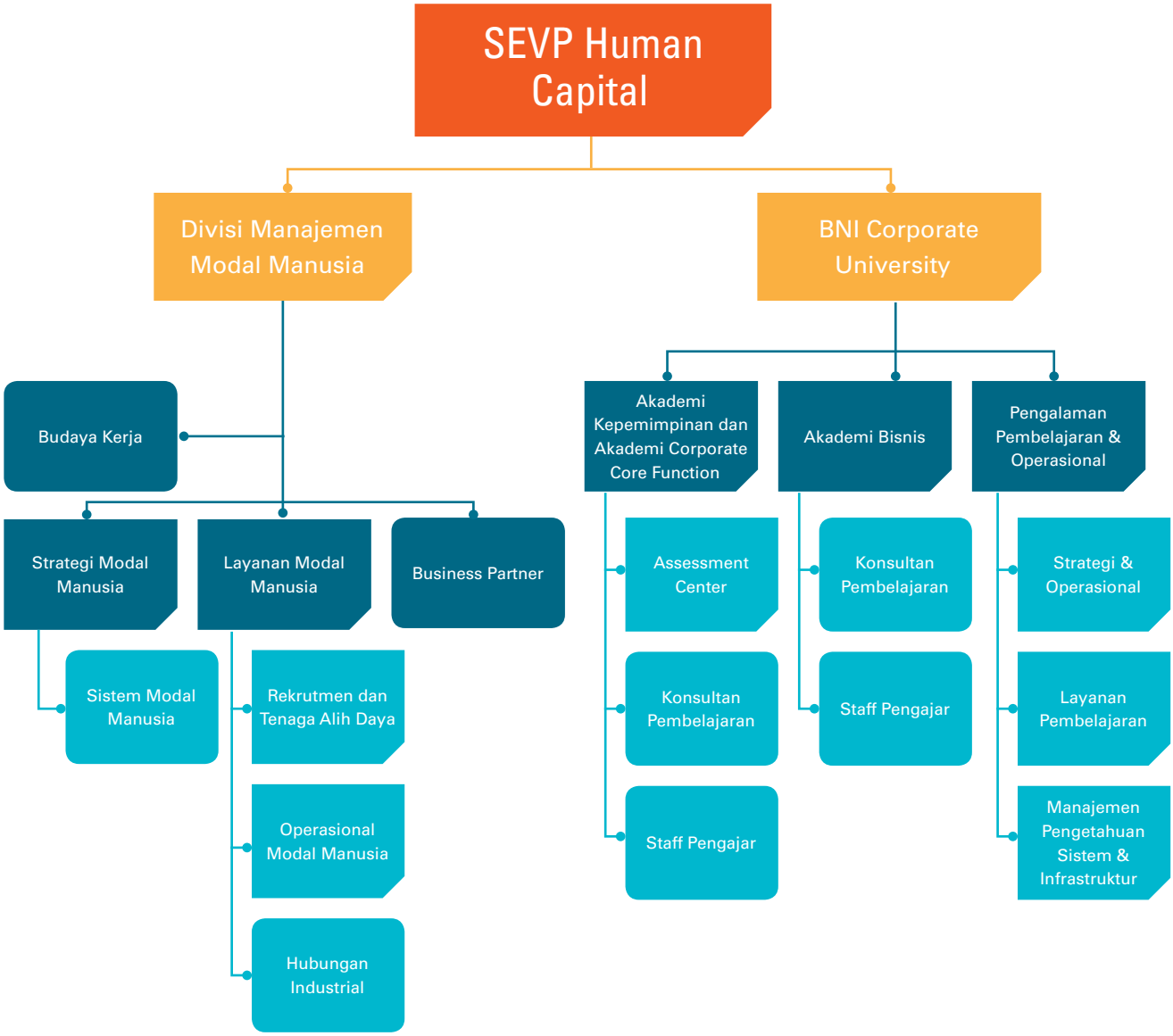

Adapun pejabat/pemimpin yang bertindak sebagai pengelola Sumber Daya Manusia di BNI adalah sebagai berikut:

PROFIL RINGKAS SEVP HUMAN CAPITAL

Alex Denni yang meraih gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari IPB menjabat sebagai SEVP *Human Capital* sejak tanggal 1 Juni 2016, selaku SEVP Human Capital, beliau membawahi Divisi Manajemen Modal Manusia dan BNI *Corporate University*.

PROFIL RINGKAS PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA

Ayu Sari Wulandari menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia sejak tanggal 22 Januari 2016.

PROFIL RINGKAS PEMIMPIN BNI CORPORATE UNIVERSITY

BNI Corporate University dipimpin oleh Putu Bagus Kresna selaku Chief of Learning Officer sejak tanggal 2 Desember 2013.

Profil Pegawai

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING JENJANG JABATAN

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
≥ VP	167	42	209	139	40	179	111	34	145	108	32	140	91	30	121
AVP	680	254	934	677	233	910	693	216	909	639	186	825	629	177	806
MGR	1.684	1.095	2.779	1.594	1.032	2.626	1.500	936	2.436	1.486	839	2.325	1.442	758	2.200
AMGR	3.989	3.784	7.773	4.031	3.754	7.785	4.143	3.848	7.991	4.243	3.919	8.162	3.769	3.320	7.089
ASST	5.834	9.620	15.454	5.340	8.957	14.297	5.277	8.668	13.945	5.120	8.360	13.480	4.982	8.274	13.256
PGD	1.035	-	1.035	1.078	-	1.078	1.110	-	1.110	1.168	-	1.168	1.388	1	1.389
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	2016	Komposisi terhadap total pegawai	2015	Komposisi terhadap total pegawai	Pertumbuhan
≥ VP	209	0.74%	179	0,7%	16,8%
AVP	934	3.31%	910	3,4%	2,6%
MGR	2.779	9.86%	2.626	9,8%	5,8%
AMGR	7.773	27.58%	7.785	29%	(0,1%)
ASST	15.454	54.83%	14.297	53,2%	8,1%
PGD	1.035	3.67%	1.078	4,0%	(4%)
TOTAL	28.184	100.00%	26.875	100,0%	4,9%

Komposisi pegawai BNI tahun 2016 dilihat dari sisi jenjang jabatan di dominasi oleh pegawai dengan kelas jabatan Asisten (ASST) yaitu sebesar 54,83% atau sebanyak 15.454 pegawai, jumlah tersebut meningkat sebesar 8,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 14.297 pegawai. Sedangkan kontributor terbesar kedua ditempati oleh jenjang jabatan *Asisten Manager* (AMGR) dengan jumlah sebesar 27,58%, yang jumlahnya menurun sebesar 0,51%.

Sejak tahun 2012, tren di BNI menunjukkan bahwa posisi tiga jenjang jabatan teratas (*Vice President, Asisstant Vice President*, dan *Manager*) lebih banyak dijabat oleh pegawai pria dibandingkan wanita. Sedangkan untuk posisi jenjang jabatan *Asisstant* lebih dari 60% dijabat oleh wanita, namun untuk jenjang jabatan *Assistant Manager* posisi dijabat oleh jenis kelamin wanita dan pria secara hampir berimbang.

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING–MASING JENJANG PENDIDIKAN

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Strata 3	3	3	6	3	3	6	4	1	5	4	1	5	5	1	6
Strata 2	1.497	920	2.417	1.509	867	2.376	1.514	858	2.372	1.514	858	2.372	1.546	823	2.369
Strata 1	9.793	11.559	21.352	9.437	11.314	20.751	9.241	10.945	20.186	9.241	10.945	20.186	8.696	9.701	18.397
Akademi	1.190	2.286	3.476	1.140	1.796	2.936	1.233	1.844	3.077	1.233	1.844	3.077	1.102	1.946	3.048
SD-SMA	905	27	933	770	36	806	842	54	896	842	54	896	952	89	1041
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2016	Komposisi terhadap total pegawai	2015	Komposisi terhadap total pegawai	Pertumbuhan
Strata 3	6	0.02%	6	0,02%	0,00%
Strata 2	2.417	8.58%	2.376	8,84%	1,73%
Strata 1	21.352	75.76%	20.751	77,21%	2,90%
Akademi	3.476	12.33%	2.936	10,92%	18,39%
SD-SMA	933	3.31%	806	3,00%	15,76%
TOTAL	28.184	100.00%	26.875	100,00%	4,87%

Pada 2016, Pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 1 masih mendominasi komposisi pegawai BNI yaitu sebesar 75,76% dengan jumlah sebanyak 21.352 pegawai, jumlah tersebut meningkat sebesar 2,90% dibandingkan 2015 yang berjumlah 20.751 pegawai. Selanjutnya, sebesar 12,33% komposisi pegawai merupakan lulusan Akademi dengan jumlah sebanyak 3.476 pegawai, jumlah pegawai pada jenjang ini mengalami peningkatan paling besar diantara pegawai dengan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 18,39% dibandingkan 2015.

Jika melihat tren komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, sejak tahun 2012 hingga 2016 terlihat bahwa pegawai dengan jenjang pendidikan SD-SMA 90% nya didominasi oleh pria, sedangkan pegawai dengan jenjang pendidikan Akademi rata-rata 60%nya merupakan wanita. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Strata Dua komposisi pegawai pria lebih besar dibandingkan pegawai wanita yaitu mencapai di atas 60%.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Tetap	11.775	12.495	24.270	11.647	12.173	23.820	11.500	11.689	23.189	11.352	11.097	22.449	10.273	8.908	19.181
Kontrak	1.614	2.300	3.914	1.212	1.843	3.055	1.334	2.013	3.347	1.412	2.239	3.651	2.028	3.652	5.680
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2016	Komposisi terhadap total pegawai	2015	Komposisi terhadap total pegawai	Pertumbuhan
Tetap	24.270	86,11%	23.820	88,63%	4,12%
Kontrak	3.914	13,89%	3.055	11,37%	5,56%
TOTAL	28.184	100,00%	26.875	100,00%	4,87%

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, di 2016 komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian masih didominasi oleh pegawai Tetap yaitu sebesar 86,11% sedangkan jumlah pegawai kontrak tercatat sebesar 13,89%. Jumlah pegawai Tetap meningkat sebesar 4,12% dari 23.820 pegawai di 2015 menjadi sebanyak 24.270 pegawai di 2016.

Tren empat tahun ke belakang (2012-2016), menunjukkan bahwa jumlah pegawai Tetap yang dipekerjakan oleh BNI antara jenis kelamin wania dan pria hampir seimbang, menandakan bahwa BNI dalam menerima pegawai tidak membedakan *gender* dan menjunjung adanya kesetaraan. Sedangkan untuk pegawai dengan status Kontrak, jumlah pegawai dengan jenis kelamin wanita sedikit lebih banyak dibandingkan pegawai berjenis kelamin pria.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG USIA

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
>50 Tahun	578	201	779	598	205	803	783	266	1049	841	277	1.118	703	205	908
>45-50 Tahun	1.931	1.108	3.039	1.643	841	2.484	1.628	829	2.457	1.224	536	1.760	770	297	1.067
>40-45 Tahun	1.512	1.287	2.799	1.634	1.420	3.054	1.694	1.459	3.153	1.944	1.538	3.482	2.294	1.483	3.777
>35-40 Tahun	2.640	2.462	5.102	2.760	2.320	5.080	2.805	2.379	5.184	2.599	2.069	4.668	1.675	1.418	3.093
>30-35 Tahun	1.449	1.509	2.958	1.281	1.346	2.627	1.325	1.436	2.761	1.581	1.810	3.391	2.626	2.711	5.337
>25-30 Tahun	3.897	5.716	9.613	3.785	5.570	9.355	3.805	5.727	9.532	3.455	4.943	8.398	2.140	2.733	4.873
≤ 25 Tahun	1.382	2.512	3.894	1.158	2.314	3.472	794	1.606	2.400	1.120	2.163	3.283	2.093	3.713	5.806
TOTAL			28.184			26.875			26.536			26.100			24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	2016	Komposisi terhadap total pegawai	2015	Komposisi terhadap total pegawai	Pertumbuhan
>50 Tahun	779	2.76%	979	3,64%	(20,43%)
>45-50 Tahun	3.039	10.78%	3.079	11,46%	(1,30%)
>40-45 Tahun	2.799	9.93%	2.860	10,64%	(2,13%)
>35-40 Tahun	5.102	18.10%	5.262	19,58%	(3,04%)
>30-35 Tahun	2.958	10.50%	3.000	11,16%	(1,40%)
>25-30 Tahun	9.613	34.11%	9.625	35,81%	(0,12%)
≤ 25 Tahun	3.894	13.82%	2.070	7,70%	88,12%
TOTAL	28.184	100.00%	26.875	100,00%	4,87%

Pada 2016, terdapat pergeseran komposisi jumlah pegawai BNI jika dilihat berdasarkan jenjang usia, kenaikan signifikan terjadi pada jumlah pegawai dengan jenjang usia di bawah 25 tahun. Jumlah pegawai pada jenjang usia di bawah 25 tahun meningkat sebesar 88,12% menjadi sebanyak 3.894 pegawai dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 2.070 pegawai.

Jika dilihat trennya sejak tahun 2012 hingga 2016, terlihat bahwa jumlah pegawai dengan jenjang usia di bawah 25 tahun dan jenjang usia 25-30 tahun didominasi oleh pegawai wanita, sedangkan jumlah pegawai wanita dan pria berimbang untuk jenjang usia di atas 30 tahun hingga 50 tahun.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	2015	2014	2013	2012
Pria	13.389	12.859	12.834	12.764	12.301
Wanita	14.795	14.016	13.702	13.336	12.560
TOTAL	28.184	26.875	26.536	26.100	24.861

Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	Komposisi terhadap total pegawai	2015	Komposisi terhadap total pegawai	Pertumbuhan
Pria	13.389	47.51%	12.859	47,85%	4,12%
Wanita	14.795	52.49%	14.016	52,15%	5,56%
TOTAL	28.184	100.00%	26.875	100,00%	4,87%

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jumlah pegawai BNI jika dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan angka komposisi yang hampir berimbang antara pegawai wanita dan pria. Di 2016, komposisi jumlah pegawai wanita sebesar 52,49% atau berjumlah sebanyak 14.795 pegawai, sementara pegawai pria sebesar 47,51% atau berjumlah sebesar 13.389 pegawai. Masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5,56% dan 4,12% dari tahun sebelumnya.

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENERASI

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Generasi	2016			2015			2014			2013			2012		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Baby Boomer	567	198	765	722	257	979	913	323	1236	1108	371	1479	1146	359	1505
Gen X	6291	5068	11359	6460	5215	11675	6606	5378	11984	6691	5506	12197	6690	5479	12169
Gen Y	6531	9529	16060	5677	8544	14221	5315	8001	13316	4965	7459	12424	4465	6722	11187
TOTAL	28,184			26,875			26,536			26,100			24,861		

Tabel Pertumbuhan Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Generasi	2016	Komposisi terhadap total	2015	Komposisi terhadap total	Pertumbuhan
Baby Boomer	765	2.71%	979	3.64%	-21.86%
Gen X	11359	40.30%	11675	43.44%	-2.71%
Gen Y	16060	56.98%	14221	52.92%	12.93%
TOTAL	28,184	100.00%	26,875	100.00%	4.87%

Profil Pegawai

Laporan Tahunan 2016

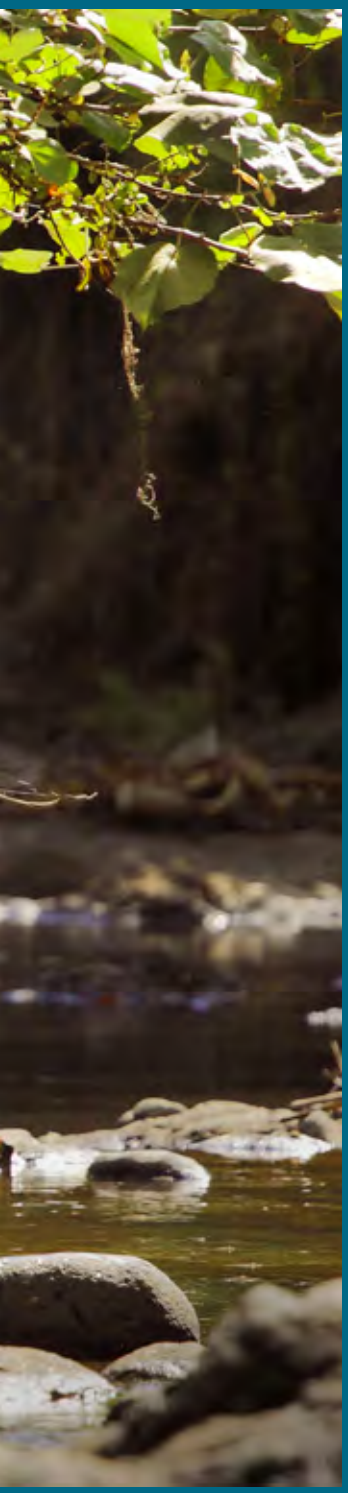

Tata Kelola Perusahaan

- BNI *Corporate Governance Framework* 321
- Arti Penting *GCG* 323
- Dasar Penerapan *GCG* 325
- *Roadmap GCG* 326
- Eksternalisasi 326
- Internalisasi 326
- *Awareness* 326
- *GCG Assesment* 326
- *Monitoring* & Evaluasi 326
- *Roadmap GCG* 329
- Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 34

BNI telah merasakan manfaat dari diterapkannya *good corporate governance*. Selain adanya peningkatan kinerja baik dari sisi operasional maupun keuangan secara berkelanjutan, BNI mendapat pengakuan dari masyarakat dengan diperolehnya beberapa penghargaan. Di tahun 2016, BNI kembali meraih penghargaan sebagai *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award*. Penghargaan lainnya adalah diperolehnya predikat sebagai *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2016.

BNI *Corporate Governance Framework*

BNI sangat menyadari bahwa penerapan *corporate governance* yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Bank memiliki peran penting dalam sebuah perekonomian melalui perannya sebagai lembaga *intermediary* antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha (perusahaan) yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan Bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

Tujuan utama penerapan *corporate governance* di BNI adalah memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkelanjutan.

BANK SEBAGAI LEMBAGA KEPERCAYAAN

Bank yang merupakan perusahaan penggerak perekonomian akan banyak mendapatkan penilaian dan sorotan dari publik maupun dari Pemerintah. Penilaian dan sorotan tersebut akan sejalan dengan tingkat kepercayaan atas bank tersebut, oleh karenanya setiap Bank akan berusaha untuk memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada setiap *stakeholders*. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut Bank harus memberikan kinerja yang baik yang tergambar dari Tingkat Kesehatan yang baik, memiliki Kecukupan Modal di atas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah dan kinerja keuangan yang kuat.

Terkait hubungan dengan persaingan usaha, maka setiap bank harus menjaga nama baiknya dengan melakukan persaingan secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan dan mampu melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik. Selain itu, bank juga harus mampu mengendalikan risiko reputasi yang dihadapi untuk tetap menjaga citra positif bagi bank.

Dari sisi internal, sebagai lembaga kepercayaan, bank harus mengelola setiap kegiatannya dengan professional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, berintegritas tinggi, berakhlak dan moral yang baik. Setelah itu, penerapan GCG yang konsisten dan berlanjut disertai dengan inovasi yang tiada henti dari sisi produk dan pelayanan akan menjamin kepercayaan setiap pemangku kepentingan.

BANK MERUPAKAN PERUSAHAAN PUBLIK

Sebagai Perusahaan Publik, tentu saja setiap bank akan bersentuhan langsung dengan para nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus selalu menjaga kepuasan pelanggan (*customer satisfaction)* dengan memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellent*) yang timbul dari hati sehingga benar-benar bisa dirasakan oleh setiap nasabahnya. Selain itu, bank harus memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik, sistem perbankan yang memadai untuk menunjang kenyamanan transaksi setiap nasabah.

Perbankan yang merupakan objek perusahaan publik juga akan mendapat pengawasan yang sangat ketat dari regulator dan juga dari nasabahnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai intermediasi yang menghimpun dan masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan. Fungsi tersebut jugalah yang menjadikan bank sebagai perangsang dan penggerak ekonomi di suatu daerah, melaksanakan pembangunan, dan sumber pendapatan daerah untuk peningkatan taraf hidup daerah tersebut. Bank juga sebagai *agent of development* di segala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Arti Penting GCG

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam era persaingan global saat ini, sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat tergantikan bagi setiap perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Dengan adanya penerapan GCG maka perusahaan sudah memiliki pondasi yang kokoh dan bekal yang cukup untuk menjadi perusahaan yang tangguh dan terus berkembang.

GCG bagi BNI merupakan sebuah kebutuhan yang harus selalu diterapkan disetiap langkah yang dijalankan oleh BNI. Penerapan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi BNI. Dengan adanya penerapan GCG, BNI memiliki pedoman dalam menjalankan roda bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan BNI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan BNI.

BNI sangat memahami bahwa industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Nasional. Kualitas *governance* yang tidak baik akan berdampak negatif bagi perekonomian Nasional. BNI menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan yang baik di sertai dengan dasar penerapan GCG yang kuat akan berdampak postif pada kinerja keuangan BNI. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi BNI didalam persaingan global, dan tentu saja akan memberi jalan untuk perkembangan BNI di tahun- tahun selanjutnya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip GCG, dan senantiasa menjalankannya di setiap proses yang dilakukan, maka BNI akan mendapatkan kepercayaan dari setiap *stakeholder*, dan mendapat dukungan baik dari internal maupun eksternal BNI. Oleh karenanya BNI senantiasa menjalankan prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kesetaraan dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan BNI, sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh insan BNI guna menciptakan Perseroan yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR: PER – 01 /MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Goverance*) dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Perseroan, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional dan pada akhirnya dapat membuat BUMN dapat bersaing secara global. Sebagai Lembaga Keuangan perusahaan terbuka, maka BNI juga senantiasa menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG serta terus selalu berupaya mengembangkan praktik GCG berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Dengan upaya optimalisasi implementasi GCG di BNI, membuat BNI senantiasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang ada di depan.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG BNI dapat diuraikan sebagai berikut.

Prinsip-Prinsip GCG	Uraian
Transparansi	1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi *good corporate governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Akuntabilitas	1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. 2. Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. 3. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan *(Corporate Culture Values)*, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards* and *punishment system*. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi *good corporate governance*.
Responsibilitas	1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 2. Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi	1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). 2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Kesetaraan dan Kewajaran	1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dasar Penerapan GCG

Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank Umum baik Konvensional maupun Syariah untuk menerapkan GCG sebagaimana yang tertuang dalam beberapa ketentuan yang berlaku , yakni:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Roadmap GCG

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan GCG di BNI dan menghindarkan BNI dari praktik *Bad Corporate Governance*, BNI terus berupaya menciptakan, mengembangkan dan memperbaiki diri sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Penyusunan *Roadmap* diperlukan untuk memetakan aspek GCG maupun menciptakan program terkait GCG di BNI dalam rangka mendukung praktik implementasi GCG.

TAHAPAN *ROADMAP*

AWARENESS

BNI menyadari pentingnya *awareness* GCG untuk implementasi GCG. Langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai GCG sangat penting untuk menciptakan komitmen bersama segenap Insan BNI. Upaya membangun kesadaran ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

Sosialisasi Terkait GCG

Sosialisasi terkait GCG selama tahun 2016 telah dilakukan di baik di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, diantaranya pada Divisi Tresuri, Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan, Operasional, Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan, BNI Corporate University, Wilayah Padang, Wilayah Denpasar dan Wilayah Surabaya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi pada acara Vendor *Gathering* yang diadakan oleh Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan. Dalam sosialisasi dimaksud dipaparkan antara lain mengenai prinsip-prinsip GCG, contoh implementasi, sampai dengan ketentuan terbaru terkait GCG. Dengan sosialisasi ini diharapkan para Insan BNI memiliki tekad serta komitmen bersama untuk mewujudkan implementasi GCG di BNI. Rencana ke depannya, materi terkait GCG juga akan dipaparkan dalam Business Meeting unit-unit di tiap wilayah.

Program Induksi Pegawai Baru

Pegawai baru merupakan cikal bakal Insan BNI yang nantinya akan belajar, tumbuh dan berkembang di BNI. Sebagai tunas atau cikal bakal maka pembekalan *corporate value* sangat penting, karena dalam pembekalan tersebut akan ditanamkan nilai-nilai GCG dan Kode Etik yang diharapkan nantinya akan bermanfaat dalam perjalanan karir di BNI. Pembekalan diberikan oleh Tim GCG yang bekerja sama dengan BNI Corporate University untuk memberikan jam pembekalan khusus terkait GCG dan Kode Etik bagi pegawai baru.

Komitmen Tata Kelola

Sebagai wujud dari komitmen bersama dalam rangka mendukung penegakan dan penyelenggaraan GCG di BNI, maka setahun sekali tepatnya pada bulan Januari dilaksanakan penandatanganan Komitmen Tata Kelola. Setiap pegawai baik dari berbagai tingkat jenjang jabatan bersama-sama menandatangani Komitmen Tata Kelola yang didahului dengan pembacaan Komitmen dan sosialisasi Anti *Fraud Awareness*. Program ini dilakukan untuk menekankan kepada para Insan BNI akan pentingnya nilai-nilai dalam Komitmen dimaksud. Komitmen Tata Kelola dimaksud menyatakan antara lain bahwa Insan BNI berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan *corporate culture* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak memberikan, menjanjikan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun
3. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan;
4. Bertindak adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*;
5. Berusaha dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *Fraud*;
6. Bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *Fraud* melalui media pelaporan yang ada di BNI;
7. Bersedia di kenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

INTERNALISASI

Internalisasi bukan sebatas pada mengetahui, namun internalisasi telah sampai kepada tahap pemahaman. Internalisasi GCG di BNI dilakukan melalui berbagai macam *tools,* sehingga memudahkan proses untuk mengadopsi nilai-nilai yang nantinya dapat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. *Tools* yang digunakan antara lain dalam bentuk:

1. Pembacaan Prinsip 46 dan Kode Etik BNI pada setiap hari mutu yang diadakan 1 (satu) bulan sekali di tiap unit maupun pada *morning briefing*,
2. Metode *self education* melalui *e-learning* GCG dan *Corporate Culture* yang memberikan kemudahan pembelajaran GCG untuk para Insan BNI,
3. Penyebaran dan pemasangan poster serta *e-leaflet* anti gratifikasi dan penegakan GCG pada tiap unit dan BNI Forum sehingga para pegawai dapat *aware* setiap saat,
4. Penyebaran *pocket book* Kode Etik,
5. Kemudahan akses Kode Etik dan *Corporate Culture* melalui *website* BNI yang dapat diakses kapan pun dan di manapun.
6. Lomba Opini terkait GCG. Lomba opini terkait GCG adalah lomba karya tulis yang diadakan dengan mengangkat tema seputar GCG yang berbeda tiap tahunnya. Lomba dapat diikuti oleh segenap pegawai BNI (tetap dan *outsourcing*) baik di unit Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Cabang Dalam/Luar negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG dan Kode Etik di BNI, meninjau pelaksanaan GCG dan Kode Etik yang telah dilakukan dan sebagai peningkatan kesadaran bersama segenap Insan BNI terhadap pentingnya GCG dalam pengelolaan perusahaan ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri, berbagai macam karya tulis yang diperoleh dari hasil Lomba Opini memberikan kontribusi positif bagi implementasi GCG di BNI dan merupakan masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.

BNI memahami bahwa *Corporate Culture* memberikan konsentrasi pada bentuk sikap (*attitude*). Bentuk sikap inilah yang akan membentuk kepribadian dari tiap individu pada suatu perusahaan, sehingga kumpulan *attitude* ini membentuk interaksi

antar individu dan integritas yang selanjutnya akan memunculkan karakter yang ada pada suatu perusahaan.

GCG *Assessment* (PENILAIAN GCG)

GCG *Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG *assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *Self Assessment* sesuai ketentuan BI/OJK dan *Third Party Assessment*, sebagai berikut.

Self Assessment Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum serta Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank, salah satu penilaian poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada bank. Pelaksanaan *Self Assessment* tersebut dilakukan secara periodik setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan Kelemahan pelaksanaan GCG di BNI yang ditinjau dari tiga aspek yaitu :

1. *Governance Structure*
   Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance Process*
   Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
3. *Governance Outcome*
   Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
   a. kecukupan transparansi laporan;
   b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   c. perlindungan konsumen;
   d. obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
   e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
   f. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *Fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Self assessment meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar *(large exposure)*
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Good *Corporate Governance* dan pelaporan internal
11. Rencana Strategis Bank

Sesuai dengan Peraturan OJK, Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG. Hasil GCG *Self Assessment* selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

	2016	2015	2014
Nilai komposit	2	2	2

Berdasarkan ketiga aspek penilaian tersebut, melalui *self assessment* GCG pada tahun 2016, BNI telah menetapkan skor implementasi pelaksanaan GCG sebagai berikut.

Hasil Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Pelaksanaan GCG	
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari *governance structure* yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam *governance process* yang berpengaruh pada *governance outcome*, tetapi secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Saat ini Bank sedang terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas GCG di segenap lini operasional Bank.

Penetapan skor tersebut di atas di dasari pada kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksananaan implentasi GCG di BNI sebagai berikut.

Kekuatan *(strength)*	Kelemahan *(weakness)*
1. Peningkatan keamanan sistem dan informasi perbankan di Bank, melalui resertifikasi standarisasi mutu dengan ruang lingkup yaitu IT *Operation* dan IT *Security Management* melalui ISO – 9001 yang akan berlaku sampai dengan tahun 2018. 2. Program *refreshment* GCG bagi segenap Insan BNI dan *Stakeholder* yang dilaksanakan secara rutin anatara lain melalui: a. Sosialisasi tata kelola kesegenap Kantor Wilayah BNI dengan *audience* Pemimpin Unit, Cabang dan Sentra Kredit b. *Champaign* anti Gratifikasi melalui media masa, serta penandatanganan Komitemen Anti Gratifikasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berjalan dengan baik, hal tersebut tercermin dari penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak independenden yaitu: a. *Indonesian Intitute for Corporate Directorship* melakukan penilaian implementasi GCG berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*, memberikan penilaian dengan predikat Baik (skor 87,33) atas implementasi GCG di BNI, di mana nilai tersebut naik secara signifikan dibandingkan tahun 2015. b. Melalui *Corporate Governance Perception Index* tahun 2016 , *The Indonesian Institute for Corporate Governance* memberikan predikat *Indonesia Most Trusted Company* kepada BNI selama 6 (enam) tahun berturut – turut	1. Bank telah memiliki pedoman dan infrastruktur terkait penerapan sistem pengendalian intern, namun masih perlu penyempurnaan terhadap kualitas penerapan sistem pengendalian intern. 2. Pada tahun 2016 masih terdapat pengenaan denda dan teguran dari pihak regulator.

Third Party Assessment

Selain melaksanakan *Self Assessment*, BNI juga secara konsisten telah melaksanakan *Third Party Assessment* yang dimaksudkan untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Dalam rangka menjaga kepercayaan segenap *stakeholder*, BNI juga aktif mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Keikutsertaan BNI dalam program tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Implementasi GCG di BNI. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan bagi BNI untuk melakukan penyempurnaan Implementasi GCG kedepannya.

CGPI 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016, mengangkat tema Pilar Keberlanjutan Untuk Mendukung Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh IICG dengan tema tersebut, Pelaksanaan GCG di BNI mendapatkan predikat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*) dengan perincian penilaian sebagai berikut.

Aspek Penilaian	2015	2014	2013
Self Assesment/survei	26,94	18,17	24,61
Sistem Dokumentasi	22,35	23,55	35,21
Makalah	13,12	22,01	11,97
Observasi	25,33	23,73	15,40
Skor CGPI	87,73	87,46	87,19

Pada periode 3 (tiga) tahun terakhir, Penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan BNI dalam CGPI selalu meningkat, hal tersebut menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di BNI semakin baik dari tahun ke tahun.

(Grafik disesuaikan selama 3 tahun)

Score CGPI BNI

Asean CG Scorecard (ACGS)

Penilaian atas implementasi GCG di BNI, juga dilaksanakan berdasarkan *ASEAN CG Scorecard* (ACGS) yang didasarkan pada Laporan tahunan dan *website* Perusahaan. Penilaian ACGS dilaksanakan oleh IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*) dengan menggunakan komponen *scorecard* yang terdiri dari:

1. Hak-hak Para Pemegang Saham
2. Perlakuan Yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham
3. Peran Para Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik GCG BNI berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dilaksanakan pada tahun 2016, BNI mendapatkan predikat "***GOOD***" dengan total score 87,33.

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	2016(%)	2015(%)
1.	Hak-hak Pemegang Saham	10	8,8	4,4
2.	Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham	15	9,17	10,59
3.	Peran Pemangku Kepentingan	10	10	9,52
4.	Keterbukaan dan Transparansi	25	23,17	20
5.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	40	29,19	29,87
6.	Bonus		7	7
7.	Penalti		0	0
Total Skor		100	87,33	81,38

Penilaian ACGS BNI mengalami pengingkatan dari skor 81.38 di tahun 2015 menjadi 87.33 di tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa BNI sebagai perusahaan terbuka berkomitmen dalam menjalankan praktik GCG berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

(Grafik disesuaikan selama 3 tahun)

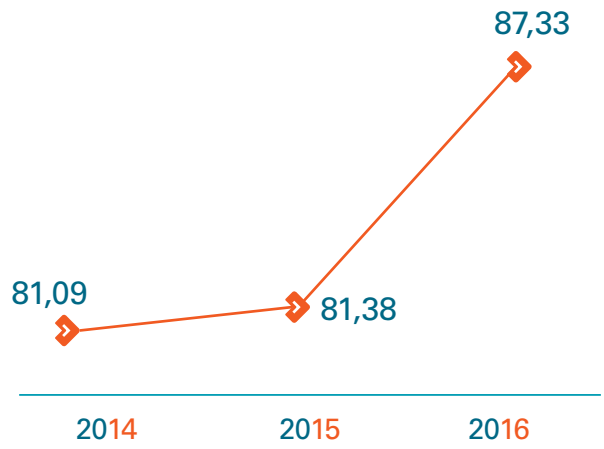

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian kinerja yang disusun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) sebagai pedoman standar bagi KBUMN dan seluruh BUMN dalam membangun, menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria penilaian dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCfPE) yang telah mulai diterapkan di BUMN sejak tahun 2012 melalui Surat Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012, tanggal 19 Juli 2012.

Sejak tahun 2005, BNI menjadikan sistem evaluasi kinerja *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCfPE) sebagai bagian dari kerangka kerja pengembangan kinerja perusahaan, hingga dilanjutkan implementasinya dalam bentuk KPKU BUMN.

Kriteria penilaian dalam KPKU terdiri dari sejumlah pertanyaan yang mewakili aspek-aspek fundamental pengelolaan organisasi/perusahaan dalam konteks pencapaian kinerja unggul. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) Kategori, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Perencanaan Strategis
3. Fokus Pelanggan
4. Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan
5. Fokus Tenaga Kerja
6. Fokus Operasi
7. Hasil-Hasil Usaha

Bagi BNI selaku salah satu BUMN yang mengimplementasikan KPKU, proses evaluasi terhadap ketujuh kategori di atas akan menghasilkan umpan balik berupa rekomendasi perbaikan kinerja (OFI/ *Opportunity For Improvement*) dan *rating* kinerja dengan standar penilaian kelas dunia, karena KPKU BUMN disarikan dari *Malcolm Baldrige Criteria* yang memang didesain untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan karakteristik perusahaan kelas dunia. *rating* kinerja tersebut dibagi dalam beberapa jenjang, yaitu:

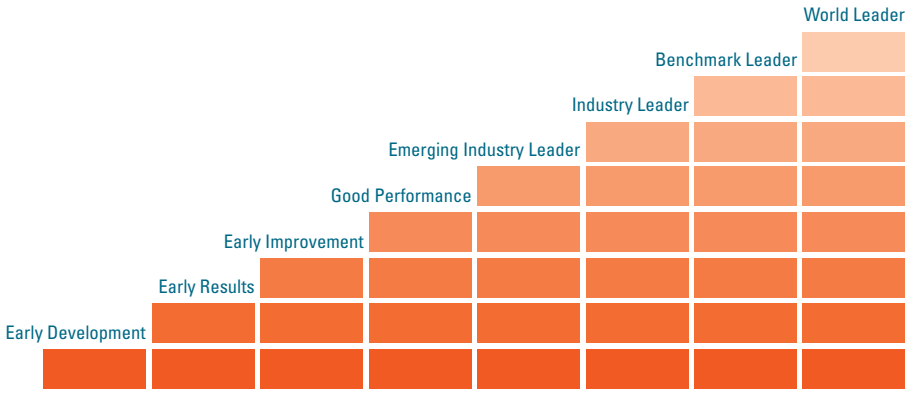

Sejak menerapkan sistem MBCfPE di tahun 2005, hasil *assesment* menunjukkan skor KPKU BNI yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hasil *assesment* KPKU tahun 2016 yang berlangsung pada akhir Januari 2017 telah berhasil memperoleh *Band Score* "*Emerging Industry Leader*".

Melalui penerapan *framework* KPKU, BNI mendapatkan gambaran kondisi perusahaan yang komprehensif dari berbagai aspek, baik proses maupun hasil. Melalui potret kondisi perusahaan tersebut, BNI dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan perusahaan. Kelemahan perusahaan yang terbungkus dalam OFI menjadi pembelajaran, sekaligus sumber inspirasi dan pemicu bagi BNI

untuk melakukan perbaikan dan *improvement* dalam berbagai bidang.

EKSTERNALISASI

Eksternalisasi sendiri didefinisikan sebagai penyesuaian terhadap dunia luar yaitu 'dunia' selain diri sendiri. Sebagaimana diketahui, pihak atau 'dunia' luar perusahaan terbuka terdiri dari para *stakeholder (p*emegang saham, nasabah penyimpan, nasabah peminjam (debitur), rekanan/vendor/ mitra kerja, pemerintah, pegawai, *customer)* dan masyarakat luas. Eksternalisasi GCG lekat kaitannya dengan prinsip transparansi dan kewajaran, di mana prinsip keterbukaan senantiasa tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan serta memperlakukan *stakeholder* dan masyarakat dengan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. BNI mengimplementasikan eksternalisasi GCG kepada *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana yaitu sebagai berikut.

1. RUPS
   RUPS merupakan sarana media komunikasi *stakeholder* kepada perusahaan dan merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG, karena di dalam RUPS dipaparkan perwujudan tanggung jawab Pengurus Perusahaan dari berbagai aspek. Penjelasan RUPS lebih rinci dapat dilihat pada Bagian RUPS bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.
2. Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan
   Hak-hak pemegang saham senantiasa dilindungi dan difasilitasi, di BNI hak pemegang saham diimplementasikan diantaranya melalui dividen, hak mengajukan pertanyaan dalam RUPS, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/ tidak menyetujui keputusan RUPS melalui kartu suara yang diberikan pada saat RUPS.
3. *Disclosure* dan Transparansi
   Sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip GCG, maka BNI terus berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi kepada para *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana diantaranya melalui Laporan Tahunan, *website* BNI, media massa, *website* IDX, serta pemberitahuan kepada regulator melalui *hardcopy* maupun sarana pelaporan elektronik. Mengingat status BNI sebagai emiten, maka Keterbukaan Informasi ini dirasa sangat penting sebagai media komunikasi perusahaan terbuka, Keterbukaan Informasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pasar modal yang berlaku.
4. Perlakuan Setara
   Seluruh pemegang saham BNI termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di BNI dalam rangka pemberian informasi baik dalam rangka *Corporate Action* maupun dalam Keterbukaan Informasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal.
   Seluruh masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank. Informasi, kritik dan/atau saran dapat diakses melalui *website* BNI dan layanan BNI Call 1500046.
5. Mewujudkan Citra Positif Bank
   Tak dapat dipungkiri bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang mengandalkan sisi *trust*. Praktik GCG yang sehat dari seluruh pihak internal perusahaan dan *stakeholder* dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang sehingga *trust* kepada bank akan terus terjaga. Dalam era digital ini, BNI berupaya memanfaatkan berbagai *tools* untuk meningkatkan citra positif bank melalui berbagai media diantaranya melalui media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio dan televisi) dan *cyber media* (*website*, *twitter*, *instagram*, *email*, portal berita, *facebook*, blog dan media sosial lainnya). Pemanfaatan media untuk mendukung praktik GCG dilakukan untuk penyebarluasan anti gratifikasi, GCG *awareness*, *service excellent*, WBS, dan sebagainya.

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai wujud implementasi dari pilar akuntabilitas dan responbilitas dari prinsip GCG.

Monitoring GCG

Monitoring GCG di BNI dilakukan antara lain dengan cara:

1. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab tiap pegawai, dilakukan di tiap unit oleh atasan langsung, unsur Pimpinan Unit, QA (*quality assurance*) maupun Satuan Pengawasan Internal.
2. Penyusunan dan *monitoring Key Performance Indicator* (KPI). Pimpinan unit memiliki peran aktif dalam proses *monitoring* KPI.
3. *Branch Performance Reward*, yaitu reward yang dilakukan terhadap cabang-cabang dengan kriteria penilaian operasional, bisnis dan upaya perbaikan.
4. *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pengawasan melekat terhadap pegawai. Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawai di bawah supervisinya untuk memastikan tidak terjadi kecurangan/*Fraud* dengan memperhatikan apakah terdapat indikasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut *(irregularities)*.

Evaluasi GCG

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di BNI berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders* dan *stakeholders*. BNI senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan. Evaluasi GCG di BNI dilakukan antara lain dengan cara:

1. *Review* pedoman/kebijakan terkait dengan GCG yang sudah ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan ketentuan regulator terbaru.
2. Penyusunan pedoman/kebijakan baru terkait dengan GCG yang belum ada, termasuk di dalamnya *updating* ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Peningkatan Prinsip Kepatuhan melalui *Compliance Index*.
4. Penyusunan Laporan terkait GCG, diantaranya Laporan Tata Kelola, Laporan *Corporate Secretary*, serta laporan terkait lainnya.
5. Sarana Pengaduan Eksternal terkait GCG
   Untuk mendorong kesadaran Insan BNI agar senantiasa berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai suatu budaya, BNI juga melibatkan peran serta masyarakat/publik sebagai pengawas implementasi GCG di BNI antara lain dengan menyediakan sarana bagi masyarakat umum (publik) untuk menyampaikan keluhan serta pengaduan terjadinya pelanggaran GCG yang dilakukan oleh pegawai BNI melalui PO Box GCG BNI JKP 10000 dan gcg@bni.co.id, di mana masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan Insan BNI atau mengetahui adanya perbuatan pegawai BNI yang menyimpang dari prinsip GCG dapat menginformasikan melalui kedua sarana tersebut dengan menyebutkan secara jelas identitas pegawai/Insan BNI yang melakukan pelanggaran dan unit di mana pegawai/Insan BNI tersebut pegawai melaksanakan tugasnya.

   Pengaduan atau keluhan yang diterima melalui PO Box GCG BNI JKP 10000 dan gcg@bni.co.id selain dimaksudkan untuk membantu proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi pihak yang menyampaikan keluhan/informasi juga diharapkan dapat menjadi bahan *review*/masukan serta evaluasi bagi BNI untuk melakukan perbaikan secara terus menerus serta meningkatkan kualitas penerapan GCG di BNI sehingga dapat menekan terjadinya tindakan penyimpangan atau pelanggaran prinsip GCG oleh pegawai BNI. Jumlah pengaduan yang masuk dalam tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas), terdiri dari 8 (delapan) jenis pengaduan terkait pelayanan maupun proses kredit, 1 (satu) jenis saran terkait suku bunga, 1 (satu) jenis pertanyaan terkait perpanjangan kredit, 1 (satu) jenis permintaan data terkait GCG, dan 1 (satu) jenis pengaduan tidak terkait dengan BNI. Terhadap pengaduan yang tidak terkait dengan GCG telah diteruskan ke unit-unit terkait untuk penyelesaiannya.

PELAKSANAAN *ROADMAP* GCG

BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dikehendaki oleh segenap *stakeholder*. Implementasi GCG oleh BNI dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis dengan tahapan sebagai berikut.

Tahun	Aktivitas
2001	• BNI berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Komitmen tersebut dipelopori oleh Komisaris dan Direksi Bank BNI dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal 3 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana tercantum dalam *Corporate Governance Handbook* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang kemudian dijadikan pedoman bagi Direksi dan Komisaris untuk mengelola BNI.
2002	• Sebagai bagian dari komitmen untuk mengadakan perbaikan yang terus menerus atas implementasi *corporate governance*, BNI melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut. • Membentuk Unit Kepatuhan dan Unit *Anti Money Laundering* di bawah tanggung jawab Divisi Hukum dan Kepatuhan. • Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyusun kriteria penilaian kinerja bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta melakukan penilaian struktur, system, dan pelaksanaan kompensasi bagi Direksi dan memberi saran untuk perubahannya kepada Komisaris bila diminta. • Membentuk *assestment center* untuk memperbaiki proses/sistem seleksi posisi pimpinan tingkat atas. • Memperbaiki sistem informasi perbankan. • Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai panduan bagi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas.
2003 Kuasi Reorganisasi, *Reverse Stock Split*, peningkatan modal dasar	• BNI terus melakukan perbaikan *corporate governance*-nya, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan terhadap penerapannya. Setiap pegawai diharuskan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kote Etik Perilaku. • Salah satu usaha perbaikan tata kelola tersebut, maka pada tahun 2003, BNI membentuk Komite Eksekutif yang bertugas membantu Direksi pada bidang-bidang tertentu, yakni: • Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO) • Komite Manajamen Risiko • Komite Kebijakan Kredit • Komite Sumber Daya Manusia • Komite Manajemen Teknologi
2004 Peluncuran identitas korporat baru	• Berikut adalah pencapaian penting di bidang penerapan tata kelola perusahaan selama tahun 2004: • Manajemen BNI telah menyetujui pembentukan komite *Good Corporate Governance* yang bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan efektivitas kebijakan maupun implementasi tata kelola perusahaan di lingkugan kerja BNI. • BNI dinilai sebagai salah satu dari lima perusahaan publik dengan praktek tata kelola perusahaan yang baik dalam *survey* yang diadakan oleh *Standard & Poor's Governance Services* serta *Corporate Governance and Financial Reporting Center* (CGRFC) yang berkantor pusat di Singapura. • Manajemen melaksanakan program *Zero Fraud* guna menumbuhkan praktek perbankan yang sehat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalaui program ini, BNI memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai *zero Fraud* dalam operasinya, dan sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang gagal mencegah *Fraud*. • BNI membentuk Tim Etika Kerja yang bekerja di bawah Komite Sumber Daya Manusia. Secara berkala tim ini mengevaluasi kemajuan etika kerja di lingkungan kerja BNI. • BNI telah meningkatkan akses para *stakeholder* terhadap seluruh informasi yang memiliki dampak material terhadap BNI, termasuk laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, informasi mengenai penggunaan dana hasil *corporate action*, informasi yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi pemodal, hasil-hasil Rapat Umum Pemegang Saham, serta peristiwa penting lainnya menyangkut BNI, baik melalui situs web BNI, laporan ke Bapepam, bursa saham, media massa, paparan public, maupun temu analis.
2005	• Komitmen BNI dalam peningkatan tata kelola dibuktikan dengan pembentukan suatu unit organisasi Pemantauan GCG melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/174/DIR/R tanggal 26 April 2005.
2006	• Ditandatanganinya 'Pernyataan Komitmen Untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' oleh segenap Direksi, Komisaris, dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi dan diperbaharui setiap tahun.

Tahun	Aktivitas
2007	• Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan 'Pernyataan Komitmen Untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' di tahun sebelumnya, maka BNI menyusun program GCG antara lain: • GCG *e-learning* • Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI • Buku Tuntutan Perikaku Insan BNI, yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang disebut PRINSIP 46. • BNI memperoleh predikat sebagai perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA.
2008	• Terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Divisi Kepatuhan bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan dan terus menyempurnakan sistem yang terintegrasi dengan sistem iCONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
2009	• BNI berhasil meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan laba hingga 103% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan GCG yang konsisten oleh segenap insan BNI.
2010	• Peluncuran *Whistle Blowing System* (WBS) secara terintegrasi agar transparansi terjaga dan pelaksanaannya dipahami oleh segenap pegawai BNI. • Penyempurnaan *code of conduct* pegawai BNI yang ditujukan agar terdapat peningkatan kualitas pegawai BNI • Keikutsertaan BNI dalam peratingan/pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen, yaitu *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM), The *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).
2011	• BNI meraih berbagai penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan besar diantaranya: • *Best of The Best Company* BUMN 2011 • *The Most Admired ASEAN Enterprose Economics Challenges Award* 2011 • *The Most Trusted Company* dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) • Terkait dengan implementasi GCG, BNI meraih beberapa penghargaan, diantaranya: • BNI meraih penghargaan *Corporate Governance Award* 2011 dari The Indonesian Institute for Corporate Governance • Tata kelola teknologi informasi BNI telah diakui kehandalannya dengan diberikannya IT Governance Award oleh Kementerian BUMN
2012	• Hasil *self assessment* sesuai ketentuan Bank Indonesia di tahun 2011 dan 2012 menunjukan tren yang stabil dengan predikat komposit Sangat Baik. • Pembentukan Komite Anti *Fraud* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/508/DIR/R tanggal 9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Anti *Fraud* (KAF). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KAF dibantu oleh unit Pengelolaan *Ethics Management* yang berada di Divisi Kepatuhan, yang salah satu fungsinya sebagai *liason* data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi *Anti Fraud* dan mengelola *database* terkait *Fraud* yang ada di BNI

Roadmap GCG

Tahun	Aktivitas
2013	• BNI meraih penghargaan: • *Most Trusted Company Based on Investors and Analyst's assesment Survey* pada *Good Corporate Governance Award* 2013 • *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2013 • Penghargaan sebagai *The Best Bank in Indonesia in Developing Good Corporate Governance* (GCG) dari Asiamoney Magazine
2014	• BNI terus melakukan peningkatan dan pembaharuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. • BNI juga terus mendukung pertumbuhan terhadap ekonomi dan lingkungan dengan menyelenggarakan program Kampoeng BNI, PKBL, aktivitas CSR yang diselenggarakan BNI Syariah, dan komitmen terhadap program One Billion Indonesian Trees (OBIT) yang telah menanam lebih dari 7 juta pohon dalam 7 tahun terakhir
2015	• BNI meraih penghargaan sebagai : *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
2016	• BNI kembali meraih penghargaan sebagai : *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD). • *Most Trusted Company* Based on Corporate Governance Index (CGPI) pada Good Corporate Governance Award 2016

Selama tahun 2016, BNI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut.

Januari

- Penandatangan Komitmen GCG oleh seluruh Insan BNI .
- Sosialisasi Anti *Fraud* kepada seluruh pegawai BNI
- Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Januari 2016
- Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Januari 2016 di 2 (dua) surat kabar yaitu Investor Daily dan The Jakarta Post guna memenuhi ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014.
- Surat Pemberitahuan Rencana RUPS Tahun Buku 2015 kepada OJK guna memenuhi ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014.

Februari

- Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dilaksanakan 21 hari kalender sebelum tanggal RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.
- Pada Pemanggilan RUPS telah disampaikan rincian penjelasan masing-masing mata acara RUPS sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.

Maret

- Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 tanggal 10 Maret 2016.
- Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 sekaligus Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 pada tanggal 14 Maret 2016 di 2 (dua) surat kabar yaitu Investor Daily dan The Jakarta Post guna memenuhi ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

April

- Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 tepat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS yaitu tanggal 10 April 2016 sesuai Rekomendasi Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Pengesahan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KP/150/DIR/R tanggal 11 April 2016
- Penyampaian Laporan Fungsi Pelaksanaan Corporate Secretary kepada Direksi yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2014.

Roadmap GCG

Mei

- Pengesahan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/011/DK/2016 tanggal 12 Mei 2016

Juni

- Publikasi Anti Gratifikasi di Harian Kompas tanggal 21 Juni 2016.

Juli

- Penyampaian Self *Assessment* GCG posisi Juni 2016 kepada OJK
- Penyampaian Self *Assessment* TKT posisi Juni 2016 kepada OJK

Agustus

- Penandatanganan Pakta Integritas Direksi sebagai Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dituangkan dalam SK Dir No. DIR/313 tanggal 24 Agustus 2016.

Oktober

- Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama KPK

November

- Pelaksanaan IICD Award di mana BNI mendapat 2 (dua) penghargaan yaitu: The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies

Desember

- Partisipasi dalam Riset ASEAN Corporate Governance Scorecard terhadap BNI, dan BNI mendapat score 87.33 (Good)
- Sosialisasi terkait GCG di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, diantaranya pada Divisi Operasional, Unit Dana Pensiun Lembaga Keuangan, BNI Corporate University, Wilayah Padang dan Wilayah Surabaya. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi pada acara Vendor Gathering yang diadakan oleh Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, pedoman tata kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan

No	Prinsip	Rekomendasi
1	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	• Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara (*one share one vote).* Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. • Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*.	• Prosedur Pengambilan Suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS BNI dilakukan dengan cara *voting* secara tertutup yakni dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan menggunakan *electronic voting*. • Prosedur dan Tata cara penghitungan kuorum, tanya jawab serta mekanisme pengambilan keputusan rapat telah dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang merujuk pada POJK No. 32 /POJK.04/2014.
	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Pada RUPS Tahunan BNI tanggal 10 Maret 2016 telah dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi dan 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris.
	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Ringkasan risalah RUPS Luar Biasa maupun Tahunan telah diumumkan dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan baik di situs Web Perusahaan maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK Ereporting, yakni pada tanggal 14 Januari 2016 untuk RUPS Luar Biasa dan tanggal 14 Maret 2016 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2015.

No	Prinsip	Rekomendasi
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	• Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. • Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	• Kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor tertuang dalam pedoman perusahaan Hubungan Investor No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015 yang mencakup kebijakan aktivitas hubungan investor seperti *analyst meeting*, penyusunan *annual report*, *investor meeting, public expose,* dan *roadshow.* • Dalam kebijakan tersebut mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Adanya Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan BNI sebagai Perusahaan Terbuka berkomitmen melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor.
	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan komunikasi serta Agenda komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah diupload ke dalam Situs Web bagian Hubungan Investor.
	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Jumlah anggota Dewan Komisaris di BNI sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keberagaman komposisi, jumlah ini dipandang cukup dan sesuai dengan kondisi BNI serta disesuaikan dengan ketentuan POJK No 33/POJK.04/2014.
	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BNI. Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tata Kelola ini.

No	Prinsip	Rekomendasi
4	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
		9. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
		10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
		11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	• Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. • Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	• Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan melalui Self *assessment* GCG di mana di dalamnya terdapat indikator tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. • Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris digambarkan melalui indikator *advisory* atas kinerja, penguatan fungsi eksekutif, dan pemantauan kepatuhan. Sedangkan penilaian yang terdapat pada *self assessment* GCG dibagi menjadi 3 (tiga) tolak ukur yaitu *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome. Governance structure* terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.
	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris Kebijakan penilaian sendiri yang tertuang dalam RKA disampaikan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka, sedangkan hasil *self assessment* GCG atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada pihak regulator.
	• Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. • Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar BNI yaitu Pasal 14 ayat 12 c yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota Dewan Komisaris antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara serta Pasal 14 ayat 24 yang menyatakan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Salah satu organ Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi (saat ini anggotanya seluruh Komisaris) yang menjalankan fungsi nominasi, di antaranya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bedasarkan tolok ukur yang telah diisusun sebagai bahan evaluasi, dengan berpedoman pada peraturan BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 dan Per-02/MBU/02/2015.

No	Prinsip	Rekomendasi
III	Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Jumlah dan kapasitas anggota Direksi didasarkan pada ketentuan POJK No 33/POJK.04/2014. Jumlah anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 10 (sepuluh) orang. Dalam rangka efektivitas pengambilan putusan, maka dalam Rapat Direksi dilakukan pengambilan putusan secara musyawarah mufakat .
	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.	Komposisi Direksi BNI saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BNI. Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tata Kelola ini.
	• Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	• Laporan Keuangan BNI terdiri dari Laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas Anak.
	• Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.	• Bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan BNI terdapat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan entitas Anak yang memuat tentang Direksi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak, telah disusun sesuai SAK dan semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dengan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Selain itu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk adalah KAP yang memiliki kompentensi dan professional di bidangnya. Seluruh ini menunjukkan komitmen penuh dari Direksi sehingga Laporan Keuangan dapat diandalkan oleh para *stakeholder*. • Direktur Keuangan BNI saat ini telah memiliki keahlian, pengetahuan dan kapabilitas di bidang akuntansi/keuangan, hal ini dapat dibuktikan melalui pendidikan formal dan informal yang telah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman sebelumnya sebagai Direktur *Risk and Compliance* di Bank lain juga turut mendukung keahlian ybs, hal ini tentunya merupakan nilai tambah bagi ybs maupun BNI.

No	Prinsip	Rekomendasi
6	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi.
		16. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
		17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan	
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.*

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	• Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.	• Kebijakan penilaian kinerja Direksi dimuat dalam Guiding Principle *Key Performance Indicator* (KPI) BOD. Pengukuran kinerja Direksi terdiri dari beberapa KPI yang diukur secara kolegial pada seluruh Direktur dan bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
	• Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	• Kebijakan tersebut mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap beberapa faktor yaitu Kapitalisasi market, laba, market share serta kepemimpinan. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.
	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.	Tiap tahunnya Penilaian Kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh pemegang saham/investor maupun *stakeholder* lainnya melalui *website* BNI sehingga informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik.
	• Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Perseroan akan bertindak aktif apabila terjadi kejahatan keuangan, Anggaran Dasar BNI menyatakan bahwa Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila ybs bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
	• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki BNI *Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism* (AML & CFT) *Policy Statement* dalam rangka penegakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	BNI telah memiliki Kebijakan terkait informasi orang dalam untuk mencegah terjadinya insider trading. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No.IN/329/INT/001 tanggal 9 Juni 2015.

No	Prinsip	Rekomendasi	
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *Fraud*.	
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*.	
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain	Dalam rangka kepatuhan terhadap SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, maka BNI membentuk Komite Anti *Fraud* untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi. Kebijakan dan Prinsip *no Fraud for our bank* diselenggarakan melalui Penerapan Strategi Anti *Fraud*. Untuk mengukur terwujudnya budaya kepatuhan, Divisi Kepatuhan telah mengembangkan suatu tools yang bernama *Compliance Index* (CIX). Sedangkan kebijakan Anti Korupsi telah diatur dalam Kode Etik BNI yang dapat diakses oleh seluruh pegawai maupun *stakeholder* melalui situs web BNI.
	• Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan.	• Perseroan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Perusahaan Online (e-PP) Pengadaan Barang dan Jasa No. IN/96/PFA/004 tanggal 25 Februari 2016. Kebijakan tersebut juga mengatur Prosedur Pengadaan termasuk metode dan alur prosesnya.
	• Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*.	• Pelaksanaan kebijakan tersebut senantiasa diterapkan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dan dipedomani bagi seluruh pegawai. *P*enyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BNI wajib telah terdaftar dalam sistem manual atau dalam Sistem Aplikasi *e-Procurement*. Pemberitahuan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa pun dilakukan dengan transparan.
	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Kebijakan terkait hak kreditur telah tertuang dalam Perjanjian dalam hal BNI melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur. Dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan hak kreditur misalnya berupa memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan Pinjaman, menjaga rasio keuangan (*Current Ratio*, DER, *Debt to Service Ratio*) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditur, menyampaikan laporan keuangan *audited* tahunan pada jangka waktu yang telah disepakati dengan Kreditur, dan sebagainya.
	Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) di BNI dengan nama "WBS to CEO". WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI. Laporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana Telepon, *email*, surat maupun website.

No	Prinsip	Rekomendasi
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan
V	Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI	
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	Keterangan Rekomendasi OJK	Penjelasan Penerapan di BNI
	• Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. • Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan telah dituangkan ke dalam Pedoman *Long Term Insentive* tersendiri, di mana untuk tahun 2016 ini bagi Pegawai tertuang dalam Pedoman Bonus Saham. Kebijakan insentif ini merupakan komitmen BNI yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.
	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Selain situs web, BNI juga memanfaatkan teknologi informasi lainnya seperti *email*, twitter dan instagram sebagai sarana komunikasi dan media keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga info lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham/investor.
	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Sub Bab Daftar Pemegang Saham serta Sub Bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur dan Mekanisme GCG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kepengurusan BNI, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung sehingga manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang yaitu: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur organ Perseroan BNI adalah sebagai berikut.

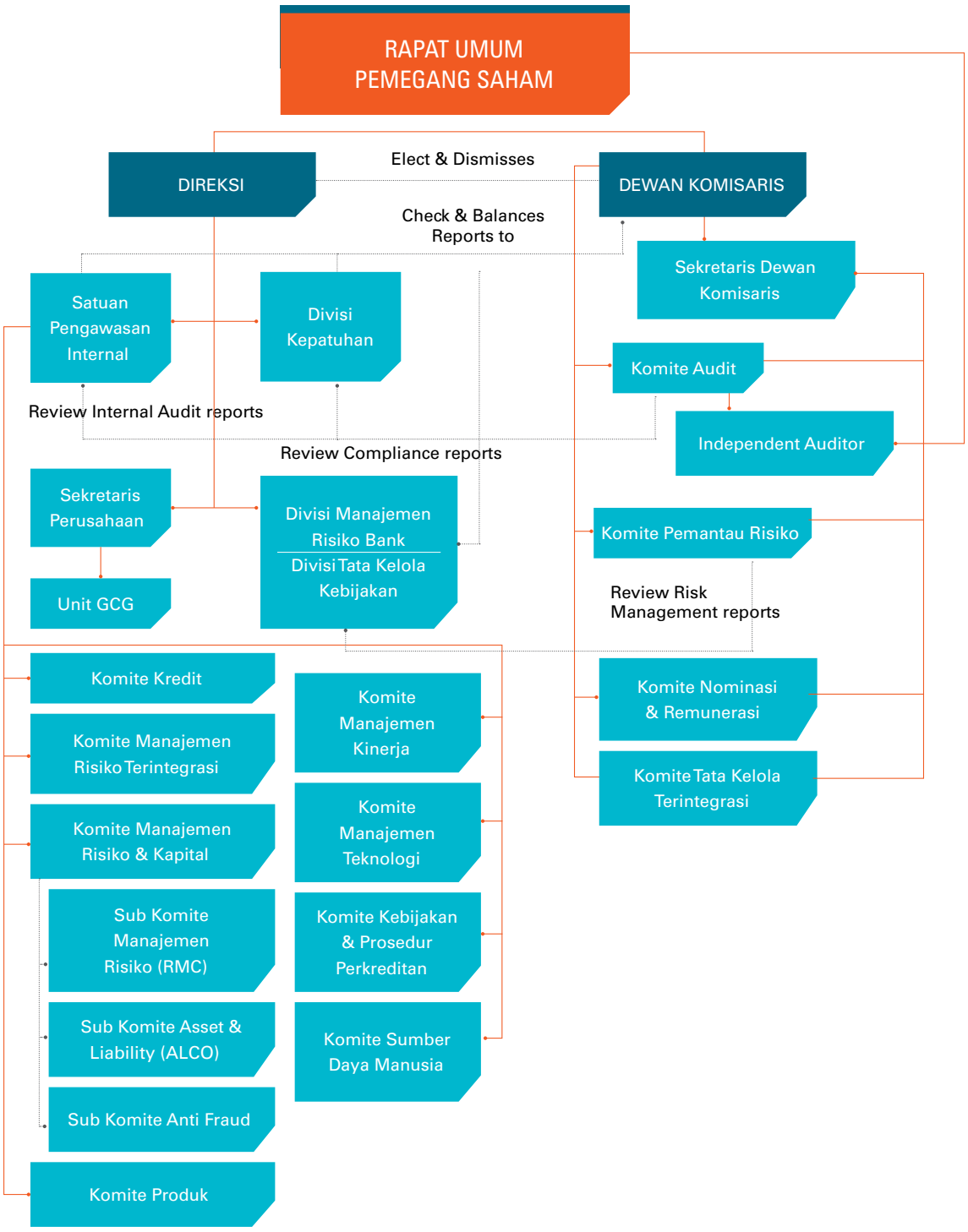

Dalam pelaksanaannya, Bank BNI memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *soft structure* GCG. Tujuan membangun GCG *Soft Structure* antara lain sebagai berikut.

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
2. Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankanaktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan.
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

GCG *soft structure* yang telah dimiliki oleh BNI antara lain adalah:

1. Anggaran Dasar Bank Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.
2. Kode Etik BNI sebagai Pedoman Perilaku Insan BNI (*Code of Conduct*) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.
3. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/011/DK/2016 tanggal 12 Mei 2016.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/150/DIR/R tanggal 11 April 2016.
5. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No DK/71 tanggal 8 Juli 2015.
6. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No.DK/27 tanggal 8 Maret 2016 dan dituangkan dalam e-PP No.IN/239/ERM/001 tgl. 28 April 2016.
7. Pedoman Benturan Kepentingan yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No.IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014.
8. Pedoman Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/356/DIR/R tanggal 2 September 2016.
9. Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/009/DK/2016 tanggal 14 April 2016.
10. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/024/DK/2016 tanggal 21 Juli 2016.
11. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP 027/DK/2015 tanggal 21 September 2015.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI Nomor KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015.
13. C*orporate Governance Handbook* No KEP/001/DK dan KP/001/Dir tanggal 3 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola.
14. BNI *Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML & CFT) Policy Statement.*
15. Pedoman Perusahaan terkait Prosedur Pengadaan yang telah dituangkan dalam e-PP No. IN/96/PFA/004 tanggal 25 Februari 2016.
16. Kebijakan WBS yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. KEP/019/DK/2010 dan No.KP/279/DIR tanggal 1 Desember 2010.
17. Pedoman Kerja Komite Risiko dan Kapital (KRK) yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016.
18. Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015.
19. Pedoman Kerja Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang didalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) yang telah disetujui oleh Direksi melalui SK Direksi No. KP/253/DIR/R tanggal 1 Juni 2016.

20. Pedoman Komite Manajemen Kinerja yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/466/DIR/R tanggal 5 Oktober 2012 perihal Performance Management Committee (PMC) BNI.
21. Pedoman Komite Produk yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 perihal Product Committee (PRC) BNI.
22. Pedoman Komite Manajemen Teknologi yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 yang telah diperbaharui melalui Memo Divisi Perencanaan No. REN/2/234/R tanggal 04 Mei 2016 perihal Perubahan Keanggotaan Komite.
23. Pedoman aktivitas pemantauan GCG dan Laporan Penilaian Sendiri yang tertuang dalam e-PP No.IN/462/KMP/001 tanggal 22 Oktober 2015.
24. Pedoman aktivitas Hubungan Investor yang tertuang dalam e-PP No.IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015.
25. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang tertuang dalam e-PP No IN/92/REN/001 tanggal 17 Maret 2014.
26. Pedoman Pengelolaan Kebijakan Akuntansi yang tertuang dalam e-PP No.IN/406/PKU/001 tanggal 24 Agustus 2016.
27. Pedoman Kepegawaian tentang Penilaian Kinerja yang tertuang dalam e-PP No.IN/99/HCT/001 tanggal 29 Februari 2016.
28. Pedoman Kepegawaian tentang Tata Tertib Pegawai No.IN/648/HCT/001 tanggal 10 Oktober 2014.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang tertinggi di mana organ ini mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ yang tertinggi di dalam perseroan. Dilihat dari sudut peranannya dalam perseroan, RUPS mempunyai peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian, karena organ inilah yang berwenang mengangkat dan ataupun memberhentikan Direksi dan atau Komisaris yang sifatnya tetap. Kemudian, organ inilah yang menetukan arah dan tujuan perseroan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya, RUPS juga menentukan hal-hal penting terkait dengan perseroan.

REFERENSI PERATURAN

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan RUPS BNI terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Tahapan Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI di Tahun 2016 tergambar dalam tabel berikut.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa

Pemberitahuan	Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diberitahukan pada tanggal 24 November 2015 kepada OJK.	Diumumkan pada tanggal 4 Desember 2015, melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.	Diumumkan pada tanggal 21 Desember 2015, melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.	RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016 pada pukul 11.00 WB – Selesai, bertempat di Ruang Serba Guna BNI Lantai 25. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta, 10220.	Diumumkan pada tanggal 14 Januari 2016 melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata acara pada RUPS Luar Biasa adalah Perubahan Pengurus Perseroan.

Rekap Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1.	Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen merangkap pelaksana tugas Komisaris Utama	√		
2.	Daniel T. Sparringa	Komisaris Independen	√		
3.	Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	√		
4.	Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	√		
5.	Anny Ratnawati	Komisaris Independen	√		
6.	Joseph F.P Luhukay	Komisaris Independen	√		
7.	Pataniari Siahaan	Komisaris	√		
8.	Revrisond Baswir	Komisaris	√		
9.	Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		
10.	Suprajarto	Wakil Direktur Utama	√		
11.	Herry sidharta	Direktur Bisnis Banking 1	√		
12.	Sutanto	Direktur Banking 2	√		
13.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	√		
14.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan	√		
15.	Adi Sulistyowati	Direktur Jaringan	√		
16.	Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		
17.	Bob Tyasika Ananta	Direktur Operasional dan TI	-		Alasan Keluarga

Keputusan RUPS Luar Biasa

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut.

Mata Acara	Keputusan RUPS Luar Biasa	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
Pertama	1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: - Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama - Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut: • Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama • Bpk. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Bpk. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen • Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris • Bpk. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen • Ibu Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen • Bpk. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen • Bpk. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris • Bpk. Revrisond Baswir sebagai Komisaris • Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris	11.861.234.015 suara atau 81,09% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.580.946.301 suara atau 17,65% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	184.807.216 suara atau 1,26% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Mata Acara	Keputusan RUPS Luar Biasa	Setuju (Jumlah Suara/ Persentasi)	Tidak Setuju (Jumlah Suara/%)	Abstain (Jumlah Suara/%)
	2. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut: • Bpk. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama • Bpk. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama • Bpk. Herry Sidharta sebagai Direktur • Bpk. Sutanto sebagai Direktur • Bpk. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur • Bpk. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur • Ibu Adi Sulistyowati sebagai Direktur • Bpk. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur • Bpk. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur • Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan calon Direktur Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

BNI telah merealisasikan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2016, dengan keterangan sebagai berikut.

No.	Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1	Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: • Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama • Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut: • Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama • Bpk. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Bpk. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen • Bpk. Kiagus Achmad Badaruddin sebagai Komisaris • Bpk. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen • Ibu Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen • Bpk. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen • Bpk. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris • Bpk. Revrisond Baswir sebagai Komisaris • Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris	Selesai	Bahwa anggota Dewan Komisaris atas nama Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama telah memperoleh persetujuan pengangkatan sebagai Komisaris BNI dari OJK melalui surat OJK Nomor: SR-78/D.03/2016 tanggal 4 Mei 2016 dan Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris telah memperoleh persetujuan pengangkatan sebagai Komisaris BNI dari OJK melalui surat OJK Nomor: SR- 81 /D.03/2016, tanggal 10-05-2016. Dengan kata lain pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut telah berlaku efektif.
2	Menyetujui dan mengangkat Bpk. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	Selesai	Bahwa anggota Direksi atas nama Bpk. Panji Irawan telah memperoleh persetujuan pengangkatan sebagai Direktur BNI dari OJK melalui surat OJK Nomor: SR-67/D.03/2016, tanggal 11-04-2016. Dengan kata lain pengangkatan anggota Direksi an. Bapak Panji Irawan tersebut telah berlaku efektif.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN Tahun Buku 2015 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 tergambar dalam tabel berikut.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

Pemberitahuan	Pengumuman	Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Diberitahukan pada tanggal 26 Januari 2016 kepada OJK.	Diumumkan pada tanggal 2 Februari 2016, melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.	Diumumkan pada tanggal 17 Februari 2016, melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 10.00 WIB – Selesai, bertempat di Ruang Serba Guna. Gedung BNI Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220	Diumumkan pada tanggal 14 Maret 2016 melalui Harian Investor Daily dan The Jakarta Post.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Adapun mata acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 sebagai berikut.

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Penetapan remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai dengan menggunakan saham tresuri (*treasury stock*).
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

KEHADIRAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Kehadiran RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1.	Hartadi A. Sarwono	Komisaris Utama	√		
2.	Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	√		
3.	Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	√		
4.	Anny Ratnawati	Komisaris Independen	√		
5.	Pataniari Siahaan	Komisaris	√		
6.	Revrisond Baswir	Komisaris	√		
7.	Bistok Simbolon	Komisaris	√		
8.	Daniel T. Sparringa	Komisaris Independen	-	√	Izin
9.	Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	-	√	Izin
10	Joseph F.P Luhukay	Komisaris Independen	-	√	Izin
11.	Achmad Baiquni	Direktur Utama	√		
12.	Suprajarto	Wakil Direktur Utama	√		
13.	Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Bisnis	√		
14.	Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	√		
15.	Sutanto	Direktur Bisnis Ritel	√		
16.	Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	√		
17.	Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	√		
18.	Bob Tyasika Ananta	Risiko Perencanaan dan Operasional	√		
19.	Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	√		
20.	Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	√		

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – firma anggota jaringan global PwC sesuai Laporan No. A160125003/DC2/ANG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – firma anggota jaringan global PwC sesuai Laporan No. A160215003/DC2/ANG/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".	14.963.812.207 suara atau 99,87% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.100 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	18.503.200 suara atau 0,12% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledigacquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu dalam rangka memenuhi Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan Laporan Perubahan Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.			
Kedua	Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu senilai Rp9.066.581.272.436,- (sembilan triliun enam puluh enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2015" sebagai berikut: Sebesar 25,00% dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai dividen tunai dan akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham. Sisanya akan digunakan sebagai Laba Ditahan. Alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar 1% dari Laba Bersih Tahun Buku 2015. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	14.981.040.607 suara atau 99,99% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.256.000 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	25.900 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
Ketiga	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016	14.740.588.303 suara atau 98,39% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	240.963.104 suara atau 1,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	771.100 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keempat	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, selain itu juga menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.	14.376.957.216 suara atau 95,96% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	586.644.837 suara atau 3,92% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	18.720.454 suara atau 0,12% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Kelima	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai dengan menggunakan saham tresuri (treasury stock).	12.337.372.858 suara atau 82,35% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.607.194.808 suara atau 17,40% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	37.754.841 suara atau 0,25% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keenam	Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris: • Sdr. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen • Sdr. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen • Sdr. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui pengalihan penugasan Sdr. Hartadi A. Sarwono dari Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen serta Sdr. Revrisond Baswir dan Sdr. Pataniari Siahaan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen.	11.903.946.787 suara atau 79,45% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.924.011.804 suara atau 19,52% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	154.363.916 suara atau 1,03% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
	Menyetujui dan mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris: Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut: • Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen • Sdr.Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen • Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris • Sdri.Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen • Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen • Sdr. Revrisond Baswir sebagai Komisaris Independen • Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris • Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Komisaris • Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.			

Agenda	Keputusan RUPST	Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Tidak Setuju (Jumlah Suara dan persentase)	Abstain (Jumlah Suara dan Persentase)
	Menyetujui dan mengangkat Sdr. Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Direktur Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut: • Sdr. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama • Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama • Sdr. Rico Rizal Budidarmosebagai Direktur • Sdr. Herry Sidharta sebagai Direktur • Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur • Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur • Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur • Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur • Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur. • Sdr. Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

BNI telah merealisasikan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2016, dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Keputusan RUPS	Status	Keterangan
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program bina Lingkungan untuk tahun buku 2015	Selesai	Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 26 Januari 2016 dan 17 Februari 2016.
2.	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015	Selesai	BNI telah mengumumkan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 10 April 2016
3.	Penetapan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2015, serta penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016	Selesai	Pemegang Saham telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016
4.	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku 2016.	Selesai	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst and Young)* telah selesai melaksanakan audit Perseroan pada tanggal 20 Januari 2017
5.	Persetujuan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pegawai dengan menggunakan saham tresuri (*treasury stock).*	Selesai	Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi terkait rencana pelaksanaan pengalihan saham yang dibeli kembali melalui Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk bonus saham Perseroan telah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat BNI No. KMP/1/1475 tanggal 12 Mei 2016.
6.	Perubahan Pengurus Perseroan	Selesai	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan telah menyatakan dalam akta Notaris tersendiri serta telah memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwiwarna serta membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

REFERENSI PERATURAN

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengharuskan seluruh perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi

kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, seperti dalam penyediaan dana kepada pihak terkait.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (PENGUNGKAPAN *BOARD MANUAL*)

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BNI diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/011/DK/2016 tanggal 12 Mei 2016, mencakup: Struktur, Persyaratan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris, nilai-nilai Perseroan serta Etika Kerja Dewan Komisaris dan larangan serta transparansi. Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
3. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwiwarna.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

8. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
6. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
12. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. pertanggungjawabannya sebagai

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan, dan syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara lengkap pengungkapan Perdoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat dilihat melalui *website* Perseroan dengan alamat www.bni.co.id (menu Hub. Investor - Tata Kelola).

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK	Pelaksana	Hasil
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	4 Mei 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Daniel Theodore Sparringa	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 10 Maret 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	15 September	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	8 Juni 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Revrisond Baswir*	Komisaris	24 Juni 2015 - 27 Juni 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
	Komisaris Independen	25 Januari 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Pataniari Siahaan*	Komisaris	25 Juni 2015-27 Juni 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
	Komisaris Independen	25 Januari 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Joseph F. P. Luhukay	Komisaris Independen	27 Juli	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Bistok Simbolon	Komisaris	10 Mei	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Joni Swastanto	Komisaris	20 April 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Wahyu Kuncoro**	Komisaris	25 Januari 2017	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

Keterangan:
**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
*** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Hartadi Agus Sarwono*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS LB tanggal 12 Januari 2016
Pradjoto**	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Daniel Theodore Sparringa***	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	RUPST tanggal 1 April 2014
Zulkifli Zaini***	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Revrisond Baswir****	Komisaris Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015 RUPST tanggal 10 Maret 2016 (Peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen)
Pataniari Siahaan****	Komisaris Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015 RUPST tanggal 10 Maret 2016 (Peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen)
Joseph F. P. Luhukay***	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Bistok Simbolon****	Komisaris	RUPS LB tanggal 12 Januari 2016
Joni Swastanto****	Komisaris	RUPST tanggal 10 Maret 2016
Wahyu Kuncoro****	Komisaris	RUPST tanggal 10 Maret 2016

Keterangan:
** Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak tanggal 4 Mei 2016*
***Menjadi Pelaksana Tugas Komisaris Utama/Komisaris Independen sampai dengan 4 Mei 2016*
**** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
*****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
****** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Pada periode 2016, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	64 Tahun	Pria	S1 Teknik Industri S2 Macroeconomics S3 Monetary Theory and Policy	Deputi Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Kepala Perwakilan BI di Tokyo Deputi Gubernur BI Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Makroekonomi dan Keuangan
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	S1 Hukum S2 Ekonomi	Ketua Dewan Etik Perbanas Penasehat hukum Dewan Gubernur BI Senior Advisor Bank Internasional Indonesia *Banking Expert* Kejaksaan Agung RI Komisaris Independen Bank Mandiri *Board of Advisor* Ikatan Bankir Indonesia (IBI) S*upervisor Board for Business Banking Code of Ethic* Perbanas	Hukum
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen	57 Tahun	Pria	S1 Sosiologi S2 Sosiologi S3 Sosiologi	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi Politik Anggota Komisaris Indonesia Power Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani Dosen Sosiologi di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga	Sosiologi
Kiagus Ahmad Badaruddin*	Komisaris	59 Tahun	Pria	S1 Ekonomi S2 Policy Economic	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian keuangan Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Komisaris Perusahaan Gas Negara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Inspektur Jenderal Kementarian Keuangan	Keuangan
Zulkifli Zaini*	Komisaris Independen	60 Tahun	Pria	S1 Teknik Sipil S2 Finance and International	*Managing Director* & SEVP Bank Mandiri Direktur Utama Bank Mandiri Komisaris Triputra Agro Persada Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara Tbk Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Perbankan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	54 Tahun	Wanita	S1 Agribisnis S2 Ekonomi Pertanian S3 Ekonomi Pertanian	Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan RI Dosen Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor	Keuangan
Revrisond Baswir***	Komisaris Komisaris Independen	58 Tahun	Pria	S1 Akuntansi S2 Administrasi Bisnis S3 Ilmu Ekonomi	Staf Ahli Kementerian HAM RI Staf Ahli DPD RI Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XIII, Pontianak Komisaris PTPN VIII, Bandung Komisaris dan Ketua Komite Audit PTPN XI, Surabaya Dosen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Anggota Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN	Ekonomi
Pataniari Siahaan***	Komisaris Komisaris Independen	70 Tahun	Pria	S1 Teknik Sipil Transportasi S2 Ilmu Hukum S3 Ilmu Hukum	Ketua dan Anggota pada DPR/MPR RI Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Ketua Tim Sosialisasi Putusan MPR RI Bidang Undang-undangDasar Negara RI Dosen Hukum Universitas Trisakti	Hukum
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen	70 Tahun	Pria	S1 Teknik Elektro S2 Ilmu Komputer S3 Ilmu Komputer	Pejabat eksekutif Bank Niaga EVP Operation Bahana Pembinaan Usaha Indonesia *Executive Director Capital Society of* Indonesia *Chief Operations Officer* Jakarta I*nitiative Task Force* Eksekutif & Partner pada *Ernst & Young* Direktur Utama Bank Lippo Direktur Utama Bank Danamon Penasehat Eksekutif Direksi Bank Panin Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance	Ekonomi dan Teknologi Informasi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Bistok Simbolon	Komisaris	60 Tahun	Pria	S1 Hukum S2 Ekonomi	Kepala Biro Hukum Sekretaris Kabinet Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Komisaris dan Komisaris Utama PT Industri Kereta Api (Persero) Wakil Sekretaris Kabinet	Hukum
Joni Swastanto	Komisaris	60 tahun	Pria	S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Ilmu Ekonomi	Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, BI Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, BI Kepala Perwakilan Semarang, BI Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, BI Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB, OJK	Perbankan
Wahyu Kuncoro****	Komisaris	47 Tahun	Pria	S1 Pertanian S1 Ekonomi S2 Magister Management	Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIB Kementrian BUMN Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kepala Bidang Usaha Industri Primer Kementrian BUMN Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementrian BUMN Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN Asisten Deputi Perbankan dan Asuransi, Kementerian BUMN Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Angkasa Pura II (Persero) Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian BUMN	Manajemen

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
*** Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada periode 2016, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2016 – 12 Januari 2016 Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang wakil Komisari Utama merangkap Komisaris Independen dan sebagai pelaksana tugas Komisaris Utama/ Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris dan 4 (empat) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Komposisi Dewan Komisaris per 1 Januari 2016 - 12 Januari 2016 sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Dan Pelaksana tugas Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Daniel Theodore Sparringa	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	25 Juni 2015
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	Jakarta	1 April 2014	15 September 2014
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	8 Juni 2015
Revrisond Baswir	Komisaris	Yogyakarta	17 Maret 2015	24 Juni 2015
Pataniari Siahaan	Komisaris	Jakarta	17 Maret 2015	25 Juni 2015
Joseph F. P. Luhukay	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	27 Juli 2015

Pada tanggal 12 Januari 2016, BNI melaksanakan RUPS Luar Biasa yang salah satu agendanya adalah mengangkat 2 (dua) anggota Komisaris baru. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 12 Januari 2016 – 10 Maret 2016 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang wakil Komisari Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 4 (empat) orang Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris per 12 Januari 2016 - 10 Maret 2016 sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Jakarta	12 Januari 2016	4 Mei 2016
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Daniel Theodore Sparringa	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	25 Juni 2015
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	Jakarta	1 April 2014	15 September 2014
Zulkifli Zaini	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Efektif
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	8 Juni 2015
Revrisond Baswir	Komisaris	Yogyakarta	17 Maret 2015	24 Juni 2015
Pataniari Siahaan	Komisaris	Jakarta	17 Maret 2015	25 Juni 2015
Joseph F. P. Luhukay	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	27 Juli 2015
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016

Pada tanggal 10 Maret 2016, BNI melaksanakan RUPS Tahunan yang salah satu agendanya adalah mengangkat 2 (dua) anggota Komisaris baru dan memberhentikan 3 (tiga) Komisaris serta peralihan 2 (dua) anggota Komisaris menjadi Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode Selama Periode 10 Maret 2016 – 27 Juni 2016 Dewan Komisaris berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 10 Maret 2016 – 25 Oktober 2016 adalah sebagai berikut.

Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	12 Januari 2016	4 Mei 2016
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Kiagus Ahmad Badaruddin	Komisaris	Jakarta	1 April 2014	15 September 2014
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	8 Juni 2015
Revrisond Baswir*	Komisaris Independen	Yogyakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017
Pataniari Siahaan*	Komisaris Independen	Jakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Wahyu Kuncoro**	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017

Keterangan
**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*
*** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

Sejak tanggal 27 Juni 2016, 2 (dua) anggota Komisaris melaksanakan *cooling off* dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen, dan pada tanggal 25 Januari 2017, Bapak Revrisond Baswir dan Bapak Pataniari Siahaan telah efektif menjabat sebagai Komisaris Independen.

Tanggal 25 Oktober 2016, Bapak Kiagus Ahmad Badaruddin diangkat menjadi Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketua PPATK tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain. Selama Periode 25 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 25 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Tanggal efektif
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	12 Januari 2016	4 Mei 2016
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	Jakarta	17 Maret 2015	8 Juni 2015
Bistok Simbolon	Komisaris	Jakarta	12 Januari 2016	10 Mei 2016
Revrisond Baswir*	Komisaris Independen	Yogyakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017
Pataniari Siahaan*	Komisaris Independen	Jakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017
Joni Swastanto	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	20 April 2016
Wahyu Kuncoro**	Komisaris	Jakarta	10 Maret 2016	25 Januari 2017

Keterangan
**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*
*** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris														
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Ket
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Hubungan Kepengu-rusan		
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√	
Zulkifli Zaini*	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Anny Ratnawati	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Revrisond Baswir***	Komisaris Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Pataniari Siahaan***	Komisaris Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√	
Bistok Simbolon	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√	
Joni Swastanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√	
Wahyu Kuncoro****	Komisaris		√		√	√			√		√		√		√	Pejabat Kementrian BUMN

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
***Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2016 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 5 (lima) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 62.50% dari Komisaris yang ada dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/OJK.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK. Kriteria Komisaris Independen diatur dalam:

1. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
   a. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independendan 1 (satu) orang komisaris utusan.
   b. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Pasal 8 PBI No. 12/7/PBI/2010 tentang perubahan atas PBI NO. 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap Komisaris Independen wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2.
3. Pasal 21 ayat (2) huruf a POJK No. 33/POJK.04/2014
   Yang menyatakan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
4. Pasal 26 ayat (1) POJK 55/POJK.03/2016
   Yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen.

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali.

Menyatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.

Jakarta,

(Komisaris Independen)

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, antara lain sebagai berikut.

1. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Pengurus partai politik dan/atau anggota legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau

Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan, atau

b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BNI.

3. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
   a. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham BNI yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BNI; dan/atau
   b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau organisasi nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BNI.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen	-	-
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Komisaris	-	-
Zulkifli Zaini8	Komisaris Independen	-	-
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	-	-
Revrisond Baswir*	Komisaris Komisaris Independen	-	-
Pataniari Siahaan*	Komisaris Komisaris Independen	-	-
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen	-	-
Bistok Simbolon	Komisaris	-	-
Joni Swastanto	Komisaris	-	-
Wahyu Kuncoro**	Komisaris	Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	Kementerian BUMN

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
***Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

*** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan Benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Nomor IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas Hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Persesoan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modaldisetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1. BNI;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui table di bawah ini

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			BNI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	12 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	22 Mei 2015 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 10 Maret 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Komisaris	1 April 2014 – 25 Oktober 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zulkifli Zaini*	Komisaris Independen	17 Maret 2015 – 10 Maret 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Revrisond Baswir***	Komisaris Komisaris Independen	17 Maret 2015 – 10 Maret 2016 10 Maret 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			BNI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Pataniari Siahaan***	Komisaris Komisaris Independen	17 Maret 2015 – 10 Maret 2016 10 Maret 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen	17 Maret 2015 – 10 Maret 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bistok Simbolon	Komisaris	12 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Joni Swastanto	Komisaris	10 Maret 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Wahyu Kuncoro****	Komisaris	10 Maret 2016 – 31 Desember 2016	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
***Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

REKOMENDASI/PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain dilakukan antara lain melalui rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau rapat dengan mengundang Direktur sektor, serta rapat dan evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2016 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
   a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2016, antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2016 setiap bulan.
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi.
   c. Melakukan penelaahan Revisi RBB Tahun 2016-2018 dan penelaahan RBB tahun 2017-2019.
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI setiap bulan serta menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kementrian BUMN secara triwulanan
3. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan
4. Melakukan *review* pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2015 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.

5. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang efektif
6. Pengawasan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu Satuan Pengawasan Internal BNI, antara lain:
   a. Melakukan evaluasi atas *internal control* atau Satuan Pengawasan Internal BNI setiap tahun.
   b. Melakukan *review* rencana dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindaklanjut hasil audit dari pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal BNI.
   c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawasan Internal BNI, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, auditor eksternal atau hasil audit akuntan publik antara lain dengan meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit baik secara tertulis maupun secara lisan.
   d. Melakukan *review* atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal BNI yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
7. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2015 dan Semester I-2016 serta mendorong Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
8. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko, antara lain:
   a. Memastikan efektivitas sistem dan proses manajemen risiko dengan memantau pengelolaan risiko utama Bank, melakukan *review* atas Profil Risiko secara berkala dan evaluasi atas posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun.
   b. Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI , serta melakukan *review* dan memberikan arahan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.
9. Melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan *review* atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
10. Memastikan terselenggaranya prinsip dan praktek GCG pada seluruh jenjang organisasi, melakukan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG, mendorong penyempurnaan praktek GCG dengan mengacu kepada *international best practices* serta melakukan *review* laporan pelaksanaan GCG.
11. Melakukan *review* Laporan perkembangan Perkara Materiil secara berkala
12. Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
13. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi yang terkait dengan penciptaan sinergi dan penguatan bisnis perusahaan anak serta melakukan r*eview* atas Kinerja Perusahaan Anak.
14. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit antara lain memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit di atas jumlah tertentu, persetujuan atas pemberian fasilitas kredit pada pihak terkait yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan *review* secara rutin dan berkala terhadap perkembangan Kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris, melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi perkreditan, serta melakukan *review* secara berkala terhadap perkembangan perkara *Non Performing Loan* (NPL).
15. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan

dengan fungsi strategis sumber daya Manusia dalam mendukung pencapaian rencana jangka panjang Bank.

16. Melakukan *Self Assessment* yaitu melakukan penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan Komisaris termasuk Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
17. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Sektor, melakukan pengawasan terhadap pencapaian rencana kerja Direktur Sektor, serta melakukan *review* atas kebijakan, strategi dan program kerja Direktur Sektor.
18. Melakukan *review* Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BN.
19. Melakukan *review* remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi pegawai.
20. Mengadakan Rapat-Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi atau Direktur Sektor terkait secara teratur untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan lain-lain yang diselenggarakan secara rutin sebanyak 26 (dua puluh enam kali pertemuan).
21. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan
22. Melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris; atau
2. Atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau atau dengan mengundang Direktur sektor yang terkait.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (RADIKOM) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.

Frekuensi Dan Kehadiran Rapat

Adapun frekuensi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	25	21	84%	12	11	91,67%
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	26	22	84,61%	12	9	75%
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen	7	7	100%	2	2	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Komisaris	22	16	72,73%	10	6	60%
Zulkifli Zaini*	Komisaris Independen	7	7	100%	2	2	100%
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	26	23	88,46%	12	10	83,33%
Revrisond Baswir***	Komisaris Komisaris Independen	15	13	86,67%	6	6	100%
Pataniari Siahaan***	Komisaris Komisaris Independen	15	14	93,33%	6	6	100%
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen	7	6	85,71%	2	2	100%
Bistok Simbolon	Komisaris	25	12	48%	12	7	58,33%
Joni Swastanto	Komisaris	19	19	100%	10	10	100%
Wahyu Kuncoro****	Komisaris	19	9	47,37%	10	4	40%

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
***Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

Agenda, Tanggal Dan Peserta Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 26 (dua puluh enam) kali serta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1	11 Januari 2016	Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Persetujuan kredit kepada pihak terkait. • Konsultasi kredit • Review perkembangan kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris semester II/2015. • Program kerja dan progress report Tahun Buku 2015.	Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay	√ √ √ √ √ √ √ √	
2	18 Januari 2016	Penjelasan Kantor Akuntan Publik mengenai progress audit atas Laporan Konsolidasi BNI tahun 2015. Lain-lain	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ - √ √ √ √ √ √	 Izin
3	1 Februari 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Pembahasan Konsultan Independen untuk Jasa Konsultasi Remunerasi Diireksi dan Dewan Komisaris, serta Progress Annual Report. • Penetapan jadwal dan mekanisme Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Sektor • Kinerja DPLK Semester II-2015 dan Strategi 2016. • Kinerja perusahaan anak Semester II/2015 dan Strategi 2016. • Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan • Semester II/2015 (Triwulan III dan IV). • Laporan pelaksanaan perkara materiil Semester II/2015 (Triwulan III dan IV).	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
4	3 Februari 2016	Presentasi Konsultan Independen mengenai penyusunan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	- √ √ - √ √ - √ - -	Izin Izin Izin Izin Izin
5	10 Februari 2016	• Pembahasan Progress Pekerjaan Konsultan Independen untuk Jasa Penyusunan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. • Talent pool BNI. • Laporan Komite Audit mengenai hasil pemeriksaan Satuan Pengawas intern BNI. • Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris terkait risiko. • Lain-lain	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ √ √ √ √ - √ -	 Izin Izin
6	17 Februari 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Laporan/Paparan hasil kajian Konsultan Independen mengenai Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. • Pembahasan tentang Laporan Pengawasan RBB Semester II/2015 • Pembahasan hal-hal yang bersifat strategis Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Kebijakan Direksi terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia • Struktur Organisasi.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin
7	2 Maret 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Tanggapan atas Laporan Kinerja BNI sampai dengan triwulan IV 2015 kepada Kementrian BUMN. • Usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris BNI kepada Kementrian BUMN • Pembahasan Draft Revisi Board Manual Dewan Komisaris • Pengakhiran dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko • Persetujuan materi Perjanjian Kerja anggota Komite Independen Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris • Persetujuan usulan revisi Kebijakan Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang disampaikan Direksi	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P. Luhukay Bistok Simbolon	√ - √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin Izin
8	16 Maret 2016	• Perkenalan Komisaris baru. • Penetapan Anggota Komisaris pada Komite-komite di bawah Dewan komisaris. • Resume catatan dan review Komite Audit atas kinerja BNI sampai dengan Februari 2016. • Penetapan kembali usulan calon anggota Independen Komite Pemantau Risiko. • Lain-lain	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ - √ -	 Izin Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
9	31 Maret 2016	• Laporan Komite Audit mengenai review atas revisi Piagam Audit Internal, dan rekomendasi KAP untuk tahun buku 2016. • Lain-lain.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ - √ √ √ √	 Izin
10	14 April 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris • Usulan revisi Board manual Dewan Komisaris. • Review Komite Audit terhadap Kinerja BNI Triwulan I/2016 • Penambahan modal kepada BNI Multifinance • Perubahan Piagam Komite Audit Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi kredit • Rencana penambahan penyertaan modal kepada perusahaan anak. • Piagam Audit Internal	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ - - √ √ √ √ √ √	 Izin Izin
11	28 April 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris. • Perkembangan proses Fit and Proper Test bagi Calon Dewan Komisaris BNI. • Draft Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual) Dewan Komisaris. • Keanggotaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. • Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. • Persetujuan *Corporate Secretary* BNI Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi Kredit • Persetujuan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada pihak terkait	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	- √ √ √ √ √ - √ -	Izin Izin Izin
12	12 Mei 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Penetapan Ketua dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. • Usulan perubahan materi SK Dewan Komisaris mengenai Ketentuan Umum anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. • Perkembangan proses fit and proper test Komisaris Independen • Lain-lain Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Kinerja sektor hubungan kelembagaan dan transaksional Perbankan	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin
13	26 Mei 2016	Internal Dewan Komisaris • Perkembangan pengalihan tugas Komisaris menjadi komisaris independen. • Penetapan anggota komite di bawah Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Persetujuan permohonan tambahan fasilitas kredit kepada pihak terkait • Konsultasi kredit. • Review perkembangan kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris Triwulan I/2016.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ - √ √ - √ √	 Izin Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
14	9 Juni 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Tindaklanjut peralihan jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen • Pembahasan SK Dekom tentang Ketentuan Umum bagi Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris • Tindaklanjut usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris • Komunikasi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dengan Dewan Komisaris. Rapat Dewan komisaris bersama Direktur Sektor • Kinerja Sektor Konsumer Banking	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ - √ √ - √ √	 Izin Izin
15	23 Juni 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris. • Persetujuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan jasa KAP 2016. • Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank BNI 2016-2018. • Usulan Direksi mengenai perubahan kebijakan DPLK BNI. • Persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai usulan Direksi terhadap perubahan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). • Pembahasan hasil Review Komite Pemantau Risiko terhadap materi konsultasi kredit Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi Kredit.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ - √ √ √ √ √ -	 Izin Izin
16	21 Juli 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2016. • Rencana kunjungan kerja Dewan Komisaris. • Rapat Dewan Komisaris mengundang Senior Eksekutif Vice President (SEVP) Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Kinerja Jaringan dan Layanan.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ - √ √	Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
17	4 Agustus 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Laporan hasil rapat Komite Audit selama Triwulan II tahun 2016. • Hasil review Komite Audit terhadap permohonan Direksi terkait pengesahan dan persetujuan atas usulan Pelepasan sebagian Aset Tanah Milik BNI yang terkena proyek Pemerintah. • Laporan Pengawasan RBB Semester I tahun 2016. • Tanggapan atas laporan kinerja BNI sampai dengan Triwulan II tahun 2016. • Cooling off calon Komisaris independen. • Pemberhentian dan pengangkatan anggota independen Komite Pemantau Risiko. • Perubahan SK Dewan Komisaris yang mengatur ketentuan Umum anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. • Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Komisaris. • Tanggapan terhadap permohonan konsultasi kredit yang disampaikan Direksi. • Job description dan pembagian tugas Organ Dewan Komisaris. • Lain-lain. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi kredit	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √	
18	18 Agustus 2016	• Laporan Komite Audit mengenai review materi kinerja keuangan BNI posisi Juli 2016 • Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai hasil evaluasi terhadap Unit Pengembangan Perusahaan Anak. • Rencana kunjungan kerja Dewan Komisaris.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √	
19	15 September 2016	• Permohonan pengesahan dan persetujuan atas usulan pelepasan sebagian aset tanah milik BNI yang terkena proyek pemerintah. • Permohonan penggunaan Room BMPK pihak terkait. • Permohonan Persetujuan Prinsip Lisensi Kerjasama dengan *China Union Pay*.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ - √ -	 Izin Izin
20	22 September 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Pembahasan draft surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi yang bersifat materil. • Laporan Komite Audit mengenai review Financial Perfomance bulan Agustus 2016 • Lain-lain Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • *Kick off Meeti*ng Audit Tahun Buku 2016 (Presentasi Kantor Akuntan Publik).	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ - √ -	 Izin Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
21	6 Oktober 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris. • Review Ketentuan/Pedoman konsultasi Kredit kepada Dewan komisaris. • Hasil review Komite Pemantau Risiko terhadap permohonan konsultasi Kredit oleh Direksi Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi kredit.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √	
22	20 Oktober 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √	
23	7 November 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris 2017 • Review terhadap Pedoman Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris. • Pembahasan surat Dewan Komisaris kepada Kementrian BUMN mengenai kinerja triwulan III-2016 • Laporan hasil review kinerja DPLK BNI oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Laporan Kinerja DPLK Semester I/2016. • Permohonan persetujuan atas usulan penetapan kenaikan manfaat pensiun. • Tindak lanjut atas SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi bank Umum. • Paparan tentang fit and proper test pengurus Bank.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ - √ -	 Izin Izin
24	17 November 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Review kebijakan konsultasi kredit kepada Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Konsultasi Kredit.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ - √ √ -	 Izin Izin
25	28 November 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris: • Laporan Rekap Rapat Komite tahun 2016. • Laporan hasil review Pedoman Konsultasi Kredit • Rev*iew* Peraturan terkait Dewan Pengawas DPLK. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Sektor • Permohonan persetujuan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. • Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I, II dan III Tahun 2016 • Laporan Kepatuhan sampai dengan Triwulan III/2016 • Realisasi Review Divisi Kepatuhan. • Program Whistle Blowing System dan Strategi Anti Fra*ud*. • Laporan perkembangan perkara materiil.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ - √ -	 Izin Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
26	15 Desember 2016	Rapat Internal Dewan Komisaris • Laporan Komite Pemantau Risiko mengenai Rapat dan Evaluasi Komite Pemantau Risiko tahun 2016. • Laporan Pokok-pokok saran dan Pendapat Komite Pemantau Risiko Triwulan III dan IV • Pendapat Komite Audit mengenai review Financial Perfomance November 2016. Rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Sektor • Penyampaian review Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Intern BNI.	Hartadi Agus Sarwono Pradjoto Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ - √ √ √ -	 Izin Izin

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebagai berikut.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket.	Peserta Rapat -Direksi	Kehadiran	Ket.
1.	18 Januari 2016	• Pengenalan Komisaris dan Direksi • Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI per Desember 2015	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ - √ √ √ √ √ √	 Izin 	Achmad Baiquni Suprajarto Sutanto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan	√ √ √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin
2.	17 Februari 2016	• Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI posisi Januari 2016 • Kebijakan Direksi terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia (antara lain rekrutmen, pengembangan, karir, talent pool) serta Struktur Organisasi.	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Joseph F. P Luhukay Bistok Simbolon	√ √ √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin	Achmad Baiquni Suprajarto Sutanto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan	- √ √ √ √ √ √ √ √ -	Izin Izin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket.	Peserta Rapat -Direksi	Kehadiran	Ket.
3.	16 Maret 2016	• Kinerja keuangan konsolidasi BNI Posisi Februari 2016 • Perkembangan dan permasalahan bisnis retail & KUR termasuk update Remedial. • Action plan antisipasi penurunan Net Interest Margin (NIM) dan suku bunga kredit, serta upaya peningkatan *Fee Based Income* (FBI).	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ - √ -	 Izin Izin	Achmad Baiquni Suprajarto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ - √ √ - √ √ - √	Izin Izin Izin Izin
4.	14 April 2016	Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi Maret 2016.	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ - - √ √ √ √ √ √	 Izin Izin 	Achmad Baiquni Suprajarto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - - - - √ √ √ √ √	 Izin Izin Izin Izin
5.	12 Mei 2016	Kinerja keuangan konsolidasi BNI Posisi April 2016.	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ √ √ √ √ -	 Izin	Achmad Baiquni Suprajarto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- - - - √ √ √ √ √ √	Izin Izin Izin Izin
6.	23 Juni 2016	• Kinerja keuangan BNI sampai dengan Mei 2016 • Revisi RBB BNI Tahun 2016 – 2018	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond Baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ - √ √ √ √ √ -	 Izin Izin	Achmad Baiquni Suprajarto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ - √ √ √ √ √ √	 Izin
7.	21 Juli 2016	• Kinerja Keuangan BNI sampai dengan Juni 2016 • Paparan/update materi exit meeting Dengan OJK	Hartadi A. Sarwono Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Wahyu Kuncoro	√ √ √ √ - √ √	 Izin 	Achmad Baiquni Suprajarto Rico Rizal Budidarmo Herry Sidharta Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Anggoro Eko Cahyo Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- - √ - √ √ √ - √ √	Izin Izin Izin Izin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Ket.	Peserta Rapat -Direksi	Kehadiran	Ket.
8.	18 Agustus 2016	Kinerja keuangan konsolidasi BNI posisi Juli 2016	Hartadi A. Sarwono	√		Achmad Baiquni	-	Izin
			Pradjoto	-	Izin	Suprajarto	-	Izin
			Kiagus Ahmad Badaruddin	-	Izin	Rico Rizal Budidarmo	-	Izin
						Herry Sidharta	√	
			Anny Ratnawati	-	Izin	Adi Sulistyowati	-	Izin
			Bistok Simbolon	-	Izin	Bob Tyasika Ananta	-	Izin
			Joni Swastanto	√		Anggoro Eko Cahyo	√	
			Wahyu Kuncoro	√		Imam Budi Sarjito	√	
						Panji Irawan	√	
						Putrama Wahju Setyawan	√	
9.	22 September 2016	Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI Posisi Agustus 2016	Hartadi A. Sarwono	√		Achmad Baiquni	√	
			Pradjoto	√		Suprajarto	-	Izin
			Kiagus Ahmad Badaruddin	√		Rico Rizal Budidarmo	√	
						Herry Sidharta	√	
			Anny Ratnawati	√		Adi Sulistyowati	-	Izin
			Bistok Simbolon	-	Izin	Bob Tyasika Ananta	-	Izin
			Joni Swastanto	√		Anggoro Eko Cahyo	-	Izin
			Wahyu Kuncoro	-	Izin	Imam Budi Sarjito	√	
						Panji Irawan	√	
						Putrama Wahju Setyawan	√	
10.	20 Oktober 2016	• Kinerja Keuangan Triwulan III/2016 • Konsep awal Rencana Bisnis Bank (RBB)	Hartadi A. Sarwono	-	Izin	Achmad Baiquni	-	Izin
			Pradjoto	√		Suprajarto	√	
			Kiagus Ahmad Badaruddin	√		Rico Rizal Budidarmo	√	
						Herry Sidharta	√	
			Anny Ratnawati	√		Adi Sulistyowati	-	Izin
			Bistok Simbolon	√		Bob Tyasika Ananta	√	
			Joni Swastanto	√		Anggoro Eko Cahyo	-	Izin
			Wahyu Kuncoro	√		Imam Budi Sarjito	√	
						Panji Irawan	√	
						Putrama Wahju Setyawan	√	
11.	17 November 2016	• Kinerja keuangan konsolidasi BNI Posisi Oktober 2016. • Penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI Tahun 2017-2019	Hartadi A. Sarwono	√		Achmad Baiquni	-	Izin
			Pradjoto	√		Suprajarto	-	Izin
			Anny Ratnawati	-	Izin	Rico Rizal Budidarmo	√	
			Bistok Simbolon	√		Herry Sidharta	√	
			Joni Swastanto	√		Adi Sulistyowati	√	
			Wahyu Kuncoro	-	Izin	Bob Tyasika Ananta	-	Izin
						Anggoro Eko Cahyo	√	
						Imam Budi Sarjito	√	
						Panji Irawan	-	Izin
						Putrama Wahju Setyawan	√	
12.	15 Desember 2016	Kinerja keuangan konsolidasi BNI sampai dengan November 2016.	Hartadi A. Sarwono	√		Achmad Baiquni	-	Izin
			Pradjoto	-	Izin	Suprajarto	-	Izin
			Anny Ratnawati	√		Rico Rizal Budidarmo	√	
			Bistok Simbolon	√		Herry Sidharta	√	
			Joni Swastanto	√		Adi Sulistyowati	√	
			Wahyu Kuncoro	-	Izin	Bob Tyasika Ananta	-	Izin
						Anggoro Eko Cahyo	√	
						Imam Budi Sarjito	√	
						Panji Irawan	-	Izin
						Putrama Wahju Setyawan	√	

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Selama 2016, Dewan Komisaris telah mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain:

1. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Gatoet Gembiro Noegroho Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Pengangkatan Saudari Ayu Sari Wulandari Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Pengakhiran Pengangkatan Saudari Ancella Anitawati Hermawan Sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
4. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Zulkifli Zaini Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
5. Pengangkhiran Pengangkatan Saudara Daniel Theodore Sparringa Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
6. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Joseph F.P. Luhukay Sebagai Ketua Komite Audit
7. Pengakhiran Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Pengangkatan Saudari Anny Ratnawati Sebagai Ketua Komite Audit
9. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Sigid Moerkardjono Sebagai Anggota Independen Komite Audit
11. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12. Pengangkatan Saudara Joni Swastanto Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
13. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Tubagus Chairul Amachi Sebagai Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14. Pengangkatan Saudara Joni Swastanto Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
15. Pengangkatan Saudara Hartadi Agus Sarwono Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
16. Pengangkatan Saudara Hartadi Agus Sarwono Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
17. Pengangkatan Saudara Bistok Simbolon Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
18. Pengangkatan Saudara Bistok Simbolon Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
19. Pengangkatan Saudari P. Donnaria Silalahi Sebagai Anggota Independen Komite Audit
20. Pengangkatan Saudara Bambang Ratmanto Sebagai Anggota Independen Komite Audit
21. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Subarjo Joyosumarto Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
22. Pengangkatan saudara Hari Dewanto Sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
23. Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2016 dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kinerja Tahun 2015
24. Piagam Komite Pemantau Risiko
25. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Hari Dewanto Sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
26. Pengangkatan Saudara Irwan Rinaldi Sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
27. Ketentuan Umum Pengangkatan, Pemberhentian, Pengaturan Tugas serta Honorarium Anggota Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
28. Pengangkatan Saudara Rizqullah Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
29. Pengangkatan Saudari Rosa Lima Dwi Mutiari Sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
30. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Kiagus Ahmad Badaruddin Sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
31. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Kiagus Ahmad Badaruddin Sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
32. Persetujuan Atas Pernyataan Tertulis Pendiri Dana Pensiun Bank Negara Indonesia

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Program orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program orientasi adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif.

Mengingat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2016 terdapat Mata Acara Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memiliki latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak, maka Bank BNI melakukan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru dalam bentuk:

1. Distribusi Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Kode Etik, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh dewan Komisaris.
3. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan tersebut diberikan dengan cara melakukan presentasi oleh Unit terkait kepada anggota Dewan Komisaris dimaksud serta melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah/Cabang Perseroan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Daniel Theodore Sparringa*	Komisaris Independen	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/ Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Komisaris	Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Zulkifli Zaini*	Komisaris Independen	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/ Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Anny Ratnawati	Komisaris Independen	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/ Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Revrisond Baswir***	Komisaris Komisaris Independen	Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Pataniari Siahaan***	Komisaris Komisaris Independen	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/ Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Joseph F. P. Luhukay*	Komisaris Independen	-	-	-
Bistok Simbolon	Komisaris	-	-	-

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Joni Swastanto	Komisaris	Seminar Pengendalian Grafitikasi Seminar Revisit Enterprise Risk Management And Learning Best Practices of Credit Risk Management	Senin, 17 Oktober 2016, di Kantor Pusat BNI Gedung BNI, Ruang Serbaguna Lt.25 Jakarta Kamis- Jumat, 1-2 Desember 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BNI Banker Association for Risk Management (BARa)
Wahyu Kuncoro****	Komisaris	-	-	-

Keterangan:
** Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*
***Berhenti menjabat sejak 25 Oktober 2016*
****Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***** Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Di samping program peningkatan kompetensi di atas, Dewan Komisaris juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2016, Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Sertifikas Manajemen Risiko
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Level 2
Revrisond Baswir*	Komisaris Komisaris Independen	Level 2
Pataniari Siahaan*	Komisaris Komisaris Independen	Level 2
Bistok Simbolon	Komisaris	Level 1
Joni Swastanto	Komisaris	Level 1
Wahyu Kuncoro**	Komisaris	Level 1

Keterangan:
**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 .Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*
***Efektif menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 25 Januari 2017*

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai macam prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS OLEH RUPS

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tersebut kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS menyatakan serta memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2016 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2016 yang seluruhnya tercapai

Pihak Yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Oleh Rups

Kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2016 tercermin dari pencapaian realisasi Program Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tahun 2016 yang seluruhnya tercapai, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Tahunan Perseroan. Di samping itu dalam Anggaran Dasar BNI juga diatur kewajiban Dewan Komisaris untuk menyusun program kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disusun oleh Direksi. Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan perseroan selama tahun berjalan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui Assessment GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui Self Assesment GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pelaksanaan Self Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris Melalui Assessment GCG

Pelaksanaan Self Assesment GCG ini dilaksanakan secara periodik tiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Melalui Assessment GCG

Kriteria Self Assessment Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG Kriteria Self Assessment Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Governance structure terdiri dari 14 indikator, Governance Process terdiri dari 17 indikator sedangkan governance outcome terdiri dari 6 indikator.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui Assessment GCG

Faktor-faktor positif ketiga aspek tersebut yang ada pada Dewan Komisaris dan dituangkan dalam *Self Assesment* GCG Periode 31 Desember Tahun 2016 antara lain sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen

yang tinggi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara efektif antara lain melalui forum Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG;
3. Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2015;
4. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Hasil *self assessment* GCG Periode 31 Desember 2016 tersebut, BNI mendapat nilai komposit 2 (Baik).

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui Asean CG Scorecard

Salah satu mekanisme penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang berasal dari eksternal adalah melalui ASEAN CG *Scorecard*.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris Melalui Asean Cg Scorecard

Prosedur pelaksanaan *assessment* Kinerja Dewan Komisaris melalui ASEAN CG *Scorecard* dilakukan berdasarkan informasi atau dokumen-dokumen yang tersedia di publik berkaitan dengan praktik-praktik GCG terkait kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Melalui Asean Cg Scorecard

Parameter penentu tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam penilaian ASEAN CG *Scorecard* adalah sebagai berikut.

No	Parameter Penentu
1	Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
2	Struktur Dewan Komisaris.
3	Proses Dewan Komisaris.
4	Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris.
5	Kinerja Dewan Komisaris.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan *assessment* kinerja Dewan Komisaris berdasarkan ASEAN CG *Scorecard* adalah melalui IICD sebagai lembaga resmi yang ditunjuk OJK untuk melakukan *assessment* terhadap Bank.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS MELALUI ASEAN CG SCORECARD

Score BNI 2016 terhadap komponen prinsip utama kelima yaitu tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebesar 30.93 atau dengan predikat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris telah konsisten dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 BNI tanggal 10 Maret 2016, RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut.
1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/ honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Adapun struktur remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 adalah sebagai berikut.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1.	Honorarium	Komisaris Utama sebesar 50% dari Direktur Utama.
		Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% dari Direktur Utama
		Anggota Dewan Komisaris sebesar 45% dari Direktur Utama.
2.	Tunjangan	
	Hari Raya	Dewan Komisaris diberikan tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium.
	Transportasi	Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium.
	Asuransi Purna Jabatan	Diberikan selama menjabat Premi yang ditanggung perusahaan adalah maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
3.	Fasilitas	
	Kesehatan	Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: • Rawat jalan dan obat, • Rawat inap dan obat, • Medical check up dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri. Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
	Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa dilembaga peradilan. Jasa kantor pengacara atau konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya adalah untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. Penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan Perseroan.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut.

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Untuk presentasi penetapan Remunerasi Dewan Komisaris adalah 50% dari Direktur Utama untuk Komisaris Utama dan 45 % dari Direktur Utama untuk anggota Komisaris.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Berikut jumlah nominal/komponen remunerasi Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi		
• Gaji	9 ORANG	9.032,84,-
• Tunjangan Perumahan	-	-
• Tunjangan Transportasi	9 ORANG	1.422, 62,-
• Tunjangan Hari Raya	9 ORANG	911,63,-
• Tantiem	9 ORANG	53.153,28,-
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
• Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Asuransi Purna Jabatan (dapat dimiliki)	9 ORANG	1.750,51,-
• Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	9 ORANG	22,85,-

Komposisi honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
- Komisaris Utama sebesar 50% dari gaji Direktur Utama
- Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% dari gaji Direktur Utama
- Komisaris sebesar 45% dari Direktur Utama

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Orang	Jutaan Rp
Di atas Rp. 2 miliar	5 ORANG	20.434,00,-
Di atas Rp. 1 miliar - Rp. 2 miliar	4 ORANG	5.929, 45,-
Di atas Rp. 500 juta - Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

Tantiem

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2016 adalah sebesar 0,58% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015 diberikan kepada Dewan Komisaris dengan proposi terhadap Direktur Utama yaitu Komisaris Utama sebesar 50% , Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% dan anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45%.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut.

1. Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
   b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
   d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
4. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), jika terjadi hal tersebut maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI ATURAN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

BOARD MANUAL DIREKSI

Sama halnya dengan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, maka dalam rangka menyempurnakan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan sebagai salah satu upaya implementasi praktik GCG di BNI, maka dilakukanlah suatu penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/150/DIR/R tanggal 11 April 2016 sehingga terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor KP/244/DIR/R tanggal 29 Juni 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi mengatur antara lain tentang Landasan Hukum, Struktur, Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, Masa Jabatan Direksi, Pembentukan Komite di Bawah Direksi, Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Waktu Kerja Direksi, Nilai Perseroan, Etika Kerja Direksi, Transparansi, serta Pelaporan dan Tanggung Jawab.

Selain beberapa hal terkait tata tertib kerja yang diatur di atas, beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Menghapusbuku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh dewankomisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewajiban Direksi

Selain itu, Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
4. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri.
9. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
10. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.
11. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
12. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
13. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
   a. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
      i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau;
      ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
   e. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan
   f. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
2. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
   a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
   c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Entitas Utama dan Anak Usahanya.
3. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perbankan, Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
   dan syarat lain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Achmad Baiquni	Direktur Utama	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	RUPST tanggal 17 Mei 2010 diangkat kembali pada RUPST tanggal 1 April 2014
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	RUPS LB tanggal 12 Januari 2016

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	RUPST tanggal 17 Maret 2015
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	RUPST 10 Maret 2016

* berhenti menjabat sejak tanggal 10 Maret 2016

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengikuti proses *Fit and Proper Test*, Perseroan mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif berdasarkan surat OJK	Pelaksana	Hasil
Achmad Baiquni	Direktur Utama	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Sutanto	Direktur Bisnis Banking 2	12 Juli 2010	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	16 April 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	11 April 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	22 Mei 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	15 Juli 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.

Pada periode 2016, keberagaman komposisi Direksi Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Achmad Baiquni	Direktur Utama	60	Pria	S1 Ekonomi Pembangunan S2 Bisnis Manajemen	• Direktur Konsumer BNI • Direktur Korporasi BNI • Direktur Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Syariah BNI • Direktur Keuangan BRI	Ekonomi
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	61	Pria	S1 Ekonomi S2 Manajemen Pemasaran S3 Manajemen Bisnis	• *Corporate Secretary* BRI • Pemimpin Wilayah BRI • Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BRI	Manajemen
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	54	Pria	S1 Ekonomi Manajemen MBA dan MIS Business and Finance S3 Doktor Manajemen Bisnis	• GM/EVP *Treasury* di BRI • Direktur R*isk and Compliance* di BTN.	Manajemen keuangan
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	60	Pria	S1 Manajemen S2 Business Administration	• Pemimpin Divisi Korporasi BNI • Pemimpin Divisi Usaha Menengah BNI • Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI • Direktur SDM dan Umum Perum Jamkrindo • Direktur Operasi Perum Jamkrindo Direktur Keuangan Perum Jamkrindo	Ekonomi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	59	Pria	S1 Ekonomi S2 Manajemen	• Pemimpin Divisi Pendidikan & Pelatihan BNI • Pemimpin Divisi Kebijakan Manajemen Risiko BNI	
Bob Tyasika Ananta	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi	54	Pria	S1 Akutansi S2 Finance	• General Manager Kangor Cabang Hong Kong BNI • Pemimpin Divisi Internasional BNI • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI	Keuangan
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	52	Pria	S1 Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya	• Komisaris PT Mandiri Sekuritas • *Executive Vice Presi*dent Treasury Group Bank Mandiri (Persero) Tbk, • Ketua A*ssociation Cambiste Internati*onale (ACI) Indonesia • *Chairman* Indonesia Fo*reign Exchange Market Committee* (IFEMC)	Manajemen
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	50	Wanita	S1 Ekonomi	• Pemimpin Wilayah BNI Jakarta Senayan • Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan BNI	Ekonomi
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	48	Pria	S1 Teknik Manajemen Industri S2 Agribisnis	• Pemimpin Kantor BNI Wilayah Jakarta Kota • Pemimpin BNI Wilayah Jakarta BSD • Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan BNI • Pemimpin Divisi Human Capital BNI • Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia • Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Manajemen
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	58	Pria	S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Ekonomi	• Pemimpin Divisi Perencanaan Strategi BNI • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah	Ekonomi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	47	Pria	S1 Kehutanan S2 Magister Manajement Accounting	• Pemimpin Divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit korporasi BNI • Pemimpin Divisi BUMN dan institusi pemerintah BNI • Pemimpin Divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit komersial dan usaha kecil BNI	Manajemen Bisnis

*Berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada periode 2016, jumlah dan komposisi Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut.

Selama Periode 1 Januari 2016 – 12 Januari 2016

Direksi berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Pada periode 1 Januari 2016 – 12 Januari 2016, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Sutanto	Direktur Bisnis Banking 2	Jakarta	17 Mei 2010 diangkat kembali 1 April 2014	12 Juli 2010
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	Tangerang	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015

Selama Periode 12 Januari 2016 – 10 Maret 2016 Direksi berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (empat) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Pada periode 12 Januari 2016 – 10 Maret 2016, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Sutanto	Direktur Bisnis Banking 2	Jakarta	17 Mei 2010 diangkat kembali 1 April 2014	12 Juli 2010
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	Tangerang	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	Jakarta	12 Januari 2016	11 April 2016

Selama Periode 10 Maret 2016 – 31 Desember 2016 Direksi berjumlah 10 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BNI.

Pada periode 10 Maret 2016 – 31 Desember 2016, jumlah dan komposisi Direksi adalah sebagai berikut.

Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Efektif
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	Jakarta	17 Maret 2015	16 April 2015
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	Tangerang	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	Jakarta	17 Maret 2015	22 Mei 2015
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	Jakarta	12 Januari 2016	11 April 2016
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	Bekasi	10 Maret 2016	15 Juli 2016

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Achmad Baiquni	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Suprajarto	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit		√		√		√		√		√		√		√
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi		√		√		√		√		√		√		√
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2		√		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional		√		√		√		√		√		√		√
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional		√		√		√		√		√		√		√
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan		√		√		√		√		√		√		√
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking		√		√		√		√		√		√		√
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan		√		√		√		√		√		√		√
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah		√		√		√		√		√		√		√

* berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Dalam memperlancar pelaksanaan tanggungjawab dan pekerjaannya mengelola Perseroan, maka dilakukan pembagian tugas dan wewenang Direksi.

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. bertanggung jawab secara keseluruhan atas tugas dan wewenang Direksi Perseroan. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Pengawasan Intern, Manajemen Modal Manusia dan Manajemen Pembelajaran Organisasi.
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Usaha Kecil, Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang didalamnya termasuk bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Pengelolaan Jaringan.
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Penganggaran dan Pengendalian Keuangan, Risiko Kredit Korporasi, Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil, Administrasi Kredit dan Pengembangan Perusahaan Anak.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Korporasi dan Multinasional 1, Bisnis Korporasi & Multinasional 2, BUMN dan Institusi Pemerintah dan bisnis sindikasi.
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Bisnis Komersial dan Usaha Kecil dan Pengembangan Pasar dan Manajemen Portfolio.
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Perencanaan Strategis, Operasional, serta Pengelolaan Aset dan Pengadaan.
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Tresuri, Internasional dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang Hubungan Kelembagaan, Jasa Transaksional Perbankan dan *Wealth Management*.
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	Bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang manajemen produk konsumer, penjualan konsumer, bisnis kartu, pemrosesan & penagihan kredit konsumer dan komunikasi pemasaran.
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	Bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang kepatuhan, hukum, tata kelola kebijakan, dan manajemen risiko bank.
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sesuai dengan pembidangan tugas atau sektornya masing-masing. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi fungsi dan bidang bisnis menengah high end, bisnis menengah, analisa nasabah dan manajemen portfolio dan penyelamatan dan penyelesaian kredit.

* berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-03/MBU/02/2015, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
   b. anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
   c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
   d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
   e. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
   f. menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Achmad Baiquni	Direktur Utama	-	-
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	-	-
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	-	-
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	-	-
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	-	-
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	-	-
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	-	-
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	-	-
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	-	-
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	-	-
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	-	-

* berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan Benturan kepentingan Direksi diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Nomor IN/695/KMP/001 tanggal 29 Oktober 2014. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya da.atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Per tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat anggota Direksi BNI yang memiliki saham BNI mencapai 5% atau lebih dari modal disetor BNI, ataupun di bank lain maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Lebih dari 5%			
		BNI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Achmad Baiquni	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2016

Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan, antara lain revisi RBB 2016 – 2018.
2. Pemenuhan targer kinerja Perseroan.
3. Pengelolaan aset dan keuangan, termasuk penyertaan saham pada perusahaan yang tidak tercatat di bursa.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi.
5. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :

1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
2. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
3. dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Frekuensi Dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi disajikan berdasarkan periode jabatan Direksi, sebagai berikut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Direksi dan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Achmad Baiquni	Direktur Utama	39	27	69,23%	12	4	33,33%
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	39	31	79,49%	12	5	41,67%
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit	39	31	79,49%	12	8	66,67
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	39	31	79,49%	12	8	66,67
Sutanto*	Direktur Bisnis Banking 2	8	8	100%	2	2	100%
Bob Tyasika Ananta	Direktur Perencanaan dan Operasional	39	29	74,36%	12	8	66,67
Panji Irawan	Direktur Tresuri dan Internasional	37	30	81,08%	12	7	58,33
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	39	34	87,18%	12	7	58,33
Anggoro Eko Cahyo	Direktur Konsumer Banking	39	34	87,18	12	10	83,33
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan	39	34	87,18%	12	11	91,67
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Bisnis Menengah	31	25	80,65	10	10	100%

** berhenti menjabat sejak 10 Maret 2016*

Agenda, Tanggal Dan Peserta Rapat Direksi

Selama tahun 2016, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
1	5 Januari 2016	• Review ketentuan pengadaan. • HUT BNI	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito	√ √ √ √ √ √ √ √ √	
2	12 Januari 2016	Pembidangan Direksi	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito	√ √ √ √ √ √ √ - √	 Dinas
3	13 Januari 2016	Penataan Struktur Organisasi Direksi.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	- √ √ √ - √ √ √ √ √	Dinas Dinas
4	26 Januari 2016	Java Jazz Festival.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	√ √ √ √ √ √ √ √ - √	 Dinas
5	2 Februari 2016	Penunjukan Komisaris BNI Syariah.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	√ √ √ √ √ √ - - √ √	 Dinas Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
6	9 Februari 2016	• Update Rencana Penerbitan Kartu Debit CO Brand BNI. • Persetujuan Nama Kartu Debit CO Brand BNI Garuda.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	- √ - √ √ √ √ √ √ √	Dinas Dinas
7	16 Februari 2016	• Presentasi Crash Program Penyelesaian Pending Collateral Bermasalah Di CLN. • Penunjukkan pemimpin Divisi dan unit perubahan Unit Bisnis Menengah High End.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	√ √ √ √ √ √ - √ √ -	 Dinas Dinas
8	1 Maret 2016	• Penambahan modal disetor BNI Multifinance • Update pelaksanaan Java Jazz	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Sutanto Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan	√ - √ √ √ √ √ √ √ √	 Cuti
9	10 Maret 2016	• Usul Pemenang Lelang Pengadaan Kontraktor *Design and Build* Proyek Pembangunan Gedung BNI Pejompongan	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ - √ √ √ √ √	 Dinas
10	22 Maret 2016	• Penetapan struktur organisasi dan supervisi wilayah oleh Direksi. • Review gaji pegawai tahun 2016.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ - √ √ - √ √ √	 Dinas Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
11	29 Maret 2016	Roadmap Penurunan Suku Bunga Menjadi Single Digit.	Achmad Baiquni	-	Dinas
			Suprajarto	√	
			Herry Sidharta	√	
			Anggoro Eko Cahyo	√	
			Rico Rizal Budidarmo	√	
			Adi Sulistyowati	√	
			Bob Tyasika Ananta	√	
			Imam Budi Sarjito	-	Dinas
			Panji Irawan	√	
			Putrama Wahju Setyawan	-	Dinas
12	12 April 2016	• Lain-Lain (Namasindo Plas). • Strategi Peningkatan Produktivitas Pegawai. • Keputusan Lain-Lain (Arahan Direktur Utama).	Achmad Baiquni	√	
			Suprajarto	√	
			Herry Sidharta	√	
			Anggoro Eko Cahyo	√	
			Rico Rizal Budidarmo	-	Dinas
			Adi Sulistyowati	√	
			Bob Tyasika Ananta	√	
			Imam Budi Sarjito	√	
			Panji Irawan	√	
			Putrama Wahju Setyawan	√	
13	13 April 2016	Pembidangan Direksi	Achmad Baiquni	√	
			Suprajarto	√	
			Herry Sidharta	-	Dinas
			Anggoro Eko Cahyo	√	
			Rico Rizal Budidarmo	-	Dinas
			Adi Sulistyowati	√	
			Bob Tyasika Ananta	√	
			Imam Budi Sarjito	√	
			Panji Irawan	√	
			Putrama Wahju Setyawan	-	Dinas
14	19 April 2016	• Penetapan Aplikasi Mobile Banking, Program ATM Asuransi, Penentuan Nama Agen Laku Pandai, dan Penentuan Nama Produk Uang Elektronil Berbasis Server. • Pengisian Posisi INACRAFT.	Achmad Baiquni	-	Dinas
			Suprajarto	√	
			Herry Sidharta	√	
			Anggoro Eko Cahyo	√	
			Rico Rizal Budidarmo	√	
			Adi Sulistyowati	√	
			Bob Tyasika Ananta	√	
			Imam Budi Sarjito	√	
			Panji Irawan	√	
			Putrama Wahju Setyawan	-	Dinas
15	26 April 2016	Struktur organisasi	Achmad Baiquni	√	
			Suprajarto	√	
			Herry Sidharta	√	
			Anggoro Eko Cahyo	√	
			Rico Rizal Budidarmo	√	
			Adi Sulistyowati	√	
			Bob Tyasika Ananta	√	
			Imam Budi Sarjito	√	
			Panji Irawan	√	
			Putrama Wahju Setyawan	√	

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
16	3 Mei 2016	Presentasi Hasil Survey MRI BSEM 2015-2016	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- - - √ - √ √ √ √ √	Dinas Cuti Dinas Dinas
17	17 Mei 2016	Revisi RBB 2016-2018	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ √ √ √ √ √ √ √ √	Dinas
18	24 Mei 2016	• Digital Loan • Rejeki BNI Taplus • Organisasi • Review RBB	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	
19	7 Juni 2016	• Kajian *Buy Back Global Bond* BNI 2012 • Pengadaan ATM 2016 • Lain-Lain	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ √ √ √ √ √ √ √ √	Dinas
20	8 Juni 2016	• Update Corporate University BNI • Update HUT BNI Ke 70 dan Mudik BNI	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
21	21 Juni 2016	• Usulan Logo Baru BNI Emerald, Usulan Re-Layout BNI Emerald Outlet, dan Usulan New Design BNI Emerald Card (Priority Banking Card dan Private Banking Card) • Prognosa Juni 2016	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ - √ √ √ - - √	 Dinas Dinas Dinas
22	28 Juni 2016	• Right Sizing Organisasi Unit Fungsional BNI. • PMC Review KPI Unit dan Penetapan KPI BOD 2016. • Presentasi Macro Outlook Oleh Head Of Research PT Bahana Securities.	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - √ √ √ √ √ √ √ √	 Dinas
23	19 Juli 2016	• Update BNI Day • Pemaparan Tax Amnesty	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	
24	2 Agustus 2016	Progress Implementasi Tax Amnesty	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ - √ √ √ √ - -	 Dinas Dinas Dinas
25	9 Agustus 2016	Kinerja Divisi Internasional dan Rencana Pembangunan Jaringan Kantor Luar Negeri	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ √ √ √ √ - √ √ √	Dinas Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
26	18 Agustus 2016	• Road Map To Digital Banking • Digital Loan	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - √ √ - √ - √ √ √	 Dinas Dinas Dinas
27	23 Agustus 2016	• Update Rencana Penanganan Pra NPL dan NPL Kredit Konsumer (BNI Griya) • Roadmap Digital Banking	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - √ √ √ - - √ - √	 Dinas Dinas Dinas Dinas
28	6 September 2016	• *Action Plan* Pemenuhan Likuiditas dan LFR • Pembahasan Pembentukan Proyek *Digital Banking*	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ - √ - √ - √ √ √	 Dinas Dinas Dinas
29	20 September 2016	Rencana Akusisi BNI Asset Management	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ √ √ √ √ - - - √	Dinas Cuti Dinas Dinas
30	27 September 2016	• Kajian Organisasi SPI • Inisiasi Pembukaan Kantor Cabang Malaysia • Perencanaan Pelaksanaan Audit 2016 KAP EY	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	
31	4 Oktober 2016	*Total Rewards Improvement*	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - √ √ √ √ √ √ √ -	 Dinas Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
32	11 Oktober 2016	• *Total Reward* • Pembahasan KUD 2017 dan RBB 2017-2019	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ √ √ √ √ - √	 Dinas
33	14 Oktober 2016	Pemaparan RBB 2017-2019	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ - √ √ √ - √ - √	 Dinas Dinas Dinas
34	18 Oktober 2016	*Total Reward*	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ - √ √ √ √ √ √ √ √	 Dinas
35	1 November 2016	• *Roadmap* Optimalisasi Aset • Lain-Lain • Program BUMN - *Integrated Digital Economy Platform*	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ - √ - √ √ √ √ √	 Dinas Dinas
36	8 November 2016	• *Executive Dashboard* • ATM Himbara	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ √ - √ √ √ √ √	 Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
37	15 November 2016	• Pembahasan Rencana Pembentukan Holding • Perbaikan Kredit	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- - √ √ √ √ √ √ √ √	Dinas Dinas
38	23 November 2016	Inisiasi Bisnis dengan Iran	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- - √ - √ - - - √ √	
39	6 Desember 2016	Penanganan Skimming ATM	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	- √ - √ √ - √ √ √ √	Dinas Dinas Dinas
40	13 Desember 2016	Update Proyek *Digital Banking 46*	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ - √ √ √ √ √ - √	 Dinas Dinas
41	20 Desember 2016	• POJK Tata Kelola Remunerasi • Sanksi Administrasi	Achmad Baiquni Suprajarto Herry Sidharta Anggoro Eko Cahyo Rico Rizal Budidarmo Adi Sulistyowati Bob Tyasika Ananta Imam Budi Sarjito Panji Irawan Putrama Wahju Setyawan	√ √ √ - - - √ - √ √	 Cuti Dinas Dinas Dinas

Sementara agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Komisaris.

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Mengingat pada RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2016 dan 10 Maret 2016 terdapat Mata Acara Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, di mana anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat memiliki latar belakang beragam, maka BNI melakukan program pengenalan bagi anggota Direksi baru antara lain :

1. Diskusi Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Kode Etik, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang ada di bawah Direksi dan Komisaris.
3. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan tersebut diberikan dengan cara melakukan presentasi oleh Unit terkait kepada anggota Direksi dimaksud serta melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah/Cabang Perseroan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggaraan
Achmad Baiquni	Direktur Utama	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Indonesia Leadership Forum (Undangan dari Menkeu)	01 Feb 2016. Hotel Borobudur	Workshop
			Sosialisasi Penilaian ASEAN CG Scorecard tahun 2016	15 Feb 2016, Perkantoran BI	Workshop
			Sosialisasi Kereta Cepat	19 Feb 2016, Hotel Preanger Bandung	Workshop
			ISEI : Dialog Publik "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing"	30 Mar 2016, Balai Kartini	Seminar
			Seminar APPU	07 April 2016, BNI Lt 25	Seminar
			Sharing Session Geo Politic	13 April 2016, BNI lt 32	Seminar
			Sosialisasi Program Pengendalian Inflasi BI	25 April 2016, Perkantoran BI	Seminar
			Workshop on Enchanting Techincal Cooperation among Members Countries through Reverse Linkage	16 Mei 2016, JCC	Workshop
			1st Annual Islamic Finance Conference of Sukuk for Infrastruktur Development	17 Mei 2016, JCC	Conference
			Pengarahan Ketua OJK kepada CEO Bank	26 Juni 2016, Perkantoran BI	Workshop
			Talkshow "Peran Perbankan dalam mendukung kebijakan Tax Amnesty"	30 Juni 2016, Shangrila Hotel	Workshop
			Minister Lecture & Konferensi International	08 Sept 2016, JCC	Conference
			FDG Challenges to Global Economyc	22 Sept 2016, The Ritz Carlton Pacific Place	Workshop
			Diskusi Interaktif OJK dalam rangka Meningkatkan Peran & Kontribusi Industri Perbankan	23 Sept 2016, Hotel Borobudur	Workshop
			Seminar & Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi	17 Okt 2016, BNI Lt 25	Workshop
			Forum BUMN 2 Tahun Mewujudkan Nawa Cita	03 Nop 2016, Hotel Dharmawangsa	Workshop
			Pertemuan Tahunan BI 2016 & Arahan Presiden RI	22 Nop 2016, JCC	Workshop
			FGD Program Percepatan Sertifikasi Properti	23 Nov 2016, Kemenetrian Agraria & Tata Ruang	Workshop
			Kompas 100 CEO Forum	24 Nov 2016, JCC	Seminar

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggaraan
			Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi olehKPK	01 Des 2016, Balai Kartini	Seminar
			Breakfast Meeting PWI "Masa Depan Ekonomi Indonesia"	08 Des 2016, Dharmawangsa Hotel	Seminar
			Seminar Economic Outlook 2017	09 Des 2016, Plasa Bapindo	Seminar
Suprajarto	Wakil Direktur Utama	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Retail Banking Innovation	23-24 February 2016, London	Conference - FinTech Network
			Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	7 April 2016, Jakarta	PPATK
Rico Rizal Budidarmo	Direktur Keuangan & Risiko Kredit	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Forum CFO BUMN	25 Januari 2016, Jakarta	Bank Mandiri
			UBS Indonesian Conference 2016	7 Maret 2016, Jakarta	UBS
			Workshop rencana Holding BUMN sector perbankan & Jasa Keuangan KBUMN	8 Maret 2016, Bali	Kementerian BUMN
			Seminar Anti Pencucian Uang	7 April 2016, Jakarta	BNI & PPATK
			Indonesian Investment Day	10-15 April 2016, Singapore & UK	Danareksa Sekuritas & Goldman Sachs
			Keynote Speech dalam kuliah umum PERBANAS	3 Juni 2016, Jakarta	Perbanas
			Macquarie ASEAN Banks Tour	20 Juni 2016, Jakarta	Macquarie
			Customer Gathering Tax Amnesty HIMBARA	10-11 Agustus 2016, Singapore	HIMBARA
			Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif	18 November 2016, Jakarta	Istana Negara
			Kompas CEO Forum	24 November 2016, Jakarta	Kompas
Herry Sidharta	Direktur Bisnis Korporasi	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Seminar Anti Pencucian Uang	7 April 2016, Jakarta	BNI & PPATK
			Kompas CEO Forum	24 November 2016, Jakarta	Kompas

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggaraan
Bob Tyasika Ananta	Direktur - Perencanaan dan Operasional	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Halfday Seminar LPPI	Senin, 29 February 2016, Jakarta	Seminar - LPPI
			Loan restructure Training	Jumat, 11 Maret 2016, Jakarta	Workshop - BNI
			International Seminar OJK	Rabu, 16 Maret 2016, Jakarta	Seminar - OJK
			Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	Kamis, 7 April 2016, Jakarta	PPATK
			Membangun Bangsa Menyejahterakan Pekerja Indonesia	Jumat, 29 April 2016, Jakarta	BUMN Marketers Club
			Global and Indonesia Macroeconomics Trend and Fore Cast	Jumat, 29 April 2016, Jakarta	BARA
			Meningkatkan Daya Saing Perbankan dalam mendukung Pertumbuhan ekonomi Yang Tinggi	Kamis, 12 Mei 2016, Jakarta	Halfday Semuinar - LPPI
			Penyegaran Komisaris & Direksi BUMN	Rabu, 26 Oktober 2016, Jakarta	BUMN Executive Club
			Dinamika dan Isu terkini Politik Ekonomi Internasional	Kamis, 3 November 2016, Jakarta	BI Institute Leadership Forum - Seminar
			KOMPAS CEO Forum	Kamis, 24 November 2016, Jakarta	KOMPAS - BNI
			Seminar Oengkajian & Informasi Anggaran Pusat dan Daerah, Seminar Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III 2015 - 2019	Rabu, 23 November 2016, Jakarta	DPRD RI
			Economic Outlook 2017 "Harapan Tinggi di Tahun Ekspansi"	Rabu, 7 Desember 2016	Bisnis Indonesia - Seminar
			Seminar Nasional Indonesia Change Management Forum " Kempemimpinan Dalam transformasi Organisasi untuk Mendukung Kinerja"	Selasa, 13 Desember 2016, Jakarta	IBI
Putrama Wahju Setyawan	Direktur - Bisnis Menengah	10 Maret 2016 – 31 Desember 2016	Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	Kamis, 7 April 2016, Jakarta	PPATK
			Sosialisasi Tax Amnesty	Jumat, 02 September 2016, Solo	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
			Memperkuat Fundamental Perekonomian Indonesia	Kamis, 27 Oktober 2016, Jakarta	Tempo Economic Briefing, PT. Tempo Inti Media, Tbk
			KOMPAS CEO Forum	Kamis, 24 November 2016, Jakarta	KOMPAS - BNI

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggaraan
Panji Irawan	Direktur - Tresuri dan Internasional	12 Januari 2016 – 31 Desember 2016	Risk Management Discussion	Kamis, 21 Januari 2016	Workshop LSPP
			Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	Kamis, 7 April 2016, Jakarta	PPATK
			Workshop on Enhancing Technical Coorporation among Member Countries through Reverse Lingkage : Together We Overcome Our Challenges"	Senin, 16 Mei 2016	Workshop
			Institutional Investor Day 2016	Kamis, 4 Agustus 2016	Bursa Efek Indonesia
			Indonesia Business and Development (IBD) Expo 2016	Kamis, 8 September 2016	Conference dan Seminar
			Seminar BI "Pengembangan Instrumen Pasar Uang Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)"	Senin, 24 Oktober 2016	Bank Indonesia
			Penyegaran Komisaris dan Direksi BUMN	Rabu, 26 Oktober 2016, Jakarta	BUMN Executive Club
Anggoro Eko Cahyo	Direktur - Konsumer Banking	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Seminar Sinergi BUMN	Senin, 1 Februari 2016, Jakarta	Seminar – BUMN
			Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	Kamis, 7 April 2016, Jakarta	PPATK
			Seminar Persiapan Menyambut Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan penggunaan PIN 6 Digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debet	Rabu, 31 Agustus 2016, Jakarta & Kamis, 1 September 2016, Jakarta	Seminar - Bank Indonesia
			Indonesia Business and Development EXPO 2016	Kamis, 8 September 2016, Jakarta	Conference dan Seminar
			Challenges To Global Economy	Kamis, 22 September 2016, Jakarta	Seminar
			Indonesia Human Capital Summit	Kamis, 27 Oktober 2016, Jakarta	Seminar - FHCI
			KOMPAS CEO Forum	Kamis, 24 November 2016, Jakarta	KOMPAS - BNI
			Seminar Nasional Indonesia Change Management Forum " Kempemimpinan Dalam transformasi Organisasi untuk Mendukung Kinerja"	Selasa, 13 Desember 2016, Jakarta	IBI

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan/ Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggaraan
Imam Budi Sarjito	Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Halfday Seminar LPPI	Senin, 29 February 2016, Jakarta	Seminar - LPPI
			International Seminar OJK	Rabu, 16 Maret 2016, Jakarta	Seminar - OJK
			Seminar Anti Pencucian Uang (APU)	Kamis, 7 April 2016, Jakarta	PPATK
			Global and Indonesia Macroeconomics Trend and Fore Cast	Jumat, 29 April 2016, Jakarta	BARA
			Penyegaran Komisaris & Direksi BUMN	Rabu, 26 Oktober 2016, Jakarta	BUMN Executive Club
			Seminar "PROSPEK PEREKONOMIAN NASIONAL 2017 : PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI PERBANKAN"	Rabu, 03 November 2016, Jakarta	FKDKP
			KOMPAS CEO Forum	Kamis, 24 November 2016, Jakarta	KOMPAS - BNI
Adi Sulistyowati	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan	17 Maret 2015 – 31 Desember 2016	Seminar Anti Pencucian Uang	7 April 2016, Jakarta	BNI dan PPATK
			Kompas CEO Forum	24 November 2016, Jakarta	Kompas

Sertifikasi Manajemen Risiko

Seluruh Direksi BNI telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi Menggunakan Metode Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Kementerian BUMN secara khusus telah menetapkan penilaian kinerja Direksi BUMN dengan menggunakan metode KPKU melalui Surat nomor: S-153/S-MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kpku

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* KPKU adalah, sebagai berikut

1. Kementerian BUMN membentuk Forum Ekselen BUMN (FEB) yang bertugas untuk melaksanakan *Assessment.*
2. Kementerian BUMN menyampaikan kepada Perseroan Tim FEB sebagai personil yang melaksanakan *Assessment* di Perseroan.
3. Tim FEB melakukan *Assessment* dan membuat kesimpulan atau hasil *assessment.*
4. Tim FEB menyampaikan hasil *Assessment* kepada Kementerian BUMN untuk dapat disetujui.
5. Kementerian BUMN menetapkan hasil *Assessment*.

Kriteria Evaluasi KPKU

PERSPECTIVE Versi KPKU	INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA KPKU
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN	1. Kualitas penerapan GCG 2. Tingkat compliance/pemenuhan Portal-Portal BUMN (asset, PKBL, FIS, SDM, Publik) 3. Tingkat PROPER Strategis program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 4. Tingkat kesesuaian penyusunan belanja modal (capex) dengan kebutuhan perusahaan dan sinkronisasi dengan MP3EI
FOKUS PELANGGAN	Ukuran yang menunjukkan kesungguhan perusahaan dalam meraih, mempertahankan, memperluas dan menciptakan pasar dan pelanggan
FOKUS TENAGA KERJA	1. Kualitas penerapan GCG 2. Tingkat compliance/pemenuhan Portal-Portal BUMN (asset, PKBL, FIS, SDM, Publik)
EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES	1. Prosentase perbaikan proses bisnis 2. Tingkat utilisasi perlatan produksi 3. Kualitas penerapan manajemen risiko 4. Ukuran yang menunjukkan prestasi perusahaan dalam melakukan penciptaan nilai dari produk/jasa, yang diujudkan dengan perencanaan operasional yang tepat 5. Sinergi BUMN
KEUANGAN DAN PASAR	1. Profitabilitas 2. Pertumbuhan Pendapatan 3. Efisiensi/Biaya 4. Pertumbuhan Pasar 5. Penguasaan Pasar
LAIN-LAIN	Di luar Indikator versi KPKU

Pihak Yang Melakukan *Assesment* KPKU
Pihak yang melakukan *Assessment* KPKU adalah Tim FEB dan Kementerian BUMN.

Hasil *Assesment* KPKU
Sejak menerapkan sistem MBCfPE di tahun 2005, hasil assesment menunjukkan skor KPKU BNI yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hasil Asesmen KPKU tahun 2016 yang berlangsung pada akhir Januari 2017 belum diperoleh, namun pada Asesment sebelumnya (tahun 2015) BNI telah berhasil masuk pada Band Score "Emerging Industry Leader".

Penilaian Kinerja Penerapan GCG *(Self Assessment)* Direksi Sesuai Ketentuan BI/OJK

BI/OJK secara khusus mengatur penilaian kinerja Direksi berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang diatur dalam ketentuan *self-assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG
Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. Direksi menugaskan *Compliance Division* (dhi. unit GCG) Perseroan dalam melaksanakan *Self Assessment*.
2. *Compliance Division* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka melaksanakan *Self Assessment*.
3. *Compliance Division* mengusulkan rekomendasi nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian

dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi menetapkan nilai Komposit, termasuk faktor positif dan negatif dalam pelaksanaan GCG.
5. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada BI/OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Kriteria *Self Assessment* Direksi Terkait Pelaksanaan GCG

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome. Governance structure* terdiri dari 16 indikator, *Governance Process* terdiri dari 14 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 10 indikator.

Pihak Yang Melakukan *Self Assessment* GCG

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari BI/OJK.

Hasil *Self Assessment* Direksi Terkait Pelaksanaan GCG

Hasil *self assessment* GCG BNI Periode 31 Desember 2016 BNI mendapat nilai komposit 2 (baik). Faktor-faktor positif *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* yang ada pada Direksi dan dituangkan dalam Self Assesment GCG Periode 31 Desember Tahun 2016 antara lain sebagai berikut.

1. Direksi memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Jumlah dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, di mana jumlah Direksi sebanyak 10 (sepuluh) Direktur dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.
3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
5. Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, dan telah direview sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi maupun audit intern.
7. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi disertai kewajiban penyampaian laporan tindaklanjut dari unit-unit pelaksana. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
8. Direksi bersama SPI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI.
9. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan, antara lain melalui Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Direksi dan Komisaris, dan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara berkala.
10. Direksi telah mengkomunikasikan dan melaksanakan RBB secara efektif.
11. Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2015.

Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Key Performance Indicator* (KPI)

Penilaian kinerja Direksi melalui KPI dilakukan dengan pola 100% kolegial yang diukur dari 4 (empat) faktor antara lain sebagai berikut.

KPI BOD 2016	METRIC	DESKRIPSI
KAPITALISASI MARKET –BNI	%	Mengukur besarnya relativitas kapitalisasi saham BNI pada pasar saham
LABA – BNI	miliar Rp	Mengukur besarnya Laba BNI setelah dikurangi Pajak.
MARKET SHARE – BNI	Skor	Mengukur persentase pangsa pasar kredit & DPK dibandingkan dengan total kredit & DPK yang ada di industri perbankan.
KEPEMIMPINAN	Skor	Mengukur tingkat kemampuan Top Management dalam mencapai sasaran bisnis, memahami dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh anggota organisasi dan mendorong pengembangan budaya kerja organisasi.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui tahapan berikut.

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi.
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Struktur remunerasi anggota Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, sebagai berikut.

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1.	Gaji	Direktur Utama sebesar 100%
		Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama
		Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama
2.	Tunjangan	
	Hari Raya Keagamaan	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun.
	Perumahan	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp 27.500.000.

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
	Asuransi Purna Jabatan	• Diberikan selama menjabat • Premi yang ditanggung perusahaan adalah maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun • Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. • Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
3.	Fasilitas	
	Kendaraan	• Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perseroan. • Fasilitas kendaraan termasuk dengan biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. • Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh Menteri. • Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat.
	Kesehatan	• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya obat. • Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. • Fasilitas kesehatan diberikan berupa: • Rawat jalan dan obat, • Rawat inap dan obat, • *Medical check up* dengan ketentuan 1 (satu) kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri. • Apabila Dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, fasilitas kesehatan diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
	Bantuan Hukum	• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. • Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa dilembaga peradilan. • Jasa kantor pengacara atau konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya adalah untuk 1 (satu) kantor pengacara/konsultan hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. • Penunjukkan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan Perseroan.
	Fasilitas Perumahan	Dalam hal Perseroan menyediakan rumah jabatan Direksi maka ybs wajib mempergunakan rumah tersebut sebagai fasilitas perumahan dan ybs tidak diberikan tunjangan perumahan.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Dalam menetapkan indikator Direksi BNI mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/06/2016, sebagai berikut.

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Berikut jumlah nominal/komponen remunerasi Direksi.

Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi		
• Gaji	10 ORANG	23.157,77,-
• Tunjangan Perumahan	10 ORANG	1.999,83,-
• Tunjangan Transportasi	10 ORANG	7.421,47,-
• Tunjangan Hari Raya	9 ORANG	1.823,25,-
• Tantiem	10 ORANG	116.846,72,-
Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura		
• Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
• Transportasi (tidak dapat dimiliki)	10 ORANG	6.881,40,-
• Asuransi Purna jabatan (dapat dimiliki)	10 ORANG	5.579,89,-
• Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	10 ORANG	212,17,-

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Orang	Jutaan Rp
500 juta kebawah	-	-
Di atas 1 miliar	-	-
1 miliar – 2 miliar	-	-
Di atas 2 miliar	10 Orang	124.148,74,-

Tantiem

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2016 adalah sebesar 1,28% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015 diberikan kepada Direksi dengan proporsi terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 95% dan anggota Direksi lainnya sebesar 90%.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian direksi telah di atur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu:

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara
   d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Pemberhentian karena alasan di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh RUPS/
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasr ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara waktu anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
   b. Pemberhentian sementara yang dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang besangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
   c. Pemberitahuan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) haris setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
   d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
   e. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      i. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara.
      ii. lampaunya jangka waktu.
   f. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
   g. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal.
   h. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri. Perseroan wajib mengundang Direksi untuk hadir dan membela diri.

i. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
j. Dalam hal RUPS menguatkan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
k. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhantian dinyatakan batal.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Semua komite tersebut, diketuai oleh Komisaris Independen. Adapun uraiannya sebagai berikut.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI telah membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang antara lain mengatur Sekretariat Dewan Komisaris.

Tugas Dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank, berupa:

1. Mempersiapkan rapat dan materi rapat Dewan Komisaris Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris yaitu surat masuk, surat keluar, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris/Dewan pengawas.
5. Memastikan bahwa Dewan komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
8. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini adalah Endra Gunawan yang diangka sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BNI sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/026/DK/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

FOTO Sesdekom belum, cek di profil

Lahir tahun 1982. Lulusan Diploma 3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2003, Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Indonesia Tahun 2007, Akuntan (Ak.) Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia 2011, dan Master of Sains (S2) Pasca Sarjana Universitas Indonesia Tahun 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sub bidang Restrukturisasi BUMN padaKementerian BUMN (2015-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) (2009-2011), anggota Komite Audit PT Sarinah (Persero)(2011-2012), Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Drilling Services Indonesia (2012-2013),dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk(2013-2015).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2016

Selama tahun 2016 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, *review*, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017 dan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2016.
2. Membantu penyusunan *draft* laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
   a. Laporan kepada Kementerian BUMN RI per triwulan
   b. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
   c. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris
3. Memantau, mereview dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/ penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
   a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
   b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat, serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat Komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan.
   c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
   d. Memastikan penyelesaian Laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat-menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga

pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance.*

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit BNI dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/05/DK/2000 tanggal 28 Juli 2000 tentang Pembentukan Komite Audit yang mengacu pada peraturan sebagai berikut.

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Komite Audit Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
5. PT Bursa Efek Jakarta (BEI) Keputusan Direksi No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan IA pada Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Piagam Komite Audit

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja berupa Piagam Komite Audit BNI yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Penyempurnaan/pembaharuan terhadap Piagam Komite Audit BNI terakhir dilakukan pada tahun 2016 yang didudukkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/009/DK/2016 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Piagam Komite Audit diatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektif dan independen, kerahasiaan, serta kompetensi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
   a. Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau
   b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi diberikan atas dasar aspek independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee.*
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut.
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal.

Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Audit

Struktur Komite Audit terdiri atas:
1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
   a. seorang Komisaris Independen;
   b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntasi; dan
   c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
5. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Pada periode 2016, struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Susunan Komite Audit per tanggal 1 Januari 2016 - 10 Maret 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Joseph F.P. Luhukay	Ketua	Komisaris Independen	Ekonomi dan Teknologi Informasi
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Sigid Moerkardjono	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 10 Maret 2016 – 24 Maret 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Sigid Moerkardjono	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 24 Maret 2016 – 3 Mei 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Anny Ratnawati	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Sigid Moerkardjono	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 3 Mei 2016 - 1 Juni 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Anny Ratnawati	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Audit per tanggal 1 Juni 2016 - 12 Juni 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Anny Ratnawati	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Donnaria Silalahi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Audit per tanggal 12 Juni 2016 – 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Anny Ratnawati	Ketua	Komisaris Independen	Keuangan
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Donnaria Silalahi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Profil Komite Audit

Ketua Komite Audit
ANNY RATNAWATI

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Audit
BAMBANG RATMANTO

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 6 Mei 1958, saat ini berusia 58 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/019/DK/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982 dan memperoleh gelar Magister di bidang Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School pada tahun 2008. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa perusahaan, antara lain sebagai Presiden Komisaris merangkap Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko pada PT Bank MNC Internasional Tbk. (2014-2016), Komisaris Independen pada PT Bank MNC Internasional Tbk. (2013-2014), berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai Head of Credit & Operation Policy (EVP) pada PT CIMB Niaga Tbk. (2008-2013), Presiden Komisaris PT Saseka Gelora Finance (subsidiary PT Bank Niaga Tbk.) (2007-2009), Non Executive Director pada Niaga Finance Company-Hongkong (2000-2001), dan berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai Chief Audit Executive (EVP) pada PT Bank Niaga Tbk. (1985-2007).

Anggota Komite Audit
DONNARIA SILALAHI

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 16 September 1952, saat ini berusia 64 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/020/DK/2016 tanggal 26 Mei 2016.

Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa perusahaan, antara lain sebagai sebagai QA & HC Operation Division Head (EVP) (2014-2015) dan Operational Division Head (EVP) (2012-2013) pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. dan PT Bank BTPN Syariah, Operational Risk Division Head (EVP) pada PT Bank OCBC NISP Tbk. (2009-2012), berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai Operation Risk Management Head (EVP) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2001-2009), dan berbagai posisi jabatan dengan posisi terakhir sebagai System and Operation Policy Group Head (VP) pada PT Bank Niaga Tbk. (1984-2001).

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan, sebagai berikut.

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
3. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perseroan;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan;
9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Per 31 Desember 2016, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Anny Ratnawati	S1 Agribisnis S2 Ekonomi Pertanian S3 Ekonomi Pertanian	Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan RI Dosen Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Bambang Ratmanto	S1 Ekonomi S2 Manajemen	Komisaris Independen pada PT Bank MNC Internasional Tbk. Head of Credit and Operation Policy (EVP) pada PT CIMB Niaga Tbk. Presiden Komisaris PT Saseka Gelora Finance (subsidiary PT Bank Niaga Tbk.) Non Executive Director pada Niaga Finance Company-Hongkong Chief Audit Executive (EVP) pada PT Bank Niaga Tbk.
Donnaria Silalahi		QA & HC Operation Division Head (EVP) PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Operational Division Head (EVP) pada PT Bank BTPN Syariah. Operational Risk Division Head (EVP) pada PT Bank OCBC NISP Tbk. (2009-2012) Operation Risk Management Head (EVP) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2001-2009) System and Operation Policy Group Head (VP) pada PT Bank Niaga Tbk. (1984-2001).

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit diatur dalam Kode Etik Komite Audit BNI. Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada Anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Anny Ratnawati	Bambang Ratmanto	Donnaria Silalahi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Joseph F.P. Luhukay	Ketua	10 Maret 2016	-	-	-
Anny Ratnawati	Ketua	24 Maret 2016 - 31 Desember 2016	Seminar dan *Executive Roundtable,* Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
			Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) *Framework for Financial Services Industry*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan 25 (dua puluh lima) Rapat, baik rapat internal Komite, rapat bersama Direktur Sektor dan Divisi terkait, serta melalui Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Anggota Komite Audit dengan tujuan agar hal-hal yang bersifat substantif dapat segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2016, Komite Audit juga telah melaksanakan 1 (satu) pertemuan yang bersifat

diskusi, merupakan pertemuan yang dilaksanakan karena RUPS Tahunan BNI Tahun Buku 2015 Tanggal 10 Maret 2016 memberhentikan dengan hormat Bapak Jos Luhukay sebagai Komisaris Independen sehingga jabatannya sebagai Ketua Komite Audit berakhir, dan Dewan Komisaris belum menetapkan pengganti Ketua Komite Audit.

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Audit.
Periode 1 Januari - 10 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Joseph F.P. Luhukay	Ketua	8	8	100%
Anny Ratnawati	Anggota	8	7	87,50%
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	8	8	100%
Sigid Moerkardjono	Anggota	8	8	100%

Periode 10 Maret – 24 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Anny Ratnawati	Anggota	1	1	100%
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	1	1	100%
Sigid Moerkardjono	Anggota	1	1	100%

Periode 24 Maret – 3 Mei 2016
Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Anny Ratnawati	Anggota	5	5	100%
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	5	5	100%
Sigid Moerkardjono	Anggota	5	5	100%

Periode 3 Mei – 1 Juni 2016
Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Anny Ratnawati	Ketua	-	-	-
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	-`	-	-

Periode 1 Juni – 12 Juni 2016
Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Anny Ratnawati	Ketua	-	-	-
Tubagus Chairul Amachi	Anggota	-	-	-
Bambang Ratmanto	Anggota	-	-	-
Donnaria Silalahi	Anggota	-	-	-

Periode 12 Juni – 31 Desember 2016

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Anny Ratnawati	Ketua	12	12	100%
Bambang Ratmanto	Anggota	12	12	100%
Donnaria Silalahi	Anggota	12	12	100%

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2016, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	4 Januari 2016	• Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2015 dan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2016 • Laporan Komite Audit untuk Annual Report Tahun 2015	Joseph F. P Luhukay Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
2	11 Januari 2016	Finalisasi Rencana Audit Tahunan SPI Tahun 2016 Progress Report Audit Tahun Buku 2015	Joseph F.P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
3	18 Januari 2016	Laporan Keuangan Publikasi per 31 Desember 2015	Joseph F. P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
4	25 Januari 2016	• Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 4 Tahun 2015 • Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 2 Tahun 2015 • Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI	Joseph F. P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
5	10 Februari 2016	Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 2 Tahun 2015 Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI	Joseph F.P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
6	17 Februari 2016	• Review Realisasi Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 • Realisasi PKBL Tahun 2015	Joseph F.P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
7	24 Februari 2016	• Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 2 Tahun 2015 • Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI • Pemantauan Tindak Lanjut Kasus Fraud	Joseph F.P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
8	2 Maret 2016	Progress Pembentukan *Corporate University*	Joseph F.P Luhukay Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
9	16 Maret 2016	Financial Performance Februari 2016	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10	24 Maret 2016	• Realisasi Review Divisi Kepatuhan sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2015 • Rencana Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2016 • Program Strategi Anti Fraud • Program Whistle Blowing System • Review Kinerja Perusahaan Anak BNI per 29 Februari 2016 • Review Piagam Audit Internal	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
11	31 Maret 2016	Kinerja Perusahaan Anak BNI per 29 Februari 2016	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
12	14 April 2016	• Review F*inancial Performance* dan Publikasi per 31 Maret 2016 • Realisasi Rencana Kerja Komite Audit Triwulan I tahun 2016 • Pembaharuan Piagam Komite Audit	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
13	21 April 2016	• Update Progress Pembentukan *Corporate University* • *Turn Over* Pegawai	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
14	28 April 2016	• Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 1 Tahun 2016 • Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI • Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK • Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI • Pemantauan Tindak Lanjut Kasus Fraud	Anny Ratnawati Tubagus Chairul Amachi Sigid Moerkadjono
15	16 Juni 2016	• Realisasi Review Divisi KPN sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2016 • Program Strategi Anti Fraud • Program Whistle Blowing System • Laporan Penyelesaian Audit dan Internal Control Report Tahun Buku 2015 • Review Usulan HPS Pengadaan KAP Tahun Buku 2016 • Financial Performance Mei 2016 • Review Usulan Revisi RBB 2016-2018	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
16	21 Juli 2016	• Laporan Keuangan Publikasi per 30 Juni 2016 • Review Usulan Pemenang Pengadaan KAP Tahun Buku 2016	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
17	4 Agustus 2016	• Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 2 Tahun 2016 • Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 1 Tahun 2016 • Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI • Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK • Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI • Pokok-Pokok Saran dan Pendapat Komite Audit Triwulan 2 Tahun 2016 • Review Usulan Pelepasan Aset	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
18	25 Agustus 2016	• Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit Semester 1 Tahun 2016 • Pemantauan Tindak Lanjut Kasus Fraud	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
19	15 September 2016	• Realisasi Review Divisi KPN sd. Triwulan 2 Tahun 2016 • Program Strategi Anti Fraud • Program *Whistle Blowing System* • *Compliance Index*, Komite Kepatuhan, dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan • Kick Off Meeting Audit Tahun Buku 2016	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
20	6 Oktober 2016	Review Laporan Hasil Audit Tahun 2016	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
21	13 Oktober 2016	Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2016	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
22	20 Oktober 2016	• D*ashboard Risk Profile* • *Assessment* Penilaian Tata Kelola Terintegrasi	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
23	23 November 2016	• Evaluasi Pelaksanaan RKAT SPI Triwulan 3 Tahun 2016 • Temuan-Temuan SPI yang Bersifat Material • Tindak Lanjut Pemeriksaan SPI • Tindak Lanjut Pemeriksaan Auditor Eksternal (OJK, BPK RI, KAP) • Pemantauan Tindak Lanjut Kasus Fraud • Evaluasi ORSA SPI	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
24	28 November 2016	• Permohonan Persetujuan Kebijakan APU PPT • Laporan Kepatuhan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2016 • Realisasi Review Divisi Kepatuhan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2016 • Program Strategi *Anti Fraud* • Program *Whistle Blowing System* • Laporan Perkembangan Perkara Materiil	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
25	14 Desember 2016	• RKAT dan Metodologi Audit SPI Tahun 2017 • Laporan Komite Audit untuk Annual Report Tahun Buku 2016 • Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2017	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi
26	15 Desember 2016	*Progress Report* General Audit Tahun Buku 2017	Anny Ratnawati Bambang Ratmanto Donnaria Silalahi

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Selama tahun 2016 Komite Audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan sebagai berikut.

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/ jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2016.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
   a. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan konsultasi SPI, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI.
   b. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan *review* Divisi Kepatuhan (KPN), serta pengawasan tindak lanjut hasil *review* Divisi KPN.
   c. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan OJK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.
   d. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan BPK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
   e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan KAP, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP (*Management Letter*/*Internal Control Report*).
   f. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit.
   g. Memantau perkembangan penyelesaian kasus pegawai, dan tindak lanjut kasus-kasus yang berkenaan dengan *fraud*.
6. Melakukan *assessment* terhadap Sistem Internal Kontrol BNI.

a. Melakukan evaluasi penerapan *Whistle Blowing System* (WBS).
b. Melakukan evaluasi penerapan Program Strategi Anti *Fraud*.

7. Memberikan rekomendasikan pengembangan *Credit Discipline Program* untuk meningkatkan kualitas kredit Bank.
8. Memberikan rekomendasikan untuk menambahkan kurikulum mengenai temuan-temuan audit sebagai *lessons to be learned* pada BNI *Corporate University*.
9. Melakukan penelaahan terhadap laporan bulanan kinerja perusahaan dan usulan RBB 2017-2019 yang disampaikan Manajemen.
10. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
11. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite Audit.
12. Melakukan koordinasi antar Komite.

Laporan Komite Audit

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, BNI telah memuat Piagam Komite Audit dan informasi lainnya yang diwajibkan dalam Peraturan OJK tersebut pada Situs Web Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, serta Kode Etik Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab, serta Kode Etik Komite Audit selengkapnya dapat dilihat pada bagian Tinjauan Tata Kelola Perusahaan, sub bagian Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, sub sub bagian Komite Audit.

Dalam tahun buku 2016, Komite Audit melalui rapat-rapat Komite telah melakukan pembahasan dengan pihak terkait mengenai hal-hal berikut.

a. Manajemen
Komite Audit melakukan *review* atas laporan keuangan *unaudited* yang akan dipublikasikan pada tahun 2016, guna memastikan bahwa isi dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, independensi, objektivitas, serta kecukupan lingkup pemeriksaannya juga dilakukan oleh Komite Audit melalui pembahasan bersama Manajemen. Selain hal-hal tersebut, pembahasan dengan Manajemen juga dilakukan Komite Audit bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka memastikan kecukupan sistem pengendalian internal,sistem pengendalian risiko & pelaksanaan GCG. Komite Audit juga melakukan pembahasan dan monitoring tindak lanjut penyelesaiaan temuan Audit baik Audit Internal maupun Audit Eksternal, *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian serta tindakan-tindakan sanksi administratif yang diperlukan.

Berkenaan dengan upaya untuk lebih meningkatkan kualitas kredit Bank, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Manajemen untuk mengimplementasikan *Credit Discipline Program* dan menambahkan kurikulum pada BNI *Corporate University* mengenai temuan-temuan audit sebagai *lesson to be learned*.

b. Auditor Eksternal
Dalam rangka proses audit laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2016 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit membahas rencana audit, monitoring progress pelaksanaan audit termasuk temuan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian, evaluasi terhadap pengendalian internal termasuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan, serta kualitas pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Penelaahan dan evaluasi terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan Komite Audit sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- Berdasarkan hasil audit BI/OJK, diperoleh 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) temuan yang memerlukan tindak lanjut, dan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) temuan telah selesai ditindaklanjuti.
- Berdasarkan hasil audit BPK, diperoleh 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) temuan yang memerlukan tindak lanjut, dan 634 (enam ratus tiga puluh empat) temuan telah selesai ditindaklanjuti.
- Berdasarkan hasil audit PPATK, tidak terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut.
- Berdasarkan hasil audit KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) berupa Internal Control Report (*Management Letter*), diperoleh 19 (sembilan belas) temuan yang memerlukan tindak lanjut, dan seluruh temuan telah selesai ditindaklanjuti.

c. Satuan Pengawasan Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan berbasis risiko, memonitor pelaksanaan dan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh Manajemen Perseroan. Komite Audit juga melakukan pembahasan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI), dalam upaya mendorong efektivitas dan penguatan fungsi SPI.

Berdasarkan RKAT SPI Tahun 2016, realisasi dari rencana aktivitas yang dilakukan SPI sebagai berikut:

No	Jenis Aktivitas	Rencana	Realisasi
1	Audit Umum	89	85
2	Audit Teknologi Informasi	3	10
3	Audit *Issue*	22	27
4	Audit Pendalaman	-	28
5	*Surprise* Audit	-	11
6	Konsultasi	-	3
	Jumlah	114	164

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas tindak lanjut audit SPI sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 116 (seratus enam belas) tindak lanjut yang masih dalam proses penyelesaian, masing-masing terdiri dari 26 (dua puluh enam) tindak lanjut atas audit SPI tahun 2015, dan 90 (sembilan puluh) tindak lanjut atas audit SPI tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas proses penyelesaian kasus pegawai, pada tahun 2016 terdapat 108 (seratus delapan) kasus. Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kasus telah selesai diproses, sementara sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus masih dalam proses penyelesaian.

Terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dan fraud, ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) kepada 51 (lima puluh satu) pegawai, pemberian sanksi Demosi kepada 10 (sepuluh) pegawai, pemberian sanksi STK (Surat Teguran Keras) kepada 24 (dua puluh empat) pegawai, pemberian sanksi STE (Surat Teguran) kepada 26 (dua puluh enam) pegawai, dan pemberian sanksi SP (Surat Pembinaan) kepada 102 (seratus dua) pegawai.

Berkenaan dengan fungsi SPI sebagai third line of defense, Komite Audit telah merekomendasikan kepada SPI untuk meninjau kembali penamaan Kontrol Internal yang ditempatkan pada seluruh divisi dan unit operasional, serta keterlibatannya

pada aktivitas operasional.

d. Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan terhadap ketentuan Perbankan dan perundang-undangan lainnya yang terkait, disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan. Selama tahun 2016, Perseroan secara rutin telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 2007. Selain hal tersebut, Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai rencana kerja Divisi Kepatuhan, proses kasus pegawai, pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS), dan penerapan Program Strategi Anti Fraud.

Pembahasan terhadap rencana kerja dari Divisi Kepatuhan dilakukan untuk mendorong efektivitas sinergi antara Divisi Kepatuhan dan SPI dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, terutama kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap laporan WBS, selama tahun 2016 terdapat 38 (tiga puluh delapan) laporan yang disampaikan melalui WBS, yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan tidak cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya, 4 (empat) laporan terbukti terkait pelanggaran kode etik, 2 (dua) laporan terbukti terkait kecurangan, 1 (satu) laporan terbukti terkait penyuapan/gratifikasi, 18 (delapan belas) laporan terbukti terkait pelanggaran aturan/hukum, dan 6 (enam) laporan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian.

Penerapan Strategi Anti Fraud semester II tahun 2015 telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari 2016, dan Penerapan Strategi Anti Fraud semester I tahun 2016 telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Juli 2016. Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) kasus fraud yang dilaporkan sebagai laporan insidentil kepada OJK. Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap penerapan Strategi Anti Fraud, pada tahun 2016 jumlah fraud internal yang terjadi sebanyak 70 (tujuh puluh) kejadian dan jumlah *fraud* eksternal yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kejadian.

e. Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta rekomendasi Komite Audit, secara periodik dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Secara garis besar sebagai berikut:
- Pelaksanaan review atas usulan penunjukkan KAP dan Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI yang berakhir 31 Desember 2016, serta melakukan review atas efektifitas pelaksaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik termasuk aspek independensi dan objektivitas.
- Pelaksanaan review atas laporan Keuangan Publikasi Bank.
- Pelaksanaan review atas efektivitas fungsi Internal Audit berkaitan dengan realisasi RKAT, temuan-temuan dan rekomendasi audit mencakup kepatuhan atas Kontrol Internal, proses pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG).
- Pelaksaan review efektivitas tindak lanjut atas penyelesaian temuan-temuan Auditor Internal maupun Auditor Ekternal (OJK, BPK, PPATK).
- Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan dan usulan RBB 2017-2019 yang disampaikan Manajemen.
- Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dasar Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. POJK nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); jo Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

Perseroan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi BNI terakhir dilakukan pada tahun 2015 yang didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBk Nomor KEP 027/DK/2015 tanggal 21 September 2015 mengenai Pembaharuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut memuat visi dan misi, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tanggung jawab, tugas, wewenang hak dan kewajiban, rapat, dan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri atas:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
      ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Memberikan usulan/rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Struktur remunerasi;
      ii. Kebijakan remunerasi; dan

iii. Besaran remunerasi;
bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas di evaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

c. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris
4. Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

Wewenang Komite Nominasi Dan Remunerasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan *peer group,* dan
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
      i. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
      ii. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Nominasi Dan Remunerasi

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
2. Komite Nominasi dan remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan

Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi sumber daya manusia.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
7. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
8. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pada periode 2016, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Periode 1 Januari – 13 Januari 2016
Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Komisaris Independen	Sosiologi
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Zulkifli Zaini	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum
Joseph F.P Luhukay	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi dan Teknologi Informasi
Gatoet Gembiro Noegroho	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 13 Januari – 20 Januari 2016
Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Komisaris Independen	Sosiologi
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Zulkifli Zaini	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum

Joseph F.P Luhukay	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi dan Teknologi Informasi

Periode 20 Januari – 10 Maret 2016

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Komisaris Independen	Sosiologi
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Zulkifli Zaini	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum
Joseph F.P Luhukay	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi dan Teknologi Informasi
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 10 Maret – 20 April 2016

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 20 April – 4 Mei 2016

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Perbankan
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 4 Mei – 10 Mei 2016

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Hartadi A. Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Perbankan
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 10 Mei – 27 Juni 2016

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Hartadi A. Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Revrisond baswir*	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Pataniari Siahaan*	Anggota	Komisaris	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Perbankan
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	Hukum
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Periode 27 Juni – 25 Oktober 2016

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Hartadi A. Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Perbankan
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	Hukum
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Periode 25 Oktober – 31 Desember 2016

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hukum
Hartadi A. Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Anny Ratnawati	Anggota	Komisaris Independen	Keuangan
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris	Perbankan
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris	Hukum
Ayu Sari Wulandari	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan SK Dewan Komisaris No.Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dijabarkan sebagai berikut.

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PRADJOTO Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
Anggota Komite Nominasi danRemunerasi HARTADI A. SARWONO Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ANNY RATNAWATI Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi JONI SWASTANTO Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BISTOK SIMBOLON Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi AYU SARI WULANDARI Warga negara Indonesia, berdomisili di Bogor Lahir pada 1 Desember 1969 saat ini berusia 47 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak Januari 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/002/DK/2016 tanggal 29 Februari 2016. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Master of Applied Finance The University of Melbourne. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan antara lain sebagai Wakil Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010-2011), Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2011-2012), Wakil Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2012-2014), Wakil Pemimpin Divisi Market Intelligence & Portfolio PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014-2015) dan Pemimpin Divisi Market Intelligence & Portfolio PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2015). Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Januari 2016-sekarang).

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi Dan Remunerasi

Per 31 Desember 2016, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Pradjoto	S1 Hukum S2 Ekonomi	• Ketua Dewan Etik Perbanas • Penasehat hukum Dewan Gubernur BI • Senior Advisor Bank Internasional Indonesia • *Banking Expert* Kejaksaan Agung RI • Komisaris Independen Bank Mandiri • *Board of Advisor* Ikatan Bankir Indonesia (IBI) • *Supervisor Board for Business Banking Code of Ethic* Perbanas
Hartadi A. Sarwono	S1 Teknik Industri S2 Macroeconomics S3 Monetary Theory and Policy	• Deputi Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI • Kepala Perwakilan BI di Tokyo • Deputi Gubernur BI • Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Anny Ratnawati	S1 Agribisnis S2 Ekonomi Pertanian S3 Ekonomi Pertanian	• Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI • Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas • Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan • Wakil Menteri Keuangan Kementerian Keuangan RI • Dosen Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Joni Swastanto	S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Ilmu Ekonomi	• Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, BI • Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, BI • Kepala Perwakilan Semarang, BI • Kepala Departemen Perizinan dan Informasi • Perbankan, BI • Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK • Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB, OJK
Bistok Simbolon	S1 Hukum S2 Ekonomi	• Kepala Biro Hukum Sekretaris Kabinet • Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet • Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Politik, Hukum dan Keamanan • Komisaris dan Komisaris Utama PT Industri Kereta Api (Persero) • Wakil Sekretaris Kabinet
Ayu Sari Wulandari	S1 Teknik Industri Pertanian S2 Finance	• Wakil Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI • Pemimpin Divisi Usaha Kecil BNI • Wakil Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi BNI • Wakil Pemimpin Divisi Market Intelligence & Portfolio BNI • Pemimpin Divisi Market Intelligence & Portfolio BNI

Independensi Komite Nominasi Dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	Pradjoto	Hartadi A. Sarwono	Anny Ratnawati	Revrisond baswir	Pataniari Siahaan	Joni Swastanto	Bistok Simbolon	Ayu Sari Wulandari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi Dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Pradjoto	Ketua	I*mplementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Hartadi A. Sarwono	Anggota	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Seminar dan E*xecutive Roundtable,* Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Zulkifli Zaini	Anggota	Seminar dan *Executive Roundtable,* Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Anny Ratnawati	Anggota	Seminar dan *Executive Roundtable,* Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Revrisond Baswir*	Anggota	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Pataniari Siahaan*	Anggota	Seminar dan *Executive Roundtable,* Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Joni Swastanto	Anggota	Seminar Pengendalian Gratifikasi	Senin 17 Oktober 2016 Kantor Pusat BNI Gd BNI Ruang Serbaguna Lt. 25 Jakarta	KPK & BNI
		Seminar Revisit Enterprise Risk Management and Learning Best Practices of Credit Risk Management	Kamis-Jumat 1-2 Desember 2016 di Intercontinental Bandung Dago	BARA

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan total 15 (lima belas) kali rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 13 Januari 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Pradjoto	Ketua	2	2	100%
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	2	1	50%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	2	1	50%
Zulkifli Zaini	Anggota	2	1	50%
Anny Ratnawati	Anggota	2	1	50%
Revrisond baswir	Anggota	2	1	50%
Pataniari Siahaan	Anggota	2	1	50%
Joseph F.P Luhukay	Anggota	2	1	50%
Gatoet Gembiro Noegroho	Anggota	2	1	50%

Periode 14 Januari – 10 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Pradjoto	Ketua	3	3	100%
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	3	2	66,67%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	3	2	66,67%
Zulkifli Zaini	Anggota	3	2	66,67%
Anny Ratnawati	Anggota	3	2	66,67%
Revrisond baswir	Anggota	3	2	66,67%
Pataniari Siahaan	Anggota	3	2	66,67%
Joseph F.P Luhukay	Anggota	3	2	66,67%
Ayu Sari Wulandari	Anggota	3	1	33,33%

Periode 20 April – 4 Mei 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Pradjoto	Ketua	1	1	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	1	1	100%
Anny Ratnawati	Anggota	1	1	100%
Revrisond baswir	Anggota	1	1	100%
Pataniari Siahaan	Anggota	1	1	100%
Joni Swastanto	Anggota	1	1	100%
Ayu Sari Wulandari	Anggota	1	1	100%

Periode 5 Mei – 27 Juni 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat yang diselenggarakan	Jumlah Rapat yang diikuti	Persentase
Pradjoto	Ketua	3	3	100%
Hartadi A. Sarwono	Anggota	3	3	83,33%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	3	2	50%
Anny Ratnawati	Anggota	3	2	50%
Revrisond baswir*	Anggota	3	3	50%
Pataniari Siahaan*	Anggota	3	1	16,67%
Joni Swastanto	Anggota	3	3	100%
Bistok Simbolon	Anggota	3	1	33,33%
Ayu Sari Wulandari	Anggota	3	3	100%

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Periode 8 Juni – 25 Oktober 2016

Tingkat Kehadiran Rapat KomiteNominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Pradjoto	Ketua	3	3	100%
Hartadi A. Sarwono	Anggota	3	2	83,33%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	3	1	50%
Anny Ratnawati	Anggota	3	2	50%
Joni Swastanto	Anggota	3	3	100%
Bistok Simbolon	Anggota	3	1	33,33%
Ayu Sari Wulandari	Anggota	3	3	100%

Periode 25 Oktober – 31 Desember 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Pradjoto	Ketua	3	3	100%
Hartadi A. Sarwono	Anggota	3	3	100%
Anny Ratnawati	Anggota	3	3	100%
Joni Swastanto	Anggota	3	3	100%
Bistok Simbolon	Anggota	3	1	100%
Ayu Sari Wulandari	Anggota	3	3	33,33%

Agenda Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2016, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	11 Januari 2016	Pemberian mandat dan Kuasa kepada Ketua KNR untuk: • Hadir, memberikan suara dan rekomendasi dalam rapat dengan Tim Evaluasi Bakal calon Direksi/Dewan Komisaris BNI yang diajukan dalam RUPS Luar Biasa BNI Januari 2016 • Penandatanganan butir 1	Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond baswir Pataniari Siahaan Jos Luhukay Gatoet Gembiro
2	11 Januari 2016	Pembahasan Calon Pengurus Perseroan dalam rangka RUPS Luar Biasa BNI.	Pradjoto
3	10 Februari 2016	Diskusi Surat Kementrian BUMN No. SR-110/-MBU/02/2016 tanggal 05 Februari 2016 perihal permintaan nama untuk talent pool BUMN.	Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond baswir Pataniari Siahaan Jos Luhukay
4	10 Maret 2016	Pemberian mandat dan kuasa kepada Ketua KNR untuk • Hadir, memberikan suara dan rekomendasi dalam rapat dengan tim evaluasi Bakal Calon Kandidat anggota Direksi/Dewan Komisaris BNI yang diajukan dalam RUPS Tahunan BNI Maret 2016. • Menandatangani dokumen terkait butir 1 di atas.	Pradjoto Daniel T. Sparringa Kiagus Ahmad Badaruddin Zulkifli Zaini Anny Ratnawati Revrisond baswir Pataniari Siahaan Jos Luhukay Ayu Sari Wulandari
5	10 Maret 2016	Pembahasan Calon Pengurus Perseroan dalam rangka RUPS Tahunan BNI.	Pradjoto
6	28 April 2016	• Presentasi Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (*Corporate Secretary)* mengenai Penilaian kinerja anggota Direksi • Lain-lain: Usulan remunerasi Direksi dan Komisaris untuk tahun 2016 serta tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2015; Calon kandidat anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen.	Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond baswir Pataniari Siahaan Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
7	12 Mei 2016	• Pembahasan keanggotaan Komite Audit dari pihak independen bukan komisaris. • Pembahasan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dari pihak independen bukan komisaris.	Hartadi Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Revrisond baswir Pataniari Siahaan Bistok Simbolon Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
8	26 Mei 2016	• Proses alih tugas Komisaris menjadi komisaris independen. • Susunan keanggotaan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.	Hartadi Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond baswir Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
9	23 Juni 2016	• Penetapan tanggal cooling off untuk calon Komisaris Independen • Remunerasi Direksi dan Komisaris.	Hartadi Pradjoto Anny Ratnawati Revrisond baswir Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
10	30 Juni 2016	Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai Surat BUMN No. S-89/D.5. MBU/06/2016 tanggal 27 Juni 2016.	Hartadi Pradjoto Anny Ratnawati Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
11	4 Agustus 2016	• Presentasi *Senior Executive Vice President Human Capital* mengenai: • *Human Capital Architecture* • Draft Materi Kebijakan Alih Daya dan Penerapan Manajemen Risiko Alih Daya • Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dari pihak • independen bukan Komisaris.	Hartadi Pradjoto Kiagus Ahmad Badaruddin Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
12	6 Oktober 2016	Presentasi Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan mengenai *Key Perfomance Indicator* (KPI) Direksi tahun 2016.	Pradjoto Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
13	7 November 2016	• Presentasi Direktur Konsumer Banking mengenai Tambahan Manfaat Pensiun. • Tindak lanjut atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 40/SEOJK.03/2016 • Presentasi Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan mengenai pelaksanaan F*it and Proper Test S*esuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK) No. 27/03/2016 jo SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016.	Hartadi Pradjoto Anny Ratnawati Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
14	17 November 2016	• Presentasi *Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital:* • *Up* date progress penyusunan kebijakan remunerasi cfm. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016. • Up date implementasi I*ntegrated Human Capital Architecture.*	Hartadi Pradjoto Anny Ratnawati Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari
15	28 November 2016	Diskusi mengenai penilaian calon anggota Dewan Komisaris untuk memenuhi SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016.	Hartadi Pradjoto Anny Ratnawati Bistok Simbolon Joni Swastanto Ayu Sari Wulandari

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2016

Selama tahun 2016 Komite Nominasi Dan Remunerasi telah melaksanakan seluruh Program/Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut.

Bidang Remunerasi

1. Melakukan *review* Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Membuat rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran remunerasi
3. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris.
4. Melakukan *review* Remunerasi dan sistem Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan, serta hal-hal lain terkait remunerasi pegawai
5. Melakukan penilaian kinerja Direksi kolegial dan individual untuk tahun buku 2015
6. Melakukan review terhadap format dan *Key Perfomance Indikator* (KPI) Penilaian Kinerja Direksi kolegial dan individual untuk tahun buku 2017

Bidang Nominasi

1. Melakukan *review* terhadap sistem nominasi Direksi
2. Membuat rekomendasi mengenai Program Pengembangan Kemampuan anggota Direksi/ Dewan Komisaris;
3. Rekomendasi kandidat Direksi dan atau Komisaris
4. Melakukan review terhadap sistem nominasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi *Man Power Planning and Forecasting*, sistem rekrutmen, *Career Path Management, roadmap* pengembangan Sumber Daya Manusia, dsb, untuk memastikan tersedianya sistem pengelolaan SDM yang dapat mendukung tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga rencana-rencana strategsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Melakukan pemantauan terhadap perubahan ketentuan dan atau peraturan perundangan-undangan terkait serta melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru terhadap hal-hal terkait fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, secara internal Perseroan memiliki program yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dalam program ini para pegawai potensial yang masuk ke dalam *Talent Pool* akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya.

Dengan adanya program ini, apabila Perseroan membutuhkan penggantian kepemimpinan, Perseroan akan mengajukan kandidat internal dari peserta program yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, hasil pemilihan kandidat internal tersebut akan diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BNI dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN PER-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Piagam Komite Pemantau Risiko

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/ penyempurnaan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan pada tahun 2016, yang didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/024/DK/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang "Piagam Komite Pemantau Risiko". Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut memuat dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas , maksud dan tujuan, pembentukan dan struktur, persyaratan keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

   untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada BNI.
4. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan program/ rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
6. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko
8. Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* BNI.
9. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
10. Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

11. Melakukan monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
12. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
13. Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
14. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan.
15. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Hak dan kewajiban Komite Pemantau Risiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
4. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:
   a. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
   b. Laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang terkait jabatannya.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada hari dan jam kerja Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam satu minggu sesuai hari dan jadwal kehadiran yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta;
   b. apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, Anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar hari dan jadwal kehadiran rutin tersebut.
10. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerjasama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris lainnya.

Persyaratan Keanggotaan

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BNI.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
   b. Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara umum.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko.
3. Persyaratan Independensi
   Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:
   a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI.
   c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.
   d. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan perusahaan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
4. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Komite manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.

Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya

terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
   b. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
   c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
4. Jumlah dari komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
5. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BNI.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
   b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/ Perusahaan lain.
8. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
9. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
10. Anggota Direksi BNI tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
11. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
12. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
13. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Pada periode 2016, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Januari 2016 – 10 Maret 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Zulkifli Zaini	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Ancella Anitawati Hermawan	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 10 Maret 2016 – 31 Maret 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Zulkifli Zaini	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris	Ekonomi
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 31 Maret 2016 – 12 Mei 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris	Perbankan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 12 Mei 2016 – 1 Juni 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Revrisond Baswir	Anggota	Komisaris	Perbankan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 1 Juni – 27 Juni 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Revrisond Baswir*	Anggota	Komisaris	Perbankan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan
Hari Dewanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 27 Juni – 4 Agustus 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan
Hari Dewanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 4 Agustus 2016 – 16 Agustus 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 16 Agustus 2016 – 25 Oktober 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	Komisaris	Keuangan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan
Irwan Rinaldi	Anggota	Pihak Independen	Manajemen

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 25 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi A. Sarwono	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Makroekonomi dan Keuangan
Hemawati	Anggota	Pihak Independen	Perbankan
Irwan Rinaldi	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

Profil Komite Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tahun 2004berdasarkan SK Dewan KomisarisNo.Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan. Adapun profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dijabarkan sebagai berikut.

Ketua Pemantau Risiko
Hartadi A. Sarwono

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Pemantau Risiko
HEMAWATI

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 9 Maret 1955 saat ini berusia 61 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Oktober 2014 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris NoKEP/009/DK/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Perusahaan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa perusahaan, antara lain Direktur Operasional PT Bank QNB Kesawan (2010-2012), Pemimpin Divisi Operasional BNI (2006-2010), Wakil Pemimpin Divisi Operasional BNI (2004-2006), Wakil Pemimpin Wilayah 12 BNI (2003-2004) dan berbagai posisi di BNI hingga pensiun tahun 2010.

Anggota Komite Pemantau Risiko
IRWAN RINALDI

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 6 Juli 1960, saat ini berusia 56 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak Agustus 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan KomisarisNoKEP/026/DK/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntasi dari Universitas Andalas pada tahun 1985 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun1999. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa perusahaan, antara lain sebagai Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2003-2006), Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2006-2013), Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2013-2016) dan memberikan berbagai pelatihan, antara lain di Ikatan Komite Audit Indonesia (2015), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah /Asbanda (2015), BARa Risk Forum (2016).

vKualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2016, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hartadi A. Sarwono	S1 Teknik Industri S2 Macroeconomics S3 Monetary Theory and Policy	Deputi Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Kepala Perwakilan BI di Tokyo Deputi Gubernur BI Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Hemawati	S1 Ekonomi S2 Manajemen	Direktur Operasional PT Bank QNB Kesawan Pemimpin Divisi Operasional BNI Wakil Pemimpin Divisi Operasional BNI Wakil Pemimpin Wilayah 12 BNI
Irwan Rinaldi	S1 Akuntansi S2 Manajemen	Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan BRI Kepala Divisi Manajemen Risiko BRI

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Hartadi A. Sarwono	Revrisond Baswir	Hemawati	Irwan Rinaldi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Zulkifli Zaini*	Ketua	10 Maret 2016	Seminar dan E*xecutive Roundtable*, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Hartadi Agus Sarwono	Ketua	12 Mei 2016 – 31 Desember 2016	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Kiagus Ahmad Badaruddin**	Anggota	25 Oktober 2016	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Manage ment (BARa)
Revrisond Baswir*	Anggota	27 Juni 2016	*Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.*	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)

**Berhenti menjabat sejak tanggal 10 Maret 2016*
*** Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Oktober 2016*
**** Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari Pihak Independen.Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali Rapat termasuk 2 (dua)rapat gabungan bersama Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta 2 (dua) pertemuan yang bersifat diskusi, baik rapat/diskusi internal maupun rapat/diskusi bersama Divisi-divisi/ unit-unit terkait, sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 10 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Zulkifli Zaini	Ketua	6	6	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	6	6	100%
Revrisond Baswir	Anggota	6	6	100%
Ancella Anitawati Hermawan	Anggota	6	6	100%
Hemawati	Anggota	6	6	100%

Periode 10 Maret – 31 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Zulkifli Zaini	Ketua	1	1	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	1	1	100%
Revrisond Baswir	Anggota	1	1	100%
Hemawati	Anggota	1	1	100%

Periode 1 April – 1 Juni 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	1	1	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	1	1	100%
Revrisond Baswir	Anggota	1	1	100%
Hemawati	Anggota	1	1	100%

Periode 1 Juni – 27 Juni 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	1	1	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	1	1	100%
Revrisond Baswir*	Anggota	1	1	-
Hemawati	Anggota	1	1	100%
Hari Dewanto	Anggota	1	1	100%

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Periode 27 Juni – 4 Agustus 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	1	1	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	1	1	100%
Hemawati	Anggota	1	1	100%
Hari Dewanto	Anggota	1	1	100%

Periode 4 Agustus – 16 Agustus 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	2	2	100%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	2	-	-
Hemawati	Anggota	2	2	100%

Periode 16 Agustus – 25 Oktober 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	4	3	75%
Kiagus Ahmad Badaruddin	Anggota	4	2	50%
Hemawati	Anggota	4	4	100%
Irwan Rinaldi	Anggota	4	4	100%

Periode 25 Oktober – 31 Desember 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Hartadi A. Sarwono	Ketua	3	3	100%
Hemawati	Anggota	3	3	100%
Irwan Rinaldi	Anggota	3	3	100%

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 17 (tujuh belas) Rapat termasuk 2 (dua) rapat gabungan bersama Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta 2 (dua) pertemuan yang bersifat diskusi, baik rapat/diskusi internal maupun rapat/diskusi bersama Divisi-divisi/unit-unit terkait, sebagai berikut :

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	11 Januari 2016	Finalisasi Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2016. Lain-lain.	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
2	18 Januari 2016	Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2015 dan Profil risiko Triwulan IV-2015 .	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
3	10 Februari 2016	• Rencana Kerja Divisi Manajemen Sentra Konsumer Tahun 2016 dalam upaya Pencapaian Target dan Perbaikan Kualitas Kredit Konsumer. • Internal KPR	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
4	17 Februari 2016	• Jadwal Rapat dan Kegiatan KPR Tahun 2016 tahun 2016. • Review Portofolio Pinjaman BNI per 31 Desember 2015.	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
5	25 Februari 2016	Pembaharuan Materi Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko (Piagam Komite Pemantau Risiko).	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
6	02 Maret 2016	Laporan Realisasi Rencana/Program Kerja Divisi ERM Triwulan IV-2015 dan Rencana Kerja Divisi ERM, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2016.	Zulkifli Zaini Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
7	31 Maret 2016	Kinerja Perusahaan Anak per 29 Februari 2016.	Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
8	26 Mei 2016	Perbaikan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko 2016. Lain-lain	Hartadi Agus Sarwono Kiagus Ahmad Badaruddin Revrisond Baswir Hemawati
9	22 Juni 2016	• Pembahasan hasil evaluasi terhadap materi Permohonan konsultasi Kredit yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris. • Piagam Komite Pemantau Risiko.	Hartadi Agus Sarwono Kiagus Ahmad Badaruddin Hemawati Hari Dewanto

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10	21 Juli 2016	Up date Kebijakan Perkreditan BNI Semester I-2016 .	Hartadi Agus Sarwono Kiagus Ahmad Badaruddin Hemawati Hari Dewanto
11	25 Agustus 2016	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I-2016 dan Profil Risiko BNI termasuk Profil Risiko Terintegrasi Triwulan II-2016.	Hartadi Agus Sarwono Kiagus Ahmad Badaruddin Hemawati Irwan Rinaldi
12	22 September 2016	Dash Board Risk Profile dan Assesment Penilaian Tata Kelola Terintegrasi.	Kiagus Ahmad Badaruddin Hemawati Irwan Rinaldi
13	29 September 2016	Realisasi Rencana Bisnis Bank (Business Plan Bank) sampai dengan bulan Agustus 2016	Hartadi Agus Sarwono Kiagus Ahmad Badaruddin Hemawati Irwan Rinaldi
14	13 Oktober 2016	Review Operational Risk Self Assesment (ORSA) Divisi Operasional Teknologi Informasi Triwulan III-2016 serta Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) dan Data Center BNI.	Hartadi Agus Sarwono Hemawati Irwan Rinaldi
15	27 Oktober 2016	Kebijakan Umum Perkreditan BNI. Up date Kebijakan Kredit Triwulan III-2016.	Hartadi Agus Sarwono Hemawati Irwan Rinaldi
16	10 November 2016	Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).	Hartadi Agus Sarwono Hemawati Irwan Rinaldi
17	8 Desember 2016	• Laporan Realisasi Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2016. • Jadwal Kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2017 • Realisasi Program Kerja Divisi Enterprise Risk Management Triwulan III-2016. • Review Kebijakan umum Manajemen Risiko dan Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern. • Review Kebijakan Perkreditan Bank. • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Posisi 30 Juni 2016.	Hartadi Agus Sarwono Hemawati Irwan Rinaldi

Diskusi *)

Tanggal Diskusi	Hartadi A. Sarwono	Kiagus Ahmad Badaruddin	Revrisond Baswir**	*Hemawati*	Agenda Rapat
4 Agustus 2016	V	----------		V	Pembahasan materi permohonan konsultasi Kredit yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris
11 Agustus 2016	V	----------		V	Review Laporan Kinerja Perusahaan Anak dan Laporan Realisasi Investasi/ Tambahan Modal kepada Perusahaan Anak

*) tidak mengambil keputusan dan hanya bersifat diskusi

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain dengan melakukan pemantauan, penelaahan/*review* serta pemberian saran terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas Komite Pemantau Risiko antara lain melalui:

1. Pelaksanaan rapat internal KPR.
2. Rapat dan diskusi bersama divisi-divisi/ unit-unit terkait.
3. Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat. yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut.
   a. Tingkat Kesehatan Bank per semester dan Profil Risiko per Triwulan.
   b. Kebijakan Umum dan Strategi manajemen Risiko BNI, termasuk Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta Pedoman perusahaan Sistem Pengendalian Intern.
   c. Kebijakan Perkreditan BNI.
   d. Pemantauan/monitoring penerapan Manajemen Risiko.
   e. Bidang perkreditan sepert melakukan *review*/ evaluasi terhadap portofolio pinjaman, evaluasi kinerja per segmen kredit, 16 (enam belas) permohonan konsultasi kredit dan permohonan persetujuan pemberian atau tambahan pemberian fasilitas kredit yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, monitoring pelaksanaan hasil konsultasi kredit kepada Dewan komisaris, perbaikan kualitas kredit.
   f. Rencana kerja atau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
   g. Kinerja Perusahaan Anak serta realisasi investasi/penyertaan modal kepada Perusahaan Anak.
   h. Permasalahan teknologi Informasi.
   i. Penetapan Kebijakan *Risk Tolerance* dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM).
   j. Rencana Bisnis Bank.
   k. Hasil *exit meeting* Otoritas Jasa Keuangan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibentuk dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/12/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan di BNI didudukkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didudukkan

dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi memuat: Pembentukan dan Struktur Komite; Tugas dan Tanggung Jawab Komite; Keanggotaan Komite; Pengangkatan, Pemberhentian serta Masa Tugas Anggota Komite; Persyaratan Anggota Komite; Wewenang, Hak, dan Kewajiban Komite; Rapat Komite.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
   Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Entitas Utama.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki wewenang sebagai berikut.

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Ketua/anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas

Utama mengenai kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan implementasinya untuk memastikan pengeloaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara memadai.

8. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama kepada Direksi Entitas Utama untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat dan menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite.

Struktur, Keanggotaan Dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
   b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota;
   c. Seorang pihak independen sebagai anggota. Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama;
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota.
2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 di atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 di atas dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Keanggotaan tidak tetap merupakan Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Pada periode 2016, struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan tabel di bawah ini:

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 1 Januari 2016 – 25 Februari 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Komisaris Independen BNI	Sosiologi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Subarjo Joyosumarto	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah	Ekonomi
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 25 Februari 2016 – 10 Maret 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	Komisaris Independen BNI	Sosiologi
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 10 Maret 2016 – 20 April 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 20 April 2016 – 10 Mei 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Pataniari Siahaan	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris BNI	Perbankan
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 10 Mei 2016 – 27 Juni 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Pataniari Siahaan*	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris BNI	Perbankan
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per tanggal 27 Juni 2016 – 20 Oktober 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi

Susunan Komite Pemantau Risiko per tanggal 20 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Pradjoto	Ketua	Komisaris Independen BNI	Hukum
Joni Swastanto	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
Bistok Simbolon	Anggota	Komisaris BNI	Hukum
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance	Ekonomi Syariah
Krisna Wijaya	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Agribisnis
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Securities	Banking & Fnance
Setyowati	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi
Rizqullah	Anggota	Komisaris Independen Independen PT Bank BNI Syariah	Ekonomi
Rosa Lima Dwi Mutiari	Anggota	Komisaris Independen PT BNI Multifinance	Ekonomi

Profil Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan SK Dewan Komisaris No Kep/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dijabarkan sebagai berikut.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
PRADJOTO

Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
JONI SWASTANTO

Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
BISTOK SIMBOLON

Profile dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
K.H. MA'RUF AMIN
(Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah dan PT BNI Life Insurance)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 14 Maret 1943 saat ini berusia 73 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak September 2015 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/029/DK/2015 tanggal 21 September 2015

Meraih gelar Sarjana di bidang Ushuluddin dari Universitas Ibnu Chaldun pada tahun 1967 dan gelar Dr (Honoris Causa) dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah pada tahun 2012. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di beberapa perusahaan, antara lain sebagai Ketua Komisi VI DPR-RI (1999-2001), Anggota DPR/MPR-RI (1999-2004), Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-2014). Saat ini menjabat Ketua Dewan Syariah Nasional MUI dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
KRISNA WIJAYA
(Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 22 Juli 1955 saat ini berusia 61 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak November 2015 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/032/DK/2015 tanggal 16 November 2015.

Meraih gelar Sarjana di bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980, memperoleh gelar Sarjana S2 di Bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada (1990) dan gelar Sarjana (S3) Studi Antar Bidang dari Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain sebagai Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan (2005-2007), Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2008-2010), dan Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk. (2010-2015).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
FABIANUS SUDJATMOKO
(Presiden Komisaris/Independen PT BNI Securities)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta Lahir pada 15 Januari 1957, saat ini berusia 59 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak November 2015 berdasarkan surat keputusan Dewan KomisarisNo.KEP/031/DK/2015 tanggal 16 November 2015.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982 dan memperoleh gelar di bidang Banking & Finance dari Dowling College, New York pada tahun 1996. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2004-2010), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2010-2011), dan Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (2012-2015).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
RIZQULLAH
(Komisaris Utama/Independen PT BNI Syariah)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Tangerang. Lahir pada 16 Februari 1957 saat ini berusia 59 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak Oktober 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/028/DK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1982, memperoleh gelar S2 di bidang Bisnis Internasional dari Universitas Baldwin Wallace College, Ohio, USA pada tahun 1986 dan memperoleh gelar sarjana S3 di bidang Ekonomi & Keuangan Islam dari Universitas Trisakti pada tahun 2013. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain sebagai Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (2005-2007), Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.(2007-2008), Pemimpin Proyek Pendirian Bank Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2008-2010), Direktur Utama PT Bank BNI Syariah (2010-2012), Direktur Program S2 Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam (2013-2015), Komisaris Independen PT Graha 165 (2015-sekarang).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
ROSA LIMA DWI MUTIARI
(Komisaris Utama/Independen PT BNI Multifinance)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Tangerang. Lahir pada 25 Juni 1956 saat ini berusia 60 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak Oktober 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/029/DK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1980 dan memperoleh gelar S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 1995. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain sebagai jabatan dari tahun 2004 dengan posisi terakhir sebagai Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2012-2014), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Indonesian Profesional Certification Authority), Asesor Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2012-Sekarang), Tenaga Pengajar dan Konsultan Perkreditan pada Divisi Manajemen Pembelajaran Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014-sekarang).

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
SETYOWATI
(Pihak Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir pada 30 Oktober 1958 saat ini berusia 58 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan sejak November 2015 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris No.KEP/033/DK/2015 tanggal 16 November 2015.

Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1982. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain sebagai Corporate Credit Audit Departemen Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2006-2007), Credit Risk & Policy Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2007-2009), dan Policy, System & Procedure Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010-2014). Saat ini menjabat sebagai penasehat di PT Bank Syariah Mandiri.

Kualifikasi Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Per 31 Desember 2016, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Pradjoto	S1 Hukum S2 Ekonomi	• Ketua Dewan Etik Perbanas • Penasehat hukum Dewan Gubernur BI • Senior Advisor Bank Internasional Indonesia • Banking Expert Kejaksaan Agung RI • Komisaris Independen Bank Mandiri • Board of Advisor Ikatan Bankir Indonesia (IBI) • Supervisor Board for Business Banking Code of Ethic Perbanas
Pataniari Siahaan	S1 Teknik Sipil Transportasi S2 Ilmu Hukum S3 Ilmu Hukum	• Ketua dan Anggota pada DPR/MPR RI • Pimpinan Badan Legislasi DPR RI • Ketua Tim Sosialisasi Putusan MPR RI Bidang Undang-undang Dasar Negara RI • Dosen Hukum Universitas Trisakti
Joni Swastanto	S1 Ekonomi S2 Ekonomi S3 Ilmu Ekonomi	• Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, BI • Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, BI • Kepala Perwakilan Semarang, BI • Kepala Departemen Perizinan dan Informasi • Perbankan, BI • Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, OJK • Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB, OJK
Bistok Simbolon	S1 Hukum S2 Ekonomi	• Kepala Biro Hukum Sekretaris Kabinet • Kepala Biro Polkam, Pertahanan, Ratifikasi dan Permasalahan Hukum Sekretariat Kabinet • Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Politik, Hukum dan Keamanan • Komisaris dan Komisaris Utama PT Industri Kereta Api (Persero) • Wakil Sekretaris Kabinet
K.H. Ma'ruf Amin	S1 Bidang Ushuluddin Dr (HonorisCausa) dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah	• Ketua Komisi VI DPR-RI • Anggota DPR/MPR-RI • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden • Ketua Dewan Syariah Nasional MUI • Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
Krisna Wijaya	S1 Bidang Sosial Ekonomi Pertanian S2 Bidang Manajemen Agribisnis S3 Studi Antar Bidang	• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif (CEO) Lembaga Penjamin Simpanan • Komisaris PT Bank Danamon Indonesia (Tbk) • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Tbk)
Fabianus Sudjatmoko	S1 Bidang Ekonomi Perusahaan S2 Bidang Banking and Finance	• Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Pemimpin Divisi Manajemen Resiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

Nama	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Setyowati	S1 Bidang Ekonomi	• Corporate Credit Audit Department Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Credit Risk & Policy Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Policy, System & Procedure Group Head PT Bank Mandiri (Persero) • Penasehat di PT Bank Syariah Mandiri.
Rizqullah	S1 Bidang Ekonomi S2 Bidang Bisnis Internasional S3 Bidang Ekonomi dan Keuangan Islam	• Direktur PT Sarana Multigriya Finansial • Pemimpin Divisi Risiko Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Pemimpin Proyek Pendirian Bank Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Direktur Utama PT Bank BNI Syariah • Direktur Program S2 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam • Komisaris Independen PT Graha 165
Rosa Lima Dwi Mutiari	S1 Bidang Ekonomi Perusahaan S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI	• Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. • Asesor Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) • Tenaga Pengajar dan Konsultan Perkreditan pada Divisi Manajemen Pembelajaran Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	Pradjoto	Pataniari Siahaan	Joni Swastanto	Bistok Simbolon	K.H. Ma'ruf Amin	Krisna Wijaya	Fabianus Sudjatmoko	Setyowati	Rizqullah	Rosa Lima Dwi Mutiari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Aspek Independensi	Pradjoto	Pataniari Siahaan	Joni Swastanto	Bistok Simbolon	K.H. Ma'ruf Amin	Krisna Wijaya	Fabianus Sudjatmoko	Setyowati	Rizqullah	Rosa Lima Dwi Mutiari
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Pradjoto	Ketua	Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry.	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016, Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Daniel T. Sparringa	Anggota	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Pataniari Siahaan	Anggota	Seminar dan Executive Roundtable, Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia	Rabu-Kamis, 13-14 Januari 2016 Shangrila Hotel Jakarta	CRMS Indonesia/Center for Risk Management Studies dan LPPI/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Implementing Integrated Governance, Risk Management And Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry	Kamis-Jumat, 17-18 Maret 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)
Joni Swastanto	Anggota	Seminar Pengendalian Grafitikasi	Senin, 17 Oktober 2016, di Kantor Pusat BNI Gedung BNI, Ruang Serbaguna Lt.25 Jakarta	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BNI
		Seminar Revisit Enterprise Risk Management And Learning Best Practices of Credit Risk Management	Kamis- Jumat, 1-2 Desember 2016 Intercontinental Bandung Dago Pakar, Bandung	Banker Association for Risk Management (BARa)

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota.

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat bersama Direktur Sektor, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, unit-unit terkait, dan internal Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 6 (enam) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat yang disajikan berdasarkan periode jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut.

Periode 1 Januari – 10 Maret 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Kehadiran	Persentase
Pradjoto	Ketua	1	1	100%
Daniel Theodore Sparringa	Anggota	1	1	100%
Pataniari Siahaan	Anggota	1	1	100%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	1	-	-
Krisna Wijaya	Anggota	1	1	100%
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	1	1	100%
Fuady Thaher*	Anggota	1	1	100%
Subarjo Joyosumarto**	Anggota	1	1	100%
Setyowati	Anggota	1	1	100%

**Sudah tidak efektif berdasarkan RUPS PT BNI Multifinance tanggal 27 Juni 2016*
***Pengakhiran pengangkatan sebagai anggota komite per 25 Februari 2016 ssesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/021/DK/2016 tanggal 26 Mei 2016*

Periode 10 Maret – 10 Mei 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Kehadiran	Persentase
Pradjoto	Ketua	1	1	100%
Pataniari Siahaan	Anggota	1	-	-
Bistok Simbolon*	Anggota	1	1	100%
Wahyu Kuncoro**	Anggota	1	1	100%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	1	-	-
Krisna Wijaya	Anggota	1	1	100%
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	1	1	100%
Setyowati	Anggota	1	1	100%

**Efektif menjadi anggota komite per 10 Mei 2016, sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/018/DK/2016 tanggal 12 Mei 2016*
***Efektif menjadi Komisaris sejak 25 Januari 2017*

Periode 11 Mei – 27 Juni 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Kehadiran	Persentase
Pradjoto	Ketua	1	1	100%
Pataniari Siahaan*	Anggota	1	-	-
Joni Swastanto	Anggota	1	1	100%
Bistok Simbolon	Anggota	1	-	-
Wahyu Kuncoro**	Anggota	1	1	100%
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	1	-	-
Krisna Wijaya	Anggota	1	-	-
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	1	1	100%
Setyowati	Anggota	1	1	100%

**Melaksanakan cooling off dalam rangka peralihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016. Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*
***Efektif menjadi Komisaris sejak 25 Januari 2017*

Periode 28 Juni – 20 Oktober 2016

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Kehadiran	Persentase
Pradjoto	Ketua	3	3	100%
Joni Swastanto	Anggota	3	3	100%
Bistok Simbolon	Anggota	3	-	-
K.H. Ma'ruf Amin	Anggota	3	-	-
Krisna Wijaya	Anggota	3	3	100%
Fabianus Sudjatmoko	Anggota	3	1	33,33%
Rizqullah*	Anggota	3	3	100%
Rosa Lima Dwi Mutiari**	Anggota	3	2	66,67%
Setyowati	Anggota	3	3	100%

**Efektif menjadi anggota komite per 20 Oktober 2016, sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/028/DK/2016 tanggal 20 Oktober 2016*
***Efektif menjadi anggota komite per 20 Oktober 2016, sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/029/DK/2016 tanggal 20 Oktober 2016*

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2016, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	1 Februari 2016	Kinerja perusahaan anak semester II/2015 dan Strategi 2016	Pradjoto Daniel T. Sparringa Pataniari Siahaan Krisna Wijaya Fabianus Sudjatmoko Subarjo Joyosumarto** Setyowati*
2.	31 Maret 2016	Kinerja perusahaan anak per Februari 2016	Pradjoto Bistok Simbolon*** Krisna Wijaya Fabianus Sudjatmoko Setyowati Wahyu Kuncoro****
3.	26 Mei 2016	Evaluasi terhadap Tata Kelola Perusahaan PT BNI Asset Management dan PT BNI Securities (fungsi kepatuhan, manajemen risiko, pengendalian internal).	Pradjoto Joni Swastanto Setyowati Pataniari Siahaan***** Wahyu Kuncoro**** Fabianus Sudjatmoko
4.	21 Juli 2016	• Evaluasi terhadap Tata Kelola Perusahaan PT BNI Life Insurance dan PT Bank BNI Syariah (fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal). • Implementasi dan pelaksanaan: • Kebijakan Tata Kelola Terintergasi • Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi	Pradjoto Joni Swastanto Krisna Wijaya Rizqullah****** Setyowati
5.	22 September 2016	• Dashboard Risk Profile • Asesmen Penilaian Tata Kelola Terintegrasi	Pradjoto Joni Swastanto Krisna Wijaya Fabianus Sudjatmoko Rizqullah Rosa Lima Dwi Mutiari ******* Setyowati
6.	13 Oktober 2016	• Realisasi program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016 dan Rencana kerja tahun 2017 • Presentasi masing-masing Komisaris perusahaan anak (anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi) mengenai: • Temuan hasil audit dan tindak lanjut • Penerapan Strategi Anti Fraud	Pradjoto Joni Swastanto Krisna Wijaya Rizqullah Fabianus Sudjatmoko Rosa Lima Dwi Mutiari Setyowati

** Sudah tidak efektif berdasarkan RUPS PT BNI Multifinance tanggal 27 Juni 2016.*
***Pengakhiran pengangkatan sebagai Anggota Komite per 25 Februari 2016 sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/021/DK2016 tanggal 26 Mei 2016.*
****Efektif menjadi Anggota Komite per 10 Mei 2016 sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/018/DK2016 tanggal 12 Mei 2016.*
*****Efektif menjadi Komisaris sejak tanggal 15 Januari 2017.*
******Melaksanakan cooling off dalam rangka pengalihan tugas dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 27 Juni 2016. Efektif menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 25 Januari 2017.*
*******Efektif menjadi Anggota Komite per 20 Oktober 2016 sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/028/DK2016 tanggal 20 Oktober 2016.*
********Efektif menjadi Anggota Komite per 20 Oktober 2016 sesuai SK Dewan Komisaris Nomor KEP/029/DK2016 tanggal 20 Oktober 2016*

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2016, Komite Tata Kelola terintegrasi telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan membahas kinerja perusahaan anak berikut strategi pertumbuhan perusahaan anak sejalan dengan perubahan visi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja sehingga *corporate plan* perusahaan anak terintegrasi dengan *corporate plan* perusahaan induk.
2. Memberikan masukan dan saran dalam rangka peningkatan sinergi perusahaan anak sebagai bagian dari BNI Group, ekplorasi produk-produk baru yang prospektif dan optimalisasi peluang bisnis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk.
3. Mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi meliputi kecukupan pengendalian intern terintegrasi; pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi; implementasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, dan pencapaian kinerja perusahaan anak.
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap *dashboard risk profile* terintegrasi, penentuan *leading risk indicator* untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan masing-masing perusahaan anak serta melakukan evaluasi hasil asesmen/ penilaian terhadap tata kelola terintegrasi.
6. Memastikan hasil temuan audit terintegrasi telah ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan anak serta memastikan telah dibuatkan kategorisasi temuan untuk mengantisipasi temuan berulang.
7. Mendorong peningkatan pelaksanaan sinergi perusahaan anak, di antaranya sinergi dalam hal *branding* bersama dan penetapan segmentasi agar tidak terjadi *overlapping*.
8. Mendorong percepatan BNI *Incorporated* berjalan dengan baik sehingga berdampak pada *profitability* masing-masing perusahaan anak diiringi pengendalian risiko, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tata kelola yang baik.
9. Membahas dan merekomendasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi di perusahaan anak.
10. Melakukan *review* dan memastikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan tata kelola terintegrasi serta memastikan atas kelemahan yang ada telah dibuat *action plan*/langkah-langkah perbaikan.
11. Meningkatkan komitmen bersama bagi semua Komisaris perusahaan anak dan seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi bahwa dalam melakukan pengawasan harus berdasarkan pada konteks risiko terhadap entitas utama.
12. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2017 dengan fokus: memastikan struktur Tata Kelola Terintegrasi berfungsi secara optimal; memastikan proses Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik; mengevaluasi hasil Tata Kelola Terintegrasi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengembang misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholder,* antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan publik secara luas. Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Regulasi yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Anggaran Dasar BNI.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.
5. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.
7. Keputusan Direksi BEJ No.339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 Perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
8. Peraturan No.IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada struktur organisasi Perseroan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam memberikan pengarahan dan memantau kegiatan unit-unit kerja menurut bidang tugasnya yang meliputi hubungan investor, korporat branding, komunikasi eksternal, komunikasi internal, hukum dan pemantauan GCG, serta protokol, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan.

DIVISI KOMUNIKASI PERUSAHAAN & KESEKRETARIATAN
STRUKTUR ORGANISASI

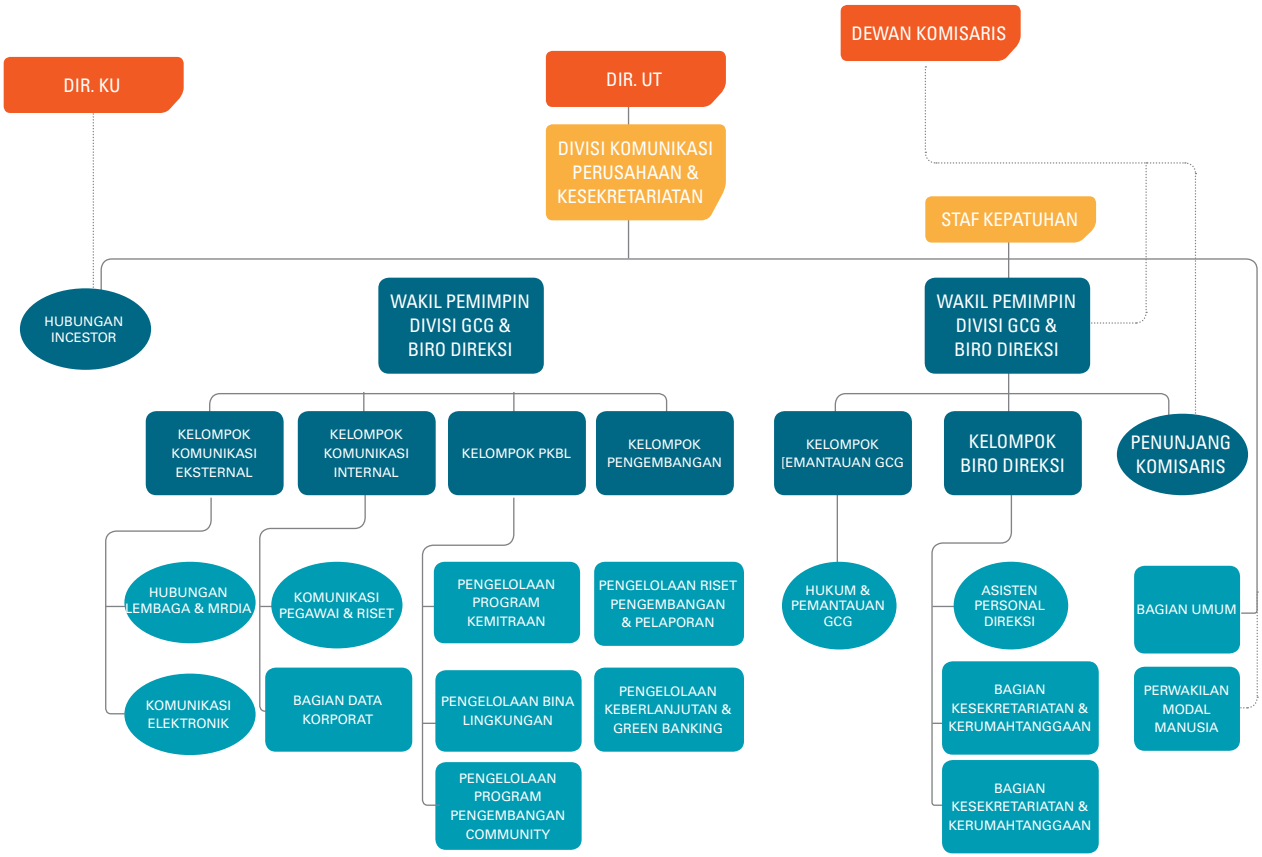

KETERANGAN:

1. Hubungan Investor bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dalam pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan aspek finansial, sedangkan pelaksaan fungsi lainnya serta administrasi kepegawaian tetap berada di bawah Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan.
2. Penunjang Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Komisaris, namun demikian administrasi kepegawaiannya berada di bawah Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan.
3. Apabila diperlukan, Komisaris dapat langsung berkoordinasi dengan Wakil Pemimpin Divisi GCG & Biro Direksi
4. Pelaksanaan Fungsi BagIAN Umum mengikuti kebijakan sentralisasi Bagian Umum Kantor Pusat
5. Pelaksanaan ungsi Perwakilan Modal Manusia mengikuti kebijakan Implementasi sentralisasi Perwakilan Modal Manusia.

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Di BNI, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Divisi Komunikasi Perseroan dan Kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholder*. Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi *Corporate Secretary* paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut di atas dan dalam pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi Sekretaris Perusahaan yang selaras dengan visi dan misi BNI, Sekretaris Perusahaan BNI memiliki fungsi dan tugas yang tertuang dalam Pedoman Perseroan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan untuk Perseroan adalah sebagai berikut.
   a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal. Khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
   b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal (*investor relation*) yang berkaitan dengan kondisi Bank.
   c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan *stakeholder* (*public relation*) yang berkaitan dengan kondisi Bank.
   d. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
   e. Sebagai penghubung atau contact person antara Bank dengan OJK dan masyarakat.
2. Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga menjalankan tugas-tugas sebagai berikut.
   a. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat *minutes of meeting*
   b. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
   c. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih.
   d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.

   Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang

diperlukan berkaitan dengan hal hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan.

e. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2016 BNI mengalami perubahan Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut.

1. Sejak 27 November 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2016 Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. Suhardi Petrus.
2. Sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan saat ini, Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdr. Kiryanto

Suhardi Petrus
(27 November 2015 - 24 April 2016)

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Akuntansi, Universitas Sebelas Maret (1992) dan S2 Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Wijaya Putra (2000).

Memimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan BNI mulai 27 November 2015 sampai 24 April 2016.

Sebelumnya menjabat sebagai VP Management & Development Divisi Kepatuhan, Head of Compliance Management & Development Divisi Kepatuhan (2013), dan Pemimpin Jaringan dan Layanan Wilayah Kantor Wilayah Semarang (2014-2015). Saat ini beliau menjabat sebagai Pemimpin Jaringan dan Layanan Wilayah, Kantor Wilayah Banjarmasin.

Kiryanto
(25 April 2016 – saat ini)

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Manajemen Keuangan FISIP Universitas Gajah Mada (1992) dan S2 Bidang Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (2000).

Sebelumnya menjabat sebagai Senior Economist BNI Divisi Perencanaan Strategis (2006-2016) dan *Assistant Vice President* Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (2004-2006). Selain itu, beliau adalah seorang ekonom dan profesional Indonesia yang karyanya telah diterbitkan di sejumlah media cetak dan sering memberikan pelatihan kepada pegawai bank.

Penggantian *Corporate Secretary* tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Dewan Komisaris No. DK/38 tanggal 22 April 2016 dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 April 2016. Perubahan tersebut telah diumumkan Perseroan pada tanggal 26 April 2016 melalui surat kabar nasional, yaitu harian The Jakarta Post dan Investor Daily. Berikut Pemberitahuan di surat kabar dimaksud:

BNI

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")
INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, dengan ini Direksi Perseroan menginformasikan perubahan *Corporate Secretary* Perseroan dari semula Sdr. Suhardi Petrus digantikan oleh Sdr. Kiryanto.

Selanjutnya, semua korespondensi untuk *Corporate Secretary* Perseroan ditujukan kepada:

Sdr. Kiryanto
d.a Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan
Gedung BNI Lantai 24
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Demikianlah, untuk dimaklumi.

Jakarta, 26 April 2016
Direksi Perseroan

BNI

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk ("Company")
INFORMATION TO SHAREHOLDER

In compliance with the Rule of the Indonesia Financial Services Authority No.35/POJK.04/2014 and the Rule of the Listing of Shares No I-A, herewith the Company Board of Directors releases the information concerning the change in the Company Corporate Secretary previously held by Suhardi Petrus and now replaced by Kiryanto.

Hereafter, all correspondence for the Company Corporate Secretary should be addressed to:

Kiryanto
Corporate Secretary & Communication Division
BNI Building 24th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Jakarta, April 26th, 2016
Board of Directors

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan yang efektif, BNI telah memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan maupun training. Pada tahun 2015 Sekretaris Perusahaan BNI telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Periode	Materi	Waktu dan Tempat	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Kiryanto	25 April 2016 – 31 Desember 2016	Seminar Anti Pencucian Uang	Jakarta, 7 April 2016	Seminar Oleh PPATK
		Pengendalian Gratifikasi	Jakarta, 17 Oktober 2016	Seminar Oleh KPK
		CEO Forum	Jakarta, 24 November 2016	Seminar Oleh Kompas dan BNI
		Konferensi GCG – Tata Kelola Perusahaan dan Risiko Terintegrasi Menuju Regional Champion	Jakarta, 19 Desember 2016	Seminar Oleh IICG

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2016

Beberapa kegiatan terkait dengan pemangku kepentingan yang telah dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 antara lain:

1. Menyelenggarakan *Corporate Action* yaitu:
   a. RUPS Luar Biasa pada tanggal 12 Januari 2016
   b. RUPS Tahunan pada tanggal 10 Maret 2016
   c. Pembayaran Dividen pada tanggal 13 April 2016
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
3. GCG *Awareness* untuk Direksi dan Dewan Komisaris BNI termasuk di dalamnya update kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
4. Melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam upaya mengelola komunikasi dengan komunitas pasar modal khususnya investor dan *analyst* untuk menjamin keterbukaan atau transparansi informasi, BNI mengadakan kegiatan *Analyst Meeting* dan *Public Expose*, menerima Investor/*Analyst Visit* dan *Conference Call*, menyelenggarakan *Analyst Gathering, Economic Outlook* serta menerbitkan BNI *Monthly Report*.
6. Mengikuti *Non Deal Roadshow* baik di dalam maupun luar negeri, yakni di wilayah Asia, Eropa dan Amerika.
7. Penyediaan akses informasi yang *up to date* pada akses yang dapat dijangkau publik secara luas, antara lain membangun *database* saham, mengembangkan aplikasi *website*, mempersiapkan *Annual Report* Tahun Buku 2016.
8. Mengoptimalkan strategi penerapan GCG melalui *Self Assessment* GCG dan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi, serta sosialisasi GCG di beberapa kantor Wilayah dan pada saat Vendor *Gathering*.
9. Penyampaian Laporan rutin dan insidentil kepada regulator antara lain Laporan Registrasi Pemegang Efek, Daftar Pemegang Saham, Laporan Hutang Valas, dsb.
10. Pengurusan *Fit and Proper Test* Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Dokumentasi data legalitas Perusahaan antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Susunan Pengurus, dsb.
12. Menyelenggarakan *press conference* dan *teleconference* dengan para *stakeholder.*
13. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan, Sekretaris Negara, Otoritas Jasa Keuangan, *Self Regulatory Organization* (Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Biro Adminsitrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
14. Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.
15. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi dan membuat Notulen hasil Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2015

Sebagaimana Laporan *Corporate Secretary* yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka Sekretaris Perusahaan BNI telah menyusun laporan Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Memo No.KMP/7/1292 tanggal 22 April 2016.

Laporan tersebut antara lain memuat tentang:

Pelaksanaan Fungsi *Corporate Secretary* Berdasarkan POJK No. 35 /POJK.04/2014

No.	Fungsi menurut OJK	Program	Realisasi
1	Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal	Mengikuti perkembangan Pasar Modal sesuai peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan melakukan koordinasi dengan Divisi lain terkait pemenuhan ketentuan Pasar Modal yang berlaku	Telah melakukan analisa yuridis/kajian terkait : • Revisi Anggaran Dasar BNI utk memenuhi POJK No. No. 32/ POJK.04/2014 dan No. 32/POJK.04/2014 • Kewenangan Memutus Anggota Direksi BNI yang masih dalam Proses Fit and Proper Test OJK • Transaksi Peminjaman Dana ke China Development Bank • Revaluasi Aset terkait paket kebijakan ekonomi V • Resume Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank • Pembelian Gedung BNI Sudirman dan KCU Fatmawati terkait Transaksi Afiliasi yang dilakukan BNI dengan Dana Pensiun BNI
		Pemenuhan POJK baru tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan	• Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disetujui Direksi cfm Surat Direksi No. DIR/164 tanggal 26 Juni 2015 dan Dewan Komisaris BNI cfm Surat No. DK/71 tanggal 8 Juli 2015 dan telah disampaikan kepada segenap LJK pada Konglomerasi Keuangan BNI • BNI telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan cfm Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/009/DK/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2	Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	GCG Awareness untuk BOC dan BOD termasuk di dalamnya update kebijakan baru dan isu-isu mengenai GCG	Telah menyusun dan menyampaikan: • Kajian Yuridis tentang Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BNI • Kajian mengenai regulasi terbaru terkait RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Nominasi Remunerasi, Corporate Secretary dan HMETD (No. 32/POJK.04/2014, No. 33 /POJK.04/2014 , No. 34 / POJK.04/2014, No. 35 /POJK.04/2014 No. 38 /POJK.04/2014) • Informasi penerbitan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah kepada Direksi • Analisa Peraturan Menteri BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 kepada Direksi • Analisa Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham BNI bersama Divisi Tresuri • Analisa Pelaksanaan Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham BNI untuk Bonus Saham kepada Direksi dan Surat No. DIR/158/R kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan *Buyback*.
3	Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:		

No.	Fungsi menurut OJK	Program	Realisasi
	keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	Menjamin keterbukaan atau transparansi informasi perusahaan baik finansial maupun non finansial, dengan tetap menjaga informasi tersebut disampaikan secara wajar dan pantas.	Telah menyusun, melakukan dan menyampaikan: • Keterbukaan Informasi atas setiap c*orporate action* BNI • Publikasi Keterbukaan Informasi di media cetak, website BNI, Sistem Pelaporan Emiten (SPE) OJK dan *e-reporting* di Bursa Efek Indonesia (idx.net) • Surat Keterbukaan Informasi kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia
		Intensifikasi publikasi materi dan informasi kinerja perusahaan	• Telah melakukan Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan di Media Lokal • Telah menyusun Materi Corporate Presentation • Telah menyusun Smartbook • Telah melakukan publikasi highlight laporan keuangan dan print ad di media asing
		Penyediaan informasi secara berkala mengenai kinerja perusahaan, kinerja saham BNI maupun outlook pasar	• Menyediakan informasi secara berkala mengenai kinerja perusahaan, kinerja saham BNI maupun outlook pasar secara keseluruhan melalui Weekly, Monthly, Quarterly dan Annually Reporting. • Mengirimkan laporan bulanan (Monthly update) pada pihak internal dan pihak eksternal mengenai perkembangan pasar dan kinerja saham perusahaan.
		Penyediaan akses informasi yang up to date pada akses yang dapat dijangkau publik secara luas melalui updating materi pada media digital agar dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas.	• Membangun database mengenai saham, data investor dan masukan/feedback sebagai dasar perbaikan ke depan • Menyediakan informasi up to date mengenai kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan melalui media digital (website) • Mengembangkan Aplikasi dan Konten website • Melakukan updating materi website BNI sesuai dengan POJK No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten
		Mempersiapkan laporan manajemen yang terangkum dalam laporan tahunan (Annual Report)	• Menyusun Tim Annual Report • Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penyusunan Annual Report TB 2014 dan TB 2015
	penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu	Mengoptimalkan strategi penerapan dan pemantauan GCG	Telah melakukan Self Assesment GCG (Semester II Posisi Desember 2014) dan BNI mendapat peringkat 2
			Telah melakukan Self Assesment TKT (Semester I Posisi Juni 2015) yang disampaikan kepada OJK dan BNI mendapat peringkat 2
			Telah dilakukan Self Assessment GCG (Semester I Posisi Juni 2015) dan BNI mendapat peringkat 2
		Penyampaian Laporan Rutin ke OJK	• Laporan rutin dalam rangka kepatuhan ketentuan terhadap OJK yang disampaikan melalui surat dan upload SPE OJK antara lain: • Laporan Registrasi Efek setiap bulannya • Laporan 10 Besar Daftar Pemegang Saham setiap triwulan • Laporan Hutang Valas setiap bulan

Struktur dan Mekanisme GCG

No.	Fungsi menurut OJK	Program	Realisasi
		Penyampaian Laporan insidentil ke OJK	• Laporan insidentil dalam rangka kepatuhan ketentuan terhadap OJK yang disampaikan melalui surat dan upload SPE OJK antara lain berupa Laporan Keterbukaan Informasi atas corporate action (terlampir).
	penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	• Telah melakukan RUPS Tahunan tgl 17 Maret 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 34 tgl. 17 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH • Telah melakukan RUPS Luar Biasa tanggal 9 November 2015 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 6 Tanggal 9 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi
		Pengurusan Fit and Proper Test Direksi dan Dewan Komisaris	Telah berkoordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan fit and proper test terhadap 8 calon Direksi dan 7 calon Dewan Komisaris. Seluruh calon Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengikuti fit and proper test tahun 2015 dinyatakan lulus uji fit and proper test OJK dan telah dituangkan dalam Akta Perubahan Susunan Pengurus yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH
	penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pendokumentasian data GCG antara lain berupa Akta RUPS dan Notulen Radisi untuk database Corporate	Telah melakukan administrasi secara hardcopy maupun softcopy terhadap dokumen perusahaan antara lain Akta RUPS dan Notulen Radisi
	pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Program orientasi dilakukan untuk menambah kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris	Telah dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2015
	Lain-lain terkait implementasi GCG	Penunjang Komisaris	• Melaksanakan inisiatif strategis untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG serta meningkatkan kualitas layanan melalui dukungan implementasi penerapan TKT kelengkapan administrasi Komisaris baru dalam memastikan terselenggaranya GCG dan RUPS, peningkatan kualitas layanan yuridis & strategis sebagai bahan referensi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas laporan yang berisi analisis atau review dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, dan Penyusunan Laporan Hasil Rapat Komisaris dan Rapat Komite. • Melakukan supporting terhadap implementasi program Dewan Komisaris berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2015.
		Mengupayakan terlaksananya Prinsip-Prinsip GCG secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan citra/image BNI serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan (value creation)	• Membuat Komitmen GCG yang ditandangani oleh segenap Insan BNI • Telah menyusun Pakta Integritas BNI yang ditandatangani oleh segenap Direksi • Telah melakukan publikasi Anti Gratifikasi melalui eksternal dan internal media
		Pengelolaan saham	Telah melakukan pengelolaan administrasi saham oleh Biro Administrasi Efek BNI (PT Datindo Entrycom) yang menyampaikan Laporan Bulanan Efek kepada BNI
		Pembayaran Dividen	Telah dilakukan pembayaran dividen tahun buku 2014 pada tanggal 17 April 2015
		Sosialisasi Benturan Kepentingan & TKT	Telah menyampaikan materi sosialisasi Benturan Kepentingan kepada segenap Divisi/Satuan/Unit
		GCG Campaign	Telah menyelenggarakan Lomba Opini Benturan Kepentingan, yang diikuti oleh segenap pegawai pada bulan Maret 2015

No.	Fungsi menurut OJK	Program	Realisasi
4	Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK dan pemangku kepentingan lainnya	Mengoptimalkan strategi yang berkaitan dengan permodalan & rating BNI	Telah melaksanakan : • intensifikasi komunikasi efektif dengan Lembaga Rating • aktivitas review rating BNI melalui lembaga rating S&P, Moody's, Fitch dan Pefindo
		Intensifikasi komunikasi efektif dengan publik/investor sehingga dapat meningkatkan stakeholders satisfaction	Telah melakukan intensifikasi komunikasi efektif dengan publik/ investor melalui aktivitas Investor Relation antara lain melalui aktivitas Analyst Meeting, Public Expose, Non Deal Road Show Dalam dan Luar Negeri, Investor and Analyst Visit, Teleconference, Analyst Gathering, Economic Outlook serta BNI Monthly Report to External
		Intensifikasi komunikasi efektif dengan analyst melalui penyelenggaraan analys meeting	Telah melakukan analyst meeting Kinerja Keuangan sebagai berikut : FY 2014 : 29 Januari 2015 1Q 2015 : 23 April 2015 2Q 2015: 30 Juli 2015 3Q 2015: 15 Oktober 2015
		Penyelenggaraan Public Expose	Telah melaksanakan Public Expose Kinerja Keuangan posisi bulan September 2015 pada tanggal 9 November 2015 melalui acara Investor Summit di Bursa Efek Indonesia
		Pelaksanaan Program Kemitraan GCG dengan Institusi/Lembaga terkait	Telah melakukan kerjasama dengan IICG, IICD, KNKG, dan LKDI
		Menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemangku kepentingan	• Melakukan promosi perusahaan dan penerbitan informasi lainnya • Mengelola komunikasi dengan Kementerian BUMN • Mengelola komunikasi dan korespondensi dengan investor, analis pasar modal, fund manager, perusahaan sekuritas, badan regulator dan lembaga pemeringkat • Updating sistem support (Bloomberg, Orient) dsb • Mengadakan shareholder meetings, investor meetings/forum, investor/analyst visit, private meetings with investors ("one-on-one" briefings) • Mengelola database mengenai investor, kinerja perusahaan maupun peers dan analyst mailing list • Penghubung antara perusahaan dengan media, misalnya dalam penyusunan Press Release • Spokesperson perseroan • Meminimalisir pemberitaan negatif reputasi BNI

FUNGSI *INVESTOR RELATIONS*

Kegiatan *Investor Relations* merupakan bagian dari fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi utama mendukung Sekretaris Perusahaan dalam usahanya untuk membina hubungan dan meningkatkan program *Investor Relations* yang kondusif secara intensif, sistematis dan terencana, dengan:

1. Menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan mengelola komunikasi dan korespondensi dengan investor, analis pasar modal, *fund manager*, perusahaan sekuritas, badan regulator dan lembaga pemeringkat.
2. Menjamin keterbukaan atau transparansi informasi perusahaan baik finansial maupun non finansial, dengan tetap menjaga informasi tersebut disampaikan secara wajar dan pantas.
3. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai perusahaan atau nasabah sebagaimana mestinya dan tidak memanfaatkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan pihak tertentu lainnya.
4. Mengadakan shareholder meetings, press conferences, conference, investor meetings/ forum, investor/analyst visit, private meetings

with investors ("*one-on-one" briefings*).
5. Melakukan publikasi kinerja perusahaan
6. Melakukan promosi perusahaan dan penerbitan informasi lainnya.
7. Mengirimkan laporan bulanan pada pihak internal dan pihak eksternal mengenai perkembangan pasar dan kinerja saham perusahaan.
8. Mempersiapkan laporan manajemen yang terangkum dalam laporan tahunan (Annual Report)
9. Menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan melalui media digital (website) agar dapat memberikan akses yang lebih mudah dan luas.
10. Mengelola database mengenai investor, kinerja perusahaan maupun *peers* dan *analyst mailing list*.

Berikut adalah aktivitas *Investor Relations* bersama dengan Sekretaris Perusahaan dalam rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan selama tahun 2016.

Aktivitas Investor Relation	2016
Analyst Meeting	4X
Public Expose	1X
Non Deal Road Show/Conference Dalam Negeri	11X
Non Deal Road Show/Conference Luar Negeri	10X
Investor and Analyst Visit	123X
Teleconference	32X
Analyst Gathering	1X
Economic Outlook	1X

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, di antaranya:
1. Komite Kredit
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
3. Komite Manajemen Risiko dan Kapital
4. Komite Produk
5. Komite Manajemen Kinerja
6. Komite Manajemen Teknologi
7. Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
8. Komite Sumber Daya Manusia

KOMITE KREDIT

Struktur Dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit terdiri dari 4 (empat) tingkatan yang masing-masing memiliki komposisi keanggotaan dan limit kewenangan tersendiri, yaitu :
1. Komite Kredit tingkat Direksi
2. Komite Kredit tingkat Direktur :
   a. Direktur Sektor + Direktur*) + Direktur Utama
   b. Direktur Sektor + Direktur*)
   c. Direktur Sektor
3. Komite Kredit tingkat Kantor Pusat :
   a. Kantor Pusat 2 (KP-2)
   b. Kantor Pusat 1 (KP-1)
4. Komite Kredit tingkat Wilayah :
   a. Komite Kredit Kantor Wilayah 2
   b. Komite Kredit Kantor Wilayah 1
   c. Komite Kredit Menengah
   d. Komite Kredit Kecil 2
   e. Komite Kredit Kecil 1
   f. Komite Kredit Cabang 2
   g. Komite Kredit Cabang 1

*) yang dimaksud dengan Direktur adalah sesuai dengan tabel padanan berikut.

Segmen	Direktur Sektor	Direktur Padanan
Bisnis Banking		
Korporasi	Direktur Bisnis Korporasi	Direktur Bisnis Menengah
Menengah	Direktur Bisnis Menengah	Direktur Bisnis Korporasi
Kecil	Wakil Direktur Utama	Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan
Konsumer Unorganik	Direktur Konsumer Banking	Direktur Tresuri dan Internasional
Kantor Cabang Luar Negeri	Direktur Tresuri dan Internasional	Direktur Konsumer Banking

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Uraian Tugas Komite Kredit sebagai berikut.

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dalam aspek pendanaan perkreditan.
3. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit.
4. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan kredit yang hanya bersifat formalitas.
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Kredit, sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Kredit

No.	Tingkat Kewenangan	Jumlah Rapat
1	Radisi	4
2	Diu + Dir sektor + Dir Padanan	62
3	Wadiu + Dir Ts + Dir KU	10
4	Dir sektor + Dir Padanan	8
5	Dir sektor	28

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BNI sebagai bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan juga menerapkan Manajemen Risiko secara terintegrasi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 dan bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI yang bertindak sebagai Direktur yang ditunjuk untuk menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Ketua	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan – BNI sebagai Direktur yang ditunjuk untuk menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank - BNI
Anggota Tetap	Direktur Keuangan - BNI Pemimpin Divisi Kepatuhan - BNI Pemimpin Satuan Pengawasan Internal - BNI Pemimpin Unit Pengembangan Perusahaan Anak -BNI Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis - BNI Pemimpin Divisi Hukum – BNI Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan - BNI Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Syariah Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Securities Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Life Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Multifinance Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Assets Management Pemimpin Divisi yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Syariah Pemimpin Divisi yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Securities Pemimpin Divisi yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Life Pemimpin Divisi yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Multifinance Pemimpin Divisi yang membawahkan Manajemen Risiko – BNI Assets Management
Anggota tidak tetap	Direktur dan Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat baik dari BNI maupun Perusahaan Anak

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
3. Menetapkan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan metodologi dan penilaian profil risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Risiko Terintegrasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	10 Februari 2016	Penetapan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI Posisi 31 Desember 2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Posisi 31 Desember 2015
2.	4 Agustus 2016	Penetapan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI Posisi 30 Juni 2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Posisi 30 Juni 2016 Rencana Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2016

KOMITE RISIKO DAN KAPITAL

Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi, terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Risiko Dan Kapital

Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Ketua Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
Sekretaris merangkap anggota tetap	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
Anggota Tetap	Direktur Keuangan dan Risiko Kredit Direktur Konsumer Banking Direktur Tresuri dan Internasional Direktur Perencanaan dan Operasional SEVP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit SEVP Jaringan dan Layanan SEVP Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Tresuri Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Satuan Pengawasan Internal Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan Pemimpin Unit Analisa Nasabah dan Manajemen Portofolio
Anggota tidak tetap	Direktur/ SEVP/ Pemimpin Divisi/ Satuan/ Unit, yang terkait dengan materi Rapat

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Risiko Dan Kapital

Uraian Tugas Komite Risiko dan Kapital sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Manajemen Risiko, yang paling kurang meliputi:
2. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya.
3. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
4. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
5. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
6. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank, mencakup pengukuran, struktur (tier 1/tier 2), alokasi dan rencana kontijensi permodalan.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Komite Risiko dan Kapital telah mengadakan 10 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Risiko dan Kapital

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	15 Januari 2016	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BNI posisi 31 Desember 2015 Metode Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi
2.	11 Maret 2016	Review Loan Exposure Limit (LEL) Pinjaman Dalam Negeri Periode 2016
3.	23 Maret 2016	Usul Penetapan Industry Risk Rating (IRR) Dan Standar Rasio Keuangan Tahun 2016
4.	24 Maret 2016	Penetapan Pagu Kas BNI Wide
5.	11 April 2016	Menetapkan dan me-review limit-limit risiko pasar Divisi Tresuri dan KCLN
6.	18 April 2016	Hasil Penilaian Profil Risiko Individu Posisi 31 Maret 2016
7.	25 Juli 2016	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BNI secara Individu posisi 30 Juni 2016 Profil Risiko BNI secara Individu posisi 30 Juni 2016 Review Credit Risk Appetite
8.	09 September 2016	Menetapkan dan me-review limit-limit risiko pasar Divisi Tresuri dan KCLN
9.	17 Oktober 2016	Profil Risiko BNI secara Individu posisi 30 September 2016 Review Risk Appetite Statement BNI 2017
10.	07 November 2016	Review limit Secondary Reserve (SR) dalam kondisi Normal/ Ketat/ Moderat Penetapan Pagu Kas BNI Wide

Komite Risiko dan Kapital memiliki 3 sub Komite, yaitu:
1. Sub Komite Manajemen Risiko
2. Sub Komite Asset dan Liability (ALCO)
3. Sub Komite Anti Fraud

Sub Komite Manajemen Risiko

Struktur Dan Keanggotaan Sub Komite Manajemen Risiko

Ketua	:	Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank (merangkap anggota tetap)
1. Anggota Tetap	:	Direktur Keuangan & Risiko Kredit
		Direktur Konsumer Banking Direktur Tresuri & Internasional Direktur Perencanaan & Operasional SEVP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit SEVP Jaringan & Layanan SEVP Teknologi Informasi
		Pemimpin Divisi Tresuri
		Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil Pemimpin Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
		Pemimpin Divisi Kepatuhan
		Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan
		Pemimpin Satuan Pengawasan Internal Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan Pemimpin Unit Analisa Nasabah & Manajemen Portofolio
2. Anggota Tidak Tetap		Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi Rapat.

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Sub Komite Manajemen Risiko

Sub Komite/Bidang Manajemen Risiko melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait Manajemen Risiko, yang paling kurang meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya
2. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
3. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
4. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis bank, mencakup pengukuran, struktur (tier 1/tier 2), alokasi, dan rencana kontijensi permodalan.

Sub Komite Asset Dan Liability (Alco)

Struktur Dan Keanggotaan Sub Komite Asset Dan Liability (ALCO)

Ketua	Direktur Tresuri & Internasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tresuri (merangkap anggota tetap)
1. Anggota Tetap	Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan
	Direktur Bisnis Korporasi
	Direktur Bisnis Menengah
	Direktur Konsumer Banking
	Direktur Perencanaan & Operasional
	Direktur Keuangan & Risiko Kredit
	Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan
	SEVP Teknologi Informasi
	SEVP Jaringan & Layanan
	SEVP Penyelamatan & Penyelesaian Kredit
	SEVP Digital Banking
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil Pemimpin Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Internasional Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 2 Pemimpin Unit Sindikasi Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah Pemimpin Divisi Bisnis Menengah High End Pemimpin Divisi Bisnis Menengah Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil Pemimpin Unit Analisa Nasabah & Manajemen Portofolio Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan Pemimpin Divisi Manajemen Wealth
2. Anggota Tidak Tetap	SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi Rapat.

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Sub Komite Asset Dan Liability (ALCO)

Adapun tugas dan tanggung jawab Sub Komite/ Bidang Asset dan Liabilities, yaitu:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran ALMA BNI serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI.
3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.
5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui Primary Reserve, Secondary Reserve, Tertiary Reserve dan Loan.
6. Menganalisa struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI berupa interest rate risk, foreign exchange risk, dan liquidity risk.
7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, suku bunga, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI.
8. Menetapkan suku bunga pinjaman (base rate) dan suku bunga DPK (giro, tabungan dan deposito).

Sub Komite Anti Fraud

Sesuai dengan SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektifitas penerapan Strategi Anti Fraud maka BNI membentuk Komite Anti Fraud untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi.

Struktur Dan Keanggotaan Sub Komite Anti Fraud

Sub Komite Anti Fraud dibentuk berdasarkan SK Nomor KP/483/DIR/R tanggal 21 Desember 2016 perihal Pembentukan Komite Anti Fraud (KAF), yang beranggotakan:

Ketua : Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
Sekretaris : Pemimpin Divisi Kepatuhan (merangkap anggota)

Anggota Tetap	:	Direktur Konsumer Banking
	:	SEVP Jaringan & Layanan
	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
	:	Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan
	:	Pemimpin Satuan Pengawasan Internal
	:	Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia
	:	Pemimpin Divisi Hukum
	:	Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan
	:	Pemimpin Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer.

Anggota tidak tetap : Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Sub Komite Anti Fraud

Tugas dan tanggung jawab Komite Anti Fraud yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian fraud yang berasal dari kegiatan/aktivitas di segenap unit kerja BNI.
2. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
3. Menetapkan kebijakan dan strategi anti fraud.
4. Memantau penerapan kebijakan dan strategi anti fraud di BNI serta melakukan review dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan secara periodik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KAF dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang memiliki

fungsi:
1. Mengelola kebijakan dan pelaksanaan SAF berkoordinasi dengan unit /divisi terkait;
2. Mereview SOP SAF;
3. Melaporkan secara berkala maupun insidentil ke pihak Internal (Direktur Utama dan Dewan Komisaris) dan pihak eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) terkait dengan Strategi Anti Fraud;
4. Sebagai liason data dan pelaporan dengan Divisi/ Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi Anti Fraud dan mengelola database terkait fraud yang ada di BNI;
5. Memonitor inisiasi dan implementasi Strategi Anti Fraud serta perbaikannya.

Rapat Komite Anti Fraud (KAF) di tahun 2016 telah dilaksanakan dengan hasil yaitu :
1. Penguatan aspek pencegahan (*fraud prevention*), antara lain:
   a. Sosialisasi *fraud awareness* dan kebijakan *know your employee.*
   b. *E-learning Anti Fraud Awareness,* Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Good Corporate Governance,* dan Budaya Kerja BNI.
   c. Penyempurnaan sistem transaksi (operasional dan bisnis kartu) dalam rangka memitigasi terjadinya *fraud internal.*
   d. Penyempurnaan kebijakan internal seperti kebijakan pengelolaan ATM.
2. Penguatan aspek deteksi, antara lain implementasi *Compliance Index* (CIX), Komite Kepatuhan, dan *Whistleblowing System* (WBS).
3. Penguatan aspek penerapan sanksi antara lain dengan perbaikan bentuk dan jenis sanksi administratif.
4. Penguatan evaluasi penerapan SAF antara lain kajian pemberian tunjangan tidak tetap (*performance rewards*) dikaitkan dengan pelanggaran pegawai.
5. Penguatan pengendalian internal seperti pelaksanaan pelatihan pimpinan cabang.

KOMITE PRODUK

Komite Produk merupakan wadah pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk/aktivitas di BNI untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Komite Produk dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/448/DIR/R tanggal 20 September 2012 perihal Product Committee (PRC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Produk

Ketua : Direktur Utama

Ketua Pengganti merangkap
Anggota Tetap : Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap :
- Direktur Perencanaan dan Operasional
- Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
- Direktur Hukum
- SEVP Jaringan dan Layanan
- Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan
- Pemimpin Divisi Hukum
- Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan
- Pemimpin Divisi Operasional
- Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
- Pemimpin Divisi Kepatuhan

Anggota Tidak Tetap : Anggota Direksi yang bertindak sebagai Direktur Sponsor, Pemimpin Divisi/ Satuan/Unit dan Pemimpin Perusahaan Anak yang terkait dengan topik yang dibahas
Sekretaris : Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Supporting Staff Group : Divisi terkait

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Produk

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Produk antara lain:

- Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI.
- Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan "kelayakan" produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan perusahaan anak/perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait.
- Melakukan monitoring produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi Supporting Staf Group/product owner.
- Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan Performance Management System (PMS) dalam implementasiproduk/aktivitas baru.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Komite Produk telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Produk

No.	Agenda Rapat Tahun 2016
1.	Realisasi produk dan aktivitas baru triwulan I 2016 dan rencana pengembangan produk/aktivitas baru dalam revisi RBB 2016-2018.
2.	Pemenuhan data mitigasi risiko atas rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru 2017 serta realisasi penerbitan produk dan/atau aktivitas baru dalam RBB 2016.

KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Komite Manajemen Kinerja (PMC) merupakan komite permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (performance management) di BNI untuk memastikan keselarasan strategic planning, memfasilitasi proses target setting dan penilaian kinerja. Komite Manajemen Kinerja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/466/DIR/R tanggal 5 Oktober 2012 perihal Performance Management Committee (PMC) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti merangkap	
Anggota Tetap	: Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap	: Seluruh Anggota Direksi dan SEVP - Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis - Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan - Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia - Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan - Pemimpin Satuan Pengawasan Internal
Anggota Tidak Tetap	: Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan topik yang dibahas
Sekretaris 1 (Bidang *Target Setting*)	: Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan
Sekretaris 2 (Bidang *Strategic Planning*)	: Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Sekretaris 3 (Bidang Penilaian Kinerja)	: Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Supporting Staff Group	: Divisi terkait

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kinerja

Uraian Tugas Komite Manajemen Kinerja sebagai berikut.

Bidang Target Setting

1. Menyetujui dan menetapkan jadwal tahunan dan bertanggung jawab dalam *planning* dan *budgeting*.
2. Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan *planning* dan *budgeting*.
3. Memutuskan proposal CAPEX dengan kriteria tertentu (*business cases*).

Bidang *Strategic Planning*

1. Meninjau dan memastikan keselarasan antara RBB, *Corporate Plan* dan anggaran, dan menyarankan penyesuaian bila diperlukan.
2. Meninjau dan menyetujui target yang disarankan/ penyesuaian anggaran (*forecasting*), dan merekomendasikan perubahan RBB/*Corporate Plan* apabila diperlukan sebagai lembaga arbitrase atas permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja.

Bidang Penilaian Kinerja

1. Meninjau dan menyetujui KPI pada level sektor.
2. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI BNI.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Kinerja telah mengadakan 2 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Manajemen Kinerja

No.	Agenda Rapat Tahun 2016
1.	Finalisasi Skor Unit dan Sub Unit 2015.
2.	Perubahan KPI Unit dan Sub Unit dan KPI Direksi 2016.

KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan Komite permanen di BNI yang di dalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP). Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (KKP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/168/DIR/R tanggal 26 April 2013 dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/169/DIR/R tanggal 26 April 2013 dan dilakukan perubahan susunan penataan Komite menjadi Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang didalamnya terdapat Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/106/DIR/R tanggal 03 April 2014. Pada tahun 2015 dilakukan penyesuaian susunan penataan Komite berdasarkan Penataan Organisasi Direksi BNI No. KP/117/DIR/R tanggal 20 Maret 2015 yang selanjutnya diperbaharui/diupdate melalui memo REN No. REN/2/1437 tanggal 19 Oktober 2016 yang disesuaikan dengan penataan Organisasi Direksi cfm. SK Direksi No. KP/253/DIR/R tanggal 1 Juni 2016.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (KKP)

Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Anggota Tetap	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan (merangkap Sekretaris) Direktur Bisnis Korporasi Direktur Bisnis Menengah Direktur Konsumer Banking Direktur Keuangan dan Risiko Kredit SEVP Jaringan dan Layanan Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Satuan Pengawas Internal

Anggota tidak tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi Rapat

Susunan Keanggotaan Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)

Ketua	Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
Anggota	Wakil Direktur Utama (khusus materi terkait Segmen Kecil) Direktur Bisnis Korporasi (khusus materi terkait Segmen Korporasi) Direktur Bisnis Menengah (khusus materi terkait Segmen Menengah) Direktur Konsumer Banking (khusus materi terkait Konsumer Banking) Direktur Keuangan dan Risiko Kredit (khusus materi terkait Risiko Kredit dan Administrasi Kredit) Direktur Tresuri dan Internasional (khusus materi terkait Bisnis Tresuri dan Internasional/FI)
Sekretaris	Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan sebagai berikut.

1. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
2. Menetapkan Kebijakan Bisnis Tresuri dan Internasional/*Financial Institution* terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian.
3. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta melakukan *review* apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
4. Melakukan *review* secara berkala selama-lamanya setiap 3 (tiga) tahun sekali terhadap KPB dan apabila diperlukan menetapkan perubahan/perbaikan KPB.
5. Memantau dan mengevaluasi :
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, *Good Corporate Governance* dan Penerapan Manajemen Risiko.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
   f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dewan Komisaris, mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 4 di atas.
7. Merumuskan dan merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas Perkreditan Bank.
8. Me-*review* hasil keputusan Sub Komite Prosedur Perkreditan melalui mekanisme Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab sub Komite Prosedur Perkreditan sebagai berikut.

1. Menetapkan Prosedur dan ketentuan operasional Perkreditan.
2. Menetapkan *Lending Model.*
   Lending Model adalah kebijakan operasional dan prosedur perkreditan yang spesifik terkait skema pembiayaan dengan syarat dan kondisi khusus yang telah disesuaikan untuk segmen pasar, industri atau daerah tertentu dengan tetap memperhatikan *prudential banking principles* dan *Good Corporate Governance*.
3. Menetapkan prosedur dan ketentuan operasional Bisnis Tresuri dan Internasional / *Financial Institution*

4. Menyampaikan laporan/report secara berkala keputusan Sub Komite Prosedur Perkreditan ke Komite Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan telah mengadakan 39 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

No.	Tanggal	Keputusan
1	15 Januari 2016	Pencabutan Prosedur KKLK khusus Pola Channeling sebagaimana diatur dalam memo Divisi USK No. USK/2/702 tanggal 16 Maret 2009.
2	1 Februari 2016	Review Self Financing Fasilitas KI untuk KUR Ritel. Review Pemantauan Debitur KUR
3	1 Februari 2016	Review Kewenangan Memutus KUR di UKC
4	3 Februari 2016	Review Mekanisme Penetapan Limit Pembelian Corporate Bond
5	9 Februari 2016	Review Kewenangan Memutus Kredit (Direktur Pengganti) tindak lanjut SK DIR. No. KP/017/DIR/R tanggal 18 Januari 2016
6	07 Maret 2016	Review Kewenangan Memutus Kredit Konsumer Organik Review Kewenangan Memutus Pemberian Keringanan Biaya Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Kredit Konsumer Organik
7	08 Maret 2016	Review Mekanisme Transaksi Repo Review komposisi Aset Sekuritas Indonesia Related – Non Indonesia Related di KCLN
8	10 Maret 2016	Review Ketentuan BNI Fleksi Pensiunan dan Calon Pensiunan
9	19 Februari 2016	Penetapan Limit NWE Nasabah non Debitur
10	08 Maret 2016	Pemberian Kewenangan Memutus Kredit Program Kemitraan (PK) Kepada Pemimpin Cabang
11	16 Maret 2016	Review Ketentuan BNI Wirausaha (BWU)
12	24 Maret 2016	Review Alur Proses Perkreditan Business Banking
13	28 Maret 2016	Ketentuan Pemberian KUR Linkage Executing untuk Budidaya Tebu
14	30 Maret 2016	Review Ketentuan Perpanjangan Sementara Kredit
15	30 Maret 2016	Review Batas Maksimum Pinjaman yang dapat Dilakukan melalui Sindikasi Kredit / Club Deal
16	06 April 2016	Review Pengelolaan Debitur Pasca Restrukturisasi
17	29 April 2016	Ketentuan Kewenangan Memutus Kredit di Kantor Cabang
18	13 Mei 2016	Review Kewenangan Memutus Komite Kredit Tingkat Direksi
19	20 Mei 2016	Review Ketentuan BNI Fleksi
20	20 Mei 2016	Tata cara Pengambilan Keputusan Kredit oleh Komite Kredit dan Penuangan Keputusan Kredit dalam NK-3
21	26 Mei 2016	Review Penetapan Persyaratan Agunan Tambahan KUR Ritel Penetapan Kewenangan Pembuatan Skim – Skim KUR
22	01 Juni 2016	Kewenangan Memutus Program Pemasaran Perkreditan Konsumer
23	07 Juni 2016	Ketentuan Pembiayaan Delivery Order (D/O) Gula
24	20 Juni 2016	Review Kewenangan Penyelamatan dan Penyelesaian Perkreditan Konsumer dan Kartu Kredit
25	07 Juni 2016	Ketentuan Kriteria Bank Untuk Pembiayaan Kredit Sindikasi dengan Debitur Bank
26	13 Juni 2016	Switching Fasilitas Forex Line dan Derivative Line Review Ruang Lingkup Bisnis Tresuri

No.	Tanggal	Keputusan
27	28 Juli 2016	Review Ketentuan Pemberian Kredit bagi Debitur Prima
28	04 Agustus 2016	Review Proses Analisa Kredit BNI Wira Usaha (BWU) Penetapan Kewenangan Pengembangan Fitur Produk BWU
29	24 Agustus 2016	Penetapan Kriteria Pemilihan Manajer Investasi
30	31 Agustus 2016	Dana Tax Amnesty Sebagai Agunan BNI Instan dan CCC
31	05 September 2016	Penetapan Berakhirnya Status Restrukturisasi Kredit
32	30 September 2016	Ketentuan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) untuk Segmen Kredit Konsumer Organik
33	13 Oktober 2016	Penyempurnaan kewenangan memutus kredit kepada Pemimpin wilayah Penyempurnaan kewenangan memutus kredit di kantor Cabang
34	17 Oktober 2016	Pemberian fasilitas Pre Financing pekerjaan yang didanai oleh APBN
35	31 Oktober 2016	Mekanisme Transaksi Structured Product
36	01 November 2016	BNI Fleksi Kredit Pensiun (BKP) untuk calon pensiunan dengan pembayaran gajinya tidak melalui BNI
37	24 November 2016	Ketentuan Transaksi yang terkait OFAC, EU dan UN Sanction
38	05 Desember 2016	Review Kewenangan Transaksi Surat Berharga Trading
39	05 Desember 2016	Review Batas Signifikansi dan Penetapan Traffic Light Monitoring Penjualan Surat Berharga AFS

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komite permanen di BNI yangberanggotakan SPASI seluruh Direksi dan beberapapemimpin SPASI Divisi dengan kewenangan sebagai berikut.

1. Memutuskan kebijakan/ketentuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia terkait:
   b. Perencanaan Pegawai
   c. Rekrutmen dan Seleksi
   d. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
   e. Penilaian Kinerja Pegawai
   f. Jalur Karir dan Suksesi
   g. Remunerasi
   h. Hubungan Industrial
   i. Budaya Kerja
2. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksanana program mutasi/promosi tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah
3. Mengevaluasi kinerja tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah
4. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah
5. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia

Komite Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komite permanen di BNI yang beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa pemimpin Divisi. Komite Sumber Daya Manusia dibentukberdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Perubahan Komite Sumber Daya Manusia. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor KP/078/DIR/R tanggal 9 Februari 2004 perihal Komite Sumber Daya Manusia dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/637/DIR/R tanggal 5 Oktober 2004 perihal Komite Disiplin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Ketua	:	Direktur Utama
Anggota Tetap	:	Direktur yang mensupervisi Divisi Human Capital (Merangkap Ketua Pengganti) *) Direktur yang mensupervisi Divisi Kepatuhan *)
Anggota Tidak Tetap	:	Direktur Sektor dan/atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit (jika tidak terdapat Direktur Sektor) yang terkait dengan materi rapat *)
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Human Capital (HCT)

**) Dalam hal tidak terdapat posisi Direktur, maka posisi tersebut digantikan oleh SEVP atau Pejabat yang mensupervisi Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan bidang tersebut.*

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut.

1. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia tersebut meliputi
2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat termasuk untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi
4. Memastikan bahwa pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya

Tim Di bawah Komite Sumber Daya Manusia

Tim Pengkajian Dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketua	:	Pemimpin DIvisi Human Capital (HCT)
Anggota Tetap	:	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (REN) (Merangkap Ketua Pengganti) Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN)
Anggota Tidak Tetap	:	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat *)
Sekretaris	:	Pemimpin Kelompok di Divisi Human Capital (HCT) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pengkajian Dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut.

1. Mengelola aktivitas penelitian, pengkajian dan evaluasi efektivitas dan kualitas serta merekomendasikan usulan perubahan/penyempurnaan kebijakan maupun mekanisme operasionalisasi implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia terkait:
   b. Perencanaan pegawai
   c. Rekrutmen & seleksi
   d. Pelatihan & pengembangan kompetensi
   e. Penilaian Kinerja Pegawai
   f. Jalur karir & suksesi
   g. Remunerasi
   h. Hubungan Industrial
   i. Budaya kerja
2. Mengelola usulan pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia

Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

Ketua	:	Pemimpin Divisi Human Capital (HCT)
Anggota Tetap	:	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang mensupervisi unit terkait (Merangkap Ketua Pengganti) Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan materi rapat
Sekretaris	:	Pemimpin Kelompok di Divisi Human Capital (HCT) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola aktivitas perencanaan dan pencarian kandidat berdasarkan syarat yang telah ditetapkan serta merekomendasikan kandidat bersangkutan untuk dimutasikan/ dipromosikan sebagai tenaga pimpinan.

Tim Pertimbangan Sanksi Administratif

Kantor Pusat

Ketua	:	Pemimpin DIvisi Human Capital (HCT) (Merangkap Anggota)
Anggota	:	Pemimpin Divisi Kepatuhan (KPN) Pemimpin Divisi Hukum (HUK) Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya
Sekretaris	:	Pemimpin Satuan Pengawasan Internal (SPI) (Tidak Merangkap Anggota)
Kantor Wilayah		
Ketua	:	Pemimpin Wilayah (CEO Region)
Anggota Tetap	:	Wakil Pemimpin Wilayah yang mensupervisi unit terjadinya peristiwa/kasus Satu orang Wakil Pemimpin Wilayah Lainnya yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah (CEO Region) Pemimpin Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya
Sekretaris	:	Pemimpin Kontrol Internal Wilayah (Tidak Merangkap Anggota)

Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

Tim Pertimbangan Mjtasi Tenaga Pimpinan bertugas dan bertanggungjawab mengelola aktivitas analisa dan pengkajian atas rekomendasi sanksi administratif yang diterima dari divisi pemroses kasus untuk kemudian merekomendasikan kepada pemutus atau memberikan putusan sanksi administratif terhadap pegawai yang terkait kasus sesuai dengan matriks kewenangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2016, Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai (TPMTP) telah menjadwalkan rapat secara reguler sebanyak 2 (dua) kali seminggu untuk pembahasan mutasi tenaga Pimpinan Cabang, Sentra. Selanjutnya, keputusan mutasi pada jabatan CEO GM dan CEO Region telah dilakukan melaui Rapat Direksi yang berjumlah 4 (empat) kali pertemuan. Sementara, Tim Pertimbangan Sanksi Administratif telah melakukan 9 (sembilan) kali rapat pembahasan.

KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan sebagai Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Commitee) dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI).

Komite Manajemen Teknologi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/201/DIR/R tanggal 14 Juni 2011 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi, yang diperbaharui melalui Memo Divisi Perencanaan No. REN/2/234/R tanggal 04 Mei 2016 perihal Perubahan Keanggotaan Komite.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Teknologi

Ketua	Wakil Direktur Utama
Ketua Pengganti merangkap anggota tetap	Direktur Perencanaan dan Operasional
Anggota Tetap	Direktur Konsumer Banking Direktur Keuangan dan Risiko Kredit Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan SEVP Digital Banking SEVP Teknologi Informasi (sebagai Pelaksana Harian KMT) Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi Pemimpin Divisi Operasional Teknologi Informasi - Pemimpin Divisi Manajemen Data Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Pemimpin Divisi E-Banking Pemimpin Divisi Internasional Pemimpin Divisi Penganggaran dan Pengendalian Keuangan Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan Pemimpin Unit E-Channel Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank
Anggota tidak tetap	Direksi, Pemimpin, Divisi/Satuan/Unit, dan Pemimpin Perusahaan Anak (yang terkait dengan topik yang dibahas)
Sekretaris	Pemimpin Divisi Solusi dan Keamanan Teknologi Informasi
Supporting Staff Group	Divisi Terkait

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Teknologi

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Teknologi terdiri atas berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Formulasi Kebijakan TI
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, end user computing, aktivitas e-banking, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI.
   b. *Review* dan persetujuan rekomendasi anggaran TI dan keamanan informasi.
   c. Penetapan dan evaluasi TI *Governance*.
2. Bidang Penyelarasan Strategi TI dan Bisnis
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan* – ITSP) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha BNI, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, efektifitas serta rencana pelaksanaan (*roadmap*), sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan, serta *cost* and *benefit* yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
   c. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BNI.
   d. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha BNI
3. Bidang Pengelolaan Risiko TI
   a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan kebijakan dan prosedur utama TI, khususnya terkati aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *end user computing*, aktivitas e-banking, penggunaan

pihak penyedia jasa TI. Serta kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI.

b. Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi BNI pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BNI.

c. Memfasilitasi hubungan antar Divisi/Satuan/Unit dalam upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI.

4. Bidang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja TI
   a. Melakukan analisis dan rekomendasi terhadap kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*) dalam *service level agreement* (SLA).
   b. Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya.

Pelaksanaan Tugas Dan Frekuensi Rapat Komite Manajemen Teknologi

Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Teknologi telah mengadakan 7 kali rapat dengan agenda sebagai berikut.

Agenda Rapat Komite Manajemen Teknologi

Tanggal Rapat	Agenda Rapat
2 Februari 2016	• Program Optimalisasi dan Improvement Realisasi Proyek Capex Otomasi tahun 2016. • Tindaklanjut status Proyek tahun 2015 dan 2016.
8 Maret 2016	Koordinasi tindak lanjut eksekusi dan status proyek pengadaan investasi otomasi tahun 2016.
29 April 2016	• Optimalisasi proyek investasi otomasi tahun 2016 segenap Divisi/Satuan/Unit. • Utilisasi dan Evaluasi produk performance user bisnis setelah tahapan implementasi.
13 Juni 2016	• Update status proyek user. • Optimalisasi proyek investasi otomasi tahun 2016. • Utilisasi proyek user bisnis. • Update Product Holding Ratio. • Update Proyek Dual Data Center.
23 Juni 2016	• Update status proyek user tahun 2016 • Optimalisasi proyek investasi otomasi tahun 2016 • Update proyek Data Management • Update status Project Monitoring • Utilisasi produk user bisnis • Product Holding Ratio • Update Proyek Dual Data Center
8 September 2016	• Tindak lanjut KMT 23 Juni 2016 • Update status proyek user tahun 2016, dalam rangka persiapan sign-off proyek semester 2 tahun 2016 • Update status proyek investasi otomasi tahun 2016 • Update diskusi roadmap IT KCLN
17 November 2016	• IT Planning Session dan Sign Off Proyek User 2017 • Sistem perencanaan yang baik melalui realisasi anggaran proyek investasi otomasi 2017 • Platform IT Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)
27 Desember 2016	• Proyek user tahun 2017 yang membutuhkan dukungan TI • Proyek investasi otomasi tahun 2017 • Platform pengembangan sistem IT KCLN • Utilisasi produk/fitur user bisnis

Satuan Pengawasan Internal

Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern (sebagai *Third Line of Defense*). Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta penilaian kualitas kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif tidak hanya menjadi tanggungjawab audit intern, namun tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern, pejabat/pegawai bank dan pihak ekstern (otoritas pengawasan bank, auditor ekstern dan nasabah bank).

Satuan Pengawasan Internal (SPI) dibentuk untuk memberikan nilai tambah melalui pelaksanaan fungsi *assurance* (pelaksanaan audit/pemeriksaan)dan fungsi konsultasi (*consulting*) yang dilakukan secara independen serta objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan Perseroan.

Pelaksanaan audit bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas *internal control*, *governance process* dan *risk management* serta menilai kualitas pencapaian kinerja, sedangkan fungsi konsultasi dilakukan secara informal maupun secara formal antara lain *independent review* atas peluncuran produk baru (sesuai ketentuan BI) dan penugasan khusus atas permintaan *auditee*, manajemen ataupun atas inisiatif dari SPI.

STRUKTUR ORGANISASI SPI

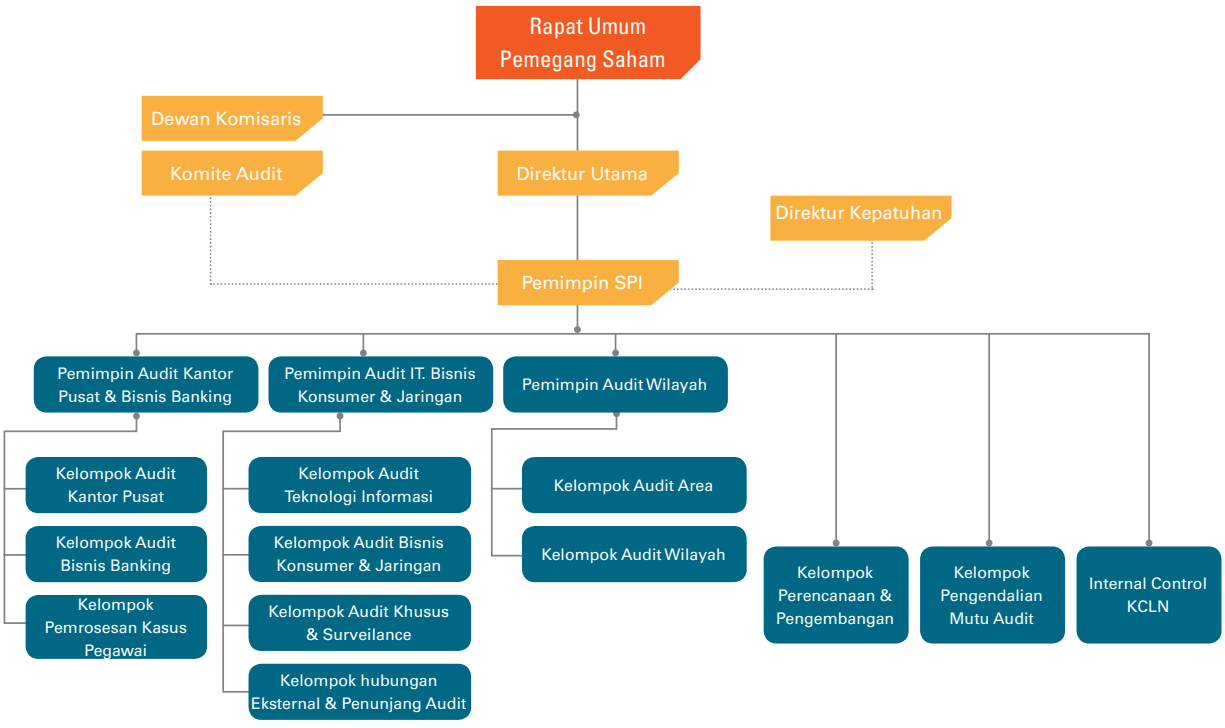

Kedudukan SPI Dalam Struktur Organisasi

Fungsi SPI dalam organisasi BNI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan yang diharapkan dapat mengawal strategi bisnis yang semakin agresif, maka dilakukan *enhancement* fungsi *compliance officer* yang *dedicated* berada di outlet BNI yang semula di bawah divisi *compliance* menjadi internal auditor di bawah Satuan Pengawasan Internal. Untuk itu, organisasi SPI dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut.

1. Audit Kantor Pusat, Audit Bisnis Banking, Pemrosesan Kasus Pegawai.
2. Audit Teknologi Informasi, Audit Bisnis Konsumer dan Jaringan, Audit Khusus &*Surveillance*.
3. Audit Wilayah (Audit Wilayah 1 dan Audit Wilayah 2) yang dibagi mempertimbangkan area geografis dan kemudahan akses.

Profil Pemimpin SPI

Sejak tahun 2014, Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Anang Basuki, CIA dengan jabatan *Executive Vice President* sesuai Surat Keputusan Direksi No. KP/614/DIR/R tanggal 11-12-2014.

Anang Basuki, CIA telah berpengalaman dalam bidang pengawasan (internal audit) mengingat awal karir dimulai sebagai auditor di SPI dan semakin ditunjang dengan perolehan gelar sertifikasi di bidang internal audit (CIA), di samping itu pengalaman operasional perbankan juga telah dimiliki sebagai Pemimpin Cabang dan CEO Region.

Posisi yang pernah dijabat oleh Anang Basuki, CIA adalah CEO Region Wilayah Padang, Pemimpin Cabang Malang dan Pemimpin Cabang Mojokerto.

Per tanggal 04 Januari 2017 telah dilakukan serah terima jabatan pemimpin SPI dari Anang Basuki kepada M Gunawan Putra (sebelumnya Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Menengah dan Kecil).

Muhammad Gunawan Putra, memperoleh Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2015. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal sejak 4 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No KP/482/DIR/R tahun 2016.

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

Kegiatan yang dilakukan SPI bertujuan untuk mendorong perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko, serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ruang lingkup kegiatan SPI mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap seluruh kegiatan BNI. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Terintegrasi, ruang lingkup SPI termasuk pada perusahaan anak/afiliasi yang dimiliki BNI sebagai entitas utama.

Wewenang SPI

Kewenangan SPI dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada piagam audit internal, sbb.:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI termasuk terhadap perusahaan anak/ afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit;
4. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
5. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan rencana atau jadual audit, serta menetapkan metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan;
6. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu; dan
7. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan assurance lainnya (compliance unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Tugas Dan Tanggungjawab

Dalam menjalankan fungsinya, SPI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan.
2. Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester/triwulan atau sesuai periode yang disepakati.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan BNI.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perseroan.
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak memp engaruhi independensi dan objektivitas SPI, serta tersedia sumber daya yang memadai.
8. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi penyimpangan dan/atau *fraud* apabila diperlukan.
9. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik.
10. Melakukan pemrosesan kasus serta

menyempurnakan dan mengembangkan proses dan fungsi pemrosesan kasus di BNI.
11. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas.
13. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama setiap semester.
14. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

STANDAR PELAKSANAAN & PENGEMBANGAN MUTU

Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Pedoman Perusahaan Audit Intern. Dalam rangka meningkatkan mutu audit, SPI senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta best practice antara lain The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Information System Audit and Control Association (ISACA).

Sesuai SPFAIB, efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal dan kesesuaiannya dengan standar pelaksanaan yang berlaku, secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dievaluasi oleh pihak Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi internasional dengan klasifikasi A dan termasuk dalam 10 besar rekanan yang terdaftar di BNI.

SPI juga memilikikode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektifitas, menjaga kerahasiaan, dan senantiasa meningkatkan kompetensi.

HUBUNGAN SPI DENGAN PIHAK EKSTERNAL

SPI dapat melakukan pertukaran informasi dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal yang dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Koordinasi dapat dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Wujud dari tanggung jawab SPI terhadap pihak eksternal antara lain sbb.:

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SPI telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan revisi terakhir berdasarkan SK Direksi No KP/106/DIR tanggal 11-03-2016. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta standar *best practices* yang berlaku.

Piagam Audit Internal memuat tentang Visi dan Misi SPI, Struktur dan Kedudukan SPI, Tugas dan Tanggung Jawab SPI, Wewenang, Kode Etik, Independensi dan Obyektivitas, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan, Persyaratan dan Pengembangan Auditor, Risiko Audit dan Perlindungan Hukum kepada Pemimpin dan Auditor, Program Pengendalian Mutu Audit, Fungsi SPI dalam Tata Kelola Terintegrasi dan Hubungan SPI dengan auditor eksternal.

1. *Transfer Knowledge t*erkait audit
   SPI aktif melakukan transfer knowledge terkait metodologi/perkembangan di bidang internal audit baik kepada Internal Audit Perusahaan Anak maupun kepada organisasi lainnya, antara lain: sebagai narasumber dalam IIA National Conference (Bali), CAE Forum, Narasumber "inspiring talk with GM", Narasumber focusgrup discussion peningkatan kapasitas SPI dalam menunjang pencapaian misi BPJS Ketenagakerjaan, menghadiri undangan OJK untuk pembahasan Rencana Bisnis Bank

dan Undangan BPK dalam diseminasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK. Selain itu juga memberikan kuliah umum sebagai praktisi tentang perkembangan internal audit di Universitas Petra Surabaya.

2. Aktif dalam organisasi profesi, yaitu Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), IIA Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Forum Komunikasi SPI antara lain hadir dalam The IIA National Conference 2016, Konferensi Nasional VIII IAIB, Konferensi Nasional I FKSPI BUMN.
3. Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF)
   Dalam penerapan Strategi Anti Fraud, sebagai bagian dari pengendalian intern bank, terutama pilar fraud prevention & detection, SPI melaksanakan surprise audit dan sosialisasi customer fraud awareness pada beberapa auditee yang hasilnya dikonsolidasikan oleh Divisi Kepatuhan untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

KOMPOSISI PERSONIL SPI

Satuan Pengawasan Internal didukung oleh 664 pegawai yang tersebar di kantor pusat dan seluruh wilayah operasional BNI, sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

Komposisi SDM SPI

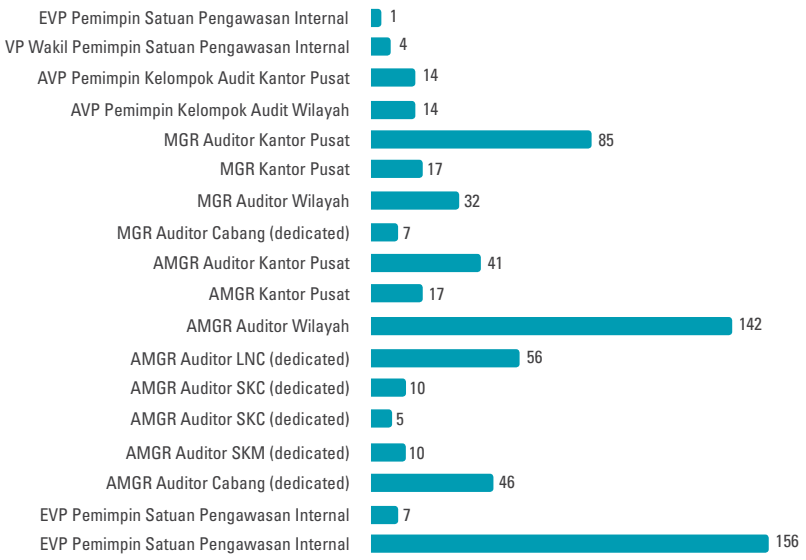

SERTIFIKASI PROFESI SPI

SPI telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai SPI, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara lain melalui program sertifikasi nasional dan internasional di bidang internal audit/kepatuhan, keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional maupun pelatihan rutin internal.

Berikut data sertifikasi yang telah diperoleh pegawai SPI sampai dengan posisi tahun 2016, sebagai berikut:

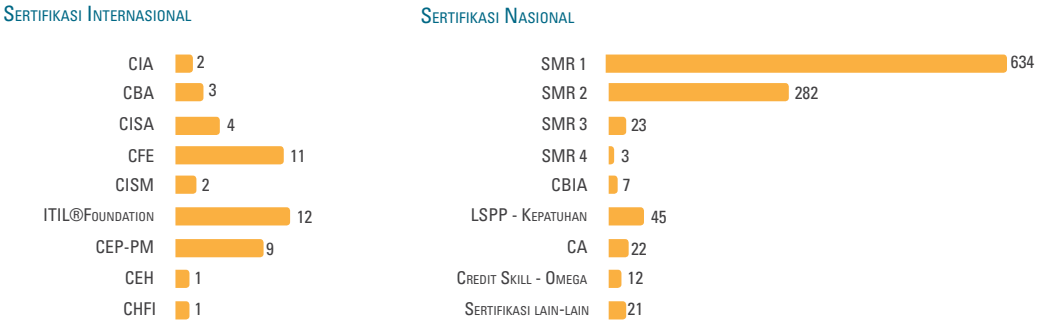

KODE ETIK AUDITOR

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, auditor SPI harus menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, sebagai berikut.

1. Integritas
   a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab.
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya.
   c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas SPI dan profesi audit internal.
   d. Mendukung tujuan BNI dan SPI.
2. Objektivitas
   a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan.
   b. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*.
   c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun.
   d. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui.
3. Kerahasiaan
   a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
   b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.
4. Kompetensi
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan/atau standar audit lain yang berlaku.
   c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SPI

Selain sertifikasi, keikutsertaan dalam seminar/*training*/konferensi profesi baik di dalam dan luar negeri, magang dan pembekalan terhadap perkembangan organisasi dan bisnis/produk BNI maupun pembekalan terhadap pemahaman industri, juga diberikan secara rutin setiap tahun kepada personalia SPI melalui program *refreshing* auditor. Selama tahun 2016 telah dilakukan program peningkatan pendidikan berkelanjutan, sebagai berikut.

Pengembangan Kompetensi SPI

No	Materi	Waktu Pelaksanaan
	Seminar Dalam Negeri	
1	*IT IL Foundation*	15 Februari 2016
2	*Workshop Fraud Prevention in Banking Industries*	23 Maret 2016
3	Seminar Nasional Internal Audit 2016	27 April 2016
4	*Workshop Audit Methodology and Quality Review*	31 Mei 2016
5	*The IIA National Conference* 2016 Nusa Dua Bali	7 September 2016
6	*Workshop Legal for Non Legal*	22 September 2016
7	*Workshop* Implementasi UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004	30 September 2016
8	*Workshop Audit Methodology : Continous Auditing*	29 September 2016
9	Konferensi Nasional IAIB VIII Bali	10 November 2016
10	Konferensi Nasional I FKSPI Yogyakarta	16 November 2016
11	*Workshop* Nasional Urgensi Manajemen Kearsipan Dalam Perspektif Hukum Sebagai Alat Bukti Persidangan	30 November 2016
	Seminar Luar Negeri	
1	SOPAC 2016 *Conference and Financial Institutions Benchmarking Program*	5 Maret 2016
	Magang	
1	*Global Development Program: Short Overseas Assigment* - London	5 Februari 2016
	Pelatihan Internal BNI – ***In Class Training***	
1	Refreshing Kontrol Internal	Januari 2016
2	*Refreshing* Auditor (tentang internal audit dan perkembangan bisnis/organisasi BNI)	25 Januari - 11 Februari 2016
3	*Basic Dealer*	16 Maret 2016
4	Implementasi Model *Operational* Perkreditan Business Banking	29 Maret 2016
5	*Fraud Refreshment and Sharing Knowledge* FCA	29 Maret 2016
6	*Awareness Performance Management System* (PMS)	Maret, Mei dan Juni 2016
7	*Operation Policy and Procedure – Process Improvement for Efficiency*	Mei 2016
8	Brevet Kontrol Internal	8 Agustus 2016

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN SPI TAHUN 2016

Dalam rangka mencapai visi BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, maka arah kebijakan BNI untuk periode 2016-2018 adalah fokus menjadi bank dengan kinerja unggul dengan memperkuat sinergi antar unit untuk percepatan bisnis yang didukung dengan tingkat layanan yang semakin baik.

Sejalan dengan strategi BNI tersebut, SPI melaksanakan fungsi pengawasan internal dan melakukan sinergi dengan unit *first line* dan *second line* serta berintegrasi dengan SPI Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) untuk meningkatkan kepedulian terhadap *internal control* sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan bisnis, salah satu strategi BNI adalah mengoptimalkan outlet yang ada dengan memberikan kewenangan memutus kredit kepada Pemimpin Cabang (sebagaimana tertuang dalam KPP No 3/02/KPP/2015 tanggal 29 April 2016). Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya peningkatan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis operasional, disisi lain manajemen BNI menuntut SPI untuk melakukan pengawalan aktivitas operasional di seluruh level unit kerja baik Kantor Pusat, Wilayah, Cabang dan Sentra Kredit.

SPI mengawal percepatan bisnis BNI melalui *alignment* antara strategi SPI dan strategi bisnis BNI, dengan meningkatkan *capability*, untuk memberikan kontribusi yang bernilai tambah.

PROGRAM KERJA SPI

Berdasarkan hasil *assessment* serta ketersediaan sumber daya maka ditetapkan rencana audit tahun 2016 sebanyak 114 penugasan audit, yang meliputi:

1. Audit Tematik pada aktivitas *Business Banking, Consumer Banking, Corporate Function Audit* dan IT Audit.
2. Audit Mandatory.
3. Audit Unit terdiri dari audit divisi, cabang Dalam Negeri dan Luar Negeri, kantor wilayah, Sentra Kredit Kecil, Sentra Kredit Menengah dan *Loan Consumer Centre*.
4. Aktivitas IT dan Audit Aplikasi.

Hasil audit tematik bersifat lebih menyeluruh dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang stratejik (menyentuh *root cause*) kepada manajemen untuk perbaikan proses bisnis BNI.

Dengan bergabungnya fungsi Auditor Cabang/Sentra/Wilayah/Divisi (d.h Kontrol Internal) diharapkan *coverage* audit SPI dapat mencakup 100% dari total *auditee* yang ada melalui pelaksanaan *day to day review* oleh Auditor Cabang/Sentra/Wilayah/Divisi. Namun dengan adanya pergerakan *risk mapping* SPI sesuai hasil *dynamic risk assessment,* maka dimungkinkan adanya pelaksanaan review/audit terhadap unit-unit yang berisiko tinggi oleh auditor kantor pusat dan Auditor Cabang/Sentra/Wilayah/Divisi secara bersama-sama melalui pelaksanaan *on site audit.*

Selain pelaksanaan audit tersebut di atas, SPI juga memberikan jasa konsultasi berupa *independent review* dan konsultasi untuk penyempurnaan proses/sistem dan prosedur.

METODE AUDIT

SPI telah menyusun Rencana Audit dan Konsultasi tahun 2016, yang disusun dengan pendekatan *risk based* melalui tahapan *macro risk assessment* dan *micro risk assessment*. *Assessment* ini dilaksanakanmelalui proses identifikasi dan penilaian terhadap 346 aktivitas (*macro process*) BNI sesuai hasil penilaian risiko operasional dari Divisi Manajemen Risiko Bank, terkait Kebijakan Umum Direksi (KUD) 2016, *Risk Profile* BNI sesuai *Risk Management Committee* (RMC), masukan atau *concern* Direksi dan *Senior Management*, kondisi/*issue* yang terjadi sesuai perkembangan bisnis BNI dan kajian internal SPI. Selain itu, juga dilakukan assessment terhadap unit tertentu yang akan menjadi fokus audit dengan orientasi pada *compliance* dan *control assurance*.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2016

Selama tahun 2016, beberapa inisiatif penyempurnaan dan perangkat audit yang telah dilaksanakan SPI, adalah:

1. Penyempurnaan perangkat dan metodologi audit sejalan dengan migrasi fungsi Kontrol Internal ke SPI.
2. Pengembangan *exception report* yang menunjang pemeriksaan.
3. Melakukan *review*/pengkinian Piagam Audit Internal sesuai dengan POJK No 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.
4. Melakukan penyempurnaan mekanisme penanganan laporan *Whistle Blowing System* dengan Divisi Kepatuhan.
5. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi.
6. Menyempurnakan audit program yang dilengkapi dengan video tutorial pemeriksaan.
7. Penyempurnaan Juklak *Off Site* Audit.
8. Pengkinian Pedoman Perusahaan

Audit Pendalaman.
9. Penyempurnaan Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Konsultasi.
10. Pengembangan aplikasi *Enterprise Audit Management System* (EAMS) yang akan digunakan sebagai *electronics working papers* serta *tools* untuk pemeriksaan Kontrol Internal.

Selanjutnya, realisasi audit dan konsultasi tahun 2016 sebanyak 164 penugasan audit atau 144% dari target rencana audit tahunan (114 penugasan audit), dengan rincian sebagai berikut:

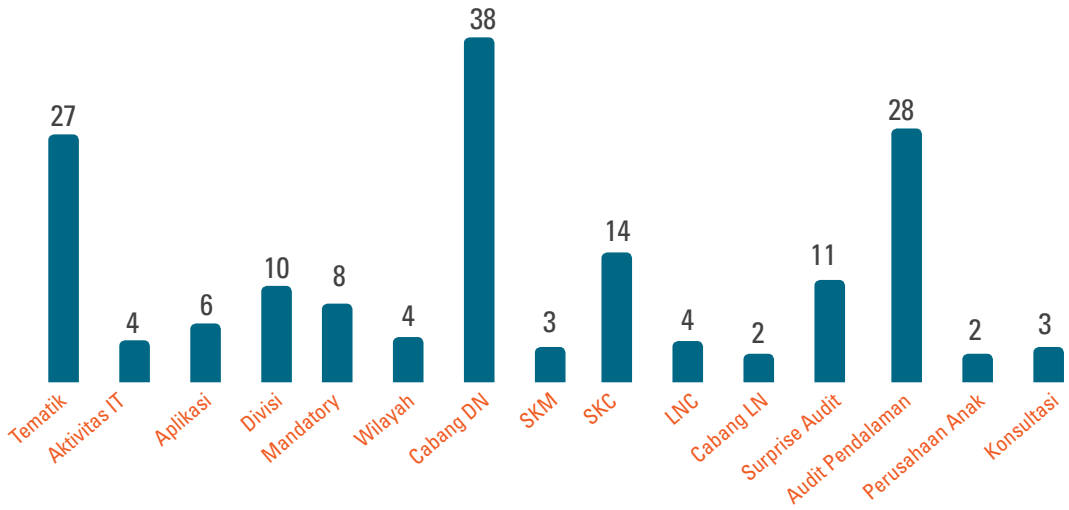

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Kegiatan internal audit meliputi juga kegiatan pemantauan terhadap auditee atau *auditable activities*. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit baik oleh *auditee* maupun pihak terkait lainnya.Tindak lanjut hasil audit tersebut termasuk penyelesaian Rekomendasi SPI dan Disposisi Direksi.

SPI melakukan analisis terhadap data yang disampaikan *auditee* untuk menentukan status penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Status tindak lanjut hasil audit dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu temuan yang belum ditindaklanjuti, temuan yang sedang ditindaklanjuti dan temuan yang telah ditindaklanjuti. Setiap Triwulan, SPI menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam bentuk Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Berikut data tindak lanjut hasil audit SPI, Rekomendasi dan Disposisi Direksi posisi 31 Desember 2016.

1. Progres Penyelesaian Pending Tindak Lanjut Hasil Audit SPI

Temuan Tahun	Total Jatuh Tempo	Selesai	Progress Penyelesaian
2014	4.118	4.118	100%
2015	3.440	3.370	97,97%
2016	2.963	2.222	74,99%
Total	10.521	9.710	92,29%

2. Progres Penyelesaian Rekomendasi SPI

Temuan Tahun	Total Jatuh Tempo	Selesai	Progress Penyelesaian
2014	398	398	100%
2015	687	661	96,22%
2016	431	341	79,12%
Total	1.516	1.400	92,35%

3. Progres Penyelesaian Disposisi Direksi

Temuan Tahun	Total Jatuh Tempo	Selesai	Progress Penyelesaian
2014	174	174	100%
2015	310	302	97,42%
2016	172	127	73,84%
Total	656	603	91,92%

PROGRAM DAN STRATEGI SPI TAHUN 2017

Arah dan Strategi BNI tahun 2017 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD) dan di-breakdown dalam empat perspektif yaitu financial, customer, internal business process serta learning & growth. Selanjutnya strategi BNI tersebut dijabarkan dalam strategy map dan KPI BNI 2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi BNI tahun 2017, SPI menetapkan tujuan audit tahun 2017 yaitu "Mengawal pertumbuhan bisnis yang berkualitas, mendorong efisiensi,dan menekan potensi fraud". Untuk mencapai tujuan audit, maka telah disusun strategi inisiatif dalam Business Plan SPI Tahun 2017, sebagai berikut.

1. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan isu kritikal maupun risiko terkini yang dihadapi oleh customer, untuk mendukung strategi BNI mengembangkan dan menambah outlet dan ATM disesuaikan dengan potensi bisnis untuk penetrasi pasar.
2. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan coverage audit dan mendorong efisiensi.
3. Mendorong perbaikan kualitas kredit, untuk mendukung strategi BNI memperbaiki proses kredit untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga kualitas kredit.
4. Mengoptimalkan kegiatan assurance untuk mengevaluasi kualitas control dan meminimalkan tingkat kejadian fraud.
5. Membuat risk & fraud awareness program, deterent effect program untuk mendorong terciptanya budaya pengendalian.
6. Menyediakan tools audit bagi unit bisnis sebagai alat early warning system.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan immediate post review pada pemberian kredit serta review atas

exception report untuk menurunkan transaksi yang termasuk kategori redflag.

8. Mendorong penyelesaian proyek ITSP, untuk mendukung strategi BNI mengimplementasikan Rencana Strategis Teknologi Informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dengan pengembangan platform menuju digital banking.
9. Meningkatkan kompetensi & kapabilitas pegawai, untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pegawai secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
10. Meningkatkan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Intern di Perusahaan Anak, antara lain melalui peningkatan koordinasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan improvement terhadap metodologi audit perusahaan anak.
11. Melaksanakanprogram-program peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai SPI secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta meningkatkan engagement pegawai.
12. Senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi/perangkat audit/pemeriksaan sesuai perkembangan organisasi dan bisnis BNI.

Fungsi Audit Ekstern

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan BNI tahun buku 2016 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam menjalankan aktivitas operasional, selain auditor intern, Bank Negara Indonesia juga diawasi oleh auditor ekstern dhi. Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahun buku 2015, melalui surat Dewan Komisaris nomor DK/076 tanggal 21 Juli 2016, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst and Young) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Lainnya tahun buku 2016.
Tahun buku 2016, merupakan periode tahun audit pertama bagi KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst and Young)

Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pada pasal 18 ayat 6 disebutkan Bank wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Proses Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of *Ernst and Young*) sebagai auditor eksternal dilakukan melalui mekanis melelang terbuka.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN *FEE* PERIODE 5 TAHUN TERAKHIR

Berdasarkan POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pasal 6 berbunyi Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, *fee*, dan izin KAP selama 5 tahun terakhir.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, ***Fee*** dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode	***Fee****	Izin KAP
2016	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)	Yasir	1 Tahun	7.200.000.000,-	603/KM.1/2015
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Angelique Daryanto	1 Tahun	8.390.000.000,-	241/KM.1/2015
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Haryanto Sahari	3 Tahun	13.215.125.000,-	151/KM.1/2010
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Haryanto Sahari		10.953.800.000,-	151/KM.1/2010
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)	Haryanto Sahari		9.900.000.000,-	151/KM.1/2010

**Termasuk Fee Auditor Eksternal untuk Anak Perusahaan*

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Ruang lingkup pekerjaan audit KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of* Ernst and Young) untuk tahun buku 2016 adalah:

1. Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi BNI.
2. Audit atas Laporan Keuangan Publikasi.
3. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
5. Audit atas Laporan Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
6. Audit atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama atas Operasional Departemen Kustodian BNI.
7. Audit atas Laporan PSA 62.
8. *Review* atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja BNI.
9. Surat Komentar/Management Letter.

HASIL PEMERIKSAAN

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2011 hingga 2016, Laporan Keuangan Konsolidasian BNI memperoleh Opini disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan BNI telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.Hal ini menunjukkan BNI telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat dansesuai dengan standar yang berlaku dan lepas dari salah saji yang material..

IMBALAN JASA AUDIT

Fee jasa audit Laporan Keuangan tahunan, laporan keuangan program kemitraan & bina lingkungan (PKBL) Bank Negara Indonesia BNI, dan jasa audit lainnya untuk tahun buku 2016 adalah sebesar Perseroan dan Laporan Lainnya tahun buku 2016Rp6.372.714.480,00 (sudah termasuk out of pocket expense (OPE) dan pajak pertambahan nilai (PPN)).

PROFIL PERUSAHAAN

AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Sungkoro&Surja
(member of Ernst and Young)
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2,7thfloor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
INDONESIA
Nomor Telepon: [62] (21) 52895000
Nomor Facsimile: [62] (21) 52894100

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Koordinasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian Laporan Komite Audit.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERN DAN KEPATUHAN BANK TERHADAP KETENTUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK DAN BANK INDONESIA

BNI telah menyelenggarakan pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank dengan efektif, antara lain sebagai berikut:

a. Sebagaimana disebutkan dalam PBI No: 7/50/PBI/2005 Tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan bank, dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan, BNI wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Melalui surat Dewan Komisaris nomor DK/076 tanggal 21 Juli 2016, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of Ernst and Young) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Lainnya tahun buku 2016
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkanPemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk

6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

c. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BNI wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
d. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
e. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit, Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit.
f. Bank Indonesia dan/atau OJK dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja telah berakhir.

Fungsi Manajemen Risiko

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan.

Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk dan/atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Regulator.

Penerapan Manajemen Risiko BNI berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
   a. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
   b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
   b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. Sistem Pengendalian Intern
   Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi dan fungsi Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI disusun dan ditetapkan sebagai berikut.

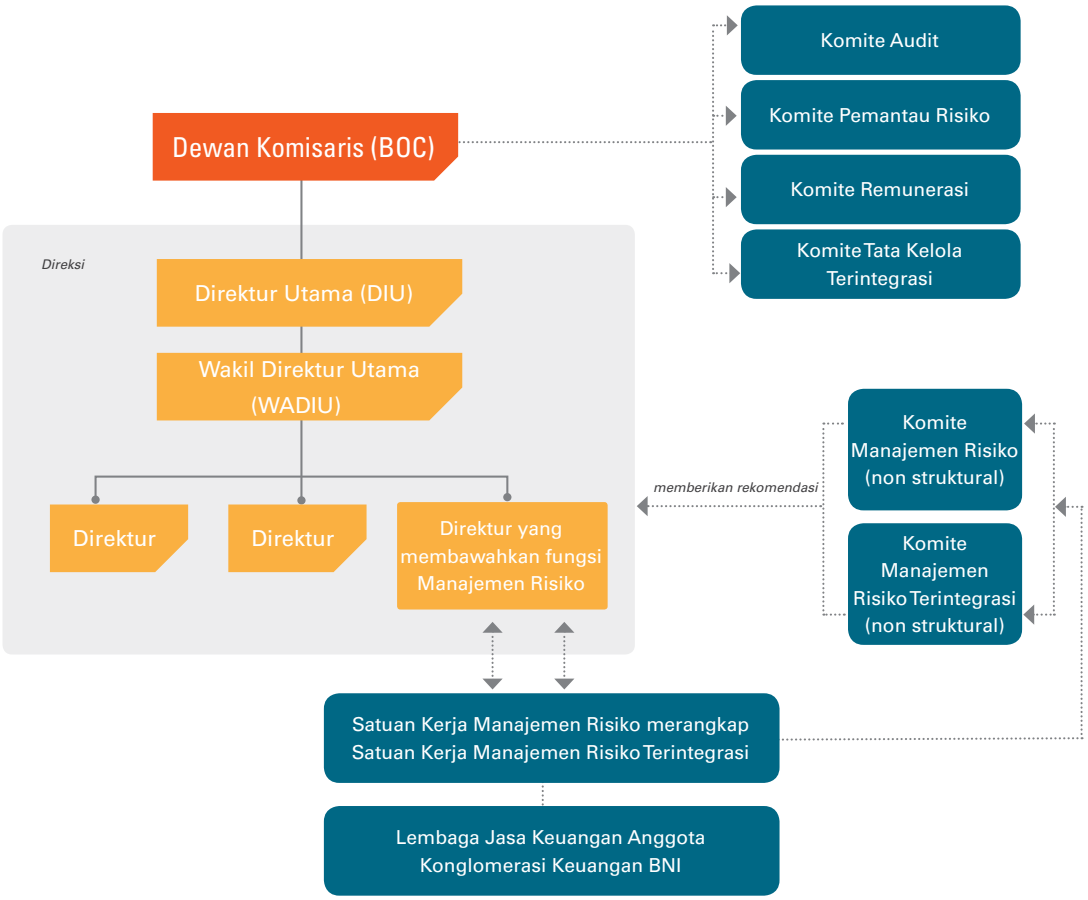

Struktur organisasi Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut.

a. Direksi dan Dewan Komisaris BNI berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko BNI secara individu maupun Manajemen Risiko Terintegrasi.
b. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
c. Direktur BNI yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko selain menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko bagi BNI juga melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.
d. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Komite Risiko dan Kapital bidang Manajemen Risiko (KRK-RMC) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
e. Jika diperlukan, Direktur yang membawahkan

fungsi Manajemen Risiko dapat membahas permasalahan terkait Manajemen Risiko dalam rapat komite lainnya di tingkat Direksi atau Rapat Direksi.

f. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko BNI, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang juga menjalankan fungsinya sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

g. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit pengelola risiko yang berada di unit-unit bisnis dan fungsional. Koordinasi pengelolaan risiko dilakukan baik untuk 4 (empat) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas maupun untuk 6 (enam) risiko lainnya yaitu risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko *intra group* dan risiko asuransi.

h. Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya independen terhadap Satuan Kerja Operasional *(risk taking unit)* dan tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Bank.

i. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang terjadi kepada Komite Manajemen Risiko atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Secara hirarki, organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko (dhi. Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan).

Struktur Divisi Manajemen Risiko

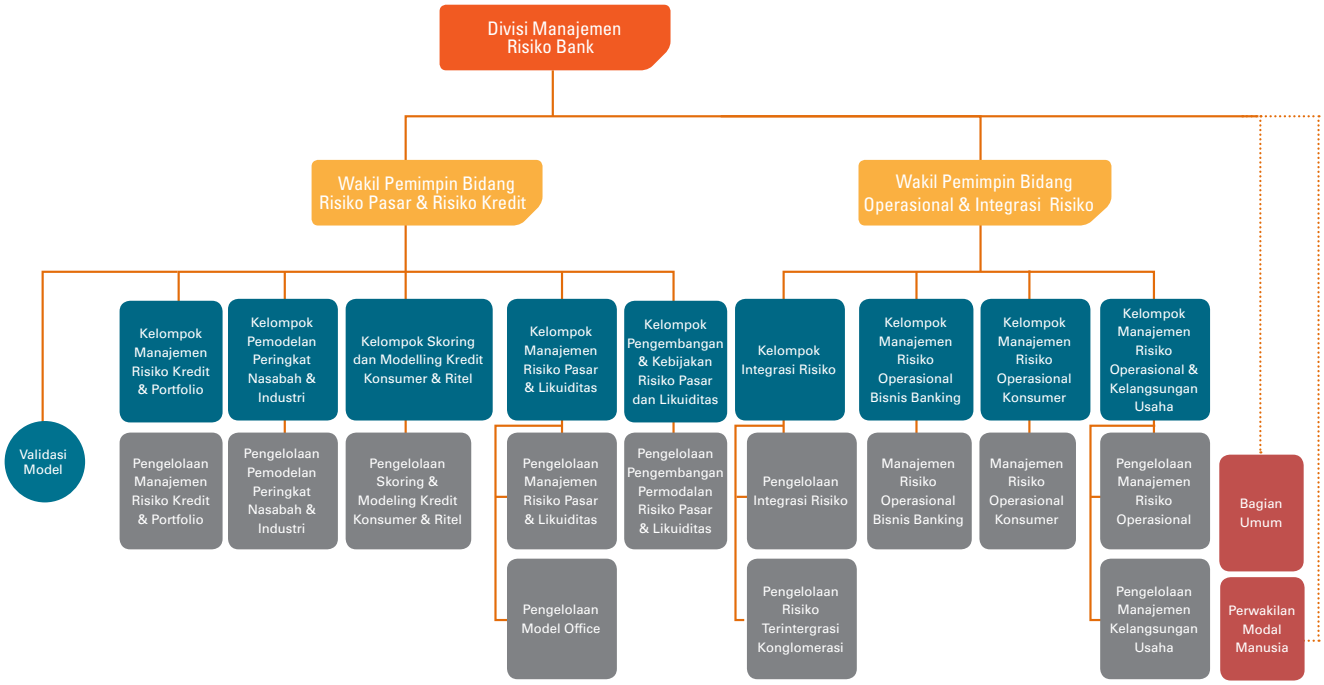

Ket:
Fungsi Umum mengikuti kebijakan sentralisasi fungsi Bagian Umum (Employee Service) Kantor Pusat
Fungsi Modal Manusia (Human Capital) mengikuti kebijakan sentralisasi fungsi Human Capital Kantor Pusat (HC Representative)

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Sejak Juli 2015, Divisi Manajemen Risiko Bank dipimpin oleh Agus Harinugroho, Ir, MM, FRM, CWM.

Agus Harinugroho ,Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1989) danv S2 Bidang Manajemen Bisnis dan Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung (1995).

Agus Harinugroho berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang Manajemen Risiko yang ditunjang dengan perolehan beberapa gelar profesional antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Level V, *Financial Risk Manager* (FRM) dari Global Association of Risk Professional (GARP), *Certified Wealth Manager* (CWM), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Wakil Manajer Investasi (WMI) dan *Chartered Financial Analyst* (CFA) Level I dari Association for Investment Management and Research (AIMR).

Sebelumnya menjabat sebagai DGM Risiko Kredit dan Risiko Pasar Divisi Manajemen Risiko Bank, Manager Riset Pasar Uang dan Valuta Asing Divisi Tresuri, Analis Pasar Modal Divisi Tresuri dan Analis *Asset and Liability Management* Divisi Tresuri.

Tugas Dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Bank secara individu maupun terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang sekaligus berfungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai berikut.
   a. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko bank.
   b. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*.
   c. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko.
   d. Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko.
   e. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sesuai kewenangan yang dimiliki.
   f. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko bank secara rutin.
   g. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur risiko.
   h. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi melalui Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
   i. Independen dari *risk taking unit* dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.
   j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan 4 (empat) risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, termasuk melakukan pengukuran risiko kredit, pasar dan operasional, antara lain melalui *Internal Rating System*, *Market Risk Management Model* dan Perangkat Risiko Operasional.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
   Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut.
   a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
   c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan hasil penilaian:
      i. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
      ii. Tingkat Risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.
      iii. Profil Risiko Terintegrasi.
   d. Melakukan stress *testing*.
   e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
   f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.
   g. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tentang hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   h. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko BNI memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

a. Mengelola risiko yang melekat pada produk, aktivitas dan kegiatan usaha/ bisnis BNI yang relatif kompleks.
b. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
c. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
d. Memelihara dan meningkatkan penilaian Profil Risiko BNI secara individu, konsolidasi maupun terintegrasi sebagai Konglomerasi Keuangan.
e. Mengelola struktur permodalan yang memadai untuk meng-cover risiko yang mungkin timbul.
f. Memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih akurat.
g. Menciptakan dan memelihara posisi strategis dan reputasi BNI.
h. Menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (shareholder value) BNI.

Implementasi Manajemen Risiko BNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari regulator yaitu dengan menerapkan empat pilar penerapan Manajemen Risiko yang pelaksanaannya di BNI adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
   Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).

   Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan

dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Risiko & Kapital (KRK) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Assets & Liabilities (ALCO), Sub Komite Anti Fraud (KAF), serta forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Agar implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya didasarkan pada Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan. Tata Kelola Risiko mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi-fungsi pengelolaan Risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan bahwa Risiko dikelola dengan baik.

Tata Kelola Risiko di BNI

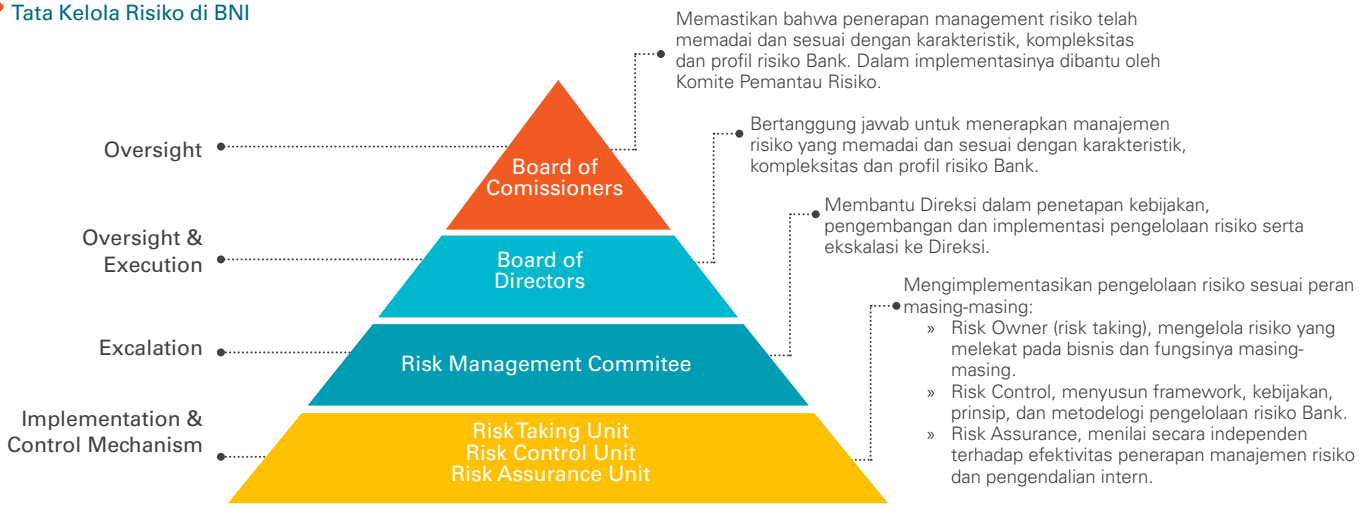

Internal Control

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

   Untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko secara efektif, BNI telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang komprehensif dan terintegrasi. BNI telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, sebagai kebijakan yang menjadi acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan Manajemen Risiko. Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko. Sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di mana Bank wajib mengelola 8 (delapan) jenis Risiko, BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan terhadap masing-masing Risiko. Ketentuan secara detail dari masing-masing prosedur diatur dalam petunjuk teknis. Hirarki penetapan kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis digambarkan pada bagan berikut:

Hirarki Penetapan Kebijakan

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BNI juga telah memiliki limit Risiko, baik limit per Risiko (Risiko kredit, Risiko pasar, dan Risiko likuiditas), limit per aktivitas fungsional maupun limit secara keseluruhan. Kebijakan, prosedur dan limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan review dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Proses Manajemen Risiko di BNI meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.
   Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitatif dan /atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus oleh regulator. Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem, pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan stress testing untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

   Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (risk taking unit) sebagai pemilik risiko (risk owner) maupun oleh risk control unit, dan hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala antara lain Laporan Portofolio Pinjaman, Laporan Pemantauan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Laporan Beban Risiko Operasional, Laporan Feedback Operational Risk Self Assessment, Internal Risk Report, Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
   Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

   Beberapa aplikasi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara tepat waktu dan akurat antara lain Credit Risk Management System (CRMS), Internal Rating *System*, *Scoring System*, Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), dan aplikasi manajemen risiko pasar.
   BNI telah menyiapkan solusi manajemen risiko yang sejalan dengan IT Strategic Plan, diantaranya:
   a. Menyiapkan aplikasi front end untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional
   b. Menyiapkan data *storage* dan information system
   c. *Capital calculation engine*

4. Sistem Pengendalian Intern
   Sistem pengendalian intern di BNI diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas:

   First line of defense dilakukan oleh *risk taking* unit sebagai risk owner yang melakukan pengelolaan risiko terhadap risiko yang melekat di bisnis

dan fungsinya (day-to-day risk management & control).

Second line of defense atau *risk control* unit dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan yang bertugas mendorong seluruh jajaran organisasi melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan internal.

Sebagai ***Third line of defense*** atau *risk assurance* unit, BNI memiliki Satuan Pengawasan Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Risk Assurance menilai secara independen terhadap kesesuaian proses penerapan Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan regulasi dari regulator.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Dalam implementasi manajemen risiko, perlu keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi risiko dan *risk appetite*. Strategi risiko dan *risk appetite* tersebut implementasinya diterjemahkan ke dalam *governance*, proses, kebijakan serta *tools* dan metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, sumber daya manusia dan budaya risiko yang kuat.

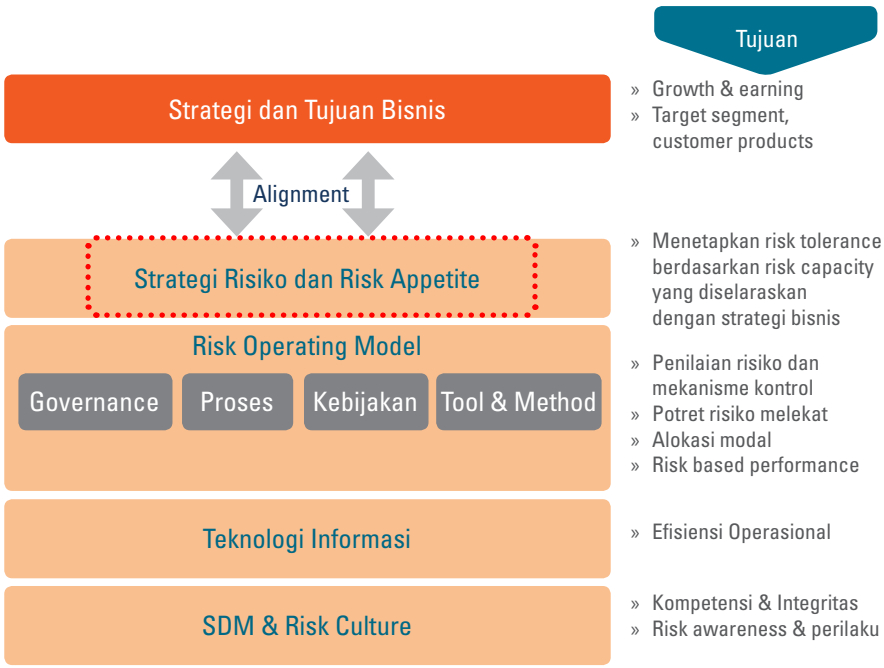

Strategi manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa prinsip yakni:
1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BNI.
2. Bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan mengelola risiko BNI baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Terpenuhinya kecukupan modal yang dipersyaratkan serta alokasi sumber daya yang memadai.

Dalam penyusunan strategi manajemen risiko, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
1. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada eksposur risiko BNI.
2. Organisasi BNI termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan BNI dalam mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan internal.
4. Bauran serta diversifikasi portofolio internal.

Strategi manajemen risiko dirumuskan sesuai dengan strategi bisnis dan harus mampu memberikan arahan secara keseluruhan dalam aktivitas pengelolaan risiko. Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:
1. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*)
2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko
3. Tata kelola risiko
4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar

Jenis dan besarnya eksposur risiko diukur dengan menggunakan metodologi pengukuran risiko yang sesuai dengan ketentuan Regulator, dan harus dikaitkan dengan *risk appetite*, *risk tolerance*, limit yang telah ditetapkan serta ketersediaan dan perencanaan modal.

Tata Kelola Penetapan Strategi Manajemen Risiko
1. Strategi Manajemen Risiko menjadi salah satu dasar (acuan) dalam penetapan strategi bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI yang ditetapkan secara tahunan dan disampaikan kepada Regulator.
2. Strategi manajemen risiko disusun dan dipersiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, diputus oleh Direksi melalui Rapat Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh Direksi kepada Divisi/ Unit/ Satuan Kerja dan direview secara berkala sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan, adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank.

PENILAIAN PROFIL RISIKO

Penilaian Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko. Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana ketentuan regulator.
1. Penilaian Risiko Inheren
   Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

   Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

   Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/ indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3

(*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
   Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

   Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

   Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu di perhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

   Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:
   a. tata kelola Risiko;
   b. kerangka Manajemen Risiko;
   c. proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
   d. kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2014 setiap Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) dan memiliki Entitas Utama. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Bank, Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Perusahaan Efek dan Perusahaan Pembiayaan.

BNI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama serta memiliki 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life, BNI Securites dan BNI Asset Management, dengan struktur sebagaimana bagan berikut.

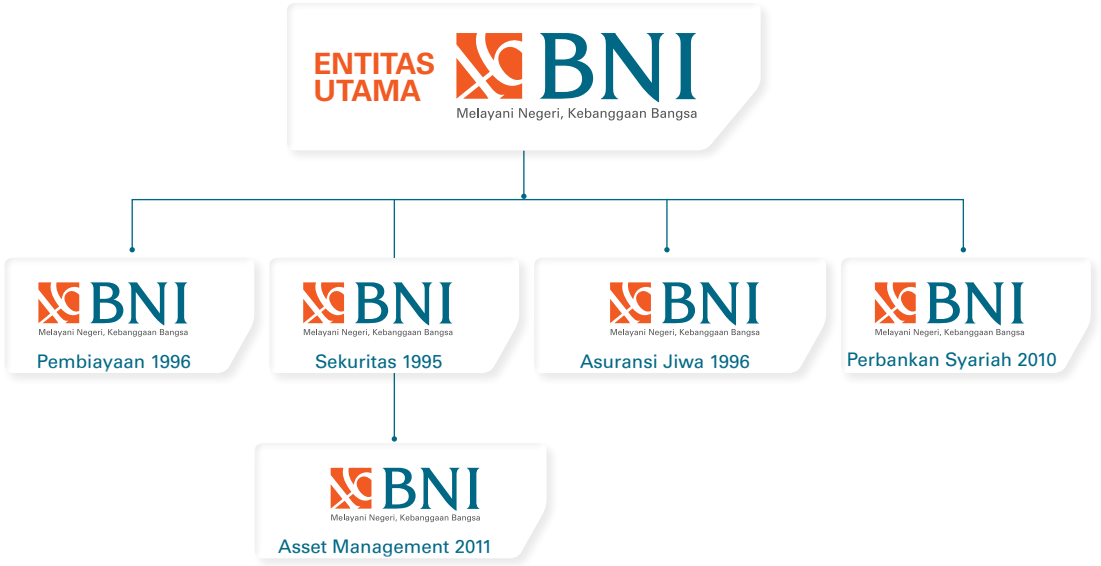

Gambar Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI sebagai Entitas Utama telah melakukan hal-hal berikut.

1. Menetapkan Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
2. Menunjuk Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan (Dir. KN) menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) di mana tugas, tanggung jawab, keanggotaan (jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan), dan tata cara rapat KMRT diatur dalam SK No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 perihal Penetapan Keanggotaan KMRT.
4. Menyusun Kebijakan Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai pedoman bagi BNI sebagai Entitas Utama dalam mengelola seluruh Risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha BNI maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Kepatuhan ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan BNI.

Sebagai pelaksanaan tugas tersebut di atas, Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi membentuk Pengelolaan Tata Kelola Kepatuhan Terintegrasi dan melakukan aktivitas sebagai berikut.

1. Melakukan *review* kecukupan kebijakan/prosedur di perusahaan anak.
2. Analisa Dampak Ketentuan Eksternal.
3. *Sharing*/ Diskusi/ Sosialisasi.
4. Berkoordinasi dengan perusahaan anak terkait Pelaksanaan Tata Kelola Kepatuhan Terintegrasi.
5. Melakukan *assesment* terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di perusahaan anak.

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan terkait pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.
7. Memberikan rekomendasi saran perbaikan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di perusahaan anak.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Pengawasan Internal ditetapkan sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang memiliki tugas utama :

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern (SKAI) Perusahaan Anak melalui evaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur SKAI Perusahaan Anak, perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan pokok pokok hasil audit serta tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI selaku Entitas Utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.

PROFIL RISIKO

JENIS RISIKO YANG DIHADAPI BANK DAN UPAYA PENGELOLAANNYA

Jenis Risiko

Terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang sekurang-kurangnya harus dikelola, yaitu:

1. Risiko Kredit
   Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
   Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

   Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

   Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

   Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontijensi, di mana pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.
2. Risiko Pasar
   Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3. Risiko Likuiditas
   Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko Operasional
   Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional bersumber antara lain dari proses internal, sumber daya manusia (SDM), sistem dan infrastruktur teknologi informasi, serta kejadian eksternal.
5. Risiko Hukum
   Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum

dan/ atau kelemahan aspek yuridis.
Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.
7. Risiko Stratejik
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Risiko stratejik timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/ atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level stratejik.
8. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/ aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/ aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum.

HASIL PENILAIAN PROFIL RISIKO

Hasil self assessment Profil Risiko BNI secara Individu posisi 31 Desember 2016 adalah peringkat 2 (low to moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren low to moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) satisfactory.

UPAYA PENGELOLAANNYA

Untuk mengelola risiko secara efektif dan komprehensif diperlukan infrastruktur manajemen risiko yang mencakup Tata Kelola dan Organisasi (termasuk SDM), Kebijakan dan Prosedur, Proses Manajemen Risiko, Perangkat dan Metode Pengukuran (termasuk Kuantifikasi Model Risiko), dan didukung oleh Teknologi Informasi serta Budaya Risiko yang kuat.

Proses Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko yang telah dikembangkan dan diimplementasikan BNI adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Identifikasi risiko kredit dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko kredit berikut dampaknya, yang dilaksanakan berkala disesuaikan dengan karakteristik produk dan jenis aktivitasnya. Pengukuran risiko kredit merupakan bagian dan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penerapan manajemen risiko kredit dan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko.

Dalam rangka melengkapi sistem pengukuran, dilakukan stress testing risiko kredit yaitu dengan mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi faktor yang berdampak signifikan terhadap portofolio dan kecukupan permodalan bank.

Stress testing dilakukan secara berkala atau dapat juga dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi perekonomian atau sesuai kebutuhan/ permintaan regulator.

ERM menyusun metodologi/model stress testing risiko kredit dengan memperhatikan karakteristik produk atau aktivitasnya serta diselaraskan dengan aturan /kebutuhan regulator.
Pemantauan risiko kredit bertujuan untuk melihat

dan memastikan pelaksanaan seluruh proses pengelolaan risiko kredit berjalan baik dan potensi risiko kredit yang ada masih dalam limit risiko yang diperkenankan.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih mendalam akibat Risiko Kredit yang didukung dengan beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio.

Untuk pemrosesan pada eksposur individu segmen *business banking*, BNI telah memiliki model rating berupa *internal rating system*, sementara untuk segmen konsumer digunakan sistem skoring debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan.

Untuk mengatur komposisi portofolio, BNI telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) yang berfungsi membatasi risiko konsentrasi eksposur pinjaman setiap sektor ekonomi pada masing-masing segmen, dan menjadi pedoman ekspansi pinjaman. Untuk menilai risiko setiap jenis industri BNI telah memiliki *Industry Risk Rating* (IRR) serta Standar Rasio Keuangan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kualitas debitur dari sisi industri.

2. Risiko Pasar
   Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru.
   Tujuan Identifikasi Risiko Pasar antara lain adalah:
   a. Menentukan transaksi/produk yang terekspos Risiko Pasar.
   b. Mengelompokkan Risiko Pasar berdasarkan kriteria yang ada.
   c. Memudahkan pengukuran Risiko Pasar dan pengendaliannya.

   Pengukuran Risiko Pasar secara periodik dilakukan terhadap seluruh portofolio trading book dan banking book yang terekspos Risiko Pasar.

   BNI melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Risiko Pasar, sementara pengelolaan Risiko Pasar harian menggunakan Metode Internal (Value at Risk).

   Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar adalah portofolio trading book untuk risiko suku bunga dan portofolio trading book dan banking book untuk risiko nilai tukar Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.

   Proses pemantauan dan pelaporan Risiko Pasar dilakukan secara periodik, mencakup:
   a. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Pasar atas seluruh portofolio Bank yang terekspos Risiko Pasar.
   b. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Pasar (realisasi eksposur Risiko Pasar dibandingkan limitnya).
   c. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Pasar.

   Pengendalian Risiko Pasar dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih mendalam akibat Risiko Pasar melalui penetapan limit-limit risiko pasar di Divisi Tresuri maupun Kantor Cabang Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
   a. *Value at Risk Limit* (VaR Limit), yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.
   b. *Stress Value at Risk Limit* (VaR Limit), yang merupakan pengukuran risiko pasar yang disesuaikan dengan kondisi tidak normal di pasar atau maksimum potensi kerugian saat pasar tidak normal.
   c. *Budget Loss Limit* yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.
   d. *Management Action Trigger* (MAT), yaitu

batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugi (*early warning signal*). MAT melengkapi loss limit berupa persentase tertentu dari loss limit.

e. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga.
f. *Limit aset* dan *liability repricing gap* (*Interest Rate Risk in Banking Book*) untuk membatasi risiko suku bunga dalam *banking book*.
g. *Nominal open position limit*, yaitu batas maksimum nominal *open position* yang dapat dilakukan dealer.
h. Limit internal PDN keseluruhan (*absolut*), yaitu batas maksimum pengelolaan PDN.

3. Risiko Likuiditas

Identifikasi Risiko Likuiditas merupakan proses memperoleh dan menganalisis sumber-sumber Risiko Likuiditas yang melekat pada seluruh aktivitas bisnis/ transaksi/ produk yang dapat memberikan dampak finansial bagi Bank. Setiap aktivitas/ produk/ transaksi dianalisis dan dibedakan untuk memastikan bahwa setiap Risiko Likuiditas telah diidentifikasi, diukur secara akurat, dikelola sesuai dengan metode yang tepat, dan dikendalikan dengan baik.

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Metode Pengukuran Risiko Likuiditas meliputi rasio likuiditas, profil maturitas, proyeksi arus kas, *stress* testing, dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Proses pemantauan dan/atau pelaporan Risiko Likuiditas dilakukan secara periodik, mencakup:

a. Pemantauan dan pelaporan besarnya Risiko Likuiditas atas seluruh aktivitas/produk Bank yang terekspos Risiko Likuiditas.
b. Pemantauan dan pelaporan terhadap kepatuhan limit Risiko Likuiditas (realisasi eksposur Risiko Likuiditas dibandingkan limitnya).
c. Pemantauan indikator (internal dan eksternal) peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas.
d. Rekomendasi tindak lanjut atas terjadinya pelampauan limit dan/atau terjadinya kondisi pasar yang tidak normal, dan/atau terjadinya kondisi lainnya yang mengarah pada peningkatan potensi Risiko Likuiditas.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*. Penetapan dan pemantauan limit, yaitu limit Pagu Kas BNI Wide, limit Secondary Reserve Ideal (SR Ideal), limit Profil Maturitas, dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM). Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi Tresuri (TRS) dan Divisi ERM.

4. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima) proses utama yang berkesinambungan yaitu identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

a. Identifikasi Risiko
b. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional, antara lain: Risk Control Self Assessment (RCSA), risk mapping, Key Risk Indicators (KRI), scorecards, event analysis, matriks frekuensi, metodologi kuantitatif, dan metodologi kualitatif. Implementasi dari metode-metode identifikasi dan pengukuran risiko operasional tersebut di BNI terangkum dalam suatu aplikasi, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP merupakan suatu tools atau perangkat yang dipergunakan dalam pengelolaan risiko operasional termasuk dengan

melakukan pencatatan kejadian kerugian yang terjadi, menyusun tindak lanjut serta melakukan mitigasinya.

c. Penilaian Risiko
Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode operational risk self assessment, mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.

d. Pengukuran Risiko
Sesuai dengan aturan Regulator, pengukuran risiko operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach).

e. Pemantauan Risiko
Dilakukan oleh seluruh unit sebagai *first line of defense* terhadap risiko utama pada saat aktivitas sedang berlangsung.
Sedangkan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/ feedback atas penilaian risiko berdasarkan hasil self assessment serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang terjadi, meliputi:
- Feedback report untuk seluruh divisi/ satuan/ unit/ wilayah/ cabang
- Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko Operasional kepada Direksi
- Laporan Profil Risiko Operasional

f. Pengendalian Risiko
Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal dengan menerapkan 4 (empat) strategi mitigasi, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko Operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan *fraud*.

Business Continuity Management

Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritikal sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis dan layanan BNI.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/ *Business Continuity Management* (BCM) di segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.

Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Regulator yang mewajibkan bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki pengelolaan keberlangsungan usaha dan rencana darurat (business continuity management dan contingency plan) guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnisnya. Selain peraturan Regulator dan Basel II, untuk Kantor Cabang Luar Negeri, BCM diimplementasikan dengan memenuhi regulasi BCM di negara setempat.

5. Risiko Hukum
Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko hukum dari produk dan aktivitas usaha Bank serta risiko hukum dari produk dan aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
Proses identifikasi risiko hukum yang melekat pada Bank dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter:
   a. Faktor Litigasi
   b. Faktor Kelemahan Perikatan
   c. Faktor Ketiadaan/ Perubahan Perundang-undangan

Pengukuran risiko hukum dilakukan berdasarkan perhitungan dengan indicator/ parameter dalam identifikasi risiko hukum yang dibandingkan

dengan modal Bank. Hasil pengukuran risiko hukum tercermin dalam Profil Risiko Hukum. Pemantauan risiko hukum dilakukan guna mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko hukum tersebut dilaporkan secara berkala termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko hukum digunakan Bank untuk mengelola risiko hukum terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan :

a. Melakukan penilaian/ assessment berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk baru atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/ perubahan fitur atas produk Bank.
b. Memberikan advis hukum dan/ atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.
c. Melakukan review berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
d. Melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan Bank.
e. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Bank sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

6. Risiko Stratejik
Identifikasi risiko stratejik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko stratejik yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank, misal karena adanya kebijakan yang tidak tepat, kurang responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, implementasi kebijakan yang tidak sesuai rencana, atau karena implementasinya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur Profil Risiko Stratejik Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko stratejik menggunakan empat parameter, yaitu: kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis Bank terhadap pesaing dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Penilaian profil risiko stratejik secara detail dituangkan dalam laporan profil risiko stratejik dengan berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Penilaian Profil Risiko BNI.

Pelaksanaan *stress test* dapat dilakukan bila terjadi perubahan makro yang signifikan dan dapat mempengaruhi strategi Bank untuk dilakukan penyesuaian. Penyesuaian strategi dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi terhadap perubahan makro agar perusahaan tetap dapat melakukan ekspansi bisnis namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Divisi Perencanaan Strategis (REN) melakukan pemantauan realisasi strategi *Business Plan* tiap-tiap Divisi/ Unit sehingga dapat diidentifikasi permasalahan implementasi strategi dan program kerja untuk segera diperbaiki agar target keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Manajemen Risiko Stratejik dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis, di bawah pengawasan aktif Direktur Perencanaan dan Operasional.

7. Risiko Kepatuhan
Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan seperti jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengenali atau mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter berupa:

a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
b. Frekuensi pelanggaran (track record kepatuhan Bank);
c. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kepatuhan, indikator/ parameter sertas besarnya bobot dan rasio yang digunakan untuk mengukur profil risiko kepatuhan ditetapkan oleh Divisi Kepatuhan dengan memperhatikan masukan dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Unit lainnya maupun Regulator bila ada.

Divisi Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik secara insidentil pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pengendalian risiko kepatuhan tidak hanya dilakukan terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri.

8. Risiko Reputasi
   Untuk melakukan identifikasi dan mengukur dampak Risiko Reputasi, Bank menggunakan beberapa sumber informasi antara lain pemberitaan media massa, situs Bank dan analisis jejaring social, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah dan kuesioner kepuasan nasabah.

Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP) melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko Reputasi yang terjadi kepada Direksi baik secara insidentil pada saat terjadinya risiko reputasi maupun secara berkala termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan terhadap pemberitaan (news management) dan pengelolaan krisis komunikasi serta monitoring opini/ komentar news media atau social media dilakukan berkoordinasi dengan Divisi Komunikasi Perusahaan. Sedangkan pengelolaan komplain/ keluhan nasabah dilakukan bekerjasama dengan Unit Pusat Layanan Pelanggan.

Bank mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui 2 (dua) hal, yaitu:

a. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi
b. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang Manajemen Risiko, BNI telah mengadakan pelatihan yang mendukung kompetensi pegawai Divisi Manajemen Risiko Bank sepanjang 2016, sebagai berikut.

Pengembangan Kompetensi Divisi Manajemen Risiko

No	Nama Pendidikan Dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
1	Pengkinian Pedoman Perusahaan (*Credit, International, and Treasury*)	BNI	11 Januari 2016
2	*Credit Scoring Model For Origination Management*	BNI	18 Januari 2016
3	Program Pengembangan Pengelola	BNI	25 Januari 2016
4	BNI Economic Outlook	BNI	3 Februari 2016
5	Pemantapan nilai-nilai Kebangsaan	BNI	10 Februari 2016
6	Program Pengembangan Pengelola	BNI	14 Maret 2016
7	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	BNI	16 Maret 2016
8	Profil Bisnis Jalan Tol	BNI	17 Maret 2016
9	*Test Of English For International Communication* (TOEIC)	BNI	9 April 2016
10	Program Pengembangan Pengelola	BNI	11 April 2016
11	*Business Continuity Management*	BNI	12 April 2016
12	Ekonomi dan Geopolitik Dalam *Framework* Internasional dan Pasar Global	BNI	13 April 2016
13	*Business Communication And Presentation Intermediate*	BNI	14 April 2016
14	*Refreshment* Materi Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 Pengajar	BNI	14 April 2016 20 April 2016
15	*Refreshment* Materi Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Pengajar	BNI	14 April 2016 20 April 2016
16	*Refreshment* Materi Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Pengajar	BNI	14 April 2016 20 April 2016
17	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	BNI	28 Mei 2016
18	*Environmental, Social, And Governance* (ESG)	BNI	2 Juni 2016 19 Oktober 2016
19	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	BNI	6 Agustus 2016
20	*Essential and Strategic Insights For Managing Resiliency and Technology*	BNI	25 Agustus 2016
21	Pengelolaan Kas, ATM, dan *Safe Deposit Box* (SDB)	BNI	27 Oktober 2016
22	*Best Practice Credit Risk Analyst and Credit Analyst*	BNI	9 November 2016
23	Kondor+	BNI	19 November 2016
24	*Auditor Region*	BNI	15 Desember 2016
25	*Refreshment Training* KPKU BUMN *For Executive*	BNI	16 Desember 2016
26	*Credit Discipline Program*	BNI	23 Desember 2016

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam bidang Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan oleh BNI sebagai berikut.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Level Sertifikasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	AMGR	339
	MGR	92
2	AMGR	1
	MGR	42
	AVP	2
3	-	-
4	VP	9
	SVP	1
5	VP	1
	SVP	2

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk pengembangan ke depan, BNI telah merencanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain :

1. Keselarasan *Risk Appetite, Capital Allocation,* dan *Risk Adjusted Performance Measurement.*
   Keselarasan antara *risk appetite*, alokasi modal (*capital allocation*) sampai dengan proses penilaian kinerja berbasis risiko (*risk adjusted performance measurement*), dimulai dari penetapan *risk appetite*, dilanjutkan dengan perhitungan *Risk Weighted Asset* dari target bisnis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan modal ke masing-masing *Risk Taking Unit*. Besarnya total modal yang dialokasikan harus sesuai dengan kemampuan modal *(risk capacity)* BNI secara keseluruhan yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana strategis bank dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI untuk satu tahun kedepan. Selanjutnya, modal yang digunakan *Risk Taking Unit* dipakai sebagai dasar untuk penilaian *Risk Adjusted Performance Measurement* (RAPM) masing-masing *Risk Taking Unit*.
2. Peningkatan kapabilitas risiko kredit
   Dalam rangka memenuhi persyaratan *regulator* terkait implementasi Basel II saat ini Divisi Manajemen Risiko Bank telah memiliki aplikasi Credit Risk Management Solution-Risk Weighted Asset (CRMS-RWA) yang berfungsi untuk melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) risiko kredit secara otomasi. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan metode *Internal Rating Based* saat ini masih terus dikembangkan agar dapat melakukan perhitungan dengan lebih komprehensif.
3. Peningkatan kapabilitas risiko operasional
   Aplikasi manajemen risiko operasional yang dimiliki BNI saat ini (PERISKOP) belum mencakup kapabilitas *operational risk capital calculator.* Saat ini BNI sedang dalam proses memperbaharui aplikasi yang dimiliki yang mencakup penambahan dan perluasan kapabilitas aplikasi sehingga menjadi solusi yang dapat meningkatkan pengelolaan risiko operasional menjadi lebih baik. Selain itu BNI juga berencana untuk menyelesaikan penerapan *Business Continuity Management* (BCM) cabang luar negeri.
4. Memperkuat Budaya Risiko
   Selain beberapa inisiatif di atas, BNI juga akan terus meningkatkan kesadaran risiko di segenap unit, melalui peningkatan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh pegawai, yang dilakukan baik melalui pendekatan top down maupun bottom up sehingga tercipta budaya risiko yang kuat.
   Pada tanggal 15 Juni s/d 1 Juli 2016 telah dilaksanakan survey budaya risiko yang diikuti oleh 15.822 pegawai (± 61% dari total pegawai BNI), dengan hasil survey budaya risiko BNI 4,98 (*Moderate to Strong*). Budaya Risiko juga menjadi salah satu materi *e-learning* yang wajib diikuti oleh segenap pegawai BNI.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BASEL

Pada bulan Desember 2010 Basel Committee menerbitkan dokumen "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" untuk memperkuat permodalan global

dan pengaturan likuiditas dalam rangka mendorong peningkatan ketahanan perbankan.

Ketentuan mengenai Permodalan Basel III telah diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yaitu selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, Bank juga diwajibkan untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer), yang meliputi Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge untuk Domestic Systematically Important Bank (D-SIB).

Untuk mengantisipasi pemenuhan ketentuan mengenai buffer pada saat diimplementasikan (dimulai sejak 1 Januari 2016), BNI telah melakukan simulasi untuk memastikan bahwa modal BNI masih memenuhi persyaratan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa berdasarkan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018, modal BNI masih memenuhi persyaratan kecukupan permodalan sesuai Profil risiko dan buffer.

Selain itu, untuk antisipasi implementasi Basel III terkait likuiditas BNI juga telah melakukan penyempurnaan manajemen risiko likuiditas berupa penerapan perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas manajemen risiko likuiditas.

TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2016

Sepanjang Tahun 2016 Divisi Manajemen Risiko Bank dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko menetapkan target dan melakukan inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
   a. Me-review atau mengembangkan Industry Risk Rating (IRR) nasional dan regional serta standar rasio keuangan untuk tahun 2016.
   b. Menetapkan Loan Exposure Limit (LEL) pinjaman dalam negeri tahun 2016.
   c. Menyusun kajian portofolio pinjaman, Non Performing Loan (NPL) analysis, dan space available pinjaman secara berkala.
   d. Melakukan stress testing risiko kredit.
   e. Me-review atau menyempurnakan sistem pemeringkatan debitur di seluruh segmen.
   f. Mengembangkan perhitungan ATMR dengan metode Internal Rating Based (IRB).
   g. Mengembangkan credit risk measurement secara berkelanjutan.
   h. Mengembangkan metodologi dan melakukan review perhitungan Credit Risk Premium (CRP) secara berkala.
   i. Melakukan pengukuran profil risiko kredit.
   j. Me-review dan mengembangkan Pedoman Perusahaan (PP) Manajemen Risiko Kredit.
   k. Melakukan validasi model risiko kredit segmen Business Banking (Menengah dan Kecil) dan segmen Consumer Banking.
   l. Melakukan validasi model scoring aplikasi kartu kredit (behavior).
   m. Mereview dan mengembangkan scoring dan modeling kredit konsumer dan mass ritel (a.l BWU dan KUR).

2. Risiko Pasar
   a. Menyusun, me-review, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pasar, untuk portofolio Divisi Tresuri dan Kantor Cabang Luar Negeri (Global Tresury).
   b. Menyusun, me-review, dan mengembangkan metodologi pengelolaan risiko pasar.
   c. Melakukan pengukuran, pemantauan, dan analisis serta pengendalian dalam rangka pengelolaan risiko pasar sebagai berikut-:
      - Melakukan valuasi harga/ rate pasar
      - Menetapkan dan me-review secara periodik limit-limit risiko pasar yaitu Limit Value at Risk, Limit Budget Loss, dan Limit Repricing Gap
      - Mengukur, memantau, dan menganalisis Value at Risk, Budget Loss, kewenangan transaksi, open position, dan profit/loss trading book Divisi Tresuri dan KCLN
      - Memantau dan menganalisis Budget Loss, Net Open Position / NOP dan Repricing Gap (Interest Risk in Banking Book) pada portofolio Banking Book BNI
      - Melakukan evaluasi terhadap pengukuran

NOP dan Repricing Gap yang dilakukan Divisi Tresuri
- Memantau Counterparty Limit untuk bisnis tresuri
- Mengukur dan memantau risiko konsentrasi portofolio surat berharga
- Mengelola kewajaran laporan laba rugi bisnis tresuri
- Mengelola dan memverifikasi kewajaran harga/rate pasar

d. Melakukan *stress testing* nilai tukar dan suku bunga, secara berkala.
e. Melakukan back testing.
f. Melakukan perhitungan ATMR risiko pasar.
g. Melakukan updating dan uploading kebijakan dan prosedur risiko pasar ke BNI e-PP.
h. Melakukan validasi model risiko pasar.
i. Melakukan review risk appetite risiko pasar, yaitu NOP, Value at Risk, dan Budget Loss Limit.
j. Melakukan penilaian/ assessment risiko pasar pada produk, aktivitas dan transaksi baru.
k. Melakukan pengukuran profil risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas
a. Menyusun, me-review, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas dalam negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.
b. Menyusun, me-review dan mengembangkan metodologi pengelolaan risiko likuiditas.
c. Melakukan pengukuran, pemantauan, dan analisis serta pengendalian dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas sbb. :
- Menetapkan dan me-review secara periodik limit-limit risiko likuiditas, yaitu Pagu Kas BNI Wide, Secondary Reserve (SR) Ideal, Limit Profil Maturitas, dan Onshore Loan Limit
- Memantau dan menganalisis realisasi pagu kas BNI Wide.
- Memantau dan menganalisis realisasi Secondary Reserve dan Tertiary Reserve Likuid.
- Memantau dan menganalisis realisasi profil maturitas
- Menetapkan kondisi likuiditas normal, moderat atau ketat dengan indikator peringatan dini dan liquidity kontinjensi plan

d. Menyusun kebijakan, prosedur, dan metodologi LCR (Liquidity Coverage Ratio) dalam rangka penerapan Basel III.
e. Melakukan stress testing risiko likuditas sesuai jadual (business as usual), serta melakukan pemantauan dan analisis perkembangan parameter stress testing risiko likuiditas dalam Rapid Response Team (ad-hoc).
f. Melakukan updating dan uploading kebijakan dan prosedur risiko likuiditas ke BNI e-PP.
g. Melakukan validasi model risiko likuiditas.
h. Melakukan review risk appetite risiko likuiditas, yaitu LDR/LFR, konsentrasi 50 Deposan Inti, dan Rasio Earning Asset Valas.
i. Melakukan penilaian/ assessment risiko likuiditas pada produk, aktivitas dan transaksi baru.
j. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas.

4. Risiko Operasional
a. Melakukan evaluasi/updating kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional.
b. Melakukan evaluasi/updating kebijakan dan prosedur Business Continuity Management (BCM).
c. Melakukan identifikasi risiko operasional dengan mengevaluasi/updating risk issues di segenap unit organisasi.
d. Menyusun laporan terkait risiko operasional untuk kebutuhan internal dan eksternal.
e. Melakukan perhitungan ATMR dengan menggunakan pendekatan Standardized Approach (SA).
f. Melakukan perhitungan ATMR dengan menggunakan pendekatan BIA.
g. Melakukan pengukuran profil risiko operasional.
h. Melakukan pemantauan risiko operasional di segenap unit organisasi.
i. Melakukan penilaian/assessment risiko operasional terkait produk, aktivitas, dan transaksi baru.
j. Melakukan pengembangan aplikasi Self Assessment dan implementasi di cabang/unit/

wilayah dalam dan luar negeri serta sentra dan divisi di BNI.

k. Melakukan pengembangan aplikasi Loss Event Database (LED) dan implementasi di cabang/ unit/wilayah dalam dan luar negeri serta sentra dan divisi di BNI.
l. Melakukan pengembangan aplikasi Key Risk Indicator (KRI) dan implementasi di cabang/ unit/wilayah dalam dan luar negeri serta sentra dan divisi di BNI.
m. Tersedianya Operational Risk Management Solution (ORMS).
n. Mengelola dan melakukan evaluasi dokumen Business Continuity Management (BCM), Risk and Threat Analysis (RTA) dan Business Impact Analysis (BIA).
o. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi BCM disegenap unit organisasi.
p. Melakukan evaluasi optimalisasi Dual Data Centre (DDC), Disaster Recovery Center (DRC) dan Command Centre (CC) serta penentuan alternate site di segenap unit organisasi.

5. Risiko Hukum
   a. Mengembangkan dan me-review kebijakan hukum.
   b. Melakukan analisis/kajian hukum dalam bentuk pemberian advis tertulis maupun lisan.
   c. Melakukan analisis/kajian hukum terhadap produk/aktivitas baru bank.
   d. Melaksanakan penyuluhan/pelatihan hukum.
   e. Melakukan legal review terhadap perjanjian non standar dengan menggunakan metode perhitungan scoring system.
   f. Melakukan pendampingan terhadap unit bisnis terkait dengan aktivitas bisnis.
   g. Menangani dan menyelesaikan perkara hukum.
   h. Melakukan supervisi penanganan perkara.
   i. Melakukan pengukuran profil risiko hukum.

6. Risiko Reputasi
   a. Menyampaikan surat jawaban/ tanggapan kepada media massa terkait komplain/ keluhan nasabah terhadap BNI.
   b. Menjaga reputasi dan image BNI terhadap seluruh stakeholders.
   c. Melakukan pengukuran profil risiko reputasi.
7. Risiko Stratejik
   a. Melakukan perencanaan strategis dengan penajaman strategi dan target dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD) dan Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal yang mencakup kondisi makro ekonomi, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan usaha, serta kondisi internal yang mencakup risk appetite, kapabilitas teknologi, budaya organisasi, kinerja, dan keunggulan kompetitif BNI.
   b. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dengan mengevaluasi tingkat risiko kegiatan usaha, risk appetite, dan risk tolerance.
   c. Melakukan review Corporate Plan 2014-2018 sebagai Rencana Jangka Panjang BNI untuk menentukan arah dan kebijakan BNI yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana jangka pendek.
   d. Melakukan sosialisasi strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD dan RBB kepada segenap divisi/satuan/unit/wilayah.
   e. Memperkuat alignment strategi unit dalam upaya mencapai strategi dan target corporate.
   f. Melakukan penyempurnaan organisasi yang berkesinambungan, efektif dan efisien untuk mendukung kinerja BNI secara optimal.
   g. Mempertajam informasi dan ulasan mengenai kondisi ekonomi dan bisnis dunia, nasional, wilayah,dan potensi bisnis perusahaan anak terkini untuk memperluas wawasan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
   h. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap realisasi pencapaian strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD, RBB, dan Business Plan Unit.
   i. Melakukan self assesment penilaian profil risiko stratejik.
8. Risiko Kepatuhan
   a. Mengoptimalkan pengembangan sistem identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan:
      - Pengembangan sistem melalui Enterprise Fraud Management (EFM) yang meliputi

Sistem Identifikasi Monitoring Transaksi, Risk Based Approach (RBA), Sanction & PEP Screening
- Enhancement Sistem Pelaporan Cash Transaction Report (CTR)
- Optimalisasi sistem informasi data nasabah Walk In Customer (WIC) yang bertransaksi di atas 100 juta.

b. Memantau pelaksanaan updating profil nasabah di seluruh unit.
c. Memantau Pelaksanaan kebijakan APU & PPT di seluruh unit termasuk supervisi ke Cabang LN.
d. Melakukan Analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi (PPATK).
e. Melakukan Analisis Laporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sesuai undang-undang atau kriteria yang ditetapkan dan melaporkannya kepada PPATK.
f. Melakukan Analisis Laporan Transaksi Keuangan dalam dan ke Luar Negeri (LTKL) sesuai dengan undang-undang atau kriteria yang ditetapkan dan melaporkannya kepada PPATK.
g. Melakukan review SOP APU & PPT dan Penyempurnaan SOP Custody.
h. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU & PPT dan kewajiban Bank berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada pegawai baru dan eksisting.
i. Membantu pelaksanaan pemeriksaan atau audit khusus PPATK dan BI atau OJK.
j. Melaksanakan supervisi Penerapan APU & PPT di Kantor Cabang DN dan LN.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 setiap Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) dan memiliki Entitas Utama. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Bank, Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Perusahaan Efek dan Perusahaan Pembiayaan.

BNI telah membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan, di mana BNI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama serta memiliki 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life, BNI Securites dan BNI Asset Management, dengan struktur sebagaimana bagan berikut :

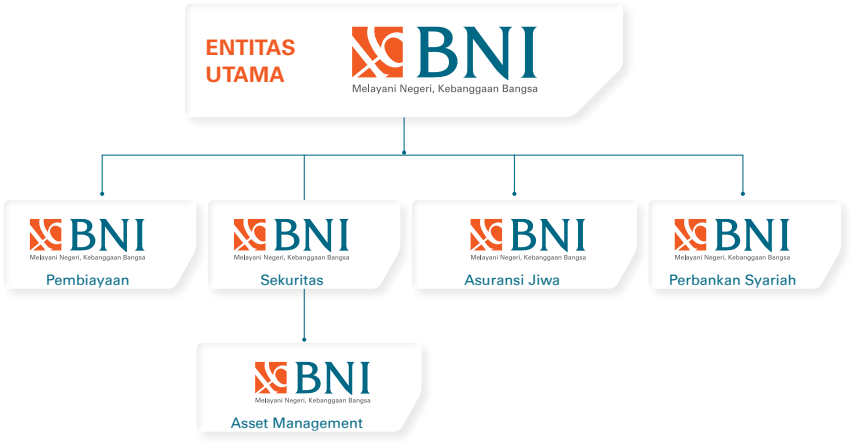

Gambar Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI sebagai Entitas Utama telah melakukan hal-hal berikut:

a. Menetapkan Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
b. Menunjuk Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan (Dir. KN) menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
c. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) di mana tugas, tanggung jawab, keanggotaan (jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan), dan tata cara rapat KMRT diatur dalam SK No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 perihal Penetapan Keanggotaan KMRT.
d. Menyusun Kebijakan Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai pedoman bagi BNI sebagai Entitas Utama dalam mengelola seluruh Risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha BNI maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
e. Menyusun Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi
f. Menyusun Pakta Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
g. Menerapkan *early warning* untuk risiko secara terintegrasi dengan melakukan *assessment Leading Risk Indicator* setiap bulan untuk segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
h. Melakukan *assessment* Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.
i. Menetapkan Limit Risiko secara Terintegrasi antara lain
   - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi
   - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Terintegrasi
   - Liquidity Coverage Ratio (LCR) Terintegrasi.

Dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Manajemen Risiko Bank menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Terintegrasi sekurang-kurangnya adalah :

1. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
3. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan hasil penilaian :
   a. Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Tingkat Risiko masing-masing risiko secara terintegrasi.
   c. Profil Risiko Terintegrasi.
4. Melakukan stress testing.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tentang hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Kepatuhan ditetapkan sebagai Satuan

Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan BNI.
Sebagai pelaksanaan tugas tersebut di atas, Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi membentuk Pengelolaan Tata Kelola Kepatuhan Terintegrasi dan melakukan aktivitas sebagai berikut :

1. Melakukan review kecukupan kebijakan/prosedur di perusahaan anak
2. Analisa Dampak Ketentuan Eksternal
3. Sharing/ Diskusi/ Sosialisasi
4. Berkoordinasi dengan perusahaan anak terkait Pelaksanaan Tata Kelola Kepatuhan Terintegrasi
5. Melakukan assesment terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di perusahaan anak
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan terkait pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan
7. Memberikan rekomendasi saran perbaikan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di perusahaan anak

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Pengawasan Internal ditetapkan sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang memiliki tugas utama :

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern (SKAI) Perusahaan Anak melalui evaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur SKAI Perusahaan Anak, perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan pokok pokok hasil audit serta tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI selaku Entitas Utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern BNI meliputi :

1. Pengendalian stratejik
   Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi ataupun kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, visi dan misi BNI.
2. Pengendalian operasional
   Bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional.
3. Pengendalian pelaporan
   Bertujuan memastikan kualitas setiap informasi/ pelaporan yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal.
4. Pengendalian ketaatan
   Bertujuan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap hukum, peraturan dan perundangan yang terkait dengan operasional.

Pada dasarnya pengendalian intern Bank merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi kecurangan, penyalahgunaan dan kesalahan dalam proses operasional Bank. Terdapat 5 (lima) elemen pengendalian intern yang saling berkaitan dalam Sistem Pengendalian Intern Bank dan sejalan dengan kerangka COSO dan Basel Committee – Internal Control, yaitu :

1. Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian,
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko,
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi,
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tanggal 29-09-2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, di mana pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*) yang bertujuan untuk menjamin:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
   Untuk menjamin semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas pengawas bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu
   Untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank
   Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh
   Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai

RUANG LINGKUP SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern BNI, meliputi:

1. Pengendalian Stratejik
   Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi atau kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, visi dan misi BNI.
   a. BNI telah melaksanakan proses pengendalian keuangan sebagaimana yang tertuang dalam strategi map BNI(perspektif finansial) melalui ekspansi bisnis pada pasar yang selektif untuk pertumbuhan berkualitas, menjaga kualitas aset, meningkatkan FBI, memaksimalkan laba dan meningkatkan shareholder value.
   b. Penetapan strategi BNI telah mempertimbangkan dampak permodalan BNI melalui penilaian dan pengukuran risiko pasar untuk perhitungan Kecukupan Perhitungan Modal Minimum (KPMM) dan perhitungan risiko pasar secara day to day activities dan penentuan limit risiko pasar.
   c. Penilaian/pengukuran risiko stratejik menggunakan indikator/parameter kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis bank terhadap pesaing, dan pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Pengendalian Operasional
   Bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional.
   a. BNI telah melengkapi kebijakan/ standar operating prosedur/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang memuat prosedur kerja setiap transaksi operasional BNI termasuk produk/aktivitas baru dan managing change serta mitigasi risiko operasional terkaitnya.
   b. Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional di BNI dilakukan melalui

koordinasi antara unit bisnis dengan unit penunjang secara berjenjang, yaitu
1. Penyampaian laporan eksposur risiko secara periodik/insidentil kepada Divisi Manajemen Risiko Bank (laporan Lost Event setiap bulan dan laporan Self Assessment setiap triwulan).
2. Memastikan pengelolaan risiko berada di masing-masing unit bisnis (risk taking unit/risk owner), sehingga harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada transaksi/ aktivitas secara harian.

c. Pengendalian risiko operasional BNI juga mencakup prosedur rencana kelangsungan usaha (Business Continuity Plan/BCP) yang merupakan mekanisme formal/ rencana yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadinya gangguan atau bencana.

d. Struktur organisasi BNI telah dilengkapi dengan unit pengawasan/pengendalian, yaitu:
1. Pemisahan fungsi untuk menghindari pemberian wewenang dan tanggungjawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).
2. Supervisor yang berfungsi melakukan pengawasan kontrol internal di seluruh unit kerja (cabang, sentra, wilayah, divisi/ unit/satuan di kantor pusat).
3. Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Kepatuhan.
4. Satuan Pengawasan Internal yang independen terhadap risk taking unityang menilai kecukupan dan efektivitas risk management, internal control dan governance process melalui pelaksanaan audit/konsultasi.

3. Pengendalian Pelaporan
Bertujuan untuk memastikan kualitas setiap informasi/pelaporan yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal, melalui tersedianya sistem akuntansi yang handal, sistem informasi, mekanisme saluran komunikasi dan mekanisme pelaporan risiko.

4. Pengendalian Ketaatan
Bertujuan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap hukum, peraturan dan perundangan yang terkait dengan operasional.

a. Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui tindakan yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan regulator (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan) serta peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan, telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit yang independen terhadap satuan kerja operasional.

STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Three Lines of Defense yang terdapat pada struktur pengendalian intern, merupakan pemisahan fungsi dalam 3 (tiga) garda di mana fungsinya melekat pada masing-masing unit secara independen serta berperan dalam platform Enterprise Risk Management untuk menciptakanGood Corporate Governance di BNI.
Pemantauan aktivitas bank pada unit bisnis maupun unit fungsional di BNI dilakukan melalui three lines of defense, yaitu:

1. *Day to day control (first line of defense)*
RiskTaking Unit sebagai Risk Owner melakukan pengelolaan risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya masing-masing (day to day risk management & control).
2. *Permanent Control (second line of defense)*
Merupakan unit fungsional yang bertanggungjawab dan memastikan bahwa kerangka kerja, kebijakan dan limit dalam rangka mendukung unit bisnis, sekaligus memantau dan mengelola risiko yang muncul di RiskTaking Unit. Risk Control Unit menyusun framework, kebijakan prinsip dan metodologi pengelolaan risiko.

Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) melakukan pemantauan antara lain melalui penetapan limit-limit risiko serta membandingkan dengan realisasinya, pemantauan risiko-risiko yang meningkat secara signifkan melalui Internal Risk Report dan Profil Risiko.

Second Line of defense di BNI dilakukan oleh Divisi Tata Kelola Kebijakan, Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan serta Divisi Kepatuhan.

3. *Periodic Control (third line of defense)*
   Risk Assurance Unit menilai secara independen terhadap efektivitas proses penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern dengan mengacu peraturan yang berlaku baik ketentuan eksternal maupun internal dan telah sesuai dengan prinsip GCG.

   Fungsi ini dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan eksternal auditor secara periodik di mana laporan hasil audit SPI disampaikan langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Di samping itu, laporan hasil audit disampaikan ke Direktur Kepatuhan, Direktur Sektor (Direktur Pembina) serta manajemen lini secara periodik.

   Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Struktur Pengendalian Intern, yang dituangkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

   Penetapan wewenang, fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang diatur pada kebijakan dan prosedur masing-masing pihak yang terlibat, dimulai dari jenjang yang tertinggi sampai jenjang terendah dan menggambarkan pelaksanaan pengendalian yang melekat pada setiap Divisi/Unit/Satuan.

   a. Dewan Komisaris
      Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dijalankan melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Risk Control Unit dan Risk Assurance Unit.
   b. Direksi
      Dalam menjalanan tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi dibantu oleh Komite Risiko & Kapital, Komite Manajemen Teknologi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Performance Management.
      Direksi memiliki akuntabilitas langsung terhadap Risk Assurance Unit (Satuan Pengawasan Internal).
   c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Divisi/ Unit/Satuan ditetapkan pada Kebijakan dan Prosedur organisasi masing-masing Divisi/ Unit/Satuan.

BNI telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan bank, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha bank dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia dan mengacu pada best practice yang ada.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian intern di BNI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

Risk Taking Unit or 1st Line of Defense	Risk Control Unit or 2nd Line of Defense	Risk Assurance Unit or 3rd Line of Defense
Risk Owner, bertanggungjawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (Day to day risk management & control)	Risk Control, bertanggungjawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko Bank	Risk Assurance, bertanggungjawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern
» Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya » Identifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd line of defense.	» Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits » Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko » Sebagai risk oversight unit, melakukan agregasi dan pelaporan risiko secara keseluruhan. » Advice atau rekomendasi ke 1st line defense dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan	» Melakukan audit intern secara independen dan periodic terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. » Menyusun rekomendasi/ corrective action dan memonitor pelaksanaannya. » Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan key stake holder sesuai kewenangan

Pemilik Risiko (*Risk Owner*) sebagai *first line of defense/Risk Taking Unit* melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya secara harian (*day to day)*.

Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/Risk Control Unit* yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.

Satuan Pengawasan Internal bertindak sebagai *third line of defense/Risk Assurance Unit*, yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas menilai secara independen kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari *regulator*.

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian internal Bank telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) di tahun 2013. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemonitoran.

Kelima unsur pengendalian internal menurut COSO sejalan dengan Elemen Sistem Pengendalian Internal Bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tanggal 29 September 2003.

Adapun Implementasi pengendalian internal di Bank BNI yang mencakup elemen-elemen utama di atas telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian
   Elemen lingkungan pengendalian di Bank BNI diwujudkan dalam bentuk pengawasan manajemen dan budaya pengendalian, di mana ruang lingkup pengendalian dilakukan baik di seluruh tingkatan, yaitu pengendalian tingkat aktivitas maupun pengendalian tingkat entitas.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
   Risiko-risiko yang material dan memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan Bank telah diidentifikasi dan diukur secara berkelanjutan oleh seluruh unit.
   Proses identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi 8 (delapan) risiko, yaitu:
   a. Risiko Kredit
   b. Risiko Pasar
   c. Risiko Operasional
   d. Risiko Likuiditas
   e. Risiko Reputasi
   f. Risiko Hukum
   g. Risiko Stratejik
   h. Risiko Kepatuhan

   Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola dan dilaksanakan pada seluruh tingkatanunit operasional, termasuk di dalamnya proses identifikasi, analisis dan penilaian risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan Bank.

   Mekanisme pembuatan dan penyampaian laporan profil risiko dituangkan dalam kebijakan dan prosedur profil risiko, di samping itu penilaian risiko terhadap seluruh produk/aktivitas baru melalui mekanisme persetujuan produk dan aktivitas baru.
3. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian meliputi:
   a. Aktivitas pengendalian secara umum telah melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi, yang disusun untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan dan tindakan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi telah dilakukan.
   b. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi, yang sekurang-kurangnya meliputi:
      i. Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
      Direksi aktif meminta presentasi dan laporan kinerja secara berkala, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan bank terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan harus sesuai dengan

kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tingkat dan jen is risiko yang secara maksimum ditetapkan (*risk tolerance*) dan penetapan limit.

ii. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Reviews*)
Kaji ulang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal secara periodik.

iii. Pengendalian Sistem Informasi
Mencakup verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi dan otorisasi, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

iv. Pengendalian Aset Fisik
Aktivitas pengendalian mencakup pengamanan aset, membatasi akses terhadap komputer dan file data.

v. Dokumentasi, mencakup dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.

c. Kegiatan pengendalian sesuai jenis risiko
Aktivitas pengendalian telah dituangkan dalam dokumen kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko-risiko (dhi. Risiko pasar, likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi dan stratejik).

4. Informasi dan Komunikasi
Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, meliputi:

a. Sistem Akuntansi
Mencakup metode, catatan dan proses rekonsiliasi data akunting dengan sistem informasi.

b. Sistem Informasi
BNI telah melakukan pengendalian risiko-risiko yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya gangguan pada usaha dan kerugian potensial, meliputi:

i. Pengendalian yang berhubungan dengan komputer seperti *mainframe*, *client server*. *workstation*yang memastikan operasional berjalan dengan semestinya meliputi prosedur *back up* dan penyelamatan data (*data recovery*), kebijakan perolehan dan pengembangan perangkat lunak, prosedur pemeliharaan dan pengendalian keamanan akses (*physical*/*logical*).

ii. Pengendalian atas aplikasi termasuk kesesuaian pada ketentuan dan ketepatan data yang diproses, prosedur validasi untuk pencatatan data, prosedur pengendalian dan otorisasi akses serta pengamanan hal-hal yang dikecualikan atau menyimpang.

5. BNI telah memiliki saluran komunikasi untuk memastikan semua pegawai memahami, mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

a. Tersedianya jalur komunikasi bagi pegawai untuk melaporkan tindakan yang menyimpang antara lain melalui *Whitsle Blowing System*.

b. Masukan karyawan diakomodasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan perbaikan, antara lain melalui survey karyawan dan *employee engagement survey*.

c. Komunikasi lintas unit dilaksanakan secara efektif.

d. Jalur komunikasi yang terbuka dan efektif dengan nasabah dan pihak eksternal lainnya.

e. Ketepatan waktu *follow up management* terhadap komunikasi yang diperoleh dari nasabah, vendor, regulator dan pihak eksternal lainnya.

6. BNI telah memiliki mekanisme pelaporan risiko yang handal, tepat waktu dan mudah diakses, meliputi: penjelasan secara berkala kepada analis dan lembaga pemeringkat; laporan kepada Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko per triwulan; penyampaian informasi kepada Direksi mengenai total risiko dan konsentrasi per jenis risiko, hasil *stress test*, penjelasan mengenai risiko dan perkembangan pasar dan ekonomi yang relevan sekurang-kurangnya secara bulanan; laporan pemantauan posisi dan konsentrasi risiko manajemen lini dan laporan posisi risiko *risk owner*.

7. Kegiatan Pemantauan
   Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern yang berupa:
   a. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan oleh audit internal.
      Aktivitas pemantauan (evaluasi) terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Intern dilakukan berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern maupun ekstern sehingga dapat meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern dan efektivitasnya. Aktivitas pemantauan (evaluasi) terhadap Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara berkala atau insidentil oleh SPI.

      Fungsi SPI telah independen terhadap fungsi yang menjalankan aktivitas harian dan memiliki akses terhadap semua kegiatan operasional. Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern, SPI melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya secara langsung ke Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
   b. Pengawasan dari eksternal (OJK, BPK dan Akuntan Publik).
      Tingkat pengawasan terhadap operasional dilakukan secara berjenjang termasuk pengawasan oleh pihak ekstern yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia sebagai Regulator dan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik dan BPK).

      Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawas, mencakup:
      i. Kewenangan dalam mengatur perizinan (*power to lisence*)
      ii. Kewenangan dalam membuat peraturan (*power to regulate*)
      iii. Kewenangan dalam mengawasi (*power to control*)
      iv. Kewenangan dalam menetapkan dan mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

      Disisi lain, BNI juga wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara periodik dan menyampaikan ke Bapepam. Efektivitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal dievaluasi oleh Komite Audit. Komite Audit juga menelaah independensi dan objektivitas auditor eksternal serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.

Fungsi Kepatuhan

BNI merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas berdasarkan prinsip kepercayaan, untuk mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan diperlukan landasan *good corporate governance* yang kuat serta penerapan prinsip-prinsip *prudential banking* yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan kepatuhan bank.

Berangkat dari kesadaran di atas, maka BNI telah menargetkan salah satu sasaran perseroan dalam misi kelima perusahaan yakni "Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri". Berdasarkan misi tersebut perseroan, pelaksana kepatuhan tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga suatu kebutuhan organisasi. Dengan demikian kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya *(culture)* yang terinternalisasi dan terorganisasi.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

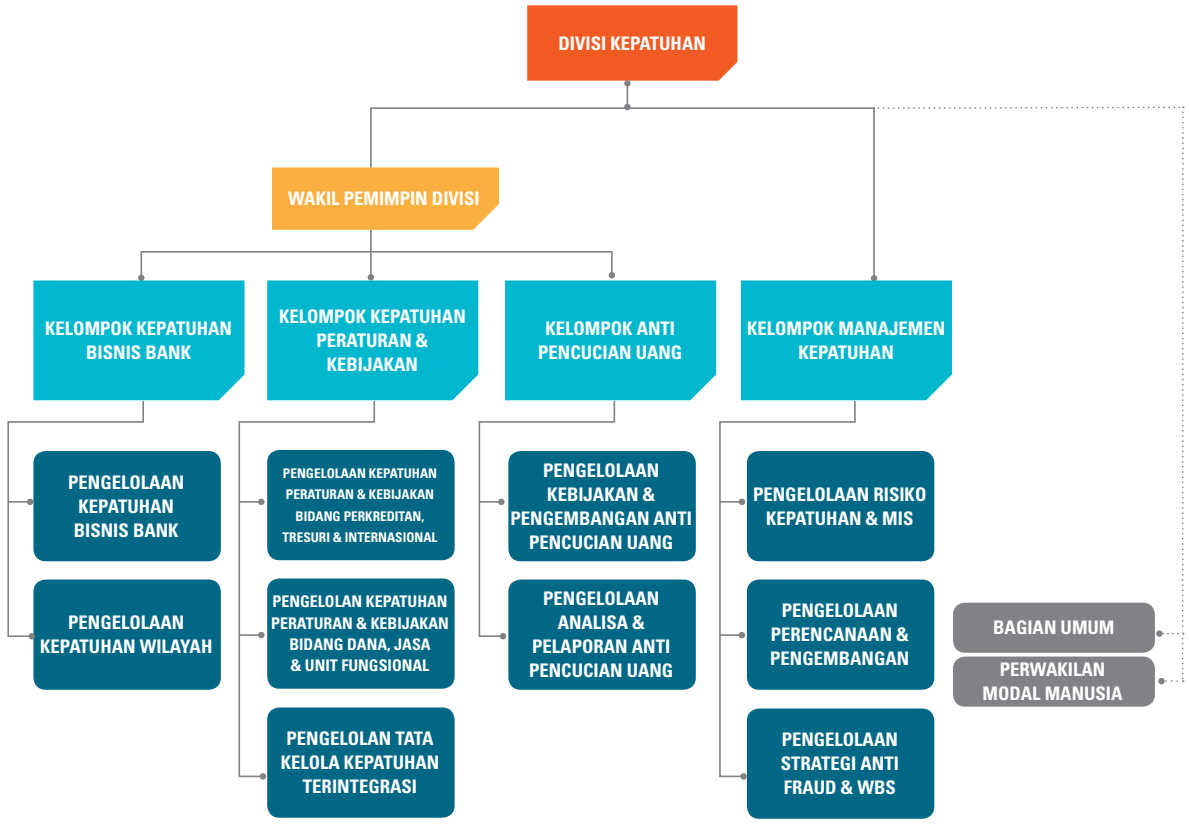

Dalam pelaksanaan kepatuhan, BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi Kepatuhan sebagai pelaksana fungsi kepatuhan. Selain hal tersebut, Dewan Komisaris BNI juga terlibat melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kepatuhan bank.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS TERHADAP FUNGSI

KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris serta pemenuhan PBI terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dilaksanakan dengan cara:

1. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.

Dewan Komisaris BNI secara langsung ataupun melalui Komite di bawah Komisaris, secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran perbaikan melalui sarana pertemuan atau melalui laporan berkala, seperti:

3. Pertemuan berkala Dewan Komisaris dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
4. Pertemuan berkala Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/atau Komite Tata Kelola Terintegrasi) dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau Divisi Kepatuhan;
5. Laporan yang disampaikan secara berkala antara lain Laporan Kepatuhan, Laporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Laporan terkait pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Laporan uji kepatuhan terhadap keputusan Rapat Direksi, dan Laporan penerapan Strategi Anti Fraud.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI saat ini adalah Sdr. Imam Budi Sarjito selaku Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI. Pengangkatan dan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, ketentuan Bank Umum, ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)*, serta ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Perbankan, yang antara lain mengatur:

1. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Melalui surat OJK No. SR-98/D.03/2015 tanggal 22 Mei 2015, OJK menyetujui pengangkatan Sdr. Imam Budi Sarjito selaku Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI.
2. Wajib memenuhi persyaratan independensi, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dilarang dijabat atau memanfaatkan tenaga kerja asing.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
6. Tidak membawahkan fungsi-fungsi: bisnis operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan bank, treasury, keuangan, akuntansi, logistik, pengadaan, teknologi informasi dan audit intern. Berdasarkan struktur organisasi BNI yang berlaku bahwa Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI membawahi organisasi sebagai berikut:
   a. Divisi Kepatuhan;
   b. Divisi Hukum;
   c. Divisi Manajemen Risiko Bank; dan
   d. Divisi Tata Kelola Kebijakan.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan

ketentuan OJK, Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
8. selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama atau Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

PROFIL KEPALA FUNGSI KEPATUHAN

Pemimpin Divisi Kepatuhan saat ini adalah Sdr. Hery Wibowo. Dalam menentukan dan menetapkan Pemimpin Divisi Kepatuhan manajemen senantiasa memperhatikan syarat minimum sebagai berikut.
1. Memenuhi persyaratan independensi.
2. Menguasai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan *(compliance culture)*.

Hery Wibowo (03 November 2014 – 31 Desember 2016)	Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar S1 Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1992). Memimpin Divisi Kepatuhan sejak 03 November 2014 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Head of Network Services di Kantor Wilayah Jakarta BSD mulai 31 Januari 2013 sd 02 November 2014.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai SK DIR No. KP/431/DIR/R tanggal 28 September 2015, tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan secara garis besar terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut.
1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan;
2. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU dan PPT;
3. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas implementasi Strategi Anti Fraud dan Whistleblowing System (WBS);
4. Pelaksana Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka menjadikan Divisi Kepatuhan sebagai strategic partner bagi setiap lini organisasi maka SDM Kepatuhan juga terus ditingkatkan melalui beberapa uji kompetensi (sertifikasi)/seminar/pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti:
1. Seminar "Implementing an Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Service Industry";
2. Seminar Sehari Manajemen Anti Fraud Perusahaan 2016 di Tengah Pelemahan Ekonomi.
3. Digitalisasi Anti Financial Crime Compliance Seminar.
4. ASEAN and South Asia Correspondent Banking Regional (Workshop – Financial Crime

Compliance Academy).
5. Seminar Nasional Menyambut UU Tax Amnesty.
6. Kegiatan 2nd Counter-Terrorism Financing Summit.
7. Revisit Enterprise Risk Management and Learning Best Practies of Credit Risk Management;
8. Sertifikasi Compliance dan Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT);
9. Sertifikasi Manajemen Risiko;
10. Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE);
11. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia – IAPI);

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2016

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
   Dalam rangka mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan di seluruh unit organisasi, BNI telah menyusun program Compliance Awareness, Compliance Training dan Uji Pemahaman terhadap ketentuan internal yang bertujuan agar setiap pegawai memiliki kesadaran, pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dalam semua aspek kegiatan operasional.
   Untuk mengukur terwujudnya budaya kepatuhan, Divisi Kepatuhan telah mengembangkan suatu tools yaitu Compliance Index (CIX) dan pelaksanaan Komite Kepatuhan.
   a. Compliance Awareness Program
      Compliance Awareness bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pentingnya penerapan kepatuhan, pemahaman terhadap regulasi perbankan, penerapan program APU-PPT, risiko-risiko kepatuhan, pelaksanaan startegi anti fraud serta fraud prevention. Media untuk compliance awareness berupa sosialisasi/ training klasikal, e-learning, video conference serta media internal (BNI Forum dan Portal KnowMe).
      Di tahun 2016 Divisi Kepatuhan telah mengadakan sosialisasi dengan materi antara lain: Fraud Awareness, Credit Compliance Review, Compliance Index (CIX), Enterprise Fraud Management (EFM), Compliance Culture Awareness, Ketentuan/Regulasi dari otoritas (POJK dan SEOJK), serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sosialisasi tersebut disampaikan kepada segenap pegawai dan unit organisasi yang terkait.
   b. Uji Pemahaman SOP
      Dalam rangka meningkatkan dan memastikan terlaksananya budaya kepatuhan maka Divisi Kepatuhan bersama dengan unit terkait mengadakan uji pemahaman pegawai terhadap kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas perbankan.
      Penentuan SOP dan pegawai yang akan di uji ditentukan secara risk based, baik berdasarkan review Divisi Kepatuhan, temuan dari SPI ataupun penyimpangan/fraud yang terjadi.
   c. *Compliance Index* (CIX) merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepatuhan suatu unit yang diukur berdasarkan parameter dan kriteria tertentu terkait dengan kepatuhan, yaitu frekuensi terjadinya Fraud dan Kasus Kelalaian berikut nominal kerugiannya, frekuensi Sanksi Eksternal berikut nominal denda yang dikenakan, serta tingkat penyelesaian tindak lanjut atas komitmen terhadap hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
   Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Divisi Kepatuhan aktif dalam meminimalkan tingkat risiko kepatuhan.
   Penilaian profil risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan

Manajemen Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system) kepatuhan.

Secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan BNI pada tahun 2016 berada pada level 2 (low to moderate), dengan rincian sebagai berikut:

a. Risiko Inheren BNI pada tahun 2016 BNI berada pada level 2 (low to moderate).
b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level 2 (satisfactory).
c. Upaya perbaikan selalu dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dalam rangka meminimalisir Risiko Kepatuhan antara lain :
d. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif.
e. Mengingatkan unit organisasi yang menjadi unit in charge terhadap pemenuhan kewajiban secara periodik/berkala.
f. Membuat langkah-langkah perbaikan (corrective action) berdasarkan database risiko kepatuhan.
g. Memasukkan sanksi dari regulator/pengawas yang merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan ke dalam *compliance index*, serta menjadikan *compliance index* sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) Divisi Kepatuhan.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah timbulnya risiko kepatuhan serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan maka Divisi Kepatuhan melakukan upaya-upaya preventif *(ex-ante)* dengan melakukan uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:
   a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan *(up-dating)*.
   b. Uji kepatuhan/*review* terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku *(existing)*.
   c. Uji kepatuhan terhadap keputusan Rapat Direksi.
   d. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk/aktivitas baru.
   e. *Compliance checklist* untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
   f. *Compliance checklist* terhadap rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa *bancassurance*.
   g. Uji kepatuhan/*Credit Compliance Review* (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).
   h. Uji kepatuhan/*Procurement Compliance Review* (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.
   i. Uji kepatuhan/*review* terhadap rencana pembukaan dan relokasi kantor bank (kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor fungsional)
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK/BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Untuk mencegah dipergunakannya sistem perbankan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Bank dalam menjalankan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, di mana salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara memadai.

ORGANISASI DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Dalam rangka mendukung penerapan program APU dan PPT, Divisi Kepatuhan ditetapkan sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap penerapan Program APU dan PPT. Divisi Kepatuhan melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI (Direktur Kepatuhan dan Risiko Perseroan).

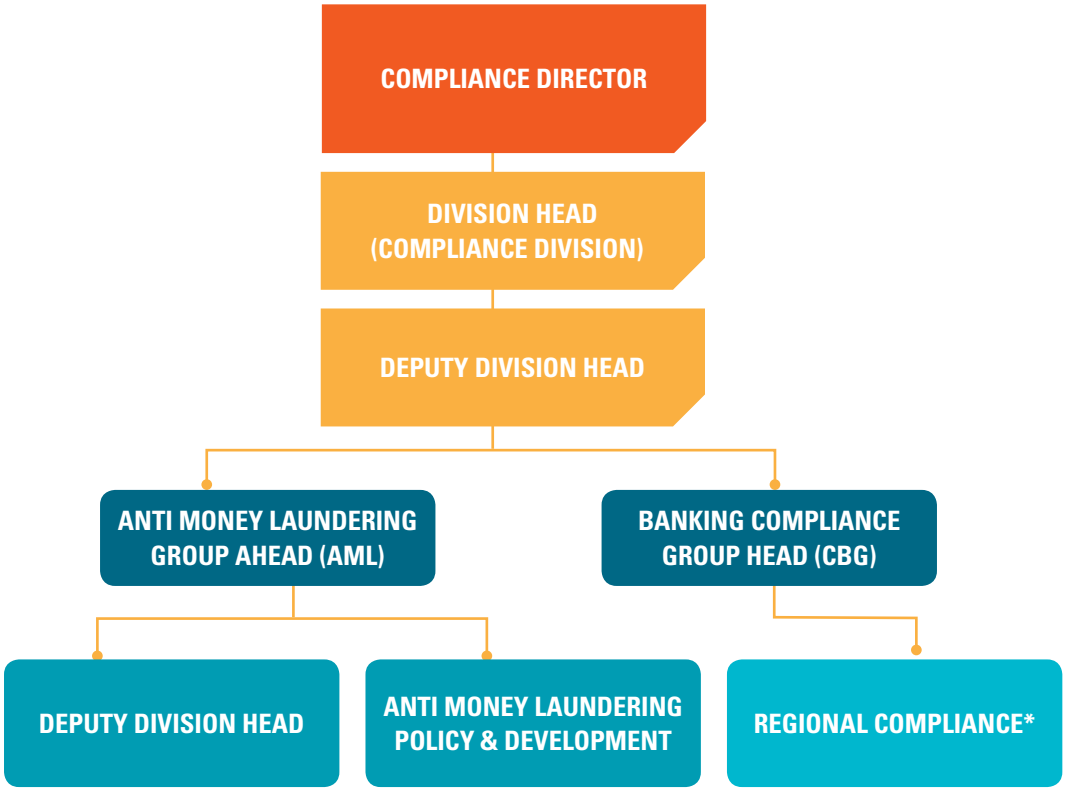

Regional Compliance memiliki fungsi memastikan penerapan APU dan PPT di Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra

PROGRAM DALAM PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

Sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka BNI menerapkan program APU dan PPT melalui:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut.
   a. Persetujuan Direksi mengenai penetapan Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
   b. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan APU dan PPT;
   c. Laporan berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran) terkait kewajiban pelaporan dan implementasi program APU PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
   d. Persetujuan Direksi atas Laporan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah;
   e. Rapat Direksi & Dewan Komisaris untuk membahas pelaksanaan Program APU & PPT.
2. Kecukupan dan efektifitas kebijakan serta prosedur. Divisi Kepatuhan telah menyusun Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT yang secara berkala dilakukan *review/up-dating*/ penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan APU dan PPT, maka disetiap prosedur produk dan aktivitas perbankan diatur pula prosedur pelaksanaan APU-PPT, seperti prosedur *due diligence* untuk masing-masing produk atau aktivitas. Untuk memastikan implementasi Program APU dan PPT telah berjalan sebagaimana mestinya maka dilakukan supervisi oleh Divisi Kepatuhan.
3. Pelaksanaan pengendalian intern. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dalam penerapan APU dan PPT antara lain dilakukan dengan:
   a. dimilikinya kebijakan dan prosedur APU-PPT serta pemantauan internal yang memadai;
   b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT baik melalui *firstline* (*risk taking unit*), *secondline* maupun *thirdline of defense*; dan
   c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.
4. Sistem manajemen informasi. Untuk mengoptimalkan pemantauan transaksi dalam pelaksanaan Program APU dan PPT, BNI memiliki teknologi sistem informasi *Enterprise Fraud Management* (EFM) *System* yang terdiri dari modul: *Anti Money Laundering Detection, Sanction list, Filtering & Screening Terrorist,* PEP *Screening Detection* dan *Customer Due Diligence (CDD) Risk Scoring,* Sistem *Suspect Account to Verify* (SAV) dan selain itu BNI juga telah mengembangkan Sistem Aplikasi *Walk In Customer* (WIC).

   Sistem EFM tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih optimal, khususnya dalam hal pendeteksian/pemantauan transaksi nasabah yang memiliki pola perilaku dan pola transaksi pencucian uang, Sistem SAV untuk mendeteksi transaksi nasabah dengan pola penipuan, sedangkan sistem Aplikasi WIC digunakan untuk memelihara profil WIC.
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. BNI menyelenggarakan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan.

   Metode pelatihan adalah sebagai berikut:
   a. Pelatihan dapat dilakukan secara elekronik / *online* base , maupun melalui tatap muka;
   b. Pelatihan melalui tatap muka, dengan pendekatan yaitu:
      i. dilakukan secara interaktif (misal

workshop), diberikan untuk pegawai yang mendapatkan prioritas secara berkala, dengan topik disesuaikan dengan kebutuhan peserta;

ii. dilakukan secara satu arah (misal seminar) diberikan untuk pegawai yang tidak mendapatkan prioritas, dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan, dengan topik berupa gambaran umum penerapan Program APU dan PPT.

PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT PADA PERUSAHAAN ANAK DAN KANTOR CABANG DI LUAR NEGERI

Sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang memiliki jaringan kantor secara internasional, maka untuk memastikan penerapan APU dan PPT telah berjalan efektif di seluruh jaringan kantor, maka Divisi Kepatuhan juga memantau dan menganalisa penerapan APU dan PPT di:

1. Perusahaan Anak di Luar Negeri;
2. Kantor Cabang Luar Negeri.

APRESIASI EKSTERNAL TERHADAP PROGRAM APU-PPT BNI

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 BNI menerima penghargaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apresiasi tersebut diberikan atas partisipasi aktif BNI dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan upaya-upaya BNI dalam mendukung secara penuh rezim *Anti Money Laundering* serta terkait dengan partisipasi aktif BNI dalam mendukung survey *National Risk Assesment* (NRA) yang dilakukan oleh PPATK.

Code Of Conduct

BNI senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.Untuk mewujudkan hal tersebut, BNI telah memiliki *Code of Conduct* yang dinamakan Kode Etik BNI. Kode Etik BNI ini merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan BNI dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. Kode Etik berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik BNI diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2010 yang merupakan hasil revitalisasi dari *Code of Conduct* sebelumnya (tahun 2001). Kode Etik BNI wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap Insan BNI (Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai BNI) yang ditandai dengan pembubuhan tandatangan oleh segenap Insan BNI pada surat Pernyataan Sikap Insan BNI sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan Kode Etik BNI.

ISI *CODE OF CONDUCT*

Kode Etik BNI terdiri dari 14 butir yang pada prinsipnya mewajibkan segenap Insan BNI untuk:

1. Bertindak Profesional, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja Prinsip 46.
2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada bawahan, atasan, rekan kerja dan mitra kerja untuk melaksanakan Kode Etik BNI.
3. Menjaga hubungan baik antar sesama insan BNI.
4. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan.
5. Menjaga keamanan kerja.
6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan pengadministrasian pekerjaan dengan baik, jujur dan akurat.
8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BNI.
9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami.
10. Bertindak sebagai Narasumber, sepanjang untuk kepentingan BNI.
11. Tidak menjadi anggota dan donatur Partai Politik.
12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar mengenai BNI.
13. Tidak menggunakan aset BNI untuk kepentingan pribadi.
14. Tidak menyalahgunakan Corporate Identity BNI, untuk kepentingan pribadi.

Sampai dengan saat ini, materi Kode Etik tersebut masih cukup revelevan dengan situasi dan kondisi di BNI sera perkembangan regulasi perbankan di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP *CODE OF CONDUCT*

Code of conduct adalah salah satu bentuk komitmen BNI untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja BNI melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Code of conduct berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

PENYEBARLUASAN *CODE OF CONDUCT*

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kode Etik BNI tersebut, telah diterbitkan buku saku Kode Etik BNI dan telah didistribusikan kepada segenap Insan BNI. Selain itu secara berkala dilakukan sosialisasi Kode Etik melalui seminar internal/sosialisasi BNI, internal media BNI (Majalah Sinergi dan website BNI Forum) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai BNI, *sharing session* pada saat bulan mutu yang diselenggarakan setiap bulan di setiap unit organisasi BNI, pelatihan GCG dan Kode

Etik bagi pegawai BNI baik pegawai baru maupun lama serta *coaching* yang dilakukan oleh atasan pegawai. Pelanggaran terhadap Kode Etik BNI akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku di BNI.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN *CODE OF CONDUCT*

Penerapan dan penegakan Kode Etik sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi GCG senantiasa dilakukan melalui program *awareness* dan internalisasi. BNI berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan Perseroan di semua tingkatan atau struktur organisasi mulai dari level dasar sampai kepada *top management*. Untuk itu keberadaan Kode Etik menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Penegakan terhadap Kode Etik dilakukan dengan upaya pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan *Kode Etik* dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik yang diatur tersendiri dalam mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistlebloowing System*). Setiap insan BNI dapat melaporkan penyimpangan atas Kode Etik tersebut dan identitas pelapor akan dilindungi. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

PENGAWASAN IMPLEMENTASI KODE ETIK BNI

Pengawasan implementasi Kode Etik BNI dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perseroan dan Kesekretariatan pada bagian Kelompok Pemantauan GCG, yang salah satu fungsinya adalah memantau implementasi Kode Etik. Namun demikian pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik tersebut juga dilakukan oleh Divisi Kepatuhan untuk memastikan telah dipenuhinya kepatuhan dan kewajiban terhadap Kode Etik BNI, serta proses penegakan kepatuhan terhadap kasus-kasus pelanggaran Kode Etik BNI.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Insan BNI dalam tingkatan apapun apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik BNI maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut adalah sebagai berikut.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pokok	Jenis Pelanggaran
Surat Pembinaan (SP)	Pelanggaran Tata Tertib dan Ketertiban Lingkungan Kerja
Surat Teguran (STE)	Pelanggaran Tata Tertib dan Ketertiban Lingkungan Kerja Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajiban
Surat Teguran Keras (STK)	Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajiban Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur *fraud*/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi
Demosi	Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajibanyang mengandung unsur kesengajaan Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur *fraud*/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Pelanggaran Sistem Prosedur/Kewajibanyang mengandung unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian Pelanggaran berat yang tidak memenuhi unsur *fraud*/kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Jumlah pelanggaran kode etik dapat dilihat pada jumlah pengaduan dan tindak lanjut *Whistleblowing System*.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan BNI diidentikkan dengan "PRINSIP 46" yang merupakan tuntutan Perilaku Insan BNI, terdiri dari:

4 Nilai Budaya Kerja :
- Profesionalisme
- Integritas
- Orientasi Pelanggan
- Perbaikan Tiada Henti

6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI:
- Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
- Jujur, Tulus dan Ikhlas
- Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
- Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
- Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
- Kreatif dan Inovatif

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, 6 perilaku Utama Insan BNI adalah:

4 Nilai Budaya Kerja BNI	6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI
Profesionalism	Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan HAsil Terbaik
Integritas	Jujur, tulus dan ikhlas Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
Orientasi Pelanggan	Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
Perbaikan Tiada Henti	Senantiasa Melakukan Penyempurnaan Kreatif dan Inovatif

Gratifikasi

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Kode Etik (*Code of Conduct*) di BNI salah satunya adalah dengan penerapan Pengendalian Gratifikasi. Sebagai tahap awal dalam penerapan program Pengendalian Gratifikasi, telah dilakukan penandatanganan "Komitmen Pengendalian Gratifikasi" oleh Direktur Utama yang disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Ketua KPK) pada tanggal 17 Oktober 2016, dan dihadiri oleh Senior Manager dan Dewan Komisaris BNI, serta Nasabah, Debitur, dan Notaris.

Dalam rangka menindaklanjuti "Komitmen Pengendalian Gratifikasi", maka dilakukan penyusunan *draft* Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi/UPG yang akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas dilingkungan kerja yang terindikasi gratifikasi, baik dari sisi penerimaan gratifikasi maupun pemberian gratifikasi.

SOSIALISASI GRATIFIKASI

Sosialisasi terkait Gratifikasi telah dilakukan, melalui penayangan artikel maupun informasi lain terkait dengan Gratifikasi pada Website bni.co.id, media cetak (Harian Kompas), serta media internal BNI al. BNI Forum (Pelaporan Penerimaan Gratifikasi), Surat Edaran kepada segenap Divisi/Satuan/Unit, Leaflet mengenai Gratifikasi, serta melalui sarana e-learning (berupa *case study*).

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2016

Pada tahun 2016, telah terdapat 2 (dua) laporan penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh Pelapor (dhi. pegawai BNI) kepada Divisi Kepatuhan, yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK. Laporan penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh Pelapor telah diteruskan kepada KPK kurang dari 30 hari kerja.

Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct* dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perseroan telah membangun WBS.

KEBERADAAN DAN TUJUAN WBS

Implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) dengan nama "WBS to CEO" merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image BNI. Pengelolaan WBS dilakukan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte.

Dengan demikian, WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif Insan BNI untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI.

PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

Penanggung Jawab WBS di BNI adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggung Jawab WBS, Direktur Utama menunjuk Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.

Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di BNI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS BNI yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk menjalankan aktivitas harian WBS. Penunjukan/pengangkatan Petugas WBS BNI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan atas usul dari Pengelola WBS.

Tugas dan Wewenang Pengelola WBS

1. Tugas Pengelola WBS
   a. Mengelola pelaksanaan WBS.
   b. Mengkoordinasikan penanganan tindaklanjut atas laporan yang masuk melalui WBS
   c. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun diluar Kantor Pusat.
   d. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
   e. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektifitas WBS BNI
2. Wewenang Pengelola WBS adalah:
   a. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan.
   b. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS
   c. Memberikan usulan kepada kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor.
   d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

BAGAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

No	LANGKAH KERJA	Pelapor	Tim WBS Konsultan	KPN	SPI
1.	Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS.				
2.	Laporan dari pelapor diterima oleh tim WBS konsultan.				
3.	Tim WBS Konsultan melakukan analisa apakah laporan termasuk dalam objek WBS atau bukan (jika bukan masuk ke dalam objek WBS, laporan tersebut akan diteruskan kepada Petugas WBS BNI untuk kemudian diteruskan kepada unit yang berkepentingan).				
4	Apabila merupakan objek WBS maka Tim WBS konsultan akan menginput ke *e–room*.				
5	Tim WBS Konsultan mengirimkan email pemberitahuan ke Pengelola WBS dan Petugas WBS BNI mengenai adanya laporan baru dalam *e-room*.				
6	Petugas WBS BNI melakukan kajian/analisa awal terhadap laporan yang masuk serta dapat menghubungi unit terkait, Tim Konsultan WBS, maupun Pelapor (*full disclosure*) untuk mengumpulkan informasi dan data pendukung tambahan (bila ada dan memungkinkan).				
7	Petugas WBS BNI meminta keputusan dari yang berwenang untuk tindak lanjut laporan WBS tsb.				
8	Keputusan dari yang berwenang melalui petugas WBS untuk menindaklanjuti/tidak menindaklanjuti laporan tersebut.				
9	Petugas WBS melakukan pengkinian di e-room atas keputusan yang berwenang atas laporan tersebut.				
10	Apabila keputusan yang berwenang agar ditindaklanjuti, maka Petugas WBS akan menerusakan ke SPI untuk melakukan penelitian.				
11	SPI melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan kepada Petugas WBS.				
12	Petugas WBS mengupdate perkembangan penelitian dari SPI ke *e-room*.				

BAGAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

No	LANGKAH KERJA	Pelapor	Tim WBS Konsultan	KPN	SPI
1.	Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS.				
2.	Laporan dari pelapor diterima oleh tim WBS konsultan.				
3.	Tim WBS Konsultan melakukan analisa apakah laporan termasuk dalam objek WBS atau bukan (jika bukan masuk ke dalam objek WBS, laporan tersebut akan diteruskan kepada Petugas WBS BNI untuk kemudian diteruskan kepada unit yang berkepentingan).				
4	Apabila merupakan objek WBS maka Tim WBS konsultan akan menginput ke e–room.				
5	Tim WBS Konsultan mengirimkan email pemberitahuan ke Pengelola WBS dan Petugas WBS BNI mengenai adanya laporan baru dalam e-room.				
6	Petugas WBS BNI melakukan kajian/analisa awal terhadap laporan yang masuk serta dapat menghubungi unit terkait, Tim Konsultan WBS, maupun Pelapor (full disclosure) untuk mengumpulkan informasi dan data pendukung tambahan (bila ada dan memungkinkan).				
7	Petugas WBS BNI meminta keputusan dari yang berwenang untuk tindak lanjut laporan WBS tsb.				
8	Keputusan dari yang berwenang melalui petugas WBS untuk menindaklanjuti/tidak menindaklanjuti laporan tersebut.				
9	Petugas WBS melakukan pengkinian di e-room atas keputusan yang berwenang atas laporan tersebut.				
10	Apabila keputusan yang berwenang agar ditindaklanjuti, maka Petugas WBS akan menerusakan ke SPI untuk melakukan penelitian.				
11	SPI melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan kepada Petugas WBS.				
12	Petugas WBS mengupdate perkembangan penelitian dari SPI ke e-room				

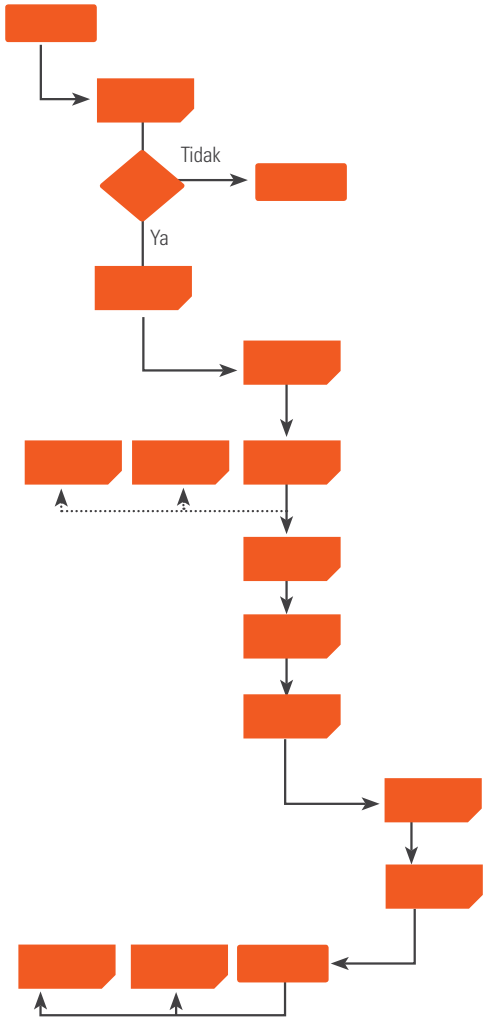

MEDIA PELAPORAN

Pelaporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana :

Telepon : 021-57853377
Email : bni-transparan@tipoffs.com.sg
Surat : BNI Transparan PO BOX 2646/JKP 10026
Website : http://bni-transparan.tipoffs.com.sg
SMS : Nomor (081-1970-1946)

PENANGANAN PENGADUAN

Dalam penanganan pengaduan pelaporan melalui WBS

1. Tim WBS Konsultan menyusun laporan penyingkapan beserta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan laporan pelanggaran yang diterima, selanjutnya di*upload* ke dalam *e-room* yang dipersiapkan khusus untuk BNI paling lambat 1 hari kerja setelah laporan tersebut diterima. Tim WBS konsultan akan mengirimkan e-mail kepada Pengelola WBS BNI dan/atau Petugas WBS BNI yang telah ditunjuk serta anggota e-room lainnya mengenai adanya laporan penyingkapan baru yang masuk ke dalam e-room. Petugas WBS BNI diharapkan untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2. Jangka waktu untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut laporan penyingkapan adalah sebagai berikut:
   a. Tanggapan pertama: paling lambat 15 hari kerja setelah laporan penyingkapan masuk ke *e-room*.
   b. Tanggapan berikutnya: setiap akhir bulan berikutnya setelah tanggapan pertama.
3. Guna menjaga independensi, apabila terdapat laporan tindak pelanggaran yang menyebutkan nama atau melibatkan salah seorang anggota *e-room* maka anggota *e-room* tersebut tidak dapat mengakses *e-room*.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perlindungan utama terhadap Pelapor adalah perlindungan terhadap kerahasiaan identitas dan laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Bentuk perlindungan terhadap Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi antara lain Kontrol Internal/ SPI maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan tindak pelanggaran.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pelaksanaan sosialisasi WBS dilakukan secara berkesinambungan antara lain pelaksanaan pelatihan kepada pegawai baru, sosialisasi melalui video, poster, sms *blast* kepada segenap pegawai serta melalui peran Serikat Pekerja (SP) Pusat untuk membantu mensosialisasikan kepada segenap pegawai di Cabang/Sentra.

BNI akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui WBS sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal itu, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi sebagai berikut.

1. Menyampaikan progress penyelesaian WBS melalui BNI forum;
2. Menyampaikan materi WBS melalui *in-class training* kepada calon pegawai jenjang *Officer Development Program (*ODP) maupun *Assistant Development Program* (ADP);
3. Memasang poster WBS di setiap unit;
4. Mensosialisasikan WBS melalui a.l. BBM *blast* kepada segenap pegawai, media/majalah internal, video WBS;
5. Perluasan pelapor dengan melibatkan pihak eksternal;
6. Penambahan saluran media pelaporan;
7. Sosialisasi ke pihak eksternal melalui perangkat sosialisasi di unit-unit, *website* BNI, pencantuman informasi WBS pada perjanjian-perjanjian dengan pihak-ketiga;
8. Melakukan koordinasi dengan Tim WBS Konsultan secara berkelanjutan.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Laporan yang disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran sebagai berikut:

1. Kecurangan;
   Kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan,

pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan.

2. Pelanggaran peraturan/hukum
   Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
3. Benturan kepentingan
   Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/*outsourcing* (Insan BNI) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis BNI.
4. Penyuapan/gratifikasi
   Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan/wewenang/ tanggung jawabnya di BNI.
5. Kelakuan tidak etis
   Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada *Code of Conduct* BNI.

LAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* 2015

Sampai dengan periode bulan Desember 2016, laporan tindak pelanggaran yang diterima melalui WBS adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) laporan. Laporan tindak pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan proses investigasi yang dilakukan oleh Kontrol Internal (KI) yang bertugas pada unit di mana terjadinya tindak pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, maka perkembangan tindak lanjut laporan WBS sebagai berikut.

Jumlah Pengaduan Dan Tindak Lanjutnya

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

No.	Jenis Tindak Pelanggaran	Jumlah Laporan	Status						
			Dalam Proses	Penyelesaian					
				Terbukti					Tidak cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya
				Review Pendalaman	Proses Sanksi	Teguran	Konseling	Sanksi Adminis tratif	
1.	Benturan kepentingan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kelakuan tidak etis	8	3	0	0	1	2	1	1
3.	Kecurangan	3	0	0	1	0	0	1	1
4.	Penyuapan/ gratifikasi	2	0	1	0	1	0	0	0
5.	Pelanggaran aturan/ hukum	25	3	0	0	2	12	3	5
Total		38	6	1	1	4	14	5	7
*lain-lain		13							

Keterangan : Lain-lain (*) = Di luar ruang lingkup WBS

Sarana pelaporan yang digunakan dalam melaporkan WBS adalah sebagai berikut.

- Email sebanyak 13 (tiga belas) laporan atau sebesar 34,21% dari total laporan WBS.
- *Website* sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan atau sebesar 55,26% dari total laporan WBS.
- *Hot Line* sebanyak 1 (satu) laporan atau masing-masing sebesar 2,63% dari total laporan WBS.
- Sarana surat (PO BOX) masing-masing sebanyak 3 (tiga) laporan atau masing-masing sebesar 7,90% dari total laporan WBS.

Permasalahan Hukum

PERKARA HUKUM

Perkara hukum yang dihadapi BNI untuk periode tahun 2016 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Perkara Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	Klaim
Perkara Carry Over Tahun Sebelumnya	463	63	35
Perkara Baru Di Tahun 2016	159	25	26
Perkara Selesai Di Tahun 2016	83	38	29
Dalam Proses Penyelesaian	539	50	32

1. Sejumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) perkara perdata yang masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari :
   a. 517 perkara perdata, Perkara Perdata merupakan gugatan perdata yang diajukan terhadap BNI antara lain mengenai keberatan/ perlawanan debitur atas pelaksanaan eksekusi/lelang agunan, gugatan pihak ketiga atas jaminan kredit, penguasaan jaminan oleh pihak ketiga, gugatan atas pembebanan bunga dan pinjaman pokok.
   b. 13 perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan
   c. 9 perkara Tata Usaha Negara (TUN).

2. Sejumlah 82 perkara pidana dan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari:
   a. 50 perkara pidana yang terdiri dari perkara pidana terkait kredit sebanyak 30 perkara dan perkara pidana non kredit sebanyak 20 perkara.
   b. 32 klaim yang terdiri dari klaim kredit sebanyak 8 klaim dan klaim non kredit sebanyak 24 klaim.

3. Sejumlah 2 perkara di bidang pajak yang masih dalam proses penyelesaian, yakni:
   a. 1 perkara terkait piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 69238/PP/M. IIA/15/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang amarnya mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh BNI.
   b. 1 perkara terkait banding PPh Badan (PP 77/2013), BNI telah mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Juni 2016. Saat ini perkara masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak.

Dari sejumlah 83 (delapan puluh tiga) perkara perdata yang diselesaikan pada periode tahun 2016, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara selesai dengan amar putusan BNI dimenangkan, sedangkan terdapat 10 (sepuluh) perkara lainnya BNI dikalahkan namun tidak bersifat materiil.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Kebijakan/policy maupun SOP BNI cukup memadai dan prudent dalam melindungi kepentingan bisnis BNI. Sehingga, seluruh permasalahan hukum tersebut di atas baik perdata maupun pidana, tidak memberikan dampak finansial yang signifikan terhadap BNI. Hal tersebut tercermin dari Profil Risiko Hukum selama periode 2016 yang secara konsisten berada pada predikat Low To Moderate

UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO HUKUM

BNI selalu berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Secara konsisten melaksanakan program Legal Risk Awareness sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas pemahaman aspek hukum transaksi

perbankan bagi seluruh pegawai maupun calon pegawai secara berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan bisnis BNI.
2. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas advis hukum pada Satuan Kerja Hukum untuk mendukung kelancaran transaksi yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan supervisi advis hukum kepada segenap Satuan Kerja Hukum di BNI.
3. Melaksanakan Program Legal Review Perjanjian yang dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan risiko hukum melalui proses identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan pemantauan guna pengukuran risiko hukum yang dapat timbul dari suatu perjanjian.
4. Secara rutin melakukan koordinasi penanganan perkara dengan seluruh Satuan Kerja Hukum pada seluruh Kantor Wilayah BNI. Hal tersebut di samping sebagai bentuk monitoring atau pemantauan perkara dan penanganannya juga bertujuan untuk menjalankan fungsi supervisi terhadap penanganan perkara di seluruh Satuan Kerja Hukum.
5. Pemberian pelatihan bagi masing-masing pegawai Divisi Hukum disesuaikan dengan Individual Development Plan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi antara lain Analytical Thinking, Consulting Skill dan Legal Knowledge pegawai guna menunjang bisnis BNI.
6. Mengikutsertakan pegawai Divisi Hukum dalam berbagai sertifikasi ataupun pelatihan bekerjasama dengan BNI Corporate University (BNV) maupun lembaga pelatihan eksternal lainnya. Bentuk pelatihan ataupun sertifikasi yang diberikan antara lain berupa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Pendidikan Auditor Hukum, English For Law, program diskusi Participant Active Group serta pelatihan hukum lainnya dalam rangka menciptakan corporate lawyer yang profesional dan kompeten.
7. Menyelenggarakan Sharing Session atau Workshop seputar hukum dengan mengundang pakar hukum, institusi penegak hukum serta lembaga-lembaga terkait antara lain Bareskrim Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PERKARA HUKUM MATERIIL YANG DIHADAPI DIREKTUR DAN DEWAN KOMISARIS

Selama periode tahun 2016, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki perkara hukum penting terkait perdata maupun pidana terkait dengan bisnis BNI.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

No	Pokok Perkara/Gugatan	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Status Penyelesaian	Sanksi administrasi (yang dikenakan kepada Perusahaan, oleh otoritas terkait, pada tahun buku 2016. Jika tidak terdapat, berikan pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi)
1	**Penggugat :** Kang Mui Gek;Vince Ria;Jansen;Pek Yin Ing;Kristian S.;Willem S.;Anthony;Wydiavei;Yong Lai Tjie;Eric;Mangerbang TampubolonNorma T;Lily Jungto;Henny Arlis. **Tergugat :** PT BNI Life Insurance **Yuridiksi kasus :** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara No.342/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst	**POTENTIAL RISK :** Catatan pada tanggal 29 Februari 2016, nilai estimasi gugatan sebagai berikut: **Gugatan materil:** Rp 29.126.533.019 Gugatan imateriil: Rp 6.125.306.604	TINGKAT PENGADILAN NEGERI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No.342/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Juli 2013 menyatakan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT (MEMENANGKAN BNI LIFE). TINGKAT BANDING Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Para Penggugat (Kang Mui Gek CS) telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan perkara sudah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (MEMENANGKAN BNI LIFE).	NIHIL
2	**Diajukan oleh :** PT BNI Life Insurance **Kepada :** Jiwasraya **Yuridiksi perkara :** Jakarta **Estimasi nilai kerugian :** Materil : Rp 1.292.275.825,-	POTENTIAL RISK Rp 1.292.275.825	Sehubungan dengan ini , BNI Life telah mengajukan permintaan untuk penyelesaian kadaluarsa klaim dan AJK premi untuk Jiwasraya , tapi berdasarkan informasi dari tim Bancassurance ada pengganti orang incharge yang menangani ini , sehingga belum ada tanggapan lebih lanjut untuk Surat BNI kordinasi dengan unit Bancass untuk mengingatkan Jiwasraya untuk merespon surat tersebut.	NIHIL

Pengungkapan Hal Penting

Sejalan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG, maka Perseroan yang memandang perlu untuk mengungkapkan hal-hal sebagaimana berikut.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, lengkap, utuh, kini dan cukup akurat sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
Transparansi Informasi Produk

1. Berkenaan dengan transparansi informasi produk Bank:
   a. Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
   b. Penerapan transparansi informasi produk Bank dilakukan dengan informasi secara tertulis melalui Buku Petunjuk Layanan/ staterkit, Brosur/leaflet, Ketentuan Pembukaan Rekening yang harus dibaca dan ditandatangani nasabah pada saat membuka rekening, maupun melalui sarana lain seperti website BNI, maupun pengumuman yang dipasang/disebarkan di kantor-kantor Cabang BNI. Selain informasi secara tertulis Petugas Bank akan menjelaskan informasi produk kepada nasabah pada saat menawarkan produk/jasa Bank.
   c. Di samping itu informasi produk-produk consumer banking telah disampaikan secara transparan melalui media cetak, media elektronik dan billboard termasuk media internet.
   d. Melalui berbagai sarana yang mudah diakses oleh nasabah, Bank telah menyampaikan informasi dalam hal terdapat perubahan syarat dan ketentuan penggunan produk Bank kepada nasabah. Bank juga memiliki layanan informasi produk 24 jam melalui BNI Call.
2. Terkait dengan penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak Bank, telah dicantumkan di dalam Syarat dan Ketentuan pada formulir Pembukaan Rekening yang diberikan Bank kepada nasabah pada saat pembukaan rekening.

TRANSPARANSI TATA CARA PENGADUAN NASABAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA NASABAH

Berkenaan dengan transparansi dan tata cara pengaduan nasabah serta penyelesaian sengketa kepada nasabah:

1. Bank telah melakukan transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Nasabah.
2. Bank telah memiliki suatu sistem yang digunakan oleh petugas Call Center dan Customer Service Cabang untuk mencatat permintaan informasi, transaksi dan keluhan dari nasabah yang diterima melalui layanan BNI Call 1500046 maupun cabang. Setiap keluhan yang diterima akan ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA) yang berlaku. Keluhan nasabah tersebut merupakan masukan bagi BNI untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.

REMUNERASI

Sesuai proses penyusunan POJK No 45 tahun 2015 dan SE OJK No 20 th 2016 mengenai remunerasi berbasis risiko dan kinerja yang pernah diikuti oleh BNI dan beberapa instansi terkait lainnya, disampaikan bahwa *mandatory disclosure*. Ketentuan terkait tersebut untuk Bank Buku IV akan dilakukan pada annual report tahun 2018 (dalam hal ini penetapan kebijakan th 2016, dan implementasi kebijakan 2017 sehingga *disclosure* akan dilakukan di Laporan Tata Kelola tahun 2018).

RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hal pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau emberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	: 46:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	: 1,1:1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	: 1,1:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	: 1,5:1

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian kredit kepada Pihak Terkait dengan Bank serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri, berikut pemantauan dan penyelesaiannya.

1. Secara berkala BNI melakukan rapat Komite Prosedur Perkreditan dan Komite Kebijakan Perkreditan maupun Rapat Direksi untuk membahas hal-hal yang terkait

dengan kebijakan, prosedur dan pelaksanaan operasional bidang perkreditan.

2. Untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki sistem internal control yang memadai sebagai berikut.
   a. Telah ada kebijakan dan prosedur dalam proses pemberian kredit.
   b. Telah ada review ex-ante pada proses pemberian kredit baru maupun tambahan dengan nominal > Rp5 M berupa Credit Compliance Review (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan pada proses pengadaan barang dan jasa dengan nominal ≥ Rp1M berupa Procurement Compliance Review (PCR)
   c. Telah ada review ex-post yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal.
   d. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
   e. Penyediaan dana besar dimintakan persetujuan kepada manajemen dan untuk jumlah tertentu harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
   f. SPI melakukan pemeriksaan terhadap sentra kredit berdasarkan risk assessment untuk memastikan kecukupan pengelolaan risk management dan internal control termasuk dalam proses pemberian kredit.

Dalam penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar:

1. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut penyediaan dana kepada debitur melalui *Internal Rating System* (*corporate, commercial, and small business*), *Loan Portofolio Management*, *Loan Exposure Limit* (per segment, per sektor ekonomi dan per regional), BMPK (untuk internal BNI melalui *Internal House Limit*), dan *Country Exposure Limit*.
2. Jumlah modal dan rasio CAR selalu dilaporkan kepada Manajemen dan segenap unit untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan bisnis bank terutama yang menyangkut penyediaan dana.

Penyampaian laporan ke BI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal Rp juta
Kepada Pihak Terkait	115 Pihak terkait 47 Pihak terkait yang dikecualikan dalam perhitungan BMPK	4.880.921 320.387
Kepada Debitur Inti		
a. Individu	5 Debitur besar Individual	23.604.554
b. Grup	15 Debitur besar grup	89.016.000

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN PERSEROAN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan Surat Edaran No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka BNI melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (*Buy Back*). BNI telah menunjuk PT BNI Securities sebagai lembaga sekuritas yang

melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan dengan periode pembelian saham di pasar kurang dari 3 bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali adalah sebesar 0,807% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sejumlah 150.537.500 lembar saham. Nilai pembelian kembali saham Perseroan sebesar Rp749.979.275.500,00 (maksimal 750 miliar Rupiah) dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah sebesar Rp4.982,00 per saham.

Atas pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 30 Oktober 2015. Memperhatikan butir 4 huruf a angka 3 Peraturan No. XI.B.2 jo. Pasal 9 Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan/digunakan untuk pelaksanaan *Employee Stock Option Plan atau Empoyee Stock Purchase Plan*, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 12 Mei 2016 yang intinya menyampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan pengalihan saham Seri C hasil pembelian kembali saham melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk Bonus Saham (selanjutnya disebut "Program Bonus Saham").

Program Bonus Saham disusun sebagai bagian dari remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam bentuk penghargaan jangka panjang di mana saham yang dibeli kembali dialokasikan kepada:

- Pegawai sebagai bonus atas pencapaian kinerja perusahaan, dan
- Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai bagian dari tantiem untuk tahun buku yang bersangkutan.

Pengawasan Program Bonus Saham akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan akan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

Alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN.

Berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan No. 8 tanggal 10 Maret 2016, alokasi bonus saham kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri BUMN.

PROGRAM BONUS SAHAM PEGAWAI

Program bonus saham pegawai merupakan program pemberian bonus dalam bentuk saham Bank yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.

Tujuan dari program bonus saham pegawai ini adalah sebagai:

1. bentuk retensi pegawai dalam jangka panjang.
2. upaya untuk memotivasi pegawai agar memberikan kinerja yang terbaik.
3. upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap
4. Bank.

Alokasi tahap I dilakukan pada tahun 2016 dan pegawai yang berhak menjadi peserta dalam Program Bonus Saham adalah pegawai tetap per 30 Oktober 2015 (dhi. tanggal Keterbukaan Informasi).

Tanggal berakhir *vesting period* tahap I dibedakan berdasarkan jenjang iabatan, dengan rincian sebagai berikut.

1. ASST ke bawah *vesting period* berakhir tanggal 31 Januari 2017
2. AMGR *vesting period* berakhir tanggal 30 April 2017
3. MGR ke atas *vesting period* tanggal 31 Juli 2017.

Jenjang jabatan yang menjadi dasar perhitungan *vesting period* tahap I adalah jenjang jabatan pegawai per 31 Desember 2015.

Pegawai yang dinyatakan *eligible* untuk *vesting* akan memperoleh pemberitahuan melalui email atau media komunikasi lainnya yang di antaranya memuat konfirmasi atas bonus saham yang menjadi haknya pada tanggal *vesting*. Adapun syarat *vesting* ditetapkan sebagai berikut.

1. Tidak sedang dalam proses kasus dan/atau dampak sanksi mengacu pada Peraturan
2. Kepegawaian Bank yang berlaku;
3. Tidak berakhir hubungan kerja atas kemauan sendiri; atau
4. Tidak berakhir hubungan kerja karena kinerja (low performance).

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Afiliasi

Pada tahun 2016, BNI tidak melakukan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi.

Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa sebagai salah satu komitmen implementasi prinsip GCG di BNI yang dilakukan secara transparan, *equal treatment* dan bertanggungjawab.

METODE PENGADAAN

Metode pengadaan barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut.

1. Pelelangan Terbuka / Seleksi Umum, yaitu pengadaan yang diumumkan secara luas melalui media massa dengan calon peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta.
2. Pemilihan Langsung / Seleksi Langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak secara terbatas dengan calon peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta.
3. Penunjukkan Langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa dengan memperhatikan syarat-syarat penunjukan langsung.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Tahapan Proses Pengadaan

BNI menerapkan pembagian tahapan pengadaan barang dan atau jasa sebagai berikut.

Proses Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Proses pengadaan barang dan/atau jasa terdiri dari:

Pelelangan, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp1 miliar.

Alur Proses Pelelangan

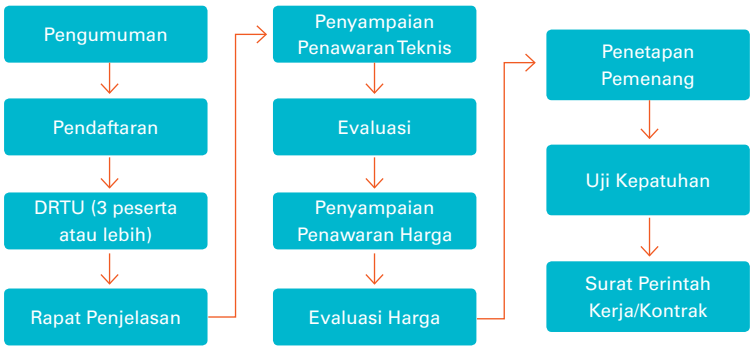

Pemilihan Langsung, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar.

Alur Proses Pemilihan Langsung

Penunjukkan Langsung, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp100 juta, atau dengan kriteria tertentu.

Alur Proses Penunjukkan Langsung

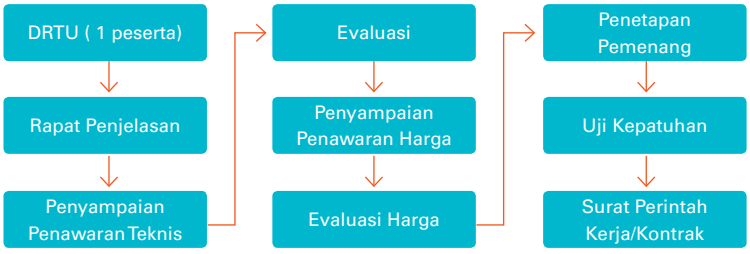

PENGELOLAAN REKANAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BNI

Rekanan BNI adalah penyedia barang dan/atau jasa yangdibutuhkan BNI yang telah terdaftar dalam sistem manual ataudalam Sistem Aplikasi e-Procurement.

Penyedia barang dan/atau jasa yang dapat dimasukkan ke dalamdaftar rekanan BNI adalah yang memiliki kualifikasi dan klasifikasisebagaimana telah ditetapkan oleh badan asosiasi atau instansiyang berwenang dan secara internal BNI khusus untuk pengadaanjasa kualifikasinya ditentukan oleh masing-masing unit penggunajasa.

Kebijakan mengenai Proses Penerimaan Rekanan BNI terdapat dalam Pedoman Perusahaan Rekanan.

Penerimaan Pendaftaran Rekanan Bni

Proses penerimaan pendaftaran rekanan BNI dilakukan menggunakan sistem aplikasi *e-Procurement*. Dengan menggunakan aplikasi ini, prosespendaftaran rekanan BNI dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran rekanan, antara laindilakukan pengisian *form* melalui sistem aplikasi *e-procurement*, pemeriksaan kelengkapan biodata perusahaan, *on the spot* dan wawancara calon rekanan. Calon rekanan yang memenuhi syarat dapatdiberikan Tanda Daftar Rekanan.

Tanda Daftar Rekanan yang diterbitkanoleh suatu unit organisasi di BNI berlaku untuk seluruh unit di BNI sepanjang klasifikasi dan kualifikasi rekanan yang dicatatkansesuai dengan jenis pengadaan barang dan/atau jasa yang akandilaksanakan.

INFORMASI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2016

Untuk mendukung operasional perbankan BNI di tahun 2016 ini sedang dilakukan pembangunan gedung kantor BNI di JI. Pejompongan Raya V No.24, Bendungan Hilir - Jakarta dengan jumlah lantai sebanyak 30 lantai tower, 6 lantai podium dengan total luas bangunan ±75.028 m2.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2016, Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik

PEMBERIAN DANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Sepanjang tahun 2016, Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dikemas BNI dengan melaksanakan berbagai aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara garis besar, biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas CSR, sebagai berikut.

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
1.	Bencana Alam	1,733,496,903	• Bencana alam banjir di Cisalak Subang • Bencana alam banjir & longsor di Garut • Bencana alam banjir bandang di Cianjur • Bencana alam di Sumedang • Bencana alam banjir di Purworejo • Bencana alam banjir di Banjarnegara & Banyumas • Bencana alam banjir rob di Pekalongan • Bencana alam banjir di kabupaten Kampar • Bencana alam banjir Kab Solok dan Kab 50 kota • Bantuan Banjir di Sukabumi • Bantuan banjir Surakarta • Bantuan banjir & longsor di Sukabumi • Bantuan bencana alam di Wonosobo • Bantuan bencana alam di Kebumen • Bantuan bencana alam di Purworejo • Bantuan tanggap darurat gempa di Pidiejaya

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
2.	Pendidikan dan/atau pelatihan	21,295,928,910	• Pesantren Darul Falah • UMKM di Makassar, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Jakarta • Beasiswa mahasiswa 9 kampus di Jogjakarta • STIKES & STMIK Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta • Yayasan Al Qur'an Center Az Zahra di Kalibata Jakarta Selatan • UMKM di Kediri • Guru & tenaga pendidik • SLB Bagian B & C (Yayasan Abdi Gumelar) di Jakarta Timur • Sekolah Tunas Harapan Swadharma di Jakarta Barat • SMP Duta Mas di Jakarta Barat • 2 SMK di Bandung • Ponpes di Kabupaten Sumedang • Pondok pesantren Salafiyah Insitisyatul Ulum di Garut • Mahasiswa Ikopin di Bandung • MTS Muhammadiyah di Jasinga Bogor • Petani bunga di Pengalengan dan Sukabumi • Universitas Padjajaran • SD Islam As-Syai'iyah, Yayasan inspirasi anak bangsa • SMK Kudus • Ponpes Nurulumah di Purwokerto • SMK Bhineka Karya 1 di Boyolali • SMPN 1 Magelang • Madrasah Diniyah Al Hidayah di Kudus • Madrasah Diniyah Awwaliyah Adz Dzikiriyah di Jepara • Pesantrean Al Huda • Ponpes Ainul Burham di Jepara • Miftahul Huda Sinanggul di Jepara • Universitas Diponegoro • PKBM Masa Depan di Banyumas • PAUD, TK, SD Angkasa • TK Kartika III – 51 Asmil Kadipiro di Surakarta • Universitas Airlangga • Pesantren Tebu Ireng • Madrasah Diniyah Nurul Huda di Lamongan • MI Bahrul Ulum di Jombang • Ruang Kelas di Treanggalek • SMP dan Madrasah di Madura • Yayasan Aba Muchsin di Surabaya • Universitas Muhammadiyah di Malang • Yayasan Darul Falah di Jember • Madrasah dan Ponpes Putri Sekar Anom di Pamekasan, Madura • MD Wustha Hidayatut Thullab di Sampang • SMK Raudlatul Jannah di Probolinggo • SDN 24 Sungai Kakap di Pontianak • TK Baitur Rahman di Kalimantan Timur • Tanjung Pinang • Natuna • Beasiswa Indonesia Bagian Timur • Ponpes Darul Munawarah di Aceh • SMKN 2 Langsa di Aceh • Dayah Bustanul Huda di Aceh • Lombok • Ende • Papua • SDN Mangga Dua Marauke • UGM • Manokwari • Malino, Sulawesi selatan • UMKM Makassar • Toraja

Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
			• Wakatobi • Kendari • Sawahlunto • Padang • Solok • SDIT Al Madaniy di Bukittinggi • Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Hijrah di Banyuasin • Langkat • Jakarta Selatan • Tafiz Al Ikhlas di Ogan Ilir • Tanjung Pinang • Mentawai • Banyuasin • Manokwari • Pontianak • Kudus • Bogor • Bali • Pekalongan • Sidoarjo • Indramayu • Bandung • Tanjung Pinang • Yogyakarta • Pamekasan • Bali • MTS Al Karimiyah di Sumenep • SMA Efarina di Simalungun • Tanjung Pinang • Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Sumbawa • Ponpes Albarkah & Raudlatut Thalibin di Rembang • Palu • Tangerang • Tambora • Beasiswa UNSEOD di Purwokerto • Gunung Puntang, Bandung • Prembun • Pontianak • Malang • Bolaang Mangondo • Lasem, Rembang • Mahasiswa prestasi KEMENDIKBUD di Jakarta • PAUD Aliza di Banyuwangi • Kebumen
3.	Peningkatan Kesehatan	3,110,612,908	• Khitanan missal Bapekis di Jakarta Pusat • Khitanan missal YYS Persaudaraan Bersama di Jakarta Utara • Donor darah di kementerian BUMN Jakarta Pusat • Jakarta Utara • Jambi • RS PKU Muhammadiyah Mayong di Jepara • Banjarbaru • Lombok Utara • Mataram • Operasi bibir sumbing FKG UI 2016 di Kab Pasaman • Mataram • Wonosobo • Cilacap • Jakarta Barat • Program kesehatan Aisyiyah di Yogyakarta • Tenaga kesehatan Depkes di Jakarta Pusat • Poliklinik kesehatan Semarang

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
4.	Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	21,494,026,279	• Pembangunan jalan Sampang, Jatim • Sarana air bersih di Serang • Sarana pesantrean Almuwi R Yogyakarta • Sarana air bersih di Gorontalo • Sarana air bersih di Sukaraja Sukabumi • Sarana air bersih di Garut • Signage Imogiri • Magelang • Motor pengangkut sampah di Sikunir, Wonosobo • Pembangunan jembatan di Desa Limbasari Purworejo • Pembangunan jembatan Dukuh Wlahar di Brebes • Pembangunan pagar makam desa kemantran di Tegal • Pembangunan talud dan pengerasan jalan dukuh buntrak desa wlahar di Brebes • Tambalang – Semarang • Sarana Pujon • Gudang Sinoman di Kab Lamongan • Pembangunan jalan desa balik terus di Gresik • Saluran irigasi di Trenggalek • Pembangunan Talud Jalan di Banyuwangi • Perbaikan lampu dan taman kota trenggalek • Sarana air bersih di Bojonegoro, Jember, Madiun, Madura, Situbondo, Trenggalek • Banyuwangi • Sasirangan, Banjarmasin • Tanjung Pinang • Bantuan sarana air bersih di Pringsewu, Lampung • Sarana air bersih di Ternate, Ambon, dan Meulaboh • YAPIT (Yayasan Puteri Indonesia Timur) Ende • Pulau Komodo • Sarana air bersih di Merauke, Makassar, Sengkang, Bau-Bau, Bangko, Lubuklinggau, Musi Palembang, Balige, Tolitoli, Parepare, Tanjungpinang, Bintan, Batola, Sampit, Sintang, Berau, Nunukan, Merauke, Bulukumba, Tasikmalaya, Lampung, Cirebon • Ponpes Yayasan Hasanah Titik di Jakarta Pusat • Perahu karet di Majalaya – Subang • MCK di Bintan • Motor sampah di Bantul • Labuan Bajo • Pemkab Toba Samosir • Palangkaraya • Pulau Komodo • Karanganyar • Bekasi • MCK di Banyuasin • Motor sampah di Banjarmasin

Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
5.	Sarana Ibadah	7,462,815,913	• Pura Dadia Sekar Anom di Bali • Sarana Ibadah di BSD, Tangerang • Masjid Al Huda di Samigaluh, Kulonprogo • GP Ansor Jakarta Timur • Gereja GKJ Nehemia Jakarta Selatan • Masjid Al Huda di Pisangan Timur, Jakarta Timur • Masjid Jami At – taqwa di kebayoran lama, Jakarta selatan • Masjid Roudhotussyfa di Cilandak, Jakarta Selatan • Mushola Detasemen matra 1 Paskhas di Halim • Musholla majelis taklim & dzikir hidayaturrohman di Jakarta Barat • Musholla Nurul Amal di Jakarta Selatan • Perayaan Natal • Musholla Baitul Rahmat di Jakarta Barat • Masjid Al Huda di Kab Babelan Bekasi • Masjid Al ikhlas di Depok • Masjid Al Muhajirin di Bekasi • Masjid Baabul Jannah di Cimanggis • Masjid Nurul Hakim di Kab Garut • Masjid Nurui Qolbi di Kab Garut • Musholla Nurul Huda di Depok • Sarana ibadah di Margonda • Masjid Al Ihya di Surakarta • Masjid Jami Al BAROKAH Desa Pelang di Jepara • Masjid Jami Al Muttaqin di Mijen, Semarang • Masjid Nurul Huda Dawuhan di Purwokerto • Musholla Al Ikhlas Desa Wlahar di Brebes • Musholla Baitul Mutaqien di Jepara • Baksos di Gresik

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
			• Mushola di Sampang • Baitul Muttaqin di Probolinggo • Masjid Al Wardah & Baitul Mumin di Kab Lamongan • Masjid di Banyuwangi • Masjid Muftahul Jannah, Baitul Musthofa & Nurul Islam di Lamongan • Masjid Nurrahman di Sidoarjo • Masjid Nurul Falah di Madura • Masjid Potana Mopena di Kab Tuban • Masjid Tsanawiyah di Gresik • Mushola Nurul Huda di Banyuwangi • Musholla Al Kalami di Trenggalek • Musholla Riyadus Sholihin di Magetan • Sarana Ibadah DI Pontianak • Sarana Ibadah di Banjarmasin • Fasilitas pengajian majelis Ta'lim Imam • Musholla Al Fatah • Sarana ibadah di Tarakan • Masjid di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang • Musholla Al Hikmah di Tanjung Karang Barat • Musholla Khalid Bin Walid di Pringsewu • Balai Al Quran TPQ BTM Nur Fajar di Langsa • Masjid Babut Taqwa di Langsa • Muenasah Reje Bukit di Aceh • Gereja St. Petrus Pada di Lembata, NTT • Masjid Al Iman di Samata, Goa • Masjid Ash Shobirin, di Kab.Moutong, Parigi • Masjid Nurul Huda Kendari • Sarana Ibadah Palembang • Mushola Babus Salam di Cilincing, Jakarta Utara • Sarana Ibadah di Demak • masjid AL Muttaqin di Karanganyar • Mushola Mardhatillah di Pancoran Mas Depok • masjid At Taqwa di Ungaran • Musholla Nurul Iman di Batu Bara • Masjid Miftahuljannah di Bekasi • Majelis Talim Al Faqih di Tanjung Karang • Masjid Al Chidmah di Batang • Sarana Ibadah di Pacitan • Masjid Nurul Ummah di Sukoharjo

Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
6.	Pelestarian Alam	9,877,557,545	• Universitas UNS di Surakarta • Penanaman asem jawa di Yogyakarta • Yayasan Nara Kreatif • Earth Hour 2016 • Yayasan Pelita Cakrawala • Bandung • Green Indonesia for the world di Jakarta Timur • Konservasi terumbu karang • Konservasi terumbu karang di kepulaian seribu • Taman pintar BNI DKI Jakarta • Aksi Hijau Nusantara di Bogor • 10.000 bibit pohon di Ruas Tol Cikampek • Program Pelatihan di Alam Bebas oleh Wanadri di Bandung • Program Pembibitan Satu Juta Lima Ratus Ribu Bibit Pohon di Sentul • Program penghijauan Taman Kota di Garut • Program Reusable Bag Hari Bumi 2016 • Program Bank Sampah di Solo • Program Penghijauan Pola Padat Karya KODAM IV Diponegoro di Surakarta • Pembangunan Taman Hutan Kota Keputih di Surabaya • Penanaman 1000 pohon Lembaga Intelektual Muda Kalimantan • Penghijauan Vertikal Garden di Banjarbaru • Restorasi Lahan Gambut • Program Penanaman Hutan Samboja Lestari di Samarinda • Program Pembibitan Pohon dengan KODAM Patimura di Maluku • Program Perawatan Hutan Kota BNI Aceh • Motor Pengangkut Sampah • Penanaman Terumbu Karang • Program Penghijauan Pemerintah Kota Palembang • Bantuan Penghijauan Median Jalan di Aceh • Bantuan penanaman bibt pohon di Balikpapan • Penanaman bibit pohon di Yogyakarta
7.	Pengentasan Kemiskinan	16,655,764,070	• Pasar murah HUT BNI di Denpasar • Pasar Murah HUT BNI di Jakarta BSD • UNI Syarif Hidayatullah, Ciputat • Pasar murah BUMN Hadir untuk Negeri di Sleman • Pemberdayaan perempuan sahabat merapi di Yogyakarta • Baksos Bhakti Yagor Panca di Cilincing, Jakarta Utara • Baksos Hari Kesetiakawanan Nasional 2016 di Jakarta Utara • Baksos HUT Lemhanas ke 50, tahun 2015 • Baksos Idul Adha di Jakarta Pusat • Baksos Majelis Talim Bhakti Khoirunnisa di Pejaten • Baksos NU dalam rangka idul adha di Tebet • Baksos Polda di Jakarta Pusat • Baksos Ramadhan Korps Dai Istiqlal di Jakarta Pusat • Pasar murah TNI AU di Jakarta Timur • Santunan 500 anak yatim di Jakarta Pusat • Pasar Murah HUT BNI ke 70 di Wilayah Jakarta Kemayoran • Pasar Murah HUT BNI ke 70 di wilayah Jakarta Kota • Pasar Murah HUT BNI ke 70 di wilayah Jakarta Senayan • Pembagian 1.000 sembako di Kalimalang Jakarta Timur • Pembagian 3.000 paket buka puasa di masjid istiqlal, Jakarta pusat • Santunan 100 anak yatim di Jakarta pusat

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
			• Santunan 500 anak yatim dalam bulan Dzulhijah 1437 H di Jakarta Selatan • Kegiatan pasar murah BUMN di Merangin, Jambi • Kegiatan pasar murah Ramadhan di Garut 2015 • Pasar murah HUT BNI ke 70 di Wilayah Bandung • Pembangunan mesin pengering padi • Kegiatan baksos sembako di telaga menjer, wonosobo • Kegiatan pasar murah BNI Hadir untuk negeri • Kegiatan pasar murah di Kabupaten Sukoharjo & Klaten • Sembako murah di Semarang • Sarana jarring nelanan di Demak • Baksos di Malang • Baksos TNP2K SETNEG di Malang • Pasar murah HUT BNI ke 70 di Surabaya • Baksos JIMKA di Kab Banjarbaru • Pasar Murah BUMN Hadir untuk Negeri di Wilayah Banjarmasin • Pasar murah BUMN Hadir untuk Negeri • Bedah rumah veteran di Tanjung Pinang • Bedah rumah, MCK dan sarana air bersih di Tanjung Pinang • Pengembangan sumur dan rumah nelayan desa pesisir di lampung selatan • Baksos kementerian PMK 2016 di Ambon • Pasar Murah BUMN di Naganraya • Baksos di Kupang • Pasar murah di Sumba Barat • Pasar murah di Teluk Wondama • Pasar murah di wilayah Papua • Pasar murah di Kuantan Singingi • Pasar murah di wilayah Makassar • Pasar murah untuk keluarga pejuang di Sigi • Pasar murah HUT BNI di wilayah Manado • Pasar murah BNI di wilayah Padang • Baksos di Palembang • Pasar murah di Palembang • Pasar Murah di Musi Rawas • Pasar murah di wilayah medan • Bantuan bingkisan keluarga pejuang di jaktim • Pembinaan desa di kepulauan Riau • Tanjung Pinang • Bedah rumah veteran di Bintan • Pasar Murah HUT BNI di Wilayah Jakarta Kota • Pasar murah HUT BNI di Wilayah Semarang • Pasar murah HUT BNI di Wilayah Medan • Bukber HIMBARA anak yatim di Mataram • Sembako untuk yayasan juang anak bangsa di Jakarta Utara • Bedah rumah di Medan • Bedah rumah di Jombang • Alumni resimen mahasiswa di Jakarta Selatan • DKM Al Hikmah di Sukabumi • Pasar murah di Klaten • Pasar murah di Boyolali • Bedah rumah veteran di Tanjung Pinang • Bansos di Sidoarjo • Bedah rumah di Gayungan, Kebumaen, Gresik, Banjarmasin, Padang, dan Bandung • Pembinaan desa di Anambas dan di Pulau Penyengat • Program Gapok Tani di Boyolali

Pemberian Dana Kegiatan Untuk Kegiatan Politik

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)	Pihak Penerima
8	Bantuan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pemasaran dalam upaya Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan	2,566,315,928	Pameran Bahari Nusantara expo untuk mitra binaan Capacity building petani tebu PTPN X Pameran di kegiatan CEO Forum Kompas Inkubasi bisnis di Kampoeng BNI Lumajang, Ponorogo, Borobudur Magelang, dan Sengkang Pameran indigo festival untuk mitra binaan Pameran Katumbiri untuk promosi mitra binaan Capacity building/pelatihan di Kampoeng BNI Batik Tegal Capacity building/pelatihan Kampoeng BNI Wisata Borobudur Magelang Pameran di kegiatan HUT bersama BUMN di Labuan bajo Pelatihan dan pembinaan petani tebu rakyat PTPN VII di Kotabumi Pameran mitra binaan untuk event ISSF di Bali
	Total Biaya	85,034,493,726	

Penjelasan detail mengenai aktivitas seputar program CSR Perseroan terkait:

- Lingkungan hidup.
- Ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Pengembangan sosial dan kemasyarakatan.
- Tanggung jawab kepada konsumen

disajikan pada bagian Laporan CSR yang disajikan bersamaan dengan Laporan Tahunan ini.

Information Tecnology Governance

Tata kelola TI (IT *Governance*) merupakan pengelolaan kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang berkelanjutan, untuk memastikan bahwa organisasi TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Pemilihan kerangka kerja (*framework*) Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People, Process* dan *Technology*. Atas pertimbangan tersebut, implementasi tata kelola TI di BNI mengadopsi berbagai kerangka kerja yang sesuai dengan area layanan TI di BNI.

CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGIES (COBIT)

Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) diakui secara luas sebagai kerangka kerja manajemen TI dan tata kelola TI. COBIT mengatur TI dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan BNI melalui pengelolaan kelompok proses dan enabler-nya, di mana tujuan bisnis dipetakan menjadi tujuan TI, serta dilakukan pengukuran pencapaian dan maturity nya. TI BNI menggunakan kerangka kerja COBIT sebagai acuan tata kelolanya antara lain karena adanya sinergi antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, berfokus pada data dan informasi, dapat fleksibel mengikuti arah kerja perusahaan, serta dapat digunakan bersamaan dengan standar kerangka kerja lainnya.

INFORMATION TECHNOLOGY INFORMATION LIBRARY (ITIL)

Information Technology Information Library (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk *IT Service Management* (ITSM), yang digunakan TI BNI dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis BNI. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level IT* untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI. Dengan ITIL tersebut, operasional TI BNI menetapkan baseline sebagai tolok ukur layanan, sebagai landasan untuk perencanaan, implementasi dan pengukuran pencapaiannya.

ISO 27000

ISO 27000 adalah merupakan bagian dari standar kerja di area *Information Security Management Systems* (ISMS), di mana standar ini digunakan untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Standar ISO 27000 digunakan sebagai acuan referensi oleh TI BNI dalam menetapkan solusi keamanan secara enterprise, baik dari sisi arsitektur TI, kebijakan, solusi pengembangan, maupun dari operasional TI. Implementasi standar tersebut antara lain diterapkan secara *end-to-end*, mulai dari sisi sistem *core, surrounding*, jaringan komunikasi, aplikasi, dan perangkat akses nya seperti pada ATM dan EDC.

ISO 9001

ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu (Quality Management Systems) yang didesain untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan stakeholder sekaligus mematuhi kebutuhan regulator terkait produk maupun aktivitasnya. TI BNI telah menerapkan ISO 9001 : 2008 (standar internasional untuk sistem manajemen mutu) dengan ruang lingkup yaitu IT Operation dan IT Security Management dan telah melakukan proses re-sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tanggal 26-27 Juli 2016. Berdasarkan audit summary report dari tim auditor eksternal terhadap pencapaian sasaran mutu oleh unit IT, disimpulkan bahwa sistem manajemen di Unit IT memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga status sertifikasi ISO 9001 : 2008 diperpanjang untuk 3 tahun ke depan sampai dengan Agustus 2019. Selanjutnya, sesuai dengan rencana kegiatan unit IT, pada tahun 2017 akan dilakukan proses upgrade ISO 9001 : 2008 ke versi terbaru yakni ISO 9001 : 2015, dikarenakan sesuai aturan standar internasional bahwa ISO 9001 : 2008 akan berakhir penggunaannya pada tahun 2018. Dengan adanya sertifikasi ISO 9001 : 2008 di unit IT akan memberikan manfaat bagi semua pegawai di unit IT beserta manajemen yakni dengan ditetapkannya mekanisme serta standar mutu yang menjaga bisnis proses IT agar selalu berjalan sesuai dengan standar sistem manajemen mutu yang ditetapkan, di mana pengendalian mutu dilakukan secara sistematik sehingga konsistensi mutu menjadi lebih baik dan kepercayaan pelanggan meningkat.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

SIARAN PERS

Siaran Pers yang telah dilakukan oleh BNI selama tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Siaran Pers

Tanggal	Siaran Pers
11 Januari 2016	BNI Jadi Bank Tunggal Layanan Izin Investasi 3 Jam di BKPM
26 Januari 2016	BNI Gandeng Agung Podomoro, Salurkan Pembiayaan Kios Jakarta
27 Januari 2016	BNI Tampung Setoran Pungutan Ekspor Sawit
28 Januari 2016	BNI lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Bogor untuk memberikan layanan perbankan secara lengkap.
31 Januari 2016	BNI ditetapkan sebagai *Syndicated Loan House* di Indonesia oleh *Asia Pacific Loan Market Association* (APLMA).
01 Februari 2016	Kementerian ATR/ BPN Gandeng BNI Layani Transaksi di 450 BPN
02 Februari 2016	Alpha Southeast Asia kembali menganugerahkan predikat sebagai *The Best Remittance Provider in Southeast Asia* pada tahun 2015 kepada BNI.
04 Februari 2016	BNI dan Angkasa Pura 2 Kerja samaLayanan *Integrated Cash Management*untuk meningkatkan pelayanan di 13 Bandar Udara di Indonesia.
10 Februari 2016	BNI dan Apotek K24 melakukan sinergi untuk mempermudah pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di lebih dari 350 outlet Apotek K24 di seluruh Indonesia.
11 Februari 2016	BNI dan PT Pos Indonesia (Persero) bekerjasama untuk saling melengkapi layanan yang diberikan kepada masyarakat.
16 Februari 2016	Dalam rangka merayakan HUT ke-70-BNI Gelar CSR untuk Tenaga Migran di Singapura. BNI Seoul, Tawarkan Produk Unggulan Kiriman Uang MANTAP
17 Februari 2016	BNI Perluas Layanan Remitansi ke City Plaza Singapore
06 Maret 2016	Terbitkan *Debit Card Co Brand* BNI dan Garuda, satukan fungsi *Debit* dan *TapCash* dalam Satu Kartu
10 Maret 2016	Keputusan RUPS Tahunan BNI 2015 BNI Bagikan Dividen 25% dari Laba Bersih
13 Maret 2016	BNI Gandeng Sisfo Salurkan KUR Mikro untuk Bisnis Keamanan Nelayan
18 Maret 201	Sinergi BUMN realisasikan Tol Surabaya Mojokerto,pengguna tol langsungdapat bertransaksi dengan BNI *TapCash*
21 Maret 2016	Sinergi 4 Bank BUMN melalui *launching e-Payment Toll* PT Jalan tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ) yang mengelola Ruas Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR)
19 April 2016	Kemendesa dan BNI Sinergi Kembangkan Akses Ekonomi Pedesaan Melalui fasilitas *Integrated Cash Management* untuk menyimpan dan mengelola dana seperti BNI *Direct, Virtual Account*, dan BNI *e-tax, Payroll*, tunjangan kinerja pegawai, serta Pembayaran Pensiun Pegawai.
20 April 2016	Semarak 70 Tahun BNI di INACRAFT 2016 Jelajahi Warisan Nusantara Karya Anak Bangsa. BNI kembali menjadi partner utama Inacraft selama 12 tahun sejak tahun 2005
22 April 2016	BNI kucurkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Rp 1 Triliun bagi Semen Indonesia
28 April 2016	BNI ditetapkan sebagai agen penjual obligasi Negara ritel berkinerja terbaik 2015oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
01 Mei 2016	HUT ke-70BNI, Kemenerian Luar Negeri, dan BNP2TKI Latih 150 TKI Kemandirian Ekonomi
12 Mei 2016	BNI Perluas Inklusi Keuangan di Kawasan Pesisir Utara Jateng BNI Cetak 7.630 Agen Laku Pandai
28 Mei 2016	Tarik Investasi ke Bojonegoro,BNI dan Pemda Gelar *Investment Day* 2016
01 Juni2016	Sambut 70 TahunBNI Bangun Sumur Bor di Daerah Minim Sarana Air Bersihdi Halmahera Timur
02 Juni 2016	BNI Hadiahi RS Bhayangkara Batam Mobil Jenazah

Tanggal	Siaran Pers
27 Juni 2016	Terbitkan Kartu Masyarakat Indonesia SejahteraBNIDorong Warung Kube Menjadi Agen Laku Pandai
29 Juni 2016	BNI Sosialisasikan Manfaat *Tax Amnesty* di Singapura
01 Juli 2016	BNI Pulangkan 5.000 PemudikLebih dari 700 Gardu Tol di Jalur Mudik Siap Bertransaksi BNI *TapCash*
22 Juli 2016	Pada Kuartal II 2016BNI Raih Laba Bersih Rp4,37 Triliun
28 Juli 2016	Kerja Sama GOJEK dan BNI, Kini *Top UpGo Pay* Bisa Dilakukan di BNI
22 Agustus 2016	Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA)Sosialisasikan Manfaat *Tax Amnesty* di Hong Kong
28 Agustus 2016	Sasar Konsumen Properti, BNI dan Agung Sedayu Group Beri Konsultasi *Tax Amnesty*
29 Agustus 2016	PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek Palapa Ring Paket Tengah senilai Rp 975 miliar.
30 Agustus 2016	Dorong Gerakan Non Tunai, BNI Terbitkan Kartu Tani dimulai dari Jombang Dikunjungi Queen Maxima, BNI Tunjukkan Program SimPel dan e-Warong KUBE
01 September 2016	BNI peroleh predikat terbaik pada layanan *Trade Finance* dan *Cash Management*diberikan oleh Majalah Alpha South East Asia dalam kategori *Best Trade Finance Bank in Indonesia*dan *Best Cash Management Bank in Indonesia*untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penyediaan Layanan Produk dan Jasa Perbankan antara BP Batam dengan BNI di Batam, Kepulauan Riau.
05 September 2016	BNI dan KBRI Terbitkan Kartu *Co-branding* Pekerja Indonesia – Singapura (KPIS)
07 September 2016	BNI bekerjasama dengan Blue Bird meluncurkan sistem pembayaran Non-Tunai (*Cashless*) di aplikasi *My Blue Bird* Buka Agen46 di Telang, BNI Perkuat Layanan Perbankan di Kawasan Transmigrasi
14 September 2016	HIS Indonesia Gandeng BNI Hadirkan Japan *Travel Fair*
15 September 2016	BNI Perkuat Pariwisata Pulau Lombok dengan menggelar Pelatihan dan Pengembangan Produk Pariwisata pada Rumah Kreatif BNI *Geopark* Rinjani. BNI Pecahkan Rekor MURI Buka Tabungan SimPel Terbanyak dengan merangkul 100.000 Siswa.
21 September 2016	BNI peroleh penghargaan sebagai bank yang dapat memberikan layanan *Cash Management* terbaik di Indonesia, melalui survei yang dilakukan AsiaMoney.
22 September 2016	BNI Gandeng Lazada Hadirkan Pinjaman Digital bagi UKM
23 September 2016	BNI gandeng Tokopedia melalui Perjanjian Kerja Sama untuk Salurkan KUR kepada para Mitra Toppers dari kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
27 September 2016	Sinergi BNI dan IPB luncurkansitus *online* untuk memasarkan produk-produk inovatif yang diproduksi oleh IPB(serambibotani.com dan ipbsciencepark.com)
29 September 2016	BNI dan Bank Victoriamenandatangani Nota Kesepahaman Perpanjangan Kerja Sama *Capacity Building*Pendampingan sebagai Bank Devisa.
30 September 2016	BNI (sebagai salah satu dari enam anggota sindikasi) salurkan pembiayaan sindikasi kepada Waskita Karya untuk bangun Kereta Api Ringan (LRT) Palembang. BNI berserta 2 bank BUMN lain sediakan layanan keuangan bagi Pelindo III untuk Tingkatkan Layanan Kepelabuhan.
03 Oktober 2016	BNI himpun dana repatriasi Rp7,6 Triliun dalam program *Tax Amnesty*
08 Oktober 2016	BNI untuk ke-6 kalinya, kembali menjadi *Official Bank* dalam perhelatan pameran properti terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Real Estat Indonesia (REI), yaitu Real Estat Expo 2016.Pada pameran yang berlangsung pada 8 – 16 Oktober 2016.

Tanggal	Siaran Pers
13 Oktober 2016	BNI, BNN serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Yayasan Alumni SMAN 1 Jambi laksanakan kegiatan sosialisasi program Stop Narkoba dengan *Edutainment*. Pada Kuartal III 2016, BNI mencatat laba sebesar Rp 7,72 triliun atau tumbuh 28,7%.
17 Oktober 2016	BNI berkomitmen kendalikan Gratifikasi yang ditegaskan melalui kerja sama BNI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).
18 Oktober 2016	BNI bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perusahaan swasta untuk mengembangkan perekonomian para petambak udang di Provinsi Lampung
19 Oktober 2016	BNI dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menandatangani Perjanjian Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan sebagai langkah awal menuju *smart city*. BNI resmi menjadi bank yang menyalurkan dana bantuan bagi siswa sekolah dalam Program Indonesia Pintar (PIP) dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perluasan layanan BNI diarahkan ke Wilayah Timur Indonesia dalam hal ini dengan membuka outlet baru di ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yaitu Waisai
20 Oktober 2016	BNI gelar BUMN Mengajar di Malang untuk tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.
21 Oktober 2016	Peresmian pemasangan terminal parkir elektronik (TPE) di Jalan Ir. H Juanda, Jakarta Pusat. Sebanyak 41 TPE siap digunakan untuk pembayaran parker tepi jalan *(on-street parking)* di sepanjang jalan Juanda, jalan Pecenongan, dan jalan Pinangsia
24 Oktober 2016	BNI bagikan motor di BSD dalam rangka program Rejeki BNI Taplus.
28 Oktober 2016	BNI dan OJK melakukan Deklarasi Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dalam bentuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tabungan Simpel secara serentak dengan lebih dari 300 sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA yang tersebar di berbagai daerah layanan Kantor Cabang BNI
03 November 2016	BNI menyalurkan kredit untuk pembiayaan kebutuhan dana talangan Proyek Jalan Tol Pandaan Malang senilai Rp450miliar
09 November 2016	BNI ajak 250 Guru dan Pelajar Natuna gemar menabung dalam Program Pembinaan Daerah Perbatasan.
14 November 2016	Permudah Pengajuan KUR dan BNI Wirausaha,BNI rancang layanan pengajuan kredit secara *online* melalui *https://eform.bni.co.id*
02 Desember 2016	BNI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura luncurkan Kartu Pekerja Indonesia - Singapura (KPIS), yaitu Kartu Multimanfaat untuk Pekerja Indonesia berbasis Kartu Debit BNI.
05 Desember 2016	BNI menerbitkan produk baru yang dapat digunakan untuk memudahkan transaksi kaum urban, yaitu produk BNI UnikQu.
06 Desember 2016	BNI Layani Setoran Penerimaan Negara Rp250 Triliun
10 Desember 2016	BNI bangun Rumah Kreatif BUMN dan ajak Mitra Binaan masuki Ekosistem Ekonomi Digital.
16 Desember 2016	Penandatanganan Perjanjian Kredit antara sindikasi Bank Mandiri, BNI, dan SMIdengan PT Trans Bumi Serbaraja untuk proyek pembangunan jalan tol Serpong Balaraja.
19 Desember 2016	BNI bersama PT KAI menerbitkan kartu *TapCash RailPay*
29 Desember 2016	BNI *Develops Rural Entrepreneurship By Encouraging BUMDes Workshops to Strengthen Business*

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
1	Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero)	6 Januari 2016	√		Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
2	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Desember 2015	6 Januari 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
3	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban Dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Desember 2015	6 Januari 2016	-	√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
4	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Desember 2015	7 Januari 2016	-	√	Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)				

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
5	Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Januari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√	
6	Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Januari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
7	Laporan Informasi atau Fakta Material: Perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Hasil RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Januari 2016	14 Januari 2016		√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
8	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Up. OJK Kepala Departemen Pengawasan Bank 1	20 Januari 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
9	Penyampaian Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Up. OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal	21 Januari 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
10	Laporan Informasi atau Fakta Material: Perseroan menyelenggarakan *Analyst Meeting* Kinerja Desember 2015 (audited)	25 Januari 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
11	Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 Januari 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
12	Laporan Keuangan Konsolidasi Posisi Desember 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Januari 2016		√	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank				
13	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Desember 2015 (*audited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 Januari 2016		√	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	√	√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
14	Publikasi Pengumuman RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBk	2 Februari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
15	Pengumuman RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2 Februari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
16	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Januari 2016	9 Februari 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
17	Penyampaian Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Januari 2016	9 Februari 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
18	Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17 Februari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
19	Pemanggilan RUPS Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17 Februari 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
20	Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17 Februari 2016	cc	√	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
21	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Februari 2016	7 Maret 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
22	Penyampaian Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Februari 2016	7 Maret 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
23	Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Maret 2016	√	cc	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√			
24	Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Maret 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
25	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Maret 2016	cc	√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
26	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal	17 Maret 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√			
27	Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Up. Kepala Departemen Pengawasan Bank 1	17 Maret 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
28	Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada institusi-institusi beserta OJK	28 Maret 2016		√	Ketentuan Butir III.2 tentang laporan tahunan yang tercantum dalam keputusan direksi PT BEI No. Kep-306/BEJ/07-20 04 tgl.19 Jul 2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi. Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik				
29	Penyampaian Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Maret 2016	6 April 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
30	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Maret 2016	6 April 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
31	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Maret 2016	6 April 2016		√	Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)				
32	Laporan Informasi atau Fakta Material: *Analyst Meeting* Kinerja Maret 2016 (*unaudited*)	12 April 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
33	Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi Maret 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13 April 2016	√	cc	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
34	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Maret 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13 April 2016	√	cc	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
35	Keterbukaan Informasi Penggantian *Corporate Secretary* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26 April 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 35 / POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√	
36	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi April 2016	9 Mei 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
37	Laporan Informasi atau Fakta Material: Rencana pelaksanaan Pengalihan Saham Yang Dibeli Kembali Melalui Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan Dalam Bentuk Saham Perseroan	12 Mei 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√	
38	Perubahan Komite Audit	6 Juni 2016		√	Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/ PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014.	√	√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
39	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tk Posisi Mei 2016	7 Juni 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
40	Laporan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* Perseroan dalam *Treasury Stock* ke Rekening Penampungan	7 Juni 2016		√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik				
41	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7 Juni 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
42	Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	21 Juni 2016			Peraturan OJK No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Surat Edaran OJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka			√	
43	Laporan informasi dan fakta material: Rencana tambahan penyertaan modal pada anak perusahaan yaitu PT BNI Multifinance sebesar Rp203.000.000.000,00	23 Juni 2016				√	√	√	

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
44	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juni 2016	11 Juli 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
45	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Juni 2016	11 Juli 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
46	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi Juni 2016	11 Juli 2016		√	Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)				
47	Informasi Rencana *Public Expose* (*Investor Day 2016* dan *Investor Summit and Capital Market Expo 2016*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20 Juli 2016	√		Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√			
48	Laporan Keuangan Konsolidasi Posisi Juni 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25 Juli 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
49	Laporan Keuangan Publikasi Posisi Juni 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25 Juli 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
50	Laporan informasi dan fakta material: Perseroan menyelenggarakan *Analyst Meeting* Kinerja Juni 2016 (*unaudited*)	25 Juli 2016		√			√		
51	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk Posisi Juli 2016	8 Agustus 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
52	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8 Agustus 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
53	Penyampaian Laporan Hasil *Public Expose* 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9 Agustus 2016	√		Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	√			

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
54	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Agustus 2016	5 September 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
55	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Agustus 2016	5 September 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
56	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi September 2016	6 Oktober 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
57	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi September 2016	6 Oktober 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		

Akses Informasi dan Data Perusahaan

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
58	Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar (Lokal dan Asing) Posisi September 2016	6 Oktober 2016		√	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/ POJK.3/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan				
59	Laporan Informasi atau Fakta Material: Penyelenggaraan *Analyst Meeting* Kinerja September 2016 (*unaudited*)	13 Oktober 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
60	Laporan Keuangan Publikasi Posisi September 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Oktober 2016	√	cc	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	√	√		
61	Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi September 2016 (*unaudited*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14 Oktober 2016	√	cc	Peraturan OJK No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	√	√		
62	Laporan Informasi atau Fakta Material: Pelantikan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	26 Oktober 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
63	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Oktober 2016	7 November 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		

No.	Keterangan	Tanggal	Kepada		Referensi	Akses Website			Keterangan
			IDX	OJK		IDX	SPE	BNI	
64	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi Oktober 2016	7 November 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
65	Penyampaian Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta Asing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi November 2016	6 Desember 2016		√	Surat Ketua Bapepam No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Nomor: S-124/PM.23/2013 tanggal 27 Februari 2013 terkait permintaan data Hutang/ Kewajiban dalam bentuk Valuta Asing. Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik		√		
66	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Posisi November 2016	6 Desember 2016	cc	√	Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√		
67	Laporan Informasi atau Fakta Material: Penandatanganan Perjanjian atas fasilitas pinjaman US$ 750 juta kepada BNI	20 Desember 2016	cc	√	Peraturan OJK No. 31/ POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	√	√	√	

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

BNI merupakan Badan Usaha Milik Negara di mana kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar Saham Seri A Dwiwarna. Saham Seri A Dwiwarna memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahaan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran serta meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut.

Susunan Pemegang Saham

Perihal	Jumlah Lembar	Nilai Nominal	
		Nilai	Terbilang
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	Rp7500,00	tujuh ribu lima ratus rupiah
Seri B	289.341.866	Rp2.170.063.995.000,00	dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
Seri C	34.213.162.660	Rp12.829.935.997.500,00	dua belas triliun delapan ratus duapuluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah
Jumlah Modal Dasar	34.502.504.527	Rp15.000.000.000.000,00	lima belas triliun rupiah
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A Dwiwarna	1	Rp7500,00	tujuh ribu lima ratus rupiah
Seri B	289.341.866	Rp2.170.063.995.000,00	dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
Seri C	18.359.314.591	Rp6.884.742.971.625,00	enam triliun delapan ratus delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima
Jumlah Modal Disetor	18.648.656.458	Rp9.054.806.974.125,00	Sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah

Informasi Rinci Pemegang Saham Utama Dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM

Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing harus diperlakukan setara dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan. Perseroan aktif melakukan disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material Perseroan,

termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* Perseroan (Daftar Keterbukaan Informasi Tahun 2016 telah diungkapkan pada tabel sebelumnya). Hak-hak pemegang saham dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasar Modal. Hak-hak para pemangku kepentingan *(stakeholders)* harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan Perseroan.

AKSES INFORMASI

Akses Informasi Perseroan maupun data terkait *corporate action* dapat diakses melalui situs resmi website Perseroan di *http://bni.co.id/*. Pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait *corporate action* maupun data Perseroan dapat menghubungi via telepon di 021-5728387, Fax di 6221-5728053 atau *email ke : investor.relations@bni.co.id*.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, serta sebagai tindaklanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, adapun pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI tahun 2016 yang terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016
2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI posisi sampai dengan Desember 2016.
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI
7. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

Berikut Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2016

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan antara lain telah mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menyusun laporan penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Terintegrasi secara periodik (Juni dan Desember) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan (tanggal 15 Agustus dan tanggal 15 Februari).

Self Assessment terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari:

Faktor Penilaian

No	Faktor Penilaian
1	Direksi Entitas Utama
2	Dewan Komisaris Entitas Utama
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian sendiri tersebut dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat dengan penjelasan masing – masing peringkat sebagai berikut.

Peringkat

Peringkat	Definisi
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
4	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
5	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Untuk tahun 2016 Konglomerasi keuangan BNI telah menyusun penilaian sendiri terkait dengan implementasi Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi		
Peringkat		Definisi Peringkat
Juni 2016	Des 2016	
2	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi
   Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalahsebagai berikut :
   a. Konglomerasi Keuangan BNI telah memiliki Struktur Konglomerasi Keuangan yang memadai antara lain ditunjukkan melalui :
      - Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan kompetensi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
      - Telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
      - Telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
      - Telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Kebijakan Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
   b. Dalam rangka peningkatan koordinasi serta pemantauan kinerja perusahaan anak (LJK) BNI sebagai Entitas Utama telah memiliki Unit khusus yang mengelola Perusahaan Anak (UPPA).
   c. Direksi dan Dewan Komisaris BNI memiliki komitmen yang tinggi atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi yang Baik.

   Tidak terdapat Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

2. Proses Tata Kelola Terintegrasi
   Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut.
   a. Komite Tata Kelola Terintegrasi secara rutin memberi masukan kepada Direksi guna peningkatan Implementasi Tata Kelola yang Baik pada Konglomerasi Keuangan BNI.
   b. Masing – masing satuan kerja pada entitas utama secara aktif berkoordinasi dengan satuan kerja pada LJK guna memastikan penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

   Tidak terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi
   Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut.
   a. Konglomerasi Keuangan telah menerapkan standar pelaksanaan Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko secara Terintegrasi melalui masing-masing satuan kerja dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Dalam rangka peningkatan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, masing masing satuan kerja telah melakukan penyempurnaan perangkat-perangkat Tata Kelola yang menjadi kewenangannya.

   Tidak terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Melalui Surat Direksi Nomor: DIR/102 tanggal 13 Maret 2015 Konglomerasi Keuangan BNI telah melaporkan struktur Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut.

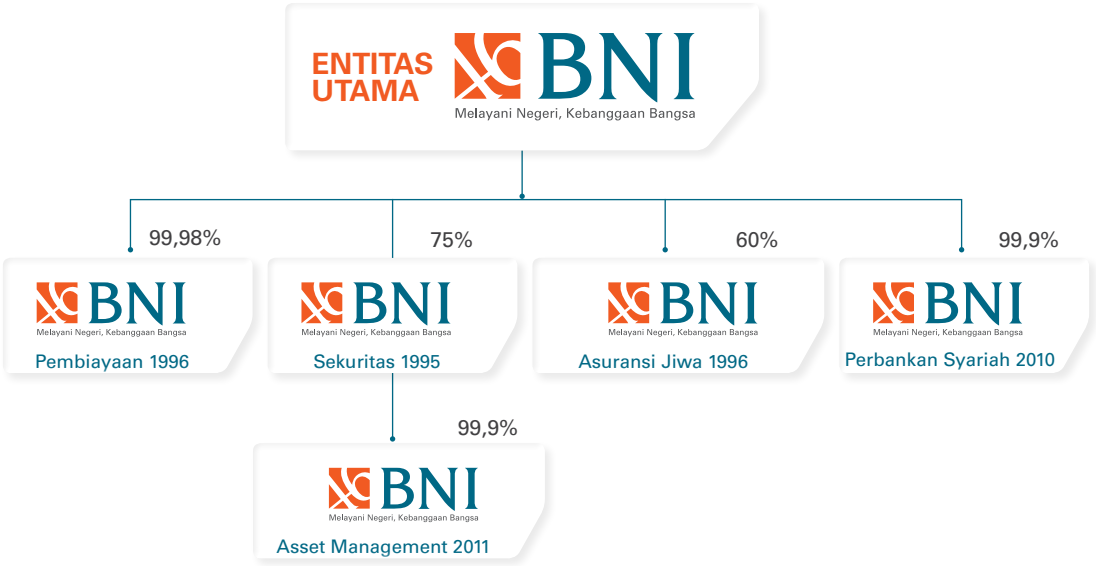

Konglomerasi Keuangan BNI telah memenuhi persyaratan administratif dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat OJK No. S-48/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015, Konglomerasi Keuangan BNI juga telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai berikut.

Ketua : Bapak Pradjoto (BNI)
Anggota :

- Bapak Joni Swastanto (BNI)
- Bapak Bistok Simbolon (BNI)
- Bapak KH. Ma'ruf Amin (DPS BNI Syariah)
- Bapak Krisna Wijaya (BNI Life)
- Bapak Fabianus Sudjatmoko (BNI Securities)
- Bapak Rizqullah (BNI Syariah)
- Ibu Rosa Lima Dwi Mutiara (BNI Multi Finance)
- Ibu Setyowati (Pihak Independen Komite TKT)

Sebagai pedoman BNI juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang disusun dan direview sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, adapun pedoman tersebut dapat diakses melalui *www.bni.co.id*

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI POSISI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNI .

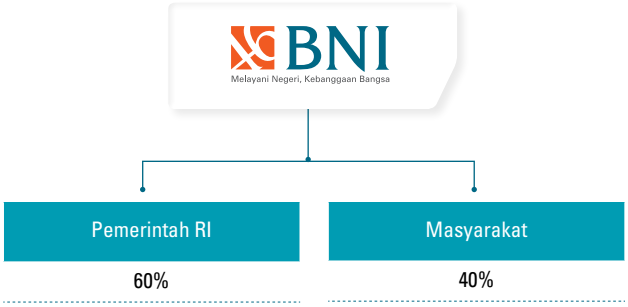

Struktur Kepemilikan Saham Lembaga Jasa keuangan yang berada pada Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu:

1. PT BNI Syariah

2. PT BNI Life Insurance

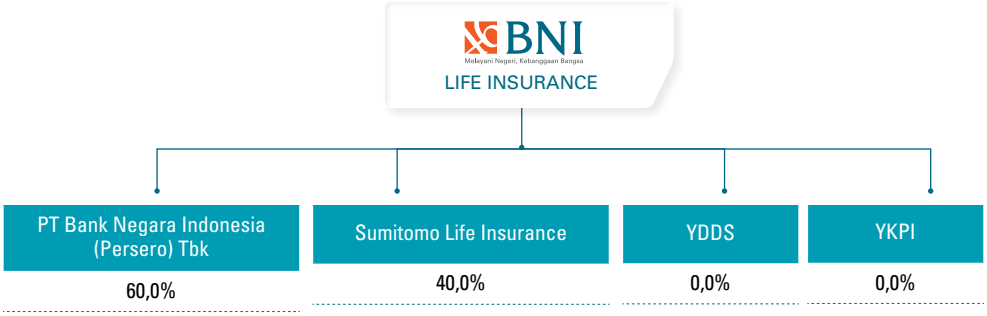

Keterangan:
**Yayasan Danar Dhana Swadharma*
***Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI*

3. PT BNI Securities

4. PT BNI Multifinance

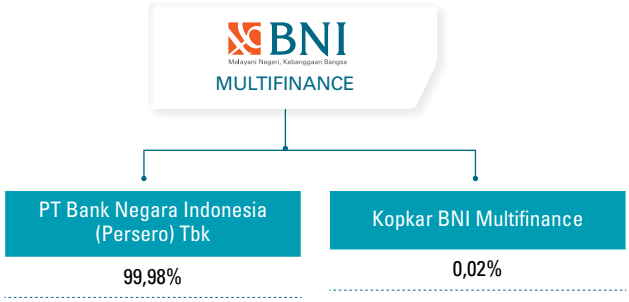

5. PT BNI Aset Management

STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Independen
Pradjoto	Wakil Komisaris Utama
Anny Ratnawati	Komisaris Independen
Pataniari Siahaan*)	Komisaris Independen
Revrisond Baswir*)	Komisaris Independen
Bistok Simbolon	Komisaris
Joni Swastanto	Komisaris Independen
Wahyu Kuncoro*)	Komisaris

**) Efektif setelah mendapatkan Keputusan Fit and Proper Test dari OJK*

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Achmad Baiquni	Direktur Utama
Suprajarto	Wakil Direktur Utama
Herry Sidharta	Direktur
Putrama Wahju Setyawan	Direktur
Rico Rizal Budidarmo	Direktur
Anggoro Eko Cahyo	Direktur
Panji Irawan	Direktur
Adi Sulistyowati	Direktur
Bob Tyasika Ananta	Direktur
Imam Budi Sarjito	Direktur

a. PT BNI Syariah

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Fero Poerbonegoro	Komisaris Utama

Rizqullah	Komisaris Independen

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Imam Teguh Saptono	Direktur Utama
Junaidi Hisom	Direktur
Kukuh Rahardjo	Direktur

b. PT BNI Life Insurance

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Krisna Wijaya	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Darwin Suzandi	Komisaris
Shinzo Kono	Komisaris
Mauli Adiwarman Idris	Komisaris Independen
Wiriadi Saputra	Komisaris Independen

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Budi T.A. Tampubolon	Direktur Utama
Geger N. Maulana	Direktur
Kazuhiko Arai	Direktur
Hirokazu Todaka	Direktur
Intan Sari Abdams Katoppo	Direktur

c. PT BNI Securities

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Fabianus Sudjatmoko	Presiden Komisaris / Komisaris Independen
Ryosuke Hayashi	Komisaris
Suhendry Hafni	Komisaris

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Adiyasa Suhadibroto	Presiden Direktur
Reza Benito Zahar	Direktur
Aswardin	Direktur

Kenichiro Matsuhisa	Direktur

d. PT BNI Multifinance

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Rosa Lima Dwi Mutiari	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Muhammad Gunawan Putra	Komisaris

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Suwaluyo	Direktur Utama
Rana Ranadi	Direktur

e. PT BNI Aset Manajemen

Struktur Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Evi Firmansyah	Presiden Komisaris
Anung F Nugroho	Komisaris

Struktur Direksi

Nama	Jabatan
Reita Farianti	Presiden Direktur
Isbono Mi Putro	Direktur

PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Guna menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan BNI, diperlukan prinsip – prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada GCG Roadmap yang diterbitkan oleh OJK serta ASEAN Corporate Governance Scorecard yang menjadi acuan implementasi penerapan GCG.

Sesuai dengan hal tersebut prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mengacu pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang terpisah dari BNI sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan
3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, di mana dalam pengelolaannya BNI merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi keuangan BNI
4. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam pedoman ini berlaku bagi Perusahaan Anak sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan Anak yang belum sesuai

dengan Pedoman ini maka wajib disesuaikan.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Transaksi keuangan intra group dalam Konglomerasi Keuangan BNI harus dilakukan berdasarkan cost and benefit analysis yang memadai, memiliki underlying yang jelas, memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BNI SELAKU ENTITAS UTAMA PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank, antara lain telah diwajibkan bagi setiap Bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang terdiri dari:

No	Faktor Penilaian
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4.	Penanganan benturan kepentingan
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
6.	Penerapan fungsi audit intern
7.	Penerapan fungsi audit ekstern
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures)
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal

No	Faktor Penilaian
11.	Rencana strategis Bank

Penilaian sendiri tersebut dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat dengan penjelasan masing – masing peringkat sebagai berikut.

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Laporan Penilaian Sendiri *(Self Assesment)* GCG PT Bank
Entitas Utama : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Posisi Laporan : Tahun 2016

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi		
Peringkat		Definisi Peringkat
Juni 2016	Des 2016	

2	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan GCG disimpulkan bahwa:

A. ***Governance Structure***

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
   a. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
   b. Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur GCG yang memadai. Struktur dan Infrastruktur GCG tersebut senantiasa direview secara berkalayang dapat diakses oleh segenap stakeholder melalui website www.bni.co.id.
   c. Struktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana 50% Dewan Komisaris berasal dari pihak independen. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bank.
   d. Jumlah dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, di mana jumlah Direksi sebanyak 10 (sepuluh) Direktur dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki integritas, kompetensi dan pengetahuan yang sangat memadai.
   e. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
   f. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   g. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan telah direview sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
   h. Dalam rangka peningkatan budaya pembelajaran BNI telah mendirikan BNI Corporate University, yang memiliki tugas antara lain meningkatkan budaya pembelajaran dan peningkatan pengetahuan kepada segenap pegawai BNI.
   i. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite telah memiliki Piagam/Charter sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   j. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang lengkap antara lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman Benturan Kepentingan, Buku Kode Etik BNI, Buku Budaya Kerja `Prinsip 46`, Anggaran Dasar BNI dan Pedoman Perusahaan BNI. Di samping itu, Bank telah memiliki ketentuan tentang pemberian kredit kepada calon debitur yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemroses dan/atau pemutus kredit, dan di dalam Pedoman Perusahaan terkait BNI juga memuat ketentuan-ketentuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam proses Pengadaan barang dan Jasa. Bank telah menyusunPedoman Perusahaan Benturan Kepentingan sebagai payung kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur definisi, bentuk, penyebab, langkah-langkah

pencegahan berikut sanksi pelanggaran.

k. Direktur Kepatuhandan Risiko Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi,tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama,tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan serta akuntansi, logistik dan pengadaan barang/ jasa, teknologi informasi maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan dalam hal ini Divisi Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhandan Risiko Perusahaan.

l. Kecukupan aspek Governance Structure terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin :
   - BNI telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (dhi. Satuan Pengawasan Internal atau SPI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama (solid line) dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit (dotted line).
   - BNI juga telah menyusun Piagam Audit Internal, Pedoman Perusahaan Audit Internal, Struktur Organisasi SPI beserta tugas pokok dan fungsinya.

m. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SPI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Modal Manusia (HCT), sedangkan peningkatan kualitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNI Corporate University (BNV).

n. Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

o. Bank telah memiliki struktur organisasi dan infrastruktur (kebijakan, prosedur, dan limit) untuk pelaksanaan Manajemen Risiko.

p. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Bank juga melakukan review secara periodik untukInternal Rating System (corporate, commercial, and small business), Loan Portfolio Management, LoanExposure Limit (per segmen, per sektor ekonomi dan per regional), BMPK (untuk internal BNI melalui Internal House Limit), Country Exposure Limit, Limit Risiko Pasar, Limit Risiko Likuiditas, dan Limit Risiko Operasional.

q. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh IT security system Bank terkait pemeliharaan aset dan informasi yang memadai (menambahkan informasi ISO yang telah dilaksanakan oleh Divisi STI)

r. BNI telah memiliki kebijakan internal mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan akan melengkapi dengan menyusun Kebijakan Keterbukaan Informasi yang mengatur antara lain:
   - Informasi apa yang dapat dipublikasikan
   - Tujuan dan Prinsip-prinsip keterbukaan (mengapa informasi tersebut harus diumumkan)
   - Kapan dapat diumumkan
   - Siapa pejabat Perusahaan yang dapat mengumumkan
   - Kepada siapa informasi diumumkan
   - Bagaimana cara mengumumkannya

   Tujuan dari pengungkapan adalah untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam rangka membantu pihak-pihak tersebut dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan.

s. Rencana strategis Bank telah disusun

dalam Rencana Korporasi (Corporate Plan), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Bisnis (Business Plan) yang disesuaikandengan Visi dan Misi Bank.

t. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya olehpemilik, yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

2. Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah:
   Tidak ada

B. ***Governance Process***

1. Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah:
   a. Sosialisasi dan internalisasi prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten antara lain dengan penandatangan Komitmen GCG setiap awal tahun oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap pegawai, pembacaan Budaya Kerja Prinsip 46 dan Kode Etik BNI pada saat Hari Mutu yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan di segenap unit organisasi BNI.
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan, serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Dewan Komisaris telah dan terus berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara efektifantara lain melalui forumRapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Sektor secara rutin rata-rata setiap minggu untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG.
   d. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi disertai kewajiban penyampaian laporan tindaklanjut dari unit-unit pelaksana. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
   e. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin (rata-rata setiap minggu) yang hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai masukan. Dalam pertemuan tersebut Komite melibatkan / mengundang divisi-divisi atau unit-unit terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.
   f. BenturanKepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan kredit, telah diadministrasikan serta terdokumentasi dengan baik. Sebab-sebab pengalihan proses atau pengambilan keputusan kredit karena adanya benturan kepentingan diinformasikan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK). PAK beserta data dan dokumen dalam rangka pemberian kredit tersebut disimpan / didokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
   g. Direktur Kepatuhandan Risiko Perusahaanbeserta Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
   h. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review, pelaksanaan dan pemantauan APU-PPT, serta penegakan etik kepatuhan melalui WBS dan Strategi Anti Fraud.
   i. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      - Direksi bersama SPI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui

pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI.

- Pelaksanaan tugas SPI dilakukan review setiap 3 (tiga) tahun oleh pihak eksternal.
- SPI dalam pelaksanaan tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut.
  - » Setiap tahun membuat Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan (RAT) yang berdasarkan risiko. Melalui Kontrol Internal di setiap unit organisasi, SPI melakukan review pada seluruh aktivitas yang ada pada unit organisasi yang bersangkutan.
  - » Pelaksanaan audit dilakukan menggunakan program audit yang memadai dengan ruang lingkup pemeriksaan berupa penilaian kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja.
  - » SPI bekerja secara independen sesuai kode etik yang tercantum dalam Internal Audit Charter.
  - » Seluruh hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.
  - » Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dipantau oleh SPI dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap triwulan.

j. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP secara independen.

k. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan, antara lain melalui Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Direksi dan Komisaris, dan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara berkala.

l. Pengambilan keputusan pemberian kredit telah dilakukan secara independen dalam suatu komite yang beranggotakan Unit Bisnis dan Unit Risiko serta persetujuan Dewan Komisaris untuk pemberian kredit kepada pihak terkait.

m. Bank secara transparan telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku;

n. Bank secara transparan telah menyampaikan informasi produk dan jasa antara lain melalui media cetak, media elektronik, website BNI, brosur/leaflet, iklan, pengumuman di kantor-kantor cabang.

o. Bank telah menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku, antara lain melalui sarana sistem Online Customer Complaint (OCC) untuk mempercepat proses penyelesaian nasabah dengan cepat dan dapat memantau proses penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh unit yang berkompeten serta sebagai database complaint nasabah. Bank memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

p. Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun realistis, komprehensif dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

q. Direksi telah mengkomunikasikan dan melaksanakan RBB secara efektif.

r. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

s. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

t. Pemilik menunjukan keseriusan dan mendukung pelaksanaan RBB.

u. Bank telah menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui upaya untuk memberikan pemahaman kepada *customer* dan pihak ketiga bahwa BNI telah menerapkan kebijakan *Anti Fraud* dan tidak mentolerir segala bentuk *Fraud* termasuk namun tidak pada gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, antara lain melalui:
   - Pencantuman larangan menerima dan memberi hadiah (gratifikasi) dalam surat keputusan kredit.
   - Publikasi media eksternal mengenai larangan pemberian hadiah (gratifikasi) antara lain namun tidak terbatas pada waktu menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru.
   - Penandatanganan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
   - Komunikasi langsung antara lain melalui vendor gathering.
   - Pencantuman larangan menerima dan memberi hadiah (gratifikasi) dalam surat penetapan/penunjukkan sebagai Vendor/Supplier/Merchant/Rekanan.

2. Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah:
   Bank telah memiliki pedoman dan infrastruktur terkait penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, namun masih perlu penyempurnaan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

C. ***Governance Outcome***

1. Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berjalan dengan baik, hal tersebut tercermin dari penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak independenden yaitu :
      - Indonesian Intitute of Corporate Director yang melakukan penilaian implementasi GCG berdasarkan ASEAN CG Scorecard, memberikan penilaian dengan predikat baik (skor 87,33) atas implementasi GCG di BNI, di mana nilai tersebut naik secara signifikan dibandingkan tahun 2015.
      - Melalui Corporate Governance Perception Index tahun 2016, The Indonesian Institute for Corporate Governance memberikan predikat Indonesia Most Trusted Company kepada BNI selama 6 (enam) tahun berturut – turut.
   b. Tujuan BNI aktif mengikuti pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh pihak independen adalah untuk mendapatkan feedback guna meningkatkan praktik implementasi GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan best practice.
   c. Seluruh hasil rapat Dewan Komisarisatau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur sektor dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.
   d. Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur sektor dituangkan dalam notulen rapat termasuk apabila terdapat perbedaaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir (agar diketahui) dan terdokumentasi dengan baik.
   e. Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2016.
   f. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
   g. Laporan hasil tugas Komite bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris pada saat melaksanakan

tugasnya memberikan saran atau masukan kepada Direksi.

h. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
i. Kebijakan, Pedoman Perusahaan dan produk yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan eksternal atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan .
k. Kepatuhan Bank tergolong baik, ketentuan Prudential Banking (CAR, NPL, BMPK, GWM, dan NOP) secara umum telah dipenuhi/sesuai dengan ketentuan.
l. Kualitasoutcomeatas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan stakeholders (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SPI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi rencana audit (RAT);rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.
m. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP baik.
n. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan tidak ada bisnis yang melampaui kemampuan modal bank dalam menyerap risiko.
o. Tidak ada pelampauan dan pelanggaran BMPK maupun prinsip kehati-hatian dan sebagai langkah antisipasi, konsultasi untuk pemberian kredit besar kepada pihak terkait dilakukan secara efektif.
p. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
q. Laporan pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
r. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi serta disetujui oleh Dewan Komisaris.
s. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
t. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
u. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.
v. Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif (SWOT Analyisis).
w. Rencana strategis bank didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai.
x. Pemilik menetapkan kebijakan pembagian keuntungan dengan memperhatikan kemampuan Bank.
y. Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank.
z. Kinerja Bank dari waktu ke waktu mengalami perbaikan yang cukup signifikan, walaupun kondisi ekonomi secara makro belum stabil.

2. Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah:
Pada tahun 2016 masih terdapat pengenaan denda dan teguran dari pihak regulator.

Laporan Tahunan 2016

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Pendekatan Holistik Terintegrasi Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility 649
- CSR Terkait Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup 650
- CSR Terkait Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja 656
- CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan 660
- CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah 673

* Informasi lebih lengkap tentang Tanggung Jawab Soaial Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BNI Tahun 2016

BNI berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, dalam wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Komitmen tersebut berlandaskan pada salah satu misi BNI untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas. Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab maka BNI senantiasa mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui perolehan laba semata. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk kinerja dan investasi sosial BNI kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, BNI ingin menciptakan manfaat atas kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pendekatan Holistik Terintegrasi Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

BNI menyadari bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). BNI berkomitmen bahwa dengan atau tanpa aturan hukum, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi moralitas. Sehingga, parameter keberhasilan adalah dengan mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. BNI menganut prinsip bahwa yang mengajarkan agar suatu pihak memperlakukan pihak lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan demikian, BNI berkeyakinan bahwa perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dalam melaksanakan CSR, BNI berpedoman pada ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Dalam ISO 26000, CSR meliputi 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 1) *Organizational Governance*, 2) Hak Asasi Manusia, 3) Ketenagakerjaan, 4) Lingkungan Hidup, 5) Praktik Kegiatan Institusi yang Adil, 6) Isu Konsumen, dan 7) Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

Gambar Pelaksanaan CSR Secara Holistik

Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance of Social Responsibility

CSR Terkait Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik merupakan komitmen Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjadikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan CSR Perseroan.

Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sumber kehidupan yang utama.

Kebijakan

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan dan perlindungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup. Dalam upaya pelaksanaan efisiensi operasional, perseroan memberikan himbauan melalui surat edaran yang disampaikan secara berkala kepada seluruh Unit Kerja yang meliputi seluruh Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang untuk melaksanakan peningkatan disiplin dan *monitoring* yang ketat terhadap pemanfaatan listrik, telepon, air, bahan bakar kendaraan dinas jabatan dan alat tulis kantor. Adapun pelaksanaan peningkatan efisiensi dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

1. Efisiensi biaya telepon dilakukan dengan mengefektifkan penggunaan *Voice over Internet Protocol* (VoIP).
2. Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan memasang daya listrik sesuai kebutuhan kantor, mematikan *air conditioner*/lampu/komputer dan peralatan kantor lainnya jika tidak digunakan, pengoperasian *air conditioner* sentral 30 menit sebelum jam kerja sampai dengan 30 menit setelah jam kerja, penggunaan lampu hemat energi.
3. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor dilakukan dengan pemanfaatan kertas bekas untuk pencetakan memo/surat/hasil pekerjaan lainya, mempertimbangkan penggunaan tinta *printer*/*toner* alternatif yang kompetibel dengan printer yang digunakan.

Efisiensi juga dapat dilaksanakan dengan cara lain apabila unit kerja memiliki metode efisiensi lainya. Pelaksanaan efisiensi tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab terhadap Lingkungan Hidup juga diaplikasikan pada Pedoman Fasilitas Kredit Komersial Perseroan yaitu Surat Edaran kepada unit bisnis mengenai persyaratan kredit,BNI mempersyaratkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan/atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kegiatan

Beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan oleh Bank dalam mendukung program tanggung jawab sosial terhadap pelestarian lingkungan sepanjang tahun 2016, yaitu:

- **Aksi lingkungan sebagai dukungan Hari Pers Nasional 2016**
  Dalam salah satu rangkaian HPN 2016,kegiatan CSR terkait pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bank diantaranya berupa bersih-bersih pantai dan penanaman pohon. Program ini sejalan dengan salah satu misi BNI yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas.

Bentuk partisipasi BNI dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan 3 (tiga) unit motor pengangkut sampah untuk kebersihan lingkungan pantai kuta, Lombok Tengah;
b. Program Penghijauan berupa penanaman 1.000 (seribu) pohon atau tanaman di jalur lingkar selatan Kabupaten Lombok Selatan; dan
c. Program bersih-bersih Pantai Kuta, Lombok.

- **Sinergi Penghijauan Ruas Tol Cikampek**
  Sebagai bentuk kepedulian BUMN dalam hal pelestarian alam dan penghijauan, sinergi BUMN antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk mengadakan program penanaman 10.000 pohon yang diawali dengan program penghijauan tahap I pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 di Km 59+200 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kegiatan ini diresmikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar dengan simbolisasi penanaman pohon yang diserahkan langsung oleh Adityawarman Direktur Utama Jasa Marga, dan Achmad Baiquni Direktur Utama BNI.
  Acara ini juga dihadiri oleh Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, serta 70 Direktur Utama BUMN.

  Kerjasama sinergi CSR antar BUMN ini dapat dijadikan *pilot project* bagi BUMN lainnya, dalam kegiatan tersebut BNI memberikan 10.000 pohon yang akan ditanam sepanjang jalur KM 45-71 kawasan Jakarta Cikampek dilahan milik Jasa Marga. Pada penghijauan tahap I ini dilakukan penanaman pohon sejumlah 850 pohon, dan tahap berikutnya akan dilanjutkan secara bertahap di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga mencapai total 10.000 pohon. Untuk jenis pohon yang ditanam adalah pohon Mahoni, Bintaro, dan Bungur yang memiliki daya resapan air yang cukup tinggi sehingga dapat pula berguna untuk menahan longsoran.

- **Hari Peduli Sampah Nasional 2016**
  Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Jakarta, BNI turut mendukung upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui aktivitas pembersihan sampah disekitar lingkungan rumah maupun dikawasan publik. BNI mendukung 3 program diantaranya sebagai berikut:

  a. Program BERGERAK untuk Indonesia Bebas Sampah 2020
     Adalah operasi memungut sampah di kawasan jalan Jenderal Sudirman hingga Bundara HI-Jakarta bersama Yayasan Pelita Cakrawala Inspirasi.
  b. Program Bersih-Bersih Gunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
     Adalah program kerja bakti dengan mengumpulkan, memilah dan membersihkan sampah yang menyebabkan kondisi kritis di kawasan wisata alam gunung. Melalui program ini, diupayakan agar penumpukan sampah plastik, besi, maupun *styrofoam* yang sangat berbahaya bagi ekosistem kawawan wisata alam dapat dibersihkan.
  c. Program daur ulang sampah kertas yang dilaksanakan BNI bersama Nara Kreatif
     BNI melakukan aksi pengumpulan sampah kertas melalui partisipasi seluruh Divisi yang berada di 3 gedung yaitu Kantor Pusat, Gedung Landmark dan Gedung Wisma 46. Selanjutnya sampah kertas yang sudah terkumpul tersebut akan didaur ulang oleh Yayasan Nara Kreatif untuk kemudian dijadikan souvenir yang dipergunakan untuk keperluan aktivitas PKBL BNI.

- **Pembibitan Pohon di Ambon**
  BNI bekerjasama dengan Kodam XVI/Pattimura Ambon melalui program pembibitan pohon sebanyak 25.000 bibit pohon tanaman keras (kayu dan buah) yang tersebar di 3 (tiga) pulau yaitu di Pulau Ambon, Pulau Seram dan Pulau Halmahera dengan nilai kerjasama sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang nantinya bibit-bibit pohon tersebut akan ditanam di daerah yang membutuhkan penghijauan khususnya Maluku dan Maluku Utara.Program pembibitan 25.000 bibit yang akan dilaksanakan di Maluku, bertujuan untuk:

  a. Memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan dan manfaat ekonomis bagi masyarakat;
  b. Menggerakkan ekonomi pedesaan, meningkatkan kemitraan dan pengentasan kemiskinan;

c. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi agar konflik di wilayah tidak terjadi lagi; dan
d. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat khususnya generasi muda agar timbul kecintaan terhadap lingkungan hidup.

Adapun bentuk dukunganyang diberikan oleh BNI adalah dengan menyumbangkan jenis bibit pohon yang disemai seperti Jabon Merah/Samama, Pala, Cengkeh, Durian, Sirsak, Mangga, Sunkist Kisar, Gandaria.

- **Hutan dan Taman Kota**
  BNI berkontribusi bagi perkotaan di Indonesia melalui pembangunan hutan dan taman kota yang berbasis kebutuhan setempat dan tanaman lokal (endemik) khas daerah. Program ini dilatarbelakangi kepedulian BNI terhadap mitigasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hutan kota ini memiliki nilai estetika, menjadi fasilitas ekowisata, sarana pendidikan, dan sarana interaksi sosial.

  Tujuan program hutan dan kota BNI adalah:
  - Mendukung program pemerintah *one billion Indonesia trees* (OBIT) dan program penurunan emisi karbon Indonesia sebesar 26%.
  - Menyeimbangkan bisnis BNI dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
  - Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup di perkotaan.
  - Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan luasan ruang terbuka hijau.
  - Menjaga lahan gambut tetap lestari dan tidak mengalami kebakaran ketika musim kemarau.

- **Fungsi hutan kota BNI adalah:**
  - Meningkatkan kualitas ekologis (iklim mikro, tanah, serapan air, serta menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan fisik kota).
  - Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
  - Sebagai alternatif sumber pendapatan pada masa pembangunan serta pasca pembangunan (memanfaatkan hutan kota dan produk hutan kota secara berkelanjutan).
  - Memfasilitasi terbentuknya komunitas peduli lingkungan yang mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

CSR Terkait Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Nama	Lokasi	Luasan	Konsep
Hutan Kota BNI Gampong Tibang Banda Aceh	Gampong Tibang, Banda Aceh	6.75 Ha	Hutan tanaman keras
Taman Kota Trembesi BNI Peulanggahan Banda Aceh	Gampong Peulanggahan, Banda Aceh	1.5 Ha	Taman trembesi
Taman Pintar BNI – DKI Jakarta	Rawamangun, DKI Jakarta	3,104.9 m2	Taman dan fasilitas bermain
Taman Kota Wonosari	Gunung Kidul, DI Yogyakarta	1.7 Ha	Taman dan fasilitas bermain
Hutan dan Taman Kota BNI Stadion Manahan Surakarta	Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah	17 Ha	Hutan
Hutan dan Taman Kota Keputih Surabaya	Surabaya, Jawa Timur	4.8 Ha	Taman Kota
Hutan Kota Udayana, Denpasar, Bali	Denpasar, Bali	35 Ha	Hutan
Hutan Gambut Jumpun Pambelom, Palangkaraya	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	10 Ha	Hutan Gambut
Vertikal Garden Banjarbaru	Banjar Baru, Kalimantan Selatan	40 titik *vertical garden*	Taman Vertikal
Taman Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	308.4 M2	Taman

- **Pembenahan Kota Trenggalek**
  Pembenahan fasilitas kota yang rencananya meliputi penataan taman di median jalan, penambahan canopy untuk toko-toko dan penambahan *lighting* untuk pepohonan di kiri kanan jalan, kursi taman dan lain-lain.

- **Penghijauan di Kota Solo**
  Dalam rangka melaksanakan amanat Presiden RI unluk menjadikan Solo Raya sebagai pusat penghijauan, Panglima TNI melalui Pangdam IV Diponegoro akan melaksanakan program penghijauan dengan pola padat karya di wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Kabupalen Klaten, Boyolali. Sragen. Sukoharjo. Karanganyar dan Wonogori.

  Pelaksanaan program penghijauan Solo Raya tersebut, akan dilaksanakan oleh Korem 074/ WaraslIralama dengan jenis tanaman yang akan ditanam antara lain Trembesi sebanyak 22.065 bibit dan Campur sebanyak 45.935 bibit dengan melibatakan 2.436 TNI dan 6.800 masyarakat yang berasal dari Pemda dan Dinas Instansi terkait, Swasta/BUMN dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

- **Pelepasliaran Orangutan di Kalimantan Tengah dan Penanaman Pohon di Kalimantan Timur**
  BNI turut mendukung program penanaman hutan kembali (reboisasi) yang diprakarsai oleh *The Borneo Orangutan Survival Foundation* atau Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (YBOS).Pelepasliaran orangutan dilaksanakan pada akhir bulan April 2016 di hutan Nyaru Menteng Kalimantan Tengah dan Kehje Sewen Kalimantan Timur dengan jumlah orangutan yang dilepasliarkan sejumlah 4 - 20 orangutan.Sedangkan, kegiatan reboisasi guna menyesuaikan kembali habitat asli orangutan,dilaksanakan antara bulan Januari hinggaApril 2016 di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. BNI turut berpartisipasidalam kegiatan reboisasi tanah seluas 5 hektar yang akan ditanami 2.000 bibit pohon dan biaya perawatan selama 5 tahun.

- ***Earth Hour* 2016**
  Kontribusi secara nyata dalam melestarikan lingkungan hidup terus dilakukan oleh BNI. Salah astu wujud dari aksi tersebut, BNI turut serta dalam kampanye "*Earth Hour* 2016". Melalui kampanye yang dilakukan secara serentak di

seluruh Indonesia pada 19 Maret 2016, BNI menjalankan program hemat energi dengan memadamkan seluruh lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan selama satu jam di Kantor Pusat BNI. Selain itu, BNI juga aktif menghimbau pemadaman listrik di kantor cabang seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Adapun perkiraan penghematan yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut mencapai 23 mega watt.

- ***Green Building***
  BNI bersama PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk bersinergi mendirikan Menara BNI sebagai kantor BNI beserta entitas anak di kawasan strategis Kota Jakarta. Gedung ini direncanakan akan menempati lahan seluas 14.817 m2 dengan total konstruksi seluas 64.061 m2. Bangunan ini akan terdiri dari 1 *basement*, 1 *semi basement*, 1 *ground floor*, 30 lantai, 1 *roof* dan 1 *parapet roof*.Dengan mengusung semangat melestarikan lingkungan hidup, Menara BNI dibangun dengan konsep *green building*. Konsep *green* yang diimplementasikan antara lain adalah ruang terbuka hijau yang cukup luas, serapan hujan yang maksimal, penyediaan lahan parkir sepeda serta fasilitas *shower*untuk mendukung komunitas*bike to work*. Efesiensi penggunaan energi dilakukan melalui *passive design* dan *active design* serta *daylight censor* yang secara otomatis mematikan lampu saat cahaya matahari cukup terang serta penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan.

- ***Green banking***
  Green banking merupakan sebuah konsep kegiatan pada sebuah institusi keuangan yang selalu memberikan prioritas pada keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan pratik bisnisnya. Selama ini, penerapan *Green Banking* oleh BNI adalah bukti kepedulian kami terhadap lingkungan. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional, industri sampai pada skala menengah dan kecil harus tetap mengedepankan pertumbuhan yang ramah lingkungan sehingga pertumbuhan yang dicapai adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen ini menunjukkan jika BNI terus berusaha untuk memberikan peran yang nyata bagi keberlanjutan lingkungan dalam lingkup lokal maupun regional.

- **BNI *Go Green***

BNI gogreen

BNI *Go Green* adalah program yang berbasis pada *triple bottom line principles*, yaitu *Profit, People*, dan *Planet* (3P). Program BNI ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*profit*), berbasis pada program pelestarian sumber daya alam (*planet*), serta melibatkan masyarakat (*people*). Melalui BNI *Go Green*, masyarakat tidak lagi hanya sekadar menjadi objek, namun juga sebagai subjek dalam program *community engangement*. Artinya, melalui program ini masyarakat akan lebih memiliki tanggung jawab untuk turut serta berkontribusi dalam melestarikan program-program BNI *Go Green*.

- ***Green Activity***
  Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kepedulian komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap lingkungan menjadi semakin penting. Oleh sebab itu, BNI menyadari semakin besarnya kebutuhan untuk memberikan pendidikan kepada para nasabah dan seluruh masyarakat tentang keutamaan kelestarian lingkungan. Sepanjang tahun 2016, BNI berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Di samping itu, program bina lingkungan BNI juga turut memberikan dukungan berupa bantuan materi sebagai bentuk kontribusi kami pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada lingkungan.

- ***Green Lending***
  Implementasi prinsip-prinsip *green lending* di BNIbertujuan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dan penerapan *triple bottom line*. *Green lending* merupakan pinjaman yang diprioritaskan untuk usaha yang ramah lingkungan. Penyaluran *green lending* antara lain dipergunakan untuk membiayai perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, termasuk perusahaan yang memiliki salah satu atau lebih

dari karakteristik berikut:
a. Melakukan efisiensi dan konservasi energi
b. Melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam
c. Melakukan inisiatif mitigasi gas rumah kaca (emisi karbon)
d. Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan usahanya
e. Menggunakan limbah sebagai bahan bakar produksi yang ramah lingkungan

- **Green Operation**
  BNI senantiasa menerapkan *green operation* di lingkungan operasional perusahaan. Kami menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Sepanjang tahun 2016, kebijakan BNI terkait dengan upaya perusahaan agar dapat secara intens melestarikan lingkungan terus kami sempurnakan, seperti efisiensi konsumsi energi listrik, daur ulang air konsumsi kantor, pengelolaan limbah, dan penghematan penggunaan kertas.

- ***Green Financing***
  Sejak tahun 2007 BNI telah aktif dalam sektor pembiayaan ramah lingkungan (kredit korporat ke pembangkit listrik *geothermal*, *minihydro*, biogas) termasuk penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan di bidang pelestarian alam seperti penanaman pohon, hutan kota, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (*hydro*, biogas, dan biomassa) dan pengembangan desa ekowisata.

- **Pemeliharaan Kendaraan Operasional**
  BNI berkomitmen untuk selalu melakukan pemeliharaan terhadap seluruh kendaraan operasional perusahaan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Pemeliharaan kendaraan operasional dan pengujian emisi gas buang dilakukan secara berkala sehingga emisi dari aktivitas transportasi dapat terus dikurangi. Di samping itu, BNI secara berkala juga mengganti kendaraan operasional perusahaan. Secara bertahap, BNI meningkatkan jumlah kendaraan operasional yang hemat bahan bakar yang menggunakan volume silinder (*cubical centimeter*) yang relatif lebih rendah.

- **Pengelolaan Limbah**
  BNI terus berusaha berupaya mengurangi kerusakan lingkungan dengan membuang limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA). BNI senantiasa menerapkan kebijakan *reduce, reuse,* dan *recycle* (3R) dalam pengelolaannya. BNI menyalurkan sampah plastik dan kertas kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Sedangkan untuk limbah berbahaya berupa minyak pelumas dari genset, BNI menerapkan prosedur penanganan pelumas bekas dengan penuh kehati-hatian. BNI selalu berusaha agar sumber daya yang menangani pelumas bekas dapat ditampung dan disimpan di tempat yang aman sebelum diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

- **Minimalisasi Penggunaan Kertas**
  Aktivitas dan operasional bank tidak terlepas dari penggunaan kertas. Namun, kami menyadari bahwa semakin banyak penggunaan kertas, akan semakin banyak pula hutan dan pohon yang harus ditebang sebagai material pembuatan kertas. Untuk itu, BNI berkomitmen untuk menghemat penggunaan kertas dengan melakukan berbagai macam kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan, salah satunya melalui paperless billing dan mengajak para nasabah untuk memaksimalkan fungsi internet banking, website, email dan perangkat digital lainnya untuk keperluan perbankan mereka.

Sertifikasi

Selama periode 2016, BNI belum memiliki sertifikasi terkait dengan lingkungan hidup .

CSR Terkait Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan

Kebijakan

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah menjadi perusahaan publik, Perseroan berupaya untuk menjadi Perusahaan yang taat azas dan taat aturan. Termasuk di bidang ketenagakerjaan, Perseroan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang ketenagakerjaan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme karyawan serta sistem imbal jasa yang sepadan.

Kegiatan

Pelaksanaan kebijakan Bank terkait bidang ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan
Bank melalui BNI *Corporate University* memberikan setiap pegawainya kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang aplikatif, serta memberikan kesempatan untuk tumbuh melalui kinerja yang baik dan memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kinerja bisnis Bank. Keseluruhan program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BNI *Corporate University* ditentukan oleh kebutuhan Bank dan pegawai dengan memperhatikan kesetaraan *gender* dan persamaaan kesempatan kepada seluruh level organisasi.

Hubungan Industrial
Bank senantiasa berupaya untuk mendorong terciptanya Hubungan Industrial yang berkualitas dan harmonis dengan Serikat Pekerja sebagai perwakilan dari pegawai. Melalui forum kemitraan dengan Serikat Pekerja, pegawai dapat menyampaikan aspirasi kepada perusahaansehingga komunikasi dua arah antara perusahaan dan pegawai tetap terjaga.

Perjanjian Kerja Bersama
Saat ini di lingkungan Perseroan terdapat organisasi Serikat Pekerja (SP) BNI. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu sarana utama pencapaian hubungan industrial yang serasi, harmonis, aman dan dinamis guna menjamin kepastian hak dan kewajiban karyawan atau manajemen perusahaan, ketenangan dalam bekerja, perbaikan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan jalannya usaha perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan hubungan antara pekerja dengan manajamen yang harmonis serta menjaga ketenangan bekerja, terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara BNI dengan Serikat Pekerja BNI. Pembaharuan terhadap PKB antara BNI dengan Serikat Pekerja BNI ini dilakukan secara berkala melalui mekanisme perundingan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja BNI.

Bank BTN secara rutin telah melakukan rapat dengan serikat pekerja. Rapat-rapat tersebut membahas terkait pemenuhan hak dan kewajiban karyawan ataupun perumusan sanksi disiplin jika terdapat pelanggaran disiplin oleh pegawai.

Remunerasi
Bank menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep *For More Benefit We Go dan* meluncurkan program *flexible benefit* sebagai salah satu program pemberian *benefit* yang sejalan dengan konsep *For More Benefit We Go.* Bank juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, Bank senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji pegawai tertinggi dan terendah	46 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,5 : 1

Program Pensiun
Salah satu bentuk program pensiun yang dilaksanakan BNI untuk pegawainya adalah Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP). DKMP merupakan bentuk *moral obligation*Bank untuk memastikan bahwa pegawai tetap mendapatkan fasilitas kesehatan setelah pensiun dengan cara mempersiapkannya sejak saat ini atau saat masih aktif sebagai pegawai.

Tingkat *Turnover* Karyawan
Pada tahun 2016 jumlah pegawai Bank berjumlah 28.184 orang, meningkat 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 26.875 orang. Sepanjang tahun 2016, *turnover* pegawai tercatat sebanyak 764 orang atau sebesar 2,7% dari keseluruhan pegawai BNI. Persentase penurunan terbesar dari *turnover* ini berasal dari jenjang jabatan asisten. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015, BNI mengimplementasikan kebijakan perpanjangan usia pensiun bagi pegawai setingkat asisten.

Tabel *Turnover* Pegawai 2015-2016

No.	Tahun	Pegawai *Resign*	Jumlah Pegawai	*Turn over* Pegawai (%)
1.	2016	764	28.184	2,7%
2.	2015	793	26.875	2,95%

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kesehatan

Kebijakan

Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab bersama. Perseroan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing.

Pelaksanaan

Bank sangat memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan karyawannya. Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan anggota keluarganya cukup komprehensif yang mencakup fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan.

Kebijakan kesehatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan agar kesehatan Karyawan tetap prima sehingga membawa dampak positif bagi Karyawan selaku individu dan keluarganya, yang pada akhirnyadiharapkanakan berdampak pada perbaikan produktivitas Bank.

Di samping memfasilitasi pegawai untuk menjaga kesehatan, Perseroan mengikut sertakan pegawai dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan biaya pertanggungan asuransi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawati dan istri karyawan yang menjalani persalinan.

Keselamatan Kerja

Kebijakan

Aspek Keselamatan Kerja merupakan salah satu hal yang jadi perhatian manajemen Perseroan. Perseroan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja Perusahaan yang optimal. Untuk itu, BNI bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera dan melakukan kegiatan operasional sesuai kaidah yang berlaku.

Kegiatan Terkait Keselamatan Kerja 2016

Keselamatan kerja Karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dalam upaya menciptakan keselamatan kerja di lingkungan gedung dan kantor Bank.

Untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti Apar, *Smoke Detector*, *Diesel Pump*, dan Tangga Darurat. Perseroan telah melakukan inspeksi keselamatan kebakaran pada tanggal 23 Januari 2015, terhadap alat-alat kebakaran sebagaimana tersebut di atas.

Perseroan juga telah memiliki rencana situasi/ evakuasi kebakaran, peletakan prosedur operasional keselamatan kebakaran berada di ruang karyawan dan setiap lantai gedung sehingga seluruh karyawan teredukasi dengan baik. Perseroan juga secara rutin melaksanakan simulasi latihan evakuasi kebakaran gedung. Pada tahun 2016, simulasi dilaksanakan pada kantor pusat BNI tanggal 28 Desember 2016

Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, BNI ingin menciptakan manfaat atas kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Utuk itu, BNI terus melanjutkan program kemitraan yang sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya seperti pembinaan Kampoeng BNI dan Desa Ekowisata untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak ataupun bantuan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat daerah tersebut.

Dalam hal pembelajaran keselamatan tenaga kerja, Perseroan telah mengikut sertakan karyawan dalam sertifikasi pelatihan "Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)" yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jaminan Sosial

Seluruh pegawai juga telah diikut sertakan sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi karyawan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

Sertifikasi

Perseroan telah mendapatkan sertifikasi Keselamatan Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta.

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan, karena secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Perseroan memandang sangat perlu untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kebijakan

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk kinerja dan investasi sosial BNI kepada masyarakat. Melalui implementasi program CSR yang terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan, BNI ingin menciptakan manfaat atas kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Salah satu penerapan CSR terkait dengan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan bagi perusahaan BUMN adalah melalui mekanisme Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan untuk melaksanakan PKBL tidak muncul pada Undang-Undang, melainkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN, sehingga dapat diartikan bahwa hanya perusahaan BUMN yang memiliki kewajiban untuk melakukan program berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta bina lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain berlandaskan pada Misi Bank, pelaksanaan program CSR BNI juga didasarkan pada pedoman regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
3. Pasal 15 huruf (b) UU Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. RUPS LB BNI tanggal 9 November 2015 dengan salah satu agenda adalah Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Anggaran PKBL

Sebagai bank terkemuka di Indonesia, BNI menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan fokus pada PKBL. Melalui mekanisme PKBL, BNI berupaya untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan tidak hanya melalui bantuan dana hibah tetapi juga melalui penyaluran pinjaman lunak. PKBL BNI dilakukan secara terencana, tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan sehingga BNI turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Lebih jauh PKBL yang dimandatkan bagi perusahaan BUMN merupakan bagian dari upaya terpadu yang dilaksanakan oleh BNI secara konsisten untuk memastikan keberlanjutan eksistensinya sebagai suatu entitas bisnis. PKBL di BNI dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan yang secara langsung disupervisi oleh Direktur Utama, dengan realisasi selama 2 tahun terakhir adalah:

Bidang Kegiatan	Penyaluran		% Kontribusi Terhadap Penyaluran	
	2016	2015	2016	2015
Program Kemitraan	24.987.502.635	23.764.910.303	24,48	23,57
Agricultural and Mining	19.096.360.000	1.641.500.000	76,43	6,91
Manufacturing	310.000.000	1.479.500.000	1,24	6,23
Services	1.095.000.000	2.358.210.303	4,38	9,92
Trading	4.486.142.635	235.000.000	17,95	0,99
Bina Lingkungan	62.747.443.679	77.042.070.523	71,52	76,43
Program Bencana Alam	1.133.496.903	859.005.585	1,81	1,11
Pendidikan dan/atau Pelatihan	16.570.517.410	27.026.963.050	26,41	35,08
Peningkatan Kesehatan	2.586.517.908	10.690.292.846	4,12	13,88
Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum	11.572.454.818	6.431.865.600	18,44	8,35
Sarana Ibadah	5.590.169.097	9.990.206.411	8,91	12,97
Pelestarian Alam	7.754.687.545	16.979.738.697	12,36	22,04
Pengentasan Kemiskinan	14.973.284.070	5.063.998.334	23,86	6,57
Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan	2.566.315.928	-	-	-
TOTAL	87.734.946.314	100.806.980.826	100	100

Kegiatan

Program Kemitraan

Program Kemitraan berupa pinjaman lunak pada mitra binaan dengan hanya membebankan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dari limit pinjaman, yang disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
3. Beban Pembinaan:
   a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
   b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
   c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Mitra binaan BNI adalah pengusaha mikro yang belum mengenal perbankan secara teknis karena keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari perbankan. Pelaku usaha mikro tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi formal dan non formal, namun mempunyai peran strategis dalam ekonomi sektor riil dan telah terbukti bahwa segmen mikro relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Mitra binaan BNI diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, modal usaha, jiwa kewirausahaan, akses ke perbankan, administrasi usaha, kualitas produk dan jangkauan pemasaran.

Penyaluran Program Kemitraan BNI pada tahun 2016 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Realisasi Penyaluran (Rp)
Agricultural and Mining	19.096.360.000
Manufacturing	310.000.000
Services	1.095.000.000
Trading	4.486.142.635
Total	24.987.502.635

Berdasarkan Sebaran Kantor Wilayah BNI

Wilayah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Proporsi terhadap Target (%)
Medan	4.173.913.044	535.000.000	12,82
Padang	4.043.478.261	555.000.000	13,73
Palembang	4.043.478.261	17.603.360.000	435,35
Bandung	5.739.130.435	290.000.000	5,05
Semarang	5.660.869.566	349.000.000	6,17
Surabaya	4.936.434.782	1.628.000.000	32,98
Makassar	2.608.695.652	1.032.142.635	39,48
Denpasar	3.130.434.783	1.070.000.000	34,18
Banjarmasin	3.652.173.913	80.000.000	2,19
Jakarta Senayan	2.608.695.652	20.000.000	0,77
Manado	2.347.826.087	15.000.000	0,64
Jakarta Kota	2.739.130.435	55.000.000	2,01
Jakarta BSD	2.739.130.435	225.000.000	8,21
Jakarta Kemayoran	3.260.869.565	25.000.000	0,77
Papua	652.173.913	595.000.000	91,23
Yogyakarta	3.469.565.217	430.000.000	12,39
Malang	4.194.000.000	480.000.000	11,44
Total	60.000.000.000	24.987.502.635	41,64

Penyaluran Program Kemitraan bukan bersifat hibah, dimaksudkan untuk mengedukasi agar penerima pinjaman atau mitra binaan dapat mengatur arus kas (*cashflow*) dalam rangka pengembalian pinjaman lunak tersebut. Dengan demikian penerima Program Kemitraan harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN maupun ketentuan internal BNI.

Realisasi penyaluran hanya mencapai 41,64% dari target, karena BNI harus memastikan penerima Program Kemitraan dapat memenuhi persyaratan. Pada umumnya persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh calon mitra adalah pengalaman di bidang usaha yang akan dibiayai, memiliki pinjaman bermasalah (di lembaga pembiayaan lain) dan sedang atau sudah menerima fasilitas kredit komersil dari bank lain (bankable).

Framework Program Kemitraan

Adapun *framework* dari Program Kemitraan yang dimiliki oleh BNI adalah sebagai berikut.

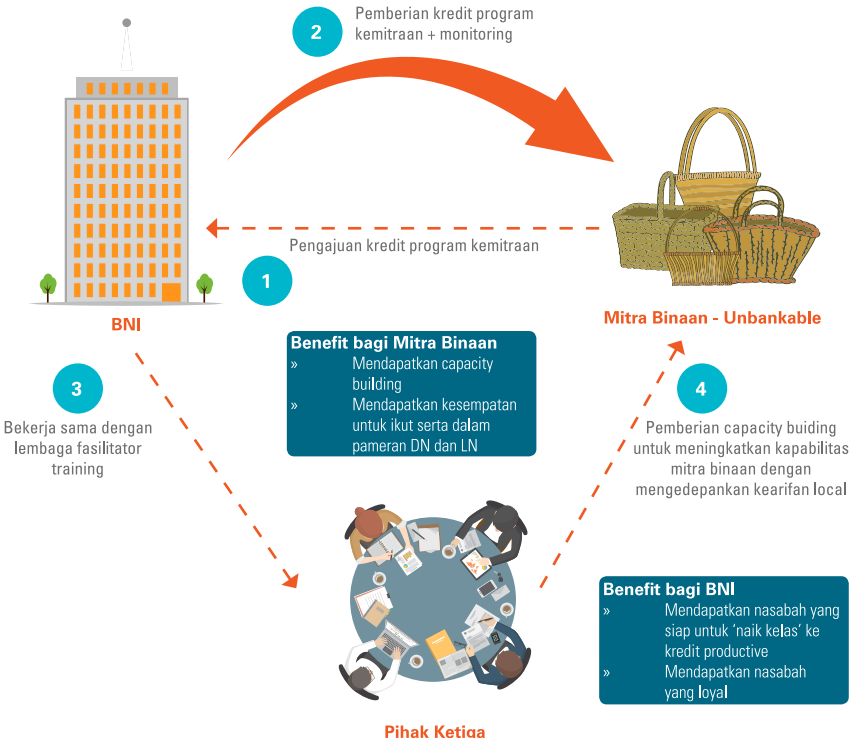

Roadmap UMKM

BNI telah memiliki *Roadmap* UMKM sebagai berikut.

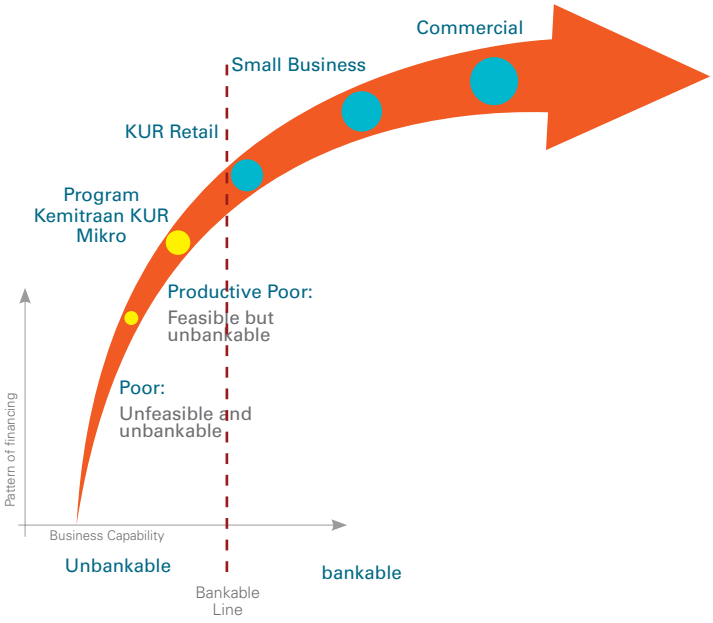

BNI terus melanjutkan program kemitraan yang sudah dijalankan dari tahun-tahun sebelumnya seperti pembinaan Kampoeng BNI dan Desa Ekowisata untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak ataupun bantuan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat daerah tersebut.

Kampoeng BNI

Kampoeng BNI adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit lunak dengan sistem klaster yang dilakukan di beberapa daerah. Konsep Kampoeng BNI dibangun atas prinsip *community development*, di mana satu klaster memiliki berbagai macam produk yang menjadi keunggulan atau ciri khas daerah tersebut. Sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 2007, Kampoeng BNI adalah pelopor program kepedulian masyarakat yang terintegrasi dengan proses bisnis. BNI membina masyarakat dan mitra binaan dari *unbankable* menjadi *bankable.* Adapun *focus area* dari Kampoeng BNI adalah Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 21 Kampoeng BNI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kampoeng BNI merupakan produk hasil integrasi antara kredit Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan. Kampoeng BNI tidak sekedar menyalurkan pembiayaan usaha, tetapi juga memberikan pendampingan, promosi dan dukungan infrastruktur

sehingga untuk jangka panjang masyarakat dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya di daerah.

Desa Ekowisata BNI

BNI telah melihat potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim yang
kaya dengan sumber daya alamnya. Sangat disayangkan jika kekayaan alam Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik untuk dijadikan daerah pariwisata sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka itu, BNI memanfaatkan daerah-daerah wisata untuk dijadikan sebagai Desa Ekowisata.

Desa Ekowisata merupakan salah satu konsep desa wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Dengan menjadi Desa Wisata, diharapkan akanmendukung pemasaran dan penjualan produknya sekaligus mendatangkan wisatawan yang berarti menjadi nilai tambah perekonomian daerah setempat. BNI membantu masyarakat yang tinggal di daerah wisata tersebut untuk dibina dan dikembangkan agar menjadi masyarakat yang produktif dan kreatif. Tidak hanya itu, BNI juga berusaha menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat desa dengan lingkungannya.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan (Program BL) merupakan programpemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Ruang lingkup Program Bina Lingkungan

1. Bantuan Program Bencana Alam;
2. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan;
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan;
4. Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum;
5. Bantuan Sarana Ibadah
6. Bantuan Pelestarian Alam
7. Pengentasan Kemiskinan
8. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan

BNI menyadari bahwa lingkungan dan masyarakat di sekitar sangat membantu kegiatan bisnis. Sebagai bentuk perwujudan timbal balik terhadap lingkungan dan masyarakat, BNI telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang disalurkan dalam beberapa bidang, seperti bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, sarana dan prasarana umum. Hal ini sesuai dengan misi keempat BNI yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Bantuan Program Bencana Alam

Selama tahun 2016, BNI telah menyalurkan bantuan terkait bencana alam di 16 lokasi, antara lain gempa bumi di NAD, Pidie Jaya, banjir bandang di Garut, banjarnegara, banyumas, kampar dan solok, bencana longsor di Sukabumi, Kebumen, Purworejo dan Wonosobo. Pemberian bantuan pada saat kejadian/ pasca bencana dilakukan langsung oleh BNI maupun bekerjasama dengan BUMN lain, Kemensos, TNI, BNPB, Pemda dan pihak lain yang terkait

Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan

1. BNI ikut membantu masyarakat melalui program CSR melalui Pelatihan dan Kegiatan Edukasi antara lain Pelatihan E-Commerce untuk UKM, Bantuan pelatihan penyandang disabilitas, Pelatihan untuk purna TKI, Penyuluhan dan pelatihan di daerah terluar dan terpencil, program CEO menyapa siswa, BUMN mengajar, Bantuan penyelenggaraan FGD dan diskusi panel.
2. BNI turut membantu siswa yang berprestasi dengan program Beasiswa di Indonesia Bagian Timur dan seluruh provinsi Indonesia.
3. BNI juga ikut membantu sarana pendidikan berupa bantuan fisik sekolah, pesantren dan kampus, bantuan sarana pendidikan, dan bantuan untuk para guru.
4. Beberapa program yang telah dilakukan selama tahun 2016 adalah program beasiswa Indonesia Timur, pelatihan TKI di luar negeri (Singapore dan Korea), BUMN Mengajar di 16 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, Siswa Mengenal Nusantara dan pelatihan mantan atlet dan napi.

Bidang Peningkatan Kesehatan

BNI dalam bidang kesehatan di tahun 2016 ikut membantu khitanan masal, bantuan ambulance, sarana kesehatan, Bakti sosial kesehatan dan bantuan untuk tenaga kesehatan. Program kesehatan tersebut tersebat dibeberapa wilayah di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Sumatera Barat dan Jawa Timur.

Program yang telah dilakukan di antaranya pemberian bantuan sarana prasarana rumah sakit, penghargaan kepada tenaga kesehatan Puskesmas berprestasi, bantuan mobil ambulan, khitanan massal, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis dan kampanye gerakan anti narkoba di sekolah-sekolah serta kegiatan bakti sosial lainnya

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum

BNI juga aktif dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana umum yang selaras dengan misi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Menjelang akhir tahun

2015, BNI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membangun jembatan yang menghubungkan Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, dan Desa Buara, Kecamatan Karanganyar di Purbalingga, Jawa Timur, yang selama ini terpisahkan oleh Sungai Tuntung Gunung. Jembatan ini diberi nama Jembatan Pengayoman BNI dan menghabiskan dana senilai Rp 5 miliar. Selain itu, BNI juga aktif membantu fasilitas keagamaan dengan pemberian bantuan di tiga provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan total nilai Rp 100 juta.

Realisasi program di bidang pengembangan sarana dan prasarana umum pada tahun 2016 di antaranya dukungan BNI di bidang pengembangan sarana dan prasarana umum adalah bantuan sarana air bersih dan MCK, tempat penitipan anak di pasar dan rumah kreatif BUMN.

Bidang Sarana Ibadah

BNI melakukan peningkatan sarana dan prasarana ibadah seluruh umat beragama di 70 lokasi yang tersebar di Indonesia, seperti pembangunan/renovasi di Sampang, Jepara, Bali, Lembata, Langsa, Batang, Pacitan dan Tanjung Karang.

Bidang Pelestarian Alam

Beberapa program pada tahun 2016 di antaranyaprogram kegiatan peduli sampah dengan memanfaatkan sampah kertas daur ulang menjadi produk nilai guna, *Green Lifestyle* (kegiatan bersih gunung melalui edukasi bebas sampah dan penataan), sinergi penanaman 10.000 pohon di ruas tol cikampek dengan Jasa Marga, kegiatan Bank Sampah dengan bekerjasama dengan BUMDes di seluruh Indonesja, pengembangan pertanian

holtikulutura dan konservasi terumbu karang di beberapa wilayah di Indonesia.

Bidang Pengentasan Kemiskinan

Salah satu bentuk nyata BNI dalam di bidang pengentasan kemiskinan adalah pemulangan TKI bermasalah di Luar Negeri, bedah rumah veteran dan pasar murah.

Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan

BNI bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara VII menyalurkan program kemitraan kepada 339 petani tebu untuk masa tanam 2016/2017 dengan nilai penyaluran sebesar Rp16,5 miliar. Di samping itu BNI juga mengadakan pelatihan terhadap petani tebu dengan tujuan untuk,

1. Agar petani mampu dan mau menerapkan sistem budidaya tebu berbasis mekanisasi.
2. Agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menerapkan sistem budidaya tebu berbasis mekanisasi.
3. Agar dapat meningkatkan pendapatan petani tebu.
4. Agardapat meningkatkan kualitas tebu yang dihasilkan.
5. Meningkatkan tingkat pengembalian kredit kemitraan kepada BNI

BNI juga melatih dan meningkatkan kapasitas mitra binaan melalui pelatihan dan pembukaan akses pasar.

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Kemasyarakatan

Tabel Rincian Program dan Kegiatan Bina Lingkungan Tahun 2016

Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Biaya Pelaksanaan
Bantuan Korban Bencana Alam		
• Bencana Alam Banjir; • Bencana Alam Banjir dan Longsor; • Bencana Alam Banjr Bandang; • Bantuan Tanggap Darurat Gempa.	NAD, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah	1.133.496.903
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan		
• Bantuan Pendidikan Pesantren; • Pelatihan *E-Commerce*; • Kegiatan *Workshop*; • Beasiswa; • Renovasi Gedung SLB dan Sekolah; • Sarana dan Prasarana Sekolah.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Denpasar, NTB, Papua	16.570.517.410
Bantuan Peningkatan Kesehatan		
• Khitanan Massal; • Donor Darah; • *Medical Check Up*; • Sarana Kesehatan Rumah Sakit; • Mobil *Ambulance*; • Operasi Bibir Sumbing; • Kegiatan Bakti Sosial • Program Kesehatan bekerjasama dengan Politeknik.	Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan	2.586.517.908
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum		
• Pembangunan Jalan; • Pembangunan Jembatan; • Pembagunan Saluran Irigasi; • Sarana dan Prasarana untuk Pesantren; • Bantuan Sarana Air Bersih; • Program HUT BNI- Penyediaan Sarana Air Bersih; • Pembangunan Sarana dan Prasarana di beberapa Kampoeng BNI; • Program HUT RI ke 70- Penyediaan Sarana Air Bersih dan MCK.	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimanan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku, NTT, Papua	11.572.454.818
Bantuan Sarana Ibadah		
• Renovasi Sarana Ibadah Pura; • Pembangunan Masjid; • Pembangunan Musholla; • Pembangunan Gereja; • Kegiatan Silaturahmi; • Kegiatan Bakti Sosial; • Bantuan Sarana Ibadah.	Nanggroe Aceh Darusssalam, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah IstimewaYogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,	5.590.169.097
Bantuan Pelestarian Alam		
• Program pembibitan pohon dan distribusi gratis untuk masyarakat; • Penanaman Bibit Pohon; • Program BUMN membangun desa berbasis *agroforestry*; • Pembangunan hutan dan taman kota; • Program Bank Sampah; • Kegiatan pelestarian lingkungan; • Kegiatan *Earth Hour*; • Restorasi Lahan Gambut; • Penanaman Terumbu Karang	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua.	7.754.687.545

Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Biaya Pelaksanaan
Bantuan Pengentasan Kemiskinan		
• Program pemberdayaan masyarakat pulau terluar; • Pengentasan kemiskinan bagi petani; • Bantuan untuk nelayan miskin; • Pemberdayaan masyarakat adat; • Kegiatan Bakti Sosial; • Pasar Murah dalam rangka kegiatan HUT BNI; • Santunan Anak Yatim.	Maluku, Papua Barat, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau.	14.973.284.070

BUMDes

Pada Pasal1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarrnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan badan usaha milik desa (BUMDes) terus digenjot pemerintah. Salah satunya mempercepat teknis kerja sama dengan Perum Bulog dan Bank BNI. Dana desa yang dialokasikan berkisar antara Rp600 juta sampai Rp700 juta untuk setiap desa. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan Bank BNI guna mendirikan satu badan usaha mikro. Selanjutnya, desa juga dapat bekerja sama dengan Bulog terkait pengadaan sarana pascapanen.

Untuk mengembangkan produk-produk desa, hal yang bisa dilakukan menerapkan *one village one product* (satudesa satu produk unggulan). Selain dapat menarik perhatian investor dan konsumen, sistem ini juga dipercaya mampu memperpendek rantai distribusi.

BNI akan selalu konsisten dalam membantu pengembangan BUMDes, salah satunya dengan memanfaatkan dana *corporate social responsibility*. BNI juga sudah mendesain bagaimana BUMDes menjadi satu unit usaha yang bisa berkembang di desa-desa.

Lokakarya BUMDes

Bank BNI bersama Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Desa untuk mendorong peran BUMDes. Salah satu tujuan dari lokakarya ini adalah untuk memberikan inspirasi pengembangan bisnis di BUMDes terbaik yang hadir dalam lokakarya, melalui sinergi kerja sama antara BUMDes dengan BNI serta dengan *counterpart* BNI. Langkah ini merupakan salah satu upaya BNI dalam memperdalam dan memperluas layanan perbankan di pedesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Total peserta lokakarya mencapai 70 orang, yang terdiri atas pimpinan 33 BUMDes terbaik bersama para kepala desa. Selain itu, BNI juga mengundang Satuan Kerja BUMDes dari seluruh Wilayah di Indonesia. diharapkan, nantinya BUMDes-BUMDes terbaik ini dapat menjadi mercusuar percontohan, yang dapat menyebarkan virus positif pada BUMDes lain di sekitarnya.

Lokakarya yang berlangsung selama empat hari ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara BNI dengan Kementerian Desa terkait pengembangan ekonomi desa. Melalui BUMDes, BNI dapat menerapkan program Laku Pandai yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya sebagai Agen46.

Sebagai Agen46 BNI, BUMDes dapat melayani masyarakat umum untuk kegiatan perbankan berupa pembukaan rekening, tarik dan setor uang ke tabungan, serta layanan pembayaran listrik, telpon, pulsa, dan lainnya. Agen46 juga berpotensi untuk menjadi mitra bisnis bagi *counterpart* BNI, seperti Bulog, BAPPEBTI, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan mitra kerja lainnya.

BUMDes juga dapat dijadikan sebagai jaringan BNI untuk penyaluran berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial (bansos) dan kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, kerja sama BNI dengan BUMDes menjadi salah satu metode untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan.

Bank Sampah

Timbunan sampah yang terus menumpuk akan berakibat buruk bagi kesehatan lingkungan serta menimbulkan berbagai penyakit dan sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar. Sementara, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia tidak akan bisa menampung sampah yang terus menerus dihasilkan masyarakat jika masyarakat tidak mulai bertindak untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Untuk itulah penanganan masalah sampah harus dimulai dari sumbernya.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Sebagai salah satu wujud nyata tanggung jawab BNI terkait dengan Lingkungan hidup dan sosial, saat ini terdapat 2 buah bank sampah yang didukung oleh BNI yaitu:

1. Rumah Kreatif Bank Sampah Rangga Mekar
   Bank Sampah Rangga Mekar (BSRM) adalah sebuah organisasi binaan Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan yang melaksanakan program Bank Sampah dan Perbaikan Rumah Kreatif menuju Bogor *Green and Clean* yang didukung BNI.

   Program pengolahan sampah yang dilaksanakan BSRM melalui pendekatan 3P (*People, Profit, Planet*) dengan konsep *Community Based Solid Waste Management* (CBSWM). CBSWM merupakan program penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat.Konsep program BSRM ini tidak ubahnya seperti kegiatan menabung di bank, nasabah akan mendapatkan nomor rekening dan buku tabungan yang didalamnya telah tercatat identitas nasabah, tanggal transaksi dan jenis setoran sampah serta volume sampah. Dana yang tercatat dalam buku tabungan sampah dapat digunakan untuk berbagai transaksiseperti pembelian *voucher* listrik, *voucher*pulsa telepon genggam, pembayaran biaya sekolah SD dan SMP dan dapat juga diuangkan.

2. Bank Sampah Desa Karang Tengah, Imogiri
   Awalnya Desa Karang tengah dikenal sebagai sentra jambu mete dengan dibangunnya Bukit Hijau BNI. Kini masyarakat di wilyah tersebut menghasilkan beragam jenis produk, seperti kerajinan kokon, batik pewarnaan alam, dan berbagai jenis makanan seperti bakpia, kripik pisang dan sebagainya.

Sasaran Bisnis
- Pendaftaran Pengelola Bank Sampah menjadi Agen BNI 46
- Mengaktifkan transaksi Nasabah Agen BNI 46 (yang menjadi unit usaha BUMDes) melalui aktivitas transaksi:
  a. Pembukaan rekening operasional bank sampah
  b. Pembukaan rekening Tabungan Pandai untuk Masyarakat desa serta pseserta bank sampah
  c. Setor ke rekening Tabungan Pandai masyarakat pada saat pembayaran sampah yang telah terkumpul

Sosialisasi Masyarakat

Musyarawah

- Kesepakatan & komitmen warga
- Sosialisasi tata cata pemilahan, jadwal pemungutan (optional), benefit untuk desa dan untuk lingkungan.
- Meminta warga mempersiapkan KTP serta pendaftaran Rp 20.000 sebagai setoran awal rek BNI Pandai

Persiapan Infrasturktur Fisik & Non Fisik
- Area pengolahan (depo, TPS tampat penimbanan)
- Alat pengangkutan (truk/ gerobak/motor viar, dll)

- Pelengkapana pencatatan
- Peralatan pendukung lainnya, (timbangan, bak plastik pemilah cangkung pencampur kompos, dll)
- SDM pengelola bank sampah
- Mencari pengepul

Operasionalisasi Bank Sampah

Pendaftaran & pembukaan rekening

Warga setor sampah

Pencatatan & penimbangan

Pemilahan

Pengolahan

Penjualan

Transfer ke rek pandai warga sesuai catatan secara bulanan

Keterangan Alur Proses
- Pendaftaran warga melalui pembukaan rekenin g BNI Pandai
- Nomor rekening merupakan nomor induk dalam pencatatan sampah yang akan disetor
- Sampah yang disetor akan ditimbang dan dicatat berdasarkan nomor induk/ nomor rekening
- Sampah organic diolah menjadi kompos sedang non organic dipilah dan dijual ke pengepul
- Hasil penjualan sampah ke pengepul/penjualan kompos disetorkan ke rekening Bank Sampah
- Bank Sampah membayar ke warga melalui transfer ke rek.BNI Pandai Warga sesuai catatan secara bulanan

Selain itu, BNI memberikan bantuan sarana dan prasarana didalam Kampoeng BNI, misalnya *showroom*, *packing house*, balai pertemuan, dan juga sarana sosial masyarakat dan saatini bermaksud untuk menyempurnakan bisnis pengelolaan sampah dan bank sampah yang ada.

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Dalam rangka mencapai Visi "Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja" serta Misi Pertama "Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama", BNI hadir dengan serangkaian produk dan jasa yang kompetitif.

Kebijakan

Bank berkomitmen untuk selalu memberikan nilai tambah dalam setiap produk dan jasa maupun layanan yang ditawarkanserta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah/ konsumen(*product responsibility*). Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan nasabah/konsumen, mencakup antara lain: Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Pusat Pengaduan Konsumen (*Customer Care*), Program *Engagement* Konsumen dan Program Peningkatan Layanan.

Terkait dengan Jaminan atas perlindungan Konsumen, Bank mengacu kepada POJK No.1/ POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di BNI tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

- IN/199/EBK/001, tgl 30-03-2016, Tentang Perlindungan Data Nasabah
- IN/0/EBK/001, tgl 02-02-2016, Tentang Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah
- IN/784/PDM/001, tgl 17-12-2014, Tentang Formulir Pembukaan Rekening

Selain hal tersebut berpedoman pada salah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan harus dilaksanakan oleh perbankan nasional, hal tersebut juga ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Pemberdayaan dan perlindungan konsumen melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi

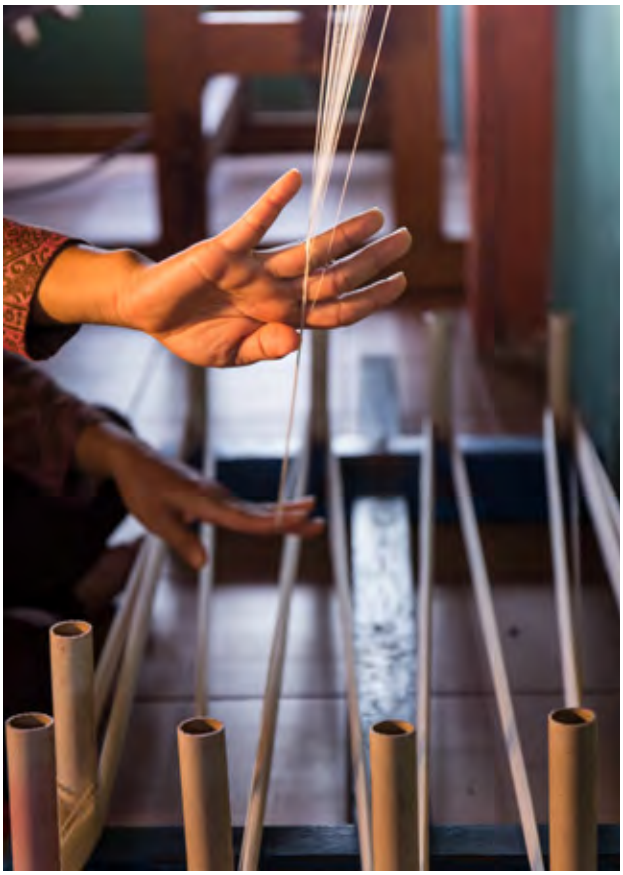

independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan sosialisasi bagi nasabah. Melalui berbagai program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan nasional. Perseroan senantiasa berupaya untuk menyukseskan program API dimaksud untuk memberikan nilai tambah dalam layanan pembiayaan perumahan, tidak hanya dengan produk-produk terbaik, tapi juga dengan pelayanan yang konsisten, terpercaya, menyeluruh, dan penuh perhatian kepada kebutuhan para nasabah dan sekaligus sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada nasabah.

Kegiatan

Pelaksanaan kebijakan jaminan atas perlindungan konsumen atau disebut *internal dispute resolution* seperti tersebut di atas disajikan dalam tabel berikut:

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
A PRINSIP PENERAPAN IDR	
Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan didasari oleh 5 prinsip sebagaimana tertuang dalam POJK No.1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu: 1. Transparansi; 2. Perlakuan yang adil; 3. Keandalan; 4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan 5. Penanganan Pengaduan Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Terkait Penanganan Pengaduan, berikut ini adalah prinsip penerapan IDR sektor jasa keuangan yang efektif: 1. Visibilitas PUJK mempublikasikan cara menyampaikan Pengaduan kepada Konsumen, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. 2. Aksesibilitas PUJK memiliki fasilitas layanan Penanganan Pengaduan yang mudah diakses oleh Konsumen. 3. Responsif PUJK segera melayani, menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Konsumen dan menyediakan informasi status serta hasil Penanganan Pengaduan kepada Konsumen secara jelas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 4. Perlakuan yang Adil PUJK menangani setiap Pengaduan Konsumen secara adil, obyektif dan tidak memihak. 5. Biaya Layanan Pengaduan PUJK tidak memungut biaya atas Penanganan Pengaduan, kecuali untuk layanan lain yang diminta oleh Konsumen diluar yang telah disediakan oleh PUJK yang besarannya telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Konsumen dan dapat dibuktikan kebenarannya. 6. Kerahasiaan Data PUJK menjaga kerahasiaan informasi mengenai Konsumen yang melakukan Pengaduan terhadap pihak manapun, kecuali: a. Kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Dalam rangka penyelesaian Pengaduan; c. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Atas persetujuan Konsumen. 7. Fokus pada Konsumen PUJK secara berkeseimbangan memperhatikan kepentingan Konsumen melalui komitmen dan implementasi untuk menyelesaikan Pengaduan tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. 8. Akuntabilitas PUJK memiliki kejelasan fungsi, struktur, sistem, hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang baik dari pihak PUJK maupun Konsumen dalam hubungannya dengan implementasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan PUJK terhadap Penanganan Pengaduan. 9. Perbaikan Berkelanjutan PUJK melakukan perbaikan yang berkelanjutan terkait proses Penanganan Pengaduan untuk meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan.	Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di BNI tertuang dalam ketentuan sebagai berikut: • IN/199/EBK/001, tgl 30-03-2016, Tentang Perlindungan Data Nasabah • IN/0/EBK/001, tgl 02-02-2016, Tentang Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah • IN/784/PDM/001, tgl 17-12-2014, Tentang Formulir Pembukaan Rekening Visibilitas Alur penyampaian pengaduan telah dipublikasikan di web site BNI (www.bni.co.id) Aksesibilitas Layanan penanganan pengaduan telah disediakan untuk dapat mudah diakses oleh konsumen melalui: 1. Layanan 24 Jam BNI Call 1500046 2. E-mail bnicall@bni.co.id 3. Website BNI www.bni.co.idSosial media (twitter,facebook) 4. Kantor Cabang di seluruh Indonesia Responsif Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.E Perlakuan yang adil Diatur dalam PP nomor IN/784/PDM/001, tgl 17-12-2014Tentang Formulir Pembukaan Rekening Biaya Layanan Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.E Kerahasiaan Data Diatur dalam PP Kepegawaian Tata Tertib dan Ketentuan Sanksi Administratif Bab I Tata Tertib Sub Bab D Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan. Fokus pada Konsumen Diatur dalam PP nomor IN/784/PDM/001, tgl 17-12-2014Tentang Formulir Pembukaan Rekening Akuntabilitas Diatur dalam PP nomor IN/212/BCC/001, tgl 26-03-2016 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Perbaikan Berkelanjutan Untuk peningkatan dan efisiensi Penanganan Pengaduan secara berkesinambungan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan review SLA penyelesaian pengaduan nasabah untuk masing-masing kategori pengaduan. 2. Secara periodik menyampaikan umpan balik (feedback) kepada product owner atas permasalahan yang sering terjadi.

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
B Kerangka Penanganan Pengaduan	
1. Komitmen Perusahaan berkomitmen dalam mengimplementasikan Standar IDR secara efektif dan efisien berdasarkan SEOJK No.2/SEOJK.07/2014, sesuai dengan prinsip perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam POJK No. 1/POJK.07/2013, antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Memberikan perlakuan yang seimbang dan obyektif kepada setiap Pengaduan; b. Memberikan kesempatan yang memadai kepada Konsumen untuk menjelaskan materi Pengaduan; c. Memberikan kesempatan kepada pihak lain yang diberikan kuasa (jika ada) oleh Konsumen yang mempunyai kepentingan terhadap Pengaduan, untuk memberikan penjelasan dalam penyelesaian Pengaduan; dan d. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai Konsumen yang melakukan Pengaduan terhadap pihak manapun, kecuali (i) kepada OJK; (ii) dalam rangka penyelesaian Pengaduan; (iii) diatur oleh peraturan perundang-undangan; dan (iv) atas persetujuan Konsumen. Komitmen tersebut didukung dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan di setiap level, sebagai berikut: a. Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan: 1). Memasukkan pengembangan proses Penanganan Pengaduan pada rencana bisnis perusahaan. 2). Melaporkan Penanganan Pengaduan pada laporan tahunan. 3). Menerima laporan berkala terkait Penanganan Pengaduan. 4). Melakukan review terhadap informasi serta laporan terkait Penanganan Pengaduan. 5). Mengidentifikasi proses yang cacat serta melakukan perbaikan. b. Pejabat Penanganan Pengaduan 1). Menciptakan, mengelola, serta bertanggungjawab atas sistem Penanganan Pengaduan yang efektif. 2). Memastikan ketersediaan staf sesuai dengan bidang Penanganan Pengaduan. 3). Memberikan pelatihan terkait Penanganan Pengaduan kepada staf. 4). Mengatur serta mendukung staf dalam melaksanakan proses Penanganan Pengaduan. 5). Menyampaikan laporan berkala kepada manajemen serta satuan kerja lain terkait isu Penanganan Pengaduan. c. Staf Penanganan Pengaduan 1). Bersikap profesional pada saat berhadapan dengan Konsumen. 2). Mengetahui dan mematuhi kebijakan internal Penanganan Pengaduan. 3). Berinisiatif untuk mencari informasi terkait perkembangan program dan layanan Penanganan Pengaduan. 4). Memelihara minat terhadap praktik terbaik (best practice) terkait Penanganan Pengaduan. d. Unit kerja lain yang terkait dengan Penanganan Pengaduan 1). Mengetahui proses Penanganan Pengaduan serta responsif terhadap Penanganannya. 2). Mengetahui prosedur dan kebijakan Penanganan Pengaduan. 3). Membantu unit atau pejabat/staf Penanganan Pengaduan dalam menangani Pengaduan Konsumen. 4). Membantu Konsumen dalam menyampaikan Pengaduannya. 5). Memberikan informasi terkait Pengaduan Konsumen kepada karyawan atau unit Penanganan Pengaduan. 6). Memberikan respon terkait permasalahan sistematis yang timbul akibat Pengaduan Konsumen.	Komitmen Perusahaan dalam menerapkan Standar IDR secara besaran telah dituangkan dalam Prinsip 46 BNI, dan secara rinci diatur dalam PP nomor IN/784/PDM/001, tgl 17-12-2014 Tentang Formulir Pembukaan, PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PP Kepegawaian Tata Tertib dan Ketentuan Sanksi Administratif Bab I Tata Tertib Sub Bab D Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan.

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
2. Kebijakan PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis Penanganan Pengaduan Konsumen dengan mengacu pada: a. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; b. SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan ; dan c. Standar IDR. d. Kebijakan dan prosedur dimaksud wajib ditaati oleh seluruh pengurus dan karyawan PUJK.	Kebijakan: Kebijakan dan prosedur tertulis Penanganan Pengaduan Konsumen di BNI mengacu pada: • Pedoman Perusahaan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Nomor IN/212/BCC/001 tanggal 26 Maret 2015. • KUD (Kebijakan Umum Direksi)
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi memutuskan pelaksanaan Penanganan Pengaduan melalui pembentukan unit/fungsi dengan menunjuk anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Unit kerja atau pejabat Penanganan Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direksi dan bersifat independen serta memiliki kewenangan dalam memutus sesuai pendelegasian wewenang yang berlaku masing-masing PUJK dan memiliki akses kepada pejabat yang berwenang serta fungsi lainnya yang terkait dengan bidang tugasnya yaitu untuk melayani dan menyelesaikan Pengaduan. Berikut adalah tanggung jawab dari masing-masing level jabatan:	
a. Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan: 1). Memastikan bahwa perusahaan menerapkan proses Penanganan Pengaduan; 2). Memastikan bahwa proses Penanganan Pengaduan telah direncanakan, dirancang, dimonitor dan dikembangkan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal Penanganan Pengaduan; 3). Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dalam proses Penanganan Pengaduan secara efektif dan efisien; 4). Memastikan perusahaan mengutamakan fokus pada Konsumen dan berkomitmen dalam melaksanakan proses Penanganan Pengaduan; 5). Memastikan bahwa informasi mengenai proses Penanganan Pengaduan mudah diakses oleh Konsumen dan pihak terkait lainya; 6). Memastikan menerima laporan terkait isu Pengaduan; dan 7). Melakukan peninjauan secara berkala dan pengembangan proses Penanganan Pengaduan secara efektif dan efisien.	
b. Pejabat Penanganan Pengaduan 1). Menetapkan target kinerja, evaluasi dan pelaporan terkait Penanganan Pengaduan; 2). Melaporkan kepada Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan mengenai proses Penanganan Pengaduan, serta rekomendasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses Penanganan Pengaduan; dan 3). Memantau pelaksanaaan proses Penanganan Pengaduan, termasuk perekrutan serta pelatihan kepada sumber daya, sistem teknologi, dokumentasi, kebijakan dan jangka waktu serta persyaratan lainnya.	
c. Staf Penanganan Pengaduan 1). Mendapatkan pelatihan mengenai Penanganan Pengaduan; 2). Mematuhi prosedur dan kebijakan internal Penanganan Pengaduan; 3). Bersikap sopan kepada Konsumen serta dapat menindaklanjuti Penanganan Pengaduan dgn tepat; dan 4). Mempraktikkan keterampilan interpersonal dan komunikasi dengan baik.	

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
d. Unit kerja lain yang terkait dengan Penanganan Pengaduan 1). Mengetahui peran, tanggung jawab dan kewenangan dalam proses Penanganan Pengaduan; 2). Mengetahui prosedur dan kebijakan internal yang diterapkan serta informasi yang disampaikan kepada Konsumen; 3). Memastikan bahwa proses Penanganan Pengaduan diimplementasikan dengan efektif dan efisien; 4). Bekerjasama dengan unit kerja/pejabat Penanganan Pengaduan; 5). Memastikan fokus pada Konsumen dan berkomitmen dalam melaksanakan proses Penanganan Pengaduan; 6). Memastikan bahwa informasi proses Penanganan Pengaduan mudah diakses; 7). Melaporkan tindak lanjut serta hasil Penanganan Pengaduan; 8). Memastikan pemantauan proses Penanganan Pengaduan dilakukan dan dicatat; 9). Memastikan upaya yang dilakukan dapat menyelesaikan Pengaduan serta mencegah terjadinya Pengaduan yang serupa berulang, serta mendokumentasikannya; dan 10). Melaporkan Pengaduan yang berdampak secara signifikan kepada Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan. 11). Dalam hal Pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan karyawan PUJK yang memiliki kewenangan untuk menangani Pengaduan atau karyawan PUJK yang menyelesaikan Pengaduan tersebut, maka Penanganan dan penyelesaian Pengaduan wajib dilakukan oleh karyawan lain.	
Pengendalian Internal PUJK wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan Penanganan Pengaduan. Sistem pengendalian internal sekurang-kurangnya mencakup: Kepatuhan PUJK terhadap pelaksanaan prinsip penerapan IDR; Sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut Pengaduan Konsumen; dan Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam Penanganan Pengaduan.	Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal terkait dengan Penanganan Pengaduan di BNI telah dilakukan dan diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.G

	STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
C	Desain dan Perencanaan	
	PUJK wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan Konsumen. Selain itu, PUJK juga wajib memastikan setiap kantor untuk menjalankan fungsi Penanganan Pengaduan Konsumen. PUJK menunjuk minimal 1 (satu) orang karyawan PUJK atau menyediakan sarana dalam rangka mendukung fungsi Penanganan Pengaduan di setiap kantor PUJK. Karyawan tersebut tidak terlibat dalam transaksi atau kegiatan terkait materi Pengaduan. Dalam menentukan unit Pengaduan tersendiri dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan, Direksi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Jenis produk dan/atau layanan yang ditawarkan; 2. Jenis, jumlah dan penyebaran Konsumen, baik Konsumen ritel maupun korporasi; 3. Nilai transaksi yang dilakukan; dan 4. Struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran kantor secara geografis. PUJK merencanakan dan merancang secara efektif dan efisien struktur Penanganan Pengaduan. Skema unit dan/atau fungsi pelayanan dan penyelesaian Pengaduan internal disesuaikan dengan metode layanan di masing-masing PUJK (sentralisasi, desentralisasi atau semi desentralisasi). Berikut adalah contoh struktur organisasi unit dan/atau fungsi pelayanan dan penyelesaian Pengaduan: 1. Tujuan Dalam mendukung kinerja Penanganan Pengaduan, proses penerimaan Pengaduan sampai dengan memberikan tanggapan/selesainya Pengaduan, PUJK memiliki sistem Penanganan Pengaduan yang bertujuan untuk: a. Menjamin efektivitas dan efisiensi proses Penanganan Pengaduan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan; b. Terlaksananya tanggung jawab dan wewenang pada setiap level jabatan terkait Penanganan Pengaduan; c. Pemenuhan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat dari sisi kompetensi dan kuantitas; d. Memastikan jangka waktu Penanganan Pengaduan dan tingkat kepuasan Konsumen; dan e. Menjamin efektivitas dan efisiensi proses tindakan preventif dan korektif.	Terkait dengan Tujuan dan Penyelenggaraan Penyelesaian Pengaduan Nasabah telah di atur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Nomor IN/212/BCC/001 tanggal 26 Maret 2015

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
2. Penyelenggaraan Agar Konsumen dapat mengetahui adanya aspek perlindungan Konsumen yang diberikan oleh PUJK, maka PUJK perlu menyusun kebijakan terkait pelaksanaan IDR yang terdiri dari : a. Mekanisme penyampaian informasi kepada Konsumen mengenai tata cara Penanganan Pengaduan; b. Prosedur Penanganan Pengaduan disusun dalam format yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh Konsumen; c. Media dan tata cara penyampaian disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PUJK; dan d. Pengkinian tata cara Penanganan Pengaduan. 3. Sumber Daya Manusia PUJK melakukan analisis terkait proporsi karyawan terlatih dalam Penanganan Pengaduan yang berhubungan dengan Konsumen. PUJK membuat prioritas pelatihan berdasarkan tugas utama sehari-hari agar fungsi Penanganan Pengaduan berjalan dengan benar dan tepat guna, misalnya: a. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Konsumen (frontliner) wajib mendapatkan pelatihan rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sebelum penempatan wajib mendapatkan pelatihan. Contoh pelatihan rutin yang dapat diterapkan: Pelatihan dasar dan konsep masing-masing sektor jasa keuangan, pengetahuan produk secara umum, dan dasar customer service. b. Setiap peluncuran produk dan layanan baru, PUJK wajib melakukan pelatihan terkait product knowledge kepada frontliner sebagai upaya memastikan pemahaman karyawan atas produk tersebut sehingga dapat memberikan solusi yang tepat kepada Konsumen sesuai karakteristik produk. c. Karyawan yang tidak berhadapan dengan Konsumen langsung (support function) wajib mendapatkan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam masa kerjanya dan tidak diharuskan mendapatkan pelatihan sebelum penempatan. d. Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, PUJK melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan dan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan materi dan metode pelatihan. Tata cara evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing PUJK.	Sumber Daya Manusia: 1. Pegawai front liner cabang (Customer Service dan Teller) dan Petugas Contact Center Officer wajib mendapatkan pelatihan sebelum penempatan yang terdiri dari: a. Pelatihan dasar dan konsep Perbankan secara Umum b. Produk, Jasa dan Layanan BNI c. Service Excellence. d. Handling Complaint 2. Updating product, jasa dan layanan baru kepada front liners dilaksanakan melalui Branch Sharing Session dan BNI Forum. 3. Bagi karyawan yang ditempatkan di support function telah mendapatkan pelatihan sebelum penempatan. 4. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesesuaian materi pelatihan, dilakukan evaluasi pada pegawai melalui Competency Test yang dilakukan secara periodik baik dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat maupun dilakukan oleh masing-masing Kantor Wilayah.

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
E Pelaksanaan Penanganan Pengaduan	
1. Media Komunikasi PUJK wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme Penanganan Pengaduan bagi Konsumen. Mekanisme Penanganan Pengaduan dimaksud wajib diberitahukan melalui media publikasi yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia pada masing-masing PUJK dan mudah diakses oleh Konsumen, sekurang-kurangnya tersedia melalui sarana komunikasi lainnya, misalnya surat, surat elektronik, telepon, atau leaflet, maupun tersedia dalam website PUJK. Informasi yang tersedia dalam media publikasi tersebut wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dan dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. Informasi tersebut minimal terdiri dari: a. Lokasi layanan Konsumen; b. Jam kerja layanan; c. Nomor telepon layanan Pengaduan; d. Alamat surat atau surat elektronik layanan Pengaduan; e. Tata cara penyampaian Pengaduan; f. Proses Penanganan Pengaduan; dan g. Pemantauan Pengaduan. Dalam rangka memasarkan produk dan/atau layanan, PUJK memuat tata cara yang dapat ditempuh apabila terjadi Pengaduan atas pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan. Tata cara penyampaian Pengaduan tersebut dicantumkan dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana diatur dalam SEOJK No.12/SEOJK.07/2014.	Media Komunikasi: 1. Lokasi Layanan Konsumen : 2. Seluruh Cabang di seluruh Indonesia 3. Jam kerja Layanan: 4. Hari Kerja dan Sabtu Minggu untuk weekend Banking. 5. Layanan Phone Banking 24 Jam 6. Nomor Telepon Layanan Informasi, Permintaan dan Pengaduan melalui BNI Call 1500046 7. Alamat surat atau surat elektornik layanan Pengaduan: Email bnicall@bni.co.id 8. Website BNI: www.bni.co.id 9. Tata Cara penyampaian Pengaduan, Proses Penanganan Pengaduan dan Pemantauan Pengaduan : Sudah diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan telah diinformasikan kepada nasabah melalui website BNI.
2. Alur Penanganan Pengaduan PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah: a. Kantor/cabang yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor/cabang tempat terjadinya permasalahan yang dilaporkan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor/cabang tersebut; b. Transaksi keuangan yang dilaporkan oleh Konsumen memerlukan penelitian yang lebih mendalam; dan/atau c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar PUJK dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.	
Adapun contoh alur Penanganan Pengaduan, sebagai berikut:	Alur Penangan Pengaduan Alur Penangan Pengaduan Nasabah telah mengacu pada ketentuan OJK dan diatur dalam PP Penyelesian Pengaduan Nasabah Nomor IN/212/BCC/001 tanggal 26 Maret 2015

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
d. Pengaduan Konsumen diterima secara tatap muka, melalui telepon, surat/ surat elektronik (Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pemasar). Pengaduan yang telah diterima wajib dicatat dan didaftarkan menggunakan kode registrasi yang unik. e. Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, PUJK memberikan tanda terima registrasi pengaduan sebagai bukti penerimaan pengaduan dan dapat digunakan sebagai akses untuk mengetahui perkembangan proses penanganan pengaduan. f. Petugas Penanganan Pengaduan menganalisa Keluhan & mengindentifikasi Permasalahan Konsumen yang meliputi: 1). Identitias Konsumen 2). Materi Pengaduan serta harus memahami ekspektasi Konsumen. 3). Melakukan koordinasi dengan unit terkait jika dirasa perlu g. PUJK melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pengaduan. Unit kerja dan/atau fungsi penanganan pengaduan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam hal diperlukan, maka PUJK melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran pengaduan yang dikeluhkan oleh Konsumen. h. PUJK melakukan Eskalasi apabila keluhan tidak dapat diselesaikan langsung oleh Karyawan Penerima Pengaduan. i. Jika Pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap maka PUJK menghubungi Konsumen untuk memberikan informasi perpanjangan waktu 20 hari kerja dengan kondisis sesuai dengan Pasal 35 ayat 3 POJK No.1/POJK.07/2013. j. Karyawan Penanganan Pengaduan menghubungi Konsumen Untuk menyampaikan penyelesaian pengaduan yang telah dilakukan. Penyelesaian Pengaduan dapat berupa Ganti rugi atau Permohonan maaf. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan Konsumen dapat disampaikan oleh PUJK melalui media antara lain telepon, SMS, surat, surat elektronik, tatap muka, media online. k. Apabila Konsumen menolak penyelesaian pengaduan yang diusulkan oleh PUJK, maka PUJK menginformasikan bahwa Konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. l. PUJK mengkonfirmasi kepada Konsumen bahwa dibutuhkan kelengkapan dokumen dan akan menunggu dokumen/informasi tambahan tersebut dalam 7 hari kerja (disesuaikan dengan SOP masing-masing PUJK). m. Jika Konsumen tidak menyerahkan dokumen/informasi, PUJK mengirimkan Surat kepada Konsumen bahwa pengaduan dianggap selesai sampai Konsumen melengkapi dokumen/informasi yang diperlukan. *Jika Konsumen menyerahkan dokumen/informasi, dilanjutkan ke nomor 1.	
3. Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan Apabila PUJK telah menerima Pengaduan dari Konsumen, maka PUJK wajib melakukan pencatatan dan pendaftaran setiap Pengaduan dengan menggunakan kode registrasi yang unik. Pencatatan tersebut paling kurang meliputi rincian data Konsumen, diskripsi Pengaduan dan data pendukung yang relevan.	

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
4. Pemantauan Pengaduan PUJK menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Konsumen melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh PUJK antara lain melalui website, surat, surat elektronik, atau telepon.Untuk memastikan proses Penanganan Pengaduan Konsumen dilakukan sesuai dengan mekanisme di atas, maka PUJK melakukan pemantauan internal sebagai berikut: a. Memantau penyelesaian Pengaduan Konsumen yang sedang berjalan; b. Memastikan bahwa Pengaduan tersebut diselesaikan sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian; dan c. Memastikan bahwa status dan perkembangan Penanganan Pengaduan telah ditatausahakan.	Pemantauan Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.C dan Bab II.E
5. Penyampaian Bukti Penerimaan Pengaduan PUJK memberikan tanda terima registrasi Pengaduan sebagai bukti penerimaan Pengaduan dan dapat digunakan sebagai akses untuk mengetahui perkembangan proses Penanganan Pengaduan. a. Pemberitahuan penerimaan Pengaduan kepada Konsumen minimal memuat informasi sebagai berikut: 1). Nomor registrasi Pengaduan. 2). Tanggal penerimaan Pengaduan sesuai dengan tanggal pada saat PUJK menerima Pengaduan dari Konsumen. b. PUJK menyampaikan bukti penerimaan Pengaduan Konsumen melalui media antara lain: 1). Telepon 2). Short Message Sevices (SMS) 3). Surat/surat elektronik 4). Tatap muka	Penyampaian Bukti Penerimaan Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.C
6. Klasifikasi Pengaduan Pengaduan yang telah diterima oleh PUJK diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kesulitan penyelesaian, media/sarana informasi Pengaduan, lokasi Pengaduan, kompleksitas materi Pengaduan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dijadikan klasifikasi Pengaduan oleh masing-masing PUJK misalnya dengan menggunakan parameter sebagai berikut: a. Pengaduan Konsumen yang disampaikan ke unit kerja dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan yang dapat diselesaikan dalam beberapa hari berikutnya. b. Pengaduan yang disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan. c. Pengaduan berulang untuk masalah dan Konsumen yang sama. d. Pengaduan yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik. e. Pengaduan yang disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau lembaga/badan sejenis. f. Pengaduan yang disampaikan melalui Lembaga Negara terkait, misalnya Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara.	Klasifikasi Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.E dan Bab III.A
7. Analisis dan Investigasi Pengaduan PUJK melakukan verifikasi dan analisis untuk menentukan tindak lanjut Penanganan Pengaduan. Unit kerja dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Dalam hal diperlukan, maka PUJK melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran Pengaduan yang dikeluhkan oleh Konsumen. Tingkat penyelidikan/investigasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan Pengaduan yang mencakup frekuensi kejadian dan dampak yang ditimbulkan. PUJK melakukan investigasi dengan cara: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; dan b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.	Analisis dan Investigasi Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.B

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
8. Penyelesaian dan Tanggapan Pengaduan Setelah PUJK melakukan verifikasi dan investigasi maka bentuk penyelesaian Pengaduan ditindaklanjuti sebagai berikut: a. Pengaduan yang diyakini tidak benar Penyampaian empati dan klarifikasi kepada Konsumen. b. Pengaduan yang diyakini benar 1). Pernyataan Maaf (Redress) Surat pernyataan maaf dapat diberikan oleh PUJK kepada Konsumen apabila: • Terdapat permintaan Konsumen agar PUJK menyampaikan pernyataan maaf; • Terdapat bukti dari hasil evaluasi internal bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak PUJK; • Tidak terdapat keterlibatan dan kelalaian Konsumen terkait materi Pengaduan; • Terdapat itikad baik dari Konsumen untuk menyelesaikan Pengaduan; • Terdapat kesepakatan tertulis antara Konsumen dan PUJK mengenai penyelesaian Pengaduan. Sarana atau media/tata cara pernyataan maaf ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Konsumen dan PUJK. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara PUJK dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.	Penyampaian Penyelesaian Pengaduan Jangka waktu penyelesian pengaduan sdh mengacu pada ketentuan OJK dan telah diatur dalam PP Penyelesian Pengaduan Nasabah (Bab II.E-hal 1-2) Penyampaian perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan ke Nasabah dilakukan melalui SMS sebelum berakhir nya masa 20 hari kerja pertama (sebelum waktu yg telah disepakati) (diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.C) Penutupan Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.E dan Bab II.F
2). Penawaran Penyelesaian Pengaduan • PUJK menentukan persyaratan atau kondisi penyelesaian Pengaduan; • Pemberian ganti rugi dapat mempertimbangkan syarat minimal sebagai berikut: - Pengaduan mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial dan adanya unsur kerugian material; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen adalah benar berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh PUJK; - Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/ atau layanan dengan produk dan/ atau layanan yang diterima; - Konsumen telah memenuhi kewajibannya; - Ganti rugi yang diberikan hanya yang berdampak langsung terhadap Konsumen dan paling banyak sebesar nilai transaksi kerugian yang dialami Konsumen. • Pemberian ganti rugi tersebut tidak diberikan untuk potensi kehilangan keuntungan dan biaya-biaya yang dibayarkan oleh Konsumen dalam rangka memproses Pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya konsultasi, biaya pengurusan dokumen pendukung Pengaduan, akomodasi, transportasi dan biaya telepon.	Penanganan Pengaduan dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah III.A
9. Penyampaian Penyelesaian Pengaduan PUJK melakukan penyelesaian Pengaduan antara lain berupa empati, permintaan maaf atau menawarkan penyelesaian lain yang dapat diterima Konsumen. Penyampaian hasil penyelesaian Pengaduan Konsumen dapat disampaikan oleh PUJK melalui media antara lain telepon, SMS, surat, surat elektronik, tatap muka, media online.	

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
10. Penutupan Pengaduan Dalam hal PUJK menyampaikan penyelesaian Pengaduan kepada Konsumen, maka PUJK melakukan pencatatan dan pengkinian status Pengaduan. Apabila Konsumen menolak penyelesaian Pengaduan yang diusulkan oleh PUJK, maka PUJK menginformasikan bahwa Konsumen dapat memilih penyelesaian Pengaduan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PUJK memantau perkembangan proses Penanganan Pengaduan untuk menjaga reputasi PUJK dan dalam rangka kepuasan Konsumen. 11. Penanganan Pengaduan dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan PUJK menunjuk Karyawan sebagai Person In Charge Pengaduan (PIC) yang berhubungan dengan OJK dan memiliki tugas untuk memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi dan/atau kelengkapan dokumen dari OJK terkait dengan Penanganan Pengaduan Konsumen. Dalam rangka efektifitas Penanganan Pengaduan, PUJK dapat menunjuk 3 (tiga) orang karyawan yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang menangani Pengaduan Konsumen dan 1 (satu) orang pejabat dari bagian hukum untuk menjadi PIC. PUJK yang telah diberikan hak akses Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) Sektor Jasa Keuangan, maka PIC dimaksud memiliki tugas tambahan sebagai berikut: a. Memantau, mengambil alih, menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan; dan b. Memberikan masukan terkait SLKT Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal Pengaduan disampaikan oleh Konsumen kepada OJK, maka PUJK melakukan Penanganan Pengaduan tersebut melalui SLKT Sektor Jasa Keuangan dengan cara: a. Mengakses SLKT Sektor Jasa Keuangan PUJK mengakses SLKT Sektor Jasa Keuangan secara reguler melalui website www.konsumen.ojk.go.id untuk: 1). Mengetahui adanya Pengaduan yang dieskalasi oleh OJK; dan 2). Memantau Pengaduan yang tercatat dalam SLKT. b. Mengambil alih Pengaduan PUJK mengambil alih Pengaduan yang tercatat. c. Menindaklanjuti Pengaduan PUJK menindaklanjuti Pengaduan yang telah diambil alih dan mencatat tindak lanjut yang telah dilakukan ke dalam riwayat Pengaduan serta melampirkan bukti pendukung Penanganan Pengaduan. d. Penyelesaian Pengaduan Dalam hal PUJK menilai bahwa Penanganan Pengaduan telah selesai maka PUJK mengusulkan penyelesaian Pengaduan tersebut kepada OJK. Petunjuk pelaksanaan SLKT Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam user manual. Perkembangan status dan tindak lanjut Penanganan Pengaduan yang dilakukan oleh PUJK dapat dipantau oleh Konsumen melalui website www.konsumen.ojk.go.id.	

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
F Pemeliharaan dan Perbaikan Berkelanjutan	
1. Alur Perbaikan Berkelanjutan	Alur Perbaikan Berkelanjutan: Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab IV.A
2. Administrasi Pengaduan PUJK wajib mengadministrasikan setiap proses Penanganan Pengaduan dalam rangka memastikan kualitas dan menjaga kinerja Penanganan Pengaduan secara keseluruhan. Pengadministrasian wajib memuat informasi paling kurang: a. Identitas Konsumen; b. Materi Pengaduan; dan c. Tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan termasuk status Pengaduan Konsumen. PUJK mengatur, menetapkan dan mengimplementasikan prosedur administrasi setiap proses Penanganan Pengaduan. Prosedur tersebut harus sejalan dan memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan kemanan data dan/atau informasi Konsumen/pengadu yang berlaku. Prosedur administrasi proses Penanganan Pengaduan antara lain: a. Langkah-langkah spesifik untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, menjaga dan mengarsip (termasuk jangka waktu retensi) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Sistem penjagaan dokumentasi Pengaduan terutama dalam bentuk arsip elektronik dan media rekaman magnetik dimana rekaman ini dimungkinkan hilang, disalahgunakan atau usang; c. Menentukan prosedur dan batasan terkait penyerahan/pengungkapan suatu dokumentasi atas suatu permintaan dari Konsumen/pengadu/ pihak terkait. Hal tersebut meliputi jenis dokumen yang dapat diberikan, pihak yang dapat menerima dokumen berikut dengan formatnya; dan d. Pengungkapan dokumen dalam hal ini data dan statistik Pengaduan ke publik.	Administrasi Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.F
3. Analisis, Evaluasi dan Laporan Pengaduan PUJK menganalisis dan mengevaluasi Pengaduan secara berkala. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah dengan teknik pengolahan data statistik dan laporan-laporan. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi: a. kesesuaian produk dan layanan PUJK; b. tingkat kepuasan Konsumen; c. kinerja dan efektivitas sistem manajemen kualitas Penanganan Pengaduan; d. efektivitas implementasi dari suatu perencanaan; e. efektivitas tindakan untuk memitigasi risiko; f. kinerja dari pihak eksternal terkait penyelenggaraan Penanganan Pengaduan; dan/atau g. kebutuhan atas peningkatan kualitas dari sistem Penanganan Pengaduan.	Analisis, Evaluasi dan Laporan Pengaduan : Laporan tiga bulanan ke Direksi. Laporan bulanan ke Pemimpin BCC. Laporan bulan ke Divisi terkait. Laporan Internal:

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
Selain hal tersebut, hasil analisis juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi tren dan mayoritas permasalahan yang sering diadukan dalam rangka membantu menemukan solusi yang komprehensif agar permasalahan tersebut tidak timbul di kemudian hari. Unit kerja dan/atau fungsi Penanganan Pengaduan Konsumen menyampaikan laporan penyelesaian Pengaduan Konsumen kepada Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan PUJK secara berkala. Bentuk laporan disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing PUJK dan disampaikan dalam bentuk: a. Laporan Internal Laporan yang dibuat secara internal dengan menggunakan format/ bentuk laporan yang ada di masing-masing PUJK yang minimal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1). Jenis produk dan/atau layanan dan permasalahan yang diadukan. 2). Pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan, terdiri dari Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya dan Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan. 3). Penyebab Pengaduan, misalnya: • Pemahaman karakteristik produk oleh Konsumen, • Informasi produk yang kurang memadai, • Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi, • Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak, • Kelalaian PUJK, • Tindak pidana PUJK. 4). Jumlah publikasi yang negatif, misalnya Pengaduan Konsumen pada: • Media massa, • Artikel media cetak/elektronik, • Liputan media cetak/elektronik, • Publikasi/tulisan di tempat umum, • Media sosial, atau • Surat elektronik b. Laporan Eksternal 1). Laporan yang dibuat dengan format/bentuk standard sesuai Pasal 34 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013. Contohnya adalah laporan yang disampaikan kepada OJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. 2). Laporan tahunan yang disampaikan kepada publik yang paling kurang mencakup sarana, jumlah dan Penanganan Pengaduan Konsumen. 4. Pemenuhan Kepentingan Konsumen Terhadap Penanganan Pengaduan PUJK memantau persepsi Konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan atas layanan Penanganan Pengaduan yang dilakukan. Metode pemantauan dapat dilakukan antara lain melalui survei, umpan balik (feedback) Konsumen terhadap produk dan layanan yang diberikan, interaksi dengan Konsumen, dan sebagainya. Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kepuasan Konsumen antara lain: a. Kecepatan waktu Penanganan Pengaduan; b. Kompetensi karyawan yang menangani Pengaduan; c. Kemudahan penyampaian Pengaduan.	Laporan Eksternal: Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.H Pemenuhan Kepentingan Konsumen Terhadap Penanganan Pengaduan Diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.H Survey terhadap kepuasan pelanggan secara umum telah dilaksanakan melalui survey : • Customer Satisfaction Survey • Survey Internal BCC Sedangkan survey secara specific terkait penanganan pengaduan akan ditambahkan pada questioner survey periode selanjutnya.

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
5. Pemantauan Proses Penanganan Pengaduan PUJK memantau kinerja sistem Penanganan Pengaduan secara berkesinambungan baik mekanisme dan sumber daya yang terlibat didalamnya. Pemantauan tersebut diukur dengan kriteria yang meliputi: a. Jenis Pendekatan Pemantauan Pendekatan yang diadopsi disesuaikan dengan jenis dan ukuran organisasi di PUJK. b. Tanggung Jawab Manajemen PUJK memastikan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas pemantauan dan laporan kinerja proses Penanganan Pengaduan dan tindakan korektif yang dilakukan adalah pihak yang kompeten untuk melakukan hal ini. Berikut adalah beberapa jenis tanggung jawab yang dapat dipertimbangkan: 1). Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan: a. Mendefinisikan tujuan pemantauan; b. Mendefinisikan tanggung jawab pemantauan; c. Melakukan tinjauan atas proses pemantauan; dan d. Memastikan bahwa peningkatan kinerja dan perbaikan diimplementasikan. 2). Pejabat Penanganan Pengaduan: a. Menetapkan proses pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja; dan b. Melapor kepada Direksi atau Pejabat Setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan terkait kinerja selama tinjauan proses Penanganan Pengaduan sehingga semua peningkatan kinerja dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan. 3). Pejabat lain yang terkait dengan Penanganan Pengaduan: a. Memantau Penanganan Pengaduan secara memadai dan mencatat hasil pemantauan tersebut sesuai dengan kewenangannya; b. Melakukan tindakan korektif yang diperlukan selama berada dalam ranah tanggungjawabnya; dan c. Menyediakan data terkait Penanganan Pengaduan untuk membantu meninjau proses pemantauan selama berada dalam ranah tanggungjawabnya. c. Kriteria pemantauan proses dan data Penanganan Pengaduan: 1). Kriteria Pemantauan Proses Penanganan Pengaduan Berikut adalah contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan saat memantau proses Penanganan Pengaduan: a. Kebijakan dan tujuan Penanganan Pengaduan telah ditetapkan dan dilaksanakan secara tepat; b. Komitmen Direksi atau Pejabat setingkat di bawah Direksi Yang Menjalankan Fungsi Penanganan Pengaduan terhadap Penanganan Pengaduan; c. Tanggung jawab atas Penanganan Pengaduan telah diberikan secara tepat/sesuai; d. Karyawan yang menangani Pengaduan Konsumen diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Pengaduan; e. Batasan kebijakan tentang tanggapan Penanganan Pengaduan kepada Konsumen telah diatur; f. Kompetensi dan proporsi karyawan yang menangani Pengaduan telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan PUJK; g. Efektivitas dan efisiensi pelatihan Penanganan Pengaduan; h. Jumlah saran yang berasal dari karyawan terkait Penanganan Pengaduan; i. Sikap karyawan terhadap Penanganan Pengaduan; j. Frekuensi audit Penanganan Pengaduan atau tinjauan manajemen; k. Waktu yang digunakan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari audit Penanganan Pengaduan atau tinjauan manajemen;	Pemantauan Proses Penanganan Pengaduan Pemantauan Proses Penanganan Pengaduan diatur dalam PP Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bab II.B dan Bab II.

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
l. Waktu yang digunakan untuk menanggapi Konsumen/pengadu; m. Tingkat kepuasan Konsumen; n. Efektivitas dan efisiensi proses tindakan preventif dan korektif. 2). Kriteria Pemantauan Data Pengaduan. Pemantauan data penting karena akan memberikan/ menyediakan indikator langsung terhadap kinerja proses Penanganan Pengaduan. Pemantauan data dapat meliputi: a. Jenis produk dan/atau layanan dan permasalahan yang diadukan; b. Pengaduan yang diadukan dalam masa laporan pada suatu periode tertentu; c. Penyebab Pengaduan; dan d. Publikasi negatif.	
6. Audit Penanganan Pengaduan Kegiatan audit terhadap Penanganan Pengaduan diperlukan dalam rangka mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan IDR telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta selaras dengan tujuan perusahaan. Audit dilakukan secara reguler oleh satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi audit internal. Satuan kerja atau pejabat tersebut dalam melakukan pengendalian internal perlu untuk: a. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, salah satunya menggunakan sampling test dari beberapa jasa, produk, dan Konsumen dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur Penanganan Pengaduan; b. Menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; c. Melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di PUJK dalam Penanganan Pengaduan Konsumen secara berkala; d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengaduan untuk mengurangi penyebab terjadinya Pengaduan; e. Menyampaikan hasil audit ke dalam tinjauan manajemen untuk identifikasi masalah dan perbaikan proses Penanganan Pengaduan; dan f. Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam Penanganan Pengaduan Konsumen secara tepat waktu.	Audit Penanganan Pengaduan Audit penanganan Pengaduan tidak khusus dilakukan secara spesifik namun tetap menjadi salah satu fokus audit operasional yang dilakukan di Cabang maupun Divisi/unit (KIC/KI) secara regular.

STANDAR INTERNAL DISPUTE RESOLUTION (IDR)	IMPLEMENTASI IDR DI BNI
7. Review Manajemen Terhadap Proses Penanganan Pengaduan Direksi dan Pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi Penanganan Pengaduan harus meninjau proses Penanganan Pengaduan secara berkala dalam rangka untuk memastikan kesesuaian, keefektifan dan efisiensi yang berkesinambungan berdasarkan informasi yang berasal dari: a. Hasil audit; atau b. Informasi lainnya yang diperlukan, diantaranya: 1). faktor internal seperti perubahan kebijakan, tujuan, struktur organisasi, sumber daya, dan produk yang ditawarkan; 2). faktor eksternal seperti perubahan peraturan perundang-undangan, kompetisi bisnis, dan inovasi teknologi; 3). kinerja Penanganan Pengaduan keseluruhan yang meliputi survei kepuasan Konsumen dan hasil pemantauan Penanganan Pengaduan; 4). status tindakan korektif, preventif dan tindak lanjut atas tinjauan manajemen sebelumnya; atau 5). rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja Penanganan Pengaduan. Selanjutnya, Direksi atau Pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi Penanganan Pengaduan untuk meninjau Penanganan Pengaduan secara rutin. Hal tersebut dilakukan dalam rangka: a. memastikan efektivitas dan efisiensi Penanganan Pengaduan; b. mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin muncul baik dari faktor internal dan eksternal; c. mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan produk dan layanan serta Penanganan Pengaduan; d. mengkaji kebutuhan atas perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terhadap Penanganan Pengaduan; dan e. mengevaluasi perubahan potensial terhadap kebijakan dan tujuan Penanganan Pengaduan. Tindak lanjut dari review manajemen meliputi: a. keputusan dan tindakan terkait dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses Penanganan Pengaduan; b. usulan pada peningkatan kapasitas dan kinerja produk dan layanan; dan c. keputusan dan tindakan terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia seperti program pelatihan, mutasi dan rotasi yang berkesinambungan, dan sebagainya.	Review Manajemen Terhadap Proses Penanganan Pengaduan, sudah dilakukan melalui: Evaluasi SLA penyelesaian pengaduan nasabah secara periodic dengan unit operasional. Menyesuaikan ketentuan internal BNI jika terdapat perubahan perundang-undangan. Melakukan penyempurnaan aplikasi penangan pengaduan nasabah. Memberikan feedback kepada business owner atau product owner terkait pengaduan nasabah yang sering muncul. Melakukan monitoring SLA terkait penyelesaian pengaduan.
8. Perbaikan Berkelanjutan Peningkatan efektivitas dan efisiensi Penanganan Pengaduan secara berkesinambungan dilakukan oleh PUJK dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PUJK paling kurang meliputi: a. Melaksanakan tindak lanjut atas review manajemen; b. Menganalisis data Pengaduan dan umpan balik (feedback) Konsumen atas Penanganan Pengaduan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berulang dan/atau bersifat sistemik; c. Menggunakan hasil identifikasi permasalahan dimaksud pada huruf b untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan penyebab permasalahan pokok Pengaduan dan mencegah terulangnya hal yang sama di kemudian hari; d. Menelaah dan mengaplikasikan praktik terbaik (best practice) terkait Penanganan Pengaduan dari berbagai referensi baik nasional maupun internasional; dan e. Mendorong dan mengembangkan inovasi teknologi dalam sistem Penanganan Pengaduan.	Perbaikan Berkelanjutan Untuk peningkatan dan efisiensi Penanganan Pengaduan secara berkesinambungan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan review SLA penyelesaian pengaduan nasabah untuk masing-masing kategori pengaduan. Secara periodik menyampaikan umpan balik (feedback) kepada product owner atas permasalahan yang sering terjadi.

Disamping pelaksanaan kebijakan jaminan atas perlindungan konsumen, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank terkait dengan Nasabah/Konsumen sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

ATM Tuna Netra

BNI menciptakan inovasi yang menyasar kalangan disabilitas. Inovasi tersebut berupa layanan ATM berbasi audio bernama *talking* ATM atau ATM Wicara bagi mereka penyandang tuna netra. ATM ini diperkenalkan di Wilayah Papua pada 7 Mei 2016 di Galeri ATM KC Entrop Jayapura, Papua.

Dalam ATM Wicara, spesifikasi mesin *touch screen* ATM dilengkapi dengan mesin audio berupa *headset* bagi nasabah penyandang disabilitas tunanetra. Melalui *headset* tersebut, nasabah akan diperdengarkan instruksi transaksi perbankan seperti informasi saldo dan tarik tunai dalam jumlah tertentu, sampai dengan perubahan PIN rekening. Selain itu,seluruh huruf di papan tombol ATM juga tercetak menggunakan huruf *Braille*.

Pembayaran Kendaraan Bermotor e-Samsat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran pajak daerah dan registrasi kendaraan bermotor, BNI telah berkerjasama dengan SAMSAT Jawa Barat dan Jasa Raharja mengembangkan elektronik SAMSAT (e-SAMSAT).Layanan e-SAMSAT Jawa Barat ini diharapkan akan memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin mudah karena BNI menyiapkan 1.338 ATM di Wilayah Jawa Barat dan 14.369 ATM tersebar di seluruh Indonesia.Dengan adanya e-SAMSAT, masyarakat akan diberikan kemudahan, kecepatan dan proses pembayaran yang lebih praktis dan terhindar dari praktek percaloan. Layanan anti percaloan ini diharapkan menjadi *entry point* agar masyarakat dapat mengenal BNI sebagai Bank Transaksional yang memiliki banyak fasilitas yang mempermudah nasabahnya

BNI Bawa Mitra Binaan Go Online

Dengan semakin maraknya penjulan secara *online*, BNI mendorong mitra binaannya untuk siap *Go Online* dengan menggelar pelatihan *e-Commerce* di 6 kota. Pelatihan *e-Commerce* bertajuk GOL (*Go OnLine*) dihadiri oleh 70 Mitra Binaan BNI dengan menampilkan sebanyak 1.946 Produk Mitra Binaan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara simultan di Jakarta, Kuta, Kampoeng BNI Kamasan – Klungkung, Bandung, Yogyakarta dan Makassar. Dari keenam kota tersebut, total Mitra Binaan yang hadir sebanyak 320 orang.Tujuan dilaksanakannya pelatihan adalah memberikan bekal terhadap Mitra Binaan BNI dalam menghadapi globalisasi *digital marketing*. Terbukanya pasar baru di dunia maya akan memperkuat para pelaku UMKM menjalankan usahanya.

BNI Rezeki Mudik 2016

BNI kembali memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, BNI sukses memberangkatkan 1.000 peserta mudik yang juga nasabah setia BNI menggunakan moda transportasi kereta api pada Sabtu, 02 Juli 2016 lalu. Sebelumnya, BNI telah memberangkatkan 80 bus eksekutif dengan kapasitas sekitar 4.000 peserta mudik dan membantu pemulangan Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Malaysia sebanyak 30 orang.

Sebanyak 500 pemudik menggunakan kereta kelas ekonomi dan 500 pemudik lainnya menggunakan kereta kelas eksekutif. Kereta kelas eksekutif mengantarkan pemudik ke jurusan Yogjakarta dan Solo dengan 400 tempat duduk dan Surabaya dengan 100 tempat duduk. Sedangkan kereta kelas ekonomi memulangkan pemudik ke Solo dengan 200 tempat duduk dan Surabaya dengan 300 tempat duduk. Kereta kelas ekonomi diberangkatkan dari Stasiun Senen dan kereta kelas eksekutif diberangkatkan dari Stasiun Gambir.

BNI Peduli TKI

Sebagai bagian dari HUT BNI Ke-70, BNI membantu kepulangan para Buruh Migran Indonesia yang kurang mampu dan bermasalah ke Tanah Air. Sebanyak 30 TKI dari Malaysia, 20 TKI dari Taiwan dan 20 TKI dari Oman berpartisipasi dalam program ini. Selain untuk membantu dalam berlebaran bersama sanak keluarga di kampung halaman, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wujud syukur atas kerja sama antara BNI dan Buruh Migran Indonesia.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah BNI

BNI *Contact Center* sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam layanan bagi para nasabah BNI, senantiasa terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan maupun kartu kredit. Alur layanan dan solusi penyelesaian pengaduan nasabah BNI telah tercantum pada website BNI www.bni.co.id pada ikon BNI Call 1500046. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

Pengaduan Secara Lisan

Solusi penyelesaian pengaduan yang disampaikan secara lisan maksimal dalam 2 (dua) hari kerja. Apabila solusi penyelesaian pengaduan secara lisan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas BNI akan menyarankan nasabah untuk pengajuan pengaduan secara tertulis.

Alur penyampaian dan penyelesaian pengaduan secara lisan

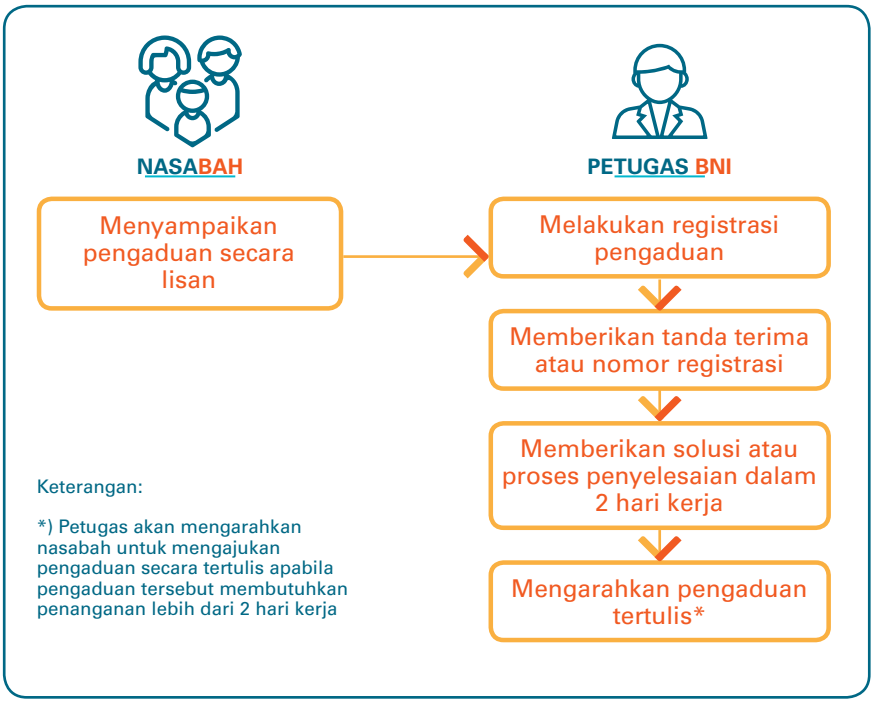

Pengaduan Secara Tertulis

Dalam hal pengajuanpengaduan secara tertulis diperlukan dokumen dari nasabah yaitu:

1. Surat Pernyataan yang menjelaskan permasalahan yang dialami nasabah (bersifat wajib)
2. Salinan identitas diri nasabah/perwakilan nasabah (bersifat wajib)
3. Dokumen pendukung seperti:
   a. Bukti setoran/penarikan/transfer atau aktivitas perbankan lain yang terkait dengan pengaduan yang dimaksud
   b. Fotokopi buku tabungan/rekening koran milik nasabah dan/atau perwakilannya
   c. Surat kuasa nasabah yang diwakilkan (bila bukan nasabah sendiri yang mengajukan pengaduan)

d. Dokumen dari pihak berwenang (bila perwakilan nasabah adalah lembaga/ badan hukum)
e. Dokumen lain yang diperlukan

Pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa BNI akan memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan perpanjangan waktu penyelesaian.

Alur penyampaian dan penyelesaian pengaduan secara tertulis

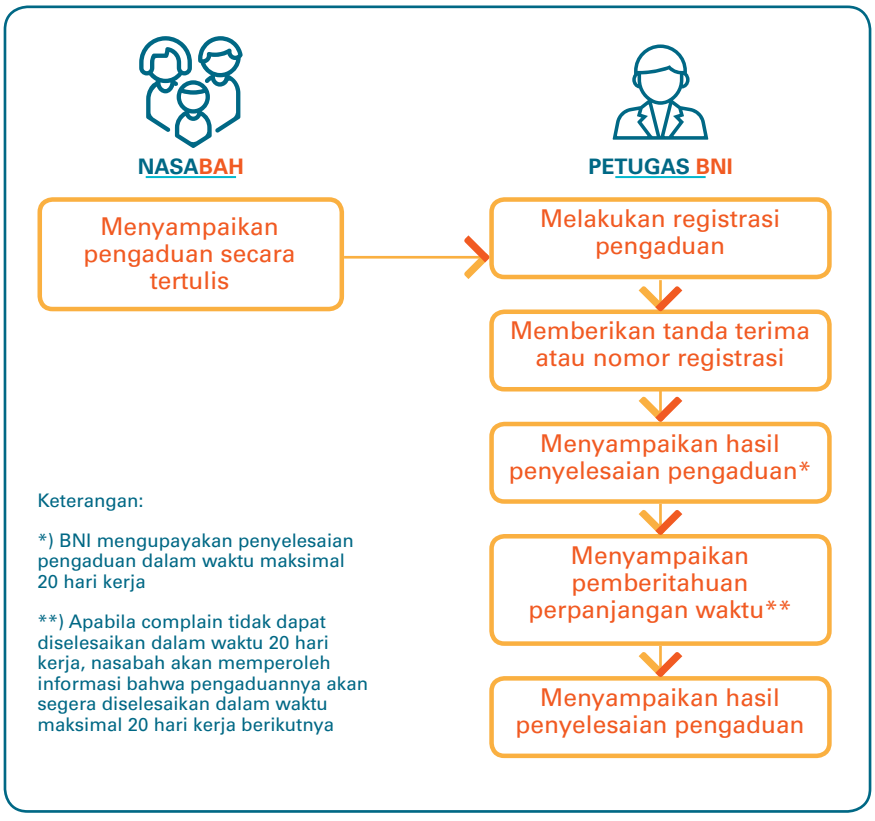

Sesuai Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014, BNI akan memberikan informasi penyelesaian atas pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat ataupun pesan singkat (*short message service*/*sms*). Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI masih kurang sesuai, nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui layanan mediasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

CSR TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PEMASOK *(PROCUREMENT)*

Kebijakan

BNI berkomitmen untuk melaksanakan perubahan tata kerja sekaligus meningkatkan kinerja pengadaan. Perseroan memanfaatkan teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan proses pengadaan yang telah terbukti berhasil meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan pengadaan.

Kegiatan

Dalam rangka mencapai Visi "Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja" serta Misi Kelima "Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik", BNI menerapkan proses pengadaan yang transparan dengan menggunakan portal website, www.bni-eproc.com

BNI memiliki unit khusus yang menangani pemasok yaitu Divisi *Procurement and Fix Asset* (PFA). Dalam melakukan pengadministrasian pemasok, BNI menyusun Daftar Rekanan yang selalu di *update* sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, BNI juga melakukan penilaian terhadap pemasok dengan berdasar pada Lembar Penilaian Kinerja Rekanan.

CSR Terkait Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk dan Nasabah

Laporan Tahunan 2016

Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko (Konsolidasi)

- Struktur Permodalan BNI 698
- Penerapan Manajemen Risiko 703

Struktur Permodalan BNI

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas secara keseluruhan, *cushion* untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank senantiasa menghubungkan antara sasaran keuangan dan kecukupan modal dengan risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula dengan ekspansi bisnis yang didasarkan pada kecukupan permodalan dan persyaratan likuiditas Bank. Kebutuhan permodalan tersebut direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Kebijakan manajemen terkait permodalan ditujukan untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat dan struktur permodalan yang baik untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan usaha di masa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016, modal Bank terdiri dari:

Modal Inti
Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari: Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* 1 – CET 1) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier* 1). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, selisih lebih penjabaran laporan keuangan, dana setoran modal, waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank, opsi saham, pendapatan komprehensif lainnya dan saldo surplus revaluasi aset tetap) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan, pendapatan komprehensif lainnya, selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif, selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan serta PPA non produktif).

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)
Modal pelengkap meliputi instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Pada tahun 2016, BNI memiliki jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp84,28 triliun, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan modal inti dan modal pelengkap tahun 2015 sebesar Rp73,8 triliun.

Tabel 1.a Struktur Modal BNI (dalam juta Rupiah)

KOMPONEN MODAL	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
I. Modal Inti (Tier 1)	79.644.529	82.433.225	64.251.153	66.359.277
1 Modal Inti Utama/*Common Equity Tier* 1 (CET 1)	79.644.529	82.433.225	64.251.153	66.359.277
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi *Treasury Stock*)	9.054.807	9.054.807		
1.2 Cadangan Tambahan Modal *)	74.141.736	75.058.373		
1.2.1 Faktor Penambah	75.452.711	76.983.451		
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	12.271.672	12.345.269		
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	81.715	81.715		
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-		
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	12.189.957	12.263.554		
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	63.181.039	64.638.182		
1.2.1.2.1 Agio	14.568.468	14.568.468		
1.2.1.2.2 Cadangan umum	2.778.412	2.778.412		
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu	35.057.859	36.054.633		

KOMPONEN MODAL	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan	10.776.300	11.236.669		
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-		
1.2.1.2.6 Lainnya	-	-		
1.2.2 Faktor Pengurang	(1.310.975)	(1.925.078)		
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya	(1.247.449)	(1.861.323)		
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-		
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1.247.449)	(1.861.323)		
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	(63.526)	(63.755)		
1.2.2.2.1 Disagio	-	-		
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu	-	-		
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan	-	-		
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-		
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*	-	-		
1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	(63.526)	(63.755)		
1.2.2.2.7 Lainnya	-	-		
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	2.484		
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama *)	(3.552.014)	(1.682.439)		
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	(1.249.473)	(1.288.172)		
1.4.2 *Goodwill*	-	-		
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	-	-		
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	(2.302.541)	(394.267)		
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-		
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-		
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-		
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier 2* pada bank lain	-	-		
1.4.7.1 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-		
2 Modal Inti Tambahan/*Additional Tier* 1 (AT 1) *)	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1	-	-		
2.2 Agio/Disagio	-	-		
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *)	-	-		
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier 2* pada bank lain	-	-		
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-		

Struktur Permodalan BNI

KOMPONEN MODAL	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
II. Modal Pelengkap (*Tier 2*)	4.633.546	4.766.042	9.547.647	9.698.487
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier 2*	-	-		
2. Agio/Disagio	-	-		
3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	4.733.546	4.866.042		
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap *)	(100.000)	(100.000)		
4.1 *Sinking Fund*	-	-		
4.2 Penempatan dana pada instrumen *Tier 2* pada bank lain	(100.000)	(100.000)		
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-		
TOTAL MODAL	84.278.075	87.199.267	73.798.800	76.057.764

	31 Desember 2016		31 Desember 2015			31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian		Individual	Konsolidasian	Individual	Konsolidasian
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO					Rasio KPMM				
ATMR RISIKO KREDIT	378.715.505	393.701.434	329.342.843	341.710.828	Rasio CET 1 (%)	18,3%	18,2%	17,0%	16,9%
ATMR RISIKO PASAR	2.540.057	2.671.238	1.475.750	1.764.663	Rasio Tier 1 (%)	18,3%	18,2%	17,0%	16,9%
ATMR RISIKO OPERASIONAL	54.098.017	56.705.293	47.746.053	49.745.517	Rasio Tier 2 (%)	1,1%	1,1%	2,5%	2,5%
TOTAL ATMR	435.353.579	453.077.965	378.564.646	393.221.008	Rasio KPMM (%)	19,4%	19,3%	19,5%	19,3%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	9,8%	9,8%	9,7%	9,7%	CET 1 UNTUK BUFFER (%)	1%	1%		

MANAJEMEN PERMODALAN TERINTEGRASI PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 setiap Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) dan memiliki Entitas Utama. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berupa Bank, Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Perusahaan Efek dan Perusahaan Pembiayaan.

BNI telah membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan, dimana BNI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama serta memiliki 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Life, BNI Securites dan BNI Asset Management.

Mengacu pada POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 04 Desember 2015, Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan yang dilakukan dengan menghitung Rasio KPMM Terintegrasi.

Berdasarkan hasil Komite Risiko & Kapital Bidang Manajemen Risiko (RMC) - 01/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah diputuskan bahwa pelaporan KPMM Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI menggunakan modal BNI secara konsolidasi ditambah dengan modal BNI Life.

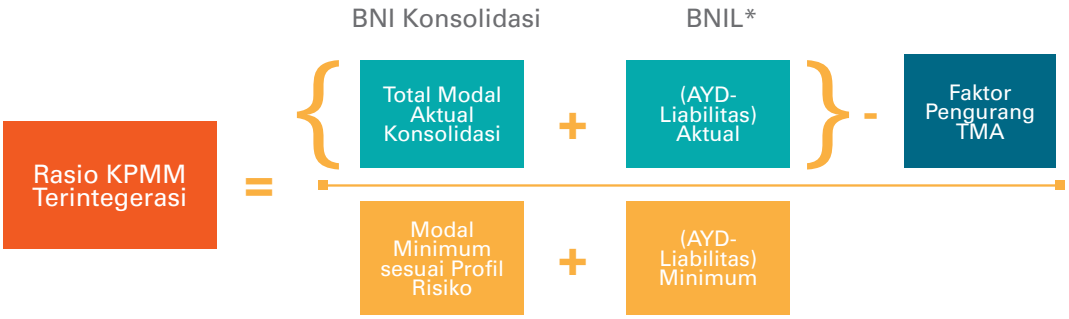

**) 120% x Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)*

Perhitungan Total Modal Aktual (TMA) dan Total Modal Minimum masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI juga dilakukan dalam rangka memonitor kecukupan permodalan masing-masing LJK. Hasil perhitungan Rasio Kecukupan Permodalan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI posisi 31 Desember 2016 adalah sebesar 204,13%.

Penerapan Manajemen Risiko

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko BNI berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
   a. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
   b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
   a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
   b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. Sistem Pengendalian Intern
   Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR).

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Risiko & Kapital Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Rapat Komite Risiko dan Kapital Sub Komite *Assets & Liabilities* (ALCO), Rapat Komite Risiko dan Kapital Sub Komite *Anti Fraud* (KAF), serta forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Prosedur Perkreditan (KPP).

Kecukupan Kebijakan Dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan acuan dasar yang bersifat strategis tentang penerapan manajemen risiko di BNI, sedangkan prosedur manajemen risiko merupakan tata cara yang menjadi panduan dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko. Ketentuan secara detail dari masing-masing prosedur diatur dalam petunjuk teknis.

Kebijakan Manajemen Risiko di BNI antara lain:

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
2. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, dan Risiko Reputasi.
3. Pedoman Sistem Pengendalian Intern

Dalam implementasinya Kebijakan Manajemen Risiko dijabarkan dalam Prosedur Manajemen Risiko.

Beberapa limit terkait risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional telah dimiliki BNI sebagai salah satu metode pengendalian risiko dan dilakukan review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di BNI meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, dapat digambarkan sebagai berikut :

Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko serta dampak yang ditimbulkannya

Pengendalian risiko difokuskan pada risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat dan toleransi risiko yang akan diambil.

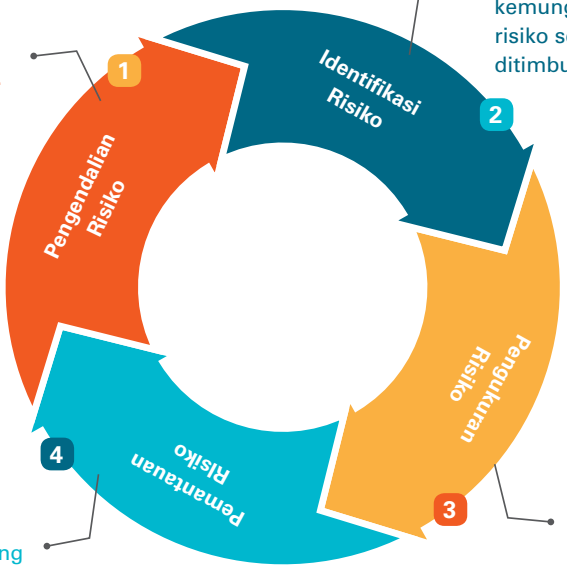

Proses pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian serta untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik, al. dengan:

- melakukan pemantauan kepatuhan pada regulasi
- toleransi dan limit risiko yang telah ditetapkan
- hasil *stress testing*
- upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Disclosure

Menyampaikan laporan risiko, yang mencakup :

1. Laporan Manajemen Risiko kepada Regulator dan Manajemen
2. Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik

Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh *regulator* atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan sendiri oleh BNI berdasarkan *best practise* dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem, pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh *risk control unit*, dan hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala antara lain Laporan Portofolio Pinjaman, Laporan Pemantauan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Laporan Beban Risiko Operasional, Laporan *Feedback Operational Risk Self Assessment*, *Internal Risk Report,* Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Beberapa aplikasi manajemen risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara baik, akurat dan tepat waktu antara lain *Credit Risk Management System* (CRMS), *Internal Rating System, Scoring System,* Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), dan aplikasi manajemen risiko pasar.

IDENTIFIKASI RISIKO

Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya.

Hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah :

1. Melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis BNI.
3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/ aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.

PENGUKURAN RISIKO

Proses pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko serta untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran risiko adalah:

1. Ruang lingkup pengukuran risiko paling tidak mengukur sensitivitas, kecenderungan, faktor risiko secara individu, eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dengan mempertimbangkan korelasi, dan seluruh risiko yang melekat pada transaksi serta produk bank.
2. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Regulator maupun yang dikembangkan sendiri secara internal.
3. Penerapan metode pengukuran disesuaikan ketentuan Regulator yang berlaku.
4. Penggunaan metode internal dalam hal pengukuran risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, harus mempertimbangkan persyaratan Regulator, antara lain persyaratan penggunaan, *backtesting*, validasi, dan dokumentasi.
5. Pengukuran risiko dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Pengukuran risiko untuk BNI secara individu dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko, sedangkan untuk Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko.
7. Untuk keperluan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kepada Regulator, pengukuran risiko BNI individu dilakukan terhadap 3 (tiga) risiko utama yakni risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sedangkan perhitungan KPMM terintegrasi dilakukan dengan membandingkan antara total modal aktual Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan dengan total modal minimum yang wajib dipenuhi oleh LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

8. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala dimana hasil pengukuran dilaporkan kepada Regulator sebagai bagian dari pelaporan Profil Risiko dan KPMM BNI individu serta pelaporan Profil Risiko dan KPMM terintegrasi.

PEMANTAUAN RISIKO

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap mitigasi dan *limit* risiko yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan risiko adalah:

1. Pemantauan risiko mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan *limit*, dan hasil *stress testing* serta konsistensi pelaksanaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal (Regulator) maupun internal (Manajemen).

PENGENDALIAN RISIKO

Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengendalian risiko adalah:

1. Sistem pengendalian risiko mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
3. Mekanisme lindung nilai dan mitigasi risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Strategi pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima Risiko (*Risk Acceptance*)
   Untuk jenis risiko yang secara proses tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi pencegahan atau perbaikan situasi, maka potensi risiko yang ada akan diterima sebagai konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis, dengan pertimbangan bahwa risiko yang ada masih dalam *limit*/ toleransi Bank. Namun demikian, kontrol yang ketat harus dijalankan apabila strategi pengendalian risiko ini diterapkan.
2. Menghindari Risiko *(Risk Avoidance)*
   Risk avoidance dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko yang tidak dapat diterima *(unacceptable),* atau mencegah bertambahnya eksposur risiko yang ada. *Risk avoidance* dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis lebih kecil dengan eksposur risiko yang mungkin terjadi.
3. Memindahkan risiko (*Risk Transfer*)
   Pada strategi pemindahan risiko, risiko yang ada masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut, namun risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain. Salah satu metode pemindahan risiko yang paling umum dilakukan adalah pemanfaatan jasa asuransi atau tenaga alih daya (*outsourcing*).
4. Mengurangi Risiko *(Risk Mitigation)*
   Pengendalian risiko akan optimal apabila dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi risiko yang ada. Mitigasi risiko dimaksudkan untuk memperkecil kerugian yang dipicu oleh faktor eksternal, maupun kejadian di internal bank. Salah satu alternatif untuk menekan dan mengurangi risiko adalah melalui peningkatan kontrol dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Beberapa aplikasi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara baik, akurat dan tepat waktu antara lain *Credit Risk Management System* (CRMS), *Internal Rating System*, *Scoring System*, Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP), dan aplikasi manajemen risiko pasar.

Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Sistem pengendalian intern di BNI dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas:

1st *Risk Taking Unit or 1st Line of Defense*	2nd *Risk Control Unit or 2nd Line of Defense*	3rd *Risk Assurance Unit or 3rd Line of Defense*
Risk Owner, bertanggungjawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya *(Day to day risk management & control)*	***Risk Control,*** bertanggungjawab dalam penyusunan *framework,* kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko Bank	***Risk Assurance,*** bertanggungjawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern
• Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian *(day-to-day)* bisnis atau fungsinya • Identifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/ parameter risiko yang telah ditetapkan oleh *2nd line of defense.*	• Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk *risk appetite & limits* • Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko • Sebagai *risk oversight* unit, melakukan agregasi dan pelaporan risiko secara keseluruhan. • Advice atau rekomendasi ke *1st line defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan • Eskalasi permasalahan/ keputusan penting ke Senior Management/ Direksi/*Risk Management Committee*	• Melakukan audit intern secara independen dan *periodic* terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. • Menyusun rekomendasi/ *corrective action* dan memonitor pelaksanaannya. • Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan *key stake holder* sesuai kewenangan

Pemilik Risiko (*Risk Owner*) sebagai *first line of defense/ Risk Taking Unit* melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya secara harian (*day to day)*.

Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Tata Kelola Kebijakan dan Divisi Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/ Risk Control Unit* yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.

Satuan Pengawasan Internal bertindak sebagai *third line of defense/ Risk Assurance Unit*, yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas menilai secara independen kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari *regulator*.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BNI telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan diterapkannya pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit* dan *Risk Control Unit* serta *Risk Assurance Unit*.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Ditengah ketidakpastian perekonomian global yang semakin meningkat dan perlambatan ekonomi akibat krisis global masih dirasakan dalam perekonomian Indonesia, berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah Bank (*non-performing loan/* NPL). Portofolio kredit BNI masih dapat tumbuh cukup besar yaitu sebesar 17,61% pada tahun 2016. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan Bank Umum maupun Bank Persero. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) BNI meningkat dari 1,96% pada tahun 2015 menjadi 3% pada tahun 2016 sejalan dengan peningkatan NPL perbankan secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, BNI telah mengimplementasikan *early warning system* yaitu suatu sistem *monitoring* untuk mengidentifikasi risiko kredit secara lebih dini yang digunakan sebagai penentu dilakukannya investigasi lebih jauh sebelum kredit jatuh menjadi *non-performing loan*. BNI secara proaktif melakukan upaya restrukturisasi terhadap kredit yang diindikasikan akan bermasalah di kemudian hari untuk menekan laju peningkatan NPL. Untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti BNI secara bertahap terus meningkatkan rasio kemampuan Bank untuk menyerap potensi kerugian akibat kualitas kredit yang buruk (*Coverage Ratio)*, dan saat ini *Coverage Ratio* BNI telah mencapai 146%.

Saat ini BNI telah memiliki *Credit Dicipline Program* (CDP) sebagai panduan bagi seluruh *officer* kredit dalam memproses kredit secara efektif dan *prudent*, mulai dari proses penyusunan *pipeline*, verifikasi hingga pemantauan kredit. *Credit Dicipline Program* (CDP) telah disosialisasikan pada Desember 2016 ke beberapa wilayah dan akan dilanjutkan ke segenap Wilayah pada Tahun 2017.

Tata Kelola dan Organisasi

Untuk mempercepat ekspansi bisnis dengan tetap menjaga kualitas kredit, maka BNI melakukan perubahan proses kredit dimana fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh *Relationship Manager.* Untuk memperdalam dan memperkuat usulan kredit, unit risiko bisnis melakukan kajian risiko secara lebih mendalam (*deep dive analysis*) dan analisis terhadap anomali bisnis untuk mengantisipasi risiko yang belum tertangkap dari analisis risiko di *Relationship Manager* serta mitigasi yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

BNI menerapkan *four eyes principles* dalam proses perkreditan yang diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis.

Untuk menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah, BNI telah menunjuk SEVP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang membawahi Unit *Remedial & Recovery* yang memiliki fungsi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah di semua segmen bisnis.

Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense* (*risk owner*) yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM) dan Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV) berperan sebagai *second line of defense* yang bertugas mempersiapkan infrastruktur perkreditan seperti penyusunan kebijakan dan prosedur perkreditan, penetapan *limit* kewenangan memutus kredit, menyiapkan sistem *rating* dan *scoring*, bersama unit bisnis memantau portofolio kredit, serta mempersiapkan *tools* lain yang diperlukan untuk menunjang aktivitas perkreditan.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai *third line of defense* turut aktif menjaga kualitas portofolio kredit melalui *immediate review,* yaitu melakukan sampling pemeriksaan terhadap beberapa debitur segera setelah kredit dicairkan.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan disusun sebagai dasar untuk melakukan aktivitas dalam proses perkreditan agar kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan. BNI memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang diputus oleh Forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya KPB diterjemahkan ke dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan yang diputus oleh Forum Komite Prosedur Perkreditan (KPP) dan dilakukan pembakuan ke dalam Pedoman Perusahaan. Pedoman Perusahaan yang digunakan saat ini sudah dalam bentuk pedoman *online* yaitu BNI e-PP (elektronik Pedoman Perusahaan).

Untuk menjaga agar portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK BNI telah menetapkan *limit* BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Proses

Proses manajemen risiko kredit diimplementasikan sejak proses pemasaran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas. Proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu *value chain activity* yang diawali dengan penetapan strategi dan perencanaan, *customer insight,* perencanaan portofolio, pengembangan produk, pemrosesan kredit, administrasi kredit, pemantauan yang intensif dan optimisasi portofolio.

Pada aktivitas operasional individu, proses manajemen risiko kredit dilaksanakan oleh Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis melalui tahapan identifikasi (antara lain verifikasi kebenaran data), pengukuran (penggunaan perangkat analisa kredit), pemantauan (melalui kunjungan berkala kepada nasabah dan *review rating* nasabah), dan pengendalian (antara lain melalui penetapan limit, *covenant*, dan faktor *mitigant*).

Proses Manajemen Risiko Kredit

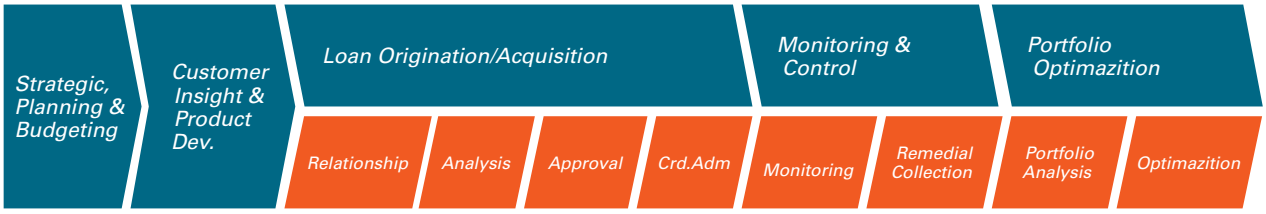

Secara portofolio keseluruhan, pemantauan dan pelaporan eksposur kredit dilakukan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui Laporan Portofolio Pinjaman. Selain itu secara berkala dalam Forum Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko dilakukan evaluasi atas pencapaian target, penetapan langkah-langkah dan koordinasi tindaklanjut perbaikan, serta evaluasi atas efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Perangkat dan Metode

Untuk mendukung operasional proses bisnis dan pengelolaan risiko kredit, BNI telah memiliki beberapa perangkat manajemen risiko kredit baik pada tataran eksposur individu maupun portofolio.

Untuk pemrosesan pada eksposur individu segmen *business banking,* BNI telah memiliki model *rating* berupa *internal rating system,* sementara untuk segmen *consumer* digunakan sistem skoring debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan.

Untuk mengatur komposisi portofolio, BNI telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) yang berfungsi membatasi risiko konsentrasi eksposur pinjaman setiap sektor ekonomi pada masing-masing segmen, dan menjadi pedoman ekspansi pinjaman. Untuk menilai risiko setiap jenis industri BNI telah memiliki *Industry Risk Rating* (IRR) serta standar rasio keuangan yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kualitas debitur dari sisi industri.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada bank, BNI secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut.
Untuk mengintegrasikan dokumentasi dalam proses perkreditan, BNI memulai inisiatif pengembangan e-PAK yang membantu proses *end-to-end* kredit berikut pendokumentasiannya yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa *tools* yang telah ada.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Berdasar PSAK 55, bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi terjadinya penurunan nilai aset bank. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat dari suatu aset melebihi dari nilai yang dapat dipulihkan dari aset yang bersangkutan.

Setiap akhir bulan BNI melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui Laporan Laba Rugi (*Fair Value Through Profit and Loss*). BNI mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa Aset Keuangan atau kelompok Aset Keuangan tersebut mengalami penurunan nilai.

Bukti objektif adalah bukti terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Bukti objektif tersebut antara lain :

1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur.
2. Pelanggaran kontrak, yaitu terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran kewajiban debitur baik pokok, bunga dan denda.
3. BNI dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan tersebut.
4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau
6. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset keuangan tersebut, meskipun penurunan belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara Individu dalam kelompok aset keuangan tersebut.

Metode perhitungan pembentukan CKPN di BNI menggunakan 2 (dua) metode yaitu *assessment* secara Individu dan *assessment* secara Kolektif.

Perhitungan CKPN secara Individu dilakukan terhadap suatu aset keuangan yang signifikan mempunyai bukti obyektif mengalami penurunan nilai, yaitu aset keuangan dari segmen Korporasi dan Menengah, serta kepemilikan surat berharga. CKPN secara Individu dihitung dengan menggunakan metode nilai kini dari estimasi arus kas suatu aset keuangan yang dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *Incurred Loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* [PD] dan *Loss Given Default* [LGD]) dari masing-masing kelompok aset tertentu). Perhitungan CKPN secara Kolektif dilakukan bagi semua aset keuangan yang:

1. Tidak dievaluasi secara Individu, yaitu antara lain kredit dari segmen Kecil, Kredit Konsumtif, Kartu Kredit, Tagihan Akseptasi, Tagihan Dokumen dan Fasilitas.
2. Tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari aset keuangan yang dievaluasi, yaitu pinjaman dalam segmen korporasi dan usaha menengah yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai.
3. Terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari aset keuangan yang dievaluasi secara Individu namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai.

Dalam perhitungan CKPN secara kolektif ini, suatu aset dikategorikan sebagai aset yang telah jatuh tempo (*default*) apabila aset tersebut tercatat mempunyai jumlah hari tunggakan atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau telah di hapus buku.

BNI menggunakan *migration analysis* dan *roll rate analysis* dengan periode observasi data selama 5 tahun untuk perhitungan PD dan LGD CKPN Kolektif.

Dalam rangka implementasi IFRS-9 yang diadopsi pada PSAK-71, BNI mempersiapkan implementasinya dengan pengembangan metodologi perhitungan CKPN sesuai IFRS-9 sebagaimana tertuang pada PSAK-71.

Pengungkapan tagihan bersih dan rincian mutasi cadangan penurunan nilai Bank secara Individu dan konsolidasi dibuat dalam tabel : Tabel 2.1.a, Tabel 2.1.b, Tabel 2.2.a, Tabel 2.2.b, Tabel 2.3.a, Tabel 2.3.b, Tabel 2.4.a, Tabel 2.4.b, Tabel 2.5.a, Tabel 2.5.b, Tabel 2.6.a, dan Tabel 2.6.b

Tabel 2.1a Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-16						31-Dec-15					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Area						Tagihan Bersih Berdasarkan Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	505	214	571	119.685.710	10.980.153	130.667.153	8	16	575	95.339.311	3.234.950	98.574.860
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.495.211	238.590	10.528.044	44.963.546	4.392.791	67.618.182	5.417.981	91.695	12.444.224	28.024.382	3.864.826	49.843.108
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	136.881	136.881	-	-	-	-	344.413	344.413
4	Tagihan kepada Bank	502.545	641.608	742.492	23.323.961	7.407.595	32.618.201	352.483	725.209	619.141	28.153.520	5.941.558	35.791.911
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.250.421	1.491.388	5.147.724	3.473.276	-	12.362.809	2.331.136	1.423.417	5.567.583	4.158.968	392	13.481.496
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.337.136	1.003.409	1.248.622	2.739.411	-	6.328.578	1.357.901	927.394	1.210.245	1.398.332	-	4.893.872
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	313.001	219.168	470.591	206.729	2.596	1.212.085	305.393	217.629	452.661	195.098	5.517	1.176.298
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11.246.582	8.676.980	13.853.279	16.982.883	-	50.759.724	8.340.101	6.793.018	8.927.727	13.734.899	723	37.796.468
9	Tagihan kepada Korporasi	51.572.935	19.720.788	57.678.101	120.367.807	12.684.335	262.023.966	45.502.637	17.203.178	52.260.283	102.566.790	9.739.675	227,272,566
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	347.985	195.195	328.776	1.032.029	573.823	2.477.808	900.274	182.208	427.360	1.260.629	404.414	3.174.885

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-16						31-Dec-15					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Area						Tagihan Bersih Berdasarkan Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
11	Aset Lainnya	2.227.639	1.653.814	2.890.732	31.683.771	86.392	38.542.348	2.218.807	1.625.101	2.889.005	31.588.049	1.793.382	40.114.344
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	77.293.960	33.841.154	92.888.932	364.459.123	36.264.566	604.747.735	66.726.721	29.188.865	84.798.804	306.419.978	25.329.850	512.464.218

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.
Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.
Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya
Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.
Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

2.1.b Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-16						31-Dec-15					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Area						Tagihan Bersih Berdasarkan Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan kepada Pemerintah	505	214	571	119.685.710	10.980.153	130.667.153	8	16	575	95.339.311	3.234.950	98.574.860
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.495.211	238.590	10.528.044	44.963.547	4.392.790	67.618.182	5.417.981	91.695	12.444.224	28.024.382	3.864.826	49.843.108
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	136.881	136.881	-	-	-	-	344.413	344.413
4	Tagihan kepada Bank	502.545	641.608	742.492	23.324.727	7.408.112	32.619.484	352.483	725.209	619.141	28.177.312	5.942.076	35.816.221
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.250.421	1.491.388	5.147.724	3.473.276	-	12.362.809	2.331.136	1.423.417	5.567.583	4.158.968	392	13.481.496
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.337.136	1.003.409	1.248.622	2.739.411	-	6.328.578	1.357.901	927.394	1.210.245	1.398.332	-	4.893.872
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	313.001	219.168	470.591	206.729	2.596	1.212.085	305.393	217.629	452.661	195.098	5.517	1.176.298
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	11.246.582	8.676.980	13.853.805	17.143.637	-	50.921.004	8.340.101	6.793.018	8.928.252	13.760.975	723	37.823.069
9	Tagihan kepada Korporasi	51.577.385	19.720.789	57.690.596	119.609.318	12.684.334	261.282.422	45.507.087	17.203.178	52.272.778	102.013.713	9.739.675	226.736.431
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	347.985	195.195	328.776	1.032.028	573.824	2.477.808	900.274	182.208	427.360	1.260.629	404.414	3.174.885
11	Aset Lainnya	2.227.639	1.653.814	2.890.732	32.565.347	91.307	39.428.839	2.218.807	1.625.101	2.889.005	32.038.522	1.798.296	40.569.731
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	4.029.474	1.323.437	6.130.953	16.578.752	-	28.062.616	3.229.541	1.165.441	4.812.157	14.006.830	-	23.213.969
	Total	81.327.884	35.164.592	99.032.906	381.322.482	36.269.997	633.117.861	69.960.712	30.354.306	89.623.981	320.374.072	25.335.282	535.648.353

Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.
Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.
Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya
Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.
Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank Secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16						31-Des-15					
		Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	47.825.305	7.963.104	8.396.643	36.272.643	30.209.458	130.667.153	30.417.342	12.179.443	9.494.496	16.415.360	30.068.217	98.574.858
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.566.860	5.296.153	4.232.293	25.412.350	2.110.526	67.618.182	23.796.643	5.394.399	3.354.435	15.546.172	1.751.458	49.843.107
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-	-	2.259	136.881	206.838	137.575	-	-	-	344.413
4	Tagihan Kepada Bank	16.036.319	5.864.304	4.080.883	620.403	6.016.292	32.618.201	19.909.539	3.856.700	1.858.009	1.069.474	9.098.188	35.791.910
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	86.502	635.741	1.334.264	10.306.302	-	12.362.809	7.034	812.835	1.118.526	11.543.101	-	13.481.496
6	Kredit Beragun Properti Komersial	945.186	846.362	1.419.889	3.117.141	-	6.328.578	745.966	424.161	1.004.345	2.719.400	-	4.893.872
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	4.882	13.612	65.030	1.128.561	-	1.212.085	5.072	13.566	45.318	1.112.342	-	1.176.298
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.396.409	7.137.180	13.450.379	17.328.801	9.446.955	50.759.724	2.996.069	5.842.368	6.171.114	13.896.410	8.890.507	37.796.468
9	Tagihan Kepada Korporasi	118.859.346	26.755.522	40.974.465	72.095.673	3.338.960	262.023.966	112.361.409	24.734.513	26.649.069	60.698.698	2.828.878	227.272.567
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	538.921	238.479	182.468	1.198.501	319.439	2.477.808	1.298.998	409.437	259.054	1.082.821	124.575	3.174.885
11	Aset Lainnya	505	412	1.150	-	38.540.281	38.542.348	-	-	-	-	40.114.344	40.114.344
12	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	218.394.857	54.750.869	74.137.464	167.480.375	89.984.170	604.747.735	191.744.910	53.804.997	49.954.366	124.083.778	92.876.167	512.464.218

2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16						31-Des-15					
		Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Bedasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total	<1 Tahun	> 1 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun s.d 5 Tahun	>5 Tahun	Non Kontraktual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	47.825.305	7.963.104	8.396.643	36.272.641	30.209.460	130.667.153	30.417.342	12.179.443	9.494.496	16.415.360	30.068.217	98.574.858
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.566.860	5.296.153	4.232.293	25.412.351	2.110.525	67.618.182	23.796.643	5.394.399	3.354.435	15.546.172	1.751.458	49.843.107
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.623	-	-	-	2.258	136.881	206.838	137.575	-	-	-	344.413
4	Tagihan Kepada Bank	16.037.084	5.864.304	4.080.883	620.403	6.016.810	32.619.484	19.933.332	3.856.700	1.858.009	1.069.474	9.098.706	35.816.221
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	86.502	635.741	1.334.264	10.306.302	-	12.362.809	7.034	812.835	1.118.526	11.543.101	-	13.481.496
6	Kredit Beragun Properti Komersial	945.186	846.362	1.419.889	3.117.141	-	6.328.578	745.966	424.161	1.004.345	2.719.400	-	4.893.872
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	4.882	13.612	65.030	1.128.561	-	1.212.085	5.072	13.566	45.318	1.112.342	-	1.176.298
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.397.460	7.170.226	13.463.897	17.442.466	9.446.955	50.921.004	2.997.120	5.875.413	6.184.633	13.875.397	8.890.507	37.823.070
9	Tagihan Kepada Korporasi	118.873.219	26.790.569	41.001.535	71.278.139	3.338.960	261.282.422	112.375.282	24.769.561	26.676.140	60.086.573	2.828.879	226.736.435
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	538.920	238.479	182.468	1.198.502	319.439	2.477.808	1.298.998	409.437	259.054	1.082.821	124.575	3.174.885
11	Aset Lainnya	505	412	1.150	-	39.426.772	39.428.839	-	-	-	-	40.569.730	40.569.730
12	Eksposur di Unit Syariah	6.668.135	4.677.004	5.181.220	10.819.261	716.996	28.062.616	5.288.944	3.977.593	3.536.690	10.159.026	251.715	23.213.968
	Total	225.078.681	59.495.966	79.359.272	177.595.767	91.588.175	633.117.861	197.072.571	57.850.683	53.531.646	133.609.666	93.583.787	535.648.353

2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Individu

31–Des-2016

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	5.923.835	-	-	-	
2	Perikanan	52.665	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	1.475.758	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	11.301.634	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	18.964.564	-	-	-	
6	Konstruksi	-	4.550.430	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	474	-	-	2.667	551	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.412.580	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	103.145.565	8.627.235	-	16.909.940	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.456.960	628.328	-	72.208	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.173.296	37.969	-	3.120.120	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	8.944	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	167.538	11.222	-	53.237	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	10.777.431	
20	Lainnya	670.655	11.684.627	136.881	12.451.085	1.584.827	
	Total	130.667.153	67.618.182	136.881	32.618.201	12.362.809	

Penerapan Manajemen Risiko

(dalam Juta Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	1.155.582	33.786.048	22.091	-	-
	-	-	128.534	651.126	15.339	-	-
	-	-	15.000	9.979.455	6.731	-	-
	-	-	690.681	60.521.794	104.095	-	-
	-	-	10.805	8.274.750	2.291	-	-
	-	-	123.639	13.851.429	62.589	-	-
	1.635	-	11.134.972	36.852.368	638.906	-	-
	-	-	496.244	9.255.960	21.757	-	-
	-	-	194.392	15.999.717	233.122	-	-
	-	-	21.421	21.846.492	331.202	-	-
	4.048.989	-	497.554	13.986.505	31.822	-	-
	-	-	1.431	-	-	-	-
	449	-	29.302	374.280	1.814	-	-
	-	-	48.146	1.204.645	539	-	-
	347	-	263.313	4.581.769	7.936	-	-
	-	-	17.477	6.636	101	-	-
	-	-	-	4.166	-	-	-
	-	1	194	2.486	-	-	-
	2.267.232	1.180.605	31.935.910	10.890.444	934.150	-	-
	9.926	31.479	3.995.127	19.953.896	63.323	38.542.348	-
	6.328.578	1.212.085	50.759.724	262.023.966	2.477.808	38.542.348	-

31–Des-2015							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	3.507.652	-	-	44	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.375.033	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	11.220.000	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	10.342.480	-	-	-	
6	Konstruksi	-	2.131.879	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	111.345	-	18.504	1.290	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	5.075.182	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	57.261.472	4.648.894	-	35.574.716	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	1.571.649	-	105.832	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	40.625.273	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	13.163	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	35.604	34.657	-	72.906	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	6.781	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	10	13.480.161	
20	Lainnya	652.510	8.824.337	344.413	-	-	
	Total	98.574.859	49.843.108	344.413	35.791.912	13.481.495	

Penerapan Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	824.377	24.499.691	24.001	-	-
	-	-	72.147	560.505	10.188	-	-
	-	-	11.128	8.493.496	309.015	-	-
	-	-	477.868	56.041.464	646.215	-	-
	-	-	10.359	7.359.851	4.612	-	-
	-	-	112.848	10.026.589	80.875	-	-
	1.982	-	6.229.265	32.550.032	544.432	-	-
	-	-	166.755	7.979.925	23.737	-	-
	-	-	115.418	17.748.417	277.224	-	-
	-	-	36.698	4.316.067	6.393	-	-
	2.338.586	-	247.070	9.569.744	335.015	-	-
	-	-	-	288	-	-	-
	495	-	14.293	385.053	361	-	-
	-	-	40.235	1.034.378	1.950	-	-
	520	-	190.511	3.642.376	68.810	-	-
	-	-	7.495	6.427	312	-	-
	-	-	19	2.488	-	-	-
	-	-	4.561	26.595	24	-	-
	2.552.290	1.176.298	28.466.223	10.350.782	492.241	-	-
	-	-	769.199	32.678.394	349.480	40.114.344	-
	4.893.873	1.176.298	37.796.469	227.272.562	3.174.885	40.114.344	-

Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31-Des-2016							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	5.923.835	-	-	-	
2	Perikanan	52.665	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	1.475.758	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	11.301.634	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	18.964.563	-	-	-	
6	Konstruksi	-	4.550.430	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	474	-	-	2.667	551	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	4.412.580	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	103.145.566	8.627.235	-	17.081.935	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.456.960	628.328	-	72.208	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.173.296	37.969	-	3.120.120	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	8.944	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	167.538	11.222	-	53.237	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	10.777.431	
20	Lainnya	670.654	11.684.628	136.881	12.280.373	1.584.827	
	Total	130.667.153	67.618.182	136.881	32.619.484	12.362.809	

Penerapan Manajemen Risiko

(dalam Juta Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	1.155.685	33.786.047	22.091	-	-
	-	-	128.534	651.126	15.339	-	-
	-	-	15.411	9.979.455	6.731	-	-
	-	-	693.461	60.539.958	104.095	-	-
	-	-	10.805	8.274.750	2.291	-	-
	-	-	130.207	13.851.429	62.589	-	-
	1.635	-	11.136.593	36.852.368	638.906	-	-
	-	-	496.366	9.255.960	21.757	-	-
	-	-	195.243	16.005.714	233.122	-	-
	-	-	78.946	21.864.958	331.202	-	-
	4.048.989	-	504.080	13.993.492	31.822	-	-
	-	-	1.431	-	-	-	-
	449	-	29.310	374.280	1.814	-	-
	-	-	48.162	1.204.645	539	-	-
	347	-	263.313	4.581.769	7.936	-	-
	-	-	17.520	6.636	101	-	-
	-	-	-	4.166	-	-	-
	-	1	194	2.486	-	-	-
	2.267.232	1.180.604	31.935.910	10.890.444	934.150	-	-
	9.926	31.480	4.079.833	19.162.739	63.323	39.428.839	28.062.616
	6.328.578	1.212.085	50.921.004	261.282.422	2.477.808	39.428.839	28.062.616

31-Des-2015							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	3.507.652	-	-	44	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.375.033	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	11.220.000	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	10.342.480	-	-	-	
6	Konstruksi	-	2.131.879	-	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	111.345	-	18.423	1.290	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	5.075.182	-	-	-	
10	Perantara Keuangan	57.261.472	4.648.894	-	35.599.973	-	
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	1.571.649	-	105. 371	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	40.625.273	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	13.105	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	35.604	34.657	-	72.588	-	
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	6.751	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	10	13.480.161	
20	Lainnya	652.510	8.824.337	344.413	-	-	
	Total	98.574.859	49.843.108	344.413	35.816.221	13.481.495	

Penerapan Manajemen Risiko

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Syariah
	-	-	823.382	24.436.527	24.001	-	219.448
	-	-	72.051	559.060	10.188	-	108.345
	-	-	11.524	8.471.599	309.015	-	255.193
	-	-	480.008	55.915.100	646.215	-	888.166
	-	-	10.345	7.340.876	4.612	-	181.436
	-	-	119.257	10.000.739	80.875	-	424.200
	1.982	-	6.222.591	32.466.114	544.432	-	1.750.805
	-	-	166.654	7.959.351	23.737	-	241.372
	-	-	116.114	17.708.966	277.224	-	246.147
	-	-	94.098	4.323.357	6.393	-	2.268.381
	2.338.586	-	253.258	9.552.041	335.015	-	509.284
	-	-	-	287	-	-	358.584
	495	-	14.281	384.060	361	-	274.104
	-	-	40.198	1.031.712	1.950	-	324.672
	520	-	190.257	3.632.986	68.810	-	-
	-	-	7.528	6.411	312	-	-
	-	-	19	2.482	-	-	-
	-	-	4.555	26.526	24	-	-
	2.552.290	1.176.298	28.428.322	10.324.096	492.241	-	9.820.481
	-	-	768.627	32.594.143	349.480	40.569.730	5.343.351
	4.893.873	1.176.298	37.823.069	226.736.433	3.174.885	40.569.730	23.213.969

2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Bank Secara Individu (dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-16					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	62.729.342	26.329.611	75.746.277	258.754.907	28.524.001	452.084.138
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)						
	a. Belum jatuh tempo	1.424.693	121.138	289.911	1.445.033	195.668	3.476.443
	b. Telah jatuh tempo	1.272.071	629.541	1.289.606	1.994.100	353.180	5.538.498
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	1.133.483	142.878	1.769.387	4.970.919	147.582	8.164.248
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.796.792	1.021.139	2.274.883	2.990.009	77.722	8.160.545
5	Tagihan yang dihapus buku	366.239	269.910	231.570	2.143.848	-	3.011.567

dibawah tabel diberi keterangan:
Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.
Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.
Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya
Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.
Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

No.	Keterangan	31-Dec-15					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	64.109.981	26.878.914	81.009.865	259.387.298	20.698.078	452.084.136
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)						
	a. Belum jatuh tempo	1.176.457	121.138	289.911	1.445.032	195.668	3.228.206
	b. Telah jatuh tempo	1.272.071	629.541	1.289.606	1.994.099	353.180	5.538.497
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	842.793	313.700	772.501	2.701.491	144.795	4.775.280
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.858.566	945.816	2.022.806	2.210.419	26.053	7.063.660
5	Tagihan yang dihapus buku	380.883	565.555	675.892	830.358	205	2.452.893

2.4.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	31-Dec-16					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	78.818.547	32.709.927	96.413.495	325.152.322	33.990.250	567.084.541
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)						
	a. Belum jatuh tempo	1.590.835	178.157	404.531	2.833.690	195.668	5.202.881
	b. Telah jatuh tempo	1.272.753	629.541	1.290.668	3.520.125	353.180	7.066.267
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	1.133.483	142.878	1.769.387	4.970.918	147.582	8.164.248
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.888.805	1.055.755	2.347.091	3.356.701	77.722	8.726.074
5	Tagihan yang dihapus buku	409.886	276.859	257.388	2.239.452	-	3.183.585

dibawah tabel diberi keterangan:
Grup A : Wilayah Medan, Wilayah Padang, Wilayah Palembang, Wilayah Banjarmasin.
Grup B : Wilayah Makassar, Wilayah Denpasar, Wilayah Manado, Wilayah Papua.
Grup C : Wilayah Bandung, Wilayah Semarang, Wilayah Surabaya
Grup D : Wilayah Jakarta Senayan, Wilayah Jakarta Kota, Wilayah Jakarta BSD, Wilayah Jakarta Kemayoran.
Grup E : Wilayah Kantor Cabang Luar Negeri

No.	Keterangan	31-Dec-15					
		Area					
		Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Grup E	Total
1	Tagihan	67.303.077	28.373.584	85.493.896	272.738.392	20.671.158	474.580.107
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)						
	a. Belum jatuh tempo	1.225.900	126.229	302.134	1.507.693	203.891	3.365.847
	b. Telah jatuh tempo	1.326.243	655.998	1.344.911	2.078.941	368.023	5.774.117
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	910.623	338.947	834.673	2.534.588	156.449	4.775.280
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	1.968.850	990.295	2.113.860	2.331.538	26.282	7.430.825
5	Tagihan yang dihapus buku	397.848	548.906	664.233	854.915	203	2.466.105

2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Individu (dalam juta Rupiah)

31-Des-2016							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	34.538.975	7.797	165.237	282.967	394.640	46.709
2	Perikanan	739.875	-	5.690	21.308	34.553	75
3	Pertambangan dan Penggalian	10.771.376	5.439	67.927	1.382.125	99.419	18.027
4	Industri Pengolahan	63.520.461	78.797	1.543.878	2.737.427	916.760	158.841
5	Listrik, Gas dan Air	22.386.111	-	133.957	132.200	165.271	4.195
6	Konstruksi	15.974.051	57.839	412.389	353.775	361.593	277.488
7	Perdagangan Besar dan Eceran	42.432.474	2.332.808	461.338	805.096	2.844.798	535.036
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	8.340.970	4.119	72.017	78.885	269.595	8.295
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	18.545.584	13.481	225.880	1.365.879	320.055	43.785
10	Perantara Keuangan	122.613.585	170.943	606.775	743.343	226.042	15.689
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	19.782.336	312.885	66.557	212.801	359.539	68.877
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.215.959	-	-	1.960	40.883	-
13	Jasa Pendidikan	342.772	-	4.954	-	13.483	808
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.081.234	-	23.191	22.398	29.995	1.654
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	4.310.284	8.207	46.026	19.269	122.793	9.549
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	20.833	-	527	-	1.368	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	3.488	-	-	-	126	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	2.244	-	-	-	81	2.587
19	Bukan Lapangan Usaha	49.678.234	472.993	1.220.825	1.612	1.785.656	-
20	Lainnya	15.783.292	11.135	481.330	3.203	173.895	1.819.952
	Total	452.084.138	3.476.443	5.538.498	8.164.248	8.160.545	3.011.567

31-Des-2015							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yg mengalami penurunan nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	29.035.020	1.402	189.732	142.913	300.427	141.097
2	Perikanan	694.018	13.209	3.519	48.315	26.492	4.246
3	Pertambangan dan penggalian	12.559.926	556.737	724.173	1.552.660	101.331	20.330
4	Industri pengolahan	69.737.101	767.872	1.056.758	1.197.474	1.031.414	238.838
5	Listrik, gas dan air	17.018.515	3.593	3.921	3.044	90.567	1.992
6	Konstruksi	12.846.796	51.613	476.811	416.537	346.143	122.664

31-Des-2015							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yg mengalami penurunan nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
7	Perdagangan besar dan eceran	40.862.518	549.386	1.124.850	589.247	1.945.911	691.046
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8.392.870	62.114	98.665	183.720	214.872	42.742
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	23.670.381	405.613	175.845	318.680	497.743	163.820
10	Perantara keuangan	88.469.050	335	23.998	460	196.032	50.842
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	14.355.426	336.705	170.195	98.232	340.360	42.983
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	39.881.957	-	-	-	17.938	-
13	Jasa pendidikan	401.881	-	1.548	-	13.916	1.972
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.101.279	-	7.152	3.998	34.524	1.453
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	4.274.678	56.719	195.012	212.377	118.291	22.478
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	15.176	-	1.000	-	1.343	2.526
17	Badan internasional badan ekstra internasional lainnya	2.501	-	-	-	78	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	38.010	-	102	-	1.227	339.139
19	Bukan lapangan usaha	57.730.843	346.271	932.036	356	1.653.609	5.035
20	Lainnya	30.996.190	76.637	353.180	7.267	131.442	559.690
	Total	452.084.136	3.228.206	5.538.497	4.775.280	7.063.660	2.452.893

2.5.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

31-Des-2016							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	41.438.296	41.214	165.418	282.967	397.991	51.110
2	Perikanan	905.153	1.774	5.690	21.308	34.845	424
3	Pertambangan dan Penggalian	13.137.977	6.985	67.989	1.382.556	103.224	19.433
4	Industri Pengolahan	76.846.146	120.742	1.544.155	2.740.997	930.766	159.807
5	Listrik, Gas dan Air	26.890.503	4.973	133.957	132.928	167.747	4.666
6	Konstruksi	19.927.813	72.556	412.797	353.775	373.182	283.852
7	Perdagangan Besar dan Eceran	52.749.571	2.502.800	462.009	869.829	2.872.930	543.709

31-Des-2016							
No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individu	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang Dihapusbuku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	10.168.161	7.479	72.023	78.885	272.429	8.295
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	22.475.509	22.010	226.101	1.181.782	324.828	44.954
10	Perantara Keuangan	151.571.233	249.220	606.797	843.942	293.813	107.084
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	24.129.608	328.257	67.187	220.509	366.875	71.810
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25.301.830	-	72	1.960	40.955	-
13	Jasa Pendidikan	733.606	365	4.954	6.328	17.644	808
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.080.302	5.651	23.191	22.398	40.127	3.659
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	5.140.548	8.207	46.210	19.269	122.977	9.549
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	24.887	-	527	-	1.368	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	4.159	-	-	-	126	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	2.676	-	-	-	81	2.587
19	Bukan Lapangan Usaha	74.660.654	696.216	1.220.825	1.612	1.983.147	86.425
20	Lainnya	18.895.909	1.134.432	2.006.365	3.203	381.019	1.785.413
	Total	567.084.541	5.202.881	7.066.267	8.164.248	8.726.074	3.183.585

31 Desember 2015							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yg mengalami penurunan nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
1	Pertanian, perburuan dan kehutanan	29.213.787	1.461	197.894	141.343	307.472	135.813
2	Perikanan	800.649	13.765	3.667	47.784	28.812	4.592
3	Pertambangan dan penggalian	12.796.736	580.139	754.673	1.535.601	107.202	20.678
4	Industri pengolahan	70.545.503	800.143	1.101.459	1.192.290	1.050.759	232.456
5	Listrik, gas dan air	17.175.565	3.744	4.085	4.639	93.407	2.803
6	Konstruksi	13.257.538	53.939	497.275	411.961	357.779	119.228
7	Perdagangan besar dan eceran	42.547.706	572.478	1.172.824	598.492	1.983.404	668.518
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	8.621.262	64.724	102.818	181.701	221.418	42.009
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	23.890.090	423.218	183.465	317.388	505.158	157.641
10	Perantara keuangan	90.858.393	1.158	25.030	20.820	223.551	59.804
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	14.855.729	350.856	178.004	101.725	349.698	43.569
12	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	40.183.938	-	75	-	25.071	1.780
13	Jasa pendidikan	673.497	-	1.613	-	19.318	3.244

31 Desember 2015							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yg mengalami penurunan nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.422.163	-	7.453	3.954	41.081	2.999
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	4.269.060	59.103	203.399	210.043	119.508	21.463
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	15.198	-	1.042	-	1.355	2.412
17	Badan internasional badan ekstra internasional lainnya	2.498	-	-	-	78	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	37.958	-	106	-	1.238	323.819
19	Bukan lapangan usaha	67.403.100	360.823	971.206	352	1.857.306	53.551
20	Lainnya	36.009.737	80.296	368.029	7.187	137.210	569.726
	Total	474.580.107	3.365.847	5.774.117	4.775.280	7.430.825	2.466.105

2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank Secara Individu (dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	31-Des-16		31-Des-15	
		CKPN Individu	CKPN Kolektif	CKPN Individu	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	4.775.280	7.063.660	2.807.220	3.986.589
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	4.425.007	3.008.094	2.273.107	5.027.082
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	4.407.041	2.907.383	2.191.441	4.930.332
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	17.966	100.711	81.666	96.750
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	(1.040.894)	(1.970.673)	(335.078)	(2.117.817)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	4.855	59.464	30.031	167.806
	Saldo akhir CKPN	8.164.248	8.160.545	4.775.280	7.063.660

2.6.b Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	31-Des-16		31-Des-15	
		CKPN Individu	CKPN Kolektif	CKPN Individu	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	4.775.280	7.430.825	2.807.221	4.262.163
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	4.421.889	3.361.332	2.286.388	5.220.447
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	4.403.923	3.233.725	2.204.722	5.116.026
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	17.966	127.607	81.666	104.421

No	Keterangan	31-Des-16		31-Des-15	
		CKPN Individu	CKPN Kolektif	CKPN Individu	CKPN Kolektif
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	(1.040.894)	(2.142.691)	(335.078)	(2.131.028)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	7.973	76.608	16.749	79.243
	Saldo akhir CKPN	8.164.248	8.726.074	4.775.280	7.430.825

PENGUKURAN RISIKO KREDIT DENGAN PENDEKATAN STANDAR

Penggunaan Peringkat dari Lembaga Pemeringkat Eksternal

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, BNI menggunakan Peringkat Eksternal dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu:

1. Peringkat suatu perusahaan hanya berlaku untuk perusahaan tersebut, sehingga walaupun berada dalam satu kelompok usaha peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain.
2. Peringkat domestik (Pefindo, Fitch Indonesia dan ICRA Indonesia) hanya digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah, sedangkan peringkat internasional (Moody's, S&P dan Fitch) digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.
3. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud (*issue rating*). Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga, didasarkan pada peringkat debitur (*issuer rating*). Dalam hal tagihan berbentuk selain surat berharga yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
4. Peringkat jangka pendek digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki jangka waktu pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihan Kepada Korporasi. Dalam hal tagihan jangka pendek tidak mempunyai peringkat jangka pendek, maka penetapan bobot risiko menggunakan peringkat jangka panjang.
5. Apabila suatu eksposur mempunyai lebih dari satu peringkat yang *eligible*, maka yang digunakan adalah peringkat yang memberikan bobot risiko terendah ke-dua. Dalam hal ini apabila hanya terdapat dua peringkat, maka yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

Kategorisasi Portofolio yang menggunakan Peringkat

Penentuan bobot risiko berdasarkan peringkat eksposur sebagaimana tersebut di atas hanya diberlakukan untuk kategori portofolio sebagai berikut:

1. Tagihan Kepada Pemerintah Negara lain
2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4. Tagihan Kepada Bank (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)
5. Tagihan Kepada Korporasi (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)

Lembaga Pemeringkat yang Digunakan
Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui adalah sebagai berikut:

1. Fitch Ratings
2. Moody's Investor Service
3. Standard and Poor's
4. PT. Fitch Ratings Indonesia
5. PT. ICRA Indonesia
6. PT. Pemeringkat Efek Indonesia

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam tabel berikut

3.1.a Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Bank Secara Individu

31-Des-2016								
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		63,866,269	329,683	687,510	64,998,414	785,277	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		20,949,363	5,411,594	5,042,753	350,209	756,017	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		134,622	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		1,852,342	1,310,258	1,249,710	2,613,795	1,632,651	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	4,198,458	743,016	1,635,942	823,490	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		70,509	-	-	202,089	254,931	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		-	-	-	-	-	
	Total		86,873,105	11,249,993	7,722,989	69,800,449	4,252,366	

Penerapan Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	-	130,667,153
-	-	-	-	-	-	-	35,108,246	67,618,182
-	-	-	-	-	-	-	2,259	136,881
-	-	-	-	-	-	-	23,959,445	32,618,201
-	-	-	-	-	-	-	12,362,809	12,362,809
-	-	-	-	-	-	-	6,328,578	6,328,578
-	-	-	-	-	-	-	1,212,085	1,212,085
-	-	-	-	-	-	-	50,759,724	50,759,724
84,921	-	-	-	-	-	-	254,538,139	262,023,966
181	-	-	-	-	-	-	1,950,098	2,477,808
-	-	-	-	-	-	-	38,542,348	38,542,348
-	-	-	-	-	-	-	-	-
85,102	-	-	-	-	-	-	424,763,731	604,747,735

Bank Secara Individu

31-Des-2015								
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		55.609.898	34.316	206.291	42.688.311	36.043	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		12.671.527	4.974.549	1.979.005	282.270	1.168.271	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		344.413	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		3.330.560	1.627.795	2.645.307	2.629.597	1.075.475	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		1.203.253	3.840.377	652.682	2.253.926	1.101.616	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		63.443	-	-	-	285.855	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		-	-	-	-	-	
	Total		73.223.094	10.477.037	5.483.285	47.854.104	3.667.260	

Penerapan Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	-	-	98.574.859
-	-	-	-	-	-	-	28.767.484	49.843.106
-	-	-	-	-	-	-	-	344.413
-	-	-	-	-	-	-	24.483.177	35.791.911
-	-	-	-	-	-	-	13.481.496	13.481.496
-	-	-	-	-	-	-	4.893.873	4.893.873
-	-	-	-	-	-	-	1.176.298	1.176.298
-	-	-	-	-	-	-	37.796.468	37.796.468
1.117.088	-	-	-	-	-	-	217.103.624	227.272.566
181	-	-	-	-	-	-	2.825.405	3.174.884
-	-	-	-	-	-	-	40.114.344	40.114.344
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.117.269	-	-	-	-	-	-	370 642.169	512.464.218

3.1.b Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

31-Des-2016								
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		63.866.269	329.683	687.510	64.998.414	785.277	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		20.949.363	5.411.594	5.042.753	350.209	756.017	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		134.622	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		1.852.342	1.310.258	1.249.710	2.615.795	1.632.651	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	4.198.458	743.016	1.635.942	823.490	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		70.509	-	-	202.089	254.931	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		155.889	68.417	34.256	-	-	
	Total		87.028.994	11.318.410	7.757.245	69.802.449	4.252.366	

Penerapan Manajemen Risiko

(dalam juta Rupiah)

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	130.667.153
	-	-	-	-	-	-	35.108.246	67.618.182
	-	-	-	-	-	-	2.259	136.881
	-	-	-	-	-	-	23.958.728	32.619.484
	-	-	-	-	-	-	12.362.809	12.362.809
	-	-	-	-	-	-	6.328.578	6.328.578
	-	-	-	-	-	-	1.212.085	1.212.085
	-	-	-	-	-	-	50.921.004	50.921.004
	84.921	327	-	-	-	-	253.796.268	261.282.422
	181	-	-	-	-	-	1.950.098	2.477.808
	-	-	-	-	-	-	39.428.839	39.428.839
	-	-	-	-	90.650	-	27.713.404	28.062.616
	85.102	327	-	-	90.650	-	452.782.318	633.117.861

31-Des-2015								
No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT. ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr] AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA		idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		55.609.898	34.316	206.291	42.688.311	36.043	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		12.671.527	4.974.549	1.979.005	282.270	1.168.271	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		344.413	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		3.330.560	1.627.795	2.645.307	2.631.597	1.075.475	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi		1.203.253	3.840.377	652.682	2.253.926	1.101.616	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		63.443	-	-	-	285.855	
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah		155.889	68.417	34.256	-	-	
	Total		73.378.983	10.545.454	5.517.541	47.856.104	3.667.260	

Penerapan Manajemen Risiko

Tagihan Bersih								
			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	98.574.859
	-	-	-	-	-	-	28.767.485	49.843.107
	-	-	-	-	-	-	-	344.413
	-	-	-	-	-	-	24.505.487	35.816.221
	-	-	-	-	-	-	13.481.496	13.481.496
	-	-	-	-	-	-	4.893.873	4.893.873
	-	-	-	-	-	-	1.176.298	1.176.298
	-	-	-	-	-	-	37.823.070	37.823.070
	1.117.088	327	-	-	-	-	216.567.164	226.736.433
	181	-	-	-	-	-	2.825.405	3.174.884
	-	-	-	-	-	-	40.569.731	40.569.731
	-	-	-	-	90.650	-	22.864.756	23.213.968
	1.117.269	327	-	-	90.650	-	393.474.765	535.648.353

RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)

Counterparty Credit Risk

Cunterparty credit risk merupakan bagian dari risiko kredit. *Counterparty credit risk* merupakan risiko akibat kegagalan pihak lawan sebelum penyelesaian akhir dari arus kas pada transaksi tersebut baik dipengaruhi oleh kondisi usaha maupun karena faktor pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, misalnya dalam transaksi *derivative*, repo maupun reverse repo.

Jenis instrumen mitigasi risiko dari *counterparty credit risk* yang diterima oleh bank antara lain:

1. Uang tunai yang disimpan oleh bank
2. Giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh bank
3. Surat berharga pemerintah Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara

Untuk menentukan limit kredit bagi *counterparty* maka dilakukan analisis terhadap *counterparty* yang dilakukan oleh Unit Risiko Bisnis Korporasi.

Perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan hasil perhitungan ATMR pendekatan Standar, maka telah disiapkan perhitungan tambahan ATMR risiko kredit dari *Counterparty Risk* dengan memasukkan komponen CVA (*Credit Valuation Adjustment*).

1. TRANSAKSI DERIVATIF
   Transaksi derivatif yang dilakukan oleh Bank umumnya adalah transaksi *Forward*, *Cross Currency Swap* (CCS), dan *Interest Rate Swap* (IRS). Nasabah Bank yang akan melakukan transaksi derivatif harus memiliki limit transaksi yang ditentukan oleh Unit Bisnis dan Unit Risiko. Dalam kebijakan transaksi derivatif juga ditentukan besarnya marginal deposit minimum yang harus disetor oleh nasabah sesuai dengan jenis dan risiko yang melekat dalam transaksi derivatif. Pengungkapan risiko kredit pihak lawan transaksi derivatif dimuat dalam Tabel 3.2.a Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif

3.2.a Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif

No	Variabel yang Mendasari	31-Dec-16							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		≤1 tahun	>1 thn - ≤5 thn	>5 tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	20,005,282	-	-	111,910	-	311,962	-	311,962
3	Lainnya	2,937,666	8,277,796	-	137,954	-	582,311	-	582,311
	TOTAL	22,942,948	8,277,796	-	249,864	-	894,273	-	894,273
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	20,005,282	-	-	111,910	-	311,962	-	311,962
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	2,937,666	8,277,796	-	137,954	-	582,311	-	582,311

Penerapan Manajemen Risiko

No	Variabel yang Mendasari	31-Dec-16							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		≤1 tahun	>1 thn - ≤5 thn	>5 tahun					
	TOTAL	22,942,948	8,277,796	-	249,864	-	894,273	-	894,273

No	Variabel yang Mendasari	31-Dec-15							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		≤1 tahun	>1 thn - ≤5 thn	>5 tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	12.320.630	18.417	-	231.990	-	356.116	-	356.116
3	Lainnya	215.870	1.085.542	-	208.711	-	265.148	-	265.148
	TOTAL	12.536.500	1.103.959	-	440.701	-	621.264	-	621.264
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	12.320.630	18.417	-	231.990	-	356.116	-	356.116
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	215.870	1.085.542	-	208.711	-	265.148	-	265.148
	TOTAL	12.536.500	1.103.959	-	440.701	-	621.264	-	621.264

2. TRANSAKSI REPO dan *REVERSE* REPO
BNI hanya melakukan transaksi Repo maupun *Reverse* Repo dengan *underlying* aset Surat Berharga Pemerintah Republik Indonesia (Surat Utang Negara).

3.2.b.1 Transaksi Repo

Bank Secara Individu (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16				31-Des-15			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.277.326	7.927.687	762.739	265.551	3.666.938	3.101.625	604.170	302.085
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	4.277.326	7.927.687	762.739	265.551	3.666.938	3.101.625	604.170	302.085

3.2.b.2 Transaksi Repo

Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16				31-Des-15			
		Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SB	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.277.326	7.927.687	762.739	265.551	3.666.938	3.101.625	604.170	302.085
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	4.277.326	7.927.687	762.739	265.551	3.666.938	3.101.625	604.170	302.085

3.2.c1 Transaksi Reverse Repo

Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.325.260	1.312.446	12.815	2.563
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	1.325.260	1.312.446	12.815	2.563

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	376.215	376.215	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	376.215	376.215	-	-

3.2.c2 Transaksi Reverse Repo

Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-16			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.325.260	1.312.446	12.815	2.563
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	339.490	-	-	339.490
	Total	1.664.750	1.312.446	12.815	342.053

No.	Kategori Portofolio	31-Dec-15			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	376.215	376.215	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	376.215	376.215	-	-

MITIGASI RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mitigasi risiko kredit adalah objek yang dibiayai oleh Bank. Sedangkan sebagai pelengkap, Bank dapat menerima agunan tambahan. Jenis agunan utama dan tambahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Agunan, yang dapat berupa aset fisik (tanah, bangunan, mesin, peralatan, dsb.) maupun aset keuangan (*cash collateral*, *marginal deposit*, emas, piutang, surat hutang maupun surat berharga lainnya). Dalam teknik mitigasi risko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit.
2. Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun perusahaan Asuransi. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi yang diperhitungkan hanya garansi yang diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan kategori Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia, Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain, Tagihan Kepada Bank serta lembaga penjaminan/asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan garansi dan penerbit garansi.
3. Asuransi Kredit, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan polis asuransi, penerbit asuransi dan kategori portofolio penerima asuransi.

BNI mengatur kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan berdasarkan jenis eksposur dan skim pembiayaan yang diberikan. Penilaian kecukupan agunan yang diterima telah memperhitungkan adanya *cash equivalent value*. Untuk eksposur kredit (*loan*), penilaian agunan harus dilakukan minimum setiap 24 bulan.

Penerbit jaminan/garansi yang diakui dalam perhitungan teknik mitigasi risiko kredit pada umumnya adalah bank koresponden yang memenuhi persyaratan sebagai *prime* bank ataupun berstatus Badan Usaha Milik Negara. Penggunaan garansi sebagai salah satu bentuk teknik mitigasi risiko masih terbatas pada transaksi jasa perdagangan.

Pengungkapan tagihan bersih Bank secara individu dan konsolidasi berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit dimuat dalam Tabel 4.1.a dan b.

4.1.a Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Individu

2016						
No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	129.462.741	687.510	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	10.002	5.292.022	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	5.481	6.807.709	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	100	-	12.362.709	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	40.477	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	91.795	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	10.276.473	1.400.166	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.956	-	-	-	
11	Aset Lainnya	10.753.182	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	150.776.829	14.187.407	12.362.709	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	272.992	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	107.873	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	7.024	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	280.016	107.873	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.573	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

Kategori Portofolio								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	231.337	-	-	-		253.171	20.254
	-	18.059.089	-	34.682.968	-		44.770.917	3.581.673
	-	-	-	-	-		-	-
	-	10.413.452	-	2.421.872	-		8.990.140	719.211
	-	-	-	-	-		4.326.948	346.156
	-	-	-	6.288.101	-		6.288.101	503.048
	-	1.212.085	-	-	-		606.043	48.483
	-	-	50.392.232	-	-		37.794.174	3.023.534
	-	36.612.698	-	197.120.671	127.382		215.898.126	17.271.850
	-	-	-	443.571	2.032.281		3.491.993	279.359
	-	-	-	24.924.738	2.864.428		29.221.380	2.337.710
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	66.528.661	50.392.232	265.881.921	5.024.091	-	351.640.993	28.131.278
	-	-	-	-	-		-	-
	-	9.522.847	-	-	-		4.761.424	380.914
	-	2.259	-	-	-		1.130	90
	-	10.152.530	-	-	-		5.097.840	407.827
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	275.697	-	-		206.773	16.542
	-	50.522	-	16.220.051	-		16.245.312	1.299.625
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	19.728.158	275.697	16.220.051	-	-	26.312.479	2.104.998
	-	-	-	-	-		-	-
	-	51.254	-	-	-		25.627	2.050

2016

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	1.312.445	570.276	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	1.325.018	570.276	-	-	

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	97.815.143	147.550	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.583	17.640.708	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	8.427	7.080.045	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	126	-	13.481.370	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2.524	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	67.229	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	847.295	5.043.140	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.425	-	-	-	
11	Aset Lainnya	12.743.509	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	111.840.674	29.911.443	13.481.370	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	604.983	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	60.317	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

Kategori Portofolio								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-		-	-
	-	826.382	-	181	-		527.427	42.194
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	208.979	-		208.979	16.718
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	877.636	-	209.160	-	-	762.033	60.962

Kategori Portofolio								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-		-	-	-	-		29.510	2.361
-		24.159.442	-	1.168.271	-		16.776.134	1.342.091
-		-	-	-	-		-	-
-		18.092.131	-	396.125	-		10.858.200	868.656
-		-	-	-	-		4.718.480	377.478
-		-	-	4.891.349	-		4.891.349	391.308
-		1.176.298	-	-	-		588.149	47.052
-		-	37.484.454	-	-		28.113.341	2.249.067
-		651.627	-	204.274.452	1.117.088		207.284.526	16.582.762
-		-	-	108.543	3.063.918		4.704.420	376.354
-		-	-	26.964.726	406.108		27.573.888	2.205.911
-		-	-	-	-	-	-	-
-		44.079.498	37.484.454	237.803.466	4.587.114	-	305.537.997	24.443.040
-		-	-	-	-		-	-
-		6.702.638	-	-	-		3.351.319	268.106
-		-	-	-	-		-	-
-		8.820.016	-	-	-		4.422.071	353.766
-		-	-	-	-		-	-
-		-	-	-	-		-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	7.209	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	612.192	60.317	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)					
1	Tagihan kepada Pemerintah	7182	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	376.215	148.116	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	383.397	148.116	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

Kategori Portofolio								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-		-	-	-	-		-	-
-		-	244.785	-	-		183.589	14.687
-		-	-	15.234.600	-		15.234.600	1.218.768
-		-	-	-	-		-	-
-		-	-	-	-	-	-	-
-		15.522.654	244.785	15.234.600	-	-	23.191.579	1.855.327
-		-	-	-	-		-	-
-		162.465	-	-	-		81.233	6.499
-		-	-	-	-		-	-
-		810.518	-	-	-		434.882	34.791
-		-	-	-	-		-	-
-		-	-	97.153	-		97.153	7.772
-		-	-	-	-	-	-	-
-		972.983	-	97.153	-	-	613.268	49.062

4.1.b Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	107.356.573	687.510	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	10.000	39.218.993	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	4.282.807	6.807.709	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	100	-	12.362.709	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	40.477	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	91.795	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.238.202	1.400.166	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.957	-	-	-	
11	Aset Lainnya	21.999.215	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	135.155.748	48.114.378	12.362.709	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	272.993	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	107.872	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	7.024	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	280.017	107.872	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk)*					
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.573	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

31 Desember 2016								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	231.337	-	22.106.167	-		22.359.338	1.788.747
	-	18.059.089	-	756.000	-		17.629.343	1.410.347
	-	-	-	-	-		-	-
	-	6.137.410	-	2.421.872	-		6.852.119	548.170
	-	-	-	-	-		4.326.948	346.156
	-	-	-	6.288.101	-		6.288.101	503.048
	-	1.212.085	-	-	-		606.043	48.483
	-	-	50.553.512	-	-		37.915.134	3.033.211
	-	36.612.698	-	205.380.118	127.382		224.157.573	17.932.606
	-	-	-	443.571	2.032.280		3.491.991	279.359
	-	-	-	14.056.012	3.373.612		19.116.430	1.529.314
	-	-	-	-	-	27.977.857	23.781.179	1.902.494
	-	62.252.619	50.553.512	251.451.841	5.533.274	27.977.857	366.524.199	29.321.935
	-	-	-	-	-		-	-
	-	9.522.847	-	-	-		4.761.424	380.914
	-	2.259	-	-	-		1.130	90
	-	10.152.530	-	-	-		5.097.839	407.827
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	275.697	-	-		206.773	16.542
	-	50.522	-	16.257.331	-		16.282.592	1.302.607
	-	-	-	-	-		-	-
	-	38.340	-	46.419	-	-	65.589	5.247
	-	19.766.498	275.697	16.303.750	-	-	26.415.347	2.113.227
	-	-	-	-	-		-	-
	-	51.253	-	-	-		25.627	2.050
	-	-	-	-	-		-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
4	Tagihan kepada Bank	1.312.445	570.457	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	1.325.018	570.457	-	-	

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan kepada Pemerintah	97.815.143	147.550	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.583	17.640.708	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	8.427	7.080.045	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	126	-	13.481.370	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2.524	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	67.229	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	847.295	5.043.140	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.425	-	-	-	
11	Aset Lainnya	12.744.316	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	4.931.463	359.532	7.753.834	-	
	Total Eksposur Neraca	116.772.944	30.270.975	21.235.204	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan kepada Pemerintah	604.983	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	60.317	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

31 Desember 2016								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	826.382	-	-	-		527.282	42.183
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	208.979	-		208.979	16.718
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	877.635	-	208.979	-	-	761.888	60.951

31 Desember 2015								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-		29.510	2.361
	-	24.159.442	-	1.168.271	-		16.776.134	1.342.091
	-	-	-	-	-		-	-
	-	18.116.441	-	396.125	-		10.870.355	869.628
	-	-	-	-	-		4.718.480	377.478
	-	-	-	4.891.349	-		4.891.349	391.308
	-	1.176.298	-	-	-		588.149	47.052
	-	-	37.511.055	-	-		28.133.291	2.250.663
	-	651.627	-	203.738.316	1.117.088		206.748.390	16.539.871
	-	-	-	108.543	3.063.918		4.704.420	376.354
	-	-	-	27.414.065	411.348		28.031.087	2.242.487
	-	67.916	-	6.770.172	-	3.246.292	12.349.227	987.938
	-	44.171.724	37.511.055	244.486.841	4.592.354	3.246.292	317.840.392	25.427.231
	-	-	-	-	-		-	-
	-	6.702.638	-	-	-		3.351.319	268.106
	-	-	-	-	-		-	-
	-	8.820.016	-	-	-		4.422.071	353.766
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setela				
		0%	20%	35%	40%	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7.209	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	612.192	60.317	-	-	
1	Tagihan kepada Pemerintah					
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.182	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	376.215	148.116	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	
		383.397	148.116	-	-	

Penerapan Manajemen Risiko

31 Desember 2015								
ah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	244.785	-	-		183.589	14.687
	-	-	-	15.234.600	-		15.234.600	1.218.768
	-	-	-	-	-		-	-
	-	38.340	-	46.419	-	-	65.589	5.247
	-	15.560.994	244.785	15.281.019	-	-	23.257.168	1.860.574
	-	-	-	-	-		-	-
	-	162.465	-	-	-		81.233	6.499
	-	-	-	-	-		-	-
	-	810.518	-	-	-		434.882	34.791
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	97.153	-		97.153	7.772
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	972.983	-	97.153	-	-	613.268	49.062

4.2.a Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Secara Individu (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A EKSPOSUR NERACA							
1	Tagihan kepada Pemerintah	130.381.588	-	-	-		130.381.588
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	58.044.081	10.000	-	-		58.034.081
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-	-		134.622
4	Tagihan kepada Bank	19.648.514	5.480	-	-		19.643.034
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.362.809	100	-	-		12.362.709
6	Kredit Beragun Properti Komersial	6.328.578	40.477	-	-		6.288.101
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	1.212.085	-	-	-		1.212.085
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	50.484.027	91.795	-	-		50.392.232
9	Tagihan kepada Korporasi	245.537.390	1.238.202	-	-		244.299.188
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.477.808	1.957	-	-		2.475.851
11	Aset Lainnya	38.542.348	-	-	-		38.542.348
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	565.153.850	1.388.011	-	-	-	563.765.839
B EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF							
1	Tagihan kepada Pemerintah	272.992	-	-	-		272.992
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.522.847	-	-	-		9.522.847
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.259	-	-	-		2.259
4	Tagihan kepada Bank	10.260.403	-	-	-		10.260.403
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	275.697	-	-	-		275.697
9	Tagihan kepada Korporasi	16.277.597	7.024	-	-		16.270.573
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	36.611.795	7.024	-	-	-	36.604.771

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
C EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.573	-	-	-		12.573
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	51.254	-	-	-		51.254
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	2.709.284	1.312.446	-	-		1.396.838
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	208.979	-	-	-		208.979
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	2.982.090	1.312.446	-	-	-	1.669.644

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A EKSPOSUR NERACA							
1	Tagihan kepada Pemerintah	97.962.693	-				97.962.693
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	42.978.004	9.583				42.968.421
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-				344.413
4	Tagihan kepada Bank	25.576.728	8.427				25.568.301
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13.481.496	126				13.481.370
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.893.873	2.524				4.891.349
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	1.176.298	-				1.176.298
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	37.551.683	67.229				37.484.454
9	Tagihan kepada Korporasi	211.933.605	847.295				211.086.310
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.174.885	2.425				3.172.460
11	Aset Lainnya	40.114.344	-				40.114.344
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-			-	-
	Total Eksposur Neraca	479.188.022	937.609	-	-	-	478.250.413

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	604.983	-	-	-		604.983
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6.702.638	-	-	-		6.702.638
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	8.880.333	-	-	-		8.880.333
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	244.785	-	-	-		244.785
9	Tagihan kepada Korporasi	15.241.808	7.209	-	-		15.234.599
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	84.759	-	-	-	-	84.759
	Total Eksposur TRA	31.759.307	7.209	-	-	-	31.752.097
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.182	-	-	-		7.182
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	162.465	-	-	-		162.465
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.334.849	376.215	-	-		958.634
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	97.153	-	-	-		97.153
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	1.601.649	376.215	-	-	-	1.225.434

4.2.b Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	130.381.588	-	-	-		130.381.588
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	58.044.081	10.000	-	-		58.034.081
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-	-		134.622

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
4	Tagihan kepada Bank	19.649.798	5.480	-	-		19.644.318
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.362.809	100	-	-		12.362.709
6	Kredit Beragun Properti Komersial	6.328.578	40.477	-	-		6.288.101
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	1.212.085	-	-	-		1.212.085
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	50.645.307	91.795	-	-		50.553.512
9	Tagihan kepada Korporasi	244.758.566	1.238.202	-	-		243.520.364
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.477.808	1.957	-	-		2.475.851
11	Aset Lainnya	39.428.839	-	-	-		39.428.839
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	27.977.857	-	-	-	-	27.977.857
	Total Eksposur Neraca	593.401.938	1.388.011	-	-	-	592.013.927
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	272.992	-	-	-		272.992
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	9.522.847	-	-	-		9.522.847
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.259	-	-	-		2.259
4	Tagihan kepada Bank	10.260.402	-	-	-		10.260.402
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	275.697	-	-	-		275.697
9	Tagihan kepada Korporasi	16.314.877	7.024	-	-		16.307.853
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	84.759	-	-	-	-	84.759
	Total Eksposur TRA	36.733.833	7.024	-	-	-	36.726.809
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	12.573	-	-	-		12.573
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	51.254	-	-	-		51.254
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	2.709.284	1.312.446	-	-		1.396.838
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	208.979	-	-	-		208.979
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	2.982.090	1.312.446	-	-	-	1.669.644

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	EKSPOSUR NERACA						
1	Tagihan kepada Pemerintah	97.962.693	-	-	-		97.962.693
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	42.978.004	9.583	-	-		42.968.421
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-	-	-		344.413
4	Tagihan kepada Bank	25.601.039	8.427	-	-		25.592.612
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13.481.496	126	-	-		13.481.370
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.893.873	2.524	-	-		4.891.349
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	1.176.298	-	-	-		1.176.298
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	37.578.284	67.229	-	-		37.511.055
9	Tagihan kepada Korporasi	211.397.470	847.295	-	-		210.550.175
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.174.885	2.425	-	-		3.172.460
11	Aset Lainnya	40.569.730	-	-	-		40.569.730
12	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	23.129.209	-	-	-	-	23.129.209
	Total Eksposur Neraca	502.287.394	937.609	-	-	-	501.349.785
B	EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTIJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF						
1	Tagihan kepada Pemerintah	604.983	-	-	-		604.983
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6.702.638	-	-	-		6.702.638
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	8.880.333	-	-	-		8.880.333
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	244.785	-	-	-		244.785
9	Tagihan kepada Korporasi	15.241.808	7.209	-	-		15.234.600
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
11	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	84.759	-	-	-	-	84.759
	Total Eksposur TRA	31.759.306	7.209	-	-	-	31.752.097
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	7.182	-	-	-		7.182
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	162.465	-	-	-		162.465

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.334.849	376.215	-	-		958.634
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	97.153	-	-	-		97.153
7	Eksposur di Unit Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	1.601.649	376.215	-	-	-	1.225.434

SEKURITISASI ASET

Aktivitas sekuritisasi BNI hanya terbatas pada kepemilikan *credit linked notes*, namun demikian per 31 Desember 2016 tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT PENDEKATAN STANDAR

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar – Bank secara Individu dimuat dalam Tabel 6.1.1, Tabel 6.1.2, Tabel 6.1.3, dan Tabel 6.1.7

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar – Bank secara Konsolidasi dimuat dalam Tabel 6.2.1, Tabel 6.2.2, Tabel 6.2.3, Tabel 6.2.6 dan Tabel 6.2.7.

1. Eksposur Aset di Neraca

6.1.1 Eksposur Aset di Neraca

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	130.381.588	253.171	253.171
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	58.044.081	21.491.762	21.486.762
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	19.648.514	8.946.748	8.944.008
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.362.809	4.329.273	4.329.238
6	Kredit Beragun Properti Komersial	6.328.578	6.328.578	6.288.101
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.212.085	606.043	606.043
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	50.484.027	37.863.020	37.794.173
9	Tagihan Kepada Korporasi	245.537.390	241.854.277	240.616.075
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.477.808	3.494.927	3.491.992
11	Aset Lainnya	38.542.348	27.831.522	27.831.522
	Total	565.153.850	352.999.321	351.641.085

No	Kategori Portofolio	31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	97.962.693	29.510	29.510
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	42.978.004	16.780.925	16.776.134
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.576.728	10.862.413	10.858.200
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13.481.496	4.718.524	4.718.479
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.893.873	4.893.873	4.891.349
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.176.298	588.149	588.149
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	37.551.683	28.163.762	28.113.340
9	Tagihan Kepada Korporasi	211.933.605	208.131.823	207.284.528
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.174.885	4.708.056	4.704.419
11	Aset Lainnya	40.114.344	27.573.888	27.573.888
	Total	479.188.022	306.450.923	305.537.996

Tabel 6.2.1 Eksposur Aset di Neraca
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	130.381.588	253.171	253.171
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	58.044.081	21.491.753	21.486.753
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	134.622	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	19.649.798	8.947.391	8.944.651
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.362.809	4.326.983	4.326.948
6	Kredit Beragun Properti Komersial	6.328.578	6.328.578	6.288.102
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.212.085	606.043	606.043
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	50.645.307	37.983.980	37.915.134
9	Tagihan Kepada Korporasi	244.758.566	241.854.277	240.616.075
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2.477.808	3.494.927	3.491.992
11	Aset Lainnya	39.428.839	28.702.946	28.702.946
	Total	565.424.081	353.990.048	352.631.815

No	Kategori Portofolio	31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	97.962.693	29.510	29.510
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	42.978.004	16.780.925	16.776.134
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	344.413	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	25.601.039	10.874.568	10.870.355
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13.481.496	4.718.524	4.718.479
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.893.873	4.893.873	4.891.349
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.176.298	588.149	588.149
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	37.578.284	28.183.713	28.133.291
9	Tagihan Kepada Korporasi	211.397.470	207.595.688	206.748.393
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.174.885	4.708.056	4.704.419
11	Aset Lainnya	40.569.730	28.031.088	28.031.088
	Total	479.158.185	306.404.094	305.491.167

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

6.1.2 Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16			31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	272.992	-	-	604.983	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.522.847	4.761.423	4.761.423	6.702.638	3.351.319	3.351.319
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.259	1.130	1.130	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	10.260.403	5.097.840	5.097.840	8.880.333	4.422.071	4.422.071
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	275.697	206.772	206.772	244.785	183.589	183.589
9	Tagihan Kepada Korporasi	16.277.597	16.252.336	16.245.312	15.241.808	15.241.808	15.234.600
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	36.611.795	26.319.501	26.312.477	31.674.547	23.198.787	23.191.579

Tabel 6.2.2 Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16			31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	272.993	-	-	604.983	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.522.847	4.761.423	4.761.423	6.702.638	3.351.319	3.351.319
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	2.259	1.130	1.130	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	10.260.403	5.097.840	5.097.840	8.880.333	4.422.071	4.422.071
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	275.697	206.772	206.772	244.785	183.589	183.589
9	Tagihan Kepada Korporasi	16.314.877	16.289.616	16.282.592	15.241.808	15.241.808	15.234.600
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	36.649.076	26.356.781	26.349.757	31.674.547	23.198.787	23.191.579

2. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk)*

6.1.3 Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (***Counterparty Credit Risk***)

Bank secara Individu (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16			31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	12.573	-	-	7.182	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	51.254	25.627	25.627	162.465	81.233	81.233
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.709.284	789.826	527.337	1.334.849	510.125	434.882
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	208.979	208.979	208.979	97.153	97.153	97.153
	Total	2.982.090	1.024.432	761.943	1.601.649	688.511	613.268

6.2.3 Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (***Counterparty Credit Risk***)
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31-Des-16			31-Des-15		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	12.573	-	-	7.182	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	51.254	25.627	25.627	162.465	81.233	81.233
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.709.284	789.826	527.337	1.334.849	510.125	434.882
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	208.979	208.979	208.979	97.153	97.153	97.153
	Total	2.982.090	1.024.432	761.943	1.601.649	688.511	613.268

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

per 31 Desember 2016 tidak memiliki Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

4. Eksposur Sekuritisasi

per 31 Desember 2016 tidak memiliki eksposur sekuritisasi

5. Eksposur di Unit Usaha Syariah

6.2.6 Eksposur di Unit Usaha Syariah
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Jenis Transaksi	31-Des-16		31-Des-2015	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Total Eksposur	-	13.957.921	-	12.414.816

6. Total Pengukuran Risiko Kredit

6.1.7 Total Pengukuran Risiko Kredit
Bank secara Individu (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-16	31-Des-15
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	378.715.505	329.342.843
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

6.2.7 Total Pengukuran Risiko Kredit
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

Keterangan	31-Des-16	31-Des-15
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	393.701.434	341.710.828
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Risiko Pasar

Sebagian besar Risiko Pasar *Trading Book* bersumber dari aktivitas bisnis Tresuri baik Dalam Negeri maupun Kantor Cabang Luar Negeri, sementara Risiko Pasar *Banking Book*, khususnya *Interest Rate Risk in Banking Book* dan Posisi Devisa Neto (PDN) bersumber dari seluruh aktivitas perusahaan. Bank senantiasa memantau dan mengelola risiko pasar secara kontinyu dan ketat.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar yang efektif dan independen, aktivitas bisnis Tresuri dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *front office, middle office*, dan *back office*.

Front office sebagai unit bisnis berupaya mencapai target bisnis dengan melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan nasabah. Namun sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, *front office* juga berfungsi sebagai *first line of defense* yang akan berupaya membatasi dan mengantisipasi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar dan suku bunga sesuai limit-limit yang telah ditetapkan. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis Tresuri dibatasi dengan *Risk Appetite* dan *Risk Limit* yang diusulkan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank ke Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko. Limit transaksi Tresuri diusulkan oleh Divisi Tata Kelola Kebijakan melalui Komite Prosedur Perkreditan (KPP), sedangkan *counterparty limit* ditetapkan oleh Unit Risiko Bisnis.

Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai *second line of defense* melakukan fungsi pemantauan risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit risiko baik limit risiko pasar, limit kewenangan maupun limit *counterpart*, melakukan validasi terhadap *fixing price*, memeriksa kewajaran harga atas transaksi tresuri dan investigasi terjadinya *off market* dan me-*review* penggunaan *limit*. Selain itu, untuk melengkapi fungsi manajemen risiko pasar yang telah ada BNI juga memiliki fungsi *Middle Office* yang bertugas melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan terhadap risiko-risiko pada transaksi Tresuri.

Fungsi *back office* berada di Divisi Operasional yaitu melakukan aktivitas konfirmasi, pembukuan dan *settlement* transaksi Tresuri.

Kebijakan dan Prosedur

Dalam rangka mendukung target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki Pedoman Perusahaan untuk Bisnis Tresuri dan Internasional. Selain itu agar pengelolaan Risiko Pasar berjalan efektif, BNI berpedoman pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Pasar. Pedoman Perusahaan berisi tentang tata laksana dan metodologi serta model pengelolaan risiko pasar, yang disusun dan *direview* serta divalidasi secara periodik oleh Divisi Manajemen Risiko Bank.

Proses

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru.

BNI melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Risiko Pasar, sementara pengelolaan Risiko Pasar harian menggunakan Metode Internal (*Value at Risk*).

Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar adalah portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga dan portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri.

Eksposur risiko pasar Bank secara individu dan konsolidasi dengan perusahaan anak menggunakan metode standar dimuat dalam tabel 7.1 sebagai berikut.

7.1 Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Bank secara Individu dan Konsolidasi

(dalam juta Rupiah)

No	Jenis Risiko	31-Des-16				31-Des-15			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	13.645	170.563	18.934	236.678	20.766	259.578	30.247	378.088
	a. Risiko Spesifik	-	-	3.915	48.935	6.239	77.988	12.466	155.825
	b. Risiko Umum	13.645	170.563	15.019	187.743	14.527	181.590	17.781	222.263
2	Risiko Nilai Tukar	189.560	2.369.494	182.210	2.277.631	97.294	1.216.172	95.422	1.192.775
3	Risiko Ekuitas			12.554	156.929	-	-	15.504	193.800
4	Risiko Komoditas					-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-			-	-	-	-
	Total	203.205	2.540.057	213.698	2.671.238	118.060	1.475.750	141.173	1.764.663

Komposisi VaR per Jenis Risiko 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

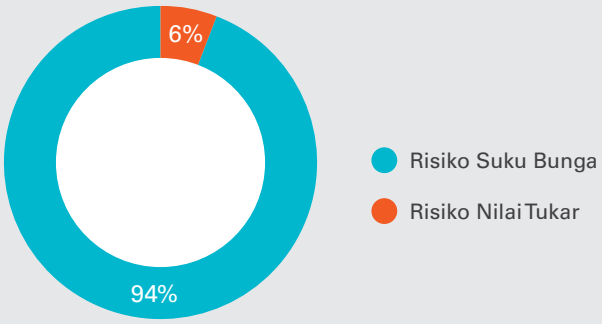

Eksposur risiko pasar *(Value at Risk)* Dalam Negeri dan Kantor Cabang Luar Negeri senantiasa dipantau secara harian dan disampaikan kepada Manajemen secara mingguan dan bulanan. Kebijakan valuasi harga yang digunakan saat ini untuk instrumen yang aktif diperdagangkan adalah *mark-to-market* sedangkan metode valuasi untuk instrumen yang kurang aktif diperdagangkan menggunakan harga wajar dari sumber yang independen.

Eksposur risiko pasar Bank secara individu dan konsolidasi dengan menggunakan model internal (*value at risk*) dimuat dalam tabel 7.2.a sebagai berikut.

Tabel 7.2 Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Internal (*Value at Risk*/VaR)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2016				31 Desember 2015			
		VaR Rata-rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
1	Risiko Suku Bunga	153.107	272.104	124.449	172.886	110.451	162.356	85.452	142.675
2	Risiko Nilai Tukar	14.112	37.803	3.209	11.450	3.970	16.993	336	11.908
3	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	167.219	309.907	127.658	184.336	114.421	179.349	85.788	154.583

Perkembangan risiko pada portofolio *banking book* secara keseluruhan dipantau ketat secara periodik sesuai metode pengukuran yang ditetapkan regulator, yaitu pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) untuk risiko nilai tukar dan gap risiko suku bunga *banking book* (*interest rate risk in banking book gap*), serta disampaikan kepada manajemen melalui Forum Komite Risiko dan Kapital Bidang Aset & *Liability*.

Beberapa informasi terkait pengukuran gap risiko suku bunga banking book (*interest rate risk in banking book gap*) antara lain :

1. Perlakuan *Non Maturity Instrument*
   Asumsi maturitas untuk kewajiban yang tergolong core deposit, seperti giro, tabungan dan deposito, dikelompokkan pada skala waktu tertentu dimana asumsi ini akan dianalisa secara berkala oleh Divisi Tresuri serta didokumentasikan dan disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko Bank untuk mendapatkan validasi.
2. Asumsi perubahan suku bunga
   Menggunakan standar asumsi perubahan suku bunga sebesar 0,25% dan 0,5% yang bersifat paralel pada seluruh skala waktu (*time band*).
3. Frekuensi Pengukuran
   Pengukuran gap risiko suku bunga *banking book* (*interest rate risk in banking book gap*) dilakukan secara bulanan.

Perangkat dan Metode

Untuk mendukung proses bisnis dan sejalan dengan pengelolaan risiko pasar, BNI telah memiliki *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari *Reuters, Bloomberg* dan sumber independen lainnya.

Beberapa limit yang telah ditetapkan untuk mengelola potensi kerugian Risiko Pasar di Divisi Tresuri maupun Kantor Cabang Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

1. *Value at Risk Limit* (VaR *Limit*), yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu.
2. *Stress Value at Risk Limit* (*Stress* VaR *Limit*), yang merupakan pengukuran risiko pasar yang disesuaikan dengan kondisi tidak normal di pasar atau maksimum potensi kerugian saat pasar tidak normal.
3. *Budget Loss Limit* yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis.
4. *Management Action Trigger* (MAT), yaitu batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugi (*early warning signal*). MAT melengkapi loss limit berupa persentase tertentu dari *loss limit*.
5. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan *rating* dan jenis mata uang surat berharga.
6. Limit *aset* dan *liability repricing gap* (*Interest Rate Risk in Banking Book*) untuk membatasi risiko suku bunga dalam *banking book*.
7. Nominal *open position limit*, yaitu batas maksimum nominal *open position* yang dapat dilakukan *dealer*.
8. *Limit* internal PDN keseluruhan (absolut), yaitu batas maksimum pengelolaan PDN.

Langkah-langkah memperkuat pengelolaan risiko pasar dalam rangka menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2016, antara lain melakukan pemantauan secara ketat pergerakan faktor pasar yang berpotensi memberikan dampak pada bank, antara lain nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Untuk mengetahui potensi dampak pada bank, telah dilakukan *Scenario Analysis* dan *Stress Testing* secara periodik dan insidentil. *Stress Testing* secara periodik menggunakan skenario yang mengacu pada ketentuan *regulator* dan skenario internal Bank. Sedangkan skenario *Stress Testing* insidentil dan *Scenario Analysis* menyesuaikan kondisi faktor makro ekonomi dan faktor pasar pada saat itu. Masing-masing Kantor Cabang Luar Negeri juga melakukan *Stress Testing* sesuai ketentuan internal dan ketentuan regulator setempat. Hasil *stress testing* tersebut digunakan untuk menyiapkan *contingency plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, serta pemenuhan giro wajib minimum yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Tata Kelola dan Organisasi

Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM), Divisi Tresuri (TRS), dan Kantor Cabang Luar Negeri. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS dan segenap Kantor Cabang Luar Negeri yang diwujudkan dalam manajemen strategi likuiditas. Divisi ERM juga melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi TRS tersebut.

Kebijakan dan Prosedur

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan kedalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa :

1. Ketersediaan Alat Likuid : Kas, Giro Wajib Minimum (GWM), *Secondary Reserve*, Indikator Peringatan Dini, *Contigency Plan* Likuiditas *Head Office* maupun Kantor Cabang Luar Negeri, dll
2. Pengukuran Risiko Likuiditas : Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio)*, *Stress testing*, dan lain-lain.
3. Pemantauan Risiko Likuiditas
4. Pengendalian Risiko Likuiditas
5. Penetapan Limit Likuiditas : limit Pagu Kas BNI Wide, limit *Secondary Reserve* Ideal (SR Ideal), limit Profil Maturitas dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana.

Proses

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve (*kas dan GWM*)*, BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*. Penetapan dan pemantauan limit, yaitu limit Pagu Kas BNI *Wide*, *limit Secondary Reserve Ideal* (SR Ideal), limit Profil Maturitas, dan pembatasan Kredit Valas berdasarkan Ketersediaan Dana dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.

Perangkat dan Metode

Dalam mengelola risiko likuiditas, BNI menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas bank di masa mendatang.

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valas Bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam tabel 9.1.a dan b, tabel 9.2.a dan b.

Tabel 9.1.a Profil Maturitas Rupiah Tahun 2016

Bank secara Individu (dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A. Aset						
	1. Kas	10.270.365	10.270.365	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	39.189.207	39.189.207	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.986.255	1.671.255	770.000	295.000	250.000	-
	4. Surat Berharga	43.252.431	835.367	4.089.392	2.769.781	5.253.167	30.304.724
	5. Kredit yang diberikan	302.902.366	42.123.228	25.537.102	31.321.945	24.291.207	179.628.884
	6. Tagihan lainnya	9.168.454	2.011.559	2.820.315	3.529.563	804.420	2.597
	7. Lain-lain	17.076.049	1.451.412	153.077	132.412	1.139	15.338.009
	Total Aset	424.845.127	97.552.393	33.369.886	38.048.701	30.599.933	225.274.214
	B. Kewajiban						
	1. Dana Pihak Ketiga	347.175.138	116.822.245	36.084.830	11.464.991	7.397.347	175.405.725
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	20.998	-	-	-	-	20.998
	3. Kewajiban pada bank lain	5.753.336	2.365.631	127.814	43.915	605.613	2.610.363
	4. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang diterima	66.078	-	-	-	-	66.078
	6. Kewajiban lainnya	2.886.795	399.480	914.686	547.826	46.803	978.000
	7. Lain-lain	9.934.029	160.471	94.175	29.921	19.306	9.630.156
	Total Kewajiban	365.836.374	119.747.827	37.221.505	12.086.653	8.069.069	188.711.320
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	59.008.753	(22.195.434)	(3.851.619)	25.962.048	22.530.864	36.562.894
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1. Komitmen	23.545.301	16.901.455	3.772.665	2.272.720	598.461	-
	2. Kontinjensi	6.861.798	6.861.798	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	30.407.099	23.763.253	3.772.665	2.272.720	598.461	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1. Komitmen	72.366.295	27.461.606	8.113.217	5.067.304	4.619.785	27.104.383
	2. Kontinjensi	28.493.108	14.352.745	1.868.842	3.526.561	2.073.177	6.671.783
	Total Kewajiban Rekening Administratif	100.859.403	41.814.351	9.982.059	8.593.865	6.692.962	33.776.166
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(70.452.304)	(18.051.098)	(6.209.394)	(6.321.145)	(6.094.501)	(33.776.166)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(11.443.551)	(40.246.532)	(10.061.013)	19.640.903	16.436.363	2.786.728
	Selisih Kumulatif		(40.246.532)	(50.307.545)	(30.666.642)	(14.230.279)	(11.443.551)

Tabel 9.1.a Profil Maturitas Rupiah Tahun 2015

Bank secara Individu (dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A. Aset						
	1. Kas	12.153.189	12.153.189	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	26.458.762	26.458.762	-	-	-	-
	3. Penempatan pada bank lain	2.485.791	2.235.791	-	250.000	-	-
	4. Surat Berharga	39.332.701	226.070	2.010.330	1.482.015	2.900.413	32.713.873
	5. Kredit yang diberikan	253.251.328	37.167.841	23.787.528	25.867.366	23.918.411	142.510.182
	6. Tagihan lainnya	2.648.010	446.267	1.491.698	507.335	202.158	552
	7. Lain-lain	14.868.918	1.193.688	50.916	50.598	2.160	13.571.556
	Total Aset	351.198.699	79.881.608	27.340.472	28.157.314	27.023.142	188.796.163

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	B. Kewajiban						
	1. Dana Pihak Ketiga	291.181.347	105.877.895	23.376.556	7.030.544	8.802.129	146.094.223
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	23.032	-	-	-	-	23.032
	3. Kewajiban pada bank lain	1.923.169	1.168.964	712.970	15.161	14.952	11.122
	4. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman yang diterima	195.906	-	-	-	-	195.906
	6. Kewajiban lainnya	2.022.053	1.234.161	651.654	135.499	739	-
	7. Lain-lain	8.770.099	178.851	64.044	19.261	24.115	8.483.828
	Total Kewajiban	304.115.606	108.459.871	24.805.224	7.200.465	8.841.935	154.808.111
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	47.083.093	(28.578.263)	2.535.248	20.956.849	18.181.209	33.988.051
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1. Komitmen	15.780.483	12.584.890	2.845.596	257.510	71.492	20.995
	2. Kontinjensi	5.442.840	5.442.840	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	21.223.323	18.027.730	2.845.596	257.510	71.492	20.995
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1. Komitmen	45.150.949	14.562.798	6.992.770	4.406.017	4.501.384	14.687.979
	2. Kontinjensi	21.302.743	7.890.290	2.088.717	5.992.639	2.285.340	3.045.758
	Total Kewajiban Rekening Administratif	66.453.692	22.453.088	9.081.487	10.398.653	6.786.724	17.733.737
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(45.230.369)	(4.425.358)	(6.235.891)	(10.141.146)	(6.715.232)	(17.712.741)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	1.852.724	(33.003.621)	(3.700.644)	10.815.703	11.465.977	16.275.309
	Selisih Kumulatif		(33.003.621)	(36.704.265)	(25.888.563)	(14.422.586)	1.852.723

Tabel 9.1.b Profil Maturitas Rupiah 2016

Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A. Aset						
	1. Kas	10.440.299	10.440.299	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	41.817.802	41.217.802	-	-	600.000	-
	3. Penempatan pada bank lain	4.456.150	2.816.161	770.000	295.000	574.989	-
	4. Surat Berharga	51.829.014	3.374.761	6.242.409	4.630.506	7.097.167	30.484.171
	5. Kredit yang diberikan	303.060.759	42.126.881	25.537.614	31.468.525	24.294.301	179.633.438
	6. Tagihan lainnya	13.790.125	2.161.559	2.920.315	3.529.563	898.765	4.279.923
	7. Lain-lain	18.816.097	2.526.927	453.077	432.412	65.672	15.338.009
	Total Aset	444.210.246	104.664.390	35.923.415	40.356.006	33.530.894	229.735.541
	B. Kewajiban						
	1. Dana Pihak Ketiga	350.467.816	117.168.787	36.133.594	11.512.744	7.502.723	178.149.968
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	20.998	-	-	-	-	20.998
	3. Kewajiban pada bank lain	6.174.187	2.745.191	127.814	43.915	605.613	2.651.654
	4. Surat Berharga yang diterbitkan	496.000	-	-	-	-	496.000
	5. Pinjaman yang diterima	166.078	-	-	-	-	166.078
	6. Kewajiban lainnya	2.891.650	404.335	914.686	547.826	46.803	978.000
	7. Lain-lain	18.065.897	5.160.471	1.094.175	1.029.921	1.151.174	9.630.156
	Total Kewajiban	378.282.626	125.478.784	38.270.269	13.134.406	9.306.313	192.092.854
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	65.927.620	(20.814.394)	(2.346.854)	27.221.600	24.224.581	37.642.687
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1. Komitmen	23.545.301	16.901.455	3.772.665	2.272.720	598.461	-
	2. Kontinjensi	6.946.239	6.946.239	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	30.491.540	23.847.694	3.772.665	2.272.720	598.461	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1. Komitmen	73.334.953	28.430.265	8.113.217	5.067.304	4.619.785	27.104.382
	2. Kontinjensi	28.565.634	14.425.271	1.868.842	3.526.561	2.073.177	6.671.783
	Total Kewajiban Rekening Administratif	101.900.587	42.855.536	9.982.059	8.593.865	6.692.962	33.776.165
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(71.409.047)	(19.007.842)	(6.209.394)	(6.321.145)	(6.094.501)	(33.776.165)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(5.481.427)	(39.822.236)	(8.556.248)	20.900.455	18.130.080	3.866.522
	Selisih Kumulatif		(39.822.236)	(48.378.484)	(27.478.029)	(9.347.949)	(5.481.427)

Tabel 9.1.b Profil Maturitas Rupiah 2015
Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A Aset						
	1 Kas	12.298.324	12.298.324	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	29.019.670	29.019.670	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	2.613.913	2.353.913	10.000	250.000	-	-
	4 Surat Berharga	41.028.742	226.070	2.135.490	1.837.015	2.950.414	33.879.753
	5 Kredit yang diberikan	253.277.928	37.167.841	23.787.528	25.867.366	23.918.411	142.536.782
	6 Tagihan lainnya	2.648.009	446.267	1.491.697	507.335	202.158	552
	7 Lain-lain	15.529.357	1.555.009	50.916	50.598	2.160	13.870.674
	Total Aset	356.415.943	83.067.094	27.475.631	28.512.314	27.073.143	190.287.761
	B Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	293.863.403	108.559.951	23.376.556	7.030.544	8.802.129	146.094.223
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	23.032	-	-	-	-	23.032
	3 Kewajiban pada bank lain	2.296.745	1.542.540	712.970	15.161	14.951	11.122

No.	Kategori Portofolio		31 Desember 2015					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	4	Surat Berharga yang diterbitkan	496.000	-	-	-	-	496.000
	5	Pinjaman yang diterima	245.906	50.000	-	-	-	195.906
	6	Kewajiban lainnya	2.022.053	1.234.161	651.654	135.499	739	-
	7	Lain-lain	9.518.900	178.851	64.044	19.261	24.115	9.232.629
	Total Kewajiban		308.466.038	111.565.503	24.805.224	7.200.466	8.841.934	156.052.912
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		47.949.905	(28.498.409)	2.670.407	21.311.849	18.231.209	34.234.849
II	REKENING ADMINISTRATIF							
	A	Tagihan Rekening Administratif						
	1	Komitmen	15.780.483	12.584.890	2.845.596	257.510	71.492	20.995
	2	Kontinjensi	5.502.223	5.502.223	-	-	-	
	Total Tagihan Rekening Administratif		21.282.706	18.087.113	2.845.596	257.510	71.492	20.995
	B	Kewajiban Rekening Administratif						
	1	Komitmen	46.186.772	14.562.798	6.992.770	4.406.017	4.501.384	15.723.802
	2	Kontinjensi	21.387.502	7.890.290	2.088.717	5.992.639	2.285.340	3.130.516
	Total Kewajiban Rekening Administratif		67.574.274	22.453.088	9.081.487	10.398.656	6.786.724	18.854.319
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(46.291.568)	(4.365.975)	(6.235.891)	(10.141.146)	(6.715.232)	(18.833.324)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]		1.658.337	(32.864.384)	(3.565.484)	102.566.790	(11.170.703)	15.401.525
	Selisih Kumulatif			(32.864.384)	(36.429.868)	(25.259.165)	(13.743.188)	1.658.337

Tabel 9.2.a Profil Maturitas Valas Tahun 2016
Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
A	Aset						
1	Kas	721.581	721.581	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	15.321.937	15.321.937	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	8.005.592	7.984.898	20.694	-	-	-
4	Surat Berharga	33.480.664	1.630.415	3.672.630	3.601.415	370.952	24.205.252
5	Kredit yang diberikan	53.597.137	6.741.545	4.513.678	2.572.318	2.186.546	37.583.050
6	Tagihan lainnya	7.211.043	1.927.147	2.736.952	1.632.746	914.198	-
7	Lain-lain	61.425	61.425				
Total Aset		118.399.379	34.388.948	10.943.954	7.806.479	3.471.696	61.788.302
B	Kewajiban						
1	Dana Pihak Ketiga	64.972.431	30.248.592	5.835.802	1.789.350	519.661	26.579.026
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	675.096	3.314	-	-	-	671.782
3	Kewajiban pada bank lain	4.123.554	2.893.758	1.006.881	221.568	1.347	-
4	Surat Berharga yang diterbitkan	6.731.115	-	-	6.731.115	-	-
5	Pinjaman yang diterima	32.103.250	1.347.250	269.450	3.130.295	943.075	26.413.180
6	Kewajiban lainnya	5.642.718	910.795	998.110	2.085.220	253.687	1.394.906
7	Lain-lain	1.211.585	279.500	74.153	-	3.920	854.011
Total Kewajiban		115.459.749	35.683.209	8.184.396	13.957.548	1.721.690	55.912.905
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		2.939.630	(1.294.261)	2.759.558	(6.151.069)	1.750.006	5.875.397
II	REKENING ADMINISTRATIF						
A	Tagihan Rekening Administratif						
1	Komitmen	33.849.905	29.402.080	3.720.875	507.347	219.602	-
2	Kontinjensi	16.368.613	16.368.613	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		50.218.518	45.770.693	3.720.875	507.347	219.602	-
B	Kewajiban Rekening Administratif						
1	Komitmen	48,792,782	31,549,529	9.414.327	4.708.342	2.300.807	819.777
2	Kontinjensi	25.729.608	2.357.593	1.619.219	2.463.002	7.505.139	11.784.655

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	Total Kewajiban Rekening Administratif	73.915.907	33.300.638	11.033.546	7.171.344	9.805.946	12.604.432
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(23.697.389)	12.470.055	(7.312.671)	(6.663.997)	(9.586.344)	(12.604.432)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(20.757.759)	11.175.794	(4.553.113)	(12.815.066)	(7.836.338)	(6.729.035)
	Selisih Kumulatif		11.175.794	6.622.681	(6.192.385)	(14.028.723)	(20.757.758)

Tabel 9.2.a Profil Maturitas Valas Tahun 2015

Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A Aset						
	1 Kas	590.321	590.321	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	27.135.773	26.446.523	689.250	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	12.299.432	11.425.477	742.998	68.925	62.032	-
	4 Surat Berharga	11.978.291	235.903	1.130.756	174.477	110.363	10.326.792
	5 Kredit yang diberikan	43.378.568	6.749.936	4.973.449	2.845.059	3.154.573	25.655.551
	6 Tagihan lainnya	9.068.708	2.472.930	1.915.564	3.108.614	1.571.600	-
	7 Lain-lain	33.662	33.662	-	-	-	-
	Total Aset	104.484.755	47.954.752	9.452.017	6.197.074	4.898.568	35.982.343
	B Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	60.100.311	20.927.215	8.052.273	2.522.862	424.895	28.173.065
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	441.965	441.965	-	-	-	-
	3 Kewajiban pada bank lain	2.406.210	1.826.647	579.563	-	-	-
	4 Surat Berharga yang diterbitkan	6.870.667	-	-	-	-	6.870.667
	5 Pinjaman yang diterima	21.812.678	98.287	746.361	293.869	3.590.345	17.083.816
	6 Kewajiban lainnya	8.490.904	1.523.835	1.432.372	1.805.725	911.230	2.817.742
	7 Lain-lain	1.027.798	9.967	19.988	-	1.061	996.782
	Total Kewajiban	101.150.533	24.827.916	10.830.557	4.622.456	4.927.531	55.942.073

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	3.334.222	23.126.836	(1.378.540)	1.574.619	(28.963)	(19.959.730)
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	11.370.467	8.375.918	2.404.779	167.488	71.792	350.490
	2 Kontinjensi	14.883.372	14.883.372	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	26.253.839	23.259.290	2.404.779	167.488	71.792	350.490
	B Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	28.754.162	15.380.145	5.448.742	4.532.742	1.585.523	1.807.010
	2 Kontinjensi	24.336.986	2.229.999	1.531.569	2.329.693	7.098.930	11.146.795
	Total Kewajiban Rekening Administratif	53.091.148	17.610.144	6.980.311	6.862.435	8.684.453	12.953.805
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(26.837.309)	5.649.146	(4.575.532)	(6.694.947)	(8.612.661)	(12.603.315)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(23.503.087)	28.775.982	(5.954.072)	(5.120.328)	(8.641.624)	(32.563.045)
	Selisih Kumulatif		28.775.982	22.821.910	17.701.582	9.059.958	(23.503.087)

Tabel 9.2.b Profil Maturitas Valas 2016
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA						
	A Aset						
	1 Kas	727.344	727.344	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	15.753.138	15.753.138	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	8.081.698	7.984.908	96.789	-	-	-
	4 Surat Berharga	33.662.131	1.630.415	3.672.630	3.601.415	370.952	24.386.719
	5 Kredit yang diberikan	53.597.137	6.741.545	4.513.678	2.572.318	2.186.546	37.583.050
	6 Tagihan lainnya	7.211.043	1.927.147	2.736.952	1.632.746	914.198	-
	7 Lain-lain	60.681	60.681				
	Total Aset	119.093.172	34.825.178	11.020.049	7.806.479	3.471.696	61.969.769
	B Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	64.985.270	30.261.431	5.835.802	1.789.350	519.661	26.579.026
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	675.096	3.314	-	-	-	671.782
	3 Kewajiban pada bank lain	4.049.922	2.820.126	1.006.881	221.568	1.347	-
	4 Surat Berharga yang diterbitkan	6.731.115	-	-	6.731.115	-	-
	5 Pinjaman yang diterima	32.103.250	1.347.250	269.450	3.130.295	943.075	26.413.180
	6 Kewajiban lainnya	5.642.718	910.795	998.110	2.085.220	253.687	1.394.906
	7 Lain-lain	1.216.056	283.971	74.153	-	3.920	854.011
	Total Kewajiban	115.403.427	35.626.887	8.184.396	13.957.548	1.721.690	55.912.905
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	3.689.745	(801.709)	2.835.653	(6.151.069)	1.750.006	6.056.864
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	33.849.905	29.402.080	3.720.875	507.347	219.602	-
	2 Kontinjensi	16.368.613	16.368.613	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	50.218.518	45.770.693	3.720.875	507.347	219.602	-
	B Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	48.186.298	30.943.045	9.414.327	4.708.342	2.300.807	819.777
	2 Kontinjensi	25.729.608	2.357.593	1.619.219	2.463.002	7.505.139	11.784.655
	Total Kewajiban Rekening Administratif	73.915.906	33.300.638	11.033.546	7.171.344	9.805.946	12.604.432

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2016					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(23.697.388)	12.470.055	(7.312.671)	(6.663.997)	(9.586.344)	(12.604.432)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(20.007.643)	11.668.346	(4.477.018)	(12.815.066)	(7.836.338)	(6.547.568)
	Selisih Kumulatif		11.668.346	7.191.328	(5.623.738)	(13.460.076)	(20.007.644)

Tabel 9.2.b Profil Maturitas Valas 2015
Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio		31 Desember 2015					
			Saldo	Jatuh Tempo				
				≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
I	NERACA							
	A	Aset						
	1	Kas	591.958	591.958	-	-	-	-
	2	Penempatan pada Bank Indonesia	27.158.601	26.469.351	689.250	-	-	-
	3	Penempatan pada bank lain	12.331.752	11.428.164	742.998	68.925	62.032	29.633
	4	Surat Berharga	12.218.556	235.903	1.130.756	174.477	110.363	10.567.057
	5	Kredit yang diberikan	43.378.568	6.749.936	4.973.449	2.845.059	3.154.573	25.655.551
	6	Tagihan lainnya	9.068.707	2.472.930	1.915.564	3.108.613	1.571.600	-
	7	Lain-lain	32.786	32.786	-	-	-	-
	Total Aset		104.780.928	47.981.028	9.452.016	6.197.074	4.898.569	36.252.241
	B	Kewajiban						
	1	Dana Pihak Ketiga	60.171.331	20.927.215	8.052.273	2.522.862	424.895	28.244.086
	2	Kewajiban pada Bank Indonesia	441.965	441.965	-	-	-	-
	3	Kewajiban pada bank lain	2.400.797	1.821.234	579.563	-	-	-
	4	Surat Berharga yang diterbitkan	6.870.667	-	-	-	-	6.870.667
	5	Pinjaman yang diterima	21.812.678	98.287	746.361	293.869	3.590.345	17.083.816
	6	Kewajiban lainnya	8.490.904	1.523.835	1.432.372	1.805.725	911.230	2.817.742
	7	Lain-lain	1.027.797	9.966	19.988	-	1.061	996.782
	Total Kewajiban		101.216.139	24.822.502	10.830.556	4.622.455	4.927.531	56.013.093
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		3.564.789	23.158.526	(1.378.540)	1.574.619	(28.963)	(19.760.852)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2015					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bln s.d. 3 bln	>3 bln s.d. 6 bln	>6 bln s.d. 12 bln	>12 bulan
II	REKENING ADMINISTRATIF						
	A Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	11.370.467	8.375.918	2.404.779	167.488	71.792	350.490
	2 Kontinjensi	14.883.372	14.883.372	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	26.253.839	23.259.290	2.404.779	167.488	71.792	350.490
	B Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	28.754.162	15.380.145	5.448.742	4.532.742	1.585.523	1.807.010
	2 Kontinjensi	24.336.986	2.229.999	1.531.569	2.329.693	7.098.930	11.146.795
	Total Kewajiban Rekening Administratif	53.091.148	17.610.144	6.980.311	6.862.453	8.684.453	12.953.805
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(26.837.309)	5.649.146	(4.575.532)	(6.694.947)	(8.612.661)	(12.603.315)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	(23.272.520)	28.807.672	(5.954.072)	(5.120.329)	(8.641.624)	(32.364.167)
	Selisih Kumulatif		28.807.672	22.853.600	17.733.271	9.091.647	(23.272.520)

Perhitungan profil maturitas tersebut sesuai dengan ketentuan *regulator* dan tidak termasuk profil maturitas perusahaan anak yang bergerak dalam bidang asuransi.

Salah satu kekuatan dari proses pemantauan risiko BNI adalah ketersediaan informasi profil likuiditas Bank. Informasi tersebut tersedia di aplikasi *Executive Information Management* (EIS) LDAP, yang dapat menyajikan informasi perkembangan dana maupun pinjaman secara harian sehingga dapat pula dihasilkan profil arus kas harian dan profil maturitas bulanan yang dapat digunakan sebagai salah satu sistem pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas bank.

Indikator Peringatan Dini
Indikator peringatan dini dijabarkan dalam indikator-indikator *Secondary Reserve* pada kondisi normal, kondisi moderat atau kondisi ketat (*tight)* baik untuk Rupiah maupun valuta asing, antara lain tren tingkat suku bunga BI Rate atau BI *7 Days Reverse Repo Rate*, JIBOR, SIBOR, LIBOR, suku bunga rata-rata Deposito Bank Pesaing ataupun *spread Credit Default Swap* (CDS) yang naik signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren cadangan devisa yang turun signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren dana nasabah dominan yang cenderung menurun secara signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, dan lain-lain.

Penetapan SR Ideal dalam kondisi *moderate* atau *tight* dapat dipertimbangkan apabila salah satu kondisi/ indikator atau parameter terjadi. Penetapan dilakukan oleh Divisi ERM dengan berpedoman pada indikator-indikator di atas dan data-data yang diperoleh dari Divisi TRS selaku unit bisnis. Selanjutnya penetapan tersebut akan memberlakukan *Liquidity Contigency Plan* (LCP) SR Ideal yang *moderate* atau *tight*. Indikator-indikator di atas dapat direview secara periodik sesuai perkembangan kondisi eksternal maupun internal sejalan dengan perkembangan ekonomi baik nasional, regional, maupun global.

***Stress Testing* Likuiditas**
Untuk mengetahui ketahanan likuiditas di periode krisis, telah dilakukan *stress testing* likuiditas secara periodik. Skenario s*tress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario spesifik pada bank dan skenario stres pada pasar. Skenario spesifik pada bank menggunakan asumsi bank berada dalam kesulitan likuiditas akibat hilangnya kepercayaan investor/ deposan pada bank. Sedangkan skenario stres pada pasar menggunakan asumsi terjadi gangguan pada pasar/ sistem keuangan secara keseluruhan yang berakibat pada terganggunya operasional bank.

Hasil *stress testing* dari skenario tersebut akan digunakan untuk *liquidity funding plan* agar risiko yang terjadi tetap dapat dibatasi dan dikelola dengan baik.

Rasio Kecukupan Likuiditas
Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, bank melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dengan cara memelihara *High Quality Liquid Aset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama periode 30 hari ke depan dalam skenario stress, sedemikian rupa sehingga bank dapat mempertahankan rasio kecukupan likuiditas tersebut selalu di atas 100%, baik secara Individu (*bank only*) maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak,dengan nilai LCR BNI secara Individu per Desember 2016 sebesar 251%.

Risiko Operasional

Dengan meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk serta aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi pendukung yang sangat cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah akan pelayanan yang diberikan oleh bank, maka pengelolaan risiko operasional menjadi hal yang sangat penting.

Tata Kelola dan Organisasi
Tata kelola manajemen risiko operasional telah diimplementasikan BNI dimana segenap unit bisnis dan unit pendukung baik di dalam maupun di luar negeri, berperan sebagai *Risk Owner* atau *Risk Taker* yang merupakan *first line of defense*. Implementasi

tersebut didukung dengan *second line of defense* yang dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Kepatuhan, serta Divisi Tata Kelola Kebijakan sebagai *Risk Control Unit* dan *third line of defense* yaitu Satuan Pengawasan Internal sebagai *Risk Assurance Unit*.

Kebijakan dan Prosedur

Divisi Manajemen Risiko Bank telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung implementasi manajemen risiko operasional pada segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional Dalam Negeri
- *Operational Risk Management Policy for Overseas Branches*

Kebijakan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Prosedur atau *Standard Operating Procedure* dan Petunjuk Teknis transaksi dan operasional yang *prudent* untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari seperti:

- Prosedur Manajemen Risiko Operasional Dalam Negeri
- *Operational Risk Management Procedure for Overseas Branches*
- *Operational Risk Self Assessment Manual for Overseas Branches*
- Prosedur Pelaksanaan *Self Assessment* (SA) Risiko Operasional
- Prosedur Pelaksanaan *Loss Event Database* (LED)
- Prosedur Pelaksanaan *Key Risk Indicators* (KRI)
- Panduan Penggunaan Perangkat Risiko Operasional (PERISKOP)
- Pedoman Pelaksanaan Pembukuan Rekening Beban Risiko Operasional (BRO)

Proses

Manajemen risiko operasional BNI terdiri dari 5 (lima) proses utama yang berkesinambungan yaitu identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

1. Identifikasi Risiko
   Mekanisme identifikasi risiko operasional dilakukan dengan menerapkan *Macro Process Mapping Assessment* atas proses kerja/ aktivitas masing-masing unit untuk menangkap potensi risiko operasional yang dilakukan dengan metode interview (*one on one meeting*).
2. Penilaian Risiko
   Dilakukan oleh masing-masing unit pemilik risiko melalui metode *operational risk self assessment,* mencakup penilaian atas dampak, frekuensi dan penyebab risiko serta solusinya.
3. Pengukuran Risiko
   Sesuai dengan aturan Regulator, pengukuran risiko operasional saat ini menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar *(Basic Indicator Approach).*
   Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam tabel 8.1.a dan b.

Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional Bank secara Individu

(dalam juta Rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	31-Des-16			31-Des-15		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	28.852.276	4.327.841	54.098.017	25.464.562	3.819.684	47.746.053
	Total	28.852.276	4.327.841	54.098.017	25.464.562	3.819.684	47.746.053

Tabel 8.1.b Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak (dalam juta Rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	31-Des-16			31-Des-15		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Dasar	30.242.824	4.536.424	56.705.293	26.530.942	3.979.641	49.745.517
	Total	30.242.824	4.536.424	56.705.293	26.530.942	3.979.641	49.745.517

4. Pemantauan Risiko
   Dilakukan oleh seluruh unit sebagai *first line of defense* terhadap risiko utama pada saat aktivitas sedang berlangsung.
   Sedangkan Divisi Manajemen Risiko Bank melakukan evaluasi dan laporan/ *feedback* atas penilaian risiko berdasarkan hasil *self assessment* serta realisasi atas kerugian risiko operasional yang terjadi, meliputi:
   - *Feedback report* untuk seluruh divisi/ satuan/ unit/ wilayah/ cabang
   - Laporan bulanan Pemantauan Beban Risiko Operasional kepada Direksi
   - Laporan Profil Risiko Operasional
5. Pengendalian Risiko
   Mekanisme mitigasi risiko operasional tergambar pada proses pengendalian internal dengan menerapkan 4 (empat) strategi mitigasi, yaitu hindari, kurangi, transfer dan terima. Keempat strategi mitigasi tersebut tertuang dalam prosedur mitigasi Risiko Operasional yang meliputi prosedur pengendalian, prosedur penyelesaian transaksi, prosedur akuntansi, prosedur penyimpanan aset dan kustodian, prosedur penyediaan produk dan prosedur pencegahan *fraud*.

Perangkat dan Metode
Untuk membantu proses pengelolaan risiko operasional yang dilakukan oleh setiap unit kerja, Bank telah mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional (*Operational Risk Management tool*) berbasis web (*web-based*) yang diberi nama PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mensosialisasikan Budaya Risiko serta meningkatkan Kesadaran Risiko karena terdapat 3 (tiga) proses utama dalam pengelolaan risiko operasional yang menggunakan perangkat ini yaitu *Self Assessment*, *Loss Event Database* dan *Key Risk Indicator*.

PERISKOP	
Modul *Self Assessment*	*Self Assessment* (SA) merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara independen oleh setiap unit (*risk owner*) dalam rangka mengidentifikasi potensi risiko operasional yang terdapat di unitnya, mencari penyebabnya, mengukur potensi kerugian (dampak dan frekuensi) yang mungkin timbul serta mencarikan solusi untuk mengatasinya. Hasil SA memberikan gambaran potensi risiko yang dihadapi unit untuk 3 (bulan) ke depan yang didasarkan pada data historis 3 (bulan) sebelumnya serta *inherent risk* (risiko yang melekat).
Modul *Loss Event Database*	Merupakan *database* atas seluruh kerugian finansial yang meliputi *actual loss* dan *near miss* sejak *event* terjadi hingga penyelesaiannya akibat risiko operasional yang terjadi di seluruh unit di Bank. Data kerugian yang terkumpul melalui modul LED, selain digunakan untuk pengelolaan risiko operasional yang lebih baik serta mencegah terjadinya kasus serupa juga sebagai dasar pada perhitungan ATMR risiko operasional dalam rangka menghitung kebutuhan modal untuk meng-*cover* risiko operasional dengan menggunakan metode *Advance Measurement Approach* (AMA).
Modul *Key Risk Indicator*	*Key Risk Indicators* merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas secara dini dan memberikan tanda (*early warning signal*) jika melebihi suatu *threshold* tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memonitor eksposur risiko operasional dan efektivitas kontrol Bank.

Business Continuity Management

Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritikal sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis dan layanan BNI.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan Usaha/ *Business Continuity Management* (BCM) di segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.

Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Regulator yang mewajibkan bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel II yang mewajibkan Bank untuk memiliki pengelolaan keberlangsungan usaha dan rencana darurat (*business continuity management* dan *contingency plan*) guna memastikan kemampuan Bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas bisnisnya. Selain peraturan Regulator dan Basel II, untuk Kantor Cabang Luar Negeri, BCM diimplementasikan dengan memenuhi regulasi BCM di negara setempat.

1. Tata Kelola dan Organisasi
   Dalam kondisi bencana (*disaster*), BNI telah menyiapkan organisasi spesifik berupa *Crisis Management Team (CMT)* dan *Emergency Task Force (ETF)* yang terdiri dari Eksekutif Senior/ Pimpinan Tertinggi Unit sebagai koordinator yang memiliki level kewenangan tertinggi. CMT akan aktif apabila *Executive Management Team (EMT)* selaku pimpinan tertinggi dari CMT menyatakan deklarasi kondisi status bencana.

   BNI telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Dual Data Center* (DDC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center* yang secara rutin dikelola kesiapannya.

2. Kebijakan dan Prosedur
   Terkait dengan implementasi *Business Continuity Management* (BCM), BNI telah menetapkan:
   a. Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) Dalam Negeri.
   b. Prosedur *Business Continuity Management* (BCM) Dalam Negeri.
   c. *Business Continuity Management* (BCM) *Policy for Overseas Branches.*
   d. *Business Continuity Management* (BCM) *Procedure for Overseas Branches.*
   e. *Governance* Gedung *Business Continuity Management* (BCM)
   f. Prosedur Penggunaan Gedung *Business Continuity Management* (BCM).
3. Proses
   Setiap langkah *Recovery Strategy* dan *Restoration Strategy* yang dilaksanakan dipantau dan dilaporkan kepada *Crisis Management Team* (CMT) sampai kondisi dinyatakan normal kembali.

   Untuk memastikan tingkat kesiapan dan evaluasi *Business Continuity Management* (BCM), BNI melakukan pengujian sistem pada divisi/ unit kritikal setiap 3 bulan sekali, melakukan *site visit* dan simulasi penanganan bencana atas implementasi BCM di seluruh unit operasional yang dilakukan secara rutin tiap tahun untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing unit, ditinjau dari segi organisasi maupun infrastruktur BCM yang dimilikinya.

   Hasil evaluasi dan pengujian rutin tersebut terlihat dari penanganan yang sistematis dan terarah dalam menghadapi bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam, maupun oleh sistem sehingga aktivitas operasional BNI di lokasi bencana dapat tetap berjalan pada tingkatan tertentu walaupun beberapa sarana dan prasarana penunjang aktivitas bisnis mengalami gangguan.

Risiko Hukum

Tata Kelola dan Organisasi

Manajemen risiko hukum dilakukan oleh Divisi Hukum di bawah pengawasan aktif Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan risiko, Divisi Hukum bekerja sama dengan Unit

Pengelolaan Hukum atau staf yang menangani fungsi hukum yang terdapat pada Divisi/ Satuan/ Unit/ Kantor Wilayah atau unit organisasi lainnya dimana Satuan Kerja Bidang Hukum dimaksud berfungsi sebagai *'legal watch'*, yang menyediakan analisis/ advis hukum kepada unit organisasi dan/ atau pegawai pada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Dalam pengelolaan risiko hukum, Divisi Hukum bekerjasama dengan Divisi Manajemen Risiko Bank dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi Manajemen Risiko Hukum secara berkala.

Kebijakan dan Prosedur
Implementasi manajemen risiko hukum mengacu pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Hukum serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum.

Guna menghasilkan kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang tepat, Divisi Hukum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses
Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Hukum, BNI menerapkan kebijakan manajemen risiko dalam sebuah alur proses yang terdiri dari :

1. Melakukan identifikasi Risiko Hukum secara berkala dan berkesinambungan. Identifikasi dilakukan dengan melakukan analisa terhadap seluruh sumber Risiko Hukum.
2. Melaksanakan pengukuran Risiko Hukum yang dilakukan berdasarkan perhitungan indikator/ parameter dalam identifikasi Risiko Hukum dibandingkan dengan modal Bank.
3. Melakukan pemantauan Risiko Hukum dengan mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan bank.
4. Proses pengendalian Risiko Hukum digunakan terutama terhadap kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan :
   a. Melakukan penilaian/ *assessment* berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk baru atau aktivitas baru atau terdapat penambahan/ perubahan fitur atas produk Bank.
   b. Memberikan *advis* hukum dan/ atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.
   c. Melakukan *review* berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
   d. Melakukan *review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan Bank.
   e. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Bank sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.

Hasil pemantauan risiko hukum disusun dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum (SIM Risiko Hukum) yang menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

Risiko Stratejik

Tata Kelola dan Organisasi
Manajemen Risiko Stratejik dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis, di bawah pengawasan aktif Direktur Perencanaan dan Operasional.

Pengelolaan Risiko Stratejik dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan strategis berupa *planning and budgeting* yang mencakup penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit serta *cascading* target *bankwide* menjadi target unit yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan strategis meliputi:
1. *Corporate Plan*, disusun 5 (lima) tahun sekali
2. Kebijakan Umum Direksi (KUD), disusun 1 (satu) tahun sekali
3. Rencana Bisnis Bank (RBB), disusun 1 (satu) tahun sekali
4. *Business Plan,* disusun 1 (satu) tahun sekali

Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan strategis diawali dengan menyusun *Corporate Plan* sebagai acuan penetapan target dan strategi Kebijakan Umum Direksi yang akan dijadikan panduan dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank. Selanjutnya, Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank akan menjadi acuan penyusunan *Operational Planning* yang dituangkan dalam *Business Plan* Divisi, Wilayah dan Cabang/ Sentra. *Business Plan* Wilayah akan menjadi acuan dalam penyusunan *Business Plan* Cabang/ Sentra. Melalui mekanisme tersebut, dapat dipastikan bahwa proses *alignment* strategi tetap terjaga mulai dari level *corporate* sampai unit terendah (cabang).

Kebijakan dan Prosedur
Implementasi manajemen risiko stratejik mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Stratejik serta Kebijakan dan Prosedur antara lain Prosedur Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru.

Proses
Proses manajemen risiko stratejik yang efektif dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal.
Dokumen *Corporate Plan* wajib di-*review* setiap tahun untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Dokumen Kebijakan Umum Direksi dan Rencana Bisnis Bank, *Business Plan* Unit di-*review* pada Semester I, bahkan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek jika terjadi perubahan lingkungan yang signifikan.

Mekanisme untuk mengukur pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis dengan ketentuan sebagai bertikut:
1. Pemantauan kinerja dan strategi perusahaan (*bankwide*) dilakukan secara bulanan
2. Pemantauan kinerja Divisi dilakukan secara triwulanan

Pemantauan pencapaian kinerja perusahaan dan seluruh unit dilakukan secara semesteran dalam forum *Business Meeting* di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.

Risiko Kepatuhan

Tata Kelola dan Organisasi
Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan (KPN), yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan.

Kebijakan dan Prosedur
Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya antara lain Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Anti Fraud, dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Proses
Dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bisnis BNI yang sehat dan berkelanjutan, Divisi Kepatuhan membantu Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan melakukan proses manajemen risiko kepatuhan antara lain :
1. Pengelolaan Risiko Kepatuhan, meliputi:
   a. Pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya.
   b. Pemantauan terhadap pengenaan sanksi/ denda dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas lainnya dan bekerjasama dengan satuan kerja terkait untuk melakukan perbaikan.
   c. Pemantauan terhadap prinsip *prudential banking* (*Capital Adequacy* Ratio (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Netto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Non Performing Loan* (NPL), Penilaian Kualitas Aktiva (PKA)).
2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem

dan prosedur serta pelaksanaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:

a. Proses sertifikasi, pemberian pendapat dan analisis kepatuhan
   i. Melakukan sertifikasi terhadap rancangan kebijakan dan prosedur baru maupun eksisting.
   ii. Memberikan pendapat kepatuhan
   iii. Melakukan kajian produk/ aktivitas baru
   iv. Melakukan analisis dampak peraturan eksternal
   v. Melakukan review terhadap kecukupan kebijakan
   vi. Melakukan uji kepatuhan atas keputusan Rapat Direksi (Radisi)
b. Review *Ex-Ante* (Preventif)
   Melakukan *compliance review* secara preventif terhadap proses kredit dan *procurement* sesuai kewenangan dan kriteria yang berlaku, yaitu:
   i. *Credit Compliance Review* (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)
   ii. *Procurement Compliance Review* (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/ atau Jasa
   iii. *Outlet Check List Review* (OCR) atas usulan Pembukaan/ Relokasi Outlet.

3. Memantau dan Menjaga Kepatuhan Bank terhadap Komitmen Kepada Regulator/ Otoritas Pengawas.
   Pemantauan terhadap komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPK dan otoritas pengawas lainnya dilakukan bersama Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian temuan.

   Upaya penyelesaian temuan audit eksternal tersebut dilakukan melalui:
   a. Meminta kepada unit pantauan untuk menyelesaikan temuan audit eksternal dan memantau realisasinya;
   b. Melakukan koordinasi dengan SPI terkait hasil penyelesaian tindak lanjut audit *regulator*.

Risiko Reputasi

Tata Kelola dan Organisasi

Manajemen risiko reputasi dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan yang berada di bawah pengawasan aktif Wakil Direktur Utama.

Pemantauan terhadap pemberitaan *(news management)* dan pengelolaan krisis komunikasi serta monitoring opini/ komentar *news* media atau *social* media dilakukan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan. Sedangkan pengelolaan komplain/ keluhan nasabah dilakukan bekerjasama dengan Unit Pusat Layanan Pelanggan.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi manajemen risiko reputasi mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Reputasi serta Kebijakan dan Prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses manajemen risiko reputasi dilakukan, antara lain melalui:

1. Evaluasi secara harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan atas risiko reputasi yang dihadapi BNI, dan dituangkan dalam Laporan Media *Monitoring*.
2. Mengklasifikasikan media massa dalam beberapa kelompok sesuai dengan sirkulasi dan cakupan geografis. Masing-masing kelompok media ditangani secara berbeda sesuai dengan dampak risiko reputasi yang ditimbulkannya.
3. Standardisasi kompetensi staf kehumasan/ hubungan media di Divisi Komunikasi Perusahaan, kantor wilayah/ regional agar memiliki kemampuan dan kepekaan dalam merespon isu dan opini yang berkembang.
4. *Monitoring* dan evaluasi terhadap komentar, keluhan, dan masukan yang berkembang di *news media* atau *social media*, serta pemilihan strategi untuk merespon opini yang berkembang di *social media*.
5. Menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai standar kecepatan melakukan respon atas komplain nasabah.
6. Pengukuran dan pemantauan jumlah komplain dan tingkat penyelesaian komplain.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis dilakukan melalui penetapan standar *Crisis Contingency Plan* yang diimplementasikan ketika terjadi krisis dari skala ringan hingga skala berat. *Crisis Contingency Plan* tersebut, terdiri dari:

1. Review masalah atau kronologis
2. Alur informasi
3. Penentuan *personal in charge*
4. Penetapan kewenangan dan juru bicara
5. Jadwal aktivitas penanganan krisis
6. Alternatif strategi komunikasi
7. Evaluasi

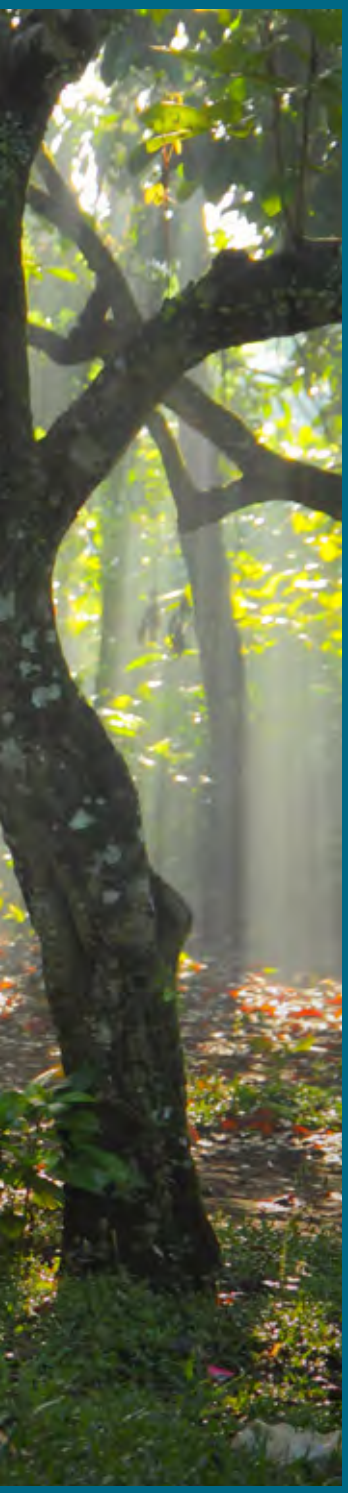

Referensi Kriteria ARA/POJK

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA.....792

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA

	Kriteria	Penjelasan	Hal
I.	UMUM		
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	
4.	Laporan tahunan ditampilkan di *website* perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 (empat) tahun terakhir.	
II.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING		
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Laba bruto b. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan c. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.	10
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	11
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 6 (enam) rasio keuangan yang umum dan relevan denganindustri perusahaan, yaitu: 1. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 2. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 3. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; 4. Rasio lancar; 5. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 6. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 7. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.	11-13

	Kriteria	Penjelasan	Hal
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Jika penghentian sementara tersebut masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.	17-18
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(outstanding)*; 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.	18-19
III.	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		
1.	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	33-41
2.	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	53-63
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	66-67

	Kriteria	Penjelasan	Hal
IV.	PROFIL PERUSAHAAN		
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, *email,* dan situs web.	70
2.	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	71-72
3.	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	74-75
4.	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi.	84-85
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan.	86-87
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.	88-91
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.	92-96
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.	99-103
9.	Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	104-107

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA

	Kriteria	Penjelasan	Hal
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	108-114
11.	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	115
12.	Kronologis pencatatan saham*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	116
13.	Kronologis pencatatan efek lainnya*	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek.	117
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	118
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	24-28
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.	119-120
17.	Informasi pada Situs Web Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.	121

	Kriteria	Penjelasan	Hal
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.	
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	
4.	Bahasan tentang struktur modal *(capital structure)* dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policy)*	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.	
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur permodalan, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA

	Kriteria	Penjelasan	Hal
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	
10.	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.	
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.	

	Kriteria	Penjelasan	Hal
17.	Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.	
VI.	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		
1.	Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	364, 394-396
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	377-378
3.	Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	412 425 402
4.	*Assessment* terhadap Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan *assessment*.	412 425 402
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	398-401, 433-436
6.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. 4. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	383-393, 415-425
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.	625

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA

	Kriteria	Penjelasan	Hal
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	375-377, 410-411
9.	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	439-452
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	452-469
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	469-494
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 6. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 1. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 2. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.	495-504
13.	Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya	Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.	351-363
14.	Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	523-533

	Kriteria	Penjelasan	Hal
15.	Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	534-537
16.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	538-563
17.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.	564-567
18.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	648-653
19.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.	654-657
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	658-670
21.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	671-692

	Kriteria	Penjelasan	Hal
22.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.	589-591
23.	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list,* buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	607-624, 629
24.	Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	579-581
25.	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi *whistleblower;* 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan	583-588
26.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya	368-371, 405-408
VII.	INFORMASI KEUANGAN		
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	

	Kriteria	Penjelasan	Hal
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung *(direct method)* untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	

Indeks Bapepam LK X.K.6 dan ARA

	Kriteria	Penjelasan	Hal
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	

Laporan Tahunan 2016

Laporan Keuangan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
As of 31 December 2016 and for the year then ended
with independent auditors' report

BNI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Achmad Baiquni
   Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Nomor telepon : 5728043
   Alamat rumah : Jl. Taman Wijaya Kusuma III / 21C Cilandak, Jakarta Selatan
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rico Budidarmo
   Alamat kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Nomor telepon : 5728948
   Alamat rumah : Jl. Cilandak IV/11 RT.009 RW.003 Cilandak Barat, Jakarta Selatan
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT
31 DECEMBER 2016 AND 2015
AND FOR FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016 AND 2015
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1. *Name* : *Achmad Baiquni*
   Office address : *Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia*
   Telephone : *5728043*
   Residential address : *Jl. Taman Wijaya Kusuma III / 21C Cilandak, Jakarta Selatan*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *Rico Budidarmo*
   Office address : *Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia*
   Telephone : *5728948*
   Residential address : *Jl. Cilandak IV/11 RT.009 RW.003 Cilandak Barat, Jakarta Selatan*
   Title : *Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;*
2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*

Jakarta, 20 JAN 2017

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Baiquni
Direktur Utama/*President Director*

Rico Budidarmo
Direktur/*Director*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
www.bni.co.id

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2016 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi	Halaman/ *Page*	***Table of Contents***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 5	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	6 - 7	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	8 - 9	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 11	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 217	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Keuangan Tambahan	218 - 228	*Supplementary Financial Information*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-2855/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-2855/PSS/2017

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KAP Tel. 0327/KM.1/2017
A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kelepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2855/PSS/2017 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2016, and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Informasi keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2855/PSS/2017 (continued)

Other matters (continued)

The accompanying financial information of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan report No. A160125003/DC2/ANG/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-2855/PSS/2017 (continued)

Other matters (continued)

The consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2015 and for the year then ended, were audited by other independent auditors whose report No. A160125003/DC2/ANG/I/2016 dated January 25, 2016 expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Yasir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703/*Public Accountant Registration No. AP.0703*

20 Januari 2017/*January 20, 2017*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2016	2015	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	11,167,643	12,890,427	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	30,146,853	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain				*Current accounts with other banks*
- Pihak berelasi		1,655,498	1,469,517	*Related parties* -
- Pihak ketiga		4,644,269	7,530,182	*Third parties* -
Total giro pada bank lain		6,299,767	8,999,699	*Total current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(1,748)	(906)	*Less: Allowance for impairment losses*
	6,46b	6,298,019	8,998,793	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia				*Placements with other banks and Bank Indonesia*
- Pihak berelasi		713,026	1,053,078	*Related parties* -
- Pihak ketiga		32,949,142	32,363,730	*Third parties* -
Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia		33,662,168	33,416,808	*Total placements with other banks and Bank Indonesia*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(500)	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	7,46c	33,661,668	33,416,808	
Efek-efek				*Marketable securities*
- Pihak berelasi		4,686,585	1,356,304	*Related parties* -
- Pihak ketiga		19,169,272	8,607,499	*Third parties* -
Total efek-efek		23,855,857	9,963,803	*Total marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(91,107)	(36,309)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,46d	23,764,750	9,927,494	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		1,664,750	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	14	1,664,750	376,215	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya				*Bills and other receivables*
- Pihak berelasi		5,205,598	2,896,219	*Related parties* -
- Pihak ketiga		3,393,465	5,961,604	*Third parties* -
Total wesel ekspor dan tagihan lainnya		8,599,063	8,857,823	*Total bills and other receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(31,268)	(26,379)	*Less: Allowance for impairment losses*
	9,46e	8,567,795	8,831,444	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2016	2015	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Tagihan akseptasi				*Acceptances receivables*
- Pihak berelasi		3,115,708	1,236,874	*Related parties -*
- Pihak ketiga		11,693,520	9,662,927	*Third parties -*
Total tagihan akseptasi		14,809,228	10,899,801	*Total acceptances receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(84,834)	(79,188)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,46f	14,724,394	10,820,613	
Tagihan derivatif				*Derivatives receivables*
- Pihak berelasi		48,105	118,902	*Related parties -*
- Pihak ketiga		201,759	321,799	*Third parties -*
Total tagihan derivatif	11,46g	249,864	440,701	*Total derivatives receivables*
Pinjaman yang diberikan				*Loans*
- Pihak berelasi		78,193,582	48,417,362	*Related parties -*
- Pihak ketiga		315,081,810	277,687,787	*Third parties -*
Total pinjaman yang diberikan		393,275,392	326,105,149	*Total loans*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(16,680,865)	(12,038,618)	*Less: Allowance for impairment losses*
	12,46h	376,594,527	314,066,531	
Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	13	63,006,339	47,222,319	*Government bonds adjusted for amortization of discount and premium*
Pajak dibayar dimuka	27a	620,320	2,299,174	*Prepaid taxes*
Beban dibayar dimuka	15	2,410,891	1,632,641	*Prepaid expenses*
Penyertaan saham		57,169	60,500	*Equity investments*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(24,707)	*Less: Allowance for impairment losses*
	16	57,169	35,793	
Aset lain-lain - neto	17	6,793,167	4,482,111	*Other assets - net*
Aset tetap		28,425,728	26,348,670	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(6,453,505)	(5,592,076)	*Less: Accumulated depreciation*
	18	21,972,223	20,756,594	
Aset pajak tangguhan - neto	27d	1,331,508	1,465,453	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET		**603,031,880**	**508,595,288**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2016	2015	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	19	3,275,668	1,805,494	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi		71,981,896	50,886,870	*Related parties* -
- Pihak ketiga		343,471,188	303,050,010	*Third parties* -
Total simpanan nasabah	20,46i	415,453,084	353,936,880	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi		695,722	179,887	*Related parties* -
- Pihak ketiga		9,039,460	4,068,171	*Third parties* -
Total simpanan dari bank lain	21,46j	9,735,182	4,248,058	*Total deposits from other banks*
Liabilitas derivatif				*Derivatives payable*
- Pihak berelasi		10,979	2,745	*Related parties* -
- Pihak ketiga		399,891	1,158,812	*Third parties* -
Total liabilitas derivatif	11,46k	410,870	1,161,557	*Total derivatives payable*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	3,764,961	3,163,142	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas akseptasi				*Acceptances payable*
- Pihak berelasi		1,093,708	491,533	*Related parties* -
- Pihak ketiga		3,264,829	5,696,725	*Third parties* -
Total liabilitas akseptasi	23,46l	4,358,537	6,188,258	*Total acceptances payable*
Beban yang masih harus dibayar	24	1,047,239	917,129	*Accrued expenses*
Utang pajak				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan		92,423	716,302	*Corporate income tax* -
- Pajak lainnya		58,347	33,094	*Other taxes* -
Total utang pajak	27b	150,770	749,396	*Total taxes payable*
Imbalan kerja	43	3,503,202	3,480,504	*Employee benefits*
Penyisihan	25	156,119	99,227	*Provisions*
Liabilitas lain-lain	26	11,148,956	7,583,784	*Other liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	28	6,731,115	6,870,667	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	29	32,965,422	22,523,581	*Borrowings*
TOTAL LIABILITAS		**492,701,125**	**412,727,677**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2016	2015	
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Giro *Mudharabah*	30,46m			*Mudharabah current accounts*
- Pihak berelasi		141,115	10	*Related parties* -
- Pihak ketiga		434,854	430,940	*Third parties* -
Total giro *Mudharabah*		575,969	430,950	*Total Mudharabah current accounts*
Tabungan *Mudharabah*	31,46o			*Mudharabah saving deposits*
- Pihak berelasi		13,849	8,778	*Related parties* -
- Pihak ketiga		6,863,593	5,692,052	*Third parties* -
Total tabungan *Mudharabah*		6,877,442	5,700,830	*Total Mudharabah saving deposits*
Deposito *Mudharabah*	32,46n			*Mudharabah time deposits*
- Pihak berelasi		7,530,591	334,139	*Related parties* -
- Pihak ketiga		5,107,827	10,017,986	*Third parties* -
Total deposito *Mudharabah*		12,638,418	10,352,125	*Total Mudharabah time deposits*
Total simpanan nasabah		20,091,829	16,483,905	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Giro *Mudharabah*	30			*Mudharabah current accounts*
- Pihak berelasi		-	-	*Related parties* -
- Pihak ketiga		15,470	11,938	*Third parties* -
Total giro *Mudharabah*		15,470	11,938	*Total Mudharabah current accounts*
Tabungan *Mudharabah*	31			*Mudharabah saving deposits*
- Pihak berelasi		-	-	*Related parties* -
- Pihak ketiga		187,088	138,660	*Third parties* -
Total tabungan *Mudharabah*		187,088	138,660	*Total Mudharabah saving deposits*
Deposito *Mudharabah*	32			*Mudharabah time deposits*
- Pihak berelasi		-	-	*Related parties* -
- Pihak ketiga		286,368	298,886	*Third parties* -
Total deposito *Mudharabah*		286,368	298,886	*Total Mudharabah time deposits*
Total simpanan dari bank lain		488,926	449,484	*Total deposits from other banks*
Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan	33,46p			*Mudharabah Sukuk issued*
- Pihak berelasi		165,000	151,000	*Related parties* -
- Pihak ketiga		331,000	345,000	*Third parties* -
Total Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan		496,000	496,000	*Total Mudharabah Sukuk issues*
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		**21,076,755**	**17,429,389**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December* 2016	2015	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to equity holders of the parent entity*
Modal saham:				*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				*Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)				*Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)				*Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)*
Modal dasar:				*Share capital - Authorized:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 289.341.866 saham				*Class B - 289,341,866 shares*
- Seri C - 34.213.162.660 saham				*Class C - 34,213,162,660 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 289.341.866 saham				*Class B - 289,341,866 shares*
- Seri C - 18.359.314.591 saham	34	9,054,807	9,054,807	*Class C -18,359,314,591 shares*
Tambahan modal disetor	34	14,568,468	14,568,468	*Additional paid-in capital*
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	1i	2,256,999	2,256,999	*Transactions with non-controlling interest*
Cadangan revaluasi aset	18	12,285,490	12,189,957	*Asset revaluation reserve*
Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	8,13	(1,888,467)	(2,518,968)	*Unrealized losses on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		81,715	75,502	*Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*
Saldo laba				*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya				*Appropriated*
Cadangan umum dan wajib	36	2,778,412	2,778,412	*General and legal reserves*
Cadangan khusus	37	-	5,705,376	*Specific reserves*
Tidak ditentukan penggunaannya		48,019,910	33,054,162	*Unappropriated*
Total saldo laba		50,798,322	41,537,950	*Total retained earnings*
Saham treasuri	2ah,34	-	(749,979)	*Treasury shares*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**87,157,334**	**76,414,736**	***Total equity attributable to equity holders of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali		**2,096,666**	**2,023,486**	***Non-controlling interest***
TOTAL EKUITAS		**89,254,000**	**78,438,222**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**603,031,880**	**508,595,288**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December* 2016	2015	
PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH	38	43,768,439	36,895,081	***INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME***
BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH	39	(13,773,377)	(11,334,885)	***INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE***
PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH - NETO		**29,995,062**	**25,560,196**	***INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME - NET***
PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI		5,596,823	3,618,148	***PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN***
BEBAN KLAIM		(4,255,262)	(2,485,134)	***CLAIMS EXPENSE***
PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI - NETO		**1,341,561**	**1,133,014**	***PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Provisi dan komisi lainnya		6,472,654	5,539,509	*Other fee and commission*
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		1,377,944	1,590,469	*Recovery of assets written off*
(Kerugian)/keuntungan dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan		(43,417)	21,904	*(Loss)/gain from financial assets held for trading*
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dan dimiliki untuk diperdagangkan		646,026	279,273	*Gain on sale of financial assets classified as available for sale and held for trading*
Laba selisih kurs - neto		685,019	515,081	*Foreign exchange gains - net*
Lain-lain		824,457	618,793	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		**9,962,683**	**8,565,029**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	6,7,8,9,10 12,16,25b	**(7,853,131)**	**(7,336,259)**	***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	40,43,46s	(8,833,954)	(7,365,834)	*Salaries and employees' benefits*
Umum dan administrasi	42	(6,211,925)	(5,758,344)	*General and administrative*
Beban promosi		(945,652)	(884,631)	*Promotion expense*
Premi penjaminan simpanan		(729,374)	(597,504)	*Deposit guarantee premium*
Lain-lain	41	(2,495,938)	(1,903,585)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		**(19,216,843)**	**(16,509,898)**	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***
LABA OPERASIONAL		**14,229,332**	**11,412,081**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL – NETO		**73,573**	**54,067**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**14,302,905**	**11,466,148**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSE***
Kini		(2,959,750)	(3,033,413)	*Current*
Tangguhan		67,041	707,797	*Deferred*
TOTAL BEBAN PAJAK	27c	(2,892,709)	(2,325,616)	***TOTAL TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**11,410,196**	**9,140,532**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December* 2016	2015	
LABA TAHUN BERJALAN		**11,410,196**	**9,140,532**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	18	120,136	12,380,091	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	43	231,693	101,002	*Remeasurement of post employment benefit*
Pajak penghasilan terkait		(47,125)	(202,272)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		6,213	17,464	*Translation adjustment of foreign currency financial statements*
Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		733,885	(693,742)	*Gain/(loss) on changes in value of financial assets categorized as available-for-sale*
Pajak penghasilan terkait		(122,314)	119,472	*Related income tax*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**922,488**	**11,722,015**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**12,332,684**	**20,862,547**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		11,338,748	9,066,581	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali		71,448	73,951	*Non-controlling interest*
TOTAL		**11,410,196**	**9,140,532**	***TOTAL***
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		12,259,504	20,788,596	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali		73,180	73,951	*Non-controlling interest*
TOTAL		**12,332,684**	**20,862,547**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)	**44**	**610**	**487**	***BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (IN FULL RUPIAH AMOUNT)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest*	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual neto setelah pajak/ *Unrealized losses on available-for-sale securities and Government Bonds, net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings* *)			Saham treasuri/ *Treasury shares*	Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent*	*Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
								Dicadangkan/*Appropriated*							
								Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Cadangan khusus/ *Specific reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated***)					
Saldo per 31 Desember 2015		**9,054,807**	**14,568,468**	**2,256,999**	**(2,518,968)**	**75,502**	**12,189,957**	**2,778,412**	**5,705,376**	**33,054,162**	**(749,979)**	**76,414,736**	**2,023,486**	**78,438,222**	***Balance as of 31 December 2015***
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	8,13	-	-	-	630,501	6,213	95,533	-	-	11,527,257	-	12,259,504	73,180	12,332,684	*Comprehensive income for the year*
Saham treasuri	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,979	749,979	-	749,979	*Treasury shares*
Reklasifikasi cadangan khusus	34	-	-	-	-	-	-	-	(5,613,100)	5,613,100	-	-	-	-	*Reclassification of specific reserves*
Reklasifikasi cadangan cabang luar negeri	35,37	-	-	-	-	-	-	-	(92,276)	92,276	-	-	-	-	*Reclassification of overseas branch legal reserve*
Dividen tunai	35	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,266,885)	-	(2,266,885)	-	(2,266,885)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2016		**9,054,807**	**14,568,468**	**2,256,999**	**(1,888,467)**	**81,715**	**12,285,490**	**2,778,412**	**-**	**48,019,910**	**-**	**87,157,334**	**2,096,666**	**89,254,000**	***Balance as of 31 December 2016***

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e).

**) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp277.373.

*) *Accumulated losses of Rp58,905,232 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e).*

**) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit, net of tax amounting to Rp277,373.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest*	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, neto setelah pajak/ *Unrealized losses on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi asset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings* *)			Saham treasuri/ *Treasury shares*	Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
								Dicadangkan/*Appropriated*						
								Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Cadangan khusus/ Specific *reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated***)				
Saldo per 31 Desember 2014		**9,054,807**	**14,568,468**	**2,256,999**	**(1,944,698)**	**58,038**	**-**	**2,778,412**	**3,909,726**	**28,390,021**	**-**	**59,071,773**	**1,949,535**	**61,021,308**	***Balance as of 31 December 2014***
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	8,13	-	-	-	(574,270)	17,464	12,189,957	-	-	9,155,445	-	20,788,596	73,951	20,862,547	*Comprehensive income for the year*
Pembelian saham treasuri	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(749,979)	(749,979)	-	(749,979)	*Purchase of treasury shares*
Pembentukan cadangan khusus	35,37	-	-	-	-	-	-	-	1,795,650	(1,795,650)	-	-	-	-	*Appropriation for specific reserves*
Dividen tunai	35	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,695,654)	-	(2,695,654)	-	(2,695,654)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2015		**9,054,807**	**14,568,468**	**2,256,999**	**(2,518,968)**	**75,502**	**12,189,957**	**2,778,412**	**5,705,376**	**33,054,162**	**(749,979)**	**76,414,736**	**2,023,486**	**78,438,222**	***Balance as of 31 December 2015***

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e).

**) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp88.864.

*) *Accumulated losses of Rp58,905,232 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e).*

**) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit amounting to Rp88,864.*

Melangkah Lebih Cepat Menangkan Persaingan

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA IN DONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December* 2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah		42,679,256	36,334,620	*Interest income and sharia income*
Beban bunga dan beban syariah		(13,817,212)	(11,121,452)	*Interest expense and sharia expense*
Pendapatan premi		5,596,823	3,310,796	*Premium income*
Beban klaim		(4,255,262)	(2,485,134)	*Claims expenses*
Pendapatan operasional lainnya		9,612,498	11,974,988	*Other operating income*
Beban operasional lainnya		(20,816,407)	(20,290,342)	*Other operating expenses*
Pendapatan bukan operasional - neto		73,573	35,009	*Non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan		(3,583,629)	(3,470,990)	*Payment of income tax*
Pembayaran pajak final atas revaluasi aset tetap		-	(190,134)	*Payment of final tax from revaluation of fixed assets*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**15,489,640**	**14,097,361**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating asets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(360,701)	(1,083,399)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		(1,263,681)	(1,130,054)	*Marketable securities and Government Bond at fair value through profit or loss*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14	(1,288,535)	5,861,141	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		258,760	(6,555,451)	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan		(67,170,243)	(48,482,868)	*Loans*
Tagihan akseptasi		(3,909,427)	1,631,640	*Acceptances receivable*
Beban dibayar di muka	15	(778,250)	(240,399)	*Prepaid expenses*
Aset lain-lain		456,981	(551,735)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	19	1,470,174	(7,571)	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	20	61,516,204	53,672,071	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	21	5,487,124	1,846,187	*Deposits from other banks*
Beban yang masih harus dibayar	24	130,110	257,537	*Accrued expenses*
Imbalan kerja	43	(67,929)	138,451	*Employee benefits*
Liabilitas akseptasi	23	(1,829,721)	(280,345)	*Acceptances payable*
Utang pajak		25,252	6,846	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		3,609,007	2,151,573	*Other liabilities*
Kenaikan dana syirkah temporer		3,647,366	3,025,643	*Increase deposits from temporary syirkah funds*
Kas neto diperoleh dari kegiatan operasi		**15,422,131**	**24,356,628**	***Net cash provided from operating activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Years Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December* 2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
(Pembelian)/penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto		(12,932,452)	3,485,158	*(Purchases)/sales of marketable securities available-for-sale and held-to-maturity- net*
Pembelian Obligasi Pemerintah - neto		(14,313,878)	(4,039,755)	*Purchases of Government Bond - net*
Penambahan aset tetap		(2,171,589)	(3,022,124)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	18	17,755	60,252	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		**(29,400,164)**	**(3,516,469)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Kenaikan pinjaman yang diterima		10,441,841	11,311,316	*Increase in borrowings*
(Penurunan)/kenaikan efek-efek yang diterbitkan		(139,552)	712,636	*(Decrease)/increase in marketable securities issued*
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		601,819	671,211	*Increase in securities sold under agreements to repurchase*
Pembayaran dividen		(2,266,885)	(2,695,654)	*Payment of dividends*
Hasil pembelian *treasury stock*		-	(749,979)	*Purchase of treasury stock*
Kas neto diperoleh dari kegiatan pendanaan		**8,637,223**	**9,249,530**	***Net cash provided from financing activities***
(PENURUNAN)/PENINGKATAN NETO KAS DAN SETARA KAS		**(5,340,810)**	**30,089,689**	***NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**83,607,533**	**53,512,006**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		17,428	5,838	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**78,284,151**	**83,607,533**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS:				***COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:***
Kas	4	11,167,643	12,890,427	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	30,146,853	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	6,299,767	8,999,699	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		30,669,888	30,785,230	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date*
Total kas dan setara kas		**78,284,151**	**83,607,533**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of 31 December 2016 and For the Year Then Ended (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" or "Bank") was originally established in Indonesia as the central bank under the name "Bank Negara Indonesia" based on Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 1946 dated 5 July 1946. Subsequently, by virtue of Law No. 17 of 1968, BNI became "Bank Negara Indonesia 1946", and changed its status to a state-owned commercial bank.

Based on Government Regulation No. 19 of 1992, dated 29 April 1992, BNI changed its legal status to a limited liability corporation (Persero). The change in legal status to become a limited liability corporation was covered by notarial deed No. 131, dated 31 July 1992 of Muhani Salim, S.H., and was published in Supplement No. 1A of the State Gazette No. 73 dated 11 September 1992.

In compliance with the Indonesian Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007, BNI's Articles of Association has been amended. The amendment was covered by notarial deed No. 46 dated 13 June 2008 of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting on 28 May 2008 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its decision letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated 12 August 2008 and published in Supplement No. 29015 of the State Gazette No. 103 dated 23 December 2008.

The latest amendment of BNI's Articles of Association was made regarding, among other matters, realignment of the entire Articles of Association based on notarial deed No. 35 dated 17 March 2015 of Fathiah Helmi, S.H. and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0776526 dated 14 April 2015.

According to Article 3 of BNI's Articles of Association, BNI's scope of activity is to engage in general banking services.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar Rp850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

c. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) setiap saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang BEI). BNI juga menerbitkan 151.220.563.500 lembar saham Seri C kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

d. Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial Public Offering (IPO)

On 28 October 1996, BNI undertook an initial public offering of 1,085,032,000 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount) and offering price per share of Rp850 (full amount) to the public in Indonesia. The shares began trading on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently Indonesia Stock Exchange or IDX) on 25 November 1996.

c. Limited Public Offering I

On 30 June 1999, BNI undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 151,904,480,000 Class C shares with a par value per share of Rp25 (full amount). Each holder of 1 share was entitled to buy 35 new shares for Rp347.58 (full amount) per share. As a result of LPO I, BNI increased its capital by 683,916,500 Class C shares to the public on 21 July 1999 and the LPO I listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently IDX).On 7 April 2000 and 30 June 2000, BNI also issued 151,220,563,500 Class C shares to the Government of Indonesia through the recapitalization program under the Government Regulation No. 52 year 1999.

d. Recapitalization

On 30 March 2000, the Ministry of Finance approved BNI's recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. In connection with the increase in the recapitalization amount, which was approved in the Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued additional 44,946,404,500 Class C shares without pre-emptive rights.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of 31 December 2016 and For the Year Then Ended (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Rekapitalisasi (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

e. Kuasi-reorganisasi

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, BNI melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") tanggal 15 Desember 2003.

Penyesuaian kuasi-reorganisasi yang telah dibukukan pada tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

Akumulasi kerugian	(58,905,232)	*Accumulated losses*
Cadangan umum dan wajib	432,952	*General and legal reserve*
Cadangan khusus	382,541	*Specific reserve*
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1,190,598	*Fixed assets revaluation reserve*
Laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	58,660	*Unrealize gain on available for sale securities*
Kenaikan penliaian kembali nilai wajar aktiva bersih	2,472,634	*Revaluation uplift in the fair value of net assets*
Tambahan modal disetor	54,367,847	*Additional paid in capital*
	-	

Anggaran Dasar BNI telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan akta notaris Agung Prihatin, S.H., No. 42 tanggal 30 Desember 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1152 tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 9.

f. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Recapitalization (continued)

On 20 July 2001, BNI's capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares in connection with the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on 25 June 2001.

e. Quasi-reorganisation

In order for BNI to eliminate the negative consequences of being burdened by accumulated losses, BNI undertook quasi-reorganisation as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("RUPS-LB") on 15 December 2003.

The quasi-reorganisation adjustments which were booked on 30 June 2003 are as follows:

BNI's Articles of Association were amended to reflect the changes in additional paid-in capital as a result of quasi-reorganisation, based on notarial deed of Agung Prihatin, S.H., No. 42 dated 30 December 2003 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 dated 19 December 2003 and was published in the State Gazette No. 1152, Supplement No. 9 dated 30 January 2004.

f. Limited Public Offering II

On 30 July 2007, the Extraordinary General Shareholders' Meeting approved the issuance up to 1,992,253,110 new Class C shares through Limited Public Offering II with a par value per share of Rp375 (full amount).

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran Umum Saham Terbatas II (lanjutan)

Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (nilai penuh) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 dan biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp195.280.

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

g. Penawaran Umum Saham Terbatas III

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp8.950.869.

h. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 10 Maret 2016 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No 8 tanggal 10 Maret 2016 dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 10 Maret 2016 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No 8 tanggal 10 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Limited Public Offering II (continued)

Each owner of 20 old shares whose name was registered in the List of Shareholders of BNI as of 9 August 2007 at 16.00 WIB was entitled to 3 pre-emptive rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 (full amount) per share. From the Limited Public Offering II, BNI raised Rp747,094 additional share capital and Rp3,287,218 additional paid-in capital and Rp195,280 shares issuance cost.

The initial trading took place on 13 August 2007 at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently IDX).

g. Limited Public Offering III

On 25 November 2010, at the Extraordinary General Shareholders' Meeting, the shareholders decided, among other matters, to increase the issued and paid-up capital through limited public offering with pre-emptive right (LPO III) to shareholders for the issuance of 3,374,715,948 new Class C shares with a par value per share of Rp375 (full amount). Such pre-emptive rights can be traded inside and outside the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting 10 December 2010 until 16 December 2010, with consideration to the existing capital market regulation. From the LPO III, BNI obtained Rp1,265,519 additional share capital and Rp8,950,869 additional paid-in capital, net of shares issuance cost.

h. Organizational and Management Structure

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of BNI as of 31 December 2016 and 2015 in which based on BNI's Annual Stockholders' General Meeting Held on 10 March 2016, as stated under the Notarial Deed No. 8 dated 10 March 2016 and BNI's Annual Stockholders' General Meeting held on 10 March 2016, as stated under the Notarial Deed No. 8 dated 10 March 2016 are as follows:

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

h. Organizational and Management Structure (continued)

	2016	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Hartadi A. Sarwono	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Pradjoto	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Anny Ratnawati	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen *)	Pataniari Siahaan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen *)	Revrisond Baswir	*Independent Commissioner*
Komisaris	Bistok Simbolon	*Commissioner*
Komisaris *)	Wahyu Kuncoro	*Commissioner*
Komisaris	Joni Swastanto	*Commissioner*

	2015	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Pradjoto	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Anny Ratnawati	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Jos Luhukay	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Zulkifli Zaini	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Daniel T. Sparringa	*Independent Commissioner*
Komisaris	Pataniari Siahaan	*Commissioner*
Komisaris	Kiagus Ahmad Badaruddin	*Commissioner*
Komisaris	Revrisond Baswir	*Commissioner*

	2016	2015	
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Achmad Baiquni	Achmad Baiquni	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Suprajarto	Suprajarto	*Vice President Director*
Direktur	Rico Budidarmo	Rico Budidarmo	*Director*
Direktur	Bob Tyasika Ananta	Bob Tyasika Ananta	*Director*
Direktur	Herry Sidharta	Herry Sidharta	*Director*
Direktur	Anggoro Eko Cahyo	Anggoro Eko Cahyo	*Director*
Direktur	Imam Budi Sarjito	Imam Budi Sarjito	*Director*
Direktur	Adi Sulistyowati	Adi Sulistyowati	*Director*
Direktur	Putrama Wahju Setyawan	Sutanto	*Director*
Direktur	Panji Irawan	-	*Director*
Komite Audit)**			***Audit Committee**)**
Ketua	Anny Ratnawati	Jos Luhukay	*Chairman*
Anggota	-	Anny Ratnawati	*Member*
Anggota	Bambang Ratmanto	Tubagus Chairul Amachi	*Member*
Anggota	Donnaria Silalahi	Sigid Moerkardjono	*Member*

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015.

*) *Effective after the issuance of approval from Financial Service Authority.*

**) *The formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority rule No.55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015.*

Jumlah pegawai BNI adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of employees of BNI are as follows (unaudited):

	Tetap/ *Permanent*	Tidak tetap/ *Non-permanent*	Total	
2016	24,272	4,118	28,390	*2016*
2015	23,820	3,055	26,875	*2015*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2016, BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 kantor layanan serta 829 outlet lainnya (31 Desember 2015: 169 kantor cabang, 911 kantor layanan serta 729 outlet lainnya) (tidak diaudit). Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Seoul serta 1 kantor perwakilan di New York.

i. Entitas Anak

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

h. Organizational and Management Structure (continued)

BNI's head office is located at Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. As of 31 December 2016, BNI has 196 domestic branches, 944 sub-branches and 829 other outlets (31 December 2015: 169 domestic branches, 911 sub-branches and 729 other outlets) (unaudited). In addition, BNI's network also includes 5 overseas branches located in Singapore, Hong Kong, Tokyo, London and Seoul and 1 agency in New York.

i. Subsidiaries

BNI has direct ownership in the following Subsidiaries:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Tahun Mulai Beroperasi Komersial/ *Year Started Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Total Aset/ *Total Assets*	
			2016	2015	2016	2015
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	1997	60.00%	60.00%	13,062,865	9,915,762
PT BNI Multifinance	Pembiayaan/ *Financing*	1983	99.99%	99.98%	516,791	178,478
PT BNI Securities dan Entitas Anak/*and Subsidiary*	Sekuritas/*Securities*	1995	75.00%	75.00%	987,266	765,438
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan/ *Financial services*	1998	100.00%	100.00%	7,130	5,431
PT Bank BNI Syariah	Perbankan/*Banking*	2010	99.90%	99.90%	28,314,175	23,017,667

Semua Entitas Anak BNI berkedudukan di Jakarta, kecuali BNI Remittance Ltd. berkedudukan di Hong Kong.

PT BNI Life Insurance ("BNI Life")

BNI Life didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI Life Insurance.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BNI Life, ruang lingkup kegiatan BNI Life adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI Life memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-305/KMK.01 7/1997 tanggal 7 Juli 1997.

All of the Subsidiaries of BNI are domiciled in Jakarta, except for BNI Remittance Ltd. which is domiciled in Hong Kong.

PT BNI Life Insurance ("BNI Life")

BNI Life was founded under the name PT Asuransi Jiwasraya based on Notarial Deed No. 24 dated 28 November 1996. On 26 November 2004, PT Asuransi Jiwasraya changed its name to PT BNI Life Insurance.

In accordance with article 3 of BNI Life's Articles of Association, the scope of BNI Life's activities is to engage in life insurance business including life insurance business under sharia principle. BNI Life obtained its operating license as a life insurance company based on the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. Kep-305/KMK.017/1997 dated 7 July 1997.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Life Insurance ("BNI Life") (lanjutan)

Pada bulan Desember 2007, BNI telah meningkatkan penyertaannya pada BNI Life dari 59,78% menjadi 69,11%.

Pada tanggal 29 Juli 2008, BNI memberikan pinjaman subordinasi kepada BNI Life sebesar Rp50.000 yang dapat dikonversikan menjadi modal saham. Pada tahun 2008, BNI juga memberikan tambahan setoran modal kepada BNI Life sebesar Rp50.000.

Pada bulan Januari 2009, pinjaman subordinasi tersebut dikonversikan menjadi modal saham yang secara efektif meningkatkan investasi BNI dari 69,11% menjadi 85,11%. Tambahan investasi telah diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 3 tanggal 6 Januari 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009.

Pada 9 Desember 2011, BNI meningkatkan investasi yang dimiliki pada BNI Life senilai Rp149.999 yang meningkatkan kepemilikan BNI dari 85,11% menjadi 91,52%.

Pada bulan September 2012 BNI mengakuisisi 8,47% saham yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dengan imbalan pembelian sebesar Rp93.330 sehingga BNI memiliki 99,99% modal saham BNI Life. Selisih antara nilai pembayaran dan nilai buku BNI Life pada tanggal transaksi sebesar Rp62.862 disajikan dalam ekuitas sebagai akun "Transaksi dengan kepentingan nonpengendali".

Pada tahun 2013, BNI mengumumkan kemitraan strategis dengan Sumitomo Life Insurance Company ("Sumitomo Life"). Kemitraan strategis ini dilakukan melalui akuisisi 40% saham BNI Life oleh Sumitomo Life senilai Rp4,2 trilliun.

Pada tanggal 4 Desember 2013, BNI Life telah menerima uang muka sebesar 15% dari nilai akuisisi saham atau ekuivalen sebesar Rp630.000.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Life Insurance ("BNI Life") (continued)

In December 2007, BNI increased its investment in BNI Life from 59.78% to 69.11%.

On 29 July 2008, BNI granted subordinated loan to BNI Life amounting to Rp50,000 which can be converted to capital stock. In 2008, BNI also injected additional paid-up capital to BNI Life amounting to Rp50,000.

In January 2009, the subordinated loan was converted to capital stock which effectively increased BNI's investment from 69.11% to 85.11%. The additional investment was notarized by Notarial Deed No.3 dated 6 January 2009 of Fathiah Helmi, S.H., and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 dated 16 March 2009.

On 9 December 2011, BNI increased its investment in BNI Life by Rp149,999 which increased BNI's ownership from 85.11% to 91.52%.

In September 2012, BNI acquired 8.47% of shares owned by a non-controlling interest for a purchase consideration of Rp93,330 thereby BNI now holds 99.99% of the equity share capital of BNI Life. The difference between the consideration paid and the book value of BNI Life at the transaction date amounted to Rp62,862 was presented in equity as "Transactions with non-controlling interest".

In 2013, BNI announced a new strategic partnership with Sumitomo Life Insurance Company ("Sumitomo Life"). The new strategic partnersip is through acquisition of 40% shares of BNI Life by Sumitomo Life amounted to Rp4.2 trillion.

On 4 December 2013, BNI Life has received advance payment of 15% from the total acquisition shares value or equivalent to Rp630,000.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Life Insurance ("BNI Life") (lanjutan)

Pada tanggal 11 Maret 2014, BNI Life telah menerima persetujuan dari OJK mengenai Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan Saham melalui surat No. S-20/D.05/2014. Pada tanggal 27 Maret 2014, sisa nilai akuisisi saham sebesar Rp3.570.000 telah disetor penuh oleh Sumitomo Life. Seluruh penerimaan dari Sumitomo Life setelah dikurangi dengan biaya transaksi dicatat di dalam akun "transaksi dengan kepentingan nonpengendali".

Pada tanggal 3 April 2014, akuisisi ini telah diselesaikan dan diaktakan dengan Akta Notaris No.7 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.01557.40.21.2014 tanggal 29 April 2014. Akuisisi ini mengakibatkan kepemilikan saham BNI di BNI Life terdilusi dari sebelumnya 99,99% menjadi 60%.

Kantor pusat BNI Life berlokasi di BNI Life Tower, The Land Mark Center Lantai 21 Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, BNI Life memiliki 17 kantor pemasaran dan 47 kantor pemasaran mandiri yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan memiliki karyawan sebanyak 820 orang pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: 696 karyawan) (tidak diaudit).

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Multifinance, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayan multi guna dan sewa operasi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2008, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 20 tanggal 23 Desember 2008, pemegang saham telah memberikan persetujuan atas rencana kuasi-reorganisasi BNI Multifinance per tanggal 31 Juli 2008 yang efektif berlaku sejak tanggal 7 Juli 2008.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Life Insurance ("BNI Life") (continued)

On 11 March 2014, BNI Life has received approval from OJK, concerning the changes of share ownership plan in its letter No.S-20/D.05/2014. On 27 March 2014, the remaining acquisition value amounting to Rp3,570,000 has been fully paid by Sumitomo Life. The total cash received from Sumitomo Life after deducted by the transaction cost is recorded as "transactions with non-controlling interest".

On 3 April 2014, the acquisition has been completed and notarized by Notarial Deed No.7 and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU.01557.40.21.2014 dated 29 April 2014. This acquisition diluted BNI's ownership in BNI Life from 99.99% to 60%.

BNI Life head office is located in BNI Life Tower, The Land Mark Center 21st floor Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910. As of 31 December 2016 and 2015, BNI Life has 17 marketing offices and 47 personal marketing offices located in various cities in Indonesia and has 820 employees as of 31 December 2016 (31 December 2015: 696 employees) (unaudited).

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")

In accordance with Article 3 of BNI Multifinance's Articles of Association, the scope of the Company's activities involves investment financing, working capital financing, multipurpose financing and operation lease.

In the General Shareholders' Meeting on 19 June 2008, as covered in the Notarial Deed No. 20 dated 23 December 2008 of Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., the shareholders approved the planned quasi-reorganization of BNI Multifinance as of 31 July 2008 which became effective on 7 July 2008.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance") (lanjutan)

Berikut adalah mutasi saldo tambahan modal disetor yang terjadi sebelum dan setelah kuasi-reorganisasi:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance") (continued)

The following are the movements of additional paid-in capital that occurred before and after quasi-reorganization:

	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	
Saldo per 31 Juli 2008 (sebelum kuasi-reorganisasi)		***Balance as of 31 July 2008 (before the quasi-reorganization)***
Penurunan nilai nominal saham	387,939	*Decrease in par value of shares*
Eliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi		*Elimination related to quasi-reorganization*
Koreksi atas pajak tangguhan	(15,208)	*Correction of deferred tax*
Selisih penilaian kembali aset dan liabilitas	(1,473)	*Revaluation of assets and liabilities*
Saldo defisit	(370,033)	*Deficit*
Saldo per 31 Juli 2008 (setelah kuasi-reorganisasi)	1,225	***Balance as of 31 July 2008 (after the quasi-reorganization)***

Sesuai keputusan pemegang saham BNI Multifinance tanggal 7 Juni 2013, telah disetujui penambahan penyertaan BNI di BNI Multifinace dengan mengkonversi pinjaman subordinasi menjadi penyertaan sebesar Rp75.000.

In accordance with decisions of BNI Multifinance's shareholders on 7 June 2013, it was approved to increase BNI's investment in BNI Multifinance by converting subordinated loans into equity amounting to Rp75,000.

Atas konversi pinjaman subordinasi tersebut menyebabkan penyertaan BNI pada BNI Multifinance menjadi sebesar Rp95.414 (1.908.279.707 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham).

As a result of the above subordinated loans conversion, BNI's investment in BNI Multifinance becoming Rp95,414 (1,908,279,707 shares with a nominal value of Rp50 (full amount) per share).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI Multifinance dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali Anggaran Dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp203.000.000.000 dan seluruhnya sejumlah penerbitan 4.060.000.000 saham Perusahaan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta No. 90 tanggal 23 Juni 2016 Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0060863 tanggal 24 Juni 2016.

The latest amendment of BNI Multifinance's Articles of Association was made regarding, among other matters and increase in issued and fully paid capital amounting Rp203,000,000,000 and issuance of 4,060,000,000 shares contributed by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Notarial Deed No.90 dated 23 June 2016 of I Gede Buda Gunamanta, S.H. and has been approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0060863 dated 24 June 2016.

Kantor pusat BNI Multifinance berlokasi di Gedung BNI Life Insurance, lantai 5, Jl. Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta 10260. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, BNI Multifinance memiliki 8 outlet cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan memiliki karyawan sebanyak 85 orang pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: 82 karyawan) (tidak diaudit).

BNI Multifinance head office is located in Gedung BNI Life Insurance, 5th floor, Jl. Aipda KS. Tubun No. 67, Jakarta 10260. As of 31 December 2016 and 2015, BNI Multifinance has 8 counters located in various cities in Indonesia and has 85 employees as of 31 December 2016 (31 December 2015: 82 employees) (unaudited).

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Securities ("BNI Securities") dan Entitas Anak

BNI Securities didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 dari Koesbiono Sarmanhadi, S.H., di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan akta No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1995, Tambahan No. 5804.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Securities, ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan efek, termasuk didalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pada bulan Juli 2011, SBI Securities Co. Ltd. memberikan dana untuk penanaman modal di BNI Securities yang mengurangi kepemilikan BNI di BNI Securities dari 99,85% menjadi 75%.

BNI Securities memiliki 99,90% dari jumlah saham PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), entitas anak yang didirikan tanggal 28 Maret 2011 dan bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi.

BNI Asset Management merupakan hasil pemekaran usaha *(spin-off)* Divisi Manajemen Investasi BNI Securities. Proses pendiriannya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Securities tanggal 1 Maret 2011. Pemekaran usaha tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.11 sebagai lampiran dalam surat keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-480/BL/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Securities ("BNI Securities") and Subsidiary

BNI Securities was established by virtue of Notarial Deed No. 22 dated 12 April 1995 of Koesbiono Sarmanhadi, S.H., in Jakarta. The deed was amended by notarial deed No. 39 dated 3 May 1995 of the same notary. The deeds of establishment and amendment thereon were approved by the Decision Letter of the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 dated 19 May 1995 and was published in the State Gazette No. 55 dated 11 July 1995, Supplement No. 5804.

In accordance with Article 3 of BNI Securities' Articles of Association, the scope of its business activities comprises securities trading, including investment underwriting and advisory investment and other related activities allowed by Financial Service Authority (OJK), previously the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) and other regulations.

In July 2011, SBI Securities Co. Ltd. made an equity investment in BNI Securities which reduced BNI ownership in BNI Securities from 99.85% to 75%.

BNI Securities owns 99.90% of the total share capital of PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), a subsidiary established on 28 March 2011 and engaged in investment management and advisory activities.

BNI Asset Management was established from the spin-off of the Investment Management Division of BNI Securities. The spin-off was approved during BNI Securities Shareholders' Extraordinary General Meeting dated 1 March 2011. The spin-off was conducted in accordance with Bapepam and LK Regulation No. V.D.11 as attached in the decree of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-480/BL/2009 regarding the Guidelines for Investment Manager's Functions.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Securities ("BNI Securities") dan Entitas Anak (lanjutan)

Kantor pusat BNI Securities berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2016, BNI Securities memiliki 52 outlet cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (2015: 53 outlet cabang) dan memiliki karyawan sebanyak 308 orang pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: 311 karyawan) (tidak diaudit).

BNI Remittance Ltd. (dahulu BNI Nakertrans)

BNI telah menambah modalnya sebesar HKD7.434.944 (nilai penuh) setara dengan Rp10.000 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat menggunakan metode biaya. Kantor pusat BNI Remittance Ltd. berada di Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki karyawan sebanyak 8 orang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

BNI Syariah adalah bank umum syariah yang merupakan hasil pemekaran usaha (*spin-off*) Unit Usaha Syariah BNI ("UUS BNI"). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI tanggal 5 Oktober 2009 sesuai akta No. 37 Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemekaran usaha dilakukan dengan mengacu kepada PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dengan cara mendirikan bank umum syariah baru.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT BNI Securities ("BNI Securities") and Subsidiary (continued)

BNI Securities head office is located in Sudirman Plaza Indofood Tower, 16th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. As of 31 December 2016, BNI Securities has 52 counters located in various cities in Indonesia (2015: 53 outlets) and has 308 employees as of 31 December 2016 (31 December 2015: 311 employees) (unaudited).

BNI Remittance Ltd. (formerly BNI Nakertrans)

On 11 June 2009 BNI increased its capital by HKD7,434,944 (full amount) equivalent to Rp10,000, which was recorded using the cost method. The main office of BNI Remittance Ltd. is located in Causeway Bay, Hong Kong and has 8 employees as of 31 December 2016 and 2015.

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")

BNI Syariah was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 which was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta. The Establishment Deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 dated 25 March 2010.

BNI Syariah is a general sharia bank as a result of the spin-off of the Sharia Business Unit of BNI ("UUS BNI"). The establishment process was approved at the Shareholders' Extraordinary General Meeting of BNI held on 5 October 2009 in accordance with the deed No. 37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was conducted in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit by establishing a new general sharia bank.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") (lanjutan)

Pemberitahuan atas rancangan *spin-off* kepada karyawan, nasabah dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 12 Agustus 2009 sedangkan pemberitahuan atas rencana pengalihan hak dan liabilitas UUS BNI telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 15 Februari 2010. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap yaitu persetujuan izin prinsip usaha dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010 BNI Syariah telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS Bank BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan Nomor 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, BNI Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010, yakni saat pertama kalinya BNI Syariah melakukan kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

BNI Syariah menjalankan operasional sebagai bank devisa sejak tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Sehubungan dengan telah beroperasinya BNI Syariah, maka Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2010 mencabut izin usaha UUS Bank BNI melalui keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/7/KEP.DpG/2010 tentang pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") (continued)

The announcement to the employees, customers and third parties regarding the planned spin-off was made through a national newspaper on 12 August 2009 while the announcement regarding the transfer of the rights and obligations of UUS BNI was made through a national newspaper on 15 February 2010. The establishment was approved by Bank Indonesia in two stages, which are the approval of the business license in principle and the business license. On 8 February 2010, BNI Syariah received its license in principle from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on Bank Indonesia letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The separation of UUS BNI was made under Separation Deed No. 159 dated 22 March 2010 which was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta.

On 21 May 2010, BNI Syariah received its business license from Bank Indonesia, based on the Decision Letter No. 12/41/ KEP.GBI/2010 of the Governor of Bank Indonesia regarding the approval of the business license of PT Bank BNI Syariah. The separation became effective on 19 June 2010, in which BNI Syariah started its operational activity, as reported to Bank Indonesia under letter No. Dir/1/03 dated 19 June 2010 regarding the Report on the Implementation of the Opening of General Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

BNI Syariah started its operational activities as a foreign exchange bank on 9 July 2010 based on the Copy of the Decision Letter No. 12/5/KEP.DpG/2010 of the Deputy Governor of Bank Indonesia dated 9 July 2010.

As BNI Syariah has commenced its operations, UUS BNI's business license was revoked pursuant to the Decision Letter No.12/7/KEP.DpG/2010 of the Deputy Governor of Bank Indonesia dated 27 August 2010 regarding the revocation of the business license of the Sharia Business Unit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI Syariah pada tanggal 18 September 2014 sesuai dengan Akta Notarial No. 53, BNI dan BNI Life masing-masing menambah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp500.000.000 (nilai penuh), secara tunai dengan mengeluarkan saham dari modal dasar sejumlah 500.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Penambahan modal saham ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK melalui Pelaksana Harian (Plh) Kepala Departemen Pengawasan Bank I No. S-67/PB.31/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal oleh BNI dan BNI Life pada BNI Syariah.

Penambahan setoran modal ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06781.40.21.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BNI Syariah.

Kantor pusat BNI Syariah berlokasi di Gedung Tempo Pavillion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2016, BNI Syariah memiliki 68 kantor cabang, 171 kantor cabang pembantu dan 86 outlet lainnya yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (31 Desember 2015: 49 kantor cabang dan 98 kantor cabang pembantu) dan memiliki karyawan sebanyak 4.450 orang pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: 4.297 karyawan) (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Subsidiaries (continued)

PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah") (continued)

Based on Decision from Shareholders as a replacement of Extraordinary General Shareholders' Meeting of BNI Syariah dated 18 September 2014 in accordance with Notarial Deed No. 53, BNI and BNI Life have increased the issued and fully paid capital amounted to Rp500,000,000,000 (full amount) and Rp500,000,000 (full amount), respectively, in cash through the issuance of shares from authorized capital amounted to 500,500 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The additional share capital has been approved by OJK based on OJK Letter through Daily Executive Bank Supervision Department I No. S-67/PB.31/2014 dated 25 August 2014, regarding the Approval of Additional Capital from BNI and BNI Life on to BNI Syariah.

This additional capital has been approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-06781.40.21.2014 regarding The Acceptance of Notification on the Amendement of BNI Syariah's Articles of Association.

BNI Syariah's head office is located in Gedung Tempo Pavillion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan, Jakarta 12950 - Indonesia. As of 31 December 2016, BNI Syariah has 68 branches, 171 sub-branches and 86 other outlets located in various cities in Indonesia (31 December 2015: 49 branches and 98 sub-branches) and has 4,450 employees as of 31 December 2016 (31 December 2015: 4,297 employees) (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak ("Grup") ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 20 Januari 2017.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Entitas Anak, BNI Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2014) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" dan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali bagi hasil dari pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* dan laporan arus kas konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of BNI and Subsidiaries ("Group") were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 20 January 2017.

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of BNI and Subsidiaries ("Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and Bapepam and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of Bapepam and LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".

A Subsidiary, BNI Syariah, which is engaged in sharia banking presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with SFAS No. 101 (Revised 2014), "Presentation of Sharia Financial Statements",SFAS No. 102 (Revised 2013) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 "Accounting for Musyarakah", SFAS No. 107 "Accounting for Ijarah" and SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) and other Statements of Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants.

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by the revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, and financial assets and liabilites (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, except for profit sharing for Mudharabah and musyarakah financing and consolidated statements of cash flows.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Grup dan memberikan dampak pada laporan keuangan konsolidasian, adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statements of cash flows are prepared in the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, along they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

On 1 January 2016, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards ("SFAS") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the new or revised standards and interpretations, which are relevant to the Group's operations and resulted in an effect on the consolidated financial statements, are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- PSAK Syariah 110 – Akuntansi Sukuk

  Sesuai dengan perubahan pada PSAK Syariah 110 – Akuntansi Sukuk mengenai penambahan kategori "Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain" dalam klasifikasi akuntansi investasi Sukuk yang disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal Sukuk diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk
  - Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat dari investasi Sukuk diakui sebagai Penghasilan Komprehensif Lain

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri
- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi
- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama
- ISAK 30: Pungutan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

- *SFAS Sharia 110 – Accounting for Sukuk*

  According to changes on SFAS Sharia 110 – Accounting for Sukuk regarding addition of "Fair Value through Other Comprehensive Income" (FVOCI) category in classification of Accounting for Sukuk Investment that is presented as:
  - *Difference between acquisition cost and principal amortized on a straight line basis over the term of Sukuk*
  - *Difference between fair value and carrying amount of FVOCI Sukuk recognized as Other Comprehensive Income*

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

- *Amendments to SFAS 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure Initiative*
- *Amendments to SFAS 4: Separate Financial Statements regarding equity method on Separate Financial Statement*
- *Amendments to SFAS 65: Consolidated Financial Statements regarding Exception Application Consolidation for Investment Entities*
- *Amendments to SFAS 66: Joint Arrangement regarding accounting for acquisition of interest in joint operation*
- *ISFAS 30: Levies*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Grup terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities

(i) Classification

The Group classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- *Financial assets at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets held for trading;*
- *Loans and receivables;*
- *Held-to-maturity financial assets;*
- *Available-for-sale financial assets.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*

Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities held for trading which the Group acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the consolidated statement of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Grup mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification ***(continued)***

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Group intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Group upon initial recognition designates as of fair value through profit or loss;*
- *those that the Group upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or*
- *those for which the Group may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available-for-sale.*

Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity. Financial assets intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

Available-for-sale-financial assets

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets t is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Available-for-sale-financial assets (continued)

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

Other financial liabilities

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ ***Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)***		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Class (as determined by the Group)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/*Financial assets held for trading*	Efek-efek/*Marketable securities*
			Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*
			Tagihan derivatif - Tidak terkait lindung nilai/*Derivative receivables – Non hedging related*
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Kas/*Cash*	Kas pada *vendor*/*Cash in vendor*
		Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain/*Current accounts with other banks*	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/*Placements with other banks and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under agreements to resell*	
		Wesel ekspor dan tagihan lainnya/*Bills and other receivables*	
		Tagihan akseptasi/*Acceptance receivables*	
		Pinjaman yang diberikan/*Loans*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
			Piutang bunga/*Interest receivables*
			Lain-lain/*Others*
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/*Held-to-maturity investments*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/*Available-for-sale financial assets*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
		Penyertaan saham/*Equity investments*	

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ ***Category as defined by SFAS 55 (Revised 2014)***		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Class (as determined by the Group)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*	Tagihan derivatif - terkait lindung nilai atas arus kas/*Derivative receivables - hedging instruments in cash flow hedges related*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial liabilities held for trading*	Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative payables - non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Liabilitas segera/*Obligation due immediately*	
		Simpanan nasabah/*Deposits from customers*	
		Simpanan dari bank lain/*Deposits from other banks*	
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*	
		Liabilitas akseptasi/*Acceptance payables*	
		Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*	Setoran jaminan/*Security deposit*
			Utang bunga/*Interest payable*
			Utang nasabah/*Payable to customers*
			Lain-lain/*Others*
		Efek-efek yang diterbitkan/*Marketable securities issued*	
		Pinjaman yang diterima/*Borrowings*	
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas nilai arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*	Liabilitas derivatif - Terkait lindung nilai atas arus kas/*Derivative payables - Hedging instruments in cash flow hedges related*
Kontrak jaminan keuangan/ *Financial guarantee contract*	*Letters of credit* yang tidak dapat dibatalkan/*Irrevocable letters of credit*		
	Garansi bank yang diberikan/*Bank Guarantees issued*		
	Standby letters of credit		

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition

a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Subsequent measurement

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*

- *the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasfikasikan setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai Wajar melalui Laba Rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

b. (continued)

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the Fair Value through Profit and Loss, if the initial recognition of financial instrument is determined as measured at Fair Value through Profit and Loss.

The Group can not classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

a. are so close to maturity or the financial asset's repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;

b. occur after the Group has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

c. are attributable to an isolated event that is beyond the Group's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Group.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus (lanjutan)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Offsetting (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direview dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, the Group uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Grup untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets

At each consolidated statement of financial position date, the Group assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criterias used by the Group to determine that there is objective evidence of impairment include:

a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has yet been identified individually in the portfolio, including:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Grup pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Grup akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Perhitungan penurunan nilai secara individu

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

The Group first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Group will determines whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

A) Financial assets carried at amortised cost

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or

2. Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criterias, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Individual impairment calculation (continued)

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

1. Loans which individually have insignificant value;

2. Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik seperti, *migration analysis method* dan *roll rates analysis method*, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menerapkan *roll rate method* untuk pinjaman kartu kredit dengan menggunakan data historis selama 3 tahun dalam menghitung *Probability of Default* (*PD*) dan *Loss Given Default* (*LGD*). Untuk pinjaman selain kartu kredit, Bank menerapkan *migration analysis method* dengan menggunakan data historis selama 5 tahun dalam menghitung PD dan LGD.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Based on the above criterias, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans which collectibility classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis and roll rate analysis methods, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank applies roll rate method for credit card loans using 3 years historical data to compute the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD). For loans other than credit card loans, the Bank applies migration analysis method using 5 years historical data to compute the PD and LGD.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

A) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Grup menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

A) Financial assets carried at amortised cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

The Group uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

As a practical guideline, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

B) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

B) Financial assets classified as available-for–sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the consolidated statement of comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in consolidated profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognised in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available - for - sale shall not be reversed through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

C) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum" yang berlaku sampai dengan 21 Agustus 2017.

d. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian BNI.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

C) Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Bank Indonesia (OJK), Bank implements Bank Indonesia Regulation No.14/15/PBI/2012 dated 24 October 2012 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" and Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11/POJK.03/2015 dated 21 August 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Commercial Banks" which is valid until August 21, 2017.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of BNI and all its Subsidiaries that are controlled by BNI.

Where Subsidiaries either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atas entitas anak, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai keberadaan pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto.* Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Grup, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Grup kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara BNI dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian BNI dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas. Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. The Group also assesses existence of control where it does not have more than 50% of the voting power but is able to govern the financial and operating policies by virtue of de-facto control. De-facto control may arise in circumstances where the size of the Group's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Group the power to govern the financial, operating and other policies.

All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among BNI and Subsidiaries are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of BNI and its Subsidiaries as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiaries' financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiaries' financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position andrepresents the non-controlling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiaries based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiaries.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran

Transaksi dalam mata uang asing

BNI dan Entitas Anak yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah, kecuali untuk BNI Remittance yang pembukuan akuntansinya dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada pukul 16:00 WIB. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2016	2015	
1 Pound Sterling Inggris	16,555	20,439	*British Pound Sterling 1*
1 Euro	14,176	15,057	*Euro 1*
1 Dolar Amerika Serikat	13,473	13,785	*United States Dollar 1*
1 Dolar Hong Kong	1,737	1,779	*Hong Kong Dollar 1*
1 Yen Jepang	115	115	*Japanese Yen 1*

Penjabaran laporan keuangan sehubungan dengan konsolidasian laporan cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri

Cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign currency transactions and translations

Transactions denominated in foreign currencies

BNI and its Subsidiaries domiciled in Indonesia maintain their accounting records in Rupiah, except for BNI Remittance which its accounting records is maintained in United States Dollar. Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

At consolidated statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Reuters middle rate at 16:00 Western Indonesian Time (WIB). The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of comprehensive income for the current year.

Translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies (continued)

As of 31 December 2016 and 2015, the foreign currency exchange rates used for translation of foreign currencies to Rupiah are as follows (amounts in full Rupiah):

Translation of financial statements relating to consolidation of BNI branches domiciled outside of Indonesia

BNI's branches domiciled outside of Indonesia maintain their accounting records in their respective domestic currencies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Saldo akun-akun aset, liabilitas, komitmen dan kontinjensi dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;
- Saldo akun-akun laba rugi setiap bulannya dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot* Reuters jam 16:00 WIB rata-rata untuk bulan yang bersangkutan. Saldo untuk tahun berjalan merupakan jumlah dari penjabaran bulanan tersebut;
- Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

f. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign currency transactions and translations (continued)

For consolidation purposes, the financial statements of such branches domiciled outside of Indonesia are translated into Rupiah as follows:

- *Assets, liabilities, commitments and contingencies accounts are translated using the Reuters spot rates at 16:00 WIB at the consolidated statement of financial position date;*
- *Revenues and expenses accounts are translated on a monthly basis using the average month-end Reuters spot rate at 16:00 WIB. The balances for the year represent the sum of those monthly translations;*
- *Equity accounts are recorded using the historical rates; and*
- *Differences arising from translation are presented in the consolidated statement of financial position balance as part of equity under "Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements".*

f. Current accounts with other banks and Bank Indonesia

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsidiary that engages in sharia banking presents current accounts with Bank Indonesia and other banks at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tagihan tresuri asing, unit penyertaan reksa dana, obligasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan kepada BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laporan laba rugi serta disajikan sebesar nilai wajarnya

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Placements with other banks and Bank Indonesia

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as loans and receivables. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Marketable securities and Government Bonds

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), foreign treasury bills, mutual fund units, bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds issued to BNI and other banks with respect to the recapitalization program of the Government and other bonds issued by the Government of Indonesia and other countries, that are not related to the recapitalization program, acquired through the primary and secondary markets.

At initial recognition, the securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., available-for-sale financial assets, held-to-maturity financial assets or at fair value through profit or loss and initially measured at fair value

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Januari 2016, Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Marketable securities and Government Bonds (continued)

Since 1 January 2016, the Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on busines model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

Allowance for possible losses are recognised in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *Letters of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada eksportir.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase (continued)

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Bills and other receivables

Bills and other receivables consist of receivables from Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit to exporters.

Bills and other receivables are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

Bills and other receivables are classified as loans and receivables.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risks.

Derivatives financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the consolidated profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

I. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Grup.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya, adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah

Pinjaman yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *ijarah, murabahah* dan *qardh*.

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Loans (continued)

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borned by the Group.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve a modification of the terms of the loans, conversion of loans into equity or other financial instruments and/or a combination of both.

For non performing loan restructuring which involves a conversion of loans into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity investments or other financial instruments received, reduced by estimated costs to sell the equity or other financial instruments, is less than the carrying value of the loan.

Sharia financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of sharia receivables, Mudharabah financing and musyarakah financing.

Sharia receivables arise from transactions based on ijarah, murabahah, and qardh agreements.

Ijarah is a leasing arrangement of goods and/or services between the owner of a leased object (lessor) and lessee including the right to use the leased object, for the purpose of obtaining a return on the leased object. Ijarah muntahiyah bittamlik is a leasing arrangement between the lessor and lessee to obtain profit on the leased object being leased with an option to transfer ownership of the leased object through purchase/sale or giving (hibah) at certain time according to the lease agreement (akad).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau marjin;
c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

At each statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that Murabahah receivables not carried at fair value through profit or loss are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition, and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b) a breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
c) the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d) it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah piutang *murabahah* jumlahya signifikan secara individual. Apabila piutang *murabahah* jumlahnya signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang *murabahah*. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara individual, terlepas piutang *murabahah* tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok piutang *murabahah* yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Piutang *murabahah* yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:

1) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

2) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether the Murabahah receivables is individually significant. If the Murabahah receivables considered individually significant, the Bank will determines that objective of evidence of impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed Murabahah receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of Murabahah receivables with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Murabahah receivables that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* meliputi *hawalah* dan *rahn*.

Hawalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat *ujrah* (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing)* atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of hawalah and rahn.

Hawalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah (fee) and is recognised upon receipt.

Rahn is the pawn of goods or assets from customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and in exchange for the Bank to obtain ujrah (benefits) and are recognised based on accrual basis.

Funds of qardh is recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the review quality of the individual outstanding balances.

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or net revenue sharing method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *Mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah.*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

m. Kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen hutang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans (continued)

Sharia financing (continued)

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

m. Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Jaminan keuangan diakui awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Setelah pengakuan awal, liabilitas atas jaminan tersebut diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah awal, dikurangi amortisasi provisi dan estimasi terbaik dari jumlah yang diharapkan akan terjadi untuk menyelesaikan jaminan tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman transaksi yang sejenis dan kerugian historis masa lalu, dilengkapi dengan penilaian manajemen. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan menggunakan metode garis lurus.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan *present value* atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi *probable*).

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan kerugian historis.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

o. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial guarantee contracts (continued)

Financial guarantees are initially recognised at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal the premium received because all guarantees are agreed on arm's length terms. Subsequent to initial recognition, the bank's liabilities under such guarantees are measured at the higher of the initial amount, less amortisation of fees recognised, and the best estimate of the amount required to settle the guarantee. These estimates are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supplemented by the judgement of management. The fee income earned is amortised over the period of guarantees using the straight line method.

Subsequently they are measured at the higher of amortised amount and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable).

Allowances for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are calculated based on historical experience.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable are classified as loans and receivables. Acceptances payable are classified as other financial liabilities.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

o. Equity investments

Equity investments represent investments in the form of shares of stock, in non-public companies engaged in financial services held for long-term purposes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Penyertaan saham (lanjutan)

Investasi dalam saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dicatat sebesar biaya perolehan setelah pengakuan awalnya karena terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, kecuali untuk investasi dalam saham tertentu yang memiliki harga kuotasi dicatat sebesar nilai wajar setelah pengakuan awalnya.

Investasi dimana BNI mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau di perusahan asosiasi dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian BNI atas laba atau rugi neto perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan.

Investasi dengan persentase kepemilikan dibawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan metode biaya dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyertaan saham dengan metode biaya terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan diukur dengan menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai.

p. Aset tetap dan penyusutan

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Equity investments (continued)

Investments in shares classified as available for sale financial asset is carried at cost after it's initial recognition as its consist unquoted equity securities whose fair value cannot be reliably measured, except for certain investment in shares that has quote price which accounted for at fair value after initial recognition.

Investments in which BNI has an ownership interest of 20% to 50% or in associated company in which the Bank has significant influence are recorded based on the equity method. Under equity method, investments are stated at cost and adjusted for BNI's share in net income or losses of the associated companies based on its percentage of ownership and reduced by dividends received since the date of acquisition.

Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at cost reduced by an allowance for impairment losses.

Equity investments at cost method consist of unquoted equity shares whose fair value can not be reliably measured, are classified as available-for-sale investments and are carried at cost less impairment.

p. Fixed assets and depreciation

Group applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memilki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets and depreciation (continued)

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and bulidings recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreasing in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset does have balance on its "Gain of Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain of Revaluation of Fixed Assets" which presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	15	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	5	*Office equipment and motor vehicles*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, Automatic Teller Machines (ATM), computer software and hardware, communication and other office equipment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets and depreciation (continued)

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Construction in progress". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed.

q. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking, Phone Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan.

Termasuk di dalam simpanan adalah simpanan syariah yang terdiri dari giro *wadiah.* Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad adh-dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Foreclosed collaterals (continued)

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognise such permanent decline in value and any such write-down is recognized in profit or loss.

r. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time obligations to public customers or other banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Savings account represent deposits of customers in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may only be withdrawn over the counter and via ATMs or funds transfers by SMS Banking, Phone Banking and Internet Banking when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and BNI and a Subsidiary engaged in banking.

Deposits include sharia deposits consist of wadiah deposit. Wadiah deposit is a wadiah yad adh-dhamanah deposits in which the depositor is entitled to receive bonus income based on the policy of BNI Syariah. Wadiah demand deposits are stated at the amount payable to customers.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Liabilitas segera (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BNI Syariah kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

s. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BNI Syariah kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

t. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari obligasi yang diterbitkan oleh Grup.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Obligations due immediately (continued)

Deposits from customers are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost using effective interest rate method except sharia deposits which is stated at the amount payable by BNI Syariah to customers. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

s. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost using effective interest rate method except sharia deposits which is stated at the amounts payable by BNI Syariah to the customers. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

t. Securities issued

Securities issued consist of bonds issued by the Group.

Securities issued are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of marketable securities are deducted from the amount of securities issued.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Efek-efek yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BNI Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah dan sukuk mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Securities issued (continued)

Bonds issued are presented at nominal value net of unamortized discount. Costs incurred related to the bond issuance are presented as deduction from the proceeds of bonds issued and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Borrowings

Borrowings are funds received from other bank, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BNI Syariah) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah sukuk issued.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anythime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance in Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan merupakan sukuk yang menggunakan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu sukuk menggunakan garis lurus. Penerbitan sukuk dan perdagangan sukuk berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari. Pemilik sertifikat sukuk *mudharabah* mendapatkan bagi hasil.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BNI Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Temporary syirkah funds (continued)

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Mudharabah sukuk issued is a sukuk using the contract of mudharabah. Sukuk mudharabah is recognized when the entity becomes party of issuance contract mudharabah sukuk. Sukuk mudharabah is recognized at nominal value. Transaction costs are recognised separately from the sukuk mudharabah. Transaction costs for the issuance of sukuk mudharabah presented in assets as deferred expenses and amortized over the term of sukuk using straight-line method. Sukuk issuance and trading of sukuk based on the principles of sharia, including any underlying assets/activities. The holders of mudharabah sukuk certificate receive profit sharing.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BNI Syariah does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BNI Syariah's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

w. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah, beban bunga dan beban syariah

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Temporary syirkah funds (continued)

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

w. Interest income and sharia income, interest expense and sharia expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah, beban bunga dan beban syariah (lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin *murabahah*, pendapatan *ijarah* (sewa), bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan *qardh*. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah.*

Marjin *Murabahah* dan pendapatan *ijarah* diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi *qardh* diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

x. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Interest income and sharia income, interest expense and sharia expense (continued)

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, lease income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

x. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest rate method and classified as part of interest income in profit or loss.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi adalah kemungkinan untuk membayar manfaat yang signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

BNI Life mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan membayar manfaat pada saat terjadinya suatu kejadian yang diasuransikan, yang setidaknya 10% lebih besar dari manfaat yang dibayarkan jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi. Jika suatu kontrak asuransi tidak mengandung risiko asuransi yang signifikan, maka kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak investasi. Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamandemen.

BNI Life menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Produk-produk dari BNI Life dibagi berdasarkan kategori utama sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract

Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from policyholder upon the issuance of the policy.

Significant insurance risk is the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios considered are those with commercial substance.

BNI Life defines significant insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurance of an insured event of at least 10% more than the benefits payable if the insured event did not occur. If the insurance contract does not contains significant insurance risk, the contract will be deemed as an investment contract. Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification is subsequently performed unless the terms of the agreement are later amended.

BNI Life issues insurance contracts for traditional insurance product and investment-linked insurance product. Both of these products, have significant insurance risk.

BNI Life's products may be divided into the following main categories:

Tipe polis/ ***Policy type***	**Deskripsi manfaat/** ***Description of benefits***
1) Produk Tradisional/ *Traditional Products*	Produk yang memberikan perlindungan untuk menutupi risiko kematian, kecelakaan, penyakit kritis, dan kesehatan dari pemegang polis. Jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung / *Products which provide protection to cover the risk of death, accident, critical illness, and health of the insured. The basic sum insured will be paid upon the occurance of the risks covered.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract (continued)

Tipe polis/ *Policy type*	Deskripsi manfaat/ *Description of benefits*
2) Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi/*Investment linked insurance products*	Produk yang memberikan manfaat untuk risiko kematian dari uang pertanggungan dan akumulasi nilai tunai yang berasal dari pengembangan premi yang dibayar / *Products which provide benefit to cover the risk of death, from sum insured and accumulated cash value from investment yield from paid premium.*
Produk asuransi unit link /*Unit-linked insurance products.*	Nilai dana investasi akan dihitung berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diterima dari aset dasar tergantung dari tipe fund yang dipilih oleh pemegang polis / *The investment fund value will be measured based on the yield of return from the underlying assets depend on the fund type which is chosen by the policyholders.*

BNI Life memisahkan komponen deposit dari kontrak unit link seperti yang syaratkan oleh PSAK 62 hanya jika kondisi-kondisi dibawah ini terpenuhi:

- BNI Life dapat mengukur komponen "deposit" secara terpisah (termasuk opsi penyerahan melekat, yaitu tanpa memperhitungkan komponen "asuransi"); dan
- Kebijakan akuntansi BNI Life tidak mensyaratkan untuk mengakui semua hak dan kewajiban yang timbul dari komponen "deposit".

Karena hanya kondisi pertama di atas terpenuhi, maka BNI Life tidak memisahkan komponen deposit dari kontrak unit link.

Pengujian kecukupan liabilitas

Untuk asuransi jiwa, liabilitas kepada pemegang polis khususnya kewajiban untuk klaim masa depan diuji untuk menentukan apakah liabilitas tersebut cukup untuk menutupi semua arus kas keluar di masa depan termasuk semua manfaat yang dijamin dan manfaat tambahan yang dijamin, manfaat partisipasi yang tidak dijamin (jika ada), semua biaya untuk penerbitan polis dan pemeliharaan polis, serta mencerminkan arus kas masuk masa depan, yaitu premi yang diterima di masa depan.

BNI Life unbundles the deposit component of unit-linked contract as required by PSAK 62 only when both of the following conditions are met:

- *BNI Life can measure separately the "deposit" component (including any embedded surrender option, i.e. without taking into account the "insurance" component); and*
- *BNI Life's accounting policies do not otherwise require to recognise all obligations and rights arising from the "deposit" component.*

Since only the first conditions above is met, therefore BNI Life does not unbundles the deposit component of unit-linked contract.

Liability adequacy tests

For life insurance, the liabilities to policyholder in particular the liabilities for future claim is tested to determine whether they are sufficient to cover all related future cash out flow include all guaranteed benefit and guaranteed embedded additional benefit, non-guaranteed participation benefit feature (if any), all the expense for policies issuance and maintaining the policies, as well as reflecting the future cash inflow, i.e. premium receipt in the future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

Pengujian kecukupan liabilitas (lanjutan)

Liabilitas dihitung berdasarkan diskonto dari arus kas untuk semua arus kas yang terkait yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk seperti yang disebutkan di atas dengan menggunakan seperangkat asumsi aktuaria berdasarkan estimasi terbaik terkini yang ditetapkan oleh aktuaris BNI Life, termasuk asumsi mortalitas/morbiditas, *lapse*, biaya dan inflasi serta marjin atas risiko pemburukan.

BNI Life menerapkan metode *Gross Premium Reserve* dalam perhitungan cadangan premi atas manfaat polis masa depan kepada pemegang polis dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan marjin atas risiko pemburukan, sehingga pengujian kecukupan liabilitas tidak diperlukan lagi.

Pengakuan pendapatan premi

Pendapatan premi kontrak jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Pendapatan premi kontrak jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat polis jatuh tempo.

BNI Life menghitung premi yang belum merupakan pendapatan dengan menggunakan metode amortisasi harian.

Premi yang belum merupakan pendapatan hanya diterapkan terhadap premi yang mempunyai risiko (asuransi jangka warsa, kecelakaan diri dan kesehatan) yang diperbaharui setiap tahunnya.

Kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan premi yang diterima sebelum jatuh tempo polis dicatat sebagai titipan premi di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Ujrah/fee yang diterima oleh BNI Life diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract (continued)

Liability adequacy tests (continued)

The liabilities are calculated based on discounted cash flow basis for all related cash flows i.e. both of cash outflows and cash inflows as mentioned above using a set of most recent best estimate actuarial assumptions which is set by the BNI Life's actuary, covering assumptions on mortality/morbidity, lapse, expense and inflation as well as margin for adverse deviation.

BNI Life applies the Gross Premium Reserve method to calculate the policyholder liabilities based on actuarial assumptions which is based on best estimate assumptions and margin for adverse deviation, therefore, the liability adequacy testing is no longer required.

Premium income recognition

Premium income from short duration insurance contracts is recognised as revenue over the period of risk coverage in proportion to the amounts of insurance protection provided. Premium income from long duration contracts are recognised as revenue when the policy is due.

BNI Life calculates unearned premium income using daily amortisation method.

Unearned premiums only apply for premiums that have yearly renewable term which have risk component only (term life, personal accident, and health insurance).

Increase (decrease) in unearned premiums is recognised in the current year's profit or loss.

Premium income received before the due date of the respective policies are reported as premium deposits in the consolidated statement of financial position.

Ujrah/fee received by BNI Life is recognised as income in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

Reasuransi

BNI Life mereasuransikan sebagian porsi risikonya kepada perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi yang diterima.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk membagi liabilitas manfaat polis masa depan, membagi estimasi liabilitas klaim, dan membagi premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

BNI Life menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BNI Life mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti obyektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BNI Life tidak dapat menerima seluruh jumlah di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Klaim dan manfaat polis

Klaim dan manfaat polis terdiri dari klaim yang telah diselesaikan, klaim dalam proses penyelesaian dan estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR). Klaim dan manfaat polis diakui sebagai beban pada saat terjadinya liabilitas untuk memberikan proteksi. Klaim reasuransi yang diperoleh dari BNI Life reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang klaim dan manfaat polis pada periode yang sama dengan periode pengakuan klaim dan manfaat polis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract (continued)

Reinsurance

BNI Life reinsures a portion of its risk with reinsurance companies. The amount of premium paid or portion of premium from prospective reinsurance transactions is recognised over the reinsurance contract in proportion with the protection received.

Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for ceded liabilities for future policy benefits, ceded estimated claim liabilities and ceded unearned premiums. Recoveries amount from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.

BNI Life present separately reinsurance assets as assets of liabilities for future policy benefits, unearned premiums and estimated claim liabilities.

If a reinsurance asset is impaired, BNI Life deducted the carrying amount accordingly and recognises that impairment loss in the profit and loss. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that BNI Life may not receive all amounts due to it under the terms of the contract, and the impact on the amounts that BNI Life will receive from the reinsurer can be reliably measured.

Claims and policy benefits

Claims and policy benefits consist of settled claims, claims that are still in process of completion and estimated of claims incurred but not yet reported (IBNR). Claims and policy benefits are recognised as expenses when the liabilities to cover claims are incurred. Reinsurance claims recoveries from reinsurance companies are recognised and recorded as deduction from claims and policy benefits consistent in the same period with the claims and policys benefits recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

Klaim dan manfaat polis (lanjutan)

Total klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dinyatakan berdasarkan estimasi menggunakan teknik perhitungan teknis oleh aktuaris yang dilaporkan sebagai bagian dari "Estimasi liabilitas klaim" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim, sebagai hasil dari evaluasi lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai biaya tambahan atau pengurang biaya pada periode terjadinya perubahan.

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dikurangi dengan nilai kini dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus tertentu oleh aktuaris BNI Life atau aktuaris independen yang terdaftar.

BNI Life menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan penerimaan premi di masa depan.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Untuk produk unit link, liabilitas kepada pemegang unit link diakui pada saat penerimaan dana dikonversi menjadi unit setelah dikurangi biaya-biaya dan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai aset bersih efektif yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract (continued)

Claims and policy benefits (continued)

Total claims in process, including claims incurred but not yet reported, are stated at estimated amounts determined based on the actuarial technical insurance calculations which is reported as part of "Estimated claim liabilities" in the consolidated statement of financial position. Changes in estimated claim liabilities as a result of further evaluation and the difference between estimated claims and paid claims are recognised as addition to or deduction from expenses in the period the changes occurred.

Liabilities for future policy benefits

The liabilities for future policy benefits represent the present value of estimated future policy benefits to be paid to policyholders or their heirs less present value of estimated future premiums to be received from the policyholders and recognised consistenly with the recognition of premium income.The liabilities for future policy benefits are determined and computed based on certain formula by BNI Life's actuary or registered independent actuary.

BNI Life calculates the liability for future policy benefits using Gross Premium Reserve method that reflects the present value of estimated payments of all the guaranteed benefits including all the embedded options available, the present value of all estimated handling costs incurred and the future premium receipt.

Increase/(decrease) for future policy benefits is recognised in the current year's profit and loss.

For unit-linked products, the liability to unit-linked policyholders is recognised at the time the funds received are converted into units, net of related expenses and will increase or decrease in accordance with effective net asset value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

Liabilitas manfaat polis masa depan (lanjutan)

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk unit link non syariah diakui sebagai pendapatan premi bruto di laporan laba rugi. Liabilitas kepada pemegang polis unit link diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian yang termasuk di dalam liabilitas manfaat polis masa depan sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi dengan bagian premi yang merupakan pendapatan Entitas Anak, disertai dengan pengakuan kenaikan liabilitas kepada pemegang polis unit link di laba rugi.

Setiap bunga, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan nilai pasar investasi dicatat sebagai pendapatan atau beban, disertai dengan pengakuan kenaikan atau penurunan liabilitas manfaat polis masa depan di laporan laba rugi dan liabilitas manfaat polis masa depan di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk unit link Syariah diakui sebagai liabilitas manfaat polis masa depan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi bagian *fee* untuk Entitas Anak dalam rangka mengelola pendapatan dari produk unit link.

z. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Insurance contract (continued)

Liabilities for future policy benefits (continued)

Funds received from customers for non-sharia unit-linked products are recognised as gross premiums income in the statement of profit and loss. Liabilities to unit-linked policyholders are recognised in the consolidated statement of financial position which is included in the liabilities for future policy benefits for the amount received net of the portion of premium representing Subsidiary's revenue, with corresponding profit or loss recognition for the increase in liabilities to unit-linked policyholders.

Any interest, gain or loss due to increases or decreases in market value of investments are recorded as income or expense, with a corresponding recognition of increase or decrease liabilities for future policy benefits in the profit or loss and liabilities for future policy benefits in the consolidated statement of financial position.

Funds received from customers for Sharia unit linked products is recognized as liabilities for future policy benefit in the statements of financial position for the amount received net of the portion representing the Subsidiariy's fees in managing the unit-linked product revenue

z. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

aa. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

BNI memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Taxation (continued)

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted asat reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided

aa. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrued to the employees.

Pension benefits and other post-employment

BNI has defined benefit and defined contribution pension plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

BNI diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Employee benefits (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk ("DPLK").

BNI is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No. 13/2003 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

ab. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba *residual*) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Employee benefits (continued)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Group also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged are credited to profit or loss.

ab. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year available to shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ac. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

(i) perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
(ii) perusahaan asosiasi;
(iii) investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
(iv) perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas;
(v) karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
(vi) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Pelaporan segmen

BNI dan Entitas Anak menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Transactions with related parties

BNI and Subsidiaries enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", which are defined, among others, as:

(i) entities under the control of BNI and Subsidiaries;
(ii) associated companies;
(iii) investors with voting rights that gives them significant influence;
(iv) entities controlled by investors under Note iii above;
(v) key employees and family members; and
(vi) entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government, which is defined as the Minister of Finance or Provincial Government who has share ownership in the entity.

All significant transactions with related parties have been disclosed in notes to the consolidated financial statements.

ad. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ae. Segment reporting

BNI and its Subsidiaries determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ae. Pelaporan segmen (lanjutan)

Grup mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Korporasi, Komersial dan Kecil, Konsumer dan Ritel, Tresuri dan Institusi Keuangan, Kantor Pusat dan Entitas Anak.

af. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ag. Saham treasuri

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Segment reporting (continued)

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

The Group discloses its operating segments based on operating segments that consist of Corporate, Commercial and Small, Consumer and Retail, Treasury and Financial Institution, Head Office and Subsidiaries.

af. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of "Additional Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the consolidated statement of financial position.

ag. Treasury shares

When any Group entity purchases the entity's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. When ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.
Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements these where require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Grup menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

d. Significant judgement is required in determining the provision for taxes

Group provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

e. Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi

Cadangan teknis Entitas Anak dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain" berdasarkan perhitungan teknis asuransi dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial yaitu asumsi estimasi terbaik dan marjin atas risiko pemburukan. Termasuk dalam cadangan teknis adalah liabilitas manfaat polis masa depan, estimasi liabilitas klaim, dan premi yang belum merupakan pendapatan. Entitas Anak menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang menghitung liabilitas manfaat polis masa depan berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan marjin atas risiko pemburukan.

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

h. Konsolidasian Entitas Terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Grup mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur yang dijabarkan dalam Catatan 2d dan apakah Bank, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Grup, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Bank.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

e. Insurance liabilities on insurance contracts

Technical reserves of the Subsidiary recorded in the consolidated consolidated statement of financial position as part of "Other liabilities" are calculated based on insurance technical calculation using certain actuarial assumptions which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk. Included in the technical reserves are liability for future policy benefits, estimated claim liabilities, and unearned premium income. The Subsidiary uses Gross Premium Reserve method in calculating liability for future policy benefits which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk.

f. Deferred Tax Asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

g. Fixed Asset Revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

h. Consolidation of Structured Entities

In determining the degree of control exercised, the Group considers whether these entities meet the definition of Structured Entities as set out in Note 2d and whether the Bank, in substance, controls such entities.

When the Group, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Bank.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

i. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicates that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;

b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

4. KAS / *4. CASH*

Kas terdiri dari : / *Cash consists of the following:*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	10,440,299	12,298,469	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	322,618	351,883	*United States Dollar*
Dolar Singapura	146,903	108,359	*Singapore Dollar*
Yuan China	65,434	6,507	*Chinese Yuan*
Euro	45,893	29,594	*Euro*
Real Arab Saudi	37,828	19,729	*Saudi Arabian Real*
Dolar Australia	32,722	15,644	*Australian Dollar*
Ringgit Malaysia	18,924	27,731	*Malaysian Ringgit*
Dolar Hong Kong	18,017	11,318	*Hong Kong Dollar*
Yen Jepang	17,868	13,559	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	12,099	3,994	*Great Britain Pound Sterling*
United Arab Emirates Dirham	2,733	1,149	*United Arab Emirates Dirham*
Brunei Dollar	2,142	900	*Brunei Dollar*
Franc Swiss	1,221	546	*Swiss Franc*
South Korean Won	1,164	411	*South Korean Won*
Dolar Taiwan	1,001	152	*Taiwan Dollar*
Dolar Kanada	687	373	*Canadian Dollar*
Thailand Baht	90	109	*Thailand Baht*
	727,344	591,958	
Total	**11,167,643**	**12,890,427**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp3.280.343 dan Rp1.264.525 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp3,280,343 and Rp1,264,525 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	23,905,301	26,725,601	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	6,241,552	4,206,576	*United States Dollar*
Total	**30,146,853**	**30,932,177**	***Total***

Bank dan Entitas Anak dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

The Bank and Subsidiaries are required to maintain minimum statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Giro Wajib Minimum (GWM) Grup telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan PBI/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang masing-masing sebesar:

As of 31 December 2016 and 2015, the Group's Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia (BI) Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 which have been further amended with PBI No. 18/3/PBI/2016 dated 15 March 2016 dan PBI No. 18/14/PBI/2016 dated 18 August 2016 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency which are as follows:

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

	31 Desember/*December*	
	2016	**2015**
Rupiah		*Rupiah*
- GWM Primer	6.50%	7.50% *Primary Minimum Statutory Reserve*
- GWM Sekunder	4.00%	4.00% *Secondary Minimum Statutory Reserve*
Mata uang asing	8.00%	8.00% *Foreign Currencies*

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau *excess reserve* yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR). GWM LFR adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR Bank dibawah minimum LFR target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR target BI (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve is the minimum reserves that should be maintained by the Bank, comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represent the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve and the Minimum Statutory Reserve on Loan to Funding Ratio (LFR). The Minimum Statutory Reserve on LFR is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR is below the minimum of LFR targeted by Bank Indonesia (80%) or if the Bank's LFR above the maximum of LFR targeted by BI (92%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing (BNI saja) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar:

The ratio of the Minimum Statutory Reserve requirement (BNI only) for its Rupiah and foreign currencies accounts as of 31 December 2016 and 2015, are as follows:

	31 Desember/*December*	
	2016	**2015**
Rupiah		*Rupiah*
- GWM Primer	6.77%	9.23% *Primary Minimum Statutory Reserve*
- GWM Sekunder	10.56%	14.82% *Secondary Minimum Statutory Reserve*
Mata uang asing	8.01%	8.01% *Foreign currencies*

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	350,212	299,405	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2,782,390	2,960,824	*United States Dollar*
Dolar Singapura	944,083	1,415,447	*Singapore Dollar*
Euro	824,025	1,133,605	*Euro*
Yen Jepang	586,698	824,676	*Japanese Yen*
Yuan China	503,295	2,129,675	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	151,546	116,251	*Hong Kong Dollar*
Swiss Franc	44,091	21,232	*Swiss Franc*
Pound Sterling Inggris	33,349	21,749	*Great Britain Pound Sterling*
United Arab Emirates Dirham	32,601	31,231	*United Arab Emirates Dirham*
Dolar Australia	19,983	35,832	*Australian Dollar*
Dolar Kanada	18,141	8,908	*Canadian Dollar*
South Korean Won	9,026	-	*South Korean Won*
Baht Thailand	326	332	*Thailand Baht*
Real Arab Saudi	1	520	*Saudi Arabian Real*
Ringgit Malaysia	-	12	*Malaysian Ringgit*
	5,949,555	8,700,294	
Total	6,299,767	8,999,699	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,748)	(906)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6,298,019**	**8,998,793**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	5,083	261	*Rupiah*
Mata uang asing	1,650,415	1,469,256	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	1,655,498	1,469,517	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	345,129	299,144	*Rupiah*
Mata uang asing	4,299,140	7,231,038	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	4,644,269	7,530,182	*Total third parties*
Total	6,299,767	8,999,699	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,748)	(906)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6,298,019**	**8,998,793**	***Net***

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *c. By Bank Indonesia collectibility*

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of 31 December 2016 and 2015 were classified as current.

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

d. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	906	1,589	*Beginning balance*
Penyisihan/(pembalikan) selama tahun berjalan	7,375	(632)	*Allowance/ (reversal) during the year*
Penyesuaian karena penjabaran laporan keuangan	(6,533)	(51)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**1.748**	**906**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	**Yuan China/ *Chinese Yuan* %**	
2016	0.01 - 0.68	0.70	*2016*
2015	0.01 - 0.25	0.00	*2015*

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA / *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *By type and currency*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Indonesia - FASBI	17,912,502	2,294,069	*Bank Indonesia - FASBI*
Call Money			*Call Money*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	470,000	250,000	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	400,000	250,000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Standard Chartered Bank Jakarta	200,000	-	*Standard Chartered Bank Jakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	150,000	100,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Riau*
PT Bank Bukopin Tbk	100,000	-	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	100,000	450,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
BPD Yogyakarta	100,000	-	*BPD Yogyakarta*
BPD Sulawesi Tengah	100,000	-	*BPD Sulawesi Tengah*
BPD Kalimantan Selatan	100,000	-	*BPD Kalimantan Selatan*
BPD Sumatera Selatan	100,000	-	*BPD Sumatera Selatan*
BPD Jambi	85,000	-	*BPD Jambi*
PT Bank Victoria International Tbk	75,000	-	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	65,000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
BPD Bali	55,000	-	*BPD Bali*
BPD Aceh Syariah	50,000	-	*BPD Aceh Syariah*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	400,000	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan) / *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Rupiah (lanjutan)			***Rupiah*** *(continued)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	200,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	200,000	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	140,000	*PT Bank Nationalnobu Tbk*
PT Bank ICBC Indonesia	-	150,000	*PT Bank ICBC Indonesia*
Lain-lain	66,000	175,000	*Others*
Negotiable Certificate of Deposit			*Negotiable Certificate of Deposit*
PT Bank Tabungan Negara Tbk	295,733	-	*PT Bank Tabungan Negara Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	199,579	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	98,341	-	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Bank Mizuho Indonesia	92,286	-	*PT Bank Mizuho Indonesia*
Lain-lain	97,499	-	*Others*
Deposito berjangka	1,106,500	2,224,256	*Time deposits*
	22,018,440	6,833,325	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Indonesia - FASBI	9,511,585	22,952,025	*Bank Indonesia - FASBI*
Call Money			*Call Money*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	269,450	275,700	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
PT Bank Mizuho Indonesia	202,088	-	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank ANZ Indonesia	155,768	304,649	*PT Bank ANZ Indonesia*
National Bank of Canada, London	67,362	-	*National Bank of Canada, London*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	275,700	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Deutsche Bank AG, Singapore	-	1,220,639	*Deutsche Bank AG, Singapore*
Credit Industriel Et Commercial, Singapore		318,428	*Credit Industriel Et Commercial, Singapore*
PT Bank DBS Indonesia	-	275,700	*PT Bank DBS Indonesia*
Banco do Brasil S.A., London	-	234,345	*Banco do Brasil S.A., London*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	179,205	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Hongkong Shanghai Bank Corp., London	-	132,853	*Hongkong Shanghai Bank Corp., London*
Lain-lain	19,944	207,464	*Others*
Deposito berjangka			*Time deposits*
KEB Hana Bank, Seoul	512,718	-	*KEB Hana Bank, Seoul*
KB Kookmin Bank, Seoul	224,162	-	*KB Kookmin Bank, Seoul*
Woori Bank, Seoul	189,946	-	*Woori Bank, Seoul*
DZ Bank AG, Singapore	155,419		*DZ Bank AG, Singapore*
Oversea Chinese Banking Corp., Hongkong	134,725	206,775	*Oversea Chinese Banking Corp., Hongkong*
HSH Nordbank AG, Singapore	134,725	-	*HSH Nordbank AG, Singapore*
Lain-lain	65,836	-	*Others*
	11,643,728	26,583,483	
Total	33,662,168	33,416,808	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**33,661,668**	**33,416,808**	***Net***

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Placements with other banks and Bank Indonesia based on currencies are as follows:

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

7. *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. *By type and currency (continued)*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	22,018,440	6,833,325	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	11,197,650	24,911,563	*United States Dollar*
Korean Won	405,440	-	*Korean Won*
Pound Sterling Inggris	20,694	132,854	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	19,944	1,539,066	*Chinese Yuan*
	11,643,728	26,583,483	
Total	33,662,168	33,416,808	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**33,661,668**	**33,416,808**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan

b. *By relationship*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Call Money	495,311	200,000	*Call Money*
Deposito berjangka	172,032	542,916	*Time deposits*
	667,343	742,916	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Call Money	-	310,162	*Call Money*
Deposito berjangka	45,683	-	*Time deposits*
Total pihak berelasi	713,026	1,053,078	*Total related party*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Indonesia - FASBI	17,912,502	2,294,069	*Bank Indonesia - FASBI*
Call Money	2,504,127	2,115,000	*Call Money*
Deposito berjangka	934,468	1,681,340	*Time deposits*
	21,351,097	6,090,409	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Indonesia - FASBI	9,511,585	22,952,025	*Bank Indonesia - FASBI*
Call Money	714,612	3,114,521	*Call Money*
Deposito berjangka	1,371,848	206,775	*Time deposits*
	11,598,045	26,273,321	
Total pihak ketiga	32,949,142	32,363,730	*Total third party*
Total	33,662,168	33,416,808	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(500)	-	*Allowance for impairment losses*
Neto	**33,661,668**	**33,416,808**	***Net***

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan sebagai lancar.

c. *By Bank Indonesia collectibility*

All placements with other banks and Bank Indonesia as of 31 December 2016 and 2015 were classified as current.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan) / *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)*

d. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	-	2,109	*Beginning balance*
Penyisihan/(pembalikan) selama tahun berjalan	500	(2,109)	*Allowance/(reversal) during the year*
Saldo akhir	**500**	**-**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan / *Placements with other banks pledged as collateral*

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

There were no placements with other banks pledged as collateral as 31 December 2016 and 2015.

f. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound Sterling* %	Won Korea/ *Korean Won* %	*Yuan China/ Chinese Yuan* %	
2016	3.90 - 10.00	0.01 - 1.77	0.00	1.25 - 1.35	1.53	*2016*
2015	5.50 - 11.25	0.32 - 0.60	0.00	0.00 - 0.00	0.00	*2015*

8. EFEK-EFEK / *MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *By type and currency*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Reksadana	2,391,964	2,396,516	2,343,703	2,089,679	*Mutual funds*
Obligasi subordinasi	1,158,357	1,159,118	734,250	767,161	*Subordinated bonds*
Obligasi	779,221	779,566	640,982	593,668	*Bonds*
Efek lainnya	353,138	350,413	116,998	155,896	*Other securites*
	4,682,680	4,685,613	3,835,933	3,606,404	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Reksadana	32,862	33,220	20,081	21,807	*Mutual funds*
Obligasi	-	-	68,925	75,997	*Bonds*
	32,862	33,220	89,006	97,804	
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	**4,715,542**	**4,718,833**	**3,924,939**	**3,704,208**	***Total fair value through profit or loss***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Rupiah					***Rupiah***
Sertifikat Bank Indonesia	4,000,000	3,848,014	1,100,000	1,057,766	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1,100,000	1,095,683	900,000	887,938	*Certificates Deposits of Bank Indonesia*
Reksadana	886,050	888,913	720,025	724,022	*Mutual funds*
Obligasi	2,881,000	2,832,901	569,000	557,255	*Bonds*
Obligasi subordinasi	654,000	664,438	209,950	209,229	*Subordinated bonds*
Negotiable Certificates of Deposits	-	-	170,000	164,876	*Negotiable Certificates of Deposits*
	9,521,050	9,329,949	3,668,975	3,601,086	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Sertifikat Bank Indonesia	6,709,305	6,681,806	-	-	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	1,087,720	1,068,055	1,154,587	1,080,793	*Bonds*
Reksadana	-	-	26,311	36,938	*Mutual funds*
	7,797,025	7,749,861	1,180,898	1,117,731	
Total tersedia untuk dijual	**17,318,075**	**17,079,810**	**4,849,873**	**4,718,817**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Rupiah					***Rupiah***
Obligasi, setelah dikurangi premi yang belum diamortisasi sebesar Rp849 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp2.849 pada tanggal 31 Desember 2015	2,037,999	2,037,150	1,428,043	1,340,509	*Bonds, net of unamortized premium Rp849 as of 31 December 2016 and Rp2,849 as of 31 December 2015*
Obligasi subordinasi	-	-	140,000	144,895	*Subordinated bonds*
	2,037,999	2,037,150	1,568,043	1,485,404	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Obligasi	20,154	20,064	55,180	55,374	*Bonds*
Total dimiliki hingga jatuh tempo	**2,058,153**	**2,057,214**	**1,623,223**	**1,540,778**	***Total held-to-maturity***
Total efek-efek	**24,091,770**	**23,855,857**	**10,398,035**	**9,963,803**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(91,107)		(36,309)	*Allowance for impairment losses*
Efek-efek - neto		**23,764,750**		**9,927,494**	***Marketable securities - net***

Perincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Marketable securities based on currencies are as follow:

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah	16,052,712	8,692,894	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	7,803,145	1,270,909	*United States Dollar*
Total	23,855,857	9,963,803	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91,107)	(36,309)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23,764,750**	**9,927,494**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

Harga pasar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual berkisar antara 99,51% - 102,83%, dan berkisar antara 93,82% - 102,61% masing-masing dari nilai nominal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas peningkatan atau penurunan nilai pasar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual (neto setelah pajak) sebesar Rp9.264 (rugi) dan Rp84.590 (rugi) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The market value of the available-for-sale securities as of 31 December 2016 and 2015, ranged between 99.51% - 102.83%, and between 93.82% - 102.61% of the nominal amounts, respectively. BNI recognized the unrealized gains or loss from increase or decrease in the market value of marketable securities categorized as available-for-sale (net of taxes) in the amount of Rp9,264 (loss) and Rp84,590 (loss) for the period and year ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	4,278,041	871,211	*Rupiah*
Mata uang asing	408,544	485,093	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	4,686,585	1,356,304	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	11,774,671	7,821,683	*Rupiah*
Mata uang asing	7,394,601	785,816	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	19,169,272	8,607,499	*Total third parties*
Total	23,855,857	9,963,803	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91,107)	(36,309)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23,764,750**	**9,927,494**	***Net***

c. Berdasarkan penerbit / *c. By issuer*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Korporasi	8,951,757	5,725,280	*Corporates*
Bank	3,278,597	2,292,820	*Banks*
Bank Indonesia	11,625,503	1,945,703	*Bank Indonesia*
Total	23,855,857	9,963,803	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91,107)	(36,309)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**23,764,750**	**9,927,494**	***Net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

	2016		
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi / ***Fair value through profit or loss***			
Rupiah / ***Rupiah***			
Reksadana / *Mutual funds*	-	-	2,396,516
Obligasi / *Bonds*	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	779,566
Obligasi subordinasi / *Subordinated bonds*	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	1,159,118
Efek lainnya / *Other securities*	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	350,413
			4,685,613
Mata uang asing / ***Foreign currencies***			
Reksadana / *Mutual funds*	-		33,220
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi / ***Total fair value through profit and loss***			**4,718,833**
Tersedia untuk dijual / ***Available-for-sale***			
Rupiah / ***Rupiah***			
Sertifikat Bank Indonesia / *Certificates of Bank Indonesia*	-	-	3,848,014
Sertifikat Deposito Bank Indonesia / *Certificates Deposits of Bank Indonesia*	-	-	1,095,683
Reksadana / *Mutual funds*	-	-	888,913
Obligasi subordinasi / *Subordinated bonds*	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	664,438
Obligasi / *Bonds*			
Bank BRI 25/05/19 / *Bank BRI 25/05/19*	Pefindo	idAAA	199,750
Bank Mandiri Thp I Th 2016 Seri C / *Bank Mandiri Thp I Th 2016 Seri C*	Pefindo	idAAA	171,681
PNM Tahap II Th 2016 Seri A / *PNM Tahap II Th 2016 Seri A*	Pefindo	idA	147,764
PNM Tahap II Th 2016 Seri B / *PNM Tahap II Th 2016 Seri B*	Pefindo	idA+	135,656
Bank Panin Tahap II Th 2016 / *Bank Panin Tahap II Th 2016*	Pefindo	idAA	115,162
Bank BRI 01/12/19 / *Bank BRI 01/12/19*	Pefindo	idAAA	100,906
Medco Energi Internasional Bond III Tahun 2012 / *Medco Energi Internasional Bond III Tahun 2012*	Pefindo	idAAA	100,030
BJB MTN-BJB / *BJB MTN-BJB*	Pefindo	idAA-	100,000
Bank Resona Perdania VI Th 2016 / *Bank Resona Perdania VI Th 2016*	Pefindo	AA(idn)	100,000
LPEI BEXI-2023 / *LPEI BEXI-2023*	Pefindo	idAAA	99,414
Mandiri/8.5B / *Mandiri/8.5B*	Pefindo	idAAA	94,717
LPEI BEXI-2019 / *LPEI BEXI-2019*	Pefindo	idAA-	93,551
Bank Sulselbar Tahap II Th 2016 / *Bank Sulselbar Tahap II Th 2016*	Pefindo	idA+	93,002
Adira Finance Tahap I th 2016 / *Adira Finance Tahap I th 2016*	Pefindo	idAA-	92,738
Sarana Multigriya Financial Thp VI 2016 / *Sarana Multigriya Financial VI 2016*	Pefindo	idAA+	77,548
Waskita Karya thp II th 2016 / *Waskita Karya thp II th 2016*	Pefindo	idA-	73,516
Bank BTN BTN-8A/8/19N / *Bank BTN BTN-8A/8/19N*	Pefindo	idAA+	71,853
Bank UOB Indonesia I Tahun 2015 Seri C / *Bank UOB Indonesia I Tahun 2015 Seri C*	Pefindo	idAA-	71,239
LPEI BEXI-2021 / *LPEI BEXI-2021*	Pefindo	idAAA	68,219
Maybank Finance Thp III Th 2016 B / *Maybank Finance Thp III Th 2016 B*	Pefindo	AA(idn)	68,044
Indosat VIII Tahun 2012 Seri A / *Indosat VIII Tahun 2012 Seri A*	Pefindo	idAA+	59,915
Maybank Finance Thp II Th 2016 B / *Maybank Finance Thp II Th 2016 B*	Pefindo	AA(idn)	53,798

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2016			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				***Available-for-sale** (continued)*
Rupiah				***Rupiah** (continued)*
Maybank Finance Thp II Th 2016 A	Pefindo	AA+(idn)	40,811	*Maybank Finance Thp II Th 2016 A*
Adira Finance Tahap I th 2015	Pefindo	idAA+	39,278	*Adira Finance Thp IV th 2016 Seri C*
Bank Panin Tahap I Th 2016	Pefindo	idAAA	39,040	*Bank Panin Tahap I Th 2016*
Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C	Pefindo	idAA+	35,416	*Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C*
Angkasa Pura I 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	34,794	*Angkasa Pura I 2016 Seri B*
Indosat tahap I Th 2014 Seri B	Pefindo	idAA+	25,967	*Indosat tahap I Th 2014 Seri B*
Jasa Marga JM/XIV-20-U	Pefindo	AAA(idn)	24,738	*Jasa Marga JM/XIV-20-U*
Indosat Tahap II	Pefindo	idAAA	20,782	*Indosat Tahap II*
BII Finance Thp I Th 2015 Seri A	Pefindo	AA+(idn)	20,365	*BII Finance Thp I Th 2015 Seri A*
Bank Panin Tahap I Th 2012	Pefindo	AA+(idn)	20,140	*Bank Panin Tahap I Th 2012*
Indosat tahap I Th 2014 Seri D	Pefindo	idAA	20,067	*Indosat tahap I Th 2014 Seri D*
Bank CIMB Niaga BNGAIJ-IB	Pefindo	idAA	19,938	*Bank CIMB Niaga BNGAIJ-IB B*
Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B	Pefindo	AA(idn)	19,807	*Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B*
Indosat tahap II Th 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	17,992	*Indosat tahap II Th 2015 Seri B*
Telkom Tahap I	Pefindo	idAA-	15,457	*Telkom Tahap I*
Mitra Adiperkasa Tahap I	Pefindo	AAA(idn)	15,430	*Mitra Adiperkasa Tahap I*
Mandiri Tunas Finance Thp II 2016 Seri B	Pefindo	idAAA	15,004	*Mandiri Tunas Finance 2016 Seri B*
Waskita Karya Tahap I Th 2016	Pefindo	idAA+	14,865	*Waskita Karya Tahap I Th 2016*
Indosat Tahap IV Th 2016 Seri E	Pefindo	AA+(idn)	14,394	*Indosat Tahap IV Th 2016 Seri E*
Indosat Tahap II Th 2015 Seri C	Pefindo	idAA+	10,206	*Indosat Tahap II Th 2015 Seri C*
Bank Exim Tahap VII 2016 Seri C	Pefindo	idAA+	10,127	*Bank Exim Tahap VII 2016 Seri C*
Bank BTN Tahap I	Pefindo	AA(idn)	10,039	*Bank BTN Tahap I*
Lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	159,741	*Others*
			9,329,949	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Sertifikat Bank Indonesia	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	6,681,806	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi				*Bonds*
Pelindo II	S&P	BB+	267,103	*Pelindo II*
Pertamina	S&P	BB+	70,838	*Pertamina*
Bank Boston USA	Moodys	Ba1	67,309	*Bank Boston USA*
Suntrust USA	Moodys	Baa2	67,305	*Suntrust USA*
Huntington USA	Moodys	Baa2	66,742	*Huntington USA*
Bank of America	Moodys	Baa3	60,805	*Bank of America*
Corestates Cap III / Wells Fargo	Fitch	BBB+	60,623	*Corestates Cap III / Wells Fargo*
M&T Bank USA	Moodys	Baa2	60,054	*M&T Bank USA*
JP Morgan Chase USA	Moodys	Baa2	58,934	*JP Morgan Chase USA*
EIBINDO	S S&P	BB+	54,033	*EIBINDO*
Hutch Whamp Int 09 Ltd	Fitch	AA-	45,250	*Hutch Whamp Int 09 Ltd*
Bangkok Bank Pub Co	Fitch	AA-	43,100	*Bangkok Bank Pub Co*
Korea Development Bank	Moodys	Aa2	33,577	*Korea Development Bank*
ICBC Asia Ltd	Moodys	Baa2	28,608	*ICBC Asia Ltd*
CIMB Bank Bhd	S&P	A-	26,985	*CIMB Bank Bhd*
Shinhan Bank	S&P	A+	26,880	*Shinhan Bank*
Pertamina 2023	Moodys	Baa3	26,827	*Pertamina 2023*
Amresco USA	Moodys	A3	2,891	*Amresco USA*
Lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	191	*Others*
			7,749,861	
Total tersedia untuk dijual			**17,079,810**	***Total available for sale***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2016			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***	
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi				*Bonds*
Protelindo I 2014	Fitch	idAAA	500,000	*Protelindo I 2014*
PT Intan Baruprana Finance	Pefindo	idBBB-	300,000	*PT Intan Baruprana Finance*
Bank Panin Thp I Th 2016	Pefindo	idAAA	200,320	*Bank Panin Thp I Th 2016*
Bumi Serpong Damai Thp I Thn 2016 Seri A	Pefindo	idAA-	150,240	*Bumi Serpong Damai Thp I Thn 2016 Seri A*
Garuda Indonesia 1A	Fitch	idBBB+	136,000	*Garuda Indonesia 1A*
BTN-IA/2015	Fitch	BBB+(idn)	120,000	*BTN-IA/2015*
Indosat	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	*Indosat*
Sukuk Mudharabah Maybank Thp II	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	*Sukuk Mudharabah Maybank Thp II*
Sukuk Mudharabah BSM 2016	Pefindo	idAA-(sy)	50,000	*Sukuk Mudharabah BSM 2016*
Sukuk Mudharabah BRIS 2016	Fitch	idA+(sy)	46,000	*Sukuk Mudharabah BRIS 2016*
Maybank Indonesia Thp II Thn 2016	Pefindo	idAAA	40,064	*Maybank Indonesia Thp II Thn 2016*
Mandiri Tunas Finance Tahap II Th 2016 Seri B	Pefindo	idAA+	35,056	*Mandiri Tunas Finance Tahap II Th 2016 Seri B*
Bank Permata Thp I Th 2013	Pefindo	idAA+	32,189	*Bank Permata Thp I Th 2013*
BII Tahap II Tahun 2012 seri B	Pefindo	idAAA	30,300	*BII Tahap II Tahun 2012 seri B*
Sukuk Ijarah Indosat Thp IV 2016 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	30,000	*Indosat Thp IV 2016 Seri B*
Adira Multifinance	Pefindo	idAAA(sy)	25,000	*Adira Multifinance*
Muamalat 2012	Pefindo	idA-(sy)	24,368	*Muamalat 2012*
Indosat Thp II Th 2015 Seri C	Pefindo	idAAA	20,052	*Indosat Thp II Th 2015 Seri C*
Maybank Finance Thp III Th 2016 Seri B	Pefindo	AA+(idn)	20,004	*Maybank FinanceThp III Th 2016*
Sukuk Ijarah Indosat Thp IV 2016 Seri A	Pefindo	idAAA(sy)	20,000	*Indosat Thp IV 2016 Seri A*
Indosat V/2012	Pefindo	idAAA(sy)	16,920	*Indosat V/2012*
Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 Seri B	Pefindo	idAA+	15,168	*Bank BTPN Tahap II Th.2012 Seri B*
Sukuk Ijarah BKLJT I Summarecon Agung Thp II 2014	Pefindo	A+	15,000	*Sukuk Ijarah BKLJT I Summarecon Agung Thp II 2014*
PLN II/2007	Pefindo	idAAA(sy)	14,000	*PLN II/2007*
Sukuk Mudharabah II Mayora Indah	Pefindo	idAA-(sy)	12,990	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah*
Bank Panin III Tahun 2010	Pefindo	idAAA	10,101	*Bank Panin III Tahun 2010*
Bank Muamalat 2013	Pefindo	idA-(sy)	10,000	*Bank Muamalat 2013*
Xl Axiata Thp I Thn 2015 Seri B	Pefindo	AAA	8,000	*Xl Axiata Thp I Thn 2015 Seri B*
Lainnya	Beragam/Various	Beragam/*Various*	55,378	*Others*
			2,037,150	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Obligasi				*Bonds*
Majapahit Holding BV	Pefindo	AAA	20,064	*Majapahit Holding BV*
Total dimiliki hingga jatuh tempo			**2,057,214**	***Total held-to-maturity securities***
Total efek-efek			**23,855,857**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(91,107)	*Allowance for impairment losses*
Efek-efek - neto			**23,764,750**	***Marketable securities - net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2015			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi				***Fair value through profit or loss***
Rupiah				***Rupiah***
Reksadana	-	-	2,089,679	*Mutual funds*
Obligasi subordinasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	767,161	*Subordinated bonds*
Obligasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	593,668	*Bonds*
Efek lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	155,896	*Other securities*
			3,606,404	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	21,807	*Mutual funds*
Obligasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	75,997	*Bonds*
			97,804	
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi			**3,704,208**	***Total fair value through profit and loss***
Tersedia untuk dijual				***Available-for-sale***
Rupiah				***Rupiah***
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	1,057,766	*Certificates of Bank Indonesia*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	887,938	*Certificates Deposits of Bank Indonesia*
Reksadana	-	-	724,022	*Mutual funds*
Negotiable Certificates of Deposits	-	-	164,876	*Negotiable Certificates of Deposits*
Obligasi subordinasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	209,229	*Subordinated bonds*
Obligasi				*Bonds*
Medco Energi Internasional Bond III Tahun 2012	Pefindo	idAA-	96,864	*Medco Energi Internasional Bond III Tahun 2012*
OCBC NISP 1C 2016	Pefindo	idAAA	74,828	*OCBC NISP 1C 2016*
Bank UOB Indonesia I Tahun 2015 Seri C			69,433	*Bank UOB Indonesia I Tahun 2015 Seri C*
Bank BII Bonds II Seri B 2012	Pefindo	idAAA	48,309	*Bank BII Bonds II Seri B 2012*
Bank BTPN 3A-2013	Pefindo	idAA-	29,915	*Bank BTPN 3A-2013*
Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C			29,538	*Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C*
Obligasi Jasa Marga XIV		idAA	23,456	*Obligasi Jasa Marga XIV*
Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E			19,766	*Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E*
CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Seri B	Pefindo	idAAA	19,325	*CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Seri B*
Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	17,869	*Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri B*
Bank Tabungan Negara Seri XII	Pefindo	idAA	17,444	*Bank Tabungan Negara Seri XII*
OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Seri C	Pefindo	idAAA	15,963	*OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 Seri C*
Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	14,690	*Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B*
Indosat VIII Tahun 2012 Seri A	Pefindo	idAAA	10,430	*Indosat VIII Tahun 2012 Seri A*
Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri B	Pefindo	idAAA	9,887	*Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri B*
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Seri A	Pefindo	idA	7,995	*Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Seri A*
Indosat Tahap I Tahun 2015 Seri B	Pefindo	idAAA	4,982	*Indosat Tahap I Tahun 2015 Seri B*
Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Seri A	Pefindo	idAA-	4,976	*Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Seri A*
Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	Pefindo	idAA	4,801	*Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B*
PLN Tahap II Tahun 2013	Pefindo	idAAA	4,748	*PLN Tahap II Tahun 2013*
Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	Fitch	AA(idn)	4,744	*Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C*
PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2013	Pefindo	idBBB+	4,573	*PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2013*
Lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	22,719	*Others*
			3,601,086	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	36,938	*Mutual funds*
Obligasi				*Bonds*
Pelindo II	S&P	BB+	273,066	*Pelindo II*
Pertamina 2023	S&P	BB+	73,135	*Pertamina 2023*
PT Pertamina Persero	Moodys	Baa3	62,894	*PT Pertamina Persero*
Merrill Lynch USA	Moodys	Baa3	59,315	*Merrill Lynch USA*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

8. *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. *By rating (continued)*

	2015			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai tercatat/ *Carrying Value*	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				***Available-for-sale** (continued)*
Mata uang asing (lanjutan)				***Foreign currencies** (continued)*
M&T Bank USA	Moodys	Baa2	58,974	*M&T Bank USA*
Wachovia Bank USA	Fitch	BBB+	58,626	*Wachovia Bank USA*
Bank Boston USA	Moodys	Ba1	58,242	*Bank Boston USA*
JP Morgan Chase USA	Moodys	Baa2	57,035	*JP Morgan Chase USA*
Suntrust USA	Moodys	Baa2	55,571	*Suntrust USA*
EIBINDO	S&P	BB+	55,554	*EIBINDO*
Huntington USA	Moodys	Baa2	53,719	*Huntington USA*
Hutch Whamp Int 09 Ltd	Fitch	A-	47,907	*Hutch Whamp Int 09 Ltd*
Bangkok Bank, Bangkok	Fitch	BBB+	44,674	*Bangkok Bank, Bangkok*
Korea Development Bank	Moodys	Aa3	34,094	*Korea Development Bank*
ICBC Asia	Moodys	Baa2	29,605	*ICBC Asia*
CIMB Bank BHD	S&P	A-	27,628	*CIMB Bank BHD*
Shinhan Bank	S&P	A	27,278	*Shinhan Bank*
Lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	3,476	*Others*
			1,117,731	
Total tersedia untuk dijual			**4,718,817**	***Total available for sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held-to-maturity***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi subordinasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	144,895	*Subordinated bonds*
Obligasi				*Bonds*
Obligasi I Protelindo tahun 2014	Fitch	AA-(idn)	500,000	*Obligasi I Protelindo tahun 2014*
MTN I Intan Baruprana Finance 2014	ICRA	(Idr)BBB+	300,000	*MTN I Intan Baruprana Finance 2014*
Obligasi Berkelanjutan Garuda Indonesia Tahap 1	Fitch	BBB+(idn)	136,000	*Obligasi Berkelanjutan Garuda Indonesia Tahap 1*
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Seri A	Fitch	AA(idn)	120,000	*Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Seri A*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri B	Pefindo	idAAA(sy)	50,000	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri B*
Sukuk Ijarah XL Axiata Tahap I Tahun 2015	Pefindo	AAA(idn)	50,000	*Sukuk Ijarah XL Axiata Tahap I Tahun 2015*
Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 SR B	Fitch	AA+(idn)	29,358	*Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 SR B*
Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015	Pefindo	idAAA(sy)	25,000	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015*
Sukuk *Ijarah* Indosat V Tahun 2012	Pefindo	idAAA(sy)	18,889	*Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012*
Sukuk *Ijarah* Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II 2014	Pefindo	idA+(sy)	15,000	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II 2014*
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 Seri B	Fitch	AA+(idn)	14,952	*Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 Seri B*
Sukuk *Ijarah* PLN II Tahun 2007	Pefindo	idAAA(sy)	14,000	*Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin I Tahun 2012	Pefindo	idAA	10,002	*Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin I Tahun 2012*
Sukuk *Mudharabah* II Mayora Indah Tahun 2012	Pefindo	idAA-(sy)	12,964	*Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012*
Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Tahap 1 Tahun 2011	Pefindo	idAAA	5,006	*Obligasi Berkelanjutan Adira Dinamika Tahap 1 Tahun 2011*
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A	Pefindo	idAAA	5,000	*Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A*
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012	Fitch	AAA(idn)	4,896	*Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012*
Obligasi Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri B	Pefindo	idAA+	3,024	*Obligasi Perum Pegadaian XI Tahun 2006 Seri B*
Lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	26,418	*Others*
			1,485,404	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Obligasi				*Bonds*
Majapahit Holding BV	Pefindo	AA+	55,374	*Majapahit Holding BV*
Total dimiliki hingga jatuh tempo			**1,540,778**	***Total held-to-maturity securities***
Total efek-efek			9,963,803	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(36,309)	*Allowance for impairment losses*
Efek-efek - neto			**9,927,494**	***Marketable securities - net***

Underlying aset utama dari reksa dana yang dimiliki oleh Grup adalah deposit dan Obligasi Pemerintah.

The main underlying assets of the Group's mutual funds consist of deposits and government bonds.

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

e. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *e. By Bank Indonesia collectibility*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	23,230,984	6,078	9,610,622	2,586	*Pass*
Kurang lancar	624,692	85,021	353,000	33,723	*Substandard*
Macet	181	8	181	-	*Loss*
	23,855,857	91,107	9,963,803	36,309	

f. Cadangan kerugian penurunan nilai / *f. Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Saldo awal	36,309	5,002	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	55,290	27,633	*Allowance during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(492)	3,674	*Foreign exchange translation adjustments*
Saldo akhir	**91,107**	**36,309**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

g. Tingkat suku bunga per tahun / *g. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku Bunga Kontrak:			*Contractual Rate:*
2016	6.05 - 13.60	0.88 - 7.75	*2016*
2015	0.09 - 13.60	0.08 - 13.10	*2015*
Suku Bunga Efektif:			*Effective Interest Rate:*
2016	6.05 - 11.36	0.86 - 10.10	*2016*
2015	6.85 - 12.75	0.86 - 10.10	*2015*

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA / *9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	663,853	393,323	*Domestic Documentary Letters of Credit*
Wesel Ekspor	95,106	190,481	*Export Bills*
Tagihan lainnya:			*Other receivables:*
- *Open account financing*	4,788,652	2,771,480	*Open account financing -*
	5,547,611	3,355,284	

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan) / *9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Wesel Ekspor	2,238,423	1,587,892	*Export Bills*
Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	-	351	*Domestic Documentary Letters of Credit*
Tagihan lainnya:			*Other receivables:*
- *Open account financing*	84,557	79,506	*Open account financing -*
- Tagihan transaksi *L/C Sight*	728,472	3,834,790	*L/C Sight receivables -*
	3,051,452	5,502,539	
Total	8,599,063	8,857,823	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31,268)	(26,379)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8,567,795**	**8,831,444**	***Net***

Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Bills and other receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	5,547,611	3,355,284	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2,397,451	5,073,755	*United States Dollar*
Yuan Cina	647,113	427,166	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	4,713	1,248	*Japanese Yen*
Euro	2,175	370	*Euro*
	3,051,452	5,502,539	
Total	8,599,063	8,857,823	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31,268)	(26,379)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8,567,795**	**8,831,444**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	5,152,134	2,895,868	*Rupiah*
Mata uang asing	53,464	351	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	5,205,598	2,896,219	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	395,477	459,416	*Rupiah*
Mata uang asing	2,997,988	5,502,188	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	3,393,465	5,961,604	*Total third parties*
Total	8,599,063	8,857,823	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31,268)	(26,379)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**8,567,795**	**8,831,444**	***Net***

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan) / *BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *By Bank Indonesia collectibility*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	8,599,063	(31,268)	8,857,823	(26,379)	*Pass*

d. Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Saldo awal	26,379	1,061	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	21,133	31,346	*Allowance during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(16,244)	(6,028)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**31,268**	**26,379**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Euro %	
2016	8.21 - 9.21	0.80 - 6.32	1.00 - 3.00	*2016*
2015	0.00 - 9.00	0.00 - 2.00	-	*2015*

10. TAGIHAN AKSEPTASI / *ACCEPTANCES RECEIVABLE*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / *By party and currency*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Debitur non-bank	7,812,796	2,085,978	*Non-bank debtors*
Bank	32,875	185,265	*Banks*
	7,845,671	2,271,243	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Debitur non-bank	6,025,646	8,227,851	*Non-bank debtors*
Bank	937,911	400,707	*Banks*
	6,963,557	8,628,558	
Total	14,809,228	10,899,801	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(84,834)	(79,188)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**14,724,394**	**10,820,613**	***Net***

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang (lanjutan) / *a. By party and currency (continued)*

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: / *Acceptances receivable based on currencies are as follows:*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	**7,845,671**	**2,271,243**	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	6,636,637	7,962,493	*United States Dollar*
Dolar Singapura	159,823	86,554	*Singapore Dollar*
Euro	120,321	182,671	*Euro*
Yen Jepang	42,637	80,589	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	2,462	4,335	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan Cina	1,677	311,916	*Chinese Yuan*
	6,963,557	8,628,558	
Total	14,809,228	10,899,801	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(84,834)	(79,188)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**14,724,394**	**10,820,613**	***Net***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	2,544,188	681,051	*Rupiah*
Mata uang asing	571,520	555,823	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	3,115,708	1,236,874	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	5,301,483	1,590,192	*Rupiah*
Mata uang asing	6,392,037	8,072,735	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	11,693,520	9,662,927	*Total third parties*
Total	14,809,228	10,899,801	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(84,834)	(79,188)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**14,724,394**	**10,820,613**	***Net***

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *c. By Bank Indonesia collectibility*

	31 Desember/*December* 2016		2015		
	Pokok/ *Principal*	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Pokok/ *Principal***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	
Lancar	14,809,228	(84,834)	10,820,668	(52,511)	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	2,496	(849)	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	76,637	(25,828)	*Substandard*
	14,809,228	**(84,834)**	**10,899,801**	**(79,188)**	

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)*

d. Cadangan kerugian penurunan nilai / *d. Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	79,188	64,622	*Beginning balance*
(Pembalikan)/penyisihan selama tahun berjalan	(47,654)	45,695	*(Reversal)/allowance (during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	53,300	(31,129)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**84,834**	**79,188**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF / *11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE*

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, currency swaps, interest rate swaps and spot transactions for financing, trading and hedging purposes.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2016			
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount foreign currency (full amount)*	**Nilai wajar/*Fair values***		
Instrumen		**Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable***	**Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable***	***Instruments***
Terkait Nilai Tukar				***Exchange Rate Related***
Kontrak berjangka - beli				*Forward contract - buy*
USD	134,933,000	31,595	(4,167)	*USD*
Kontrak berjangka - jual				*Forward contract - sell*
JPY	169,411,600	717	(544)	*JPY*
USD	72,923,045	2,804	(1,753)	*USD*
Swap mata uang asing - beli				*Foreign currency swaps – buy*
EUR	25,089,206	-	(13,284)	*EUR*
USD	1,169,798,000	35,807	(15,102)	*USD*
Swap mata uang asing - jual				*Foreign currency swaps - sell*
AUD	1,500,000	-	(1)	*AUD*
CNY	86,929,579	1,538	-	*CNY*
EUR	25,000,000	4,149	-	*EUR*
GBP	500,000	142	-	*GBP*
USD	1,548,264,901	33,393	(297,957)	*USD*
SGD	826,565	-	(13)	*SGD*
HKD	69,758,088	-	(55)	*HKD*
Spot mata uang asing - beli				*Foreign currency spots - buy*
EUR	2,000,000	211	-	*EUR*
USD	92,815,000	1,316	(218)	*USD*
Spot mata uang asing - jual				*Foreign currency spots - sell*
EUR	2,000,000	59	-	*EUR*
USD	81,650,000	177	(559)	*USD*

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Instrumen / *Instruments*	2016 Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount foreign currency (full amount)*	2016 Nilai wajar/*Fair values* Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable*	2016 Nilai wajar/*Fair values* Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable*
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga / ***Exchange and Interest Rate Related***			
Swap mata uang asing dan suku bunga / *Cross currency swaps and interest rate*			
USD	187,930,905	89,165	(77,217)
Swap atas suku bunga / *Interest rate swaps*			
USD	740,000,000	48,791	-
		249,864	**(410,870)**

Instrumen / *Instruments*	2015 Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount foreign currency (full amount)*	2015 Nilai wajar/*Fair values* Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable*	2015 Nilai wajar/*Fair values* Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable*
Terkait Nilai Tukar / ***Exchange Rate Related***			
Kontrak berjangka - beli / *Forward contract - buy*			
JPY	120,318,000	-	(200)
USD	15,239,874	189	(4,987)
Kontrak berjangka - jual / *Forward contract - sell*			
USD	121,994,892	15,319	(1,636)
Swap mata uang asing - beli / *Foreign currency swaps – buy*			
CNY	109,363,588	2,085	-
HKD	11,624,748	21	(35)
JPY	4,213,017,080	-	(280)
USD	576,175,874	17,103	(144,717)
Swap mata uang asing - jual / *Foreign currency swaps - sell*			
AUD	2,500,000	-	(374)
USD	839,818,772	196,720	(20,681)
Spot mata uang asing - beli / *Foreign currency spots - buy*			
EUR	2,100,000	-	(41)
USD	56,793,472	149	(580)
Spot mata uang asing - jual / *Foreign currency spots - sell*			
EUR	2,100,000	43	-
USD	46,796,896	361	(93)
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga / ***Exchange and Interest Rate Related***			
Swap mata uang asing dan suku bunga / *Cross currency swaps and interest rate*			
USD	338,815,726	208,711	(987,933)
		440,701	**(1,161,557)**

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Tagihan derivatif			***Derivatives receivables***
Pihak berelasi			***Related parties***
Mata uang asing	48,105	118,902	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	48,105	118,902	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Mata uang asing	201,759	321,799	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	201,759	321,799	*Total third parties*
Total	**249,864**	**440,701**	***Total***
Liabilitas derivatif			***Derivatives payable***
Pihak berelasi			***Related parties***
Mata uang asing	10,979	2,745	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	10,979	2,745	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Mata uang asing	399,891	1,158,812	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	399,891	1,158,812	*Total third parties*
Total	**410,870**	**1,161,557**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 digolongkan lancar.

Based on the Bank's management review and evaluation, all derivatives receivables as of 31 December 2016 and 2015 were classified as current.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / 12. LOANS

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46h.

Loans to related parties are disclosed in Note 46h.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / a. By type and currency

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	140,296,949	124,065,512	*Working capital*
Investasi	80,482,524	59,552,179	*Investment*
Konsumen	73,343,599	64,034,181	*Consumer*
Sindikasi	38,072,462	28,661,601	*Syndicated*
Karyawan	3,318,245	3,312,696	*Employee*
Program pemerintah	650,539	771,899	*Government programs*
	336,164,318	280,398,068	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	34,420,711	28,313,176	*Working capital*
Investasi	14,622,259	13,159,453	*Investment*
Sindikasi	7,908,922	4,078,102	*Syndicated*
Konsumen	155,401	151,129	*Consumer*
Karyawan	3,781	5,221	*Employee*
	57,111,074	45,707,081	
Total	393,275,392	326,105,149	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,680,865)	(12,038,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**376,594,527**	**314,066,531**	***Net***

Perincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Loans based on currencies are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah	336,164,318	280,398,068	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	54,737,407	45,316,557	*United States Dollar*
Yuan China	1,509,320	-	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	528,202	123,515	*Japanese Yen*
Euro	102,152	43,342	*Euro*
Dolar Singapura	101,904	89,845	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	75,190	75,393	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	56,809	58,429	*Great Britain Pound Sterling*
Won Korea	90	-	*Korean Won*
	57,111,074	45,707,081	
Total	393,275,392	326,105,149	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(16,680,865)	(12,038,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**376,594,527**	**314,066,531**	***Net***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sindikasi	31,253,012	18,364,950	*Syndicated*
Modal kerja	28,611,167	10,850,765	*Working capital*
Investasi	5,471,602	12,235,836	*Investment*
Karyawan	32,212	30,981	*Employee*
Konsumen	23,883	53,020	*Consumer*
	65,391,876	41,535,552	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	9,392,983	3,695,770	*Working capital*
Investasi	3,408,723	3,186,040	*Investment*
	12,801,706	6,881,810	
Total pihak berelasi	78,193,582	48,417,362	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	111,685,782	113,214,747	*Working capital*
Investasi	75,010,922	47,316,343	*Investment*
Konsumen	73,319,716	63,981,161	*Consumer*
Sindikasi	6,819,450	10,296,651	*Syndicated*
Karyawan	3,286,033	3,281,715	*Employee*
Program pemerintah	650,539	771,899	*Government programs*
	270,772,442	238,862,516	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	25,027,728	24,617,406	*Working capital*
Investasi	11,213,536	9,973,413	*Investment*
Sindikasi	7,908,922	4,078,102	*Syndicated*
Konsumen	155,401	151,129	*Consumer*
Karyawan	3,781	5,221	*Employee*
	44,309,368	38,825,271	
Total pihak ketiga	315,081,810	277,687,787	*Total third parties*
Total	393,275,392	326,105,149	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,680,865)	(12,038,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**376,594,527**	**314,066,531**	***Net***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

c. Berdasarkan sektor ekonomi / *c. By economic sector*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	59,308,474	47,906,357	*Trading, restaurants and hotels*
Perindustrian	58,115,271	55,371,820	*Manufacturing*
Pertanian	39,866,141	28,117,344	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	29,581,444	23,939,820	*Business services*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	20,021,846	22,747,753	*Transportation, warehousing and communications*
Listrik, gas dan air	20,254,818	11,503,246	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	19,588,019	12,854,704	*Construction*
Jasa pelayanan sosial	10,060,457	8,325,420	*Social services*
Pertambangan	2,966,458	2,439,529	*Mining*
Lain-lain	76,401,390	67,192,077	*Others*
	336,164,318	280,398,068	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Perindustrian	14,975,009	11,016,933	*Manufacturing*
Pertambangan	11,217,984	12,353,941	*Mining*
Jasa dunia usaha	9,018,513	5,168,196	*Business services*
Listrik, gas dan air	6,751,651	5,989,133	*Electricity, gas and water*
Pertanian	3,261,439	769,449	*Agriculture*
Perdagangan, restoran dan hotel	2,272,842	2,050,049	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2,183,177	1,060,821	*Transportation, warehousing and communications*
Jasa pelayanan sosial	1,186,073	344,540	*Social services*
Konstruksi	491,162	179,895	*Construction*
Lain-lain	5,753,224	6,774,124	*Others*
	57,111,074	45,707,081	
Total	393,275,392	326,105,149	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,680,865)	(12,038,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**376,594,527**	**314,066,531**	***Net***

d. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual / *d. By assessment as collective and individual*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Individual	21,046,895	11,088,520	*Individual*
Kolektif	372,228,497	315,016,629	*Collective*
Total	393,275,392	326,105,149	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,680,865)	(12,038,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**376,594,527**	**314,066,531**	***Net***

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

e. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia / *e. By Bank Indonesia collectibility*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	369,622,882	(4,922,769)	307,862,525	(4,394,115)	*Current*
Dalam perhatian khusus	12,008,235	(2,099,659)	9,533,014	(1,965,618)	*Special mention*
Kurang lancar	1,593,966	(867,910)	2,722,628	(1,306,213)	*Substandard*
Diragukan	838,648	(526,856)	848,223	(310,942)	*Doubtful*
Macet	9,211,661	(8,263,671)	5,138,759	(4,061,730)	*Loss*
	393,275,392	**(16,680,865)**	**326,105,149**	**(12,038,618)**	

f. Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi / *f. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Perindustrian	2,755,974	(2,649,062)	1,791,522	(1,288,138)	*Manufacturing*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,566,562	(1,329,041)	587,746	(288,944)	*Transportation, warehousing and communications*
Perdagangan, restoran dan hotel	2,163,729	(1,628,930)	1,844,724	(1,211,834)	*Trading, restaurants and hotels*
Pertambangan	1,135,756	(1,107,551)	1,285,364	(875,341)	*Mining*
Jasa dunia usaha	974,171	(920,697)	550,354	(198,517)	*Business services*
Konstruksi	465,468	(428,515)	543,933	(454,377)	*Construction*
Pertanian	240,758	(186,568)	239,869	(192,309)	*Agriculture*
Jasa pelayanan sosial	70,653	(56,527)	268,681	(193,373)	*Social services*
Listrik, gas dan air	138,929	(132,602)	12,691	(3,052)	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	2,132,275	(1,218,944)	1,584,726	(973,000)	*Others*
Total	**11,644,275**	**(9,658,437)**	**8,709,610**	**(5,678,885)**	***Total***

Rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara gross (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,96% dan 2,67% (rasio untuk BNI saja 2,96% dan 2,70% masing-masing pada tanggal tanggal 31 Desember 2016 dan 2015), sedangkan rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara neto pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,50% dan 0,93% (rasio untuk BNI saja 0,44% dan 0,91% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015).

The non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a gross basis, (before deducting the allowance for impairment losses), as of 31 December 2016 and 2015, were 2.96% and 2.67%, respectively (the ratios for BNI only were 2.96% and 2.70% as of 31 December 2016 and 2015, respectively), while the non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a net basis as of 31 December 2016 and 2015, were 0.50% and 0.93%, respectively (the ratios for BNI only were 0.44% and 0.91% as of 31 December 2016 and 2015, respectively).

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

g. Tingkat suku bunga per tahun / *g. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	*Euro* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	
Bunga kontrak					*Contractual rates*
2016	4.00 - 22.00	2.25 - 9.00	0.75	6.50 - 7.00	*2016*
2015	4.09 - 22.00	5.00 - 7.25	2.50	7.00	*2015*
Bunga efektif					*Effective interest rate*
2016	6.72 - 30.36	2.52 - 9.60	0.75	7.10 - 7.25	*2016*
2015	7.20 - 41.12	4.68 - 7.08	2.50	7.10 - 7.25	*2015*

h. Pinjaman yang direstrukturisasi / *h. Restructured loans*

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2016 dan 2015:

Below is the type and amount of restructured loans as of 31 December 2016 and 2015:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Perpanjangan jangka waktu kredit	5,284,867	3,179,700	*Extension of loan maturity dates*
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	11,400,256	6,344,553	*Extension of loan maturity dates and reduction of interest rates*
Perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit, dan program restrukturisasi lain-lain*)	14,747,549	11,183,043	*Extension of loan maturity dates, reduction of interest rates and other restructuring programs*)*
Total	**31,432,672**	**20,707,296**	***Total***

*) Program restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari penambahan fasilitas kredit, Perjanjian Pengakuan Utang (PPH) dan *Interest Balloon Payment (IBP)*.

*) *Other restructuring scheme mainly includes additions of loan facilities, debt recognition agreements (PPH) and Interest Balloon Payments (IBP).*

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp2.940.364 dan Rp3.781.510.

Restructured loans which are categorized as non-performing loan amounted to Rp 2,940,364 and Rp3,781,510, as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

i. Pinjaman sindikasi / *i. Syndicated loans*

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated loans represent loans provided to debtors based on syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp45.981.384 dan Rp32.739.703 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

BNI's participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp45,981,384 and Rp32,739,703 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

i. Pinjaman sindikasi (lanjutan) / *i. Syndicated loans (continued)*

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI's percentage shares in syndicated loans, in which BNI acts as the lead arranger, is as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
% Partisipasi	0.25% - 93.35%	27.00% - 55.00%	*% Participation*

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI's participation in syndicated loans, in which BNI acts as the syndication member, is as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
% Partisipasi	0.00% - 64.43%	0.03% - 64.43%	*% Participation*

j. Cadangan kerugian penurunan nilai / *j. Allowance for impairment losses*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2016			
	Individu/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Total**	
Saldo awal	4,775,280	7,263,338	12,038,618	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	4,403,923	3,223,184	7,627,107	*Allowance during the year*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	17,966	127,607	145,573	*Recovery of written off loans*
Penghapusan selama tahun berjalan	(1,040,894)	(2,142,691)	(3,183,585)	*Write-offs during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	7,973	45,179	53,152	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**8,164,248**	**8,516,617**	**16,680,865**	***Ending balance***

	2015			
	Individu/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Total**	
Saldo awal	2,807,221	4,163,074	6,970,295	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	2,204,722	5,014,092	7,218,814	*Allowance during the year*
Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan	81,666	104,421	186,087	*Recovery of written off loans*
Penghapusan selama tahun berjalan	(335,078)	(2,131,027)	(2,466,105)	*Write-offs during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	16,749	112,778	129,527	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**4,775,280**	**7,263,338**	**12,038,618**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

k. Kredit dihapusbukukan

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

l. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp5.161.870 dan Rp5.430.504 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Perjanjian pembiayaan hak *recourse* di atas, dengan perusahaan pembiayaan terkait adalah sebesar 100% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dari jumlah kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atas debitur, BNI memiliki hak *recourse* terhadap perusahaan pembiayaan yang terkait.

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Grup memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

Pinjaman yang diberikan dalam pembiayaan syariah masing-masing sebesar Rp20.493.610 dan Rp17.767.590 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% - 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 18 tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Kredit Program Pemerintah terdiri dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), *Two Steps Loan* (TSL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Revitalisasi Perkebunan yang dapat didanai sebagian dan/atau seluruhnya oleh Pemerintah.

12. LOANS (continued)

k. Loans written off

The loans written off by BNI are recorded as extra-comptable in the administrative account.

l. Financing arrangements with multi-finance companies

BNI has financing arrangements with several multi-finance companies with respect to motor vechicles financing amounted to Rp5,161,870 and Rp5,430,504 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

As of 31 December 2016 and 2015, the above recourse arrangements with the respective multi-finance companies were 100% of the total loans under repective financing arrangements. In case of default by the borrowers, BNI has recourse against the respective multi-finance companies.

m. Other significant information relating to loans

The Group holds collateral against loans in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other assets held as collaterals.

Loans include sharia receivables amounting to Rp20,493,610 and Rp17,767,590 as of of 31 December 2016 and 2015, respectively.

Loans to employees which carried interest rate of 3% - 4% per annum are intended for purchase of houses and other necessities with 1 year to 18 years time period. The loan principal and interest payments are settled through monthly payroll deductions.

Government Program Loans consist of Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Two Steps Loan (TSL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) and Revitalisasi Perkebunan which were partially and/or fully funded by the Government.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (lanjutan) / *m. Other significant information relating to loans (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

As at of 31 December 2016 and 2015, there was not any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Bank Indonesia regulations.

Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BNI per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 8,43% dan 7,13%, sedangkan bila rasio tersebut ditambahkan dengan kredit menengah maka rasionya menjadi sebesar 17,70% dan 16,00% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The micro and small scale loans to total loans ratio for BNI and the small scale loans to total loans ratio for BNI as of 31 December 2016 and 2015 is 8.43% and 7.13%, respectively, whereas if that ratio is added with middle scale loans, the ratio will become 17.70% and 16.00% as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

13. OBLIGASI PEMERINTAH / *13. GOVERNMENT BONDS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/December				
	2016		2015		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap	650,429	660,239	295,815	289,918	*Fixed rate*
Tingkat bunga mengambang	43,500	44,227	6,500	6,053	*Floating rate*
	693,929	704,466	302,315	295,971	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap	1,347	1,353	161,285	160,791	*Fixed rate*
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi	**695,276**	**705,819**	**463,600**	**456,762**	***Total fair value through profit or loss***
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap	16,142,268	15,697,378	13,857,459	12,692,682	*Fixed rate*
Tingkat bunga mengambang	8,507,370	8,485,787	12,645,950	12,598,921	*Floating rate*
	24,649,638	24,183,165	26,503,409	25,291,603	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap	18,365,451	18,604,617	9,024,808	9,046,210	*Fixed rate*
Tingkat bunga mengambang	821,823	872,558	-	-	*Floating rate*
	19,187,274	19,477,175	9,024,808	9,046,210	
Total tersedia untuk dijual	**43,836,912**	**43,660,340**	**35,528,217**	**34,337,813**	***Total available-for-sale***
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi, sebesar Rp459.994 per 31 Desember 2016 dan Rp559.801 per 31 Desember 2015	14,905,825	14,445,831	12,851,762	12,239,428	*Fixed rate, net of unamortized discount/premium of Rp459,994 as of 31 December 2016 and Rp559,801 as of 31 December 2015*
Tingkat bunga mengambang	2,000	2,140	2,000	2,191	*Floating rate*
	14,907,825	14,447,971	12,853,762	12,241,619	

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)					***Held-to-maturity*** *(continued)*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/ premi yang belum diamortisasi sebesar Rp75.665 per 31 Desember 2016 dan Rp7 per 31 Desember 2015	3,799,117	3,874,782	186,133	186,125	*Fixed rate, net of unamortized discount/premium of Rp75,665 as of 31 December 2016 and Rp7 as of 31 December 2015*
Tingkat bunga mengambang	309,868	317,427	-	-	*Floating rate*
	4,108,985	4,192,209	186,133	186,125	
Total dimiliki hingga jatuh tempo	**19,016,810**	**18,640,180**	**13,039,895**	**12,427,744**	***Total held-to-maturity***
Total Obligasi Pemerintah	**63,548,998**	**63,006,339**	**49,031,712**	**47,222,319**	***Total Government Bonds***

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi masing-masing sebesar Rp8.498.370 dan Rp11.902.950 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The total outstanding nominal amount of Government Bonds received by BNI from the recapitalization program amounted to Rp8,498,370 and Rp11,902,950 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual dan dijual selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The total available-for-sale Government Bonds sold during the current year were as follows:

	Total dijual/ *Sold*	Kepada pihak ketiga/ *To third parties*		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Harga jual/ *Selling price*	
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	6,584,091	5,387,178	5,698,791	*Year ended 31 December 2016*
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015	1,701,074	1,644,373	1,718,582	*Year ended 31 December 2015*

Jumlah Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo dalam tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp4.490.443 (nilai nominal) dan Rp704.468 (nilai nominal).

Total Government Bonds which have matured amounted to Rp4,490,443 (nominal value) and Rp704,468 (nominal value) during 2016 and 2015, respectively.

Untuk obligasi tingkat bunga mengambang, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 99,62% sampai dengan 99,85% dan antara 69,97% sampai dengan 109,53% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dari nilai nominal.

For floating interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 99.62% to 99.85% and from 69.97% to 109.53% of the nominal value as of 31 December 2016 and 2015, respectively, of the nominal amounts.

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *GOVERNMENT BONDS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 84,45% sampai dengan 122,41% dan antara 72,18% sampai dengan 140,77% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

For fixed interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 84.45% to 122.41% and from 72.18% to 140.77% as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai pasar Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual (neto setelah pajak) sebesar Rp981.697 (rugi) dan Rp489.680 (rugi) masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang dicatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian.

BNI recognized the unrealized gains or losses from the decrease in the market value of the Government Bonds categorized as available-for-sale (net of taxes) in the amount of Rp981,697 (loss) and Rp489,680 (loss) for years ended 31 December 2016 and 2015, respectively, both recorded in the equity section of the consolidated statement of financial position.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Obligasi pemerintah dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah nominal Rp4.373.950 dan Rp3.782.950 telah dijual dengan janji dibeli kembali hingga jatuh tempo sehingga klasifikasinya berubah dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo (lihat Catatan 22).

As of 31 December 2016 and 2015 the fixed rate government bonds has been sold under agreements to repurchase to maturity with nominal amount to Rp4,373,950 and Rp3,782,950 therefore the classification changes from available-for-sale to held-to-maturity (refer to Note 22).

b. Berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo dan jenis bunga / *Based on maturity date and type of interest rate*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Diperdagangkan	05/03/2017 -	27/02/2016 -	*Trading*
Obligasi tingkat bunga tetap	15/04/2043	15/04/2043	*Fixed rate bonds*
Tersedia untuk dijual	06/01/2017 -	15/01/2016 -	*Available-for-sale*
Obligasi tingkat bunga tetap	15/05/2033	15/04/2043	*Fixed rate bonds*
Obligasi tingkat bunga mengambang	25/02/2017 - 25/07/2020	25/03/2016 - 25/07/2020	*Floating rate bonds*
Dimiliki hingga jatuh tempo	15/04/2017 -	27/02/2016 -	*Held-to-maturity*
Obligasi tingkat bunga tetap	15/05/2037	15/02/2044	*Fixed rate bonds*

c. Tingkat suku bunga tetap tahunan / *Annual fixed interest rates*

	Rupiah %	**Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*** %	**Dolar Singapura/ *Singapore Dollar*** %	
Suku bunga kontrak:				*Contractual interest rate:*
2016	4.87 - 12.04	0.63 - 7.75	2.25 - 3.25	*2016*
2015	4.45 - 12.90	0.25 - 11.63	2.25 - 3.25	*2015*
Suku bunga efektif:				*Effective interest rate:*
2016	4.87 - 12.04	0.55 - 4.72	0.97 - 1.89	*2016*
2015	6.60 - 12.15	0.06 - 6.15	1.08 - 1.64	*2015*

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

d. Tingkat suku bunga mengambang tahunan / *d. Annual floating interest rates*

	Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates*	
2016	6.28% - 6.56%	*2016*
2015	5.31% - 8.75%	*2015*

14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI / *14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL*

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

2016

Counterparty	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Liabilitas Penjualan Kembali/ *Resale Liabilities*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealized Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak ketiga/*Third parties*							
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	125,000	15/12/2016	16/01/2017	111,686	338	111,348
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	250,000	20/12/2016	20/01/2017	221,492	871	220,621
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	250,000	21/12/2016	23/01/2017	224,225	1,088	223,137
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	250,000	22/12/2016	24/01/2017	229,102	1,235	227,867
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	250,000	22/12/2016	24/01/2017	229,102	1,235	227,867
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	350,000	23/12/2016	06/01/2017	314,768	349	314,419
Bank Indonesia	Sukuk	107,084	07/12/2016	04/01/2017	107,858	387	107,471
Bank Indonesia	Sukuk	109,357	14/12/2016	11/01/2017	109,925	284	109,641
Bank Indonesia	Sukuk	122,184	21/12/2016	18/01/2017	122,572	193	122,379
		1,813,625			**1,670,730**	**5,980**	**1,664,750**

2015

Counterparty	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Liabilitas Penjualan Kembali/ *Resale Liabilities*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealized Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak ketiga/*Third parties*							
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	200,000	21/12/2015	01/02/2016	180,782	1,272	179,510
PT Bank Jabar Banten Tbk	OBN	200,000	21/12/2015	01/02/2016	198,099	1,394	196,705
		400,000			**378,881**	**2,666**	**376,215**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

Securities purchased under agreements to resell are classified as current.

Tingkat suku bunga tetap tahunan :

Annual fixed interest rates :

	Rupiah %	
Suku bunga kontrak:		*Contractual interest rate:*
2016	7.30 - 8.50	*2016*
2015	8.25	*2015*

15. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *15. PREPAID EXPENSES*

Beban dibayar dimuka terdiri dari : / *Prepaid expenses consist of:*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Sewa dibayar dimuka	1,176,299	1,082,404	*Prepaid rent*
Biaya tangguhan	459,033	146,532	*Deferred expenses*
Perbaikan dan pemeliharaan	287,162	226,774	*Service and maintenance*
Asuransi	225,107	65,299	*Insurance*
Promosi	168,166	50,225	*Promotion*
Lainnya	95,124	61,407	*Others*
	2,410,891	**1,632,641**	

16. PENYERTAAN SAHAM / *16. EQUITY INVESTMENTS*

Penyertaan jangka panjang / ***Long-term equity investments***

	Biaya Perolehan/ *Cost*		Bagian BNI Atas Laba/(Rugi Akumulasi)/ *BNI 's Share of Accumulated Profit/(Losses)*		Nilai Tercatat/ *Carrying Value*		
	2016	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	
Metode ekuitas	-	40,742	-	(36,796)	-	3,946	*Equity method*
Klasifikasi tersedia untuk dijual					57,169	56,554	*Classified as available-for-sale*
Total					57,169	60,500	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai					-	(24,707)	*Allowance for impairment losses*
Neto					**57,169**	**35,793**	***Net***

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia adalah: / *The classification of long-term equity investments based on Bank Indonesia collectibility are as follows:*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Lancar	57,169	59,964	*Current*
Macet	-	536	*Loss*
Total	57,169	60,500	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(24,707)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**57,169**	**35,793**	***Net***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Saldo awal	24,707	24,707	*Beginning balance*
(Pembalikan) selama tahun berjalan	(24,707)	-	*(Reversal) during the year*
Neto	**-**	**24,707**	***Net***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai. / *Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.*

16. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) / *16. EQUITY INVESTMENTS (continued)*

Penyertaan jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term equity investments (continued)***

Penyertaan pada perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut: / *The long-term equity investments to associated companies are as follows:*

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 2016	2015	*Company's Name*
Metode ekuitas				***Equity method***
PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (dahulu PT Swadharma Surya Finance)	Pembiayaan/*Financing*	-	25.00%	*PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (formerly PT Swadharma Surya Finance)*
Diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual				***Classified as available-for-sale***
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi/*Investment*	8.00%	8.00%	*PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia*
PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (dahulu PT Swadharma Surya Finance)	Pembiayaan/*Financing*	7.35%	-	*PT Swadharma Nusantara Pembiayaan (formerly PT Swadharma Surya Finance)*
PT Bursa Efek Indonesia	Bursa efek/*Stock exchange*	2.07%	1.20%	*PT Bursa Efek Indonesia*
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek/ *Settlement and depository*	1.93%	2.50%	*PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero)	Pemeringkat efek/ *Credit rating agency*	1.93%	1.93%	*PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero)*
PT Bank Mizuho Indonesia	Bank/*Banking*	1.00%	1.00%	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Bank/*Banking*	0.52%	0.52%	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*

17. ASET LAIN-LAIN - NETO / *17. OTHER ASSETS - NET*

Aset lain-lain - neto terdiri dari : / *Other assets - net consist of:*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Piutang bunga	3,110,149	2,020,966	*Interest receivables*
Piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit	1,581,100	362,447	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Piutang lain-lain	952,919	595,130	*Other receivables*
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp209.580 pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: Rp159.693)	317,127	364,897	*Foreclosed collateral, net of allowance for impairment losses of Rp209,580 as of 31 December 2016 (31 December 2015: Rp159,693)*
Uang muka bonus saham	249,979	499,979	*Share bonus advance*
Persediaan kantor	189,223	256,438	*Office supplies*
Piutang premi asuransi	21,503	8,762	*Insurance premium receivables*
Lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp26.559 pada tanggal 31 Desember 2016 (31 Desember 2015: Rp27.504)	371,167	373,492	*Others, net of allowance for impairment losses of Rp26,559 as of 31 December 2016 (31 December 2015: Rp27,504)*
Total	**6,793,167**	**4,482,111**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016, piutang bunga sebagian besar merupakan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp1.491.811 dan Rp653.834 (31 Desember 2015: Rp1.325.421 dan Rp530.792).

As of 31 December 2016, interest receivables are mostly comprised of interest from loans and Government Bonds amounting to Rp1,491,811 and Rp653,834, respectively (31 December 2015: Rp1,325,421 and Rp530,792).

17. ASET LAIN-LAIN - NETO (lanjutan)

Piutang lain-lain sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari transaksi efek dengan nasabah sebesar Rp456.774 dan Rp259.011 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai.

17. OTHER ASSETS - NET (continued)

Other receivables mostly comprised of receivables from securities transactions with customers amounting to Rp456,774 and Rp259,011 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

18. ASET TETAP

Aset tetap kepemilikan langsung:

18. FIXED ASSETS

Direct ownership of fixed assets:

	2016				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Pengurangan dan reklasifikasi/ *Disposals and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Cost***
Tanah	13,729,429	99,281	-	13,828,710	*Land*
Bangunan	3,692,772	164,996	(7,735)	3,850,033	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	7,625,050	607,418	(86,796)	8,145,672	*Office equipment and motor vehicles*
Total biaya perolehan	25,047,251	871,695	(94,531)	25,824,415	*Total cost*
Aset dalam penyelesaian	1,301,419	1,467,754	(167,860)	2,601,313	*Construction in progress*
Total biaya perolehan	26,348,670	2,339,449	(262,391)	28,425,728	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	350,786	211,443	(16,329)	545,900	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	5,241,290	728,084	(61,769)	5,907,605	*Office equipment and motor vehicles*
Total akumulasi penyusutan	5,592,076	939,527	(78,098)	6,453,505	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**20,756,594**			**21,972,223**	***Net book value***

	2015					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Pengurangan dan reklasifikasi/ *Disposals and reclassification*	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap/ *Increase arising on revaluation of properties*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	1,766,479	1,397,450	-	10,565,500	13,729,429	*Land*
Bangunan	2,772,014	584,143	(40,998)	377,613	3,692,772	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	6,247,637	1,462,773	(85,360)	-	7,625,050	*Office equipment and motor vehicles*
Total biaya perolehan	10,786,130	3,444,366	(126,358)	10,943,113	25,047,251	*Total cost*
Aset dalam penyelesaian	1,723,661	209,736	(631,978)	-	1,301,419	*Construction in progress*
Total biaya perolehan	12,509,791	3,654,102	(758,336)	10,943,113	26,348,670	*Total cost*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	1,517,600	235,211	(8,213)	(1,393,812)	350,786	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	4,770,141	548,100	(76,951)	-	5,241,290	*Office equipment and motor vehicles*
Total akumulasi penyusutan	6,287,741	783,311	(85,164)	(1,393,812)	5,592,076	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**6,222,050**				**20,756,594**	***Net book value***

18. ASET TETAP (lanjutan) / *18. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on sale of fixed assets are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember /*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Harga jual	17,755	60,252	*Proceeds*
Nilai buku	(16,433)	(41,194)	*Book value*
Keuntungan	**1,322**	**19,058**	***Gain***

Pada tanggal 26 November 2015, Bank membeli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Kav. No. 1, Jakarta Pusat senilai Rp1.465.000 dan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya R.S Fatmawati, Jakarta Selatan senilai Rp65.000 dari Dana Pensiun BNI (pihak berelasi).

On 26 November 2015, the Bank purchased land and building located in Jl. Jenderal Sudirman Kav. No. 1, Central Jakarta amounting to Rp1,465,000 and land and building located in Jl. Raya R.S Fatmawati, South Jakarta amounting to Rp65.000 from BNI Pension Fund (related party).

Jumlah beban penyusutan aset tetap sebesar Rp939.527 dan Rp783.311 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The balances of depreciation amounting to Rp939,527 and Rp783,311 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Group during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

Aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2016 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp Rp6.341.119 (31 Desember 2015: Rp8.393.422). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertangungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

As of 31 December 2016, the fixed assets of the Bank were insured against risk of fire and theft with sum insured amounting to Rp6,341,119 (31 December 2015: Rp8,393,422). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Bangunan	1,174,271	450,819	*Buildings*
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	1,427,042	850,600	*Office equipment and motor vehicles*
Total	**2,601,313**	**1,301,419**	***Total***

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah berkisar 2% - 66% (31 Desember 2015: 6% - 61%).

The estimated percentage of completion of construction in progress as of 31 December 2016 is between 2% - 66% (31 December 2015: 6% - 61%).

18. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2016 tidak berbeda jauh dengan nilai tercatat karena Grup melakukan penilaian pada tanah dan bangunan pada tanggal 30 September 2015.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

Pada tanggal 30 September 2015, Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:
a) KJPP Toha Okky Heru dan Rekan
b) KJPP Antonius Setiady dan Rekan
c) KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
d) KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan
e) DTZ Debenham Tie Leung (SEA) PTE LTD
f) Knight Frank
g) Muromachi Real Estate Co, Ltd
h) Property Appraisal Service

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti
b) Kondisi pasar
c) Lokasi
d) Karakteristik fisik
e) Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan
f) Karakteristik tanah

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 30 September 2015 untuk kelompok aset tanah dan bangunan di Indonesia dan luar negeri yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

18. FIXED ASSETS (continued)

There is no significant difference between fair value and carrying value of land and building owned by the Group as of 31 December 2016 because the Group perform revaluation over land and buildings on 30 September 2015.

There were no fixed assets pledged as collateral.

On 30 September 2015, the Group changed their accounting policy of land and buildings from cost model to revaluation model.

The valuations of land and building are perfomed by the following external independent appraiser:
a) KJPP Toha Okky Heru dan Rekan
b) KJPP Antonius Setiady dan Rekan
c) KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
d) KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan
e) DTZ Debenham Tie Leung (SEA) PTE LTD
f) Knight Frank
g) Muromachi Real Estate Co, Ltd
h) Property Appraisal Service

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, determined based on reference to recent market transactions done on arm's length terms and appropriate requirements. The valuation methods used are market value approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others are as follow:

a) Type and right on property
b) Market condition
c) Location
d) Physical characteristic
e) Income producing characteristic
f) Land characteristic

Information on revaluation of land and buildings on 30 September 2015 located in Indonesia and overseas performed by the Bank are as follow:

	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	Nilai Buku Setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation*	Keuntungan/ (Kerugian) Revaluasi/ *Gain/(Loss) Revaluation*	
Tanah	1,731,909	12,297,409	10,565,500	*Land*
Bangunan	1,115,110	2,886,536	1,771,426	*Buildings*
Jumlah	**2,847,019**	**15,183,945**	**12,336,926**	***Total***

18. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp10.565.500 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp10.570.506 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp5.006.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp1.771.426. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp1.809.585 dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp38.159. Bangunan sebesar Rp41.261 tidak mengalami perubahan nilai setelah dilakukan proses penilaian kembali

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp12.380.091. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan adalah sebesar Rp43.165.

Penilaian kembali yang dilakukan oleh entitas anak atas tanah dan bangunan menghasilkan kenaikan nilai tercatat atas aset tetap sebesar Rp120.136

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

18. FIXED ASSETS (continued)

The revaluation of land results in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp10,565,500 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp10,570,506 and a decrease in carrying amount recognised in the current year expenses amounting to Rp5,006.

Increase in carrying amount of building from the revaluation of building is recorded at Rp1,771,426. The increase consist of the increase in the carrying amount of building recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp1,809,585 and decrease in the carrying amount of building recognised in the curent year expenses amounting to Rp38,159. The revaluation of buildings amounting to Rp41,261 results in no change in value of those buildings.

In total, the increase in the carrying amount from revaluation of land and buildings is recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp12,380,091. The decrease of carrying amount from revaluation results in recognition of current year expenses amounting to Rp43,165.

The revaluation of land and buildings performed by its subsidiaries results in an increase in the carrying amount of fixed assets amounting to Rp120,136.

If land and buildings are recorded on historical cost basis, the amount would be as follow:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Tanah	1,759,861	1,731,269	*Land*
Bangunan			*Buildings*
Harga perolehan	2,745,400	2,737,843	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(1,845,187)	(1,668,989)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bangunan	900,213	1,068,854	*Net book amount*
Jumlah nilai buku bersih	2,660,074	2,800,123	*Total net book value*

Perubahan cadangan revaluasi aset neto setelah pajak adalah sebagai berikut:

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	Cadangan revaluasi aset, neto setelah pajak/ *Asset revaluation reserve, net of tax*	
Saldo per 31 Desember 2015	12,189,957	*Balance as of 31 December 2015*
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	95,533	*Comprehensive income for the year*
Saldo per 31 Desember 2016	12,285,490	*Balance as of 31 December 2016*

18. ASET TETAP (lanjutan) / *18. FIXED ASSETS (continued)*

Selain tanah dan bangunan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than land and buildings.

Pada tahun 2015, Bank juga melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan di Indonesia untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali dilakukan atas tanah dan bangunan dengan nilai buku pajak sebelum revaluasi sebesar Rp1.917.157 dan menghasilkan keuntungan revaluasi sebesar Rp6.337.806. Pembayaran pajak final atas keuntungan revaluasi sebesar Rp190.134 dicatat mengurangi "Cadangan Revaluasi Aset".

In 2015, The Bank also performed revaluation for tax purposes over land and buildings located in Indonesia. The revaluation of the above land and buildings with fiscal book value before revaluation amounting to Rp1,917,157 resulting in gain on revaluation amounting to Rp6,337,806. The payment of final tax over the gain on revaluation amounting to Rp190,134 was recorded as a deduction of "Asset Revaluation Reserve".

Penilaian kembali tanah dan bangunan untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-2547/WPJ.19/2015 tanggal 18 Desember 2015. BNI melakukan penilaian kembali aset tetap dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Revaluation of land and bulidings for tax purposes is performed after approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-2547/WPJ.19/2015 dated 18 December 2015. BNI performed revaluation of fixed assets in accordance with the Finance Minister Regulation (PMK) No. 191/PMK.010/2015, dated 15 October 2015, with its amendments (PMK No. 233/PMK.03/2015), dated 21 December 2015.

Ketentuan penyusutan fiskal aset tetap setelah penilaian kembali dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016.

The provision on the fiscal depreciation of fixed assets after revaluation is valid from 1 January 2016.

19. LIABILITAS SEGERA / *19. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Rupiah			***Rupiah***
Kewajiban sebagai *issuer* bank (ATM)	1,200,981	522,844	*Obligation as issuer bank*
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	935,444	453,825	*Temporary deposit transactions not yet settled*
Kerjasama pihak ketiga	453,633	153,759	*Third party agreement*
Setoran pajak sebagai bank persepsi	274,258	282,514	*Tax collection received by BNI as collecting Bank*
Dana setoran cek	54,748	59,837	*Fund deposits for cheques*
Kiriman uang	34,849	36,498	*Money transfers*
Dana setoran smartpay	14,768	8,304	*Fund deposits for smartpay*
Dana *Trust*	3,859	-	*Fund deposits for trust*
Transaksi kliring	642	27,953	*Items for clearing*
Transaksi inkaso	37	164	*Items for inkaso*
Lainnya	44,131	39,464	*Others*
	3,017,350	1,585,162	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Kiriman uang	245,520	129,755	*Money transfers*
Kerjasama pihak ketiga	5,169	39,751	*Third party agreement*
Setoran pajak sebagai bank persepsi	4,276	3,461	*Tax collection received by BNI as collecting Bank*
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	1,935	8,594	*Temporary deposit transactions not yet settled*
Dana *Trust*	1,243	38,666	*Fund deposits for trust*
Lainnya	175	105	*Others*
	258,318	220,332	
Total	**3,275,668**	**1,805,494**	***Total***

20. SIMPANAN NASABAH / 20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46i.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46i.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / a. By type and currency

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	91,526,009	60,027,724	*Current accounts*
Tabungan	139,602,521	122,828,002	*Savings account*
Deposito berjangka	119,339,285	110,909,822	*Time deposits*
	350,467,815	293,765,548	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	30,550,219	30,735,635	*Current accounts*
Tabungan	12,182,452	6,536,310	*Savings account*
Deposito berjangka	22,252,598	22,899,387	*Time deposits*
	64,985,269	60,171,332	
Total	**415,453,084**	**353,936,880**	***Total***

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from customers based on currencies are as follows:

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah	**350,467,815**	**293,765,548**	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	62,589,004	57,850,933	*United States Dollar*
Euro	1,226,838	1,240,699	*Euro*
Dolar Singapura	627,989	522,595	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	227,289	206,324	*Japanese Yen*
Pound Sterling Inggris	167,467	274,032	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	86,158	17,641	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	37,787	46,159	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	15,773	6,452	*Australian Dollar*
Franc Swiss	6,165	6,497	*Swiss Franc*
South Korean Won	799	-	*South Korean Won*
	64,985,269	60,171,332	
Total	**415,453,084**	**353,936,880**	***Total***

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*.

Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana pemilik dana akan memperoleh pendapatan bonus. Jumlah giro *wadiah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp1.533.147 dan Rp1.070.897, sedangkan jumlah tabungan *wadiah* masing-masing sebesar Rp2.545.937 dan Rp1.709.839.

Deposits from customers based on sharia principles include wadiah current accounts, wadiah savings, Mudharabah savings and Mudharabah deposits.

Wadiah current accounts and wadiah savings represent a wadiah yad-dhamanah deposit in which the customers are entitled to receive bonus income. The balances of wadiah current accounts as of 31 December 2016 and 2015 were Rp1,533,147 and Rp1,070,897, respectively, while the balances of wadiah savings were Rp2,545,937 and Rp1,709,839, respectively.

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criterias.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp2,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, BNI adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of 31 December 2016 and 2015, BNI was a participant of that guarantee program.

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	22,293,267	11,063,960	*Current accounts*
Tabungan	303,351	176,596	*Savings account*
Deposito berjangka	28,217,504	27,401,634	*Time deposits*
	50,814,122	38,642,190	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	9,500,225	7,936,332	*Current accounts*
Tabungan	443,058	454,825	*Savings account*
Deposito berjangka	11,224,491	3,853,523	*Time deposits*
	21,167,774	12,244,680	
Total pihak berelasi	71,981,896	50,886,870	*Total related parties*

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *b. By relationship (continued)*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	69,232,742	48,963,764	*Current accounts*
Tabungan	139,299,170	122,651,406	*Savings account*
Deposito berjangka	91,121,781	83,508,188	*Time deposits*
	299,653,693	255,123,358	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	21,049,994	22,799,303	*Current accounts*
Tabungan	11,739,394	6,081,485	*Savings account*
Deposito berjangka	11,028,107	19,045,864	*Time deposits*
	43,817,495	47,926,652	
Total pihak ketiga	343,471,188	303,050,010	*Total third parties*
Total	**415,453,084**	**353,936,880**	***Total***

c. Tabungan berdasarkan jenis / *c. Savings accounts by type*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Tabungan BNI	148,320,182	126,642,427	*BNI savings accounts*
Tabungan Haji	1,574,883	1,734,118	*Hajj savings accounts*
Tabungan Syariah	1,889,908	987,767	*Sharia savings accounts*
Total	**151,784,973**	**129,364,312**	***Total***

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Giro	14,033,673	12,521,705	*Current accounts*
Tabungan	25,422,686	10,968,809	*Savings account*
Deposito berjangka	5,130,176	4,487,274	*Time deposits*
Total	**44,586,535**	**27,977,788**	***Total***

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *e. Annual interest rates and profit sharing*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	*Euro* %	
2016	0.00 - 8.10	0.00 - 1.95	0.00 - 0.75	0.00 - 0.15	*2016*
2015	0.00 - 10.00	0.00 - 1.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	*2015*

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46j.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46j.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Pinjaman pasar uang antar bank	690,000	553,616	*Interbank money market*
Giro	957,516	800,556	*Current accounts*
Deposito berjangka	305,304	91,984	*Time deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	3,246,040	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Simpanan lainnya	486,400	482,426	*Other deposits*
	5,685,260	1,928,582	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman pasar uang antar bank	649,177	1,108,248	*Interbank money market*
Giro	926,035	702,630	*Current accounts*
Deposito berjangka	1,285,750	429,298	*Time deposits*
Simpanan lainnya	1,188,960	79,300	*Other deposits*
	4,049,922	2,319,476	
Total	**9,735,182**	**4,248,058**	***Total***

Simpanan dari bank lain berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro *wadiah* dan deposito *Mudharabah*.

Deposits from other banks based on sharia principles include wadiah current accounts and Mudharabah deposits.

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana pemilik dana akan memperoleh pendapatan bonus. Jumlah giro *wadiah* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp31.334 dan Rp52.981.

Wadiah current accounts represent a wadiah yad-dhamanah deposit in which the customers are entitled to receive bonus income. The balances of wadiah current accounts as of 31 December 2016 and 2015 were Rp31,334 and Rp52,981, respectively.

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Rupiah	5,685,260	1,928,582	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2,464,030	814,365	*United States Dollar*
Yen Jepang	1,115,833	879,628	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	434,043	613,402	*Singapore Dollar*
Euro	24,224	7,551	*Euro*
Dolar Hong Kong	9,799	1,459	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	1,592	3,064	*Great Britain Pound Sterling*
Lain-lain	401	7	*Others*
	4,049,922	2,319,476	
Total	**9,735,182**	**4,248,058**	***Total***

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Negotiable Certificate of Deposit	653,514	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Giro	22,505	2,261	*Current accounts*
Pinjaman pasar uang antar bank	-	100,000	*Interbank money market*
	676,019	102,261	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	19,703	77,626	*Current accounts*
Total pihak berelasi	695,722	179,887	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Negotiable Certificate of Deposit	2,592,526	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Giro	935,011	798,295	*Current accounts*
Pinjaman pasar uang antar bank	690,000	453,616	*Interbank money market*
Deposito berjangka	305,304	91,984	*Time deposits*
Simpanan lainnya	486,400	482,426	*Other deposits*
	5,009,241	1,826,321	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman pasar uang antar bank	649,177	1,108,248	*Interbank money market*
Giro	906,332	625,004	*Current accounts*
Deposito berjangka	1,285,750	429,298	*Time deposits*
Simpanan lainnya	1,188,960	79,300	*Other deposits*
	4,030,219	2,241,850	
Total pihak ketiga	9,039,460	4,068,171	*Total third parties*
Total	**9,735,182**	**4,248,058**	***Total***

c. Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *c. By annual interest rates and profit sharing*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Yen Jepang/ *Japanese Yen* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	
2016	0.00 - 8.40	0.00 - 1.85	0.18 - 0.31	0.00 - 1.96	*2016*
2015	0.00 - 8.25	0.00 - 2.00	0.00 - 0.40	0.00 - 1.25	*2015*

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Giro	17,900	266,579	*Current account*
Tabungan	53,854	106,745	*Savings account*
Deposito berjangka	20,470	19,378	*Time deposit*
Total	**92,224**	**392,702**	***Total***

22. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *22. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE*

2016

Counterparty	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Nilai Pembelian Kembali/ *Buy Back Value*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expenses*	Nilai Bersih/ *Net Value*
PT Bank ANZ Indonesia	OBN	1,699,000	6/8/2014	15/4/2017	1,405,514	21,149	1,384,365
PT Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	395,500	9/9/2016	15/11/2020	561,956	126,273	435,683
PT Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	582,500	9/9/2016	15/9/2018	661,904	74,775	587,129
PT Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	1,696,950	19/8/2014	15/5/2018	1,422,961	65,177	1,357,784
		4,373,950			**4,052,335**	**287,374**	**3,764,961**

2015

Counterparty	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Nilai Pembelian Kembali/ *Buy Back Value*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expenses*	Nilai Bersih/ *Net Value*
PT Bank ANZ Indonesia	OBN	1,699,000	06/08/2014	15/04/2017	1,437,995	28,446	1,409,549
PT Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	1,696,950	19/08/2014	15/05/2018	1,455,967	49,091	1,406,876
PT Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	387,000	24/06/2015	15/05/2016	348,195	1,478	346,717
		3,782,950			**3,242,157**	**79,015**	**3,163,142**

Tingkat suku bunga tetap tahunan : / *Annual fixed interest rates :*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku bunga kontrak:			*Contractual interest rate:*
2016	4.40 - 5.50	2.30	*2016*
2015	5.25 - 10.75	0.00	*2015*

23. LIABILITAS AKSEPTASI / *23. ACCEPTANCES PAYABLE*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / *a. By party and currency*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Bank	1,573,981	755,944	*Banks*
Kreditur non-bank	217,312	277,464	*Non-bank creditors*
	1,791,293	1,033,408	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank	2,452,594	4,977,570	*Banks*
Kreditur non-bank	114,650	177,280	*Non-bank creditors*
	2,567,244	5,154,850	
Total	**4,358,537**	**6,188,258**	***Total***

23. LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *23. ACCEPTANCES PAYABLE (continued)*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang (lanjutan) / *a. By party and currency (continued)*

Perincian liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptances payable based on currencies are as follow:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Rupiah	**1,791,293**	**1,033,408**	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	2,485,686	4,997,798	*United States Dollar*
Euro	50,200	47,285	*Euro*
Dolar Singapura	15,560	29,178	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	14,121	80,589	*Japanese Yen*
Yuan Cina	1,677	-	*Chinese Yuan*
	2,567,244	5,154,850	
Total	**4,358,537**	**6,188,258**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	522,187	405,868	*Rupiah*
Mata uang asing	571,521	85,665	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	1,093,708	491,533	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	1,269,106	627,540	*Rupiah*
Mata uang asing	1,995,723	5,069,185	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	3,264,829	5,696,725	*Total third parties*
Total	**4,358,537**	**6,188,258**	***Total***

24. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *24. ACCRUED EXPENSES*

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

Accrued expenses consists of the following:

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Biaya kantor	362,873	378,089	*Office expenses*
Kewajiban sebagai bank penerbit	285,068	237,578	*Liabilities as issuing bank*
Deposito *Mudharabah*	35,258	41,818	*Mudharabah time deposits*
Sukuk *Mudharabah*	4,353	4,440	*Mudharabah sukuk*
Biaya teknologi dan telekomunikasi	234,936	70,480	*Technology and telecommunication expenses*
Biaya *loyalty*	75,937	135,216	*Loyalty Expenses*
Lain-lain	48,814	49,508	*Others*
Total	**1,047,239**	**917,129**	***Total***

25. PENYISIHAN / *25. PROVISION*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	108,511	40,058	*Estimated losses from commitments and contigencies*
Penyisihan atas perkara hukum	47,608	59,169	*Provision for legal cases*
Total	**156,119**	**99,227**	***Total***

a. Perubahan cadangan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

a. The movements of the allowance for legal cases are as follows:

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Saldo awal	59,169	59,707	*Beginning balance*
Pembalikan selama tahun berjalan	(11,561)	(538)	*Reversal during the year*
Saldo akhir	**47,608**	**59,169**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for legal cases are adequate.

b. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

b. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Saldo awal	40,058	27,523	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	28,108	15,509	*Allowance during the year*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	40,345	(2,974)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo akhir	**108,511**	**40,058**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi di atas telah memadai.

Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are adequate.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN / *26. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Utang ke pemegang polis	7,782,768	4,832,346	*Obligation to policy holders*
Setoran jaminan	1,344,181	1,212,653	*Guarantee deposits*
Utang bunga	545,914	589,749	*Interest payable*
Utang nasabah - Entitas anak	377,144	220,695	*Payable to customers - Subsidiary*
Nota kredit dalam penyelesaian	203,278	98,186	*Credit memo in process*
Kewajiban pada pihak ketiga	137,515	111,995	*Liability to third parties*
Pendapatan yang belum diakui	63,976	108,506	*Unearned income*
Utang reasuransi dan komisi	50,089	51,880	*Reinsurance payable and commission*
Lain - lain	644,091	357,774	*Others*
Total	**11,148,956**	**7,583,784**	***Total***

27. PERPAJAKAN / *27. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	2016	2015	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
BNI	619,751	2,289,853	*BNI*
Entitas Anak	569	9,321	*Subsidiaries*
Total	**620,320**	**2,299,174**	**Total**

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2016	2015	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
BNI			*BNI*
Pasal 29	73,301	490,975	*Article 29*
Pasal 25	-	225,313	*Article 25*
	73,301	716,288	
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pasal 29	19,122	14	*Article 29*
Total pajak penghasilan badan	92,423	716,302	*Total corporate income tax*
Pajak lainnya			*Other taxes*
BNI	45,155	21,216	*BNI*
Entitas Anak	13,192	11,878	*Subsidiaries*
Total pajak lainnya	58,347	33,094	*Total other taxes*
Total	**150,770**	**749,396**	***Total***

c. Beban pajak / *c. Tax expense*

	2016	2015	
BNI			*BNI*
Kini	2,790,515	2,886,135	*Current*
Tangguhan	(49,481)	(701,477)	*Deferred*
Pajak penghasilan - BNI	2,741,034	2,184,658	*Income tax - BNI*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Kini	169,235	147,278	*Current*
Tangguhan	(17,560)	(6,320)	*Deferred*
Pajak penghasilan - Entitas Anak	151,675	140,958	*Income tax - Subsidiaries*
Total	**2,892,709**	**2,325,616**	***Total***

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the profit before income tax are as follows:

	2016	2015	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	14,302,905	11,466,148	*Consolidated income before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan dari entitas anak	(785,571)	(653,193)	*Income before income tax of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	13,517,334	10,812,955	*Income before income tax - BNI*

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

c. Beban pajak (lanjutan) / *c. Tax expense (continued)*

	2016	2015	
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	2,703,467	2,162,591	*Tax calculated at applicable tax rates*
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak			*Expenses not deductible for tax purposes*
- Kenikmatan karyawan	29,082	27,558	*Employees' fringe benefits* -
- Keuntungan atas reksadana	(32,435)	(46,662)	*Gain on mutual fund* -
- Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai - aset lain-lain	(36)	(884)	*Reversal of allowance for impairment losses on other assets* -
- Lain-lain	40,956	42,055	*Others* -
Beban Pajak BNI	2,741,034	2,184,658	*Tax expense - BNI*
Beban Pajak Anak	151,675	140,958	*Tax expense - Subsidiaries*
	2,892,709	**2,325,616**	

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi BNI dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income before tax as shown in BNI's profit and loss and estimated taxable income are as follows:

	2016	2015	
Grup			***The Group***
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	14,302,905	11,466,148	*Consolidated income before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan dari Entitas Anak	(785,571)	(653,193)	*Income before income tax of Subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	13,517,334	10,812,955	*Income before income tax - BNI*
Beda waktu			*Timing differences*
- Penyusutan aset tetap	(17,381)	25,800	*Depreciation of fixed assets* -
- (Pembalikan)/penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan	(78,052)	3,258,539	*(Reversal)/Addition of allowance for impairment losses on earning assets - loans* -
- Pembalikan cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya	(12,221)	(599)	*Reversal of allowance for legal, fraud and others* -
- Rugi/(laba) yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	1,382	(4,959)	*Unrealized gain on trading securities* -
- Pembalikan cadangan imbalan kerja	189,317	131,183	*Reversal of allowance for employee benefits* -
- Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pinjaman yang diberikan	164,358	97,339	*Addition of allowance for impairment earning assets - other than loans* -
	247,403	3,507,303	
Beda tetap			*Permanent differences*
- Kenikmatan karyawan	145,412	137,791	*Employees' fringe benefits* -
- Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai - aset lain-lain	(178)	(4,421)	*Reversal of allowance for impairment losses on other assets* -
- Keuntungan atas reksadana	(162,176)	(233,311)	*Gain on mutual funds* -
- Lain-lain	204,779	210,360	*Others* -
	187,837	110,419	
Penghasilan kena pajak - BNI	13,952,574	14,430,677	*Taxable income - BNI*

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

27. TAXATION (continued)

c. Tax expense (continued)

Taxable income for the current year and the estimated corporate income tax payable is as follows:

	2016	2015	
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku			*Income tax based on the applicable tax rates*
20% x Rp13.952.574	2,790,515	-	*20% x Rp13,952,574*
20% x Rp14.430.677	-	2,886,135	*20% x Rp14,430,677*
Beban pajak penghasilan	2,790,515	2,886,135	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar di muka	(2,717,214)	(2,395,160)	*Prepaid tax*
Utang pajak penghasilan - BNI	**73,301**	**490,975**	***Corporate income tax payable - BNI***

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh PP No. 77 Tahun 2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Based on UU No. 36 Year 2008 regarding Income Tax, Government Regulation (GR) No. 81 Year 2007 dated 28 December 2007 which subsequently has been revoked and replaced by GR No. 77 Year 2013 dated 21 November 2013 regarding Reduction of Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers and Regulation of the Minister of Finance No. 238/PMK.03/2008 dated 30 December 2008 regarding Procedures for Implementing and Supervising the Granting of Reduction of the Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Listed Company, a public listed company in Indonesia can obtain a reduction of income tax rate by 5% lower from the highest income tax rate by fulfilling several requirements, which include at the minimum 40% of total issued and fully paid in capital shares are traded in Indonesia Stock Exchange and must be recorded in depository and settlement institutional and the shares are owned by at least 300 parties and each party can only own less than 5% of the total issued and fully paid shares. The above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred and eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh PP No. 77 Tahun 2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka mengatur bahwa perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015, Pemerintah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. PP ini merubah persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang ada dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak serta masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

27. TAXATION (continued)

c. Tax expense (continued)

Based on UU No. 36 Year 2008 regarding Income Tax, Government Regulation (GR) No. 81 Year 2007 dated 28 December 2007 which subsequently has been revoked and replaced by GR No. 77 Year 2013 dated 21 November 2013 regarding Reduction of Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers and Regulation of the Minister of Finance No. 238/PMK.03/2008 dated 30 December 2008 regarding Procedures for Implementing and Supervising the Granting of Reduction of the Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers in the Form of Public Listed Company, a public listed company in Indonesia can obtain a reduction of income tax rate by 5% lower from the highest income tax rate by fulfilling several requirements, which include at the minimum 40% of total issued and fully paid in capital shares are traded in Indonesia Stock Exchange and must be recorded in depository and settlement institutional and the shares are owned by at least 300 parties and each party can only own less than 5% of the total issued and fully paid shares. The above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred and eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Subsequently on 3 August 2015, the Government issued GR No. 56 Year 2015 regarding the Changes on GR No. 77 Year 2013 regarding the Reduction of Tax Rate of Income Tax Resident Corporate Tax Payers. This GR changed requirement to obtain a reduction of income tax rate by 5% lower from the highest income tax rate by fulfilling several requirements, which include at the minimum 40% of total issued and fully paid in capital shares are traded in Indonesia Stock Exchange and the shares are owned by at least 300 parties and each party can only own less than 5% of the total issued and fully paid shares. The above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred and eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Formulir No.X.H.I-2 tanggal 2 Januari 2017 dan 3 Januari 2016 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, atas kepemilikan saham BNI selama tahun 2016 dan 2015, semua kriteria untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut di atas telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 20%.

d. Aset pajak tangguhan - neto

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

27. TAXATION (continued)

c. Tax expense (continued)

Based on the Monthly Shareholding Report Form No.X.H.I-2 dated 2 January 2017 and 3 January 2016 from the Registrar, Datindo Entrycom, regarding BNI's shares during the years 2016 and 2015, BNI has met all criterias mentioned above to obtain a facility of tax rate reduction.

BNI's corporate income tax for the years ended 31 Desember 2016 and 2015 are calculated using the tax rate of 20%.

d. Deferred tax assets - net

The deferred tax assets as 31 Desember 2016 and 2015 represent the tax effects on the following:

	2016				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ *Credited/ (charged) to consolidated statement of comprehensive income*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif- pinjaman yang diberikan	527,515	(15,610)	-	511,905	*Allowance for impairment losses on earning assets - loans*
Cadangan imbalan kerja	288,294	37,863	(50,074)	276,083	*Allowance for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	86,144	32,872	-	119,016	*Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans*
(Laba)/rugi yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	510,107	-	(131,336)	378,771	*Unrealized (gain)/loss on available-for-sale-securities*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	13,609	(2,444)	-	11,165	*Allowance for legal, fraud and others*
(Laba)/rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	(13,623)	276	-	(13,347)	*Unrealized (gain)/loss on trading securities*
Penyusutan aset tetap	(30,644)	(3,476)	-	(34,120)	*Depreciation of fixed assets*
Aset pajak tangguhan BNI - neto	**1,381,402**	**49,481**	**(181,410)**	**1,249,473**	***Net deferred tax assets - BNI***
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - neto	**84,051**			**82,035**	***Net deferred tax assets - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**1,465,453**			**1,331,508**	***Net consolidated deferred tax assets***

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

d. Aset pajak tangguhan - neto (lanjutan) / *d. Deferred tax assets - net (continued)*

	2015				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ *Credited/ (charged) to consolidated statement of comprehensive income*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif- pinjaman yang diberikan	(124,193)	651,708	-	527,515	*Allowance for impairment losses on earning assets - loans*
Cadangan imbalan kerja	274,196	26,237	(12,139)	288,294	*Allowance for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	66,676	19,468	-	86,144	*Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans*
Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	416,980	-	93,127	510,107	*Unrealized loss on available-for-sale-securities*
Cadangan hukum, kecurangan (*fraud*) dan lainnya	13,729	(120)	-	13,609	*Allowance for legal, fraud and others*
Laba yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan	(12,633)	(992)	-	(13,625)	*Unrealized gain on trading securities*
Penyusutan aset tetap	(35,819)	5,177	-	(30,642)	*Depreciation of fixed assets*
Aset pajak tangguhan BNI - neto	**598,936**	**701,478**	**80,988**	**1,381,402**	***Net deferred tax assets - BNI***
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - neto	**69,378**			**84,051**	***Net deferred tax assets - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	**668,314**			**1,465,453**	***Net consolidated deferred tax assets***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seluruhnya.

Management believes that deferred tax assets are fully realisable.

e. Surat ketetapan pajak / *e. Tax assessment letters*

Pada tanggal 28 November 2012, BNI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") No. 00002/206/10/093/12 atas Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp1.633.716 (termasuk denda). Pada tanggal 26 Desember 2012, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas SKPKB PPh Badan sebesar Rp9.798. Pada tanggal 19 Februari 2013, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap sisa SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 26 Februari 2013, BNI telah melakukan pembayaran sebagian atas sisa SKPKB PPh Badan sebesar Rp816.858. Pada tanggal 21 Februari 2014, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-289/WPJ.19/2014 yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Pada tanggal 16 Mei 2014, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 16 Maret 2016, Pengadilan Pajak telah membacakan putusan banding yang mengabulkan permohonan banding BNI

On 28 November 2012, BNI received the tax assessment letter ("SKPKB") No. 00002/206/10/093/12 which stated that there was an underpayment of corporate income tax for fiscal year 2010 amounting to Rp1,633,716 (including penalties). On 26 December 2012, BNI has made a partial payment amounting to Rp9,798. On 19 February 2013, BNI has submitted an objection letter to the Directorate General of Tax for the remaining underpayment. On 26 February 2013, BNI has made a partial payment of the remaining underpayment amounting to Rp816,858. On 21 February 2014, BNI received a letter from the Directorate General of Tax No. KEP-289/WPJ.19/2014 which rejected the objection of the above SKPKB. On 16 May 2014, BNI submitted the request for appeal on the rejection of the above objection to the Tax Court . On 16 March 2016, the Tax Court approve the appeal of BNI.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tanggal 8 April 2016, BNI menerima salinan putusan banding. Terhadap pembayaran sebesar Rp816.858 atas SKPKB telah dikompensasikan ke PPh Pasal 29 PPh Badan tahun pajak 2015, angsuran PPh Pasal 25 bulan April, Mei, dan Juni 2016.

Pada tanggal 28 November 2012, BNI juga menerima SKPKB No. 00197/207/10/093/12 atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp19.362 (termasuk denda). Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2012, BNI telah membayar seluruh SKPKB PPN tersebut. Pada tanggal 19 Februari 2013, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap SKPKB PPN tersebut. Pada tanggal 21 Februari 2014, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-290/WPJ.19/2014 yang menolak keberatan atas SKPKB PPN tersebut. Pada tanggal 16 Mei 2014, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 11 April 2016, Pengadilan Pajak telah membacakan putusan banding yang mengabulkan permohonan banding BNI. Pada tanggal 26 April 2016, BNI telah menerima salinan putusan banding. Berdasarkan putusan tersebut BNI telah mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran SKPKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Mei 2016, BNI telah menerima pengembalian pembayaran pajak sebesar Rp5.589 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 16 Desember 2014, BNI menerima SKPKB No. 00002/206/13/093/14 atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2013 sebesar Rp619.751 (termasuk denda). Pada tanggal 30 Desember 2014, BNI telah melakukan pembayaran penuh atas SKPKB tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015, BNI telah mengajukan surat keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap SKPKB PPh tersebut. Pada tanggal 7 Maret 2016, BNI menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-00057/KEB/WPJ.19/2016 yang menolak keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Atas keputusan penolakan keberatan tersebut. Pada tanggal 3 Juni 2016, BNI telah mengajukan permohonan banding atas penolakan keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, proses sidang masih berjalan dan Pengadilan Pajak belum menerbitkan putusan atas banding yang diajukan oleh BNI.

27. TAXATION (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

On 8 April 2016, BNI received a copy of the appeal decision. On payment of Rp816,858 on SKPKB has been compensated for the Article 29 of the Corporate income tax year 2015, installment of Income Tax Article 25 of April, May, and June 2016.

On 28 November 2012, BNI has also received SKPKB No. 00197/207/10/093/12 which stated that there was an underpayment of Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2010 amounting to Rp19,362 (including penalties). On 26 and 27 December 2012, BNI has fully paid the above SKPKB VAT. On 19 February 2013, BNI has submitted an objection letter to the Directorate General of Tax for the above underpayment. On 21 February 2014, BNI received a letter from Directorate General of Tax No. KEP-290/WPJ.19/2014 which rejected the objection of the above SKPKB. On 16 May 2014, BNI submitted the request for appeal on the rejection of the above objection to the Tax Court. On 11 April 2016, the Tax Court approve the appeal of BNI. On 26 April 2016, BNI received a copy of the appeal decision. Based on the appeal decision. BNI has submitted the request for tax refund to the Directorate General of Tax. On 27 May 2016, BNI received the tax refund amounting to Rp5,589 from Directorate General of Tax.

On 16 December 2014, BNI received SKPKB No. 00002/206/13/093/14 which stated that there was an underpayment of corporate income tax for fiscal year 2013 amounting to Rp619,751 (including penalties). On 30 December 2014, BNI has made a full payment for the above SKPKB. On 12 March 2015, BNI has submitted an objection letter to the Directorate General of Tax for the above underpayment. Up to the date of this conslidated financial statements, On 7 March 2016, BNI received a letter from Directorate General of Tax No. KEP-00057/KEB/WPJ.19/ 2016 which rejected the objection of the above SKPKB corporate income tax. On 3 June 2016, BNI submitted the request for appeal on the rejection of the above objection to the Tax Court. Up to the date of this consolidated financial statements, Tax Court process is still ongoing and has not yet issue decision on the appeal submitted by BNI.

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat tagihan pajak

Pada tanggal 29 Desember 2015, BNI menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") No. 90004/106/14/093/15 atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2014 sebesar Rp985.578 (termasuk denda). Pada tanggal 31 Desember 2015, BNI telah melakukan pembayaran sebesar Rp849.636 (pokok pajak) atas STP tersebut.Pada tanggal 14 Januari 2016, BNI telah mengajukan surat permohonan pembatalan ke Direktorat Jenderal Pajak terhadap STP tersebut.

Pada tanggal 24 Februari 2016, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat No. KEP-00249/NKEB/WPJ.19/2016 yang mengabulkan permohonan pembatalan atas STP PPh Badan tersebut. Atas pembayaran sebesar Rp849.636 (pokok pajak) atas STP telah dikompensasikan ke angsuran PPh Pasal 25 bulan Pebruari dan Maret 2016 serta PPh Pasal 29 PPh Badan tahun pajak 2015.

27. TAXATION (continued)

f. Tax collection letter

On 29 December 2015, BNI received tax collection letter ("STP") No. 90004/106/14/093/15 on the corporate income tax for fiscal year 2014 amounting to Rp985,578 (including penalties). On 31 December 2015, BNI has made a payment amounting to Rp849,636 (principal amount of tax) for the above STP. On 14 January 2016, BNI has submitted a cancellation letter on the above tax collection letter to the Directorate General of Tax.

On 24 February 2016, Directorate General of Taxation issued letter No. KEP-00 249/NKEB /WPJ.19/2016 which granted the cancellation letter of the above STP corporate income tax. On payment of Rp849,636 (principal amount of tax) on STP has been compensated for the installment of Income Tax Article 25 of February and March 2016 as well as Article 29 of the Income Tax corporate income tax year 2015.

28. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

a. Berdasarkan jenis

28. SECURITIES ISSUED

a. By type

	31 Desember/*December*				
	2016		2015		
	Saldo/ *Balance*	Peringkat/ *Rating* *)	Saldo/ *Balance*	Peringkat/ *Rating* *)	
Obligasi-BNI, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp5.135 per 31 Desember 2016 (2015: Rp21.833)	6,731,115	BB	6,870,667	BB	*Bonds-BNI, net of unamortized discount cost of Rp5,135 as of 31 Desember 2016 (2015: Rp21,833)*

*) *S&P*

Pada tanggal 27 April 2012, BNI, melalui BNI Cabang London, menerbitkan surat utang dengan jumlah nilai nominal USD500 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2017. Tingkat suku bunga sebesar 4,13% per tahun yang akan dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 27 April dan 27 Oktober setiap tahunnya, sejak tanggal 27 Oktober 2012. Surat utang tersebut dapat dilunasi, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian, sejumlah pokok yang terhutang beserta bunga yang ditangguhkan dan bunga yang belum dibayarkan, jika ada, atas pilihan penerbit surat hutang setiap saat dalam hal terdapat perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak di Indonesia. Surat utang dikeluarkan pada harga 98,89% setara dengan USD494,4 juta dan terdaftar pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

*) *S&P*

On 27 April 2012, BNI, through its London Branch, issued Notes with total nominal value of USD500 million that will be due on 27 April 2017. The Notes bear interest of 4.13% per annum payable semi-annually in arrears on 27 April and 27 October in each year, commencing on 27 October 2012. The Notes are subject to repayment, in whole but not in part, of their outstanding principal amount, together with accrued and unpaid interest, if any, at the option of the Issuer at any time in the event of certain changes affecting taxes in Indonesia. The Notes were issued at a price of 98.89% equivalent to USD494.4 million and are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

28. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan) / *28. SECURITIES ISSUED (continued)*

a. Berdasarkan jenis (lanjutan) / *a. By type (continued)*

Dari jumlah yang diterima sebesar USD494,4 juta tersebut, sebesar USD400 ribu digunakan sebagai biaya penerbitan surat utang. Penerimaan bersih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan oleh Bank sebagai tambahan sumber pendanaan untuk cabang-cabang luar negeri Bank dan untuk tujuan pendanaan umum Bank. Surat utang ini merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat dan (tergantung pada ketentuan dan kondisi di bawah) tanpa jaminan dari Bank dan akan diperingkat pari passu (kecuali terdapat ketentuan hukum tertentu yang mewajibkan adanya preferensi) dan setara dengan kewajiban tanpa jaminan dari waktu ke waktu selama kewajiban masih belum dilunasi.

Of the USD494.4 million proceeds, USD400 thousand was withheld as payment for various issuance costs. The net proceeds of the issuance of the Notes will be utilized by the Bank to supplement funding sources for the Bank's overseas branches and for general funding purposes of the Bank. The Notes will constitute direct, unconditional and (subject to the provisions of condition below) unsecured obligations of the Bank and will rank pari passu among themselves (save for certain obligations required to be preferred by law) and equally with all other unsecured obligations from time to time as long as not yet settled.

b. Berdasarkan mata uang / *c. By currency*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Mata uang asing	6,731,115	6,870,667	*Foreign currencies*

c. Tingkat suku bunga per tahun / *c. Annual interest rates*

	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
2016 dan 2015	4.13	*2016 and 2015*

29. PINJAMAN YANG DITERIMA / *29. BORROWINGS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Rupiah			***Rupiah***
Pinjaman penerusan	74,233	205,763	*Two step loans*
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	951	951	*Liquidity credit for members of primary cooperatives*
Lain-lain	112,157	62,225	*Others*
	187,341	268,939	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman bilateral	27,863,190	20,633,303	*Bilateral loans*
Bankers acceptance	4,239,796	1,179,263	*Bankers acceptance*
Pinjaman penerusan	57,699	62,839	*Two step loans*
Lain-lain	617,396	379,237	*Others*
	32,778,081	22,254,642	
Total	**32,965,422**	**22,523,581**	***Total***

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral

BNI memiliki pinjaman bilateral sebagai salah satu strategi pendanaan Bank untuk menjaga komposisi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk di dalam pinjaman bilateral adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

a) Pinjaman bilateral dalam negeri dengan Standard Chartered Bank Jakarta sebesar USD200 juta atau ekuivalen Rp2.694.500 dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,95% dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2019.

b) Pinjaman bilateral luar negeri dengan Societe Generale Paris sebesar USD50 juta atau ekuivalen Rp673.625 dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun dan tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 2,30% dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2018.

c) Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar USD700 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan ditambah 2,85% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebesar USD696 juta atau ekuivalen Rp9.373.781 dan USD695 juta atau ekuivalen Rp9.582.907

d) Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar RMB1,90 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga SHIBOR 6 bulan ditambah 3,30% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebesar RMB1.903 juta atau ekuivalen Rp3.689.837 dan RMB1.903 juta atau ekuivalen Rp4.039.306

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Bilateral loans

BNI has bilateral loan which is one of Bank's strategy to maintain funding profile between short term and long term funding. Bilateral loans include the following borrowing facilities:

a) Onshore bilateral loan with Standard Chartered Bank Jakarta amounting to USD200 million or equivalent Rp2,694,500 with tenor of 5 years and with interest at 3 months LIBOR plus 1.95% and will mature on 19 September 2019.

b) Offshore bilateral loan with Societe Generale Paris amounting to USD 50 million or equivalent Rp673,625 with tenor of 4 years and with interest at 3 months LIBOR plus 2.30% and will mature on 17 December 2018.

c) Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to USD700 million with tenor of 10 years and with interest at 6 months LIBOR plus 2.85% and will mature on 16 September 2025. . As of 31 December 2016 and 2015, outstanding loan less unamortised issuance costs is amounted to USD696 million or equivalent Rp9,373,781 and USD695 million or equivalent Rp9,582,907, respectively.

d) Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to RMB1.9 billion with tenor of 10 years and with interest at 6 months SHIBOR plus 3.30% and will mature on 16 September 2025. As of 31 December 2016 and 2015, outstanding loan less unamortised issuance costs is amounted to RMB1,903 million or equivalent Rp3,689,837 and RMB1,903 million or equivalent Rp4,039,306, respectively.

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

e) Pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB sebesar USD 250 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1% per annum dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi adalah sebesar USD247 juta atau ekuivalen Rp3.327.056.

f) Pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB sebesar USD 500 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah 1,21% per annum dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi adalah sebesar USD494 juta atau ekuivalen Rp6.654.113.

Pinjaman penerusan

Pinjaman penerusan terdiri dari fasilitas pinjaman dalam Rupiah dan mata uang asing yang diperoleh dari beberapa lembaga pembiayaan internasional melalui Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Badan Usaha Milik Negara) yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di Indonesia termasuk wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *letters of credit* ekspor dan impor. Pinjaman ini memiliki beberapa jangka waktu jatuh tempo mulai dari 2004 sampai 2017. Tingkat bunga rata-rata per tahun atas fasilitas tersebut berkisar antara 1,25% sampai dengan 7,83% untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Bunga dibayar setiap enam bulan.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Bilateral loans (continued)

e) Offshore bilateral loan with consortium of banks consist of ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB *amounting to USD250 million with tenor of 3 years and with interest at 3 months LIBOR plus 1% and will mature on 22 December 2019. As of 31 December 2016, outstanding loan less unamortised issuance costs is amounted to USD247 million or equivalent Rp3,327,056.*

f) Offshore bilateral loan with consortium of banks consist of ANZ, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Commerzbank, CTBC, DBS, OCBC, dan UOB *amounting to USD500 million with tenor of 5 years and with interest at 3 months LIBOR plus 1.21% and will mature on 22 December 2021. As of 31 December 2016, outstanding loan less unamortised issuance costs is amounted to USD494 million or equivalent Rp6,654,113.*

Two step loans

Two step loans consist of credit facilities in Rupiah and foreign currencies obtained from international funding institutions through Bank Indonesia and Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (a state-owned enterprise) for a purpose of specific projects financing in Indonesia including local letters of credit, also export and import letters of credit. These facilities have various maturity terms starting from 2004 to 2017. Annual average interest rates of the facilities ranged from 1.25% to 7.83% for the period and year ended 31 December 2016 and 2015. Interest is paid semi-annually.

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman penerusan (lanjutan)

Pinjaman penerusan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 di atas mencakup pinjaman penerusan dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* untuk pembiayaan *Industrial Efficiency and Pollution Control Phase* I dan II yang diterima pada tahun 2001 dan 2004.

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1145/DP3/2001 tertanggal 30 Maret 2001 dan SLA-1174/DP3/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas masing-masing tidak melebihi DM11.700.000 dan EUR 9 juta. Tanggal terakhir penarikan pinjaman adalah masing-masing pada tanggal 30 Juni 2001 dan 30 Desember 2007. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah masing-masing selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun dan 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun.

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut.

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3,00% sampai dengan 7,00% per tahun.

Bankers acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antarbank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan.

BNI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

29. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Two step loans (continued)

Included in the above two step loans as of 31 December 2016 and 2015 are step loans from Kreditanstalt fur Wiederaufbau to finance Industrial Efficiency and Pollution Control Phase I and II that was received in 2001 and 2004.

Based on the two step loans agreement between BNI and the Ministry of Finance No. SLA-1145/DP3/2001 dated 30 March 2001 and SLA-1174/DP3/2004 dated 25 August 2004, the Government appointed BNI as an executor bank with a total facilities for each not exceeding DM11,700,000 and EUR 9 million. Latest withdrawal date were 30 June 2001 and 30 December 2007, respectively. The term of two step loans are 12 years including 2 years grace period and 40 years including 10 years grace period, respectively.

Liquidity credit for members of primary cooperatives credit

This is a credit facility provided by Bank Indonesia specifically for BNI's debtors in relation to the Government's loan program for small investment loans, working capital loans and small business loans. In accordance with the Government Regulation, the management of this liquidity loan program was transferred to PT Permodalan Nasional Madani (Persero), a state-owned enterprise. The loan will mature on various dates based on the completion of such programs.

Interest rates on the facility range from 3.00% to 7.00% per annum.

Bankers acceptance

Bankers acceptance represents interbank borrowings for liquidity purposes obtained by BNI from various foreign banks with borrowing period of 6 months.

BNI has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

29. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / *29. BORROWINGS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh pinjaman yang diterima merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of 31 December 2016 and 2015, all borrowings were with third parties.

c. Tingkat suku bunga per tahun / *c. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	*Euro* %	Yuan Cina/ *Chinese Yuan* %	
2016	5.50 - 11.50	0.45 - 4.45	0.20 - 0.30	3.30	*2016*
2015	9.10 - 11.50	0.43 - 3.63	0.64 - 0.64	3.30	*2015*

30. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - GIRO *MUDHARABAH* / *30. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH CURRENT ACCOUNTS*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Giro iB *Hasanah* (*Mudharabah*)	575,969	430,950	*iB Hasanah (Mudharabah) current accounts*
Bank			*Bank*
Giro iB Hasanah (Mudharabah)	15,470	11,938	*iB Hasanah (Mudharabah) current accounts*
	591,439	**442,888**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak berelasi	141,115	10	*Related parties*
Pihak ketiga	434,854	430,940	*Third parties*
	575,969	**430,950**	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	15,470	11,938	*Third parties*
	591,439	**442,888**	

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The average rate of Nisbah ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended 31 December 2016 and 2015 is as follows:

	2016		
	Nisbah (%)/ *Ratio (%)*	Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)*	
Giro *Mudharabah*	3 : 97	0.32	*Mudharabah current accounts*

30. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH CURRENT ACCOUNTS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *b. By relationship (continued)*

	2015		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Giro *Mudharabah*	3 : 97	0.32	*Mudharabah current accounts*

31. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - TABUNGAN *MUDHARABAH* / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Tabungan iB Syariahplus Perorangan	3,999,129	3,419,283	*iB Savings Shariaplus individual*
Tabungan iB Bisnis	1,184,782	993,895	*iB Savings Business*
Tabungan iB Baitullah *Hasanah* Rupiah	766,769	593,804	*iB Savings Baitullah Hasanah Rupiah*
Tabungan iB Bisnis Non Perorangan	356,850	285,481	*iB Savings Business non individual*
Tabungan Prima iB *Hasanah*	237,918	125,834	*iB Prima Savings Hasanah*
Tapenas iB *Hasanah*	133,452	105,290	*iB Tapenas Hasanah*
Tabungan iB Syariahplus Non Perorangan	138,875	97,163	*iB Savings Shariaplus non-individual*
Tapma iB *Hasanah*	57,016	63,342	*iB Tapma Hasanah*
Tabungan iB Syariahplus Perorangan Valas	-	10,874	*iB Savings Shariaplus individual foreign currencies*
Tabungan IB Baitullah *Hasanah* Valas	-	3,204	*iB Savings Baitullah Hasanah-foreign currencies*
Tabungan iB *Hasanah* Card	2,651	2,660	*Tabungan iB Hasanah Card*
	6,877,442	**5,700,830**	
Bank			*Bank*
Tabungan iB Bisnis Non Perorangan	163,041	117,783	*iB Savings Business non-individual*
Tabungan iB Syariahplus Non Perorangan	24,047	20,877	*iB Savings Shariaplus non-individual*
	187,088	**138,660**	
	7,064,530	**5,839,490**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak berelasi	13,849	8,778	*Related parties*
Pihak ketiga	6,863,593	5,692,052	*Third parties*
	6,877,442	5,700,830	
Bank			*Bank*
Pihak ketiga	187,088	138,660	*Third parties*
	7,064,530	**5,839,490**	

31. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - TABUNGAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

31. *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)*

b. *By relationship (continued)*

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

The average rate of Nisbah ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan iB *Hasanah*	1 : 99 - 28:72	0.10 - 4.81	*iB Hasanah Savings Deposit*

	2015		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
Tabungan iB *Hasanah*	1 : 99 - 28:72	0.11 - 5.26	*iB Hasanah Savings Deposit*

32. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - DEPOSITO *MUDHARABAH*

a. Berdasarkan hubungan

32. *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. *By relationship*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak berelasi	7,538,591	4,559	*Related parties*
Pihak ketiga	5,099,827	10,347,566	*Third parties*
	12,638,418	10,352,125	
Bank			*Bank*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	286,368	298,886	*Third parties*
	286,368	298,886	
	12,924,786	**10,651,011**	

b. Berdasarkan jangka waktu kontrak

b. *By contractual period*

	31 Desember/*December*		
	2016	**2015**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
1 bulan	8,093,817	6,673,491	*1 month*
3 bulan	748,981	644,943	*3 months*
6 bulan	351,386	209,406	*6 months*
12 bulan	3,444,234	2,824,285	*12 months*
	12,638,418	10,352,125	

32. DANA *SYIRKAH* TEMPORER - DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *TEMPORARY SYIRKAH FUNDS - MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu kontrak (lanjutan) / *By contractual period (continued)*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Bank			*Bank*
1 bulan	110,185	138,235	*1 month*
3 bulan	141,500	103,000	*3 months*
6 bulan	3,832	43,300	*6 months*
12 bulan	30,851	14,351	*12 months*
	286,368	298,886	
	12,924,786	**10,651,011**	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	31 Desember/*December* 2016	2015	
Bukan Bank			*Non-Bank*
≤ 1 bulan	6,213,734	4,800,770	*≤ 1 month*
>1 - 3 bulan	3,439,689	3,165,554	*>1 - 3 months*
>3 - 12 bulan	943,227	703,136	*>3 - 12 months*
>12 bulan	2,041,768	1,682,665	*> 12 months*
	12,638,418	10,352,125	
Bank			*Bank*
≤ 1 bulan	90,185	118,535	*≤ 1 month*
>1 - 3 bulan	162,442	123,641	*>1 - 3 months*
>3 - 12 bulan	7,396	43,514	*>3 - 12 months*
>12 bulan	26,345	13,196	*> 12 months*
	286,368	298,886	
	12,924,786	**10,651,011**	

d. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Entitas Anak atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

d. *Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Subsidiary from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.*

The average rate of Nisbah ratio and profit sharing for Mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2016 and 2015, are as follows:

	2016		2015		
	Nisbah* (%)/ *Ratio (%)	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	***Nisbah* (%)/ *Ratio (%)***	**Tingkat bagi hasil (%)/ *Profit sharing rate (%)***	
1 Bulan	46 : 54	4.99	49 : 51	5.30	*1 month*
3 Bulan	47 : 53	5.13	51 : 49	5.52	*3 months*
6 Bulan	49 : 51	5.35	53 : 47	5.73	*6 months*
12 Bulan	50 : 50	5.49	55 : 45	5.95	*12 months*

e. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp839.974 dan Rp1,127,880 pada tanggal 31 Desember 2016 (2015: Rp1.289.142 dan Rp1.849.746).

e. *Mudharabah deposits that were used as collateral for the Bank's receivables and financing respectively amounted to Rp839,974 and Rp1,127,880 as of 31 December 2016 (2015: Rp1,289,142 and Rp1,849,746).*

33. SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN

Pada tanggal 26 Mei 2015, Entitas Anak menerbitkan sukuk *mudharabah* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah nilai nominal Rp500 milliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2018. Tingkat bagi hasil sukuk *mudharabah* adalah sebesar 9,25% per tahun. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulanan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah*. Pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* terakhir sekaligus jatuh tempo sukuk *mudharabah* adalah tanggal 26 Mei 2018. Tanggal 26 Mei 2018 juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan pembiayaan mikro yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Entitas Anak.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan diakui sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan sukuk dicatat secara terpisah sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk *Mudharabah*. Jumlah biaya yang diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.098 dan Rp758.

Prinsip pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*, dimana pendapatan yang diperoleh dari pendapatan kas seluruh portofolio dihitung berdasarkan alokasi Portofolio sebesar 5 (lima) kali Dana Sukuk *Mudharabah* dalam mata uang rupiah yang dimiliki Entitas Anak.

Perhitungan bagi hasil berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk *Mudharabah* dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Entitas Anak kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (tidak diaudit). Nisbah untuk pemegang sukuk *Mudharabah* adalah sebesar 15,35%.

33. MUDHARABAH SUKUK ISSUED

On 26 May 2015, the Subsidiary issued Mudharabah sukuk, listed on the Indonesian Stock Exchange, with a nominal value of Rp500 billion that will mature on 26 May 2018. The indicative level of the sukuk's yield is 9.25% per annum. The revenue from profit-sharing is paid on quarterly basis, in accordance with the payment date of Sukuk mudharabah's profit-sharing. The first payment mudharabah Sukuk revenue profit-sharing was distributed on 26 August 2015, while the last payment of the revenue will be distributed on 26 May 2018. 26 May 2018 will also be the date of the repayment of Mudharabah sukuk fund.. All of the funds generated from the issuance of the Mudharabah sukuk, after being deducted by all of the emission costs, will be used entirely to support the sharia financing activities, such as consumer financing, productive financing, and micro financing, as a part of the Subsidiary's business activities.

The value of mudharabah sukuk issued is recognized at its nominal value. All costs related to the issuance process of the Sukuk is separately recorded as accrued expenses and will be amortized using straight line method during the period of Mudharabah sukuk. Total amortized expense amounted to Rp1,098 and Rp758 as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

The profit-sharing uses revenue-sharing principle, where revenue generated from cash-revenue of all portfolios is calculated based on portfolio allocation as many as 5 (five) times of Sukuk Mudharabah funds owned by Subsidiary in Rupiah currency.

The method used for the revenue sharing calculation is based on the multiplication of the revenue-sharing portion of the Mudharabah sukuk holders with the revenue that can be shared. The calculation is based on the information provided by Subsidiary to the Trustee about the explanation of the calculation of the Revenue Sharing calculation-method using three (3) (unaudited) financial positions period. The Nisbah of the Sukuk Mudharabah holders is 15.35%.

33. SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini. BRI adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan BNI Syariah melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia .

33. MUDHARABAH SUKUK ISSUED (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") was appointed as the Trustee of the Mudharabah Sukuk issuance. BRI is an indirectly-affiliated party of BNI Syariah through the share ownership by the Republic of Indonesia.

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan jangka waktu kontrak / *a. By type, currency and contractual period*

	2016				
	Saldo/ *Balance*	**Peringkat/ *Rating***	**Pemeringkat/ *Rating Agencies***	**Jangka waktu/ *Period***	
Sukuk *Mudharabah*	496,000	id AA+(Sy)	Pefindo	3 tahun/*year*	*Mudharabah Sukuk*

	2015				
	Saldo/ *Balance*	**Peringkat/ *Rating***	**Pemeringkat/ *Rating Agencies***	**Jangka waktu/ *Period***	
Sukuk *Mudharabah*	496,000	id AA+(Sy)	Pefindo	3 tahun/*year*	*Mudharabah Sukuk*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2016	**2016**	
Bukan Bank			*Non-Bank*
Pihak ketiga	341,000	345,000	*Third parties*
Pihak berelasi	155,000	151,000	*Related parties*
	496,000	**496,000**	

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Modal Saham

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Share Capital

As of 31 December 2016 and 2015, BNI's share capital ownership are as follows:

	2016			
Pemegang saham	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Class A Dwiwarna share*
Negara Republik Indonesia	1	-	-	*Republic of Indonesia*
Saham Seri B				*Class B shares*
Negara Republik Indonesia	217,006,399	1.16	1,627,548	*Republic of Indonesia*
Karyawan	6,500,267	0.03	48,752	*Employees*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65,835,200	0.35	493,764	*Public (ownership less than 5% each)*
Total saham Seri B	289,341,866	1.54	2,170,064	*Total Class B shares*

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan) / *34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

Modal Saham (lanjutan) / *Share Capital (continued)*

Pemegang saham / *Shareholders*	2016 Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	2016 Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*	2016 Jumlah/ *Amount*
Saham Seri C / *Class C shares*			
Negara Republik Indonesia / *Republic of Indonesia*	10,972,187,475	58.84	4,114,570
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Limited liability (ownership less than 5% each)*	1,372,362,823	7.37	514,636
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Foreign investment entities (ownership less than 5% each)*	5,488,185,123	29.43	2,058,069
Anggoro Eko Cahyo (Direktur) / *Anggoro Eko Cahyo (Director)*	153,526	0.00	58
Imam Budi Sarjito (Direktur) / *Imam Budi Sarjito (Director)*	117,074	0.00	44
Putrama Wahju Setyawan (Direktur) / *Putrama Wahju Setyawan (Director)*	116,425	0.00	44
Bob Tyasika Ananta (Direktur) / *Bob Tyasika Ananta (Director)*	82,891	0.00	31
Adi Sulistyowati (Direktur) / *Adi Sulistyowati (Director)*	68,124	0.00	26
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Public (ownership less than 5% each)*	526,041,130	2.82	197,265
Total saham Seri C / *Total Class C shares*	18,359,314,591	98.46	6,884,743
Total / *Total*	**18,648,656,458**	**100.00**	**9,054,807**

Pemegang saham / *Shareholders*	2015 Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	2015 Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*	2015 Jumlah/ *Amount*
Saham Seri A Dwiwarna / *Class A Dwiwarna share*			
Negara Republik Indonesia / *Republic of Indonesia*	1	-	-
Saham Seri B / *Class B shares*			
Negara Republik Indonesia / *Republic of Indonesia*	217,006,399	1.16	1,627,548
Karyawan / *Employees*	6,500,267	0.03	48,752
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Public (ownership less than 5% each)*	65,835,200	0.35	493,764
Total saham Seri B / *Total Class B shares*	289,341,866	1.54	2,170,064
Saham Seri C / *Class C shares*			
Negara Republik Indonesia / *Republic of Indonesia*	10,972,187,475	58.84	4,114,570
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Limited liability (ownership less than 5% each)*	1,899,735,948	10.19	712,401
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Foreign investment entities (ownership less than 5% each)*	4,888,006,657	26.21	1,833,002
Sutanto (Direktur) / *Sutanto (Director)*	3,848,414	0.02	1,443
Anggoro Eko Cahyo (Direktur) / *Anggoro Eko Cahyo (Director)*	153,526	0.00	58
Imam Budi Sarjito (Direktur) / *Imam Budi Sarjito (Director)*	117,074	0.00	44
Bob Tyasika Ananta (Direktur) / *Bob Tyasika Ananta (Director)*	82,891	0.00	31
Adi Sulistyowati (Direktur) / *Adi Sulistyowati (Director)*	68,124	0.00	26
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) / *Public (ownership less than 5% each)*	445,014,482	2.40	166,880
Total saham Seri C / *Total Class C shares*	18,209,214,591	97.66	6,828,455

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Modal Saham (lanjutan)

Share Capital (continued)

	2015			
Pemegang saham	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham treasuri	150,100,000	0.80	56,288	*Treasury shares*
Total	**18,648,656,458**	**100.00**	**9,054,807**	***Total***

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambilalihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

The Class A Dwiwarna is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

On 13 August 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares, representing 22.54% of shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).

Sesuai Keterbukaan Informasi dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan/atau Pegawai dalam bentuk program Bonus Saham yang diterbitkan Bank pada tanggal 30 Oktober 2015, Bank melakukan pembelian kembali saham Bank yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Program ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“POJK No.02/POJK.04/2013”) dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

In accordance to the Disclosure of Information in relation to the Management and/or Employees Stock Ownership Plan in the form of Bonus Shares Program issued by the Bank on 30 October 2015, the Bank repurchased shares issued by the Bank and listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). This program is consistent with Regulation of Financial Services Authority ("FSA") No.02/ POJK.04/2013 dated 23 August 2013 on the Repurchase of Shares Issued by the Issuer or Public Company in market conditions which fluctuate significantly ("POJK No.02/POJK.04/ 2013") and FSA Circular Letter No.22/SEOJK.04/2015 dated 21 August 2015 on Another Condition As Market Conditions that Fluctuate Significantly.

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2015 sampai dengan 28 Desember 2015, sesuai dengan tanggal Keterbukaan Informasi. Bank melakukan pembelian kembali Saham Seri C sejumlah 1.505.375 lot atau sebanyak 150.537.500 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp4.982 (nilai penuh) per lembar saham. Namun demikian sehubungan dengan adanya proses pencatatan transaksi saham di bursa yang dilakukan pada T+3 maka jumlah saham pada saham treasuri yang dicatat per tanggal 30 Desember 2015 sebanyak 150.100.000. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2015, Bank mencatatkan total saham treasuri senilai Rp749.979.

Pada tahun 2016, Bank melakukan alokasi saham treasuri senilai Rp749.979 sebagai Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Perseroan dalam bentuk Saham Bonus.

Tambahan Modal Disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010	591,156	*Balance as of 1 January 2010*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2000 (lihat Catatan 1c)	56,883,826	*Additional paid in capital due to Right Issue I in 2000 (refer to Note 1c)*
	57,474,982	
Pengurangan tambahan modal disetor akibat Pengembalian dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia (lihat Catatan 1d)	(581,474)	*Reduction paid in capital due to refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia (refer to Note 1d)*
	56,893,508	
Dieliminasi dengan akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e)	(54,367,847)	*Elimination against accumulated losses in relation to the quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e)*
	2,525,661	
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2007 (lihat Catatan 1f)	3,287,218	*Additional paid in capital due to Right Issue II in 2007 (refer to Note 1f)*
Biaya emisi penerbitan saham	(195,280)	*Shares issuance cost*
	5,617,599	
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas III pada tahun 2010 (lihat Catatan 1g)	9,196,100	*Additional paid in capital due to Right Issue III in 2010 (refer to Note 1g)*
Biaya emisi penerbitan saham	(245,231)	*Shares issuance cost*
	14,568,468	

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share Capital (continued)

The repurchase of shares was executed on on 2 November 2015 to 28 December 2015, consistent with the date of Disclosure of Information. The Bank repurchased 1,505,375 lots of Shares Class C, or 150,537,500 shares with an average acquisition cost amounting to Rp4,982 (full amount) per share. However, in relation to the recording process of share transactions in stock exchange which is done on T + 3, the number of shares recorded as treasury shares as of 30 December 2015 is 150,100,000. Therefore, as of 31 December 2015, the Bank recorded total of treasury shares amounting to Rp749,979.

In 2016, the Bank has allocated the treasury shares amounting Rp749,979 as Share Ownership Program for Management and Company's Employees in the form of Share Bonus.

Additional Paid in Capital

The movement in additional paid in capital are as follows:

35. PENGGUNAAN LABA NETO / *APPROPRIATION OF NET INCOME*

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2016 dan 17 Maret 2015, pengalokasian laba neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings held on 10 March 2016 and 17 March 2015, the allocation of the net income for the years ended 31 December 2015 and 2014, respectively, are as follows:

	2015	2014	
Pembagian dividen	2,266,885	2,695,654	*Distribution of dividends*
Pembentukan cadangan khusus	-	1,795,650	*Appropriation for specific reserves*
Saldo laba	6,799,696	6,291,324	*Retained earnings*
Total	**9,066,581**	**10,782,628**	***Total***

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba neto tahun 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp2.266.885 dan Rp2.695.654.

General Shareholders' meeting has approved the dividend distribution of Rp2,266,885 and Rp2,695,654, respectively from the 2015 and 2014 net income.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, sejak tahun 2013, pembukuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dananya bersumber dari anggaran Bank diperhitungkan sebagai biaya tahun berjalan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015, alokasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan maksimum sebesar 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Based on Ministry of State Owned Enterprises Regulation No. PER-08/MBU/2013, since 2013, the recording of Partnership and Community Development Fund Program (PKBL) where the allocation of the fund comes from the Bank's budget is considered as current year expense.
Based on Ministry of State Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015, the allocation of Partnership and Community Development Fund Program for maximum of 4% of its net profit after tax previous year.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2016, para pemegang saham menyetujui alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2016 sebesar 1% dari laba bersih tahun buku 2015.

In accordance with the decision of the General Shareholders' Meeting on 10 March 2016, the shareholders approved the allocation of Community Development Fund Program of 1% of net profit after tax year 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam siaran persnya menyampaikan bahwa dalam rapat pleno 23 Februari 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menyimpulkan bahwa terhadap perubahan peraturan pemerintah No.8 dan No.9 tersebut, penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi (biaya tahun berjalan) karena penyaluran dana PKBL tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas *(equity transaction)* antara BUMN dan kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya. Dengan demikian penyaluran dana PKBL tidak dapat diakui sebagai pengurang saldo laba *(retained earning)* dan tidak dapat disajikan langsung dalam laporan perubahan ekuitas.

Indonesian Institute of Accountants in a press release said that during the plenary meeting on 23 February 2016, the Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) conclude that the changes in government regulations No.8 and No.9 the distribution of PKBL to be recognized as an expense in the income statements (as cost of the current year) for the distribution of PKBL is not a transaction in equity (equity transaction) between State Own Enterprises and Ministry of State Own Enterprise as its shareholders. Thus the distribution of PKBL can not be recognized as a reduction of retained earnings and may not be presented directly in the statement of changes in equity.

36. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 70), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

36. GENERAL AND LEGAL RESERVES

The general and legal reserves were originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

37. CADANGAN KHUSUS

Cadangan khusus terdiri dari cadangan yang dibentuk dalam rangka tujuan investasi dan *legal reserve* dari cabang luar negeri.

Sehubungan dengan adanya penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum" yang mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016 ("tanggal diundangkan"), untuk menjaga struktur permodalannya, Bank telah melakukan reklasifikasi atas saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya (Cadangan Khusus) menjadi laba di tahan yang tidak ditentukan penggunaanya yaitu cadangan khusus sebesar Rp5.613.100 dan cadangan wajib cabang luar negeri sebesar Rp92.276 per 31 Desember 2016.

37. SPECIFIC RESERVES

Specific reserves consist of reserve for investment purposes and legal reserve from overseas branches.

In relation with implementation of Regulation of the Financial Services Regulatory Authority ("POJK") No. 34 / POJK.03 / 2016 dated September 22, 2016 on Amendments to POJK No. 11 / POJK.03 / 2016 concerning "Minimum Capital Requirement for Commercial Bank" which came into force on 31 September 2016 ("date of enactment"), to maintain its capital structure, the Bank has reclassified retained earnings that has been appropriated (specific reserve) into the unappropriated retained earnings amounted Rp5,613,100 and legal reserve of overseas branch amounting Rp92,276 as of 31 December 2016.

38. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH

38. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Pinjaman yang diberikan	36,303,645	30,360,226	*Loans*
Obligasi Pemerintah	2,854,312	2,424,281	*Government Bonds*
Margin, pendapatan bagi hasil dan bonus syariah	2,790,383	2,414,184	*Margin, profit-sharing revenue and sharia bonus*
Efek-efek	753,894	601,617	*Marketable securities*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	446,786	511,322	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	260,357	219,544	*Bills and other receivables*
Lain-lain	359,062	363,907	*Others*
Jumlah	**43,768,439**	**36,895,081**	***Total***

Termasuk dalam pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan yang mengalami penurunan nilai secara individual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp206.399 dan Rp184.796.

Included in interest income from loans is interest income on individual impaired loans for the period ended 31 December 2016 and 2015 amounting to Rp206,399 and Rp184,796.

39. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH / *39. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Simpanan nasabah dan bank lain	11,334,388	9,504,013	*Deposits from customers and other banks*
Pinjaman yang diterima	1,231,241	660,680	*Borrowings*
Bagi hasil *Mudharabah*	854,557	821,689	*Mudharabah profit-sharing expense*
Efek-efek yang diterbitkan	294,811	296,354	*Securities issued*
Lain-lain	58,380	52,149	*Others*
Total	**13,773,377**	**11,334,885**	***Total***

40. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *40. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Gaji, upah dan tunjangan pajak	3,703,377	3,523,555	*Salaries, wages and tax allowance*
Bonus, insentif dan tantiem	2,105,781	1,673,958	*Bonus, incentives and tantiem*
Tunjangan hari raya, kesehatan, kesejahteraan dan lainnya	2,377,524	1,641,945	*Yearly allowance, medical, welfare and others*
Pendidikan dan pelatihan	263,460	252,215	*Training and development*
Lainnya	383,812	274,161	*Others*
Total	**8,833,954**	**7,365,834**	***Total***

Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, imbalan kerja jangka panjang yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit serta *Executive Vice President* dan *Senior Vice President* masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Total gross salaries and allowances, bonus/tantiem, long-term employment benefits paid to the Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Executive Vice President and Senior Vice President for the period ended 31 December 2016 and 2015, respectively, are as follows:

	2016				
	Gaji dan tunjangan/ *Salaries and allowances*	**Bonus/tantiem/ *Bonus/tantiem***	**Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	11,287	38,569	1,924	51,780	*The Board of Commissioners*
Direksi	32,127	84,166	5,695	121,988	*Directors*
Komite Audit	576	-	-	576	*Audit Committee*
Executive Vice President dan *Senior Vice President*	71,182	15,278	-	86,460	*Executive Vice Presidents and Senior Vice Presidents*
	115,172	**138,013**	**7,619**	**260,804**	

	2015				
	Gaji dan tunjangan/ *Salaries and allowances*	**Bonus/tantiem/ *Bonus/tantiem***	**Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris	9,827	38,545	1,667	50,039	*The Board of Commissioners*
Direksi	25,002	113,849	4,192	143,043	*Directors*
Komite Audit	575	-	-	575	*Audit Committee*
Executive Vice President dan *Senior Vice President*	63,422	14,666	-	78,088	*Executive Vice Presidents and Senior Vice Presidents*
	98,826	**167,060**	**5,859**	**271,745**	

40. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN (lanjutan) / *SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE (continued)*

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja Bank dan pegawai, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees, incentives based on the Bank and employees' performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

41. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN / *OTHER OPERATING EXPENSES – OTHERS*

Akun ini terdiri dari beban kerjasama dengan pihak ketiga terkait transaksi ATM dan kartu kredit, beban Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL), beban pungutan tahunan OJK dan lain-lain.

This account represents partnership expenses with third parties related to ATM and credit card transactions, Partnership and Community Development Fund Program expenses, annual fees to OJK and others.

42. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Beban tenaga kerja	1,166,424	1,005,995	*Personnel expenses*
Biaya sewa	1,135,058	1,173,670	*Rental expenses*
Komunikasi	1,054,112	1,060,346	*Communications*
Penyusutan (Catatan 18)	939,527	783,311	*Depreciation (Notes 18)*
Perlengkapan kantor	596,549	535,372	*Office supplies*
Perbaikan dan pemeliharaan	492,709	453,344	*Repairs and maintenance*
Listrik dan air	336,907	321,362	*Electricity and water*
Transportasi	236,324	212,989	*Transportation*
Penelitian dan pengembangan	45,449	56,034	*Research and development*
Jasa profesional	39,412	47,904	*Professional services*
Teknologi informasi	8,325	19,745	*Information technology*
Beban lain-lain	161,129	88,272	*Other expenses*
Total	**6,211,925**	**5,758,344**	***Total***

43. IMBALAN KERJA / *EMPLOYEE BENEFITS*

	2016	**2015**	
Imbalan kerja jangka pendek	1,695,907	1,655,353	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya			*Other long-term employee benefits*
BNI	1,380,419	1,441,472	*BNI*
Entitas Anak	426,876	383,679	*Subsidiaries*
	1,807,295	1,825,151	
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**3,503,202**	**3,480,504**	***Liability recognized in the consolidated statement of financial position***

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). The employees' contributions are 7.5% of the employee's pension salary-based and the remaining amounts required to fund the program/pension plan are contributed by BNI.

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Program pensiun manfaat pasti / ***Defined benefit pension plan***

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Towers Watson Purbajaga dan 31 Desember 2015, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended 31 December 2016 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga and 31 December 2015 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), using the "Projected Unit Credit" method.

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaria PT Towers Watson Purbajaga dan Biro Pusat Aktuaria tanggal 19 Januari 2017 dan 22 Januari 2016 disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports of PT Towers Watson Purbajaga and Biro Pusat Aktuaria dated 19 January 2017 and dated 22 January 2016 are as follows:

	2016	2015	
Nilai wajar aset dana pensiun (tidak diaudit)	6,383,827	5,572,774	*Fair value of pension plan assets (unaudited)*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(6,001,564)	(4,914,297)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih lebih pendanaan	382,263	658,477	*Unrecognized funding surplus*
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	(382,263)	(658,477)	*Asset adjustment*
Aset - neto	-	-	***Asset - net***

Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

The above assets were not recognized in the consolidated statement of financial position as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of funded defined benefit obligations of the years are as follows:

	2016	2015	
Pada awal tahun	4,914,297	4,965,411	*At beginning of the year*
Biaya jasa kini	152,157	111,504	*Current service cost*
Biaya bunga	442,827	397,233	*Interest cost*
	5,509,281	5,474,148	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1,006,472	(296,829)	*Actuarial losses/(gains) from changes in financial assumption*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi pengalaman	(88,058)	122,799	*Actuarial losses from changes in experience assumption*
	918,414	(174,030)	
Pembayaran dari program:			*Payments from plan:*
iuran peserta	24,594	25,826	*Employee's contributions*
imbalan yang dibayar	(450,725)	(411,647)	*Benefits paid*
Pada akhir tahun	**6,001,564**	**4,914,297**	***At end of the year***

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

Rekonsiliasi atas perubahan aset neto selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasiandana pensiun adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net assets during the years ended 31 December 2016 and 2015 recognized in the pension fund's consolidated statement of financial position are as follows:

	2016	2015	
Aset neto pada awal tahun	-	-	*Net assets at beginning of year*
Beban tahun berjalan	152,157	111,504	*Current year expenses*
Kontribusi pemberi kerja	(71,234)	(71,192)	*Employer's contributions*
Jumlah yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	(80,923)	(40,312)	*Total amount recognized in other comprehensive income*
Aset - neto pada akhir tahun	**-**	**-**	***Net assets at end of year***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

The movement in the fair value of plan assets of the years are as follows: (unaudited)

	2016	2015	
Pada awal tahun	5,572,774	5,250,098	*At beginning of the year*
Hasil dari aset program	457,232	420,008	*Return on plan assets*
Kerugian aktuarial	708,718	217,297	*Actuarial losses*
Kontribusi pemberi kerja	71,234	71,192	*Employer's contributions*
Kontribusi pekerja	24,594	25,826	*Employee's contributions*
Imbalan yang dibayar dan beban administrasi	(450,725)	(411,647)	*Benefits paid and administrative expenses paid*
Pada akhir tahun	**6,383,827**	**5,572,774**	***At end of the year***

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	131,787	111,504	*Current service cost*
Bunga bersih	20,370	(22,775)	*Net interest*
Penyesuaian aset berdasarkan PSAK No.24	-	22,775	*Asset adjustment based on SFAS No.24*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	**152,157**	**111,504**	***Expense recognized in profit or loss***

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan (continued)***

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah: / *The key assumptions used in the above calculation are:*

	2016	2015	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	8%	8.75%	*Annual discount rate before normal retirement age*
Tingkat diskonto per tahun setelah usia pensiun normal:			*Annual salary growth rate after normal retirement age:*
Pembayaran bulanan	8%	11.00%	*Monthly payment*
20% *lumpsum*	11.00%	11.00%	*20% lumpsum*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	8%	9%	*Annual salary growth rate*
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	8%	8.75%	*Interest credited to refined contribution fund*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia 2011 (TMI2011)	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia 2011 (TMI2011)	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 20-29	4%	4%	*Age 20-29*
Umur 30-34	2%	2%	*Age 30-34*
Umur 35-39	1.2%	1.2%	*Age 35-39*
Umur 40-50	0.8%	0.8%	*Age 40-50*
Umur 51-52	0.4%	0.4%	*Age 51-52*
Umur >52	0%	0%	*Age >52*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut: / *The sensivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follow:*

		Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
2016	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	Biaya jasa kini/ *Current service cost*	**2016**
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(579,357)	(17,696)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	697,210	22,116	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	180,502	10,933	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(164,746)	(9,913)	

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / *Defined benefit pension plan (continued)*

Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation

2015	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	Biaya jasa kini/ *Current service cost*	2015
	Kenaikan/*increase* 1%	4,577,698	90,889	
Tingkat diskonto	Penurunan/*decrease* 1%	5,351,128	138,549	*Discount rate*
	Kenaikan/*increase* 1%	5,058,542	121,433	
Tingkat kenaikan gaji	Penurunan/*decrease* 1%	4,782,930	102,544	*Salary increase rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Aset program terdiri dari: (tidak diaudit) / *Plan assets comprise the following: (unaudited)*

	2016			2015			
	Dikutip/ *Quoted*	Tidak dikutip/ *Unquoted*	Jumlah/ *Total*	Dikutip/ *Quoted*	Tidak dikutip/ *Unquoted*	Jumlah/ *Total*	
Instrumen Ekuitas							***Equity instruments***
Saham							*Stocks*
Keuangan	940,976	-	940,976	219,053	-	219,053	*Financial*
Hasil Industri Untuk Konsumsi	-	-	-	195,143	-	195,143	*Consumption industries*
Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	-	-	-	96,451	-	96,451	*Property, Real estated and Construction*
Transportasi, Infrastruktur dan Utilities	-	-	-	87,320	-	87,320	*Transportation, infrastructur and Utilities*
Industri Lainnya	-	-	-	118,270	-	118,270	*Other industries*
Reksadana	98,950	-	98,950	27,171	-	27,171	*Mutual Funds*
Penempatan Langsung							*Direct Placement*
Perdagangan, Jasa, dan Investasi	-	1,000,984	1,000,984	-	360,758	360,758	*Trade, Services, and Investment*
Keuangan	-	-	-	-	113,472	113,472	*Financial*
Instrumen Utang							***Debt Instruments***
Obligasi	32,705	1,783,493	1,816,198	79,297	1,181,952	1,261,249	*Bonds*
Surat Berharga Pemerintah	419,169	1,181,257	1,600,426	320,362	1,121,602	1,441,964	*Government bonds*
Properti	95,757	103,418	199,175	24,569	19,952	44,521	***Property***
Kas dan setara Kas							***Cash and cash equivalents***
Deposito *on call*	-	15,321	15,321	-	171,719	171,719	*Deposit on call*
Deposito	-	711,797	711,797	-	1,379,762	1,379,762	*Deposit*
Jumlah	1,587,557	4,796,270	6,383,827	1,167,636	4,349,217	5,516,853	*Total*

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pasca kerja untuk tahun 2017 adalah Rp96.628 (tidak diaudit).

Bank tereskpos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi yang telah diatur dalam kerangka *Asset Liability Matching* (ALMA), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debts instruments. Debt instrument is expected to contribute best yields in long term at the acceptable risk level. For defined benefit program most of debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets in accordance to the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year 2017 is Rp96,628 (unaudited).

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans are as follows:

The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to Pension Fund.

To ensure the result of investments is consistent with the Asset Liability Management (ALMA) framework, Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investment will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumption used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefit with its realization.

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti adalah 10,88 tahun dan kewajiban iuran pasti adalah 12,70 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto untuk Entitas Induk adalah sebagai berikut:

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

The average duration of the defined benefit obligation is 10.88 years and defined contribution benefit obligation is 12.70 years.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit for Parent Only is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Pensiun	452,576	1,785,720	26,683,191	28,921,487	*Pension*
Cuti besar	80,956	424,720	2,919,368	3,425,044	*Long leave*
Penghargaan masa kerja	16,961	196,493	2,745,649	2,959,103	*Gratuity*
Jumlah	550,493	2,406,933	32,348,208	35,305,634	*Total*

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya, dimana kontribusi iuran proporsional antara Bank dan karyawan masing-masing adalah sebesar 75% dan 25% dari jumlah iuran pensiun yang ditetapkan oleh Bank untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi Bank dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti, atau imbalan kerja yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Hal ini akan mengakibatkan akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees, whereby the proportion of contribution between the Bank and employees are 75% and 25%, respectively, of the amount of pension contributions determined by the Bank for employees hired before 1 September 2005. For employees hired after 1 September 2005, the Bank and its employees contribute 11.5% and 3.5%, respectively, of the employees' salaries. The defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Permanent employees who joined the Bank prior to September 2005 are entitled to defined benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

The exposed risks in defined contribution plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and therefore, will cause accumulated actual contribution is lower than its assumption, increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Program pensiun iuran pasti (lanjutan) / ***Defined contribution pension plan (continued)***

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp65.945 dan Rp71.192 masing-masing untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp65,945 and Rp71,192 for the period and year ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Post employment benefits and other long-term employee benefits***

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The liability for post employee benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar PT Towers Watson Purbajaga dan 31 Desember 2015, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016, dan 22 Januari 2016.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the years ended 31 December 2016 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga and 31 December 2015 were prepared by a registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 31 December 2016 and 22 January 2016.

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui Bank pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the employee benefits liability recognized by Bank in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2016	2015	
Liabilitas neto pada awal tahun	1,441,472	1,370,978	*Net liability at the beginning of year*
Biaya selama tahun berjalan	307,086	298,082	*Expense recognized during current year*
Jumlah yang diakui pada laba komprehensif lain	(169,447)	(60,689)	*Total amount recognized in other comprehensive income*
Pembayaran imbalan	(198,692)	(166,899)	*Actual benefit payments*
Liabilitas yang diakui oleh Bank	**1,380,419**	**1,441,472**	***Liability recognized by Bank***

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi:

Employee benefit expense recognized by Bank in profit or loss:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	185,520	185,603	*Current service cost*
Biaya bunga	122,744	103,746	*Interest cost*
Kerugian aktuaria tahun berjalan - neto	(1,178)	8,733	*Net actuarial losses recognized in current year*
Biaya jasa lalu	-	-	*Past service cost*
Amortisasi biaya jasa masa lalu *non-vested*	-	-	*Amortization of past service cost non-vested*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	**307,086**	**298,082**	***Expense recognized in profit or loss***

43. IMBALAN KERJA (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2016	2015	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun:			*Annual discount rate:*
Kewajiban imbalan pasti	8.00%	8.75%	*Define benefit obligation*
Beban manfaat pasti	8.75%	8.00%	*Net benefit cost*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	8%	9%	*Annual salary growth rate*
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	8%	8.75%	*Interest credited to refined contribution fund*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia 2011 (TMI2011)	Tabel Mortalita yang disesuaikan/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia 2011 (TMI2011)	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 20-29	4%	4%	*Age 20-29*
Umur 30-34	2%	2%	*Age 30-34*
Umur 35-39	1.2%	1.2%	*Age 35-39*
Umur 40-50	0.8%	0.8%	*Age 40-50*
Umur 51-52	0.4%	0.4%	*Age 51-52*
Umur >52	0%	0%	*Age >52*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensivity of defined benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follow :

	Dampak program pensiun iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on defined contribution pension plan and other long-term employee benefits*			
2016	**Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption***	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	***2016***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(92,548)	(10,023)	
	Penurunan/*decrease* 1%	104,967	11,633	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	149,408	19,169	
	Penurunan/*decrease* 1%	(120,074)	(14,280)	*Salary increase rate*

43. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *43. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Post employment benefits and other long-term employee benefits (continued)***

2015	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Dampak program pensiun iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on defined contribution pension plan and other long-term employee benefits* — Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation*	Biaya jasa kini/ *Current service cost*	*2015*
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	1,492,265	181,206	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	1,402,172	192,037	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	1,584,402	202,607	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	1,317,759	171,309	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

44. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK / *44. BASIC AND DILUTED EARNINGSPER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITYHOLDERS OF THE PARENT ENTITY*

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of shares of outstanding common shares during the related year.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11,338,748	9,066,581	*Income for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	18,588,205,225	18,623,639,791	*Weighted average number of common shares outstanding*
Laba per saham dasar dan dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	**610**	**487**	***Basic and diluted earnings per share attributable to equityholders of the parent entity (in full Rupiah amount)***

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2016	2015	
Tagihan komitmen			***Commitments receivables***
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	56,936,424	26,818,865	*Unsettled forward purchased of foreign currency*
Lain-lain	458,782	332,085	*Others*
Total	**57,395,206**	**27,150,950**	***Total***
Liabilitas komitmen			***Commitments payable***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54,547,648	38,265,234	*Unused loan facilities*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	10,514,690	9,147,646	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	57,065,398	27,528,054	*Unsettled forward sales of foreign currency*
Total	**122,127,736**	**74,940,934**	***Total***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Garansi bank yang diterima	18,696,786	16,405,866	*Bank guarantees received*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4,475,842	3,851,659	*Interest receivable on non performing assets*
Lainnya	142,224	128,070	*Others*
Total	**23,314,852**	**20,385,595**	***Total***
Liabilitas kontinjensi			***Contingent payables***
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
Performance bonds	24,932,828	19,649,413	*Performance bonds*
Advance payment bonds	11,060,605	9,540,004	*Advance payment bonds*
Standby letters of credit	6,721,547	5,708,369	*Standby letters of credit*
Garansi bank lainnya	7,304,665	6,667,647	*Other bank guarantees*
Bid bonds	4,272,734	4,099,105	*Bid bonds*
Shipping guarantee	2,670	2,684	*Shipping guarantee*
Risk sharing	194	57,266	*Risk sharing*
Total	**54,295,243**	**45,724,488**	***Total***

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transactions in the normal course of Bank activities that have credit risk are as follows:

	2016	2015	
Garansi bank yang diterbitkan			*Bank guarantees issued*
Pihak yang berelasi (Catatan 46q)	18,366,969	13,429,898	*Related parties (Note 46q)*
Pihak ketiga	35,928,274	32,294,590	*Third parties*
Irrevocable letters of credit			*Irrevocable letters of credit*
Pihak yang berelasi (Catatan 46r)	6,238,557	4,675,931	*Related parties (Note 46r)*
Pihak ketiga	4,276,133	4,471,715	*Third parties*
	64,809,933	**54,872,134**	

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transactions that have credit risk by collectibility are as follows:

	2016	2015	
Lancar	64,516,506	53,864,161	*Current*
Dalam perhatian khusus	287,631	951,002	*Special mention*
Kurang lancar	1,074	50,793	*Substandard*
Diragukan	26	-	*Doubtful*
Macet	4,696	6,178	*Loss*
Total	**64,809,933**	**54,872,134**	***Total***

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Jenis hubungan / *a. Type of relationships*

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia	***Control through The Government of The Republic of Indonesia***
Adhi Karya dan Entitas Anak	*Adhi Karya and subsidiaries*
Amarta Karya	*Amarta Karya*
Aneka Tambang dan Entitas Anak	*Aneka Tambang and subsidiaries*
Angkasa Pura I dan Entitas Anak	*Angkasa Pura I and subsidiaries*
Angkasa Pura II dan Entitas Anak	*Angkasa Pura II and subsidiaries*
ASABRI	*ASABRI*
ASDP Ferry Indonesia	*ASDP Ferry Indonesia*
Asuransi Jasa Indonesia	*Asuransi Jasa Indonesia*
Asuransi Jasa Raharja dan Entitas Anak	*Asuransi Jasa Raharja and subsidiaries*
Asuransi Jiwasraya	*Asuransi Jiwasraya*
Asuransi Kredit Indonesia dan Entitas Anak	*Asuransi Kredit Indonesia and subsidiaries*
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Entitas Anak	*Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and subsidiaries*
Balai Pustaka	*Balai Pustaka*
Bank Mandiri dan Entitas Anak	*Bank Mandiri and subsidiaries*
Bank Rakyat Indonesia	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Tabungan Negara	*Bank Tabungan Negara*
Barata Indonesia	*Barata Indonesia*
Berdikari dan Entitas Anak	*Berdikari and subsidiaries*
Bhanda Ghara Reksa dan Entitas Anak	*Bhanda Ghara Reksa and subsidiaries*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

Bina Karya
Biofarma
Biro Klasifikasi Indonesia
Boma Bisma Indra
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Brantas Abipraya
Bulog dan Entitas Anak
Dahana
Damri
Danareksa dan Entitas Anak
Dirgantara Indonesia dan Entitas Anak
Djakarta Lloyd dan Entitas Anak
Dok & Perkapalan Kodja Bahari
Dok dan Perkapalan Surabaya
Garam
Garuda Indonesia dan Entitas Anak
Hotel Indonesia Natour
Hutama Karya dan Entitas Anak
IGLAS
Indah Karya
Indofarma dan Entitas Anak
Indonesia Asahan Aluminium
Indra Karya
Industri Kapal Indonesia
Industri Kereta Api dan Entitas Anak
Industri Sandang Nusantara
Industri Telekomunikasi Indonesia
Istaka Karya
Jaminan Kredit Indonesia
Jasa Marga dan Entitas Anak
Jasa Tirta I
Jasa Tirta II
Kawasan Berikat Nusantara
Kawasan Industri Makassar
Kawasan Industri Medan

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Type of relationships (continued)

Control through The Government of The Republic of Indonesia

Bina Karya
Biofarma
Biro Klasifikasi Indonesia
Boma Bisma Indra
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Brantas Abipraya
Bulog and subsidiaries
Dahana
Damri
Danareksa and subsidiaries
Dirgantara Indonesia and subsidiaries
Djakarta Lloyd and subsidiaries
Dok & Perkapalan Kodja Bahari
Dok dan Perkapalan Surabaya
Garam
Garuda Indonesia and subsidiaries
Hotel Indonesia Natour
Hutama Karya and subsidiaries
IGLAS
Indah Karya
Indofarma and subsidiaries
Indonesia Asahan Aluminium
Indra Karya
Industri Kapal Indonesia
Industri Kereta Api and subsidiaries
Industri Sandang Nusantara
Industri Telekomunikasi Indonesia
Istaka Karya
Jaminan Kredit Indonesia
Jasa Marga and subsidiaries
Jasa Tirta I
Jasa Tirta II
Kawasan Berikat Nusantara
Kawasan Industri Makassar
Kawasan Industri Medan

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

a. Type of relationships (continued)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

Control through The Government of The Republic of Indonesia

Kawasan Industri Wijayakusuma	*Kawasan Industri Wijayakusuma*
Kementerian Keuangan	*Kementerian Keuangan*
Kereta Api Indonesia dan Entitas Anak	*Kereta Api Indonesia and subsidiaries*
Kertas Kraft Aceh	*Kertas Kraft Aceh*
Kertas Leces	*Kertas Leces*
Kimia Farma dan Entitas Anak	*Kimia Farma and subsidiaries*
Kliring Berjangka Indonesia	*Kliring Berjangka Indonesia*
Krakatau Steel dan Entitas Anak	*Krakatau Steel and subsidiaries*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)*
LEN Industri dan Entitas Anak	*LEN Industri and subsidiaries*
LKBN Antara	*LKBN Antara*
Merpati Nusantara Airlines	*Merpati Nusantara Airlines*
PAL Indonesia dan Entitas Anak	*PAL Indonesia and subsidiaries*
PANN dan Entitas Anak	*PANN and subsidiaries*
Pegadaian dan Entitas Anak	*Pegadaian and subsidiaries*
Pelabuhan Indonesia I dan Entitas Anak	*Pelabuhan Indonesia I and subsidiaries*
Pelabuhan Indonesia II dan Entitas Anak	*Pelabuhan Indonesia II and subsidiaries*
Pelabuhan Indonesia III dan Entitas Anak	*Pelabuhan Indonesia III and subsidiaries*
Pelabuhan Indonesia IV dan Entitas Anak	*Pelabuhan Indonesia IV and subsidiaries*
Pelayaran Nasional Indonesia dan Entitas Anak	*Pelayaran Nasional Indonesia and subsidiaries*
Pembangunan Perumahan dan Entitas Anak	*Pembangunan Perumahan and subsidiaries*
Percetakan Negara Republik Indonesia	*Percetakan Negara Republik Indonesia*
Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak	*Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries*
Perhutani dan Entitas Anak	*Perhutani and subsidiaries*
Perikanan Indonesia	*Perikanan Indonesia*
Perikanan Nusantara	*Perikanan Nusantara*
Perkebunan Nusantara III dan Entitas Anak	*Perkebunan Nusantara III and subsidiaries*
Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak	*Permodalan Nasional Madani and subsidiaries*
Pertamina dan Entitas Anak	*Pertamina and subsidiaries*
Pertani	*Pertani*
Perumnas	*Perumnas*
Perusahaan Gas Negara dan Entitas Anak	*Perusahaan Gas Negara and subsidiaries*
Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak	*Perusahaan Listrik Negara and subsidiaries*
Perusahaan Pengelola Aset dan Entitas Anak	*Perusahaan Pengelola Aset and subsidiaries*
Perusahaan Perdagangan Indonesia	*Perusahaan Perdagangan Indonesia*
Pindad dan Entitas Anak	*Pindad and subsidiaries*
Pos Indonesia dan Entitas Anak	*Pos Indonesia and subsidiaries*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

Primissima	*Primissima*
Pupuk Indonesia Holding Company dan Entitas Anak	*Pupuk Indonesia Holding Company and subsidiaries*
Rajawali Nusantara Indonesia dan Entitas Anak	*Rajawali Nusantara Indonesia and subsidiaries*
Reasuransi Indonesia Utama dan Entitas Anak	*Reasuransi Indonesia Utama and subsidiaries*
Sang Hyang Seri	*Sang Hyang Seri*
Sarana Karya	*Sarana Karya*
Sarana Multigriya Finansial	*Sarana Multigriya Finansial*
Sarinah dan Entitas Anak	*Sarinah and subsidiaries*
Semen Baturaja	*Semen Baturaja*
Semen Indonesia dan Entitas Anak	*Semen Indonesia and subsidiaries*
Sucofindo dan Entitas Anak	*Sucofindo and subsidiaries*
Surveyor Indonesia	*Surveyor Indonesia*
Tambang Batubara Bukit Asam dan Entitas Anak	*Tambang Batubara Bukit Asam and subsidiaries*
Taspen dan Entitas Anak	*Taspen and subsidiaries*
Telekomunikasi Indonesia dan Entitas Anak	*Telekomunikasi Indonesia and subsidiaries*
Timah dan Entitas Anak	*Timah and subsidiaries*
Varuna Tirta Prakasya	*Varuna Tirta Prakasya*
Virama Karya	*Virama Karya*
Waskita Karya dan Entitas Anak	*Waskita Karya and subsidiaries*
Wijaya Karya dan Entitas Anak	*Wijaya Karya and subsidiaries*
Yodya Karya	*Yodya Karya*

Pengendalian Kegiatan Perusahaan

Manajemen Kunci	*Key Management*

a. Type of relationships (continued)

Control through The Government of The Republic of Indonesia

Control on Company's Activities

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Giro pada bank lain / *b. Current account with other banks*

	2016	2015	
Bank Mandiri	1,655,195	1,469,438	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia	303	79	*Bank Rakyat Indonesia*
Total	**1,655,498**	**1,469,517**	***Total***

c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia / *c. Placements with other banks and Bank Indonesia*

	2016	2015	
Bank Tabungan Negara	423,215	266,866	*Bank Tabungan Negara*
Bank Mandiri	213,079	337,957	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia	76,732	448,255	*Bank Rakyat Indonesia*
Total	**713,026**	**1,053,078**	***Total***

d. Efek-efek / *d. Marketable securities*

	2016	2015	
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	1,360,531	37,501	*Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*
Danareksa	928,208	340,875	*Danareksa*
Bank Rakyat Indonesia	407,467	5,016	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	331,402	17,754	*Bank Mandiri*
Permodalan Nasional Madani	283,420	217	*Permodalan Nasional Madani*
Pelabuhan Indonesia II	267,103	273,066	*Pelabuhan Indonesia II*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	261,187	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor*
Bank Tabungan Negara	213,454	175,743	*Bank Tabungan Negara*
Garuda Indonesia	141,872	141,796	*Garuda Indonesia*
Pertamina	96,614	136,030	*Pertamina*
Waskita Karya	91,509	2,997	*Waskita Karya*
Sarana Multigriya Finansial	77,548	11,731	*Sarana Multigriya Finansial*
Perusahaan Listrik Negara	47,090	126,949	*Perusahaan Listrik Negara*
Telekomunikasi Indonesia	41,955	18,410	*Telekomunikasi Indonesia*
Lain-lain	137,225	68,219	*Others*
Total	**4,686,585**	**1,356,304**	***Total***

e. Wesel ekspor dan tagihan lainnya / *e. Bills and other receivables*

	2016	2015	
Adhi Karya	1,787,265	-	*Adhi Karya*
Waskita Karya	1,090,193	1,708,531	*Waskita Karya*
Brantas Abipraya	653,799	425,656	*Brantas Abipraya*
Wijaya Karya	631,480	366,854	*Wijaya Karya*
Hutama Karya	498,574	208,593	*Hutama Karya*
Bank Mandiri	328,843	53,591	*Bank Mandiri*
Nindya Karya	133,223	61,946	*Nindya Karya*
Lain-lain	82,221	71,048	*Others*
Total	**5,205,598**	**2,896,219**	***Total***

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

f. Tagihan akseptasi / *f. Acceptances receivables*

	2016	2015	
Garuda Indonesia	1,691,031	76,111	*Garuda Indonesia*
Pembangunan Perumahan	254,450	58,509	*Pembangunan Perumahan*
Hutama Karya	227,160	109,267	*Hutama Karya*
Pindad	214,599	58,441	*Pindad*
Krakatau Steel	182,284	25,126	*Krakatau Steel*
Wijaya Karya	149,690	134,871	*Wijaya Karya*
Dirgantara Indonesia	95,415	198,160	*Dirgantara Indonesia*
Dahana	90,318	81,703	*Dahana*
Nindya Karya	80,625	127,278	*Nindya Karya*
Lain-lain	130,136	367,408	*Others*
Total	**3,115,708**	**1,236,874**	***Total***

g. Tagihan derivatif / *g. Derivatives receivables*

	2016	2015	
Garuda Indonesia	33,696	104,686	*Garuda Indonesia*
Bank Mandiri	6,699	1,419	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia	4,984	7	*Bank Rakyat Indonesia*
Lain-lain	2,726	12,790	*Others*
Total	**48,105**	**118,902**	***Total***

h. Pinjaman yang diberikan / *h. Loans*

	2016	2015	
Perusahaan Listrik Negara	19,261,255	10,644,337	*Perusahaan Listrik Negara*
Pegadaian	5,378,658	4,940,006	*Pegadaian*
Telekomunikasi Indonesia	4,621,145	3,808,352	*Telekomunikasi Indonesia*
Bulog	4,487,128	793	*Bulog*
Krakatau Steel	3,607,965	2,117,992	*Krakatau Steel*
Petrokimia Gresik	3,378,668	4,092,364	*Petrokimia Gresik*
Waskita Karya	3,578,039	745,461	*Waskita Karya*
Jasa Marga	2,794,921	1,404,660	*Jasa Marga*
PANN	2,604,902	2,497,066	*PANN*
Perkebunan Nusantara III	2,389,116	1,078,105	*Perkebunan Nusantara III*
Tambang Batubara Bukit Asam	2,304,160	2,513,414	*Tambang Batubara Bukit Asam*
Perkebunan Nusantara VII	2,126,730	2,149,862	*Perkebunan Nusantara VII*
Pertamina	2,031,054	1,486	*Pertamina*
Kereta Api Indonesia	1,897,367	2,297,209	*Kereta Api Indonesia*
Kementerian Keuangan	1,635,296	647,573	*Kementerian Keuangan*
Garuda Indonesia	1,596,823	631,823	*Garuda Indonesia*
Pupuk Sriwijaya	1,187,151	1,084,836	*Pupuk Sriwijaya*
Rajawali Nusindo	1,042,903	758,916	*Rajawali Nusindo*
Pupuk Iskandar Muda	1,014,000	924,795	*Pupuk Iskandar Muda*
PAL Indonesia	905,478	938,258	*PAL Indonesia*
Perkebunan Nusantara IV	798,613	-	*Perkebunan Nusantara IV*
Pelabuhan Indonesia III	625,000	11,951	*Pelabuhan Indonesia III*
Angkasa Pura I	621,300	688,994	*Angkasa Pura I*
Semen Baturaja	599,427	-	*Semen Baturaja*
Dirgantara Indonesia	568,357	-	*Dirgantara Indonesia*
Wijaya Karya	504,220	381,095	*Wijaya Karya*
Perkebunan Nusantara V	500,000	-	*Perkebunan Nusantara V*
Pembangunan Perumahan	494,383	204,274	*Pembangunan Perumahan*
Pindad	441,927	290,001	*Pindad*
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	432,087	-	*Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia*
Hutama Karya	430,478	239,714	*Hutama Karya*
Pupuk Indonesia	426,277	-	*Pupuk Indonesia*
Perkebunan Nusantara XI	414,272	96,694	*Perkebunan Nusantara XI*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan) / *Loans (continued)*

	2016	2015	
Rekayasa Industri	350,052	203,201	*Rekayasa Industri*
Mega Eltra	313,948	232,124	*Mega Eltra*
Pos Indonesia	294,858	374,301	*Pos Indonesia*
Perusahaan Gas Negara	252,609	-	*Perusahaan Gas Negara*
Adhi Karya	250,000	-	*Adhi Karya*
Industri Gula Glenmore	223,021	-	*Industri Gula Glenmore*
Pupuk Kujang	211,266	618,994	*Pupuk Kujang*
Dahana	169,744	171,641	*Dahana*
IGLAS	156,567	157,582	*IGLAS*
Pelabuhan Indonesia I	155,722	48,516	*Pelabuhan Indonesia I*
Permodalan Nasional Madani	153,620	167,500	*Permodalan Nasional Madani*
Brantas Abipraya	99,869	99,551	*Brantas Abipraya*
Perusahaan Perdagangan Indonesia	99,791	-	*Perusahaan Perdagangan Indonesia*
Sang Hyang Seri	97,500	98,403	*Sang Hyang Seri*
Perumnas	94,419	99,659	*Perumnas*
LEN Industri	92,839	17,445	*LEN Industri*
Angkasa Pura II	82,838	-	*Angkasa Pura II*
Perkebunan Nusantara VIII	72,547	-	*Perkebunan Nusantara VIII*
Percetakan Uang Republik Indonesia	70,468	99,002	*Percetakan Uang Republik Indonesia*
Perikanan Indonesia	52,578	-	*Perikanan Indonesia*
Virama Karya	51,390	-	*Virama Karya*
Lain-lain	148,836	839,412	*Others*
Total	**78,193,582**	**48,417,362**	***Total***

i. Simpanan nasabah / *Deposits from customers*

	2016	2015	
Pertamina	14,509,204	9,181,220	*Pertamina*
Perusahaan Listrik Negara	10,559,324	4,426,697	*Perusahaan Listrik Negara*
Pelabuhan Indonesia II	4,927,336	81,712	*Pelabuhan Indonesia II*
Perusahaan Gas Negara	4,166,171	2,614,511	*Perusahaan Gas Negara*
Telekomunikasi Indonesia	3,315,077	5,739,334	*Telekomunikasi Indonesia*
Waskita Karya	3,262,602	1,899,046	*Waskita Karya*
BPJS Kesehatan	1,906,443	799,546	*BPJS Kesehatan*
Indonesia Asahan Aluminium	1,869,301	-	*Indonesia Asahan Aluminium*
Hutama Karya	1,724,177	1,157,185	*Hutama Karya*
Krakatau Steel	1,658,137	158,715	*Krakatau Steel*
BPJS Ketenagakerjaan	1,461,736	3,165,008	*BPJS Ketenagakerjaan*
Wijaya Karya	1,419,215	122,652	*Wijaya Karya*
Garuda Indonesia	1,245,157	388,938	*Garuda Indonesia*
Pembangunan Perumahan	1,203,778	144,280	*Pembangunan Perumahan*
Petrokimia Gresik	1,200,805	959,183	*Petrokimia Gresik*
Kementerian Keuangan	1,153,026	2,587,003	*Kementerian Keuangan*
Asuransi Jiwasraya	1,087,055	971,708	*Asuransi Jiwasraya*
Angkasa Pura II	1,039,429	212,848	*Angkasa Pura II*
Kereta Api Indonesia	1,014,855	772,840	*Kereta Api Indonesia*
Tambang Batubara Bukit Asam	955,269	1,028,122	*Tambang Batubara Bukit Asam*
Jasa Marga	797,606	760,686	*Jasa Marga*
Bulog	587,259	1,756	*Bulog*
Pelabuhan Indonesia I	585,418	512,417	*Pelabuhan Indonesia I*
Pupuk Indonesia	582,342	300,666	*Pupuk Indonesia*
Asuransi Jasa Indonesia	517,541	833,230	*Asuransi Jasa Indonesia*
Barata Indonesia	500,176	366	*Barata Indonesia*
Pelabuhan Indonesia IV	484,009	57,325	*Pelabuhan Indonesia IV*
Semen Gresik	443,463	429,204	*Semen Gresik*
Pelabuhan Indonesia III	404,992	390,495	*Pelabuhan Indonesia III*
Adhi Karya	387,904	136,072	*Adhi Karya*
Pindad	352,063	192,657	*Pindad*
Asuransi Kredit Indonesia	344,274	47,893	*Asuransi Kredit Indonesia*
Aneka Tambang	341,288	874,536	*Aneka Tambang*
Perumnas	335,095	1,027,591	*Perumnas*
PAL Indonesia	334,068	972,775	*PAL Indonesia*
Perikanan Indonesia	311,966	-	*Perikanan Indonesia*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

i. Simpanan nasabah (lanjutan) / *i. Deposits from customers (continued)*

	2016	2015	
Perkebunan Nusantara III	267,673	262,863	*Perkebunan Nusantara III*
Perkebunan Nusantara XI	265,582	40,390	*Perkebunan Nusantara XI*
Dirgantara Indonesia	243,878	281,799	*Dirgantara Indonesia*
Brantas Abipraya	233,072	224,563	*Brantas Abipraya*
Kliring Berjangka Indonesia	226,973	82,230	*Kliring Berjangka Indonesia*
Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia	214,557	-	*Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia*
Pos Indonesia	207,852	191,056	*Pos Indonesia*
Angkasa Pura I	194,747	297,286	*Angkasa Pura I*
Perkebunan Nusantara IV	176,781	40,809	*Perkebunan Nusantara Iv*
Jaminan Kredit Indonesia	176,705	239,009	*Jaminan Kredit Indonesia*
Nindya Karya	161,398	195,442	*Nindya Karya*
Perkebunan Nusantara VII	157,015	215,408	*Perkebunan Nusantara VII*
Perusahaan Perdagangan Indonesia	144,360	4,563	*Perusahaan Perdagangan Indonesia*
Inhutani V	137,446	202,278	*Inhutani V*
Perkebunan Nusantara XII	135,236	169	*Perkebunan Nusantara XII*
Dahana	132,052	123,906	*Dahana*
Rekayasa Industri	131,781	235,137	*Rekayasa Industri*
Asuransi Jasa Raharja	117,968	253,927	*Asuransi Jasa Raharja*
Percetakan Uang Republik Indonesia	107,518	76,654	*Percetakan Uang Republik Indonesia*
Permodalan Nasional Madani	101,974	1,032,033	*Permodalan Nasional Madani*
Lain-Lain	1,459,767	3,939,131	*Others*
Total	**71,981,896**	**50,886,870**	***Total***

j. Simpanan dari bank lain / *j. Deposits from other banks*

	2016	2015	
Bank Tabungan Negara	318,426	164,958	*Bank Tabungan Negara*
Bank Mandiri	278,257	1,371	*Bank Mandiri*
Bank Rakyat Indonesia	98,370	13,558	*Bank Rakyat Indonesia*
LPEI	669	-	*LPEI*
Total	**695,722**	**179,887**	***Total***

k. Liabilitas derivatif / *k. Derivatives payable*

	2016	2015	
Bank Rakyat Indonesia	7,219	-	*Bank Rakyat Indonesia*
Bank Mandiri	1,749	1,394	*Bank Mandiri*
Perusahaan Listrik Negara	1,236	-	*Perusahaan Listrik Negara*
Garuda Indonesia	203	-	*Garuda Indonesia*
Krakatau Steel	36	370	*Krakatau Steel*
Lain-lain	536	981	*Others*
Total	**10,979**	**2,745**	***Total***

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

l. Liabilitas akseptasi / *l. Acceptances payable*

	2016	2015	
Pindad	199,922	-	*Pindad*
Garuda Indonesia	197,644	-	*Garuda Indonesia*
Pembangunan Perumahan	191,559	-	*Pembangunan Perumahan*
Hutama karya	131,357	-	*Hutama Karya*
Dahana	93,098	-	*Dahana*
Wijaya Karya	66,172	-	*Wijaya Karya*
Krakatau Steel	58,824	-	*Krakatau Steel*
Adhi Karya	33,124	-	*Adhi Karya*
Dirgantara Indonesia	32,873	-	*Dirgantara Indonesia*
Nindya karya	30,507	-	*Nindya Karya*
LEN Industri	17,160	-	*LEN Industri*
Lain-lain	41,468	491,533	*Others*
Total	**1,093,708**	**491,533**	***Total***

m. Dana Syirkah Temporer - Giro *Mudharabah* / *m. Temporary Syirkah Funds – Mudharabah Current Accounts*

	2016	2015	
Pemerintah Republik Indonesia	126,634	-	*The Government of Republic Indonesia*
Pertamina	5,913	-	*Pertamina*
Pegadaian	752	-	*Pegadaian*
Asuransi Jasa Indonesia	90	-	*Asuransi Jasa Indonesia*
Lain-lain	7,726	10	*Others*
Total	**141,115**	**10**	***Total***

n. Dana Syirkah Temporer - Deposito *Mudharabah* / *n. Temporary Syirkah Funds – Mudharabah Deposit Accounts*

	2016	2015	
Pemerintah Republik Indonesia	7,054,485	-	*The Government of Republic Indonesia*
Pertamina	400,000	-	*Pertamina*
Manajemen kunci	10,104	4,559	*Key Management*
Pertamina Gas	-	179,205	*Pertamina Gas*
Pelabuhan Indonesia II	-	137,850	*Pelabuhan Indonesia II*
Asuransi Jasa Indonesia	-	2,525	*Asuransi Jasa Indonesia*
Lain-lain	66,002	10,000	*Others*
Total	**7,530,591**	**334,139**	***Total***

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

o. Dana Syirkah Temporer - Tabungan *Mudharabah* / *Temporary Syirkah Funds – Mudharabah Saving Accounts*

	2016	2015	
Manajemen kunci	13,830	8,778	*Key Management*
Jamsostek	12	-	*Jamsostek*
Bumi Putera	7	-	*Bumi Putera*
Total	**13,849**	**8,778**	***Total***

p. Sukuk *Mudharabah* / *Sukuk Mudharabah*

	2016	2015	
Bank Syariah Mandiri	100,000	100,000	*Bank Syariah Mandiri*
Danareksa	25,000	-	*Danareksa*
Penjaminan Infrastruktur Indonesia	20,000	-	*Penjaminan Infrastruktur Indonesia*
Asuransi Jasa Indonesia	10,000	-	*Asuransi Jasa Indonesia*
Lainnya	10,000	51,000	*Others*
Total	**165,000**	**151,000**	***Total***

q. Garansi bank yang diterbitkan / *Bank guarantees issued*

	2016	2015	
Hutama Karya	2,983,713	2,632,751	*Hutama Karya*
Waskita Karya	2,531,086	3,073,846	*Waskita Karya*
Nindya Karya	1,593,224	992,257	*Nindya Karya*
Brantas Abipraya	1,375,188	818,350	*Brantas Abipraya*
Pembangunan Perumahan	1,295,762	191,673	*Pembangunan Perumahan*
Pertamina	1,244,240	1,360,016	*Pertamina*
Wijaya Karya	1,164,496	329,134	*Wijaya Karya*
Bank Mandiri	940,471	136,147	*Bank Mandiri*
Perusahaan Listrik Negara	771,797	637,158	*Perusahaan Listrik Negara*
Rekayasa Industri	650,958	248,831	*Rekayasa Industri*
Adhi Karya	429,787	-	*Adhi Karya*
Dirgantara Indonesia	421,837	625,920	*Dirgantara Indonesia*
Kereta Api Indonesia	420,323	281,508	*Kereta Api Indonesia*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	392,140	199,104	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor*
Telekomunikasi Indonesia	351,214	178,934	*Telekomunikasi Indonesia*
Perusahaan Gas Negara	313,319	299,745	*Perusahaan Gas Negara*
Tambang Batubara Bukit Asam	284,177	253,057	*Tambang Batubara Bukit Asam*
Krakatau Steel	186,872	322,265	*Krakatau Steel*
PAL Indonesia	168,157	10,120	*PAL Indonesia*
LEN Industri	118,050	107,729	*LEN Industri*
Pupuk Iskandar Muda	113,584	119,708	*Pupuk Iskandar Muda*
Semen Gresik	110,037	6,214	*Semen Gresik*
Garuda Indonesia	83,821	84,746	*Garuda Indonesia*
Rajawali Nusindo	72,440	40,578	*Rajawali Nusindo*
Mega Eltra	46,930	63,628	*Mega Eltra*
Dahana	46,142	77,893	*Dahana*
Kertas Kraft Aceh	43,686	1,254	*Kertas Kraft Aceh*
Asuransi Jasa Indonesia	40,210	9,578	*Asuransi Jasa Indonesia*
Lain-lain	173,308	327,754	*Others*
Total	**18,366,969**	**13,429,898**	***Total***

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

r. *Letter of Credit*

	2016	2015	
Telekomunikasi Indonesia	1,734,578	1,102,890	*Telekomunikasi Indonesia*
Bulog	1,055,573	292,132	*Bulog*
Krakatau Steel	701,044	529,470	*Krakatau Steel*
Pertamina	529,459	212,769	*Pertamina*
Pembangunan Perumahan	471,550	148,833	*Pembangunan Perumahan*
Semen Baturaja	359,083	469,384	*Semen Baturaja*
Kereta Api Indonesia	341,618	429,276	*Kereta Api Indonesia*
Pindad	164,703	221,994	*Pindad*
Dirgantara Indonesia	134,541	279,423	*Dirgantara Indonesia*
Nindya Karya	126,792	198,531	*Nindya Karya*
Perkebunan Nusantara V	87,717	-	*Perkebunan Nusantara V*
Hutama Karya	86,437	57,233	*Hutama Karya*
Petrokimia Gresik	67,206	104,640	*Petrokimia Gresik*
Pupuk Kujang	42,981	57,065	*Pupuk Kujang*
Garuda Indonesia	41,669	43,460	*Garuda Indonesia*
Semen Gresik	40,188	107,566	*Semen Gresik*
Lain-lain	253,418	421,265	*Others*
Total	**6,238,557**	**4,675,931**	***Total***

s. Gaji dan tunjangan / *s. Salaries and benefits*

	2016	2015	
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja jangka panjang Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Executive Vice President* dan *Senior Vice President*	**122,791**	**104,685**	***Salaries, allowance and long-term employment benefits Commisioners, Board of Directors, Executive Vice President and Senior Vice President***
Tantiem, bonus Dewan Komisaris, Direksi, *Executive Vice President* dan *Senior Vice President*	**138,013**	**167,060**	***Tantiem, bonus Board of Commisioners, Board of Directors, Executive Vice President and and Senior Vice President***

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The details balances of transactions with related parties as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Aset			***Asset***
Giro pada bank lain	1,655,498	1,469,517	*Current account with other bank*
Penempatan pada bank lain	713,026	1,053,078	*Placement with other banks*
Efek-efek	4,686,585	1,356,304	*Marketable securities*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	5,205,598	2,896,219	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	3,115,708	1,236,874	*Acceptances receivables*
Tagihan derivative	48,105	118,902	*Derivatives receivables*
Pinjaman yang diberikan	78,193,582	48,417,362	*Loans*
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi	93,618,102	56,548,256	*Total assets with related parties*
Jumlah aset konsolidasian	603,031,880	508,595,288	*Total consolidation assets*
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	15.5%	11.1%	*Percentage of total assets with related parties to total consolidated assets*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

	2016	2015	
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah	71,981,896	50,886,870	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	695,722	179,887	*Deposit from other banks*
Liabilitas derivatif	10,979	2,745	*Derivatives payable*
Liabilitas akseptasi	1,093,708	491,533	*Acceptance payable*
Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	73,782,305	51,561,035	*Total liabilities with related parties*
Jumlah liabilitas konsolidasian	492,701,125	412,727,677	*Total consolidation liabilities*
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	15.0%	12.5%	*Percentage of total liabilities with related parties to total consolidated liabilities*
Dana Syirkah Temporer			***Temporary Syirkah Funds***
Simpanan Mudharabah	7,685,555	342,927	*Mudharabah Saving*
Sukuk Mudharabah	165,000	151,000	*Mudharabah Sukuk*
Jumlah Dana Syirkah Temporer Pihak-pihak berelasi	7,850,555	493,927	*Total Temporary Syirkah Funds with related parties*
Jumlah Dana Syirkah Temporer	21,076,755	17,429,389	*Total Temporary Syirkah Funds*
Persentase jumlah Dana Syirkah Temporer kepada pihak-pihak Berelasi terhadap jumlah Dana Syirkah Temporer konsolidasian	3.8%	2.8%	*Percentage of total temporary syirkah funds with related partiesto total consolidated Temporary syirkah funds*

47. INFORMASI SEGMEN / *SEGMENT INFORMATION*

Segmen operasi Grup dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: Korporasi, Komersial dan Kecil, Konsumer dan Ritel, Tresuri dan Institusi Keuangan, Kantor Pusat dan Entitas Anak. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Transaksi antar segmen usaha diperlakukan seperti transaksi pihak ketiga yang dicatat ke dalam masing-masing segmen dan dieliminasi di tingkat Bank.

The Group's operating segments represent the key customer and product groups, as follows: Corporate, Commercial and Small, Consumer and Retail, Treasury and Financial Institution, Head Office and Subsidiaries. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies. Transactions between business segments are recorded within the segment as if they are third party transactions and are eliminated at the Bank level.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

The following summary describes the operations in each of the Bank's reportable segments:

47. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

- **Konsumer dan Ritel**: termasuk kredit pembiayaan konsumsi antara lain kredit kepemilikan rumah, kartu kredit dan transaksi-transaksi lain atas nasabah konsumer, serta termasuk kredit yang diberikan kepada individu dengan skala ritel.
- **Tresuri dan Institusi Keuangan**: terkait dengan kegiatan tresuri Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market, capital market* dan *fixed income*, termasuk antara lain bisnis perbankan internasional dan supervisi cabang luar negeri.
- **Kantor Pusat**: merupakan penyediaan jasa secara sentralisasi kepada segmen lainnya.
- **Entitas Anak**: seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan syariah, asuransi, pembiayaan konsumen dan sekuritas.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

- ***Consumer and Retail**: includes consumer loan such as housing loans, credit cards and other transactions with consumer loans, and including loans to retail customers.*
- ***Treasury and Financial Institution**: treasury activities include foreign exchange, money market, capital market and fixed income, also including international banking and overseas branch supervision.*
- ***Head Office**: represent centralized services for other segments.*
- ***Subsidiaries**: all transactions from Subsidiaries in sharia banking, insurance, consumer financing and securities.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

Information concerning the operating segments of the Group are set out in the table below:

	2016								
	Korporasi/ *Corporate*	Komersial dan Kecil/ *Commercial and Small*	Konsumer dan Ritel/ *Consumer and Retail*	Tresuri dan Insitusi Keuangan/ *Treasury and Financial Institution*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***)	Konsolidasi/ *Consolidation*	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto *)	11,358,064	6,039,041	9,245,780	1,913,248	-	1,966,356	(527,427)	29,995,062 2	*Interest income and sharia income - net*
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	1,341,561	-	1,341,561	*Premium income - net*
Pendapatan operasional lainnya	2,232,985	987,102	5,284,685	2,568,702	(288,576)	406,953	(1,229,168)	9,962,683	*Other operating income*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(3,091,255)	(2,285,709)	(1,518,976)	(13,760)	(620,343)	(323,088)	-	(7,853,131)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(2,745,881)	(1,846,954)	(6,391,948)	(1,163,554)	(4,331,755)	(2,803,418)	66,667	(19,216,843)	*Other operating expenses*
Laba operasional	7,753,913	2,893,480	6,619,541	3,304,636	(5,240,674)	588,364	(1,689,928)	14,229,332	*Operating income*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	530	58	25,643	(4,270)	19,989	31,623	-	73,573	*Non operating income/ (expenses) - net*
Laba sebelum beban pajak	7,754,443	2,893,538	6,645,184	3,300,366	(5,220,685)	619,987	(1,689,928)	14,302,905	*Income before tax expense*
Total aset	189,076,652	104,980,702	64,458,486	246,881,502	12,202,226	42,888,227	(57,455,915)	603,031,880	*Total assets*
Total liabilitas	226,359,058	86,903	208,459,001	51,404,578	7,065,052	13,637,027	(14,310,494)	492,707,125	*Total liabilities*

*) termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi
**) termasuk eliminasi *internal transfer pricing* atau reklaisifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap entitas anak

*) *Includes componen of internal transfer pricing between operating segment*
**) *Includes elimination of internal transfer pricing or reclassification beetween operating segment and elimination of subsidiaries*

47. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *47. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2015								
	Korporasi/ *Corporate*	Komersial dan Kecil/ *Commercial and Small*	Konsumer dan Ritel/ *Consumer and Retail*	Tresuri dan Insitusi Keuangan/ *Treasury and Financial Institution*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasi/ *Consolidation*	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	8,443,784	5,685,669	8,548,640	1,589,287	-	1,618,871	(326,055)	25,560,196	*Interest income and sharia income - net*
Pendapatan premi - neto	-	-	-	-	-	825,662	-	825,662	*Premium income - net*
Pendapatan operasional lainnya	1,591,005	1,422,997	4,668,911	1,621,255	(257,754)	597,286	(771,320)	8,872,380	*Other operating income*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1,615,705)	(3,554,773)	(1,643,272)	(224,532)	(99,000)	(198,977)	-	(7,336,259)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(2,613,926)	(1,317,572)	(6,017,579)	(1,061,535)	(3,129,230)	(2,370,056)	-	(16,509,898)	*Other operating expenses*
Laba operasional	5,805,158	2,236,321	5,556,700	1,924,475	(3,485,984)	472,786	(1,097,375)	11,412,081	*Operating income*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	217	(1)	3,041	8,041	(32,119)	74,888	-	54,067	*Non operating income/ (expenses) - net*
Laba sebelum beban pajak	5,805,375	2,236,320	5,559,741	1,932,516	(3,518,103)	547,674	(1,097,375)	11,466,148	*Income before tax expense*
Total aset	153,686,911	87,517,759	56,441,019	164,580,709	39,597,982	33,839,188	(27,068,280)	508,595,288	*Total assets*
Total liabilitas	174,879,709	78,023	176,869,563	46,148,028	7,965,951	8,888,777	(2,102,374)	412,727,677	*Total liabilities*

Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis BNI dan Entitas Anak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the geographical segment of BNI and Subsidiaries are set out in the table below:

	2016						
	Indonesia	New York	Eropa/ *Europe*	Asia	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasi/ *Consolidated*	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	29,512,278	101,389	74,047	309,755	(2,407)	29,995,062	*Interest income and sharia income - net*
Pendapatan premi - neto	1,341,561	-	-	-	-	1,341,561	*Premium income - net*
Pendapatan operasional lainnya	10,096,114	30,926	39,594	192,914	(396,865)	9,962,683	*Other operating income*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7,833,621)	(9,990)	-	(9,520)	-	(7,853,131)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(18,757,902)	(72,031)	(78,717)	(308,193)	-	(19,216,843)	*Other operating expenses*
Laba operasional	14,358,430	50,294	34,924	184,956	(399,272)	14,229,332	*Operating income*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	68,492	695	(869)	2,848	2,407	73,573	*Non operating income/ (expenses) - net*
Laba sebelum beban pajak	14,426,922	50,989	34,055	187,804	(396,865)	14,302,905	*Income before tax expense*
Beban pajak	(2,892,709)	-	-	-	-	(2,892,709)	*Tax expense*
Laba bersih	11,534,213	50,989	34,055	187,804	(396,865)	11,410,196	*Net income*
Total aset	568,983,990	5,962,102	7,021,039	28,971,753	(7,907,004)	603,031,880	*Total assets*
Total liabilitas	452,543,963	6,008,366	7,021,586	28,860,861	(1,733,651)	492,701,125	*Total liabilities*

	2015						
	Indonesia	New York	Eropa/ *Europe*	Asia	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasi/ *Consolidated*	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah - neto	25,306,375	52,454	41,138	193,989	(33,760)	25,560,196	*Interest income and sharia income - net*
Pendapatan premi - neto	825,662	-	-	-	-	825,662	*Premium income - net*
Pendapatan operasional lainnya	8,872,574	57,140	54,506	220,928	(332,768)	8,872,380	*Other operating income*

47. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *47. SEGMENT INFORMATION (continued)*

	2015						
	Indonesia	New York	Eropa/ *Europe*	Asia	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*	Konsolidasi/ *Consolidated*	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7,321,538)	-	-	(14,721)	-	(7,336,259)	*Allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(16,097,072)	(58,324)	(72,473)	(282,029)	-	(16,509,898)	*Other operating expenses*
Laba operasional	11,586,001	51,270	23,171	118,167	(366,528)	11,412,081	*Operating income*
Pendapatan/(beban) bukan operasional - neto	12,311	553	(578)	8,021	33,760	54,067	*Non operating income/ (expenses) - net*
Laba sebelum beban pajak	11,598,312	51,823	22,593	126,188	(332,768)	11,466,148	*Income before tax expense*
Beban pajak	(2,325,616)	-	-	-	-	(2,325,616)	*Tax expense*
Laba bersih	9,272,696	51,823	22,593	126,188	(332,768)	9,140,532	*Net income*
Total aset	481,410,175	5,421,192	4,823,828	23,807,874	(6,867,781)	508,595,288	*Total assets*
Total liabilitas	380,167,017	5,495,864	4,833,195	23,553,510	(1,321,909)	412,727,677	*Total liabilities*

48. MANAJEMEN RISIKO / *48. RISK MANAGEMENT*

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi kejadian, baik yang diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak diperkirakan *(unexpected)* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risks in the context of banking is a potential event, which is either (expected) and not estimated (unexpected) that can give negative impact to the Bank earnings and capital.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer also within the internal Bank.

Penerapan manajemen risiko di BNI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dan pada Peraturan OJK (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, mengingat Bank merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki beberapa perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan, serta secara internasional berpedoman pada dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

The implementation of risk management in BNI is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016, Financial Services Authority regulation (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated 7 September 2016 about the implementation of Risk Management for Commercial Bank, and the Financial Services Authority regulations POJK No. 17/POJK.03/2014 dated November 18 2014 also SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated May 25 2015 about the implementation of integrated Risk Management for Financial Conglomeration, cvonsidering Bank is part of financial services sector that has several subsidiary companies incorporated in a financial conglomerate, and also internationally use the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) documents as guidelines.

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Dalam implementasi manajemen risiko dilakukan melalui 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu: (i) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (ii) Kecukupan Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan (iv) Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko di BNI secara umum terangkum dalam kerangka (*framework*) manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, BNI menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. BNI juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu BNI, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan BNI. BNI terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan BNI agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (*assessment*) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

The risk management implementation baseds on the needs to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Units to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.

Risk management implemented by 4 (four) pillars of risk management: (i) Active Control from Board of Directors and Board of Commissioners; (ii) the adequacy of Policies and risk management procedures also risk Limit; (iii) the adequacy of identification, measurement, monitoring, and Risk control also Risk Management Information Systems, and (iv) Internal Control Systems. Implementation of risk management in BNI is undertaken within risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of Risk Management Implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for BNI's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. BNI have taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of BNI by implementing risk culture enhanchement to build a strong risk culture that is part of the BNI's company culture. BNI constantly strive to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to the new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity has been done to ensure the potential risk that may occur has been mitigated.

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 49 sampai dengan Catatan 52 adalah sesuai dengan definisi dari Regulator.

BNI juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan untuk risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan;
- Melakukan analisis aspek hukum dan uji kepatuhan terhadap produk atau aktivitas *existing* dan baru;
- Melakukan supervisi dan review secara berkala terhadap perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh unit-unit bisnis;
- Mengelola dan mengoptimalkan fungsi sarana *Online Customer Complaint* (OCC) serta pelaporannya, selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengelola jumlah pemberitaan negatif yang ada di media, baik media cetak maupun media elektronik dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perencanaan strategis melalui serangkaian proses untuk penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit;
- Melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

The management of BNI's credit, liquidity, market and operational risks, as described in Notes 49 to 52 are consistent with Regulator's definition.

BNI also manage risk management for other risks as regulated by Regulator, as follow (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as noncompliance with the terms of the engagemnet validity of the contract or binding of collateral imperfect ; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:

- *Manage Operational Guidance Manual for legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;*
- *Analysis of the legal aspects and compliance test for existing and new product or activities;*
- *Conduct assessment and analysis of the agreements or contracts entered into and executed by the business units;*
- *Manage and optimize Online Customer Complaint (OCC), including its reporting, in order to solve such problems based on prevailing policies;*
- *Managing the amounts of negative news on media, whether printed or electronic media, and follow up the proclamation in accordance with the prevailing policies.*
- *The strategic planning done through a series of strategic planning process to align of corporate strategy and strategy unit;*
- *Compliance certification to all policies and procedures in accordance with applicable regulations.*

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015, BNI selaku Entitas Utama Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Tujuan penerapan manajemen risiko terintegrasi tersebut yaitu untuk mengelola seluruh risiko yang melekat pada aktivitas/kegiatan usaha konglomerasi keuangan bank serta menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholder value*) konglomerasi keuangan bank secara keseluruhan.

Secara umum seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan BNI, baik BNI sebagai LJK Induk (Entitas Utama) dan masing-masing LJK Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada masing-masing LJK. Manajemen risiko pada masing-masing LJK Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi LJK Anak juga dibentuk unit/ fungsi intern yang melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kontrol internal secara rutin dan berkala. Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing LJK Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap LJK Anak untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada LJK Anak.

BNI selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan LJK Anak untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengukuran risiko yang dituangkan dalam bentuk penilaian Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi, KPMM Terintegrasi, penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) konsolidasi, serta penilaian Profil Risiko Konsolidasi dan penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

48. RISK MANAGEMENT (continued)

In accordance with the Circular Letter of Financial Services Authority regulations (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015, BNI as parent entity financial conglomeration have to implement the integrated risk management comprehensively and effectively. The purpose of the implementation of integrated risk management implementation is to manage the whole inherent risks in financial conglomeration business activity, also to create a competitive advantages and maintain sustainable growth, so that it can increase the financial conglomeration shareholder value of the Bank as a whole.

Generally, all of the Financial Services Institutions (FSI) as part of the BNI Financial Conglomeration, wether BNI as the Parent FSI (Main Entity) and each Subsidiaries FSI have implemented risk management, among others by establishing a risk unit in each FSI. Risk management in each FSI is operating separately from the business unit and conducts its function independently. To support the implementation of risk management, the FSI have established internal control units/ function in their organizational structure, which monitor the compliance with internal controls regularly and periodically on a regular basis. In addition, the Boards of Commissioners and Directors of the respective Subsidiaries actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiaries, through the reports submitted by the respective Subsidiaries, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiaries.

As the Parent Entity, BNI coordinates with its FSI Subsidiaries regarding the implementation of risk management policies as defined by Indonesia Financial Services Authority/ Bank Indonesia, among others by implementing risk monitoring and measurement in the form of consolidated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, Bank's consolidated soundness rating consolidated assessment, and also integrated risk profile assessment on BNI Financial Conglomeration.

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil risiko BNI menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian Profil Risiko BNI telah dilakukan sesuai dengan lampiran SE BI No. 13/24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren BNI posisi 31 Desember 2016 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko BNI adalah 2 *(low to moderate)* (tidak diaudit).

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penilaian Profil Risiko BNI Terintegrasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan lampiran SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan Semesteran. Berdasarkan hasil laporan terakhir secara penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren posisi 30 Juni 2016 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 *(low to moderate)* (tidak diaudit).

48. *RISK MANAGEMENT (continued)*

The risk profile of BNI reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for each type of risk. The risk profile of BNI has been performed based on attachement of SE BI No. 13/24/DPNP dated 25 October 2011 about Bank's soundness rating assessment. Based on the results of a recent self-assessment report, inherent risk rank of BNI as of 31 December 2016 is low to moderate and the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the risk profile composite rank of BNI is 2 (low to moderate) (unaudited).

Integrated Risk Profile assessment is the assessment of the 10 (ten) type of risks based on the Inherent Risks and the integrated Implementation of Risk Management Quality (KPMR). The ten types of risks that being assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Intra Group Transactions Risk and Risk Insurance. Assessment of the Integrated Risk Profile has been complies with the SE OJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 about Integrated Risk Management Implementation for Financial Conglomerate.

Integrated risk profile assessment being conducted semi annually. Based on the results of the last self assessment, the inherent risk rank of BNI as of as of 30 June 2016 is low to moderate with the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the composite rank of BNI's Risk Profile as financial conglomeration is 2 (low to moderate) (unaudited).

49. RISIKO KREDIT

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL)*. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

49. *CREDIT RISK*

The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors, to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Tujuan pengelolaan risiko kredit BNI selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mengelola kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal bayar atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individu maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan serta manajemen risiko kredit yang diputuskan dalam forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Prosedur Perkreditan (KPP), Komite Risiko dan Kapital sub bidang Manajemen Risiko (KRK-RMC) yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior serta Rapat Direksi (Radisi), juga secara tertulis dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan dan Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit.

Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian penyelamatan/restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan dan kebijakan manajemen risiko kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman untuk kredit produktif, setiap usulan pemberian kredit dilakukan melalui proses analisis kredit oleh Unit Bisnis dan direview oleh unit risiko kredit. Mekanisme persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit. Komite Kredit merupakan lembaga pemutus kredit yang beranggotakan pemutus dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis, dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

49. CREDIT RISK (continued)

The purpose of the BNI's credit risk management other than to comply with Bank Indonesia and Financial Services Authority regulations is to manage the possible losses resulting from the debtors failed to pay on loans or credit facility and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and loan portfolio level.

BNI already has loan policies, credit and credit risk management procedures that was decided in the Credit Policy Committee (KKP) and Credit Procedures Committee (KPP), Risks and Capital Committee sub division of Risk Management (KRK-RMC) consist of Board of Directors and several members of senior management, and also Board of Directors meetings, also as written in the Credit Company Guidelines (PP) and Credit Risk Management Company Guidelines.

These policies provide complete and detailed guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, controls, restructuring and the settlements of non-performing loans.

To support a prudent loan granting process, BNI conducts periodic reviews and enhances its loan and credit risk management policies in line with current business developments.

Credit risk management is implemented both at the individual and portfolio level. At the individual level, for productive loans, each loan proposal is made through a process of analysis by the Business Unit and being review by the credit risk unit. The credit approval process mechanism is through a credit committee meeting. The credit committee constitutes the decision maker for credit approval, which consists of representatives from Business Units and representatives from the Credit Risk Unit, so then the loan granting process become more comprehensive and cautious.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Pada tingkat portofolio, setiap tahun sekali ditetapkan batas maksimum pinjaman *(Loan Exposure Limit*) yang bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan sektor industri untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan risiko di masing-masing sektor industri serta mengurangi risiko konsentrasi. Dalam penentuan konsentrasi tiap sektor industri yang optimal, Bank mengembangkan metode *Credit Portofolio Optimisation (CPO)* dengan memperhitungkan korelasi *risk-return* dari tiap sektor industri. Selanjutnya Bank memonitor status kelonggaran ekspansi pinjaman (*space available*) secara periodik berdasar *Loan Exposure Limit* (LEL).

Proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan *internal rating system* (untuk kredit produktif) dan *scoring system* (untuk kredit konsumtif dan kredit produktif segmen ritel), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisis dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi untuk segmen Korporasi dan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial dan Usaha Kecil untuk segmen menengah dan kecil, agar penyelamatan/ penyelesaian kredit dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Sebagai upaya memitigasi risiko kredit per debitur, Bank menentukan struktur kredit termasuk penentuan covenant yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Pekerjaan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

49. CREDIT RISK (continued)

At portfolio level, the loan exposure limit is determined annually to diversify loan portfolio among different industry sectors in order to optimize return regarding risk in each sector and to reduce concentration risk. In the determination of optimal concentration in industry sectors, Bank has developed a method of Credit Portfolio Optimisation by calculating the correlation of risk return from each industry sectors. Furthermore, Bank monitors the status of the space available based on Loan Exposure Limit (LEL) periodically.

Loan analysis and approval process is conducted through several assessment processes of the applicant's credit risks, i.e. through internal rating system (for productive loans) and scoring system (for consumer and retail loans), followed by the related risk mitigation strategy. The results of the credit's analysis and risk assessment process will be forwarded to the Credit Committee for approval.

Non performing loan is managed by a Corporate Remedial and Recovery Division for corporate segment and Commercial Remedial and Recovery Division for middle and small segment, to ensure better credit recovery and settlement, and to enable the Business Unit to focus on the management of performing debtors and loan expansion.

To mitigate credit risk, the Bank sets loan structure for every debtor through appropriate covenants that aligns with debtor needs and condition. This is to ensure the debtor uses the loan according to original purpose so that bank and debtor's interest are fulfilled. Collateral types held by the Bank are cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets. Estimates of fair value of collateral held by the Bank is based on the value of collateral assessed internally or externally by the independent appraisers.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Ketentuan coverage atau kecukupan agunan untuk tiap segmen ditentukan sebagai berikut:

49. CREDIT RISK (continued)

The collateral coverage criteria for each segment is divided as follows:

Segmen/*Segment*	Jenis Agunan/*Collateral*	Jumlah *Coverage* Minimal* / *Minimum Coverage Amount*
Korporasi/ *Wholesale*	Aset tetap/*Fixed Asset*	100% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	SBLC	
	Tanah dan Bangunan/*Land and Building*	
	Piutang/*Receivable*	
	Kendaraan/*Vehicle*	
	Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank*	
Menengah/ *Middle*	Aset tetap/*Fixed Asset*	125% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	SBLC	
	Tanah dan Bangunan/*Land and Building*	
	Piutang/*Receivable*	
	Kendaraan/*Vehicle*	
	Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank*	
Kecil/*Retail*	Aset tetap/*Fixed Asset*	110% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	SBLC	

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Khusus untuk pengukuran risiko kredit, BNI menggunakan metode standar. Selanjutnya, BNI juga mempersiapkan dan mengembangkan metodologi rating internal. Saat ini BNI sedang mempersiapkan parameter risiko yang akan digunakan dalam perhitungan risiko kredit seperti *Probability of Default, Loss Given Default* dan *Exposure at Default.*

The development of credit risk management is conducted in stages, and inline with the framework set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. Specifically for measuring credit risk, BNI utilizes the standardized approach methodology. Furthermore, BNI also prepares and develops internal ratings-based methodology. Currently BNI prepares risk parameters, which will be used in the calculation of credit risk such as Probability of Default, Loss Given Default and Exposure at Default.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

(i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements

Eksposur risiko kredit terhadap aset-neto sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to the assets-net of allowance possible losses on the consolidated statement of financial position as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *49. CREDIT RISK (continued)*

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan) / *(i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements (continued)*

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2016	2015	*Description*
Giro pada Bank Indonesia	30,146,853	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6,298,019	8,998,793	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	33,661,668	33,416,808	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek			*Marketable securities*
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	4,718,833	3,704,208	*Fair value through profit or loss -*
- Tersedia untuk dijual	17,033,703	4,685,094	*Available-for-sale -*
- Dimiliki hingga jatuh tempo	2,012,214	1,538,192	*Held-to-maturity -*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,664,750	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8,567,795	8,831,444	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	14,724,394	10,820,613	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	249,864	440,701	*Derivatives receivable*
Pinjaman yang diberikan	376,594,527	314,066,531	*Loans*
Obligasi Pemerintah			*Government Bonds*
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	705,819	456,762	*Fair value through profit or loss -*
- Tersedia untuk dijual	43,660,340	34,337,813	*Available-for-sale -*
- Dimiliki hingga jatuh tempo	18,640,180	12,427,744	*Held-to-maturity -*
Penyertaan saham	57,169	35,793	*Equity investments*
Aset lain-lain - neto*)	5,665,671	2,987,305	*Other assets - net*)*
Neto	**564,401,799**	**468,056,193**	***Net***

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.*

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to consolidated administrative accounts items as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2016	2015	*Description*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan *(committed)*	1,800,036	1,640,062	*Unused loan facilities (committed)*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	10,514,690	9,147,646	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi bank yang diterima	18,696,786	16,405,866	*Bank guarantees received*
Garansi yang diterbitkan	54,295,243	45,724,488	*Guarantees issued*
Total	**85,306,755**	**72,918,062**	***Total***

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat neto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The table above represents credit risk exposures of the Group as of 31 December 2016 and 2015, without taking into account any collaterals held or other credit enhancements. For assets on the consolidated statement of financial position, the exposures set out above are based on net carrying value as reported in the consolidated statement of financial position.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar 66,72% dan 67,10% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses kredit, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis Teknologi.
- BNI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- BNI telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
- BNI telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
- BNI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, *personal loans* dan fasilitas antar bank.

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

49. CREDIT RISK (continued)

(i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements (continued)

As of 31 December 2016 and 2015, the total maximum credit risk exposure in consolidated statement of financial position from loans is 66.72% and 67.10%, respectively.

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

- *The process of improving credit management in a sustainable manner by improving credit processes, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.*
- *BNI has a documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transactions must adhere to the requirements of the Bank's policy.*
- *BNI has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.*
- *BNI has done stress test on credit risk to assess the ability of Bank to stay in the non-normal condition and as an instrument for decision making for the Bank.*
- *BNI has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.*
- *All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.*

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation.

The carrying amounts of financial assets other than bank loans and securities purchased under agreement to resell is equal to the maximum exposure of credit risk.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *CREDIT RISK (continued)*

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation. (continued)

The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under agreements to resell on 31 December 2016 and 2015:

Keterangan / *Description*	2016 Eksposur maksimum/ *Maximum exposure*	2016 Agunan/ *Collateral*	2016 *Eksposur Neto/ Net Exposure*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased under agreements to resell*	1,664,750	1,807,606	-

Keterangan / *Description*	2015 Eksposur maksimum/ *Maximum exposure*	2015 Agunan/ *Collateral*	2015 *Eksposur Neto/ Net Exposure*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased under agreements to resell*	376,215	398,041	-

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016								
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts with Bank Indonesia*	-	30,146,853	-	-	-	-	-	30,146,853	
Giro pada bank lain / *Current accounts with other banks*	198	6,299,569	-	-	-	-	-	6,299,767	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia / *Placements with other banks and Bank Indonesia*	-	33,662,168	-	-	-	-	-	33,662,168	
Efek-efek / *Marketable securities*	12,337,571	10,893,413	-	-	-	-	624,873	23,855,857	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased under agreements to resell*	1,664,750	-	-	-	-	-	-	1,664,750	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya / *Bills and other receivables*	1,932,417	6,666,646	-	-	-	-	-	8,599,063	
Tagihan akseptasi / *Acceptances receivables*	3,969,459	10,286,881	376,233	-	176,655	-	-	14,809,228	
Tagihan derivatif / *Derivatives receivables*	-	249,864	-	-	-	-	-	249,864	
Pinjaman yang diberikan / *Loans*									
Modal kerja / *Working capital*	9,295,481	129,419,737	11,208,883	456,631	12,042,230	5,647,720	6,646,978	174,717,660	
Investasi / *Investment*	9,835,768	67,679,970	4,108,670	100,955	8,230,668	3,288,793	1,859,959	95,104,783	
Konsumen / *Consumer*	8,681,700	46,316,888	11,696,717	181,828	1,635,326	2,985,618	2,000,923	73,499,000	
Sindikasi / *Syndicated*	2,986,194	33,840,101	4,047,491	-	3,936,362	58,503	1,112,733	45,981,384	
Karyawan / *Employee*	80,527	2,932,995	237,816	5,207	15,604	27,186	22,691	3,322,026	
Program Pemerintah / *Government programs*	-	277,583	141,447	-	230,103	415	991	650,539	
Obligasi Pemerintah / *Government Bonds*	-	63,006,339	-	-	-	-	-	63,006,339	
Penyertaan saham / *Equity investments*	-	57,169	-	-	-	-	-	57,169	
Aset lain-lain - neto*) / *Other assets - net*)*	-	5,665,671	-	-	-	-	-	5,665,671	
Total	**50,784,065**	**447,401,847**	**31,817,257**	**744,621**	**26,266,948**	**12,008,235**	**12,269,148**	**581,292,121**	
Cadangan kerugian penurunan nilai / *Allowance for impairment losses*								(16,890,322)	
Neto / ***Net***								**564,401,799**	

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut: (lanjutan)

49. CREDIT RISK (continued)

(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2016 and 2015 are as follows: (continued)

	2015								
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Giro pada Bank Indonesia	-	30,932,177	-	-	-	-	-	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	8,999,699	-	-	-	-	-	8,999,699	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	13,233,096	20,183,712	-	-	-	-	-	33,416,808	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	118,603	9,492,019	-	-	-	-	353,181	9,963,803	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	376,215	-	-	-	-	-	-	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	2,131,992	6,725,831	-	-	-	-	-	8,857,823	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	2,877,897	7,710,374	232,397	-	-	2,496	76,637	10,899,801	*Acceptances receivables*
Tagihan derivatif	-	440,701	-	-	-	-	-	440,701	*Derivatives receivables*
Pinjaman yang diberikan									*Loans*
Modal kerja	7,759,782	115,787,896	11,246,132	314,490	8,516,960	3,837,751	4,915,677	152,378,688	*Working capital*
Investasi	8,943,780	49,605,618	5,408,154	68,900	4,448,410	2,066,908	2,169,862	72,711,632	*Investment*
Konsumen	7,286,265	40,857,661	10,329,867	171,106	824,182	3,259,742	1,456,487	64,185,310	*Consumer*
Sindikasi	6,628	16,701,222	13,763,499	-	1,772,789	349,478	146,087	32,739,703	*Syndicated*
Karyawan	95,914	2,910,425	254,145	6,082	15,812	17,142	18,397	3,317,917	*Employee*
Program Pemerintah	14,682	613,504	66,866	202	71,552	1,993	3,100	771,899	*Government programs*
Obligasi Pemerintah	748,208	46,474,111	-	-	-	-	-	47,222,319	*Government Bonds*
Penyertaan saham	-	59,964	-	-	-	-	536	60,500	*Equity investments*
Aset lain-lain - neto*)	-	2,987,305	-	-	-	-	-	2,987,305	*Other assets - net*)*
Total	**43,593,062**	**360,482,219**	**41,301,060**	**560,780**	**15,649,705**	**9,535,510**	**9,139,964**	**480,262,300**	
Cadangan kerugian penurunan nilai								(12,206,107)	*Allowance for impairment losses*
Neto								**468,056,193**	***Net***

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.*

- **Grup 1** : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- **Grup 2** : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 3** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (dibawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 4** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 5** : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

- ***Group 1*** *: New customers (less than 6 months).*
- ***Group 2*** *: Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.*
- ***Group 3*** *: Existing customers with history of overdue below 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 4*** *: Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 5*** *: Existing customers with loans that was/has been restructured.*

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *49. CREDIT RISK (continued)*

(iv) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(iv) The aging analysis of past due but not impaired loans as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

	2016				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days*	Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days*	Total	
Modal kerja	706,624	365,518	4,575,578	5,647,720	*Working capital*
Investasi	1,788	3,083	3,283,922	3,288,793	*Investment*
Konsumen	576,898	5,082	2,403,638	2,985,618	*Consumer*
Sindikasi	-	-	58,503	58,503	*Syndication*
Karyawan	150	29	27,007	27,186	*Employee*
Program pemerintah	-	-	415	415	*Government programs*
Total	1,285,460	373,712	10,349,063	12,008,235	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(278,801)	(110,171)	(1,710,687)	(2,099,659)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1,006,659**	**263,541**	**8,638,376**	**9,908,576**	***Net***

	2015				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days*	Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days*	Total	
Modal kerja	1,452,114	237,977	2,147,660	3,837,751	*Working capital*
Investasi	32,600	22,766	2,011,542	2,066,908	*Investment*
Konsumen	836,730	96,774	2,326,238	3,259,742	*Consumer*
Sindikasi	58,522	-	290,956	349,478	*Syndication*
Karyawan	534	-	16,608	17,142	*Employee*
Program pemerintah	1,599	-	394	1,993	*Government programs*
Total	2,382,099	357,517	6,793,398	9,533,014	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(656,610)	(32,277)	(1,276,731)	(1,965,618)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1,725,489**	**325,240**	**5,516,667**	**7,567,396**	***Net***

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016. Untuk tabel ini, Grup telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure

The following table provides details of the Group's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized by geographical region as of 31 December 2016. For this table, the Group has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *49. CREDIT RISK (continued)*

2016

	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Lain-lain *)/ *Others *)*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	28,922,705	-	-	-	-	1,224,148	30,146,853	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2,902,627	6	834	3,421	2,128	3,390,751	6,299,767	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	29,201,543	-	2	-	-	4,460,623	33,662,168	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek								*Marketable securities*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-	-	4,718,833	4,718,833	*Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual	15,580,306	-	-	-	-	1,499,504	17,079,810	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	1,056,000	-	-	-	-	1,001,214	2,057,214	*Held-to-maturity*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,325,260	-	-	-	-	339,490	1,664,750	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	7,139,764	19,717	9,762	2,149	-	1,427,671	8,599,063	*Bill and other receivables*
Tagihan akseptasi	10,182,393	92,673	5,849	112,953	-	4,415,360	14,809,228	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	248,326	-	-	-	-	1,538	249,864	*Derivatives receivable*
Pinjaman yang diberikan	277,452,094	38,941,812	14,930,946	17,065,831	2,989,949	41,894,760	393,275,392	*Loans*
Obligasi pemerintah								*Government Bonds*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	497,484	-	-	-	-	208,335	705,819	*Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual	30,353,344	-	-	-	-	13,306,996	43,660,340	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	12,306,544	-	-	-	-	6,333,636	18,640,180	*Held-to-maturity*
Penyertaan saham	57,169	-	-	-	-	-	57,169	*Equity Investment*
Aset lain-lain - neto**)	5,284,866	68,251	18,662	23,760	4,252	265,880	5,665,671	*Other assets - net**)*
Total	422,510,425	39,122,459	14,966,055	17,208,114	2,996,329	84,488,739	581,292,121	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(16,890,322)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**564,401,799**	***Net***

2015

	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Lain-lain *)/ *Others *)*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	29,936,441	-	-	-	-	995,736	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	4,716,737	5	885	217	15,886	4,265,969	8,999,699	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	28,899,621	-	-	-	-	4,517,187	33,416,808	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek								*Marketable securities*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	75,997	-	-	-	-	3,628,211	3,704,208	*Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual	3,749,825	-	-	-	-	968,992	4,718,817	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	1,056,000	-	-	-	-	484,778	1,540,778	*Held-to-maturity*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	376,215	-	-	-	-	-	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8,215,934	6,656	-	-	-	635,233	8,857,823	*Bill and other receivables*
Tagihan akseptasi	7,052,969	57,862	97,476	134,182	-	3,557,312	10,899,801	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	438,596	-	-	-	-	2,105	440,701	*Derivatives receivable*
Pinjaman yang diberikan	227,692,643	32,724,069	11,414,292	14,619,386	2,314,036	37,340,723	326,105,149	*Loans*
Obligasi pemerintah								*Government Bonds*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	386,381	-	-	-	-	70,381	456,762	*Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual	26,568,642	-	-	-	-	7,769,171	34,337,813	*Available-for-sale*
Dimiliki hingga jatuh tempo	8,521,903	-	-	-	-	3,905,841	12,427,744	*Held-to-maturity*
Penyertaan saham	60,500	-	-	-	-	-	60,500	*Equity Investment*
Aset lain-lain - neto**)	2,507,952	141,505	65,533	29,884	34,794	207,637	2,987,305	*Other assets - net**)*
Total	350,256,356	32,930,097	11,578,186	14,783,669	2,364,716	68,349,276	480,262,300	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai							(12,206,107)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**468,056,193**	***Net***

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Entitas Anak
**) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

*) *Includes overseas branches and Subsidiaries*
**) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables..*

50. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, serta pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar.

Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM), Divisi Tresuri (TRS), dan Kantor Cabang Luar Negeri. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS dan segenap Kantor Cabang Luar Negeri, yang diwujudkan dalam manajemen strategi likuiditas.

Divisi ERM juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi TRS tersebut.

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa :

a. Ketersediaan Alat Likuid: Kas, GWM, *Secondary Reserve*, Indikator Peringatan Dini, *Liquidity Contingency Plan Head Office* maupun Kantor Cabang Luar Negeri, dll
b. Pengukuran Risiko Likuiditas : Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas, Stress testing, dll
c. Pemantauan Risiko Likuiditas
d. Pengendalian Risiko Likuiditas
e. Penetapan Limit Likuiditas: Pagu Kas, Pagu Kas *Bank Wide*, SR Ideal, Limit Profil Maturitas, Limit Ketersediaan Kredit Valas.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai antisipasi pemenuhan *secondary reserve* yang ideal, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*. Penetapan dan pemantauan limit, yaitu *Secondary Reserve Ideal* (SR Ideal) dan limit ketersediaan kredit valas dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.

50. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk relates to the possibility of the bank is unable to meet short-term obligations to depositors, investors and creditors, as well as the fulfillment of Statutory Reserve Requirements, among others, due to limited access to financing or the inability to liquidate assets at reasonable prices.

Liquidity Risk Management carried out by the Bank's Risk Management Division (ERM), Treasury Division (TRS), and Branch Offices of Foreign Affairs. Liquidity Risk Policies and Procedures prepared by the Division ERM, subsequently implemented by the Division of TRS and all Branch Offices of Foreign Affairs, which is manifested in the liquidity management strategy.

ERM Division also monitors the implementation of the liquidity management performed by the Tresury Division.

ERM Division prepare Liquidity Risk Policy Guidelines in Liquidity Risk Management Implementation Guidelines, which is further elaborated into the Liquidity Risk Management Procedures which contains guidelines for liquidity risk management practices, which include:

a. Availability Tool Liquid: Cash, Statutory Reserve Requirement, Secondary Reserve, Early Warning Indicators, Liquidity Contingency Plan Head Office or Branch Office of Foreign Affairs, etc.
b. Measurement of Liquidity Risk: Liquidity Ratio, Cash Flow Projection, Maturity Profile, Liquidity Adequacy Ratio, Stress testing, etc.
c. Liquidity Risk Monitoring
d. Liquidity Risk Management
e. Limit Liquidity: Ceiling, Cash Ceiling Bank Wide, Ideal SR, Maturity Profile Limit, Credit Availability in Foreign Currency Limit.

In managing liquidity, beside addition to managing primary reserve (cash and statutory reserve requirement), BNI keep and maintain secondary reserve to ensure liquidity is at a safe level. As anticipated fulfillment ideal secondary reserve, BNI preserve and maintain tertiary reserve. The setting and monitoring of limits, ie Ideal Secondary Reserve (Ideal SR) and credit availability in foreign currency limit conducted periodically by the ERM Division. While the availability of the whole reserve is monitored on a daily, weekly, and monthly by the Tresury Division and the ERM Division.

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada *undiscounted cash flows.*

50. LIQUIDITY RISK (continued)

The table below shows the remaining contractual maturities of the financial liabilities based on undiscounted cashflows.

2016

	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	3,285,461	-	-	-	-	3,285,461	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	136,457,715	38,599,966	12,526,241	9,317,249	231,075,817	427,976,988	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	5,117,432	1,134,941	224,993	646,846	2,610,363	9,735,182	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	410,870	-	-	-	-	410,870	*Derivatives payable*
Liabilitas akseptasi	859,447	1,912,798	1,285,795	300,497	-	4,358,537	*Acceptances payable*
Efek-efek yang diterbitkan	-	11,375	6,886,560	22,750	522,750	7,443,435	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	7,422	1,371,541	14,844	2,371,154	3,764,961	*Securities sold under agreements to repurchase*
Pinjaman yang diterima	1,413,592	345,868	3,527,790	1,434,252	30,425,588	37,147,090	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain*)	11,218,087	-	-	-	-	11,218,087	*Other liabilities*)*
Total	158,762,604	42,012,370	25,822,920	11,736,438	267,006,279	505,340,611	*Total*
Total aset	80,656,485	2,869,480	2,906,403	2,092,358	55,704,799	144,229,527	*Total assets*
KOMITMEN DAN KONTINJENSI							***COMMITMENT AND CONTINGENCIES***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	54,547,648	-	-	-	-	54,547,648	*Unused loan facilities*
Irrevocable letter of credit yang masih berjalan	4,151,512	1,715,885	1,790,561	2,135,362	721,370	10,514,690	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi yang diterbitkan	14,945,090	8,339,978	5,198,623	6,808,291	19,003,261	54,295,243	*Guarantees issued*
Total	73,644,250	10,055,863	6,989,184	8,943,653	19,724,631	119,357,581	*Total*

2015

	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	1,805,494	-	-	-	-	1,805,494	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	98,252,493	29,295,389	7,327,511	10,563,866	210,291,080	355,730,339	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2,914,290	1,292,534	15,161	14,951	11,122	4,248,058	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	1,161,557	-	-	-	-	1,161,557	*Derivatives payable*
Liabilitas akseptasi	1,596,434	2,084,019	1,595,841	911,964	-	6,188,258	*Acceptances payable*
Efek-efek yang diterbitkan	-	11,375	153,533	164,908	7,602,908	7,932,724	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	341,920	18,119	2,803,103	3,163,142	*Securities sold under agreements to repurchase*
Pinjaman yang diterima	98,004	1,126,544	327,219	3,951,109	22,710,123	28,212,999	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain*)	6,392,122	1,123	1,197	-	21,318	6,415,760	*Other liabilities*)*
Total	112,220,394	33,810,984	9,762,382	15,624,917	243,439,654	414,858,331	*Total*
Total aset	120,924,603	3,268,499	2,973,721	2,375,401	40,820,558	170,362,782	*Total assets*

*) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah Entitas Anak.

*) *Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary..*

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) / *50. LIQUIDITY RISK (continued)*

	2015						
	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
KOMITMEN DAN KONTINJENSI							***COMMITMENT AND CONTINGENCIES***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	38,265,234	-	-	-	-	38,265,234	*Unused loan facilities*
Irrevocable letter of credit yang masih berjalan	2,143,049	1,466,361	1,217,011	2,360,510	1,960,715	9,147,646	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi yang diterbitkan	8,920,920	3,873,832	6,023,900	8,894,496	18,011,340	45,724,488	*Guarantees issued*
Total	49,329,203	5,340,193	7,240,911	11,255,006	19,972,055	93,137,368	*Total*

*) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

*) *Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary.*

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BNI memelihara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama periode 30 hari ke depan dalam skenario stress, dengan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas sesuai ketentuan regulator, baik secara individual (*bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

In order to increase the resilience of short-term liquidity, BNI maintaining High Quality Liquid Assets (HQLA) are adequate to meet its liquidity needs during the period of the next 30 days in a scenario stress by managing the ratio of adequacy of liquidity in accordance with the regulator, either individually (bank only) or consolidated with subsidiaries.

Laporan rasio Kecukupan Likuiditas BNI tersebut dilaporkan secara bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BNI's Liquidity Coverage Ratio are reported monthly to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

51. RISIKO PASAR / *51. MARKET RISK*

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh BNI baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif. Risiko Pasar melekat pada hampir seluruh aktivitas Bank, baik *trading book* maupun *banking book* yang mencakup Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.

Market risk is the risk of loss due to the adverse volatility of market price movements against BNI's financial assets and liabilities (on balance sheet) including administrative accounts (off balance sheet). Market risk is embedded in the Bank's business activities, both in trading and banking books, which cover Interest Rate risks and Foreign Exchange risks.

Pengelolaan Risiko Pasar BNI dilakukan melalui koordinasi beberapa Divisi terkait, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bank (Divisi ERM) dan Divisi Tata Kelola Perusahaan (Divisi PGV) yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan (Dir. KN), Divisi Tresuri (Divisi TRS) dan Kantor Cabang Luar Negeri dalam pengawasan Divisi Internasional (Divisi INT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Tresuri dan Internasional (Dir. TS). Dalam mengelola Risiko Pasar, Direksi didukung oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) serta dalam pengawasannya didukung oleh Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Market Risk Management is done through coordination with BNI's several related divisions such as: Enterprise Risk Management Division (ERM) and Policy Governance Division (PGV) which report to the Director of Compliance & Enterprise Risk Management; and Treasury Division (TRS) as well as Overseas branches supervised by the International Division (INT) which report to the Director of Treasury and International. The Market Risk Management is also supported by Risk Management Committee (RMC) and Assets and Liabilities Committee (ALCO) and supervised by the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

BNI telah memiliki Aplikasi Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung proses pengelolaan Risiko Pasar. Pengukuran potensi Risiko Pasar untuk pengendalian internal BNI dilakukan secara harian menggunakan Model Internal - *Value at Risk (VaR) Methodology*, sedangkan pengukuran Risiko Pasar dalam rangka perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dilakukan secara bulanan menggunakan Metode Standar. BNI juga melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *banking book* secara bulanan menggunakan *Assets & Liabilities Gap Report* serta pengukuran Risiko Nilai Tukar pada *banking book* melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian dan bulanan sesuai ketentuan Regulator.

Sehubungan dengan penggunaan Model Internal (VaR) dalam pengukuran Risiko Pasar, BNI telah melakukan proses validasi melalui *Back Testing* setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menilai akurasi pengukuran VaR yang digunakan. Selain itu, BNI telah melakukan proses *Stress Testing* terhadap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga (portofolio obligasi) untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan faktor pasar yang ekstrim pada saat kondisi pasar abnormal. *Stress Testing* dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal.

Limit Risiko Pasar BNI sebagai bagian dari proses pengendalian Risiko Pasar ditetapkan dan dikaji ulang secara periodik oleh Divisi ERM dan Divisi PGV yang independen terhadap *risk taking units* (TRS dan cabang-cabang luar negeri). Limit-limit Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

a. Limit Risiko Pasar pada *trading book*:
   (i) Limit *Value at Risk* (VaR)
   (ii) Limit nominal transaksi
   (iii) Limit nominal *open position*
   (iv) Limit kerugian

   Limit ditetapkan pada masing-masing *desk* (*Currencies Trading, Rates Trading, Banking Management* - Surat Berharga *Available For Sale, Funding and Gapping* – Surat Berharga Likuiditas).

b. Limit Risiko Pasar pada *banking book*:
   (i) Limit Gap Aset & Liabilitas – Rupiah

   (ii) Limit Gap Aset & Liabilitas – Valuta Asing

   (iii) Limit Posisi Devisa Neto internal BNI.

51. MARKET RISK (continued)

BNI has market risk tools to support the implementation of the Market Risk Process. The measurement of potential market risk, for internal control purposes, is conducted on a daily basis using an Internal Model -Value at Risk (VaR) Methodology. On the other hand, the market risk measurement for Capital Adequacy Ratio purposes, is conducted on a monthly basis using the Standard Method. BNI also conducts on a monthly basis the measurement of interest rate risk on banking book using Assets & Liabilities Gap Report (A/L Gap Report) and the measurement for foreign exchange risk on banking book by calculating the Net Open Position (NOP) both daily and monthly in accordance with Regulator regulation.

In line with the use of the Internal Model (VaR) in measuring market risk, BNI conducts Back Testing on a quarterly basis to assess the accuracy of the VaR methodologies used. Stress Testing has also been conducted for the financial instuments that are exposed to foreign exchange risk and interest rate risk (limited to bond positions) in order to assess the Bank's resilience in encountering extreme change of risk factors in abnormal market conditions. Stress Testing is done every 6 (six) months or whichever is earlier in case there is an abnormal condition.

BNI Market Risk limit as a part of the risk controlling process is set and reviewed periodically by ERM and PGV which are independent from risk taking units (TRS and overseas branches). The Market Risk limits are as follows:

a. Market Risk limits on trading book:
   (i) Value at Risk (VaR) limit
   (ii) Transaction nominal limit
   (iii) Open position limit
   (iv) Loss limit

   These limits are performed for each trading desk (Currencies Trading, Rates Trading, Banking Management - Available For Sale Bonds, Funding and Gapping – Liquidity Bonds).

b. Market Risk limits on banking book:
   (i) Gap Asset & Liability Limit – Indonesian Rupiah
   (ii) Gap Asset & Liability Limit – Foreign Currency
   (iii) Internal BNI Net Open Position Limit.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui laporan yang memberikan informasi mengenai eksposur risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit-limit. Laporan VaR diberikan kepada manajemen BNI secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui laporan sirkulasi atau forum RMC. Khusus terkait dengan laporan perkembangan Risiko Suku Bunga pada *banking book* disampaikan kepada manajemen setiap bulan melalui forum *Asset & Liabilities Committee (ALCO)*.

BNI menggunakan model *Value at Risk* (VaR) untuk menghitung potensi risiko pasar yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar pada portofolio produk Bank. Cakupan Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

a. Risiko Nilai Tukar pada *trading book* dan *banking book.*
b. Risiko Suku Bunga pada *trading book* dan *banking book* (tidak termasuk aset-aset/investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo).

Metode untuk menghitung VaR yang digunakan BNI adalah *Variance Covariance/Risk Metrics*. Metode ini menggunakan formula dengan memasukkan parameter-parameter seperti volatilitas dan korelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa segala perubahan dalam faktor risiko yang mempengaruhi kondisi pasar normal akan mengikuti distribusi normal.

VaR tidak menyediakan informasi potensi laba atau rugi pada kondisi pasar yang ekstrim atau *stress*. BNI melakukan *stress testing* untuk kondisi pasar yang ekstrim tersebut.

Pengukuran VaR adalah estimasi maksimum potensi kerugian Risiko Pasar untuk 1 (satu) hari ke depan dengan tingkat keyakinan 99% dengan posisi portofolio yang dimiliki tidak berubah. Penggunaan tingkat keyakinan 99% berarti dalam rentang waktu satu hari, kerugian harian yang melebihi VaR dalam kondisi pasar normal tidak akan terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 100 hari.

51. MARKET RISK (continued)

Market Risk monitoring is conducted through reports which give information about the market risk exposures and the limit compliance. The VaR reports are submitted to BNI management on a periodic basis (daily, weekly, and monthly) through circular reports or RMC forum. Specifically the report for interest rate risk on banking book is submitted to management on a monthly basis through the ALCO forum.

BNI uses Value at Risk model (VaR) to measure potential market risk arising from possible changes of market factors which can affect the market value of the Bank portfolio. The scope of Market Risk are as follows:

a. Foreign exchange risk on trading book and banking book.
b. Interest rate risk on trading book and banking book (excluding held-to-maturity assets/ investments).

The VaR method used in BNI is Variance Covariance/Risk Metrics. This method uses formulas with some parameters such as volatility and correlation. It assumes that any changes that occurs in the risk factors affecting the normal market conditions will follow normal distribution.

VaR does not provide information for potential gain or loss in the extreme or stress market condition. BNI performs stress testing in the extreme market condition.

The VaR calculation is an estimate which using a 99% confidence level, of the potential loss that is not expected to be exceeded if the current market risk positions were to be held unchanged for one day. The use of a 99% confidence level means that, within a one day horizon, losses exceeding the VaR figure should occur, on average under normal market conditions, not more than once every hundred days.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Karena VaR adalah bagian dari pengelolaan Risiko Pasar Bank, limit-limit VaR telah dibentuk untuk seluruh *trading operation* dan eksposur perlu direview oleh manajemen secara harian terhadap limit-limit.

Tabel dibawah ini menunjukkan VaR agregat pada portofolio *trading book* dan *banking book* milik Bank:

51. MARKET RISK (continued)

Since VaR is an integral part of the Bank's market risk management, VaR limits have been established for all trading operations and exposures are required to be reviewed daily against the limits by management.

The table below presents the aggregate VaR on the Bank's trading book and banking book portfolio:

	31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *31 December 2016 and the year ended*			
	Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk*	Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk*		
		Trading book	*Banking book*	
2016 - 31 Desember	11,450	2,912	169,974	*2016 - 31 December*
2016 - Rata-rata harian	20,105	5,928	154,124	*2016 - Average daily*
2016 - Tertinggi	37,673	7,863	261,338	*2016 - Highest*
2016 - Terendah	9,119	2,762	123,432	*2016- Lowest*

	31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut/ *31 December 2015 and the year ended*			
	Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk*	Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk*		
		Trading book	*Banking book*	
2015 - 31 Desember	11,908	2,723	139,952	*2015 - 31 December*
2015 - Rata-rata harian	3,970	2,805	107,646	*2015 - Average daily*
2015 - Tertinggi	16,993	10,780	151,576	*2015 - Highest*
2015 - Terendah	336	86	85,366	*2015- Lowest*

(i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul pada instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan.

Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko (KRK-RMC) BNI, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko (KRK-RMC) BNI adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan *limit* risiko yang ditetapkan.

(i) Interest rate risk

Interest rate risks arise from financial instruments which have the loss possibilities from changes in interest rates that will affect future cash flows or fair value of the financial instruments.

BNI's Risk and Capital Committee sub division Risk Management (KRK-RMC) which consists of members of the Board of Directors and selected members of senior management held responsible for determining, executing and overseeing the interest rate risk management policy in accordance with the overall guidelines of BNI. The main objective of the Risk and Capital Committee sub division Risk Management (KRK-RMC) is to maximize BNI's returns within the predetermined risk limits.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas konsolidasian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

51. MARKET RISK (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the range of contractual interest rates per annum for significant consolidated assets and liabilities as of 31 December 2016 and 2015:

2016

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	*Euro* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Won Korea/ *Korean Won* %	Yuan China/ *Chinese Yuan* %	
ASET							***ASSETS***
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	3.90-10.00	0.01-1.77	-	-	1.25-1.35	1.53	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	6.05-13.60	0.88-7.75	-	-	-	-	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.30-8.50	-	-	-	-	-	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8.21-9.21	0.80-6.32	6.50-3.00	-	-	2.80-3.00	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan	4.00-22.00	2.25-9.00	0.75	1.83 -7.00	2.50	7.00	*Loans*
Obligasi Pemerintah							*Government Bonds*
- Tingkat bunga tetap	4.87-12.04	0.63-7.75	-	2.25-3.25	-	-	*Fixed interest rate -*
- Tingkat bunga mengambang	6.28-6.56	-	-	-	-	-	*Floating interest rate -*
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00-8.10	0.00-1.95	0.00-0.15	0.00-0.75	0.1-1.00	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0.00-8.40	0.00-1.85	-	0.00-1.96	-	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.40 -5.50	2.30	-	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	-	4.13	-	-	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5.50-11.50	0.45-4.45	0.20-0.30	-	-	3.30	*Borrowings*

2015

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat / *United States Dollar* %	*Euro* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	
ASET					***ASSETS***
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	5.50 - 11.25	0.32 - 0.60	-	-	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	0.09 - 13.60	0.08 - 13.10	-	-	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	8.25	-	-	-	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0.00 - 9.00	0.00 - 2.00	-	-	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan	4.09 - 22.00	5.00 - 7.25	2.50	7.00	*Loans*
Obligasi Pemerintah					*Government Bonds*
- Tingkat bunga tetap	4.45 - 12.90	0.25 - 11.63	-	2.25 - 3.25	*Fixed interest rate -*
- Tingkat bunga mengambang	5.31 - 8.75	-	-	-	*Floating interest rate -*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00 - 10.00	0.00 - 1.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0.00 - 8.25	0.00 - 2.00	-	0.00 - 1.25	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.25 - 10.75	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	-	4.13	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	9.10 - 11.50	0.43 - 3.63	0.64	1.58 - 1.88	*Borrowings*

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Bank. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

51. MARKET RISK (continued)

(i) Interest rate risk (continued)

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Bank's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

2016	
Perubahan presentase/ Percentage *change*	**Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss***
±25	± 74,175
±50	± 148,349

2015	
Perubahan presentase/ Percentage *change*	**Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss***
±25	± 12,933
±50	± 25,866

BNI memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. BNI telah melakukan penilaian atas dampak dari risiko tingkat suku bunga tersebut dan hasilnya tidak signifikan.

BNI has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others. BNI assessed that the impact of that interest rate risk is not significant.

(ii) Risiko mata uang

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya aset dan liabilitas keuangan dalam valuta asing dan rekening administratif konsolidasian baik pada sisi aset konsolidasian maupun liabilitas konsolidasian. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu: *trading book*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing, dan *banking book*, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

BNI memiliki kebijakan untuk menjaga eksposur mata uang asing dalam batas yang wajar dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Manajemen berkeyakinan bahwa saat ini eksposur mata uang asing atas aset dan liabilitas masih dalam batas yang konservatif.

(ii) Currency risk

Foreign currency risks arise from consolidated financial assets and liabilities and administrative accounts in foreign currency positions, both on the consolidated assets and liabilities. BNI's foreign currency position is divided into two activities: the trading book, which is prepared to generate profit from the exchange rate, and the banking book, which is prepared to control BNI's overall Net Open Position.

BNI's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits and within existing regulatory guidelines. The Management believes that its current profile of foreign currency exposure on its assets and liabilities is within conservative limits.

51. RISIKO PASAR (lanjutan) / *MARKET RISK (continued)*

(ii) Risiko mata uang (lanjutan) / *Currency risk (continued)*

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2016 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Presented below is the Net Open Position (NOP), in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2016 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

2016

Mata Uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Yuan China	5,262,942	4,125,634	1,137,308	*Chinese Yuan*
Dolar Amerika Serikat	212,493,893	212,673,075	179,182	*United States Dollar*
Euro	5,298,087	5,304,794	6,707	*Euro*
Yen Jepang	2,652,761	2,680,795	28,034	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	2,494,486	1,755,287	739,199	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	480,171	539,841	59,670	*British Pound Sterling*
Dolar Hongkong	412,913	288,686	124,227	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	841,033	251,328	589,705 *)	*Others*
Total			**2,864,032**	***Total***
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	111,745,668	106,129,299	5,616,369	*United States Dollar*
Euro	1,374,127	1,380,986	6,859	*Euro*
Yen Jepang	1,644,894	1,968,195	323,301	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	2,234,502	1,495,301	739,201	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	136,127	187,519	51,392	*British Pound Sterling*
Dolar Hongkong	317,347	71,926	245,421	*Hong Kong Dollar*
Yuan China	3,157,864	3,900,467	742,603	*Chinese Yuan*
Lain-lain	642,167	37,877	604,290 *)	*Others*
Total			**8,329,436**	***Total***
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54)			84,278,075	*Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			3.40%	*NOP Ratio (Aggregate)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			9.88%	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dari beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies*

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2015 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

Presented below is the Net Open Position, in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2015 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

2015

Mata Uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	*Currencies*
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	210,864,286	209,910,173	954,113	*United States Dollar*
Euro	5,785,028	5,826,597	41,569	*Euro*
Yen Jepang	2,722,502	2,718,985	3,517	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	3,283,553	3,314,850	31,297	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	814,196	863,228	49,032	*British Pound Sterling*
Dolar Hongkong	487,590	487,807	217	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	5,734,243	5,597,816	136,427 *)	*Others*
Total			**1,216,172**	***Total***

51. RISIKO PASAR (lanjutan) / *MARKET RISK (continued)*

(ii) Risiko mata uang (lanjutan) / *(ii) Currency risk (continued)*

2015

Mata Uang / *Currencies*	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	118,505,747	110,515,751	7,989,996	*United States Dollar*
Euro	1,664,031	1,703,040	39,009	*Euro*
Yen Jepang	1,341,878	1,707,644	365,766	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	3,118,324	3,149,622	31,298	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	439,462	488,495	49,033	*British Pound Sterling*
Dolar Hongkong	376,420	155,507	220,913	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	5,011,942	4,562,438	449,504 *)	*Others*
Total			**9,145,519**	***Total***
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54)			73,798,800	*Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			1.65%	*NOP Ratio (Aggregate)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			12.39%	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies*

52. RISIKO OPERASIONAL / *OPERATIONAL RISK*

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta *International Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Salah satu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). PERISKOP terdiri dari tiga (3) modul utama, yaitu:

- Modul *Self Assessment*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) secara independen dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. Modul *self assessment* wajib diisi oleh segenap unit setiap tiga bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap frekuensi dan dampak setiap *risk issue* di unitnya serta mencari penyebab risiko tersebut timbul.

In order to implement operational risk management, BNI made reference to Bank Indonesia or Financial Authority Regulations, also International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes. One of the tools used to perform risk management at BNI is PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Periskop consists of three (3) main modules:

- *Self Assessment Module, is a methodology to detect the possibility that an operational risk has occurred. This method is a self-assessment process conducted by every risk owner independently in identifying, assessing, controlling and monitoring operational risk in each unit. Self Assessment module should be filed by all units, once every three-month; by conducting an assessment of the existing risk issue frequency and impacts; and finding solutions to mitigate emerging operational risks.*

52. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

- *Loss Event Database*, merupakan sarana yang digunakan untuk mencatat setiap peristiwa risiko operasional yang menimbulkan dampak finansial yang meliputi *actual loss* dan *near miss* secara langsung. Setiap kali unit pemilik risiko (*risk owner*) mengalami kerugian risiko operasional, maka unit tersebut harus melakukan input dalam modul *Loss Event Database* tersebut. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau liabilitas hukum yang terjadi serta pengembalian kerugian (*recovery*). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil risiko operasional secara teratur. Data yang diperoleh dari *Loss Event Database (LED)* merupakan input data utama bila Bank akan mengaplikasikan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA) dalam pengukuran kecukupan modal minimum risiko operasional.

- *Key Risk Indicator*, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/ dominan, yang berpotensi mengganggu pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja, sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi. Perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/ threshold* yang ditetapkan sebelumnya (*early warning signal*) yang menuntut adanya tindak lanjut manajemen Unit untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain PERISKOP, BNI saat ini telah memiliki rekening Beban Risiko Operasional (BRO) serta *Recovery* BRO, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan oleh risiko operasional. Pembukuan pada rekening BRO juga akan berdampak kepada penilaian kinerja serta tergambar dalam *Performance Measurement System* (PMS) Unit yang bersangkutan. Setiap bulan dilakukan monitoring terhadap rekening BRO dan Recovery BRO ini guna mitigasi risiko operasional.

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

52. OPERATIONAL RISK (continued)

- *The Loss Event Database is a system to identify and record every operational risk that causes direct financial impact. Each time the risk owner unit experienced financial loss from operational risk, the unit should record it in the Lost Event Database module. The module will generate information such as type of risk, cause of risk, location where the risk emerge and the amount of risk or legal obligation and the recovery (if any). This system is very important to monitor operational risk exposure and profile in an orderly manner. The data gathered from the Loss Event Database will become the main input when the Bank applies advance approaches to measure its minimum operational risk capital adequacy ratio.*

- *Key Risk Indicators, is a series of parameters established to identify main potential loss from operational risk, that potentially interfere the achievement of Key Performance Indicator (KPI) before it happens. The module will give a warning/alert when the exposure exceeds a predetermined range/threshold that has been set and requires follow up from Unit's management to overcome the problems.*

Besides PERISKOP, BNI has Operational Risk Expense (Beban Risiko Operasional (BRO)) and BRO Recovery accounts, which will be used to record losses or recoveries caused by operational risks. The recording in BRO accounts would also affect the performance assessment and also described in the Performance Measurement System (PMS) of the units concerned. To mitigate the operational risk, BRO account and recovery will be monitored monthly.

Regarding the business resilience when disaster occurs, BNI has a Business Continuity Management (BCM) policies, which is a formal mechanism which combined strategies, policies, procedures and organizations developed to ensure operational continuity of critical functions under certain levels of services when a disturbance or disaster is encountered. This policy is applied for all business units in BNI for both domestic and overseas.

52. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti Disaster Recovery Center (DRC), Dual Data Center (DDC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan Command Center. Secara rutin BNI melakukan pengujian sistem dan aplikasi pada divisi/unit kritikal setiap 3 (tiga) bulan sekali, melakukan site visit dan simulasi pada cabang dan wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

52. OPERATIONAL RISK (continued)

BNI has the infrastucture needed to implement BCM such as Disaster Recovery Center (DRC), Dual Data Center (DDC), BCM alternative building and Command Center. Regularly BNI perform a system and application testing on critical Division/Unit every 3 (three) months, do a site visit and simulation to the branch and region to ensure the disaster readiness.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The next table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 December 2016 and 2015, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

	2016		2015		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas	11,167,643	11,167,643	12,890,427	12,890,427	*Cash*
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	4,718,833	4,718,833	3,704,208	3,704,208	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	705,819	705,819	456,762	456,762	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	249,864	249,864	440,701	440,701	*Derivatives receivable*
	5,674,516	5,674,516	4,601,671	4,601,671	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Efek-efek	17,033,703	17,033,703	4,685,094	4,685,094	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	43,660,340	43,660,340	34,337,813	34,337,813	*Government Bonds*
	60,694,043	60,694,043	39,022,907	39,022,907	
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Held-to-maturity***
Efek-efek	2,012,214	2,056,423	1,538,192	1,352,698	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	18,640,180	19,610,830	12,427,744	13,958,756	*Government Bonds*
	20,652,394	21,667,253	13,965,936	15,311,454	
Total	**87,020,953**	**88,035,812**	**57,590,514**	**58,936,032**	***Total***

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2016		2015		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Pinjaman dan piutang					***Loans and receivables***
Pinjaman yang diberikan	376,594,527	376,594,527	314,066,531	314,066,531	*Loans*
Tagihan akseptasi	14,724,394	14,724,394	10,820,613	10,820,613	*Acceptances receivable*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8,567,795	8,567,795	8,831,444	8,831,444	*Bills and other receivables*
Giro pada Bank Indonesia	30,146,853	30,146,853	30,932,177	30,932,177	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6,298,019	6,298,019	8,998,793	8,998,793	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	33,661,668	33,661,668	33,416,808	33,416,808	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,664,750	1,664,750	376,215	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Penyertaan saham	57,169	57,169	35,793	35,793	*Equity investments*
Aset lain-lain - neto*)	5,665,671	5,665,671	2,987,305	2,987,305	*Other assets - net*)*
	477,380,846	477,380,846	410,465,679	410,461,733	
Total	**575,569,441**	**576,584,301**	**480,946,620**	**482,292,138**	***Total***
Liabilitas keuangan Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Financial liabilities Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	410,870	410,870	1,161,557	1,161,557	*Derivatives payable*
Liabilitas keuangan lainnya					***Other financial liabilities***
Liabilitas segera	3,275,668	3,275,668	1,805,494	1,805,494	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	122,076,228	122,076,228	90,763,359	90,763,359	*Current accounts*
Tabungan	151,784,973	151,784,973	129,364,312	129,364,312	*Savings account*
Deposito berjangka	141,591,884	141,591,884	133,809,209	133,809,209	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain					*Deposits from other banks*
Pinjaman pasar uang antar bank	1,339,177	1,339,177	1,661,864	1,661,864	*Interbank call money*
Giro	1,883,551	1,883,551	1,503,186	1,503,186	*Current accounts*
Deposito berjangka	1,591,054	1,591,054	521,282	521,282	*Time deposit*
Negotiable Certificate of Deposit	3,246,040	3,246,040	-	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Simpanan lainnya	1,675,360	1,675,360	561,726	561,726	*Other deposits*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3,764,961	3,764,961	3,163,142	3,163,142	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas akseptasi	4,358,537	4,358,537	6,188,258	6,188,258	*Acceptances payable*
Efek-efek yang diterbitkan	6,731,115	6,782,393	6,870,667	7,004,641	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	32,965,422	32,965,422	22,523,581	22,523,581	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain**)	9,757,460	9,757,460	6,415,760	6,415,760	*Other liabilities**)*
	486,041,429	486,092,708	405,151,840	405,285,814	
Total	**486,452,299**	**486,503,578**	**406,313,397**	**406,447,371**	***Total***

*) Aset lain-lain - neto terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables.*

**) *Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary.*

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Bank menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
(ii) Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
(iii) Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The Bank adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;

(ii) Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (derived from prices);

(iii) Level 3: Inputs for the financial asset or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

The table below show the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy:

	2016				
		Nilai wajar/*Fair value*			
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	4,718,833	-	4,718,833	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	705,819	705,819	-	-	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	249,864	-	249,864	-	*Derivatives receivable*
	5,674,516	705,819	4,968,697	-	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Efek-efek	17,033,703	-	17,033,703	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	43,660,340	35,161,970	8,498,370	-	*Government Bonds*
	60,694,043	35,161,970	25,532,073	-	
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Hold to maturity***
Efek-efek	2,012,214	2,056,423	-	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	18,640,180	19,610,830	-	-	*Government Bonds*
	20,652,394	21,667,253	-	-	
Pinjaman yang diberikan	376,594,527	-	363,711,880	12,882,647	*Loans*
Aset tetap	17,132,843	-	17,132,843	-	*Fixed Assets*
Total	**480,748,323**	**57,535,042**	**411,345,493**	**12,882,647**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	410,870	-	410,870	-	*Derivatives payable*
Total	**410,870**	**-**	**410,870**	**-**	***Total***

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar: (lanjutan)

The table below show the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy: (continued)

	2015				
		Nilai wajar/*Fair value*			
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	3,704,208	-	3,704,208	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	456,762	456,762	-	-	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	440,701	-	440,701	-	*Derivatives receivable*
	4,601,671	456,762	4,144,909	-	
Tersedia untuk dijual					***Available-for-sale***
Efek-efek	4,685,094	-	4,685,094	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	34,337,813	22,477,571	11,860,242	-	*Government Bonds*
	39,022,907	22,477,571	16,545,336	-	
Dimiliki hingga jatuh tempo					***Hold to maturity***
Efek-efek	1,538,192	-	1,352,698	-	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	12,427,744	-	13,958,756	-	*Government Bonds*
	13,965,936	-	15,311,454	-	
Pinjaman yang diberikan	314,066,531	-	314,066,531	-	***Loans***
Aset tetap	17,071,415	-	17,071,415	-	***Fixed Assets***
Total	**388,728,460**	**22,934,333**	**367,139,645**	-	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	1,161,557	-	1,161,557	-	*Derivatives payable*
Total	**1,161,557**	-	**1,161,557**	**-**	***Total***

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hirarki nilai wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkankan dalam pasar aktif (contohnya surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual), ditentukan dengan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasian dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkala dari suatu bursa, pedagang efek, broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan regular pada tingkat yang wajar. Harga pasar dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran (*bid price*). Instrumen-instrumen tersebut digolongkan dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (contohnya derivatif *over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi spesifik dari entitas. Apabila seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, maka instrumen keuangan tersebut dikategorikan dalam Tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian spesisfik yang digunakan untuk melakukan penilaian pada instrumen keuangan, antara lain:

- Harga yang dikutip dari pasar atau pedagang efek instrumen serupa
- Nilai wajar dari swap tingkat suku bunga yang diperhitungkan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas masa datang berdasarkan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi
- Nilai wajar dari kontrak berjangka valuta asing yang ditentukan berdasarkan kurs berjangka pada tanggal pelaporan keuangan, dan
- Teknik-teknik lainnya, seperti analisis arus kas diskontoan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

There is no transfer between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy.

The fair value of financial instrument trade in active market (i.e traded and available for sales securities), is based on qouted market price at reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from exchange, dealer or broker, industry group pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occuring market transcarion on an arm's length basis. The quoted market price used for financial asset held by group is bid price. These instruments are included in Level 1. Instrument included in Level 1 comprise primarily on securities that is classified as held-for-trading and available-for-sale.

The fair value of financial instrument that are not traded in an active market (i.e over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation tchnique maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value of an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. Otherwise, if one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation technique used to value financial instruments include:

- *Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments*
- *Fair value of interest rate swap is calculated as the present value of estimated future cashflow based on observable yield curves*
- *Fair value of foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at reporting date,and*
- *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for other financial instrument*

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), FASBI syariah, *call money*, penempatan "*fixed term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, wesel ekspor, tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(ii) Pinjaman yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, equity investments, acceptances receivable, securities purchases under agreements to resell and other assets.

Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), sharia FASBI, call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.

The carrying amount of cash and cash equivalents, as well as placements with floating rates are a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, bills and other receivables, acceptances receivable and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate placements, bills and other receivables, equity investments, acceptances receivable, securities purchased under agreements to resell and other assets were a reasonable approximation of its fair value.

(ii) Loans

Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amount of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

(iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

(v) Efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

54. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

(iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptances payable and other liabilities

The estimated fair value of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits and acceptances payable are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits, acceptances payable and other liabilities are the reasonable approximation of their fair values.

(iv) Marketable securities and Government Bonds

The fair value for held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

(v) Securities issued, borrowings and securities sold under agreements to repurchase

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

54. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

54. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets* (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio Kecukupan Modal (hanya BNI) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

54. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

As of 31 December 2016 and 2015, the Bank has complied with all capital requirements.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No.34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The CAR of BNI (BNI only) as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar			***BNI - without considering market risk***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	378,715,505	329,342,843	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	84,278,075	73,798,800	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	22.25%	22.41%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.80%	9.70%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia*
BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar			***BNI - considering market risk***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	381,255,562	330,818,593	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	84,278,075	73,798,800	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	22.11%	22.31%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.80%	9.70%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia*
BNI - dengan memperhitungkan risiko operasional, mulai berlaku sejak 1 Januari 2010			***BNI - considering operational risk, effective since 1 January 2010***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	435,353,579	378,564,646	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	84,278,075	73,798,800	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	19.36%	19.49%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Bank Indonesia	9.80%	9.70%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia*

55. AKTIVITAS JASA LAINNYA

BNI menyediakan jasa kustodi, *trustee,* pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aset yang terdapat dalam aktivitas jasa lainnya tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini adalah masing-masing sebesar Rp45.106 dan Rp36.132 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Kegiatan Jasa Kustodian

Jasa Kustodian BNI mendapat izin operasi oleh Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-162/PM/1991 tertanggal 9 Desember 1991. Kustodian BNI merupakan bagian dari Divisi Operasional, dimana jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi (*administration*) atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
b. Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
c. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah *(corporate action)*;
d. Perwalian *(proxy)* pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
e. Penyampaian laporan *(reporting)* dan informasi *(information)* yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian BNI.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek-efek, Kustodian BNI memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan:

a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang di Indonesia;

b. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara (SUN - Obligasi Pemerintah atau Surat Perbendaharaan Negara) serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

c. Kustodian reksadana (*mutual fund*) dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi;

55. OTHER ACTIVITIES

BNI provides custodian, trustee, investment management and mutual fund services to third parties. Assets that are held in other activities are not included in these consolidated financial statement. Total fees received from these services amounted to Rp45,106 and Rp36,132 for the period ended 31 December 2016 and 2015, respectively.

Custodian Services

BNI Custodian Services has obtained a operating license based on the Decision Letter of Bapepam and LK No. KEP-162/PM/1991 dated 9 December 1991. BNI's Custodian Department, which is part of the Operational Division, provides a full range of custodian services such as:

a. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;

b. Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;

c. Corporate action services related to the rights of the marketable securities;

d. Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;

e. Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by BNI's custodian department.

In order to fulfil the investors' needs in investing in various marketable securities and instruments, BNI's Custodian Operations facilitates it:

a. General custodian which provides services to investors investing in capital markets or money markets in Indonesia;

b. Sub-Registry service provider for settlement of Government Debenture Debt (SUN - either Government Bonds or Surat Perbendaharaan Negara) and SBI transactions;

c. Custodian for mutual funds and discretionary funds issued and managed by investment manager;

55. AKTIVITAS JASA LAINNYA (lanjutan)

Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

d. Kustodian *Euroclear* bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di *Euroclear Operations Centre,* Brussels. Kustodian BNI merupakan anggota langsungdari *Euroclear.*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Kustodian BNI memiliki 255 nasabah (tidak diaudit) dan 124 nasabah (tidak diaudit). Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusi/badan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp156.765.440 (tidak diaudit) dan Rp119.730.069 (tidak diaudit).

BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan OJK, dahulu Bapepam dan LK.

Kegiatan Wali Amanat

BNI mendapat izin operasi untuk kegiatan wali amanat berdasarkan Surat Keputusan No. 01/STTD-WA/PM/1996 tertanggal 27 Maret 1996. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh wali amanat adalah sebagai berikut:

a. Jasa Wali Amanat untuk obligasi dan *medium-term notes* (MTN)
b. Jasa Agen Pengelola Rekening Penampungan
c. Jasa Agen Pembayaran
d. Jasa Penampungan Dana IPO
e. Jasa Agen Penjaminan

BNI selaku Wali Amanat telah mengelola 20 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp23.238.000 (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 18 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp16.136.000 (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2015.

56. RENCANA BARANG MODAL

BNI memiliki komitmen barang modal terkait dengan pembangunan gedung kantor cabang serta pengadaan perlengkapan komputer dan ATM adalah sebesar Rp1.746.296 (tidak diaudit) dan Rp1.745.137 (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

55. OTHER ACTIVITIES (continued)

Custodian Services (continued)

d. Euroclear Custodian for customerwho is conducting investment and settlement of securities transactions listed in Euroclear Operations Center, Brussels. BNI Custodian is a direct member of Euroclear.

As of 31 December 2016 and 2015, BNI's custodian operations has 255 customers (unaudited) and 124 customers (unaudited), respectively. The customers are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies, mutual funds, other institutions/legal entities and individual customers with a total portfolio value as of 31 December 2016 and 2015 of Rp156,765,440 (unaudited) and Rp119,730,069 (unaudited), respectively.

BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with OJK, previously Bapepam and LK regulation.

Trust Operations

BNI has obtained the operating license for trustee services based on Decision Letter of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. 01/STTD-WA/PM/1996 dated 27 March 1996. The Trustee Services Business (TSB) provides a full range of the following services:

a. Trustee for bond and medium-term notes (MTN)
b. Escrow Account Agent
c. Paying Agent
d. Initial Public Offering / IPO Receiving Bank
e. Security Agent

BNI as a Trustee, has 20 trusteeship arrangements with the total value of bonds and MTN issued amounting to Rp23,238,000 (unaudited) as of 31 December 2016 and 18 trusteeship arrangements with the total value of bonds and MTN issued amounting to Rp16,136,000 (unaudited) as of 31 December 2015.

56. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

BNI has capital expenditure plans in relation to the construction of branch offices and procurement of computer equipment and ATMs amounting to Rp1,746,296 (unaudited) and Rp1,745,137 (unaudited) as of 31 December 2016 and 2015, respectively.

57. KREDIT KELOLAAN

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko kredit atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aset BNI dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan liabilitas BNI, pinjaman tersebut tidak dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut sebesar 0,25% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 0,15% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

57. CHANNELING LOANS

BNI administers loans directly disbursed by the Government of the Republic of Indonesia (financed by overseas creditors) to the borrowers of certain specified projects. These borrowers are approved by the Government of the Republic of Indonesia. Payments received by BNI from borrowers are remitted back to the Government. BNI bears no credit risk on these transactions. These loans are not the assets of BNI and funds received from the Government of Republic of Indonesia are not the liabilities of BNI. These loans are not recognized in BNI's consolidated financial statements. BNI receives fees for administering the loans of 0.25% from the average of loans outstanding balance in Rupiah and 0.15% of the average of loan outstanding balance in United States Dollar.

Following is the outstanding loans balance administered by BNI on behalf of the Government as of 31 December 2016 and 2015 (unaudited):

	2016	2015	
Sektor			***Sector***
Listrik, gas dan air	4,098	413,650	*Electricity, gas and water*
Pertanian	2,899	33,485	*Agriculture*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2,747	128,865	*Transportation, warehouse and communications*
Perdagangan, restoran dan hotel	2,283	4,044	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa pelayanan sosial	1,876	2,942	*Social services*
Jasa dunia usaha	1,680	1,706	*Business services*
Perindustrian	1,133	2,309,408	*Manufacturing*
Konstruksi	6	1,101,721	*Construction*
Lain-lain	9,484	17,435	*Others*
Total	**26,206**	**4,013,256**	***Total***

58. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) telah menerbitkan standar baru dan revisi atas standar akuntansi pada tahun 2016. Standar ini belum berlaku efektif untuk tahun 2016. Perubahan tersebut antara lain:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan*
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi*
- PSAK 3: Laporan Keuangan Interim (Penyesuaian 2016)**

58. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) and Sharia Financial Accounting Standard Board (DSAS-IAI) issued new standard and revised of current standard in 2016. The standard is not applied in 2016. Following are new and revised standard:

- *Amendments SFAS 2: Statement of Cash Flow on the Disclosure Initiative**
- *Amendments SFAS 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses**
- *SFAS 3: Interim Financial Reporting (Improvement 2016)***

58. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- PSAK 24: Imbalan Kerja (Penyesuaian 2016) **
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan (Penyesuaian 2016) **
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Penyesuaian 2016) **
- PSAK Syariah 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 104: Akuntansi Istishna (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 107: Akuntansi Ijarah (Revisi 2016)**
- PSAK Syariah 108: Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah (Revisi 2016) **

* Berlaku efektif 1 Januari 2018
** Berlaku efektif 1 Januari 2017

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

58. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS (continued)

- *SFAS 24: Employee Benefits (Improvement 2016)***
- *SFAS 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation (Improvement 2016)***
- *SFAS 60: Financial Instrument – Disclosure (Improvement 2016)***
- *Sharia SFAS 101: Presentation of Sharia Financial Statements (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 102: Murabahah Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 104: Istishna Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 107: Ijarah Accounting (Revised 2016)***
- *Sharia SFAS 108: Accounting for Sharia Insurance Transaction (Revised 2016)***

** Effective at 1 January 2018*
*** Effective at 1 January 2017*

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
ASET			***ASSETS***
Kas	10,991,946	12,743,510	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	28,922,705	29,936,441	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6,007,102	8,838,765	*Current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	6,007,102	8,838,765	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	30,573,184	29,604,552	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	30,573,184	29,604,552	
Efek-efek	20,775,110	9,680,235	*Marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(86,717)	(33,723)	*Less: Allowance for impairment losses*
	20,688,393	9,646,512	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,325,260	376,215	*Securities purchased under agreements to resell*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
	1,325,260	376,215	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	8,599,063	8,857,823	*Bills and other receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(31,268)	(26,379)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,567,795	8,831,444	
Tagihan akseptasi	14,804,373	10,899,801	*Acceptances receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(84,834)	(79,188)	*Less: Allowance for impairment losses*
	14,719,539	10,820,613	
Tagihan derivatif	249,864	440,701	*Derivatives receivables*
Pinjaman yang diberikan	372,621,478	308,307,475	*Loans*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,121,974)	(11,677,580)	*Less: Allowance for impairment losses*
	356,499,504	296,629,895	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
ASET (lanjutan)			***ASSETS** (continued)*
Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	53,047,320	39,492,957	*Government Bonds adjusted for amortization of discount and premium*
Pajak dibayar di muka	619,751	2,289,853	*Prepaid taxes*
Beban dibayar dimuka	2,211,917	1,476,314	*Prepaid expenses*
Penyertaan saham	2,356,994	2,153,994	*Equity investments*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(22,071)	*Less: Allowance for impairment losses*
	2,356,994	2,131,923	
Aset lain-lain - neto	5,321,508	3,737,906	*Other assets - net*
Aset tetap	27,623,336	25,645,918	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(6,130,240)	(5,308,552)	*Less: Accumulated depreciation*
	21,493,096	20,337,366	
Aset pajak tangguhan - neto	1,249,473	1,381,402	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET	**564,845,351**	**478,716,369**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	3,242,559	1,777,726	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	412,147,567	351,281,658	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	9,876,890	4,329,379	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	410,870	1,161,557	*Derivatives payable*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3,764,961	3,163,142	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas akseptasi	4,353,682	6,188,258	*Acceptances payable*
Beban yang masih harus dibayar	849,667	749,521	*Accrued expenses*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	73,301	716,288	*Corporate income tax* -
- Pajak lainnya	45,155	21,216	*Other taxes* -
Total utang pajak	118,456	737,504	*Total taxes payable*
Imbalan kerja	3,076,326	3,096,825	*Employee benefits*
Penyisihan	154,348	98,354	*Provision*
Liabilitas lain-lain	3,704,259	3,337,967	*Other liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	6,731,115	6,870,667	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	32,865,422	22,473,581	*Borrowings*
TOTAL LIABILITAS	**481,296,122**	**405,266,139**	***TOTAL LIABILITIES***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 1
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham:			*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class A Dwiwarna - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)*
Modal dasar:			*Share capital - Authorized:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 289.341.866 saham			*Class B - 289,341,866 shares*
- Seri C - 34.213.162.660 saham			*Class C - 34,213,162,660 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 289.341.866 saham			*Class B - 289,341,866 shares*
- Seri C - 18.359.314.591 saham	9,054,807	9,054,807	*Class C - 18,359,314,591 shares*
Tambahan modal disetor	14,568,468	14,568,468	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	12,189,957	12,189,957	*Asset revaluation reserve*
Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	(1,247,448)	(1,880,545)	*Unrealized losses on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	81,715	75,502	*Exchange difference in translation of foreign currency financial statements*
Saldo laba			*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya			*Appropriated*
Cadangan umum dan wajib	2,778,412	2,778,412	*General and legal reserves*
Cadangan khusus	-	5,705,376	*Specific reserves*
Tidak ditentukan penggunaannya	46,123,318	31,708,232	*Unappropriated*
	48,901,730	40,192,020	
Saham treasuri	-	(749,979)	*Treasury shares*
TOTAL EKUITAS	**83,549,229**	**73,450,230**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**564,845,351**	**478,716,369**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
PENDAPATAN BUNGA	40,713,575	34,288,945	***INTEREST INCOME***
BEBAN BUNGA	(12,850,377)	(10,502,250)	***INTEREST EXPENSE***
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**27,863,198**	**23,786,695**	***INTEREST INCOME - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING INCOME***
Provisi dan komisi lainnya	6,531,431	5,600,372	*Other fee and commission*
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1,377,944	1,590,469	*Recovery of assets written off*
Kerugian dari aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan	(12,213)	(25,957)	*Loss from financial assets held for trading*
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dan dimiliki untuk diperdagangkan	637,701	285,050	*Gain on sale of financial assets classified as available for sale and held for trading*
Laba selisih kurs - neto	679,103	510,520	*Foreign exchange gains - net*
Lain-lain	405,947	396,658	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**9,619,913**	**8,357,112**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	**(7,530,043)**	**(7,137,282)**	***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(7,719,917)	(6,359,233)	*Salaries and employees' benefits*
Umum dan administrasi	(5,731,971)	(5,367,890)	*General and administrative*
Beban promosi	(777,034)	(692,415)	*Promotion expense*
Premi penjaminan	(729,374)	(597,504)	*Guarantee premium*
Lain-lain	(1,521,796)	(1,189,467)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	**(16,480,092)**	**(14,206,509)**	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***
LABA OPERASIONAL	**13,472,976**	**10,800,016**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	**44,358**	**12,939**	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**13,517,334**	**10,812,955**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK			***TAX EXPENSE***
Kini	(2,790,515)	(2,886,135)	*Current*
Tangguhan	49,481	701,477	*Deferred*
TOTAL BEBAN PAJAK	(2,741,034)	(2,184,658)	***TOTAL TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**10,776,300**	**8,628,297**	***INCOME FOR THE YEAR***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 2
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
LABA TAHUN BERJALAN	**10,776,300**	**8,628,297**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	12,380,091	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	250,369	101,002	*Remeasurement of post employment benefit*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(50,074)	(202,272)	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	6,213	17,464	*Translation adjustment of foreign currency financial statements*
Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	791,371	(433,142)	*Gain/(loss) on changes in value of financial assets categorized as available-for-sale*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(158,274)	93,127	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**839,605**	**11,956,270**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**11,615,905**	**20,584,567**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual neto setelah pajak/ *Unrealized losses on available-for-sale securities and Government Bonds, net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference from translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings* *)			Saham treasuri/ *Treasury shares*	Total ekuitas/ *Total equity*	
						Dicadangkan/*Appropriated*					
						Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Cadangan khusus/ *Specific reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated***)*			
Saldo per 31 Desember 2015	**9,054,807**	**14,568,468**	**(1,880,545)**	**75,502**	**12,189,957**	**2,778,412**	**5,705,376**	**31,708,232**	**(749,979)**	**73,450,230**	***Balance as of 31 December 2015***
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	633,097	6,213	-	-	-	10,976,595	-	11,615,905	*Comprehensive income for the year*
Reklasifikasi cadangan khusus	-	-	-	-	-	-	(5,613,100)	5,613,100	-	-	*Reclassification of specific reserves*
Reklasifikasi cadangan cabang luar negeri	-	-	-	-	-	-	(92,276)	92,276	-	-	*Reclassification of overseas branch legal reserve*
Modal saham diperoleh kembali	-	-	-	-	-	-	-	-	749,979	749,979	*Treasury stock*
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	-	(2,266,885)	-	(2,266,885)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2016	**9,054,807**	**14,568,468**	**(1,247,448)**	**81,715**	**12,189,957**	**2,778,412**	**-**	**46,123,318**	**-**	**83,549,229**	***Balance as of 31 December 2016***

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangankhusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

**) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp289.159.

*) *Accumulated losses of Rp58,905,232 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of 30 June 2003.*

**) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit, net of tax amounting to Rp289,159.*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 3
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Year Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, neto setelah pajak/ *Unrealized losses on available-for-sale securities and Government Bonds, net of tax*	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Translation adjustment of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings* *)			Saham treasuri/ *Treasury shares*	Total ekuitas/ *Total equity*	
						Dicadangkan/*Appropriated*					
						Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Cadangan khusus/ *Specific reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated***)*			
Saldo per 31 Desember 2014	**9,054,807**	**14,568,468**	**(1,540,530)**	**58,038**	**-**	**2,778,412**	**3,909,726**	**27,482,375**	**-**	**56,311,296**	***Balance as of 31 December 2014***
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(340,015)	17,464	12,189,957	-	-	8,717,161	-	20,584,567	*Comprehensive income for the year*
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	-	-	(749,979)	(749,979)	*Treasury shares*
Pembentukan cadangan khusus	-	-	-	-	-	-	1,795,650	(1,795,650)	-	-	*Appropriation for specific reserves*
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	-	(2,695,654)	-	(2,695,654)	*Cash dividends*
Saldo per 31 Desember 2015	**9,054,807**	**14,568,468**	**(1,880,545)**	**75,502**	**12,189,957**	**2,778,412**	**5,705,376**	**31,708,232**	**(749,979)**	**73,450,230**	***Balance as of 31 December 2015***

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangankhusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

**) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto setelah pajak sebesar Rp88.864.

*) *Accumulated losses of Rp58,905,232 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of 30 June 2003.*

**) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit amounting to Rp88,864.*

Melangkah Lebih Cepat Menangkan Persaingan 1037

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pendapatan bunga	40,022,127	33,739,599	*Interest income*
Beban bunga	(12,894,212)	(10,288,818)	*Interest expense*
Pendapatan operasional lainnya	9,161,985	11,377,441	*Other operating income*
Beban operasional lainnya	(18,284,948)	(17,823,748)	*Other operating expenses*
Pendapatan bukan operasional - bersih	43,036	(6,119)	*Non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan	(3,388,349)	(3,294,367)	*Payment of income tax*
Pembayaran pajak final atas revaluasi aset tetap	-	(190,134)	*Payment of final tax from revaluation of fixed assets*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**14,659,639**	**13,513,854**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:			*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	(1,519,815)	(1,046,328)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(35,106)	(401,780)	*Marketable securities and Government Bond at fair value through profit or loss*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	258,760	(6,555,451)	*Bills and other receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(949,045)	5,861,141	*Securities purchased under agreements to resell*
Pinjaman yang diberikan	(64,314,003)	(45,729,574)	*Loans*
Tagihan akseptasi	(3,904,572)	1,631,640	*Acceptances receivable*
Biaya dibayar di muka	(735,603)	(244,937)	*Prepaid expenses*
Aset lain-lain	777,948	(393,072)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	1,464,833	(4,260)	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	60,865,909	52,260,616	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	5,547,511	1,836,985	*Deposits from other banks*
Beban yang masih harus dibayar	100,146	216,307	*Accrued expenses*
Imbalan kerja	(111,127)	70,493	*Employee benefits*
Liabilitas akseptasi	(1,834,576)	(280,345)	*Acceptances payable*
Utang pajak	(21,217)	(712)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	410,125	166,902	*Other liabilities*
Kas neto diperoleh dari kegiatan operasi	**10,659,807**	**20,901,479**	***Net cash provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
(Pembelian)/penjualan efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	(11,064,437)	4,001,882	*(Purchases)/sale of marketable securities available-for-sale and held-for-maturity - net*
Pembelian Obligasi Pemerintah - neto	(12,333,639)	(2,426,686)	*Purchases of Government Bond - net*
Penambahan aset tetap	(2,030,199)	(2,841,801)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	15,811	20,928	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(25,412,464)**	**(1,245,677)**	***Net cash used in investing activities***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Schedule 4
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended 31 December 2016
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December*		
	2016	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Kenaikan pinjaman yang diterima	10,391,841	11,342,190	*Increase in borrowings*
(Penurunan)/kenaikan efek-efek yang diterbitkan	(139,552)	712,636	*(Decrease)/increase in marketable securities issued*
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	601,819	671,211	*Liabilities on securities sold under repurchase agreement (repo)*
Pembayaran dividen	(2,266,885)	(2,695,654)	*Payment of dividends*
Hasil pembelian *Treasury Stock*	-	(749,979)	*Purchase of treasury stock*
Kas neto diperoleh dari kegiatan pendanaan	**8,587,223**	**9,280,404**	***Net cash provided from financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(6,165,434)**	**28,936,206**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**80,018,006**	**51,075,990**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	17,288	5,810	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**73,869,860**	**80,018,006**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS:			***COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:***
Kas	10,991,946	12,743,510	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	28,922,705	29,936,441	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6,007,102	8,838,765	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	27,948,107	28,499,290	*Placement with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date*
Total kas dan setara kas	**73,869,860**	**80,018,006**	***Total cash and cash equivalents***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - PARENT ENTITY
As of December 31, 2016 and For the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No.4 (revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No.4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak yang disajikan pada biaya perolehan.

1. Significant Accounting Policy

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity.

The separate financial statements of parent entity are prepare in accordance with the statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No.4 (revised 2013), "Separate Financaial Statements".

PSAK No.4 (Revised 2013) regulates that when an entity related to present the separate fincaial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries which are stated at cost.

2. Penyertaan Saham

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki Bank diungkapkan pada Catatan 1i atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Investments in shares

Information pertaining to subsidiaries of the Bank disclosed in Note 1i to the consolidated financial statements.

Laporan Tahunan 2016

BNI

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia

T. 021 - 2511 946 , 572 8387
F. 021 - 572 8295 , 572 8053

www.bni.co.id